



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2024**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi;
- b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
- c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yakni tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. Bab II yang memuat gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. Bab IV yang memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - e. Bab V yang memuat arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
 - f. Bab VI yang memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - g. Bab VII yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - h. Bab VIII yang memuat penutup.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 5 Juli 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di padang

Pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Tabel Daftar Isi

Gambar Daftar

Grafik

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-8
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-10
1.3.1. Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025	I-11
1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD	I-13
1.4. HUBUNGAN DAN MAKSUD	I-26
1.4.1. Maksud	I-26
1.4.2. Tujuan	I-27
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD	I-27
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1. KONDISI UMUM	II-1
2.1.1. Aspek geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah	II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah	II-4
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-8
2.1.1.4. Demografi	II-11
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-17
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-17
A. Pertumbuhan Ekonomi	II-17
B. Laju Inflasi	II-30
C. Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan	II-33
D. Ketimpangan Wilayah	II-36
E. Tingkat Kemiskinan	II-37
F. Tingkat Pengangguran	II-45
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-52
A. Indeks Pembangunan Manusia	II-52
B. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-56

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-58
2.1.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-60
A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-60
B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-64
C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-67
D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-70
E. Urusan Pemerintahan Bidang Kententraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	II-72
F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-74
2.1.3.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-75
A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-75
B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	II-78
C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-80
D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-82
E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	II-83
F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-84
G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-85
H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-87
I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-89
J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.....	II-90
K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-92
L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-93
M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	II-94
N. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-95
O. Urusan Pemerintaan Bidang Persandian.....	II-96
P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-97
Q. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan	II-97
R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.....	II-99
2.1.3.3. Urusan Pilihan	II-100
A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-100
B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-103
C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-104

D. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	II-106
E. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	II-107
F. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II-109
G. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II-111
H. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	II-112
2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-114
A. Sekretariat Daerah	II-114
B. Sekretariat DPRD	II-116
2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-116
A. Unsur Perencanaan.....	II-116
B. Unsur Keuangan.....	II-117
C. Unsur Kepegawaian	II-119
D. Unsur Pendidikan dan Pelatihan.....	II-121
E. Unsur Penelitian dan Pengembangan	II-122
F. Unsur Penghubung.....	II-123
2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-125
A. Inspektorat.....	II-125
2.1.3.7. Urusan Pemerintahan Umum	II-126
A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-126
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-129
2.1.4.1. Strategi pertama	II-129
2.1.4.2. Strategi kedua.....	II-130
2.1.5. Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing.....	II-131
2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-131
2.1.5.2. Nilai Tukar Petani (NTP)	II-132
2.1.5.3. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapit.....	II-133
2.1.5.4. Tata Kelola Pemerintahan.....	II-135
2.1.5.5. Potensi Ekonomi Lain (Pariwisata, Perdagangan, Industri, UKM, dll).....	II-138
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-142
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	II-142
2.3.1.1. Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	II-143
2.3.1.2. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	II-143

2.3.1.3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	II-145
2.3.1.4. Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	II-147
2.3.1.5. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	II-148
2.3.1.6. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.....	II-150
2.3.1.7. Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	II-153
2.3.2. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah	II-154
2.3.2.1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasa	II-154
A. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan	II-154
B. Urusan pemerintahan bidang Kesehatan.....	II-155
C. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-155
D. Urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-157
E. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-157
F. Urusan pemerintahan bidang Sosial	II-158
2.3.2.2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	II-159
A. Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.....	II-159
B. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-159
C. Urusan pemerintahan bidang Pangan.....	II-160
D. Urusan pemerintahan bidang Pertanahan	II-161
E. Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.....	II-161
F. Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-162
G. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-163
H. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-164
I. Urusan pemerintahan bidang Perhubungan	II-165
J. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika	II-165
K. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-166
L. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.....	II-166
M. Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga	II-168

N. Urusan pemerintahan bidang Statistik.....	II-169
O. Urusan pemerintahan bidang Persandian.....	II-169
P. Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.....	II-170
Q. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.....	II-170
R. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan.....	II-171
2.3.2.3. Urusan Pilihan.....	II-171
A. Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan	II-171
B. Urusan pemerintahan bidang Pariwisata	II-172
C. Urusan pemerintahan bidang Pertanian.....	II-173
D. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan.....	II-174
E. Urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	II-176
F. Urusan pemerintahan bidang Perdagangan	II-176
G. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian.....	II-177
H. Urusan pemerintahan bidang Transmigrasi	II-178
2.3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-179
A. Sekretariat Daerah.....	II-179
a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	II-179
b. Biro Umum	II-179
c. Biro Organisasi.....	II-179
d. Biro Hukum.....	II-180
e. Biro Administrasi Pimpinan	II-181
f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	II-181
g. Biro Kesra.....	II-181
h. Biro Administrasi Pembangunan	II-182
i. Biro Perekonomian	II-182
B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	II-183
2.3.2.5. Unsur Penunjang Unsur Pemerintahan.....	II-183
A. Unsur Perencanaan	II-183
B. Unsur Keuangan	II-184
C. Unsur Kepegawaian.....	II-186
D. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan.....	II-187
E. Unsur Penelitian Dan Pengembangan	II-187
F. Unsur Penghubung	II-188
2.3.2.6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan	II-188
2.3.2.7. Urusan Pemerintahan Umum	II-188

2.4. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	II-189
2.4.1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun berjalan 2024 hingga triwulan II di Sumatera Barat	II-189
2.4.2. Permasalahan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun berjalan 2024 hingga triwulan II di Sumatera Barat	II-240
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-240
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-240
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-240
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-241
5. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-241
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-242
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-242
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-243
9. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-244
10. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-245
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	II-245
12. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-246
13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-246
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-248
15. Urusan pemerintahan bidang Pertanian	II-249
16. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan	II-250
17. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	II-250
2.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	II-251
2.5.1. Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	II-251
2.5.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	II-255
2.5.3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	II-258
2.5.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	II-260
2.5.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	II-262
2.5.6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	II-264
2.6. CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT	II-268

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023.....	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-3
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat.....	III-6
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2025.....	III-6
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-8
A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan (RPJMD)	III-9
B. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-13
C. Analisis Keuangan Daerah Dalam Penyusunan RKPD	III-15
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15
A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-16
B. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-19
C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-21
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	IV-2
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025	IV-3
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025.....	IV-8
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-8
4.2.2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2025.....	IV-10
A. Bidang Pendidikan	IV-13
B. Bidang Kesehatan	IV-15
C. Bidang Pekerjaan Umum	IV-15
D. Bidang Perumahan Rakyat	IV-16
E. Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	IV-16
F. Bidang Sosial.....	IV-17
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025	IV-18
1. Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	IV-18
2. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.....	IV-28
3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	IV-33

4. Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	IV-41
5. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata.....	IV-46
6. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	IV-51
7. Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas.....	IV-59
4.2.4. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat.....	IV-67

4.3. PENYELARASAN DAN DUKUNGAN RKPD PROVINSI TERHADAP RKP

TAHUN 2025.....	IV-94
4.3.1. Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.....	IV-96
4.3.2. Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.....	IV-118
4.3.3. Prioritas Nasional 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.....	IV-211
4.3.4. Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	IV-233
4.3.5. Prioritas Nasional 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.....	IV-291
4.3.6. Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.....	IV-298
4.3.7. Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.....	IV-319
4.3.8. Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur	IV-335

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1

5.1. Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	V-1
5.1.1. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten/Kota	V-2

5.1.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	V-2
5.1.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian PDRB per Kapita	V-3
5.1.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	V-4
5.1.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka.....	V-5
5.1.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Kemiskinan	V-6
5.1.1.6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Gini.....	V-8
5.1.2. Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	V-9
5.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pendapatan per Kapita	V-9
5.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Pengangguran	V-10
5.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	V-11
5.1.2.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	V-13
5.1.2.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan.....	V-14
5.1.3. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	V-15
5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.....	V-18
5.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi	V-18
5.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan	V-21
5.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan	V-22
5.2.4. Arah Kebijakan Pemerataan Wilayah.....	V-24
5.2.5. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain.....	V-30
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VII-1
7.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO.....	VII-1
7.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	VII-2
7.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	VII-5
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

LAMPIRAN 1: Daftar Penerima Hibah Berdasarkan Pertimbangan TAPD

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kesesuaian Prioritas RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	I-12
Tabel 1.2	Persandingan Arah Kebijakan RPJPD dengan Sasaran dan Strategi pada RPJMD 2021-2026	I-15
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	II-3
Tabel 2.3	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023	II-5
Tabel 2.4	Potensi Luas Ancaman Bencana Di Sumatera Barat	II-10
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (jiwa)	II-12
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023	II-13
Tabel 2.7	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (jiwa) berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan Semester II Tahun 2023	II-14
Tabel 2.8	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-15
Tabel 2.9	Jumlah penduduk provinsi se pulau Sumatera tahun 2019-2020	II-16
Tabel 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Persen)	II-18
Tabel 2.11	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023	II-22
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023	II-23
Tabel 2.13	PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (Rp. Miliar)	II-24
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023	II-25
Tabel 2.15	Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-25

Tabel 2.16	PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	II-27
Tabel 2.17	PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	II-27
Tabel 2.18	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera dan perbandingan dengan Nasional Tahun 2021-2023	II-28
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (persen)	II-29
Tabel 2.20	Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2023. Tahun Kalender 2023. dan Year on Year menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	II-32
Tabel 2.21	Andil Inflasi/Deflasi menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota. Desember 2023 (2018=100)	II-33
Tabel 2.22	Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2020-2023	II-35
Tabel 2.23	Indeks Gini Ratio menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-35
Tabel 2.24	Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-39
Tabel 2.25	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)	II-41
Tabel 2.26	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-43
Tabel 2.27	Jumlah penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa) Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)	II-44
Tabel 2.28	Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat (%) Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)	II-44
Tabel 2.29	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat 2020-2023	II-46
Tabel 2.30	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Sumatera Barat (%)	II-47
Tabel 2.31	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2019- 2023 (Agustus) (%)	I-48
Tabel 2.32	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Kondisi Agustus 2023)	II-51
Tabel 2.33	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2019-2023	II-53

Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Sumatera Tahun 2019-2023	II-54
Tabel 2.35	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023	II-55
Tabel 2.36	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-58
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masing-masing urusan/unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	II-59
Tabel 2.38	Perkembangan Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-61
Tabel 2.39	Pencapaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-64
Tabel 2.40	Capaian dan Target indikator urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-70
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-71
Tabel 2.42	Pencapaian dan Target indikator urusan Pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-72
Tabel 2.43	Pencapaian dan Target indikator urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-74
Tabel 2.44	Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-76
Tabel 2.45	Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-78
Tabel 2.46	Perkembangan dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-81
Tabel 2.47	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-83
Tabel 2.48	Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-84
Tabel 2.49	Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-85

Tabel 2.50	Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-86
Tabel 2.51	Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-87
Tabel 2.52	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-90
Tabel 2.53	Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-91
Tabel 2.54	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-92
Tabel 2.55	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-94
Tabel 2.56	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-95
Tabel 2.57	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Statistik Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-95
Tabel 2.58	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Persandian Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-96
Tabel 2.59	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-97
Tabel 2.60	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-98
Tabel 2.61	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-99
Tabel 2.62	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-101
Tabel 2.63	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pariwisata pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-104
Tabel 2.64	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-105
Tabel 2.65	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-107
Tabel 2.66	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-108

Tabel 2.67	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-109
Tabel 2.68	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-111
Tabel 2.69	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-113
Tabel 2.70	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Kinerja Sekretariat Daerah pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-114
Tabel 2.71	Perkembangan Capaian dan Target Indikator dan Target Sekretariat DPRD pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-116
Tabel 2.72	Perkembangan Indikator Unsur Perencanaan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-117
Tabel 2.73	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Keuangan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-118
Tabel 2.74	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Kepegawaian pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-120
Tabel 2.75	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-121
Tabel 2.76	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Penelitian dan Pengembangan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-123
Tabel 2.77	Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Penghubung pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-124
Tabel 2.78	Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-126
Tabel 2.79	Perkembangan Indikator Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Pemerintahan Umum pada RPJMD Tahun 2021-2026	II-126
Tabel 2.80	Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat 2018-2022	II-131
Tabel 2.81	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2023 Provinsi Sumatera Barat	II-132
Tabel 2.82	Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat 2018-2022	II-133
Tabel 2.83	Rincian Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Rupiah)	II-133
Tabel 2.84	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Sumatera Barat Tahun 2018-2023	II-134

Tabel 2.85	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2022 (Rupiah)	II-135
Tabel 2.86	Capaian Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023	II-137
Tabel 2.87	Jumlah Desa Wisata Berdasarkan Klasifikasi dan Tematik di Provinsi Sumatera Barat	II-139
Tabel 2.88	Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	II-142
Tabel 2.89	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing Tahun 2023	II-143
Tabel 2.90	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2023	II-144
Tabel 2.91	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Tahun 2023	II-145
Tabel 2.92	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2023	II-147
Tabel 2.93	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata Tahun 2023	II-149
Tabel 2.94	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Tahun 2023	II-150
Tabel 2.95	Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tahun 2023	II-153
Tabel 2.96	Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024	II-190
Tabel 2.97	Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-251
Tabel 2.98	Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Kesehatan Tahun 2023	II-255
Tabel 2.99	Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	II-258

Tabel 2.100	Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	II-260
Tabel 2.101	Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	II-262
Tabel 2.102	Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Sosial Tahun 2023	II-264
Tabel 2.103	Realisasi Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	II-268
Tabel 3.1	Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia 2022-2023	III-4
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025	III-5
Tabel 3.3	Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 – 2025	III-8
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp juta)	III-9
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp juta)	III-11
Tabel 3.5	Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025 (Rp juta)	III-12
Tabel 3.6	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp juta)	III-13
Tabel 3.7	Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-13
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	III-14
Tabel 3.9	Proyeksi/ Target Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (dalam Rp. Juta)	III-14
Tabel 3.10	Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-15
Tabel 3.11	Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 s/d 2025	III-21
Tabel 3.12	Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 s/d 2025	III-22
Tabel 4.1	Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025	IV-3
Tabel 4.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	IV-3
Tabel 4.3	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025	IV-7
Tabel 4.4	Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2025	IV-12
Tabel 4.5	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Tahun 2025	IV-19

Tabel 4.6	Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Tahun 2025	IV-20
Tabel 4.7	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2025	IV-29
Tabel 4.8	Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2025	IV-30
Tabel 4.9	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Tahun 2025	IV-34
Tabel 4.10	Program Pembangunan mendukung Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Tahun 2025	IV-35
Tabel 4.11	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas meningkatkan usaha perdagangan Dan industri kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2025	IV-41
Tabel 4.12	Program Pembangunan mendukung Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2025	IV-42
Tabel 4.13	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025	IV-49
Tabel 4.14	Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025	IV-49
Tabel 4.15	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan berkelanjutan Tahun 2025	IV-52
Tabel 4.16	Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan berkelanjutan Tahun 2025	IV-54
Tabel 4.17	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas Tahun 2025	IV-62
Tabel 4.18	Program Pembangunan mendukung Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tahun 2025	IV-63
Tabel 4.19	Target Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	IV-67
Tabel 4.19	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2025	IV-95

Tabel 4.20	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IV-96
Tabel 4.21	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IV-97
Tabel 4.22	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	IV-119
Tabel 4.23	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.....	IV-121
Tabel 4.24	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	IV-211
Tabel 4.25	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	IV-212
Tabel 4.26	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	IV-233
Tabel 4.27	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	IV-235
Tabel 4.28	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	IV-292

Tabel 4.29	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 5. proses Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	IV-292
Tabel 4.30	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	IV-298
Tabel 4.31	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	IV-299
Tabel 4.32	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	IV-319
Tabel 4.33	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	IV-320
Tabel 4.34	Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	IV-335
Tabel 4.35	Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	IV-336
Tabel 5.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024-2025	V-16
Tabel 5.2	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024-2025 dan Komponen Pembentuknya	V-17
Tabel 5.3	Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan di Kawasan Perbatasan dengan Provinsi Tetangga	V-30
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2026	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 2026	VII-2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 2026	VII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-13
Gambar 2.2	Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat	II-4
Gambar 2.3	Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat	II-56
Gambar 5.1	Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Wilayah yang Setara	V-2
Gambar 5.2	Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian PDRB per Kapita antar Wilayah yang setara	V-3
Gambar 5.3	Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia antar Wilayah yang setara	V-4
Gambar 5.4	Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka antar Wilayah yang setara	V-6
Gambar 5.4	Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Kemiskinan antar Wilayah yang setara	V-7
Gambar 5.5	Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Rasio Gini antar Wilayah yang setara	V-8
Gambar 5.6	Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-10
Gambar 5.7	Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-11
Gambar 5.8	Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-12
Gambar 5.8	Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-13
Gambar 5.9	Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Koefisien Gini Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-14
Gambar 5.10	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023	V-25
Gambar 5.11	Kontribusi Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah dibandingkan dengan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-26
Gambar 5.11	Peta Perbandingan PDRB per Kapita dan Persebaran Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-27
Gambar 5.12	Pola Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Koridor Pertumbuhan di Pulau Sumatera dan Provinsi Sumatera Barat	V-28

Gambar 5.13 Pola Pergerakan dari Koridor Pertumbuhan ke Wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat V-29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 (jiwa)	II-11
Grafik 2.2	Jumlah Penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok umur Tahun 2023	II-16
Grafik 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-18
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2023	II-20
Grafik 2.5	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-21
Grafik 2.6	Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera, dan Nasional Tahun 2017-2023 (Rp. Juta)	II-29
Grafik 2.7	Perkembangan Inflasi Year on Year Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023	II-30
Grafik 2.8	Perkembangan Inflasi Year on Year Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023	II-31
Grafik 2.9	Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-34
Grafik 2.10	Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2016-2021	II-37
Grafik 2.11	Garis Kemiskinan antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-38
Grafik 2.12	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi Tahun 2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-39
Grafik 2.13	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2019 – September 2023	II-40
Grafik 2.14	Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Tempat di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-42
Grafik 2.16	Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023	II-49
Grafik 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2017-2023 (%)	II-50
Grafik 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020-2023	II-50
Grafik 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2016 - Agustus 2023 (Persen)	II-51

Grafik 2.20	Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2019-2023	II-53
Grafik 2.21	Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan di Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-102
Grafik 5.1	Kontribusi Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah dibandingkan dengan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023	V-26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai macam upaya dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya.

Sebagai awal dari pelaksanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Menindaklanjuti amanat tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana pada tahun keempat dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang dalam penyusunannya mempedomani Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program yang telah tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 serta juga capaian dan target terhadap pelaksanaan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunannya RKPD Tahun 2025 juga telah memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, mempedomani Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 juga mengakomodir direktif/arahan langsung Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketetapan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD yang diinputkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Secara regulasi, pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya.

Dokumen RKPD Tahun 2025 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan dokumen penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD Tahun 2025 mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.
6. Menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga mempedomani:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat).

3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan penjabaran secara lebih operasional terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dan juga hasil penyelarasan dengan Prioritas Nasional, yang difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan mengacu sepenuhnya untuk menjawab tuntutan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah dalam melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain hal tersebut, pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas terhadap capaian indikator makro pembangunan antara lain yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan gini ratio, penurunan tingkat pengangguran.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2025 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu.

Untuk itu maka 7 (tujuh) Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tetap dipertahankan menjadi 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2025 sebagai upaya menjaga kesinambungan RKPD dengan RPJMD, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Namun demikian, menyikapi perkembangan proses penyusunan perencanaan di tingkat nasional yang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2025 juga sedang dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 maka tentunya RKPD Tahun 2025 juga akan diwarnai dengan beberapa isu dan kebijakan baru di daerah sebagai bentuk keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Adapun prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 yakni :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Dalam mendorong daya ungkit dari pencapaian masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut maka terdapat 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKPD Tahun 2025. Penajaman dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program unggulan dilakukan dengan secara rutin per triwulan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output program unggulan dan memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Sistematika RKPD Tahun 2025 meliputi Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.

Pendahuluan menjelaskan gambaran umum proses penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan berisikan informasi umum tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

Gambaran umum kondisi daerah antara lain memuat kondisi umum daerah Sumatera Barat, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD tahun 2023 serta permasalahan pembangunan daerah. Bagian ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang *tidak memenuhi* target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang *telah memenuhi* target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang *melebihi target* kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025, mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Khusus untuk dokumen RKPD Provinsi sesuai dengan ketentuan Permendagri No.86 Tahun 2017, terdapat bab mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber pendanaan lain berasal dari peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Selain itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 perlu ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan mencakup :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD.
 - b. Orientasi mengenai RKPD.
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup :
 - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017)
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan berita acara forum konsultasi publik (pasal 81 Permendagri 86 tahun 2017).
 - c. Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk memperoleh persetujuan untuk penyempurnaan bahan rancangan awal renja perangkat daerah (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017).
 - d. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah (ayat 2 pasal 83 Permendagri 86 tahun 2017), yang berisikan :

- Agenda penyusunan RKPD
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
 - Musrenbang RKPD
 - Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
 - Verifikasi Rancangan Renja SKPD (ayat 4 pasal 84 Permendagri 86 tahun 2017)
3. Penyusunan Rancangan RKPD.
 - a. Penelaahan terhadap rancangan awal RKP program strategis nasional (ayat 1 pasal 85 Permendagri 86 tahun 2017)
 - b. Pengajuan persetujuan rancangan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RKPD (ayat 1 pasal 86 Permendagri 86 tahun 2017)
 - c. Penyampaian surat edaran Gubernur tentang penyelarasan prioritas pembangunan kepada Bupati/Walikota yang memuat rancangan RKPD Provinsi dan jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi (ayat 2 pasal 86 dan ayat 3 pasal 87 Permendagri 86 tahun 2017)
 4. Musrenbang Provinsi (pasal 90 Permendagri 86 tahun 2017)
 5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
 - a. Penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi (ayat 1 pasal 100 Permendagri 86 tahun 2017)
 - b. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
 - c. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 2 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
 - d. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
 - e. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk di fasilitasi (ayat 2 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
 - f. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 3 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
 - g. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 6 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017).

6. Penetapan.

- a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. (ayat 1 pasal 103 Permendagri 86 tahun 2017)
- b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi (ayat 1 pasal 104 Permendagri 86 tahun 2017)
- c. Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (ayat 1 pasal 107 Permendagri 86 tahun 2017)

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan beberapa hal seperti memastikan konsistensi dan dukungan terhadap perencanaan pusat (RKP) dengan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam menyusun program dan kegiatan serta mewujudkan perencanaan partisipatif dengan mengoptimalkan peran serta kelompok masyarakat dalam penyusunan RKPD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 - 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 13) Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
- 21) Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2020-2050 025-2045
- 22) Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Selain peraturan perundang-undangan di atas maka terdapat beberapa dasar hukum dan dokumen lainnya yang turut diperhatikan dan diacu dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, antara lain yakni :

- 1) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045
- 2) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Tahun 2025, merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dalam penyusunannya RKPD Tahun 2025 memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan dua tahun sebelumnya (Tahun 2023) antara lain yakni evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator Kinerja Program serta Indikator Kinerja Program Unggulan, serta selain itu isu-isu strategis yang berkembang yang perlu diintervensi serta sumber daya dan potensi yang dimiliki.

1.3.1. Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah dan jangka panjang maka kedudukan RKP Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 serta juga merupakan implementasi tahun pertama dari RPJPN Tahun 2025-2045. Agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 akan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025, hal tersebut dilakukan sebagai pertimbangan dalam upaya menjaga kesinambungan serta konsistensi RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektifitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Dengan memperhatikan Tema RKP 2025 serta Prioritas Nasional (PN), maka penyusunan Tema Pembangunan pada RKPD Tahun 2025 juga sepenuhnya mengacu pada arah pembangunan serta tema RKP Tahun 2025, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan yakni :

1. Pasal 3 ayat (1) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 5 ayat (3) bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu, hal ini sejalan dengan dasar-dasar dan landasan pikir sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional bahwa perencanaan daerah harus mendukung terhadap ketercapaian nasional sebagai tujuan utama pelaksanaan pembangunan.

Meskipun penyusunan Tema RKPD Tahun 2025 sangat memperhatikan keselarasan dengan Tema RKP Tahun 2025 namun dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, rencana yang disusun tetap tidak mengabaikan :

1. upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, yang menjadi fokus utama yang dilakukan secara bertahap dan menjaga agar tetap berada pada tren positif yang diikuti dengan adanya pemerataan pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua

- lapisan masyarakat serta tetap waspada terhadap gejolak risiko ekonomi dengan fokus mengupayakan penanganan pada kemungkinan kenaikan lonjakan harga komoditas pangan.
2. pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 3. pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
 4. pencapaian terhadap target kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021-2026.

Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Selanjutnya RKP Tahun 2025, diterjemahkan ke dalam kesesuaian antara prioritas nasional dengan prioritas pembangunan daerah dan program pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Prioritas Nasional tidak sama persis dari sisi nomenklatur dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, namun secara substansi telah diselaraskan antara nasional dan daerah, hal tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Kesesuaian Prioritas RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 3. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 4. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
		2. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 3. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	7. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 8. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 9. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hubungan antar dokumen perencanaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan, serta program unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2025; dan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032. Selain itu juga, RKPD Tahun 2025 juga menyelaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang bersifat imperatif terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, sebagai berikut: RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang di dalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing penanggung jawab pada Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program lintas Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan

bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2025.

Selain itu, RKPD juga dijadikan pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder dalam penyusunan rencana tahunan masing-masing daerah.

Secara substansi dan hirarkis, keberadaan RKPD melaksanakan strategi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Persandingan Arah Kebijakan RPJPD dengan Sasaran dan Strategi pada RPJMD 2021-2026

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
Misi 1 RPJPD : Mewujudkan Kehidupan Agama Dan Budaya Berdasarkan Filosofi ABS-SBK		
1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya 2. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan 3. Terwujudnya pola pendidikan dengan pengemblengan agama intensif secara menyeluruh 4. Terwujudnya kualitas manajemen sekolah benuansa Islam 5. Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak dan wakaf secara profesional 6. Semakin mantapnya pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam. 7. Terlaksananya advokasi hukum atas	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat sebagai landasan utama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan 2. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam peningkatan Kesejahteraan Rakyat 3. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda 4. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
persengketaan tanah ulayat jika tidak ditemukan kompromi secara kekeluargaan. 8. Terwujudnya pengelolaan tanah ulayat dengan kepastian hukum. 9. Terwujudnya kerukunan sosial multukultur 10. Terwujudnya komunikasi intensif antar etnis		5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat 6. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur serta peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur 7. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 8. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat 9. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat 10. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 11. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama 12. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya 13. Terwujudnya Ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
		14. Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan 15. Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional 16. Meningkatkan Pembinaan Sejarah 17. Meningkatkan Pelestarian Dan Pengelolaan Warisan Budaya (Cagar Budaya) 18. Meningkatkan Pengelolaan Permuseuman
Misi 2 RPJPD : Mewujudkan Sistem Hukum Dan Tata Pemerintahan Yang Baik		
1. Terwujudnya sinergitas antara pelaku pembangunan daerah 2. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD serta kabupaten dan kota 3. Terwujudnya tata pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel 4. Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi 5. Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan 6. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis 7. Pemantapan penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat 8. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 3. Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. 4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial 5. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 6. Peningkatan kuantitas APIP

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
9. Tertatanya manajemen kepegawaian yang profesional 10. Terdapatnya aparatur yang handal dan bertanggung jawab 11. Terlaksananya suatu sistem birokrasi yang berorientasi prstasi dan non- paternalistik 12. Akuntabilitas dan kredibilitas data untuk internal dan penelitian		7. Peningkatan kualitas APIP 8. Optimalisasi SPIP 9. Meningkatkan peran dan layanan APIP 10. Meningkatnya pelaksanaan TLHP internal dan eksternal 11. Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah 12. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah 13. Meningkatkan asistensi dan rekonsinasi data anggaran 14. Meningkatkan Pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah 15. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal 16. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan 17. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah 18. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan 19. Peningkatan sarana dan prasaran penunjang pelayanan 20. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah 21. Mewujudkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 22. Meningkatkan layanan perizinan dan investasi di daerah

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
		Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah
	2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	1. Pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Merit 3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 4. Peningkatan Koordinasi dalam pengelolaan SPBE 5. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial yang berkualitas 6. Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 7. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kepegawaian Daerah 8. Peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mewujudkan ASN dan stakeholder yang profesionalitas dan berkompeten 9. Terwujudnya kinerja birokrasi
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Terwujudnya kualitas pelayanan Publik

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
		2. Meningkatkan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik
Misi 3 RPJPD : Mewujudkan Sumberdaya Insani Yang Berkualitas, Amanah Dan Berdaya Saing Tinggi		
1. Terlaksananya pendidikan berakreditasi Internasional dan Pengakuan Asia 2. 15 SMA Standar Nasional dan 30% Akses PT 3. 15 Sekolah Berasrama dan 5 Standar Internasional 4. Penuntasan sebagian Penyakit utama 5. 4 Rumah Sakit Umum menjadi rujukan Sumatera Bagian Tengah (Stroke, Psikotropika, Ginjal, Ortopedi) 6. Tercapainya kemampuan IPTEK yang tinggi dan tepat guna 7. Hasil Implementasi Iptek 8. Sains Park Internasional	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19. 2. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat 3. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan 4. Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 5. Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan 6. Pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan
	2. Menurunnya prevalensi stunting	1. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan 2. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
		3. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum 4. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah 5. Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting 6. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat
	3. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 2. Optimalisasi pengelolaan Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan 3. Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal 4. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan 5. Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan 6. Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
	4. Meningkatnya daya saing masyarakat	1. Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas. 2. Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal 3. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan 4. Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis 5. Meningkatkan hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6. Optimalisasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi 7. Optimalisasi perekayasaan Inovasi dan Teknologi 8. Optimalisasi uji coba, penerapan rancang bangun dan diseminasi hasil kelitbangan 9. Optimalisasi Pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 10. Penciptaan iklim investasi
Misi 4 RPJPD : Mewujudkan Ekonomi Produktif Dan Mampu Bersaing Di Dunia Global		
1. Diterapkannya teknologi pertanian rakyat tepat guna pada 250 nagari/desa dengan didukung oleh BATP sehingga tercapainya	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan,	1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian) 2. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
usaha pertanian rakyat modern. 2. Meningkatnya pengembangan kawasan yang terintegrasi 3. Terbangunnya 250 KSP, 95 KIMBUN dan pemantapan KAPET serta Agrociti yang sudah ada dan pembangunan baru yang layak. 4. Termantapkannya regulasi usaha dan bertambahnya perusahaan yang aktif dalam usaha penangkapan dan budidaya perikanan laut. 5. Meningkatnya hasil tangkapan dan budidaya perikanan 6. Terlaksananya usaha perdagangan dan jasa yang mampu bersaing di dunia global. 7. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah Tujuan utama wisata 8. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang Pantai Barat Sumatera	Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan 3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna 4. Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan 5. Pengembangan <i>system value chain</i> 6. Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan
	2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	1. Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok; 2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal; 4. Pemberdayaan daerah rentan pangan 5. Peningkatan keamanan pangan
	3. Meningkatnya pendapatan petani hutan	1. Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan sosial dalam bentuk HTR, HN dan HKm 2. Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
	4. Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan 2. Peningkatan perlindungan konsumen dan Pengawasan perdagangan, dan standardisasi mutu komoditi potensial 3. Pengembangan pasar ekspor
	5. Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah	1. Peningkatan daya saing produk IKM 2. Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah
	6. Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	1. Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha 2. Peningkatan akses pembiayaan koperasi dan UMKM 3. Penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UMKM
	7. Terciptanya 100.000 <i>entrepreneur</i> dari berbagai sektor	1. Penumbuhan dan Peningkatan SDM <i>entrepreneur</i> 2. Peningkatan fasilitasi <i>entrepreneur</i>
	8. Meningkatnya pertumbuhan investasi	1. Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal 2. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat
	9. Meningkatnya peran ekonomi digital	Meningkatkan kontribusi ekonomi digital
	10. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	1. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi 2. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata 3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
	11. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	1. Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif 2. Meningkatkan Kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
Misi 5 RPJPD : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		
1. Pemantapan dan penguatan pengelolaan pada 6 DAS 2. Peningkatan jumlah kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan nagari yang melaksanakan agroforestri serta pemantapan pengelolaan padakawasan yang sudah dilaksanakan sebelumnya 3. Peningkatan jumlah nagari yang dapat melaksanakan hutan rakyat tanaman industri (dimana kondisinya sesuai) dan pemantapan pengelolaan pada nagari- nagari yang sudah dilaksanakan sebelumnya 4. Pengembangan kerangka aturan sebagai landasan implementasi pada kegiatan prioritas pada RPJMD ke 4 5. Tercapainya penataan ruang yang baik dan dilaksanakan secara konsekuen	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermoda 3. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis 4. Pemenuhan kebutuhan energi dan insfrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah 5. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
	2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 2. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana

.Arah Kebijakan RPJPD	RPJMD 2021-2026	
	Sasaran	Strategi
6. Terlaksananya perlindungan Kawasan Koservasi Alam 7. Terdapatnya tata-kelola lingkungan yang baik 8. Terdapatnya pengawasan penggunaan lahan kritis 9. Terdapatnya masyarakat sadar lingkungan 10. Terdapatnya masyarakat sadar lingkungan	3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	1. Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan 2. Pengarusutamaan perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon 3. Implementasi valuasi ekonomi lingkungan 4. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman 5. Peningkatan pemanfaatan energy Terbarukan pada Bauran energi daerah
	4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	1. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan 2. Pembangunan Infrastruktur Pertanian
	5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	1. Tersusunya Rencana Tata Ruang yang berkualitas 2. Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang

Sumber : Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. RKPD dijadikan pedoman saat menjabarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pendekatan *money follows program* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 antara lain:

1. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan jangka panjang (RPJPD tahun 2025 – 2045) dan RPJMD Tahun 2021-2026, yang secara operasional juga akan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Perangkat Daerah Provinsi yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah, pedoman penyusunan RKPD Kabupaten/Kota serta pedoman bagi stakeholder pembangunan lainnya.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjadi acuan dalam penyelerasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
6. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2025.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat (1) Kondisi Umum meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; (3) Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

memuat arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan

kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2023-2024), dan perkiraan untuk tahun 2025.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025.

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

memuat arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

memuat panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU dan IKK pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Secara Astronomis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS), dan 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.119,54 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 218 pulau yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 114 pulau, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 48 pulau, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 pulau, Kabupaten Agam sebanyak 2 pulau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 26 pulau, Kota Padang sebanyak 21 pulau, Kota Pariaman sebanyak 4 pulau dan yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 pulau.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas, yaitu 6,045,65 ribu km² atau sekitar 14,35% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,56 km² (0,06%). Pada tahun 2023, Sumatera Barat memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 909 nagari dan 126 desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan.

Adapun rincian luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, nagari dan desa pada dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	5.983,222	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	6.045,649	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.590,404	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.150,580	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.377,186	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.342,266	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	2.226,270	16	-	92	-
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,405	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.902,444	12	-	62	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.282,144	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.920,925	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.852,993	11	-	90	-
13.	Kota Padang	694,337	11	104	-	-
14.	Kota Solok	58,720	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,945	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,560	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	24,173	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	74,552	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	64,767	4	16	-	55
	Jumlah	42.119,542	179	230	909	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas jika dikaitkan dengan keberadaan luas Kawasan hutan dan konservasi perairan ternyata dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, bahwa total jumlah luas hutan dan perairan di Sumatera Barat pada tahun 2023 yakni 2.278.161,53 Ha, dengan komposisi yakni Hutan Lindung sekitar 768.615,16 Ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam sekitar 769.923,31 Ha, Hutan Produksi Terbatas sekitar 227.146,07 Ha, Hutan Produksi Tetap sekitar 353.994,82 Ha dan Hutan Produksi yang dapat di konversi sekitar 158.482,17 Ha, dengan rincian pada Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

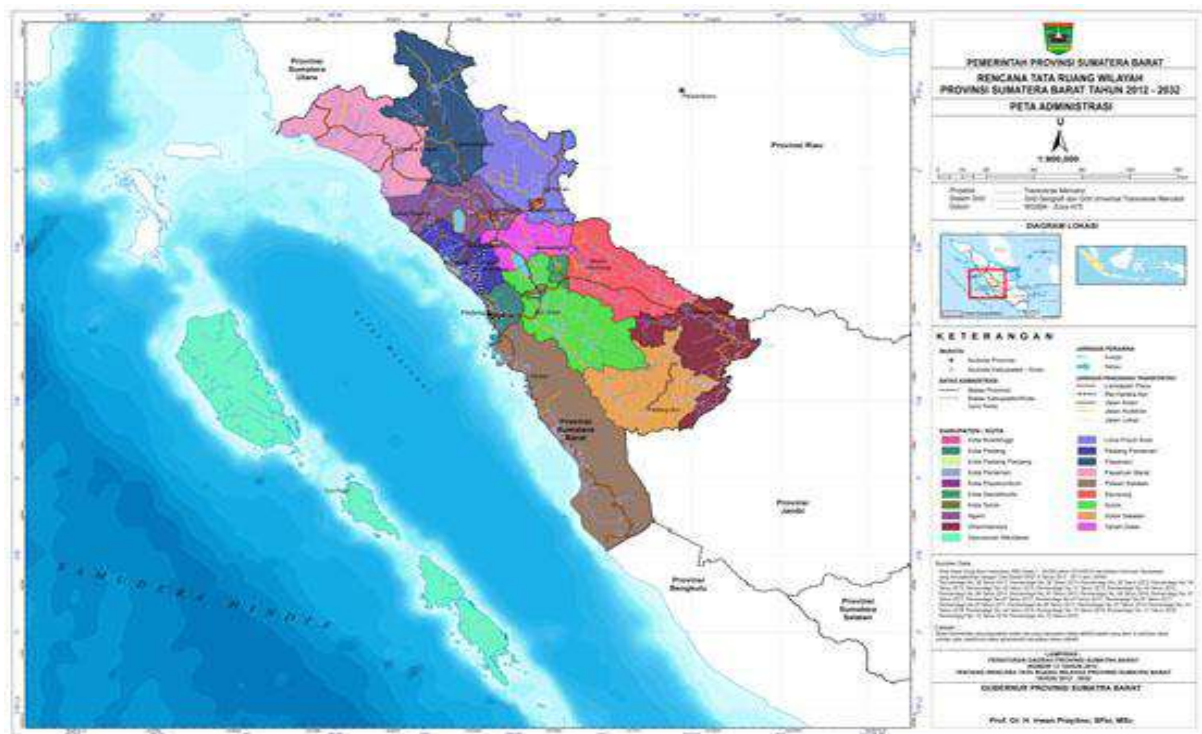
Tabel 2.2
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1.	Kab. Kep. Mentawai	7.212,95	183.269,63	-	250.822,27	50.687,32	491.992,17
2.	Kab. Pesisir Selatan	22.435,37	283.209,35	45.255,70	3.953,16	31.135,88	385.989,46
3.	Kab. Solok	117.417,24	47.388,32	10.980,59	4.477,36	9.873,36	190.136,87
4.	Kab. Sijunjung	77.268,61	41.514,22	28.107,41	19.077,37	4.468,79	170.436,40
5.	Kab. Tanah Datar	18.421,98	20.061,04	-	7.304,05	32,95	45.820,02
6.	Kab. Padang Pariaman	13.344,55	15.219,90	-	-	-	28.564,45
7.	Kab. Agam	20.000,30	28.869,41	7.321,31	2.493,89	8.767,05	67.451,96
8.	Kab. Lima Puluh Kota	116.394,79	20.140,14	20.359,92	3.904,19	11.164,21	171.963,25
9.	Kab. Pasaman	196.386,70	32.821,55	29.717,05	-	4.888,77	263.814,07
10.	Kab. Solok Selatan	82.691,41	65.939,34	53.456,60	12.780,63	13.181,74	228.049,72
11.	Kab. Dharmasraya	10.125,75	4.906,05	28.069,77	26.767,87	14.956,27	84.825,71
12.	Kab. Pasaman Barat	73.387,71	268,30	3.595,18	18.051,57	5.110,46	100.413,22
13.	Kota Padang	12.599,39	25.423,88	245,33	-	-	38.268,60
14.	Kota Solok	298,96	883,06	-	-	-	1.182,02
15.	Kota Sawahlunto	116,77	-	37,21	4.362,46	4.215,37	8.731,81
16.	Kota Padang Panjang	241,98	3,42	-	-	-	245,40
17.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	270,70	-	-	-	-	270,70
19.	Kota Pariaman	-	- 5,70	-	-	-	5,70
	Jumlah	768.615,16	769.923,31	227.146,07	353.994,82	158.482,17	2.278.161,53

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada Tahun 2023, Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,55% dari total luas Hutan Lindung di Sumatera Barat, kemudian oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 15,27% dan 15,14%.

Gambar 2.2
Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara berkisar 17,4°C-34,8°C dan rata-rata kelembaban udara antara 81,2% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 988,8 mb - 1.005,4 mb. Provinsi Sumatera Barat mempunyai ketinggian permukaan yang sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budi daya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di atas, dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 mdpl yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Tahun ini perekonomian Indonesia mulai pulih, untuk itu perlu mengoptimalkan sumberdaya lokal dan kapasitas lokal dalam rangka Pembangunan Ekonomi berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya. Motor penggerak dalam membangun ekonomi daerah merupakan seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam tingkat komunitas, perkotaan,

dan kabupaten. Meskipun berfokus ke lokal/daerah, namun perlu juga diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui secara konkrit tentang kategori dan subkategori yang mempunyai potensi pengembangan yang baik berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih maksimal. Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 indikator utama yaitu :

1. *Struktur/Kontribusi* kategori dan subkategori yang terkait dalam perekonomian daerah. Pertimbangan suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan cukup besar apabila kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar.
2. *Laju pertumbuhan* kategori dan subkategori bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya.

Kedua indikator di atas dapat digunakan untuk mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah menurut kategori dan subkategori di Provinsi Sumatera Barat, seperti digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		PROV	NAS	PROV	NAS	PROV	NAS	PROV	NAS	PROV	NAS
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	22,17	12,72	22,38	13,70	21,71	13,28	21,20	12,40	21,04	12,53
B	Pertambangan dan Penggalian	4,29	7,26	4,27	6,44	4,20	8,98	4,09	12,22	4,08	10,52
C	Industri Pengolahan	8,37	19,70	8,64	19,88	8,81	19,25	8,54	18,34	8,41	18,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	1,17	0,10	1,16	0,10	1,12	0,10	1,04	0,09	1,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,06	0,09	0,06
F	Konstruksi	10,09	10,75	10,19	10,71	10,20	10,44	10,06	9,77	10,15	9,92
G	Pedagang Besar & Eceran; Reparasi, Mobil & Sepeda Motor	15,80	13,01	15,79	12,93	15,77	12,97	16,50	12,85	16,55	12,94
H	Transportasi & Pergudangan	12,60	5,57	10,44	4,47	10,30	4,24	10,88	5,02	11,30	5,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,42	2,78	1,24	2,55	1,27	2,43	1,35	2,41	1,37	2,52
J	Informasi dan Komunikasi	5,82	3,96	6,44	4,51	6,62	4,41	6,68	4,15	6,72	4,23

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		PROV	NAS	PROV	NAS	PROV	NAS	PROV	NAS	PROV	NAS
K	Jasa Keuangan	2,90	4,24	3,04	4,51	3,28	4,51	3,23	4,13	3,08	4,16
L	Real Estate	2,01	2,77	2,06	2,94	2,05	2,94	2,02	2,49	2,08	2,42
M, N	Jasa Perusahaan	0,44	1,92	0,44	1,91	0,43	1,91	0,42	1,74	0,44	1,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,13	3,62	6,71	3,76	6,90	3,77	6,52	3,09	6,33	2,95
P	Jasa Pendidikan	4,34	3,30	4,70	3,56	4,64	3,56	4,62	2,89	4,48	2,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,07	1,42	1,10	1,62	1,30	1,69	1,30	1,70	1,21
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,93	1,81	2,00	1,95	1,88	1,96	1,95	1,96	2,11	1,94
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel diatas menggambarkan bahwa dari tahun 2019-2023 bahwa Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan, Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,89%, Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,04%. menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 21,20%, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 16,55%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 15,50%, Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 11,30%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,88%.

Jika dibandingkan dengan Nasional maka, Struktur PDRB nasional didominasi oleh Lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 18,67%; Lapangan usaha Pedagang Besar & Eceran; Reparasi, Mobil & Sepeda Motor sebesar 12,94%; Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 12,53%; Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,52%, dan Lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,92%.

Potensi pembangunan wilayah Sumatera Barat dapat dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan, antara lain:

Kawasan Perikanan dan Kelautan : terbagi dalam 2 aktivitas yaitu perikanan air tawar (di daratan) dan perikanan laut/air payau (di wilayah laut). Aktivitas perikanan laut antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah lautan (termasuk kawasan pantai), maka potensi pembangunan yang dimiliki adalah dalam aktivitas budidaya pembesaran dan penangkapan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan laut yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Samudra Indonesia yang terletak di kawasan Pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan Tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik, sementara aktivitas perikanan air tawar dalam bentuk pembenihan, pembesaran hampir seluruh kabupaten/kota memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kawasan Tanaman Pangan antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai “lumbung pangan” Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Guna meningkatkan produktivitas lahan, maka daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ke depan daerah ini akan terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga terutama Riau.

Kawasan Perkebunan antara lain di Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan Tanah Datar Pasaman, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat, maka produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit, kopi, gambir, kakao dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Dalam meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (*crumb-rubber*) terutama di kota Padang dan pabrik minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) terutama di daerah Pasaman Barat dan Dharmasraya. Ke depan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.

Kawasan Pertambangan, antara lain di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatera dan Mentawai *Fault* di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan tsunami. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

Wilayah Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana yang meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor atau gerakan tanah, kawasan rawan gelombang pasang (tsunami), kawasan rawan abrasi pantai, kawasan rawan gunung meletus, dan kawasan rawan banjir. Kawasan-kawasan tersebut umumnya sudah dihuni penduduk. Untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut, pada kawasan-kawasan tersebut harus diberlakukan disinsentif non-fiskal berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja. Sedangkan untuk kawasan rawan bencana yang belum dihuni penduduk, dianjurkan untuk sama sekali tidak diberi prasarana dan sarana permukiman.

Letak geografis Sumatera Barat berada pada daerah tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Euroasia dengan topografi berbukit, bergunung dengan kelerengan di atas 10% dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya. Bencana yang melanda Sumatera Barat selama ini telah menyebabkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan infrastruktur, gagal panen, terhalangnya proses produksi dan lain-lainnya. Kondisi tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan daya saing daerah. Wilayah Provinsi Sumatera Barat memang merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi. Bencana alam yang rawan terjadi di Provinsi Sumatera Barat antara lain tsunami, longsor, gempa bumi, letusan gunung api dan banjir. Namun bencana-bencana lainnya juga cukup rawan terjadi seperti gerakan tanah, angin puting beliung, dan sebagainya.

Kawasan rawan bencana tsunami di Sumatera Barat tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota yang berada di sepanjang Samudera Hindia. Tujuh kabupaten/kota yang menjadi kawasan rawan bencana tsunami tersebut yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa di Kota

Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan landasannya menjangkau kurang lebih 1 km.

Selain rawan terhadap bencana tsunami, wilayah di sepanjang pantai Samudera Hindia ini juga rawan bencana gelombang pasang. Kawasan rawan gelombang pasang, yaitu di kawasan pantai di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.

Kawasan rawan tanah longsor, tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat, terutama pada sepanjang jalur patahan Samangka, dan daerah yang mempunyai zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, sampai pada perbatasan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai wilayah perbatasan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam hingga ke perbatasan Provinsi Bengkulu.

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sungai-sungai besar yang mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai di bagian barat. Wilayah yang berada di sekitar sungai berpotensi terjadinya banjir terutama pada saat musim hujan. Kawasan rawan banjir, meliputi meliputi kawasan Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman; Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Agam.

Kawasan rawan gempa bumi berada di sepanjang patahan Semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman menjadikannya sebagai daerah rawan gempa. Sejarah telah mencatat beberapa bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 1926, terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan kekuatan 7 Skala Richter yang merenggut 354 korban meninggal dunia dan lebih kurang 3.000 rumah rusak. Gempa ini sangat populer diantara para orang-orang tua masyarakat yang berada di wilayah yang terkena gempa dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi penunjuk waktu untuk mencatat sesuatu kejadian. Pada tanggal 6 Maret 2007, siklus gempa yang sama terjadi lagi dengan kekuatan 6,3 Skala Richter dan merenggut 66 korban meninggal dunia dan lebih kurang 35.000 rumah rusak di 10 kabupaten/kota yang berdekatan dengan pusat gempa ini. Begitu juga gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang berdampak pada 10 kabupaten/kota. Jumlah korban 1.195 orang meninggal. Kerusakan rumah lebih dari 249.000 dan termasuk kerusakan infrastruktur

sosial ekonomi yang parah. Setelah gempa dan tsunami Aceh pada bulan Desember 2004, bencana gempa bumi telah menjadi momok bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan rawan bencana letusan gunung api tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Provinsi Sumatera Barat memiliki gunung api seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci yang berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Tahun 2006, aktifitas Gunung Talang yang sempat menyemburkan lava meskipun tidak sampai menimbulkan bencana besar dan menarik para ahli nasional maupun internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk memprediksi aktifitasnya dimasa yang akan datang. Begitu juga Gunung Marapi masih terus mengalami erupsi pada beberapa tahun belakang ini, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup besar.

Tabel 2.4
Potensi Luas Ancaman Bencana Di Sumatera Barat

JENIS ANCAMAN	LUAS ANCAMAN (Ha)	KELAS ANCAMAN
1. Banjir	1.054.891	Tinggi
2. Banjir Bandang	106.338	Tinggi
3. Cuaca Ekstrim	2.312.260	Tinggi
4. Epidemi dan Wabah Penyakit	89.137	Sedang
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	41.303	Tinggi
6. Gempa Bumi	4.094.988	Tinggi
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	2.547.833	Tinggi
8. Kegagalan Teknologi	899	Tinggi
9. Kekeringan	4.094.980	Tinggi
10. Letusan Gunung Api		
a. Letusan Gunung Api Kerinci	12.681	Rendah
b. Letusan Gunung Api Talang	21.987	Sedang
c. Letusan Gunung Api Tandikat	21.778	Sedang
d. Letusan Gunung Api Marapi	19.947	Tinggi
11. Tanah Longsor	19.947	Tinggi
12. Tsunami	78.417	Tinggi

Sumber : RPB Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2025

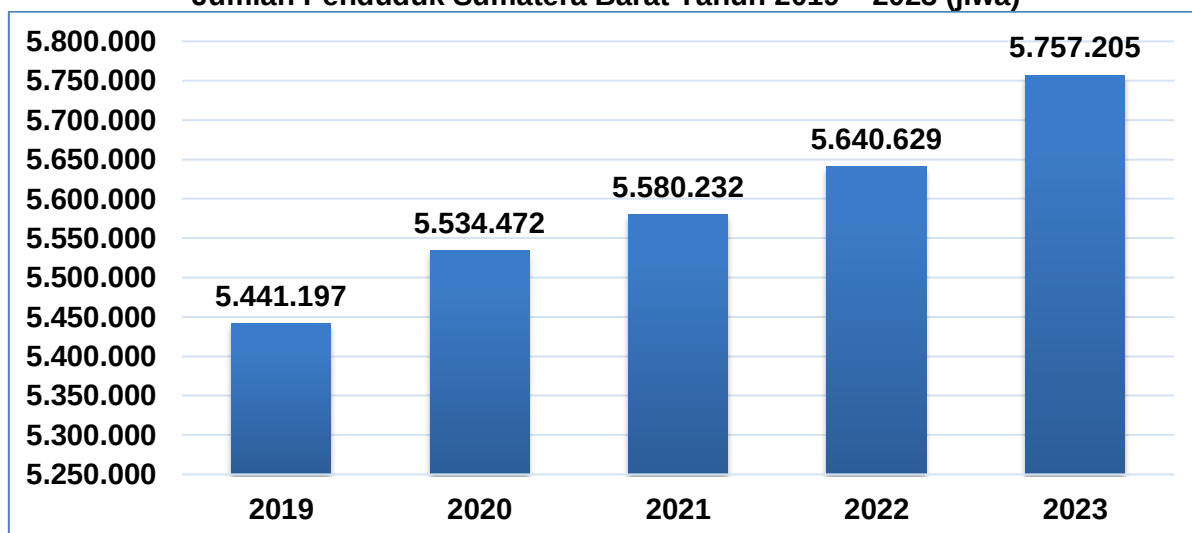
Dengan banyaknya jenis bencana alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat disebut sebagai wilayah “Laboratorium Bencana Alam”. Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, provinsi ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh epidemi wabah penyakit.

2.1.1.4. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023 yang merujuk pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, maka jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebanyak 5.757.205 jiwa yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 5.640.629 jiwa. Jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 278.696.200 jiwa maka persentase penduduk Sumatera Barat hanya sebanyak 2,06%.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan dan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Untuk itu, tentu pembangunan harus diorientasikan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian pertumbuhan serta mobilitasnya.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 (jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 5.441.197 jiwa, tahun 2020 mencapai 5.534.472 jiwa, pada tahun 2021 mencapai 5.580.232 jiwa, tahun 2022 mencapai 5.640.629 jiwa, pada tahun 2023 telah mencapai 5.757.205

Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk paling banyak berada pada Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Struktur sebaran penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota selama kurun waktu 2019 – 2023 tidak banyak mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (jiwa)

KABUPATEN/KOTA		JUMLAH PENDUDUK				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten		3.948.252	4.075.717	4.111.591	4.159.016	4.243.957
1	Kep. Mentawai	92.021	87.623	88.389	89.401	91.427
2	Pesisir Selatan	463.923	504.418	509.618	516.518	525.355
3	Solok	373.414	391.497	394.237	397.829	405.375
4	Sijunjung	237.376	235.045	237.313	240.317	243.709
5	Tanah Datar	348.219	371.704	373.693	376.276	383.676
6	Pdg Pariaman	415.613	430.626	433.018	436.129	451.388
7	Agam	491.282	529.138	534.202	540.905	551.893
8	Lima Puluh Kota	382.817	383.525	385.634	388.375	396.427
9	Pasaman	281.211	299.851	303.103	307.425	313.199
10	Solok Selatan	171.075	182.027	184.854	188.649	191.540
11	Dharmasraya	247.579	228.591	231.217	234.713	239.918
12	Pasaman Barat	443.722	431.672	436.313	442.479	450.050
Kota		1.492.945	1.458.755	1.468.641	1.481.613	1.513.248
1	Padang	950.871	909.040	913.448	919.145	942.938
2	Solok	71.010	73.438	74.469	75.850	77.842
3	Sawahlunto	62.524	65.138	65.687	66.413	67.758
4	Padang Panjang	53.693	56.311	56.971	57.850	58.627
5	Bukittinggi	130.773	121.028	121.588	122.311	124.047
6	Payakumbuh	135.573	139.576	141.184	143.325	144.830
7	Pariaman	88.501	94.224	95.294	96.719	97.206
Prov Sumatera Barat		5.441.197	5.534.472	5.580.232	5.640.629	5.757.205
Nasional		268.074.600	270.203.917	272.683.000	275.773.800	278.696.200

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Begitupun dengan ruang yang tersedia bagi penduduk, yang semakin lama tentunya akan semakin sempit sehingga akan mengakibatkan kepadatan penduduk pada suatu wilayah. Sehingga kebijakan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pembangunan harus berorientasi tidak hanya pada kualitas penduduk namun juga pada kuantitas penduduk yang tentunya akan membawa konsekuensi untuk penyediaan kebutuhan dasar dari penduduk itu sendiri. Adapun laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk serta kepadatan penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk pada
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN		PERSENTASE PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (per km ²)	
		2020- 2022	2020- 2023	2022	2023	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	1,15	1,56	1,58	1,59	14,94	15,28
2	Kab. Pesisir Selatan	1,36	1,46	9,16	9,13	85,44	86,90
3	Kab. Solok	0,92	1,28	7,05	7,04	110,80	112,91
4	Kab. Sijunjung	1,28	1,33	4,26	4,23	76,28	77,35
5	Kab. Tanah Datar	0,70	1,16	6,67	6,66	273,22	278,59
6	Kab. Pdg Pariaman	0,73	1,73	7,73	7,84	324,92	336,29
7	Kab. Agam	1,26	1,54	9,59	9,59	242,96	247,90
8	Kab. Lima Puluh Kota	0,72	1,21	6,89	6,89	118,65	121,11
9	Kab. Pasaman	1,44	1,60	5,45	5,44	78,78	80,26
10	Kab. Solok Selatan	2,06	1,87	3,34	3,33	57,48	58,36
11	Kab. Dharmasraya	1,52	1,77	4,16	4,17	80,36	82,14
12	Kab. Pasaman Barat	1,42	1,53	7,84	7,82	114,84	116,81
13	Kota Padang	0,63	1,34	16,30	16,38	1,323,77	1.358,04
14	Kota Solok	1,86	2,14	1,34	1,35	1,291,72	1.325,65
15	Kota Sawahlunto	1,11	1,45	1,18	1,18	286,33	292,13
16	Kota Pdg Panjang	1,55	1,48	1,03	1,02	2,455,43	2.448,41
17	Kota Bukittinggi	0,60	0,90	2,17	2,15	5,059,82	5.131,63
18	Kota Payakumbuh	1,53	1,35	2,54	2,52	1,922,48	1.942,67
19	Kota Pariaman	1,50	1,14	1,71	1,69	1,493,34	1.500,86
SUMATERA BARAT		1,09	1,43	100,00	100,00	133,92	136,69

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas bahwa Kota Solok dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 2,14, jika dilihat dari komposisi kepadatan penduduknya sekitar 1.325,65 jiwa per Km², jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan permasalahan kependudukan, dan sebagaimana yang sering terjadi pada umumnya penduduk di daerah perdesaan yang lebih banyak mendominasi pada wilayah administratif Kabupaten seiring dengan waktu akan berpindah ke daerah perkotaan yang cenderung memiliki banyak fasilitas pelayanan dasar yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan dan tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.

Kota Bukittinggi merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni sebesar 5.131,63 jiwa per Km², dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup rendah yakni sebesar 0,90. Meskipun laju pertumbuhan yang cukup rendah namun tingginya kepadatan penduduk di Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh akibat proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota (urbanisasi).

Secara persentase, jumlah penduduk Sumatera Barat paling banyak berdomisili di Kota Padang yakni sebesar 16,38%. Hal ini dipahami karena sebagai Ibukota Provinsi, Kota Padang memiliki sarana dan prasarana pelayanan lebih lengkap dan berkualitas, serta memiliki kesempatan peluang kerja yang juga lebih besar dibandingkan daerah administrative lainnya

Berdasarkan data kependudukan yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang merupakan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga kualitas data dapat lebih terjamin. Data hasil pelayanan tersebut kemudian dikonsolidasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Kependudukan Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31 Desember sebagai berikut.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (jiwa)
berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Semester II Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	88.845	89.299	91.017	92.554	95.068
2	Kab. Pesisir Selatan	511.725	514.444	515.881	520.293	528.381
3	Kab. Solok	387.868	390.327	393.890	402.295	408.424
4	Kab. Sijunjung	239.047	239.969	240.211	240.798	244.342
5	Kab. Tanah Datar	372.910	374.691	374.543	376.018	380.727
6	Kab. Pdg Pariaman	431.224	434.649	438.022	447.170	455.218
7	Kab. Agam	530.536	532.911	524.829	525.348	530.123
8	Kab. Lima Puluh Kota	382.932	385.986	388.866	392.094	397.683
9	Kab. Pasaman	311.442	301.328	301.685	303.993	309.202
10	Kab. Solok Selatan	182.117	182.936	181.804	182.315	182.573
11	Kab. Dharmasraya	215.341	222.305	227.053	182.315	237.724
12	Kab. Pasaman Barat	433.761	435.685	436.411	440.060	445.439
13	Kota Padang	908.557	912.910	918.860	924.840	934.847
14	Kota Solok	74.271	74.968	76.959	79.057	82.478
15	Kota Sawahlunto	66.853	67.007	67.154	67.769	68.380
16	Kota Padang Panjang	58.140	59.387	60.137	61.075	62.731
17	Kota Bukittinggi	123.296	126.645	130.211	134.412	138.534
18	Kota Payakumbuh	139.119	140.201	141.284	143.610	146.772
19	Kota Pariaman	93.774	94.359	95.640	98.690	101.680
	Sumatera Barat	5.551.758	5.580.007	5.604.457	5.664.988	5.750.326

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, 2024

Selanjutnya berdasarkan data BPS, jika data penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka Rasio Jenis Kelamin pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

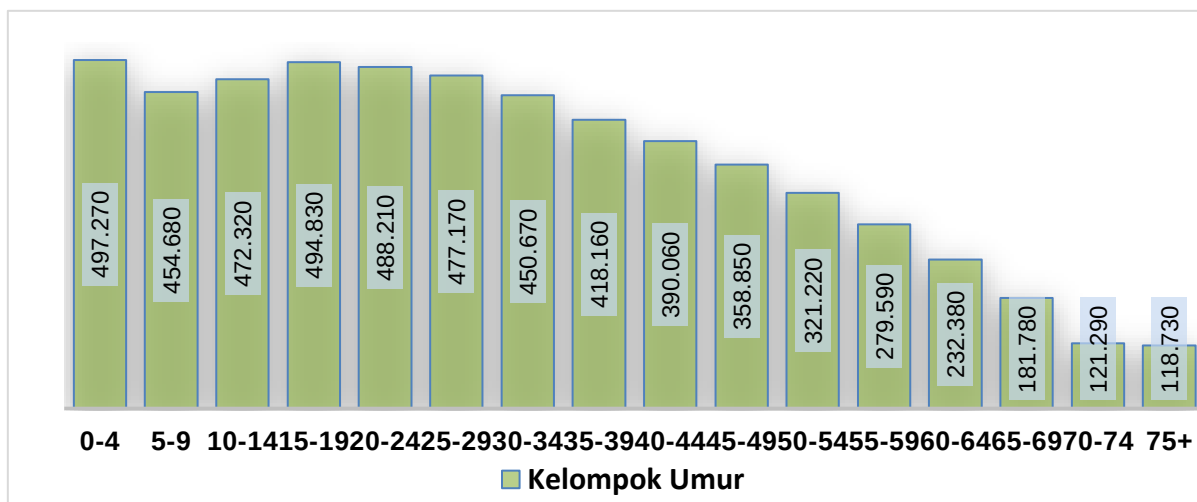
Tabel 2.8
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota		JUMLAH PENDUDUK			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
Kabupaten					
1	Kep. Mentawai	47.321	44.106	91.427	107,29
2	Pesisir Selatan	264.292	261.063	525.355	101,24
3	Solok	203.900	201.475	405.375	101,20
4	Sijunjung	123.377	120.332	243.709	102,53
5	Tanah Datar	193.191	190.485	383.676	101,42
6	Padang Pariaman	226.435	224.953	451.388	100,66
7	Agam	278.342	273.551	551.893	101,75
8	Lima Puluh Kota	198.680	197.747	396.427	100,47
9	Pasaman	157.978	155.221	313.199	101,78
10	Solok Selatan	97.420	94.120	191.540	103,51
11	Dharmasraya	121.702	118.216	239.918	102,95
12	Pasaman Barat	227.838	222.212	450.050	102,53
Kota					
1	Padang	473.089	469.849	942.938	100,69
2	Solok	39.239	28.603	77.842	101,65
3	Sawahlunto	34.086	33.672	67.758	101,23
4	Padang Panjang	29.461	29.166	58.627	101,01
5	Bukittinggi	61.949	62.098	124.047	99,76
6	Payakumbuh	72.837	71.993	144.830	101,17
7	Pariaman	49.131	48.075	97.206	102,20
Provinsi Sumatera Barat		2.900.268	2.856.937	5.757.205	101,52

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020, Sumatera Barat telah mengalami bonus demografi, sebanyak 68,65% penduduk Sumatera Barat berada pada rentang umur usia produktif (15-64 Tahun) atau berjumlah sebanyak 3.286.893 jiwa. Namun terdapat fenomena baru dalam demografi Sumatera Barat yakni terjadi kenaikan 10,83% penduduk yang masuk kategori penduduk lansia. Hal ini tentu perlu disikapi dengan cermat dalam kebijakan pembangunan manusia di Sumatera Barat yang harus mengkedepankan skill dan keterampilan penduduk pada usia produktif agar tidak menjadi bencana demografi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk tetap produktif dan mandiri ketika memasuki masa lanjut usia, sehingga tidak menjadi beban negara terutama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Adapun jumlah Penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok umur sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok umur Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Penduduk dengan rentang usia 0 – 4 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat dengan jumlah sebanyak 497.270 jiwa, sedangkan penduduk dengan kelompok umur 75+ tahun merupakan jumlah yang paing sedikit yakni sebanyak 113.405 jiwa. Jika mengambil kelompok usia produktif dengan kelompok umur 15 sd 64 tahun maka berjumlah 3.844.062 dan jika dibandingkan dengan total penduduk berjumlah 68,15%.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Provinsi se Pulau Sumatera
Tahun 2019-2023

PROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023
1. Aceh	5.371.532	5.274.871	5.333.733	5.407.855	5.482.530
2. Sumatera Utara	14.562.549	14.703.532	14.936.148	15.115.206	15.386.640
3. Sumatera Barat	5.441.197	5.534.472	5.580.232	5.640.629	5.757.210
4. Riau	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.642.870
5. Jambi	3.624.579	3.548.228	3.585.119	3.631.136	3.679.170
6. Sumatera Selatan	8.470.683	8.567.932	8.548.613	8.647.262	8.743.520
7. Bengkulu	1.991.838	2.010.670	2.032.942	2.060.092	2.086.010
8. Lampung	8.447.737	9.007.848	9.081.792	9.176.546	9.313.990
9. Kep.Bangka Belitung	1.488.792	1.455.678	1.473.165	1.494.621	1.511.900
10.Kep.Riau	2.189.653	2.064.564	2.118.239	2.179.820	2.152.630
Total Penduduk Pulau Sumatera	58.560.305	58.561.822	59.183.586	59.967.551	60.756.470
NASIONAL	268.074.600	270.203.917	272.683.000	275.773.800	278.696.190

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas maka proporsi jumlah Penduduk Sumatera Barat jika dibandingkan dengan total populasi di Pulau Sumatera sekitar 9,4% dan jika dibandingkan dengan total populasi Indonesia secara keseluruhan sekitar 2,04%.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paripurna (*ultimate goals*) dari pembangunan suatu wilayah. Ukuran ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang disepakati baik secara global maupun nasional. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, aspek kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi, ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*), ketimpangan wilayah (*Indeks Williamson*), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen pendukungnya seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

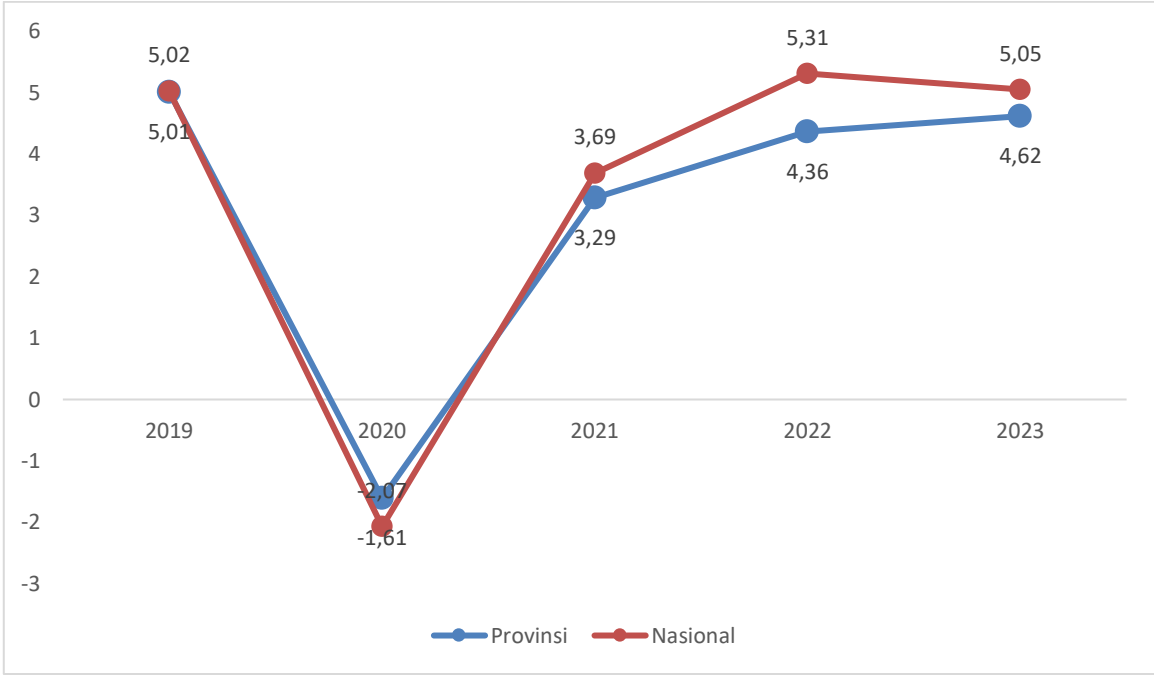
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Kedua pendekatan tersebut menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat stagnan cenderung melambat dan menurun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% dan terus mengalami penurunan hingga hanya puncaknya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 1,6% akibat dampak dari adanya pandemi covid 19. Dengan dilakukannya upaya pemulihan ekonomi secara intensif dan berkesinambungan, maka pada tahun pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat mengalami *rebound* dengan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan yang signifikan. Dan dengan dilakukannya program-program pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2022 dan 2023, maka *rebound* pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dapat terjaga dan ditingkatkan laju pertumbuhannya. Hal ini terlihat pada tahun 2022 capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%

sedangkan Sumatera Barat sebesar 4,36% dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,05% dan Sumatera Barat sebesar 4,62%

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik. 2024

Pertumbuhan Ekonomi di 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2023 fluktuatif jika dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yakni pada Kabupaten Padang Pariaman dengan capaian 546%, diikuti oleh Kota Padang Panjang sebesar 4,84%, Kota Solok dengan capaian sebesar 4,81%. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian 4,04%, diikuti dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 4,19 dan Kabupaten Sijunjung dengan capaian 4,26% dan Kabupaten Solok dengan capaian 4,36%.

Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Persen)

NO	KAB/KOTAPROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep, Mentawai	4,76	-1,85	2,88	4,94	4,04
2	Kab. Pesisir Selatan	4,81	-1,11	3,37	4,02	4,19
3	Kab. Solok	5,07	-1,14	3,31	4,31	4,36
4	Kab. Sijunjung	4,83	-1,10	3,15	3,95	4,26
5	Kab. Tanah Datar	5,01	-1,12	3,30	4,20	4,44
6	Kab. Padang Pariaman	2,51	-10,46	2,18	6,87	5,46
7	Kab. Agam	4,81	-1,37	3,70	4,21	4,52
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,10	-1,16	3,33	4,04	4,55
9	Kab. Pasaman	4,84	-0,87	3,39	4,09	4,41
10	Kab. Solok Selatan	4,89	-1,24	3,35	4,02	4,57
11	Kab. Dharmasraya	4,98	-1,39	3,42	4,28	4,35
12	Kab. Pasaman Barat	4,49	-1,34	3,75	4,17	4,33

NO	KAB/KOTAPROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023
13	Kota Padang	5,68	-1,86	3,66	4,33	4,54
14	Kota Solok	5,53	-1,42	3,56	4,60	4,81
15	Kota Sawahlunto	5,34	-1,27	2,49	3,98	4,46
16	Kota Padang Panjang	5,59	-1,44	3,46	4,39	4,84
17	Kota Bukittinggi	5,88	-1,74	3,61	4,68	4,79
18	Kota Payakumbuh	5,92	-1,65	3,59	4,52	4,70
19	Kota Pariaman	5,33	-1,32	3,53	4,55	4,79
	Sumatera Barat	5,01	-1,60	3,29	4,36	4,62
	NASIONAL	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

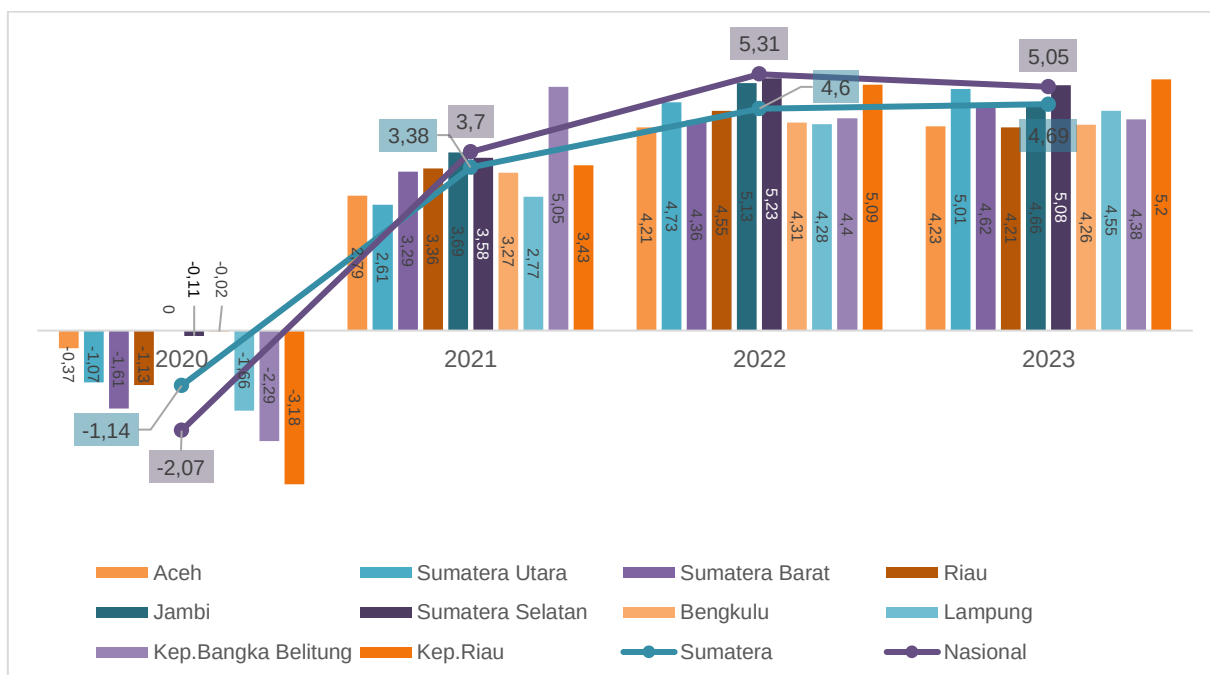
Berdasarkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2023, maka capaian tersebut dapat dikelompokkan pada :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar 4,62% sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Sawahlunto.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar 4,62% namun di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023 sebesar 5,05% sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023 sebesar 5,46% sebanyak 1 (satu) Kabupaten yakni Kabupaten Padang Pariaman.

Posisi Sumatera Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera relatif tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Sumatera Barat sebesar 4,62% lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang sebesar 4,23%, Provinsi Riau sebesar 4,21%, Provinsi Bengkulu sebesar 4,26%, Provinsi Lampung sebesar 4,55%, dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 4,38% serta jika di rata-ratakan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi yang berada di Pulau Sumatera Barat (sebanyak 10 Provinsi) sebesar 4,69%, maka laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat juga masih di bawah rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini

Grafik 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2023

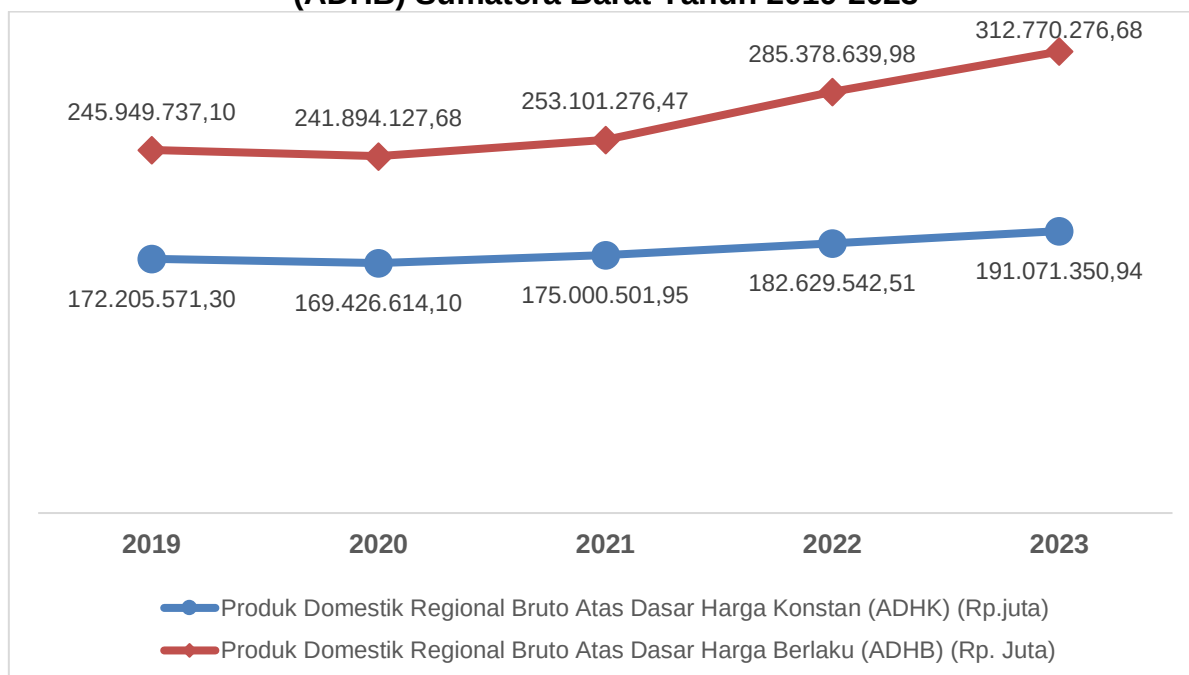


Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun, 2024

Perkembangan PDRB Sumatera Barat sejak Tahun 2019-2023 baik atas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemic Covid yang mengakibatkan PDRB ADHK pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.169,4 triliun, dan setelah adanya pemulihan ekonomi hingga tahun 2023, maka PDRB ADHK naik menjadi sebesar Rp.191,0 triliun.

Kenaikan PDRB ADHK ini juga diikuti dengan kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mempertimbangan kenaikan harga serta dampak inflasi. Pada Tahun 2019 sebesar Rp.245,9 triliun dan mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi covid menjadi Rp.241,8 triliun dan pada 2023 naik menjadi sebesar Rp.312,7 triliun. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstans (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

PDRB melalui pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran yang keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,89%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar

memberikan kontribusi sebesar 21,04%, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 21,20%. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 16,50%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 16,55%. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 11,30%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,88%. Secara lebih rinci distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian.Kehutanan dan Perikanan	22,15	22,36	21,69	21,20	21,04
2. Pertambangan dan Penggalian	4,30	4,28	4,19	4,09	4,08
3. Industri Pengolahan	8,38	8,64	8,79	8,54	8,41
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
5. Pengadaan Air.Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	10,09	10,16	10,18	10,06	10,15
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,79	15,77	15,84	16,50	16,55
8. Transportasi dan Pergudangan	12,60	10,44	10,29	10,88	11,30
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,24	1,27	1,35	1,37
10. Informasi dan Komunikasi	5,81	6,43	6,61	6,68	6,72
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	3,04	3,27	3,23	3,08
12. Real Estate	2,01	2,06	2,04	2,02	2,08
13. Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,43	0,42	0,44
14. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,13	6,72	6,89	6,52	6,33
15. Jasa Pendidikan	4,35	4,71	4,65	4,62	4,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,62	1,69	1,65	1,70
17. Jasa Lainnya	2,00	1,88	1,95	2,05	2,11
PDRB SUMATERA BARAT (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024

Jika dilihat pada tabel Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha diatas maka sejak tahun 2019-2023 terjadi pergeseran distribusi PDRB di Sumatera Barat secara perlahan. Distribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2019 sebesar 22,15% selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 sebesar 21,04%. Hal ini dapat dipahami bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian yang tersedia yang sebagian besar beralih fungsi menjadi lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya jumlah dan

kebutuhan penduduk. Begitupun dengan Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang juga selalu mengalami penurunan dari sebesar 4,30% pada tahun 2019 menjadi 4,08% di tahun 2022. Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan cenderung penurunan dan selanjutnya mengalami stagnasi atau tidak mengalami pergeseran yang berarti dari sebesar 8,38% di tahun 2019 mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 8,64% dan akhirnya pada tahun 2023 sebesar 8,41%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti dari sebesar 15,79% di tahun 2019 selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 mencapai 16,55%.

Meskipun sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki distribusi yang cukup besar pada struktur PDRB Sumatera Barat, namun laju pertumbuhannya di tahun 2023 masih relative kecil yakni sekitar 3,54% namun laju ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,52%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan laju 4,75% di tahun 2023 dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,60%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dialami oleh jasa lainnya sebesar 8,06%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,71%, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,64%. Pada tahun 2023, tidak satupun lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2023. Secara lebih rinci laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian.Kehutanan dan Perikanan	2,48	1,18	2,18	3,52	3,54
2. Pertambangan dan Penggalian	6,22	-1,31	-1,77	1,94	4,65
3. Industri Pengolahan	-1,98	-0,54	3,72	1,74	3,09
4. Pengadaan Listrik & Gas	4,20	- 6,81	3,15	3,21	4,16
5. Pengadaan Air.Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,10	- 1,04	5,53	4,37	2,29
6. Konstruksi	8,47	- 2,95	2,18	2,51	5,86
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,29	- 1,14	5,10	5,60	4,75
8. Transportasi dan Pergudangan	4,75	- 16,10	2,54	5,73	5,77
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,11	- 15,95	5,66	15,80	7,71
10. Informasi dan Komunikasi	8,73	9,55	6,42	7,02	7,64
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	1,34	8,46	4,54	2,78
12. Real Estate	6,78	0,22	2,41	5,78	6,32
13. Jasa Perusahaan	6,20	- 3,98	1,13	7,33	6,88

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
14. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,96	- 0,59	0,85	0,89	1,94
15. Jasa Pendidikan	7,94	5,03	1,84	5,13	1,84
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,54	8,83	5,88	4,54	7,29
17. Jasa Lainnya	7,50	- 10,10	7,10	11,88	8,06
PDRB SUMATERA BARAT (%)	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Adapun nilai PDRB ADHK dan ADHB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2021-2023 secara dominan berada di Kota Padang, hal ini wajar karena Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi yang juga merupakan daerah dengan basis PDRB pada sektor Lapangan Usaha Perdagangan. Nilai PDRB Kota Padang berdasarkan ADHB pada tahun 2023 sebesar Rp. 72,961 triliun, sedangkan nilai PDRB ADHB yang terkecil yakni berada di Kota Padang Panjang sebesar Rp. 4,08 triliun. Secara lebih rinci PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2021-2023 (Rp. Miliar)

NO	KAB/KOTA	PDRB (Rp.miliar)					
		ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)			ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	4.843,81	5.445,46	5.915,00	3.041,04	3.191,29	3.320,15
2	Kab. Pesisir Selatan	14.927,57	16.601,34	18.025,68	9.790,35	10.183,46	10.608,29
3	Kab. Solok	14.178,06	15.781,14	17.316,41	10.116,57	10.553,07	11.008,01
4	Kab. Sijunjung	9.566,57	10.668,55	11.676,77	6.893,21	7.165,52	7.468,60
5	Kab. Tanah Datar	13.590,93	15.055,22	16.459,56	9.892,15	10.307,42	10.757,91
6	Kab. Pdg Pariaman	18.455,08	22.193,36	25.070,85	12.199,84	13.037,57	13.740,82
7	Kab. Agam	21.351,35	23.827,65	26.162,66	14.942,56	15.572,20	16.275,98
8	Kab. Lima Puluh Kota	16.182,47	17.900,76	19.604,20	11.430,50	11.892,29	12.430,83
9	Kab. Pasaman	9.433,24	10.390,57	11.360,36	6.330,06	6.588,65	6.876,87
10	Kab. Solok Selatan	5.777,97	6.429,23	7.044,41	4.059,51	4.222,84	4.414,12
11	Kab. Dharmasraya	10.754,66	12.233,46	13.345,77	7.709,70	8.039,68	8.387,15
12	Kab. Pasaman Barat	15.931,87	17.889,12	19.544,80	11.679,97	12.166,81	12.684,89
13	Kota Padang	65.179,47	72.961,65	79.704,67	45.227,95	47.185,09	49.316,19
14	Kota Solok	4.251,89	4.793,15	5.262,10	2.936,82	3.071,87	3.219,31
15	Kota Sawahlunto	3.850,69	4.389,91	4.825,30	2.829,59	2.942,20	3.072,35

NO	KAB/KOTA	PDRB (Rp.miliar)					
		ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)			ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
16	Kota Padang Panjang	3.651,11	4.086,54	4.474,08	2.631,51	2.747,10	2.879,85
17	Kota Bukittinggi	9.026,56	10.194,02	11.131,58	6.263,12	6.556,49	6.869,40
18	Kota Payakumbuh	7.303,10	8.250,30	8.982,35	4.572,89	4.779,54	5.002,70
19	Kota Pariaman	5.258,65	5.881,85	6.435,12	3.669,62	3.836,54	4.018,87
SUMATERA BARAT		253.101,27	285.378,63	312.770,28	175.000,50	182.629,54	191.071,35
NASIONAL		16.976.690,80	19.588.445,60	20.892.400	11.120.077,90	11.710.397,80	12.301.400

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Meskipun nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun kontribusinya masih kecil jika dibandingkan dengan besaran persentase untuk Nasional dan Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Sumatera Barat belum terlalu strategis di pulau Sumatera apalagi jika dibandingkan dengan Nasional. Laju pertumbuhan dan PRDB Provinsi Sumatera Barat didukung dengan provinsi dengan jumlah penduduk dan wilayah yang lebih besar antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung. Berdasarkan data BPS, bahwa PDRB ADHK Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar Rp.191.071,32 milyar atau hanya sekitar 7,34% dari total PDRB ADHK pulau Sumatera atau hanya sekitar 1,55 % dari total PDB ADHK nasional. Begitupun jika dinilai dengan PDRB ADHB Sumatera Barat yang pada tahun 2023 sebesar Rp. 312.770,28 milyar atau hanya sekitar 6,92 % dari total PDRB ADHB pulau Sumatera atau hanya sekitar 1,5 % dari total PDB Nasional yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14

Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023.

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. Milyar)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)
1	Aceh	4.23	146.932	227.110
2	Sumatera Utara	5,01	602.236	1.050.995
3	Sumatera Barat	4.62	191.071	312.770
4	Riau	4.21	551.828	1.026.472
5	Jambi	4,66	169.269	293.729
6	Sumatera Selatan	5.08	360.911	629.100
7	Bengkulu	4.26	52.041	96.551
8	Lampung	4.55	269.241	448.880
9	Kep.Bangka Belitung	4.38	60.338	102.636
10	Kep.Riau	5,20	200.044	331.890
SUMATERA		4,69	2.603.911	4.520.134
NASIONAL		5,05	12.301.400	20.892.400

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari nilai PDRB baik ADHK maupun ADHB tersebut jika dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka dihasilkan nilai PDRB per kapita. Nilai ini menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk per kapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat jika dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Rp. 31,42 juta pada tahun 2019, selanjutnya kondisi pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan PDRB per kapita ADHK berkontraksi ke angka Rp. 30,69 juta dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar Rp.31,36 juta hingga tahun 2023 mencapai angka Rp.33,19 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan tiap penduduk Sumatera Barat secara rata-rata telah mencapai angka Rp. 33 juta lebih per tahunnya.

Jika mempertimbangkan adanya kenaikan harga produksi serta inflasi, maka yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dengan tetap dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka PDRB per kapita Sumatera Barat berdasarkan ADHB pada tahun 2019 mencapai Rp.44,88 juta dan turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 43,83 juta, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 54,33 juta. Adapun perkembangan capaian PDRB per kapita di Sumatera Barat berdasarkan ADHK dan ADHB Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (Rp. juta)	172.205.571,30	169.426.614,1	175.000.501,95	182.629.542,51	191.071.350,94
PDRB ADHB (Rp. juta)	245.949.737,1	241.894.127,68	253.101.276,47	285.378.639,98	312.770.276,68
Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	5.479.491	5.519.463	5.580.232	5.640.629	5.757.205
PDRB Per Kapita ADHK (Rp.)	31.427.293,39	30.696.213,40	31.360.793,23	32.377.513,66	33.188.210
PDRB Per Kapita ADHB (Rp)	44.885.508,01	43.825.663,42	45.356.765,90	50.593.407,22	54.326.760

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2024

Sedangkan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 juga banyak didorong oleh wilayah administrasi Kota dibandingkan dengan Kabupaten. Pada tahun 2023, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian tertinggi yakni pada Kota Bukittinggi sebesar Rp.89,74 juta sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.55,38 juta, dan capaian terendah untuk PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian terendah yakni pada Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.34,31 juta sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.20,19 juta. Secara lebih rinci capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023 dapat terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.16
PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	50,12	53,18	54,80	60,91	64,70
2	Kab. Pesisir Selatan	30,11	28,04	29,29	32,14	34,31
3	Kab. Solok	36,20	34,77	35,96	39,66	42,72
4	Kab. Sijunjung	38,15	38,99	40,31	44,39	47,91
5	Kab. Tanah Datar	37,53	35,09	36,36	40,01	42,90
6	Kab. Padang Pariaman	50,95	41,72	42,61	50,88	55,54
7	Kab. Agam	41,60	38,63	39,96	44,05	47,41
8	Kab. Lima Puluh Kota	40,60	40,59	41,96	46,09	49,45
9	Kab. Pasaman	31,46	30,02	31,12	33,79	36,27
10	Kab. Solok Selatan	32,24	30,54	31,25	34,08	36,78
11	Kab. Dharmasraya	41,17	44,98	46,51	52,12	55,63
12	Kab. Pasaman Barat	34,31	35,46	36,51	40,42	43,43
13	Kota Padang	65,13	68,50	71,35	79,37	84,53
14	Kota Solok	56,47	55,29	57,09	63,19	67,60
15	Kota Sawahlunto	58,61	56,29	58,62	66,10	71,21
16	Kota Padang Panjang	64,18	61,92	64,08	70,64	76,31
17	Kota Bukittinggi	65,89	71,39	74,23	83,34	89,74
18	Kota Payakumbuh	49,87	49,10	51,72	57,56	62,02
19	Kota Pariaman	56,12	53,20	55,18	60,81	66,20
	Sumatera Barat	44,88	43,86	45,43	50,52	54,33
	NASIONAL	59,31	57,27	62,23	71,03	75,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2.17
PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	32,36	33,83	34,41	35,70	36,31
2	Kab. Pesisir Selatan	20,55	18,84	19,21	19,71	20,19
3	Kab. Solok	26,41	25,08	25,67	26,52	27,16
4	Kab. Sijunjung	28,18	28,52	29,05	29,81	30,65
5	Kab. Tanah Datar	27,76	25,81	26,47	27,39	28,04
6	Kab. Padang Pariaman	31,96	27,78	28,17	29,89	30,44
7	Kab. Agam	29,59	27,31	27,97	28,70	29,49
8	Kab. Lima Puluh Kota	29,09	28,90	29,64	30,62	31,36
9	Kab. Pasaman	21,82	20,49	20,88	21,43	21,96
10	Kab. Solok Selatan	23,01	21,69	21,96	22,38	23,05
11	Kab. Dharmasraya	30,08	32,74	33,34	34,25	34,96
12	Kab. Pasaman Barat	25,43	26,18	26,77	27,50	28,19
13	Kota Padang	46,39	48,07	49,51	35,70	52,30
14	Kota Solok	40,13	38,80	39,44	19,72	41,36
15	Kota Sawahlunto	44,55	42,50	43,08	26,53	45,34
16	Kota Padang Panjang	47,67	45,34	46,19	29,82	49,12

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
17	Kota Bukittinggi	46,62	50,02	51,51	27,40	55,38
18	Kota Payakumbuh	32,80	31,75	32,38	29,70	34,54
19	Kota Pariaman	40,27	37,76	38,51	28,80	41,34
	Sumatera Barat	31,43	30,69	31,36	32,38	33,19
	NASIONAL	40,84	39,77	40,78	42,46	44,10

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

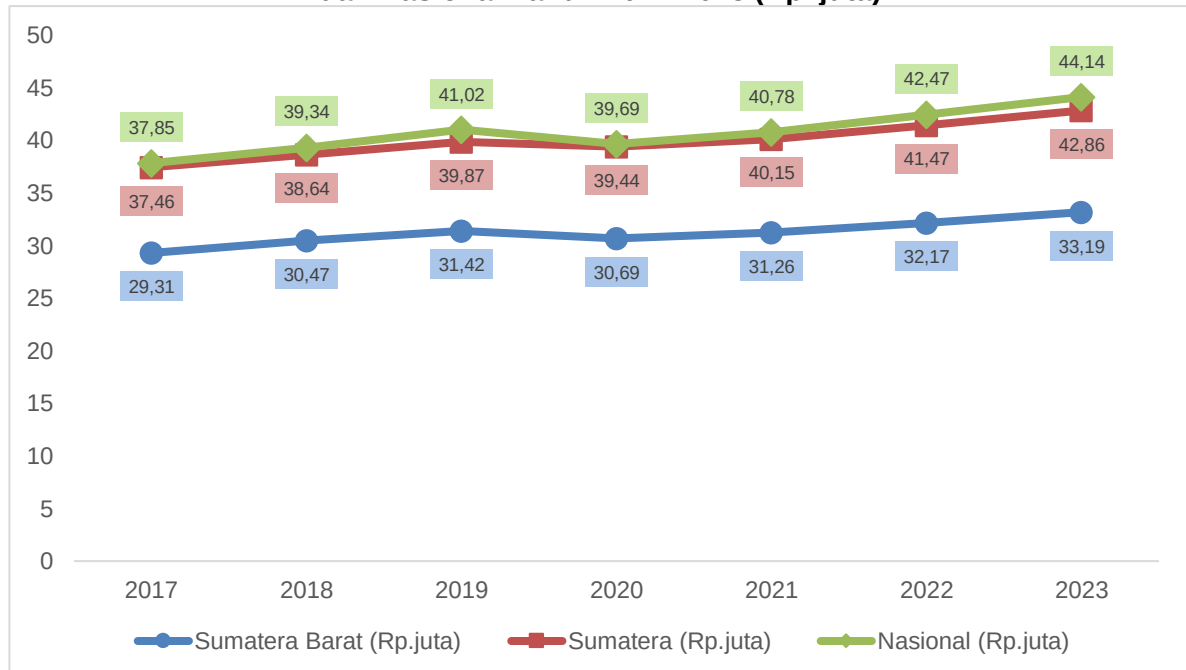
Angka capaian PDRB ADHK dan PDRB ADHB per kapita Sumatera Barat jika dibandingkan dengan rata-rata di regional Sumatera maupun Nasional masih relative rendah. PDRB Perkapita yang tertinggi di Provinsi Riau dengan capaian di tahun 2023 sebesar Rp.83,07 juta berdasarkan ADHK dan sebesar Rp.154,52 juta berdasarkan ADHB, PDRB per kapita terendah yakni di Provinsi Bengkulu dengan capaian di tahun 2023 berdasarkan ADHK sebesar Rp.24,95 juta dan berdasarkan ADHB mencapai Rp.46,29 juta. Secara lebih rinci perkembangan PDRB per kapita masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2021 - 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera dan perbandingan dengan Nasional Tahun 2021-2023

No	Provinsi	PDRB Perkapita (Rp.Ribu)					
		ADHK			ADHB		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Aceh	25.356	26.062	26.800	34.674	38.900	41.424
2	Sumatera Utara	36.582	37.781	39.140	57.442	62.922	68.306
3	Sumatera Barat	31.265	32.167	33.188	45.218	50.264	54.327
4	Riau	78.319	80.774	83.071	129.741	151.259	154.522
5	Jambi	42.898	44.515	46.007	64.771	76.164	79.836
6	Sumatera Selatan	38182	39.719	41.278	57.745	68.237	71.950
7	Bengkulu	23.546	24.238	24.948	39.167	43.757	46.285
8	Lampung	27.150	27.974	28.907	40.807	44.984	48.194
9	Kep.Bangka Belitung	37.621	38.744	39.909	58.406	63.872	67.885
10	Kep.Riau	86.585	89.637	92.930	131.884	145.579	154.179
	SUMATERA	40.135	41.467	42.858	62.089	70.317	74.398
	NASIONAL	40.781	42.471	44.139	62.259	71.043	74.965

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 2.6
Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera, dan Nasional Tahun 2017-2023 (Rp. juta)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 52,09 %. Penyumbang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 29,52 % dan pengeluaran konsumsi pemerintah 9,38 %. Laju pertumbuhan dan distribusi menurut pengeluaran Tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Pengeluaran
Tahun 2019-2023 (persen)

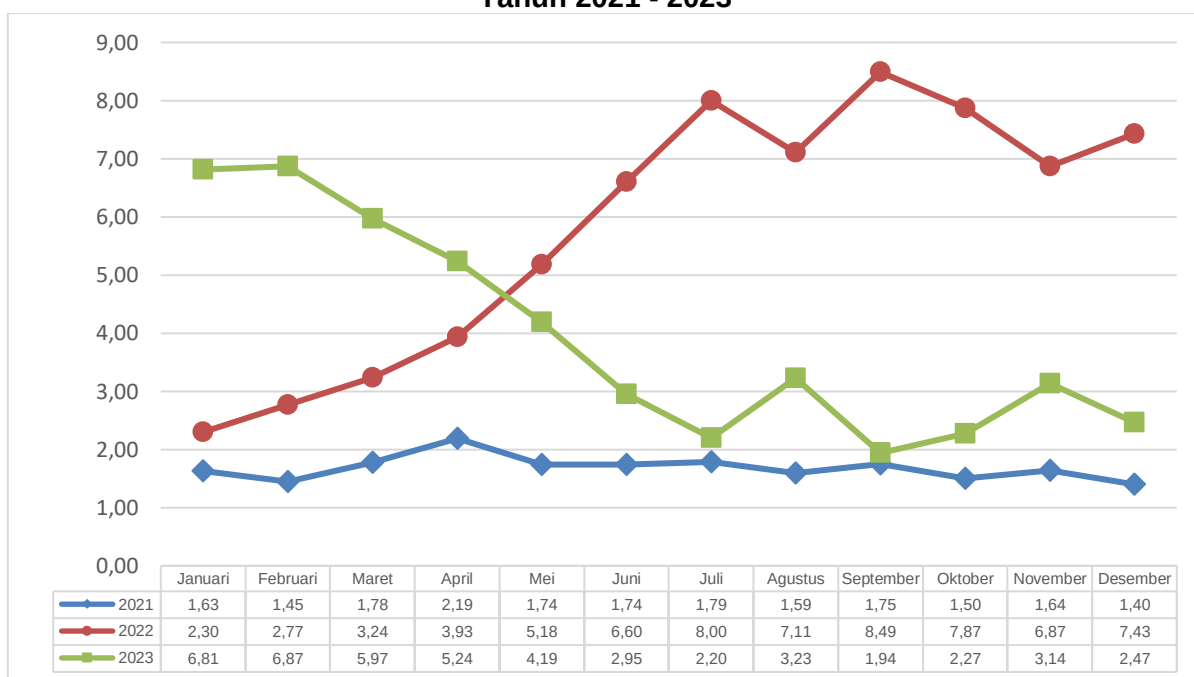
Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010					Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,74	-2,47	1,97	4,12	3,22	54,41	54,11	53,80	53,32	52,09
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	11,85	-4,39	1,79	-0,53	6,79	1,14	1,12	1,10	1,03	1,04
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,00	-8,94	0,33	-3,13	0,39	12,58	11,80	11,65	10,22	9,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,16	-2,70	1,33	3,71	7,70	30,11	30,01	29,77	29,22	29,52
Perubahan Inventori	-60,75	261,03	0,91	121,21	-	0,04	0,15	0,14	0,30	-0,27
Net Ekspor Barang & Jasa	6,12	18,31	20,49	13,31	11,55	1,72	2,82	3,53	5,91	8,24
PDRB SUMATERA BARAT	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62	100	100	100	100	100

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

B. Laju Inflasi

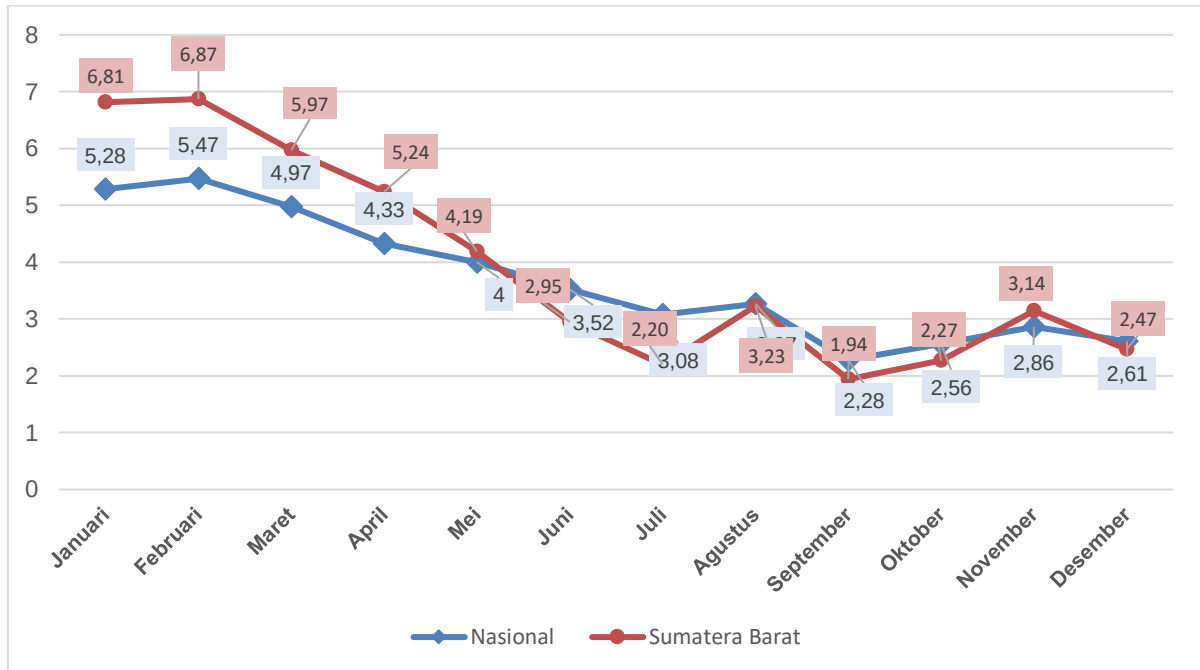
Inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang yang beredar di pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. . Pada tahun 2021, tingkat Inflasi di Sumatera Barat terjaga paling tinggi 2,19 di bulan Mei dan meningkat tajam pada tahun 2022 dengan capaian paling tinggi 8,49 di bulan September, dan kembali menurun pada tahun 2023 hingga menjadi sebesar 2,47 pada bulan Desember. Berikut perkembangan Laju Inflasi Kalender 2023 di Sumatera Barat sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.7
Perkembangan Inflasi Year on Year Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat
Tahun 2021 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Grafik 2.8
Perkembangan Inflasi Year on Year Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan Berita Resmi Statistik bahwa pada Desember 2023, inflasi *Year on Year* (yoy) Kota Padang sebesar 2,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,62 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,88 persen dengan IHK sebesar 117,02 sehingga secara agregat, inflasi *Year on Year* gabungan 2 kota sebesar 2,47 persen dengan IHK sebesar 117,55.

Inflasi y-on-y Gabungan 2 Kota terjadi karena adanya kenaikan IHK pada 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,93 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,14 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,89 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok transportasi sebesar 1,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,58 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen. yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2023. Tahun Kalender 2023. dan Year on Year
menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2021	IHK Des 2022	IHK Des 2023	Tingkat Inflasi Des 2023 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023 (%)
1	Makanan, Minuman, Tembakau	108,80	119,02	124,89	0,26	4,93
2	Pakaian dan Alas Kaki	103,51	105,65	107,12	0,04	1,39
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	102,48	106,38	106,98	-0,25	0,56
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	108,61	115,93	116,60	0,00	0,58
5	Kesehatan	111,24	113,56	115,71	0,06	1,89
6	Transportasi	106,19	123,87	125,44	1,31	1,27
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,88	103,05	103,25	0,04	0,19
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	119,92	123,48	125,77	0,00	1,85
9	Pendidikan	104,63	107,07	109,77	0,00	2,52
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,87	112,88	114,21	0,05	1,18
11	Perawatan Pribadi dan jasa Lainnya	114,45	121,29	126,21	0,47	4,14
	Umum	106,79	114,72	117,55	0,28	2,47

Sumber : BRS BPS Sumatera Barat 2024

Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Desember 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen; kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang masing-masing sebesar 0,02 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Secara m-to-m, kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Desember 2023 adalah kelompok transportasi sebesar 0,20 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,08 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,03 persen. Selanjutnya, kelompok yang memberikan andil deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan

budaya; kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil yang tidak dominan.

Tabel 2.21
Andil Inflasi/Deflasi menurut Kelompok Pengeluaran Gabungan 2 Kota.
Desember 2023 (2018=100)

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Month to Month (Mtm) (%)	Andil Year on Year (yoy) (%)
1	Makanan. Minuman. Tembakau	0,26	4,93
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,04	1,39
3	Perumahan. Air. Listrik. dan Bahan Bakar	-0,25	0,56
4	Perlengkapan. Peralatan. dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	0,58
5	Kesehatan	0,06	1,89
6	Transpotasi	1,31	1,27
7	Informasi. Komunikasi. dan Jasa Keuangan	0,04	0,19
8	Rekreasi. Olahraga. dan Budaya	0,00	1,85
9	Pendidikan	0,00	2,52
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,05	1,18
11	Perawatan Pribadi dan jasa Lainnya	0,47	4,14
	Umum	0,28	2,47

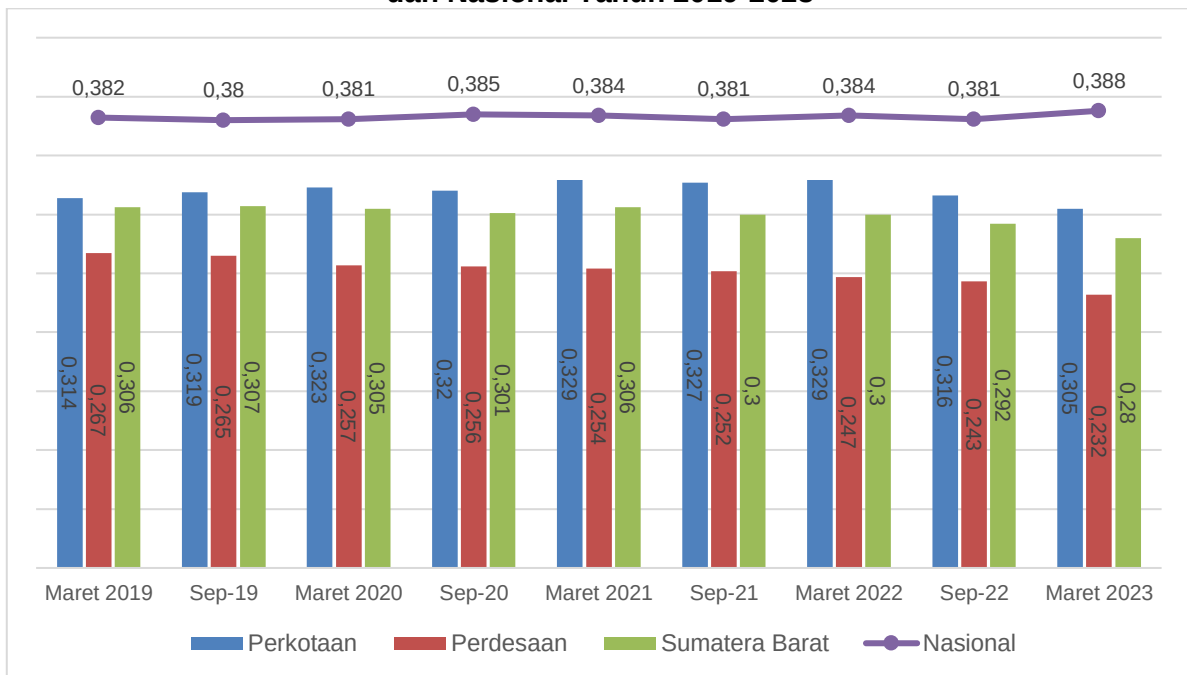
Sumber : BPS Sumatera Barat 2024

C. Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini ratio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; jika nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat walau fluktuatif, namun terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 dan secara umum berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari angka capaian, baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada dalam kategori moderat atau sedang. Pencapaian Gini Ratio Sumatera Barat pada tahun 2022 kondisi bulan Maret adalah sebesar 0.300 dan mengalami penurunan pada Maret 2023 menjadi 0,280, sedikit lebih baik sedikit dibandingkan capaian Gini Ratio pada tahun 2021 sebesar 0.306 (menurun sebesar 0.012 poin). Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9
Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Pada Maret 2023, Gini Ratio perkotaan adalah 0,305 turun 0,011 poin dibandingkan periode September 2022 yang sebesar 0,316. Di daerah perdesaan, kondisi Maret 2023 merupakan capaian paling rendah yakni sebesar 0,232. Rendahnya ketimpangan di perdesaan salah satunya diakibatkan masih homogenya kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas masih bergera pada sektor pertanian. Sedangkan di Perkotaan, dengan basis ekonomi yang didominasi dengan Perdagangan dan jasa sehingga aktifitas ekonomi masyarakat cenderung variatif sehingga juga mengakibatkan tingkat pendapatan antara penduduk juga akan sangat berbeda.

Salah satu upaya yang lain yang dapat dilakukan untuk menekan angka ketimpangan pendapatan (gini ratio), yakni belanja modal pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur agar tidak difokuskan pada wilayah perkotaan saja. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dilakukan secara merata di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Kawasan Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi nomor 2 terendah dengan nilai Gini Ratio pada tahun 2023 per bulan Maret sebesar 0,280 dan Provinsi Kepulauan Belitung merupakan Provinsi di Sumatera dengan nilai Gini Ratio paling rendah yaitu sebesar 0,245.

Tabel 2.22
Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2020-2023

NO	PROVINSI	2020		2021		2022		2023
		MARET	SEPT	MARET	SEPT	MARET	SEPT	MARET
1	Aceh	0.323	0.319	0.324	0.323	0.311	0.291	0.296
2	Sumatera Utara	0.316	0.314	0.314	0.313	0.312	0.326	0.309
3	Sumatera Barat	0.305	0.301	0.306	0.300	0.300	0.292	0.280
4	Riau	0.329	0.321	0.326	0.327	0.326	0.323	0.324
5	Jambi	0.320	0.316	0.321	0.315	0.320	0.335	0.343
6	Sumatera Selatan	0.339	0.338	0.341	0.340	0.339	0.330	0.338
7	Bengkulu	0.334	0.323	0.326	0.321	0.315	0.315	0.333
8	Lampung	0.327	0.320	0.323	0.314	0.314	0.313	0.324
9	Kep. Bangka Belitung	0.262	0.257	0.256	0.247	0.236	0.255	0.245
10	Kepulauan Riau	0.339	0.334	0.343	0.339	0.342	0.325	0.340
INDONESIA		0.381	0.385	0.384	0.381	0.384	0.381	0.338

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gini Ratio di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya dapat diukur pada kondisi Bulan maret setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2023 yakni di Kota Payakumbuh dengan capaian 0,316 dan juga Kota Padang dengan capaian 0.312, sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0.194 dan Kabupaten Solok dengan capaian 0,235. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Indeks Gini Ratio menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	0.306	0.305	0.321	0.233	0.259
2	Kab. Pesisir Selatan	0.336	0.273	0.253	0.246	0.259
3	Kab. Solok	0.246	0.264	0.246	0.243	0.235
4	Kab. Sijunjung	0.285	0.277	0.270	0.243	0.263
5	Kab. Tanah Datar	0.293	0.269	0.250	0.251	0.260
6	Kab. Padang Pariaman	0.278	0.273	0.269	0.245	0.257
7	Kab. Agam	0.297	0.257	0.272	0.298	0.255
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.251	0.278	0.244	0.208	0.194
9	Kab. Pasaman	0.238	0.222	0.248	0.230	0.243
10	Kab. Solok Selatan	0.330	0.310	0.277	0.253	0.271
11	Kab. Dharmasraya	0.295	0.307	0.268	0.287	0.291
12	Kab. Pasaman Barat	0.278	0.280	0.261	0.277	0.238
13	Kota Padang	0.283	0.258	0.343	0.354	0.312
14	Kota Solok	0.312	0.312	0.277	0.288	0.256
15	Kota Sawahlunto	0.271	0.286	0.295	0.314	0.308
16	Kota Padang Panjang	0.289	0.300	0.306	0.296	0.273
17	Kota Bukittinggi	0.322	0.394	0.286	0.317	0.255
18	Kota Payakumbuh	0.267	0.265	0.316	0.311	0.316
19	Kota Pariaman	0.276	0.325	0.301	0.272	0.289
	Sumatera Barat	0.306	0.305	0.306	0.300	0.280

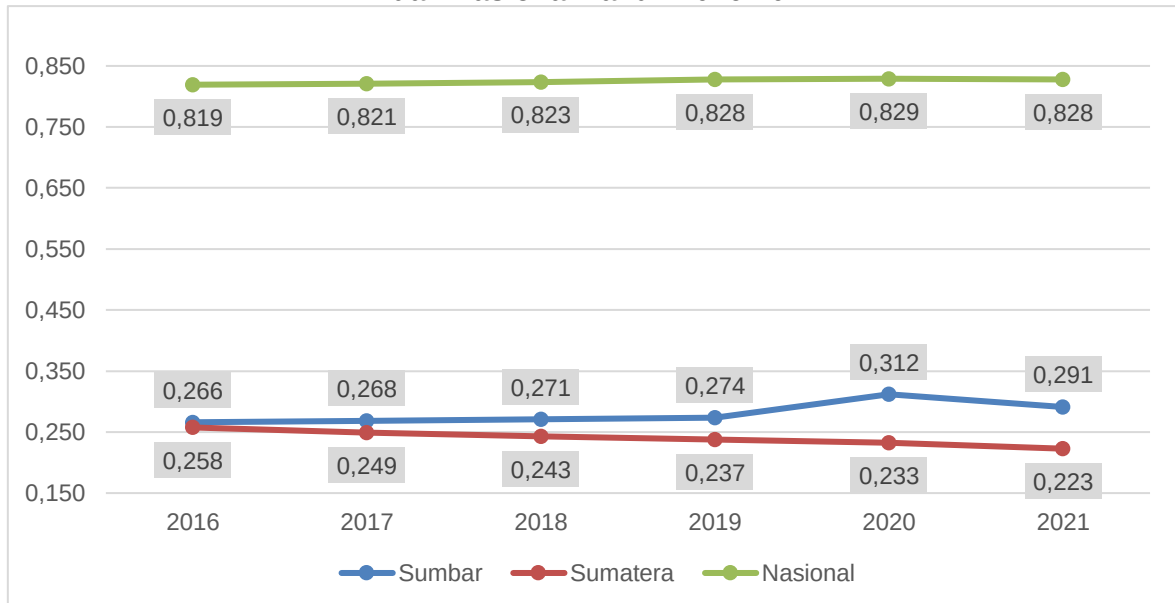
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

D. Ketimpangan Wilayah

Ukuran ketimpangan dengan indikator *Gini Ratio* hanya mengukur ketimpangan dari segi pendapatan masyarakat. Indikator ini tidak berbicara terkait ketimpangan secara wilayah. Ukuran ketimpangan wilayah pada umumnya ditunjukkan dengan Indeks Williamson. Indeks Williamson atau tingkat disparitas berada diantara nilai nol dan satu, semakin mendekati nilai 0 berarti tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di suatu provinsi semakin rendah atau terjadi pemerataan pendapatan antarkabupaten/kota, sebaliknya jika Indeks Williamson mendekati 1 berarti tingkat disparitas antar kabupaten/kota di suatu provinsi semakin tinggi atau diindikasikan terjadi ketidak merataan pendapatan kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat diukur dengan menggunakan data PDRB ADHK per kapita masing-masing kabupaten. Data termutakhir yang diperoleh menunjukkan ketimpangan wilayah cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274 dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Kondisi pandemi COVID-2019 pun memperparah ketimpangan hingga angkanya naik menjadi 0,312. Sementara itu tingkat ketimpangan yang ada di regional Sumatera cenderung berkurang dari 0,258 pada tahun 2016 menjadi 0,233 pada tahun 2020. Ketimpangan wilayah yang tinggi justru terjadi pada level nasional. Indeks Williamson Nasional pada tahun 2016 menunjukkan angka 0,819 berada dalam kondisi stabil. Kondisi tahun 2021 tingkat ketimpangan wilayah cenderung berkurang baik di level nasional, regional, dan local, tercatat tingkat ketimpangan di Nasional sebesar 0,828, di regional sumatera sebesar 0,223 dan di Sumatera Barat mencapai 0,291. Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan wilayah Nasional diprediksi akan semakin berkurang, hal ini di dukung dengan telah dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mengurangi beban Provinsi DKI Jakarta selain sebagai pusat bisnis juga sebagai Pusat Pemerintahan, serta adanya fokus Presiden yang membangun dari pinggiran/perdesaan. Di pulau Sumatera juga dengan telah beroperasinya Tol Trans Sumatera yang dipercaya sebagai kunci konektivitas yang terhubung dari Aceh hingga Lampung, saat ini telah beroporasi sepanjang 738,46 km yang terdiri atas 12 ruas tol. Dan di Sumatera Barat juga telah di bangun beberapa ruas baru yang menghubungkan antara Kabupaten/Kota sebagai peningkatan akses untuk mendukung kegiatan perekonomian dan pertanian, serta memperlancar akses distribusi barang dan orang.

Grafik 2.10
Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera
dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : BPS, 2021 *Tahun 2021 Angka Prediksi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

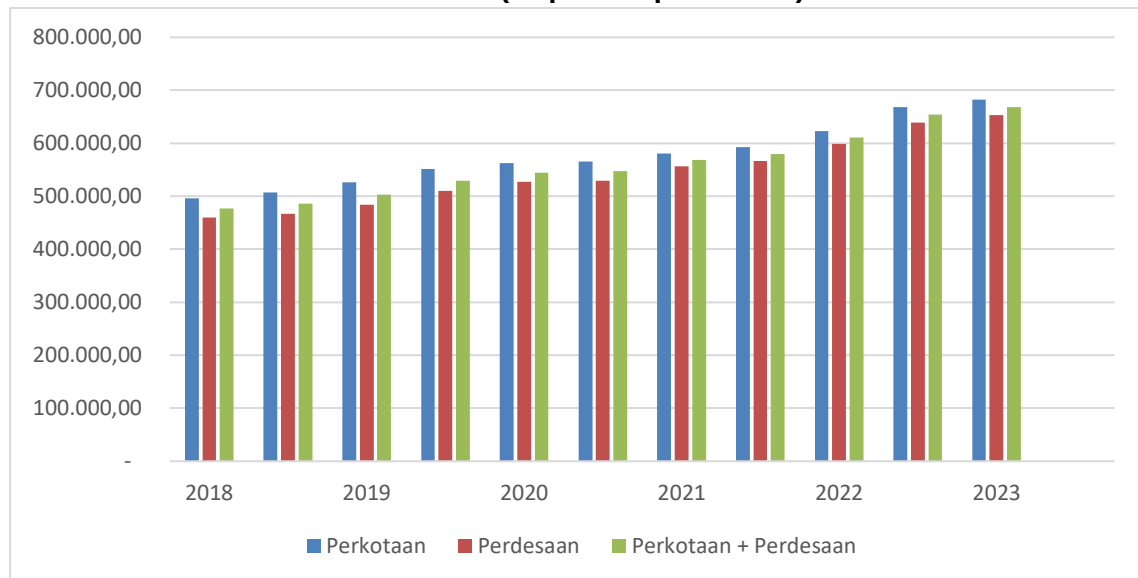
E. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan memiliki definisi dan konsep yang sulit dirumuskan karena memiliki sifat dan penyebab yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi kemiskinan merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan tetapi dalam kenyataannya selalu menjadi permasalahan besar bagi suatu daerah, baik itu pada daerah perkotaan maupun pada daerah perdesaan. Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ialah standar minimum yang diperlukan seseorang dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan dan bukan pangan. Lebih lanjut menurut BPS, masalah kemiskinan dapat berhubungan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti kondisi pendidikan, sosial demografi, perumahan dan ketenagakerjaan. Dengan mengetahui kondisi karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan atau program yang tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.

Ukuran garis kemiskinan antar daerah tempat tinggal baik perkotaan dan perdesaan juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat pada periode Maret dan September serta setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.11
Garis Kemiskinan antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Garis kemiskinan berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, hal ini dipahami karena harga kebutuhan hidup di perkotaan juga lebih tinggi di perdesaan terutama terkait dengan pemenuhan pangan, hal ini mengingat daerah perkotaan pada umumnya tidak berbasiskan pada sektor pertanian, begitupun juga dengan kebutuhan non pangan untuk di daerah perkotaan seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, biaya transportasi dan komunikasi dan lainnya juga lebih tinggi hal ini karena jumlah penduduk di perkotaan yang lebih padat dibandingkan perdesaan menyebabkan ketersediaan lahan terbatas, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan juga terbatas yang akhirnya menyebabkan biaya tinggi, disamping itu tingkat mobilitasi dan tuntutan pekerjaan di daerah perkotaan yang sangat dinamis menyebabkan banyaknya kebutuhan non pangan lainnya yang harus dipenuhi seperti penyediaan biaya komunikasi, dan transportasi.

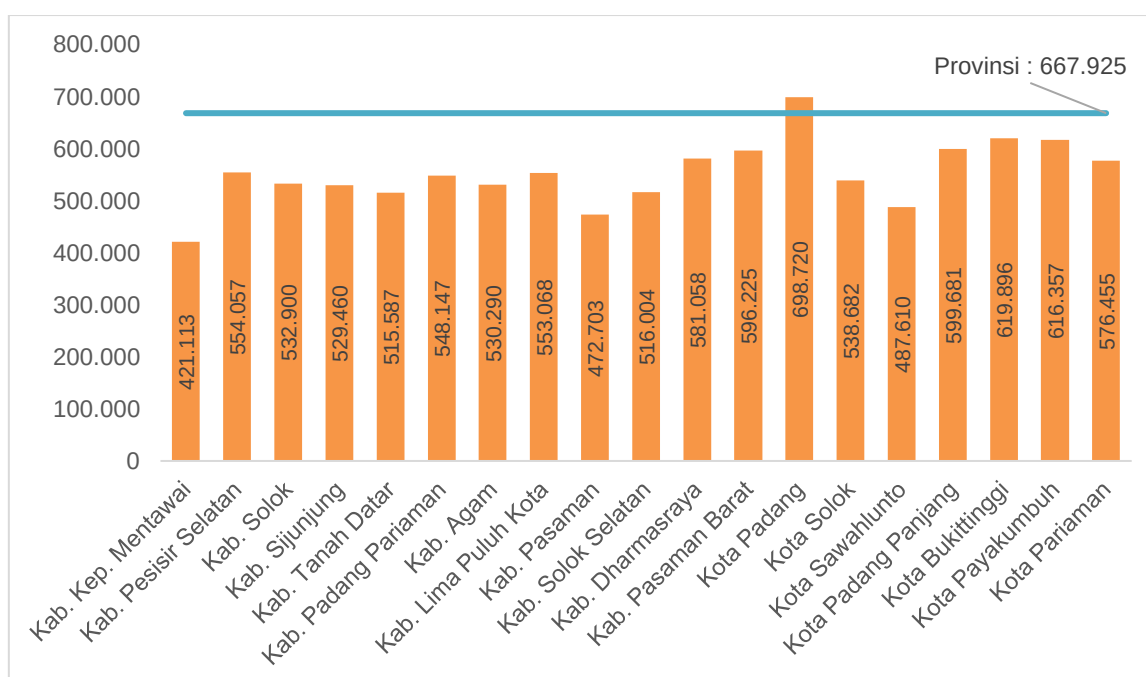
Kondisi ini tercermin dengan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam indeks Garis Kemiskinan baik di daerah administrasi Kota yang berbasiskan perkotaan dengan daerah Kabupaten yang pada umumnya didominasi dengan basisnya perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	310.033	340.191	356.403	386.152	421.113
2	Kab. Pesisir Selatan	431.817	467.743	491.573	526.564	554.057
3	Kab. Solok	415.649	451.906	461.030	484.358	532.900
4	Kab. Sijunjung	400.861	433.147	455.346	484.572	529.460
5	Kab. Tanah Datar	379.041	420.049	441.793	466.907	515.587
6	Kab. Padang Pariaman	411.182	455.463	475.342	499.461	548.147
7	Kab. Agam	379.304	424.728	444.711	485.222	530.290
8	Kab. Lima Puluh Kota	403.030	451.295	475.123	504.670	553.068
9	Kab. Pasaman	347.153	388.726	408.293	431.915	472.703
10	Kab. Solok Selatan	387.438	419.442	438.187	470.090	516.004
11	Kab. Dharmasraya	439.117	477.421	503.183	530.693	581.058
12	Kab. Pasaman Barat	417.742	467.769	492.467	544.829	596.225
13	Kota Padang	534.857	570.654	602.540	634.581	698.720
14	Kota Solok	440.618	450.254	464.977	491.488	538.682
15	Kota Sawahlunto	374.615	399.688	412.757	443.301	487.610
16	Kota Padang Panjang	450.377	491.142	516.648	543.609	599.681
17	Kota Bukittinggi	475.755	519.470	540.457	570.032	619.896
18	Kota Payakumbuh	482.184	526.490	543.335	573.234	616.357
19	Kota Pariaman	446.514	480.028	495.386	522.932	576.455
	Sumatera Barat	503.652	544.315	568.703	610.941	667.925

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Grafik 2.12
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi
Tahun 2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)



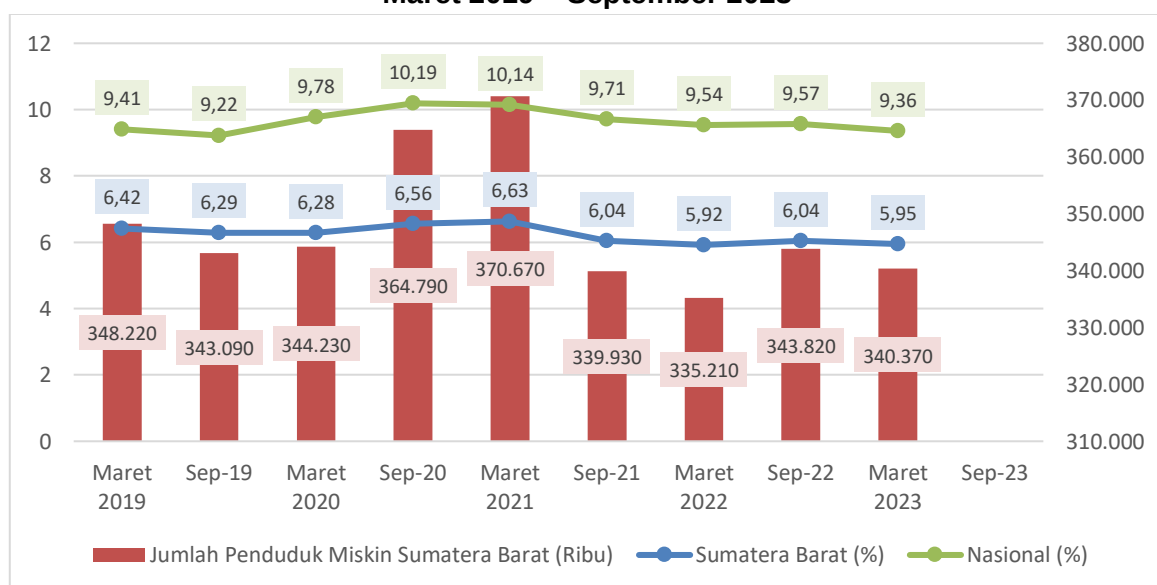
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Indeks Garis Kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 hanya berada di Kota Padang. Pada tahun 2023, Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang telah sebesar Rp.698.720 perkapita perbulan. Sedangkan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Indeks Garis Kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat berada di Kota Padang sehingga indeks garis kemiskinan provinsi sangat dipengaruhi oleh indeks garis kemiskinan yang dibentuk di Kota Padang.

Secara umum, pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada Maret 2019 sebesar 6,42% dan mengalami penurunan terendah menjadi 5,92% pada bulan Maret 2022, namun kembali mengalami peningkatan pada kondisi September 2022 sebesar 6,04% dan 5.95% pada kondisi Maret 2023. Selama kurun tersebut, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat juga dapat diturunkan dari dari 348.22 ribu jiwa (Maret 2019), menjadi 340,37 ribu jiwa (Maret 2023).

Capaian Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selalu berada di bawa rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan nasional pada kondisi Maret tahun 2019 sebesar 9,41%, mengalami kenaikan akibat dampak pandemic covid 19 menjadi 10,19% pada September 2020 namun seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan nasional kondisi Maret tahun 2023 mencapai 9,36%. Adapun perbandingan grafik capaian Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat dan Nasional serta perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.13
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2019 – September 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Provinsi yang berada di Pulau Sumatera maka capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sejak tahun 2019-2023 relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sejak adanya pandemi Covid 19 di awal Tahun 2020, maka secara signifikan dan merata seluruh capaian tingkat kemiskinan di Provinsi se Sumatera mengalami kenaikan terutama pada kondisi September 2020 dan Maret 2021, dan secara bersamaan juga mengalami penurunan pada capaian Maret 2021 hingga kondisi Maret 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera
Tahun 2019-2023 (Persen)

PROVINSI	2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
ACEH	15,32	15,01	14,99	15,43	15,33	15,53	14,64	14,75	14,45
SUMATERA UTARA	8,83	8,63	8,75	9,14	9,01	8,49	8,42	8,33	8,15
SUMATERA BARAT	6,42	6,29	6,28	6,56	6,63	6,04	5,92	6,04	5,95
RIAU	7,08	6,90	6,82	7,04	7,12	7,00	6,78	6,84	6,68
JAMBI	7,60	7,51	7,58	7,97	8,09	7,67	7,62	7,70	7,58
SUMATERA SELATAN	12,71	12,56	12,66	12,98	12,84	12,79	11,90	11,95	11,78
BENGKULU	15,23	14,91	15,03	15,30	15,22	14,43	14,62	14,34	14,04
LAMPUNG	12,62	12,30	12,34	12,76	12,62	11,67	11,57	11,44	11,11
KEP. BANGKA BELITUNG	4,62	4,50	4,53	4,89	4,90	4,67	4,45	4,61	11,11
KEP. RIAU	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69
INDONESIA	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,54	9,57	9,36

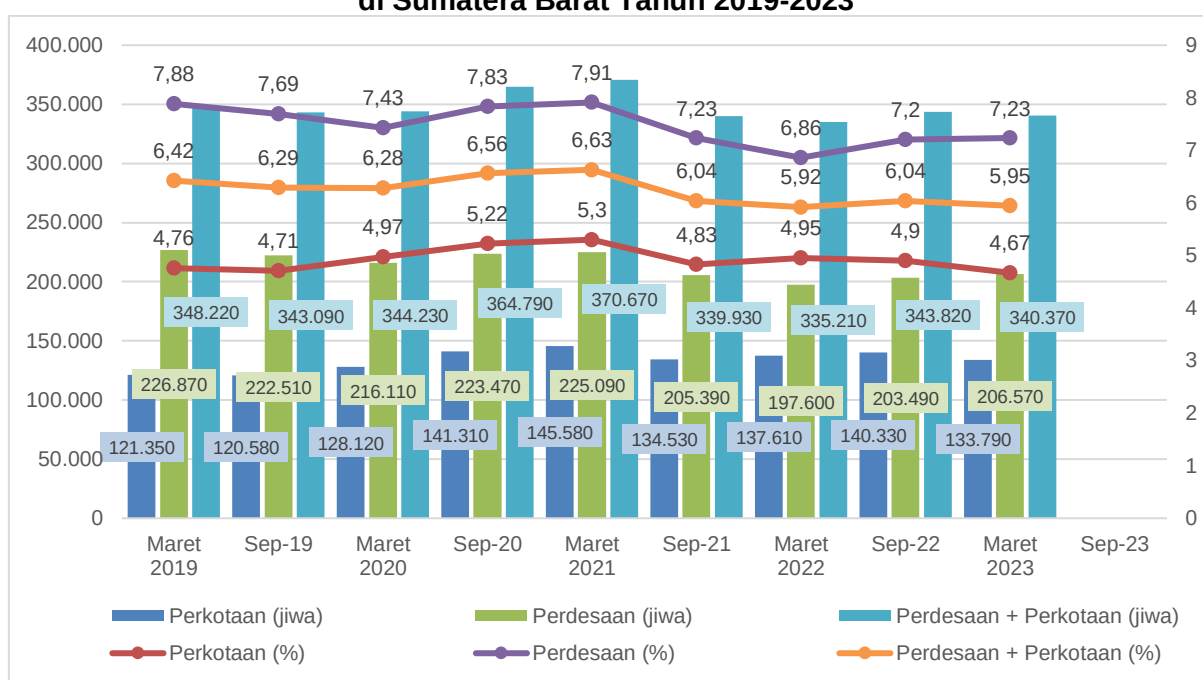
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Jika dirinci berdasarkan karakteristik wilayahnya, penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat lebih besar proporsinya bertempat tinggal di kawasan perdesaan. Data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa rata-rata sekitar dua per tiga penduduk miskin bermukim di kawasan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena kemiskinan erat kaitannya dengan kawasan perdesaan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 lalu justru lebih banyak berdampak ke peningkatan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan. Tingkat kemiskinan perkotaan naik dari 4,71% di kondisi September tahun 2019 ke angka 5,22% di September tahun 2020 atau naik 0,51% dan mengalami kenaikan kembali pada kondisi Maret 2021 menjadi 5,30% atau naik dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 0,08%, sedangkan tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan pada kondisi September 2019 sebesar 7,69% meningkat menjadi 7,83% di September 2020 atau naik sebesar 0,14% dan terus mengalami kenaikan di kondisi Maret 2021 menjadi 7,91%.

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi Covid 19 pada Maret 2020 hingga awal tahun 2021 lebih cenderung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya secara signifikan tingkat kemiskinan di Perkotaan pada kondisi Maret 2022 sebesar 4,95%, begitupun pada daerah Perdesaan juga mengalami penurunan pada kondisi Maret 2022 menjadi 6,86%. Namun pada kondisi September 2023, tingkat kemiskinan di Perdesaan mengalami peningkatan menjadi 7,23% dibandingkan daerah perkotaan justru mengalami penurunan menjadi lebih baik di angka 4,67%.

Grafik 2.14
Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Tempat
di Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara

penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam.

Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN + PERDESAAN
P1			
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
September 2022	0,782	0,943	0,862
Maret 2023	0,687	0,956	0,821
P2			
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,233	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,164
September 2022	0,168	0,180	0,174
Maret 2023	0,154	0,200	0,177

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sepertiga jumlah penduduk miskin berada pada daerah perdesaan yang dominan berada pada wilayah Kabupaten, sedangkan daerah perkotaan cenderung lebih kecil. Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat pada tahun 2023, yaitu sebanyak 41.97 ribu jiwa, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 35.09 ribu jiwa dan Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 33.52 ribu jiwa.

Meskipun Kota Padang dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat namun dari tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata Provinsi dengan capaian tahun 2023 sebesar 4,17%. Capaian tingkat kemiskinan paling tinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13.76%. Adapun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Jumlah penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)
Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	13,22	13,37	14,31	13,74	13,76
2	Kab. Pesisir Selatan	36,51	35,46	37,41	33,78	35,09
3	Kab. Solok	29,74	29,28	30,36	27,16	27,33
4	Kab. Sijunjung	16,65	16,28	16,81	15,07	15,02
5	Kab. Tanah Datar	16,20	15,34	15,89	14,91	14,56
6	Kab. Padang Pariaman	29,48	28,98	30,41	26,44	26,93
7	Kab. Agam	33,10	33,31	34,26	31,33	33,41
8	Kab. Lima Puluh Kota	26,64	26,43	28,51	26,00	27,02
9	Kab. Pasaman	20,22	20,29	21,57	19,94	19,99
10	Kab. Solok Selatan	12,49	12,39	13,41	11,81	11,91
11	Kab. Dharmasraya	15,49	15,70	17,60	15,08	15,49
12	Kab. Pasaman Barat	31,53	31,64	34,97	32,91	33,52
13	Kota Padang	42,44	42,17	48,44	42,37	41,97
14	Kota Solok	2,29	1,99	2,31	2,28	2,35
15	Kota Sawahlunto	1,35	1,36	1,52	1,47	1,47
16	Kota Padang Panjang	3,00	2,84	3,28	2,89	2,98
17	Kota Bukittinggi	6,00	6,01	6,98	6,16	5,78
18	Kota Payakumbuh	7,68	7,74	8,66	8,08	7,88
19	Kota Pariaman	4,20	3,66	3,99	3,80	3,91
	Sumatera Barat	348,22	344,23	370,67	335,21	340,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Tabel 2.28
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat (%)
Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	14,43	14,35	14,84	13,97	13,72
2	Kab. Pesisir Selatan	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
3	Kab. Solok	7,98	7,81	8,01	7,12	7,13
4	Kab. Sijunjung	7,04	6,78	6,80	6,00	5,88

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
5	Kab. Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	4,26	4,16
6	Kab. Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
7	Kab. Agam	6,75	6,75	6,85	6,22	6,60
8	Kab. Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
9	Kab. Pasaman	7,21	7,16	7,48	6,85	6,80
10	Kab. Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
11	Kab. Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56
12	Kab. Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	6,93	6,92
13	Kota Padang	4,48	4,40	4,94	4,26	4,17
14	Kota Solok	3,24	2,77	3,12	3,02	3,05
15	Kota Sawahlunto	2,17	2,16	2,38	2,28	2,27
16	Kota Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
17	Kota Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
18	Kota Payakumbuh	5,68	5,65	6,16	5,66	5,44
19	Kota Pariaman	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20
	Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,93
	NASIONAL	9,22	10,19	10,14	9,57	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

F. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Provinsi Sumatera Barat telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 4,34 juta orang, naik sebanyak 206,04 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak 3,02 juta orang (69,61 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 2,84 juta orang penduduk yang bekerja dan 179,51 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 156,16 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 156,76 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 0,60 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Sumatera

Barat pada Agustus 2023 sebesar 69,61 persen, naik 0,31 persen poin dibanding Agustus 2022.

Tabel 2.29
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat 2020-2023

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021		2022		2023	
		Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Org	4.047,44	4.077,63	4.222,98	4.138,95	4.287,70	4.344,99
2. Angkatan Kerja	Ribu Org	2.768,67	2.761,39	2.871,63	2.868,27	2.999,51	3.024,43
• Bekerja	Ribu Org	2.584,12	2.581,44	2.694,60	2.688,16	2.822,54	2.844,93
• Pengangguran	Ribu Org	184,56	179,95	177,21	180,11	176,97	179,50
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Org	1.278,77	1.316,24	1.351,35	1.270,68	1.288,19	1.320,56
4. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	6,67	6,52	6,17	6,28	5,90	5,94
• Perkotaan	%	9,81	8,65	8,27	9,54	8,00	7,32
• Perdesaan	%	3,80	4,50	4,23	3,26	4,01	4,60
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,41	67,72	68,00	69,30	69,96	69,61
• Laki-laki	%	81,25	80,67	80,55	82,58	81,34	82,21
• Perempuan	%	55,85	55,04	55,43	56,28	58,52	56,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2023

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 82,21 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,94 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan 0,37 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,66 persen poin

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sumatera Barat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 33,90 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,60 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,63 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2022 adalah Transportasi dan Pergudangan (0,58 persen poin); Jasa Lainnya (0,54 persen poin); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,45 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Perdagangan Besar dan

Eceran (1,61 persen poin); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,06 persen poin); dan Pertambangan dan Penggalan (0,18 persen poin).

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Sumatera Barat paling banyak berstatus buruh/ karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,53 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha sendiri dibantu buruh tetap yaitu sebesar 4,28 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap mengalami kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 0,81 dan 0,37 persen poin. Status pekerja yang mengalami penurunan adalah status pekerja keluarga/tak dibayar dan pekerja bebas di nonpertanian yang turun masing-masing sebesar 1,64 dan 0,07 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk Sumatera Barat yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,83 juta orang (64,19 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,02 juta orang (35,81 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen poin.

Tabel 2.30
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Sumatera Barat (%)

NO	STATUS PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Kegiatan Formal	37,87	33,72	35,23	34,74	35,81
1	Buruh/karyawan/pegawai	33,76	30,13	31,80	31,27	31,53
2	Berusaha dibantu buruh tetap	4,11	3,59	3,43	3,47	4,28
B	Kegiatan Informal	62,13	66,28	64,77	65,26	64,19
1	Berusaha sendiri	20,82	20,84	21,06	24,32	24,40
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	17,00	18,05	16,62	16,12	16,49
3	Pekerja keluarga/tak dibayar	12,89	16,05	15,32	14,41	12,77
4	Pekerja bebas di pertanian	6,58	6,55	6,76	5,92	5,85
5	Pekerja bebas di non pertanian	4,85	4,79	5,01	4,48	4,68

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 31,62%. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 17,03%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja

berpendidikan Sekolah Menengah Atas mengalami penurunan persentase terbesar yaitu 0,86% poin. Sementara penduduk bekerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan persentase terbesar yaitu turun 0,12% poin.

Tabel 2.31
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2019- 2023 (Agustus) (%)

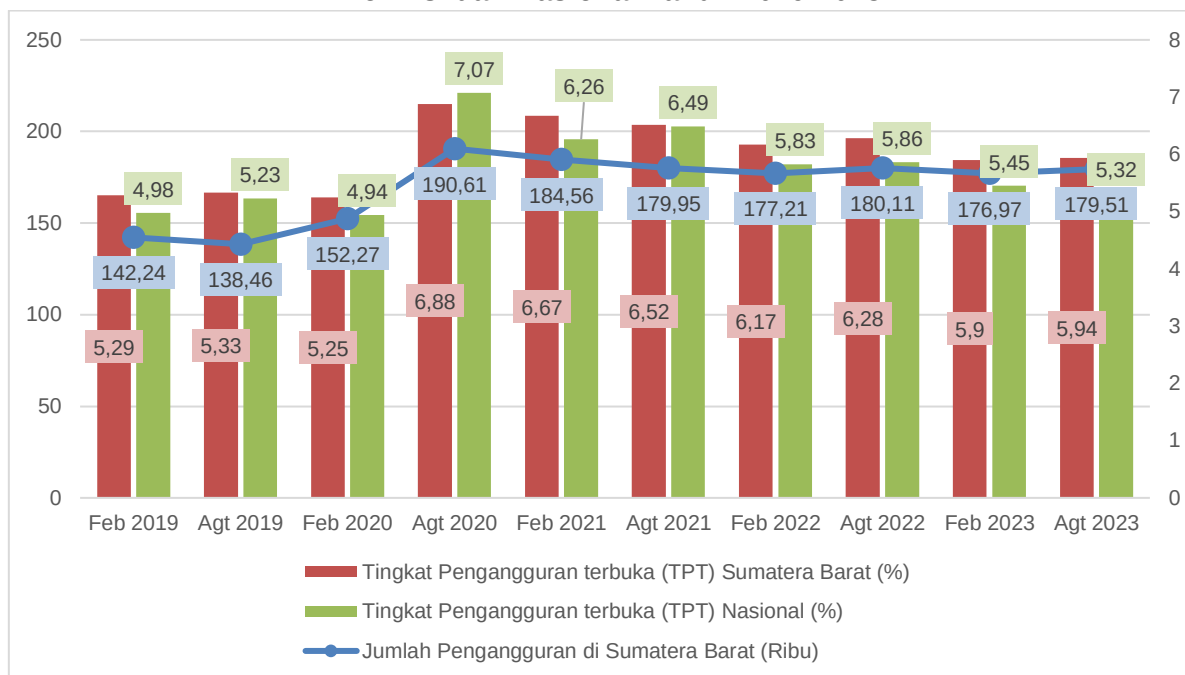
No	Pendidikan Tertinggi	Agustus				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD ke Bawah	34,77	33,25	32,27	32,94	31,62
2	Sekolah Menengah Pertama	17,61	18,67	17,55	17,48	17,49
3	Sekolah Menengah Atas	20,84	21,60	21,56	23,46	22,60
4	Sekolah Menengah Kejuruan	10,66	10,77	12,14	10,15	11,26
5	Diploma I/II/III	3,81	3,74	3,86	3,18	3,28
6	Universitas	12,32	11,96	12,64	12,81	13,74
JUMLAH		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Jika melihat perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat pada Tahun maka cenderung menurun dari Februari tahun 2019 pada angka 5,29% menjadi 5,25% pada kondisi Februari 2020. Namun dengan adanya pandemic Covid 19 pada awal Maret 2020 membuat tingkat pengangguran di Sumatera Barat meningkat menjadi 6,88% pada kondisi Agustus 2020. Beberapa upaya menjaga ketahanan ekonomi serta pemulihan ekonomi yang dilakukan secara perlahan mampu menurunkan kembali tingkat pengangguran di Sumatera Barat menjadi 6,67% pada kondisi Februari 2021, turun menjadi 6,52% pada kondisi Agustus 2021 dan terakhir menjadi 6,17% pada kondisi Februari 2022 dan mengalami kenaikan pada kondisi Agustus 2022 menjadi 6,28% dan kembali menurun di Februari 2023 menjadi 5,90%. Namun demikian, meskipun terdapat penurunan capaian Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat selama pemulihan ekonomi dengan dilakukannya beberapa upaya perbaikan namun angka tingkat pengangguran di Sumatera Barat selalu diatas rata-rata capaian tingkat pengangguran Nasional sejak tahun 2019-2023.

Adapun perkembangan jumlah pengangguran di Sumatera Barat dan perbandingan tingkat pengangguran Sumatera Barat dengan Nasional dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16
Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran
Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

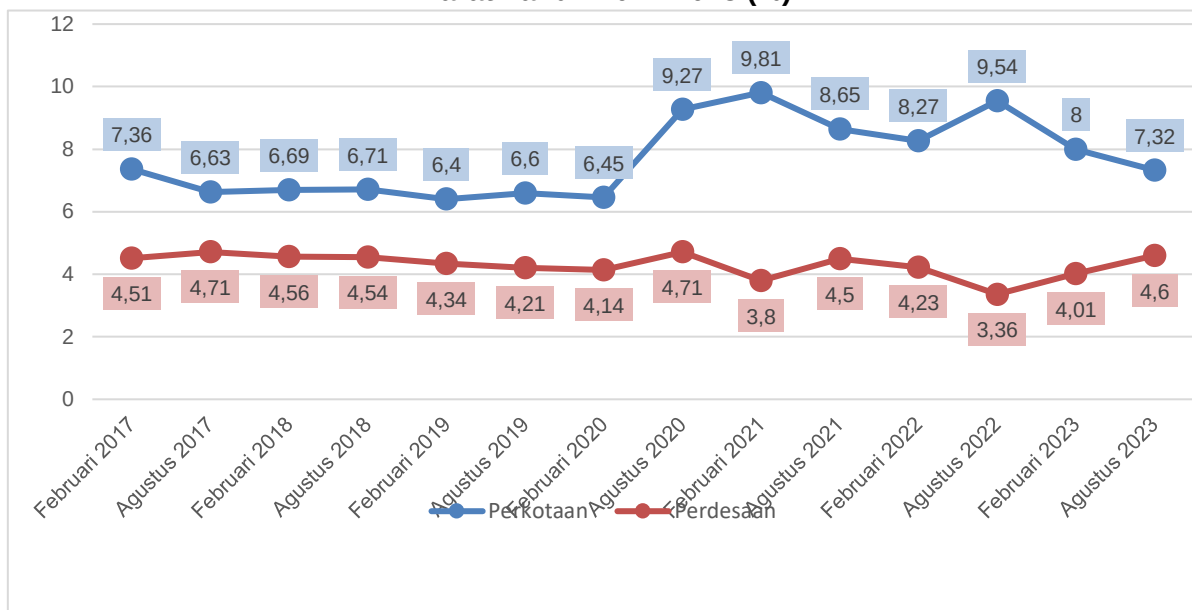


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jika melihat capaian tingkat pengangguran di Sumatera Barat maka tingkat pengangguran di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Hal ini didasarkan dengan struktur ekonomi di Sumatera Barat yang lebih dari 20% berada pada sektor lapangan usaha pertanian yang dominan berada di daerah perdesaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan struktur perkotaan yang lebih dominan dengan sektor perdagangan, industri dan jasa. Pada kondisi Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan sebesar 8% dibandingkan dengan Perdesaan sebesar 4,01%.

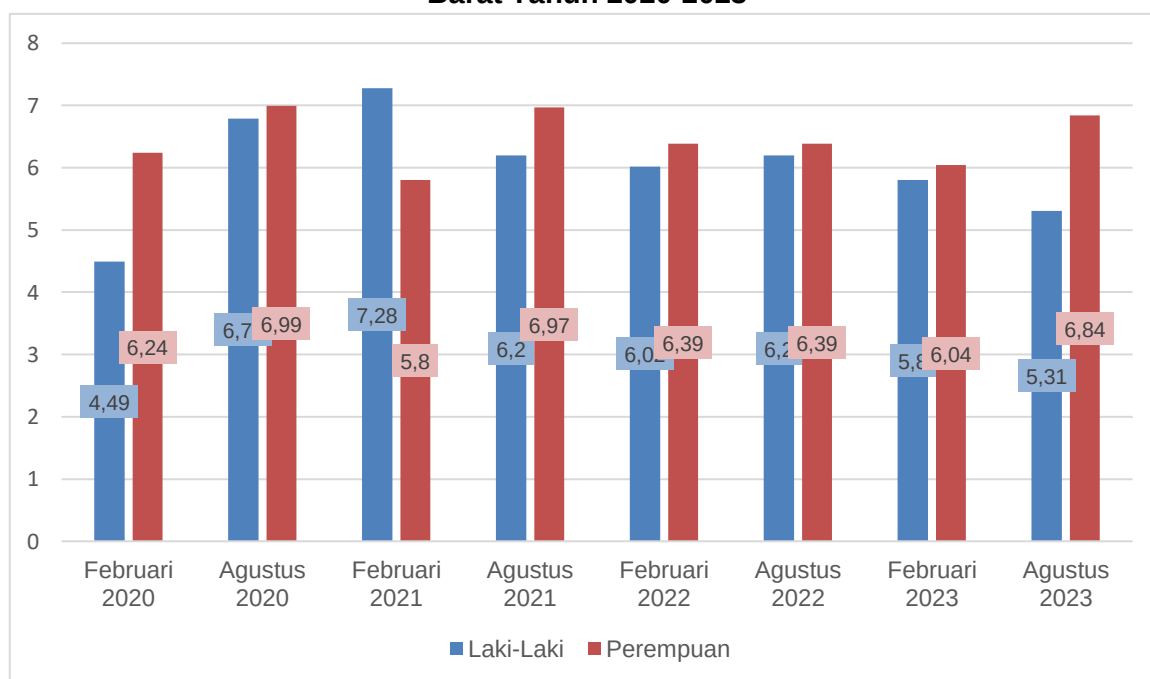
Jika berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat pengangguran penduduk berkelamin perempuan relatif lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini dikarenakan sebagian besar perempuan bekerja pada level pekerja bukan pada level manajer, salah satunya adalah karena tingkat Pendidikan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Berikut capaian tingkat pengangguran di daerah perkotaan dan perdesaan serta tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin di Sumatera Barat.

Grafik 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2017-2023 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Grafik 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020-2023

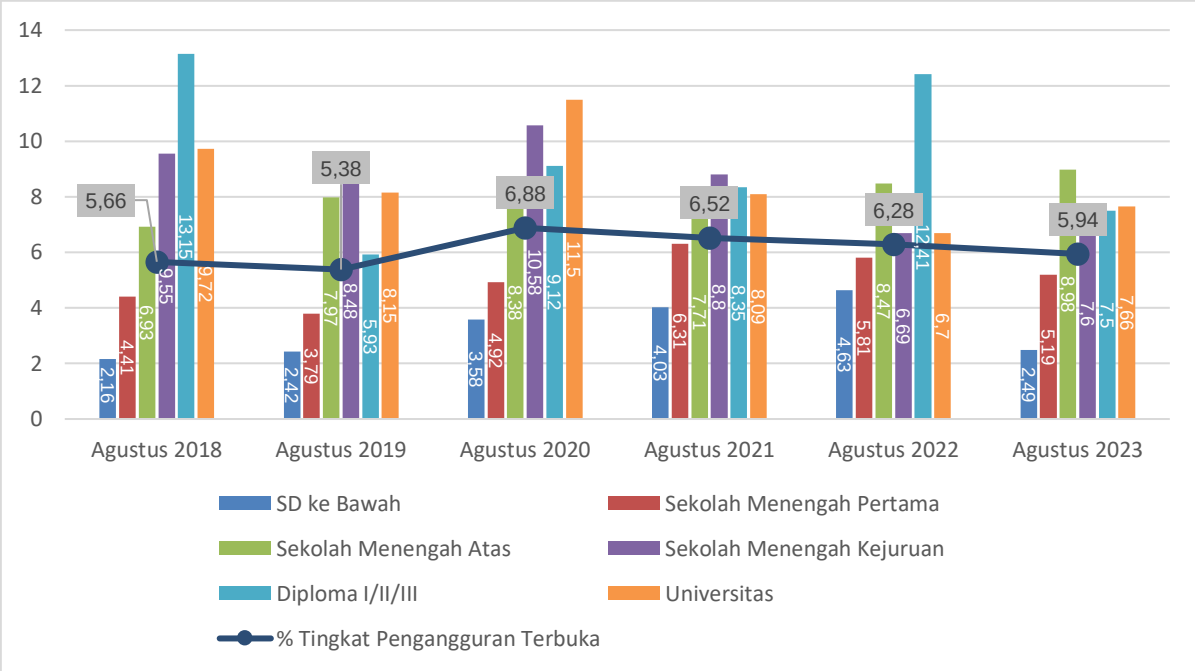


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tamatan Sekolah Menengah Atas adalah yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,98%. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,49%. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT paling

tinggi terjadi pada kategori pendidikan SD ke bawah sebanyak 2,14 persen poin. Sedangkan kenaikan terbesar pada kategori pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 1,47 persen poin.

Grafik 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2016 - Agustus 2023 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jika dilihat pada masing-masing Kabupaten/Kota maka tingkat pengangguran tertinggi pada kondisi Agustus 2023 berada di Kota Padang sebesar 10,86 persen dan capaian dengan tingkat pengangguran terendah yakni di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,33 persen. Adapun capaian tingkat pengangguran pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Kondisi Agustus 2023)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
2	Kab. Pesisir Selatan	6,02	7,00	5,97	4,61	4,75
3	Kab. Solok	4,72	4,65	4,67	5,89	4,99
4	Kab. Sijunjung	3,64	5,30	3,57	4,87	4,71
5	Kab. Tanah Datar	3,20	4,79	4,63	5,91	5,35
6	Kab. Padang Pariaman	6,08	8,13	8,41	6,6	6,69
7	Kab. Agam	4,78	4,61	5,06	4,93	4,96
8	Kab. Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25	3,72	3,95
9	Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,92	5,38	5,09
10	Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
11	Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5,00	6,23	6,22

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
12	Kab. Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02	6,33	6,01
13	Kota Padang	8,74	13,64	13,37	11,69	10,86
14	Kota Kota Solok	7,06	8,35	5,15	3,90	3,72
15	Kota Sawahlunto	6,84	8,20	6,38	5,00	4,98
16	Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,90	4,84	5,49
17	Kota Bukittinggi	6,20	7,51	6,09	4,90	4,99
18	Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,47	5,16	4,84
19	Kota Pariaman	5,48	5,73	6,09	5,19	5,68
Sumatera Barat		5,38	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dari tabel diatas terlihat secara umum tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat berdasarkan daerah, pengangguran terbuka tertinggi berada di Padang sebanyak 10,86%, Kabupaten Padang Pariaman 6,69%. Yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai 1,33 persen, dan secara akumulasi provinsi, tercatat pada Agustus 2023 sebanyak 5,94 persen atau turun 0,34 poin dibandingkan periode yang sama pada 2022. Setelah pandemic covid-19 terjadi perbaikan ekonomi dengan ditandainya meningkatnya jumlah pekerja dan menurunnya pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Dari data BPS, hingga Agustus 2022 jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,14 juta orang dengan angkatan kerja sebanyak 2,87 juta orang. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 di Sumbar mencapai 180,11 ribu orang

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

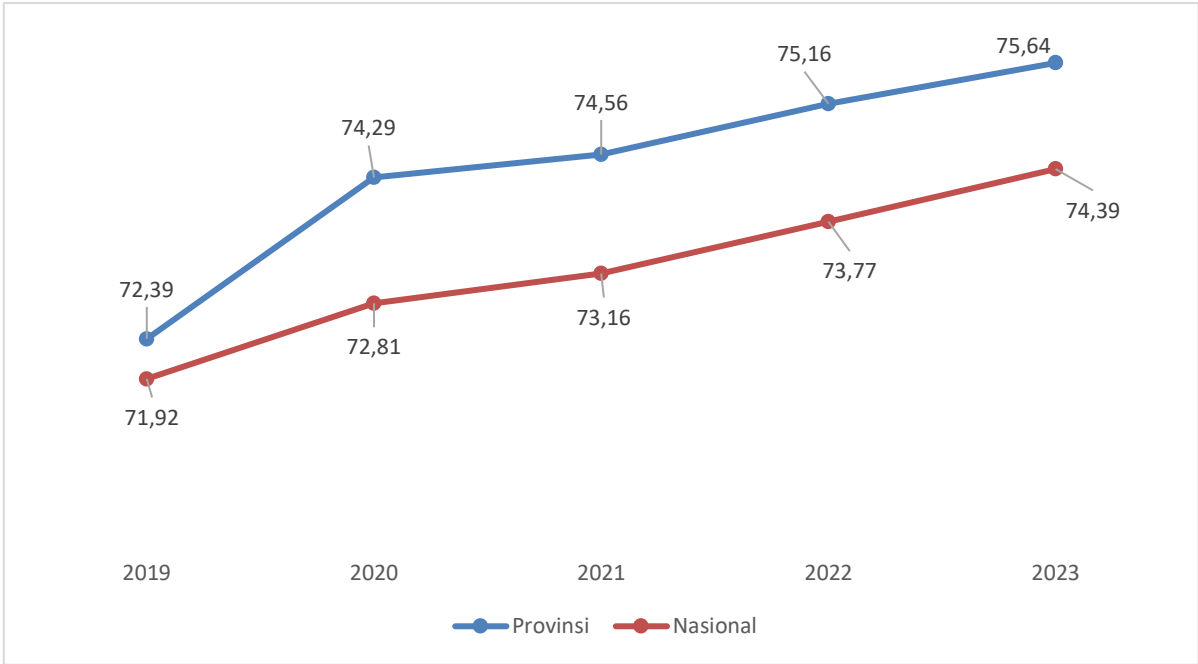
Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai 75,64, meningkat 0,48 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya (75,16). Data dari tahun 2016 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat relatif meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada di atas rata-rata Nasional.

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga 70,19 tahun, lebih lama 0,29 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 14,11 tahun. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 14,10 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun,

dari 9,18 tahun menjadi 9,28 tahun pada tahun 2023. Pada dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat dari 11,13 juta tahun 2022 menjadi 11,38 juta pada tahun 2023.

Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan hasil menggembirakan jika disandingkan dengan capaian Nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional. Perbandingan IPM Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.20
Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Tabel 2.33
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2019-2023

NO	KOMPONEN IPM	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	71,34	69,31	71,47	69,47	71,57	69,59	71,85	69,90	72,13	70,19
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,59	14,01	12,98	14,02	13,08	14,09	13,10	14,10	13,15	14,11
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,34	8,92	8,48	8,99	8,54	9,07	8,69	9,18	8,77	9,28
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu/Org/Tahun)	11.299	10.925	11.013	10.733	11.156	10.790	11.479	11.130	11.899	11.380

NO	KOMPONEN IPM	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	71,92	72,39	72,81	74,29	73,16	74,56	73,77	75,16	74,39	75,64
	PERTUMBUHAN IPM	0,92	0,72	0,90	0,69	0,82	0,92	0,61	0,62	0,62	0,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Jika diperhatikan dari capaian komponen pembentuknya, pada umumnya semua komponen pembentuk IPM menunjukkan capaian yang lebih baik daripada rata-rata Nasional kecuali untuk umur harapan hidup saat lahir dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023, capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Sumatera Barat baru mencapai 9,28 tahun, artinya hanya sampai tamat SMP. Capaian ini sedikit lebih baik dari Rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,77 tahun. Faktor yang mendukung meningkatnya lama sekolah antara lain dapat ditekannya angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah diberbagai daerah.

Selain itu capaian Harapan Lama Sekolah di Sumatera Barat pada Tahun 2023 sebesar 14,11 tahun juga jauh lebih baik dibandingkan capaian nasional yang pada tahun yang sama mencapai 13,15 tahun. Ini menunjukkan adanya optimisme masyarakat di Sumatera Barat akan kondisi pendidikan kedepannya.

Namun capaian Umur Harapan Hidup di Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar 70,19 tahun lebih rendah daripada capaian nasional sebesar 72,13 tahun. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pola hidup sehat.

Begitupun dengan capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Sumatera Barat pada tahun 2023 yang mencapai Rp.11.380 ribu perkapita/tahun juga lebih rendah dengan capaian di nasional yang sebesar Rp.11.899 ribu perkapita/tahun.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM pada Provinsi lainnya di Pulau Sumatera maka capaian IPM Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kategori tinggi dan berada diposisi 3 (tiga) setelah Kepulauan Riau dan Riau, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Sumatera Tahun 2019-2023

PROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023
1. Aceh	71,90	71,99	72,18	72,80	74,70
2. Sumatera Utara	71,74	71,77	72,00	72,71	73,37
3. Sumatera Barat	72,39	72,38	72,65	73,26	75,64
4. Riau	73,00	72,71	72,94	73,52	74,04
5. Jambi	71,26	71,29	71,63	72,14	72,77
6. Sumatera Selatan	70,02	70,01	70,24	70,90	71,62

PROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023
7. Bengkulu	71,21	71,40	71,64	72,16	72,78
8. Lampung	69,57	69,69	69,90	70,45	71,15
9. Kep.Bangka Belitung	71,30	71,47	71,69	72,24	72,85
10. Kep.Riau	75,48	75,59	75,79	76,46	77,11
NASIONAL	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan capaian IPM Sumatera Barat juga ditopang dengan kenaikan IPM pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, IPM tertinggi di Sumatera Barat yakni Kota Padang sebesar 83,98 dan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 65,79, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2022-2023

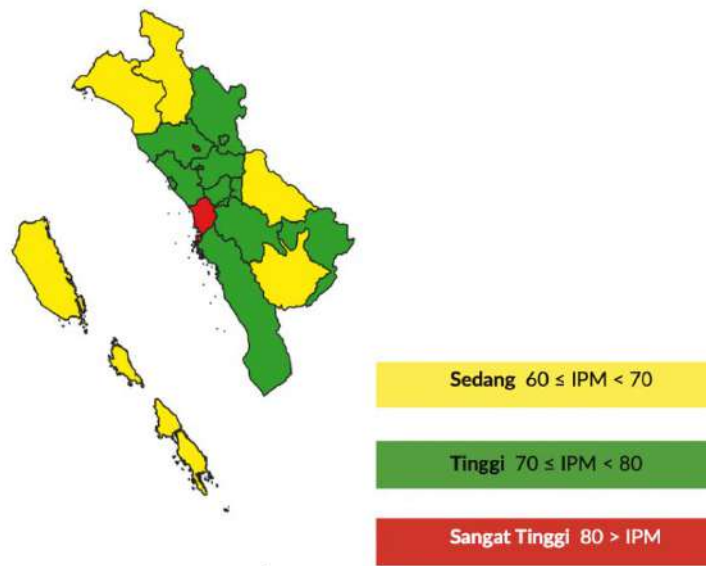
KAB/KOTA	UHH		RLS		HLS		PENGELUARAN RIIL		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kab. Kep.Mentawai	64,93	65,10	7,48	7,76	12,89	12,90	6.567	6.891	64,83	65,79
Kab. Pesisir Selatan	71,25	71,52	8,43	8,58	13,35	13,36	9.686	9.953	71,72	72,24
Kab. Solok	69,19	69,56	7,89	7,90	13,30	13,55	10.539	10.717	71,39	71,92
Kab. Sijunjung	66,70	67,02	8,30	8,57	12,68	12,75	10.582	11.018	71,32	72,30
Kab. Tanah Datar	70,49	70,84	8,90	9,02	14,59	14,78	10.695	10.905	74,85	75,57
Kab. Padang Pariaman	69,34	69,70	8,16	8,41	13,93	14,19	11.159	11.432	73,67	74,54
Kab. Agam	72,89	73,23	8,98	9,22	13,88	13,89	10.171	10.402	73,84	74,44
Kab. Lima Puluh Kota	70,08	70,30	8,08	8,12	13,40	13,41	10.035	10.285	71,64	72,05
Kab. Pasaman	67,96	68,29	8,11	8,13	13,05	13,25	8.619	8.908	69,12	69,85
Kab. Solok Selatan	68,38	68,71	8,41	8,69	12,73	12,80	10.560	10.884	71,36	72,24
Kab. Dharmasraya	71,90	72,24	8,56	8,71	12,51	12,68	11.650	11.901	73,19	73,87
Kab. Pasaman Barat	68,25	68,53	8,55	8,81	13,69	13,70	9.381	9.538	71,39	72,03
Kota Padang	73,93	74,14	11,60	11,62	16,54	16,56	14.889	15.089	83,69	83,98
Kota Solok	74,06	74,39	11,74	11,36	14,34	14,36	12.515	12.709	79,35	79,66
Kota Sawahlunto	70,20	70,69	10,43	10,44	13,42	13,99	10.537	10.829	75,21	75,91
Kota Padang Panjang	74,02	73,23	11,92	11,94	15,07	15,29	11.153	11.310	79,28	79,76
Kota Bukittinggi	74,82	75,13	11,63	11,64	14,99	15,01	13.633	13.859	81,52	81,88
Kota Payakumbuh	74,14	74,43	10,82	10,88	14,29	14,30	13.687	13.978	79,70	80,14
Kota Pariaman	70,67	70,95	10,38	10,79	14,61	14,79	13.150	13.355	79,31	79,76
Prov. Sumatera Barat	69,90	70,19	9,18	9,28	14,10	14,11	11.130	11.380	75,16	75,64

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Sejak tahun 2018, Kota Bukittinggi mengikuti Kota Padang menjadi kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM $\geq$ 80). Jumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan status capaian pembangunan manusia yang

“tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 12, dengan status “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 5, dan tidak ada lagi kabupaten/ kota dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$).

Gambar 2.3
IPM Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

B. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Olahraga telah menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat baik dalam skala nasional maupun dalam ukuran daerah begitu juga bagi masyarakat Sumatera Barat. Pembangunan olahraga merupakan suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik dan dalam arti luasnya pembangunan olahraga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan olahraga merupakan salah satu bagian dalam pembangunan manusia yang berujung untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui olahraga dapat meningkatkan kualitas manusia seperti kesehatan, kebugaran, nilai moral, disiplin, sportivitas dan lebih jauh akan dapat berperan membentuk karakter bangsa.

Olahraga di Provinsi Sumatera masih dalam proses perkembangan, hal ini dapat dilihat pencapaian prestasi Sumatera Barat di tingkat Nasional yang belum terlalu menggembirakan, walaupun terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah memiliki prestasi secara nasional. Pencapaian terkini dalam olahraga ada Tingkat Nasional yakni pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, Sumatera Barat memperoleh peringkat 15 dari 34 Provinsi yang mengikuti ajang tersebut. Disamping tolak ukur dari sisi pencapaian prestasi, masih menggunakan data tahun 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam berolahraga berada pada angka 33,03% atau baru sepertiga dari penduduk Sumatera Barat yang peduli akan pentingnya berolahraga.

Terlepas dari capaian prestasi maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga, selama ini Pemerintah Sumatera Barat telah berkomitmen untuk memajukan olahraga baik melalui penyediaan anggaran ataupun pembinaan dan pengembangan olahraga yang terencana secara berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari pengenalan, pemasaran, dan penciptaan calon olahragawan melalui optimalisasi pusat-pusat pembinaan dan latihan olahraga (PPLP) dan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM), sentra-sentra/klub-klub olahraga. Komitmen Provinsi Sumatera Barat tersebut telah diapresiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan ditetapkannya Sumatera Barat menjadi sentra pembinaan atlet pada program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga di Sumatera Barat ke depannya baik dari segi prestasi maupun pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan yang dilakukan dengan:

- a. Menjaga keberlanjutan kebudayaan yang ada di Sumatera Barat.
- b. Mengembangkan ekosistem kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman
- c. Mendayagunakan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- d. Melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan yang ada di Sumatera Barat

Semua hal diatas dilaksanakan dalam koridor pencapaian sasaran untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat, melalui pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan di Sumatera Barat.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang pengukurannya dilakukan berdasarkan 31 indikator yang dikelompokkan dalam 7 dimensi. IPK. Indeks yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah tetapi untuk mengukur kinerja pembangunan dalam pemajuan kebudayaan suatu daerah. Hasil pengukuran IPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sampai dengan tahun terakhir publikasi yakni tahun 2022 dan perbandingannya dengan capaian Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022

NO	DIMENSI	TAHUN							
		2019		2020		2021		2022	
		NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR	NAS	SUMBAR
1.	Ekonomi	33,79	33,24	26,96	25,07	20,69	18,97	26,88	34,65
2.	Pendidikan	72,49	75,75	71,26	73,94	68,71	72,70	72,53	73,28
3.	Ketahanan Sosial Budaya	73,55	63,43	74,01	63,71	66,83	58,13	69,25	61,97
4.	Warisan Budaya	43,89	46,57	41,00	48,25	46,63	52,31	48,92	56,85
5.	Ekspresi Budaya	37,14	32,22	35,82	31,94	27,13	24,50	31,48	28,71
6.	Budaya Literasi	59,11	60,76	61,63	62,97	54,29	61,17	57,40	62,95
7.	Kesetaraan Gender	54,57	57,72	58,01	60,27	58,55	60,10	59,30	60,07
	IPK	55,91	54,99	54,65	54,60	51,90	52,71	55,13	56,90

Sumber : www.ipk.kemdikbud.go.id, 2023

Berdasar tabel diatas terlihat pencapaian IPK Provinsi Sumatera Barat untuk rentang tahun 2019-2020 masih berada dibawah rata-rata IPK Nasional, baru pada tahun 2021 pencapaian IPK Provinsi Sumatera berada diatas IPK Nasional, untuk itu perlu menjaga konsistensi upaya untuk pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pembangunan kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan, berdasarkan undang-undang layanan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan dan urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, sedangkan untuk layanan urusan pemerintahan pilihan daerah meliputi 8 (delapan) urusan.

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka terdapat 230 Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2023 yang tersebar pada masing-masing urusan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masing-masing urusan/unsur pemerintahan daerah pada tahun 2023 maka terdapat 189 IKD dengan status tercapai sedangkan sebanyak 41 IKD dengan status tidak tercapai. Adapun capaian dari urusan/unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023 sebagai tabel berikut.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masing-masing urusan/unsur
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

NO	Urusan	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	Urusan Pendidikan	10	8	2
2	Urusan Kesehatan	10	9	1
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	6	6
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	3	2
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8	6	2
6	Urusan Sosial	5	5	0
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	Urusan Ketenagakerjaan	8	6	2
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	8	2
3	Urusan Pangan	7	7	0
4	Urusan Pertanahan	4	3	0
5	Urusan Lingkungan Hidup	9	5	4
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	0
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	8	0
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	5	0
9	Urusan Perhubungan	3	1	2
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	7	5	2
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2	0
12	Urusan Penanaman Modal	1	1	0
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	3	2	1
14	Urusan Statistik	2	2	0
15	Urusan Persandian	1	1	0
16	Urusan Kebudayaan	2	1	1
17	Urusan Perpustakaan	2	2	0
18	Urusan Kearsipan	2	2	0
URUSAN PILIHAN				
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	2	2	0
2	Urusan Pariwisata	3	3	0
3	Urusan Pertanian	6	6	0
4	Urusan Kehutanan	5	5	0
5	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	5	4	1
6	Urusan Perdagangan	8	6	2
7	Urusan Perindustrian	8	7	1
8	Urusan Transmigrasi	2	2	0

NO	Urusan	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Unsur Sekretariat Daerah	33	28	5
2	Unsur Sekretariat DPRD	1	1	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Unsur Perencanaan	1	1	0
2	Unsur Keuangan	11	8	3
3	Unsur Kepegawaian	4	2	2
4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	3	3	0
5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	3	3	0
6	Unsur Penghubung	2	2	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Inspektorat Daerah	2	2	0
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	0
Jumlah Indikator				230
Tercapai				189
Tidak Tercapai				41
Persentase				82,17

Sumber : Hasil evaluasi capaian IKD Tahun 2023, Bappeda

Adapun penjelasan dari capaian kinerja pada masing-masing urusan/unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.

2.1.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar secara umum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.38
Perkembangan Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
a. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	73,13	68,99	73,42	89,30	73,49	75,85	73,56	73,65	73,72
b. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	52,87	85,78	53,80	34,37	54,72	76,40	55,65	56,57	57,50
c. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	-	58,2	43,52	58,51	77,89	58,82	59,13	59,45
d. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	-	27,4	60,48	27,70	72,03	28,01	28,32	28,63
e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	91,70	103,47	93,22	106,08	94,70	104,20	96,20	97,70	99,20
f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%)	50,88	50,94	52,38	90,66	53,88	57,61	55,38	56,88	58,38
g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%)	31,27	50,94	32,77	28,55	34,27	33,12	35,77	37,27	38,77
h. Persentase SMA Negeri terakreditasi (%)	85,45	74,02	87,46	100	89,47	94,92	91,48	93,49	95,50
i. Persentase SMK Negeri terakreditasi (%)	83,33	79,12	85,02	99,13	86,70	83,48	88,38	90,07	91,75
j. Persentase SLB Negeri terakreditasi (%)	51,72	85,99	53,38	86,21	55,03	62,07	56,69	58,34	60,00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa indikator di urusan pendidikan telah ditetapkan, diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, yang dihitung dari perbandingan antara siswa usia 16-18 tahun pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia 16-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai ideal untuk indikator ini adalah 100 %. Untuk Tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 73,49 %, dan capaian atas indikator ini adalah 75,85%, yang menunjukkan bahwa terjadinya pencapaian target 2023. Hal ini disebabkan karena semakin pulihnya ekonomi keluarga terutama ekonomi menengah kebawah yang telah semakin tumbuh serta tersedianya fasilitas sekolah, guru yang berkualitas dan anggaran untuk mendukungnya.

Selanjutnya, terdapat indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, yang dihitung dari perbandingan antara siswa usia 4-18 tahun pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia 4-18 tahun. Untuk Tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 54,72%, sedangkan capaian atas indikator ini adalah 76,40%. Beberapa hal yang mendukung ketercapaian target antara lain yakni telah adanya kesadaran bahwa Penyandang disabilitas juga memiliki hak dan

kesempatan yang sama untuk memperoleh Pendidikan, serta setara dengan masyarakat lainnya dan tidak menjadi kaum termajinalkan, selain itu di tengah-tengah masyarakat terjadi Perubahan paradigma pelaksanaan pembangunan yang semakin inklusif yang semakin mengubah siapapun bisa bersekolah dan hal lain yakni semakin banyaknya sekolah khusus untuk penyandang disabilitas yaitu SLB dan didukung dengan guru dan strategi pengajaran inklusif, serta adanya adopsi pendekatan pembelajaran yang memperhitungkan kebutuhan individual penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan penggunaan teknologi.

Pada tahun 2023 target ditetapkan untuk Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum sebesar 58,51 % dengan realisasinya 77,89%, sedangkan Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum ditargetkan 27,7% realisasinya 72,03%. Keberhasilan pencapaian dari indikator siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum sangat tergantung pada : (i) Fasilitas sekolah;(ii) ketersediaan guru dan pendidik;(iii) Adanya anggaran yang memadai;(iv) disamping adanya komitmen kepala sekolah untuk penerapannya dengan baik. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan indikator ini adalah perlunya peningkatan kualitas pengajar serta upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menilai tingkat dan numerasi setiap siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu (UNESCO, 2009). Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena adanya peserta didik di atas dan di bawah umur dari official age sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas.

Untuk capaian APK SMA/SMALB/MA/SMLB/ sederajat di tahun 2023 sebesar 104,20 % dari target 94,7 %, sementara itu untuk capaian APK SMA dengan target 53,88 % terealisasi 57,61%, APK SMK dengan target 34, 27 % terealisasi 33,12 %. Capaian dari APK ini semua didukung oleh ketersediaan fasilitas sekolah, guru yang berkualitas dan pendanaannya. Fasilitas Sekolah meliputi ketersediaan Ruang kelas yang merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran tatap muka, saat ini sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Ketersediaan ruang kelas tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga perlu dilihat dari sisi kondisi/keadaannya. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan atau akses terhadap sekolah tidak hanya dilihat dari ketersediaan fasilitas, tetapi juga bagaimana sekolah tersebut dapat memberikan tempat yang aman dan sehat sehingga berpengaruh positif terhadap outcome pembelajaran peserta didik.

Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan 4.a yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang

disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan Program Unggulan, Pembangunan Unit Sekolah Baru dan pembangunan Ruang Kelas Baru termasuk sarana untuk memenuhi kebijakan tahun penerimaan sesuai PPDB siswa dan siswi yang sudah berbasis Zonasi, serta Sanitasi Sekolah yang meliputi ketersediaan toilet bersih, ketersediaan air bersih dan adanya fasilitas cuci tangan. Ketersediaan toilet di sekolah kerap tidak menjadi perhatian, padahal hal tersebut adalah aspek penting bagian dari Germas dan penanganan Covid pasca pandemi dalam mendukung proses belajar mengajar. Sekolah yang sehat membutuhkan toilet yang seimbang dengan jumlah warga sekolah. Selain itu, ketersediaan toilet yang terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan siswa,

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan seorang guru dalam melakukan pengajaran. Isu tentang pentingnya keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar dalam bidang Pendidikan, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Indikatornya adalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. Indikator ini memberikan informasi terkait kualitas guru serta memantau upaya peningkatan kualitas guru yang telah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Metadata Pilar Sosial Edisi II SDG's, guru yang memenuhi kualifikasi adalah yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Guna mengukur mutu layanan pendidikan maka indikator SMA/SMALB/SMK yang terakreditasi menjadi salah satu indikator. Akreditasi merupakan sebuah pengakuan yang diberikan oleh Badan yang berwenang bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu yang mengacu kapad Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, penilaian akreditasi juga merupakan evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perlu fokus pada investasi perbaikan sekolah yang belum terakreditasi maupun yang belum mencapai nilai maksimal dalam pencapaian akreditasi. Dan kepada masyarakat juga dapat memberikan informasi mengenai kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berkualitas dengan didorong oleh manajemen sekolah serta kelengkapan sarana dan prasarana.

Pada Tahun 2023, indikator kinerja Persentase SMA Negeri terakreditasi dari target 89,47 % terealisasi 94,92 %, kemudian Persentase SMK Negeri terakreditasi dari target 86,7

% terealisasi 83,48% dan SLB Negeri yang terakreditasi dari target 55,03 % terealisasi 62,07%. Harapan ke depan terjadinya peningkatan sekolah terakreditasi khususnya pada SMK dan SLB Negeri karena akreditasi adalah instrument yang menilai kelayakan sekolah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sama halnya dengan indikator-indikator sebelumnya Akreditasi Sekolah ini didukung oleh kecukupan fasilitas sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan cukup jumlahnya serta pendanaan untuk pelaksanaan pelayanan proses belajar mengajar ini.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas tersebut dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan kepada tindakan promotif dan preventif sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif. Perkembangan capaian layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target IKD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Pencapaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman, RSJ HB Sa'anin Padang)	1:875	1:875	1:875	1:727	1:875	1:709	1:875	1:875	1:875
2. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana da-tau berpotensi bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	97,4	97,4	97,8	97,8	98,2	99,60	98,5	98,9	100
6. Persentase Persalinan Sesuai	77,3	71,72	78,5	75,33	80	73,62	82	84	86

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
Standar di Fasyankes (%)									
7. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	14,5	10,2	13	9,7	11,5	10,39	10	8,5	7
8. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	83	82,24	86	85,19	89	89,22	92	95	100
9. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	70	53,9	75	87,19	80	87,76	85	90	95
10. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	82,48	82,32	86,1	86,16	88,2	92,53	90,3	92,4	95

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada RPJMD Tahun 2021-2026, indikator urusan kesehatan ditetapkan antara lain adalah Rasio daya tampung rumah sakit rujukan, yang merupakan perbandingan jumlah tempat tidur perawatan terhadap 1000 penduduk dalam suatu wilayah dan satuan waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah ketersediaan tempat tidur terhadap daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk dan untuk penambahan pembangunan rumah sakit baru. Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 1:875, dapat tercapai sebesar 1:709.

Untuk indikator Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit daerah yang menjadi kewenangan provinsi (RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD Pariaman, RSUD M. Natsir). Tingkat akreditasi yang dimaksud adalah tingkat akreditasi paripurna yang dinilai oleh lembaga/komisi akreditasi rumah sakit yang berwenang. Dari target capaian sebesar 100 % pada tahun 2023, maka dapat tercapai 100%.

Untuk melihat Pelayanan yang diberikan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana da-tau berpotensi bencana, dilakukan penghitungan Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana da-tau berpotensi bencana. Indikator ini ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan renkon bencana dan mengetahui jumlah korban dan daerah terdampak untuk meminimiliasi jumlah korban akibat bencana.

Hasil capaian tahun 2023 adalah sebesar 100% dari rencana target sebesar 100 %. Pencapaian ini didorong karena indicator kinerja ini merupakan SPM Provinsi dan harus didukung dengan anggaran yang maksimal.

Selanjutnya juga terdapat indicator Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang dinilai dari Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Dengan capaian ini diharapkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai

standar dan terlindunginya kelompok beresiko. Hasil capaian tahun 2023 adalah sebesar 100 %, dan sesuai dengan Target 100 % yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena hal ini merupakan SPM Provinsi yang didukung dengan alokasi anggaran yang cukup besar dan pada tahun 2023. Upaya dalam meningkatkan pelayanan KLB adalah Adanya tim gerak cepat dalam penanggulangan KLB pada setiap tingkat mulai dari puskesmas, kab/kota dan provinsi.

Untuk indikator persentase Puskesmas yang terakreditasi dilakukan untuk melihat mutu dan kualitas Puskesmas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat secara paripurna, untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar 98,2 %, dengan realisasi sebesar 99,60 % pencapaian ini disebabkan karena adanya Peraturan menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Nasional tercantum bahwa Persyaratan Kerja Sama Faskes diantaranya Sertifikasi Akreditasi dan BPJS Kesehatan mempersyaratkan Akreditasi Fasilitas Kesehatan sebagai Persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya target persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes dilakukan untuk melihat Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan oleh tim minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari dokter dan bidan atau dokter dan perawat atau 2 (dua) orang bidan atau bidan dan perawat. Untuk Tahun 2023, capaian adalah sebesar 73,62%, dan target yang ditetapkan adalah 80 %, dan capaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini diakibatkan masih adanya persalinan yang ditolong di non fasyankes terstandar seperti polindes dan poskesri serta masih ada persalinan yang ditolong oleh non nakes.

Pada persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang dilihat dari ibu hamil dengan resiko kekurangan energi kronik (KEK) yang ditandai dengan ukuran lingkaran lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, capaian tahun 2023 adalah sebesar 10,39%. Pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 11,5 % 1. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain karena masih rendahnya kualitas konsumsi makanan bergizi pada calon pengantin ataupun wanita usia subur masa sebelum hamil serta masih kurangnya skrining dan pendampingan di saat masa sebelum hamil.

Untuk melihat Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat), dilakukan dengan menilai keluarga yang memiliki akses terhadap Fasilitas sanitasi dasar (jamban sehat) yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri/bersama. Tujuan indikator ini dihitung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penyakit yang berbasis lingkungan khususnya sanitasi. Untuk Tahun 2023, capaian adalah sebesar 89,22 %, dan sudah mencapai sesuai dengan Target yang

ditetapkan yakni sebesar 89 % yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena sudah optimalnya dukungan dari beberapa Kabupaten/Kota dalam sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan terhadap pembangunan jamban, sudah optimalnya pendataan masyarakat terhadap pembangunan jamban dan adanya program yang sudah tepat sasaran.

Selanjutnya, terkait persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan yang ditujukan untuk terbentuknya Herd Immunity pada populasi dan tidak terjadinya penyakit PD3I (Penyakit Dapat Di Cegah Dengan Imunisasi). Untuk Tahun 2023, capaian sebesar 87,76 %, dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 80 %. Pencapaian ini disebabkan karena adanya koordinasi dengan lintas sector yakni kepala daerah, dinas Pendidikan, kementerian agama, MUI, PKK dalam mnedukasi masyarakat dalam Imunisasi, adapapun permasalahan dalam meningkatkan IDL ini adalah adanya Isu negatif terkait kehalalan imunisasi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi terutama bagi tumbuh kembang balita, kurangnya pencatatan akuratnya pencatatan terumana di posyandu, banyaknya isu yang beredar di sosial media bahwa imunisasi bukan merupakan hal yang penting, serta minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%), yang dilihat dari penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP), Pekerja Penerima Upah (PPU). Adapun capaian Tahun 2023 adalah sebesar 92,53 %, dari target sebesar 88,2 % dari yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena adanya beberapa kabupaten/kota yang telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) pada sejak tahun 2022, yakni menjadi 8 (delapan) Kabupaten/kota, meningkatnya Penerima Bantuan Mandiri dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam jaminan Kesehatan.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Terdapat beberapa indikator kinerja pada urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi ukuran yang dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir pada tahun 2023 terdapat target sebesar 0,69% dengan capaian 0,43%.

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk Provinsi Sumatera Barat.

Semenjak tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang berusaha untuk membangun SPAM Regional antara Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam melalui program ESP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan saat ini masih tahap penyediaan kelengkapan dokumen perencanaan. Namun dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera barat tetap juga melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, akses layanan air minum secara kumulatif sebesar 85,23% dari total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. Seiring dengan pertumbuhan penduduk khususnya di daerah perkotaan maka pengelolaan air limbah domestik menjadi hal yang penting. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Hingga saat ini, persentase layanan akses sanitasi masyarakat baru mencapai 69,27 %. Pencapaian pada layanan akses sanitasi ini Sebagian besar dikarenakan masih dipengaruhi oleh perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat terutama pada masyarakat daerah perdesaan. Namun demikian capaian ini juga di dukung dengan banyaknya dukungan penganggaran dan program Sanitasi dari Pemerintah Pusat seperti DAK Fisik Sanitasi serta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) serta dukungan dari kabupaten/kota.

Disamping itu, untuk kinerja penyelenggaraan penataan ruang dilihat dari persentase persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang dengan melakukan pola ruang RTRW Provinsi Sumatera Barat dengan peta citra terbaru dan atau rencana pembangunan. Berdasarkan hal tersebut diperoleh kesesuaian tata ruang pada tahun 2023 sebesar 87%. Hal ini menandakan bahwa peningkatan ketaatan stakeholder terhadap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah. Peningkatan ketaatan terhadap tata

ruang tersebut didorong oleh pengoptimalan sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyelesaian evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang serta dukungan dari pengendalian dan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan supervisi dari nasional.

Pada Tahun 2022, sehubungan terjadi perubahan pada SK Jaringan Jalan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan perubahan pada SK jaringan Jalan Provinsi yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat, sehingga total panjang jalan Provinsi Sumatera Barat menjadi 1608,57 km.

Kondisi kemantapan jalan di Sumatera Barat tahun 2016-2022 terus mengalami peningkatan dari 70,14% tahun 2016 meningkat menjadi 75,03% pada tahun 2021 dan pada Tahun 2022 kondisi kemantapan jalan menjadi 71,72% (SK lama) dan 71,68% (SK baru), Jika dibandingkan dengan target RPJMD maka untuk Indikator Kemantapan Jalan pada kondisi awal tahun 2021 telah mencapai angka 73,92%, pada akhir tahun 2021 mencapai angka 75,03%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (i) adanya dukungan anggaran (ii) Dukungan peralatan yang tersedia serta (iii) didukung dengan kondisi alam yang mendukung untuk pelaksanaan proyek infrastruktur. Pada Tahun 2022 Target RPJMD untuk Indikator Kemantapan Jalan adalah sebesar 75%, dan capaian kemantapan jalan pada tahun 2022 adalah 71,72%. dengan total jalan yang sudah diselesaikan mantap adalah 1084,306 Km dari Total 1525,20 Km yang dikerjakan pada tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target ini diantaranya adalah : (1) Kejadian bencana alam yang terjadi menyebabkan terjadinya kerusakan pada beberapa ruas jalan Provinsi (2) Muatan kendaraan yang melewati jalan Provinsi melebihi Kapasitas Jalan ; (3) Belum berimbangnya antara penanganan kerusakan jalan dengan penambahan kerusakan jalan.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar, seperti infrastruktur layanan irigasi yang dipergunakan untuk pengairan sawah. Capaian Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2023 sebesar 4,01 % dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,87 %. Hal ini disebabkan antara lain karena: 1) semakin berkurangnya daerah irigasi, 2) semakin menurunnya kapasitas petugas OP Irigasi, 3) kurang berperan aktifnya kelembagaan petani, 4) kurangnya dukungan pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah lainnya untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi.

Tabel 2.40
Capaian dan Target indikator urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	6,015	4,11	0,69	0,74	0,69	0,35	0,69	0,69	0,69
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai kewenangan provinsi (%)	0,81	3,08	0,83	2,72	0,83	2,66	0,83	0,83	0,83
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	48,95	5,61	4,03	5,87	0,19	4,01	0,79	0,75	0,89
4	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	5,56	1,23	11,11	0,46	11,11	0,75	11,11	11,11	11,11
5	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	52,28	58,50	53,78	58,6	55,28	59,40	56,78	58,28	59,78
6	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	100	0	100	0	100	0	100	100	100
7	Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	100	0	100	0	100	0	100	100	100
8	Rasio kemantapan jalan provinsi	73,92	75,03	75	71,72	77	67,5	79	81	82
9	Akses Air Minum Layak (%)	80,04	82,26	82	85,23	84	85,23	86	88	90
10	Akses Sanitasi Layak(%)	80,04	82,05	82	69,27	84	69,27	86	88	90
11	Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis (%)	NA	NA	20	2,5	40	0	60	80	100
12	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	84	86	86	87	87	87	88	89	90

Sumber : Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, 2024

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek penting dan sangat strategis dalam kesejahteraan manusia dan langsung menyentuh

kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini sesuai dengan Amandemen UUD 1945 pada pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, negara ingin memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana umum permukiman.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat fokus untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum (PSU) kawasan permukiman sebagaimana tercantum pada indikator RPJMD tahun 2021-2026 yang pada tahun 2023 dengan target 34,51% untuk peningkatan PSU permukiman dan terealisasi sebesar 135%.

Serta untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk melaksanakan SPM pada pelayanan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi dan untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi. Capaian realisasi untuk layanan SPM tersebut diatas dapat tercapai 100% pada tahun 2022 atau terlaksana dengan baik.

Terkait dengan penanganan kawasan kumuh, sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat sebanyak 79 kawasan dengan luas sekitar 1.254,94 ha. Pada tahun 2021, penanganan kawasan kumuh baru mencapai 54,55 hektar atau 4,35% dan pada tahun 2022 telah mencapai 8% dari 7,09% yang ditetapkan dalam indikator RPJMD. Adapun capaian pada Urusan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
	Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)									
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (%)	2,02	2,02	7,09	8	14,18	7,09	21,27	28,35	35,44
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	2	0	4	0,97	6	5	8	10	12
5	Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%)	8,71	22	17,26	43,55	34,51	135	51,77	69,03	86,28

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, 2024

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ini terdapat 3 sub urusan yakni :

1. Sub urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sub Urusan Kebakaran Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
3. Sub urusan Kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun pencapaian dalam pelaksanaan urusan ini sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Pencapaian dan Target indikator urusan pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	75	75	77,00	81,81	79,00	79,00	81,00	83,00	85,00
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	75	66,67	77,00	75	79,00	79,00	81,00	83,00	85,00
3. Indeks Penegakan Peraturan Daerah	74	95	76	96	78	78	80	82	84
4. Persentase Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (%)	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21	89,47	89,47	89,47
5. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap (%)	50	95,59	53	75	56	56	59	62	65
6. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	6,2	6,26	25	18,75	43,7	18,75	62,5	87,5	100
7. Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan capaian pada 4 (empat) indikator kinerja pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat maka terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak tercapai antara lain yakni Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan hal ini dikarenakan masih adanya Perangkat Daerah yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP terutama terkait dengan penegakan perda yang dikoordinir Perangkat Daerah serta jauhnya lokasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari Ibu Kota Provinsi serta kondisi Geografis/jalan menuju lokasi yang tidak mendukung.

Selain itu, dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, setiap anggota masyarakat berhak atas rasa aman. Secara umum, keamanan diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Sementara ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Selain keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketentraman dan ketertiban. Ketentraman dapat diartikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma

Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan membantu pemerintah daerah. Sedangkan Polri menegakkan semua peraturan perundangundangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada sub urusan Kebakaran Daerah, terdapat 1 (satu) Indikator kinerja yakni Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap dengan realisasi capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 56% dari target sebesar 56%.

Pada Sub Urusan Kebencanaan memiliki tiga indikator. Indikator tersebut yaitu (1) Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%); (2) Persentase penanganan pra bencana; (3) Persentase penanganan tanggap darurat bencana.

Adapun capaian masing-masing indikator tersebut pada tahun 2023, yakni untuk Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) dari target 43,7 % namun pencapaian hanya sebesar 18,75%. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen sesuai target dan keterbatasan SDM pelaksana yang menangani kegiatan ini. Sedangkan pencapaian untuk indikator persentase penanganan bencana dan persentase penanganan

tanggap darurat bencana tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Sebagai salah satu bidang Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah maka sebagian besar target program dan kegiatan mengarah kepada Rahabilitasi Sosial Dalam panti serta penanganan pada saat dan setelah tanggap darurat. Adapun perkembangan capaian dan target indikator urusan pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.43
Pencapaian dan Target indikator urusan Pemerintahan Bidang Sosial
pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Partisipasi Sosial (indeks)	NA	NA	0,687	0,753	0,687	75,3	0,687	0,687	0,687

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, indikator-indikator kinerja yang dicantumkan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 (empat) Indikator yang sepenuhnya merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yakni Rehabilitasi Sosial Dalam Panti yakni pada Panti Anak Terlantar, Panti Disabilitas dan Panti Lanjut Usia serta Pemenuhan kebutuhan dasar pada warga negara korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap bencana darurat bencana Provinsi.

Pencapaian SPM Bidang Sosial pada tahun 2023 telah mencapai 100%, dengan artian seluruh kelayan pada panti milik Pemerintah maupun panti milik masyarakat telah dapat disentuh dengan layanan permakanan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat beberapa layanan kelayan dalam panti yang juga selalu diupayakan untuk dapat dipenuhi secara bertahap dan ditingkatkan kualitasnya namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah antara lain layanan Pengasuhan, Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari, Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Penyediaan Alat Bantu bagi disabilitas, dan Pemulasaraan.

Begitupun pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi, beberapa layanan yang disediakan yakni Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

Terkait dengan Indeks Partisipasi Sosial yang merupakan indikator baru yang dimulai pada tahun 2023, dari target yang dibuat sebesar 0,687 terealisasi sebesar 0,753. Pada indikator ini parameter yang dinilai hanya 3 variabel yaitu : karang taruna, pekerja sosial masyarakat, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dimana bagaimana perannya sebagai pilar-pilar sosial.

2.1.3.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan di wilayahnya, sangatlah ditentukan oleh kemampuannya menciptakan berbagai inovasi dalam mensinergikan sistem ketenagakerjaan dengan kondisi demand dan supply yang ada di wilayahnya, serta dapat memfasilitasi bertemunya demand dan supply di pasar kerja yang sudah berubah total. Adapun capaian pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
pada RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1.	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	45,69	100	84,21	100	42,11	100	100	100
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi (%)	28,62	34,98	31,04	44,5	35,72	41,50	36,04	36,34	36,68
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,20	67,80	4,91	2,2	8,55	1,17	8,57	8,60	8,62
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	37,61	45,76	41,95	50,46	46,29	64,84	50,63	59,31	61,92
5.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	31,77	18,08	35,52	24,78	36,10	61,42	36,50	36,99	37,97
6.	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	8,14	9,26	12,36	19,2	16,58	25,13	20,80	25,01	29,23
7.	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%)	45,76	75,23	54,31	64,43	62,87	84,27	71,42	84,32	91,14
8.	Persentase Serapan Tenaga Kerja	31,77	18,08	35,52	24,7	36,01	68,23	36,50	36,99	37,97

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2024

Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan daerah Tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja adalah (i). Memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dan dampak Perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristiknya; (ii) Memperkirakan persediaan tenaga kerja tahun 2018-2023 dengan berbagai karakteristiknya;(iii). Memperkirakan kesempatan kerja yang akan datang dengan berbagai karakteristik, baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun faktor lainnya; (iv). Memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap (penganggur terbuka) dan (v). Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Dari pelaksanaan tahun 2023 capaian indikator Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja di Sumatera Barat sebesar 42,11 % dari target 100%. Penyusunan RTKD ini diwajibkan kepada semua Kabupaten Kota karena menjadi indikator dalam LPPD. RTKD ini disusun sekali dalam 5 tahun. Kondisi pada tahun 2022 beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyusun yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Sijunjung, untuk itu perlu komitmen bagi daerah-daerah tersebut untuk segera menyusunnya.

Tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya. Sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam melamar kerja. Bila sudah tersertifikasi, artinya seseorang dapat membuktikan bahwa kemampuannya sudah diakui oleh penguji profesional. Keuntungan dan tujuan dari sertifikasi adalah meningkatkan efisiensi kinerja HRD. Memastikan industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga kerja berbasis kompetensi. Membantu dan mempermudah dalam pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Pada tahun 2023 indikator Tenaga kerja bersertifikat dari target 35,72 % terealisasi sebesar 41,50 %. Pencapaian ini didukung oleh adanya jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di daerah serta dukungan regulasi serta sarana dan prasarana pelatihan.

Salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan kita adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Sementara di dunia usaha membutuhkan produktivitas dalam menghasilkan produk –produk dalam mempertahankan pertumbuhan usaha yang dilakukan. Produktivitas sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja, dimana semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula produktivitasnya. Pada indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi capaian pada tahun 2023 sebesar 1,17 persen lebih rendah dari target sebesar 8,55 %. Rendahnya indikator ini secara umum didasari oleh pendidikan dari tenaga kerja itu sendiri dan kurangnya pelatihan produktivitas yang diberikan serta penggunaan alat-alat dan metode kerja yang baik masih rendah.

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2023 menunjukan realisasi sebesar 64,84 % dibandingkan dengan target sebesar 46,29 %, hal ini didukung oleh sosialisasi, koordinasi dan sinergitas lintas dan kemitraan antar lembaga dalam pembahasan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi pada tahun 2023 capaiannya sebesar 61.42 % dari target sebesar 36,1 %, peningkatan capaian ini karena semua sector usaha baru bangkit dari pandemi covid-19 yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini, walaupun sudah terbukanya peluang kerja sector formal di dalam maupun di luar negeri yang bisa meningkatkan indikator ini kedepannya.

Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, capaian indikator ini sebesar 25,13 % lebih besar dari target sebesar 16,58 %, capaian ini didukung oleh penerapan strategi pelaporan dan implementasi rencana kerja unit pengawasan yang baik, serta dukungan dari fungsional pengawas

ketenagakerjaan yang mampu menjadi mitra dari perusahaan-perusahaan yang dikoordinir dalam pengawasannya, kedepan perlu peningkatan jumlah pengawas ketenagakerjaan agar indikator ini semakin baik.

Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan capaian indikator ini sebesar 84,27% yang melebihi dari target sebesar 62,87 %, peningkatan realisasi ini di dukung oleh adanya mediator yang memfasilitasi permasalahan antara perusahaan dan pekerja, dan meminimalisir kasus menjadi lebih berat, mediator ini ada di kabupaten kota (Bipatrit), antara perusahaan dan pekerjaan, tripartit melibatkan pemerintah. Kasus yang diangkat baru sebatas tindak pidana ringan sehingga lebih cepat diselesaikan.

Persentase Serapan tenaga Kerja pada tahun 2023 capaiannya sebesar 68,23 % dari target sebesar 36,01%. Tercapainya indikator ini disebabkan dunia usaha dan lapangan kerja yang sudah bangkit dari pandemic covid-19, dan sudah menerapkan langkah-langkah konkrit dengan peningkatan penempatan tenaga kerja dan penciptaan kewirausahaan baru.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan dilembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui indeks pemenuhan hak anak, dan rasio kekerasan terhadap anak. Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak juga masih menjadi salah satu program yang diprioritaskan.

Tabel 2.45
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
	2021		2022		2023		2024	2026	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	4,00	3,87	4,15	7,44	4,30	4,30	4,45	4,60	4,75
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan)	17	19,88	16	8,18	15	8,13	14	13	12
3. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio)	2,16	3,13	2,12	3,70	2,08	3,5	2,04	2,00	1,96
4. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	17	17	17	17	18	19	18	19	19
5. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
	2021		2022		2023		2024	2026	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
6. Persentase perempuan di legislative (%)	10,76	10,77	10,76	10,77	10,76	10,77	12,30	12,30	12,30
7. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	11,54	15,38	11,54	21,15	13,2	25	13,2	15,09	15,09
8. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,60	37,57	37,65	37,43	37,70	37,7	37,75	37,80	37,85
9. Indeks pemenuhan hak anak	64,73	66,15	66,03	59,64	67,53	65,73	69,13	70,83	72,63
10. Jumlah kasus perceraian baru	6.325	4.380	6.225	3.955	6.125	2077	6.025	5.925	5.825

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data pada diatas bahwa perkembangan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak berdasarkan menunjukkan bahwa persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 4,3 %, pencapaian ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman perangkat Daerah terhadap ARG, adanya koordinasi dan edukasi yang dilakukan secara intens dan konsisten kepada perangkat Daerah tentang ARG.

Untuk capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2023 sebesar 8,13, rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 19,88. Pencapaian ini disebabkan karena adanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang sudah memiliki layanan dan sarana pengaduan masyarakat, adanya kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah adanya Satuan Tugas perlindungan perempuan.

Capaian Indikator kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio) tahun 2023 sebesar 3,50 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni sebesar 3,13, dan target yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat tercapai yakni 2,12, pencapaian ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman akar penyebab kekerasan terhadap anak, masih rendahnya pemahaman tentang penegakan hukum dan penerapan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak serta masih lemahnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya capaian jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE pada tahun 2023 sudah memenuhi target yakni sebesar 19 Kabupaten/Kota, pencapaian ini disebabkan karena adanya Sistem Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi Daerah (Randa) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang memuat indikator-indikator tentang penilaian APE.

Sedangkan indikator perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi dengan Predikat Utama sudah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian ini disebabkan antara lain karena terpenuhinya tujuh instrument kunci penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yakni Komitmen kepala daerah, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran.

Untuk Capaian indikator persentase perempuan di legislatif sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 10,77%, pencapaian ini disebabkan karena adanya partisipasi perempuan dalam memilih perempuan di legislative dan adanya kebijakan tentang perempuan di partai politik bahwasanya minimal 30% perempuan terlibat didalam kepengurusan partai.

Namun angka ini masih jauh dari komposisi yang ingin dicapai yaitu jumlah keterwakilan perempuan di parlemen minimal sebesar 30 %, hal ini sebagian besar masih disebabkan oleh : 1. masih rendahnya kesadaran perempuan pemilih terhadap pentingnya memilih perempuan untuk duduk sebagai anggota parlemen yang tentunya lebih peka dengan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan; 2. masih adanya persepsi masyarakat yang merugikan perempuan yang ingin maju menjadi calon legislative; 3. Adanya kebijakan partai yang menempatkan perempuan sebagai calon legislative semata mata hanya untuk dapat lolos persyaratan untuk mengikuti pemilu sehingga perempuan yang dicalonkan tersebut terkesan seadanya; dan 4. masih adanya anggapan bahwa laki-laki dianggap lebih mampu dibandingkan perempuan dalam memimpin/mengambil keputusan.

Untuk Capaian indikator pemenuhan hak anak pada tahun 2023 sebesar 65,73 %, dari yang ditargetkan sebesar 65,73 %, sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk indikator jumlah kasus perceraian baru dengan capaian sebesar 2077 dari target yang ditetapkan yakni sebesar 6.125. Pencapaian ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan serta Kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama terkait dengan memberikan edukasi pra nikah kepada calon pengantin.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan-tau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi untuk menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pada urusan pangan terdapat beberapa indikator yang diukur dalam periode RPJMD 2016-2021 seperti ketersediaan pangan utama, penguatan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan, ketersediaan pangan serta skor pola pangan harapan, seperti yang terlihat capaiannya pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46
Perkembangan dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase cadangan pangan (%)	86	86,41	92	84,02	94	168,06	96	98	100
2. Ketersediaan pangan utama (ton)	820.798	912.699	833.110	885.080	845.607	852366	858.291	871.165	884.233
3. Skor Pola Pangan Harapan (skor)	82	83,8	82,5	89,80	83	90,5	84	84,5	85
4. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%)	82	86,3	83	88,52	83,5	84	84	84,5	85
5. Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)									
- Beras	CV ≤10	0,55	CV ≤10	2,44	CV ≤10	CV <2,71	CV ≤10	CV ≤10	CV ≤10
- Cabe Merah	CV ≤25	20,57	CV ≤25	20,50	CV ≤25	CV <21,09	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25
- Bawang Merah	CV ≤25	12,4	CV ≤25	23,95	CV ≤25	CV < 19,54	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Ketersediaan Pangan Utama (ton beras) pada tahun 2023 adalah sebesar 852.366 ton beras. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2022 yaitu sebesar 885.080 ton. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan luas lahan sawah sebesar 16% di Kota Padang dan Kab, Padang Pariaman akibat adanya pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Sumber: Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar). Hal ini memberikan dampak juga dalam perhitungan ketersediaan pangan utama di Sumatera Barat yang juga berpengaruh pada tingkat persentase cadangan pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berada di 168,06 % sedangkan target yang ditetapkan sebesar 94%.

Capaian Skor Pola Pangan Harapan di tahun 2023 sebesar 90,5 lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 89,90%. hal ini antara lain dikarerenakan bahwa pencapaian penanganan daerah rawan pangan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan bertambahnya nagari mandiri pangan yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Jumlah awal Nagari Mandiri Pangan adalah sebanyak 32 nagari/desa pada tahun 2017. Saat ini menjadi 113 nagari/desa di tahun 2023. Pertambahan nagari mandiri pangan sebagai replikasi pada kabupaten/kota dalam rangka peningkatan ketahanan dan keamanan pangan di Sumatera Barat.

Capaian indikator Ketersediaan Pangan (Kkal/kapita/th) pada tahun 2022 adalah sebesar 146,79 kkal/kapita/tahun. Penurunan capaian ini terjadi karena perubahan metode penghitungan luas panen menggunakan metode KSA yang telah disepakati antara BPS dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memberikan dampak

juga dalam perhitungan ketersediaan pangan utama di Sumatera Barat. Sedangkan pencapaian skor pola pangan harapan di Sumatera Barat meningkat pada tahun 2023 yakni mencapai 90,5 %. Dengan tercapainya target PPH menandakan bahwa pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sudah memasyarakat dengan baik. Skor PPH penduduk Sumatera Barat sudah melebihi dari target yang ditetapkan tetapi belum memenuhi target PPH ideal sebesar 100 dan target nasional 95.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain dengan menetapkan Regulasi Ketahanan Pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan kepemilikan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut serta terkait dengan status tanah ulayat, sehingga permasalahan tanah cenderung menghambat masuknya investasi dari luar yang menginginkan kepastian lahan sebelum berinvestasi.

Sedangkan kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas merupakan kewenangan pusat sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yakni dengan mengupayakan pembebasan lahan baik dalam mendukung investasi maupun pembangunan infrastuktur.

Kinerja urusan pertanahan diukur melalui indikator persentase kasus sengketa (permasalahan pertanahan) yang terfasilitasi. Indikator tersebut merupakan cerminan dari terlaksananya urusan bidang pertanahan dengan menerima permohonan kasus sengketa (permasalahan) pertanahan yang terfasilitasi. Pada tahun 2023, seluruh kasus yang masuk ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik atau mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah berkurangnya sengketa terhadap tanah-tanah negara di daerah. Keberhasilan capaian ini didorong oleh koordinasi dan pendekatan baik dengan semua stakeholder terkait

Tabel 2.47
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	N.A	N.A	1	100	2	2	3	4	5
2. Persentase pengadaaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Persentase lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota yang tersedia (%)	N.A	N.A	1	1	2	2	3	4	5
4. Persentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan/hutan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024 terdapat perubahan metode erhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) sebagai komponen penyusun IKLH. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera Barat pada tahun 2022 mengalami capaian 75,59 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dengan capaian 75,04 dengan target 77,95.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, selain IKLH juga terdapat beberapa indikator lainnya antara lain Ketaatan penanggung jawab usaha da-tau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Persentase Sampah dan LB3 Terkelola, Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapan lingkungan, Persentase penurunan beban pencemaran dan Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan dengan capaian pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	76,94	80,75	77,43	75,59	77,95	75,04	78,41	78,81	79,25
2. Ketaatan penanggung jawab usaha da-tau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	75	61,65	76	70	77	78	78	79	80
3. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	55	66,97	60	61,11	65	61,34	70	75	80
4. Persentase pengurangan sampah (%)	15	9,21	17	14,36	19	16,32	21	23	25
5. Persentase penanganan sampah (%)	54	47,24	56	67,21	58	50,31	60	62	64
6. Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun)	237.536	251.562	261.290	298.983	287.419	294.567	316.160	347.776	382.554
7. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapan lingkungan (%)	75	75,65	77	81,78	82	105,61	93	96	99
8. Persentase penurunan beban pencemaran (%)	2,5	4,05	2,5	2,7	2,5	2,74	2,5	2,5	2,5
9. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)	0,05	0,07	0,05	0,60*	0,05	0,15	0,05	0,05	0,05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2024

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sehingga sasaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni mengupayakan agar seluruh warga negara memiliki dokumen kependudukan yang lengkap serta informasi data kependudukan diketahui oleh semua pihak dan menjadi salah satu data dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun perkembangan terhadap pencapaian urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah ini..

Tabel 2.49
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja								
			2021		2022		2023		2024	2025	2026
			T	R	T	R	T	R	T	T	T
1.	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pemanfaatan data kependudukan (%)	%	50	49,02	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	%	100	87,94	86,62	101,47	90,50	91,79	92,37	94,25	96,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, 2024

G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan data pada tabel di bawah ini memperlihatkan indikator-indikator pelaksanaan pembangunan selama tahun 2023 yang dapat dikatakan cukup berhasil. Secara kuantitatif, realisasi pencapaian sampai dengan tahun 2021 dan 2023 cenderung sama, hal ini dikarenakan target sasaran yang menjadi tujuan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya adalah kelompok/lembaga yang sama yang selalu ditingkatkan kapasitasnya. Sehingga diharapkan peranan dan kontribusi lembaga yang terbina dapat meningkat ditengah-tengah masyarakat.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain yakni : 1). Tersedianya kecukupan anggaran dalam melakukan pembinaan kelembagaan, 2). Intensnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi baik kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau kepada PKK, 3). Sistem pengkaderan kelompok/lembaga binaan telah berjalan dengan baik, 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan LPM 5). Tingginya partisipasi lembaga PKK dalam pelaksanaan pembangunan terutama

dalam pelaksanaan pembinaan Posyandu dan 6) Koordinasi dan Komitmen Pemerintah dalam Melakukan Pembangunan Di desa secara Berkesinambungan

Pada tahun 2023, capaian pengentasan desa tertinggal sebanyak 10,71 %, sedangkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 17,12 % serta jumlah nagari/desa dan kelurahan dengan kategori cepat berkembang telah sebanyak 627 Desa/Nagari/Kelurahan. Pencapaian indikator-indikator kinerja ini dipacu mengingat pengentasan desa tertinggal merupakan program nasional yang didukung oleh dana desa, sehingga menjadi prioritas nasional dan daerah, selain itu, Pemerintahan daerah melalui Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki komitmen yang kuat terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Mandiri.

Pada tahun 2023 jumlah Badan Usaha Milik Desa dengan klasifikasi maju telah bertambah 85 unit BUMDes hal ini mengingat BUMDes diatur dalam penggunaan dana desa serta masyarakat telah menyadari bahwa peningkatan klasifikasi BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Selain itu juga Lembaga masyarakat yang aktif juga semakin meningkat seperti Jumlah KAN aktif pada tahun 2023 berjumlah 400 KAN, Jumlah Posyandu Mandiri yang aktif sebanyak 2.500, LPM Mandiri berjumlah 15 dan jumlah Dasa Wisma Mandiri sebanyak 11.800. hal ini dipacu antara lain yakni kelembagaan KAN sudah diatur dan ditetapkan dalam legalitas hukum yang ada di Pemerintahan Daerah, sehingga resiko dalam dualisme konflik menjadi minim, meningkatnya penguatan Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang merupakan alat penyusunan rencana program, pembinaan, monitoring dan Evaluasi, Peran dan fungsi LPM diwadahi oleh Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas lembaga dan keterlibatan dalam pembangunan Nagari/Desa serta meningkatnya koordinasi lintas sektor yang ada di Nagari/Desa dengan Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota. Dan secara umum semua lembaga ini yang telah aktif dan melaksanakan perannya masing-masing. Adapun capaian indikator kinerja urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.50

Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

N O	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA								
			2021		2022		2023		2024	2025	2026
			T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	%	43,47	46,15	8,6	28,57	10,43	10,71	13,04	14,78	9,5
2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	%	0,60	6,65	2,02	73,68	2,02	17,12	2,02	2,02	2,02
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	BUMDes	41	70	51	51	61	85	71	81	91
4	Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	Nagari/Desa	381	381	410	417	450	627	500	550	600
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif	-									

N O	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA								
			2021		2022		2023		2024	2025	2026
			T	R	T	R	T	R	T	T	T
	- Kerapatan Adat Nagari (KAN)	-	299	326	350	350	400	400	450	500	544
	- Posyandu - Mandiri	-	2.319	2.356	2.400	2.400	2.500	2500	2.600	2.700	2.800
	- LPM mandiri	-	NA	0	7	7	15	15	25	37	50
	- Dasa Wisma Mandiri		10.800	10.800	11.300	11.300	11.800	11800	12.300	12.800	13.300

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, 2024

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Sehingga diperlukan upaya pengendalian penduduk yang tumbuh seimbang. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Adapun capaian pada urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana data dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51

Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (indeks)	2,73	2,6	2,70	2,46	2,67	2,67	2,64	2,61	2,58
2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	62,18	50,60	62,58	61,08	63,00	63	63,41	63,92	64,32
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	13,00	22,40	12,44	22,21	11,22	11,25	10,66	10,00	9,34
4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	19,60	11,8	19,10	12,2	18,60	18,6	18,10	17,60	17,10
5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,60	22,2	21,80	22,5	22,00	22	22,20	22,40	22,60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Povinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Untuk indikator angka kelahiran Total/TFR digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan social ekonomi, menunjukan tingkat keberhasilan program KB, meningkatkan program pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan peraatan anak serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran, target tahun 2023 yakni 2,67 , dan sesuai dengan target.

Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) diperoleh perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif dengan jumlah seluruh

Pasangan Usia Subur, atau PA/PUS x 100 persen, indicator ini bertujuan untuk mengukur perbaikan Kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran, capaian tahun 2023 yakni sebesar 63% dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Angka Unmet need (kebutuhan ber KB) diperoleh dari proporsi pasangan usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) meliputi perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum dalam keadaan subur dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB. Capaian tahun 2023 yakni sebesar 11,2% dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya indikator Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19) yang bertujuan untuk menekan penurunan fertilitas remaja perempuan melalui akses universal terhadap pelayanan Kesehatan reproduksi yang menjadi upaya untuk melindungi remaja dari resiko perkawinan anak, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular Seksual, HIV AIDS dan kekerasan seksual. Sudah ditetapkan target sebesar 18,6 dan sesuai dengan capaiannya capaiannya pada tahun 2023 yakni sebesar 18,6, beberapa upaya untuk menurunkan angka ASFR ini yakni dengan memberikan dana BOKB ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan jangkauan pelayanan di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galcitas).

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 25-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 25-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang penting. Salah satu target besar dari upaya pengendalian penduduk adalah mengupayakan dengan menekan angka kelahiran dengan menghimbau masyarakat menikah pada usia ideal, 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Menikah pada usia ideal tersebut memberikan keuntungan dengan dapat meminimalkan resiko kematian ibu dan anak saat melahirkan, memberikan Kesehatan dan Pendidikan yang maksimal bagi anak dengan catatan orang tua telah masuk dalam kategori mapan serta usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki juga menunjukkan telah masuk pada posisi matang dan siap berumah tangga. Pada tahun 2023, MUKP di Sumatera Barat sebesar 22 tahun dan sudah sesuai dengan target, ini merupakan

awal yang cukup sangat bagus untuk membentuk pola Pendidikan dan Kesehatan keluarga yang baik.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan melingkupi 4 (empat) bidang pelayanan, yaitu: perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Kinerja penyelenggaraan perhubungan darat dapat dilihat dari indikator tingkat ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan, kinerja perhubungan laut dan ASDP, serta perhubungan udara melalui indikator tingkat ketersediaan prasarana perhubungan udara dan bidang perkeretaapian dapat terlihat dari tingkat pelayanan transportasi kereta api.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat beberapa perubahan pada urusan pemerintah daerah, salah satunya pada urusan penerbangan yang tidak lagi menjadi urusan provinsi, sehingga dalam perencanaan ke depan tidak dilaksanakan.

Dilihat dari perkembangan indikator kinerja utama untuk urusan perhubungan dalam 2 (dua) tahun terakhir, rasio konektivitas mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Rasio konektivitas menggambarkan persentase wilayah yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat maupun laut. Rasio konektivitas tahun 2022 adalah 0,662 (66,2%) meningkat menjadi 0,671% pada tahun 2023 artinya 0,671 % wilayah di Provinsi Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda transportasi darat dan laut. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka target Rasio Konektivitas tahun 2023 adalah 0,676 % sedangkan capaian tahun 2023 adalah 0,671 (67,1%). Kendala yang dihadapi adalah adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak, hal ini mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas.

Indikator Kinerja Daerah yang menjadi urusan perhubungan adalah Kinerja Lalu Lintas, yang digambarkan dengan angka V/C Rasio. Capaian V/C Rasio Tahun 2023 adalah 0,48. Angka ini dapat diartikan bahwa kinerja lalu lintas di ruas jalan provinsi bagus, arus cukup stabil, gerak kendaraan dikendalikan dan pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan angka V/C Rasio, dari 0,53 menjadi 0,48. Target indikator V/C Rasio yang harus dicapai untuk tahun 2023 adalah 0,5 sedangkan capaian tahun 2023 adalah 0,48. Dalam hal ini berarti target kinerja lalu lintas

untuk tahun 2022 belum tercapai. Kendala yang dihadapi dan menghambat kinerja lalu lintas diantaranya adalah (1) Banyaknya angkutan umum yang tidak beroperasi yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi, hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya angkutan yang belum memperpanjang KP, maupun izin trayek; (2) Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga Ketika diperjalanan dapat menghambat kinerja lalu lintas yang ada.

Indikator kinerja berikutnya adalah jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang). Perhitungan terhadap jumlah penumpang terangkut dilakukan berdasarkan rekapan penumpang terangkut pada terminal tipe B yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah penumpang terangkut pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 18.650.012 orang pada tahun 2022 menjadi 18.804.976 orang pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 yaitu 19.000.000 orang sementara realisasi 18.650.012 orang, maka target untuk indikator ini belum tercapai. Yang menjadi factor penghambat pencapaian target ini adalah: (1) Dikarenakan adanya angkutan umum yang tidak beroperasi, sehingga menyebabkan tidak terdatanya penumpang di terminal, kemudian adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar Terminal sehingga tidak terdata penumpang yang naik dan turun di terminal; (2) Adanya pelaksanaan razia gabungan sehingga angkutan umum tersebut melakukan penyimpangan trayek dan tidak melalui terminal penumpang Tipe B; (3) Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum.

Tabel 2.52
Perkembangan Capaian dan Targt Indikator Urusan Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021		2022		2023		Target Kinerja		
		T	R	T	R	T	R	2024	2025	2026
1	Rasio konektivitas Provinsi	0,661	0,674	0,668	0,662	0,676	0,671	0,684	0,691	0,695
2	Kinerja lalu lintas provinsi	0,54	0,52	0,52	0,53	0,50	0,48	0,48	0,47	0,45
3	Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (ribu orang)	18.000	18.127	19.000	18.650	20.000	18804976	22.000	23.000	24.000

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, 2024

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, secara umum tergambar pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mencapai 99%. Seluruh jaringan fiber optik sudah tersedia untuk semua OPD di wilayah Kota Padang kecuali RSUD Achmad Muchtar, RSUD Pariaman, RSUD M. Natsir dan Badan Penghubung, hal ini dikarenakan lokasi kantor tidak berada di Kota Padang sehingga penyediaan akses internet pada OPD tersebut dilakukan secara mandiri.

Dari sisi layanan publik baru 69,33 % Unit Kerja Pelayanan Publik yang menyelenggarakan layanan secara online dan terintegrasi pada tahun 2023. Ini dikarenakan belum semua Unit Kerja Pelayanan Publik dilakukan pendataan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku instansi yang merupakan supporting teknis bagi Unit Kerja Pelayanan Publik, dimana dari 75 Unit Kerja Pelayanan Publik baru 42 Unit Kerja Pelayanan Publik yang dilakukan pendataan. Namun pencapaian ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 55% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 sebesar 50%. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2023 mengalami peningkatan, bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dari 13,83 % pada tahun 2022, meningkat menjadi 19,2 % pada tahun 2023.

Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah termasuk penilaian pada penerapan SPBE. Pada tahun 2023, sudah dilakukan penilaian terhadap Indeks SPBE oleh KemenPAN RB dengan capaian nilai SPBE Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dari nilai 3,18 menjadi 4,3 . Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, diantaranya adalah telah disusunnya Peta Rencana SPBE yang merupakan pedoman penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan koordinasi yang baik dari perangkat daerah untuk mengumpulkan bukti evidence sesuai dengan indikator-indikator yang ada di evaluasi SPBE sesuai dengan tingkat kematangan.

Tabel 2.53
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	92	100	99	100	100	100
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)	50	50	55	56	60	69,33	65	70	75
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	NA	13,66	10	13,90	20	19,2	30	40	50
4. Indeks SPBE	3,10	2,8	3,20	3,18	3,30	4,3	3,40	3,50	3,60

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
a. Indeks domain kebijakan internal SPBE	3	2,8	3,1	2,8	3,2	4,4	3,3	3,4	3,5
b. Indeks domain Tata Kelola SPBE	3	2,22	3,1	2,2	3,2	2,91	3,3	3,4	3,5
c. Indeks domain Manajemen SPBE	3	1	3,1	1	3,2	4,45	3,3	3,4	3,5
d. Indeks domain Layanan SPBE	3	3,55	3,1	3,55	3,2	4,45	3,3	3,4	3,5

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat khususnya anggota koperasi dari tahun ke tahun. Nilai tambah pendapatan masyarakat dalam bentuk PDRB koperasi tersebut berasal dari pendapatan koperasi yang berasal dari usaha yang dijalankan oleh koperasi, baik dari usaha simpan pinjam maupun usaha sektor riil seperti pengadaan saprodi pada koperasi produsen, waserda pada koperasi konsumen, pemasaran hasil produksi anggotanya pada koperasi pemasaran dan jasa biro pariwisata, travel pada koperasi jasa dan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan jenis koperasi serta jenis usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar masing-masing koperasi.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pilar utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Barat. Keberadaan UKM diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi masyarakat Sumatera Barat yang memiliki jiwa berwirausaha. Aktivitas UKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya UKM

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena minat masyarakat kepada Koperasi yang konvensional semakin menurun dan lebih menyukai koperasi syariah sedangkan pertumbuhan koperasi syariah belum terlalu signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, dengan adanya pandemic covid maka banyak koperasi yang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya dan tahun 2023 imbas dari pandemic covid masih terasa dengan masih banyaknya koperasi yang mulai tumbuh kembali. Secara lebih detail kinerja urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54

Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		Kinerja Tenaga		
			T	R	T	R	T	R	2024	2025	2026
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	16,43	2,65	17,94	17,98	20,49	21,15	24,39	29,21	35,01

No	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		Kinerja Tenaga		
			T	R	T	R	T	R	2024	2025	2026
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	1,90	3,92	2	9,31	3	9,58	3,7	4,2	5

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, 2024

Adapun capaian kinerja urusan ini terlihat antara lain pada peningkatan persentase koperasi yang berkualitas yang pada tahun 2023 dengan realisasi 21,15 % meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 17,98 % dan persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha sebesar 9,58 % pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3 %.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 antara lain yakni adanya pendampingan yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk mendampingi koperasi dalam melaksanakan RAT, adanya upaya memfasilitasi koperasi untuk dapat melakukan MoU dengan berbagai lembaga untuk mendukung permodalan koperasi, seperti dengan LPDB dan PIP, tersedianya beberapa program dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian wirausaha serta adanya fasilitasi untuk wirausaha agar ikut andil dalam pelaksanaan beberapa even promosi seperti Bazar dan pameran.

Namun demikian, juga terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pencapaiannya antara lain masalah kredit macet pada beberapa koperasi masih ada sehingga berdampak kepada penurunan volume usaha koperasi serta Koperasi terkendala dalam pengembangan usaha karena terbatasnya modal koperasi sehingga volume usaha koperasi tidak mengalami peningkatan.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perkembangan realisasi investasi PMDN cukup berfluktuatif, dimana pada beberapa rentang waktu mengalami penurunan dan rentang waktu lainnya mengalami perbaikan atau peningkatan. Tahun 2021 dan 2022 merupakan tahun yang cukup berat bagi dunia investasi PMDN terutama PMA karena pada saat itu dengan adanya pandemic covid mengakibatkan beberapa dampak yang cukup signifikan terhadap masa depan perkembangan perekonomian yang tidak dapat di prediksi dengan baik.

Tahun 2023 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan diharapkan beberapa investasi PMDN dan PMA mulai masuk kembali ke Sumatera Barat. Namun demikian persoalan investasi di Sumatera Barat meskipun iklim investasi semakin membaik masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang belum terselesaikan antara lain masih lemahnya dukungan infrastruktur menunjang potensi investasi serta masih terdapat regulasi kebijakan di daerah belum sepenuhnya mendukung potensi investasi, adanya permasalahan lahan yang ada di Sumatera Barat yang dominan merupakan Tanah ulayat, Tanah kaum dan

sebagainya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyelesaian permasalahan lahan, terdapatnya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi. Serta Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Tabel 2.55
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	6,00	-16,69	6,00	0,51	8,00	53,79	9,50	10,50	11,50

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Barat, 2024

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Capaian Urusan Pemerintahan Bidang kepemudaan dan olahraga, secara umum tergambar sebagaimana tabel dibawah ini. Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) di tahun 2023 sebanyak 0,104 % dan mencapai sesuai target yang ditetapkan sebanyak 0,104 %, hal ini disebabkan masih rendahnya pelaku wirausaha dengan rentan usia pemuda sesuai dengan UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Begitupun capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 5,76 % dan indicator ini sudah mencapai target yang diharapkan yakni sebesar 5,16 %, hal ini terjadi karena tidak berjalannya kaderisasi pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sehingga rendahnya jumlah pengurus atau anggota OKP yang aktif pada usia produktif atau pada usia Pemuda.

Sedangkan capaian untuk Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga, dimana target yang ditetapkan sebanyak 26 Medali dan pencapaian pada Tahun 2023 sebesar 39 Medali, hal ini didukung dengan komitmen pemerintah daerah dan legislatif yang tinggi untuk kemajuan prestasi olah raga Sumatera Barat dan sudah adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang keolahragaan yang mendukung.

Tabel 2.56
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,0518	0,0412	0,078	0,048	0,104	0,104	0,130	0,156	0,182
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	4,70	4,5	4,93	4,2	5,16	5,76	5,39	5,62	5,85
3. Peningkatan prestasi olahraga (medali)	27	9	26	74	26	39	41	29	29

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat, 2024

N. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan urusan wajib statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan pembangunan daerah serta dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, terdapat 2 (dua) indikator pada urusan pemerintahan bidang statistik yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah telah sebesar 75 %, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 63,00 %. Sedangkan untuk indikator kinerja yakni Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah baru telah sebesar 75%, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% dan juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 67 %. Belum seluruhnya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dikarenakan karena terdapatnya beberapa Perangkat Daerah yang belum berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam penyerahan data terkait penggunaan data statistik sektoral.

Tabel 2.57
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Statistik Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	50	66,7	60	63	70	75	80	90	100
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	50	60	60	67	70	75	80	90	100

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
	melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)									

Sumber : Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, 2024

O. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Penilaian Indeks Keamanan Informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan capaian tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 64,31 %, dan menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,14 %. Semua area dalam penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sudah terpenuhi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di 5 area, yaitu (1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan, (2) Tata Kelola Keamanan Informasi, (3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, (4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi dan (5) Pengelolaan Aset Informasi.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.

Tabel 2.58

Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Persandian Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	44	58,6	45	66,14	47	64,31	50	55	60

Sumber : Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, 2024

P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sesuai Amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, amanah konstitusi ini diwujudkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Sumatera Barat yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sumatera Barat sebagai basis utama kebudayaan Indonesia telah melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

Pada periode pelaksanaan RPJMD sebelumnya kinerja urusan kebudayaan lebih dititikberatkan untuk peningkatan jumlah warisan budaya yang diakui oleh pemerintah baik itu warisan budaya tak benda (intangible) maupun warisan budaya benda (tangible), sedangkan untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan lebih diarahkan kepada pelestarian yaitu: pelestarian warisan budaya benda (cagar budaya) dan pelestarian budaya tak benda.

Pencapaian urusan kebudayaan untuk tahun 2023, antara lain dengan terlestarikannya 20 karya budaya, 13 kesenian tradisional sebanyak, 3 sejarah lokal dan 11 warisan budaya benda. Berikut perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan.

Tabel 2.59

Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	66,67	100	100	100
2. Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan (%)	80,5	80,49	81	108,93	86	96	86,4	86,7	87,0

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Q. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Pemenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pelayanan perpustakaan yang penyelenggaraan urusannya dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan antara lain inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi misalnya membaca dengan menggunakan handphone, memperbanyak buku digital, ekstentifikasi melalui mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, perlombaan serta pemilihan duta baca, bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi, dan kolaborasi dengan pihak ketiga dengan menyalurkan dan memberikan bantuan buku kepada komunitas, pondok pesantren, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan.

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan berdasarkan indikator yang ada, menunjukkan realisasi yang baik terlihat dari terpenuhinya target nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPML) pada Tahun 2023 meskipun realisasi keduanya menurun dibanding Tahun 2022. Adapun capaian kinerja urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA									
	2021		2022		2023		2024	2025	2026	
	T	R	T	R	T	R	T	T	T	
1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai)	58,05	75	63,30	68,87	64,30	64,30	65,30	66,30	67,30	
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	11,05	14,17	13	14,14	14	14	15	16	17	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional bahwa nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Sumatera Barat tahun 2023 baru mencapai 64,30, meskipun melebihi target yang ditetapkan namun turun dibanding dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mendorong terpenuhinya target nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Sumatera Barat, antara lain : melaksanakan Gerakan ASN Membaca 30 menit/hari, dengan membaca 12 judul buku setahun dan selanjutnya diperluas cakupan wilayah administratifnya seperti cakupan sekolah, cakupan segmen umur, dan basis utama keluarga yang kemudian diperluas ke ke kantor/ lembaga non pemerintahan, kantor-kantor swasta, ruang tunggu praktik dokter, unit usaha UKM seperti cafe barber shop, dan lainnya; melaksanakan Lomba Perpustakaan tingkat SMA/SMK se Sumatera Barat; membuat Pojok Baca di kantor-kantor Pemerintahan dan BUMN; melaksanakan Program Waqaf Buku untuk pustaka nagari dan taman bacaan masyarakat; melaksanakan Lomba Menulis Dan Pidato Keteladanan Bung Hatta tingkat SMA/SMK se Sumatera Barat.

Sejalan dengan hal di atas, Indek Pembangunan Literasi Masyarakat pada Tahun 2023 juga telah mencapai target meskipun nilainya masih cukup rendah dengan capaian 14. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian kedepannya. Faktor pendorong pencapaian target

tersebut adalah adanya pemerataan layanan perpustakaan (Seperti pustaka keliling, ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, ketersediaan perpustakaan nagari, perpustakaan di sekolah-sekolah, perpustakaan khusus di OPD/instansi).

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan kearsipan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala provinsi, alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan dan digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah

Tabel 2.61
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	71	71,29	71.50	75,29	72	72	72.50	73	73.50
2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	76.66	76,67	76.66	86,67	76.66	76,66	76.66	76.66	76.66

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel diatas terlihat perkembangan yang cukup baik terhadap capaian dan target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai pasal 40 dan 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tingkat

ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di Provinsi Sumatera Barat yang sudah lebih baik karena telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, sudah lebih baik lagi dimana pencapaiannya juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, diantaranya adalah tersedianya Peraturan Gubernur untuk kegiatan tentang pengelolaan arsip seperti tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Arsip Dinamis (SKAD) yang merupakan komponen wajib dalam kegiatan pengelolaan arsip; dan tersedianya kegiatan yang dapat dijadikan wadah untuk memberikan pembinaan terhadap OPD tentang proses pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip.

2.1.3.3. Urusan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan di Sumatera Barat. Dengan posisi geografis Sumatera Barat yang berada di pesisir pantai bagian barat pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor ini. Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Sumatera Barat tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan.

Sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas. Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan tata ruang untuk mengelola sumber daya alam di laut, telah tertuang dalam Perda 2 tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) tahun 2018-2038 mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km² dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 570,55 Km ditambahkan dengan Kep. Mentawai menjadi 1.973,246 Km dan 185 pulau-pulau kecil. Adapun capaian kinerja dari pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.62
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)	467.082	481.143 ,69	477.362	503.95 0.37	487.9 49	479475 ,132	499.31 1	512.01 3	525.30 7
2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	80	84,34	82	85	84	87	86	90	92

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT

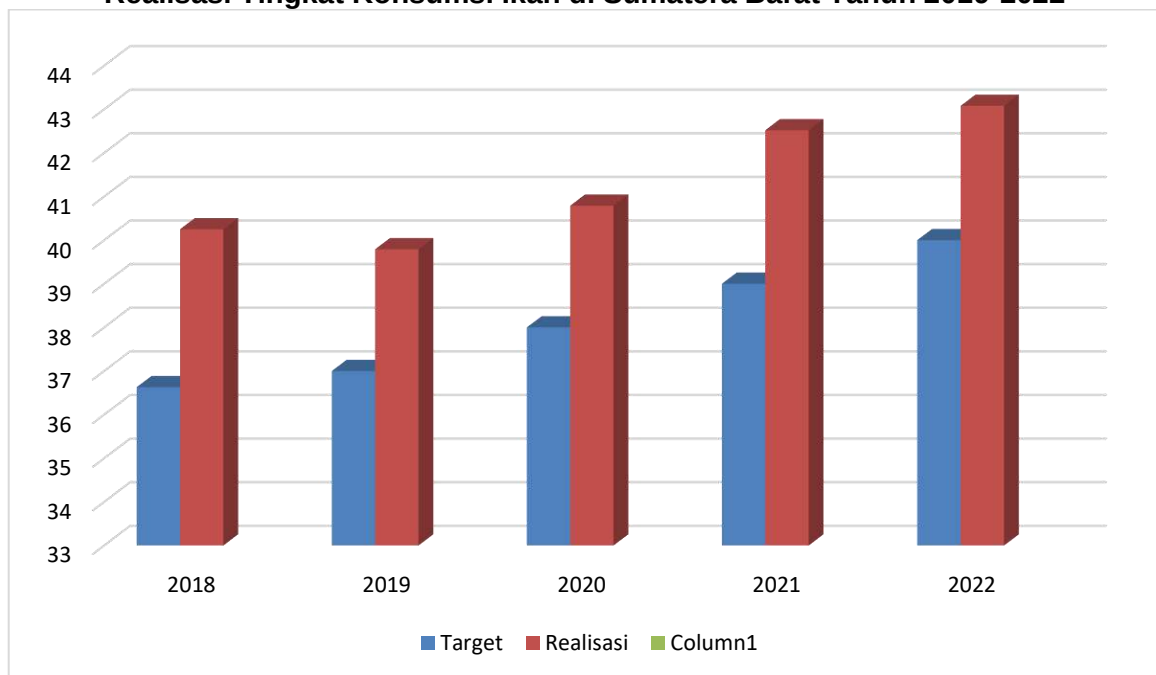
Besarnya kebutuhan terhadap produksi perikanan tangkap tersebut belum didukung oleh penanganan mutu komoditas ekspor dengan *Cold Chain System* (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan. armada penangkapan ikan Nelayan yang hingga saat ini masih didominasi oleh kapal berukuran kecil di bawah 10 gros ton (GT), dilihat dari pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 503.950.37ton.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 sebesar 479475,132 ton. Hal ini disebabkan antara lain : 1). Kurangnya bantuan induk unggul, benih dan pakan baik dari APBN dan APBD Provinsi karena merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, 2) Lemahnya penerapan teknologi budidaya, 3). Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan cara berbudidaya ikan yang baik, 4). Masih adanya hama penyakit ikan.

Pencapaian produksi budidaya laut pada tahun 2022 sebesar 649 ton relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 61,43 ton. Tingkat konsumsi ikan di tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan menjadi 43,08 kg/perkapita dibanding tahun 2022 sebanyak 42.52 kg/perkapita, hal ini adalah karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi makan ikan

melalui antara lain: mempromosikan hasil–hasil olahan hasil perikanan sumatera barat kepada masyarakat dan kelompok pengolah hasil perikanan, memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan, meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat pengolah. Hal ini juga tak lepas dari adanya kampanye secara masif dan kontinue Gemar makan ikan kepada seluruh elemen masyarakat yang didukung oleh seluruh elemen pemerintah serta masyarakat melalui Forikan. Adapun realisasi capaian tingkat konsumsi ikan tahun 2018-2022 dengan tabel dibawah ini.

Grafik 2.21
Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan di Sumatera Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa faktor pendorong yang mendukung dalam pencapaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan antara lain yakni adanya bantuan bidang perikanan tangkap berupa sarana prasarana penangkapan dan bantuan dibidang perikanan budidaya baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, meningkatnya operasional pengawasan serta meningkatnya kesadaran masyarakat memahami peraturan perundangan yang ada.

Namun dalam pencapaian kinerjanya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain kondisi cuaca yang tidak menentu serta kenaikan harga BBM yang turut mempengaruhi meningkatnya biaya operasional dalam kegiatan terutama penangkapan ikan di laut.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Capaian urusan pilihan Pariwisata pada tahun 2023 menunjukkan perubahan perbaikan yang cukup signifikan. Penurunan angka kunjungan wisatawan sebelum tahun 2023 diakibatkan oleh banyak factor.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan kunjungan wisata yang disebabkan karena adanya bencana alam melanda Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 2019 angka kunjungan wisata nusantara di Sumatera Barat masih tergolong rendah yang dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket domestik sejak Januari 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat signifikan, yaitu hanya 10.875 orang wisman yang datang ke Sumatera Barat (-82,21%) di tahun 2020 dan 1.142 orang wisman di tahun 2021. Penyebab utama penurunan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat adalah pandemi covid-19 yang melanda dunia internasional termasuk Sumatera Barat sendiri. Tingginya angka penyebaran virus corona di Indonesia juga menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan larangan warga negara asing masuk ke Indonesia selain itu adanya kebijakan Pemerintah yang cenderung berubah-ubah serta tidak dapat diprediksikan karena sangat mempengaruhi serta menghambat mobilisasi serta aktifitas diluar ruang masyarakat sehingga berdampak pada sektor pariwisata.

Pada tahun 2021-2023, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah provinsi Sumatera Barat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan berbagai event baik berskala local maupun nasional.

Pada tahun 2023 angka kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, orang wisatawan domestik (32,38 %) dan orang wisman (845,22%) pada destinasi berbayar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena banyaknya dukungan even pariwisata yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada kabupaten/kota, seperti Sawahlunto Internasional Carnival (SISSca) yang menghadirkan peserta carnavall dari designer nasional. Pengembangan desa wisata (DEWI) yang cukup pesat di tahun 2022 juga turut mempengaruhi pariwisata di Sumatera Barat, yang dibuktikan diterimanya beberapa penghargaan ditahun 2022 ini, yaitu Rekor MURI Dunia desa wisata pertama yang memilih pewarna batik dari limbah kopi untuk Desa Wisata Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Rekor MURI Dunia desa wisata pertama dengan batik beraroma kopi untuk Desa Wisata Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Juara 1 untuk kategori 5 desa berkembang terbaik Indonesia untuk Desa Wisata Pariangan, juara harapan 1 untuk 5 terbaik kategori kelembagaan tingkat nasional untuk desa wisata GTP Ulakan Kabupaten Paddang Pariaman, dan juara harapan 1 untuk 5 terbaik kategori digital dan kreatif tingkat nasional untuk Desa Wisata Silokek Kabupaten Sijunjung. Selain itu peningkatan angka kunjungan wisata mancanegara juga

didukung dengan telah dibukanya pintu penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau

Penentu keberhasilan lainnya adalah dengan kemenangan Sumatera Barat pada ajang World Halal Tourism Awards Tahun 2016 untuk dua kategori yaitu World's Best Halal Culinary Destination dan World's Best Halal Destination. Prestasi ini dilanjutkan dengan dapatnya penghargaan pada tahun 2018 sebagai sebagai 10 Destinasi Wisata Halal Unggulan pada acara Inaugural Report of Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Hal ini meningkatkan citra positif pariwisata Sumatera Barat baik di mata nasional maupun internasional.

Berikut ini tabel perkembangan capaian serta target indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 2.63
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pariwisata
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	1	-100	1,5	4.142.005	1,5	845,22	1,5	1,5	1,5
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	1,5	-40,23	1,5	17,37	1,5	32,38	1,5	1,5	1,5
3. Tingkat hunian akomodasi (%)	25,87	40	30,80	48,38	40,32	40,32	50,30	55,25	58,67

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, 2024

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB terbesar, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertanian di Sumatera Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya adalah produksi padi sawah dan

produktivitas jagung, untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Pada tahun 2023, Pertanian di Sumatera Barat mampu memproduksi padi sebanyak 1.346.063 ton dan jagung dengan produksi sebanyak 921.514 ton .

Pada tahun 2023 capaian produktifitas pertanian per hectare sebesar 9,92 %, sedangkan capaian peningkatan produksi tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar 4,31 %, serta produksi tanaman hortikultura sebesar 9,48 % dan tanaman perkebunan sebesar 1,13 %.

Pada tahun 2023 juga terjadi penurunan kejadian hewan dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 4,71 % dan juga terjadi peningkatan produksi peternakan sebesar 1,51 %. Adapun secara detail capaian untuk urusan Pemerintahan bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	8,42	8,77	8,39	9,85	8,77	9,92	9,12	9,48	9,68
2. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	2,5	-2,71	2,6	1,36	2,75	4,81	2,8	2,9	2,95
3. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	1,75	9,29	1,75	1,79	1,75	9,48	1,75	1,75	1,75
4. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	1	3,74	1	-2,8	1	1,13	1	1	1
5. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0,1	6,94	3,41	26,05	4,71	4,71	4,94	5,19	5,48
6. Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	1,35	1,83	1,45	1,55	1,51	1,51	1,57	1,62	1,68

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kinerja urusan pertanian antara lain yakni adanya kebijakan alokasi anggaran 10% dari total APBD untuk pelaksanaan Program unggulan terhadap sektor pertanian, adanya penambahan ambahan Benih Padi pada komoditas unggulan, adanya beberapa program peningkatan produktifitas dari Pemerintah, adanya kenaikan harga cabe sehingga menyebabkan tingginya minat petani untuk budidaya cabe, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewannya pada unit pelayanan kesehatan hewan serta ada pendekatan proaktif terhadap masyarakat dan komunitas. Peningkatan kebutuhan/ permintaan daging di masyarakat yang semakin tinggi.

Namun demikian, terdapat juga beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja urusan pertanian antara lain yakni terdapat beberapa irigasi tersier yang masih rusak mengakibatkan petani kesulitan memulai tanam, terjadinya kelangkaan pupuk pada beberapa waktu, cuaca ekstrem yang terjadi rentang waktu Triwulan 1 s/d 3, ketersediaan benih Pioneer yang masih langka, adanyaeralihan fungsi lahan yang digunakan sebagai pertanaman jagung di alihkan ke komoditi padi setelah adanya perbaikan saluran irigasi, serta turunnya Harga komoditi perkebunan sehingga petani tidak bergairah dikarenakan tidak dapat menutupi biaya operasional, rata-rata tanaman yang ada masih berstatus TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) dan diperkirakan akan beralih status menjadi TM (Tanaman Menghasilkan) pada tahun berikutnya, adanya bencana alam pada beberapa Kab/Kota sentra perkebunan contoh : Pasaman dan Pasaman Barat (Gempa Bumi berpusat di sekitaran Gunung Talamau) , Dharmasraya dan Solok Selatan (Banjir Bandang), terbatasnya SDM dilapangan yang terbatas, karena saat ini sedang fokus kepada penanganan wabah PMK, adanya kasus PMK di Sumbar, menyebabkan masih rendahnya produksi daging, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki peran penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan luas lahan kritis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menahan laju deforestasi dan memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi dengan mencanangkan dan menggalakkan program reboisasi. Melalui program ini ditargetkan berkurangnya lahan-lahan kritis yang tersebar di kabupaten/kota. Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan.

Selain program yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, program peningkatan peran sektor kehutanan sebagai salah satu program unggulan yang masuk dalam sektor pertanian yang mejadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Peningkatan peran sektor kehutanan dilakukan dengan cara memacu produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Peningkatan hasil hutan kayu diarahkan pada hutan rakyat dan hasil hutan bukan kayu melalui peningkatan dan pengembangan sentra budidaya lebah madu, pemanfaatan jasa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sebagai objek wisata. Selain itu pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan juga menjadi salah satu point penting menjaga kelestarian hutan dan diharapkan masyarakat yang berada di sekitar hutan juga dapat memanfaatkan potensi hutan melalui program perhutanan sosial guna meningkatkan pendapatan masyarakat/petani sekitar hutan. Beberapa Indikator capaian urusan Pemerintahan bidang seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	20	54,72	20	20	20	31,33	20	20	20
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	0,79	0,48	1,29	0,78	1,79	0,77	2,29	2,79	3,29
3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	1,90	2,55	2,85	2,95	3,81	3,83	4,76	5,71	6,66
4. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	20	20	40	40	60	60	80	100	120
5. Indeks tutupan hutan (Indeks)	61,41	64,20	60,98	63,98	60,55	63,77	60,12	59,69	59,26

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja urusan Kehutanan antara lain yakni adanya antusiasme dan keinginan masyarakat yang cukup besar untuk mendapatkan akses kelola terhadap lahan yang selama ini diakui sebagai ulayat, telah menerapkan Groundcheck untuk akurasi penelaahan citra Sentinel 2A dalam identifikasi dan penghitungan kerusakan hutan, telah berjalannya dengan baik Koordinasi dengan pihak terkait yang cukup bagus sehingga mempercepat proses pelaksanaan tender dan pengadaan bibit, adanya potensi yang telah teridentifikasi dan diminati oleh kelompok cenderung lebih mudah untuk pengembangannya

Beberapa faktor penghambat antara lain yakni pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak, terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan, Luas wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang cukup luas, Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai serta penghitungan Indeks Tutupan hutan masih menggunakan citra sentinel 2A dengan cloud cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan desk analysis.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan dan tantangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral semakin kompleks pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditambah dengan dikeluarkannya beberapa regulasi menarik

beberapa kewenangan Pemerintah provinsi ke Pusat. Dalam urusan energi dan sumberdaya mineral seperti terlihat dari dua indikator pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.66
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Energi
Dan Sumber Daya Mineral pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA									
	2021		2022		2023		2024	2025	2026	
	T	R	T	R	T	R	T	T	T	
1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%)	NA	NA	NA	100	45	40	60	75	90	
2. Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	99,91	100	100	100	100	100	100	100	100	
3. Rasio Elektrifikasi	99,30	99,91	99,50	99,98	99,60	99,99	99,70	99,80	99,90	
4. Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	28	28,19	29	29	33,3	31,49	35,7	51,7	51,8	
5. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	NA	NA	37,3	37,3	55	55	67	83	100	

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat,2024

Pengukuran pasokan listrik dapat diketahui melalui Rasio eletrifikasi yaitu merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total rumah tangga. Rasio elektrifikasi Sumatera Barat di tahun 2023 sebesar 99,99% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Penurunan ini didorong oleh kurangnya beberapa faktor antara lain adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dan program listrik pedesaan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro, pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana. Pada tahun 2021 Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana di 16 Kabupaten/Kota dengan jumlah total penerima bantuan sebanyak 1200 unit instalasi listrik. Sedangkan tahun 2022 pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana mencapai 1.198 unit yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota. Sementara itu untuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada tahun 2022 dengan capaian 29% hal ini disebabkan adanya penggunaan energi baru seperti tenaga surya dan biomassa di daerah.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yakni adanya keterlibatan seluruh stakeholder dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik, Kolaborasi Pemerintah Provinsi dengan PT. PLN, ketersediaan anggaran sesuai dengan perencanaan serta ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, beberapa factor penghambat antara lain yakni faktor geografis daerah Sumatera Barat yang bervariasi, adanya validasi data jumlah total rumah tangga, keterbatasan kewenangan Daerah, perubahan kebijakan anggaran disaat kegiatan sedang berjalan sehingga target tidak maksimal

F. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang da-tau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang da-tau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub Urusan Perdagangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari : perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2023 merupakan sektor lapangan usaha yang cukup dominan setelah Sektor Pertanian dan juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Sumatera Barat. Adapaun capaian urusan Perdagangan sebagai berikut.

Tabel 2.67
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp. Juta)	1393,13	3.066,93	1420,99	2492.04 (Jan-Okt)	1449,41	2724,448	1478,40	1507,97	1538,12
2. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	88	91,4	88	90,63	89	92,5	89	90	90
3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	22,35	42,05	23	48,84	25	70	26	26	26,5
4. Tertib Usaha	60	0	63	38,30	64	49	67	68	70
5. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	28	25,89	28	27,78	27,5	28	27,5	27	27
6. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	70	88,10	72	95,21	74	57,79	76	78	80
7. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	5,04	6	7,05	6	6	6	6	6
8. Nilai sektor perdagangan	39,30	39,86	41,27	47,08	44,16	49,32	48,57	53,43	58,78

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
dalam PDRB (Rp. Triliun)									

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan Dinas Perindag Provnsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perdagangan ini antara lain dibukanya kembali oleh pemerintah ekspor CPO dan turunannya, meningkatnya komoditas yang paling banyak diekspor pada Oktober 2022 adalah dari golongan minyak dan lemak hewan/nabati yakni Refined Palm Oil dan dari golongan karet dan barang karet yakni TSNR 20, masyarakat sudah mulai memahami proses pasca panen yang baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas komoditi, telah dimilikinya labor pengujian mutu yang sudah diakreditasi, dilaksanakanya program pengawasan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol serta pengawasan terhadap pupuk bersubsidi, semakin terkendalinya pandemi sehingga perekonomian di sektor perdagangan sudah mulai membaik, adanya kebijakan bersama pusat dan daerah dalam rangka menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar seperti minyak goreng dan cabe, adanya program melakukan pembinaan kepada pengelola pasar, lomba pasar dan promosi produk, meningkatkan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan berlaku (SNI wajib dan barang K3L), Adanya operasi pasar/pasar murah dilaksanakan pada saat terjadi lonjakan harga, serta adanya pemantauan rutin harga di pasar terhadap 17 komoditas barang kebutuhan pokok.

Namun selain itu terdapat beberapa factor penghambat dalam pencapaian kinerja urusan perdagangan, antara lain yakni tingginya harga pupuk non subsidi sehingga banyak peminat pupuk bersubsidi, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya, sehingga pelaku usaha merasa keberatan jika dilakukan pengawasan terhadap barang yang diperdagangkan, kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha terhadap pentingnya berusaha sesuai peraturan yang berlaku terutama barang-barang yang wajib SNI, masyarakat pengumpul dan pedagang yang masih belum sepenuhnya memahami tentang standar mutu komoditi sesuai ketentuan berlaku, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya sehingga pelaku usaha merasa keberatan jika dilakukan pengawasan, petugas PPNS yang tidak cukup dalam melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha, alokasi pupuk bersubsidi yang tidak seimbang dengan jumlah RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok), peningkatan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif salah satunya minyak goreng, cabe, operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh kabupaten/kota.

G. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku da-tau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Peranan sektor industri terhadap perekonomian daerah dapat dilihat melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan laju pertumbuhan industri. Selama periode 2016-2023, sektor PDRB semakin menurun kontribusinya meskipun masih tetap dominan di Sumatera Barat. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	0,41	1,33	0,41	1,3	0,41	1,33	0,41	0,41	0,41
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0,13	102	0,13	107,54	0,13	126	0,13	0,13	0,13
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	59	25,33	82	34,67	84	83,11	86	88	90
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	0	90	100	92	100	92	94	94
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	90	100	90	100	90	100	90	90	90

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)									
6. Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%)	90	85,71	90	90	90	90	90	90	90
7. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	15,4	11,36	15,7	20,93	16	21,98	16,3	16,7	17
8. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	39.403	38.174	41.373	40.653	43.263	46.900	45.363	47.673	50.193

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa faktor pendorong capaian kinerja urusan perindustrian antara lain yakni pelaksanaan perizinan Berbasis online sehingga memudahkan pelaku usaha untuk proses perizinan, hilirisasi dan diversifikasi produk industri terutama terhadap industri kecil menengah, melakukan upaya untuk meningkatkan standarisasi dan mutu produk melalui fasilitasi sertifikasi produk, menghimbau kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan RPIK (rencana pembangunan industri kabupaten/kota) mengacu kepada RPIP, peningkatan teknologi industri melalui teknologi tepat guna dan bantuan peralatan/mesin

Beberapa factor penghambat antara lain yakni cukup lamanya proses pengurusan patok tanah untuk luas tanah diatas 1 hektar, pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit, industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait, pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, kurangnya informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah, keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM, belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah srategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu sistem pengembangan wilayah.

Pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan pedesaan, melalui kegiatan penataan persebaran penduduk, yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonom dan budaya. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ketransmigrasian, baik dari segi daya tampung maupun dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Sumatera Barat memiliki 1 (satu) Kawasan Perkotaan Baru (Lunang Silaut) yang saat ini termasuk kedalam 1 (satu) dari 52 (lima puluh dua) kawasan yang menjadi Prioritas Nasional pada RPJMN 2021-2024, dan diharapkan mampu menjadi kawasan yang mandiri menjadi kawasan yang berdaya saing. Sedangkan 3 (tiga) kawasan lainnya yaitu Kawasan Muara Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, Kawasan Bumi Asri Kabupaten Solok Selatan dan Kawasan Ranah Balingka Brema Kabupaten Pasaman Barat merupakan kawasan transmigrasi di Sumatera Barat yang termasuk kedalam prioritas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Pada Tahun 2022 dengan adanya intervensi anggaran baik dari pusat maupun daerah maka di proyeksikan target IPKTrans ke tiga kawasan yang menjadi prioritas Bidang/Kementerian tersebut naik menjadi 35,36 (masih berkembang), dengan rincian 29,10 (Kawasan Muara Takung Kamang Baru), Kawasan Bumi Asri (38,42) dan Kawasan Ranah Balingka Brema (38,57).

Pencapaian urusan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ditandai dengan Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi dan Indeks perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.69
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA									
	2021		2022		2023		2024	2025	2026	
	T	R	T	R	T	R	T	T	T	
1. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi	36,70	45,69	38,08	62,44	40,00	75,89	42,00	46,00	51,00	
2. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	64,05	41,1	68,07	70,27	72,08	72,08	76,10	77,00	79,00	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel diatas terlihat kedua indikator tersebut menunjukkan pencapaian yang jauh lebih baik dari target. Pencapaian ini didukung oleh adanya intervensi anggaran dari tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten, disamping itu adanya kerjasama

lintas sector baik provinsi maupun kabupaten dalam pengembangan kawasan transmigrasi baik untuk Satuan permukiman maupun kawasan melalui tim Pokja KTM Provinsi dan Kabupaten serta sudah adanya pengelolaan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi yakni pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi ukuran capaian Sekretariat Daerah sebagaimana yang ditampilkan pada table berikut.

Tabel 2.70
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Kinerja Sekretariat Daerah
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH (nilai)	88,31	89,9	88,50	89,38	88,70	91,52	88,90	90,20	90,40
2. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai)	88,31	88,39	88,50	89,18	88,70	90,14	88,90	90,20	90,40
3. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah (nilai)	88,31	87,9	88,50	89,02	88,70	89,75	88,90	90,20	90,40
4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan (nilai)	76,65	78,5	78,85	80,57	80,15	80,89	82,35	84,55	86,75
5. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian (nilai)	76,65	77,12	78,85	80,97	80,15	80,92	82,35	84,55	86,75
6. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	80	81,79	80	121,50	80	127,5	80	80	80
7. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (%)	100	100	80	94,91	85	100	90	95	100
8. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%)	100	94,44	100	100	100	100	100	100	100
9. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya (%)	75	62,5	80	100	85	100	90	95	100
10. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
11. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%)	100	100	100	99,70	100	99,70	100	100	100
12. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) (%)	NA	NA	1,02	1,78	2,04	2,8	3,06	4,08	5,1
13. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	15,32	14,4	14	14	14,16	14	14,20	14,20	41
14. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%)	NA	NA	15	15	30	15	50	60	75
15. Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor)	91	48,91	93	89	93	95	97	97	97
16. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (dokumen)	7	7	7	10	7	11	7	7	7
17. Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov (%)	90	100	91	91	92	100	93	94	95
18. Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota (%)	90	92	91	91	92	100	93	94	95
19. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif (Lembaga)	2	4	2	9	3	9	4	4	4
20. Indeks kepuasan layanan embarkasi haji	B	-	B	B	B	B	B	B	B
21. Peringkat dalam event keagamaan nasional	1	10	1	5	1	10	1	1	1
22. Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen)	6	6	6	6	6	4	6	6	6
23. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan (%)	100	94,97	100	95,92	100	100	100	100	100
24. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan (%)	100	171,43	100	100	100	100	100	100	100
25. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	99	100	100	100	100	100	100	100
27. Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	98	100	100	100	100	100	100	100
28. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	7	6	8	8	10	11	12	14	16

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
29. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)	11,7	11,79	12,5	12,09	12,7	12,76	12,9	13,1	13,3
30. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai)	1,71	1,66	1,78	1,97	1,85	1,85	1,89	1,93	2
31. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi)	5	8	7	12	9	9	11	13	15
32. Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah)	8	12	12	42	16	28	18	20	22
33. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan (%)	90	84%	91	96,28	92	95,62	93	94	95

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

B. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD.

Tabel 2.71
Perkembangan Capaian dan Target Indikator dan Target Sekretariat DPRD
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Indek Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,96	90	91,35	90	91,05	90	90	90

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen daerah Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan pembangunan dalam dokumen pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan dan penetapan dokumen pembangunan Daerah Bappeda menetapkan Indeks Kualitas yang terdiri dari dimensi proses seperti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Konsultasi Publik serta Musrenbang, dari dimensi isi terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain ketersediaan data dukung, konsistensi serta Inovasi dan dari dimensi tindak lanjut yakni capaian kinerja, pengendalian rencana kerja dan penganggaran. Capaian target indikator kinerja unsur terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Perkembangan Indikator Unsur Perencanaan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Indeks kualitas perencanaan	70	47,88	73	76,30	77	79,97	81	85	89

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Capaian Indeks Kualitas melebihi target yang telah ditetapkan. Hal yang mendorong pencapaian ini adalah komitmen yang dibangun dalam meningkat kualitas serta pemenuhan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kelender yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain yakni masih rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang, konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum dapat terimplementasi secara maksimal terutama dalam penyusunan dokumen penganggaran, serta perlunya komitmen semua pihak dalam menindaklanjuti hasil perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

B. Unsur Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui

bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dalam hal menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Namun bila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Namun dalam pelaksanaan unsur keuangan tidak hanya sekedar memproses menjadi APBD namun juga terkait dengan penatausahaan, akuntansi, pelaporan serta terkait juga dengan asset dan pendapatan. Adapun ketercapaian unsur pendukung keuangan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.73
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Keuangan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,59	7,21	8,51	8,48	8,43	22,8	8,35	8,27	8,19
2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5	6,82	4,6	27,14	4,2	-31,4	3,8	3,6	3
3. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	3,6	2,37	3,58	-11,24	3,56	-20,4	3,55	3,54	3,53
4. Manajemen Aset	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,68	8,96	3,64	17,35	3,61	4,36	3,57	3,53	3,50
6. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	86,53	-	87,01	63,63	87,05	71,90	87,24	87,55	88,61
8. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	100	0	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
10. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,81	1,02	1,83	1,92	1,85	2,57	1,85	1,88	1,89
11. Persentase Peningkatan PAD (%)	3,4	13,78	7,2	8,37	7,2	-9,6	7,2	7,2	7,2

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan Bapenda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa faktor Pendorong dalam pencapaian kinerja unsur keuangan antara lain yakni adanya komitmen untuk merealisasi kegiatan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, tersedianya regulasi yang memberikan kemudahan kepada sektor-sektor yang menyumbang pendapatan Daerah, sistem pengelolaan aset yang telah mulai tertata dengan baik, regulasi-regulasi yang mendukung manajemen aset lebih efektif dan efisien (Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD), maksimalnya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas penataan Aset Daerah, pelaksanaan program kegiatan yang terealisasi sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan, terdapatnya dukungan Teknologi Informasi dalam mempublikasikan informasi keuangan daerah, sehingga dokumen informasi keuangan daerah yang dapat diakses oleh publik, terdapatnya kebijakan pajak (Pergub terkait pemutihan pajak dan Program 5 Untung).

Beberapa faktor penghambat antara lain yakni terlambat realisasi belanja guru dan tenaga Kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang masih kurang, masih adanya aset-aset daerah yang belum terselesaikan karena masih tersangkut dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengakses informasi public, adanya kebijakan penundaan alokasi belanja transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.

C. Unsur Kepegawaian

Perkembangan realisasi target kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian) terlihat pada table berikut, dimana indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2017 s.d 2021. Namun demikian angka indeks pencapaian target tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 % telah mencapai target dengan realisasi kinerja sebesar 96,15%.

Beberapa permasalahan dalam urusan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain : database kepegawaian yang belum *up to date*; manajemen ASN belum berjalan secara optimal; tingkat profesionalisme aparatur yang rendah; pelaksanaan tata kelola organisasi yang belum akuntabel; sistim merit belum diterapkan dengan sangat baik; minimnya jumlah jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang spesifik; penataan ASN belum dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi daerah; sistim kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN yang perlu terus diupayakan perbaikan; perlunya pengadaan ASN yang berkelanjutan karena adanya data/proyeksi tujuh tahun ke depan akan terjadi PNS pensiun dalam skala besar; kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung terhadap perkembangan teknologi terbaru; kompetensi PNS yang masih rendah dan belum merata; terdapatnya kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansinya; serta data base dan sistim informasi ASN kurang lengkap dan tidak mutakhir serta tidak terintegrasi.

Tabel 2.74
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Kepegawaian
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	200	255,88	202	261	204	261	206	208	210
2. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12	16,29	40	20,41	50	21	60	70	75
3. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	62	42,4	64	41,9	66	43	68	70	72
4. Nilai penerapan sistem merit	270	295,5	300	332	325	332	340	350	370

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

Capaian Tahun 2023 untuk indikator Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) sudah melebihi target yakni 261. Hal ini didorong oleh semakin banyak PNS yang melakukan peningkatan Pendidikan, dan sejak 2010 sudah tidak ada pengangkatan CPNS tamatan SMA/SMK kebawah.

Sedangkan untuk capaian Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar

21,00% pada Tahun 2023, dan angka ini belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih belum diminatinya jenjang karir di jabatan fungsional (JF) oleh ASN; terdapat ASN Fungsional yang pindah tugas; belum optimalnya pemanfaatan JF dalam pencapaian kinerja OPD, dan belum komprehensifnya pemahaman ASN terhadap JF.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), juga masih jauh dibawah target yakni 43,00. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penyederhanaan birokrasi yang menyebabkan JFT yang tidak bersertifikat bertambah. Disamping itu, mekanisme untuk mendapatkan sertifikat kompetensi di tiap jenis JF berbeda-beda, sehingga tidak semua JF bisa mendapatkannya.

Untuk capaian indikator Nilai Penerapan Sistem Merit, sudah melebihi target yang ditetapkan, yakni 332. Penilaian ini dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Poin 332 yang diperoleh oleh Pemprov Sumbar ini masuk kategori Sangat Baik dan sudah mendapatkan Anugrah Meritokrasi dari Menteri PAN RB pada 9 Desember 2022. Capaian ini didorong oleh sudah dilaksanakannya delapan aspek manajemen ASN, yaitu kebutuhan; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi, khususnya di Sumatera Barat untuk Pengisian Jabatan khususnya JPT sudah sesuai dengan kebijakan terkait. Akan tetapi, masih ada yang perlu disempurnakan untuk Sumatera Barat terkait penerapan sistem merit ini, diantaranya belum sempurnanya dokumen SKJ (SKJ terhadap pejabat administrator di Lingkungan Pemprov Sumbar); Belum adanya kebijakan daerah terkait pola karir ASN; dan Belum dilakukannya perubahan kebijakan terkait Promosi dan Mutasi ASN. Kedepan perlu Percepatan penyusunan SKJ yang merupakan dasar dalam Penerapan Sistem Merit pada Pemprov Sumbar; dan percepatan penyelesaian Aplikasi *Talent Pool*.

D. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator dalam urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2021 sd 2023 sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Pendidikan dan Pelatihan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan	4,5	6,59	4,6	7,1	4,7	11,01	4,8	4,9	5,0

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun									
2. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	84	96,34	85	97,76	86	92,7	87	88	89
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	95,24	81	90,9	82	88,2	83	84	85

Sumber : BPSDM Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pencapaian urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat dikatakan sudah mengalami kemajuan yang sangat baik, khusus untuk indikator Persentase ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun capaian indikatornya lebih sangat baik. Hal ini disebabkan data pengembangan kompetensi yang diambil adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan OPD provinsi. Sehingga target dan capaiannya menjadi meningkat. Pada tahun 2023 tercapai realisasi 11,01 %, dari target 4,7%. Capaian indikator lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan menunjukkan capaian yang baik dari target 86% terealisasi menjadi 92,7 %.capain ini didorong oleh kurikulum diklat yang sudah disusun sesuai dnegan kebutuhan dan kapasitas pengampu diklat juga terus di tingkatkan. Begitupula untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian sebesar 88,2 % dari target 82 %, peningkatan ini di dorong oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana diklat sesuai dengan kebutuhan peserta diklat.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain yakni bentuk kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya berupa pendidikan dan pelatihan, namun juga melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Kurikulum diklat sudah disusun sesuai kebutuhan dan kapasitas pengampu diklat juga terus ditingkatkan serta Peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kepuasan peserta diklat dan pelaksanaan peningkatan kapasitas lebih murah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

E. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna mendukung

perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Tabel 2.76
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Penelitian dan Pengembangan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%)	42,85	60	50	72,73	50	66,67	62,5	62,5	62,5
2. Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk)	2	8	10	12	10	13	10	12	12
3. Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	56,86	30	68,63	30	72,55	40	40	50

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan tugas dan fungsi, tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

Secara umum pencapaian di indikator di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut: 1). Koordinasi dengan pihak-pihak terkait semakin meningkat; 2). Adanya Bimbingan Teknis tentang Penginputan Inovasi pada Indeks inovasi litbang oleh Kemendagri;. 3) adanya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan secara terus menerus; dan 4) Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak terkait dalam pencapaian target.

F. Unsur Penghubung

Badan penghubung mempunyai tugas pokok menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Penghubung mempunyai fungsi : (a) perumusan kebijakan teknis bidang penghubung, (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung, (c) pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup provinsi dan kabupaten/kota, (d) pelaksanaan tugas di bidang humas protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga, promosi dan investasi, (e) pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang penghubung, dan (f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan unsur penghubung dapat dilihat dari; (a) koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain, (2) promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan).

Pada tahun 2023, dapat dilihat persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain terlaksana 100%, dimana kegiatan pimpinan daerah terlayani dan terfasilitasi, baik yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat maupun di Jakarta karena adanya koordinasi yang baik dengan Biro Administrasi Pimpinan dan kerjasama Pemerintah Provinsi lainnya.

Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan) juga mengalami penurunan pada tahun 2023 bila dibandingkan pada tahun 2022, yaitu dari 7 promosi menjadi 6 promosi potensi daerah Sumatera Barat.

Adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor: 400.4.7/8912SJ tanggal 20 Desember 2022 kepada seluruh Gubernur Indonesia untuk Optimalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara dan pendidikan wawasan kebangsaan, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan wahana perekat persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia, perlu mengoptimalkan fungsi dan peran anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi pembangunan dan informasi budaya daerah. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan pembinaan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika guna memelihara kerukunan nasional serta upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Tabel 2.77
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Unsur Penghubung
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)									
2. Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan)	5	4	5	7	5	6	5	5	5

Sumber : Badan Pengubung Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

A. Inspektorat

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya.

Mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan ditandai dengan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Pada tahun 2023, Pencapaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 (Tingkat Terdefinisi). Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Semua (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola.

Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2023 berada pada level 3 (*Integrated*). Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 3 hal ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 2.78
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	3	3	3	3	3	3	4	4	4
2. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	3	3	3	3	3	3	3	4	4

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.1.3.7. Urusan Pemerintahan Umum

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Pada tahun 2023 terdapat 3 kasus konflik di Sumatera Barat.

Tabel 2.79
Perkembangan Indikator Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Pemerintahan
Umum pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	4	0	3	1	3	0	3	2	2

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
2. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	67,69	73	68,01	78,51	68,5	77,35	68,75	69,25	70

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh dalam melakukan pencegahan konflik adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan beberapa SKPD dan instansi terkait serta jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi sehingga pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan Pemulihan pascakonflik dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
3. Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
4. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi di Indonesia, perlu adanya atau pengukuran pembangunan politik yang dapat memberikan gambaran objektif keadaan demokrasi di daerah. Untuk mengukur keadaan demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dalam penyusunan, pengembangan dan pemanfaatannya perlu melibatkan pemangku kepentingan. IDI merupakan usaha bersama sejak tahun 2009 antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (KEMENKO POLHUKAM), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Aspek penyusunan IDI metode baru ada 3 aspek yaitu : (a) Aspek Kebebasan (7 indikator), proses sejauh mana sector-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan

otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri, (b) Aspek Kesenjangan (7 indikator), proses sejauh mana kelompok minoritas dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Ekualisasi adalah sebuah proses transformasi kekuasaan di setiap bidang yaitu politik, ekonomi maupun sosial, (c) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator), proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi dan sosial.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mendapatkan nilai 77,35 % melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 68,05. Pada 3 (tiga) aspek yang diukur, aspek kebebasan mendapatkan nilai 76,19 dengan indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara memberikan nilai tertinggi mencapai 89,96. Pada aspek kesetaraan mendapatkan nilai 79,19 dengan indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan juga memberikan nilai tertinggi mencapai 100. Demikian juga halnya pada aspek kapasitas lembaga demokrasi mendapatkan nilai 79,98 dengan indikator transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah memberikan nilai mencapai 100.

Pada tahun 2023, jumlah konflik yang terjadi sangat rendah hanya 1 kasus, beberapa upaya yang antara lain yakni :

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat
2. Terjalannya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sosial sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah
3. Tersedianya peta rawan konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Dengan adanya pemetaan konflik di Sumatera Barat, tersedia bahan evaluasi terkait situasi dan potensi konflik yang terjadi dalam 1 (satu)

tahun sehingga akan memunculkan strategi serta bahan kebijakan pimpinan dalam penanganan konflik di wilayah Sumatera Barat

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan salah satu isu sentral yang harus disikapi untuk bertahan ditengah arus globalisasi. Daya saing daerah menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing juga merefleksikan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Untuk peningkatan daya saing ada dua strategi yang ditetapkan yaitu:

2.1.4.1. Strategi pertama

Strategi pertama dengan menciptakan value added barang dan jasa yang diproduksi, sehingga nilainya akan lebih kompetitif. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pemetaan dan optimalisasi sektor unggulan, yaitu sektor yang pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB besar. Berdasarkan data kontribusi 17 lapangan usaha terhadap PDRB Sumbar maka sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan serta konstruksi merupakan sektor andalan bagi Provinsi Sumatera Barat. Perlu upaya untuk menciptakan nilai tambah sektor tersebut, melalui optimalisasi industri hilir pertanian, termasuk mekanisme dan tata kerja yang lebih efisien untuk sektor unggulan lainnya.

Langkah kedua dilakukan melalui peningkatan kontribusi sektor potensial lainnya seperti pariwisata yang merupakan salah satu keunggulan Provinsi Sumatera Barat. Perlu upaya yang komprehensif untuk menciptakan destinasi wisata yang kompetitif dan menarik minat wisatawan

Langkah berikutnya yang harus menjadi perhatian adalah upaya penciptaan iklim yang kondusif, dengan dukungan Sumberdaya Manusia yang kapabel, regulasi yang efektif dan inovasi yang tepat sasaran.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan penghasilan masyarakat, maka kedepan optimalisasi pertumbuhan perekonomian juga akan diarahkan pada sektor perdagangan dan industri pengolahan serta sektor pariwisata yang selama ini digambarkan dengan sektor akomodasi dan makan minum. Hal ini melihat potensi laju pertumbuhan yang selama ini cenderung bergerak naik secara signifikan serta cukup besarnya potensi yang dapat dikembangkan pada sektor lapangan usaha tersebut yang selama ini belum terkelola dengan baik dan terpadu.

Struktur penduduk Provinsi Sumatera Barat ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2023 penduduk usia produktif di Indonesia mencapai atau 67,3% persen atau 3,76 juta jiwa dari jumlah semua penduduk 5,58 juta dengan rasio

ketergantungan penduduk sekitar 48,40% artinya setiap 100 orang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan tidak produktif (BPS 2022). Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Di Sumatera Barat terdapat 5 (lima) perguruan tinggi negeri dan 93 (Sembilan puluh tiga) perguruan tinggi swasta, dengan total mahasiswa semuanya pada tahun 2023 sebanyak 46.594 orang dan mempunyai berbagai macam program studi. Kehadiran perguruan tinggi akan memberikan dampak terhadap pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dari sisi fungsinya perguruan tinggi bisa meningkatkan inovasi dan penciptaan produk unggulan yang ada di daerah, memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di masyarakat sebagai wadah pengembangan bakat,tempat menciptakan SDM unggul dan sebagai bentuk pembentuk lulusan siap kerja.

Sesuai dengan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, adalah terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan berkelanjutan maka pengertian unggul ditujukan untuk masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat

2.1.4.2. Strategi kedua

Penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah terutama pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan serta penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas yang mendukung kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, penyediaan infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar terutama mendukung peningkatan akses air bersih serta sanitasi, peningkatan kemampuan finansial dan kesempatan kerja, dukungan kebijakan pemerintah, dan peningkatan stabilitas ekonomi makro. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi prioritas dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

Strategi kedua dilakukan melalui optimalisasi komponen pendorong peningkatan daya saing daerah. Komponen yang dominan meliputi penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas serta infrastruktur pelayanan dasar, peningkatan kemampuan finansial dan kesempatan kerja, dukungan kebijakan pemerintah dan peningkatan stabilitas ekonomi makro.

Penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah terutama pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan serta penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas yang mendukung kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, penyediaan infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar terutama dengan memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana seperti bencana banjir.

2.1.5. Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Sumatera Barat selama periode 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Pengeluaran riil perkapita Sumatera Barat tahun 2018 sebesar 10,638 juta rupiah per tahun dan pada tahun 2022 sebesar 11.130 juta rupiah per tahun. Sementara itu, menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita Tahun 2022 terbesar berada di Kota Padang, yaitu sebesar 14,889 juta rupiah pertahun dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu sebesar 6.567 juta rupiah pertahun yang tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat 2018-2022

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat 2018-2022						
NO	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita(Ribu Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten						
1	Kep. Mentawai	6.211	6.429	6.281	6.321	6.567
2	Pesisir Selatan	9.089	9.444	9.212	9.270	9.686
3	Solok	10.035	10.309	10.171	10.215	10.539
4	Sijunjung	10.277	10.395	10.361	10.389	10.582
5	Tanah Datar	10.417	10.709	10.588	10.616	10.695
6	Padang Pariaman	10.919	11.158	10.998	11.050	11.159
7	Agam	9.489	9.780	9.651	9.662	10.171
8	Lima Puluh Kota	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035
9	Pasaman	8.238	8.599	8.425	8.440	8.619
10	Solok Selatan	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560
11	Dharmasraya	11.189	11.431	11.273	11.324	11.650
12	Pasaman Barat	8.979	9.180	9.047	9.089	9.381
Kota						
13	Padang	14.312	14.728	14.481	14.540	14.889

NO	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita(Ribu Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
14	Solok	11.968	12.337	12.117	12.168	12.515
15	Sawah Lunto	9.765	10.238	10.182	10.195	10.537
16	Padang Panjang	10.440	11.013	10.734	10.754	11.153
17	Bukittinggi	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633
18	Payakumbuh	13.114	13.464	12.281	13.317	13.687
19	Pariaman	12.611	12.958	12.796	12.818	13.150
	Sumatera Barat	10.638	10.925	10.733	10.790	11.130

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.1.5.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Pada kurun waktu tahun 2018-2023, NTP Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat, yang pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 95,31 dan tahun 2022 dengan capaian 110,39, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 110,26.

Tabel 2.81

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2023 Provinsi Sumatera Barat

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks yang diterima petani (It)	125,39	130,55	106,55	108,25	125,42	130,35
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	131,56	136,00	105,92	108,32	113,65	118,20
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,31	100,05	100,59	107,59	110,39	110,26

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan pembentuknya maka Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan agregasi dari 5 (lima) sub sektor komoditas antara lain yakni :

1. Subsektor Tanaman Pangan terdiri dari padi dan palawija.
2. Subsektor Hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan.
3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat seperti: kelapa, kopi, cengkeh, tembakau, dan sebagainya.
4. Subsektor Peternakan terdiri dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
5. Subsektor Perikanan, meliputi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Jika dilihat lebih rinci maka capaian Nilai Tukar Petani pada masing-masing komoditas pertanian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82
Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat 2018-2022

NTP SUB SEKTOR	TARGET					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani (NTP)	95,31	100,05	100,59	107,59	110,39	110,28
NTP Tanaman Pangan (NTPP)	92,02	94,79	96,06	96,43	97,64	110,16
NTP Hortikultura (NTPH)	82,44	81,45	96,80	99,75	111,81	105,25
NTP Perkebunan Rakyat (NTPR)	99,31	99,73	103,86	126,29	127,72	125,97
NTP Peternakan (NTPPT)	103,59	103,86	102,32	101,04	105,33	99,82
NTP Perikanan (NTN)	107,88	107,88	94,55	95,45	96,92	99,06

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data tersebut maka NTP tertinggi pada sub sektor Perkebunan Rakyat dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 110,28 dan Sub Sektor Hortikultura dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 105,25. Jika dilihat dari capaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Sub Sektor Perkebunan Rakyat, Hortikultura serta Peternakan merupakan sub sektor dengan komoditas yang menguntungkan bagi para petani, namun ada tahun 2023, sub sektior peternakan mengalami penurunan yang signifikan dan digantikan dengan sektor Tanaman Pangan.

Sehingga strategi yang perlu diperkuat pada sektor pertanian dengan alokasi anggaran untuk Sektor Pertanian sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebesar 10% dari total APBD harus diarahkan dan ditajamkan pada seluruh sub sektor tersebut.

2.1.5.3. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita

Pada tahun 2023, pengeluaran perkapita penduduk Sumatera Barat sebesar Rp. 1.411.823 per bulan, capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2022 dengan pengeluaran perkapita penduduk Sumatera Barat sebesar Rp. 1.342.986 per bulan, dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.281.658. Kenaikan tersebut karena terjadi karena juga terjadi kenaikan pengeluaran masing-masing pada pengeluaran makanan dan pengeluar non makanan. Gambaran pengeluaran konsumsi perkapita menurut kelompok makanan dan non makanan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 tergambar di tabel berikut.

Tabel 2.83
Rincian Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Rupiah)

KELOMPOK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kelompok Makanan	604.871	609.258	644.853	668.029	716.262	747.469
Padi-padian	75.273	78.893	77.469	78.796	82.668	98.729
Umbi-umbian	7.294	6.621	7.026	7.948	8.925	9.850

KELOMPOK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ikan/udang/cumi/kerang	53.945	55.564	54.748	61.633	68.273	70.700
Daging	20.823	23.103	22.997	24.849	30.961	29.312
Telur dan susu	29.964	29.260	30.803	32.538	33.591	34.679
Sayur-sayuran	55.008	45.004	57.053	63.344	67.598	69.589
Kacang-kacangan	7.596	7.646	7.550	8.543	9.338	9.942
Buah-buahan	23.980	23.926	35.530	24.137	28.419	26.022
Minyak dan kelapa	19.361	18.768	20.340	23.094	31.862	26.699
Bahan minuman	14.907	14.184	15.611	16.006	17.640	16.704
Bumbu-bumbuan	6.508	6.253	6.926	7.747	9.157	8.473
Konsumsi lainnya	7.414	7.096	7.215	8.831	9.696	10.126
Makanan dan minuman jadi	199.104	207.963	213.498	216.587	214.100	226.910
Rokok	83.694	84.976	88.086	93.977	104.035	109.734
Kelompok Bukan Makanan	543.759	555.621	590.197	613.629	626.724	664.354
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	241.121	242.306	260.524	278.654	303.159	315.097
Aneka komoditas dan jasa	126.357	133.856	146.459	158.552	151.844	159.611
Pakaian, alas kaki, & tutup kepala	48.599	51.197	53.208	49.587	48.166	48.811
Komoditas tahan lama	71.500	73.395	67.511	64.804	57.577	63.702
Pajak, pungutan, dan asuransi	32.866	35.461	39.955	47.314	50.205	51.775
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	23.316	19.406	22.541	14.717	15.773	25.358
JUMLAH	1.148.630	1.164.879	1.235.050	1.281.658	1.342.986	1.411.823

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Tabel 2.84
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
di Sumatera Barat Tahun 2018-2023

KELOMPOK KOMODITAS	TAHUN									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Makanan	584.045	55,42	644.853	52,21	668.029	52,12	716.262	53,33	747.469	52,94
Bukan Makanan	469.758	44,58	590.197	47,79	613.629	47,88	626.724	46,66	664.354	47,05
Jumlah	1.053.803	100,00	1.235.050	100,00	1.281.658	100	1.342.986	100	1.411.823	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Selanjutnya, jika dirinci maka dari Pengeluaran Makanan pada tahun 2023 sebagian besar untuk pengeluaran Makanan sebesar 52,94% dan yang terbesar untuk makanan dan minuman jadi serta rokok. Sedangkan pengeluaran untuk Bukan Makanan sebesar 47,05% yang terbesar untuk Perumahan dan fasilitas rumah tangga serta aneka komoditas dan jasa.

Adapun rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2022 (Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	2022			2023		
	MAKANAN	BUKAN MAKANAN	JUMLAH	MAKANAN	BUKAN MAKANAN	JUMLAH
Kab. Kep. Mentawai	610.592	350.107	960.698	712.164	487.694	1.199.858
Kab. Pesisir Selatan	626.353	492.493	1.118.846	680.610	543.975	1.224.584
Kab. Solok	686.983	474.989	1.161.972	772.185	530.466	1.302.651
Kab. Sijunjung	649.625	513.536	1.163.161	760.082	682.192	1.442.274
Kab. Tanah Datar	700.617	518.944	1.219.561	702.100	616.519	1.318.619
Kab. Pdg Pariaman	649.140	510.271	1.194.049	713.517	580.111	1.293.628
Kab. Agam	679.941	514.108	1.194.049	694.601	519.611	1.214.212
Kab. Lima Puluh Kota	726.244	463.534	1.189.778	760.234	557.469	1.317.702
Kab. Pasaman	617.675	403.080	1.020.755	640.546	487.006	1.127.552
Kab. Solok Selatan	693.274	543.693	1.236.967	782.737	624.281	1.407.017
Kab. Dharmasraya	705.913	734.868	1.440.780	741.361	784.567	1.525.928
Kab. Pasaman Barat	763.228	507.218	1.270.446	666.417	494.977	1.161.395
Kota Padang	834.352	1.029.923	1.864.276	843.834	982.112	1.825.946
Kota Solok	846.410	857.002	1.703.412	845.055	767.666	1.612.722
Kota Sawahlunto	724.576	731.039	1.455.615	815.147	808.468	1.623.615
Kota Padang Panjang	757.667	848.982	1.606.648	810.362	831.072	1.641.434
Kota Bukittinggi	752.872	862.142	1.615.014	816.101	791.467	1.607.569
Kota Payakumbuh	766.764	809.758	1.576.522	875.907	928.962	1.804.869
Kota Pariaman	719.283	592.884	1.312.168	747.688	617.829	1.365.517
Prov.Sumatera Barat	716.262	626.724	1.342.986	747.469	664.354	1.411.823

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.1.5.4. Tata Kelola Pemerintahan

Aspek penting lainnya dalam peningkatan daya saing yang perlu dibenahi dalam peningkatan daya saing daerah Sumatera Barat adalah aspek Tata Kelola Pemerintah Daerah. Dalam meningkatkan daya saing daerah, maka perlu menjadikan birokrasi pemerintahan daerah lebih profesional dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Perkembangan kondisi tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023, dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil survei kepuasan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik dan dilakukan oleh Lembaga Independen terhadap Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. Nilai rata-rata IKM penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar 89,16 dan pada tahun 2023 berdasarkan hasil survey LP2M UNAND, LP2M UNP sert penilaian mandiri oleh 33 Perangkat Daerah Provinsi..

2. Berdasarkan Penilaian Ombudsman RI bahwa Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dengan capaian 68,52 dengan kategori Kualitas sedang dan pada tahun 2022 meningkatkan secara signifikan dengan capaian 82,60 atau masuk dalam kategori Kualitas Tinggi dan pada tahun 2023 naik dengan nilai 91,71 dengan predikat Kualitas tertinggi.
3. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan 12 kali berturut-turut dan dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun anggaran 2012 – 2023 serta mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI pada acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakerna) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Ballroom Dhanapala Kementerian Keuangan RI.
4. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintah, saat ini Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sudah mempublikasikan 100% Daftar Informasi Publik OPD melalui ppid.sumbarprov.go.id, yang pengelolaannya melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dalam mendukung keterbukaan informasi maka sejak tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu bentuk komitmen dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dua penghargaan dari Kementerian Kominfo RI atas andil Pemerintah Provinsi mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah dan pemanfaatan layanan mail multidomain. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan Digital Government Award SPBE Summit 2024 untuk kategori Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik pada kategori provinsi. Penghargaan itu diterima oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Senin tanggal 27 Mei 2024.
6. Sejak akhir tahun 2022, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki Dashboard Pembangunan Sumatera Barat yang dapat diakses oleh publik dan masyarakat umum secara bebas melalui link : <https://dashboard.sumbarprov.go.id/> yang berisikan informasi utuh dan lengkap terkait dengan pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Barat meliputi dari aspek pendapatan hingga belanja yang informasinya disajikan secara rinci hingga rincian kode rekening terkecil, sehingga diharapkan semua pihak dapat mengontrol jalannya penyelenggaraan pengelolaan APBD.

Untuk akuntabilitas dan transparansi, ditunjukkan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat menjadi dasar menilai/mengukur kinerja pembangunan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsen dengan penerapan reformasi birokrasi, berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitupun dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang juga semakin menunjukkan capaian yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Adapun Nilai SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.86
Capaian Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023

TAHUN	NILAI SAKIP	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
2016	BB (71,72)	B (62,87)
2017	BB (72,92)	B (65,45)
2018	BB (74,76)	B (65,63)
2019	BB (75,89)	B (66,79)
2020	BB (76,16)	B (66,87)
2021	BB (77,52)	B (68,89)
2022	BB (77,77)	B (69,78)
2023	BB (78,34)	BB (77,10)

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2023

Secara umum beberapa hal yang dilakukan dalam rangka tata kelola pemerintahan ini adalah:

1. Pemerintah daerah lebih konsentrasi pada aspek pengaturan dengan membuat kebijakan dari pada sebagai pelaksana kebijakan.
2. Mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Membangun karakter aparat birokrasi agar terjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual sehingga pengembangan SDM tidak hanya berorientasi pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada pengembangan moralitas/karakter.
4. Peningkatan transparansi berupa proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian pengawasan akan lebih intensif dilakukan oleh semua elemen
5. Peningkatan partisipasi berupa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul.
6. Peningkatan akuntabilitas berupa bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat dan aktivitas yang dilakukan. Diharapkan dengan adanya akuntabilitas ini dapat meminimalisir kesalahan seperti penyimpangan anggaran, atau hal hal yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku
7. Peningkatan koordinasi antara semua pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan cara pandang agar tujuan pembangunan dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien dan efektif

2.1.5.5. Potensi Ekonomi Lain (Pariwisata, Perdagangan, Industri, UKM, dll)

Otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi). Oleh karena itu kewajiban dari masing-masing daerah adalah memaksimalkan potensi ekonomi daerahnya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perekonomian tersebut. Keberadaan dari sektor-sektor yang memiliki pengaruh (multiplier effect) sangat diprioritaskan didalam usaha pembangunan mengingat jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke

tahun terus mengalami peningkatan.

Melihat potensi dan geografis daerah yang ada, Sumatera Barat secara keseluruhan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, namun potensi ekonomi ini belum dikembangkan dengan baik. Sektor pertanian merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Sementara di pedesaan ada potensi wisata yang bisa dikembangkan sehingga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa menggerakkan perekonomian desa/nagari. Selain karena potensi pariwisata yang luar biasa, juga perilaku masyarakat yang sekarang ini didominasi generasi milenial, memiliki selera wisata terhadap keindahan alam, tempat-tempat yang instagramable menjadi daya tarik bagi kaum ini.

Hal ini menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan bagi Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa/nagari sudah waktunya untuk berbenah dalam menangkap peluang ini. Akan tetapi untuk bisa menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru dibutuhkan sejumlah upaya agar angka kunjungan wisatawan semakin meningkat. Caranya yakni dengan mengandalkan kekayaan alam saja tidak cukup tetapi juga perlu pengelolaan yang baik seperti fasilitas penunjang, kebersihan dan data yang harus diperhatikan. Pengelolaan wisata tingkat desa juga akan menunjang untuk lahirnya para entrepreneur milenial dan peran serta masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sumatera Barat salah satunya dari sektor pariwisata. Potensi yang sangat besar ini membutuhkan intervensi dari berbagai stakeholder, salah satunya pemerintah. Penguatan peran pentahelix turut menjadi faktor kunci dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata meliputi wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi dengan tema-tema yang dikembangkan antara lain wisata bahari, wisata agro/eko, geowisata, wisata kreatif, wisata kuliner, wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata pendidikan, wisata religi, wisata kota pada wilayah DPP, KSPP, dan KPPP. Potensi geowisata, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tiga geopark nasional (yaitu Geopark Sianok Maninjau, Geopark Sawahlunto, dan Geopark Ranah Minang Silokek), dan empat aspiring geopark nasional (yaitu Geopark Singkarak, Geopark Harau, Geopark Solok Selatan, dan Geopark Talamau). Selain itu Provinsi Sumatera Barat telah memiliki 294 desa wisata tematik dan 50 desa wisata agro di tahun 2023.

Tabel 2.87
Jumlah Desa Wisata Berdasarkan Klasifikasi dan Tematik
di Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Klasifikasi				Tematik		
		Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri	Alam	Budaya	Buatan
1	Kab. Agam	17	10	3	-	16	11	8
2	Kab. Dharmasraya	3	7	12	-	10	8	6
3	Kab. Kep. Mentawai	8	-	1	-	2	1	1

No	Kab/Kota	Klasifikasi				Tematik		
		Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri	Alam	Budaya	Buatan
4	Kab. Lima Puluh Kota	26	4	-	-	4	4	1
5	Kab. Pdg Pariaman	3	4	1	-	4	2	1
6	Kab. Pasaman	9	4	-	-	1	4	1
7	Kab. Pasaman Barat	6	-	-	-	3	2	1
8	Kab. Pesisir Selatan	28	2	0	-	3	0	2
9	Kab. Sijunjung	10	6	8	-	15	9	8
10	Kab. Solok	1	15	3	-	9	9	3
11	Kab. Solok Selatan	6	3		-	3	3	15
12	Kab. Tanah Datar	18	4	1	-	7	7	2
13	Kota Bukittinggi	-	3		-	-	3	-
14	Kota Padang	3	-	-	-	-	-	-
15	Kota Pdg Panjang	4	1	-	-	1	2	2
16	Kota Pariaman	11	5	-	-	1	1	2
17	Kota Payakumbuh	1	1		-	-	-	-
18	Kota Sawahlunto	7	-	1	-	1	1	-
19	Kota Solok	2	2	-	-	1	1	-
JUMLAH		163	71	31	-	81	68	53

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, 2023

Hal utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan sektor pariwisata ini adalah pembenahan sarana dan prasarana pada destinasi wisata termasuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas ke kawasan wisata. Selain itu perlu dilakukan penyiapan masyarakat sekitar destinasi wisata dan peningkatan kapasitas pelaku wisata, serta branding promosi dan pemasaran.

Selain itu, merujuk pada program unggulan provinsi Sumatera Barat untuk 100.000 millennial, entrepreneur, dan woman entrepreneur, serta pelaku ekonomi kreatif, sektor lain yang juga memiliki potensi ekonomi yang besar adalah sektor Usaha Kecil dan Menengah. Potensi produk UKM di Sumatera Barat relatif banyak namun mengalami kendala dalam pemasaran karena belum bersertifikasi dan belum memenuhi standar yang ditetapkan, Disamping itu juga terkendala karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan serta masih rendahnya kapasitas pelaku UKM.

Potensi ekonomi lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah Usaha Kecil dan Menengah. Potensi produk UKM di Sumatera Barat relatif banyak namun mengalami kendala dalam pemasaran karena belum bersertifikasi dan belum memenuhi standar yang ditetapkan, Disamping itu juga terkendala karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan serta masih rendahnya kapasitas pelaku UKM.

Usaha ekonomi kreatif di Sumatera Barat memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubungannya dengan tingkat kreativitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian. Produk-produk

ekonomi kreatif diklasifikasikan kedalam 17 subsektor, yaitu : (1) Arsitektur, (2) Musik, (3) Desain Interior, (4) Fesyen, (5) Desain, (6) Komunikasi Visual, (7) Aplikasi dan Game Developer, (8) Desain Produk, (9) Penerbitan, (10) Film, Animasi, dan Video, (11) Periklanan, (12) Fotografi, (13) Televisi dan Radio, (14) Kriya, (15) Seni Pertunjukan, (16) Kuliner dan (17) Seni Rupa.

Untuk pencapaian pertumbuhan usaha ekonomi kreatif yang semakin lebih baik kedepannya maka dilakukan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui workshop untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif serta dukungan/fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif pada berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
											(8)		(9)		(10)		(11)														(12) = 8+9+10+11
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS PENDIDIKAN				636.899.436.717		663.438.129.175		2.256.344.509.219		192.765.719.175		458.120.278.303		767.044.651.650		877.646.964.978		2.295.577.614.106		101,74		2.959.015.743.281		464,60					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		1.539.519.792.295		190.611.648.104		443.348.012.766		324.810.152.533		644.835.088.807		1.603.604.902.210		104,16		1.603.604.902.210		inf					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		1.539.519.792.295		190.611.648.104		443.348.012.766		324.810.152.533		644.835.088.807		1.603.604.902.210		104,16		1.603.604.902.210		inf					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0	0	0	100	1.539.519.792.295	0	190.611.648.104	0	443.211.012.766	0	324.810.152.533	100	644.835.088.807	100	1.603.467.902.210	100,00	104,15	100	1.603.467.902.210	inf	inf					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0		0	0	12	1.474.530.750	3	57.075.200	3	131.969.200	3	345.825.050	3	758.868.950	12	1.293.738.400	100,00	87,74	12	1.293.738.400	inf	inf					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0		0	2	0	2	254.534.100	0	6.157.000	0	27.275.000	0	83.101.100	2	523.054.500	2	639.587.600	100,00	251,28	4	639.587.600	inf	inf	DISDIK			
2	X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	0		0	0	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
3	X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	0		0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK					
4	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0		0	0	0	0	319.646.350	0	50.918.200	0	68.635.800	0	80.321.950	0	60.141.250	0	260.017.200	nan	81,35	0	260.017.200	nan	inf	DISDIK			
			Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	0				3		0	0	0	0	0	3	0	3	100,00		3		inf		DISDIK						
5	X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	0				1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
6	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	0	0	362.904.400	0	0	14.862.000	0	85.730.000	0	56.749.200	0	157.341.200	nan	43,36	0	157.341.200	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	dokumen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISDIK						
7	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	0	0	537.445.900	0	0	21.196.400	0	96.672.000	0	118.924.000	0	236.792.400	nan	44,06	0	236.792.400	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISDIK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Bulan	0		0	0	12	1.502.130.252.148	3	188.418.825.032	3	433.013.492.533	3	316.485.975.911	3	611.984.639.857	12	1.549.902.933.333	100,00	103,18	12	1.549.902.933.333	inf	inf					
8	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	0		0	0	0	1.457.992.987.370	0	183.779.284.620	0	418.907.187.171	0	305.653.135.199	0	440.987.396.220	0	1.349.327.003.210	nan	92,55	0	1.349.327.003.210	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang menerima Tunjangan	orang	0				506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0				780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
9	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	5.401.750.000	0	0	2.482.500.000	0	414.100.000	1	4.822.160.200	1	7.718.760.200	100,00	142,89	1	7.718.760.200	inf	inf	DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]																												
10	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	3.461.250.000	0	526.100.000	0	1.052.200.000	0	2.873.310.000	1	2.776.914.600	1	7.228.524.600	100,00	208,84	1	7.228.524.600	inf	inf	DISDIK			
11	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	2.361.150.000	0	349.600.000	0	701.000.000	0	523.830.000	1	2.058.258.400	1	3.632.688.400	100,00	153,85	1	3.632.688.400	inf	inf	DISDIK			
12	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	4.829.750.000	0	672.600.000	0	1.342.700.000	0	968.660.000	1	3.907.200.400	1	6.891.160.400	100,00	142,68	1	6.891.160.400	inf	inf	DISDIK			
13	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	5.821.250.000	0	0	0	2.212.500.000	0	1.197.800.000	1	4.651.423.600	1	8.061.723.600	100,00	138,49	1	8.061.723.600	inf	inf	DISDIK			
14	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	10.494.900.000	0	1.591.000.000	0	3.219.500.000	0	2.388.220.000	1	9.370.100.000	1	16.568.820.000	100,00	157,87	1	16.568.820.000	inf	inf	DISDIK			
15	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	4.143.620.000	0	612.200.000	0	1.220.880.000	0	304.340.000	1	10.555.031.200	1	12.692.451.200	100,00	306,31	1	12.692.451.200	inf	inf	DISDIK			
16	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Bulan	0	0		0	12	1.723.922.228	3	46.444.412	3	296.825.362	3	751.274.912	3	127.924.244.548	12	129.018.789.234	100,00	7.484,03	12	129.018.789.234	inf	inf	DISDIK			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0				0	0	0	0	0	0	1		1	inf	1	inf	1	inf	DISDIK							
17	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	5.247.450.000	0	789.100.000	0	1.578.200.000	0	1.086.930.000	1	4.765.614.200	1	8.219.844.200	100,00	156,64	1	8.219.844.200	inf	inf	DISDIK			
18	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
19	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	0	652.222.550	0	52.496.000	0	0	0	324.375.800	0	166.296.489	0	543.168.289	nan	83,28	0	543.168.289	nan	inf	DISDIK			
			Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	dokumen	0			5		0	0	0	5	5	100,00	5		5		inf		DISDIK								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0	0	0	0	12	767.565.500	3	52.710.000	3	83.925.250	3	131.464.941	3	302.000.000	12	570.100.191	100,00	74,27	12	570.100.191	inf	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Perangkat Daerah																													
20	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
21	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	1	344.880.000	0	52.710.000	0	0	0	51.874.941	1	130.000.000	1	234.584.941	100,00	68,02	1	234.584.941	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas)	Unit/Set	0			12		0	0		0		3		3		25,00		3		inf		DISDIK						
22	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	317.685.500	0	0	0	43.118.250	0	73.350.000	0	155.000.000	0	271.468.250	nan	85,45	0	271.468.250	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	0			12		0	0		0		3		3		25,00		3		inf		DISDIK						
23	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
24	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	105.000.000	0	0	0	40.807.000	0	6.240.000	0	17.000.000	0	64.047.000	nan	61,00	0	64.047.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	dokumen	0			1		0	0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0	0	0	12	133.624.700	3	0	3	0	3	18.277.000	3	113.000.000	12	131.277.000	100,00	98,24	12	131.277.000	inf	inf						
			Tertib Adminstrasi Umum	Bulan	0	0		12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf							
25	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0	0	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK						
26	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK						
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket				0		0	0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK						
27	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Stel		0	0	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK						
28	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0	0	43		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK						
29	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0	0	259		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK						
30	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALTEKOMDIK]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0	0	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK						
31	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																												
											I	II	III	IV																																								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																								
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																													
		PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]																																																				
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel					43		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK																									
32	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK																								
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel					36		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK																									
33	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK																								
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel					45		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK																									
34	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	30		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK																								
35	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK																							
36	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK																							
37	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0		0	0		133.624.700	0		0	0		18.277.000	0		113.000.000	0		131.277.000	nan	98,24	0		131.277.000	nan	inf	DISDIK																						
			Jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali	0				1		0		0		0		1		1			100,00		1			inf		DISDIK																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																						
Predikat Kinerja																																																						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0		0	0		0	12	22.332.343.393	3		905.026.554	3		6.789.715.516	3		5.175.829.468	3		21.150.660.000	12		34.021.231.538	100,00	152,34	12		34.021.231.538	inf	inf																				
38	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	0		41.010.400	0		9.944.000	0		10.121.000	0		0	0		20.065.000	nan	48,93	0		20.065.000	nan	inf	DISDIK																						
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	bulan					12			3		3			3		3		12		100,00		12			inf		DISDIK																								
39	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan			0		0	12		2.881.500	3		0	3		2.881.500	3		0	3		2.880.000	12		5.761.500	100,00	199,95	12		5.761.500	inf	inf	DISDIK																			
40	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan			0		0	12		3.162.500	3		0	3		3.162.500	3		3.100.000	12		6.262.500	100,00	198,02	12		6.262.500	inf	inf	DISDIK																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		VII (KAB. PESISIR SELATAN)]																													
41	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BULAN		0		0	12	3.112.500	3	0	3	1.546.250	3	1.546.250	3	3.110.000	12	6.202.500	100,00	199,28	12	6.202.500	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
42	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	3.232.500	0	0	0	1.063.950	0	0	0	3.230.000	0	4.293.950	nan	132,84	0	4.293.950	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Set,Unit, Buah					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISDIK				
43	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bulan		0		0	12	3.112.500	3	0	3	0	3	3.112.500	3	3.100.000	12	6.212.500	100,00	199,60	12	6.212.500	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
44	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	3.634.100	0	0	0	1.612.000	0	0	0	3.630.000	0	5.242.000	nan	144,24	0	5.242.000	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bulan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK				
45	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	2.248.100	0	0	0	745.900	0	0	0	2.200.000	0	2.945.900	nan	131,04	0	2.945.900	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan; atau	Bulan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK				
46	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan		0		0	12	12.914.500	3	0	3	3.914.500	3	0	3	12.910.000	12	16.824.500	100,00	130,28	12	16.824.500	inf	inf	DISDIK				
47	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket		0		0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	242.255.320	0	290.000.000	0	532.255.320	nan	177,42	0	532.255.320	nan	inf	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Disediakan																													
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan ; atau	Unit, Set, Buah, dll	0				0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
48	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	199.050.600	0		0	0	0	165.850.000	0	190.000.000	0	355.850.000	nan	178,77	0	355.850.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan; atau	Unit, Set, Buah, dll	0			0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
49	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan ; atau	Bulan		0		0	12	126.163.400	3		0	3	38.531.200	3	31.642.000	3	122.000.000	12	192.173.200	100,00	152,32	12	192.173.200	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
50	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan ; atau	Unit, Set, Buah, dll	0		0	12	4.024.087.500	0	639.675.000	0	573.899.500	0	888.625.500	3	4.000.000.000	3	6.102.200.000	25,00	151,64	3	6.102.200.000	inf	inf	DISDIK						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0			0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
51	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALTEKOMDIK]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan		0		0	12	58.881.500	3		0	3	0	3	57.500.000	12	57.500.000	100,00	97,65	12	57.500.000	inf	inf	DISDIK						
52	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan		0		0	12	2.035.791.100	3	600.000	3	666.924.900	3	854.750.000	3	2.000.000.000	12	3.522.274.900	100,00	173,02	12	3.522.274.900	inf	inf	DISDIK					
53	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan		0		0	12	1.432.405.817	3		0	3	649.933.000	3	264.180.000	3	1.200.000.000	12	2.114.113.000	100,00	147,59	12	2.114.113.000	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
54	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	3.354.109.600	0	0	0	1.883.844.200	0	677.463.600	0	3.000.000.000	0	5.561.307.800	nan	165,81	0	5.561.307.800	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK					
55	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	1.027.095.900	0	0	0	537.960.700	0	202.560.000	0	1.000.000.000	0	1.740.520.700	nan	169,46	0	1.740.520.700	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK					
56	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	2.028.576.252	0	0	0	747.943.600	0	217.012.300	0	2.000.000.000	0	2.964.955.900	nan	146,16	0	2.964.955.900	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK					
57	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	1.037.243.500	0	23.190.800	0	346.305.000	0	359.787.200	0	1.000.000.000	0	1.729.283.000	nan	166,72	0	1.729.283.000	nan	inf	DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan					12	3		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK			
58	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	162.811.360	0	0	0	122.988.960	0	22.617.470	0	162.000.000	0	307.606.430	nan	188,93	0	307.606.430	nan	inf		DISDIK			
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bulan					12	3		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK			
59	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan		0		0	12	14.750.000	3	0	3	7.374.650	3	0	3	14.000.000	12	21.374.650	100,00	144,91	12	21.374.650	inf	inf		DISDIK			
60	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan		0		0	12	21.690.000	3	0	3	1.840.000	3	5.687.250	3	21.000.000	12	28.527.250	100,00	131,52	12	28.527.250	inf	inf		DISDIK			
61	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bulan		0		0	12	23.362.500	3	800.000	3	6.226.000	3	0	3	23.000.000	12	30.026.000	100,00	128,52	12	30.026.000	inf	inf		DISDIK			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
62	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bulan		0		0	12	9.185.000	3	0	3	9.185.000	3	0	3	9.000.000	12	18.185.000	100,00	197,99	12	18.185.000	inf	inf		DISDIK			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
63	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	12.800.000	0	0	0	4.708.000	0	945.000	0	12.000.000	0	17.653.000	nan	137,91	0	17.653.000	nan	inf		DISDIK			
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bulan					12	3		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK			
64	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan		0		0	12	19.329.000	3	5.300.000	3	0	3	8.060.000	3	19.000.000	12	32.360.000	100,00	167,42	12	32.360.000	inf	inf		DISDIK			
65	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan		0		0	12	8.684.250	3	0	3	5.765.750	3	0	3	8.000.000	12	13.765.750	100,00	158,51	12	13.765.750	inf	inf		DISDIK			
66	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Unit, Set, Buah, dll		0		0	12	109.548.500	0	1.750.000	0	53.348.250	0	125.402.500	3	109.000.000	3	289.500.750	25,00	264,27	3	289.500.750	inf	inf		DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengandaan	Disediakan																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
67	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Bulan		0		0	12	7.247.000	3		0	3	3.623.500	3	1.811.750	3	7.000.000	12	12.435.250	100,00	171,59	12	12.435.250	inf	inf	DISDIK			
68	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan [UPTD BALTEKOMDIK]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Bulan		0		0	12	28.855.364	3		0	3	0	3	0	3	28.000.000	12	28.000.000	100,00	97,04	12	28.000.000	inf	inf	DISDIK			
69	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan; atau	Eksemplar	0	0		0	533	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
70	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	189.610.250	0	3.600.000	0	62.750.000	0	0	0	179.000.000	0	245.350.000	nan	129,40	0	245.350.000	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
71	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALTEKOMDIK]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	305.560.000	0		0	0	16.805.832	0	95.078.951	1	295.000.000	1	406.884.783	100,00	133,16	1	406.884.783	inf	inf	DISDIK			
72	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen		0		0	1	190.000.000	0	37.345.000	0	57.959.731	0	61.585.000	1	180.000.000	1	336.889.731	100,00	177,31	1	336.889.731	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
73	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	421.832.716	0		0	0	57.030.000	0	76.860.000	0	411.000.000	0	544.890.000	nan	129,17	0	544.890.000	nan	inf	DISDIK			
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
74	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	1.118.386.375	0		0	0	211.983.300	0	53.438.600	0	1.018.000.000	0	1.283.421.900	nan	114,76	0	1.283.421.900	nan	inf	DISDIK			
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
75	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	1.245.483.900	0	62.949.400	0	179.240.680	0	193.247.835	0	1.145.000.000	0	1.580.437.915	nan	126,89	0	1.580.437.915	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
76	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	0	0		0	12	950.428.000	0	70.319.154	0	261.053.420	0	362.218.455	3	945.000.000	3	1.638.591.029	25,00	172,41	3	1.638.591.029	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD																													
77	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen		0		0	1	207.461.750	0	37.593.200	0	47.339.000	0	54.947.442	1	197.000.000	1	336.879.642	100,00	162,38	1	336.879.642	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
78	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen		0		0	1	1.295.716.159	0	11.960.000	0	132.160.993	0	130.400.695	1	1.195.000.000	1	1.469.521.688	100,00	113,41	1	1.469.521.688	inf	inf	DISDIK					
79	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen		0		0	1	290.887.500	0		0	81.105.250	0	71.581.350	1	280.000.000	1	432.686.600	100,00	148,75	1	432.686.600	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0		0	0		0	12	2.800.000.000	3	24.762.871	3	22.336.500	3		0	3	2.750.000.000	12	2.797.099.371	100,00	99,90	12	2.797.099.371	inf	inf			
80	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			0		0	0	2.800.000.000	0	24.762.871	0	22.336.500	0		0	0	2.750.000.000	0	2.797.099.371	nan	99,90	0	2.797.099.371	nan	inf	DISDIK			
			Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	0					10		0		0			10		10		100,00		10		inf		DISDIK					
81	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel; atau	unit	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
82	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun (sebutkan nama gedung/bangunannya)	unit	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0		0	0		0	12	9.224.330.404	3	1.108.269.601	3	2.946.748.952	3	2.531.809.279	3	7.482.170.000	12	14.068.997.832	100,00	152,52	12	14.068.997.832	inf	inf				
83	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan			0		0	12	1.030.000	3	500.000	3		0	3	1.000.000	12	1.500.000	100,00	145,63	12	1.500.000	inf	inf	DISDIK					
84	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0		0	5000	55.221.000	0		0	0		0	42.320.000	5000		0	5000	42.320.000	100,00	76,64	5000	42.320.000	inf	inf	DISDIK			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
85	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			0		0	0	4.000.000	0		0	0	4.000.000	0		0	8.000.000	nan	200,00	0		8.000.000	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan						12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
86	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0	3.150.000	0	0	0	750.000	0	2.400.000	0	1.720.000	0	4.870.000	nan	154,60	0	4.870.000	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan					12	3		3		3		3		3	12		100,00		12		inf	DISDIK					
87	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan		0		0	12	2.020.000	3	1.000.000	3	0	3	1.020.000	3	1.000.000	12	3.020.000	100,00	149,50	12	3.020.000	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					0	0		0		0		0		0	0		nan		0		nan	DISDIK					
88	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan		0		0	12	1.050.000	3	0	3	500.000	3	0	3	1.050.000	12	1.550.000	100,00	147,62	12	1.550.000	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					0	0		0		0		0		0	0		nan		0		nan	DISDIK					
89	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	4.000.000	nan	200,00	0	4.000.000	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan					12	3		3		3		3		3	12		100,00		12		inf	DISDIK					
90	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0	3.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	3.000.000	0	6.000.000	nan	200,00	0	6.000.000	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan					12	3		3		3		3		3	12		100,00		12		inf	DISDIK					
91	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0	3.150.000	0	0	0	2.500.000	0	0	3	3.150.000	3	5.650.000	inf	179,37	3	5.650.000	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan					12	3		3		3		3		3	12		100,00		12		inf	DISDIK					
92	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps		0		0	0	29.970.000	0	3.803.650	0	3.127.100	0	3.831.900	3	29.900.000	3	40.662.650	inf	135,68	3	40.662.650	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening					0	0		0		0		3		3		inf		3		inf	DISDIK						
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA					0	0		0		0		3		3		inf		3		inf	DISDIK						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0	0		0		0		3		3		inf		3		inf	DISDIK						
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					0	0		0		0		3		3		inf		3		inf	DISDIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
93	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	18.030.000	0	1.089.212	0	2.245.350	0	2.747.850	3	18.000.000	3	24.082.412	inf	133,57	3	24.082.412	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA				0		0		0		0		3		3		inf		3		inf		DISDIK					
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening				0		0		0		0		3		3		inf		3		inf		DISDIK					
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik				0		0		0		0		3		3		inf		3		inf		DISDIK					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps				0		0		0		0		3		3		inf		3		inf		DISDIK					
94	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESIRIR SELATAN)]	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik		0		0	15.203.000	0	4.144.484	0	1.632.700	0	4.430.460	3	12.000.000	3	22.207.644	inf	146,07	3	22.207.644	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA				0		0		0		0		3		3		inf		3		inf		DISDIK					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0		0		0		0		3		3		inf		3		inf		DISDIK					
95	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	m3		0		0	1	740.974.500	0	115.518.636	0	192.263.143	0	649.929.994	1	140.000.000	1	1.097.711.773	100,00	148,14	1	1.097.711.773	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	0				1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	0				1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	0				1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0				0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
96	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mbps		0		0	30	14.250.000	0	0	0	6.954.660	0	7.014.111	30	14.250.000	30	28.218.771	100,00	198,03	30	28.218.771	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik/KVA/MBps				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
97	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA		0		0	0	35.100.000	0	5.017.560	0	6.171.260	0	18.507.444	0	33.000.000	0	62.696.264	nan	178,62	0	62.696.264	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening					0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
98	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALTEKOMDIK]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	0	315.330.000	0	0	0	48.073.500	0	134.619.000	0	267.000.000	0	449.692.500	nan	142,61	0	449.692.500	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					100	0		0		0		0		100		100,00		100		inf		DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening					0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA					0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
99	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik		0		0	23.773.500	0	2.930.800	0	3.414.950	0	11.483.350	0	20.000.000	0	37.829.100	nan	159,12	0	37.829.100	nan	inf	DISDIK						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
100	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	39.361.500	0	0	0	7.001.689	0	2.990.440	0	39.100.000	0	49.092.129	nan	124,72	0	49.092.129	nan	inf	DISDIK						
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Rekening				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
101	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening		0		0	33.200.000	0	2.396.400	0	6.134.800	0	14.172.900	0	32.000.000	0	54.704.100	nan	164,77	0	54.704.100	nan	inf	DISDIK						
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA				0		0	0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISDIK				
102	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	70.000.000	nan	200,00	0	70.000.000	nan	inf	DISDIK						
			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit				1		0	1		0		1		2		200,00		2		inf		DISDIK							
103	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	70.000.000	nan	200,00	0	70.000.000	nan	inf	DISDIK						
			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit				1		0	1		0		1		2		200,00		2		inf		DISDIK							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
104	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	1	35.000.000	1	70.000.000	100,00	200,00	1	70.000.000	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISDIK					
105	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	35.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	67.000.000	nan	191,43	0	67.000.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit					1		1	0		0		1		2		200,00		2		inf		DISDIK					
106	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	70.000.000	nan	200,00	0	70.000.000	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit					1		0	1		0		1		2		200,00		2		inf		DISDIK					
107	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	110.535.018	0	0	0	63.194.784	0	15.780.078	0	100.000.000	0	178.974.862	nan	161,92	0	178.974.862	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang					3		0		0		0		3		3		100,00		3		inf		DISDIK				
108	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	0	0		0	24	1.322.224.798	0	70.140.212	0	515.146.767	0	109.191.568	24	1.100.000.000	24	1.794.478.547	100,00	135,72	24	1.794.478.547	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
109	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALTEKOMDIK]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	192.673.136	0	19.050.156	0	44.573.366	0	29.954.856	1	180.000.000	1	273.578.378	100,00	141,99	1	273.578.378	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISDIK				
110	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	1.935.733.562	0	296.479.602	0	596.567.553	0	444.719.403	0	1.710.000.000	0	3.047.766.558	nan	157,45	0	3.047.766.558	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
111	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	116.987.494	0	0	0	47.294.635	0	22.612.851	0	101.000.000	0	170.907.486	nan	146,09	0	170.907.486	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
112	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	1.378.519.618	0	206.001.528	0	429.807.092	0	317.068.542	0	1.170.000.000	0	2.122.877.162	nan	154,00	0	2.122.877.162	nan	inf	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK]]																														
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang					0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
113	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0		0	1.401.273.190	0	201.003.120	0	443.908.710	0	363.519.640	0	1.250.000.000	0	2.258.431.470	nan	161,17	0	2.258.431.470	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
114	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0		0	285.431.100	0	0	0	130.660.044	0	66.860.125	0	241.000.000	0	438.520.169	nan	153,63	0	438.520.169	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
115	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0		0	646.901.938	0	100.468.539	0	193.631.846	0	149.704.071	0	540.000.000	0	983.804.456	nan	152,08	0	983.804.456	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
116	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN))	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0		0	319.237.050	0	45.225.702	0	90.195.003	0	80.430.696	0	293.000.000	0	508.851.401	nan	159,40	0	508.851.401	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	0		0	0		0	12	657.145.400	3	44.978.846	3	222.824.815	3	120.970.884	3	293.750.000	12	682.524.545	100,00	103,86	12	682.524.545	inf	inf				
117	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN))	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			0		0	0	0	16.950.000	0	0	0	11.431.050	0	0	0	16.950.000	0	28.381.050	nan	167,44	0	28.381.050	nan	inf	DISDIK			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
118	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK))	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			0		0	0	0	16.950.000	0	1.673.846	0	8.958.850	0	0	0	16.700.000	0	27.332.696	nan	161,25	0	27.332.696	nan	inf	DISDIK			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
119	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit			0		0	0	0	16.950.000	0	0	0	0	2.714.009	0	16.850.000	0	19.564.009	nan	115,42	0	19.564.009	nan	inf	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																												
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit					1		0		0		0		1			1		100,00		1		inf		DISDIK			
120	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	0	16.950.000	0	0	0	7.903.227	0	1.289.709	0	16.950.000	0	26.142.936	nan	154,24	0	26.142.936	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit					1		0		0		0		1			1		100,00		1		inf	DISDIK				
121	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	0	16.950.000	0	0	0	3.306.251	0	5.828.300	0	16.750.000	0	25.884.551	nan	152,71	0	25.884.551	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit					1		0		0		0		1			1		100,00		1		inf	DISDIK				
122	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	9.002.243	0	3.240.000	1	13.500.000	1	25.742.243	100,00	151,87	1	25.742.243	inf	inf	DISDIK				
123	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	10	339.500.000	0	43.305.000	0	111.685.250	0	85.357.000	10	47.000.000	10	287.347.250	100,00	84,64	10	287.347.250	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0				0		0		0		0		0			0		nan		0		nan	DISDIK				
124	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	4.499.134	0	10.365.616	1	16.950.000	1	31.814.750	100,00	187,70	1	31.814.750	inf	inf	DISDIK				
125	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
126	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	5.600.000	0	0	0	3.830.000	0	1.770.000	0	5.600.000	0	11.200.000	nan	200,00	0	11.200.000	nan	inf	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]																													
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					12	0		0		0		12		12		100,00		12		inf		DISDIK					
127	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit, Set, Buah		0	0	12	136.555.400	0	0	0	49.343.810	0	2.175.000	12	70.000.000	12	121.518.810	100,00	88,99	12	121.518.810	inf	inf	DISDIK					
128	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	0	11.360.000	0	0	0	5.560.000	0	0	0	11.360.000	0	16.920.000	nan	148,94	0	16.920.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; atau	Unit, Set, Buah, dll				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
129	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	0	7.750.000	0	0	0	2.415.000	0	781.250	0	7.740.000	0	10.936.250	nan	141,11	0	10.936.250	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; atau	Unit, Set, Buah, dll				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
130	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit, Set, Buah, dll		0	0	0	12.820.000	0	0	0	2.050.000	0	0	0	12.800.000	0	14.850.000	nan	115,83	0	14.850.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
131	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit, Set, Buah, dll		0	0	0	4.990.000	0	0	0	2.840.000	0	2.150.000	0	4.900.000	0	9.890.000	nan	198,20	0	9.890.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
132	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	0	5.720.000	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000	nan	99,65	0	5.700.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit, Set, Buah, dll				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
133	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit, Set, Buah, dll		0	0	0	7.100.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0	7.000.000	0	8.800.000	nan	123,94	0	8.800.000	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK				
134	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit, Set, Buah, dll		0	0	0	7.100.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	7.000.000	0	10.500.000	nan	147,89	0	10.500.000	nan	inf	DISDIK					
135	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DISDIK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0		0	nan	nan			
136	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja			0		0	5		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				636.899.436.717		663.438.129.175		716.824.716.924		2.154.071.071		14.772.265.537		442.234.499.117		232.811.876.171			691.972.711.896		96,53			1.355.410.841.071		212,81				
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				636.899.436.717		663.438.129.175		716.824.716.924		2.154.071.071		14.772.265.537		442.234.499.117		232.811.876.171			691.972.711.896		96,53			1.355.410.841.071		212,81				
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	%		635.747.680.717	0	662.590.231.025	94.7	714.089.386.164	0	2.154.071.071	0	13.532.838.387	0	441.089.691.917	94.7	232.811.876.171	94.7	689.588.477.546	100,00	96,57	94.7	1.352.178.708.571	inf	212,69						
			APM Pendidikan Menengah	%			0		73.49		0		0		0		73.49		73.49		100,00		73.49		inf							
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tertelaksananya Proses Belajar Mengajar dan Fasilitas Sarana Prasarana Sekolah	Sekolah	0	369.771.610.213	0	327.946.115.306	11	370.261.052.200	0	1.092.708.045	0	8.821.534.084	0	248.899.897.514	11	102.006.541.521	11	360.820.681.164	100,00	97,45	11	688.766.796.470	inf	186,27						
1	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0	0		1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
2	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0	0		1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
3	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0	0		1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
4	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0		1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
5	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0	0		1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
6	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0		1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
7	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	5	399.075.400	5	8.000.000.000	0	0		19.609.200	0	719.167.496	5	672.000.000	5	1.410.776.696	100,00	17,63	10	1.809.852.096	inf	inf	DISDIK				
8	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB.	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0		1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I	II	III	IV									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp				
		SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK]]																		
9	1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT))	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 nan	DISDIK			
10	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0 2	633.072.747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	2	633.072.747 inf	DISDIK			
11	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 nan	DISDIK			
12	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 nan	nan	0	0 nan	DISDIK			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00		0	nan	DISDIK			
13	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	24	7.395.432.204	17 8.950.435.926	50 4.870.000.000	0 0	339.058.300	669.651.989	50 321.249.321	50 1.329.959.610	100,00	27,31	67 10.280.395.536	279,17 139,01	DISDIK		
14	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 nan	DISDIK			
15	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0 1	235.849.847	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 nan	nan	1	235.849.847 inf	DISDIK			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00		0	nan	DISDIK			
16	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 nan	DISDIK			
17	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0 1	196.208.655	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	1	196.208.655 inf	DISDIK			
18	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT))	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	unit	0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 nan	DISDIK			
19	1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	10	1.146.291.992	4 1.205.180.000	1 1.039.647.000	0 0	0 0	0 1	397.002.150	1 397.002.150	100,00	38,19	5 1.602.182.150	50,00 139,77	DISDIK		
20	1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0	0 3	1.276.913.902	1 645.803.000	0 0	18.155.000	0 1	157.999.050	1 176.154.050	100,00	27,28	4 1.453.067.952	inf inf	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
21	1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	6	1.993.401.419	1	1.374.508.000	0	0	0	0	0	1	1.374.000.000	1	1.374.000.000	100,00	99,96	7	3.367.401.419	inf	inf	DISDIK					
22	1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	4	1.365.803.000	1	1.884.451.000	0	0	0	8.584.000	0	0	1	185.000.000	1	193.584.000	100,00	10,27	5	1.559.387.000	inf	inf	DISDIK				
23	1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang	12	1.479.086.441	6	1.314.100.000	1	576.007.000	0	0	0	0	0	1	575.000.000	1	575.000.000	100,00	99,83	7	1.889.100.000	58,33	127,72	DISDIK					
24	1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
25	1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Ruang	15	2.699.332.755	1	913.450.347	1	615.000.000	0	0	0	40.408.000	0	174.919.142	1	380.000.000	1	595.327.142	100,00	96,80	2	1.508.777.489	13,33	55,89	DISDIK				
26	1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	8	776.520.381	6	1.720.804.310	1	1.482.335.000	0	0	0	0	0	1	1.482.000.000	1	1.482.000.000	100,00	99,98	7	3.202.804.310	87,50	412,46	DISDIK					
27	1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6	221.862.966	2	559.170.000	1	800.000.000	0	0	0	52.108.000	0	161.280.000	1	550.000.000	1	763.388.000	100,00	95,42	3	1.322.558.000	50,00	596,11	DISDIK				
28	1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	11	4.437.259.323	1	195.169.850	1	2.741.000.000	0	0	0	69.885.600	0	235.813.200	1	2.400.000.000	1	2.705.698.800	100,00	98,71	2	2.900.868.650	18,18	65,38	DISDIK				
29	1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	4	1.825.227.140	1	4.825.565.000	0	0	0	82.728.000	0	668.164.610	1	4.000.000.000	1	4.750.892.610	100,00	98,45	5	6.576.119.750	inf	inf	DISDIK				
30	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0	0	1.218.585.434	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	1.218.585.434	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	7		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7	inf	DISDIK									
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISDIK									
31	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0	10	1.716.368.843	1	370.459.350	0	0	0	0	65.266.000	1	300.000.000	1	365.266.000	100,00	98,60	11	2.081.634.843	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DISDIK									
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	1	1	100,00	1	inf	DISDIK												
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0		1	0	0	0	1	1	100,00	1	inf	DISDIK														
32	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	184	45.370.976.573	22	10.158.126.623	236	26.714.455.000	0	0	0	313.460.250	0	1.431.934.742	236	25.000.000.000	236	26.745.394.992	100,00	100,12	258	36.903.521.615	140,22	81,34	DISDIK				
33	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0	0	0	1.117.691.920	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	1.117.691.920	nan	inf	DISDIK						
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jenis/Unit	0	6		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6	inf	DISDIK										
34	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0	0	771.173.908	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	771.173.908	nan	inf	DISDIK						
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISDIK											
			Jumlah Sarana yang dibangun	unit	0	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4	inf	DISDIK											
35	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH	Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0	0	2.255.984.678	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	2.255.984.678	nan	inf	DISDIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong														
								I		II		III		IV																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]																																			
			Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0		11		1		0		0		0		0		0		0		0,00		11		inf		DISDIK								
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK								
36	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0	7	1.334.667.857	1		288.730.000	0		0	0	36.973.750	1		250.000.000	1		286.973.750	100,00	99,39	8		1.621.641.607	inf	inf	DISDIK						
37	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0	17	3.334.140.390	0		43.750.000	0		0	0	0	43.600.000	0		43.600.000	nan	99,66	17		3.377.740.390	inf	inf	DISDIK								
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK										
38	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0		0	0	2.050.742.531	1		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		2.050.742.531	nan	inf	DISDIK								
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0		11		1		0		0		0		0		0		0		0,00		11		inf		DISDIK								
			Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK								
39	1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	702.566.059	0		0	1		530.000.000	0		0	0	35.236.400	0		75.313.088	1		420.000.000	1		530.549.488	100,00	100,10	1		530.549.488	inf	75,52	DISDIK			
40	1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	517.680.254	0		0	1		800.000.000	0		0	0	52.290.400	0		167.505.083	1		580.000.000	1		799.795.483	100,00	99,97	1		799.795.483	inf	154,50	DISDIK			
41	1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0	3	922.295.000	1		1.022.586.000	0		0	0	90.703.680	1		930.000.000	1		1.020.703.680	100,00	99,82	4		1.942.998.680	inf	inf	DISDIK						
42	1.01.02.1.01.18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang	0		0	0		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK								
43	1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	3.143.058.687	0		3.071.973.183	1		12.920.831.000	0		0	0	29.465.000	0		0	1		12.800.000.000	1		12.829.465.000	100,00	99,29	1		15.901.438.183	inf	505,92	DISDIK			
44	1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0	1.383.125.000	1		4.213.638.000	0		0	0	19.920.000	0		0	1		4.150.000.000	1		4.169.920.000	100,00	98,96	1		5.553.045.000	inf	inf	DISDIK			
45	1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0	437.028.800	1		886.179.000	0		0	0	0	0		0	1		880.000.000	1		880.000.000	100,00	99,30	1		1.317.028.800	inf	inf	DISDIK			
46	1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0	163.899.000	1		1.117.714.000	0		0	0	0	0		0	1		1.100.000.000	1		1.100.000.000	100,00	98,42	1		1.263.899.000	inf	inf	DISDIK			
47	1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0	220.898.990	1		1.341.256.000	0		0	0	0	0		0	1		1.340.000.000	1		1.340.000.000	100,00	99,91	1		1.560.898.990	inf	inf	DISDIK			
48	1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	295.817.288	0		129.700.000	1		942.640.000	0		0	0	0	0		0	1		940.000.000	1		940.000.000	100,00	99,72	1		1.069.700.000	inf	361,61	DISDIK			
49	1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0		0	1		265.766.000	0		0	0	0		0	0		225.000.000	1		264.469.800	100,00	99,51	1		264.469.800	inf	inf	DISDIK			
50	1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK						
51	1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0	94.685.000	1		452.300.000	0		0	0	44.125.800	1		407.000.000	1		451.125.800	100,00	99,74	1		545.810.800	inf	inf	DISDIK						
52	1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	0	488.214.000	1		1.463.708.000	0		0	0	17.895.200	0		41.817.951	1		1.400.000.000	1		1.459.713.151	100,00	99,73	1		1.947.927.151	inf	inf	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
53	1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	998.383.348	0	435.290.955	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	435.290.955	nan	43,60	DISDIK					
54	1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	93.000.000	0	0	0	0	0	1	92.000.000	1	92.000.000	100,00	98,92	1	92.000.000	inf	inf	DISDIK						
55	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	3	660.765.092	1	15.000.000	0	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00	100,00	4	675.765.092	inf	inf	DISDIK						
56	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0	0	0	191.849.513	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	191.849.513	nan	inf	DISDIK							
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK								
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK								
57	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	60.568.200	0	0	0	0	8.642.400	1	51.000.000	1	59.642.400	100,00	98,47	1	59.642.400	inf	inf	DISDIK						
58	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0	0	0	228.403.100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	228.403.100	nan	inf	DISDIK							
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK								
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0	0	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		1		inf		DISDIK								
59	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0	0	0	241.116.206	1	507.165.680	0	0	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	100,00	98,59	1	741.116.206	inf	inf	DISDIK						
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0	0	1		1	0	0	0	0	0	1		100,00		2		inf		DISDIK									
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	1		100,00		1		inf		DISDIK									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		nan		0		nan		DISDIK									
60	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	bilik	0	2.292.583.983	0	1.830.602.036	171	8.486.961.000	0	0	197.907.200	0	1.273.355.998	171	7.000.000.000	171	8.471.263.198	100,00	99,82	171	10.301.865.234	inf	449,36	DISDIK						
61	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0	0	0	1.132.869.674	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	1.132.869.674	nan	inf	DISDIK							
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK								
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK								
62	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	130.347.254	0	0	0	0	61.567.300	0	68.300.000	0	129.867.300	nan	99,63	0	129.867.300	nan	inf	DISDIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]																														
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
63	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1	0	0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1	0	0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
64	1.01.02.1.01.32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
65	1.01.02.1.01.33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
66	1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit	0	295.817.288	2	435.922.000	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	435.922.000	inf	147,36	DISDIK				
67	1.01.02.1.01.35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
68	1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit, Set, Buah, dll	25	4.917.962.416	59	15.535.569.300	22	750.000.000	0	0	0	2.556.000	0	20.127.190	22	727.000.000	22	749.683.190	100,00	99,96	81	16.285.252.490	324,00	331,14	DISDIK					
69	1.01.02.1.01.37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
70	1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
71	1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0		0	198.376.000	0	2.640.000.000	0	0	0	0	0	1.988.477.000	0	640.000.000	0	2.628.477.000	nan	99,56	0	2.826.853.000	nan	inf	DISDIK					
72	1.01.02.1.01.40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
73	1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	jenis/ unit	0	41.303.488.861	0	4.203.839.010	236	2.506.649.000	0	51.661.043	0	156.930.298	0	212.058.350	236	2.200.000.000	236	2.620.649.691	100,00	104,55	236	6.824.488.701	inf	16,52	DISDIK					
74	1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
75	1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
76	1.01.02.1.01.44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
77	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	orang	0		0	4.937.155.661	401	5.000.000.000	0	0	0	0	0	21.650.000	401	4.970.000.000	401	4.991.650.000	100,00	99,83	401	9.928.805.661	inf	inf	DISDIK					
78	1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
79	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0		0	0	11	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
80	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik	Sekolah	0		0		34	0	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			yang diselenggarakan dengan baik																													
81	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Sekolah	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DISDIK								
82	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	30	5.269.462.970	0	0	909.208.843	0	401.640.279	30	4.700.000.000	30	6.010.849.122	100,00	114,07	30	6.010.849.122	inf	inf	DISDIK							
83	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	5.168.339.726	17	5.383.801.500	0	792.125.702	0	1.583.995.003	0	382.402.851	17	3.780.000.000	17	6.538.523.556	100,00	121,45	17	11.706.863.282	inf	inf	DISDIK						
84	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Bulan	0	0	0	32	2.611.280.000	0	0	349.398.600	0	157.556.000	32	2.350.000.000	32	2.856.954.600	100,00	109,41	32	2.856.954.600	inf	inf	DISDIK							
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DISDIK											
85	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	4.122.943.800	0	0	1.301.812.835	0	445.800.617	0	2.900.000.000	0	4.647.613.452	nan	112,73	0	4.647.613.452	nan	inf	DISDIK							
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Bulan	0	0	25	0	0	0	25	25	100,00	25	inf	DISDIK																
86	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK									
87	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	26	2.759.702.746	0	0	787.567.000	0	343.227.448	26	1.859.700.000	26	2.990.494.448	100,00	108,36	26	2.990.494.448	inf	inf	DISDIK							
88	1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	dokumen	0	332.794.449	1	2.892.325.682	1	2.855.751.000	0	0	1.138.695.705	0	0	1	3.339.446.705	100,00	116,94	2	6.231.772.387	inf	1.872,56	DISDIK								
89	1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0	4.769.496.570	135739	7.442.940.700	0	248.921.300	0	1.185.079.550	0	1.815.135.750	135739	4.442.940.000	135739	7.692.076.600	100,00	103,35	135739	12.461.573.170	inf	inf	DISDIK						
90	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DISDIK								
91	1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	0	251.444.694.945	0	231.431.031.081	236	237.146.150.000	0	0	0	237.146.150.000	236	0	236	237.146.150.000	100,00	100,00	236	468.577.181.081	inf	186,35	DISDIK							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
92	1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0	0	0	53	251.000.000	0	0	0	109.579.700	0	0	53	250.000.000	53	359.579.700	100,00	143,26	53	359.579.700	inf	inf	DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dan Fasilitas Sarana Prasarana Sekolah	Sekolah	0	265.976.070.504	0	281.682.536.991	3	289.029.715.968	0	953.620.726	0	3.940.566.153	0	150.989.708.393	3	129.443.428.000	3	285.327.323.272	100,00	98,72	3	567.009.860.263	inf	213,18					
93	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	unit	0	0	0	359.732.000	5	8.000.000.000	0	0	0	7.274.700	0	1.026.403.597	5	6.800.000.000	5	7.833.678.297	100,00	97,92	5	8.193.410.297	inf	inf	DISDIK				
94	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
95	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
96	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
97	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK			
98	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK			
99	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK			
100	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK			
101	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK			
102	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	0	215.880.900	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	215.880.900	nan	inf	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong												
								I	II	III	IV																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]																														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
103	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	0	2.381.439.376	0	10.309.504.681	25	3.001.710.000	0	0	0	0	0	25	3.000.000.000	25	3.000.000.000	100,00	99,94	25	13.309.504.681	inf	558,88	DISDIK						
104	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK				
105	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK				
106	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0		0	474.084.790	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0	474.084.790	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	unit	0		2		1		0		0		0		0		0		0,00		2		inf		DISDIK					
107	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0		0	3	910.763.775	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	3	910.763.775	inf	inf	DISDIK				
108	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
109	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
110	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0		0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
111	1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	1.054.367.083	0		0	651.000.000	0	0	11.590.300	0	0	630.000.000	0	641.590.300	nan	98,55	0	641.590.300	nan	60,85	DISDIK							
			Jumlah Ruang Guru yang dibangun	unit	0		0		1		0		0		0		1		100,00		1		inf		DISDIK							
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK							
			Jumlah Ruang TU yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK							
112	1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Unit	0	1.349.646.145	0	23.420.560.387	1	28.180.600.000	0	0	6.052.200	0	0	1	28.100.000.000	1	28.106.052.200	100,00	99,74	1	51.526.612.587	inf	3.817,79	DISDIK						
113	1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Unit	0	1.014.026.035	0	1.432.299.341	1	10.218.240.000	0	0		0	0	1	10.200.000.000	1	10.200.000.000	100,00	99,82	1	11.632.299.341	inf	1.147,14	DISDIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
114	1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	933.013.771	1	1.759.027.000	0	0	0	0	0	1	1.750.000.000	1	1.752.695.200	100,00	99,64	1	2.685.708.971	inf	inf	DISDIK				
115	1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	687.053.947	0	1.144.966.184	1	400.229.000	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	391.307.250	100,00	97,77	1	1.536.273.434	inf	223,60	DISDIK				
116	1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Unit	0	2.037.031.130	1	105.699.300	1	1.210.000.000	0	0	0	0	0	1	1.200.000.000	1	1.207.764.400	100,00	99,82	2	1.313.463.700	inf	64,48	DISDIK				
117	1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
118	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN))	Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0	4	1.061.464.500	1	36.540.000	0	0	0	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	100,00	95,79	5	1.096.464.500	inf	inf	DISDIK				
119	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	0	16.880.126.222	0	6.810.186.248	111	14.745.558.000	0	0	0	10.973.100	0	477.968.585	111	14.100.000.000	111	14.588.941.685	100,00	98,94	111	21.399.127.933	inf	126,77	DISDIK			
120	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA))	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	jenis / unit	0	0	0	2.057.107.100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	2.057.107.100	nan	inf	DISDIK				
				Unit	0		10		1		0		0		0		0		0		0,00		10		inf		DISDIK			
				Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
				Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		111		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
				Unit	0		0		111		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
121	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI))	Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis/unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis/unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
122	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT))	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	9	1.655.843.414	1	48.360.000	0	0	0	0	0	1	48.000.000	1	48.000.000	100,00	99,26	10	1.703.843.414	inf	inf	DISDIK				
123	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR))	Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0	11	2.318.444.395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	11	2.318.444.395	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Sarana yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
124	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0	4	869.634.464	1	194.454.000	0	0	0	0	0	1	194.000.000	1	194.000.000	100,00	99,77	5	1.063.634.464	inf	inf	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong												
								I		II		III		IV																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		PANJANG DAN KAB. AGAM]																																	
			Jumlah Sarana yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK								
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK								
125	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Sarana yang dibangun	jenis / unit	0		0 0		954.524.665	1		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0,00	nan	0		954.524.665	nan	inf		DISDIK							
			Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK								
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK								
126	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0		0 0		1.335.109.153	1		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0,00	nan	0		1.335.109.153	nan	inf		DISDIK							
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK								
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK								
127	1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	325.631.382	0		0 1		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0,00	nan	0		0	nan	0,00		DISDIK								
128	1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	198.126.698	0		0 1		200.000.000	0		0 0		1.760.400	0	0 1		190.000.000	1		191.760.400	100,00	95,88	1		191.760.400	inf	96,79		DISDIK			
129	1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru Sekolah yang dibangun	Unit	0		0 0		0 1		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0,00	nan	0		0	nan	nan		DISDIK								
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK										
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK										
			Jumlah Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK										
130	1.01.02.1.02.14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Unit	0		0 0		0 1		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0,00	nan	0		0	nan	nan		DISDIK								
131	1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	394.277.639	0		4.287.584.596	1		5.185.526.000	0		0 0		1.863.000	0	1.246.381.500	1		3.785.000.000	1		5.033.244.500	100,00	97,06	1		9.320.829.096	inf	2.364,03		DISDIK	
132	1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0 0		1.253.174.190	1		345.335.000	0		0 0		0		58.240.950	1		280.000.000	1		338.240.950	100,00	97,95	1		1.591.415.140	inf	inf		DISDIK	
			Jumlah Ruang Guru yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		1			1			100,00		1		inf		DISDIK						
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		1			1			100,00		1		inf		DISDIK						
			Jumlah Ruang Tata Usaha Yang Direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		1			1			100,00		1		inf		DISDIK						
133	1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0 0		2.201.373.062	1		1.446.928.000	0		0 0		0		361.732.000	1		1.050.928.000	1		1.412.660.000	100,00	97,63	1		3.614.033.062	inf	inf		DISDIK	
134	1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0 0		293.281.901	1		260.447.000	0		0 0		0		65.111.750	1		191.000.000	1		256.111.750	100,00	98,34	1		549.393.651	inf	inf		DISDIK	
135	1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0 0		48.850.000	1			0 0		0 0		0		0	0		0	0,00	nan	0		48.850.000	nan	inf		DISDIK				
136	1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0 0		146.750.000	1			0 0		0 0		0		0	0		0	0,00	nan	0		146.750.000	nan	inf		DISDIK				
137	1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		444.864.257	0		0 1			0 0		0 0		0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	0,00		DISDIK				
138	1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0 0		0 1			0 0		0 0		0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan		DISDIK					
139	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0 0		0 1			0 0		0 0		0 0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan		DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		(KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]																													
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
140	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	1	414.569.000	0	0	0	0	0	1	410.000.000	1	410.000.000	100,00	98,90	1	410.000.000	inf	inf	DISDIK				
141	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
142	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Bilik	0	1.646.297.426	0	3.462.713.749	111	667.523.000	0	0	0	0	60.791.150	111	600.000.000	111	660.791.150	100,00	98,99	111	4.123.504.899	inf	250,47	DISDIK					
143	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
144	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
145	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0	0	211.674.200	1	166.191.000	0	0	0	0	1	160.000.000	1	160.000.000	100,00	96,27	1	371.674.200	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah Sarana yang direhab	unit	0		1		1		0		0		1		1		100,00		2			inf		DISDIK					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		1		1		100,00		1			inf		DISDIK					
146	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
											I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK					
147	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0	757.487.384	1		0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	757.487.384	nan	inf	DISDIK					
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
148	1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
149	1.01.02.1.02.25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
150	1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Rumah Guru yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Rumah Penjaga Sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
151	1.01.02.1.02.27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
152	1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	jenis/ unit	0	994.025.044	0	7.114.167.415	1	950.000.000	0		0	0		0	1	940.000.000	1	940.000.000	100,00	98,95	1	8.054.167.415	inf	810,26	DISDIK					
153	1.01.02.1.02.29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	jenis/ unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
154	1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	jenis/ unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
155	1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	jenis/ unit	0	99.725.225	0	0	111	1.900.530.300	0		0	0		1.007.160.000	111	860.000.000	111	1.867.160.000	100,00	98,24	111	1.867.160.000	inf	1.872,30	DISDIK					
156	1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	jenis/ unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
157	1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	jenis/ unit	0		0	43.304.550.996	1	41.683.002.000	0		0	0		130.863.190	0	77.596.257	1	41.400.000.000	1	41.608.459.447	100,00	99,82	1	84.913.010.443	inf	inf	DISDIK			
158	1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
159	1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Prasarana yang dipelihara	jenis / unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	jenis/ unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Sarana yang dipelihara	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dipelihara	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
160	1.01.02.1.02.36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang dipelihara	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang dipelihara	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang dipelihara	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
161	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
162	1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	jenis/ unit	0	87.746.883.170	1	2.362.321.445	111		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	1	2.362.321.445	inf	2,69	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
163	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	sekolah	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
164	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Sekolah	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
165	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	1.848.043.000	0	0	0	283.877.500	0	110.112.250	0	1.700.000.000	0	2.093.989.750	nan	113,31	0	2.093.989.750	nan	inf	DISDIK				
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Bulan	0	0	0	0	18	0	0	3	0	0	18	0	21	0	116,67	21	inf	DISDIK								
166	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	0	9	1.162.853.000	0	0	252.560.000	0	62.267.000	9	1.050.000.000	9	1.364.827.000	100,00	117,37	9	1.364.827.000	inf	inf	DISDIK				
167	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	2.042.399.000	0	0	0	570.241.000	0	209.348.000	0	1.752.000.000	0	2.531.589.000	nan	123,95	0	2.531.589.000	nan	inf	DISDIK				
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Bulan	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	15	0	100,00	15	inf	DISDIK									
168	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	0	14	1.712.046.000	0	0	527.554.124	0	138.830.000	14	1.560.000.000	14	2.226.384.124	100,00	130,04	14	2.226.384.124	inf	inf	DISDIK				
169	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	6.546.481.665	11	6.487.965.956	0	943.501.326	0	1.884.471.339	0	987.709.976	11	1.650.000.000	11	5.465.682.641	100,00	84,24	11	12.012.164.306	inf	inf	DISDIK				
170	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
171	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses	Sekolah	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Belajar dan Ujian																												
172	1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	dokumen	0	887.574.051	0	2.867.228.571	1	4.251.881.662	0	0	54.835.000	0	851.549.400	1	3.300.000.000	1	4.206.384.400	100,00	98,93	1	7.073.612.971	inf	796,96	DISDIK					
173	1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0		0	1.694.691.470	100	2.805.867.100	0	10.119.400	0	145.530.000	0	443.138.050	100	2.110.000.000	100	2.708.787.450	100,00	96,54	100	4.403.478.920	inf	inf	DISDIK				
174	1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
175	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Sekolah	0		0	119.297.600	111	74.879.000	0	0	0	0	0	111	17.500.000	111	17.500.000	100,00	23,37	111	136.797.600	inf	inf	DISDIK					
176	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	0	147.834.975.674	0	148.642.089.679	111	146.832.120.000	0	0	0	0	143.692.344.128	111	0	111	143.692.344.128	100,00	97,86	111	292.334.433.807	inf	197,74	DISDIK					
177	1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	0		0	0	111	145.891.950	0	0	0	40.660.700	0	21.716.550	111	80.000.000	111	142.377.250	100,00	97,59	111	142.377.250	inf	inf	DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dan Fasilitas Sarana Prasarana Sekolah	Sekolah	0		0	52.961.578.728	0	54.798.617.996	0	107.742.300	0	770.738.150	0	41.200.086.010	0	1.361.906.650	0	43.440.473.110	nan	79,27	0	96.402.051.838	nan	inf					
178	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	0	nan	nan	DISDIK					
179	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	0	nan	nan	DISDIK					
180	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		0	nan		DISDIK						
181	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	0	nan	nan	DISDIK					
182	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	363.579.820	5	4.000.000.000	0	9.797.300	0	9.797.300	0	10.480.000	5	1.229.020.650	5	1.259.095.250	100,00	31,48	5	1.622.675.070	inf	inf	DISDIK				
183	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	nan		DISDIK						
184	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]																													
185	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
186	1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah unit sekolah baru yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
187	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
188	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
189	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	unit	0	0	2.725.219.698	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	2.725.219.698	nan	inf	DISDIK				
190	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
191	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
192	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	unit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK				
193	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISDIK				
194	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
195	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		VII (KAB. PESIR SELATAN)]																													
196	1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Ruang Guru yang dibangun	Unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang dibangun	Unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Ruang TU yang dibangun	Unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK			
197	1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
198	1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	196.472.800	1	216.840.000	0	0	0	0	54.210.000	1	0	1	54.210.000	100,00	25,00	1	250.682.800	inf	inf	DISDIK					
199	1.01.02.1.03.06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
200	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESIR SELATAN)]	Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
201	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0	1	196.472.800	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	196.472.800	inf	inf	DISDIK					
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Sarana yang dibangun	unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
202	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
203	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						
204	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	Jenis/Unit	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISDIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah Prasarana yang dibangun	Jenis/Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
205	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Sarana yang dibangun	unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
206	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Sarana Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0	1	196.472.800	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	1	196.472.800	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Prasarana Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK			
207	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	1.304.847.863	29	1.130.000.000	0	24.945.000	0	19.696.500	0	440.503.000	29	0	29	485.144.500	100,00	42,93	29	1.789.992.363	inf	inf	DISDIK				
208	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Utilitas Sekolah yang dibangun	jenis / unit	0		0	2	420.483.670	1	88.584.600	0		0	0		0	1	39.533.000	1	39.533.000	100,00	44,63	3	460.016.670	inf	inf	DISDIK				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK			
			Jumlah Prasarana yang dibangun	jenis / unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
			Jumlah Sarana yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
209	1.01.02.1.03.09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	jenis/ unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
210	1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	1.028.566.413	1	1.368.094.100	0		0	0		342.023.525	1	0	1	342.023.525	100,00	25,00	1	1.370.589.938	inf	inf	DISDIK				
211	1.01.02.1.03.11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru Sekolah yang dibangun	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
212	1.01.02.1.03.12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
213	1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
			Ruang Mobilitas baru yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Ruang Orientasi baru yang dibangun	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
214	1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	762.145.685	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	762.145.685	nan	inf	DISDIK				
215	1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	762.145.685	1	366.480.000	0		0	0		91.620.000	1	0	1	91.620.000	100,00	25,00	1	853.765.685	inf	inf	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
216	1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK				
217	1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Unit	0		0	0	0	1		0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK				
218	1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1.113.263.038	1	2.620.664.000	0		0	0	610.166.000	1		0	1	610.166.000	100,00	23,28	1	1.723.429.038	inf	inf	DISDIK				
219	1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0	0	250.101.295	0	257.012.000	0		0	0	64.253.000	0		0	0	64.253.000	nan	25,00	0	314.354.295	nan	inf	DISDIK				
			Jumlah Ruang Guru yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
			Jumlah Ruang Tata Usaha Yang Direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISDIK					
220	1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	1	128.456.000	0		0	0	32.114.000	1		0	1	32.114.000	100,00	25,00	1	32.114.000	inf	inf	DISDIK				
221	1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
222	1.01.02.1.03.22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
223	1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
224	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Bilik	0		0	0	274.216.103	29	661.268.000	0		0	0	165.317.000	29		0	29	165.317.000	100,00	25,00	29	439.533.103	inf	inf	DISDIK				
225	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI))	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
226	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM))	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
227	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT))	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
228	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN))	Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK					
229	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I	II	III	IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		[KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN]]																													
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK		
230	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISDIK		
231	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK, KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0	0	381.913.750	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		381.913.750	nan	inf	DISDIK		
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
232	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Prasarana yang direhab	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
			Jumlah Sarana yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
			Jumlah Utilitas sekolah yang direhab	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK		
233	1.01.02.1.03.25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
234	1.01.02.1.03.26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
235	1.01.02.1.03.28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
236	1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
237	1.01.02.1.03.31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
238	1.01.02.1.03.32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
239	1.01.02.1.03.33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
240	1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	jenis/ unit	0		0	0	328.292.900	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		328.292.900	nan	inf	DISDIK		
241	1.01.02.1.03.36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	jenis / unit			0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
242	1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	jenis / unit	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISDIK		
243	1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	jenis / unit	0		0	0	29		700.000.000	0	0	0	32.023.950	0	29	32.023.950	100,00	4,57	29		32.023.950	inf	inf	DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
244	1.01.02.1.03.39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
245	1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	jenis / unit	0	0	0	0	29	735.163.900	0	0	39.861.800	0	8.581.100	29	27.545.000	29	75.987.900	100,00	10,34	29	75.987.900	inf	inf	DISDIK					
246	1.01.02.1.03.41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Bangunan Gedung Sekolah yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Bangunan Ruang Sekolah yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
247	1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Prasarana yang dipelihara	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Sarana yang dipelihara	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Utilitas Sekolah yang dipelihara	jenis / unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
248	1.01.02.1.03.43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
249	1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	jenis / unit	0	0	0	3.571.847.858	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	3.571.847.858	nan	inf	DISDIK				
250	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	77.550.000	0	0	19.785.000	0	4.500.000	0	0	0	0	24.285.000	nan	31,32	0	24.285.000	nan	inf	DISDIK				
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Bulan	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	100,00	3	0	inf	DISDIK									
251	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Sekolah	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	DISDIK								
252	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK					
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Sekolah	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	nan	DISDIK								
253	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	0	2	95.140.000	0	0	10.500.000	0	1.250.000	2	0	2	11.750.000	100,00	12,35	2	11.750.000	inf	inf	DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
											I	II	III	IV																																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
		[KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN]]																																																	
254	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	75.940.000	0	0	0	7.500.000	0	26.212.500	0	12.078.000	0	45.790.500	nan	60,30	0	45.790.500	nan	inf	DISDIK																									
			Waktu pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik yang diselenggarakan dengan baik	Bulan	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	100,00	5	inf	DISDIK																															
255	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	4	105.735.400	0	0	0	23.600.000	0	3.680.000	4	11.040.000	4	38.320.000	100,00	36,24	4	38.320.000	inf	inf	DISDIK																									
256	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK																											
257	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	324.368.100	2	474.500.000	0	73.000.000	0	138.500.000	0	36.440.000	2	36.440.000	2	284.380.000	100,00	59,93	2	608.748.100	inf	inf	DISDIK																									
258	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK																											
259	1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dokumen	0	0	863.618.000	1	939.999.300	0	0	0	393.366.050	0	147.909.100	1	6.250.000	1	547.525.150	100,00	58,25	1	1.411.143.150	inf	inf	DISDIK																									
260	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0	149.304.850	2072	533.950.696	0	0	0	15.929.600	0	156.215.800	2072	0	2072	172.145.400	100,00	32,24	2072	321.450.250	inf	inf	DISDIK																									
261	1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	0	0	37.748.245.600	29	40.149.720.000	0	0	0	39.004.610.985	29	0	29	39.004.610.985	100,00	97,15	29	76.752.856.585	inf	inf	DISDIK																											
262	1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	0	0	0	29	73.520.000	0	0	0	60.177.950	0	0	29	60.177.950	100,00	81,85	29	60.177.950	inf	inf	DISDIK																											
263	1.01.02.1.03.54	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen		0	0	39	360.950.960	0	0	0	331.174.450	0	3.981.700		0	0	335.156.150	0,00	92,85	0	335.156.150	nan	inf																										
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Kegiatan	0	0	0	1	360.950.960	0	0	0	331.174.450	0	3.981.700	0	0	0	335.156.150	0,00	92,85	0	335.156.150	nan	inf																										
1	1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku	1	0	1	0	1	360.950.960	0	0	331.174.450	0	3.981.700	0	0	0	335.156.150	0,00	92,85	1	335.156.150	100,00	inf	DISDIK																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	%		0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Menengah	Sekolah	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan				
1	1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah swasta yang dinilai Kelayakannya	Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Khusus	SEkolah	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan				
2	1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus swasta yang dinilai Kelayakannya	Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	dokumen		558.445.000	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00					
			Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang		0			12	0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Kegiatan	0	558.445.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00					
1	1.01.06.1.01.04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	Orang	0	111.689.000	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	DISDIK				
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah yang diberi penghargaan	Orang	0	0			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00		0		nan		DISDIK				
2	1.01.06.1.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jenis event Bahasa dan Sastra Daerah yang dilaksanakan	Event	1	167.533.500	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	0,00	0,00	DISDIK			
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Peserta Didik	0	0			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00		0		nan		DISDIK				
3	1.01.06.1.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jenis Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah yang disusun	Jenis	0	279.222.500	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	DISDIK				
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Dokumen	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00		0		nan		DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	0,00						
Predikat Kinerja																							-	SR						
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	%		593.311.000	0	847.898.150	74.07	2.374.379.800	0	0	0	908.252.700	0	1.140.825.500	0	0	0	0	0	0,00	86,30	0	2.896.976.350	nan	488,27			
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terpenuhi kebutuhan Pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Sekolah	0	593.311.000	0	847.898.150	376	2.374.379.800	0	0	0	908.252.700	0	1.140.825.500	0	0	0	0	0	0,00	86,30	0	2.896.976.350	nan	488,27			
1	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	0	230.958.709	0	212.676.150	0	852.310.100	0	0	0	687.191.950	0	18.922.550	0	0	0	0	0	0	0	0	918.790.650	nan	397,82	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dihitung dan dipetakan	orang	0		0		15949		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
2	1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	0	362.352.291	0	635.222.000	0	1.522.069.700	0		0	221.060.750	0	1.121.902.950	0		0	0	1.342.963.700	nan	88,23	0	1.978.185.700	nan	545,93	DISDIK			
			Jumlah pendidik yang akan mengikuti kegiatan 1) Bimbingan Teknis dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Kab. Sijunjung sebanyak 185 Orang, 2) Penataan dan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMA, SMK dan SLB sebanyak 53 Orang, 3) Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok Kerja (KKG) SLB sebanyak 135 Orang	orang	0		0		373		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	471,87					
Predikat Kinerja																									-	ST					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I		II		III		IV														
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS KESEHATAN				0		0	207.172.726.447	16.707.628.779	73.978.486.782	52.403.621.382	53.484.516.033	196.574.252.976		94,88	196.574.252.976	inf												
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0	72.667.201.719	9.423.266.617	17.871.290.440	31.938.633.576	17.822.320.478	77.055.511.111		106,04	77.055.511.111	inf												
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0	72.667.201.719	9.423.266.617	17.871.290.440	31.938.633.576	17.822.320.478	77.055.511.111		106,04	77.055.511.111	inf												
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0		0	100	82.660.034.892	8.389.955.923	16.574.739.817	40.850.306.169	20.124.236.137	0	85.939.238.046	0,00	103,97	0	85.939.238.046	nan	inf								
									0						0		nan		0		nan									
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	0	0	0	85	619.573.102	0	17.155.000	0	38.450.700	0	54.276.000	0	102.259.943	0	212.141.643	0,00	34,24	0	212.141.643	nan	inf				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	553.733.432	0	11.430.000	1	23.919.000	2	44.336.000	0	74.196.973	3	153.881.973	100,00	27,79	3	153.881.973	inf	inf	DINKES			
2	X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen		0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES						
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	4	65.839.670	1	5.725.000	1	14.531.700	1	9.940.000	1	28.062.970	4	58.259.670	100,00	88,49	4	58.259.670	inf	inf	DINKES			
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		0	0	0	0	0	50.325.078.079	0	7.608.778.542	0	14.300.333.223	0	18.837.128.989	0	11.131.445.412	0	51.877.686.166	nan	103,09	0	51.877.686.166	nan	inf				
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	394	49.689.855.149	0	7.605.400.542	0	14.156.493.073	0	18.722.387.189	394	10.776.673.232	394	51.260.954.036	100,00	103,16	394	51.260.954.036	inf	inf	DINKES			
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	12	518.820.000	3	0	3	115.200.000	3	85.387.500	3	314.857.500	12	515.445.000	100,00	99,35	12	515.445.000	inf	inf	DINKES			
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	4	62.322.330	1	2.806.000	1	18.901.400	1	20.367.800	1	7.910.430	4	49.985.630	100,00	80,21	4	49.985.630	inf	inf	DINKES			
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	54.080.600	3	572.000	3	9.738.750	3	8.986.500	3	32.004.250	12	51.301.500	100,00	94,86	12	51.301.500	inf	inf	DINKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		0	0	0	0	0	544.362.600	0	5.357.150	0	105.924.411	0	160.904.041	0	326.943.839	0	599.129.441	nan	110,06	0	599.129.441	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12) = 8+9+10+11			(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
9	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan per tahun	unit		0		0	6	90.600.000	0		0	0	90.399.891	0	200.109	0	90.600.000	0,00	100,00	0	90.600.000	nan	inf	DINKES					
10	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	0	205.030.000	0		0	0	91.591.811	0	42.876.950	0	203.838.080	0	338.306.841	nan	165,00	0	338.306.841	nan	inf	DINKES			
11	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	12	248.732.600	0	5.357.150	0	14.332.600	0	27.627.200	0	122.905.650	0	170.222.600	0,00	68,44	0	170.222.600	nan	inf	DINKES				
12	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	12		0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan					
13	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	stel		0		0	63	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES			
14	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah pegawai yang mendapatkan baju dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang		0		0	118	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket					0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES					
15	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0		0	63	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES			
				Paket					58	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
				Paket					2	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		0		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DINKES			
17	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	50	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		0	0	0	0	0	2.238.709.222	0	145.970.578	0	527.777.586	0	1.089.283.549	0	592.530.189	0	2.355.561.902	nan	105,22	0	2.355.561.902	nan	inf					
18	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	47.590.060	1		0	1	37.484.080	1	14.853.800	1	32.735.260	4	85.073.140	100,00	178,76	4	85.073.140	inf	inf	DINKES			
19	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	28.895.600	0		0	0	5.250.317	1	21.400.000	1	26.650.317	100,00	92,23	1	26.650.317	inf	inf	DINKES					
20	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	roll		0		0	4	23.740.500	0		0	0	23.607.480	0		0	23.607.480	0,00	99,44	0	23.607.480	nan	inf	DINKES					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		[UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]																														
				buah				351	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES							
				lusin				30	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES							
21	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	20.383.200	0		0	0	1	12.000.000	0	8.000.000	1	20.000.000	100,00	98,12	1	20.000.000	inf	inf	DINKES					
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit		0		0	14	384.267.050	0		0	0	0	232.845.410	0	106.421.640	0	339.267.050	0,00	88,29	0	339.267.050	nan	inf	DINKES					
				lembar				2		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				buah				11		0		0		8		3		11		100,00		11		inf		DINKES						
				set				3		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				meter				550		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
23	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	58.489.585	1	89.788.000	1	141.051.950	1	53.980.000	1	44.887.835	4	329.707.785	100,00	563,70	4	329.707.785	inf	inf	DINKES					
24	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	2	25.314.000	0		0	0	2	24.883.000	0	36.838.020	2	61.721.020	100,00	243,82	2	61.721.020	inf	inf	DINKES					
25	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pcs		0		0	30	125.098.700	6		0	6	0	6	9.870.000	6	73.444.760	24	83.314.760	80,00	66,60	24	83.314.760	inf	inf	DINKES				
				BUah				487		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				kotak				815		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Lusin				5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Bungkus				700		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Rim				370		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Pack				25		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Tabung				459		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
26	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	106.147.550	0	22.553.354	1	80.604.510	1	45.510.800	0	46.517.750	2	195.186.414	100,00	183,88	2	195.186.414	inf	inf	DINKES					
27	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	68.574.000	0		0	0	1	60.382.400	0	8.100.000	1	68.482.400	100,00	99,87	1	68.482.400	inf	inf	DINKES					
28	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	41.720.000	0	787.500	0	36.302.650	1	20.059.750	0	17.989.750	1	75.139.650	100,00	180,10	1	75.139.650	inf	inf	DINKES					
29	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	rim		0		0	30	20.800.000	0		0	0	20	18.417.000	0	2.000.000	20	20.417.000	66,67	98,16	20	20.417.000	inf	inf	DINKES					
30	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kotak		0		0	10	103.005.000	0		0	0	0	63.915.150	0	521.920	0	64.437.070	0,00	62,56	0	64.437.070	nan	inf	DINKES					
				Buah				4602		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Lembar				80750		0		0		50000		0		50000		61,92		50000		inf		DINKES						
				Rim				45		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Buku				40		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
				Meter				200		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
31	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Paket		0		0	1		0		0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES																						
32	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	4.320.000	0		0	0	0	1	2.880.000	0	720.000	1	3.600.000	100,00	83,33	1	3.600.000	inf	inf	DINKES																					
33	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	33.940.000	0	720.000	0	4.295.000	0	10.620.000	0	20.820.000	0	36.455.000	0,00	107,41	0	36.455.000	nan	inf	DINKES																						
34	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	232	200.000.000	0		0	0	200	99.595.200	30	84.562.142	230	184.157.342	99,14	92,08	230	184.157.342	inf	inf	DINKES																						
35	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		0		0	12	830.425.977	3	32.121.724	3	228.039.396	3	347.965.540	3	15.360.814	12	623.487.474	100,00	75,08	12	623.487.474	inf	inf	DINKES																						
36	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	28	29.516.000	0		0	0	0	19.740.702	0	9.775.298	0	29.516.000	0,00	100,00	0	29.516.000	nan	inf	DINKES																						
				Laporan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DINKES																						
37	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	dokumen		0		0	12	86.482.000	0		0	0	6	22.907.000	0	62.435.000	6	85.342.000	50,00	98,68	6	85.342.000	inf	inf	DINKES																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		0	0	0	0	0	443.150.200	0		0	0	65.146.500	0	127.759.500	0	1.122.163.383	0	1.315.069.383	nan	296,75	0	1.315.069.383	nan	inf																						
38	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES																							
39	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES																							
40	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	0	70.000.000	0		0	0	65.146.500	0	0	0	859.570.001	0	924.716.501	nan	1.321,02	0	924.716.501	nan	inf	DINKES																					
41	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Mebel yang Disediakan	Set		0		0	1	373.150.200	0		0	0	0	127.759.500	0	262.593.382	0	390.352.882	0,00	104,61	0	390.352.882	nan	inf	DINKES																						
				Buah					2		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DINKES																							
				Unit					46		0		0	5	5	10	10	21,74		10		10		inf		DINKES																							
42	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah IPAL	Unit		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
					0	0	0	0	5.651.629.178	0	604.677.493	0	1.158.680.173	0	2.172.434.290	0	1.410.680.261	0	5.346.472.217	nan	94,60	0	5.346.472.217	nan	inf					
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	0	100		0		0		0		0			0,00		0			nan							
43	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0	12	36.465.002	3	2.500.000	3	0	0	30.902.250	6	30.322.752	12	63.725.002	100,00	174,76	12	63.725.002	inf	inf	DINKES				
44	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0	1	15.960.000	0	0	0	0	0	9.802.500	0	5.800.000	0	15.602.500	0,00	97,76	0	15.602.500	nan	inf	DINKES				
45	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buah		0	0	500	20.000.000	0	0	0	0	300	13.650.000	0	6.450.000	300	20.100.000	60,00	100,50	300	20.100.000	inf	inf	DINKES				
				Tahun			1		0		0		0		1		1	100,00		1		inf		DINKES						
46	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		0	0	12	613.500.000	3	0	3	0	3	431.669.273	3	178.420.294	12	610.089.567	100,00	99,44	12	610.089.567	inf	inf	DINKES				
47	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0	12	744.600.000	3	282.873.133	3	278.150.238	3	148.588.258	3	135.377.759	12	844.989.388	100,00	113,48	12	844.989.388	inf	inf	DINKES				
48	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0	1	345.032.064	0	128.874.200	0	128.874.200	0	128.874.200	1	38.330.701	1	424.953.301	100,00	123,16	1	424.953.301	inf	inf	DINKES				
49	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh/tahun		0	0	61999	0	0	0	0	0	0	23.607.480	0	0	0	23.607.480	0,00	inf	0	23.607.480	nan	inf	DINKES				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES					
			Jumlah tagihan air yang dibayarkan	M3/tahun			2495		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
			Jumlah Tagihan telpon yang dibayarkan	menit/tahun			685		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
50	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	6	1.478.361.876	0	0	0	0	3	1.086.525.121	0	396.368.655	3	1.482.893.776	50,00	100,31	3	1.482.893.776	inf	inf	DINKES				
51	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	12	1.640.279.118	3	53.490.036	3	614.715.611	3	61.875.084	3	394.135.400	12	1.124.216.131	100,00	68,54	12	1.124.216.131	inf	inf	DINKES				
52	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	1	757.431.118	0	136.940.124	0	136.940.124	1	236.940.124	0	225.474.700	1	736.295.072	100,00	97,21	1	736.295.072	inf	inf	DINKES				
53	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINKES					
			Jumlah rohaniawan yang dibayarkan jasanya	org/kegiatan			36		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
			Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan jasanya	OB			8		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
			Jumlah instruktur senam yang dibayarkan jasanya	orang/kegiatan			48		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp	K	Rp		K	I		II		III		IV														
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K												Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	2.851.866.165	0	8.017.160	0	378.427.224	0	585.174.614	0	834.381.792	0	1.806.000.790	nan	63,33	0	1.806.000.790	nan	inf					
			Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	0		0		100		0		0		0		0		0,00		0		nan								
54	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	4		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES					
55	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3		28.200.000	0		0	0		23.185.000	0	5.005.000	0	28.190.000	0,00	99,96	0	28.190.000	nan	inf	DINKES			
56	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Kendaraan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	2		100.000.000	0		0	0		35.599.910	0	53.000.000	0	88.599.910	0,00	88,60	0	88.599.910	nan	inf	DINKES			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					1			0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
57	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	0		377.000.000	0	6.417.160	0	71.336.550	0	206.022.488	12	158.561.287	12	442.337.485	inf	117,33	12	442.337.485	inf	inf	DINKES			
58	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1			0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES					
59	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3		336.923.000	0		0	0		0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINKES					
			Jumlah Pagar yang Direhabilitasi	Meter					100			0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
60	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2		1.393.283.896	0		0	0		0	1	256.856.081	1	256.856.081	50,00	18,44	1	256.856.081	inf	inf	DINKES			
61	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2			0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
62	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	83.517.118	0		0	0	83.019.832	1	154.691.269	1	237.711.101	100,00	284,63	1	237.711.101	inf	inf	DINKES					
63	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	6	243.100.000	1	1.600.000	12	87.090.674	8	81.469.745	0	165.580.755	21	335.741.174	350,00	138,11	21	335.741.174	inf	inf	DINKES				
64	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	50.622.151	0		0	0	47.434.650	1	2.650.100	2	50.084.750	100,00	98,94	2	50.084.750	inf	inf	DINKES					
65	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	239.220.000	0		0	220.000.000	2	108.442.989	0	38.037.300	2	366.480.289	66,67	153,20	2	366.480.289	inf	inf	DINKES				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					15		0		0		0		0		0	0,00		0		nan		DINKES					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					30		0		0		0		0		0	0,00		0		nan		DINKES					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-			0	0	0	0	0	9.992.833.173	0		0	0	8.911.672.593	0	2.301.915.659	0	11.213.588.252	nan	112,22	0	11.213.588.252	nan	inf					
66	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	6.278.877.586	0		0	0	6.397.637.829	12	1.056.987.862	12	7.454.625.691	1.200,00	118,73	12	7.454.625.691	inf	inf	DINKES					
67	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	3.713.945.587	0		0	0	2.514.034.764	0	1.244.927.797	0	3.758.962.561	0,00	101,21	0	3.758.962.561	nan	inf	DINKES					
68	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	10.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0		0	134.505.524.728	7.284.362.162	56.107.196.342	20.464.987.806	35.662.195.555	119.518.741.865		88,86	119.518.741.865	inf												
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0		0	134.505.524.728	7.284.362.162	56.107.196.342	20.464.987.806	35.662.195.555	119.518.741.865		88,86	119.518.741.865	inf												
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN	Akreditasi Institusi pelatihan	(B) strata			0		0	1	310.899.250		0	12.546.200	193.352.599	250.749.761	0	456.648.560	0,00	146,88	0	456.648.560	nan	inf							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																												
			Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang					480									0		0,00		0		nan						
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%					79.9									0		0,00		0		nan						
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK untuk UKM dan UKP	%	0	0	0	0	100	88.084.250	0	0	0	12.546.200	0	55.284.631	0	62.204.729	0	130.035.560	0,00	147,63	0	130.035.560	nan	inf				
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%	0	0	0	0	100		0	0	0		0		0		0		0,00		0		nan					
1	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah FGD pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan yang dilaksanakan	kali		0	0	0	2	88.084.250	0	0	0	12.546.200	1	55.284.631	1	62.204.729	2	130.035.560	100,00	147,63	2	130.035.560	inf	inf	DINKES			
			Jumlah rapat koordinasi SDMK yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINKES			
			Jumlah pertemuan analisis kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan Provinsi dan Kab Kota yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINKES			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	0	0	0	0	480	222.815.000	0	0	0	0	0	138.067.968	0	188.545.032	0	326.613.000	0,00	146,58	0	326.613.000	nan	inf				
					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0		nan		0		nan					
2	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah penilaian tenaga kesehatan teladan yang dilaksanakan	kali		0	0	0	1	156.709.100	0	0	0	0	1	128.862.968	0	172.846.132	1	301.709.100	100,00	192,53	1	301.709.100	inf	inf	DINKES			
			Jumlah workshop validasi data SISDMK yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Jumlah FGD Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	kali					3		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Jumlah uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang					420		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
3	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan [UPTD BKOM & Pelkes]	Meningkatnya Kompetensi Teknis SDMK	Orang		0	0	0	0	66.105.900	0	0	0	0	0	9.205.000	0	15.698.900	0	24.903.900	nan	37,67	0	24.903.900	nan	inf	DINKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%		0	0	0	94	132.188.128.724	7.117.122.162	54.695.379.614	19.944.428.614	34.505.080.951	0	116.262.011.341	0,00	87,95	0	116.262.011.341	nan	inf								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																												
			Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%			100						0		0,00		0		nan											
							0						0		nan		0		nan											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	%	0	0	0	0	100	13.795.403.719	0	0	0	272.661.394	0	1.054.130.565	0	7.135.196.323	0	8.461.988.282	0,00	61,34	0	8.461.988.282	nan	inf				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0	0	nan							
1	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES					
2	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES					
3	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	m2		0	0	24	190.512.000	0	0	0	1	17.571.289	0	654.078	1	18.225.367	4,17	9,57	1	18.225.367	inf	inf	DINKES					
4	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		0	0	1	9.000.000.000	0	0	0	1	72.951.780	0	5.137.306.330	1	5.210.258.110	100,00	57,89	1	5.210.258.110	inf	inf	DINKES					
5	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	80.000.000	2	80.000.000	inf	inf	2	80.000.000	inf	inf	DINKES					
			jumlah pelayanan terpadu ke kab kep mentawai	kab			1	0	0	0	0	0	1	1	100,00		1		inf		DINKES									
6	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES						
7	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Paket		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES						
8	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	kegiatan		0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	1	328.745.781	1	328.745.781	100,00	328,75	1	328.745.781	inf	inf	DINKES					
9	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan	Paket		0	0	2	69.094.900	0	0	0	0	0	2	69.094.900	2	69.094.900	100,00	100,00	2	69.094.900	inf	inf	DINKES					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
		Handuk dan Habis Pakai Lainnya) [UPTD BKOM & Pelkes]	Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan																																																
10	1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah bahan kimia dan bahan pakai habis laboratorium yang diadakan	kegiatan		0	0	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	1	87.651.155	1	87.651.155	100,00	14,61	1	87.651.155	inf	inf	DINKES																									
			Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Diadakan dan Dipelihara	Unit				2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DINKES																									
11	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket		0	0	1	225.000.000	0	0	0	0	1	74.278.980	0	47.463.144	1	121.742.124	100,00	54,11	1	121.742.124	inf	inf	DINKES																									
12	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	jenis		0	0	36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES																									
13	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		0	0	19	54.146.000	0	0	0	0	0	23.264.022	19	16.155.024	19	39.419.046	100,00	72,80	19	39.419.046	inf	inf	DINKES																									
14	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket		0	0	3	1.435.645.000	0	0	1	272.661.394	3	29.635.730	0	1.024.768.163	4	1.327.065.287	133,33	92,44	4	1.327.065.287	inf	inf	DINKES																									
15	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket		0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINKES																								
16	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket		0	0	5	2.121.005.819	0	0	0	0	3	836.428.764	2	343.357.748	5	1.179.786.512	100,00	55,62	5	1.179.786.512	inf	inf	DINKES																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat)	%	0	0	0	0	89	117.536.613.446	0	7.117.122.162	0	54.419.631.120	0	18.545.143.332	0	27.037.658.802	0	107.119.555.416	0,00	91,14	0	107.119.555.416	nan	inf																									
			Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	0		0		76		0		0		0		0		0,00		0		nan																												
			Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	0		0		231		0		0		0		0		0,00		0		nan																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	Daerah	0		0		2		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
			Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA	Kabupaten/kota	0		0		6		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kabupaten/kota	0		0		18		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
			Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	0		0		37		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	0		0		100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
			Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan	%	0		0		100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
			Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	0		0		94		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
			Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I	%	0		0		100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan						
17	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang		0		0	0	635.786.000	0	0	145.398.061	0	185.029.961	19	208.950.038	19	539.378.060	inf	84,84	19	539.378.060	inf	inf	DINKES					
			Terlaksananya Pembentukan Tim Kesiap Siagaan Bencana Tingkat Provinsi Sumbar	KK					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf	DINKES					
			Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	KK					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf	DINKES					
			Terlaksananya PertemuanKoordinasi Radio Komunikasi RS dan Kabupaten Kota	KK					19		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			Terlaksananya Pertemuan Rakoir Kabupaten Kota	KK					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf	DINKES					
			Terlaksananya Pertemuan Rencana Kontigensi	KK					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf	DINKES					
			Terlaksananya Rapat Rapat Penunjang Kegiatan	KK					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf	DINKES					
18	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen		0		0	100	203.110.924	0	0	88.240.000	0	26.123.750	0	43.052.280	100	42.245.032	100	199.661.062	100,00	98,30	100	199.661.062	inf	inf	DINKES			
19	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rapat Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak Termasuk Masalah Gizi dan Stunting	Kegiatan		0		0	2	1.236.770.008	0	0	0	0	76.352.825	2	805.965.237	2	882.318.062	100,00	71,34	2	882.318.062	inf	inf	DINKES					
			Terlaksananya pelatihan pelaksanaan ANC Terpadu , Nifas dan Neonatal Esensial	Kegiatan					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf	DINKES					
			Terlaksananya pelatihan antenatal care dan pemeriksaan	kegiatan					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINKES					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			usg bagi dokter puskesmas (blandded learning)																											
			Terlaksananya rapat evaluasi kematian ibu dan anak	kegiatan					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DINKES			
			Terlaksananya rapat pembentukan dan evaluasi jejaring layak hamil , ANC dan Stunting	kegiatan					6		0		0		0		6		6		100,00		6		inf		DINKES			
			Terlaksananya suverfisi da layanan program KIA dan gizi	kab/kota					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf		DINKES			
20	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Bimtek Program Kesga dan Terlaksananya Optimalisasi Program Kespro	kab/kota		0		0	19	107.029.882	0	0	15.656.250	0	34.637.138	19	16.136.294	19	66.429.682	100,00	62,07	19	66.429.682	inf	inf	DINKES				
			Terlaksananya audit maternal dan perinatal di provinsi	kegiatan					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINKES			
			Terlaksananya optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak	kegiatan					6		0		0		0		6		6		100,00		6		inf		DINKES			
			Terlaksananya rakor pelayanan kesehatan balita	kegiatan					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINKES			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES			
21	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Kasus Balita Kurus	%		0		0	7.4	849.909.982	0	0	0	0	369.170.702	0	197.743.380	0	566.914.082	0,00	66,70	0	566.914.082	nan	inf	DINKES				
			Menurunnya Kasus Balita Gizi Buruk	%					14.4		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Menurunnya Kasus Blita Stunting	%					18.4		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES			
22	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga [UPTD BKOM & Pelkes]	Terlaksananya Tes Kebugaran Masyarakat	orang		0		0	100	51.800.000	0	0	0	0	27.315.900	0	24.484.100	0	51.800.000	0,00	100,00	0	51.800.000	nan	inf	DINKES				
23	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN	Orang		0		0	400	39.118.730	0	2.530.000	0	20.005.900	0	17.950.000	0	26.585.530	0	67.071.430	0,00	171,46	0	67.071.430	nan	inf	DINKES			
			Terlaksananya Movei/Pembinaan Program Kesjaor ke Kab/Kota	Kali					10		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
24	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Pembina KKS Provinsi Sumatera Barat	Kegiatan		0		0	1	424.670.650	0	3.710.162	0	93.169.025	0	168.184.805	1	150.422.070	1	415.486.062	100,00	97,84	1	415.486.062	inf	inf	DINKES			
			Terlaksananya Workshop Tim Verifikasi Dokumen KKS Kab/Kota	Kegiatan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Terlaksananya Workshop 5 Pilar STBM	Kegiatan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	Kegiatan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan ODF di Kab/Kota	Kegiatan					5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
25	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Paket		0		0	3	60.070.000	0	0	0	0	34.889.162	3	13.067.438	3	47.956.600	100,00	79,83	3	47.956.600	inf	inf	DINKES				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		[UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]																												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					3	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
26	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	kab/kota		0		0	19	108.598.450	0	0	0	9.978.800	0	39.592.000	19	22.126.645	19	71.697.445	100,00	66,02	19	71.697.445	inf	inf	DINKES			
			Jumlah peserta pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di Provinsi Sumatera Barat	orang					38	0		0		0		38		38		100,00		38		inf	DINKES					
27	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		0		0	0	443.129.965	0	0	0	42.190.013	0	117.804.883	0	117.026.702	0	277.021.598	nan	62,51	0	277.021.598	nan	inf	DINKES			
			Jumlah fokus dalam Penanggulangan Pemberantasan Penyakit DBD	fokus					16	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			jumlah tenaga yang mengikuti Penguatan Layanan Upaya Berhenti Merokok di kabupaten/ kota	orang					77	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			jumlah tenaga yang mengikuti Penguatan Regulasi & Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kab/Kota	orang					50	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			Jumlah tenaga yang mengikuti Pertemuan Akselerasi Pembentukan Rabies Center di Kab/Kota	orang					50	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			Jumlah Tenaga yang mengikuti Pertemuan Koordinasi Manajemen Pengelolaan Program ISPA	orang					50	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			Jumlah Tenaga yang mengikuti Pertemuan Koordinasi Pengendalian Hipertensi dan Diabetes	orang					62	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			Jumlah tenaga yang mengikuti pertemuan Peningkatan kapasitas Petugas puskesmas dalam tatalaksana ISP dan Hepatitis	orang					60	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
			Jumlah tenaga yang mengikuti Workshop Penemuan faktor resiko PTM	orang					60	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
28	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					15	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINKES					
29	1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen		0		0	1	77.580.900	0	0	0	16.335.500	1	21.802.000	0	47.303.100	1	85.440.600	100,00	110,13	1	85.440.600	inf	inf	DINKES			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
30	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	kali		0		0	1	42.538.500	0		0	0		0	0	11.600.000	1	17.037.550	1	28.637.550	100,00	67,32	1	28.637.550	inf	inf	DINKES			
			Jumlah kabupaten kota yang mengikuti pertemuan	kabupaten kota					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf	inf	DINKES					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	nan	DINKES					
31	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	kali		0		0	5	577.112.300	0		0	0	99.423.284	0	208.535.819	5	163.076.244	5	471.035.347	100,00	81,62	5	471.035.347	inf	inf	DINKES				
			Jumlah FGD yang dilaksanakan	kali					5		0		0		0		5		5		100,00		5		inf	inf	DINKES					
32	1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen		0		0	3	559.333.740	0		0	0	66.416.050	0	186.111.210	3	267.806.130	3	520.333.390	100,00	93,03	3	520.333.390	inf	inf	DINKES				
			Jumlah Pengamanan Makanan dan Minuman yang dilakukan	Kali					5		0		0		0		5		5		100,00		5		inf	inf	DINKES					
33	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		0		0	0	105.286.873.000	0	7.022.642.000	0	52.304.342.150	0	15.354.090.350	0	23.482.062.200	0	98.163.136.700	nan	93,23	0	98.163.136.700	nan	inf	DINKES					
34	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	JUmlah Spesimen Penyakit potensial KLB dan PD3I ke Laboratorium Nasional	Paket		0		0	138	340.989.980	0		0	0	14.094.280	0	142.644.130	138	61.000.350	138	217.738.760	100,00	63,85	138	217.738.760	inf	inf	DINKES				
			Jumlah Peserta pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini , Preventive dan Respon Penyakit Bidang P2P	orang					228		0		0		0		228		228		100,00		228		inf	inf	DINKES					
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen					100		0		0		0		100		100		100,00		100		inf	inf	DINKES					
			Jumlah Labkesmas Tingkat II dilakukan supervisi dan pembinaa	Labkeda					7		0		0		0		7		7		100,00		7		inf	inf	DINKES					
35	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monev SPM Kabupaten Kota	Kab Kota		0		0	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES					
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	orang					45		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	inf	DINKES					
36	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen		0		0	19	2.797.925.475	0		0	0	1.509.481.940	0	805.015.749	19	181.424.815	19	2.495.922.504	100,00	89,21	19	2.495.922.504	inf	inf	DINKES				
			Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Tenaga Kefarmasian tentang Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Dokumen					19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf	inf	DINKES					
			jumlah peserta pertemuan tim pertimbangan klinis Rumah Sakit	orang					30		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	inf	DINKES					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			jumlah peserta workshop manajemen sindrom koroner akut, bantuan hidup dasar untuk perawat IGD	orang					30		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES				
			Jumlah RS Terakreditasi	Rumah Sakit					78		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES				
37	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas	Dokumen		0		0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen				0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES			
			Jumlah dokumen hasil pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan di sekolah	Dokumen				39		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES			
38	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen		0		0	3	107.485.060	0	0	22.771.800	0	15.686.550	3	41.181.152	3	79.639.502	100,00	74,09	3	79.639.502	inf	inf	DINKES					
			Jumlah tenaga dokter spesialis yang diberi intensif	OB		0		0	24	0	0	0	0	0	0	255.000.000	0	255.000.000	0,00	inf	0	255.000.000	nan	inf	DINKES						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINKES				
40	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Dokumen IKM	Dokumen		0		0	1	3.229.152.000	0	0	0	0	577.131.550	1	773.150.670	1	1.350.282.220	100,00	41,82	1	1.350.282.220	inf	inf	DINKES					
			Jumlah Bulan Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bulan					12		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES						
41	1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		0		0	0	159.872.400	0	0	17.381.600	0	53.123.321	0	59.753.579	0	130.258.500	nan	81,48	0	130.258.500	nan	inf	DINKES					
			jumlah pendampingan akreditasi puskesmas	kab/kota					19		0		0		19		19		100,00		19		inf		DINKES						
42	1.02.02.1.02.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		0		0	19	187.755.500	0	0	16.862.717	0	55.422.997	19	64.110.546	19	136.396.260	100,00	72,65	19	136.396.260	inf	inf	DINKES					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			0	0	0	0	0	254.342.900	0	0	0	3.087.100	0	1.325.000	0	133.715.000	0	138.127.100	nan	54,31	0	138.127.100	nan	inf					
43	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Rapat Validasi Data Kesehatan	Kali		0		0	4	12.427.650	0	0	3.087.100	0	1.325.000	0	0	0	4.412.100	0,00	35,50	0	4.412.100	nan	inf	DINKES					
44	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		0		0	0	76.856.000	0	0	0	0	0	0	119.880.000	0	119.880.000	nan	155,98	0	119.880.000	nan	inf	DINKES					
45	1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit		0		0	3	165.059.250	0	0	0	0	0	0	13.835.000	0	13.835.000	0,00	8,38	0	13.835.000	nan	inf	DINKES					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	0	0	0	0	100	601.768.659	0	0	0	0	343.829.717	0	198.510.826	0	542.340.543	0,00	90,12	0	542.340.543	nan	inf					
					0	0	0	0			0		0		0		0		nan		0		nan							
46	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah dokumen untuk akreditasi BKOM Pelkes	Dokumen		0	0	0	1	78.280.657	0	0	0	1	57.835.051	0	55.893.611	1	113.728.662	100,00	145,28	1	113.728.662	inf	inf	DINKES				
47	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan mutu SDM guna meningkatkan mutu pelayanan	fasilitas		0	0	0	1	269.656.000	0	0	0	1	98.139.420	1	77.659.959	2	175.799.379	200,00	65,19	2	175.799.379	inf	inf	DINKES				
48	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Kesehatan	dokumen		0	0	0	2	253.832.002	0	0	0	1	187.855.246	1	64.957.256	2	252.812.502	100,00	99,60	2	252.812.502	inf	inf	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALATKESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	%		0	0	0	100	56.225.190		0		1.661.000		23.866.751		21.337.910	0	46.865.661	0,00	83,35	0	46.865.661	nan	inf				
			Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%					100								0		0,00		0		nan							
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	%	0	0	0	0	100	43.682.590	0	0	0	930.000	0	14.334.580	0	17.228.481	0	32.493.061	0,00	74,38	0	32.493.061	nan	inf				
1	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	Sarana		0	0	0	50	43.682.590	0	0	0	930.000	0	14.334.580	50	17.228.481	50	32.493.061	100,00	74,38	50	32.493.061	inf	inf	DINKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	0	0	0	0	100	12.542.600	0	0	0	731.000	0	9.532.171	0	4.109.429	0	14.372.600	0,00	114,59	0	14.372.600	nan	inf				
2	1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana		0	0	0	6	12.542.600	0	0	1	731.000	3	9.532.171	2	4.109.429	6	14.372.600	100,00	114,59	6	14.372.600	inf	inf	DINKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota		0	0	0	11	1.950.271.564		0		177.817.750		303.339.842		885.026.933	0	1.366.184.525	0,00	70,05	0	1.366.184.525	nan	inf				
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	kabupaten/kota	0	0	0	0	11	1.367.928.754	0	0	0	173.083.150	0	232.296.050	0	663.420.079	0	1.068.799.279	0,00	78,13	0	1.068.799.279	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																														
1	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	kampanye program prioritas kesehatan melalui kegiatan pkk	kegiatan		0		0	1	1.367.928.754	0		0	0	173.083.150	0	232.296.050	0	663.420.079	0	1.068.799.279	0,00	78,13	0	1.068.799.279	nan	inf	DINKES				
			Terlaksananya penggerakan masyarakat dalam pemberdayaan implementasi gernas	lokasi					10		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
			kampanye kesehatan dalam kegiatan penas tani tahun 2023	kegiatan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
			terlaksananya penggerakan masyarakat dalam kampanye cegah stunting itu penting	lokasi					5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
			terlaksananya penggerakan masyarakat aksi bergizi	lokasi					6		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINKES					
			penggerakan masyarakat aktifkan posyandu	lokasi					4		0		2		2		0		4		100,00		4		inf		DINKES					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	inf				
Predikat Kinerja																											-	-				
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/Kota	Kabupaten/kota	0	0	0	0	11	521.002.230	0		0	0	380.000	0	63.039.090	0	201.483.076	0	264.902.166	0,00	50,84	0	264.902.166	nan	inf					
2	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		0		0	1	521.002.230	0		0	0	380.000	1	63.039.090	0	201.483.076	1	264.902.166	100,00	50,84	1	264.902.166	inf	inf	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											inf	inf				
Predikat Kinerja																											-	-				
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	0	0	0	0	11	61.340.580	0		0	0	4.354.600	0	8.004.702	0	20.123.778	0	32.483.080	0,00	52,96	0	32.483.080	nan	inf					
3	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen		0		0	2	61.340.580	0		0	0	4.354.600	1	8.004.702	0	20.123.778	1	32.483.080	50,00	52,96	1	32.483.080	inf	inf	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											inf	inf				
Predikat Kinerja																											-	-				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI				896.232.629.103		214.030.334.803		385.903.190.040		41.110.724.649		52.615.591.393		63.687.779.033		87.904.518.964		245.318.614.039		63,57		459.348.948.842		51,25				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				861.295.047.103		211.510.194.992		208.110.172.040		41.110.724.649		52.576.775.537		54.793.926.185		65.089.453.073		213.570.879.444		102,62		425.081.074.436		49,35				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				861.295.047.103		211.510.194.992		208.110.172.040		41.110.724.649		52.576.775.537		54.793.926.185		65.089.453.073		213.570.879.444		102,62		425.081.074.436		49,35				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		1.391.245.047.103	100	360.944.104.174	100	336.562.824.292	25	69.665.810.832	25	78.714.416.689	25	91.122.449.165	25	110.609.708.466	100	350.112.385.152	100,00	104,03	200	711.056.489.326	inf	51,11				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS, Calon PNS dan P3 K yang menerima gaji dan Tunjangan	orang/bulan	718	321.662.975.394	718	62.076.285.810	718	79.657.519.788	718	12.555.638.466	718	26.439.134.385	718	18.465.403.205	718	19.569.197.680	2872	77.029.373.736	400,00	96,70	3590	139.105.659.546	500,00	43,25				
1	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	718	321.662.975.394	718	62.076.285.810	718	79.657.519.788	718	12.555.638.466	718	26.439.134.385	718	18.465.403.205	718	19.569.197.680	2872	77.029.373.736	400,00	96,70	3590	139.105.659.546	500,00	43,25	RSAM	-Bukittinggi	Pelaksanaan masih Tahun ke III dan alokasi Anggaran yang tersedia masih kurang dari yang ditargetkan sehingga capaian masih SR	Pelaksanaan pembayaran gaji ASN berjalan lancar.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								500,00	43,25					
Predikat Kinerja																								ST	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	4470	2.829.228.000	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00				
2	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4470	2.829.228.000	0	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	RSAM		Tidak tersedia anggaran APBD untuk pengadaan Pakaian Dinas.	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00	0,00					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga RS yang disediakan	Unit	430	2.752.843.709	0	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00				
3	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	430	2.752.843.709	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	RSAM		Tidak tersedia anggaran APBD untuk pengadaan Perengkapan Rumah Tangga RS.	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00	0,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I		II		III		IV																																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
																										K					Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja																																																					
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Bulan	60	532.000.000.000	243	149.433.909.182	12	128.452.652.252	3	28.555.086.183	3	26.137.641.152	3	36.328.522.980	3	45.520.255.393	12	136.541.505.708	100,00	106,30	255	285.975.414.890	425,00	53,75																											
4	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	60	532.000.000.000	24	149.433.909.182	1	128.452.652.252	3	28.555.086.183	3	26.137.641.152	3	36.328.522.980	3	45.520.255.393	12	136.541.505.708	1.200,00	106,30	36	285.975.414.890	60,00	53,75	RSAM	Bukittinggi			Realisasi Anggaran Belanja Triwulan IV tergantung Realisasi Pendapatan RS Triwulan IV																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																					
Predikat Kinerja																																																					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.937.582.000		2.520.139.811		177.793.018.000		0		38.815.856		8.893.852.848		22.815.065.891		31.747.734.595		17,86		34.267.874.406		98,08																											
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				34.937.582.000		2.520.139.811		177.793.018.000		0		38.815.856		8.893.852.848		22.815.065.891		31.747.734.595		17,86		34.267.874.406		98,08																											
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		32.350.000.000	93	2.520.139.811	93	177.793.018.000	0	0	0	38.815.856	0	8.893.852.848	93,06	22.815.065.891	93,06	31.747.734.595	100,06	17,86	186,06	34.267.874.406	inf	105,93																											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan.	%	100	16.500.000.000	40	221.639.585	80	177.793.018.000	0	0	0	38.815.856	0	8.893.852.848	100	22.815.065.891	100	31.747.734.595	125,00	17,86	140	31.969.374.180	140,00	193,75					Tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan sarana dan prasarana																						
1	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	9.000.000.000	0		0	2	55.029.691.728	0	0	0	38.815.856	0	8.893.852.848	1	22.815.065.891	1	31.747.734.595	50,00	57,69	1	31.747.734.595	100,00	352,75	RSAM	Untuk anggaran menjadi 35.029.711.728	Adanya Lelang Ulang yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sampai 22 Desember 2023	Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara intensif sampai batas kontrak																						
2	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit	14	7.500.000.000	7	221.639.585	14	122.763.326.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7	221.639.585	50,00	2,96	RSAM	Anggaran pada APBD tidak ada, Anggaran	Adanya Proses Rekonsiliasi untuk pengadaan	Masih tersedia waktu yang cukup untuk																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Fasilitas Layanan Kesehatan	Layanan Kesehatan yang Disediakan																								122.763.326,272 adalah DAK	beberapa unit Alkes dari dana DAK oleh Kemenkes sehingga proses pengadaan tertunda.	proses pengadaan Alkes yang tertunda tersebut.	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									75,00	177,85				
Predikat Kinerja																									S	ST				
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan	Bulan	15	15.000.000.000	6	2.298.500.226	12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	6	2.298.500.226	40,00	15,32						
3	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Tengaa Nakes dan Non Nakes yang dibayarkan	orang	330	15.000.000.000	330	2.298.500.226	380	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	330	2.298.500.226	100,00	15,32	RSAM		Untuk Tahun 2023 tidak tersedia lagi anggaran untuk Insentif Covid dengan sudah menjadi endeminya kasus covid.			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									33,33	5,11				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan yang Tersedia	Set	1	150.000.000	0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 0,00	0,00								
4	1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	1	150.000.000	0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 0,00	0,00	RSAM			Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan alat/perangkat sistem informasi Kesehatan.				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Survey Akreditasi	RS	1	700.000.000	0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 0,00	0,00								
5	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	700.000.000	0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 0,00	0,00	RSAM			Tidak tersdianya alokasi anggaran untuk biaya Akreditasi Rumah Sakit.	Anggaran untuk biaya Akreditasi dibebankan pada Anggaran BLUD.			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%		787.582.000	0	0 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	nan	0	0 nan	0,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		MANUSIA KESEHATAN																												
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang dilatih untuk peningkatan Kompetis dan Kualifikasi SDM	orang	15	787.582.000	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00				
1	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	600	787.582.000	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	RSAM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00				
Predikat Kinerja																									SR	SR				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN			20.046.661.000	54.364.088.027	59.507.448.241	11.072.347.854	17.768.078.895	15.459.192.896	18.558.424.473	62.858.044.118	105,63	117.222.132.145	584,75																
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			287.661.000	51.644.548.039	59.384.668.641	11.072.347.854	17.674.952.895	15.453.518.723	18.558.424.473	62.759.243.945	105,68	114.403.791.984	39.770,35																
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			287.661.000	51.644.548.039	59.384.668.641	11.072.347.854	17.674.952.895	15.453.518.723	18.558.424.473	62.759.243.945	105,68	114.403.791.984	39.770,35																
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	442.214.000	100	80.621.536.746	100	87.818.346.228	100	17.580.021.408	100	25.028.776.326	100	23.715.231.360	100	29.654.990.069	400	95.979.019.163	400,00	109,29	500	176.600.555.909	inf	39.935,54						
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai/ASN/CASN/PPPK yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	285	133.108.000	275	22.667.559.332	326	30.950.991.054	272	4.564.674.300	272	10.321.129.464	273	7.191.806.086	273	7.461.858.877	1090	29.539.468.727	334,36	95,44	1365	52.207.028.059	478,95	39.221,56					
1	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	285	133.108.000	275	22.667.559.332	0	30.950.991.054	272	4.564.674.300	272	10.321.129.464	273	7.191.806.086	273	7.461.858.877	1090	29.539.468.727	inf	95,44	1365	52.207.028.059	478,95	39.221,56	RSJ SAANIN				
			Jumlah Pegawai/ASN/CASN/PPPK yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	285		275		326		272		273		273		1091		334,66		1366		479,30		RSJ SAANIN	Tidak Ada Permasalahan	Gaji Sudah dibayarkan tepat waktu				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									479,12	39.221,56					
Predikat Kinerja																									ST	ST					
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	%	52	154.553.000	54,75	28.976.988.707	46	28.433.677.587	51,41	6.507.673.554	57,52	7.353.823.431	51,5	8.261.712.637	51,5	11.096.565.596	211,93	33.219.775.218	460,72	116,83	266,68	62.196.763.925	512,85	40.243,00					
2	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Operasional	Bulan	27	154.553.000	12	28.976.988.707	12	28.433.677.587	3	6.507.673.554	6	7.353.823.431	9	8.261.712.637	12	11.096.565.596	30	33.219.775.218	250,00	116,83	42	62.196.763.925	155,56	40.243,00	RSJ SAANIN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									51,85	20.121,50					
Predikat Kinerja																									R	ST					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.759.000.000	2.719.539.988	122.779.600	0	93.126.000	5.674.173	0	98.800.173	80,47	2.818.340.161	14,26																
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			19.759.000.000	2.719.539.988	122.779.600	0	93.126.000	5.674.173	0	98.800.173	80,47	2.818.340.161	14,26																
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	785.000.000	0	0	46	0	0	0	26,3	0	58,44	0	58,44	0	143,18	0	311,26	nan	143,18	0	inf	0,00						
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang Terlatih Sesuai Kompetensi	%	52	785.000.000	0	0	46	0	0	0	26,3	0	58,44	0	58,44	0	143,18	0	311,26	nan	143,18	0	275,35	0,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
		Tingkat Daerah Provinsi			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
1	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	52	785.000.000	0	0	40	0	0	0	26.3	0	58.44	0	58.44	0	143.18	0	357,95	nan	143.18	0	275,35	0,00	RSJ SAANIN			Program dan Kegiatan tidak diakomodir pada DPA APBD Tahun 2023	Peningkatan Pelatihan SDM melalui pelaksanaan In House Training yang dilaksanakan secara internal dan Eksternal di RS																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									275,35	0,00																										
Predikat Kinerja																									ST	SR																										
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		13.298.000.000	91,98	1.833.173.061	87	122.779.600	0	0	0	93.126.000	0	5.674.173	0	0	98.800.173	0,00	80,47	91,98	1.931.973.234	inf	14,53																											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	12.513.000.000	91,98	1.390.376.845	86	122.779.600	0	0	0	93.126.000	0	5.674.173	0	0	98.800.173	0,00	80,47	91,98	1.489.177.018	102,20	11,90																											
1	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Pengembangan RS yang terbangun	Unit	4	1.700.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	0,00	RSJ SAANIN	Kegiatan tidak diakomodir pada DPA APBD 2023	diharapkan bisa di akomodir dan dijadikan kegiatan prioritas pada tahun selanjutnya																							
2	1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun	Unit	2	2.462.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	0,00	RSJ SAANIN	Kegiatan tidak diakomodir pada DPA APBD 2023	diharapkan bisa di akomodir dan dijadikan kegiatan prioritas pada tahun selanjutnya																							
3	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	247	8.351.000.000	45	1.390.376.845	10	122.779.600	0	0	7	93.126.000	3	5.674.173	0	10	98.800.173	100,00	80,47	55	1.489.177.018	22,27	17,83	RSJ SAANIN	Tidak Ada Masalah, kegiatan masih proses pengadaan	Ditingkatkan koordinasi dengan Pejabat pengadaan dan penyedia untuk proses pengadaan																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,42	5,94																										
Predikat Kinerja																									SR	SR																										
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	Terlaksananya Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan	Bulan	0	785.000.000	0	442.796.216	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	442.796.216	nan	56,41																											

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																													
4	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembayaran Insentif tenaga kesehatan	%	100	785.000.000	100	442.796.216	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	100	442.796.216	100,00	56,41	RSJ SAANIN		Kegiatan tidak diakomodir pada DPA APBD 2023	diharapkan kegiatan ini bisa menunjang pembayaran insentif dokter spesialis yang bukan menangani covid-19 saja	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									25,00	14,10					
Predikat Kinerja																									SR	SR					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR				923.909.400.000		126.179.739.792		190.945.523.316		20.431.191.611		39.810.198.632		62.253.910.119		46.110.893.568		168.606.193.930		88,30		294.785.933.722		31,91				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				827.226.000.000		114.453.755.200		190.422.743.716		20.431.191.611		39.810.198.632		62.253.910.119		45.688.227.568		168.183.527.930		88,32		282.637.283.130		34,17				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				827.226.000.000		114.453.755.200		190.422.743.716		20.431.191.611		39.810.198.632		62.253.910.119		45.688.227.568		168.183.527.930		88,32		282.637.283.130		34,17				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		1.395.426.000.000	100	189.384.412.862	100	330.522.821.303	25	32.952.961.181	25	61.884.476.403	25	113.045.389.980	25	78.016.318.376	100	285.899.145.940	100,00	86,50	200	475.283.558.802	inf	34,06				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	451	259.026.000.000	451	39.523.097.538	460	50.322.666.129	0	7.909.422.041	0	17.735.920.861	0	11.462.430.258	460	13.360.136.760	460	50.467.909.920	100,00	100,29	911	89.991.007.458	202,00	34,74		Tidak ada		Perencanaan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan
1	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	451	259.026.000.000	451	39.523.097.538	0	50.322.666.129	0	7.909.422.041	0	17.735.920.861	0	11.462.430.258	451	13.360.136.760	451	50.467.909.920	inf	100,29	902	89.991.007.458	200,00	34,74	RSUD M. Natsir		Tidak ada	Perencanaan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan
			Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	4.51		451		511		0		0		0		511		511		100,00		962		21.330,38	RSUD M. Natsir		Tidak ada	Perencanaan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								10.765,19		34,74				
Predikat Kinerja																								ST		SR				
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan BLUD	Bulan	12	568.200.000.000	12	74.930.657.662	12	140.100.077.587	3	12.521.769.570	3	22.074.277.771	3	50.791.479.861	3	32.328.090.808	12	117.715.618.010	100,00	84,02	24	192.646.275.672	200,00	33,90				
2	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan dan penunjang BLUD	Bulan	12	568.200.000.000	12	74.930.657.662	12	140.100.077.587	3	12.521.769.570	3	22.074.277.771	3	50.791.479.861	3	32.328.090.808	12	117.715.618.010	100,00	84,02	24	192.646.275.672	200,00	33,90	RSUD M. Natsir			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	RSUD M. Natsir				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan		16,95				
Predikat Kinerja																								-		SR				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				96.683.400.000		11.725.984.592		522.779.600		0		0		0		422.666.000		422.666.000		80,85		12.148.650.592		12,57				
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				96.683.400.000		11.725.984.592		522.779.600		0		0		0		422.666.000		422.666.000		80,85		12.148.650.592		12,57				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat	%		96.683.400.000		11.725.984.592	93	522.779.600	0		0	0		0	94.32	422.666.000	94.32	422.666.000	101,42	80,85	94.32	12.148.650.592	inf	12,57								
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	88.906.400.000	0	10.650.985.202	93	522.779.600	0		0	0		0	94.32	422.666.000	94.32	422.666.000	101,42	80,85	94.32	11.073.651.202	inf	12,46								
			Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	0		0		100		0		0		0		100		100		100,00		100		inf									
1	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya pengembangan Rumah Sakit	gedung	3	10.103.400.000	0		1		0	0		0	0	0	0	186.190.000	0.01	186.190.000	1,00	inf	0.01	186.190.000	0,33	1,84	RSUD M. Natsir		Terbatasnya Anggaran	Melengkapi sarana prasarana sesuai skala prioritas pelayanan				
2	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1031	72.103.000.000	110	10.650.985.202	0	522.779.600	0		0	0		0	38	236.476.000	38	236.476.000	inf	45,23	148	10.887.461.202	14,35	15,10	RSUD M. Natsir		Terbatasnya Anggaran	Melengkapi sarana prasarana sesuai skala prioritas pelayanan				
			Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	1031		110		29		0		0		0		38		38		131,03		148		14,35	RSUD M. Natsir		Terbatasnya Anggaran	Melengkapi sarana prasarana sesuai skala prioritas pelayanan					
3	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai yang diadakan	unit	0	6.700.000.000	0		13066		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	RSUD M. Natsir		Anggaran tidak tersedia	-				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	5,65								
Predikat Kinerja																									-	SR								
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Bulan	0	7.777.000.000	0	1.074.999.390	3		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00	nan	0	1.074.999.390	nan	13,82								
4	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Bencana Sakit	Bulan	12	7.777.000.000	9	1.074.999.390	3		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00	nan	9	1.074.999.390	75,00	13,82	RSUD M. Natsir		Anggaran tidak tersedia	-				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									15,00	3,46								
Predikat Kinerja																									SR	SR								
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%		0		0	46		0		0		0		0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		MANUSIA KESEHATAN																													
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan	orang	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan					
1	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih	Orang	450	0	360	0	44	0	31	0	320	0	0	0	128	0	479	0	1.088,64	nan	839	0	186,44	nan	RSUD M. Natsir		Tidak tersedia anggaran	Peningkatan SDM di Fasilitasi dana BLUD	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	450		360		0		31		320		0		128		479		inf		839		186,44		RSUD M. Natsir		Tidak tersedia anggaran	Peningkatan SDM di Fasilitasi dana BLUD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									186,44	nan					
Predikat Kinerja																									ST	-					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN				496.405.262.980		107.615.559.491		115.823.644.457		17.434.045.346		29.404.649.609		91.856.322.230		129.590.245.299		268.285.262.484		231,63		375.900.821.975		75,72							
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				496.405.262.980		107.615.559.491		115.823.644.457		17.434.045.346		29.404.649.609		91.856.322.230		129.590.245.299		268.285.262.484		231,63		375.900.821.975		75,72							
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				496.405.262.980		107.615.559.491		115.823.644.457		17.434.045.346		29.404.649.609		91.856.322.230		129.590.245.299		268.285.262.484		231,63		375.900.821.975		75,72							
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	orang		830.427.012.980	70	185.696.523.045	363	190.857.787.954	25	29.423.248.102	50	45.286.214.683	77.11	151.060.159.480	100	218.570.388.796	252.11	444.340.011.061	69,45	232,81	322.11	630.036.534.106	inf	75,87		Dana bersumber dari APBD					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			95	159.391.012.980	95	29.534.595.937	0	40.789.500.960	25	5.444.842.590	50	13.523.084.535	82.24	32.652.484.980	100	40.610.101.802	257.24	92.230.513.907	inf	226,11	352.24	121.765.109.844	370,78	76,39		Dana bersumber dari APBD	Keterbatasan anggaran daerah	ASN digaji oleh pemerintah			
1	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1815	159.391.012.980	363	29.534.595.937	363	40.789.500.960	363	5.444.842.590	363	13.523.084.535	73.71	32.652.484.980	96	40.610.101.802	895.71	92.230.513.907	246,75	226,11	1258.71	121.765.109.844	69,35	76,39	RSUD PARIAMAN	Dana bersumber dari APBD	Keterbatasan anggaran daerah	ASN digaji oleh pemerintah			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									69,35	76,39							
Predikat Kinerja																									S	T							
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			44	335.518.000.000	44	78.080.963.554	0	75.034.143.497	12	11.989.202.756	24	15.881.565.074	24	59.203.837.250	44	88.980.143.497	104	176.054.748.577	inf	234,63	148	254.135.712.131	336,36	75,74		Dana Bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit	Tidak tercapainya target pendapatan rumah sakit tahun 2023	rumah sakit akreditasi tahun 2023 ini, sehingga layanan, sarana/prasarana harus ditingkatkan			
2	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	12	335.518.000.000	12	78.080.963.554	0	75.034.143.497	3	11.989.202.756	6	15.881.565.074	9	59.203.837.250	92	88.980.143.497	110	176.054.748.577	inf	234,63	122	254.135.712.131	1.016,67	75,74	RSUD PARIAMAN						
			Jumlah Bulan Operasional	Bulan	12		12		12		3		6		9		12		30		250,00		42		350,00	RSUD PARIAMAN	Dana Bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit	Tidak tercapainya target pendapatan rumah sakit tahun 2023	rumah sakit akreditasi tahun 2023 ini, sehingga layanan, sarana/prasarana harus ditingkatkan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									455,56	37,87							
Predikat Kinerja																									ST	SR							
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		0		0		0		0		0		0	nan		0		nan								
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0		0		0		0		0		0		0		0	nan		0		nan								
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		0	0		0	93		0	93		0	93		0	372		0	400,00	nan	372		0	inf	nan		Pengukuran tingkat kepuasan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																										masyarakat terhadap layanan RSUD Pariaman			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0	0	0	0	0	93	0	93	0	93	0	93	0	93	0	372	0	400,00	nan	372	0	inf	nan		Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Pariaman	Kegiatan IKM dilaksanakan di akhir tahun	Terjadi peningkatan standar pelayanan selama pelaksanaan akreditasi
1	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	93	0	93	0	206	0	inf	nan	206	0	inf	nan	RSUD PARIAMAN	Tidak ada	Tidak ada	Layanan RS
			Rehabilitas Gedung Pelayanan RS	unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	nan	RSUD PARIAMAN	Sub kegiatan ini bersumber dari anggaran BLUD	Terlambatnya penyelesaian kasus pembangunan gedung penyakit dalam.		
2	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	RSUD PARIAMAN	Sub kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 2 unit dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2025 1 unit dan tahun 2026 1 unit	Tidak ada	Kebutuhan RS
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan				
Predikat Kinerja																										-	-				
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Insenti Tenaga Kesehatan Covid- 19 dan Isentif Penanganan Covid-19	%	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan		Tidak ada lagi pelayanan covid	Tidak ada lagi pelayanan covid	Tidak ada lagi pelayanan covid	
3	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	RSUD PARIAMAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	
			Tersedianya Insentif Tenaga Kesehatan dan	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	RSUD PARIAMAN	Tidak ada	tidak ada	tidak ada		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
			Tenaga Penanganan Covid-19																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	SDM Kesehatan terlatih sesuai dengan Kompetensi	%		0 46		0 46		0 12		0 24		0 36		0 46		0 118		0 256,52	nan	164	0	inf	nan		Pelatihan			
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			46	0 46		0 0		0 12		0 24		0 36		0 46		0 118		0 inf	nan	164	0	356,52	nan		Pelatihan	Keterbatasan anggaran	Akreditasi Rumah Sakit	
1	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	46	0 46		0 0		0 12		0 12		0 36		0 46		0 106		0 inf	nan	152	0	330,43	nan	RSUD PARIAMAN	Pelatihan	Keterbatasan anggaran	Akreditasi Rumah Sakit	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									330,43	nan				
Predikat Kinerja																									ST	-				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
								I		II		III		IV				(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%						(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				0	43.478.115.105	339.517.154.980	24.145.648.370	85.744.262.598	96.050.189.364	125.612.718.285	331.552.818.617	97,65	375.030.933.722	inf	inf													
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	40.233.274.477	49.257.340.633	7.991.368.370	15.498.543.121	11.891.842.156	14.966.848.729	50.348.602.376	102,22	90.581.876.853	inf	inf														
X.XX		PENUNJANG URUSAN			0	40.233.274.477	49.257.340.633	7.991.368.370	15.498.543.121	11.891.842.156	14.966.848.729	50.348.602.376	102,22	90.581.876.853	inf	inf														
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0	100	40.058.241.051	100	49.257.340.633	0	7.991.368.370	0	15.498.543.121	0	11.891.842.156	100	14.966.848.729	100	102,22	200	90.406.843.427	inf	inf						
X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	0	0	0	151.736.225	15	485.000.000	0	88.330.566	0	69.122.559	0	82.822.375	15	103.864.093	15	344.139.593	100,00	70,96	15	495.875.818	inf	inf				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	106.330.490	0	210.000.000	0	57.410.288	0	23.724.170	0	33.233.945	2	35.739.830	2	150.108.233	inf	71,48	2	256.438.723	inf	inf	DINAS BMCKTR			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	0		2		2		1		1		0		0		2		100,00		4		inf	inf	DINAS BMCKTR			
2	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	3	45.405.735	2	275.000.000	0	30.920.278	0	45.398.389	0	49.588.430	2	68.124.263	2	194.031.360	100,00	70,56	5	239.437.095	inf	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bulan	12	0	12	30.338.865.249	12	33.306.322.839	3	5.567.686.801	3	12.095.480.345	3	7.449.313.613	3	8.958.907.356	12	34.071.388.115	100,00	102,30	24	64.410.253.364	200,00	inf				
3	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	350	29.105.465.470	350	32.295.745.339	0	5.561.926.801	0	11.661.675.345	0	7.228.826.984	350	8.282.243.356	350	32.734.672.486	100,00	101,36	700	61.840.137.956	inf	inf	DINAS BMCKTR			
4	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	13	1.233.399.779	13	1.010.577.500	3	5.760.000	3	433.805.000	3	220.486.629	4	676.664.000	13	1.336.715.629	100,00	132,27	26	2.570.115.408	inf	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan Baik	Laporan	1	0	1	232.416.583	1	243.344.000	0	2.530.000	0	52.510.000	0	55.710.428	1	112.011.350	1	222.761.778	100,00	91,54	2	455.178.361	200,00	inf				
5	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dokumen	0	0	1	232.416.583	1	243.344.000	0	2.530.000	0	52.510.000	0	55.710.428	1	112.011.350	1	222.761.778	100,00	91,54	2	455.178.361	inf	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Stel	0	0	0	325.092.228	360	58.928.000	0	18.178.500	0	3.100.000	0	6.341.601	0	3.920.000	0	31.540.101	0,00	53,52	0	356.632.329	nan	inf				
6	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	352	237.749.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	352	237.749.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
7	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	20	87.343.228	10	58.928.000	0	18.178.500	0	3.100.000	0	6.341.601	10	3.920.000	10	31.540.101	100,00	53,52	30	118.883.329	inf	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bulan	12	0	12	1.166.226.525	12	2.625.621.128	3	698.413.803	3	703.246.327	3	1.075.154.578	3	305.007.748	12	2.781.822.456	100,00	105,95	24	3.948.048.981	200,00	inf				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
8	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	38.885.580	1	55.000.000	0	0	0	26.467.395	0	18.305.565	1	10.158.165	1	54.931.125	100,00	99,87	2	93.816.705	inf	inf	DINAS BMCKTR					
9	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	15.000.000	1	1.601.400	0	2.822.800	0	3.050.200	0	9.972.100	1	17.446.500	100,00	116,31	1	17.446.500	inf	inf	DINAS BMCKTR					
10	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	3.681.000	0	4.597.000	1	6.657.500	1	14.935.500	100,00	99,57	1	14.935.500	inf	inf	DINAS BMCKTR					
11	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	15.000.000	0	5.935.750	0	0	0	3.130.650	1	3.426.000	1	12.492.400	100,00	83,28	1	12.492.400	inf	inf	DINAS BMCKTR					
12	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	15.000.000	0	2.533.000	0	3.383.800	0	4.991.000	1	4.067.400	1	14.975.200	100,00	99,83	1	14.975.200	inf	inf	DINAS BMCKTR					
13	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	15.000.000	0	2.748.000	0	3.444.000	0	4.259.700	1	2.468.400	1	12.920.100	100,00	86,13	1	12.920.100	inf	inf	DINAS BMCKTR					
14	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	15.000.000	0	2.789.800	0	2.692.500	0	2.535.700	1	3.952.900	1	11.970.900	100,00	79,81	1	11.970.900	inf	inf	DINAS BMCKTR					
15	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	129.921.402	1	150.000.000	0	56.487.054	0	16.409.100	0	75.353.904	1	35.910.510	1	184.160.568	100,00	122,77	2	314.081.970	inf	inf	DINAS BMCKTR					
16	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	1	149.533.229	1	135.000.000	0	42.298.553	0	3.442.388	0	16.425.325	1	47.734.373	1	109.900.639	100,00	81,41	2	259.433.868	inf	inf	DINAS BMCKTR					
17	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	1	26.400.000	12	45.220.000	3	3.160.000	3	9.485.000	3	5.110.000	3	12.589.000	12	30.344.000	100,00	67,10	13	56.744.000	inf	inf	DINAS BMCKTR					
18	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VII]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	84.461.928	3	24.437.500	3	5.582.500	3	34.849.950	2	17.460.600	11	82.330.550	91,67	97,48	11	82.330.550	inf	inf	DINAS BMCKTR					
19	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	84.461.928	3	22.248.360	3	18.794.000	3	19.217.415	3	61.855.990	12	122.115.765	100,00	144,58	12	122.115.765	inf	inf	DINAS BMCKTR					
20	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	84.461.928	3	18.727.000	3	25.815.650	3	26.667.200	3	12.967.700	12	84.177.550	100,00	99,66	12	84.177.550	inf	inf	DINAS BMCKTR					
21	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	736.104.992	12	1.581.530.360	3	463.340.916	3	505.783.024	3	747.912.419	3	18.022.231	12	1.735.058.590	100,00	109,71	24	2.471.163.582	inf	inf	DINAS BMCKTR					
22	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	84.461.928	3	17.336.300	3	26.244.500	3	20.244.500	3	20.327.400	12	84.152.700	100,00	99,63	12	84.152.700	inf	inf	DINAS BMCKTR					
23	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	84.461.928	3	12.703.000	3	27.023.750	3	31.295.000	3	8.890.000	12	79.911.750	100,00	94,61	12	79.911.750	inf	inf	DINAS BMCKTR					
24	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	84.461.928	3	18.707.200	3	18.742.800	3	36.760.300	3	11.175.300	12	85.385.600	100,00	101,09	12	85.385.600	inf	inf	DINAS BMCKTR					
25	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	1	85.381.322	1	62.099.200	0	3.359.970	0	3.432.120	0	20.448.750	1	17.372.179	1	44.613.019	100,00	71,84	2	129.994.341	inf	inf	DINAS BMCKTR					
26	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	nan				
Predikat Kinerja																											-	-				
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bulan	12	0	12	472.067.084	12	259.722.200	3	60.833.965	3	18.076.070	3	60.889.650	3	248.241.238	12	388.040.923	100,00	149,41	24	860.108.007	200,00	inf	DINAS BMCKTR					
27	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	45	180.523.344	1	150.000.000	0	49.925.000	0	0	0	0	1	98.734.500	1	148.659.500	100,00	99,11	46	329.182.844	inf	inf	DINAS BMCKTR					
28	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	84	291.543.740	5	109.722.200	0	10.908.965	0	18.076.070	0	60.889.650	5	149.506.738	5	239.381.423	100,00	218,17	89	530.925.163	inf	inf	DINAS BMCKTR					
29	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Workshop dan Peralatan]	Pengadaan Armco	meter	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR						
			Pengadaan Jembatan Darurat	Unit	0	0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DINAS BMCKTR						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I		II														III		IV		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pengadaan Hidrolik Breaker Excavator	Unit	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS BMCKTR					
			Pengadaan Kawat Bronjong	Buah	0		0		330		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS BMCKTR					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bulan	0	0	0	4.653.221.618	12	6.875.826.752	0	1.179.546.973	0	2.070.952.568	0	1.743.908.532	12	1.792.877.567	12	6.787.285.640	100,00	98,71	12	11.440.507.258	inf	inf					
30	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	12	10.922.000	1	13.000.000	0	2.710.000	0	2.000.000	0	1.000.000	1	6.038.500	1	11.748.500	100,00	90,37	13	22.670.500	inf	inf	DINAS BMCKTR				
31	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	20.000.000	3	2.895.850	3	4.120.079	3	3.662.541	3	5.619.138	12	16.297.608	100,00	81,49	12	16.297.608	inf	inf	DINAS BMCKTR				
32	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	20.000.000	3	1.925.469	3	3.717.175	3	3.421.981	3	3.123.320	12	12.187.945	100,00	60,94	12	12.187.945	inf	inf	DINAS BMCKTR		Tagihan Listrik awal Tahun dibayar menggunakan Anggaran Dinas, Tagihan Air tidak sebesar Tahun lalu dikarenakan kebocoran Pipa PDAM		
33	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	25.000.000	3	3.130.870	3	4.626.866	3	4.971.338	3	4.915.834	12	17.644.908	100,00	70,58	12	17.644.908	inf	inf	DINAS BMCKTR				
34	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	1	1.627.800.663	1	1.880.175.000	0	472.136.453	0	442.688.161	0	487.340.747	1	450.232.295	1	1.852.397.656	100,00	98,52	2	3.480.198.319	inf	inf	DINAS BMCKTR				
35	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	20.000.000	3	1.116.476	3	1.808.234	3	1.840.214	3	1.920.214	12	6.685.138	100,00	33,43	12	6.685.138	inf	inf	DINAS BMCKTR				
36	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	20.000.000	3	1.913.150	3	1.266.717	3	826.794	3	1.725.395	12	5.732.056	100,00	28,66	12	5.732.056	inf	inf	DINAS BMCKTR				
37	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	20.000.000	3	1.843.532	3	3.781.041	3	3.455.935	3	3.511.079	12	12.591.587	100,00	62,96	12	12.591.587	inf	inf	DINAS BMCKTR				
38	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	130.538.072	3	20.100.312	3	40.086.668	3	30.150.468	3	51.237.600	12	141.575.048	100,00	108,45	12	141.575.048	inf	inf	DINAS BMCKTR				
39	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	130.538.072	3	20.100.312	3	40.086.668	3	30.150.468	3	51.237.600	12	141.575.048	100,00	108,45	12	141.575.048	inf	inf	DINAS BMCKTR				
40	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	1	3.014.498.955	1	4.074.423.320	0	574.918.757	0	1.373.601.243	0	1.061.954.358	1	1.027.469.358	1	4.037.943.716	100,00	99,10	2	7.052.442.671	inf	inf	DINAS BMCKTR				
41	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor tenaga teknis mekanik dan listrik	orang	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor operator alat berat	orang	0		0	10		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS BMCKTR						
42	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	130.538.072	3	20.100.312	3	40.086.668	3	30.150.468	3	51.237.600	12	141.575.048	100,00	108,45	12	141.575.048	inf	inf	DINAS BMCKTR				
43	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	130.538.072	3	20.100.312	3	40.086.668	3	30.150.468	3	51.237.600	12	141.575.048	100,00	108,45	12	141.575.048	inf	inf	DINAS BMCKTR				
44	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	130.538.072	3	16.454.856	3	32.909.712	3	24.682.284	3	32.134.434	12	106.181.286	100,00	81,34	12	106.181.286	inf	inf	DINAS BMCKTR				
45	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	130.538.072	3	20.100.312	3	40.086.668	3	30.150.468	3	51.237.600	12	141.575.048	100,00	108,45	12	141.575.048	inf	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Unit	0	0	0	2.718.615.539	20	5.402.575.714	0	375.847.762	0	486.055.252	0	1.417.701.379	20	3.442.019.377	20	5.721.623.770	100,00	105,91	20	8.440.239.309	inf	inf					
46	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	15	680.457.966	20	600.767.500	0	70.597.937	0	187.488.518	0	171.384.180	20	433.300.040	20	862.770.675	100,00	143,61	35	1.543.228.641	inf	inf	DINAS BMCKTR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
							I	II	III	IV																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																												
47	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	1	103.538.650	20	822.000.000	0	37.883.350	0	59.333.560	0	645.669.000	20	183.936.130	20	926.822.040	100,00	112,75	21	1.030.360.690	inf	inf	DINAS BMCKTR				
48	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	25	869.449.800	20	252.291.175	20	155.382.374	20	205.667.365	20	254.285.986	80	867.626.900	320,00	99,79	80	867.626.900	inf	inf	DINAS BMCKTR				
49	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	14	1.934.618.923	2	3.110.358.414	0	15.075.300	0	83.850.800	0	394.980.834	2	2.570.497.221	2	3.064.404.155	100,00	98,52	16	4.999.023.078	inf	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf															
Predikat Kinerja															-	-															
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0	3.244.840.628	290.259.814.347	16.154.280.000	70.245.719.477	84.158.347.208	110.645.869.556	281.204.216.241	96,88	284.449.056.869	inf															
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0	3.244.840.628	290.259.814.347	16.154.280.000	70.245.719.477	84.158.347.208	110.645.869.556	281.204.216.241	96,88	284.449.056.869	inf															
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIRMINIUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	0	1.986.414.467	84	3.796.302.225	11.575.243	25.624.361	32.379.901	418.876.537	0	488.456.042	0,00	12,87	0	2.474.870.509	nan	inf											
1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	Lokasi	0	0	0	1.986.414.467	2	3.796.302.225	0	11.575.243	0	25.624.361	0	32.379.901	0	418.876.537	0	488.456.042	0,00	12,87	0	2.474.870.509	nan	inf					
1	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	0	0	1	1.059.694.337	1	885.001.600	0	1.136.500	0	679.000	0	11.275.850	1	408.571.787	1	421.663.137	100,00	47,65	1	1.481.357.474	inf	inf	DINAS BMCKTR				
2	1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Kab/Kota	0	0	9	503.544.665	9	94.391.780	0	10.438.743	0	24.945.361	0	21.104.051	9	10.304.750	9	66.792.905	100,00	70,76	9	570.337.570	inf	inf	DINAS BMCKTR				
3	1.03.03.1.01.11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha	0	0	0	423.175.465	0,4	2.816.908.845	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	423.175.465	nan	inf	inf	DINAS BMCKTR						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	inf															
Predikat Kinerja															-	-															
1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DANPENGEOLOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	0	0	3	622.312.600	1.927.000	0	0	184.449.000	3	390.929.597	3	577.305.597	100,00	92,77	3	577.305.597	inf	inf									
1.03.04.1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan TPA Sampah Regional	Lokasi	0	0	0	2	622.312.600	1.927.000	0	0	0	184.449.000	2	390.929.597	2	577.305.597	100,00	92,77	2	577.305.597	inf	inf							
1	1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Study Kelayakan, Doking dan DED TPA Regional Padang Pariman yang tersusun	Dokumen	0	0	0	3	486.164.000	0	1.456.000	0	0	0	133.500.571	3	299.526.885	3	434.483.456	100,00	89,37	3	434.483.456	inf	inf	DINAS BMCKTR					
2	1.03.04.1.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangn Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan	Rumah Tangga	0	0	0	50	136.148.600	0	471.000	0	0	0	50.948.429	50	91.402.712	50	142.822.141	100,00	104,90	50	142.822.141	inf	inf	DINAS BMCKTR					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf															
Predikat Kinerja															-	-															
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%		0	0	0	85	411.915.480	0	25.233.300	0	93.915.230	0	94.460.400	0	169.466.150	0	383.075.080	0,00	93,00	0	383.075.080	nan	inf					
1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Laporan	0	0	0	0	1	411.915.480	0	25.233.300	0	93.915.230	0	94.460.400	1	169.466.150	1	383.075.080	100,00	93,00	1	383.075.080	inf	inf					
1	1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	0	0	0	0	1	411.915.480	0	25.233.300	0	93.915.230	0	94.460.400	1	169.466.150	1	383.075.080	100,00	93,00	1	383.075.080	inf	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf															
Predikat Kinerja															-	-															
1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah drainase kewenangan provinsi yang dikelola	Km		0	0	10	518.145.500	2.237.000	8.404.100	0	255.071.637	249.470.823	0	515.183.560	0,00	99,43	0	515.183.560	nan	inf									
1.03.06.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya pembangunan drainase primer	m	0	0	0	0	3450	518.145.500	0	2.237.000	0	8.404.100	0	255.071.637	0	249.470.823	0	515.183.560	0,00	99,43	0	515.183.560	nan	inf					
1	1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	0	0	0	1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR							
2	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	9	517.945.500	0	2.237.000	0	8.404.100	0	255.071.637	9	249.470.823	9	515.183.560	100,00	99,47	9	515.183.560	inf	inf	DINAS BMCKTR					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	nan															

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)					
Predikat Kinerja																															
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%		0	71.4	1.258.426.161	77	200.889.772.398	66.06	7.330.208.514	66.68	43.206.865.630	66.78	74.390.610.019	67.5	72.924.104.645	267.02	197.851.788.808	346,78	98,49	338.42	199.110.214.969	inf	inf					
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	meter	555	0	555	1.258.426.161	555	200.889.772.398	0	7.330.208.514	555	43.206.865.630	712	74.390.610.019	1167	72.924.104.645	2434	197.851.788.808	438,56	98,49	2989	199.110.214.969	538,56	inf					
			Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	Laporan	13		13		13		3		3		3		4		13		100,00		26		200,00						
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi	Unit	30		30		30		0		0		3		17		20		66,67		50		166,67						
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	Km	230.1		230.1		115.6		39.2		69.52		110		41.38		260.1		225,00		490.2		213,04						
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	Km	263.75		263.75		121.05		42.02		103.71		63.89		54.13		263.75		217,89		527.5		200,00						
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	Km	198.83		198.83		104.4		18.92		33.7		24.11		27.67		104.4		100,00		303.23		152,51						
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Km	220.7		220.7		133.7		42.67		42.67		42.67		42.69		170.7		127,67		391.4		177,34			Sepanjang 50 Km dari 220.7 Km total panjang jalan di kerjakan melalui penanganan longsegment DAK			
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	Km	177.88		177.88		118.98		27.3		43.7		60.7		46.18		177.88		149,50		355.76		200,00						
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Km	211		211		117.6		35.78		49.38		56.76		69.08		211		179,42		422		200,00						
1	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Study Fungsi dan Studi kelayakan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	2	5.879.212.287	0	8.578.894	0	693.028.540	0	2.088.532.359	2	2.925.454.735	2	5.715.594.528	100,00	97,22	2	5.715.594.528	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Lingkungan dan Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	dokumen	0		0		6		0		0		2		3		5		83,33		5		inf		DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan	Dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS BMCKTR				
2	1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan untuk infrastruktur bidang ke PU an Provinsi	Ha	0	0	0	0	0.35	5.819.000.311	0	38.721.574	0	507.124.483	0.37	332.354.026	0.03	2.590.154.543	0.4	3.468.354.626	114,29	59,60	0.4	3.468.354.626	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Luas lahan untuk infrastruktur bidang ke PU an Provinsi (Koneksi ke kawasan Strategis)	Ha	0		0		0.25		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS BMCKTR				
			Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS BMCKTR				
			Terlaksananya Pendampingan Penyiapan Pembebasan Lahan Jalan Tol	dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS BMCKTR				
3	1.03.10.1.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	0	0	0	0	0	974.715.000	0	0	0	518.657.076	0	405.540.050	0	30.267.506	0	954.464.632	nan	97,92	0	954.464.632	nan	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Provinsi	dokumen	0		0		1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINAS BMCKTR				
4	1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey PKRMS/BMS Provinsi	dokumen	0	0	0	0	2	600.000.000	0	0	0	9.600.625	0	162.765.950	2	373.635.573	2	546.002.148	100,00	91,00	2	546.002.148	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Survey BMS Provinsi	dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS BMCKTR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
5	1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket IIterbangun	Km	0	0	0	0	1.25	40.491.534.150	0	30.346.186	1.26	7.180.990.223	1.25	13.441.632.472	0.49	21.915.831.178	3	42.568.800.059	240,00	105,13	3	42.568.800.059	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan Pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket I terbangun	Km	0		0		1.25		0		0.32		1		0.28		1.6		128,00		1.6		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi pada ruas Suranth - Kayu Aro - Langgai (P.086)	dokumen	0		0		1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi pada ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket II	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi pada ruas Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan Pada Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) (Longsegment DAK) terbangun	Km	0		0		4.2		0		0.36		1.43		0.52		2.31		55,00		2.31		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi pada ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket I	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen RPP PKS Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan Pada Ruas Jalan Abai Sangir - Sei.Dareh (P.056.3) terbangun	Km	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jalan Pada Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) terbangun	Km	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jalan Pada Ruas Jalan Surantiah - Kayu Aro - Langgai (P.086) terbangun	Km	0		0		0.5		0		0		0.35		0		0.35		70,00		0.35		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan Pada Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101) terbangun	Km	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jalan yang Dibangun	KM	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	nan	DINAS BMCKTR				
6	1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Jalan Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)	Km	0	0	0	0	0.5	24.375.050.000	0	32.199.047	0.19	4.377.739.750	0.21	10.845.864.234	0	6.808.912.510	0.4	22.064.715.541	80,00	90,52	0.4	22.064.715.541	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Provinsi Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)	dokumen	0		0		1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Provinsi Ruas Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) DAK	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Provinsi Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090) (P.025)	dokumen	0		0		1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Jalan Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) (Longsegment DAK)	Km	0		0		20		0.16		5.19		8.16		6.49		20		100,00		20		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar Provinsi Ruas Palembang Cs	dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Jalan Palembang Cs	Km	0		0		1		0		0.03		0.36		0.31		0.7		70,00		0.7		inf	inf	DINAS BMCKTR				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	Km	0	0			0.75		0		0.6		0.1		0		0.7		93,33		0.7		inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang dilakukan Pelebaran Jalan menuju standar di Ruas Simp. ganting Payo - Bts. Tanah Datar - Sumani (P.092)	KM	0	0			0.5		0		0.25		0.25		0		0.5		100,00		0.5		inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pelebaran Menuju Standar ruas Jalan Simpang Ganting Payo - Bts. Tanah Datar - Sumani (P.092)	dokumen	0	0			1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	0	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS BMCKTR				
7	1.03.10.1.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Pada Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068)	Km	0	0	0	0	0.8	4.270.641.800	0	0	658.346.705	0.73	1.747.404.500	0	1.958.581.448	0.73	4.364.332.653	91,25	102,19	0.73	4.364.332.653	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Provinsi pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068)	dokumen	0	0			1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	KM	0	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS BMCKTR				
8	1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi pada ruas Purus - BIM Cs	dokumen	0	0	0	0	1	28.747.770.000	0	18.544.968	0	7.601.322.225	1	14.423.302.434	0	8.428.242.676	1	30.471.412.303	100,00	106,00	1	30.471.412.303	inf	inf	DINAS BMCKTR			
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj.Balit (P.093) (Longsegment DAK)	Km	0	0			30		0.01		6.73		26.08		5.18		38		126,67		38		inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi pada ruas Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) (Longsegment DAK)	dokumen	0	0			1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi pada ruas Sitangkai - Tanjung Ampalu (P.040)	dokumen	0	0			1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Purus - BIM CS	Km	0	0			1		0		0.62		0.2		0		0.82		82,00		0.82		inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) (Longsegment DAK)	Km	0	0			30.6		0.57		21.79		4.98		3.26		30.6		100,00		30.6		inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi pada ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	dokumen	0	0			1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi pada ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)	dokumen	0	0			1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Sitangkai - Tanjung Ampalu (P.040)	Km	0	0			1		0		0.77		0.23		0		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi pada ruas Singkarak - Arian - Tj.Balit (P.093) (Longsegment DAK)	dokumen	0	0			1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)	Km	0	0			0.5		0		0.11		0.89		0		1		200,00		1		inf	DINAS BMCKTR				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
							I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka (P.076)	Km	0	0	0.5		0	0.05	0.17	0	0.22	44,00	0.22	inf	DINAS BMCKTR													
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DINAS BMCKTR													
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan pada Ruas Jalan Bts Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069)	Km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA												
9	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Sincin - Kurai Tajir (P.028) (Longsegment DAK)	KM	0	0	0	16.44	28.172.874.000	0.17	18.502.315	4.74	6.349.948.494	11.41	11.382.092.721	0.63	9.905.020.950	16.95	27.655.564.480	103,10	98,16	16.95	27.655.564.480	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sincin - Kurai Tajir (P.028) DAK	dokumen	0	0	1		0	0	0	1	100,00	1	inf	DINAS BMCKTR														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DINAS BMCKTR													
			Panjang Jalan yang dilakukan rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Rao - Rokan (P.095) (Longsegment DAK)	KM	0	0	33		0.16	14.29	12.45	3.1	30	90,91	30	inf	DINAS BMCKTR													
			Panjang Jalan yang dilakukan rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Lubuk Basung - Sei Limau (P.072)	KM	0	0	0.5		0	0.12	0.22	0.56	0.9	180,00	0.9	inf	DINAS BMCKTR													
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Basung - Sei Limau (P.072)	dokumen	0	0	1		0	0	0	1	100,00	1	inf	DINAS BMCKTR														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Rao - Rokan (P.095) DAK	dokumen	0	0	1		0	0	0	1	100,00	1	inf	DINAS BMCKTR														
10	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR							
11	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR							
12	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0	0	0	0	15	968.104.209	0	0	1.41	90.975.796	6.22	401.299.559	7.37	475.816.722	15	968.092.077	100,00	100,00	15	968.092.077	inf	inf	DINAS BMCKTR		Proses Pengadaan Secara e-Catalog yang cukup lama, dan adanya penyesuaian item pekerjaan	
13	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	0	0	0	0	47.6	200.000.000	0	0	0	47.6	199.479.478	43.74	198.255.516	91.34	397.734.994	191,89	198,87	91.34	397.734.994	inf	inf	DINAS BMCKTR				
14	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0	0	0	0	0.385	964.788.919	0.24	560.850.000	0	0	0.12	272.798.700	0.03	68.574.800	0.39	902.223.500	101,30	93,52	0.39	902.223.500	inf	inf	DINAS BMCKTR		Pekerjaan lapis hotmix dilakukan secara e-catalog dan sisanya secara swakelola	
15	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	0	0	0	0	15	501.000.000	0	0	0	15	483.022.000	0	15	483.022.000	100,00	96,41	15	483.022.000	inf	inf	DINAS BMCKTR		Pekerjaan Pengecoran Bahu Jalan yang dilakukan secara e-catalog dan sudah selesai 100% (PHO)			
16	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	0	0	0	0	177.88	4.798.760.000	27.3	735.329.850	43.7	1.179.087.214	60.7	1.636.591.138	793.57	2.138.221.415	925.27	5.689.229.617	520,17	118,56	925.27	5.689.229.617	inf	inf	DINAS BMCKTR			
17	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	0	0	0	0	220.7	5.959.900.000	41.73	1.127.112.971	71.6	1.933.312.579	64.84	1.750.938.139	42.53	1.013.689.095	220.7	5.825.052.784	100,00	97,74	220.7	5.825.052.784	inf	inf	DINAS BMCKTR		sepanjang 170.70 Km Jalan dari total 220.70 Km ditangani secara rutin dan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I		II		III		IV														
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%					(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
18	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	0	0	0	0	211	5.697.000.000	35.78	966.026.516	49.38	1.333.282.146	56.76	1.532.424.351	68.8	1.857.496.604	210.72	5.689.229.617	99,87	99,86	210.72	5.689.229.617	inf	inf	DINAS BMCKTR	sepanjang 50 Km dikerjakan melalui Longsegment DAK		
19	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	0	0	0	0	260.1	7.023.700.000	39.2	1.138.162.165	69.52	2.018.381.387	189.69	3.103.773.903	99.85	739.734.341	398.26	7.000.051.796	153,12	99,66	398.26	7.000.051.796	inf	inf	DINAS BMCKTR	Ruas - Ruas Jalan di UPTD Wilayah VI terpelihara dengan baik		
20	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	0	0	0	0	263.75	5.910.951.081	50.57	1.139.070.900	94.93	2.138.117.443	61.85	1.393.197.844	56.4	1.179.709.697	263.75	5.850.095.884	100,00	98,97	263.75	5.850.095.884	inf	inf	DINAS BMCKTR			
21	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	0	0	0	0	203.31	4.511.848.791	45.25	1.004.255.824	57.96	1.286.207.738	46.21	1.025.392.044	53.89	1.180.569.574	203.31	4.496.425.180	100,00	99,66	203.31	4.496.425.180	inf	inf	DINAS BMCKTR	Sesuai Jadwal Pekerjaan		
22	1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Jembatan RS Unand	dokumen	0	0	0	0	1	9.307.900.000	0	5.776.050	0	1.590.294.833	0	1.839.505.602	1	3.707.682.065	1	7.143.258.550	100,00	76,74	1	7.143.258.550	inf	inf	DINAS BMCKTR			
			Panjang Jembatan RS Unand terbangun	Meter	0	0		90		0		10		40.28		39.72		90		100,00		90			inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jembatan yang Dibangun	M	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR				
23	1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggantian Jembatan Kurambik (P.025)	Dokumen	0	0	0	0	1	10.794.050.000	0	13.175.000	0	1.959.233.574	0	4.788.278.000	1	3.894.172.975	1	10.654.859.549	100,00	98,71	1	10.654.859.549	inf	inf	DINAS BMCKTR			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan kurambik (P.025)	Meter	0	0		6		0		2.36		2.22		1.42		6		100,00		6			inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penggantian Jembatan Batang Tomak (P.097)	dokumen	0	0		1		0		0		0		1		1		100,00		1			inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Batang Tomak (P.097)	Meter	0	0		30		0		3.09		18.21		8.7		30		100,00		30			inf	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Batang Jawa (P.096)	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Batang Kurambik (P.025)	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR				
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Batang Sumpuh (P.096)	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Duku	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Paloge (P.056.3)	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Sei Guntuang (P.081)	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Tampalo (P.056.3)	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Jembatan Tanah Hitam I (P.038)	Meter	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS BMCKTR	Kegiatan tidak terdapat di DPA			
24	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	0	0	0	0	804	160.800.000	45.74	9.146.425	337.68	67.546.270	185.24	37.034.142	235.34	172.449.800	804	286.176.637	100,00	177,97	804	286.176.637	inf	inf	DINAS BMCKTR			
25	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	0	0	0	0	860.5	172.100.000	0	0	86.48	17.303.000	316.7	63.314.000	10.05	2.009.000	413.23	82.626.000	48,02	48,01	413.23	82.626.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
26	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	0	0	0	0	1603	320.600.000	0	0	0	0	1381946	276.382.050	99.9	44.000.150	1382045.9	320.382.200	86.216,21	99,93	1382045.9	320.382.200	inf	inf	DINAS BMCKTR			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(out/put)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
27	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	0	0	0		1236.48	247.296.000	0		626.69	125.336.680	252.66	50.530.430	357.13	70.647.500	1236.48	246.514.610	100,00	99,68	1236.48	246.514.610	inf	inf	DINAS BMCKTR					
28	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	0	0	0		859.7	61.397.000	0		859.7	61.381.400	0		0	0	859.7	61.381.400	100,00	99,97	859.7	61.381.400	inf	inf	DINAS BMCKTR	Sesuai Jadwal Pekerjaan				
29	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	0	0	0		822.5	164.500.000	50.41	10.082.400	218.83	43.767.300	127.53	25.506.700	424.91	84.982.500	821.68	164.338.900	99,90	99,90	821.68	164.338.900	inf	inf	DINAS BMCKTR	Ruas - Ruas Jembatan Provinsi di UPTD Wilayah VI terpelihara dengan baik				
30	1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	dokumen	0	0	0		6	100.000.000	0		0	1	37.898.900	0		0	0	40.214.989	1	78.113.889	16,67	78,11	1	78.113.889	inf	inf	DINAS BMCKTR			
			Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	0				0		0			0				0		0	nan		0	nan		DINAS BMCKTR						
31	1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat [UPTD Workshop dan Peralatan]	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Meter	0	0	0		1100	1.148.159.900	75	80.383.900	414	444.109.606	116	124.137.239	495	520.618.472	1100	1.169.249.217	100,00	101,84	1100	1.169.249.217	inf	inf	DINAS BMCKTR					
			Terlaksananya Penanggulangan bencana/ Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Lokasi	0				7		1		2		1		3		7		100,00		7		inf	DINAS BMCKTR						
32	1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	0	0	0		0	498.497.000	0	69.131.796	0	155.454.388	0	161.706.281	0	203.522.343	0	589.814.808	nan	118,32	0	589.814.808	nan	inf	DINAS BMCKTR					
			Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	dokumen	0				12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf	DINAS BMCKTR						
33	1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	0	0	0		12	716.942.950	3	130.620.250	3	146.961.375	3	155.166.095	3	229.529.973	12	662.277.693	100,00	92,38	12	662.277.693	inf	inf	DINAS BMCKTR					
34	1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum Provinsi	dokumen	0	0	0		6	128.328.000	0	27.815.078	0	9.652.343	0	30.300.298	6	14.448.500	6	82.216.219	100,00	64,07	6	82.216.219	inf	inf	DINAS BMCKTR					
			Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	14		13		0		0		0		0		0		0		nan		13		92,86	DINAS BMCKTR						
35	1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi]	Jumlah Alat-alat Ukur pada Laboratorium Pengujian yang Diadakan	Unit	0	0	7	1.258.426.161	9	1.202.351.000	0	166.376.405	13	671.803.537	0	210.343.280	2	151.657.495	15	1.200.180.717	166,67	99,82	22	2.458.606.878	inf	inf	DINAS BMCKTR					
			Jumlah Laporan Monitoring Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang Dilaksanakan	Laporan	0		13		13		3		3		3		4		13		100,00		26		inf	DINAS BMCKTR						
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Ke-PUan yang Dikelola	Unit	0		15		20		2		0		4		14		20		100,00		35		inf	DINAS BMCKTR						
			Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS BMCKTR						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%			0	87		0	87	1.651.483.221	0	75.978.006	0	116.243.101	0	165.052.572	87	712.226.062	87	1.069.499.741	100,00	64,76	174	1.069.499.741	inf	inf				
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	Perda	0	0	0		1	416.990.471	0	46.912.306	0	42.079.425	0	77.295.000	0	188.575.010	0	354.861.741	0,00	85,10	0	354.861.741	nan	inf						
1	1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	0	0	0		0	319.232.471	0	17.019.506	0	40.859.425	0	50.058.100	0	159.534.300	0	267.471.331	nan	83,79	0	267.471.331	nan	inf	DINAS BMCKTR					
			Jumlah Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sumatera Barat yang tersusun	Peraturan Daerah	0				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR						
2	1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0		0	97.758.000	0	29.892.800	0	1.220.000	0	27.236.900	0	29.040.710	0	87.390.410	nan	89,39	0	87.390.410	nan	inf	DINAS BMCKTR					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
							I		II		III		IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM Bidang Penataan Ruang	orang	0	0			60		50		0		0		0		50		83,33		50		inf	DINAS BMCKTR						
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KKPR	orang	0	0			60		0		0		0		70		70		116,67		70		inf	DINAS BMCKTR						
			Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri ATR BPN tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	orang	0	0			60		0		0		0		60		60		100,00		60		inf	DINAS BMCKTR						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf						
Predikat Kinerja																									-	-						
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan	0	0	0		0	3	410.983.300	0	3.675.150	0	19.546.925	0	23.781.834	0	143.914.906	0	190.918.815	0,00	46,45	0	190.918.815	nan	inf					
3	1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR					
			Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Barat	Laporan	0	0			1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS BMCKTR						
4	1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Fakta dan Analisa RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak Yang Tersusun	Dokumen	0	0	0		0	1	341.135.300	0	1.402.200	0	10.704.925	0	8.857.184	0	106.015.952	0	126.980.261	0,00	37,22	0	126.980.261	nan	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kawasan Museum dan Monumen PDRI Yang Tersusun	Dokumen	0	0			1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS BMCKTR						
5	1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperkada Kawasan Danau Prioritas di Sumatera Barat Yang Tersusun	Ranperkada	0	0	0		0	1	69.848.000	0	2.272.950	0	8.842.000	0	14.924.650	0	37.898.954	0	63.938.554	0,00	91,54	0	63.938.554	nan	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0		0	16	274.162.000	0	16.471.250	0	36.946.000	0	25.685.288	0	87.389.903	0	166.492.441	0,00	60,73	0	166.492.441	nan	inf					
6	1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Laporan Update Data Aplikasi SIMTARU	Laporan	0	0	0		0	1	274.162.000	0	16.471.250	0	36.946.000	0	25.685.288	0	87.389.903	0	166.492.441	0,00	60,73	0	166.492.441	nan	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Laporan Update Data Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy)	Laporan	0	0			1		0		0		1		1		100,00		1			inf	DINAS BMCKTR							
			Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	orang	0	0			70		0		0		0		70		70		100,00		70		inf	DINAS BMCKTR						
			SK Tim Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy)	SK Gubernur	0	0			1		0		1		0		1		100,00		1			inf	DINAS BMCKTR							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf						
Predikat Kinerja																									-	-						
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0		0	1	549.347.450	0	8.919.300	0	17.670.751	0	38.290.450	0	292.346.243	0	357.226.744	0,00	65,03	0	357.226.744	nan	inf					
7	1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang yang Tersusun	Laporan	0	0	0		0	1	174.112.700	0	2.351.000	0	2.420.375	0	1.929.500	0	143.640.007	0	150.340.882	0,00	86,35	0	150.340.882	nan	inf	DINAS BMCKTR				
			Rancangan peraturan gubernur tentang pemberian insentif dan disinsentif	naskah	0	0			1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS BMCKTR						
8	1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan Danau	Laporan	0	0	0		0	1	179.157.750	0	2.592.600	0	6.320.763	0	19.836.550	0	35.699.750	0	64.449.663	0,00	35,97	0	64.449.663	nan	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah laporan pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan Pantai	Laporan	0	0			1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR						
9	1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	Laporan	0	0	0		0	1	64.615.800	0	1.689.600	0	1.834.400	0	1.720.000	0	37.981.711	0	43.225.711	0,00	66,90	0	43.225.711	nan	inf	DINAS BMCKTR				
10	1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0		0	0	131.461.200	0	2.286.100	0	7.095.213	0	14.804.400	0	75.024.775	0	99.210.488	nan	75,47	0	99.210.488	nan	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/ Kota/ Provinsi Sumatera Barat	Laporan	0	0			1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS BMCKTR						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV																		
								(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)							(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat Kinerja																																
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit		0			0	7	81.379.145.303		2.290.848.288		18.119.579.735		8.853.663.086		35.240.271.692	0	64.504.362.801	0,00	79,26	0	64.504.362.801	nan	inf					
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Unit	0	0	0		0	7	81.379.145.303	0	2.290.848.288	0	18.119.579.735	0	8.853.663.086	7	35.240.271.692	7	64.504.362.801	100,00	79,26	7	64.504.362.801	inf	inf					
			Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	Laporan	0		0			1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
1	1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0	0			0	10	71.217.840.760	0	2.258.773.088	0	15.438.730.926	0	5.354.979.994	10	30.971.504.392	10	54.023.988.400	100,00	75,86	10	54.023.988.400	inf	inf	DINAS BMCKTR				
2	1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit		0	0			0	2	9.722.920.500	0	2.276.000	0	2.595.566.417	0	3.421.878.557	2	4.087.486.619	2	10.107.207.593	100,00	103,95	2	10.107.207.593	inf	inf	DINAS BMCKTR			
3	1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	0	0			0	1	194.049.500	0	13.435.100	0	2.558.000	0	46.951.712	1	91.853.508	1	154.798.320	100,00	79,77	1	154.798.320	inf	inf	DINAS BMCKTR				
4	1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi [UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung]	Jumlah Bangunan Gedung Negara di Provinsi Sumatera Barat yang akan di Assesmen	Bangunan		0			0	18	100.727.248	39	11.774.600	51	69.819.392	69	9.610.200	117	55.266.799	276	146.470.991	1.533,33	145,41	276	146.470.991	inf	inf	DINAS BMCKTR				
			Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen						0		39		51		69		117		276		inf		276		inf	DINAS BMCKTR					
5	1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen	0	0			0	1	143.607.295	0	4.589.500	0	12.905.000	0	20.242.623	1	34.160.374	1	71.897.497	100,00	50,07	1	71.897.497	inf	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											inf	inf				
Predikat Kinerja																																
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	kawasan		0			0	1	990.737.620		28.763.262		65.187.204		182.660.593	1	540.524.050	1	817.135.109	100,00	82,48	1	817.135.109	inf	inf					
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera	Laporan	0	0	0		0	13	990.737.620	0	28.763.262	0	65.187.204	0	182.660.593	13	540.524.050	13	817.135.109	100,00	82,48	13	817.135.109	inf	inf					
			Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	Laporan	0		0			3		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
1	1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0			0	2	525.711.685	0	3.837.000	0	8.878.500	0	15.234.000	2	287.188.220	2	315.137.720	100,00	59,94	2	315.137.720	inf	inf	DINAS BMCKTR				
2	1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	0	0			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
3	1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	0	0			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
4	1.03.09.1.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	0	0			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
								I		II		III		IV																											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
5	1.03.09.1.01.06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota [UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung]	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop untuk Pembinaan Teknis pada Kabupaten/Kota	Orang		0	0	0	150	270.280.452	0	6.756.336	0	17.936.178	50	98.017.994	50	165.281.844	100	287.992.352	66,67	106,55	100	287.992.352	inf	inf	DINAS BMCKTR														
6	1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	0	0	0	0	13	194.745.483	0	18.169.926	0	38.372.526	0	69.408.599	13	88.053.986	13	214.005.037	100,00	109,89	13	214.005.037	inf	inf	DINAS BMCKTR														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																									
Predikat Kinerja																								-	-																

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
									I		II		III		IV																																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI			140.538.140.967		0		130.679.793.267		15.638.563.112		22.444.993.822		66.777.513.340		60.628.577.327		165.489.647.601		126,64		165.489.647.601		117,75																										
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			140.538.140.967		0		24.333.451.245		4.445.258.898		4.377.397.888		12.398.232.300		11.933.607.145		33.154.496.231		136,25		33.154.496.231		23,59																										
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			140.538.140.967		0		24.333.451.245		4.445.258.898		4.377.397.888		12.398.232.300		11.933.607.145		33.154.496.231		136,25		33.154.496.231		23,59																										
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		134.983.165.376		0	100	24.333.451.245	15,26	4.422.921.748	14,94	4.364.592.888	33,21	12.398.232.300	61,36	11.933.607.145	124,77	33.119.354.081		124,77	136,11	124,77	33.119.354.081	inf	24,54																								
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	5.216.531.000	0	0	85	840.709.884	10,38	36.528.727	19,35	162.692.566	39,46	259.562.577	60,54	581.147.307	129,73	1.039.931.177		152,62	123,70	129,73	1.039.931.177	inf	19,94																								
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.296.531.000	7	0	1	377.142.884	19,13	21.413.527	19,44	73.328.166	24,81	93.575.063	75,19	283.567.821	138,57	471.884.577		13,857,00	125,12	145,57	471.884.577	2.079,57	20,55	DINAS PSDA																							
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6	300.000.000	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	6	0	100,00	0,00	DINAS PSDA																									
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	1.720.000.000	15	0	1	463.567.000	3,26	15.115.200	19,28	89.364.400	32,55	165.987.514	67,45	297.579.486	122,54	568.046.600		122,54	137,54	568.046.600	916,93	33,03	DINAS PSDA																								
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	900.000.000	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	6	0	100,00	0,00	DINAS PSDA																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	0	83.923.720.931	0	0	100	15.054.457.513	20,95	3.154.647.462	18,97	2.855.864.665	35,13	8.443.302.353	64,87	6.611.155.160	139,92	21.064.969.640		139,92	139,93	139,92	21.064.969.640	inf	25,10																								
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	135	74.526.437.098	135	0	135	14.335.407.936	21,42	3.070.127.462	19,03	2.727.685.665	35,65	8.180.038.403	64,35	6.155.369.533	140,45	20.133.221.063		104,04	140,44	275,45	20.133.221.063	204,04	27,01	DINAS PSDA																							
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	9.397.283.833	1	0	1	709.049.577	11,92	84.520.000	18,08	128.179.000	36,47	258.560.000	63,53	450.489.577	130	921.748.577		13,000,00	130,00	131	921.748.577	13.100,00	9,81	DINAS PSDA																							
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	nan	DINAS PSDA																								
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	nan	DINAS PSDA																								
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	nan	DINAS PSDA																								
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	47,04	4.703.950	52,96	5.296.050	100	10.000.000		10.000,00	100,00	100	10.000.000	inf	inf	DINAS PSDA																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	0	1.318.351.100	0	0	100	278.600.000	18,89	52.620.890	5,63	15.693.480	58,01	161.626.913	41,99	116.973.087	124,52	346.914.370	124,52	124,52	346.914.370	inf	26,31					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0	0	10	0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0	0	1	168.600.000	27,9	47.031.090	0,3	500.000	75,15	126.708.490	24,85	41.891.510	128,2	216.131.090	128,20	128,2	216.131.090	inf	inf	DINAS PSDA				
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	58	1.318.351.100	58	0	1	100.000.000	5,59	5.589.800	15,19	15.193.480	25,38	25.378.908	74,62	74.621.092	120,78	120.783.280	120,78	178,78	120.783.280	308,24	9,16	DINAS PSDA				
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0	0	1	0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0	0	1	10.000.000	0		0	0	95,4	9.539.515	4,6	460.485	100	10.000.000	100,00	100,00	100	10.000.000	inf	inf	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	%	0	2.805.838.000	0	0	100	84.000.000	29,98	25.180.000	31,15	26.170.000	33,19	27.880.000	66,81	56.120.000	161,13	135.350.000	161,13	161,13	161,13	135.350.000	inf	4,82				
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	618.750.000	1	0	1	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	1	0	100,00	0,00	DINAS PSDA			
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0		0	0	4	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA			
18	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	125.000.000	20	0	10	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	20	0	100,00	0,00	DINAS PSDA			
19	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	2.062.088.000	40	0	20	84.000.000	29,98	25.180.000	31,15	26.170.000	33,19	27.880.000	66,81	56.120.000	161,13	135.350.000	805,65	161,13	201,13	135.350.000	502,83	6,56	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	%	0	8.594.573.595	0	0	100	2.030.107.757	21,83	403.973.654	21,8	369.765.572	44,04	1.037.704.838	55,96	998.791.119	143,63	2.810.235.183	143,63	138,43	143,63	2.810.235.183	inf	32,70				
20	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	219.790.905	1	0	1	16.000.000	22,62	3.619.500	16,51	2.641.000	54	15.422.700	43,53	6.965.500	136,66	28.648.700	136,66	179,05	137,66	28.648.700	13.766,00	13,03	DINAS PSDA			
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0	0	1	5.000.000	50	2.500.000	48,9	2.445.000	50	2.500.000	50	2.500.000	198,9	9.945.000	19.890,00	198,90	198,9	9.945.000	inf	inf	DINAS PSDA			
22	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0	0	1	7.000.000	27,12	1.898.700	0		55,55	3.888.200	44,45	3.111.800	127,12	8.898.700	12.712,00	127,12	127,12	8.898.700	inf	inf	DINAS PSDA			
23	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.998.471.440	1	0	1	0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	1	0	100,00	0,00	DINAS PSDA			
24	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket			0	0	1	42.800.284	48,12	20.594.000	22,03	9.428.000	61,43	26.294.000	38,57	16.506.284	170,15	72.822.284	17.015,00	170,14	170,15	72.822.284	inf	inf	DINAS PSDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		[UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Disediakan																											
25	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	1	31.200.000	21.28	6.638.500	19.54	6.097.500	42.62	13.298.500	57.38	17.901.500	140.82	43.936.000	14.082,00	140,82	140.82	43.936.000	inf	inf	DINAS PSDA				
26	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	1	19.029.400	45.29	8.618.500	54.13	10.301.500	45.29	8.618.500	54.71	10.410.900	199.42	37.949.400	19.942,00	199,43	199.42	37.949.400	inf	inf	DINAS PSDA				
27	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.245.023.250	1	0	1	331.000.000	10.97	36.310.560	16.98	56.193.342	38.03	125.881.260	61.97	205.118.740	127.95	423.503.902	12.795,00	127,95	128.95	423.503.902	12.895,00	34,02	DINAS PSDA			
28	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	1	8.000.000	24.38	1.950.000	12.5	1.000.000	85.19	6.815.000	14.81	1.185.000	136.88	10.950.000	13.688,00	136,88	136.88	10.950.000	inf	inf	DINAS PSDA				
29	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	1	8.000.000	9.73	778.650	23.9	1.911.600	25.87	2.069.250	74.13	5.930.750	133.63	10.690.250	13.363,00	133,63	133.63	10.690.250	inf	inf	DINAS PSDA				
30	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	424.000.000	1	0	1	50.000.000	23.02	11.509.507	1.41	705.800	51.82	25.910.032	48.18	24.089.968	124.43	62.215.307	12.443,00	124,43	125.43	62.215.307	12.543,00	14,67	DINAS PSDA			
31	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0	0	2	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
32	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0	0	2	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
33	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	124.000.000	1	0	10	50.000.000	15.62	7.808.400	14.97	7.482.800	43.25	21.624.000	56.75	28.376.000	130.59	65.291.200	1.305,90	130,58	131.59	65.291.200	1.315,90	52,65	DINAS PSDA			
34	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	1	60.000.000	3	1.799.600	9.88	5.930.778	14.54	8.723.950	85.46	51.276.050	112.88	67.730.378	11.288,00	112,88	112.88	67.730.378	inf	inf	DINAS PSDA				
35	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0	15	98.480.000	16.92	16.659.400	34.79	34.264.450	49	48.259.900	51	50.220.100	151.71	149.403.850	1.011,40	151,71	151.71	149.403.850	inf	inf	DINAS PSDA				
36	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	400	4.463.288.000	400	0	50	961.574.000	24.08	231.536.137	20.1	193.283.902	58.81	565.543.756	41.19	396.030.244	144.18	1.386.394.039	288,36	144,18	544.18	1.386.394.039	136,05	31,06	DINAS PSDA			
37	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0	15	112.024.073	15.9	17.811.800	14.54	16.291.500	51.89	58.128.690	48.11	53.895.383	130.44	146.127.373	869,60	130,44	130.44	146.127.373	inf	inf	DINAS PSDA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I		II		III		IV							K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		[UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																														
38	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	120.000.000	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	5	0	100,00	0,00	DINAS PSDA						
39	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	230.000.000	14.76	33.940.400	9.47	21.788.400	45.53	104.727.100	54.47	125.272.900	124.23	285.728.800	12.423,00	124,23	124.23	285.728.800	inf	inf	DINAS PSDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan						
Predikat Kinerja																										-	-						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	100	813.640.000	0	0	0	0	0	99,02	805.640.000	99,02	805.640.000	99,02	99,02	99,02	805.640.000	inf	inf								
40	X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA						
41	X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	805.000.000	0	0	0	0	0	100	805.000.000	100	805.000.000	10.000,00	100,00	100	805.000.000	inf	inf	DINAS PSDA								
42	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA							
43	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	2	8.640.000	0	0	0	0	0	7,41	640.000	7,41	640.000	370,50	7,41	7,41	640.000	inf	inf	DINAS PSDA								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan						
Predikat Kinerja																										-	-						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	22.886.342.975	0	0	100	3.514.580.369	0	529.773.245	0	768.376.520	45,4	1.632.040.540	54,5	1.882.539.829	99,9	4.812.730.134	99,90	136,94	99,9	4.812.730.134	inf	21,03							
44	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	363.520.000	3	0	1	48.000.000	17,18	6.258.368	34	12.941.672	56,86	27.293.466	43,14	20.706.534	151,18	67.200.040	15,118,00	140,00	154,18	67.200.040	5.139,33	18,49	DINAS PSDA						
45	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0	1	1.500.000	0	0	33,33	500.000	66,67	1.000.000	100	1.500.000	10.000,00	100,00	100	1.500.000	inf	inf	DINAS PSDA									
46	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	10.000,00	100,00	100	1.000.000	inf	inf	DINAS PSDA									
47	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	6.668.185.000	3	0	1	536.500.000	19,92	148.207.336	13,23	90.970.666	51,98	278.888.546	48,02	257.611.454	133,15	775.678.002	13.315,00	144,58	136,15	775.678.002	4.538,33	11,63	DINAS PSDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
48	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0	1	92.743.020	0	0	46.23	42.879.326	53.77	49.863.694	100	92.743.020	10.000,00	100,00	100	92.743.020	inf	inf	DINAS PSDA							
49	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0	1	86.436.000	0	0	56.8	49.096.461	43.2	37.339.539	100	86.436.000	10.000,00	100,00	100	86.436.000	inf	inf	DINAS PSDA							
50	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	1.588.263.100	10	0	1	0	3.78	956.300	10.24	2.593.490	0	0	0	14.02	3.549.790	1.402,00	inf	24.02	3.549.790	240,20	0,22	DINAS PSDA					
51	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA							
52	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	1	25.319.400	0	0	36.36	9.205.900	63.64	16.113.500	100	25.319.400	10.000,00	100,00	100	25.319.400	inf	inf	DINAS PSDA							
53	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	1	647.700.000	0	0	45.45	294.352.469	54.55	353.347.531	100	647.700.000	10.000,00	100,00	100	647.700.000	inf	inf	DINAS PSDA							
54	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	1	522.174.780	0	0	41.47	216.525.156	58.53	305.649.624	100	522.174.780	10.000,00	100,00	100	522.174.780	inf	inf	DINAS PSDA							
55	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	14.266.374.875	3	0	1	1.553.207.169	16.12	374.351.241	25.76	661.870.692	45.92	713.299.216	54.08	839.907.953	141.88	2.589.429.102	14.188,00	166,71	144.88	2.589.429.102	4.829,33	18,15	DINAS PSDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	%	0	10.237.807.775	0	0	100	1.717.355.722	0	220.197.770	0	166.030.085	61.14	836.115.079	38.86	881.240.643	100	2.103.583.577	100,00	122,49	100	2.103.583.577	inf	20,55					
56	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	4.398.278.000	40	0	32	470.304.290	21.55	151.609.370	20.11	114.935.722	62.29	292.974.099	37.71	177.330.191	141.66	736.849.382	442,69	156,68	181.66	736.849.382	454,15	16,75	DINAS PSDA				
57	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	0	10	79.632.632	0	0	51.99	41.401.200	48.01	38.231.432	100	79.632.632	1.000,00	100,00	100	79.632.632	inf	inf	DINAS PSDA							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
												I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
58	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			0		0	6	66.655.000		0		0	72.56	48.367.018	27.44	18.287.982	100	66.655.000	1.666,67	100,00	100	66.655.000	inf	inf	DINAS PSDA			
59	X.XX.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit			0		0	3	170.000.000		0		0	80.5	136.850.000	19.5	33.150.000	100	170.000.000	3.333,33	100,00	100	170.000.000	inf	inf	DINAS PSDA			
60	X.XX.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit			0		0	1	45.187.100		0		0	52.98	23.942.150	47.02	21.244.950	100	45.187.100	10.000,00	100,00	100	45.187.100	inf	inf	DINAS PSDA			
61	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			0		0	7	10.000.000		0		0	99.96	9.996.250	0.04	3.750	100	10.000.000	1.428,57	100,00	100	10.000.000	inf	inf	DINAS PSDA			
62	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			0		0	4	12.730.000		0		0	89.07	11.338.600	10.93	1.391.400	100	12.730.000	2.500,00	100,00	100	12.730.000	inf	inf	DINAS PSDA			
63	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0		0	6	93.500.000		0		0	73.9	69.099.423	26.1	24.400.577	100	93.500.000	1.666,67	100,00	100	93.500.000	inf	inf	DINAS PSDA			
64	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	3.824.752.525	12	0	1	462.872.700	20.53	57.535.900	8.32	27.884.663	11.48	53.119.179	88.52	409.753.521	128.85	548.293.263	12.885,00	118,45	140.85	548.293.263	1.173,75	14,34	DINAS PSDA				
65	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0		0	2	80.000.000		0		0	96.76	77.410.000	3.24	2.590.000	100	80.000.000	5.000,00	100,00	100	80.000.000	inf	inf	DINAS PSDA			
66	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0		0	4	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
67	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	28	2.014.777.250	28	0	4	209.364.000	11.4	11.052.500	3.41	23.209.700	29.7	62.171.160	70.3	147.192.840	114.81	243.626.200	2.870,25	116,36	142.81	243.626.200	510,04	12,09	DINAS PSDA				
68	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit			0		0	3	5.590.000		0		0	78.71	4.400.000	21.29	1.190.000	100	5.590.000	3.333,33	100,00	100	5.590.000	inf	inf	DINAS PSDA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																											
69	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	3	11.520.000	0	0	43.8	5.046.000	56.2	6.474.000	100	11.520.000	3.333,33	100,00	100	11.520.000	inf	inf	DINAS PSDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0	0		106.346.342.022		11.193.304.214		18.067.595.934		54.379.281.040		48.694.970.182		132.335.151.370		124,44		132.335.151.370		inf					
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0	0		106.346.342.022		11.193.304.214		18.067.595.934		54.379.281.040		48.694.970.182		132.335.151.370		124,44		132.335.151.370		inf					
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	%		0	0	13.81	2.590.130.400		99.682.800		1.046.892.430	22.62	585.760.830	77.38	2.004.369.570	100	3.736.705.630	724,11	144,27	100	3.736.705.630	inf	inf					
1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	Orang	0	0	0	250	1.768.367.400	0	90.816.950	0	824.333.340	21.87	386.753.480	78.13	1.381.613.920	100	2.683.517.690	40,00	151,75	100	2.683.517.690	inf	inf					
1	1.03.11.1.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen		0	0	1	122.626.500	26.63	30.664.250	46.44	26.287.000	47.42	58.147.300	52.58	64.479.200	173.07	179.577.750	17.307,00	146,44	173.07	179.577.750	inf	inf	DINAS PSDA				
2	1.03.11.1.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Orang		0	0	50	328.288.300	4.4	14.350.000	38.34	111.525.650	34.99	114.872.500	65.01	213.415.800	142.74	454.163.950	285,48	138,34	142.74	454.163.950	inf	inf	DINAS PSDA				
3	1.03.11.1.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen		0	0	1	29.764.000	0.23	0	36.92	10.987.500	51.43	15.307.080	48.57	14.456.920	137.15	40.751.500	13.715,00	136,92	137.15	40.751.500	inf	inf	DINAS PSDA				
4	1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang		0	0	250	788.374.900	9.84	0	35.7	281.413.390	23.11	182.215.700	76.89	606.159.200	145.54	1.069.788.290	58,22	135,70	145.54	1.069.788.290	inf	inf	DINAS PSDA				
5	1.03.11.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen		0	0	1	102.007.000	30.92	31.402.700	89.12	59.505.000	0.28	282.000	99.72	101.725.000	220.04	192.914.700	22.004,00	189,12	220.04	192.914.700	inf	inf	DINAS PSDA				
6	1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang		0	0	250	223.891.500	0.13	0	92.55	207.214.000	2.51	5.621.000	97.49	218.270.500	192.68	431.105.500	77,07	192,55	192.68	431.105.500	inf	inf	DINAS PSDA				
7	1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang		0	0	50	144.889.500	25.12	14.400.000	86.33	110.690.300	0.49	715.000	99.51	144.174.500	211.45	269.979.800	422,90	186,33	211.45	269.979.800	inf	inf	DINAS PSDA				
8	1.03.11.1.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen		0	0	1	28.525.700	0	0	58.58	16.710.500	33.63	9.592.900	66.37	18.932.800	158.58	45.236.200	15.858,00	158,58	158.58	45.236.200	inf	inf	DINAS PSDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Terselenggaranya Sistim Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	Laporan	0	0	0	0	1	362.072.250	0	8.865.850	0	129.493.790	34.02	123.177.150	65.98	238.895.100	100	500.431.890	10.000,00	138,21	100	500.431.890	inf	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Cakupan Daerah Provinsi																													
9	1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan		0	0	1	71.073.750	1.91	0	65.84	46.794.100	25.55	18.161.250	74.45	52.912.500	167.75	117.867.850	16.775,00	165,84	167.75	117.867.850	inf	inf	DINAS PSDA					
10	1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen		0	0	1	33.450.000	0.27	0	0	9.330.000	2.44	816.000	97.56	32.634.000	100.27	42.780.000	10.027,00	127,89	100.27	42.780.000	inf	inf	DINAS PSDA					
11	1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang		0	0	50	150.136.500	22.41	8.865.850	27.04	31.729.500	46.26	69.460.000	53.74	80.676.500	149.45	190.731.850	298,90	127,04	149.45	190.731.850	inf	inf	DINAS PSDA					
12	1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen		0	0	1	107.412.000	1.43	0	38.77	41.640.190	32.34	34.739.900	67.66	72.672.100	140.2	149.052.190	14.020,00	138,77	140.2	149.052.190	inf	inf	DINAS PSDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kegiatan kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	0	0	0	0	1	459.690.750	0	0	0	93.065.300	16.5	75.830.200	83.5	383.860.550	100	552.756.050	10.000,00	120,25	100	552.756.050	inf	inf					
13	1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen		0	0	1	149.833.750	19.12	0	53.17	79.669.850	0.64	960.000	99.36	148.873.750	172.29	229.503.600	17.229,00	153,17	172.29	229.503.600	inf	inf	DINAS PSDA					
14	1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan		0	0	1	299.857.000	0.32	0	4.36	13.060.200	24.95	74.802.700	75.05	225.054.300	104.68	312.917.200	10.468,00	104,36	104.68	312.917.200	inf	inf	DINAS PSDA					
15	1.03.11.1.03.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Laporan		0	0	1	10.000.000	0	0	3.25	335.250	0.68	67.500	99.33	9.932.500	103.26	10.335.250	10.326,00	103,35	103.26	10.335.250	inf	inf	DINAS PSDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%		0	0	68.27	103.756.211.622	7.424.526.889			13.361.738.502	53.36	53.793.520.210	46.64	46.690.600.612	100	121.270.386.213	146,48	116,88	100	121.270.386.213	inf	inf						
			Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%				55.28					0		0		0		0,00		0		nan								
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	kab/kota	0	0	0	0	18	45.243.283.115	0	6.150.446.006	0	6.151.742.700	58.04	24.145.286.955	41.96	21.097.996.160	100	57.545.471.821	555,56	127,19	100	57.545.471.821	inf	inf					
1	1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen		0	0	0	16	1.940.000.000	0.22	4.315.900	3.13	60.667.040	31.84	617.789.380	68.16	1.322.210.620	103.35	2.004.982.940	645,94	103,35	103.35	2.004.982.940	inf	inf	DINAS PSDA				
2	1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit		0	0	0.65	8.103.665.758	14.27	1.156.339.511	30.52	2.473.618.722	43.21	3.501.990.235	56.79	4.601.675.523	144.79	11.733.623.991	22.275,38	144,79	144.79	11.733.623.991	inf	inf	DINAS PSDA					
3	1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM		0	0	2.82	19.365.435.513	16.07	3.026.759.598	12.67	2.538.845.266	59.7	11.561.653.655	40.3	7.803.781.858	128.74	24.931.040.377	4.565,25	128,74	128.74	24.931.040.377	inf	inf	DINAS PSDA					
4	1.03.02.1.01.16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA					

(1)	(2)	(3)	(4)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II			III	IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
5	1.03.02.1.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM		0	0	0.8	8.972.061.223	19.37	1.738.275.087	3.77	338.005.402	54.63	4.901.230.937	45.37	4.070.830.286	123.14	11.048.341.712	15.392,50	123,14	123.14	11.048.341.712	inf	inf	DINAS PSDA				
6	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		0	0	3	114.709.800		0		0	44.3	50.815.810	55.7	63.893.990	100	114.709.800	3.333,33	100,00	100	114.709.800	inf	inf	DINAS PSDA				
7	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		0	0	8	258.660.096		0		0	80.39	207.946.200	19.61	50.713.896	100	258.660.096	1.250,00	100,00	100	258.660.096	inf	inf	DINAS PSDA				
8	1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM		0	0	0.5	1.846.197.486	20.37	158.691.460	19.96	648.839.800	50.13	925.464.710	49.87	920.732.776	140.33	2.653.728.746	28.066,00	143,74	140.33	2.653.728.746	inf	inf	DINAS PSDA				
9	1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM		0	0	3	255.586.900		0		0	43.56	111.343.550	56.44	144.243.350	100	255.586.900	3.333,33	100,00	100	255.586.900	inf	inf	DINAS PSDA				
10	1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM		0	0	7.23	100.000.000		0		0	67.36	67.355.000	32.65	32.645.000	100.01	100.000.000	1.383,26	100,00	100.01	100.000.000	inf	inf	DINAS PSDA				
11	1.03.02.1.01.58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Check Dam yang Dipelihara	Unit		0	0	2	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA					
12	1.03.02.1.01.58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Check Dam yang Dipelihara	Unit		0	0	3	25.000.000		0		0	54.6	13.649.800	45.4	11.350.200	100	25.000.000	3.333,33	100,00	100	25.000.000	inf	inf	DINAS PSDA				
13	1.03.02.1.01.59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM		0	0	0.15	25.000.000		0		0	47.75	11.936.700	52.25	13.063.300	100	25.000.000	66.666,67	100,00	100	25.000.000	inf	inf	DINAS PSDA				
14	1.03.02.1.01.59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM		0	0	0.2	0		0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
15	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen		0	0	0	5	1.266.635.893		0		0	57.85	732.749.500	42.15	533.886.393	100	1.266.635.893	2.000,00	100,00	100	1.266.635.893	inf	inf	DINAS PSDA			
16	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen		0	0	0	3	941.085.500		0		0	68.13	641.183.080	31.87	299.902.420	100	941.085.500	3.333,33	100,00	100	941.085.500	inf	inf	DINAS PSDA			
17	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga		0	0	0	2	534.367.550	8.14	43.521.150	16.31	43.609.120	17.28	92.356.150	82.72	442.011.400	124.45	621.497.820	6.222,50	116,31	124.45	621.497.820	inf	inf	DINAS PSDA			
18	1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen		0	0	0	1	100.478.660	22.44	22.543.300	50.01	27.707.950	47.24	47.461.420	52.76	53.017.240	172.45	150.729.910	17.245,00	150,01	172.45	150.729.910	inf	inf	DINAS PSDA			
19	1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		0	0	0	2	709.886.720	0	0	2.88	20.449.400	49.92	354.356.344	50.08	355.530.376	102.88	730.336.120	5.144,00	102,88	102.88	730.336.120	inf	inf	DINAS PSDA			
20	1.03.02.1.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Sungai yang Dipelihara	KM		0	0	0	4.03	50.000.000		0		0	63.99	31.994.000	36.01	18.006.000	100	50.000.000	2.481,39	100,00	100	50.000.000	inf	inf	DINAS PSDA			
21	1.03.02.1.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Panjang Sungai yang Dipelihara	KM		0	0	0	2	634.512.016		0		0	43.18	274.010.484	56.82	360.501.532	100	634.512.016	5.000,00	100,00	100	634.512.016	inf	inf	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padaDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	D.I	0	0	0	0	65	58.512.928.507	0	1.274.080.883	0	7.209.995.802	51.86	29.648.233.255	48.14	25.592.604.452	100	63.724.914.392	153,85	108,91	100	63.724.914.392	inf	inf				
22	1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen		0	0	0	15	1.363.295.505	2.16	29.444.750	31.26	396.698.650	42.07	573.575.883	57.93	789.719.622	133.42	1.789.438.905	889,47	131,26	133.42	1.789.438.905	inf	inf	DINAS PSDA			
23	1.03.02.1.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
24	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		0	0	0	14.185	33.270.541.820	1.05	341.656.500	19.1	6.013.639.135	49.98	16.628.155.569	40.36	13.370.295.451	110.49	36.353.746.655	778,92	109,27	110.49	36.353.746.655	inf	inf	DINAS PSDA			
25	1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung		0	0	0	1	3.471.002.750	0.31	10.882.000	0.61	10.330.150	47.28	1.641.177.097	52.72	1.829.825.653	100.92	3.492.214.900	10.092,00	100,61	100.92	3.492.214.900	inf	inf	DINAS PSDA			
26	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		0	0	0	194	4.636.918.498		0		0	51.68	2.396.362.122	48.32	2.240.556.376	100	4.636.918.498	51,55	100,00	100	4.636.918.498	inf	inf	DINAS PSDA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
27	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		0		0	160	6.849.403.298		0		0	55.2	3.780.717.214	44.8	3.068.686.084	100	6.849.403.298	62,50	100,00	100	6.849.403.298	inf	inf	DINAS PSDA				
28	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung		0		0	40	2.465.033.268		0		0	51.08	1.259.170.526	48.92	1.205.862.742	100	2.465.033.268	250,00	100,00	100	2.465.033.268	inf	inf	DINAS PSDA				
29	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung		0		0	25	1.825.706.823		0		0	57.19	1.044.065.552	42.81	781.641.271	100	1.825.706.823	400,00	100,00	100	1.825.706.823	inf	inf	DINAS PSDA				
30	1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Unit		0		0	4	1.966.678.100		0		0	53.97	1.061.332.219	46.03	905.345.881	100	1.966.678.100	2.500,00	100,00	100	1.966.678.100	inf	inf	DINAS PSDA				
31	1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Unit		0		0	5	2.561.348.445		0		0	47.76	1.223.274.323	52.24	1.338.074.122	100	2.561.348.445	2.000,00	100,00	100	2.561.348.445	inf	inf	DINAS PSDA				
32	1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Unit		0		0	2	103.000.000	17.91	892.097.633	23.72	789.327.867	39.23	40.402.750	60.77	62.597.250	141.63	1.784.425.500	7.081,50	1.732,45	141.63	1.784.425.500	inf	inf	DINAS PSDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan					
Predikat Kinerja																									-	-					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			35.279.973.650		0		123.928.612.754		1.723.749.229		7.711.243.427		41.542.178.296	0		50.977.170.952		41,13		50.977.170.952		144,49						
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			35.160.131.750		0		8.210.816.345		1.450.057.411		4.036.121.627		6.316.249.664	0		11.802.428.702		143,74		11.802.428.702		33,57						
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			35.160.131.750		0		8.210.816.345		1.450.057.411		4.036.121.627		6.316.249.664	0		11.802.428.702		143,74		11.802.428.702		33,57						
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			35.160.131.750		0	0	8.210.816.345		1.357.337.291		4.007.439.277		6.316.249.664	0	0	11.681.026.232	nan	142,26	0	11.681.026.232	nan	33,22						
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	665.003.750	0	0	0	156.458.750	0	17.722.900	0	54.549.900	0	96.834.900	0	0	169.107.700	nan	108,08	0	169.107.700	nan	25,43						
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	248.373.750	22	0	4	57.843.750	6	14.362.900	6	32.933.900	6	36.074.900	0	18	83.371.700	450,00	144,13	40	83.371.700	166,67	33,57	DISPERKIMTAN				
2	X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
3	X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
4	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
5	X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
6	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	416.630.000	6	0	3	98.615.000	4.5	3.360.000	4.5	21.616.000	4.5	60.760.000	0	13.5	85.736.000	450,00	86,94	19.5	85.736.000	108,33	20,58	DISPERKIMTAN				
7	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Peranakot Daerah			0	27.103.279.085	0	0	0	6.583.321.479	0	1.094.599.762	0	3.138.314.921	0	5.001.434.293	0	0	9.234.348.976	nan	140,27	0	9.234.348.976	nan	34,07					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
8	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	75	25.076.753.085		0	58	6.129.063.479	18,75	1.032.839.762	18,75	2.934.800.921	18,75	4.706.270.543	0	56,25	8.673.911.226	96,98	141,52	56,25	8.673.911.226	75,00	34,59	DISPERKIMTAN				
9	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	1.816.406.000	24	0	1	434.233.000	18	61.260.000	18	200.014.000	18	287.464.000	0	54	548.738.000	5.400,00	126,37	78	548.738.000	108,33	30,21	DISPERKIMTAN				
10	X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	108	210.120.000	36	0	18	20.025.000	27	500.000	27	3.500.000	27	7.699.750	0	81	11.699.750	450,00	58,43	117	11.699.750	108,33	5,57	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							29,17	7,04						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi barang milik daerah	Bulan	0	352.630.000	0	0	12	94.997.500	0	39.255.000	0	67.420.000	0	80.728.500	0	0	0	187.403.500	0,00	197,27	0	187.403.500	nan	53,14				
11	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	352.630.000	2	0	1	94.997.500	1,5	39.255.000	1,5	67.420.000	1,5	80.728.500	0	4,5	187.403.500	450,00	197,27	6,5	187.403.500	108,33	53,14	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							9,85	4,83						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	0	552.974.950	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00					
12	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	163.750.000	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	0	33,33	0,00	DISPERKIMTAN				
13	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	57	215.576.850	20	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	20	0	35,09	0,00	DISPERKIMTAN				
14	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	173.648.100	24	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	24	0	34,29	0,00	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							7,34	0,00						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	3.257.797.989	0	0	0	619.470.664	0	121.805.589	0	385.271.926	0	593.102.201	0	0	0	1.100.179.716	nan	177,60	0	1.100.179.716	nan	33,77				
15	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	39.743.500	2	0	1	8.100.900	1,5	1.892.500	1,5	3.878.500	1,5	7.282.000	0	4,5	13.053.000	450,00	161,13	6,5	13.053.000	108,33	32,84	DISPERKIMTAN				
16	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	200.501.960	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	0	33,33	0,00	DISPERKIMTAN				
17	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	500.073.800	2	0	1	90.636.300	1,5	19.360.120	1,5	63.482.640	1,5	86.560.830	0	4,5	169.403.590	450,00	186,90	6,5	169.403.590	108,33	33,88	DISPERKIMTAN				
18	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	6	276.990.464	2	0	1	50.052.464	1,5	11.550.610	1,5	23.793.910	1,5	45.882.910	0	4,5	81.227.430	450,00	162,28	6,5	81.227.430	108,33	29,32	DISPERKIMTAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Penggandaan yang Disediakan																											
19	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	51.062.000	16	0	96	12.420.000	12	1.590.000	12	4.770.000	12	7.110.000	0	36	13.470.000	37,50	108,45	52	13.470.000	108,33	26,38	DISPERKIMTAN				
20	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2.189.426.265	2	0	1	458.261.000	1.25	87.412.359	1.25	289.346.876	1.25	446.266.461	0	3.75	823.025.696	375,00	179,60	5.75	823.025.696	115,00	37,59	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							29,08	8,00						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.889.315.226	0	0	0	500.467.952	0	72.743.040	0	213.517.310	0	322.381.600	0	0	608.641.950	nan	121,61	0	608.641.950	nan	32,21					
21	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	30.000.000	2	0	1	5.300.000	1.5	1.500.000	1.5	2.500.000	1.5	4.500.000	0	4.5	8.500.000	450,00	160,38	6.5	8.500.000	108,33	28,33	DISPERKIMTAN				
22	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1.859.315.226	2	0	1	495.167.952	1.5	71.243.040	1.5	211.017.310	1.5	317.881.600	0	4.5	600.141.950	450,00	121,20	6.5	600.141.950	108,33	32,28	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							9,85	2,76						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.339.130.750	0	0	0	256.100.000	0	11.211.000	0	148.365.220	0	221.768.170	0	0	381.344.390	nan	148,90	0	381.344.390	nan	28,48					
23	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	45	1.179.330.750	18	0	8	220.600.000	0	0	15	131.271.220	15	192.353.170	0	30	323.624.390	375,00	146,70	48	323.624.390	106,67	27,44	DISPERKIMTAN				
24	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	330	159.800.000	110	0	55	35.500.000	85.5	11.211.000	85.5	17.094.000	85.5	29.415.000	0	256.5	57.720.000	466,36	162,59	366.5	57.720.000	111,06	36,12	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							9,07	2,65						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				119.841.900		0		115.534.576.859		229.820.818		3.610.492.900		35.112.584.832	0		38.952.898.550		33,72		38.952.898.550		32.503,57					
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				119.841.900		0		115.534.576.859		229.820.818		3.610.492.900		35.112.584.832	0		38.952.898.550		33,72		38.952.898.550		32.503,57					
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				119.841.900		0	0	99.991.700		14.673.385		17.999.185		97.047.481	0	0	129.720.051	nan	129,73	0	129.720.051	nan	108,24					
1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			0		0	0	0	99.991.700	0	14.673.385	0	17.999.185	0	97.047.481	0	0	129.720.051	nan	129,73	0	129.720.051	nan	inf					
1	1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen			0		0	99.991.700	0	14.673.385	0	17.999.185	0	97.047.481	0	0	129.720.051	0,00	129,73	0	129.720.051	nan	inf	DISPERKIMTAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
2	1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen		0		0	1		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			0	119.841.900	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00					
3	1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang		119.841.900	0	100		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	DISPERKIMTAN				
4	1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang		0		0	60		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
5	1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang		0		0	60		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			0		0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan					
6	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen		0		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	1.04.03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				0		0	0	1.399.915.300		15.149.000		34.965.000		523.926.722		0	0	574.040.722	nan	41,01	0	574.040.722	nan	inf				
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			0		0	0	0	99.915.300	0	7.382.000	0	20.803.000	0	40.415.296	0	0	0	68.600.296	nan	68,66	0	68.600.296	nan	inf				
1	1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen		0		0	1	99.915.300	0	7.382.000	0	20.803.000	0	40.415.296		0	0	68.600.296	0,00	68,66	0	68.600.296	nan	inf	DISPERKIMTAN			
2	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan		0		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISPERKIMTAN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
										I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			0		0	0	0	0	1.300.000.000	0	7.767.000	0	14.162.000	0	483.511.426	0	0	0	505.440.426	nan	38,88	0	505.440.426	nan	inf				
3	1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen			0		0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
4	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah			0		0	100	1.300.000.000	0	7.767.000	0	14.162.000	0	483.511.426	0	0	0	505.440.426	0,00	38,88	0	505.440.426	nan	inf	DISPERKIMTAN			
5	1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha			0		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)					0		0	0	114.034.669.859		199.998.433		3.557.528.715		34.491.610.629		0	0	38.249.137.777	nan	33,54	0	38.249.137.777	nan	inf				
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			0		0	0	0	0	114.034.669.859	0	199.998.433	0	3.557.528.715	0	34.491.610.629	0	0	0	38.249.137.777	nan	33,54	0	38.249.137.777	nan	inf				
1	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen			0		0	0	5.240.249.650	0	172.986.706	0	1.525.889.511	0	4.967.059.855	0	0	0	6.665.936.072	nan	127,21	0	6.665.936.072	nan	inf	DISPERKIMTAN			
2	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase Jumlah Pembangunan dan Peningkatan PSU	Kawasan			0		0	19	108.794.420.209	0	27.011.727	0	2.031.639.204	0	29.524.550.774	0	0	0	31.583.201.705	0,00	29,03	0	31.583.201.705	nan	inf	DISPERKIMTAN			
3	1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan			0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK					0		0		183.219.550		43.871.000		64.628.900		113.343.800		0		221.843.700		121,08		221.843.700		inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																														
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				0		0		183.219.550		43.871.000		64.628.900		113.343.800		0		221.843.700		121,08		221.843.700		inf																						
	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM					0		0	0		41.585.850		8.706.250		11.728.850		25.908.050		0	0		46.343.150	nan	111,44	0	46.343.150	nan	inf																			
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			0		0	0	0	0		41.585.850	0	8.706.250	0	11.728.850	0	25.908.050	0	0	0		46.343.150	nan	111,44	0	46.343.150	nan	inf																			
1	2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen			0		0	0		41.585.850	0	8.706.250	0	11.728.850	0	25.908.050	0	0		46.343.150	nan	111,44	0	46.343.150	nan	inf	DISPERKIMTAN																			
			Laporan hasil kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terlaksana	Laporan						1			0		0		0				0,00		0		nan		DISPERKIMTAN																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																
Predikat Kinerja																																																
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAHGARAPAN					0		0	0		79.999.800		25.377.250		34.044.250		50.391.950		0	0		109.813.450	nan	137,27	0	109.813.450	nan	inf																			
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0		0	0	0	0		79.999.800	0	25.377.250	0	34.044.250	0	50.391.950	0	0	0		109.813.450	nan	137,27	0	109.813.450	nan	inf																			
1	2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen			0		0	0		40.000.000	0	17.864.000	0	19.970.500	0	30.383.800	0	0		68.218.300	nan	170,55	0	68.218.300	nan	inf	DISPERKIMTAN																			
			Laporan hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	Laporan						1			0		0		0			0		0,00		0		nan		DISPERKIMTAN																				
2	2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara			0		0	0		39.999.800	0	7.513.250	0	14.073.750	0	20.008.150	0	0		41.595.150	nan	103,99	0	41.595.150	nan	inf	DISPERKIMTAN																			
			Laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana	Laporan						1			0		0		0			0		0,00		0		nan		DISPERKIMTAN																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
Predikat Kinerja																							-	-						
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				0		0	0		39.999.950		8.719.000		13.985.000		24.967.800		0	0	47.671.800	nan	119,18	0	47.671.800	nan	inf			
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			0		0	0	0	0	39.999.950	0	8.719.000	0	13.985.000	0	24.967.800	0	0	0	47.671.800	nan	119,18	0	47.671.800	nan	inf			
1	2.10.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang terlaksana	Laporan			0		0	1	39.999.950	0	8.719.000	0	13.985.000	0	24.967.800	0	0	0	47.671.800	0,00	119,18	0	47.671.800	nan	inf	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUMDAN TANAH ABSENTEE				0		0	0		21.633.950		1.068.500		4.870.800		12.076.000		0	0	18.015.300	nan	83,27	0	18.015.300	nan	inf			
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0		0	0	0	0	21.633.950	0	1.068.500	0	4.870.800	0	12.076.000	0	0	0	18.015.300	nan	83,27	0	18.015.300	nan	inf			
1	2.10.06.1.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan hasil Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan			0		0	1	21.633.950	0	1.068.500	0	4.870.800	0	12.076.000	0	0	0	18.015.300	0,00	83,27	0	18.015.300	nan	inf	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				0		0	0		0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan			
	2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan			
1	2.10.07.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
			Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERKIMTAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
								I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Predikat Kinerja																								
																	-	-						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				0	0		14.066.024.466		2.609.913.292		5.035.959.567	0	0		7.645.872.859		54,36		7.645.872.859		inf					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0	0		10.418.334.961		1.909.317.125		4.005.881.416	0	0		5.915.198.541		56,78		5.915.198.541		inf					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0	0		10.418.334.961		1.909.317.125		4.005.881.416	0	0		5.915.198.541		56,78		5.915.198.541		inf					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0	0	100	10.418.334.961		1.909.317.125		4.005.881.416	0	0	0	5.915.198.541	0,00	56,78	0	5.915.198.541	nan	inf					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	0	0	0	87	200.000.000	0	82.327.900	0	19.750.000	0	0	0	102.077.900	0,00	51,04	0	102.077.900	nan	inf				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0	0	2	95.000.000	0	29.971.000	1	7.550.000	0	0	1	37.521.000	50,00	39,50	1	37.521.000	inf	inf	SATPOL PP				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP					
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0	0	5	105.000.000	2	52.356.900	0	12.200.000	0	0	2	64.556.900	40,00	61,48	2	64.556.900	inf	inf	SATPOL PP				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	0	0	0	100	8.307.550.218	0	1.485.449.389	0	3.464.478.953	0	0	0	4.949.928.342	0,00	59,58	0	4.949.928.342	nan	inf				
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang		0	0	77	8.157.069.318	77	1.454.727.389	77	3.436.281.953	0	0	154	4.891.009.342	200,00	59,96	154	4.891.009.342	inf	inf	SATPOL PP				
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0	0	0	117.660.000		26.775.000		26.775.000	0	0	0	53.550.000	nan	45,51	0	53.550.000	nan	inf	SATPOL PP				
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang				8		7		7				14		175,00	14		inf	SATPOL PP						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					K	Rp	K	Rp			I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen		0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	14	32.820.900	4	3.947.000	0	1.422.000	0	0	4	5.369.000	28,57	16,36	4	5.369.000	inf	inf	SATPOL PP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	0	0	0	100	78.554.100	0	1.943.000	0	1.089.000	0	0	0	0	3.032.000	0,00	3,86	0	3.032.000	nan	inf					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMd Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP					
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	0	53.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP					
			Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						
			Jumlah Closed-Circuit Television (CCTV) yang dipasang	Unit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						
			Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						
			Jumlah dokumen pengamanan Hukum	Dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						
			Jumlah tanah yang bersertifikat	Persil				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						
			Jumlah tanda kepemilikan tanah	Unit/Set				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						
			Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas)	Unit/Set				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						
			Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	Unit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0	0	1	9.826.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP			
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP			
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Dokumen		0	0	1	14.967.600	0	1.943.000	0	1.089.000	0	0	0	3.032.000	0,00	20,26	0	3.032.000	nan	inf	SATPOL PP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	39.004.000	0	22.270.582	0	0	0	0	0	22.270.582	0,00	57,10	0	22.270.582	nan	inf			
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP			
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP			
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Dokumen				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		SATPOL PP				
18	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0	0	0	39.004.000		22.270.582		0	0	0	0	22.270.582	nan	57,10	0	22.270.582	nan	inf	SATPOL PP			
			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang				15		5	0				5		33,33		5		inf		SATPOL PP				
			Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Orang				0	0	0	0				0		nan		0		nan		SATPOL PP				
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	Orang		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali				1	0	0	0				0		0,00		0		nan		SATPOL PP				
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kali		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	821.285.062	0	185.588.015	0	251.957.649	0	0	0	437.545.664	0,00	53,28	0	437.545.664	nan	inf			
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	0	3.170.100		0		3.170.100	0	0	0	3.170.100	nan	100,00	0	3.170.100	nan	inf	SATPOL PP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit					150		0		150				150		100,00		150		inf		SATPOL PP					
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit		0		0	10		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
23	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit		0		0	15		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
24	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	37.604.700		5.118.400		9.472.200		0	0	0	14.590.600	nan	38,80	0	14.590.600	nan	inf	SATPOL PP				
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit					382		95		96				191		50,00		191		inf		SATPOL PP					
25	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	24.004.000		7.999.800		7.999.000		0	0	0	15.998.800	nan	66,65	0	15.998.800	nan	inf	SATPOL PP				
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Unit					326		81		81				162		49,69		162		inf		SATPOL PP					
26	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis		0		0	4		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
27	X.XX.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Unit		0		0	10		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
28	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Orang		0		0	10		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
29	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen		0		0	12	756.506.262	3	172.469.815	3	231.316.349		0	0	6	403.786.164	50,00	53,38	6	403.786.164	inf	inf	SATPOL PP				
30	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis perangkat Daerah yang dikelola	Arsip		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
31	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	Orang		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	79		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan						
32	X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	Unit		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					
33	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Unit		0		0	10		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
34	X.XX.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor	unit		0		0	10		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
35	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit		0		0	20		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
36	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya baru	Unit		0		0	20		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
37	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	Unit		0		0	1		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
38	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	Unit		0		0	1		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
39	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit		0		0	1		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	100	718.461.581	0	120.108.489	0	213.494.264	0	0	0	0	333.602.753	0,00	46,43	0	333.602.753	nan	inf				
40	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Surat		0		0	1000	4.000.000	250	1.325.000	250	1.325.000	0	0	500	2.650.000	50,00	66,25	500	2.650.000	inf	inf	SATPOL PP				
41	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	0	105.363.159		21.505.853		20.306.362	0	0	0	41.812.215	nan	39,68	0	41.812.215	nan	inf	SATPOL PP				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					15		0		0				0		0,00		0		nan		SATPOL PP				
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Rekening					2		1		1				2		100,00		2		inf		SATPOL PP				
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik					0		0		0				0		nan		0		nan		SATPOL PP				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA					16500		16500		16500				33000		200,00		33000		inf		SATPOL PP				
42	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		0		0	10		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
43	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang		0		0	16	609.098.422	16	97.277.636	16	191.862.902	0	0	32	289.140.538	200,00	47,47	32	289.140.538	inf	inf	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	0	0	0	0	79	253.480.000	0	11.629.750	0	55.111.550	0	0	0	0	66.741.300	0,00	26,33	0	66.741.300	nan	inf				
44	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit		0		0	1	41.190.000	1	460.000	1	11.617.500	0	0	2	12.077.500	200,00	29,32	2	12.077.500	inf	inf	SATPOL PP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																												
45	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit		0		0	14	183.040.000	14	10.559.750	14	23.009.050	0	0	0	28	33.568.800	200,00	18,34	28	33.568.800	inf	inf	SATPOL PP				
46	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Unit		0		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
47	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Unit		0		0	25	16.850.000	1	610.000	6	8.085.000	0	0	0	7	8.695.000	28,00	51,60	7	8.695.000	inf	inf	SATPOL PP				
48	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	Unit		0		0	1	12.400.000	0	0	1	12.400.000	0	0	0	1	12.400.000	100,00	100,00	1	12.400.000	inf	inf	SATPOL PP				
49	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
50	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang pelihara/direhab	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
51	X.XX.01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang dipelihara/direhab	Persil		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan										
Predikat Kinerja																			-	-										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		3.647.689.505		700.596.167		1.030.078.151		0	0		1.730.674.318		47,45		1.730.674.318		inf					
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0		0		3.647.689.505		700.596.167		1.030.078.151		0	0		1.730.674.318		47,45		1.730.674.318		inf					
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Tranitibus yang dapat ditindaklanjuti	%		0		0	81	3.582.329.343		680.546.689		1.015.955.551		0	0	0	1.696.502.240	0,00	47,36	0	1.696.502.240	nan	inf					
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%					79								0		0,00		0		nan							
1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditangani	%	0	0	0	0	22	3.290.456.163	0	606.002.189	0	953.958.851	0	0	0	0	1.559.961.040	0,00	47,41	0	1.559.961.040	nan	inf					
1	1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan	Kasus		0		0	0	2.686.606.163		392.917.389		865.746.576		0	0	0	1.258.663.965	nan	46,85	0	1.258.663.965	nan	inf	SATPOL PP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan						15		3		7				10		66,67		10		inf		SATPOL PP						
			Jumlah jasa tenaga pengaman	Orang					51		51		51				102		200,00		102		inf		SATPOL PP						
			Jumlah patroli yang dilakukan	Kali					15		5		1				6		40,00		6		inf		SATPOL PP						
			Jumlah pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan	Kali					5		0		0				0		0,00		0		nan		SATPOL PP						
			Jumlah pengamanan dan pengawasan yang dilakukan	Kali					245		28		35				63		25,71		63		inf		SATPOL PP						
2	1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus		0	0	0	148.000.000		39.429.500		24.475.275		0	0	0	63.904.775	nan	43,18	0	63.904.775	nan	inf		SATPOL PP					
			Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat ditertibkan	Kab/kota					4		4		2				6		150,00		6		inf		SATPOL PP						
			Persentase unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dapat ditangani	%					100		1		6				7		7,00		7		inf		SATPOL PP						
3	1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah gelar pasukan Satpol PP, Satlinmas dan Damkar yang dilaksanakan	Kali		0	0	1	250.000.000		127.790.100		1.906.250		0	0	1	129.696.350	100,00	51,88	1	129.696.350	inf	inf		SATPOL PP					
			Jumlah kabupaten/kota yang dikoordinasikan dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab/Kota					19		5		2				7		36,84		7		inf		SATPOL PP						
4	1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		0	0	0	65.350.000		12.507.000		17.523.000		0	0	0	30.030.000	nan	45,95	0	30.030.000	nan	inf		SATPOL PP					
			Jumlah kabupaten/kota yang dapat dilakukan	Kab/Kota					18		3		5				8		44,44		8		inf		SATPOL PP						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I		II														III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
			pemberdayaan perlindungan masyarakat																																										
5	1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sosialisasi	orang		0		0	30	85.500.000	0	18.859.700	30	33.333.550	0	0	30	52.193.250	100,00	61,04	30	52.193.250	inf	inf	SATPOL PP																				
			Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sosialisasi	Orang					0		0		0			0		nan		0		nan		SATPOL PP																					
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang					0		0		30			30		inf		30		inf		SATPOL PP																					
6	1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan yang dilaksanakan	Kali		0		0	5	50.000.000	3	14.498.500	4	10.974.200	0	0	7	25.472.700	140,00	50,95	7	25.472.700	inf	inf	SATPOL PP																				
			Jumlah naskah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan yang disusun	Naskah					1		0		0			0		0,00		0		nan		SATPOL PP																					
7	1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang diadakan dan dipelihara	Unit		0		0	10	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP																				
8	1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang disusun.	Berkas		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP																				
9	1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat disediakan	%		0		0	100	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	SATPOL PP																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	0	0	0	0	0	79	161.873.180	0	42.952.500	0	42.604.700	0	0	0	85.557.200	0,00	52,85	0	85.557.200	nan	inf																				
10	1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	Laporan		0		0	0	25.000.000		15.048.000		8.666.000	0	0	0	23.714.000	nan	94,86	0	23.714.000	nan	inf	SATPOL PP																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Daerah dan Peraturan Gubernur																										
			Jumlah pemantauan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kali					8		5		3				8		100,00		8		inf		SATPOL PP				
11	1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kali		0		0	12	136.873.180	3	27.904.500	5	33.938.700	0	0	8	61.843.200	66,67	45,18	8	61.843.200	inf	inf	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat dibina	%	0	0	0	0	40	130.000.000	0	31.592.000	0	19.392.000	0	0	0	0	50.984.000	0,00	39,22	0	50.984.000	nan	inf				
12	1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi	Orang		0		0	50	80.000.000	5	23.603.500	2	5.096.200	0	0	7	28.699.700	14,00	35,87	7	28.699.700	inf	inf	SATPOL PP				
13	1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah rapat atau pertemuan para PPNS yang dilaksanakan	kali		0		0	1	50.000.000	0	7.988.500	0	14.295.800	0	0	0	22.284.300	0,00	44,57	0	22.284.300	nan	inf	SATPOL PP				
			Jumlah tindakan yang dilakukan PPNS dalam memproses pelanggaran Perda/Perkada	kali					1		0		0				0		0,00		0		nan		SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%		0		0	52.63	65.360.162		20.049.478		14.122.600	0	0	0	34.172.078	0,00	52,28	0	34.172.078	nan	inf					
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase pemetaan rawan bencana kebakaran kabupaten/kota yang dapat disusun	%	0	0	0	0	30	65.360.162	0	20.049.478	0	14.122.600	0	0	0	34.172.078	0,00	52,28	0	34.172.078	nan	inf					
1	1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen		0		0	0	65.360.162		20.049.478		14.122.600	0	0	0	34.172.078	nan	52,28	0	34.172.078	nan	inf	SATPOL PP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Jumlah Informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang disediakan dan dimutakhirkan	Dokumen					1		0		0				0		0,00		0		nan							
2	1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina	orang		0		0	60	0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
3	1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang diadakan	unit		0		0	5	0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
4	1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	kali		0		0	1	0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP				
5	1.05.04.1.01.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen		0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP			
			Jumlah sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dilaksanakan	kali					1	0	0		0	0				0	0,00		0		nan		SATPOL PP					
6	1.05.04.1.01.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan yang disajikan	Dokumen		0		0	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan,	Persentase kabupaten/kota yang dibina dan diawasi dalam pencegahan, penanggulangan,	%	0	0	0	0	20	0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	penyelamatan kebakaran dan penyelematan non kebakaran																											
7	1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran	kali		0		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	SATPOL PP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong											
								I		II		III		IV																				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		DINAS SOSIAL				144.708.472.801		65.525.071.263		108.444.374.746		17.007.549.605		35.548.406.661		27.805.712.473		110.852.568.123		191.214.236.862		176,32		256.739.308.125		177,42								
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				31.261.122.805		29.279.362.924		36.547.209.359		5.037.037.995		12.004.061.917		9.677.497.643		43.391.177.756		70.109.775.311		191,83		99.389.138.235		317,93								
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				31.261.122.805		29.279.362.924		36.547.209.359		5.037.037.995		12.004.061.917		9.677.497.643		43.391.177.756		70.109.775.311		191,83		99.389.138.235		317,93								
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		31.218.878.555		29.255.544.924		100		36.547.209.359		5.037.037.995		12.004.061.917		9.677.497.643	95	43.391.177.756	95	70.109.775.311	95,00	191,83	95	99.365.320.235	inf	318,29	-					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen						100								95		95		95,00		95		inf		-						
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja	Kegiatan	0	399.095.000	0	514.791.721	1	352.475.300	0	66.025.000	0	101.189.856	0	55.524.800	2	221.017.724	2	443.757.380	200,00	125,90	2	958.549.101	inf	240,18	-	-	-					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (Forum Dinas Sosial Kab/Kota)	kegiatan		180.985.000		219.811.651	2	160.441.450	1	54.395.000	0	25.588.680	0	22.242.800	0	32.189.759	1	134.416.239	50,00	83,78	1	354.227.890	inf	195,72	DINSOS	-	-	-				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		0		2		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada					
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD , Pergeseran DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		100.700.000		54.003.850	5		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		54.003.850	nan	53,63	DINSOS	-	-	-				
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP,LPDP dan LKfJ)	Laporan		25.000.000		164.045.700	3	192.033.850	3	11.630.000	0	75.601.176	0	33.282.000	1	188.827.965	4	309.341.141	133,33	161,09	4	473.386.841	inf	1.893,55	DINSOS	-	-	-				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	92.410.000	0	76.930.520	4		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		76.930.520	0,00	83,25	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	0	19.810.096.141	0	19.709.410.010	1	21.807.727.820	0	3.251.362.897	0	8.180.817.118	0	4.795.514.358	1	19.857.875.045	1	36.085.569.418	100,00	165,47	1	55.794.979.428	inf	281,65	-	-	-					
			Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kegiatan	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		-	-	-					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan		19.078.412.441		18.954.821.910	208	21.110.204.620	208	3.076.669.297	0	8.040.960.218	0	4.619.964.358	180	19.217.715.296	388	34.955.309.169	186,54	165,58	388	53.910.131.079	inf	282,57	DINSOS	-	-	-				
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang			0		5	40.620.000	3	10.155.000	0	10.155.000	0	10.155.000	0	36.558.000	3	67.023.000	60,00	165,00	3	67.023.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-				
7	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang			0		5	40.620.000	3	10.155.000	0	10.155.000	3	10.155.000	0	36.558.000	6	67.023.000	120,00	165,00	6	67.023.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINSOS	-	-	-							
8	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicincin]	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	Orang			0		4	46.710.000	3	8.285.000	0	15.370.000	0	11.527.500	0	42.039.000	3	77.221.500	75,00	165,32	3	77.221.500	inf	inf	DINSOS	-	-	-				
9	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Penerima Honorarium	Orang			0		4	40.620.000	3	6.770.000	0	13.540.000	0	10.155.000	0	36.558.000	3	67.023.000	75,00	165,00	3	67.023.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-				
10	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang			0		4	41.220.000	3	7.370.000	0	13.540.000	0	10.155.000	0	37.098.000	3	68.163.000	75,00	165,36	3	68.163.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I		II		III		IV																																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
11	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Aset Daerah)	orang		0		0	4	40.620.000	3	5.060.000	0	11.830.000	0	10.155.000	0	36.558.000	3	63.603.000	75,00	156,58	3	63.603.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-																					
12	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	0	40.620.000	3	6.770.000	0	13.540.000	0	10.155.000	0	36.558.000	3	67.023.000	inf	165,00	3	67.023.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-																					
13	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		593.880.000		684.592.500	18	252.140.000	18	100.865.000	0	19.215.000	0	58.745.000	0	220.806.000	18	399.631.000	100,00	158,50	18	1.084.223.500	inf	182,57	DINSOS	-	-	-																					
14	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	4	46.110.000	3	7.685.000	0	15.370.000	0	11.527.500	0	41.499.000	3	76.081.500	75,00	165,00	3	76.081.500	inf	inf	DINSOS	-	-	-																					
15	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	6.275.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada																					
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	220	0		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada																						
16	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	131.528.100	0	69.995.600	0	108.243.200	0	11.578.600	0	17.141.900	0	32.820.000	0	115.927.749	0	177.468.249	nan	163,95	0	247.463.849	nan	188,15	DINSOS	-	-	-																					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	Dokumen	17	0		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	118.000.000	0	114.477.204	0	83.540.600	0	8.380.000	0	3.420.000	0	29.720.924	0	60.066.540	0	101.587.464	nan	121,60	0	216.064.668	nan	183,11		-	-	-																					
17	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	72.400.000	0	114.477.204	8	48.027.500	1	8.380.000	1	3.420.000	4	23.925.924	0	43.224.750	6	78.950.674	75,00	164,39	6	193.427.878	75,00	267,17	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada																					
18	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	45.600.000	0	0	8	35.513.100	0	0	0	0	1	5.795.000	0	16.841.790	1	22.636.790	12,50	63,74	1	22.636.790	12,50	49,64	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Kegiatan	0	439.750.000	0	221.231.450	1	205.337.500	0	94.390.334	0	61.482.100	0	15.080.000	0	184.353.750	0	355.306.184	0,00	173,04	0	576.537.634	nan	131,11		-	-	-																					
			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kegiatan	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	nan			-	-	-																						
19	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan berupa 20 stel pakaian dinas	stell		0		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-																						
20	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-																						
21	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0		0	11	6.600.000	0	0	9	5.400.000	0	0	0	5.940.000	9	11.340.000	81,82	171,82	9	11.340.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-																					
22	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0		0	14	7.800.000	0	0	13	7.800.000	0	0	0	7.020.000	13	14.820.000	92,86	190,00	13	14.820.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-																					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
23	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0		0	14	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-
				stel					11		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	--	-	-
				stel					11		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-
				stel					11		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-
				Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-
				Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-
24	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Pakaian Olahraga)	stel		0		0	28	14.000.000	0		0	27	13.500.000	0	0	12.150.000	27	25.650.000	96,43	183,21	27	25.650.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-
25	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan di sediakan	Stel	95	153.750.000	0	138.724.000	95	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	138.724.000	0,00	90,23	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
26	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0		0	11	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-
27	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicincin]	Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	Stel		0		0	23	19.300.000	23	19.300.000	0	0		0	0	17.370.000	23	36.670.000	100,00	190,00	23	36.670.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah Pakaian KOPRI yang disediakan	Stel					13		13		0		0		0		13		100,00		13		inf		DINSOS	-	-	-
28	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	40	147.700.000	0	82.507.450	40	56.000.000	0	0	15	20.968.600	11	15.080.000	0	57.119.517	26	93.168.117	65,00	166,37	26	175.675.567	65,00	118,94	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
29	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	52	102.300.000	0	0	52	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
30	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	36.000.000	0	0	50	101.637.500	37	75.090.334	7	13.813.500	0	0	0	84.754.233	44	173.658.067	88,00	170,86	44	173.658.067	880,00	482,38	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan			
Predikat Kinerja																										-	-			
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	0	2.572.836.042	0	2.050.935.184	1	3.377.122.773	0	436.734.932	0	1.185.338.246	0	906.087.942	0	3.702.641.310	0	6.230.802.430	0,00	184,50	0	8.281.737.614	nan	321,89		-	-	-
31	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	buah		0		0	485	21.902.000	182	8.215.000	113	5.103.000	94	4.260.000	0	19.711.800	389	37.289.800	80,21	170,26	389	37.289.800	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	unit					30		11		7		6		0		24		80,00		24		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	meter					75		28		17		15		0		60		80,00		60		inf		DINSOS	-	-	-
32	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicincin]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan	Buah		0		0	420	20.922.400	105	5.230.600	105	5.320.600	105	5.230.600	0	18.830.160	315	34.611.960	75,00	165,43	315	34.611.960	inf	inf	DINSOS	-	-	-
33	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	roll		0		0	2	8.237.600	0	1.884.000	1	2.840.000	1	1.750.000	0	7.413.840	2	13.887.840	100,00	168,59	2	13.887.840	inf	inf	DINSOS	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	lusin					4		0		1		1		0		2		50,00		2		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	buah					149		0		51		32		0		83		55,70		83		inf		DINSOS	-	-	-
34	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Belanja Alat Untuk Alat Listrik	Buah		0		0	305	16.900.000	90	4.971.600	134	7.398.000	64	3.720.400	0	17.253.000	288	33.343.000	94,43	197,30	288	33.343.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Roll					1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-
35	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Buah		0		0	213	14.275.800	56	3.775.000	52	3.500.000	52	3.497.500	0	12.848.220	160	23.620.720	75,12	165,46	160	23.620.720	inf	inf	DINSOS	-	-	-
				buah					320		85		78		78		0		241		75,31		241		inf		DINSOS	-	-	-
				rol					4		1		1		1		0		3		75,00		3		inf		DINSOS	-	-	-
				Paket	16		0		1		0		0		1		0		1		100,00		1		6,25		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
36	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	buah		0		0	265	9.494.400	92	3.294.000	76	2.708.000	87	3.115.000	0	8.544.960	255	17.661.960	96,23	186,03	255	17.661.960	inf	inf	DINSOS	-	-	-
37	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	10.468.191	0	7.166.200	0	3.301.500	0	0	0	9.421.372	0	19.889.072	nan	190,00	0	19.889.072	nan	inf	DINSOS	-	-	-
38	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	buah		128.501.221		0	213	24.214.000	89	10.120.500	43	4.834.500	0	0	0	22.782.600	132	37.737.600	61,97	155,85	132	37.737.600	inf	29,37	DINSOS	-	-	-
				paket					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-
39	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	roll		0		0	2	13.396.000	1	4.497.800	0	2.979.800	0	3.018.600	0	12.056.400	1	22.552.600	50,00	168,35	1	22.552.600	inf	inf	DINSOS	-	-	-
				buah					500		168		111		113		0		392		78,40		392		inf		DINSOS	-	-	-
				Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-
40	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit		0		0	4		0	0	4	8.500.800	0	0	0	7.650.720	4	16.151.520	100,00	inf	4	16.151.520	inf	inf	DINSOS	-	-	-
				tabung					2		0		2		0		0		2		100,00		2		inf		DINSOS	-	-	-
				buah					21		0		21		0		0		21		100,00		21		inf		DINSOS	-	-	-
41	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit		0		0	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-
42	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bh		0		0	15	34.135.400	0	0	12	26.400.000	0	0	0	58.437.360	12	84.837.360	80,00	248,53	12	84.837.360	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	lbr					2		0		1		0		0		1		50,00		1		inf		DINSOS	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
43	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	set		0		0	1	2.462.900	0		0	0	0	0	8.696.610	0	8.696.610	0,00	353,10	0	8.696.610	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-		
44	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	505.899.692		351.739.220		9	42.753.000	0		0	1.865.000	1	855.000	0	87.286.428	1	90.006.428	11,11	210,53	1	441.745.648	inf	87,32	DINSOS	-	-	-	-	
				paket					3		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-	-	-		
45	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	41.022.000	0		0	1.022.000	0		0	46.960.020	0	47.982.020	nan	116,97	0	47.982.020	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-	
46	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit		0		0	50	75.000.000	0		0	34	74.500.000	0	0	67.050.000	34	141.550.000	68,00	188,73	34	141.550.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-	
				Unit					9		0		6		0		6		66,67		6		inf		DINSOS	-	-	-	-	-		
				Paket					0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-	-	-		
				Paket					1		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	-	-		
				Paket					1		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	-	-		
				Unit					3		0		2		0		2		66,67		2		inf		DINSOS	-	-	-	-	-		
				buah					4		0		3		0		3		75,00		3		inf		DINSOS	-	-	-	-	-		
				Paket	0		0		3		0		2		0		2		66,67		2		inf		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
47	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	buah		0		0	4	2.200.000	4	2.200.000	0		0	0	0	46.368.000	4	48.568.000	100,00	2.207,64	4	48.568.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-	
48	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Buah		0		0	8	215.919.680	0		0	5	148.764.680	2	67.155.000	0	344.763.612	7	560.683.292	87,50	259,67	7	560.683.292	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit					45		0		30		14		0	44		97,78		44		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
49	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit		0		0	5	61.736.950	0		0	2	26.873.000	2	21.812.000	0	63.578.086	4	112.263.086	80,00	181,84	4	112.263.086	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	lusin					6		0		3		2		0	5		83,33		5		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	lusin					261		0		120		98		0	218		83,52		218		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
				bks					66		0		30		25		0	55		83,33		55		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
				set					2		0		1		1		0	2		100,00		2		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
				unit					12		0		6		4		0	10		83,33		10		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
				buah					478		0		220		179		0	399		83,47		399		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
				buah					883		0		407		320		0	727		82,33		727		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
				set					1		0		0		0		0	0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-	-	-	
				botol					294		0		135		110		0	245		83,33		245		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
50	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	571.677.818		385.688.990		1	60.113.200	0		0	0	0	0	0	37.862.280	0	37.862.280	0,00	62,98	0	423.551.270	nan	74,09	DINSOS	-	-	-	-	
51	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	bks		0		0	92	5.283.200	58	3.325.200	15	836.000	19	1.122.000	0	30.371.130	92	35.654.330	100,00	674,86	92	35.654.330	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-	
				buah					30		19		5		6		0	30		100,00		30		inf		DINSOS	-	-	-	-	-	
52	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit		0		0	78	190.249.200	0		0	61	149.634.200	0	0	0	188.511.480	61	338.145.680	78,21	177,74	61	338.145.680	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
53	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	set		0		0	2	59.040.980	1	11.337.600	1	21.250.000	0	10.203.100	0	212.242.932	2	255.033.632	100,00	431,96	2	255.033.632	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
										I		II		III										IV						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			bks					66		13		24		11		0		48		72.73		48		inf		DINSOS	-	-	-	
			botol					294		56		106		51		0		213		72.45		213		inf		DINSOS	-	-	-	
			buah					883		170		318		153		0		641		72.59		641		inf		DINSOS	-	-	-	
			lusin					261		50		94		45		0		189		72.41		189		inf		DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket				1		1		0		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit				12		2		4		2		0		8		66,67		8		inf		DINSOS	-	-	-	
54	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit		0		0	75	453.370.650	0	5.322.900	9	58.460.750	62	384.793.500	0	408.033.585	71	856.610.735	94.67	188,94	71	856.610.735	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Buah					278		3		35		228		0		266		95.68		266		inf		DINSOS	-	-	-	
			Lusin					4		0		1		3		0		4		100,00		4		inf		DINSOS	-	-	-	
			Set					25		0		3		21		0		24		96,00		24		inf		DINSOS	-	-	-	
55	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pcs		0		0	6	151.017.275	0	4.709.500	6	107.169.700	0	0	0	241.790.558	6	353.669.758	100,00	234,19	6	353.669.758	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			buah					30		1		28		0		0		29		96.67		29		inf		DINSOS	-	-	-	
			Buah					49		2		45		0		0		47		95.92		47		inf		DINSOS	-	-	-	
			bks					92		4		85		0		0		89		96.74		89		inf		DINSOS	-	-	-	
			Set					1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	
			Meter					32		1		30		0		0		31		96.88		31		inf		DINSOS	-	-	-	
			unit					78		3		72		0		0		75		96.15		75		inf		DINSOS	-	-	-	
			Paket					1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	
			Unit					127		5		118		0		0		123		96.85		123		inf		DINSOS	-	-	-	
			Paket	0		0		1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
56	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan berupa belanja alat/bahan perabot kantor dan belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya	paket		0		0	13	19.781.200	0	811.500	6	9.875.000	3	4.500.000	0	59.647.860	9	74.834.360	69.23	378,31	9	74.834.360	inf	inf	DINSOS	-	-	-
57	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	46.945.244	0	0	0	27.186.600	0	0	0	83.965.720	0	111.152.320	nan	236,77	0	111.152.320	nan	inf	DINSOS	-	-	-
58	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	40.941.317	0	3.969.900	0	25.240.000	0	8.787.000	0	42.265.185	0	80.262.085	nan	196,04	0	80.262.085	nan	inf	DINSOS	-	-	-
59	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	buah		0		0	337	102.199.700	63	19.401.000	135	41.494.700	71	21.857.500	0	95.271.480	269	178.024.680	79,82	174,19	269	178.024.680	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			rim					40		6		16		8		0		30		75,00		30		inf		DINSOS	-	-	-	
			lembar					5		1		2		1		0		4		80,00		4		inf		DINSOS	-	-	-	
			dus					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-	
			kotak					9		1		4		2		0		7		77,78		7		inf		DINSOS	-	-	-	
			pcs					12		2		5		3		0		10		83,33		10		inf		DINSOS	-	-	-	
			tabung					231		43		93		49		0		185		80,09		185		inf		DINSOS	-	-	-	
			lusin					2		0		1		0		0		1		50,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	
			pak					2		0		1		0		0		1		50,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	
60	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lusin		0		0	8	84.003.500	1	16.493.100	2	21.943.500	2	25.026.400	0	75.603.150	5	139.066.150	62,50	165,55	5	139.066.150	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Pack					4		0		1		1		0		2		50,00		2		inf		DINSOS	-	-	-	
			Rim					64		12		17		19		0		48		75,00		48		inf		DINSOS	-	-	-	
			Tabung					245		48		64		73		0		185		75,51		185		inf		DINSOS	-	-	-	
			Buah					217		43		57		65		0		165		76,04		165		inf		DINSOS	-	-	-	
			Kotak					594		117		155		177		0		449		75,59		449		inf		DINSOS	-	-	-	
61	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		669.539.211		617.378.800	7	188.146.700	2	41.355.600	2	42.785.700	2	46.639.300	0	163.842.030	6	294.622.630	85,71	156,59	6	912.001.430	inf	136,21	DINSOS	-	-	-
62	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Bina Remaja	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	orang/kali		0		0	528	131.855.000	127	41.773.100	146	36.559.800	97	24.319.300	0	118.669.500	370	221.321.700	70,08	167,85	370	221.321.700	inf	inf	DINSOS	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I		II		III										IV					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		(PSBR) "Harapan" Padang Panjang]																												
63	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	jumlah penyediaan bahan logistik kantor yang dibutuhkan berupa bahan bakar , isi pemadam tabung kebakaran, isi tabung gas, belanja ATK, belanja kertas cover, belanja bahan komputer, belanja alat untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan belanja makanan dan minuman rapat	paket		0		0	8	68.723.500	2	15.549.000	2	20.803.900	2	14.625.500	0	61.851.150	6	112.829.550	75,00	164,18	6	112.829.550	inf	inf	DINSOS	-	-	-
64	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		0		0	41	123.615.994	12	34.981.589	8	23.989.510	11	33.514.910	0	111.254.395	31	203.740.404	75,61	164,82	31	203.740.404	inf	inf	DINSOS	-	-	-
65	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		0		0	10	105.048.249	3	32.672.200	2	19.015.000	3	32.670.900	0	98.083.992	8	182.442.092	80,00	173,67	8	182.442.092	inf	inf	DINSOS	-	-	-
66	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotak		0		0	9	110.467.290	1	13.401.300	3	32.533.250	2	26.390.300	0	88.577.721	6	160.902.571	66,67	145,66	6	160.902.571	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	kotak					36		4		11		9		0		24		66,67		24		inf		DINSOS	-	-	-
				pcs					25		3		7		6		0		16		64,00		16		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dus					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-
			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	orang					136		17		41		33		0		91		66,91		91		inf		DINSOS	-	-	-
				tabung					300		37		90		9		0		136		45,33		136		inf		DINSOS	-	-	-
				kotak					84		10		25		20		0		55		65,48		55		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					10		1		3		2		0		6		60,00		6		inf		DINSOS	-	-	-
			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	kotak besar					4		0		1		1		0		2		50,00		2		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Buah					337		42		101		82		0		225		66,77		225		inf		DINSOS	-	-	-
			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	buah					1082		133		324		263		0		720		66,54		720		inf		DINSOS	-	-	-
				rim					114		14		34		28		0		76		66,67		76		inf		DINSOS	-	-	-
				rim					45		6		13		11		0		30		66,67		30		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	buah					128		16		38		31		0		85		66,41		85		inf		DINSOS	-	-	-
				Pcs					12		1		4		3		0		8		66,67		8		inf		DINSOS	-	-	-
				Paket					41		5		12		10		0		27		65,85		27		inf		DINSOS	-	-	-
			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	unit					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lusin					2		0		1		0		0		1		50,00		1		inf		DINSOS	-	-	-
				Rim					40		5		12		10		0		27		67,50		27		inf		DINSOS	-	-	-
			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	pcs					52		6		16		13		0		35		67,31		35		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pak					2		0		1		0		0		1		50,00		1		inf		DINSOS	-	-	-
				Tabung					231		28		69		56		0		153		66,23		153		inf		DINSOS	-	-	-
				liter					80		10		24		19		0		53		66,25		53		inf		DINSOS	-	-	-
			jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	lusin					63		8		19		15		0		42		66,67		42		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-
				tabung					227		28		68		55		0		151		66,52		151		inf		DINSOS	-	-	-
				Lembar					5		0		2		1		0		3		60,00		3		inf		DINSOS	-	-	-
				Paket	0		0		7		1		2		2		0		5		71,43		5		inf		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
67	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Asuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	rim		0		0	4	6.714.750	1	2.127.000	1	897.000	1	2.458.900	0	6.043.275	3	11.526.175	75,00	171,65	3	11.526.175	inf	inf	DINSOS	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]																												
			eksemplar					66	21	9	24	0		54	81.82	54	inf	DINSOS	-	-	-									
			buah					25	8	3	9	0		20	80,00	20	inf	DINSOS	-	-	-									
			lembar					15003	4752	2004	5494	0		12250	81.65	12250	inf	DINSOS	-	-	-									
			kotak					4	1	1	1	0		3	75,00	3	inf	DINSOS	-	-	-									
			meter					20	6	3	4	0		13	65,00	13	inf	DINSOS	-	-	-									
68	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Buah		0	0	100	5.527.500	26	1.382.100	25	1.381.800	25	1.381.800	0	4.974.750	76	9.120.450	76,00	165,00	76	9.120.450	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			Eksemplar					24	6	6	6	0		18	75,00	18	inf	DINSOS	-	-	-									
			Meter					40	10	10	10	0		30	75,00	30	inf	DINSOS	-	-	-									
			Lembar					8335	2084	2084	2084	0		6252	75,01	6252	inf	DINSOS	-	-	-									
			Kotak					8	2	2	2	0		6	75,00	6	inf	DINSOS	-	-	-									
69	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		62.757.000	44.327.692	3	18.592.950	2	13.670.000	0	1.770.000	1	1.570.000	0	16.733.655	3	33.743.655	100,00	181,49	3	78.071.347	inf	124,40	DINSOS	-	-	-	
			paket					1	0	0	0	0		0	0,00	0	nan	DINSOS	-	-	-									
70	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	0	3.834.800	0	732.000	0	1.414.700	0	604.000	0	0	0	2.750.700	nan	71,73	0	2.750.700	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
			rim					4	1	1	1	0		3	75,00	3	inf	DINSOS	-	-	-									
			buah					25	5	9	4	0		18	72,00	18	inf	DINSOS	-	-	-									
			meter					20	4	7	3	0		14	70,00	14	inf	DINSOS	-	-	-									
			lembar					14821.728	2829	5468	2335	0		10632	71,73	10632	inf	DINSOS	-	-	-									
			Buah					30	6	11	5	0		22	73,33	22	inf	DINSOS	-	-	-									
			lembar					15003	2864	5535	2363	0		10762	71,73	10762	inf	DINSOS	-	-	-									
			Eksemplar					10	2	4	2	0		8	80,00	8	inf	DINSOS	-	-	-									
			Kotak					4	1	1	1	0		3	75,00	3	inf	DINSOS	-	-	-									
			kotak					4	1	1	1	0		3	75,00	3	inf	DINSOS	-	-	-									
			eksemplar					66	13	24	10	0		47	71,21	47	inf	DINSOS	-	-	-									
			Meter					16	3	6	3	0		12	75,00	12	inf	DINSOS	-	-	-									
			Lembar					7916	1511	2920	1247	0		5678	71,73	5678	inf	DINSOS	-	-	-									
			Paket	0		0		3	0	1	0	0		1	33,33	1	inf	DINSOS	-	-	-									
71	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	0	4.221.360	0	2.011.900	0	1.305.000	0	651.000	0	3.799.224	0	7.767.124	nan	184,00	0	7.767.124	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
72	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	rim		0	0	4	2.489.600	0	0	0	2	1.439.800	0	2.240.640	2	3.680.440	50,00	147,83	2	3.680.440	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
			jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	lembar				5500	0	0	3181	0		3181	57,84	3181	inf	DINSOS	-	-	-									
			buah					10	0	0	6	0		6	60,00	6	inf	DINSOS	-	-	-									
			eksemplar					70	0	0	40	0		40	57,14	40	inf	DINSOS	-	-	-									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	kotak				2	0	0	1	0		1	50,00	1	inf	DINSOS	-	-	-									
73	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah cetak amplop	kotak		0	0	4	5.158.750	2	2.818.500	1	946.000	1	809.100	0	4.642.875	4	9.216.475	100,00	178,66	4	9.216.475	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah penggandaan dokumen	lembar				3326	1817	610	522	0		2949	88,67	2949	inf	DINSOS	-	-	-									
			Jumlah jilid	eksemplar				24	13	4	4	0		21	87,50	21	inf	DINSOS	-	-	-									
			Jumlah Spanduk yang dicetak	meter		0		14	8	3	3	0		14	100,00	14	inf	DINSOS	-	-	-									
74	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tuna Netra	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan berupa cetak amplop, cetak blanko lainnya,	paket		0	0	5	7.007.652	1	1.399.000	1	1.355.000	2	2.226.000	0	6.306.887	4	11.286.887	80,00	161,07	4	11.286.887	inf	inf	DINSOS	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		(PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	cetak map OPD, jilid dan penggandaan						K	Rp									K	Rp											
75	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	eksemplar		0		0	14821728	3.605.431	2002	600.500	4937	1.201.000	3703	900.750	0	3.244.888	10642	5.947.138	0,07	164,95	10642	5.947.138	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
76	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bulan		0		0	12		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
77	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bulan		0		0	12		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
78	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bulan		0		0	36		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
79	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	-			0		0	0	1.500.000	0	255.000	0	495.000	0	375.000	0	1.350.000	0	2.475.000	nan	165,00	0	2.475.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
80	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan		0		0	12		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
81	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
82	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan		0		0	12		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
83	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Bulan		0		0	12		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-			
84	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		65.580.000		39.410.000	360		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0	39.410.000	nan	60,09	DINSOS	-	-	-		
85	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang dibutuhkan berupa BBM dan belanja perjalanan dinas biasa	Laporan		0		0	19	8.248.846	3	1.290.000	2	910.000	1	600.000	0	7.423.961	6	10.223.961	31,58	123,94	6	10.223.961	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
86	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	52	44.211.600	0		0	15	9.650.000	31	20.021.890	0	39.275.302	46	68.947.192	88,46	155,95	46	68.947.192	inf	inf	DINSOS	-	-	-
87	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan		0		0	0	36.139.750	0	3.475.650	0	19.524.300	0	4.663.200	0	27.313.245	0	54.976.395	nan	152,12	0	54.976.395	nan	inf	DINSOS	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		SKPD [Panti Sosial Tuna Grahlta (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																												
			jumlah uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang disediakan	orang/hari				60		8		31		8		0		47		78,33		47		inf		DINSOS	-	-	-		
			Jumlah bahan bakar minyak yang disediakan	liter				600		58		308		77		0		443		73,83		443		inf		DINSOS	-	-	-		
88	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	568.881.100	0	612.390.482	30	407.687.922	11	82.066.493	12	90.490.160	5	41.317.731	0	366.391.844	28	580.266.228	93,33	142,33	28	1.192.656.710	140,00	209,65	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
89	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0	50	39.606.000	4	2.537.600	17	11.936.000	10	6.872.000	0	35.645.400	31	56.991.000	62,00	143,89	31	56.991.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
			Jumlah bahan bakar minyak yang disediakan dalam 1 tahun	liter				956		67		317		182		0		566		59,21		566		inf		DINSOS	-	-	-		
90	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Orang/Tahun		0	0	72	33.060.000	13	5.985.000	23	10.545.000	18	8.265.000	0	29.754.000	54	54.549.000	75,00	165,00	54	54.549.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
91	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Disediakan	Orang		0	0	34	56.169.680	3	3.240.000	25	29.073.280	4	4.320.000	0	50.636.589	32	87.269.869	94,12	155,37	32	87.269.869	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun				1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-		
92	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	liter		0	0	1230.6804705882	110.215.176	114	10.212.800	228	20.425.600	622	55.650.026	0	92.485.802	964	178.774.228	78,33	162,20	964	178.774.228	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
			jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	orang/kali				120		11		22		61		0		94		78,33		94		inf		DINSOS	-	-	-		
93	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0	0	27.288.486	0	6.473.200	0	17.329.916	0	3.097.935	0	26.881.637	0	53.782.688	nan	197,09	0	53.782.688	nan	inf	DINSOS	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan				
Predikat Kinerja																										-	-				
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	0	572.530.900	0	397.136.440	1	2.450.372.613	0	1.761.300	0	798.536.700	0	1.244.012.100	0	11.518.331.600	0	13.562.641.700	0,00	553,49	0	13.959.778.140	nan	2.438,26	-	-	-		
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		-	-	-		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		-	-	-		
94	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibutuhkan berupa belanja modal alat angkutan bermotor	Unit		0	0	1	1.184.787.000	0	0	0	1	1.170.000.000	0	10.530.000.000	1	11.700.000.000	100,00	987,52	1	11.700.000.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-			
95	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		0	0	4	886.110.000	0	0	3	725.200.000	0	66.812.100	0	713.226.950	3	1.505.239.050	75,00	169,87	3	1.505.239.050	inf	inf	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
96	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			0	0	3	32.219.000	0	0	3	31.940.000	0	0	0	28.997.100	3	60.937.100	100,00	189,13	3	60.937.100	inf	inf	DINSOS	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
97	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	3	73.831.100	0	1.761.300	2	40.269.800	0	0	0	66.447.990	2	108.479.090	66,67	146,93	2	108.479.090	inf	inf	DINSOS	-	-	-
98	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		63.393.400		156.334.820	21	65.956.200	0		0	0	0	0	34.332.930	0	34.332.930	0,00	52,05	0	190.667.750	nan	300,77	DINSOS	-	-	-	
99	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	6.000.000	0		0	0	0	1	10.800.000	1	10.800.000	33,33	180,00	1	10.800.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
100	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	8.500.800	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
101	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	15	22.950.000	0		0	0	0	0	57.013.992	0	57.013.992	0,00	248,43	0	57.013.992	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
102	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	4	33.143.720	0		0	0	0	0	29.829.348	0	29.829.348	0,00	90,00	0	29.829.348	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
103	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	14.700.000	0		0	0	0	0	20.250.000	0	20.250.000	0,00	137,76	0	20.250.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
104	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	57.802.000	0		0	0	0	0	19.927.800	0	19.927.800	0,00	34,48	0	19.927.800	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
105	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
106	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	509.137.500	0	240.801.620	4	56.033.360	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	240.801.620	0,00	47,30	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
107	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	8.339.433	0		0	1.126.900	0	7.200.000	0	7.505.490	0	15.832.390	nan	189,85	0	15.832.390	nan	inf	DINSOS	-	-	-
108	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	unit		0		0	20	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-		
				set					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	0	5.368.251.019	0	4.315.353.803	1	4.909.199.049	0	1.035.648.044	0	1.400.361.749	0	1.093.859.708	0	4.548.433.595	0	8.078.303.096	0,00	164,55	0	12.393.656.899	nan	230,87		-	-	-
					0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan			-	-	-		
109	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	41.949.900	0	29.205.052	20	3.150.000	0		0	0	8	1.250.000	0	2.835.000	8	4.085.000	40,00	129,68	8	33.290.052	66,67	79,36	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
110	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
111	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buah		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-
112	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Jumlah Bahan Bakar Minyak Yang Disediakan	Tahun		0	0	1	9.300.167	0	2.325.000	0	2.325.000	0	2.325.000	0	8.370.150	0	15.345.150	0,00	165,00	0	15.345.150	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Penyediaan Kegiatan Kantor - Benda pos	Buah				360	90	90	90	0	270	75,00	270	inf	DINSOS	-	--	-										
113	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	buah		0	0	200	1.275.000	49	310.000	49	311.650	88	563.200	0	1.147.500	186	2.332.350	93,00	182,93	186	2.332.350	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DINSOS	-	-	-					
			Jumlah bahan bakar minyak yang disediakan	liter				300	73	73	133	0	279	93,00	279	inf	DINSOS	-	-	-										
114	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang dibutuhkan berupa BBM untuk mengantar surat ke dinas	Laporan		0	0	1	600.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	540.000	0	740.000	0,00	123,33	0	740.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
115	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]				0	0	0	3.936.300	0	1.440.000	0	0	0	0	3.542.670	0	4.982.670	nan	126,58	0	4.982.670	nan	inf	DINSOS	-	-	-		
116	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buah		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-			
117	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa BBM	Laporan		0	0	1	400.000	0	0	0	100.000	0	200.000	0	360.000	0	660.000	0,00	165,00	0	660.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	
118	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kwh		0	0	24000	67.150.000	4010	11.219.250	4580	12.815.800	4944	13.833.300	0	49.189.500	13534	87.057.850	56,39	129,65	13534	87.057.850	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Paket				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DINSOS	-	-	-						
			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	M3				2700	451	515	556	0	1522	56,37	1522	inf	DINSOS	-	-	-										
119	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	981.599.830	0	799.367.731	12	233.280.000	3	51.543.737	3	53.620.616	3	54.797.521	0	198.801.000	9	358.762.874	75,00	153,79	9	1.158.130.605	900,00	117,98	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
120	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		0	0	12	83.820.000	3	19.629.835	3	19.137.375	3	23.883.635	0	75.438.000	9	138.088.845	75,00	164,74	9	138.088.845	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
				kwh				43600	10210	9955	12423	0	32588	74,74	32588	inf	DINSOS	-	-	-										
121	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	m3		0	0	4345	99.810.000	872	20.025.210	926	21.278.770	856	19.673.231	0	72.541.800	2654	133.519.011	61,08	133,77	2654	133.519.011	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	kwh				28190	5656	6010	5556	0	17222	61,09	17222	inf	DINSOS	-	-	-										
				paket				12	2	3	2	0	7	58,33	7	inf	DINSOS	-	-	-										
122	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Asuhan	jumlah penyediaan jasa listrik	Kwh		0	0	44000	157.657.200	7439	26.654.787	7630	27.340.563	7822	28.027.638	0	119.391.480	22891	201.414.468	52,03	127,75	22891	201.414.468	inf	inf	DINSOS	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]																													
			jumlah penyediaan jasa air	m3					8000		1353		1387		1422		0		4162		52.03		4162		inf		DINSOS	-	-	-	-
			jumlah penyediaan jasa kawat/ faksimili/ internet/ TV berlangganan	Paket					12		2		2		2		0		6		50,00		6		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah penyediaan jasa telepon	menit					1650		279		286		293		0		858		52,00		858		inf		DINSOS	-	-	-	-
123	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Tagihan Telepon	Menit		0		0	240	128.774.330	56	27.106.057	59	28.743.807	79	38.480.247	0	133.091.051	194	227.421.162	80,83	176,60	194	227.421.162	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
			Tagihan Internet	Bulan					12		3		3		4		0		10		83,33		10		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Tagihan Air	M3					6440.636667		1496		1587		2124		0		5207		80,85		5207		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Tagihan Listrik	KWH					28800		6691		7095		9499		0		23285		80,85		23285		inf		DINSOS	-	-	-	-
124	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	83.970.000	2	13.082.209	2	12.340.434	2	13.258.791	0	60.176.790	6	98.858.224	50,00	117,73	6	98.858.224	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
125	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan berupa belanja tagihan air, listrik dan kawat/internet	Laporan		0		0	1	64.665.500	0	12.160.715	0	13.357.942	0	14.894.617	0	57.298.950	0	97.712.224	0,00	151,10	0	97.712.224	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-
126	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	0	43.318.800	0	9.346.989	0	9.460.839	0	9.948.909	0	36.007.200	0	64.763.937	nan	149,51	0	64.763.937	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-
127	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]				0		0	0	1.200.000	0	200.000	0	300.000	0	300.000	0	1.080.000	0	1.880.000	nan	156,67	0	1.880.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-
128	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	lembar		0		0	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-	-	
129	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	33.370.000	0	21.420.000	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	21.420.000	0,00	64,19	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	
130	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	399.649.244	0	89.918.722	0	119.768.290	0	85.273.470	0	370.370.761	0	665.331.243	nan	166,48	0	665.331.243	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-
			Laporan						0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-	-
			Meter						100		22		30		21		0		73		73,00		73		inf		DINSOS	-	-	-	-
			orang						11		11		0		0		0		11		100,00		11		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Orang						54		12		16		11		0		39		72,22		39		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Kali						17		4		5		4		0		13		76,47		13		inf		DINSOS	-	-	-	-
131	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	362.588.630	0	78.158.981	0	104.147.665	0	81.917.969	0	345.650.611	0	609.875.226	nan	168,20	0	609.875.226	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-
			jumlah belanja jaminan ketenagakerjaan yang disediakan	orang					12		12		0		0		0		12		100,00		12		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah belanja petugas jasa yang disediakan	orang					12		12		0		0		0		12		100,00		12		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah belanja instruktur senam yang disediakan	orang/kegiatan					46		10		13		10		0		33		71,74		33		inf		DINSOS	-	-	-	-
			jumlah belanja petugas pengangkat sampah yang disediakan	orang/kali					69		15		20		15		0		50		72,46		50		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah pakaian dinas harian petugas Non ASN yang	stel					12		12		0		0		0		12		100,00		12		inf		DINSOS	-	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
			disediakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
132	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dibutuhkan berupa belanja jasa rohaniwan, tenaga administrasi, instruktur senam, tenaga kebersihan, pengamanan kantor, sopir, juru masak, pencucian gorden dan karpet dan belanja jasa pengolahan sampah	Laporan		0		0	2	324.977.502	0	71.174.404	1	102.600.764	0	70.916.614	0	329.154.296	1	573.846.078	50,00	176,58	1	573.846.078	inf	inf	DINSOS	-	-	-
133	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang		0		0	11	376.669.310	1.1	86.407.031	0	113.526.086	0	86.737.846	0	355.032.041	1.1	641.703.004	10,00	170,36	1.1	641.703.004	inf	inf	DINSOS	-	-	-
134	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Jasa Instruktur dan penceramah yang Disediakan	orang/kegiatan		0		0	65	390.506.154	10	58.778.045	25	150.020.228	15	88.722.533	0	363.944.183	50	661.464.989	76,92	169,39	50	661.464.989	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah BPJS Ketenagakerjaan yang Disediakan	Laporan					10		3		4		2		0		9		90,00		9		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah THR Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang					10		3		4		2		0		9		90,00		9		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang/bulan					10		3		4		2		0		9		90,00		9		inf		DINSOS	-	-	-
135	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	4.311.331.289	3.465.361.020		28	1.093.087.040	28	236.948.882	0	307.759.650	0	241.969.002	0	983.778.336	28	1.770.455.870	100,00	161,97	28	5.235.816.890	inf	121,44	DINSOS	-	-	-	
136	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah pakaian kerja non ASN	stel		0		0	8	306.919.388	2	69.896.634	2	92.074.610	2	70.499.646	0	300.271.943	6	532.742.833	75,00	173,58	6	532.742.833	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			JUmlah jasa pelayanan umum kantor	orang					9	9		0		0		0		9		100,00		9		inf		DINSOS	-	-	-	
			JUmlah iuran BPJS ketenagakerjaan	orang					8	8		0		0		0		8		100,00		8		inf		DINSOS	-	-	-	
137	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	267.819.362	0	56.470.827	0	85.829.177	0	53.057.810	0	274.929.950	0	470.287.764	nan	175,60	0	470.287.764	nan	inf	DINSOS	-	-	-
138	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan	Orang		0		0	7	404.675.122	7	92.750.729	0	123.502.483	0	93.228.729	0	405.490.383	7	714.972.324	100,00	176,68	7	714.972.324	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah Jasa Tenaga Juru Masak	Orang					1	1		0		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Iuran Jaminan/Asuransi	Bulan					12	12		0		0		0		12		100,00		12		inf		DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Jasa Sopir	Orang					2	2		0		0		0		2		100,00		2		inf		DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Jasa Pengaman Kantor	Orang					1	1		0		0		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	0	1.938.319.453	0	1.932.209.112	1	3.361.433.704	0	142.735.488	0	272.916.148	0	1.537.697.811	0	3.298.458.192	0	5.251.807.639	0,00	156,24	0	7.184.016.751	nan	370,63		-	-	-
139	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	76.464.000	0	46.965.500	1	50.704.000	0	0	10	32.907.000	0	7.814.000	0	45.633.600	10	86.354.600	1.000,00	170,31	10	133.320.100	200,00	174,36	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
140	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	4	20.100.000	1	4.362.500	1	4.635.500	1	4.362.500	0	18.090.000	3	31.450.500	75,00	156,47	3	31.450.500	inf	inf	DINSOS	-	-	-
141	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		0		0	2	24.774.000	0	503.250	1	11.839.606	0	4.940.654	0	22.296.600	1	39.580.110	50,00	159,76	1	39.580.110	inf	inf	DINSOS	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																											
142	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas yang dibutuhkan berupa BBM, premi asuransi roda 4 dan roda 6, pajak roda 4, dan service roda 4	Unit		0		0	3	25.780.000	1	7.834.000	0	1.700.000	0	4.540.000	0	23.202.000	1	37.276.000	33,33	144,59	1	37.276.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-
143	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	2	15.550.000	0	3.475.000	1	3.537.600	0	0	0	13.995.000	1	21.007.600	50,00	135,10	1	21.007.600	inf	inf	DINSOS	-	-	-
144	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	11.860.000	0	2.500.000	0	2.450.000	0	3.721.500	0	10.674.000	0	19.345.500	0,00	163,12	0	19.345.500	nan	inf	DINSOS	-	-	-
				Unit	10		0		16		3		3		4		0		10		62,50		10		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
145	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		495.441.850		384.446.461	16	145.655.000	6	40.889.500	4	28.316.750	3	17.987.000	0	129.379.500	13	216.572.750	81,25	148,69	13	601.019.211	inf	121,31	DINSOS	-	-	-
146	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]				0		0	0	6.663.950	0	2.213.950	0	800.000	0	310.800	0	9.687.555	0	13.012.305	nan	195,26	0	13.012.305	nan	inf	DINSOS	-	-	-
147	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	5	44.100.000	1	10.450.000	1	10.450.000	1	10.450.000	0	38.542.500	3	69.892.500	60,00	158,49	3	69.892.500	inf	inf	DINSOS	-	-	-
148	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	51.427.912	0	8.300.000	1	10.738.000	1	17.800.000	0	46.285.121	2	83.123.121	66,67	161,63	2	83.123.121	inf	inf	DINSOS	-	-	-
149	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	33	14.350.000	0	0	0	0	0	0	0	12.915.000	0	12.915.000	0,00	90,00	0	12.915.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-
150	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	11	7.550.000	0	0	0	0	0	0	0	6.795.000	0	6.795.000	0,00	90,00	0	6.795.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
151	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	13	13.980.000	0		0	0	0	0	0	9.882.000	0	9.882.000	0,00	70,69	0	9.882.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-	
152	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	60	63.100.000	0		0	0	0	0	0	56.790.000	0	56.790.000	0,00	90,00	0	56.790.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-	
153	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	12	9.990.000	0		0	0	0	0	0	8.991.000	0	8.991.000	0,00	90,00	0	8.991.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-	
154	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	34	34.450.000	0		0	0	0	0	0	31.005.000	0	31.005.000	0,00	90,00	0	31.005.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-	
155	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	19	12.860.000	0		0	0	0	0	0	11.574.000	0	11.574.000	0,00	90,00	0	11.574.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-	
156	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Netra (PSN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	18	11.860.000	0		0	0	0	0	0	10.674.000	0	10.674.000	0,00	90,00	0	10.674.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-	
157	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]				0		0	0	206.179.103	0		0	0	6.244.650	0	11.040.000	0	257.717.703	0	275.002.353	nan	133,38	0	275.002.353	nan	inf	DINSOS	-	-	-	-
158	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		1.230.683.603		1.474.835.197	1	172.966.016	0		0	0	15.000.007	1	156.992.741	0	166.138.844	1	338.131.592	100,00	195,49	1	1.812.966.789	inf	147,31	DINSOS	-	-	-	-
159	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		0		0	3	712.488.018	0		0	0	4.510.000	2	436.211.103	0	647.258.416	2	1.087.979.519	66,67	152,70	2	1.087.979.519	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
160	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	buah		0		0	281	117.189.711	0		0	0	0	2778	115.774.339	0	105.470.740	2778	221.245.079	988,61	188,79	2778	221.245.079	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
				lusin					4		0		0		4		0		4		100,00		4		inf		DINSOS	-	-	-	-	
161	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air yang disediakan	unit		0		0	1	278.083.757	0		0	0	0	1	211.306.686	0	202.435.200	1	413.741.886	100,00	148,78	1	413.741.886	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
162	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3	842.601.528	0		44.876.346	0	58.089.125	1	425.980.901	0	744.873.775	1	1.273.820.147	33,33	151,18	1	1.273.820.147	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
				Unit					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	-	
			Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Yang Disediakan	Paket					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					8		0		0		4		0		4		50,00		4		inf		DINSOS	-	-	-	-	
				Paket					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	-	
				Unit					2		0		0		1		0		1		50,00		1		inf		DINSOS	-	-	-	-	
				Unit	1		0		1		0		0		1		0		1		100,00		1		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-	
163	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meter		0		0	3388	380.011.959	113		14.600.942	0	0	818	105.735.587	0	386.650.763	931	506.987.292	27,48	133,41	931	506.987.292	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
																	I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
164	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	73.708.750	0		0	0	73.707.910	0		0	0	232.837.875	0	306.545.785	nan	415,89	0	306.545.785	nan	inf	DINSOS	-	-	-				
			jumlah barang pakai habis untuk pemeliharaan bangunan yang disediakan	batang					25		0		25		0		0		25		100,00		25		inf		DINSOS	-	-	-						
			Jumlah barang pakai habis untuk pemeliharaan bangunan yang disediakan	buah					195		0		195		0		0		195		100,00		195		inf		DINSOS	-	-	-						
165	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-						
166	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	148	135.730.000	0	25.961.954	78	0	0		0	0	0	0	0	36.558.000	0	36.558.000	0,00	inf	0	62.519.954	0,00	46,06	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada						
167	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-						
168	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	34	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-						
169	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan berupa service CCTV, service AC Split, service komputer dan printer	Unit		0		0	19	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-						
170	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	19	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-						
171	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	13.450.000	0	2.730.000	0	7.990.000	0	2.730.000	0	12.105.000	0	25.555.000	nan	190,00	0	25.555.000	nan	inf	DINSOS	-	-	-						
172	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-						
173	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit		0		0	11	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					I	II	III	IV			I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
		Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicincin]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			113.447.349.996		36.245.708.339		71.897.165.387		11.970.511.610		23.544.344.744		18.128.214.830		67.461.390.367		121.104.461.551		168,44		157.350.169.890		138,70							
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			113.447.349.996		36.245.708.339		71.897.165.387		11.970.511.610		23.544.344.744		18.128.214.830		67.461.390.367		121.104.461.551		168,44		157.350.169.890		138,70							
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.461.250.171		7.565.497.459		0	8.632.193.960	758.478.200	1.907.192.240	3.089.614.250	0	9.123.915.510	0	14.879.200.200	nan	172,37	0	22.444.697.659	nan	1.535,99		-							
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0		0	72.270.300	0	42.310.000	0	0	1.910.000	0	9.525.004	0	372.033.900	0	383.468.904	nan	906,33	0	455.739.204	nan	inf	-	-					
1	1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	0		0	72.270.300	0	42.310.000	0	0	1.910.000	0	9.525.004	0	372.033.900	0	383.468.904	nan	906,33	0	455.739.204	nan	inf	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
			Jumlah Undian Gratis Berhadiah yang di tingkatkan Pelaksanaannya kewenangan Provinsi	Izin	20		0		20		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada				
			Jumlah Undian Gratis Berhadiah yang di tingkatkan Perizinannya kewenangan Provinsi	izin	20		0		20		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf						
Predikat Kinerja																									-	-						
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Pilar Sosial	Kegiatan	0	1.461.250.171	0	7.493.227.159	1	8.589.883.960	0	758.478.200	0	1.905.282.240	0	3.080.089.246	4	8.751.881.610	4	14.495.731.296	400,00	168,75	4	21.988.958.455	inf	1.504,80	-	-				
2	1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	100	60.394.900	0	998.665.500	0	945.021.300	0	377.130.400	0	152.960.000	0	98.130.000	0	593.194.140	0	1.221.414.540	nan	129,25	0	2.220.080.040	0,00	3.675,94	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
3	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	100	59.683.200	0	0	100	36.663.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
4	1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	orang	50	574.085.071	0	1.896.305.325	50	4.037.611.510	0	351.747.800	0	477.591.300	50	1.459.559.346	0	4.424.769.675	50	6.713.668.121	100,00	166,28	50	8.609.973.446	100,00	1.499,77	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
			jumlah Keluarga yang ditingkatkan Nilai Kesetakawanan Sosialnya kewenangan Provinsi	orang	300		0		300		0		0	300		0		300		100,00		300		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	90		0		90		0		0	90		0		90		100,00		90		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
			Terlaksananya Komplementaritas PKH	Orang	27		0		27		0		0	27		0		27		100,00		27		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
			Terlaksananya Peningkatan Capacity Building SDM PKH	Orang	27		0		27		0		0	27		0		27		100,00		27		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
			Terlaksananya Rakor PKH	Orang	27		0		27		0		0	27		0		27		100,00		27		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
			Terlaksananya Rekon PKH	Orang	27		0		27		0		0	27		0		27		100,00		27		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
			Terlaksananya Sinergitas PKH	Orang	27		0		27		0		0	27		0		27		100,00		27		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			
5	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Forum Karang Taruna yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	lembaga	1	767.087.000	0	4.598.256.334	1	3.570.587.950	0	29.600.000	0	1.274.730.940	1	1.522.399.900	0	3.733.917.795	1	6.560.648.635	100,00	183,74	1	11.158.904.969	100,00	1.454,71	DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	0		0		0		0		0	0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
										I		II		III		IV																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
			Jumlah LKKS yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	19		0		19		0		0		19		0		19		100,00		19		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada							
			Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan Nilai Nilai Kepahlawanannya Kewenangan Provinsi	Orang	100		0		100		0		0		100		0		100		100,00		100		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada							
			Jumlah PSKS yang diberikan Penghargaan	pilar	4		0		4		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada							
			Jumlah SLRT yang ditingkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	19		0		19		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada							
			Jumlah Usulan Calon Pahlawan Nasional yang di Usulkan Kewenangan Provinsi	Usulan	2		0		2		0		0		2		0		2		100,00		2		100,00		DINSOS	tidak ada	tidak ada	tidak ada							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	1.326,08												
Predikat Kinerja																								-	ST												
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	persen		103.988.614.186		25.630.195.271		100		61.539.961.663		10.728.255.016		20.326.533.667		14.676.329.180		0		55.633.219.394		0		101.364.337.257		0,00	164,71	0	126.994.532.528	nan	122,12	-			
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	persen					100								0		0		0,00		0		nan		-										
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	persen					100							0		0		0,00		0		nan		-											
									0						0		0		nan		0		nan		-												
			persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	persen					100						0		0		0,00		0		nan		-												
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Kegiatan	0	14.084.592.333	0	4.778.336.485		1		7.445.614.290	0	1.635.989.860	0	2.252.612.120	0	1.616.390.969	0	6.931.406.708	0	12.436.399.657	0,00	167,03	0	17.214.736.142	nan	122,22	-	-	-						
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		-	-	-								
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kegiatan	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		-	-	-								
1	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyandang Disabilitas didalam Panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		4.140.055.000		2.600.508.359		219		1.416.253.400	0	16.230.000	219	670.275.040	0	0	119	1.366.491.960	338	2.052.997.000	154,34	144,96	338	4.653.505.359	inf	112,40	DINSOS	-	-	-					
2	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang			0		0		638.750.000	0	100.452.250	0	155.401.000	0	159.212.250	0	562.658.850	0	977.724.350	nan	153,07	0	977.724.350	nan	inf	DINSOS	-	-	-						
			Jumlah penyandang disabilitas yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang					50		50		0		0		50		100		200,00		100		inf		DINSOS	-	-	-							
3	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang			0		0		1.277.500.000	100	206.499.770	0	321.999.630	0	321.999.200	100	1.149.750.000	200	2.000.248.600	200,00	156,58	200	2.000.248.600	inf	inf	DINSOS	-	-	-						
			jumlah biaya honorarium pengadaan barang dan jasa yang disediakan	orang/paket					3		0		1		1		0		2		66,67		2		inf		DINSOS	-	-	-							
4	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Panti Penyadang Disabilitas Milik Masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan sandang	Panti		3.000.000.000		469.285.700		13		758.336.000	13	758.336.000	0	0	0	0	13	729.923.247	26	1.488.259.247	200,00	196,25	26	1.957.544.947	inf	65,25	DINSOS	-	-	-					
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DINSOS	-	-	-							
5	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang			0		0		100		390.099.350	100	76.520.000	0	255.608.500	0	56.852.850	100	345.790.215	200	734.771.565	200,00	188,35	200	734.771.565	inf	inf	DINSOS	-	-	-				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
6	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	50	176.918.700	50	40.143.500	0	74.163.000	0	49.047.000	50	159.226.830	100	322.580.330	200,00	182,33	100	322.580.330	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
7	1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	174.397.000	100	28.030.500	0	38.100.500	0	55.830.500	100	154.311.300	200	276.272.800	200,00	158,42	200	276.272.800	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
8	1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	50	105.286.629	50	17.154.000	0	47.961.000	0	20.591.599	50	96.377.966	100	182.084.565	200,00	172,94	100	182.084.565	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
9	1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan asrama yang mudah di akses	Panti		1.300.000.000		446.784.000	12	616.525.000	0		0	0	12	616.525.000	13	554.872.500	25	1.171.397.500	208,33	190,00	25	1.618.181.500	inf	124,48	DINSOS	-	-	-	
10	1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	50	14.900.000	50	1.450.000	0	10.650.000	0	1.400.000	50	13.410.000	100	26.910.000	200,00	180,60	100	26.910.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
11	1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat yang Mendapatkan hibah uang untuk pengadaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Panti		975.000.000		0	2	69.510.000	2	69.510.000	0		0	0	13	62.559.000	15	132.069.000	750,00	190,00	15	132.069.000	inf	13,55	DINSOS	-	-	-	
12	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	12.322.500	100	3.558.965	0	892.600	0	4.650.100	100	9.504.900	200	18.606.565	200,00	151,00	200	18.606.565	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
13	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	50	6.532.900	50	1.540.500	0	1.737.000	0	1.737.000	50	5.879.610	100	10.894.110	200,00	166,76	100	10.894.110	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
14	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan perbekalan kesehatan	Panti		12.102.080		64.401.301	1	30.090.000	1	30.090.000	0		0	0	13	27.081.000	14	57.171.000	1.400,00	190,00	14	121.572.301	inf	1.004,56	DINSOS	-	-	-	
15	1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	577.474.306	100	137.707.825	0	161.140.650	0	131.697.300	100	510.720.315	200	941.266.090	200,00	163,00	200	941.266.090	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
16	1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat yang mendapatkan Hibah uang pemberian bimbingan Aktivitas Kehidupan Sehari-hari	Panti		3.780.000.000		965.704.075	12	300.128.800	0		0	12	300.128.800	0	0	13	270.115.920	25	570.244.720	208,33	190,00	25	1.535.948.795	inf	40,63	DINSOS	-	-	-
17	1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	50	683.683.605	50	117.236.600	0	127.305.600	0	145.869.000	50	638.607.765	100	1.029.018.965	200,00	150,51	100	1.029.018.965	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
18	1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	50	36.980.000	0		0	21	15.780.000	24	17.762.500	50	31.910.130	95	65.452.630	190,00	176,99	95	65.452.630	inf	inf	DINSOS	-	-	-
19	1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	jumlah uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang disediakan	orang/hari		0		0	44	12.760.000	5	1.451.650	14	4.162.000	4	1.259.200	0	11.484.000	23	18.356.850	52,27	143,86	23	18.356.850	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang					0		0		0		0		100		100		inf		100		inf		DINSOS	-	-	-	
			jumlah bahan bakar untuk kegiatan penelusuran keluarga	liter					500		57		163		49		0		269		53,80		269		inf		DINSOS	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			yang disediakan						K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
20	1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	5	20.220.000	0	0	1	4.556.800	2	9.721.400	100	15.406.740	103	29.684.940	2.060,00	146,81	103	29.684.940	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			jumlah uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang disediakan	orang/hari					44		0		10		21		0		31		70,45		31		inf		DINSOS	-	-	-	
			jumlah bahan bakar untuk kegiatan reunifikasi keluarga yang disediakan	liter					500		0		113		240		0		353		70,60		353		inf		DINSOS	-	-	-	
21	1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Rujukan Ke Balai RSPD Kemensos	Orang		877.435.253		231.653.050	9	126.946.100	2	30.078.300	4	62.750.000	2	22.236.070	0	215.324.460	8	330.388.830	88,89	260,26	8	562.041.880	inf	64,06	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah PSKS Panti Penyandang Disabilitas yang di tingkatan Kapasitasnya	Orang					50		12		25		9		0		46		92,00		46		inf		DINSOS	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	inf			
Predikat Kinerja																											-	-			
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Kegiatan	0	87.367.504.733	0	17.698.340.466	1	47.331.433.267	355	8.032.311.838	0	16.062.690.429	0	11.113.287.251	3126	42.717.255.066	3481	77.925.544.584	348.100,00	164,64	3481	95.623.885.050	inf	109,45		-	-	-	
22	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	1.277.500.000	100	206.498.876	0	321.999.296	0	321.999.496	100	1.149.750.000	200	2.000.247.668	200,00	156,58	200	2.000.247.668	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
23	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0	12.853.277.824		2591	15.905.647.800	0	57.125.000	2591	7.632.686.000	0	43.995.000	2.51	13.944.412.260	2593.51	21.678.218.260	100,10	136,29	2593.51	34.531.496.084	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
24	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	155	1.812.125.000	155	319.921.720	0	456.889.260	0	456.861.840	155	1.630.136.795	310	2.863.809.615	200,00	158,04	310	2.863.809.615	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
25	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	200	1.277.500.000	100	210.408.000	0	316.177.000	0	324.148.000	200	1.149.750.000	300	2.000.483.000	150,00	156,59	300	2.000.483.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
26	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	200	289.690.000	100	116.615.850	0	27.300.000	0	117.215.850	200	260.721.000	300	521.852.700	150,00	180,14	300	521.852.700	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
27	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	155	155.294.950	155	64.697.425	0	51.307.000	0	30.471.025	155	139.765.455	310	286.240.905	200,00	184,32	310	286.240.905	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
28	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Panti Anak Terlantar Milik Masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan sandang	Panti		29.030.000.000		790.050.150	107	6.054.035.800	107	5.954.705.800	0	55.984.000	0	0	112	5.308.849.620	219	11.319.539.420	204,67	186,98	219	12.109.589.570	inf	41,71	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	455		0		0		0		0		2591		2591		inf		2591		569,45		DINSOS	-	-	-			
29	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	100	417.982.900	0	18.370.000	77	112.519.500	23	259.495.250	100	376.184.610	200	766.569.360	200,00	183,40	200	766.569.360	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
30	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	200	186.795.000	200	184.870.500	0	0	0	0	200	168.115.500	400	352.986.000	200,00	188,97	400	352.986.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
				Orang					200		200				200		400		200,00		400		inf		DINSOS	-	-	-			
31	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	jumlah penyediaan kelengkapan asrama yang mudah diakses	tabung		0	0	656	83.580.000	83	10.630.000	167	21.260.000	290	37.020.000	0	82.572.750	540	151.482.750	82,32	181,24	540	151.482.750	inf	inf	DINSOS	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I		II		III		IV															
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)														(7)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				buah					4662		593		1186		2065		0		3844		82,45		3844		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang					100		100		0		0		100		200		200,00		200		inf		DINSOS	-	-	-	-
32	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0	0		155	390.346.500	155	38.526.750	155	181.963.250	0	137.380.600	155	350.093.115	465	707.963.715	300,00	181,37	465	707.963.715	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
33	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Panti Anak terlantar Yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasana Asrama	Panti		17.892.406.833		1.043.665.240	4	7.380.488.366	0		0	0	4	7.151.867.663	112	6.555.615.629	116	13.707.483.292	2.900,00	185,73	116	14.751.148.532	inf	82,44	DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Panti Anak Terlantar milik masyarakat yang mendapatkan hibah uang pengadaan sarana dan prasarana asrama panti	Panti					97		0		0		94		0		94		96,91		94		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	455		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DINSOS	-	-	-	-
34	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0	0		100	36.168.650	0	0	42	15.252.870	58	20.915.780	100	32.551.785	200	68.720.435	200,00	190,00	200	68.720.435	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
35	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0	0		200	8.828.550	100	4.672.800	0	0	0	4.155.350	200	7.945.695	300	16.773.845	150,00	190,00	300	16.773.845	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
36	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0	0		155	8.673.100	35	1.938.000	34	1.899.800	52	2.929.350	155	7.805.790	276	14.572.940	178,06	168,02	276	14.572.940	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
37	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Panti Anak Milik Masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan UEP Entrepreneur	Panti		650.000.000		1.337.995.157	17	500.000.000	0		1	35.806.400	2	64.044.800	112	450.000.000	115	549.851.200	676,47	109,97	115	1.887.846.357	inf	290,44	DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	360		0		0		0		0		0		2591		2591		inf		2591		719,72		DINSOS	-	-	-	-
38	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang/tahun		0	0		160	915.888.400	80	163.867.935	0	238.304.000	80	325.250.265	235	919.767.060	395	1.647.189.260	246,88	179,85	395	1.647.189.260	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
39	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang		0	0		200	610.515.337	100	159.978.320	0	151.986.630	100	174.571.865	0	549.463.803	200	1.036.000.618	100,00	169,69	200	1.036.000.618	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
				Orang					200							200		200		100,00		200		inf		DINSOS	-	-	-	-	
40	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Panti Anak terlantar milik masyarakat yang mendapatkan Bimtek dan Sosial Entrepreneur	Panti		20.000.000.000		1.287.341.550	4	1.332.678.500	0		3	1.107.504.500	0	145.977.465	0	1.176.754.050	3	2.430.236.015	75,00	182,36	3	3.717.577.565	inf	18,59	DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Panti Anak Milik Masyarakat yang mendapatkan hibah uang untuk pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Panti					91		0		76		10		112		198		217,58		198		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	175		0		0		0		0		0		2591		2591		inf		2591		1.480,57		DINSOS	-	-	-	-
41	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0	0		75	170.761.600	75	37.780.800	0	54.640.000	0	40.465.700	235	153.685.440	310	286.571.940	413,33	167,82	310	286.571.940	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
42	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang		0	0		100	339.285.600	100	66.150.000	0	70.980.000	0	123.212.211	100	305.357.040	200	565.699.251	200,00	166,73	200	565.699.251	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Hari [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Kewenangan Provinsi																											
43	1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	15	0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-	
44	1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	15	0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-	
45	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	75	706.770.000	75	94.800.000	0	159.761.500	0	279.775.750	235	635.066.325	310	1.169.403.575	413,33	165,46	310	1.169.403.575	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah transport pekerja sosial ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	kali					60		8		13		23		0		44		73,33		44		inf		DINSOS	-	-	-
46	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	60	395.825.500	60	53.830.000	0	94.475.000	0	142.682.000	100	356.242.950	160	647.229.950	266,67	163,51	160	647.229.950	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah Transport pekerja sosial ke layanan pendidikan dasar	tiap kali					161		13		38		58		109		67,70		109		inf		DINSOS	-	-	-		
47	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Panti Anak Terlantar milik Masyarakat yang Mendapatkan Hibah Uang Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Panti	12.795.097.900		192.942.545		103	5.344.599.700	0	0	88	4.574.432.500	0	8.532.000	112	4.211.600.130	200	8.794.564.630	194,17	164,55	200	8.987.507.175	inf	70,24	DINSOS	-	-	-
48	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang/hari		0		0	336	31.637.886	84	6.607.218	84	6.710.673	84	6.657.200	200	38.115.954	452	58.091.045	134,52	183,61	452	58.091.045	inf	inf	DINSOS	-	-	-
				Orang/hari					336							200		200		59,52		200		inf		DINSOS	-	-	-	
49	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah perjalanan dinas yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang/hari		0		0	72	41.760.000	0	0	37	21.300.000	0	0	0	21.186.000	37	42.486.000	51,39	101,74	37	42.486.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang					75	0		38		0		235		273		364,00		273		inf		DINSOS	-	-	-	
50	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	110	41.760.000	15	5.665.000	68	25.670.000	2	765.600	100	37.584.000	185	69.684.600	168,18	166,87	185	69.684.600	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			jumlah makan dan minum aktivitas lapangan	kotak					740		100		455		14		0		569		76,89		569		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah bahan bakar minyak yang disediakan	liter					700		95		430		13		0		538		76,86		538		inf		DINSOS	-	-	-
			Jumlah perjalanan dinas pelayanan penelusuran keluarga	orang/ hari					100		14		61		2		0		77		77,00		77		inf		DINSOS	-	-	-
51	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	15	0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS	-	-	-	
52	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang		0		0	200	476.259.000	0	0	100	236.031.250	0	0	200	574.199.100	300	810.230.350	150,00	170,12	300	810.230.350	inf	inf	DINSOS	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
											I		II		III										IV						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		[Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi																												
			Orang						200							200			200		100,00		200		inf		DINSOS	-	-	-	
53	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	20	11.040.000	0	0	0	12	6.700.000	100	9.936.000	112	16.636.000	560,00	150,69	112	16.636.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-		
54	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	24.000.000	25	6.000.000	25	6.000.000	25	6.000.000	100	21.600.000	175	39.600.000	175,00	165,00	175	39.600.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
55	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	15	16.800.000	5	4.200.000	5	4.200.000	5	4.200.000	200	15.120.000	215	27.720.000	1.433,33	165,00	215	27.720.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
			Orang						15							200		200		1.333,33		200		inf		DINSOS	-	-	-		
56	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	155	28.800.000	39	7.200.000	39	7.200.000	39	7.200.000	235	25.920.000	352	47.520.000	227,10	165,00	352	47.520.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
57	1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Pengurus Panti Anak yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		7.000.000.000		193.068.000	112	1.058.395.128	7	66.466.306	8	72.450.000	92	868.797.191	0	1.448.687.453	107	2.456.400.950	95,54	232,09	107	2.649.468.950	inf	37,85	DINSOS	-	-	-	
			Jumlah PPKS Anak di dalam panti yang mengikuti Jambore Anak Regional Sumatera	Orang					750		47		51		616		0		714		95,20		714		inf		DINSOS	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	nan			
Predikat Kinerja																											-	-			
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Kegiatan	0	2.536.517.120	0	3.153.518.320	1	5.132.721.855	180	838.134.107	0	1.614.858.251	0	1.274.348.552	212	4.464.623.135	392	8.191.964.045	39.200,00	159,60	392	11.345.482.365	inf	447,29	-	-	-		
					0		0		0		180		0		0		0		180		inf		180		inf		-	-	-		
58	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang/Tahun		0		0	110	1.404.984.695	110	226.134.610	0	360.380.100	0	351.583.085	110	1.264.486.226	220	2.202.584.021	200,00	156,77	220	2.202.584.021	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
59	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	70	894.250.000	70	144.451.296	0	225.277.716	0	225.248.647	70	804.825.000	140	1.399.802.659	200,00	156,53	140	1.399.802.659	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
60	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		248.051.000		2.083.015.363	32	204.138.200	0	2.330.000	32	98.330.000	0	2.330.000	32	183.724.380	64	286.714.380	200,00	140,45	64	2.369.729.743	inf	955,34	DINSOS	-	-	-	
61	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	70	245.684.654	70	10.921.500	0	211.463.670	0	10.921.500	70	220.310.523	140	453.617.193	200,00	184,63	140	453.617.193	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
62	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Panti Lanjut Usia Milik Masyarakat yang mendapatkan Hibah uang penyediaan sandang	Panti		350.000.000		453.977.075	2	65.852.000	2	65.852.000	0	0	0	0	32	59.266.800	34	125.118.800	1.700,00	190,00	34	579.095.875	inf	165,46	DINSOS	-	-	-	
63	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang/Tahun		0		0	110	335.632.600	110	54.157.100	0	145.872.400	0	78.298.000	110	302.069.340	220	580.396.840	200,00	172,93	220	580.396.840	inf	inf	DINSOS	-	-	-	
64	1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Panti Swasta Lanjut Usia milik masyarakat yang mendapatkan akses Asramahibah uang untuk pengadaan sarana dan prasarana asrama	Panti		300.000.000		84.767.000	2	116.350.000	0	0	0	0	2	116.350.000	2	104.715.000	4	221.065.000	200,00	190,00	4	305.832.000	inf	101,94	DINSOS	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I		II		III										IV					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
65	1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang/tahun		0	0	110	366.679.880	110	27.798.400	0	78.855.200	0	233.710.680	110	330.011.892	220	670.376.172	200,00	182,82	220	670.376.172	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
66	1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Meter		0	0	60	190.967.250	7	27.025.000	35	136.328.000	8	17.880.000	0	174.009.375	50	355.242.375	83,33	186,02	50	355.242.375	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
				Pcs				10		1		6		1		70		78		780,00		78		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakes	buah				1228		151		724		95		0		970		78,99		970		inf		DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	botol				216		25		127		17		0		169		78,24		169		inf		DINSOS	-	-	-	-
				unit				31		4		18		2		0		24		77,42		24		inf		DINSOS	-	-	-	-
				Orang/Tahun				110		13		65		9		70		157		142,73		157		inf		DINSOS	-	-	-	-
67	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Penyediaan Alat Bantu Yang Disediakan	Unit		0	0	10	65.564.000	6	36.500.000	0	0	4	27.000.000	70	58.446.000	80	121.946.000	800,00	186,00	80	121.946.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-	-
68	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Panti Lanjut Usia Milik Masyarakat yang mendapatkan Hibah Uang Penyediaan Alat Bantu	Panti		150.000.000	0	1	63.700.000	1	63.700.000	0	0	0	0	2	57.330.000	3	121.030.000	300,00	190,00	3	121.030.000	inf	80,69	DINSOS	-	-	-	-
69	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang/Tahun		0	0	110	99.538.000	0	0	14	12.346.000	0	0	110	70.452.000	124	82.798.000	112,73	83,18	124	82.798.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
70	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang/Tahun		0	0	110	200.846.571	5	9.413.850	31	56.699.471	20	36.541.200	110	117.231.994	166	219.886.515	150,91	109,48	166	219.886.515	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
71	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	70	45.854.255	12	8.074.851	30	19.729.780	18	11.669.123	70	41.268.830	130	80.742.584	185,71	176,09	130	80.742.584	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
72	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksannay kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	500.000.000	0	186.019.500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	186.019.500	0,00	37,20	DINSOS	-	-	-	-	
73	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	70	177.616.400	70	33.122.500	0	51.815.564	0	34.073.317	70	143.834.760	140	262.846.141	200,00	147,99	140	262.846.141	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
74	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	70	94.780.000	70	50.820.000	0	20.530.000	0	9.600.000	70	82.602.000	140	163.552.000	200,00	172,56	140	163.552.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
75	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Panti Lanjut Usia Milik Masyarakat yang mendapatkan hibah uang penyediaan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Panti		988.466.120	345.739.382	32	15.750.000	0	0	32	15.750.000	0	0	2	14.175.000	34	29.925.000	106,25	190,00	34	375.664.382	inf	38,00	DINSOS	-	-	-	-
76	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang/Tahun		0	0	110	414.700.000	110	68.403.000	0	105.017.000	0	96.123.000	110	317.916.000	220	587.459.000	200,00	141,66	220	587.459.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
77	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	42	18.960.000	11	4.930.000	13	5.790.000	9	4.020.000	70	18.162.000	103	32.902.000	245,24	173,53	103	32.902.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I				II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
78	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang/Tahun		0		0	26	29.000.000	0	0	6	7.000.000	13	14.500.000	20	26.100.000	39	47.600.000	150,00	164,14	39	47.600.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-
79	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang / Kegiatan		0		0	15	22.500.000	3	4.500.000	4	6.000.000	3	4.500.000	70	20.250.000	80	35.250.000	533,33	156,67	80	35.250.000	inf	inf	DINSOS	-	-	-
80	1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia yang mengikuti kegiatan Lanjut Usia Berkreasi dan HLUN	Orang	0	0	0	0	500	59.373.350	0	0	500	57.673.350	0	0	32	53.436.015	532	111.109.365	106,40	187,14	532	111.109.365	inf	inf	DINSOS	-	-	-
			Jumlah PPKS Lanjut Usia yang di tingkatkan Kapasitasnya dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Orang	0	0			50		0	0	0	0	0	0		0	0	0,00		0		nan		DINSOS	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Kegiatan	0	0	0	0	1	1.630.192.251	0	221.819.211	0	396.372.867	0	672.302.408	40	1.519.934.485	40	2.810.428.971	4.000,00	172,40	40	2.810.428.971	inf	inf		-	-	-
81	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	40	506.416.150	40	82.379.100	0	128.393.500	0	126.813.425	40	455.774.535	80	793.360.560	200,00	156,66	80	793.360.560	inf	inf	DINSOS	-	-	-
82	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	0	217.993.178	0	97.457.700	0	42.075.700	0	78.446.100	40	196.193.860	40	414.173.360	inf	189,99	40	414.173.360	inf	inf	DINSOS	-	-	-
83	1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	0	513.271.873	0	26.279.700	0	137.043.417	0	320.102.963	40	514.706.145	40	998.132.225	inf	194,46	40	998.132.225	inf	inf	DINSOS	-	-	-
84	1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	0	27.289.400	0	7.701.100	0	10.754.000	0	6.834.000	40	24.560.460	40	49.849.560	inf	182,67	40	49.849.560	inf	inf	DINSOS	-	-	-
85	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	0	365.221.650	0	8.001.611	0	78.106.250	0	140.105.920	40	328.699.485	40	554.913.266	inf	151,94	40	554.913.266	inf	inf	DINSOS	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	1.06.05	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak	Orang		903.911.810		714.469.000	25	764.870.765	0	24.411.800		198.290.902		230.192.200	0	1.912.465.037	0	2.365.359.939	0,00	309,25	0	3.079.828.939	nan	340,72		-	-	-
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang dilakukan proses pengangkatan anak	Kegiatan	0	78.292.905	0	46.352.200	1	45.335.350	0	0	0	0	0	11.950.000	0	40.801.815	0	52.751.815	0,00	116,36	0	99.104.015	nan	126,58		-	-	-
1	1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak	Kali		78.292.905		46.352.200	4	45.335.350	0	0	0	0	1	11.950.000	6	40.801.815	7	52.751.815	175,00	116,36	7	99.104.015	inf	126,58	DINSOS	-	-	-
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	25		0		25		0	0	4	0		0	4			16,00		4		16,00		DINSOS	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	126,58					
Predikat Kinerja																								-	ST					
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			0	825.618.905	0	668.116.800	0	719.535.415	0	24.411.800	0	198.290.902	0	218.242.200	0	1.871.663.222	0	2.312.608.124	nan	321,40	0	2.980.724.924	nan	361,03		-	-	-
2	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan	Keluarga	0	825.618.905	0	668.116.800	0	719.535.415	0	24.411.800	0	198.290.902	0	218.242.200	0	1.871.663.222	0	2.312.608.124	nan	321,40	0	2.980.724.924	nan	361,03	DINSOS	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota																												
			Jumlah Pendamping BPNT/Sembako yang mendapatkan Sembako di tingkatkan Kapasitasnya	orang	80		0		70		0		70		0		0		70		100,00		70		87,50		DINSOS	-	-	-	
			Jumlah Pengelola data Fakir Miskin yang mendapatkan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi DTKS di tingkatkan kapasitasnya	orang	172		0		100		0		0		100		0		100		100,00		100		58,14		DINSOS	-	-	-	
			Jumlah pengelola data Fakir Miskin yang mendapatkan Rakor DTKS ditingkatkan kapasitasnya	Pengelola Data	80		0		70		0		0		70		0		70		100,00		70		87,50		DINSOS	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	180,51					
Predikat Kinerja																									-	ST					
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	persen		515.076.293		914.027.666	100	833.409.826		54.697.800		407.260.120		132.079.200	0	677.734.170	0	1.271.771.290	0,00	152,60	0	2.185.798.956	nan	424,36	-				
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya pemberian bantuan terhadap korban bencana sosial dan alam	Kegiatan	0	515.076.293	0	914.027.666	1	833.409.826	0	54.697.800	0	407.260.120	0	132.079.200	0	677.734.170	0	1.271.771.290	0,00	152,60	0	2.185.798.956	nan	424,36	-	-	-	-	
1	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya pengadaan bantuan logistik bahan makanan sebagai bufferstock di gudang logistik provinsi untuk korban bencana alam di wilayah sumatera barat	box		0		210.974.710	650	214.192.250	69	22.780.000	412	135.663.210	0	6.340.000	0	191.900.025	481	356.683.235	74,00	166,52	481	567.657.945	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
			Terlaksananya pengadaan bantuan logistik bahan makanan sebagai bufferstock di gudang logistik provinsi untuk korban bencana alam di wilayah sumatera barat	dus				210		22		133		0		0		155		73,81		155		inf		DINSOS	-	-	-	-	
				kg				230		24		146		0		0		170		73,91		170		inf		DINSOS	-	-	-	-	
				kaleng				212		23		134		0		0		157		74,06		157		inf		DINSOS	-	-	-	-	
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-	-	-	
2	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terlaksananya penyediaan paket pengungsian untuk korban bencana	pasang		0		0	120	117.762.000	0	0	1	1.420.900	36	37.785.500	0	35.285.985	37	74.492.385	30,83	63,26	37	74.492.385	inf	inf	DINSOS	-	-	-	-
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINSOS	-	-	-	-	
			Terlaksananya penyediaan paket pengungsian untuk korban bencana	buah				59		0		1		18		0		19		32,20		19		inf		DINSOS	-	-	-	-	
3	1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Pengadaan Paket Sandang sebagai bufferstock gudang logistik	buah		515.076.293		517.206.350	285	367.975.826	11	14.813.000	178	229.481.010	67	86.453.700	0	331.226.385	256	661.974.095	89,82	179,90	256	1.179.180.445	inf	228,93	DINSOS				
			Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial khusus bagi kelompok rentan di daerah rawan bencana alam dan sosial	Kab/Kota					2		0		1		0		0		1		50,00		1		inf		DINSOS				
			Terlaksananya Pengadaan Paket Sandang sebagai bufferstock gudang logistik	pcs				1355		55		845		318		0		1218		89,89		1218		inf		DINSOS					
			jumlah klien rujukan pelayanan orang terlantar	Orang				36		1		22		8		0		31		86,11		31		inf		DINSOS	-	-	-	-	
			Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial khusus bagi kelompok rentan di daerah rawan bencana alam dan sosial	Orang	0		0		35		1		22		8		0		31		88,57		31		inf		DINSOS	-	-	-	-
4	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya pemberian pelatihan psikososial kepada masyarakat di daerah raan bencana sosial	Orang		0		185.846.606	45	133.479.750	5	17.104.800	12	40.695.000	0	1.500.000	0	119.321.775	17	178.621.575	37,78	133,82	17	364.468.181	inf	inf	DINSOS				
			Terlaksananya pemberian pelatihan psikososial kepada masyarakat di daerah raan bencana alam	Kab/Kota					3		0		1		0		0		1		33,33		1		inf		DINSOS				
				Orang				45		0		12		0		0		12		26,67		12		inf		DINSOS					
			Terlaksananya pemberian pelatihan psikososial kepada masyarakat di daerah raan bencana sosial	Kab/Kota					2		0		1		0		0		1		50,00		1		inf		DINSOS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAMPAHLAWAN	Pelestarian Taman Makam Pahlawan	persen		126.729.000		118.278.000	100	126.729.173		4.260.000		30.701.000		0	114.056.256	0	149.017.256	0,00	117,59	0	267.295.256	nan	210,92						
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pelestarian TMP	TMP	0	126.729.000	0	118.278.000	1	126.729.173	0	4.260.000	0	30.701.000	0	0	114.056.256	0	149.017.256	0,00	117,59	0	267.295.256	nan	210,92						
1	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	unit	1	126.729.000	0	118.278.000	1	126.729.173	0	4.260.000	0	30.701.000	0	0	114.056.256	0	149.017.256	0,00	117,59	0	267.295.256	0,00	210,92	DINSOS	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,00	210,92							
Predikat Kinerja																							SR	ST							

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I		II		III		IV																																
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)			(17)	(18)					(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				154.198.244.900		33.400.340.174		35.070.841.697		3.298.390.725		12.271.745.979		9.010.479.006		9.825.286.043		34.405.901.753	98,10	67.806.241.927		43,97																									
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				136.011.776.900		23.370.802.746		25.862.255.235		2.861.944.613		9.123.960.313		5.876.779.116		6.961.304.785		24.823.988.827	95,99	48.194.791.573		35,43																									
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				136.011.776.900		23.370.802.746		25.862.255.235		2.861.944.613		9.123.960.313		5.876.779.116		6.961.304.785		24.823.988.827	95,99	48.194.791.573		35,43																									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah	persen		136.011.776.900		23.370.802.746	100	25.862.255.235		2.861.944.613		9.123.960.313		5.876.779.116		6.961.304.785	0	24.823.988.827	0,00	95,99	0	48.194.791.573	nan	35,43																							
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen	0	2.058.010.681	0	212.724.667	100	74.138.620	0	20.689.300	0	21.975.000	0	15.640.000	0	13.072.500	0	71.376.800	0,00	96,27	0	284.101.467	nan	13,80																							
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.281.655.150		136.713.367	0	31.314.920	0	13.019.600	0	5.568.450	0	4.720.000	0	6.336.500	0	29.644.550	nan	94,67	0	166.357.917	nan	12,98	DINAKERTRANS	Menyusun perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku	tidak ada	komitmen dari pencapaian target Perjanjian Kinerja																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	Dokumen	10		2		2		1		1		0		0		2		100,00		4		40,00		DINAKERTRANS																						
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen	30	200.000.000	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	100,00	nan	4	0	13,33	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran																					
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10	340.127.531	2	27.744.400	3	42.823.700	1	7.669.700	1	16.406.550	1	10.920.000	0	6.736.000	3	41.732.250	100,00	97,45	5	69.476.650	50,00	20,43	DINAKERTRANS	Menyusun laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	tidak ada	komitmen dari pelaksanaan kegiatan setiap triwulan																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10		0	0			3		0		0		0		3		inf		3		30,00		DINAKERTRANS																						
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Dokumen	20	236.228.000	4	48.266.900	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	48.266.900	20,00	20,43	DINAKERTRANS	Menyusun dokumen sesuai dengan target PK yang ditetapkan	tidak ada	komitmen dari pelaksanaan kegiatan setiap triwulan																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								13,46																									
Predikat Kinerja																							-	SR																									
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	persen	0	112.145.786.739	0	19.562.246.465	100	23.545.224.269	0	2.585.703.652	0	8.221.847.058	0	5.664.058.492	0	5.786.173.572	0	22.257.782.774	0,00	94,53	0	41.820.029.239	nan	37,29																							
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang/ Bulan	975	109.753.746.739	195	19.218.973.715	169	23.292.834.269	0	2.542.510.352	169	8.130.521.008	0	5.592.620.692	0	5.718.400.572	169	21.984.052.624	100,00	94,38	364	41.203.026.339	37,33	37,54	DINAKERTRANS	Menyusun daftar gaji ASN dan PPPK setiap bulan	tidak ada	Disiplin dari ASN dan PPPK terhadap aturan yang berlaku																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAKERTRANS																						
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1.875.000.000		296.930.800	0	222.390.000	0	35.965.000	0	82.735.000	0	64.285.000	0	61.365.000	0	244.350.000	nan	109,87	0	541.280.800	nan	28,87	DINAKERTRANS	Menyusun daftar honor pengelola keuangan setiap bulan	tidak ada	tidak ada																			
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	90		18		18		0		18		0		0		18		100,00		36		40,00		DINAKERTRANS																						
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	60	50.000.000	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	100,00	nan	12	0	20,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran																					
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	5	130.000.000	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	500,00	nan	5	0	100,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran																					
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	6	100.300.000	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	1	0	16,67	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran																					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan		236.740.000		46.341.950	0	30.000.000	0	7.228.300	0	8.591.050	0	7.152.800	0	6.408.000	0	29.380.150	nan	97,93	0	75.722.100	nan	31,99	DINAKERTRANS	Menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku	tidak ada	Tertib dari pelaksanaan kegiatan setiap triwulan,																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD																											semester dan tahunan	
			Jumlah Laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran yang disiapkan	dokumen	90		18		18		3		5		5		5		18		100,00		36		40,00		DINAKERTRANS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	9,84					
Predikat Kinerja																									-	SR					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah	persen	0	1.082.295.000	0	98.686.115	100	35.460.000	0	4.445.000	0	21.457.300	0	1.460.000	0	9.870.000	0	37.232.300	0,00	105,00	0	135.918.415	nan	12,56					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	5	80.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	20,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		78.000.000		5.182.515	0	5.800.000	0	0	0	5.757.300	0	0	0	0	5.757.300	nan	99,26	0	10.939.815	nan	14,03	DINAKERTRANS	Melaksanakan pengaman terhadap BMD	Belum maksimalnya anggaran untuk pengaman BMD	Terjaganya BMD		
			Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	25		5		1	0		1		0		0		1		100,00		6		24,00		DINAKERTRANS		tidak ada			
			Jumlah Closed-Circuit Television (CCTV) yang dipasang	Unit	0		0		1	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAKERTRANS					
			Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Dokumen	0		0		1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAKERTRANS					
			Jumlah dokumen pengamanan Hukum	Unit	0		0		1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAKERTRANS					
			Jumlah tanah yang bersertifikat	Persil	0		0		1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAKERTRANS					
			Jumlah tanda kepemilikan tanah	Unit	0		0		1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAKERTRANS					
			Jumlah tanda letak tanah yang dibangun	Unit	0		0		1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAKERTRANS					
			Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	Unit	0		0		1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAKERTRANS					
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		794.295.000		93.503.600	0	29.660.000	0	4.445.000	0	15.700.000	0	1.460.000	0	9.870.000	0	31.475.000	nan	106,12	0	124.978.600	nan	15,73	DINAKERTRANS	Melaksanakan penyusunan laporan BMD	Belum maksimalnya anggaran untuk penyusunan laporan BMD	Terinventarisir inventaris Disnakertrans	
			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	5		1		1	0		1		0		0		1		100,00		2		40,00		DINAKERTRANS					
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	80.000.000	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100,00	nan	2	0	20,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	50.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	20,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	1,98					
Predikat Kinerja																									-	SR					
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00						
16	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	5	20.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
17	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	20.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	persen	0	796.250.000	0	125.032.000	100		0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	125.032.000	nan	15,70						
18	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	716.250.000	1	125.032.000	180		0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	125.032.000	20,00	17,46	DINAKERTRANS	Terlaksananya disiplin kepegawaian	tidak ada anggaran	Aturan diplin bagi ASN		
19	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
20	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			

		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
												I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
21	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	80.000.000	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat Daerah	persen	0	3.410.507.600	0	777.262.104	100	296.250.839	0	59.427.100	0	101.406.175	0	31.207.979	0	160.401.758	0	352.443.012	0,00	118,97	0	1.129.705.116	nan	33,12					
22	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	300.000.000	6	59.985.800	6	15.635.600	2	2.498.600	2	2.498.400	0	2	10.630.000	6	15.627.000	100,00	99,94	12	75.612.800	40,00	25,20	DINAKERTRANS	Terlaksananya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN		
23	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	75	625.000.000	15	59.528.200	15	15.265.000	2	2.765.000	13	12.488.600	0	0	0	15	15.253.600	100,00	99,93	30	74.781.800	40,00	11,97	DINAKERTRANS	Terlaksananya pelayanan kantor	Belum maksimalnya anggaran	Meningkatkan kinerja ASN		
24	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
25	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	95	914.000.000	19	190.764.600	17	50.230.000	5	11.779.900	9	8.483.700	0	0	3	29.938.400	17	50.202.000	100,00	99,94	36	240.966.600	37,89	26,36	DINAKERTRANS	Terlaksananya pelayanan kantor	Belum maksimalnya anggaran	Meningkatkan kinerja ASN	
26	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	35	325.000.000	7	54.418.500	7	19.390.000	2	2.495.000	2	2.497.000	3	14.390.000	0	7	19.382.000	100,00	99,96	14	73.800.500	40,00	22,71	DINAKERTRANS	Terlaksananya pelayanan kantor	Belum maksimalnya anggaran	Meningkatkan kinerja ASN		
27	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	33.600.000	3	6.600.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	3	6.600.000	20,00	19,64	DINAKERTRANS	Terlaksananya pelayanan kantor	Belum maksimalnya anggaran	Meningkatkan kinerja ASN		
28	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
29	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.062.907.600	1	390.425.004	60	195.730.239	10	39.888.600	20	75.438.475	10	16.817.979	20	119.833.358	60	251.978.412	100,00	128,74	61	642.403.416	1.220,00	60,44	DINAKERTRANS	Terlaksananya koordinasi daerah dan pusat	tidak ada	Terlaksanya regulasi dengan baik	
30	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	150.000.000	1	15.540.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	15.540.000	20,00	10,36	DINAKERTRANS	Terlaksananya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah dengan perencanaan	persen	0	2.044.131.000	0	120.600.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	120.600.120	nan	5,90						
31	X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	Unit	1	482.074.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
32	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	30	50.000.000	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
33	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	350.000.000	4	120.600.120	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	120.600.120	20,00	34,46	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	Belum maksimalnya anggaran	Meningkatkan kinerja ASN		
34	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.162.057.000	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,42	1,01					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	0	9.615.777.400	0	1.777.937.321	100	1.667.747.767	0	179.809.561	0	718.731.380	0	142.846.385	0	883.477.075	0	1.924.864.401	0,00	115,42	0	3.702.801.722	nan	38,51					
35	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2200	81.000.000	440	9.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	0	0	0	0	0	1	3.000.000	100,00	100,00	441	12.000.000	20,05	14,81	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN		
36	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	2.574.777.400	4	433.956.114	1	441.339.640	1	65.515.901	0	145.489.503	0	36.786.490	0	185.017.608	1	432.809.502	100,00	98,07	5	866.765.616	25,00	33,66	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN	
37	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	34	6.960.000.000	7	1.334.981.207	1	1.223.408.127	1	111.293.660	0	573.241.877	0	106.059.895	0	698.459.467	1	1.489.054.899	100,00	121,71	8	2.824.036.106	23,53	40,58	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,34	2,41					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	persen	0	4.819.018.480	0	696.313.954	100	243.433.740	0	11.870.000	0	38.543.400	0	21.566.260	0	108.309.880	0	180.289.540	0,00	74,06	0	876.603.494	nan	18,19					
38	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	5	237.401.480	1	39.160.000	1	56.600.370	0	2.800.000	0	5.555.000	0	5.457.500	1	24.845.790	1	38.658.290	100,00	68,30	2	77.818.290	40,00	32,78	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(out/put)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																											
39	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	2.363.637.000	3	166.673.399	14	123.736.250	2	5.500.000	4	26.908.400	3	12.580.760	5	75.894.090	14	120.883.250	100,00	97,69	17	287.556.649	130,77	12,17	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN
40	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	235.000.000	3	40.000.000	40	10.149.920	0	0	20	6.080.000	0	0	20	4.000.000	40	10.080.000	100,00	99,31	43	50.080.000	286,67	21,31	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN
41	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	562.980.000	3	101.600.000	100	10.668.600	34	3.570.000	0	0	33	3.528.000	33	3.570.000	100	10.668.000	100,00	99,99	103	112.268.000	686,67	19,94	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN
42	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	982.000.000	2	333.080.555	10	42.278.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	333.080.555	20,00	33,92	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN
43	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	438.000.000	2	15.800.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	15.800.000	20,00	3,61	DINAKERTRANS	Terlaksanya pelayanan kantor	tidak ada	Meningkatkan kinerja ASN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								20,77	2,88					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.749.133.000		9.569.563.433		8.996.437.462		433.566.112		2.975.837.666		3.100.438.390		2.860.878.173		9.370.720.341		104,16		18.940.283.774		120,26					
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			15.749.133.000		9.569.563.433		8.996.437.462		433.566.112		2.975.837.666		3.100.438.390		2.860.878.173		9.370.720.341		104,16		18.940.283.774		120,26					
2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang disusun	Dokumen		611.000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00				
2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang ditetapkan	Dokumen	0	611.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00				
1	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	5	611.000	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	1	0	20,00	0,00	DINAKERTRANS	mewajibkan setiap provinsi dan Kab/Kota untuk mentyusun RTKD	Belum semua Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk menyusun RTKD	Rencana Tenaga Kerja Makro wajib disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Kab. Kota	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								20,00	0,00					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	persen		8.761.220.915		8.151.036.980	35,72	6.786.324.000		155.522.150		2.561.706.745		2.827.633.600		2.546.920.357	0	8.091.782.852	0,00	119,24	0	16.242.819.832	nan	185,39				
2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pencari kerja yang dilatih pemerintah dan LPKS	persen	0	6.429.012.250	0	7.712.025.050	27,12	6.767.979.000	0	154.690.550	0	2.548.692.745	0	2.824.033.600	0	2.546.140.107	0	8.073.557.002	0,00	119,29	0	15.785.582.052	nan	245,54				
			Persentase pencari kerja yang dilatih pemerintah	persen	0		0		2,99		0	0	0		0		0			0,00		0		nan						
			Persentase penacri kerja yang dilatih pemerintah	persen	0		0		3,81		0	0	0		0		0			0,00		0		nan						
1	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun 2023	Orang	2	6.033.594.750		7.649.957.000	530		0	0	0	496	0	0	0	496	0	93,58	nan	496	7.649.957.000	24.800,00	126,79	DINAKERTRANS	menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh BPVP Padang, BLK Provinsi, BLK Kab/Kota serta LPKS	Tidak ada		support anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, kab/kota dan merupakan target dari program unggulan gubernur untuk menciptakan 100000 milenial entreprenneur, dan adanya kemudahan mengakses pelatihan melalui aplikasi sisnaker
2	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun 2023	Orang		0		0	624	4.405.000.000	0	92.314.100	160	1.307.511.300	384	1.887.111.900	384	1.748.682.700	928	5.035.620.000	148,72	114,32	928	5.035.620.000	inf	inf	DINAKERTRANS	menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh	Tidak ada	support anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, kab/kota dan merupakan target dari

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINA KERTRANS				program unggulan gubernur untuk menciptakan 100000 milenial entrepreneur, dan adanya kemudahan mengakses pelatihan melalui aplikasi sisnaker
3	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		0		0	272	2.135.000.000	64	53.919.000	96	1.187.831.725	102	813.962.700	160	759.286.575	422	2.815.000.000	155,15	131,85	422	2.815.000.000	inf	inf	DINA KERTRANS	menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh BPVP Padang, BLK Provinsi	Tidak ada		support anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, kab/kota dan merupakan target dari program unggulan gubernur untuk menciptakan 100000 milenial entrepreneur, dan adanya kemudahan mengakses pelatihan melalui aplikasi sisnaker
4	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah peserta pemagangan dalam negeri	Orang		395.417.500		62.068.050	20	227.979.000	0	8.457.450	20	53.349.720	0	122.959.000	0	38.170.832	20	222.937.002	100,00	97,79	20	285.005.052	inf	72,08	DINA KERTRANS	menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemagangan yang diadakan	Masih kurangnya kompetensi pencari kerja		support anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, kab/kota dan merupakan target dari program unggulan gubernur untuk menciptakan 100000 milenial entrepreneur, dan adanya kemudahan mengakses pelatihan melalui aplikasi sisnaker
			Jumlah peserta yang mengikuti seleksi magang ke jepang	Orang					200		0		0		104		0		104		52,00		104		inf		DINA KERTRANS				
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	Lembaga	0			12		2		8		7		0		17		141,67		17		inf		DINA KERTRANS					
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	85		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DINA KERTRANS				
5	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga		0		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINA KERTRANS			tidak ada anggaran	
6	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga		0		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINA KERTRANS			tidak ada anggaran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(out/put)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
7	2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran	
8	2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		tidak ada anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	persen	0	392.975.000	0	76.078.290	71.43	18.345.000	0	831.600	0	13.014.000	0	3.600.000	0	780.250	0	18.225.850	0,00	99,35	0	94.304.140	nan	24,00					
9	2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Lembaga	50	392.975.000	10	76.078.290	2	18.345.000	0	831.600	4	13.014.000	0	3.600.000	0	780.250	4	18.225.850	200,00	99,35	14	94.304.140	28,00	24,00	DINAKERTRANS	Memberikan penyuluhan dan imbingan konsultasi kepada calon pencaker	Minimnya kemampuan pencaker dalam menggunakan bahasa asing	Mencarikan peluang kerja di perusahaan melalui program AKAD, AKL, AKAN, Job Fair dan Tracer Study	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,15	2,67					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tenaga kerja formal	persen	0	1.939.233.665	0	362.933.640	36,7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	362.933.640	nan	18,72					
10	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	5	1.939.233.665	1	362.933.640	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	362.933.640	20,00	18,72	DINAKERTRANS	mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan baik di Provinsi maupun Kab/Kota yang mendapat alokasi anggaran peningkatan produktivitas tenaga kerja dari Kementrian	dukungan APBD di provinsi tahun 2023 tidak ada	adanya dukungan anggaran yang kuat dari pusat dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,43	1,87					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja	persen		1.199.362.000		230.742.870	36,01	725.475.212		97.702.400		194.580.062		184.851.400		59.047.700	0	536.181.562	0,00	73,91	0	766.924.432	nan	63,94					
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persetase tenaga kerja formal	persen	0	806.462.500	0	133.873.880	36,7	607.895.750	0	15.704.450	0	167.702.150	0	184.619.400	0	50.792.200	0	418.818.200	0,00	68,90	0	552.692.080	nan	68,53					
1	2.07.04.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	450	66.277.550	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS				
2	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	1580	638.209.750	530	64.220.050	20	27.895.750	5	5.675.850	5	3.098.250	6	2.978.200	4	0	20	11.752.300	100,00	42,13	550	75.972.350	34,81	11,90	DINAKERTRANS	memberikan penyuluhan dan bimbingan konsultasi kepada calon pencari kerja agar meningkatkan kemampuan serta memberikan motivasi dalam menghadapi dunia kerja	minimnya kemampuan pencari kerja dalam penggunaan bahasa asing, jenis pelatihan yang tersedia di BLK belum memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	adanya peluang kesempatan kerja melalui pelaksanaan job fair, penempatan tenaga kerja melalui tracer study	
3	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	1000	50.000.000	100	9.359.900	100	10.000.000	50	8.216.800	50	668.200	0	0	0	0	100	8.885.000	100,00	88,85	200	18.244.900	20,00	36,49	DINAKERTRANS	menyebarkan/luaskan informasi mengenai tersedianya layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada masyarakat			
4	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	2	51.975.200	40	60.293.930	150	570.000.000	0	1.811.800	30	163.935.700	50	181.641.200	70	50.792.200	150	398.180.900	100,00	69,86	190	458.474.830	9.500,00	882,10	DINAKERTRANS		minimnya kemampuan pencari kerja dalam penggunaan bahasa asing, jenis pelatihan yang tersedia di BLK belum memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	adanya peluang kesempatan kerja melalui pelaksanaan job fair, penempatan tenaga kerja melalui tracer study, serta pemagangan dalam dan luar negeri	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2.388,70	232,62					
Predikat Kinerja																									ST	ST					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase tenaga kerja in formal	persen	0	392.899.500	0	96.868.990	0.63	117.579.462	0	81.997.950	0	26.877.912	0	232.000	0	8.255.500	0	117.363.362	0,00	99,82	0	214.232.352	nan	54,53										
5	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	75000	392.147.500	15000	96.868.990	13000	33.300.000	10000	10.442.800	5000	14.214.212	0	232.000	0	8.255.500	15000	33.144.512	115,38	99,53	30000	130.013.502	40,00	33,15	DINAKERTRANS	penyebarluasan informasi kepada masyarakat terutama pencari kerja mengenai Karirhub agar lebih mudah dalam mengakses informasi mengenai lowongan kerja yang sesuai	tidak ada	kegiatan job fair membantu menyebarkan informasi mengenai aplikasi online karirhub						
6	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	5	752.000	0	0	400	84.279.462	0	71.555.150	248	12.663.700	0	0	0	0	248	84.218.850	62,00	99,93	248	84.218.850	4.960,00	11.199,32	DINAKERTRANS	menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan job fair kepada masyarakat	minimnya kemampuan pencari kerja dalam penggunaan bahasa asing, ketidakcocokan kebutuhan pemberi kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh pencari kerja	perusahaan yang ikut serta dalam kegiatan job fair skala nasional						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								833,33	1.872,08											
Predikat Kinerja																								ST	ST											
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	persen		989.319.000		410.929.233	11.83	1.006.159.800		32.249.450		45.020.600		31.539.190		39.818.150	0	148.627.390	0,00	14,77	0	559.556.623	nan	56,56										
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang disyahkan PP/PKB, SP/SB	persen	0	910.912.250	0	246.698.233	11.26	86.499.850	0	11.664.550	0	33.970.000	0	9.449.300	0	0	0	55.083.850	0,00	63,68	0	301.782.083	nan	33,13										
1	2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	185	11.756.000	0	0	75	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di perusahaan	minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	adanya pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan, adanya advokasi dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan,						
2	2.07.05.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan	90	10.490.000	0	0	75	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS	melaksanakan penyusunan PP/PKB di perusahaan	minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	adanya pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan, adanya advokasi dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, melakukan pengawasan dan penegakan						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																														hukum ketenagakerjaan,
3	2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	5	888.666.250	1	246.698.233	30	86.337.850	5	11.664.550	8	33.970.000	8	9.449.300	9	0	30	55.083.850	100,00	63,80	31	301.782.083	620,00	33,96	DINAKERTRANS	membentuk LKS Bipartit, mngadakan bimtek SUSU, melaksanakan penyusunan PP/PPKB di perusahaan	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	melakukan pembinaan norma K3 di perusahaan secara berkala, melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan, melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								206,67	11,32					
Predikat Kinerja																								ST	SR					
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	persen	0	50.458.750	0	146.077.000	1,94	76.792.000	0	20.584.900	0	11.050.600	0	22.089.890	0	6.950.150	0	60.675.540	0,00	79,01	0	206.752.540	nan	409,75				
4	2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	250	5.000.000	0	0	10	23.650.000	5	20.584.900	0	0	0	0	150.000	5	20.734.900	50,00	87,67	5	20.734.900	2,00	414,70	DINAKERTRANS	Penerapan SMK3 di perusahaan	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	melakukan pembinaan norma K3 di perusahaan secara berkala, melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan, melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	
5	2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseslesaikan	Perkara	100	28.938.750	0	0	15	31.013.000	0	0	9	11.050.600	5	12.962.250	5	6.500.150	19	30.513.000	126,67	98,39	19	30.513.000	19,00	105,44	DINAKERTRANS	mediasi bagi pekerja yang mengalami permasalahan dengan perusahaan	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	melakukan pembinaan norma K3 di perusahaan secara berkala, melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan, melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
6	2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja		8.000.000		0	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	0,00	DINAKERTRANS		Tidak ada anggaran		
			Dokumen data permasalahan serikat pekerja, serikat buruh dan organisasi perusahaan	Dokumen	5		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	DINAKERTRANS				
7	2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	95	520.000	0	0	10	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS	Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara		Terbentuknya LKS Tripartit

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																												pekerja, pengusaha dan pemerintah		
8	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	2	8.000.000	50	146.077.000	16	21.025.000	0	0	0	0	10	9.127.640	0	300.000	10	9.427.640	62,50	44,84	60	155.504.640	3.000,00	1.943,81	DINAKERTRANS	Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah	Kurangnya dukungan anggaran	Terlaksananya Bimtek Struktur Skala Upah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	307,99				
Predikat Kinerja																									-	ST				
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah penetapan UMP	SK	0	27.948.000	0	18.154.000	1	842.867.950	0	0	0	0	0	0	32.868.000	0	32.868.000	0,00	3,90	0	51.022.000	nan	182,56					
9	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan		17.840.000		18.154.000	0	17.868.000	0	0	0	0	0	0	32.868.000	0	32.868.000	nan	183,95	0	51.022.000	nan	286,00	DINAKERTRANS	Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah		UMP wajib ditetapkan oleh pemerintah provinsi setiap tahunnya	
			Jumlah Penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP)	Surat Keputusan	5		0		1	0	0	0	0	0	1		1		100,00		1		20,00		DINAKERTRANS					
10	2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	SK	5	400.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		Tidak ada anggaran		
11	2.07.05.1.03.04	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah SK penetapan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	SK	5	400.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS		Tidak ada anggaran		
12	2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	900000	9.308.000	0	0	6000	824.999.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAKERTRANS	Usulan dipindahkan ke Dinas Sosial dan Biro Kesra	Tidak merupakan kewenangan Disnakertrans		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	23,83				
Predikat Kinerja																									-	SR				
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	persen		3.555.163.000		720.545.100	40	478.478.450		148.092.112		174.530.259		56.414.200		215.091.966	0	594.128.537	0,00	124,17	0	1.314.673.637	nan	36,98				
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan norma kerja K3	perusahaan	0	3.555.163.000	0	720.545.100	40	478.478.450	0	148.092.112	0	174.530.259	0	56.414.200	0	215.091.966	0	594.128.537	0,00	124,17	0	1.314.673.637	nan	36,98				
1	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	4360	1.029.651.750	872	229.710.150	283	197.132.700	0	11.556.850	348	97.856.711	0	23.106.950	0	26.833.524	348	159.354.035	122,97	80,84	1220	389.064.185	27,98	37,79	DINAKERTRANS	melakukan pembinaan Norma K3 di perusahaan secara berkala, melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan,	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	adanya advokasi dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, adanya pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan, terlaksananya penyusunan PPK/PKB di perusahaan, terbentuknya LKS Bipartit, terlaksananya Bimtek SUSU, tercapainya cakupan BPJS Ketenagakerjaan
2	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	500	631.929.250	100	115.208.550	145	60.500.350	10	12.351.200	40	15.321.800	0	8.262.750	50	21.049.600	100	56.985.350	68,97	94,19	200	172.193.900	40,00	27,25	DINAKERTRANS	melakukan pembinaan Norma K3 di perusahaan secara berkala, melakukan pengawasan dan penegakan hukum	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan	adanya advokasi dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan dalam

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
3	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan		1.893.582.000		375.626.400	0	70.657.000	0	52.961.000	0	9.993.500	0	2.499.500	0	2.050.000	0	67.504.000	nan	95,54	0	443.130.400	nan	23,40	DINAKERTRANS	ketenagakerjaan di perusahaan,	perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	penegakan hukum ketenagakerjaan,	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan	Perusahaan	450		90		95		20		40		35		16		111		116,84		201		44,67	DINAKERTRANS	melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	adanya advokasi dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan dalam penerapan Norma K3 diperusahaan		
4	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan [UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan		0		0	0	150.188.400	0	71.223.062	0	51.358.248	0	22.545.000	0	165.158.842	0	310.285.152	nan	206,60	0	310.285.152	nan	inf	DINAKERTRANS	melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	adanya advokasi dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan dalam penerapan Norma K3 diperusahaan	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan	Perusahaan					95		20		40		35		16		111		116,84		111		inf	DINAKERTRANS	melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	rasio pengawas dengan perusahaan yang minim, minimnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	adanya advokasi dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan dalam penerapan Norma K3 diperusahaan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.437.335.000		459.973.995		212.149.000		2.880.000		171.948.000		33.261.500		3.103.085		211.192.585		99,55		671.166.580		27,54					
3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				2.437.335.000		459.973.995		212.149.000		2.880.000		171.948.000		33.261.500		3.103.085		211.192.585		99,55		671.166.580		27,54					
3.32.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen		0		0	100	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan					
3.32.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah dengan perencanaan	persen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan					
1	3.32.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
3.32.02		PROGRAM Perencanaan KAWASANTRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	persen		206.777.000		136.326.045	100	25.958.000		2.880.000		14.573.750		7.155.500		1.222.750	0	25.832.000	0,00	99,51	0	162.158.045	nan	78,42					
3.32.02.1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi perencanaanya	kawasan	0	206.777.000	0	136.326.045	1	25.958.000	0	2.880.000	0	14.573.750	0	7.155.500	0	1.222.750	0	25.832.000	0,00	99,51	0	162.158.045	nan	78,42					
1	3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen	5	203.200.000	0	0	2	25.640.000	1	2.880.000	1	14.573.750	0	7.155.500	0	1.222.750	2	25.832.000	100,00	100,75	2	25.832.000	40,00	12,71	DINAKERTRANS	mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dokumen RKT yang	alokasi anggaran untuk penyusunan transmigrasi setiap Kab/Kota yang cukup	Pembangunan kawasan transmigrasi setiap Kab/Kota yang akan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I		II		III		IV																																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																													
2	3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	5	3.577.000	1	136.326.045	2	318.000	0		0	0		0	0		0	0	0	0,00	0,00	1	136.326.045	20,00	3.811,18	DINAKERTRANS		telah disusun dan ditetapkan oleh Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi	besar mengakibatkan dokumen RKT yang telah disusun tidak dilengkapi dengan dokumen turunannya sehingga RKT yang telah disusun tidak dapat ditindaklanjuti	melaksanakan program transmigrasi di daerah wajib menyusun dokumen perencanaan kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penyusunannya oleh pemerintah provinsi																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									30,00	1.911,95																											
Predikat Kinerja																									SR	ST																											
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASANTRANSMIGRASI	Indeks perkembangan Satuan Pemukiman	Indeks		975.415.000		173.931.150	40	122.443.000			0		110.404.450		10.458.000		1.120.335	0	121.982.785	0,00	99,62	0	295.913.935	nan	30,34																										
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunanya	kawasan	0	975.415.000	0	173.931.150	1	122.443.000	0		0	0	110.404.450	0	10.458.000	0	1.120.335	0	121.982.785	0,00	99,62	0	295.913.935	nan	30,34																										
1	3.32.03.1.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	0		0		0	1		0	0		0	1		0	0		0	100,00	nan	1		0	inf	nan	DINAKERTRANS	mendorong komitmen pemerintah daerah untuk penyusunan dokumen RKT yang di tetapkan oleh Kementrian PDT dan Transmigrasi	alokasi anggaran untuk penyusunan RKT cukup besar sehingga dokumen RKT ditindaklanjuti	setiap Kab/Kota yang melaksanakan transmigrasi wajib menyusun dokumen RKT																					
2	3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga	500	179.790.000		35.465.000	15	27.353.200	0		0	50	17.116.750	0	9.753.000	0	360.335	50	27.230.085	333,33	99,55	50	62.695.085	10,00	34,87	DINAKERTRANS	pemeuhan anggaran untuk penyusunan dokumen karena masih lemahnya pengembangan kelembagaan di KTM lunang Silaut	satuan permukiman trasnigrasi di tahun 2024 ini menjadi UPT mandiri																							
3	3.32.03.1.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	500	44.176.000	0		0	30		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0,00	0,00	DINAKERTRANS																									
4	3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	450	751.449.000		138.466.150	30	95.089.800	0		0	90	93.287.700	0	705.000	0	760.000	90	94.752.700	300,00	99,65	90	233.218.850	20,00	31,04	DINAKERTRANS	melakukan pelatihan budidaya jamur tiram		dilakukan pelatihan untuk warga transmigrasi																						
5	3.32.03.1.01.08	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Lokasi	0		0		0	2		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAKERTRANS																								
6	3.32.03.1.01.18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	0		0		0	6		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAKERTRANS																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan																											
Predikat Kinerja																									-	-																											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASANTRANSMIGRASI	Indeks perkembangankawasan transmigrasi	persen		848.940.000		149.716.800	72.08	63.748.000		0		46.969.800		15.648.000		760.000	0	63.377.800	0,00	99,42	0	213.094.600	nan	25,10					
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	kawasan	0	848.940.000	0	149.716.800	1	63.748.000	0		0	0	46.969.800	0	15.648.000	0	760.000	0	63.377.800	0,00	99,42	0	213.094.600	nan	25,10				
1	3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	380	498.316.000		89.316.800	30	33.623.200	0		0	60	17.039.200	0	15.648.000	0	760.000	60	33.447.200	200,00	99,48	60	122.764.000	15,79	24,64	DINAKERTRANS	melakukan revitalisasi kelembagaan usaha yang ada di KTM Lunang Silaut, membuka akses pasar untuk produk unggulan, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk akses jalan rneju lokasi transmigrasi, alokasi anggaran pembinaan dan pengembangan satuan permukiman dari pemerintah provinsi sumatera barat, pemenuhan anggaran mandatori oleh pemerintah pusat melalui dana tugas perbantuan	masih lemahnya pengembangan kelembagaan yang ada di KTM Lunang Silaut,	satuan permukiman transmigrasi Padang Tarok SP1 Kab. Sijunjung merupakan UPT Bina yang ditargetkan di Tahun 2024 ini menjadi UPT Mandiri,
2	3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	1	350.624.000		60.400.000	1	30.124.800	0		0	1	29.930.600	0		0	0	1	29.930.600	100,00	99,36	1	90.330.600	100,00	25,76	DINAKERTRANS	melakukan revitalisasi kelembagaan usaha yang ada di KTM Lunang Silaut, membuka akses pasar untuk produk unggulan, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk akses jalan mneju lokasi transmigrasi, alokasi anggaran pembinaan dan pengembangan satuan permukiman dari pemerintah provinsi sumatera barat, pemenuhan anggaran mandatori oleh pemerintah pusat melalui dana tugas perbantuan	belum optimalnya pemasaran produk unggulan KTM Lunang Silaut, akses ke lokasi satuan permukiman transmigrasi sulit ditempuh	satuan permukiman transmigrasi Padang Tarok SP1 Kab. Sijunjung merupakan UPT Bina yang ditargetkan di Tahun 2024 ini menjadi UPT Mandiri, kawasan transmigrasi lunang silaut kab. Pesisir Selatan merupakan satu dari 52 kawasan yang menjadi prioritas nasional untuk dijadikan kawasan yang berdaya saing sampai tahun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									57,89	25,20					
Predikat Kinerja																									R	SR					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV				K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				65.192.595.000		19.358.155.941		25.290.745.677		2.958.363.513		6.451.316.792		5.759.766.423		9.676.856.399		24.846.303.127		98,24		44.204.459.068		67,81									
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				52.344.954.000		12.617.810.276		10.987.671.700		1.526.319.903		3.810.287.907		2.379.208.835		2.780.971.771		10.496.788.416		95,53		23.114.598.692		44,16									
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				52.344.954.000		12.617.810.276		10.987.671.700		1.526.319.903		3.810.287.907		2.379.208.835		2.780.971.771		10.496.788.416		95,53		23.114.598.692		44,16									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		52.344.954.000	100	12.617.810.276	100	10.987.671.700	25	1.526.319.903	25	3.810.287.907	25	2.379.208.835	25	2.780.971.771	100	10.496.788.416	100,00	95,53	200	23.114.598.692	inf	44,16									
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen	100	2.042.244.000	100	388.957.063	85	521.032.655	25	91.324.300	25	86.663.600	25	69.246.500	25	81.566.500	100	328.800.900	117,65	63,11	200	717.757.963	200,00	35,15									
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran yang disusun	Dokumen		1.342.244.000	0	180.602.100	3	249.002.055	0	78.263.500	2	36.066.750	0	31.208.300	1	22.962.400	3	168.500.950	100,00	67,67	3	349.103.050	inf	26,01	DPPPA								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		nan			DPPPA									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9		2	2	0	0	1	0	0	1	2	100,00	4	44,44		DPPPA															
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		500.000.000	0	13.956.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	13.956.200	nan	2,79	DPPPA										
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen	14		3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3	21,43		DPPPA														
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		100.000.000	0	50.600.250	0	272.030.600	0	13.060.800	0	50.596.850	0	38.038.200	0	58.604.100	0	160.299.950	nan	58,93	0	210.900.200	nan	210,90	DPPPA								
			Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9		6	6	3	0	0	0	0	3	6	100,00	12	133,33		DPPPA															
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		100.000.000	0	143.798.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	143.798.513	nan	143,80	DPPPA										
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun	Dokumen	18		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4	22,22		DPPPA														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan		95,87										
Predikat Kinerja																							-		ST										
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Laporan	100	32.384.996.808	100	6.151.308.527	3	7.345.425.334	0	1.172.778.731	0	2.686.142.960	0	1.654.450.670	3	1.911.652.766	3	7.425.025.127	100,00	101,08	103	13.576.333.654	103,00	41,92									
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		30.009.996.808	0	5.821.089.477	0	7.018.645.934	0	1.134.763.631	0	2.593.846.860	0	1.578.542.490	0	1.824.953.066	0	7.132.106.047	nan	101,62	0	12.953.195.524	nan	43,16	DPPPA								
			Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	250		55	55	55	0	0	0	0	55	100,00	110	44,00		DPPPA																
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1.525.000.000	0	203.075.500	0	263.764.000	19	34.054.000	0	86.853.300	0	63.550.200	0	69.554.500	19	254.012.000	inf	96,30	19	457.087.500	inf	29,97	DPPPA								
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	95		17	19	19	0	0	0	0	19	100,00	36	37,89		DPPPA																
7	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan		515.000.000	0	40.109.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	40.109.700	nan	7,79	DPPPA										

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																												
			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	5		1		1		0		0		0		0		0		0,00		1		20,00		DPPPA				
8	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DPPPA			
			Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPPPA				
9	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	Dokumen	90	335.000.000	18	87.033.850	14	63.015.400	4	3.961.100	4	5.442.800	3	12.357.980	3	17.145.200	14	38.907.080	100,00	61,74	32	125.940.930	35,56	37,59	DPPPA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD,penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD,pengamanan barang milik daerah	sub kegiatan	100	456.000.000	100	11.843.100	4	145.425.050	0	0	0	38.955.500	0	9.043.600	4	27.351.398	4	75.350.498	100,00	51,81	104	87.193.598	104,00	19,12					
10	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		20.000.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DPPPA				
			Jumlah Dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	8		0		2		0		0		0		0			0,00		0		0,00		DPPPA					
11	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	20	180.000.000	0	0	7	63.500.000	2	0	0	32.999.200	0	0	5	25.812.698	7	58.811.898	100,00	92,62	7	58.811.898	35,00	32,67	DPPPA				
12	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	0	32.747.000	0	0	1	3.827.000	0	0	0	1	3.827.000	inf	11,69	1	3.827.000	inf	inf	DPPPA					
			Jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honoraria	Orang	0		0		1		0		1		0		0	1		100,00		1		inf		DPPPA					
13	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		230.000.000	3	11.843.100	3	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	3	11.843.100	inf	5,15	DPPPA				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPPPA						
14	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	26.000.000	0	0	3	49.178.050	1	0	0	2.129.300	0	9.043.600	2	1.538.700	3	12.711.600	100,00	25,85	3	12.711.600	20,00	48,89	DPPPA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	sub kegiatan	100	690.000.000	100	102.118.396	2	101.762.000	0	63.017.100	0	12.963.320	0	4.932.880	2	0	2	80.913.300	100,00	79,51	102	183.031.696	102,00	26,53					
15	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		395.000.000		71.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	71.250.000	nan	18,04	DPPPA					
			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	265		55		55		0		0		0		0		0,00		55		20,75		DPPPA						
16	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DPPPA					
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	0		0		55		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPPPA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang disusun	Dokumen					55		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPPPA				
17	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Orang	0	0	0	0	54	71.502.000	54	63.017.100	0	0	0	0	0	0	54	63.017.100	100,00	88,13	54	63.017.100	inf	inf	DPPPA				
18	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali	50	295.000.000	37	30.868.396	5	30.260.000	1	0	4	12.963.320	0	4.932.880		0	5	17.896.200	100,00	59,14	42	48.764.596	84,00	16,53	DPPPA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,fasilitasi kunjungan tamu, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen intstalisasi listrik/penerangan bangunan kantor,penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	sub kegiatan	100	4.630.200.000	100	719.969.116	8	1.019.142.513	2	66.868.868	2	329.199.552	2	278.120.885	2	209.827.528	8	884.016.833	100,00	86,74	108	1.603.985.949	108,00	34,64					
			Terlaksananya penyediaan bahan logistik dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	0		0		2		2		0		0		0		2		100,00		2		inf						
19	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	30	80.000.000	11	21.535.800	6	18.355.600	6	9.175.700	0	0	0	9.179.900	0	0	6	18.355.600	100,00	100,00	17	39.891.400	56,67	49,86	DPPPA				
20	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	75	205.000.000	0	0	3	82.680.800	0	0	2	53.056.800	1	25.400.000	0	0	3	78.456.800	100,00	94,89	3	78.456.800	4,00	38,27	DPPPA				
21	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		805.000.000		50.317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	50.317.000	nan	6,25	DPPPA				
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	15		4		2		0		0		0		0		0		0,00		4		26,67		DPPPA				
22	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis		0		0	5	16.340.000	5	7.276.600	0	0	0	1.272.000	0	6.445.400	5	14.994.000	100,00	91,76	5	14.994.000	inf	inf	DPPPA				
23	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	40	833.000.000	4	79.665.650	4	100.363.300	4	12.463.600	0	42.284.100	0	22.668.850	0	39.644.750	4	117.061.300	100,00	116,64	8	196.726.950	20,00	23,62	DPPPA				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			4		0		0		0		0		0		0		nan		4		inf		DPPPA				
24	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	25	210.000.000	6	30.895.000	5	34.930.100	0	0	5	22.369.900	0	8.600.200	0	3.960.000	5	34.930.100	100,00	100,00	11	65.825.100	44,00	31,35	DPPPA				
25	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	15	70.200.000	120	14.520.000	3	15.720.000	3	2.620.000	0	3.930.000	0	3.930.000	0	5.240.000	3	15.720.000	100,00	100,00	123	30.240.000	820,00	43,08	DPPPA				
26	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		160.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DPPPA				
			Jumlah Tamu yang dilayani	Orang	800		0		200		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DPPPA				
27	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	6	3.660.000	1	589.000	0	372.000	0	0	0	0	1	961.000	16,67	26,26	1	961.000	inf	inf	DPPPA				
28	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	5	2.237.000.000	12	519.259.666	12	743.316.713	3	34.743.968	3	203.410.752	3	207.069.935	3	154.537.378	12	599.762.033	100,00	80,69	24	1.119.021.699	480,00	50,02	DPPPA				
29	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	Arsip	100	30.000.000	20	3.776.000	20	3.776.000	0	0	20	3.776.000	0	0	0	0	20	3.776.000	100,00	100,00	40	7.552.000	40,00	25,17	DPPPA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	inf				
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	unit	100	1.073.000.000	100	599.443.400	10	243.912.400	25	0	25	162.390.000	25	15.500.000	25	0	100	177.890.000	1.000,00	72,93	200	777.333.400	200,00	72,44					
30	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di adakan	Unit		700.000.000		184.837.200	70	170.554.200	0	0	70	162.390.000	0	0	0	0	70	162.390.000	100,00	95,21	70	347.227.200	inf	49,60	DPPPA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
31	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		363.000.000		414.606.200	0	73.358.200	0	0	0	0	0	15.500.000	0	0	0	15.500.000	nan	21,13	0	430.106.200	nan	118,49	DPPPA				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Unit	38		17		1	0		0		0	1	0		1	100,00		18		47,37		DPPPA						
32	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DPPPA				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor baru	Unit	1		0		1	0		0		0	0	0		0	0,00		0		0,00		DPPPA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	5,25						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penyedia surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor	bulan	100	7.143.126.040	100	3.933.972.824	12	1.238.183.348	3	84.923.654	3	297.555.825	3	269.579.650	3	403.467.779	12	1.055.526.908	100,00	85,25	112	4.989.499.732	112,00	69,85					
33	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	7500	35.500.000	1489	974.250.000	1500	1.365.000	399,5	0	399,5	0	399,5	755.200	399,5	0	1598	755.200	106,53	55,33	3087	975.005.200	41,16	2.746,49	DPPPA				
34	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air, Listrik, Telepon dan Internet yang dibayarkan	Bulan	20	2.640.000.000	4	2.241.538.588	12	339.819.000	3	53.910.862	3	57.901.027	3	66.580.713	3	63.446.309	12	241.838.911	100,00	71,17	16	2.483.377.499	80,00	94,07	DPPPA				
35	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		4.467.626.040		718.184.236	0	896.999.348	0	31.012.792	0	239.654.798	0	202.243.737	0	340.021.470	0	812.932.797	nan	90,63	0	1.531.117.033	nan	34,27	DPPPA				
			Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Orang	100		19		18		18		0		0		0	18		100,00		37		37,00		DPPPA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	82,14						
Predikat Kinerja																								-	T						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	bulan	100	3.925.387.152	100	710.197.850	12	372.788.400	3	47.407.250	3	196.417.150	3	78.334.650	3	147.105.800	12	469.264.850	100,00	125,88	112	1.179.462.700	112,00	30,05					
36	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		188.760.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	DPPPA					
37	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelaha	Unit	43	1.431.627.000	8	152.474.700	7	162.350.000	7	34.875.000	0	36.050.150	0	49.242.250	0	39.693.000	7	159.860.400	100,00	98,47	15	312.335.100	34,88	21,82	DPPPA				
38	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		100.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DPPPA					
			Jumlah Pemeliharaan Mebel	Unit	80		0		5		0		0		0		0	0		0,00		0		0,00		DPPPA					
39	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		730.000.152		63.149.550	0	63.570.000	0	12.532.250	0	15.200.000	0	29.092.400	0	20.568.800	0	77.393.450	nan	121,75	0	140.543.000	nan	19,25	DPPPA				
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	15		3		3		3		0		0		0	3		100,00		6		40,00		DPPPA					
40	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehab	Unit	10	1.475.000.000	2	494.573.600	1	146.868.400	0	0	1	145.167.000	0	0	0	86.844.000	1	232.011.000	100,00	157,97	3	726.584.600	30,00	49,26	DPPPA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	2,26						
Predikat Kinerja																								-	SR						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.847.641.000		6.740.345.665		14.303.073.977		1.432.043.610		2.641.028.885		3.380.557.588		6.895.884.628		14.349.514.711		100,32		21.089.860.376		164,15					
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.936.381.000		6.236.198.439		13.009.751.977		1.417.862.710		2.402.119.135		3.027.117.838		6.397.623.628		13.244.723.311		101,81		19.480.921.750		178,13					
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	persen		1.367.010.000	13,2	3.266.241.712	11,54	5.350.505.175	0	755.781.020	0	894.426.554	0	1.265.375.387	23	2.011.871.024	23	4.927.453.985	199,31	92,09	36,2	8.193.695.697	inf	599,39					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																										
									I		II		III		IV																																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksannya pembinaan pug dan pprg	kab/kota	100	872.010.000	100	159.667.514	19	69.826.800	0	4.805.000	0	35.011.800	0	1.130.000	19		0	19	40.946.800	100,00	58,64	119	200.614.314	119,00	23,01																								
1	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	20	215.000.000	19	99.702.264	1	15.046.400	0		0	1	5.210.000	0	1.130.000	0		0	1	6.340.000	100,00	42,14	20	106.042.264	100,00	49,32	DPPPA	Tidak ada hambatan	1. Bagi Pemerintah Daerah yang bagus dalam melaksanakan Randa PUG memiliki peluang yang besar dalam perolehan APE 2. 19 Kab/Kota sudah melaksanakan evalusi mandiri																				
2	2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	190	215.000.000	19	6.026.000	1	30.000.000	0	4.805.000	1	5.187.100	0		0	0	0	1	9.992.100	100,00	33,31	20	16.018.100	10,53	7,45	DPPPA	Tidak ada hambatan	1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 2. Permendagri No 67 tahun 2018 3. Perda No 07 tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. 19 Kab/Kota sudah melaksanakan evaluasi mandiri																					
3	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	5	215.000.000	55	30.320.650	51	10.960.600	0		0	51	10.860.500	0		0	0	0	51	10.860.500	100,00	99,09	106	41.181.150	2.120,00	19,15	DPPPA	Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan strategi PUG dalam PPRG	Adanya sosialisasi dan Bimtek PPRG yang dilaksanakan dnas																				
4	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	5	227.010.000	60	23.618.600	51	13.819.800	0		0	51	13.754.200	0		0	0	0	51	13.754.200	100,00	99,53	111	37.372.800	2.220,00	16,46	DPPPA	Masih kurangnya SDM perencana yg mampu melaksanakan analisis gender terhadap program dan kegiatan di instansi masing-masing	Adanya sosialisasi dan Bimtek PPRG yang dilaksanakan dnas																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pmbinaan terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat	kab/kota	10.77	350.000.000	10.77	2.471.656.109	19	4.333.417.150	0	384.153.020	0	775.686.450	0	1.085.383.504	19	1.782.462.184	19	4.027.685.158	100,00	92,94	29.77	6.499.341.267	276,42	1.856,95																									
5	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	175.000.000	293	253.909.000	2	49.504.450	0		0	0	1	33.431.200	1	140.555.000	2	173.986.200	100,00	351,46	295	427.895.200	5.900,00	244,51	DPPPA		1.Adanya paradigma masyarakat Sumatera Barat yang menganggap bahwa posisi perempuan dibelakang laki-laki 2.Kegiatan yang semula dijadwalkan di triwulan II diundur menjadi Triwulan	Adanya partisipasi perempuan dalam memilih perempuan di legislative dan Undang –undang No 2 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan																					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																													III karena menyesuaikan jadwal KPPI	minimal 30% dalam pendirian maupun pengurusannya.		
6	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	5	175.000.000	1425	2.217.747.109	3	4.283.912.700	1	384.153.020	0	775.686.450	0	1.051.952.304	2	1.641.907.184	3	3.853.698.958	100,00	89,96	1428	6.071.446.067	28.560,00	3.469,40	DPPPA		Masih adanya sub ordinasi terhadap pemilihan perempuan	Adanya partisipasi perempuan dalam memilih perempuan di legislative dan Undang –undang No 2 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun pengurusannya.		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								5.743,33	618,98							
Predikat Kinerja																								ST	ST							
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan terhadap organisasi perempuan	kab/kota	100	145.000.000	100	634.918.089	19	947.261.225	0	366.823.000	0	83.728.304	0	178.861.883	19	229.408.840	19	858.822.027	100,00	90,66	119	1.493.740.116	119,00	1.030,17						
7	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	40	20.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DPPPA					
8	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	125.000.000	200	634.918.089	30	947.261.225	0	366.823.000	30	83.728.304	0	178.861.883	0	229.408.840	30	858.822.027	100,00	90,66	230	1.493.740.116	460,00	1.194,99	DPPPA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								57,50	149,37							
Predikat Kinerja																								R	ST							
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen		770.329.250	88	157.509.750	84	1.321.079.600	0	285.983.600	0	104.567.600	0	358.363.130	100	356.291.100	100	1.105.205.430	119,05	83,66	188	1.262.715.180	inf	163,92						
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	kab/kota	100	365.000.000	100	60.664.750	19	125.344.100	0	1.016.700	0	13.005.000	0	38.655.500	19	20.523.300	19	73.200.500	100,00	58,40	119	133.865.250	119,00	36,68						
1	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	kebijakan, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan stakeholders terkait pada Kabupaten/Kota	Draft RAD		290.000.000		60.664.750	1	85.980.100	0	127.100	0	13.005.000	0	38.655.500	1	3.022.200	1	54.809.800	100,00	63,75	1	115.474.550	inf	39,82	DPPPA					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen					1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DPPPA		1. Kesulitan Dalam Menghungkapkkan Dan Mendapatkan datga terpisah tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 2. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan dan	1. tersedianya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan perlindungan dan upaya pencegahan dan kekerasan terhadap perempuan yaitu perda 7 tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																													mengungkap kasus kekerasan pada perempuan 3. sinergi dan koordinasi antar pemangku dan kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO belum optimal 3. materi KIE tentang kekerasan perempuan termasuk TPPO masih terbatas dalam bentuk memerhatikan dan mengedepankan aspek bdaya dan kearifan lokal 5. evaluasi efektifitas upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO belum terlaksana		bidang pemberdayaan perempuan dan perlindunganm anak sudah ada SK Lembaga Layanan Anak Perlindungan Perempuan Dan Anak Prov. Sumbar Nomor 260-1-2018 3. Adanya SK Nomor 1758-2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) prov. sumbar 4. Adanya permintaan data laporan kegiatan Pencegahan TPPO Dari pemerintah pusat (kemen PPA)		
2	2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan dan Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Lembaga Layanan dan Organisasi Masyarakat		75.000.000		0	30	39.364.000	0	889.600	0		0	0		0	30	17.501.100	30	18.390.700	100,00	46,72	30	18.390.700	inf	24,52	DPPPA		1. kesulitan dalam mengungkapkan dan mendapatkan data terpisah tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 2. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk Melaporkan dan mengungkapkan kasus kekerasan pada perempuan 3. sinergi an koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan terhadap peempuan termasuk TPPO belum optimal 4. materi KIE tentang kekerasan perempuan termasuk TPPO masih Terbatas dan belum memperhatikan dan mengedepankan aspek budaya dan kearifan lokal 5 Evaluasi efektifitas upaya pencegahan		sudah ada SK lembaga layanan perlindungan perempuan dab Anak prov. sumbar Nomor 260-1-2018

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																													kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO belum terlaksanakan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										inf	32,17			
Predikat Kinerja																										-	SR			
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	orang	100	0	100	0	40	242.290.300	12	4.486.900	12	37.673.050	12	41.189.480	12	50.590.900	48	133.940.330	120,00	55,28	148	133.940.330	148,00	inf				
3	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	Orang		0		0	40	129.358.300	12	1.919.800	12	6.535.700	12	23.415.680	12	39.476.500	48	71.347.680	120,00	55,16	48	71.347.680	inf	inf	DPPPA			
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang				0			23		12		9		3		47		inf		47		inf		DPPPA			
4	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kali		0		0	40	112.932.000	4	2.567.100	14	31.137.350	10	17.773.800	1	11.114.400	29	62.592.650	72,50	55,43	29	62.592.650	inf	inf	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										inf	inf			
Predikat Kinerja																										-	-			
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan	kab/kota	85	405.329.250	85	96.845.000	19	953.445.200	0	280.480.000	0	53.889.550	0	278.518.150	19	285.176.900	19	898.064.600	100,00	94,19	104	994.909.600	122,35	245,46				
			Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kabi/Kota	0	0		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		nan								
5	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		0		0	40	56.284.800	0	0	0	40	44.182.800	0	990.000	40	45.172.800	100,00	80,26	40	45.172.800	inf	inf	DPPPA				Adanya UPTD PPA yang memiliki layanan dan sarana pengaduan masyarakat (hotline 08116612343) dan website serta adanya aplikasi SIPPAK untuk layanan online pelaporan kasus
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0		nan			DPPPA						
6	2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		405.329.250		96.845.000	1	897.160.400	0	280.480.000	0	53.889.550	0	234.335.350	1	284.186.900	1	852.891.800	100,00	95,07	1	949.736.800	inf	234,31	DPPPA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Jumlah lembaga Penyedia Layanan yang terhubung dalam jejaring kesetaraan gender dan anak	Lembaga	160		2		28		0		28		0		0		28		100,00		30		18,75		DPPPA							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf								
Predikat Kinerja																									-	-								
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen		2.458.585.000	88	946.397.466	84	2.949.145.367	0	143.500.800	0	1.068.870.515	0	721.028.521	100	1.273.950.479	100	3.207.350.315	119,05	108,76	188	4.153.747.781	inf	168,95								
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	kab/kota	100	1.052.748.000	100	130.890.865	19	1.386.082.600	0	17.880.940	0	593.135.320	0	629.308.450	19	538.405.000	19	1.778.729.710	100,00	128,33	119	1.909.620.575	119,00	181,39								
1	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi (embaga dan Ormas)		350.000.000		41.243.065	32	49.823.300	0	0	32	5.492.900	0	0	0	2.129.800	32	7.622.700	100,00	15,30	32	48.865.765	inf	13,96	DPPPA		1. Adanya sikap sosial dan praktek budaya memaafkan kekerasan yang menjadi polemik dalam penyelesaian kasus kekerasan 2. Rendahnya pemahaman lintas sektor terhadap pemenuhan hak anak baik itu ABH maupun ABK					
			Jumlah Lembaga Layanan dan atau Organisasi Pemerhati/Peduli Anak yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Lembaga	50		25		10		0		10		0		0		10		100,00		35		70,00		DPPPA							
2	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Kali	60	702.748.000	6	89.647.800	10	1.336.259.300	3	17.880.940	2	587.642.420	2	629.308.450	3	536.275.200	10	1.771.107.010	100,00	132,54	16	1.860.754.810	26,67	264,78	DPPPA	Tidak ada hambatan	Karena tingginya kasus kekerasan eksual terhadap anak maka diadakan Bimtek Kekerasan terhadap Anak salah satunya di Kota Payakumbuh					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	139,37								
Predikat Kinerja																									-	ST								
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	kab/kota	100	115.000.000	100	505.472.039	19	1.314.243.467	25	98.837.060	25	353.450.116	25	62.145.371	25	716.229.279	100	1.230.661.826	526,32	93,64	200	1.736.133.865	200,00	1.509,68								
			Anak korban kekerasan yang mendapat layanan lintas sektor	orang	0		0		50		20		20		20		37		97		194,00		97		inf									
3	2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan	Orang		0		0	50	125.087.067	20	5.565.640	20	21.633.488	20	10.999.200	37	67.928.800	97	106.127.128	194,00	84,84	97	106.127.128	inf	inf	DPPPA							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
											(8)		(9)		(10)		(11)													
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang				0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPPPA					
4	2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kali		0		0	50	184.417.000	33	37.936.500	18	58.202.250	33	33.873.851	31	52.448.940	115	182.461.541	230,00	98,94	115	182.461.541	inf	inf	DPPPA			
5	2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen		115.000.000		505.472.039	10	1.004.739.400	3	55.334.920	0	273.614.378	2	17.272.320	5	595.851.539	10	942.073.157	100,00	93,76	10	1.447.545.196	inf	1.258,73	DPPPA	Tidak Ada Hambatan	Tingginya Angka kekerasan terhadap anak salah satunya pengaruh gadget , maka diadakan bimtek internet ceria	
			Jumlah KIE yang dilaksanakan	Kali	5		10		4		3		1		0		0		4		100,00		14		280,00		DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	kab/kota	100	1.290.837.000	100	310.034.562	19	248.819.300	0	26.782.800	0	122.285.079	0	29.574.700	19	19.316.200	19	197.958.779	100,00	79,56	119	507.993.341	119,00	39,35				
			Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	kab/kota	0		0		19		0		0		0		19		19		100,00		19		inf					
6	2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen		1.042.837.000		180.335.260	1	61.283.000	0	0	0	40.624.164	0	480.000	1	1.300.000	1	42.404.164	100,00	69,19	1	222.739.424	inf	21,36	DPPPA			
			Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Kali	5		40		1		0		1		0		0		1		100,00		41		820,00		DPPPA			
7	2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		0		0	80	135.234.500	0	0	80	81.180.915	0	28.230.700	0	14.340.000	80	123.751.615	100,00	91,51	80	123.751.615	inf	inf	DPPPA			
8	2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen 32 Lembaga		248.000.000		129.699.302	1	52.301.800	1	26.782.800	0	480.000	0	864.000	0	3.676.200	1	31.803.000	100,00	60,81	1	161.502.302	inf	65,12	DPPPA			
			Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	kali					1		1		0		0		0		1		100,00		1		inf		DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITASKELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	indeks		430.193.000	70,5	273.276.783	70	1.500.590.650	0	132.962.450	0	85.793.050	0	465.315.600	78,29	1.056.768.153	78,29	1.740.839.253	111,84	116,01	148,79	2.014.116.036	inf	468,19				
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak	Terlaksananya upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	kab/kota	37,5	430.193.000	37,5	273.276.783	19	1.500.590.650	0	132.962.450	0	85.793.050	0	465.315.600	19	1.056.768.153	19	1.740.839.253	100,00	116,01	56,5	2.014.116.036	150,67	468,19				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
		Anak Kewenangan Provinsi																																																		
1	2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	5	155.000.000	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DPPPA																									
2	2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	5	155.000.000	200	273.276.783	2	1.451.657.650	0	132.962.450	0	85.793.050	0	442.961.000	2	1.056.768.153	2	1.718.484.653	100,00	118,38	202	1.991.761.436	4.040,00	1.285,01	DPPPA		Banyaknya kegiatan yang bersamaan dilaksanakan perlu pengaturan jadwal efektif	Koordinasi dengan Kab/Kota Lokasi kegiatan. Identifikasi kebutuhan keterampilan																						
3	2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Laporan	5	120.193.000	0	0	2	48.933.000	0	0	0	0	1	22.354.600	1	0	2	22.354.600	100,00	45,68	2	22.354.600	40,00	18,60	DPPPA		Banyaknya kegiatan yang bersamaan dilaksanakan perlu pengaturan jadwal efektif																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100	0	100	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	inf	nan	200	0	200,00	nan																										
4	2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPPPA																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	persen		716.285.000	90,62	128.520.100	90	139.400.100	0	8.649.750	0	31.304.978	0	32.971.200	90,62	14.729.500	90,62	87.655.428	100,69	62,88	181,24	216.175.528	inf	30,18																										
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam kelembagaan data kewenangan provinsi	kab/kota	100	716.285.000	100	128.520.100	19	139.400.100	4	8.649.750	4	31.304.978	4	32.971.200	7	14.729.500	19	87.655.428	100,00	62,88	119	216.175.528	119,00	30,18																										
1	2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Dokumen		327.785.000		69.749.550	30	64.497.400	0	5.969.850	30	16.948.978	0	24.686.300	0	2.746.900	30	50.352.028	100,00	78,07	30	120.101.578	inf	36,64	DPPPA		Masih terbatasnya pengetahuan Kabikotak terkait pengumpulan data	Melakukan koordinasi dengan stockholders terkait (BPS dan Kominfo)																						
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DPPPA																										
2	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak Provinsi yang terintegrasi dengan portal satu data Indonesia	Dokumen		388.500.000		58.770.550	30	74.902.700	0	2.679.900	30	14.356.000	0	8.284.900	0	11.982.600	30	37.303.400	100,00	49,80	30	96.073.950	inf	24,73	DPPPA		Keterbatasan SDM dan waktu sehingga dilakukan Rescheduling kegiatan	Telah adanya aplikasi SIGA dan direncanakan akan dilakukan sosialisasi bagi opertaor SIGA pada bulan April 2023																						
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DPPPA																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupaten/Kota		1.907.791.000		277.515.488	2	1.749.031.085	0	42.996.050	7	97.367.650	0	184.064.000	0	1.684.013.372	7	2.008.441.072	350,00	114,83	7	2.285.956.560	inf	119,82																										

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya upaya pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia usah kewenangan provinsi	kab/kota	100	882.791.000	100	146.721.300	19	1.492.328.755	0	30.994.250	0	12.823.400	0	133.622.000	19	1.677.418.372	19	1.854.858.022	100,00	124,29	119	2.001.579.322	119,00	226,73					
1	2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Lembaga	75	445.000.000	15	42.409.500	15	1.386.660.800	15	29.188.950	0	12.103.400	0	126.750.000	0	1.190.042.774	15	1.358.085.124	100,00	97,94	30	1.400.494.624	40,00	314,72	DPPPA		Penyesuaian Jadwal Dengan Narasumber	Adanya Motivasi Peserta Sosialisasi	
2	2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Kali	95	437.791.000	19	104.311.800	19	105.667.955	0	1.805.300	0	720.000	9	6.872.000	10	487.375.598	19	496.772.898	100,00	470,13	38	601.084.698	40,00	137,30	DPPPA		Penyesuaian Jadwal Dengan Peringatan Hari Anak Sedunia	Adanya kemitraan dengan beberapa kurator dalm perencanaan kegiatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									40,00	226,01					
Predikat Kinerja																									SR	ST					
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan kesejahteraan dan perlindungan anak se Sumatera Barat	kab/kota	100	1.025.000.000	100	130.794.188	19	256.702.330	0	12.001.800	0	84.544.250	0	50.442.000	19	6.595.000	19	153.583.050	100,00	59,83	119	284.377.238	119,00	27,74					
3	2.08.06.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jenis sekolah peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan	jenis		498.000.000		72.310.500	4	69.167.450	0	1.035.700	4	14.802.250	0	38.235.200	0	0	4	54.073.150	100,00	78,18	4	126.383.650	inf	25,38	DPPPA		SK Sekber Masih Dalam Proses	Adnya Kemitraan Dengan Disdik Dalam Upaya Monex SRA	
4	2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Kali	20	344.500.000	12	48.805.388	1	88.488.905	1	7.588.700	0	0	0	0	0	1	7.588.700	100,00	8,58	13	56.394.088	65,00	16,37	DPPPA		1. Masih minimnya Kab/Kota yang memiliki PUSPAGA. 2. PUSPAGA tidak jadi dilaksanakan karena akan dilakukan perubahan anggaran, anggaran akan di alihkan ke HAN	Adanya standarisasi PUSPAGA dari KemenPPA sebagai penilaian KLA		
5	2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jenis KIE yang dilaksanakan	jenis		102.500.000		9.678.300	4	14.573.300	0	921.800	0	0	2	7.000.000	2	6.595.000	4	14.516.800	100,00	99,61	4	24.195.100	inf	23,60	DPPPA		Penggunaan Anggaran Disesuaikan Pada Hari Anak Nasional		
6	2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Provinsi	forum anak		80.000.000		0	19	84.472.675	0	2.455.600	19	69.742.000	0	5.206.800	0	0	19	77.404.400	100,00	91,63	19	77.404.400	inf	96,76	DPPPA				
			Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				0		0		8		0	0		8		inf		8		inf			DPPPA		Kegiatan Sudah Terlaksana	Telah Terpilih Pengurus Forum Anak Sumbang		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	27,02					
Predikat Kinerja																									-	SR					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.847.641.000		6.740.345.665		14.303.073.977		1.432.043.610		2.641.028.885		3.380.557.588		6.895.884.628		14.349.514.711		100,32		21.089.860.376		164,15					
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN				1.911.260.000		504.147.226		1.293.322.000		14.180.900		238.909.750		353.439.750		498.261.000		1.104.791.400		85,42		1.608.938.626		84,18					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
											(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%					(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																														
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	persen		203.288.000	85	56.151.900	80	121.787.000	0	7.416.000	0	15.368.650	0	8.925.000	100	0	100	31.709.650	125,00	26,04	185	87.861.550	inf	43,22						
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksanannya Penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPk) Penyusunan dan Pemamfaatan GDPK Tingkat Provinsi	laporan	100	203.288.000	100	56.151.900	2	121.787.000	0	7.416.000	0	15.368.650	0	8.925.000	2	0	2	31.709.650	100,00	26,04	102	87.861.550	102,00	43,22						
1	2.14.02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen		105.000.000		33.100.000	0	50.000.000	0	4.538.200	0	5.045.850	0	8.925.000	0	0	0	18.509.050	nan	37,02	0	51.609.050	nan	49,15	DPPPA		Adanya Rasionalisasi Anggaran			
			Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang diserasikan	kebijakan	5		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		DPPPA					
2	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen		98.288.000	30	23.051.900	0	71.787.000	0	2.877.800	0	10.322.800	0	0	0	0	0	13.200.600	nan	18,39	30	36.252.500	inf	36,88	DPPPA		adanya rasionalisasi anggaran			
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan GDPK	Persen	150		30		50		26.67		23.33		0		0		50		100,00		80		53,33		DPPPA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	43,02								
Predikat Kinerja																							-	SR								
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGABERENCANA (KB)	Prevalensi KB	persen		600.059.000	55.46	122.526.500	55.12	189.259.000	0	1.966.800	0	127.480.300	0	33.660.000	56.5	0	56.5	163.107.100	102,50	86,18	111.96	285.633.600	inf	47,60						
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksanannya penguatan kerjasama dengan stake holder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi promosi dan KIE program KKBK	Laporan	100	600.059.000	100	122.526.500	1	189.259.000	0	1.966.800	0	127.480.300	0	33.660.000	1	0	1	163.107.100	100,00	86,18	101	285.633.600	101,00	47,60						
1	2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis materi KIE yang disusun	Jenis	5	197.207.000	1	73.310.000	1	53.265.000	0	0	0	3.600.600	1	29.905.000	0	0	1	33.505.600	100,00	62,90	2	106.815.600	40,00	54,16	DPPPA		Kegiatan sudah terlaksana		Tersedianya dana BOKB di Kab/Kota untuk meningkatkan jangkauan pelayanan geicitas	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPPPA					
2	2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen		215.852.000		49.216.500	0	135.994.000	0	1.966.800	0	123.879.700	0	3.755.000	0	0	0	129.601.500	nan	95,30	0	178.818.000	nan	82,84	DPPPA					
			Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam advokasi dan KIE program KKBPK	Mitra Kerja	5		100		4		4		0		0		0		4		100,00		104		2.080,00		DPPPA					
3	2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Laporan		187.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DPPPA					
			Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	5		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DPPPA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	45,67								

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I		II		III		IV																																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
																									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Predikat Kinerja																																																			
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks		626.863.000	61.38	289.582.926	59.30	982.276.000	0	4.798.100	0	96.060.800	0	310.854.750	60.99	498.261.000	60.99	909.974.650	102,85	92,64	122.37	1.199.557.576	inf	191,36																									
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana pusat informasi konseling (PIK-R)	Laporan	100	346.863.000	100	75.185.796	3	743.976.000	0	2.759.600	0	38.799.500	0	182.820.950	3	472.472.200	3	696.852.250	100,00	93,67	103	772.038.046	103,00	222,58																									
1	2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kab/Kota		145.000.000	0	49.500.000	19	445.749.000	0	2.253.600	0	0	0	87.079.000	19	417.786.400	19	507.119.000	100,00	113,77	19	556.619.000	inf	383,88	DPPPA		1. Masih rendahnya pemahaman dan dukungan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi tentang program KKBPK 2. Minimnya anggaran reward yang diberikan kepada ASN pemprov Pemenang Lomba	1. Tersedianya SDM Lingkup Pemprov Pemprov Sumbang yang dapat dimanfaatkan sebagai motivator program KKBPK di lingkungannya dan masyarakat 2. menjadikan ASN pemprov Sumbang sebagai Duta ASIK Program KKBPK																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen			36		0		0		0		0		0		0		nan		36		inf		DPPPA																								
2	2.14.04.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah pengelola dan pelaksana PIK-R yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kab/Kota		100.000.000	0	0	19	78.879.000	0	0	0	0	0	0	19	53.348.300	19	53.348.300	100,00	67,63	19	53.348.300	inf	53,35	DPPPA		1Sekolah-sekolahan tingkat SLTA belum semuanya memiliki PIK-R 2. masih rendahnya pengetahuan tentang manfaat Adanya PIK-R di sekolah-sekolah tingkat SLTA	1 Untuk meningkatnya kapasitas pengetahuan remaja khususnya Di tingkat SLTA Dalam pencegahan terjadinya NAPZA sok bebas, pemokahan dini , kenakalan remaja 2. untuk peningkatan ketahanan keluarga yang memiliki remaja																					
			Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi			0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPPPA																								
3	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen		101.863.000	0	25.685.796	0	219.348.000	0	506.000	0	38.799.500	0	95.741.950	0	1.337.500	0	136.384.950	nan	62,18	0	162.070.746	nan	159,11	DPPPA		Belum adanya Bimtek tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku terhadap Petugas Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	1. Tersedianya Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dapat diberdayakan 2. TPK melaksanakan advokasi dan KIE tentang stunting melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku																					
			jumlah fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK yang dilakukan	Kali	5		30		5		0		3		2		0		5		100,00		35		700,00		DPPPA																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi	Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan orga	Laporan	100	280.000.000	100	214.397.130	2	238.300.000	0	2.038.500	0	57.261.300	0	128.033.800	2	25.788.800	2	213.122.400	100,00	89,43	102	427.519.530	102,00	152,69																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																												
4	2.14.04.1.02.04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang mendapatkan penguatan kapasitas	Kel BKB	32	90.000.000	2	149.767.950	2	157.500.000	0	0	1	27.786.300	1	85.333.800	0	25.332.400	2	138.452.500	100,00	87,91	4	288.220.450	12,50	320,24	DPPPA		Rendahnya SDM Kader BKB dalam melakukan pendampingan kepada keluarga yang memiliki Balita	Tersedianya kader BKB/ PPKB Daerah ditingkat lapangan untuk ditingkatkan kapasitasnya
5	2.14.04.1.02.05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Pokja Kampung KB yang mendapatkan fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga	Kab/Kota		190.000.000	0	64.629.180	3	80.800.000	0	2.038.500	1	29.475.000	2	42.700.000	0	456.400	3	74.669.900	100,00	92,41	3	139.299.080	inf	73,32	DPPPA			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Dokumen			0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPPPA		1. kurangnya peran serta pokja kampung KB dalam pengembangan pembangunan diwilayahnya 2. rendahnya terkait lintas sektor dalam intervensi program / kegiatan kampung KB	1. Terjadinya pokja di kampung KB untuk diberdayakan peran serta nya dan ditingkatkan kualitas SDMnya 2. inpres No. 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung berkeluarga berkualitas sebagai dasar pengalokasin anggaran dan program / kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	78,71				
Predikat Kinerja																									-	T				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
								I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		DINAS PANGAN				0	0		45.803.936.487	2.314.394.660		7.398.415.588	5.035.824.176	6.509.886.476		21.258.520.900		46,41		21.258.520.900		inf						
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0	0		17.186.266.759	2.237.164.660		5.189.711.981	3.663.515.466	2.413.888.176		13.504.280.283		78,58		13.504.280.283		inf						
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0	0		17.186.266.759	2.237.164.660		5.189.711.981	3.663.515.466	2.413.888.176		13.504.280.283		78,58		13.504.280.283		inf						
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		0	0	100	17.186.266.759	2.199.987.610		5.152.581.226	3.663.515.466	2.413.888.176	0	13.429.972.478	0,00	78,14	0	13.429.972.478	nan	inf						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%				100							0		0,00		0		nan							
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	0	0	85	362.439.110	0	0	0	72.158.400	0	152.001.500	0	14.173.800	0	238.333.700	0,00	65,76	0	238.333.700	nan	inf			
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0	4	218.166.710	1	0	1	60.260.000	1	41.948.900	4	12.918.800	7	115.127.700	175,00	52,77	7	115.127.700	inf	inf	DINAS PANGAN		
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0	4	0	0	0	1	0	0	3	0	4	0	100,00	nan	4	0	inf	nan	DINAS PANGAN			
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	0	7	144.272.400	2	0	1	11.898.400	2	110.052.600	2	1.255.000	7	123.206.000	100,00	85,40	7	123.206.000	inf	inf	DINAS PANGAN		
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku database yang disusun	dokumen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DINAS PANGAN			
			Jumlah dokumen evaluasi SPIP Urusan Pangan yang disusun	dokumen				1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	0	0	0	100	11.722.547.983	25	1.825.132.434	0	4.075.347.434	0	2.628.310.363	0	1.797.303.826	25	10.326.094.057	25,00	88,09	25	10.326.094.057	inf	inf		
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0	0	95	11.332.596.233	25	1.777.952.434	25	4.029.527.434	25	2.516.254.263	20	1.728.573.826	95	10.052.307.957	100,00	88,70	95	10.052.307.957	inf	inf	DINAS PANGAN		
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	ASN		0	0	24	346.664.500	4	47.180.000	6	45.820.000	8	91.308.100	6	68.730.000	24	253.038.100	100,00	72,99	24	253.038.100	inf	inf	DINAS PANGAN		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DINAS PANGAN			
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DINAS PANGAN		
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DINAS PANGAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0		0	1		0		0		0		0	1		0	100,00	nan	1		0	inf	nan	DINAS PANGAN				
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	43.287.250	0		0		0	3	20.748.000	9		0	12	20.748.000	100,00	47,93	12	20.748.000	inf	inf	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	0	0	0	100	229.400.000	0	27.348.250	0	62.258.613	0	5.354.319	0		0	0	94.961.182	0,00	41,40	0	94.961.182	nan	inf					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1		0		0		0		0	1		0	100,00	nan	1		0	inf	nan	DINAS PANGAN				
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	0	225.800.000	0	27.348.250	0	62.258.613	0	5.354.319	0	0	0	94.961.182	nan	42,06	0	94.961.182	nan	inf	DINAS PANGAN					
			Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	unit kendaraan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf	inf	DINAS PANGAN					
				unit bangunan					5		1		1		1		2		5		100,00		5		inf	inf	DINAS PANGAN					
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN				
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1		0	0	0	0	0	0	1		0	1	100,00	nan	1		0	inf	nan	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	221.555.000	0	0	0	59.740.000	0	78.850.000	0	9.000.000	0	147.590.000	0,00	66,62	0	147.590.000	nan	inf						
15	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		0		0	95		0	0	0	0	0	0	95	0	95	0	100,00	nan	95		0	inf	nan	DINAS PANGAN				
16	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0		0	1		0	0	0	0	0	1		0	1	0	100,00	nan	1		0	inf	nan	DINAS PANGAN				
17	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	2	221.555.000	0	0	0	59.740.000	0	78.850.000	2	9.000.000	2	147.590.000	100,00	66,62	2	147.590.000	inf	inf	DINAS PANGAN					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	962.794.779	0	2.970.000	0	196.386.527	0	278.812.590	0	119.959.215	0	598.128.332	0,00	62,12	0	598.128.332	nan	inf						
18	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	12.997.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.165.000	nan	93,60	0	12.165.000	nan	inf	DINAS PANGAN						
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	unit					14		0		2		6		6		14		100,00		14		inf	inf	DINAS PANGAN					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Kantor yang disediakan																											
19	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit		0	0	14	12.984.000	0	0	2	0	0	12.977.500	12	0	14	12.977.500	100,00	99,95	14	12.977.500	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				0		0		0		0		0		0		nan	0		nan		DINAS PANGAN					
20	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	item		0	0	16	29.991.000	0	0	0	0	9.998.600	0	0	0	9.998.600	0,00	33,34	0	9.998.600	nan	inf	DINAS PANGAN					
21	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	1	5.650.500	0	0	0	0	5.510.000	0	0	0	5.510.000	0,00	97,51	0	5.510.000	nan	inf	DINAS PANGAN					
23	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	1	8.261.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
24	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
25	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		0	0	1	11.579.500	0	0	0	4.742.900	0	4.843.000	1	0	1	9.585.900	100,00	82,78	1	9.585.900	inf	inf	DINAS PANGAN				
			penyediaan alat tulis kantor	paket				1		0		0		0	1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN					
26	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	1	22.981.600	0	0	0	5.784.400	0	4.969.200	1	13.695.700	1	24.449.300	100,00	106,39	1	24.449.300	inf	inf	DINAS PANGAN				
			penyediaan alat tulis kantor	paket				1		0		0		0	1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN					
27	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	1	20.030.500	0	0	0	0	1	19.986.500	1	0	2	19.986.500	200,00	99,78	2	19.986.500	inf	inf	DINAS PANGAN				
			penyediaan alat tulis kantor	paket				1		0		0		0	1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN					
28	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	1	4.995.400	0	0	0	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	100,00	70,06	1	3.500.000	inf	inf	DINAS PANGAN					
29	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	1	17.826.000	0	625.000	0	6.987.500	0	2.100.000	1	3.325.000	1	13.037.500	100,00	73,14	1	13.037.500	inf	inf	DINAS PANGAN				
30	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	3.885.000	1	967.500	1	4.852.500	100,00	69,32	1	4.852.500	inf	inf	DINAS PANGAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		[UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]																												
31	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	bulan		0		0	12	8.000.000	3	0	2	2.055.000	4	1.370.000	3	1.370.000	12	4.795.000	100,00	59,94	12	4.795.000	inf	inf	DINAS PANGAN			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN			
32	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	eksemplar		0		0	3	3.000.000	0	270.000	0	0	2	810.000	1	135.000	3	1.215.000	100,00	40,50	3	1.215.000	inf	inf	DINAS PANGAN			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN			
33	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0	3.000.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	nan	20,00	0	600.000	nan	inf	DINAS PANGAN			
			Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	eksemplar					3		0		1		0		2		3		100,00		3		inf		DINAS PANGAN			
34	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	jumlah makan minum yang difasilitasi	kotak		0		0	125	19.971.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN			
35	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	jumlah makan minum yang difasilitasi	kotak		0		0	125	7.991.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN			
36	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			jumlah makan minum yang difasilitasi	kotak					500		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS PANGAN			
37	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	766.536.079	3	2.075.000	3	176.216.727	4	200.197.790	2	96.966.015	12	475.455.532	100,00	62,03	12	475.455.532	inf	inf	DINAS PANGAN			
38	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	100	890.964.560	0	14.550.000	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	0,00	1,63	0	14.550.000	nan	inf				
39	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang	Unit		0		0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100,00	nan	2	0	inf	nan	DINAS PANGAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Lapangan	disewa																												
40	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	828.100.000	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Mobil box)	Unit				4		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS PANGAN					
41	X.XX.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		0		0	25.000.000	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			palet plastik	unit				4		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS PANGAN					
			Trolley Dorong	unit				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS PANGAN					
42	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	jumlah printer yang disediakan	unit		0		0	19.794.000	0		0	0		0	0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN					
			Jumlah komputer yang disediakan	unit				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS PANGAN					
43	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang disediakan	unit		0		0	14.630.560	0	14.550.000	0		0	0		0	0	14.550.000	nan	99,45	0	14.550.000	nan	inf	DINAS PANGAN					
			Jumlah laptop yang disediakan	unit				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN					
			Jumlah printer yang disediakan	unit				5		5		0		0		0		5		100,00		5		inf		DINAS PANGAN					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN					
44	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah komputer yang disediakan	unit		0		0	3.440.000	0		0	0		0	0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			jumlah printer yang disediakan	unit				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS PANGAN					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN					
45	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN				
46	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	paket		0		0	1	0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN					
47	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit		0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	unit					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			nan		DINAS PANGAN				
48	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	paket		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0			nan		DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	0	0	0	100	2.101.057.020	0	292.809.876	0	550.346.887	0	425.606.501	0	446.002.177	0	1.714.765.441	0,00	81,61	0	1.714.765.441	nan	inf			
49	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0	0	0	13.514.354	0	0	0	8.108.250	0	0	0	5.400.000	0	13.508.250	nan	99,95	0	13.508.250	nan	inf	DINAS PANGAN		
			Jumlah surat yang didistribusikan	surat					6500	50		3500		0		2950		6500		100,00		6500		inf		DINAS PANGAN			
50	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah surat yang didistribusikan	surat		0	0	0	400	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PANGAN			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					0	0		0		0		0		0	nan		0		nan		DINAS PANGAN				
51	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0	0	0	9.497.000	0	0	0	0	0	9.406.000	0	0	0	9.406.000	nan	99,04	0	9.406.000	nan	inf	DINAS PANGAN		
			Jumlah surat yang didistribusikan	surat					400	0		0		400		0		400		100,00		400		inf		DINAS PANGAN			
52	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KWH		0	0	0	125000	255.000.000	2500	57.190.255	50000	59.768.184	50000	55.093.178	22500	33.534.376	125000	205.585.993	100,00	80,62	125000	205.585.993	inf	inf	DINAS PANGAN		
			Jumlah tagihan air (PDAM) Yang dibayarkan	m3					2200		300		900		600		400		2200		100,00		2200		inf		DINAS PANGAN		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0	0		0		0		0		0	nan		0		nan		DINAS PANGAN				
			Jumlah Tagihan Internet	Mbps					1000	200		350		150		300		1000		100,00		1000		inf		DINAS PANGAN			
53	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0	0	0	351.054.361	0	80.533.530	0	61.147.989	0	62.722.236	0	44.470.056	0	248.873.811	nan	70,89	0	248.873.811	nan	inf	DINAS PANGAN		
			Jumlah tagihan air PDM yang dibayarkan	m3					2500	450		850		900		300		2500		100,00		2500		inf		DINAS PANGAN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Jumlah Tagihan Listrik PLN yang dibayarkan	kwh					181836.2407	5000		1000000		10000		80000		1095000		602,19		1095000		inf	DINAS PANGAN						
			Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan	menit					10000	2500		2500		2500		2500		10000		100,00		10000		inf	DINAS PANGAN						
54	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	menit		0		0	5000	184.998.900	1200	22.233.035	1300	24.193.489	1400	24.261.441	1100	19.128.674	5000	89.816.639	100,00	48,55	5000	89.816.639	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0		0		0		0		0		0	nan		0		nan	DINAS PANGAN						
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	m3					5000	1000		1000		1500		1500		5000		100,00		5000		inf	DINAS PANGAN						
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KWH					64067		3500		12500		30000		18000		64000		99,90		64000		inf	DINAS PANGAN					
55	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	bulan		0		0	12	1.279.492.405	3	132.853.056	3	397.128.975	3	274.123.646	3	343.469.071	12	1.147.574.748	100,00	89,69	12	1.147.574.748	inf	inf	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisioni baik	%	0	0	0	0	100	695.508.307	10	37.177.050	0	136.343.365	0	94.580.193	0	27.449.158	10	295.549.766	10,00	42,49	10	295.549.766	inf	inf					
56	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	36	186.950.000	11	37.177.050	9	49.493.805	8	44.742.853	8	13.864.158	36	145.277.866	100,00	77,71	36	145.277.866	inf	inf	DINAS PANGAN				
57	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	108.695.875	0	0	0	28.990.000	1	20.625.000	0	0	1	49.615.000	100,00	45,65	1	49.615.000	inf	inf	DINAS PANGAN				
58	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
59	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	48	100.000.000	0	0	10	13.073.160	6	2.292.150	28	11.685.000	44	27.050.310	91,67	27,05	44	27.050.310	inf	inf	DINAS PANGAN				
60	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	17	49.952.432	0	0	5	8.591.000	7	18.125.190	0	0	12	26.716.190	70,59	53,48	12	26.716.190	inf	inf	DINAS PANGAN				
61	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	17	49.910.000	0	0	9	36.195.400	5	8.795.000	3	1.900.000	17	46.890.400	100,00	93,95	17	46.890.400	inf	inf	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
								I		II		III		IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Jumlah registrasi Rumah Kemas yang diterbitkan	nomor register					3		0		0		2		1		3		100,00		3		inf	DINAS PANGAN							
4	2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah ISO UPTD - BPSMP yang diterbitkan	Sertifikat ISO		0		0	1	106.341.600	0		0	0	26.338.800	1	28.930.050	0	27.680.600	1	82.949.450	100,00	78,00	1	82.949.450	inf	inf	DINAS PANGAN					
			Jumlah petani dan petugas yang mengikuti sosialisasi SJMKP ke PUA	orang					100		20		30		20		30		100		100,00		100		inf	DINAS PANGAN							
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS PANGAN							
5	2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen		0		0	0	138.421.338	0		0	0	28.235.793	0	5.426.000	0	100.574.400	0	134.236.193	nan	96,98	0	134.236.193	nan	inf	DINAS PANGAN					
			Jumlah sarana dan prasarana laboratorium keamanan pangan Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	paket					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS PANGAN							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf							
Predikat Kinerja																									-	-							
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%		0		0	24	5.671.315.050		0		181.540.000		351.415.000		164.722.500	0	697.677.500	0,00	12,30	0	697.677.500	nan	inf							
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang tersedia	dokumen	0	0	0	0	1	116.831.500	0		0	0	9.790.000	0	86.437.500	0	1.820.000	0	98.047.500	0,00	83,92	0	98.047.500	nan	inf						
1	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan	kali			0		0	2	116.831.500	0		0	0	9.790.000	2	86.437.500	0	1.820.000	2	98.047.500	100,00	83,92	2	98.047.500	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19 Kabupaten/kota yang dilaksanakan	kali					2		0		0		2		0		2		100,00		2		inf		DINAS PANGAN						
			Jumlah pertemuan pengembangan fungsional AKP	kali pertemuan					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN						
			Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	dokumen					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN						
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf							
Predikat Kinerja																									-	-							
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	aa	qq	0	0	0	0	1	5.554.483.550	0		0	0	171.750.000	0	264.977.500	0	162.902.500	0	599.630.000	0,00	10,80	0	599.630.000	nan	inf						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
								I		II		III		IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
		Provinsi																																											
			Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersedia	dokumen	0	0	1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan																						
2	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah fungsional (penyuluh, AKP, APHP, PMHP) yang diberikan pelatihan	fungsional		0	0	1000	1.230.927.550	0	0	200	163.770.000	500	175.439.800	300	150.742.500	1000	489.952.300	100,00	39,80	1000	489.952.300	inf	inf	DINAS PANGAN																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN																				
			Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	kali rapat			2		0		0		2		0		2		100,00		2		inf		DINAS PANGAN																				
			Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	nagari			120		10		30		60		20		120		100,00		120		inf		DINAS PANGAN																				
3	2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	KK		0	0	2000	4.323.556.000	0	0	0	7.980.000	800	89.537.700	1200	12.160.000	2000	109.677.700	100,00	2,54	2000	109.677.700	inf	inf	DINAS PANGAN																			
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf																					
Predikat Kinerja																							-	-																					
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGAN Masyarakat	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun		0	0	292.98	21.432.715.250		77.230.000		1.759.874.921		679.239.260		3.360.656.900	0	5.877.001.081	0,00	27,42	0	5.877.001.081	nan	inf																				
			Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%			83									0		0,00		0		nan																							
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %)	komoditi	0	0	0	3	19.859.932.750	0	69.100.000	0	554.022.121	0	624.732.600	0	3.305.037.000	0	4.552.891.721	0,00	22,93	0	4.552.891.721	nan	inf																				
			Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	komoditi	0	0	3		0		0		0		0		0		0,00		0		nan																						
1	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		0	0	0	92.023.000	0	0	0	14.497.900	0	28.413.000	0	26.300.000	0	69.210.900	nan	75,21	0	69.210.900	nan	inf	DINAS PANGAN																			
			Jumlah buku neraca bahan makanan (NBM) yang tersedia	dokumen			1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN																				
			Jumlah data/informasi harga pangan pada 19 kab/kota yang tersedia	dokumen			1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
											(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)					(12) = 8+9+10+11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	Kelompok		0		0	12	9.109.001.000	0		0	3	141.730.000	5	219.945.800	4	3.062.647.000	12	3.424.322.800	100,00	37,59	12	3.424.322.800	inf	inf	DINAS PANGAN			
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan temak kecil) yang diberdayakan	KWT					100		5		25		40		30		100		100,00		100		inf	inf	DINAS PANGAN				
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	inf	DINAS PANGAN				
			Pangan Berbasis Sumber DayJumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan temak kecil) yang diberdayakan (kelompok rempah)ja Lokal yang Tersedia	KWT					52		5		25		12		10		52		100,00		52		inf	inf	DINAS PANGAN				
3	2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jenis Bahan Pangan dalam rangka operasi pasar, gelar pangan murah yang didistribusikan	Bahan pangan pokok		0		0	10	345.766.750	2		0	3	112.315.000	3	64.070.000	2	2.280.000	10	178.665.000	100,00	51,67	10	178.665.000	inf	inf	DINAS PANGAN			
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah bazar/pasar murah bahan pangan yang dilaksanakan	kali bazar					400		80		120		90		110		400		100,00		400		inf	inf	DINAS PANGAN				
4	2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	kab/kota		0		0	19	90.953.000	2	1.140.000	3	16.851.800	5	16.720.000	9	19.840.000	19	54.551.800	100,00	59,98	19	54.551.800	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah data/informasi distribusi dan akses pangan pada 19 kabupaten/kota yang tersedia.	dokumen					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	inf	DINAS PANGAN				
5	2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan produksi dan ketersediaan pangan wilayah sumatera barat dan prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam rangka HBKN yang tersedia	dokumen		0		0	1	77.639.000	0		0	0	14.815.000	1	36.603.800	0	6.080.000	1	57.498.800	100,00	74,06	1	57.498.800	inf	inf	DINAS PANGAN			
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	inf	DINAS PANGAN				
6	2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		0		0	0	809.878.500	0	67.200.000	0	145.829.000	0	114.200.000	0	115.280.000	0	442.509.000	nan	54,64	0	442.509.000	nan	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah ISO UPTD DPAP yang diterbitkan	sertifikat ISO					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	inf	DINAS PANGAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Jumlah Kesepakatan pasokan bahan pangan	PKs					5		0		1		2		2		5		100,00		5		inf		DINAS PANGAN				
7	2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kategori penilaian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang dilaksanakan	kategori		0		0	5	9.334.671.500	0	760.000	1	107.983.421	3	144.780.000	1	72.610.000	5	326.133.421	100,00	3,49	5	326.133.421	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah kegiatan promosi produk kelompok tani dan pelaku usaha yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN				
			Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN				
			Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	Gapoktan					32		5		5		10		12		32		100,00		32		inf		DINAS PANGAN				
			Jumlah revitalisasi PPK	unit					80		0		0		35		38		73		91,25		73		inf		DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/gejolak harga/keadaan darurat yang ditanggulangi	%	0	0	0	0	0	100	1.336.046.000	0	8.130.000	0	1.198.475.300	0	25.665.000	0	45.661.000	0	1.277.931.300	0,00	95,65	0	1.277.931.300	nan	inf				
8	2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	kelompok		0		0	35	82.107.000	0	0	0	8.910.800	0	12.445.000	35	28.221.000	35	49.576.800	100,00	60,38	35	49.576.800	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN				
9	2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	ton		0		0	200	1.253.939.000	0	8.130.000	50	1.189.564.500	20	13.220.000	130	17.440.000	200	1.228.354.500	100,00	97,96	200	1.228.354.500	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	komoditi	0	0	0	0	0	1	236.736.500	0	0	0	7.377.500	0	28.841.660	0	9.958.900	0	46.178.060	0,00	19,51	0	46.178.060	nan	inf				
			Jumlah promosi Pola Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan yang dilaksanakan	kali	0	0	0		2		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						
10	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	bitit sukun		0		0	3000	193.648.500	0	0	500	7.377.500	1500	16.510.500	1000	8.925.000	3000	32.813.000	100,00	16,94	3000	32.813.000	inf	inf	DINAS PANGAN				
			Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN				
			Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS PANGAN				
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS PANGAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																												
11	2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	dokumen		0		0	1	43.088.000	0		0		0	1	12.331.160	0	1.033.900	1	13.365.060	100,00	31,02	1	13.365.060	inf	inf	DINAS PANGAN			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan					0		0		0		0		0			0		nan		0		nan	DINAS PANGAN				
			Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS PANGAN					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf						
Predikat Kinerja																								-	-						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			48.194.111.138	8.325.224.930		26.642.096.596	3.998.047.701	7.603.614.048	5.760.174.789	8.603.756.739	25.965.593.277		97,46	34.290.818.207	71,15													
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			48.194.111.138	8.325.224.930		13.447.782.498	1.758.790.876	4.212.357.467	3.174.097.617	3.160.252.146	12.305.498.106		91,51	20.630.723.036	42,81													
X.XX		PENUNJANG URUSAN			48.194.111.138	8.325.224.930		13.447.782.498	1.758.790.876	4.212.357.467	3.174.097.617	3.160.252.146	12.305.498.106		91,51	20.630.723.036	42,81													
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			48.194.111.138	100 8.325.224.930	0	13.447.782.498	100 1.758.790.876	100 4.211.837.467	100 3.174.097.617	3.160.252.146	300 12.304.978.106	inf	91,50	400 20.630.203.036	inf	42,81												
X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	414.500.000	100 26.843.000	0	31.090.400	100 5.071.000	100 7.812.750	100 8.733.000	0 3.100.000	300 24.716.750	inf	79,50	400 51.559.750	400,00	12,44												
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	257.000.000	4 20.000.000	2 29.192.500	1 3.726.000	0 7.292.750	1 8.733.000	0 3.100.000	2 22.851.750	100,00	78,28	6 42.851.750	60,00	16,67	DLH	-	tidak ada								merupakan sub kegiatan rutin	
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	22.500.000	1 2.430.000	4 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	nan	1 2.430.000	20,00	10,80	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023	-	-								
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	22.500.000	3 1.985.000	3 1.897.900	3 1.345.000	0 520.000	0 0	0 3 1.865.000	100,00	98,27	6 3.850.000	40,00	17,11	DLH	-	Koordinasi antar unit kerja sering tidak berjalan maksimal								merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap tahun, sehingga umumnya permasalahannya sudah terpetakan dan dapat diantisipasi		
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	112.500.000	4 2.428.000	4 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	nan	4 2.428.000	20,00	2,16	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					35,00	11,69								
Predikat Kinerja																					SR	SR								
X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	47.779.611.138	0 8.298.381.930	0 9.678.727.564	0 1.502.945.817	0 3.410.137.461	0 2.111.696.480	0 2.413.595.237	0 9.438.374.995	nan	97,52	0 17.736.756.925	nan	37,12												
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	519	46.029.611.138	77 7.950.540.722	100 9.368.916.268	73 1.497.187.449	0 3.291.682.701	73 2.033.961.568	0 2.341.435.325	146 9.164.267.043	146,00	97,82	223 17.114.807.765	42,97	37,18	DLH	-	kekurangan anggaran TPP untuk bulan Desember 2023							merupakan sub kegiatan rutin yang sudah biasa dilaksanakan		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	0 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	0	nan	DLH	-	-	-											
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	143	1.750.000.000	23 347.841.208	30 295.266.256	16 5.758.368	0 118.454.760	16 70.999.912	0 72.159.912	32 267.372.952	106,67	90,55	55 615.214.160	38,46	35,16	DLH											
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 2	0 inf	nan	2 0 inf	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023 dan tidak ada di renja 2023												
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	0	0	0 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	0	nan	DLH														
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	nan	0 0 nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023											
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	Dokumen	0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00	nan	0 0 nan	nan	DLH	sub kegiatan ini											

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I	II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K					Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pemeriksaan	Tindak Lanjut Pemeriksaan																												tidak diambil di APBD 2023		
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	17	14.545.040	3	0	2	0	0	6.735.000	0	0	5	6.735.000	29,41	46,30	5	6.735.000	inf	inf	DLH	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan								
Predikat Kinerja																								-	-								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	125.801.000	0	0	0	3.030.000	0	109.326.070	0	2.900.000	0	115.256.070	nan	91,62	0	115.256.070	nan	inf							
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMd pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	0	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023									
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit		0	0	0	16	112.300.000	0	0	0	16	103.051.070	0	2.400.000	16	105.451.070	100,00	93,90	16	105.451.070	inf	inf	DLH							
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honorarnya	orang		0	0	0	3	13.501.000	0	0	0	3.030.000	3	6.275.000	0	500.000	3	9.805.000	100,00	72,62	3	9.805.000	inf	inf	DLH						
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023							
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan								
Predikat Kinerja																								-	-								
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan								
16	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023							
17	X.XX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023							
18	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023							
			jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang	kali					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	0	nan	DLH										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			dilakukan oleh perangkat daerah pemungut retribusi																											
19	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH		sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023	
20	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH		sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan	nan	DLH		sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan			
Predikat Kinerja																										-	-			
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	112.060.000	0	0	0	6.370.000	0	0	0	4.500.000	0	10.870.000	nan	9,70	0	10.870.000	nan	inf			
21	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DLH		sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023	
			Jumlah pengadaan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel					103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan	nan	DLH				
22	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen		0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH		sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan	nan	DLH		sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023		
23	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang		0		0	7	112.060.000	1	0	3	6.370.000	0	0	0	4.500.000	4	10.870.000	57,14	9,70	4	10.870.000	inf	inf	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan			
Predikat Kinerja																										-	-			
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	955.827.332	0	58.863.993	0	220.530.611	0	222.954.605	0	216.810.000	0	719.159.209	nan	75,24	0	719.159.209	nan	inf			
24	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis		0		0	8	5.000.000	8	0	0	2.700.000	0	1.040.000	3	4.500.000	11	8.240.000	137,50	164,80	11	8.240.000	inf	inf	DLH			
25	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit		0		0	8	43.231.000	0	0	0	0	1	1.990.000	2	6.500.000	3	8.490.000	37,50	19,64	3	8.490.000	inf	inf	DLH			
26	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH			
27	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit		0		0	12	46.125.300	4	11.757.000	0	5.689.000	5	9.243.000	3	3.500.000	12	30.189.000	100,00	65,45	12	30.189.000	inf	inf	DLH			
28	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis		0		0	4	17.800.000	4	3.075.000	0	1.971.750	3	12.653.250	0	0	7	17.700.000	175,00	99,44	7	17.700.000	inf	inf	DLH			
29	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	buah		0		0	4	9.980.000	4	770.000	0	3.080.000	4	2.310.000	0	2.310.000	8	8.470.000	200,00	84,87	8	8.470.000	inf	inf	DLH			
30	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DLH		sub kegiatan ini tidak diambil di	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																													
											I	II	III	IV																																									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																															
																									APBD 2023																														
			Jumlah tamu yang dilayani	orang					50		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023																											
31	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen		0		0	12	833.691.032	9	43.261.993	12	207.089.861	9	195.718.355	10	200.000.000	40	646.070.209	333,33	77,50	40	646.070.209	inf	inf	DLH																												
32	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	arsip		0		0	5		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023																										
33	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	modul		0		0	3		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023																										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																							
Predikat Kinerja																																																							
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		0	0	0	181.818.200	0		0	0	8.000.000	0	86.210.000	0		0	0	94.210.000	nan	51,82	0	94.210.000	nan	inf																											
34	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit		0		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023																										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DLH																													
35	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit		0		0	8		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DLH	sub kegiatan ini tidak diambil di APBD 2023																										
36	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya baru	unit		0		0	8	181.818.200	1		0	0	8.000.000	10	86.210.000	0		0	11	94.210.000	137,50	51,82	11	94.210.000	inf	inf	DLH																										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				0		0		1		0		0		1		inf		1		inf		DLH																													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																							
Predikat Kinerja																																																							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0	0	0	1.825.982.334	0	150.281.566	0	503.315.504	0	485.179.871	0	487.129.977	0	1.625.906.918	nan	89,04	0	1.625.906.918	nan	inf																													
37	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0		0	20	12.850.000	0		0	14	3.561.500	3	1.337.500	3	205.500	20	5.104.500	100,00	39,72	20	5.104.500	inf	inf	DLH																											
38	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening		0		0	2	214.100.000	2	30.015.439	0	63.591.637	0	50.131.099	0	50.901.429	2	194.639.604	100,00	90,91	2	194.639.604	inf	inf	DLH																												
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik				2196		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DLH																													
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA				165000		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DLH																													
39	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		0	36	1.599.032.334	33	120.266.127	0	436.162.367	0	433.711.272	0	436.023.048	33	1.426.162.814	91,67	89,19	33	1.426.162.814	inf	inf	DLH																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																							
Predikat Kinerja																																																							

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I		II		III		IV			(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%								(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	536.475.668	0	41.628.500	0	52.641.141	0	149.997.591	0	32.216.932	0	276.484.164	nan	51,54	0	276.484.164	nan	inf					
40	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	16	228.417.732	5	36.098.500	8	47.485.550	1	73.929.000	2	13.745.750	16	171.258.800	100,00	74,98	16	171.258.800	inf	inf	DLH				
41	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	15	78.057.936	5	5.530.000	6	5.155.591	15	26.205.591	9	18.471.182	35	55.362.364	233,33	70,92	35	55.362.364	inf	inf	DLH				
42	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	50.000.000	0		0	0	1	49.863.000	0		0	1	49.863.000	50,00	99,73	1	49.863.000	inf	inf	DLH			
43	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	unit		0		0	27	105.000.000	0		0	0		0	0		0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DLH			
44	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	75.000.000	0		0	0		0	0		0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0		0			13.194.314.098	2.239.256.825	3.391.256.581	2.586.077.172	5.443.504.593	13.660.095.171		103,53	13.660.095.171		inf											
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			0		0			13.194.314.098	2.239.256.825	3.391.256.581	2.586.077.172	5.443.504.593	13.660.095.171		103,53	13.660.095.171		inf											
2.11.02		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			0		0	0	0	291.260.937	7.350.000	48.911.500	89.163.250	90.068.000	0	235.492.750	nan	80,85	0	235.492.750	nan	inf									
2.11.02.1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			0	0	0	0	0	67.842.103	0	1.820.000	0	14.990.500	0	27.864.000	0	2.780.000	0	47.454.500	nan	69,95	0	47.454.500	nan	inf					
1	2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen		0		0	0	1	67.842.103	0	1.820.000	0	14.990.500	0	27.864.000	1	2.780.000	1	47.454.500	100,00	69,95	1	47.454.500	inf	inf	DLH		Laporan KLHS RPJPD masih dalam proses penyusunan	Dokumen RPPLH Prov menjadi acuan dalam Penyusunan laporan KLHS RPJPD Prov
			Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	Kab/Kota				19	15	1	2	2	20	105,26	20			inf	DLH												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf						
Predikat Kinerja																								-	-						
2.11.02.1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			0	0	0	0	0	223.418.834	0	5.530.000	0	33.921.000	0	61.299.250	0	87.288.000	0	188.038.250	nan	84,16	0	188.038.250	nan	inf					
2	2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota	Kab/Kota		0		0	19	24.470.395	3	4.680.000	1	1.440.000	2	6.419.500	3	8.694.000	9	21.233.500	47,37	86,77	9	21.233.500	inf	inf	DLH		pembinaan hanya dilakukan secara langsung ke kabupaten/kota	sesuai arahan kementrian ATR/BPN agar setiap kabupaten/kota melakukan percepatan dalam penyusunan RDTR kab/kota	
3	2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen		0		0	1	198.948.439	0	850.000	0	32.481.000	0	54.879.750	1	78.594.000	1	166.804.750	100,00	83,84	1	166.804.750	inf	inf	DLH		laporan masih dalam bentuk draft	Laporan KLHS RPJPD Prov harus diintegrasikan dalam dokumen RPJPD Prov	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf						
Predikat Kinerja																								-	-						
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)			0		0	0	0	64.188.136	1.792.000	10.129.650	26.017.500	2.590.007	0	40.529.157	nan	63,14	0	40.529.157	nan	inf									
2.11.04.1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			0	0	0	0	0	64.188.136	0	1.792.000	0	10.129.650	0	26.017.500	0	2.590.007	0	40.529.157	nan	63,14	0	40.529.157	nan	inf					
1	2.11.04.1.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DLH				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I		II		III		IV																																
											(5)		(6)		(7)		(8)														(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%						
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)																					
			Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	ha					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DLH																						
2	2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	ha		0		0	10	23.342.817	0	1.592.000	0	6.309.900	8,5	5.948.000	1,5	1.590.007	10	15.439.907	100,00	66,14	10	15.439.907	inf	inf	DLH		kurang dapat dukungan anggaran dari Kab/kota untuk pengembangan kawasan Taman Kehati	Bekerjasama dengan dunia usaha untuk pengembangan kawasan konservasi kehati																			
			Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DLH																						
3	2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang		0		0	50	40.845.319	0	200.000	50	3.819.750	0	20.069.500	0	1.000.000	50	25.089.250	100,00	61,43	50	25.089.250	inf	inf	DLH		tidak adanya tindaklanjut dan kegiatan pelatihan di Kab/Kota	adanya penetapan kawasan danau prioritas di sumatera barat melalui perpres No.60 tahun 2021																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																									nan	nan							
Predikat Kinerja																																																	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAHB3)				0		0	0	2.195.337.727		717.783.565		724.463.565		244.837.596		306.470.000	0	1.993.554.726	nan	90,81	0	1.993.554.726	nan	inf																							
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0	0	0	0	0	2.195.337.727	0	717.783.565	0	724.463.565	0	244.837.596	0	306.470.000	0	1.993.554.726	nan	90,81	0	1.993.554.726	nan	inf																							
1	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	kali		0		0	1	36.414.656	0	0	9	6.680.000	1	6.097.250	1	6.470.000	11	19.247.250	1.100,00	52,86	11	19.247.250	inf	inf	DLH		Masih belum semua perusahaan di sumatera barat yang melaporkan pengelolaan limbah B3 nya ke aplikasi si Raja Limbah																				
			Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	Kab/Kota					19		0		6		6		7		19		100,00		19		inf		DLH		Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan dan DLH Kab/Kota	untuk identifikasi data LB3 , bebrapa dapat dikoordinasikan melalui online																			
2	2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah	fasilitas		0		0	1	2.158.923.071	1	717.783.565	0	717.783.565	0	238.740.346	0	300.000.000	1	1.974.307.476	100,00	91,45	1	1.974.307.476	inf	inf	DLH		Tidak dilaksanakannya penyusunan dokumen appraisal BMD (insinerator) karena pengelolaan limbah b3 medis tidak jadi menggunakan pihak ketiga (sistem sewa) karena adanya penambahan target pendapatan oleh DPRD menjadi 15 M untuk tahun 2024	Adanya bantuan KLHK dalam pengurusan izin yang sedang dilakukan yakni berupa Bimtek penyusunan DELH, percepatan penilaian dan pembahasan DELH, percepatan pengurusan SLO)																			
			Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota					2		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DLH																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																										nan	inf						
Predikat Kinerja																																											-	-					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
									I	II	III	IV																																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				0		0	0	125.805.314		15.194.000		19.121.340		46.684.000		11.412.783	0	92.412.123	nan	73,46	0	92.412.123	nan	inf																									
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			0		0	0	0	125.805.314	0	15.194.000	0	19.121.340	0	46.684.000	0	11.412.783	0	92.412.123	nan	73,46	0	92.412.123	nan	inf																									
1	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis	usaha/kegiatan		0		0	4	32.388.322	3	3.135.000	9	10.390.740	0	1.105.000	0	3.085.491	12	17.716.231	300,00	54,70	12	17.716.231	inf	inf	DLH		jarak lokasi yang tidak bisa diprediksi untuk SLO																						
2	2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang		0		0	25		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DLH																							
			Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada	%					50		0		0		0		0			0	0,00		0		nan		DLH																								
3	2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan		0		0	6	68.044.040	0	10.999.000	0	8.504.000	0	35.595.000	0	6.300.040	0	61.398.040	0,00	90,23	0	61.398.040	nan	inf	DLH		Besaran biaya labor ada perbedaan di SIPD dan tagihan, ada beberapa item yang tidak bisa di uji di alaboratorium provinsi																						
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	usaha/kegiatan					10		2		3		3		2		10		100,00		10		inf		DLH																								
4	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait	sanksi		0		0	4	25.372.952	1	1.060.000	3	226.600	1	9.984.000	0	2.027.252	5	13.297.852	125,00	52,41	5	13.297.852	inf	inf	DLH																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGANPPLH				0		0	0	25.000.000		3.680.000		15.815.000		1.056.000		1.500.000	0	22.051.000	nan	88,20	0	22.051.000	nan	inf																									
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			0		0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0		0	nan	nan																								
1	2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalan informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	kelompok masyarakat		0		0	2		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DLH																							

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	nan				
Predikat Kinerja																											-	-				
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			0	0	0	0	25.000.000	0	3.680.000	0	15.815.000	0	1.056.000	0	1.500.000	0	22.051.000	nan	88,20	0	22.051.000	nan	inf							
2	2.11.07.1.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen		0		0	25.000.000	0	3.680.000	0	15.815.000	0	1.056.000	0	1.500.000	0	22.051.000	nan	88,20	0	22.051.000	nan	inf	DLH			lokasi MHA yang jauh sehingga informasi tentang PPLH sulit dijangkau	adanya support dari Pemerintah Daerah baik dari DLH Kabupaten Dhamasraya maupun dari Pemerintah Nagari Koto Besar (MHA Koto Besar)		
			Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	kelompok masyarakat				1		1		1		0		0		2		200,00		2		inf	DLH	-		Lokasi MHA jauh dan kepedulian masyarakat ttg pengelolaan sampah masih minim	Adanya kewajiban Pemda Provinsi untuk melakukan pendampingan MHA untuk PPLH dan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Dhamasraya			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	inf				
Predikat Kinerja																											-	-				
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0		0	0	4.659.532.555		36.353.090		135.735.506		796.706.330		2.811.180.000	0	3.779.974.926	nan	81,12	0	3.779.974.926	nan	inf							
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			0	0	0	0	4.659.532.555	0	36.353.090	0	135.735.506	0	796.706.330	0	2.811.180.000	0	3.779.974.926	nan	81,12	0	3.779.974.926	nan	inf							
1	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup lembaga kemasyarakatan	kali		0		0	6	30.040.694	4	8.444.500	1	3.713.500	12	865.000	12	25.000.000	29	38.023.000	483,33	126,57	29	38.023.000	inf	inf	DLH		1. Tidak adanya dukungan anggaran dari Kab/kota untuk kegiatan 2. Kurangnya anggaran Dinas yang mendukung kegiatan 3. Kurangnya bibit/calon2 Kalpataru dari Daerah	Dukungan dari LH Kabupaten/Kota terhadap kegiatan		
2	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi bantuan prasarana pengurangan sampah	kelompok		0		0	50	4.443.967.797	0	27.908.590	0	50.813.007	55	719.262.500	65	2.786.180.000	120	3.584.164.097	240,00	80,65	120	3.584.164.097	inf	inf	DLH		1. DP Perubahan lama disyahkan. 2. Verifikasi lapangan kelompok memakan waktu yang lama. 3. Adanya beberapa kegiatan yang dirubah pada perubahan. 4. pergantian system pelaksanaan 5. Belanja barang yang perlu proses lama	Koordinasi yang baik antara DLH dengan BPBJ, Anggota Dewan dan pihak terkait kegiatan		
			Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	kab/kota					8		0		0		8		8		16		200,00		16		inf	DLH						
			Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	kelompok masyarakat					5		0		1		34		13		48		960,00		48		inf	DLH	-	Tidak tersedianya data/pencatatan pengurangan	Adanya penambahan/penambahan kelompok yang lain akibat			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																													sampah, produksi maggot, omset dll	dari adanya kegiatan pembinaan
3	2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	dokumen		0		0	1	185.524.064	0	0	1	81.208.999	0	76.578.830	0	0	1	157.787.829	100,00	85,05	1	157.787.829	inf	inf	DLH			
			Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	kali					6		0		1		5		4		10		166,67		10		inf		DLH		tidak ada hambatan	adanya support dari pihak yang terkait yang berhubungan dengan even-even yang dilaksanakan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				0		0	0	201.851.184		10.274.000		60.810.350		71.509.000		37.800.000	0	180.393.350	nan	89,37	0	180.393.350	nan	inf				
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			0	0		0	0	201.851.184	0	10.274.000	0	60.810.350	0	71.509.000	0	37.800.000	0	180.393.350	nan	89,37	0	180.393.350	nan	inf				
1	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota Pelaksana Gerakan Sumbang Bersih	Kab/Kota		0		0	2	201.851.184	0	10.274.000	0	60.810.350	2	71.509.000	2	37.800.000	4	180.393.350	200,00	89,37	4	180.393.350	inf	inf	DLH		Kurang dukungan anggaran terhadap kegiatan	adanya dukungan dari stakeholder berhubungan dengan even dan kegiatan yang dilaksanakan
			Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura	Kab/Kota					14		0		3		7		7		17		121,43		17		inf		DLH		Kab/Kota yang dipantau dan dinilai tergantung dari KLHK	Dukungan dan komitmen dari Kab/kota terhadap Program Adipura
			Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional	sekolah					20		6		0		79		115		200		1.000,00		200		inf		DLH	-	Adiwiyata masih menjadi beban berat bagi sekolah untuk mengikutinya karena sekolah masih dengan mindset lama	Dukungan dari LH Kab/kota terkait program GPBLHS/Adiwiyata
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				0		0	0	1.104.273.290		75.125.069		248.454.413		222.827.451		457.267.094	0	1.003.674.027	nan	90,89	0	1.003.674.027	nan	inf				
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			0	0		0	0	1.092.603.290	0	75.125.069	0	247.164.413	0	222.827.451	0	457.267.094	0	1.002.384.027	nan	91,74	0	1.002.384.027	nan	inf				
1	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab/Kota		0		0	19	287.076.704	7	6.526.000	11	117.162.111	0	62.878.760	0	72.704.123	18	259.270.994	94,74	90,31	18	259.270.994	inf	inf	DLH			
2	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab/Kota		0		0	19	46.777.202	1	1.640.000	13	13.668.000	2	13.380.500	3	16.316.000	19	45.004.500	100,00	96,21	19	45.004.500	inf	inf	DLH		Tidak ada hambatan	adanya dukungan kegiatan dari KLHK dalam upaya pencapaian target 20.000 kampung iklim secara nasional tahun 2024
3	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi [UPTD Laboratorium Lingkungan]	Jumlah laboraroiium lingkungan yang dikelola	laboratorium		0		0	1	758.749.384	1	66.959.069	0	116.334.302	0	146.568.191	0	368.246.971	1	698.108.533	100,00	92,01	1	698.108.533	inf	inf	DLH		Terhadap beberapa item barang yang akan dibeli, terdapat fluktuasi harga, sehingga kegiatan pengadaan belum dapat	Adanya dukungan dari beberapa pihak terkait (pihak ketiga sub bag program dll) untuk mengusulkan harga baru, sehingga pelaksanaan kegiatan telah dapat dilaksanakan pada TW III

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																														dilaksanakan pada jadwal yang telah direncanakan. (semula TW I)			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf							
Predikat Kinerja																									-	-							
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			0	0	0	0	0	11.670.000	0	0	0	1.290.000	0	0	0	0	1.290.000	nan	11,05	0	1.290.000	nan	inf								
4	2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen		0		0	0	11.670.000	0	0	0	1.290.000	0	0	0	0	1.290.000	nan	11,05	0	1.290.000	nan	inf	DLH							
			Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	ha					2	10	0		0		0		10		500,00		10		inf	DLH									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf							
Predikat Kinerja																									-	-							
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				0		0	0	4.459.277.479	797.067.089		1.002.748.567	1.072.901.045	1.705.981.367	0	4.578.698.068	nan	102,68	0	4.578.698.068	nan	inf										
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			0	0	0	0	0	4.459.277.479	797.067.089	0	1.002.748.567	1.072.901.045	1.705.981.367	0	4.578.698.068	nan	102,68	0	4.578.698.068	nan	inf										
1	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen		0		0	0	380.521.608	0	0	0	2.373.400	0	370.407.226	0	372.780.626	nan	97,97	0	372.780.626	nan	inf	DLH								
			Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	dokumen						3	0		0		3		3		100,00		3		inf	DLH						1 dari 3 kegiatan telah selesai dilaksanakan yaitu FS Bioteknologi pengelolaan sampah di TPA Regionla Solok, 2 kegiatan sedang proses yaitu kasjian sosial dan offtaker di TPA Regiobal Payakumbuh			
2	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	dokumen		0		0	1	69.947.736	0	7.104.000	0	10.007.000	0	39.443.000	1	9.700.000	1	66.254.000	100,00	94,72	1	66.254.000	inf	inf	DLH	-			2 kajian ini merubakan syarat pendukung Program Solid Waste Managemen Subtanebel Urban Development (SWSUD) dari KLHK berupa Pembangunan TPST, Penataan TPA Regional Payakumbuh		
																														KetersKeterlibatan semua stakeholder yang mendukung kegiatannediaan anggaran			
3	2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit		0		0	0	3.998.169.347	2	789.963.089	0	987.051.667	0	1.029.953.645	0	1.325.874.141	2	4.132.842.542	inf	103,37	2	4.132.842.542	inf	inf	DLH						
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit					2	0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DLH								
			Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	TPA					2	2		0		0		0		2		100,00		2		inf	DLH								
4	2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya	laporan		0		0	1	10.638.788	0	0	0	5.689.900	0	1.131.000	1	0	1	6.820.900	100,00	64,11	1	6.820.900	inf	inf	DLH						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf							
Predikat Kinerja																									-	-							

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGAN HIDUP				0		0	0	67.787.476		15.145.000		15.990.821		14.375.000		19.235.342	0	64.746.163	nan	95,51	0	64.746.163	nan	inf					
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			0		0		0	67.787.476	0	15.145.000	0	15.990.821	0	14.375.000	0	19.235.342	0	64.746.163	nan	95,51	0	64.746.163	nan	inf					
1	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen		0		0	10	67.787.476	0	15.145.000	4	15.990.821	3	14.375.000	3	19.235.342	10	64.746.163	100,00	95,51	10	64.746.163	inf	inf	DLH				
			Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	%					100		100		0		0		0		100		100,00		100		inf	inf	DLH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
						0		0		25.570.457.395		4.329.218.202		7.431.843.185		0	0		11.761.061.387		45,99		11.761.061.387		inf				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		10.065.857.811		1.549.875.313		3.190.462.993		0	0		4.740.338.306		47,09		4.740.338.306		inf				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		10.065.857.811		1.549.875.313		3.190.462.993		0	0		4.740.338.306		47,09		4.740.338.306		inf				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0	0	10.065.857.811		1.549.875.313		3.190.462.993		0	0	0	4.740.338.306	nan	47,09	0	4.740.338.306	nan	inf				
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	131.501.545	0	17.330.000	0	32.610.000	0	0	0	0	49.940.000	nan	37,98	0	49.940.000	nan	inf				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	0	12	0	12	106.456.919	3	17.330.000	3	28.415.000	0	0	6	45.745.000	50,00	42,97	18	45.745.000	150,00	inf	DPMD				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0		0	12		0	0	0	3		0	0	3	0	25,00	nan	3	0	inf	nan	DPMD			
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0		0	12	25.044.626	0	0	3	4.195.000	0	0	3	4.195.000	25,00	16,75	3	4.195.000	inf	inf	DPMD				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	0	12	0	12	0	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	nan	DPMD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan				
Predikat Kinerja																								-	-				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	6.700.248.877	0	1.096.307.429	0	2.132.921.311	0	0	0	0	3.229.228.740	nan	48,20	0	3.229.228.740	nan	inf				
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	0	6.500.975.866	1.062.123.929		2.082.921.311	0	0	0	3.145.045.240	nan	48,38	0	3.145.045.240	nan	inf	DPMD					
			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	12		12		54		15		20			35		64,81		47		391,67		DPMD					
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat Honor	Orang	12	0	12	0	18	179.770.733	4	29.320.000	4	43.980.000	0	0	8	73.300.000	44,44	40,77	20	73.300.000	166,67	inf	DPMD				
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP, SPM, dan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	12	0	12	0	5630	0	1000	0	1200	0	0	0	2200	0	39,08	nan	2212	0	18.433,33	nan	DPMD				
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Dokumen	12	0	12	0	7	19.502.278	2	4.863.500	3	6.020.000	0	0	5	10.883.500	71,43	55,81	17	10.883.500	141,67	inf	DPMD				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	66.790.000	0	1.200.000	0		0	0	0	0	1.200.000	nan	1,80	0	1.200.000	nan	inf				
9	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit		0		0	8	66.790.000	2	1.200.000	2		0	0	0	4	1.200.000	50,00	1,80	4	1.200.000	inf	inf	DPMD			
			Jumlah CCTV yang dipasang	Unit					2		1		0					1		50,00		1		inf	DPMD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Dokumen					1		0		1					1		100,00		1		inf	DPMD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					12		3		3					6		50,00		6		inf	DPMD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Hukum	Dokumen					30		8		8					16		53,33		16		inf	DPMD				
			Jumlah Tanah yan bersertifikat	Persil					1		0		1					1		100,00		1		inf	DPMD				
			Jumlah Tanda Kepemilikan Tanah	Unit					1		1		0					1		100,00		1		inf	DPMD				
			Jumlah Tanda Letak Tanah yang dibangun	Unit/Set					2		1		1					2		100,00		2		inf	DPMD				
			Jumlah Unit yang dilakukan Penjagaan	Unit					1		1		0					1		100,00		1		inf	DPMD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan					
10	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Stel		0		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	1.696.366.586	0	213.236.804	0	490.210.556	0	0	0	0	703.447.360	nan	41,47	0	703.447.360	nan	inf				
11	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	15	35.000.000	5	8.713.000	3	5.805.000		0	0	8	14.518.000	53,33	41,48	8	14.518.000	inf	inf	DPMD			
12	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit		0		0	10	50.000.000	2	15.500.000	3	33.885.000		0	0	5	49.385.000	50,00	98,77	5	49.385.000	inf	inf	DPMD			
13	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	24	51.194.402	6	13.205.500	6	11.447.000		0	0	12	24.652.500	50,00	48,15	12	24.652.500	inf	inf	DPMD			
14	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	12	42.145.000	4	5.014.250	4	10.412.000		0	0	8	15.426.250	66,67	36,60	8	15.426.250	inf	inf	DPMD			
15	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan		0		0	12	22.260.000	4	5.535.000	3	3.690.000		0	0	7	9.225.000	58,33	41,44	7	9.225.000	inf	inf	DPMD			
16	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan		0		0	0	1.495.767.184		165.269.054		424.971.556		0	0	0	590.240.610	nan	39,46	0	590.240.610	nan	inf	DPMD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I		II		III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
			Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi	dokumen					240		60		60				120		50,00		120		inf	DPMD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf				
Predikat Kinerja																					-	-				
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0	0	0	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
17	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPMD	
18	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPMD	
19	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	12	42.000.000		0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPMD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	1.098.869.731	0	187.262.515	0	297.292.620	0	0	0	0	484.555.135	nan	44,10	0	484.555.135	nan	inf	
20	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0	2.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	1.500.000	nan	60,00	0	1.500.000	nan	inf	DPMD	
			Jumlah surat- surat masuk dan surat-surat Keluat dalm 1 tahun	Surat					1500	400		300				700		46,67		700		inf	DPMD			
21	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kapasitas tagihan Listrik yang dibayarkan	Mbps		0		0	240	199.940.000	60	43.825.689	60	42.306.515	0	0	120	86.132.204	50,00	43,08	120	86.132.204	inf	inf	DPMD	
			Jumlah Rekening tagihan Telepon yang dibayarkan	rekening					12	3		3				6		50,00		6		inf	DPMD			
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					3500	1000		1000				2000		57,14		2000		inf	DPMD			
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KWH					110000	20000		30000				50000		45,45		50000		inf	DPMD			
22	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga pelayanan Umum kantor yang tersedia	orang		0		0	18	896.429.731	4	142.936.826	4	253.986.105	0	0	8	396.922.931	44,44	44,28	8	396.922.931	inf	inf	DPMD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf				
Predikat Kinerja																					-	-				
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	330.081.072	0	34.538.565	0	237.428.506	0	0	0	0	271.967.071	nan	82,39	0	271.967.071	nan	inf	
23	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	1	40.000.000	1	13.173.565	0	4.850.000	0	0	1	18.023.565	100,00	45,06	1	18.023.565	inf	inf	DPMD	
24	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	7	50.081.072	3	11.955.000	2	28.573.900	0	0	5	40.528.900	71,43	80,93	5	40.528.900	inf	inf	DPMD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I		II				III	IV	(13) = 12/7 * 100%							(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	
					(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)							(9)		(10)	(11)
25	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPMD			
26	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	60	40.000.000	16	9.410.000	14	10.205.000	0	0	30	19.615.000	50,00	49,04	30	19.615.000	inf	inf	DPMD			
27	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	2	200.000.000	2	0	0	193.799.606	0	0	2	193.799.606	100,00	96,90	2	193.799.606	inf	inf	DPMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0	0		15.504.599.584		2.779.342.889		4.241.380.192	0	0		7.020.723.081		45,28		7.020.723.081		inf					
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0	0		15.504.599.584		2.779.342.889		4.241.380.192	0	0		7.020.723.081		45,28		7.020.723.081		inf					
2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Adat yang Terbentuk	Desa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan					
2.13.02.1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Nagari/Desa Adat	Perda Kab/Kota	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan					
			Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa/Nagari Adat	Perda Kab/Kota	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan							
1	2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Monitoring dan Evaluasi penataan Desa Adat	kali		0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	50,00	nan	2	0	inf	nan	DPMD			
			Terlaksananya sosialisasi identifikasi dan inventarisasi	orang				60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DPMD				
2	2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	FGD Kelembagaan Desa Adat	orang		0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPMD				
			Pembinaan dan Movev Kelembagaan Desa Adat	kali				3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DPMD				
3	2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	rekomendasi		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPMD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Jumlah Kerjasama Desa	Kerjasama Desa		0	0	130	986.467.555		209.915.300		192.895.280	0	0	0	402.810.580	0,00	40,83	0	402.810.580	nan	inf				
2.13.03.1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerjasama Desa	Dokumen	0	0	0	130	986.467.555	0	209.915.300	0	192.895.280	0	0	0	402.810.580	0,00	40,83	0	402.810.580	nan	inf				
			Meningkatnya Kerjasama Desa dalam Pembangunan Desa	Dokumen	0	0		130		0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
1	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	terlaksananya Rakor IDM Tahun 2023	orang		0		0	100	98.474.467			0		10.343.900		0	0	0	10.343.900	0,00	10,50	0	10.343.900	nan	inf	DPMD			
			Terlaksananya verifikasi data IDM ke Kabupaten/kota	Kabupaten/kota					14								0			0,00		0		nan		DPMD				
			Tersedianya buku IDM Tahun 2023	buku					150								0			0,00		0		nan		DPMD				
			Terlaksananya fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal	Desa Tertinggal					28		8		8				16		57,14		16			inf		DPMD				
2	2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		0		0	7	702.999.585	2	62.310.300	2	176.672.800		0	0	4	238.983.100	57,14	33,99	4	238.983.100	inf	inf	DPMD				
			Terlaksananya Acara Serah Terima dan Pelepasan Mahasiswa KKN-PPM	Orang					250		60		60				120		48,00		120			inf		DPMD				
			Terlaksananya Dukungan Kampung Bahari Nusantara	Lokasi/Kabupaten					1		1		0				1		100,00		1			inf		DPMD				
			Terlaksananya Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Program KKN-PPM	Perguruan tinggi					13		4		4				8		61,54		8			inf		DPMD				
			Terlaksananya Rapat Evaluasi TMMD/N Tahun 2023	Orang					60		15		15				30		50,00		30			inf		DPMD				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi KKN-PPM Tahun 2023	Orang					60		15		15				30		50,00		30			inf		DPMD				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis TMMD/N ke 116 , 117 dan 118	Kali					3		1		1				2		66,67		2			inf		DPMD				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi TMMD/N ke 116 , 117 dan 118	Kali					3		1		1				2		66,67		2			inf		DPMD				
3	2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pembinaan transformasi UPK menjadi BUMDesa Bersama	Kab/Kota		0		0	14	184.993.503		147.605.000		5.878.580		0	0	0	153.483.580	0,00	82,97	0	153.483.580	nan	inf	DPMD				
			jumlah BUMDESA Bersama yang terbentuk	kab/kota					12								0		0,00		0			nan		DPMD				
			Terlaksananya Rakor UPK DBM Eks PNPM bersama Aparatur	Orang					173								0		0,00		0			nan		DPMD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHANDESA	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang		0		0	410	5.346.909.606		574.244.897		1.165.994.247		0	0	0	1.740.239.144	0,00	32,55	0	1.740.239.144	nan	inf					
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Nagari/Desa dan Kelurahan Yang dibina	Aparatur	0	0	0	0	500	5.346.909.606	0	574.244.897	0	1.165.994.247	0	0	0	0	1.740.239.144	0,00	32,55	0	1.740.239.144	nan	inf					
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Desa	Aparatur	0		0		500		0		0		0	0	0		0,00		0			nan						
1	2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	terlaksananya Sosialisasi Produk hukum desa	orang		0		0	80	0	20		0	20		0	0	0	40	0	50,00	nan	40	0	inf	nan	DPMD			
			terlaksannya monev penyusunan produk hukum	Kab/Kota					5		0		0				0		0,00		0			nan		DPMD				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
						I	II		III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp					
			desa																										
2	2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen		0		0	5		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DPMD					
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen					1		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Indeks Desa Membangun Tahun 2023	Kab/Kota					5		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi calon pandeka nagari	orang					430		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
			Terlaksananya perekrutan pandeka nagari	orang					430		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
			Terlaksananya Rakor dan Evaluasi Data IDM untuk aparat Kab/Kota	orang					100		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
			Terlaksananya Rapat Teknis Penyusunan,Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	kali					1		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
			Tersedianya Data IDM Tahun 2023	persen					100		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
3	2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		0		0	0	144.144.800		57.581.100		12.100.300	0	0	0	69.681.400	nan	48,34	0		69.681.400	nan	inf	DPMD			
			Monev dan koordinasi pengelolaan keuangan Desa/nagari	kali					10		2		2			4	40,00		4			inf		DPMD					
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen					2		1		0			1	50,00		1			inf		DPMD					
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa	kali					2		0		1			1	50,00		1			inf		DPMD					
4	2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Bimtek pengelolaan Aset Desa/Nagari	kali		0		0	5	330.655.906		23.980.000		260.921.000	0	0	0	284.901.000	0,00	86,16	0		284.901.000	nan	inf	DPMD			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen					0							0		nan		0			nan		DPMD				
			Monev dan koordinasi pengelolaan aset Nagari/Desa	kali					9		1		1			2	22,22		2			inf		DPMD					
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen					4		0		0			0	0,00		0			nan		DPMD					
5	2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	terlaksananya monev ke Kab/Kota yang melaksanakan Pilkades/Pilwana serentak Tahun 2022	Kab/Kota		0		0	2	0	0		0	1		0	0	50,00	nan	1		0	inf	nan	DPMD				
			terlaksananya sosialisasi perubahan Permendagri No. 12 Tahun 2014	orang					100		0		0			0		0,00		0			nan		DPMD				
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	laporan					1		0		0			0		0,00		0			nan		DPMD				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
6	2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	0	1	428.857.750		2.372.900		134.392.200		0	0	0	136.765.100	0,00	31,89	0	136.765.100	nan	inf	DPMD			
			Terikutinya Acara Puncak Lomba Desa dan Kelurahan Tk Regional	Kali				1								0		0,00		0		nan		DPMD				
			Terikutinya Pekan Inovasi Nasional	kali				0		0		0				0		nan		0		nan		DPMD				
			Terlaksananya Penilaian Lomba Nagari dan Kelurahan Berprestasi	Kab/Kota				19		5		4				9		47,37		9		inf		DPMD				
7	2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya movev profil desa/nagari/kelurahan	Kab/Kota		0	0	19	63.797.400		32.594.200		7.911.400		0	0	0	40.505.600	0,00	63,49	0	40.505.600	nan	inf	DPMD			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen				0								0		nan		0		nan		DPMD				
			Terlaksananya rapat koordinasi teknis penyusunan profil desa/nagari dan kelurahan	orang				60								0		0,00		0		nan		DPMD				
8	2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya movev pembinaan aparatur pemerintahan Desa	Kab/Kota		0	0	10	2.187.658.100		13.460.000		151.069.000		0	0	0	164.529.000	0,00	7,52	0	164.529.000	nan	inf	DPMD			
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang				1187								0		0,00		0		nan		DPMD				
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Aparatur Pemerintah Desa Angkatan I sampai VI	orang				754								0		0,00		0		nan		DPMD				
9	2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Bimbingan teknis dan Pelatihan Bagi BAMUS Nagari yang baru terpilih	orang		0	0	420	318.373.250	50	14.970.000	150	203.044.300		0	0	200	218.014.300	47,62	68,48	200	218.014.300	inf	inf	DPMD			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Bamus Nagari	Kab/Kota				14		3		4				7		50,00		7		inf		DPMD				
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	orang				420		100		100				200		47,62		200		inf		DPMD				
10	2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Pemberian Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa	dokumen		0	0	10	850.000.000	2	0	2		0	0	0	4	0	40,00	0,00	4	0	inf	nan	DPMD			
			Terlaksananya Pemberian Bantuan Pendampingan Ke Pemerintah Desa	orang				430		0		0				0		0,00		0		nan		DPMD				
11	2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang kewenangan provinsi di desa/nagari	dokumen		0	0	1	0	0	0	1		0	0	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DPMD			
12	2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan	Terlaksananya Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2021	Kab/Kota		0	0	14	1.023.422.400		429.286.697		396.556.047		0	0	0	825.842.744	0,00	80,69	0	825.842.744	nan	inf	DPMD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Lembaga Kerja Sama antar Desa																										
			Monitoring dan Evaluasi Serta Pembinaan BUMDes	Kab/Kota					14								0		0,00		0		nan		DPMD			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen					0								0		nan		0		nan		DPMD			
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab/Kota					14								0		0,00		0		nan		DPMD			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan BUMNag/BUMDes	Orang					450								0		0,00		0		nan		DPMD			
			Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMDes/BUMNag	Kali					1								0		0,00		0		nan		DPMD			
			Terlaksananya Lomba BUMNag	Kali					1		0		1				1		100,00		1		inf		DPMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang menjalankan Peran dan Fungsinya	%		0		0	70	9.171.222.423	1.995.182.692	2.882.490.665	0	0	0	0	4.877.673.357	0,00	53,18	0	4.877.673.357	nan	inf					
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Darmawisma Mandiri/Maju)	Darmawisma	0	0	0	0	11300	9.171.222.423	0	1.995.182.692	0	2.882.490.665	0	0	0	0	4.877.673.357	0,00	53,18	0	4.877.673.357	nan	inf			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (KAN Aktif)	KAN	0		0		350		0		0		0	0	0		0,00		0		nan					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM MAndiri)	LPM	0		0		7		0		0		0	0	0		0,00		0		nan					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (POSYANDU)	Posyandu	0		0		2400		0		0		0	0	0		0,00		0		nan					
1	2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab/Kota		0		0	19	22.892.650	4	2.394.963	3	6.852.741	0	0	7	9.247.704	36,84	40,40	7	9.247.704	inf	inf	DPMD			
2	2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Kelembagaan Adat	Kab/Kota		0		0	19	1.085.555.550		486.580.157		364.417.414	0	0	0	850.997.571	0,00	78,39	0	850.997.571	nan	inf	DPMD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I		II														III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																									
			Terlaksananya Pendataan Karang Taruna Nagari/Desa/Kelurhan	Kab/Kota				19							0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Kelembagaan LPM Nagari/Desa/Kelurahan	Kab/Kota				19							0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Posyandu dan KPM	Kab/Kota				19							0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Pendataan RT/RW	Kab/Kota				19							0		0,00		0		nan	DPMD					
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen				0		0		0			0		nan		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Dukungan terhadap Gebyar Dasawisma	kali				1		1		0			1		100,00		1		inf	DPMD					
			Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Kelembagaan PKK	Kab/Kota				19		4		4			8		42,11		8		inf	DPMD					
3	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pokjanal, Pokja dan Kader Posyandu	orang		0		0	850	4.621.891.900		928.725.000		1.397.054.400	0	0	0	2.325.779.400	0,00	50,32	0	2.325.779.400	nan	inf	DPMD		
			Terlaksananya Penilaian KAN Terbaik Tk. Prov. Sumbar	Kab/Kota					7						0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Jambore Kader Posyandu	Kali					1						0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Rakor LPM	Orang					1158						0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Penilaian LPM Tk. Prov. Sumbar	Kab/Kota					8						0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat/Pemangku Adat	orang					850						0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Gebyar Dasawisma	Kali					1						0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksannya Studi Tiru LPM	Kali					1						0		0,00		0		nan	DPMD					
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMN/D/K	orang					350						0		0,00		0		nan	DPMD					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas PKK	orang					750							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Rakor Pembina PKK	Orang					70							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu Prov. Sumbang	orang					120							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Nagari/Desa/Kelurahan	Orang					100							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Orang					100							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Penilaian Kader Posyandu Berprestasi dan Posyandu Tk. Prov. Sumbang	Kab/Kota					11							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga					0							0		nan		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Rakor KAN	Orang					544							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Studi Implementasi Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD	Kali					1							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Terlaksananya Mukerda DPD LPM Prov. Sumbang	orang					77	20		25				45		58,44		45		inf	DPMD							
			Terlaksananya Temu Kader Posyandu Berprestasi Tk. Prov. Sumbang	orang					57	15		20				35		61,40		35		inf	DPMD							
4	2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	DPMD								
5	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Budaya Maggot	Orang		0		0	80	1.417.668.690	358.156.372	776.806.475		0	0	0	1.134.962.847	0,00	80,06	0	1.134.962.847	nan	inf	DPMD						
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Prukades, Pasar Desa dan Lumbung Pangan	Kab/Kota					14							0		0,00		0		nan	DPMD							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen					0							0		nan		0		nan	DPMD							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Terlaksananya Lomba Pengelolaan Pasar Desa/Nagari	kali					1							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Lomba Budidaya Maggot Lalat Hitam	kali					1							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Prukades	Orang					120							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Enterpreneur Milenial di Nagari/Desa	Orang					200							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Pasar Desa	Orang					110							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Indentifikasi Produk Unggulan Desa	Kab/Kota					14							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Dokumen					1							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat	Orang					90	30		15				45		50,00		45			inf	DPMD				
6	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terikutinya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Kali		0		0	1	406.927.433	0	7.851.200	1	215.955.000	0	0	1	223.806.200	100,00	55,00	1	223.806.200	inf	inf	DPMD			
			Terlaksananya Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Kab/Kota					19	5		5				10		52,63		10			inf	DPMD				
			Terlaksananya Penilaian Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Kali					1	0		0				0		0,00		0			nan	DPMD				
7	2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Penilaian BBGRM	Kab/Kota		0		0	19	25.886.200		0		11.187.014	0	0	0	11.187.014	0,00	43,22	0	11.187.014	nan	inf	DPMD			
			Terlaksananya Pencanangan BBGRM	Kab/Kota					19							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring BBGRM	Kab/Kota					19	3		3				6		31,58		6			inf	DPMD				
8	2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman , Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	dokumen		0		0	1		0	0		0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DPMD			
9	2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Orientasi Pendataan di Dasawisma Secara Digital	Orang		0		0	100	1.590.400.000		211.475.000		110.217.621	0	0	0	321.692.621	0,00	20,23	0	321.692.621	nan	inf	DPMD			
			Terikutinya Jambore Nasional Kader PKK	Kali					1							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Dasawisma Tk. Prov. Sumbar	Kali					1							0		0,00		0			nan	DPMD				
			Terlaksananya Jambore Kader PKK Tk. Prov. Sumbar	Kali					1							0		0,00		0			nan	DPMD				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Terlaksananya Orientasi Kiat dan Krisan (PAAREDI)	Orang					100								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksannya Rakor Ketua dan Sekretaris TP-PKK Kab/Kota se Sumbar	Orang					40								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Gebyar Dasawisma	Orang					556								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Temu Ketua Dasawisma Berprestasi Tk. Prov. Sumbar	Orang					60								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Peningkatan Wawasan Pengurus TP-PKK Prov. Sumbar	Kali					1								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksannya Orientasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui HATINYA PKK	Orang					76								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terikutinya Rakernas/Rakon PKK	kali					1								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Sosialisasi Pilot Project Program Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana	Orang					76								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Orientasi Pembinaan UP2K-PKK & Pembekalan Pendiriaan Koperasi	Orang					100								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Peringatan HKG-PKK Tk. Prov. Sumbar Tahun 2023	Orang					150								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Penilaian Dasawisma Berprestasi Tk. Prov. Sumbar	Kab/Kota					11								0		0,00		0			nan	DPMD			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan					0		0		0				0		nan		0			nan	DPMD			
			Terlaksananya Bimtek Gerakan PKK	Kab/Kota					19		4		5				9		47,37		9			inf	DPMD			
			Terlaksananya Penilaian Gerakan PKK Tk. Prov. Sumbar	Kab/Kota					19		4		5				9		47,37		9			inf	DPMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
											I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				54.294.899.687		8.182.978.764		7.942.560.086		1.225.326.398		2.440.006.731		1.666.465.670		2.077.959.984		7.409.758.783		93,29		15.592.737.547		28,72																								
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				45.765.622.687		6.541.106.829		7.069.560.086		1.055.828.310		2.173.480.489		1.420.417.603		1.916.987.221		6.566.713.623		92,89		13.107.820.452		28,64																								
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				45.765.622.687		6.541.106.829		7.069.560.086		1.055.828.310		2.173.480.489		1.420.417.603		1.916.987.221		6.566.713.623		92,89		13.107.820.452		28,64																								
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		45.220.366.374	100	6.541.106.829	100	7.069.560.086	0	1.055.828.310	25	2.173.480.489	50	1.420.417.603	25	1.916.987.221	100	6.566.713.623	100,00	92,89	200	13.107.820.452	inf	28,99																								
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tahun	5	2.120.625.000	1	336.862.122	1	425.420.000	0	102.563.600	0	29.258.153	0	130.163.626	1	103.660.000	1	365.645.379	100,00	85,95	2	702.507.501	40,00	33,13																								
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	1.047.425.000	3	116.412.415	0	175.101.200	0	80.158.500	1	15.534.653	1	16.386.626	1	36.960.000	3	149.039.779	inf	85,12	6	265.452.194	40,00	25,34	DINAS DUKCAPIL																							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	15		3		3		0		1		1		1		3		100,00		6		40,00	DINAS DUKCAPIL																								
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	180.000.000	1	13.953.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	13.953.400	20,00	7,75	DINAS DUKCAPIL																								
			Jumlah Dokumen Penganggaran -SKPD yang disusun	Dokumen	0		0		4		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS DUKCAPIL																								
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun	Dokumen	20	438.200.000	4	113.277.767	4	250.318.800	1	22.405.100	1	13.723.500	1	113.777.000	1	66.700.000	4	216.605.600	100,00	86,53	8	329.883.367	40,00	75,28	DINAS DUKCAPIL																							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS DUKCAPIL																								
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	10	455.000.000	2	93.218.540	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	93.218.540	20,00	20,49	DINAS DUKCAPIL																								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS DUKCAPIL																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																		
Predikat Kinerja																																																		
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	28.512.197.522	0	3.862.937.967	6	4.647.727.125	0	736.147.704	0	1.605.951.143	0	1.005.230.914	0	1.172.684.441	0	4.520.014.202	0,00	97,25	0	8.382.952.169	0,00	29,40																								
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	279	25.850.197.522	50	3.674.587.455	50	4.447.837.125	0	709.465.704	32	1.575.430.743	18	972.972.514	0	1.147.427.441	50	4.405.296.402	100,00	99,04	100	8.079.883.857	35,84	31,26	DINAS DUKCAPIL																							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS DUKCAPIL																								
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	60	1.907.000.000	12	115.140.000	11	124.890.000	0	23.145.000	11	23.145.000	0	23.145.000	0	23.145.000	11	92.580.000	100,00	74,13	23	207.720.000	38,33	10,89	DINAS DUKCAPIL																							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DINAS DUKCAPIL																									
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0		0		0	5.000.000	0		0	0	4.959.500	0	0	0	0	4.959.500	nan	99,19	0	4.959.500	nan	inf	DINAS DUKCAPIL																							
			Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	0		0		33		8		8		8		9		33		100,00		33		inf	DINAS DUKCAPIL																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I	II		III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	410.000.000	1	33.283.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	33.283.962	20,00	8,12	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Dokumen	0		0		1	0		0		0		0		0	0		0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL			
9	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	345.000.000	13	39.926.550	0	70.000.000	0	3.537.000	2	2.415.900	0	9.113.400	0	2.112.000	2	17.178.300	inf	24,54	15	57.104.850	23,08	16,55	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Dokumen	0		0		13		3		3		3		4		13		100,00		13		inf		DINAS DUKCAPIL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	500	560.000.000	0	105.745.555	5	98.841.600	0	5.924.750	0	23.362.597	0	8.307.362	5	15.725.575	5	53.320.284	100,00	53,95	5	159.065.839	1,00	28,40				
10	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan penghapusan serta Penghitungan standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	10	25.000.000	2	3.885.900	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	3.885.900	20,00	15,54	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0		0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
11	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	35	230.000.000	7	37.771.873	7	39.800.000	0	4.929.750	0	19.540.597	0	242.562	7	13.687.575	7	38.400.484	100,00	96,48	14	76.172.357	40,00	33,12	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0		0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
12	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	Dokumen	0	0	0	0	2	9.759.900	0	0	1	2.720.000	0	692.300	1	900.000	2	4.312.300	100,00	44,18	2	4.312.300	inf	inf	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang	0		0		2	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
13	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	5	235.000.000	1	11.557.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	11.557.000	20,00	4,92	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
14	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Dokumen	5	70.000.000	1	52.530.782	1	49.281.700	0	995.000	0	1.102.000	0	7.372.500	1	1.138.000	1	10.607.500	100,00	21,52	2	63.138.282	40,00	90,20	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	20	1.195.000.000	4	75.420.000	6	45.677.600	0	27.028.100	0	864.000	0	3.790.000	6	13.900.000	6	45.582.100	100,00	99,79	10	121.002.100	50,00	10,13				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
15	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	55.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	55.500.000	nan	inf	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	279		50		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		50		17,92	DINAS DUKCAPIL					
16	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
17	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	0	0	0	50	25.677.600	36	24.748.100	14	864.000	0	0	0	0	50	25.612.100	100,00	99,74	50	25.612.100	inf	inf	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Orang	0		0		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL					
18	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	18	455.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	0		0		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL					
19	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	284	740.000.000	80	19.920.000	10	20.000.000	2	2.280.000	0	0	0	3.790.000	0	13.900.000	2	19.970.000	20,00	99,85	82	39.890.000	28,87	5,39	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	55	4.117.000.000	11	558.970.491	10	363.477.630	0	86.704.608	0	91.281.711	0	114.520.313	10	168.262.400	10	460.769.032	100,00	126,77	21	1.019.739.523	38,18	24,77					
20	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	58	150.000.000	10	14.906.400	12	15.000.000	0	3.145.400	0	3.750.000	0	3.593.000	12	4.494.600	12	14.983.000	100,00	99,89	22	29.889.400	37,93	19,93	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL					
21	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	75	620.000.000	15	23.712.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400.000	0	17.400.000	nan	inf	15	41.112.500	20,00	6,63	DINAS DUKCAPIL					
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	0		0		10	0	0	0	0	0	0	6		6		60,00		6		inf		DINAS DUKCAPIL					
22	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit	0		0		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL					
23	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	30	425.000.000	6	98.141.693	6	111.048.500	0	14.509.500	0	30.024.800	0	32.848.825	6	33.628.100	6	111.011.225	100,00	99,97	12	209.152.918	40,00	49,21	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL					
24	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	75.000.000	0	31.256.000	0	20.538.184	0	2.700.000	0	8.789.100	0	2.701.800	0	5.799.700	0	19.990.600	nan	97,33	0	51.246.600	0,00	68,33	DINAS DUKCAPIL				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	0		0		5	0	0	0	0	0	5		5		100,00		5		inf		DINAS DUKCAPIL						
25	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	60	250.000.000	12	15.000.000	4	15.000.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	4	3.750.000	4	15.000.000	100,00	100,00	16	30.000.000	26,67	12,00	DINAS DUKCAPIL				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
26	X.XX.01.1.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	102.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	0		0		250		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
27	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	60	1.920.000.000	20	368.780.298	20	201.890.946	5	62.599.708	5	44.967.811	5	71.626.688	5	103.190.000	20	282.384.207	100,00	139,87	40	651.164.505	66,67	33,91	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
28	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Arsip	58	155.000.000	12	7.173.600	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	12	7.173.600	20,69	4,63	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
29	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	orang	7	420.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	0	14,29	0,00	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan																										
Predikat Kinerja																									-	-																										
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	20	1.341.433.916	4	665.774.030	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	665.774.030	20,00	49,63																										
30	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	68	500.000.000	15	30.000.000	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	15	30.000.000	22,06	6,00	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
31	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Jenis	15	841.433.916	7	635.774.030	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	7	635.774.030	46,67	75,56	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
32	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Mushalla dan Pos Pengamanan)	Unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan																										
Predikat Kinerja																									-	-																										
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	15	5.954.809.936	3	855.257.128	3	1.005.260.792	0	89.690.928	0	375.656.850	0	105.832.480	3	354.925.129	3	926.105.387	100,00	92,13	6	1.781.362.515	40,00	29,91																										
33	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	48.576.894	1	5.700.000	0	5.706.500	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	5.000.000	nan	87,62	1	10.700.000	20,00	22,03	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Surat	0		0		500		100		100		100		200		500		100,00		500		inf		DINAS DUKCAPIL																									
34	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	MBPS	500	2.320.765.125	100	207.206.329	100	318.840.000	25	51.519.456	25	62.914.939	0	66.311.008	50	58.473.762	100	239.219.165	100,00	75,03	200	446.425.494	40,00	19,24	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		1		0		0		0		0		0		0		nan		1		20,00		DINAS DUKCAPIL																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik	13500		2700		2700		0		0		0		2700		2700		100,00		5400		40,00		DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	48		9.6		9.6		0		0		0		9.6		9.6		100,00		19.2		40,00		DINAS DUKCAPIL			
35	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	3.585.467.917	1	642.350.799	0	680.714.292	0	36.171.472	0	312.741.911	0	37.521.472	0	295.451.367	0	681.886.222	nan	100,17	1	1.324.237.021	20,00	36,93	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	75		15		15		3		3		3		6		15		100,00		30		40,00		DINAS DUKCAPIL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	2,23					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	30	1.419.300.000	5	80.139.536	6	483.155.339	0	7.768.620	0	47.106.035	0	52.572.908	6	87.829.676	6	195.277.239	100,00	40,42	11	275.416.775	36,67	19,41				
36	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	205.950.000	1	19.780.193	1	41.190.000	0	1.825.450	0	7.809.266	0	1.368.000	1	6.166.127	1	17.168.843	100,00	41,68	2	36.949.036	40,00	17,94	DINAS DUKCAPIL			
37	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	1.213.350.000	7	60.359.343	7	194.930.000	0	893.170	0	17.844.769	0	26.759.908	7	55.963.549	7	101.461.396	100,00	52,05	14	161.820.739	33,33	13,34	DINAS DUKCAPIL			
38	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	48	0	12	0	4	51.730.000	0	5.050.000	0	16.550.000	0	12.300.000	4	15.700.000	4	49.600.000	100,00	95,88	16	49.600.000	33,33	inf	DINAS DUKCAPIL			
39	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	164.135.339	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	inf	nan	DINAS DUKCAPIL				
40	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis	0	0	0	0	4	31.170.000	0	0	0	4.902.000	0	12.145.000	4	10.000.000	4	27.047.000	100,00	86,77	4	27.047.000	inf	inf	DINAS DUKCAPIL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.529.277.000		1.641.871.935		873.000.000		169.498.088		266.526.242		246.048.067		160.972.763		843.045.160		96,57		2.484.917.095		29,13				
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.529.277.000		1.641.871.935		873.000.000		169.498.088		266.526.242		246.048.067		160.972.763		843.045.160		96,57		2.484.917.095		29,13				
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen		2.582.958.000	112,5	704.788.820	50	372.000.000	0	99.433.921	0	81.039.842	0	125.978.827	53,25	51.533.300	53,25	357.985.890	106,50	96,23	165,75	1.062.774.710	inf	41,15				
			Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persen			100,15		98		0		0		0		99,41		99,41		101,44		199,56		inf					
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	25	585.428.000	5	90.371.420	5	25.885.000	0	0	0	18.597.200	0	5.543.300	5	672.000	5	24.812.500	100,00	95,86	10	115.183.920	40,00	19,68				
1	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	4	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Kebijakan Teknis yang ditetapkan	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan			DINAS DUKCAPIL			
2	2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen data penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Dokumen	5	125.000.000	1	37.591.420	1	8.650.000	0	0	0	8.536.600	0	0	1	0	1	8.536.600	100,00	98,69	2	46.128.020	40,00	36,90	DINAS DUKCAPIL			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I	II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
3	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	6	125.000.000	1	25.989.700	0	9.235.000	0		0	0	3.065.100	0	4.694.900	0	672.000	0	8.432.000	nan	91,30	1	34.421.700	16,67	27,54	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah Regulasi terkait dengan tata kelola Pendaftaran Penduduk yang ditetapkan	Dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS DUKCAPIL				
4	2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Dokumen	5	125.000.000	1	26.790.300	0	8.000.000	0		0	0	6.995.500	0	848.400	0	0	0	7.843.900	nan	98,05	1	34.634.200	20,00	27,71	DINAS DUKCAPIL			
			Jumlah perjanjian Kerjasama Terkait Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Perjanjian Kerjasama	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS DUKCAPIL				
5	2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	5	85.428.000	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	18,43						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	25	997.530.000	5	468.176.700	5	268.115.000	0	88.349.121	0	42.007.542	0	108.674.527	5	23.036.600	5	262.067.790	100,00	97,74	10	730.244.490	40,00	73,21					
6	2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi pendaftaran Penduduk	kali	20	309.530.000	4	398.962.900	2	241.765.000	1	88.349.121	0	40.931.042	0	91.699.727	1	18.177.400	2	239.157.290	100,00	98,92	6	638.120.190	30,00	206,16	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
7	2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparat yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Pelayanan pendaftaran Penduduk	orang	0	250.000.000	0	24.948.700	38	9.550.000	0		0	0	4.657.800	38	4.819.700	38	9.477.500	100,00	99,24	38	34.426.200	inf	13,77	DINAS DUKCAPIL					
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0		1		0		0		0		0		0		0		nan		1		inf		DINAS DUKCAPIL				
8	2.12.02.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	5	125.000.000	1	19.305.000	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	19.305.000	20,00	15,44	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan KIE terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
9	2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	10	250.000.000	2	24.960.100	0	10.800.000	0		0	0	0	10.517.000	0	0	0	10.517.000	nan	97,38	2	35.477.100	20,00	14,19	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Rapat Koordinasi terkait Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	kali	10		2		1	0	0		0		0		1		1		100,00		3		30,00		DINAS DUKCAPIL				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I		II														III		IV		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
10	2.12.02.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	8	63.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	1.076.500	0	1.800.000	0	39.500	0	2.916.000	nan	48,60	0	2.916.000	0,00	4,63	DINAS DUKCAPIL		jumlah kunjungan belum signifikan		
			Jumlah stakeholder yang mendapatkan layana konsultasi terkait pendaftaran penduduk	stakeholder	8		0		2		1		1		0		0		2		100,00		2		25,00	DINAS DUKCAPIL					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	25,42							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Laporan	10	1.000.000.000	2	146.240.700	2	78.000.000	0	11.084.800	0	20.435.100	0	11.761.000	2	27.824.700	2	71.105.600	100,00	91,16	4	217.346.300	40,00	21,73					
11	2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kabupaten / Kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran Penduduk	Kab/ Kota	95	500.000.000	19	94.723.500	19	59.100.000	0	11.084.800	0	11.934.800	0	11.761.000	19	26.372.200	19	61.152.800	100,00	103,47	38	155.876.300	40,00	31,18	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS DUKCAPIL					
12	2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Pelayanan Adminduk	Orang	380	500.000.000	76	51.517.200	38	18.900.000	0	0	0	8.500.300	0	0	38	1.452.500	38	9.952.800	100,00	52,66	114	61.470.000	30,00	12,29	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Pendaftaran Penduduk	Orang	0		0		38		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DINAS DUKCAPIL					
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DINAS DUKCAPIL					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	3,62							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 thn	Persen		2.582.966.000	100	394.550.925	95	181.000.000	0	30.281.737	0	60.931.100	0	31.710.600	98,08	51.377.863	98,08	174.301.300	103,24	96,30	198,08	568.852.225	inf	22,02					
			Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen			100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		inf						
			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen			100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		inf						
			Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang melaporkan	Persen			100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		inf						
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan	20	638.277.000	0	60.964.600	4	68.043.200	0	17.590.400	0	41.714.100	0	7.835.000	4	0	4	67.139.500	100,00	98,67	4	128.104.100	20,00	20,07					
1	2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	Dokumen	4	125.000.000	0	17.952.000	0	9.506.000	0	388.000	0	9.079.000	0	0	0	0	0	9.467.000	nan	99,59	0	27.419.000	0,00	21,94	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah dokumen kebijakan teknis terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS DUKCAPIL					
2	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	9	125.000.000	0	13.496.300	0	9.455.500	0	9.163.900	0	212.100	0	0	0	0	0	9.376.000	nan	99,16	0	22.872.300	0,00	18,30	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Regulasi terkait tata kelola pencatatan sipil	Dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	DINAS DUKCAPIL					
3	2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Dokumen	5	125.000.000	1	16.020.000	0	8.000.000	0	339.500	0	0	0	7.634.000	0	0	0	7.973.500	nan	99,67	1	23.993.500	20,00	19,19	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Perjanjian Kerjasama pemanfaatan peristiwa penting	Perjanjian Kerjasama	5		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		20,00	DINAS DUKCAPIL					
4	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	5	138.277.000	0	0	0	33.541.500	0	388.000	0	32.267.000	0	201.000	0	0	0	32.856.000	nan	97,96	0	32.856.000	0,00	23,76	DINAS DUKCAPIL				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil di Kab/Kota	kali	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS DUKCAPIL				
5	2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	2	125.000.000	2	13.496.300	0	7.540.200	0	7.311.000	0	156.000	0	0	0	0	7.467.000	nan	99,03	2	20.963.300	100,00	16,77	DINAS DUKCAPIL					
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pencatatan sipil	Dokumen	0		0		2		1		1		0		0		2		100,00		2		inf		DINAS DUKCAPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	19,99							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Sub Kegiatan	0	944.689.000	0	200.929.345	5	43.481.100	0	2.639.000	0	9.298.600	0	10.270.400	5	21.191.300	5	43.399.300	100,00	99,81	5	244.328.645	inf	25,86					
6	2.12.03.1.02.01	Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil	kali	14	376.689.000	3	82.594.929	3	20.000.000	0	388.000	0	0	0	0	3	19.604.300	3	19.992.300	100,00	99,96	6	102.587.229	42,86	27,23	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
7	2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Aparatur yang mendapatkan sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Orang	9	250.000.000	1	17.239.100	38	9.310.300	0	582.000	0	0	0	8.649.000	0	0	0	9.231.000	0,00	99,15	1	26.470.100	11,11	10,59	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
8	2.12.03.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	5	125.000.000	1	30.217.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	30.217.100	20,00	24,17	DINAS DUKCAPIL					
			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada terkait Pencatatan Sipil	orang	0		0		76		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
9	2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	10	125.000.000	2	64.803.616	0	9.170.800	0	388.000	0	8.674.600	0	113.400	0	0	0	9.176.000	nan	100,06	2	73.979.616	20,00	59,18	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Rapat Koordinasi terkait Pencatatan Sipil dengan Dinas Dukcapil Kab/ Kota	kali	10		2		1		0		0		0		1		1		100,00		3		30,00		DINAS DUKCAPIL				
10	2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	8	68.000.000	0	6.074.600	0	5.000.000	0	1.281.000	0	624.000	0	1.508.000	0	1.587.000	0	5.000.000	nan	100,00	0	11.074.600	0,00	16,29	DINAS DUKCAPIL		jumlah kunjungan belum signifikan		
			Jumlah Stakeholder yang mendapatkan layanan konsultasi penyelenggaraan Pencatatan Sipi	Stakeholder	8		0		2		0		0		1		1		2		100,00		2		25,00		DINAS DUKCAPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	13,75							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan terkait Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan	10	1.000.000.000	2	132.656.980	2	69.475.700	0	10.052.337	0	9.918.400	0	13.605.200	0	30.186.563	0	63.762.500	0,00	91,78	2	196.419.480	20,00	19,64					
11	2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	5	500.000.000	1	88.554.500	1	52.134.400	0	9.664.337	0	9.918.400	0	13.605.200	2	13.148.563	2	46.336.500	200,00	88,88	3	134.891.000	60,00	26,98	DINAS DUKCAPIL				
12	2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek terkait Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Orang	190	500.000.000	38	44.102.480	60	17.341.300	0	388.000	0	0	0	0	60	17.038.000	60	17.426.000	100,00	100,49	98	61.528.480	51,58	12,31	DINAS DUKCAPIL				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	3,27							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	Inovasi		1.878.023.000	0	331.516.550	9	270.000.000	3	29.542.750	3	97.920.300	3	77.080.240	0	57.100.800	9	261.644.090	100,00	96,91	9	593.160.640	inf	31,58					
			Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	Persen			0		1,3		0		0		0		0,08		0,08		6,15		0,08		inf						
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Laporan	30	878.023.000	5	231.160.250	7	230.000.000	0	28.077.680	0	81.100.300	0	62.790.240	3	49.731.900	3	221.700.120	42,86	96,39	8	452.860.370	26,67	51,58					
1	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi terkait pengolahan informasi administrasi kependudukan	Kali	10	378.023.000	2	168.296.400	3	150.500.700	0	17.893.310	2	68.661.300	0	29.957.460	1	31.343.900	3	147.855.970	100,00	98,24	5	316.152.370	50,00	83,63	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
2	2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah aparat yang mengikuti Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Orang	15	125.000.000	3	19.185.950	50	9.499.300	0	600.800	0	7.959.000	0	309.120	50	625.000	50	9.493.920	100,00	99,94	53	28.679.870	353,33	22,94	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	15		3		0		0		0		0		0		0		nan		3		20,00		DINAS DUKCAPIL				
3	2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	0		0	0	0	40.000.000	0	4.714.500	0	0	0	19.483.660	0	15.800.000	0	39.998.160	nan	100,00	0	39.998.160	nan	inf	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan data dan administrasi kependudukan	kali	15		3		2		0		0		0		0		0		0,00		3		20,00		DINAS DUKCAPIL				
4	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	20	375.000.000	4	43.677.900	0	30.000.000	0	4.869.070	0	4.480.000	0	13.040.000	0	1.963.000	0	24.352.070	nan	81,17	4	68.029.970	20,00	18,14	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	kali	20		4		4		0		0		0		4		100,00				8		40,00		DINAS DUKCAPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Laporan	10	1.000.000.000	0	100.356.300	2	40.000.000	0	1.465.070	0	16.820.000	0	14.290.000	2	7.368.900	2	39.943.970	100,00	99,86	2	140.300.270	20,00	14,03					
5	2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab/ Kota	95	500.000.000	19	56.135.300	19	40.000.000	0	1.465.070	0	16.820.000	0	14.290.000	19	7.368.900	19	39.943.970	100,00	99,86	38	96.079.270	40,00	19,22	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				
6	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek terkait PIAK dan Pemanfaatan Data	Orang	600	500.000.000	120	44.221.000	120		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	120	44.221.000	20,00	8,84	DINAS DUKCAPIL				
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
			Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																																																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	jenis		1.055.405.000	2	126.634.240	2	50.000.000	0	10.239.680	1	26.635.000	0	11.278.400	1	960.800	2	49.113.880	100,00	98,23	4	175.748.120	inf	16,65																										
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan Skala Provinsi	Laporan	10	1.055.405.000	2	126.634.240	2	50.000.000	0	10.239.680	0	26.635.000	0	11.278.400	2	960.800	2	49.113.880	100,00	98,23	4	175.748.120	40,00	16,65																										
1	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah buku data agregat kependudukan per semester	Buku	0	450.000.000	2	57.490.240	2	20.000.000	1	9.586.040	0	0	1	8.862.400	0	960.800	2	19.409.240	100,00	97,05	4	76.899.480	inf	17,09	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
2	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku profil kepepdudukan yang disusun	Buku	0	605.405.000	1	69.144.000	1	30.000.000	0	653.640	0	26.635.000	1	2.416.000	0	0	1	29.704.640	100,00	99,02	2	98.848.640	inf	16,33	DINAS DUKCAPIL																									
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS DUKCAPIL																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(out/put)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																	
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)			(10)		(11)						(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
		DINAS PERHUBUNGAN			102.880.511.200		31.985.958.912		17.764.019.231		2.544.968.199		7.032.933.197		3.479.328.004		5.174.215.643		18.231.445.043		102,63		50.217.403.955		48,81																									
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			78.570.511.200		24.574.659.762		13.902.301.253		2.253.567.227		4.945.765.392		3.173.690.428		3.434.780.817		13.807.803.864		99,32		38.382.463.626		48,85																									
X.XX		PENUNJANG URUSAN			78.570.511.200		24.574.659.762		13.902.301.253		2.253.567.227		4.945.765.392		3.173.690.428		3.434.780.817		13.807.803.864		99,32		38.382.463.626		48,85																									
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	78.570.511.200		200	24.574.659.762	100	13.902.301.253	25	2.253.567.227	25	4.945.765.392	25	3.173.690.428	25	3.434.780.817	100	13.807.803.864	100,00	99,32	300	38.382.463.626	inf	48,85																								
X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	510	1.797.919.050	170	444.976.443	85	228.720.409	20	56.354.149	20	85.782.465	20	40.719.668	30	65.723.541	90	248.579.823	105,88	108,68	260	693.556.266	50,98	38,58																								
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	24	600.000.000	8	198.331.076	4	92.702.159	2	38.239.900	0	21.655.648	1	14.146.800	0	18.024.757	3	92.067.105	75,00	99,31	11	290.398.181	45,83	48,40	DISHUB				Komitmen bidang/sekre dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																			
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUB																								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUB																									
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Statistik Perhubungan yang Didistribusikan	Buku	510	700.000.000	170	0	85	136.018.250	0	18.114.249	85	64.126.817	0	26.572.868	0	47.698.784	85	156.512.718	100,00	115,07	255	156.512.718	50,00	22,36	DISHUB																							
			Jumlah Laporan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00	3	50,00	DISHUB																													
			Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang Disusun	Dokumen	18	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100,00	9	50,00	DISHUB									Komitmen bidang/sekre dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	497.919.050	0	246.645.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	246.645.367	nan	49,54	DISHUB																									
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	2	50,00	DISHUB																												
			Jumlah Buku Statistik Perhubungan yang Didistribusikan	Buku	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	170	100,00	DISHUB	Output Subkegiatan dipindahkan ke Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ada terdapat beberapa terdapat beberapa kab/kota yang belum mengirim rekapan data terkait perhubungan 2022	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan																										
Predikat Kinerja																							-	-																										
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	53.360.503.620	0	17.060.092.523	100	9.671.875.648	25	1.573.204.527	25	3.404.528.957	25	2.155.523.979	25	2.471.654.335	100	9.604.911.798	100,00	99,31	100	26.665.004.321	inf	49,97																									

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang	600	51.945.503.620	176	16.470.252.569	95	9.437.306.198	0	1.517.788.384	0	3.354.954.657	0	2.103.832.779	95	2.411.715.385	95	9.388.291.205	100,00	99,48	271	25.858.543.774	45,17	49,78	DISHUB	-	-	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Honor	Orang	42	450.000.000	28	424.004.833	14	174.110.000	0	47.020.000	0	38.920.000	0	36.255.000	14	39.060.000	14	161.255.000	100,00	92,62	42	585.259.833	100,00	130,06	DISHUB	-	-	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP, SPM, dan Pnegasahan SPJ yang Diterbitkan	Dokumen	3	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DISHUB	pada tahun 2024 - selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran honorarium penatausahaan	-	-	
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun	Laporan	2	45.000.000	2	43.320.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	43.320.721	100,00	96,27	DISHUB	sub kegiatan tidak terdapat/tidak jadi diambil pada DPA tahun 2023 di satukan ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (mengacu kepada DO Sekda)	-	-	
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Disiapkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUB	sub kegiatan tidak terdapat/tidak jadi diambil pada DPA tahun 2023 di satukan ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (mengacu kepada DO Sekda)	-	-	
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	84	380.000.000	28	122.514.400	14	60.459.450	4	8.396.143	3	10.654.300	3	15.436.200	4	20.878.950	14	55.365.593	100,00	91,57	42	177.879.993	50,00	46,81	DISHUB	-	-	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	600	610.000.000	200	77.970.672	100	113.722.000	25	0	25	55.917.408	25	26.697.134	25	11.475.400	100	94.089.942	100,00	82,74	300	172.060.614	50,00	28,21					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Usulkan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindah Tangganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUB	digabungkan pada sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang Diasuransikan	Unit	36	300.000.000	6	0	6	75.000.000	0	0	6	52.438.608	0	0	0	6.742.400	6	59.181.008	100,00	78,91	12	59.181.008	33,33	19,73	DISHUB	pelaksanaan kegiatan direncanakan di Tw II			
			Jumlah Tanah yang Bersertifikat	Persil	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0	1	0	20,00	0	DISHUB	pelaksanaan kegiatan direncanakan di Tw II				
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Penertiban	Dokumen	12	310.000.000	4	77.970.672	2	38.722.000	0	0	1	3.478.800	0	26.697.134	1	4.733.000	2	34.908.934	100,00	90,15	6	112.879.606	50,00	36,41	DISHUB	pelaksanaan kegiatan direncanakan di Tw II			
			Jumlah Pengelolaan BMD pada SKPD yang	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	0	DISHUB	pembayara honor BMD telah terdapat pada					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12				(15) = 14/5 * 100%				(16)	(17)	(18)	(19)
			Dibayarkan Honorinya		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			komponen TPP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												nan	nan									
Predikat Kinerja																												-	-									
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	600	820.000.000	200	89.528.331	100	140.834.600	20	7.968.425	20	19.571.379	20	25.945.800	40	32.317.555	100	85.803.159	100,00	60,92	300	175.331.490	50,00	21,38												
14	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	100.000.000	1	0	1	15.000.000	0	5.823.825	0	2.071.719	0	674.400	1	6.344.210	1	14.914.154	100,00	99,43	2	14.914.154	40,00	14,91	DISHUB							Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun				
15	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	5	270.000.000	1	0	1	32.703.400	0	1.314.300	0	0	0	0	1	9.761.345	1	11.075.645	100,00	33,87	2	11.075.645	40,00	4,10	DISHUB							Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun				
16	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	umlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	6	450.000.000	1	89.528.331	1	93.131.200	0	830.300	0	17.499.660	0	25.271.400	1	16.212.000	1	59.813.360	100,00	64,22	2	149.341.691	33,33	33,19	DISHUB							Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												4,93	3,26									
Predikat Kinerja																												SR	SR									
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	600	1.470.000.000	200	271.554.297	100	147.598.000	25	40.082.551	25	47.267.453	25	24.914.899	25	9.657.570	100	121.922.473	100,00	82,60	300	393.476.770	50,00	26,77												
17	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya	Stel	400	400.000.000	116	186.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	116	186.316.000	29,00	46,58	DISHUB	tidak tersedianya Anggaran pengadaan pakaian dinas pada tahun 2023										
18	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Dikelola	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUB	sub kegiatan tidak memerlukan anggaran										
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUB	sub kegiatan tidak memerlukan anggaran											
19	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	600.000.000	0	0	4	77.050.000	2	6.455.700	0	33.924.000	1	13.859.154	1	6.252.770	4	60.491.624	100,00	78,51	4	60.491.624	6,67	10,08	DISHUB							Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun				
20	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	38	320.000.000	0	0	7	45.197.500	3	26.464.551	2	12.355.000	1	3.213.400	1	0	7	42.032.951	100,00	93,00	7	42.032.951	18,42	13,14	DISHUB							Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun				
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,00	3	37,50	DISHUB												Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun				
21	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Orang	25	150.000.000	5	85.238.297	12	25.350.500	5	7.162.300	2	988.453	1	7.842.345	2	3.404.800	10	19.397.898	83,33	76,52	15	104.636.195	60,00	69,76	DISHUB							Komitmen bidang dalam				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																														menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	600	4.121.071.500	200	1.145.337.020	100	1.329.003.687	25	212.148.092	25	622.584.968	25	391.490.280	25	129.958.957	100	1.356.182.297	100,00	102,05	300	2.501.519.317	50,00	60,70					
22	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Set Alat Listrik	6	240.000.000	2	77.285.050	1	33.399.000	1	8.342.800	0	8.353.000	0	8.262.285	0	5.498.000	1	30.456.085	100,00	91,19	3	107.741.135	50,00	44,89	DISHUB			Komitmen bidang menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
23	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	M2 Spanduk	1000	100.000.000	413	21.745.500	243	23.713.800	43	2.835.000	54	4.468.000	55	8.317.500	10	4.908.000	162	20.528.500	66,67	86,57	575	42.274.000	57,50	42,27	DISHUB				
				Paket tempat Sampah	6		1		1		1		0		0		0	1		100,00		2		33,33		DISHUB					
				Buah Karangan Bunga	40		1		9		5		0		0		0	5		55,56		6		15,00		DISHUB					
				Buah Plakat	20		1		4		2		0		0		0	2		50,00		3		15,00		DISHUB					
				Paket Bendera	6		1		1		1		0		0		0	1		100,00		2		33,33		DISHUB					
24	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Set Alat tulis Kantor	6	851.071.500	2	313.370.196	1	76.532.800	0	25.729.200	0	15.264.000	0	20.800.200	1	13.041.200	1	74.834.600	100,00	97,78	3	388.204.796	50,00	45,61	DISHUB				
			Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah Yang Dilakukan	Kali	156		52		26		7		5		9			21		80,77		73		46,79		DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun		
25	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	600000	180.000.000	221098	132.284.728	87206	21.801.500	10961	4.214.000	8219	7.026.000	9000	4.790.000		3.386.250	28180	19.416.250	32,31	89,06	249278	151.700.978	41,55	84,28	DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
26	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	Jenis	18	150.000.000	6	49.965.000	3	25.000.000	3	5.760.000	0	5.220.000	0	7.020.000		2.280.000	3	20.280.000	100,00	81,12	9	70.245.000	50,00	46,83	DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
27	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu terkait penyediaan transportasi Penas XVI Petani Nelayan	Laporan	1	800.000.000	0		1	688.712.000	0	12.807.000	0	435.502.000	1	238.128.000	0	0	1	686.437.000	100,00	99,67	1	686.437.000	100,00	85,80	DISHUB	Pelaksanan Kegiatan dilaksanakan pada Tw II Bulan Juni		Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
28	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	6	1.800.000.000	2	550.686.546	1	459.844.587	0	152.460.092	0	146.751.968	0	104.172.295	1	100.845.507	1	504.229.862	100,00	109,65	3	1.054.916.408	50,00	58,61	DISHUB				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									12,92	20,62					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	600	917.100.030	200	277.265.250	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	200	277.265.250	33,33	30,23						
29	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Unit	28	350.000.000	4	60.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	4	60.660.000	14,29	17,33	DISHUB					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
30	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	40	567.100.030	10	216.605.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	10	216.605.250	25,00	38,20	DISHUB				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,89	1,85						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	600	12.870.000.000	200	3.820.154.642	100	2.003.412.609	25	343.341.989	25	594.537.322	25	494.925.918	25	639.937.129	100	2.072.742.358	100,00	103,46	300	5.892.897.000	50,00	45,79					
31	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Dalam 1 Tahun	Surat	8700	120.000.000	2896	27.543.470	1950	20.000.000	136	2.666.814	586,5	4.569.943	686	3.526.600	533	2.604.000	1941,5	13.367.357	99,56	66,84	4837,5	40.910.827	55,60	34,09	DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
32	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Internet yang Dibayarkan	Bulan	60	1.750.000.000	24	538.966.344	12	293.514.900	3	59.381.930	3	62.501.625	3	69.247.714	3	65.441.703	12	256.572.972	100,00	87,41	36	795.539.316	60,00	45,46	DISHUB				
			Jumlah Tagihan Telpn yang Dibayarkan	Menit	6000		90		1034		200		150		300		297		947		91,59		1037		17,28	DISHUB					
			Jumlah Jasa Publikasi yang Dibayarkan	Bulan	60		24		12		3		3		3		3		12		100,00		36		60,00	DISHUB					
			Jumlah Tagihan Air PDAM yang Dibayarkan	M3	18000		6142		3130		617		598		600		800		2615		83,55		8757		48,65	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
			Jumlah Tagihan Listrik PLN yang Dibayarkan	KWh	703800		208651		153949		20617		32210		35432,02		53343,3		141602,32		91,98		350253,32		49,77	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
33	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kantor yang Dibayarkan	Bulan	60	11.000.000.000	24	3.253.644.828	12	1.689.897.709	3	281.293.245	3	527.465.754	3	422.151.604	3	571.891.426	12	1.802.802.029	100,00	106,68	36	5.056.446.857	60,00	45,97	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun
			Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	CS	120		40		20		0		0		0		20		20		100,00		60		50,00	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
				Pengamanan	108		36		18		0		0		0		18		18		100,00		54		50,00	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
				Sopir	30		10		5		0		0		0		5		5		100,00		15		50,00	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								9,28	3,80						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	%	600	2.603.917.000	200	1.387.780.584	85	267.134.300	25	20.467.494	25	115.575.440	25	13.472.750	25	74.056.330	100	223.572.014	117,65	83,69	300	1.611.352.598	50,00	61,88					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Urusan Pemerintahan Daerah																													
34	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara	Unit	19	500.000.000	18	419.392.556	1	32.176.300	1	3.440.344	0	2.062.278	0	0	0	20.872.000	1	26.374.622	100,00	81,97	19	445.767.178	100,00	89,15	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun
35	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	90	423.917.000	28	230.610.211	23	139.740.000	4	14.227.150	4	49.453.662	4	4.148.750	6	41.999.330	18	109.828.892	78,26	78,60	46	340.439.103	51,11	80,31	DISHUB				
36	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dilakukan Pemeliharaan	Jenis	24	280.000.000	12	81.021.242	6	40.600.000	2	2.800.000	1	15.097.500	3	8.674.000	1	6.285.000	7	32.856.500	116,67	80,93	19	113.877.742	79,17	40,67	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun
37	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab	Kantor Induk	6	1.400.000.000	2	656.756.575	1	54.618.000	1	0	0	48.962.000	0	650.000	0	4.900.000	1	54.512.000	100,00	99,81	3	711.268.575	50,00	50,80	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun
				Rumah Dinas	6		2		1		1		0		0		0		1		100,00		3		50,00		DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,60	8,43					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.310.000.000		7.411.299.150		3.861.717.978		291.400.972		2.087.167.805		305.637.576		1.739.434.826		4.423.641.179		114,55		11.834.940.329		48,68						
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			24.310.000.000		7.411.299.150		3.861.717.978		291.400.972		2.087.167.805		305.637.576		1.739.434.826		4.423.641.179		114,55		11.834.940.329		48,68						
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	%	22.570.000.000	2,38	6.760.857.854	2,45	3.573.103.167	0,3	272.020.023	0,5	2.117.993.187	0,6	253.940.363	0,8	1.669.545.929	2,2	4.313.499.502	89,80	120,72	4,58	11.074.357.356	inf	49,07						
2.15.02.1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	1.850.000.000	0	0	0	44.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	0,00					
			Jumlah Laporan Penyusunan Pendahuluan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan	1		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00						
1	2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Penyusunan Pendahuluan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	1.800.000.000	0	0	1	44.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUB				
2	2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DISHUB				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
											I		II		III		IV																																						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																															
			Jumlah Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Perkada	1		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DISHUB	Pelaksanaan kegiatan tidak jadi terlaksana dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi (akan di usulkan kembali pada tahun 2024)																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00																													
Predikat Kinerja																									SR	SR																													
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah ruas jalan penyedian perengkapan jalan di jalan provinsi	Ruas Jalan	18	6.200.000.000	6	2.099.485.864	4	999.692.600	0	5.069.500	0	382.231.394	0	46.298.467	3	557.408.025	3	991.007.386	75,00	99,13	9	3.090.493.250	50,00	49,85																													
3	2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Ruas Jalan Provinsi yang dipasang perengkapan jalannya	Ruas Jalan Provinsi	18	5.000.000.000	6	1.721.416.029	2	829.088.600	0	720.000	1	225.110.200	1	44.942.825	0	555.301.775	2	826.074.800	100,00	99,64	8	2.547.490.829	44,44	50,95	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																								
4	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah ruas jalan provinsi yang di rehab dan dipelihara perengkapan jalannya	Ruas Jalan Provinsi	8	1.200.000.000	3	378.069.835	1	170.604.000	0	4.349.500	1	157.121.194	0	1.355.642	0	2.106.250	1	164.932.586	100,00	96,68	4	543.002.421	50,00	45,25	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									18,89	24,05																													
Predikat Kinerja																									SR	SR																													
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe	%	7.5	2.680.000.000	2,36	841.862.999	1,24	292.569.400	0	25.178.855	0	20.259.896	0	5.327.200	0,94	113.620.703	0,94	164.386.654	75,81	56,19	3,3	1.006.249.653	44,00	37,55																													
5	2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal	Dokumen	5	700.000.000	2	318.434.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	318.434.650	40,00	45,49	DISHUB	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di alihkan pada tahun 2024																											
6	2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Terminal yang dilakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terminal	24	500.000.000	5	134.099.020	1	77.504.312	0	23.441.480	0	19.239.571	0	5.327.200	1	32.695.350	1	80.703.601	100,00	104,13	6	214.802.621	25,00	42,96	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																								
7	2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang Terehabilitasi dan Terpelihara Fasilitas Utama dan Pendukungnya	Terminal	24	1.000.000.000	7	124.904.735	3	215.065.088	0	1.737.375	1	1.020.325	0	0	1	80.925.353	2	83.683.053	66,67	38,91	9	208.587.788	37,50	20,86	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																								
8	2.15.02.1.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	30	480.000.000	11	264.424.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	11	264.424.594	36,67	55,09	DISHUB	sub kegiatan ini tidak di Anggarkan pada tahun 2023																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									15,46	20,55																													
Predikat Kinerja																									SR	SR																													
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yang dilaksanakan	%	600	7.500.000.000	200	3.284.479.931	100	1.788.113.792	25	142.415.208	25	1.405.069.225	25	99.422.836	25	944.956.712	100	2.591.863.981	100,00	144,95	300	5.876.343.912	50,00	78,35																													
9	2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah peserta penyuluhan atau sosialisasi keselamatan LLAJ	Orang 5 Sekolah	450	5.000.000.000	165	1.190.107.761	75	1.725.213.192	0	119.179.613	0	1.396.935.538	75	91.950.824	0	934.340.712	75	2.542.406.687	100,00	147,37	240	3.732.514.448	53,33	74,65	DISHUB																												
			Jumlah Dokumen Pengendalian Efektivitas	Dokumen	6		2		1		0		0		0		1		1		100,00		3		50,00		DISHUB				Komitmen bidang dalam																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan provinsi																											menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengawasan efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Kali	24		8		4		3		1		0		0		4		100,00		12		50,00		DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	6		1		0		0		0		0		0		0		nan		1		16,67		DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
10	2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	2.500.000.000	2	2.094.372.170	0	62.900.600	0	23.235.595	0	8.133.687	0	7.472.012	1	10.616.000	1	49.457.294	inf	78,63	3	2.143.829.464	50,00	85,75	DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
			Jumlah rapat Forum LLAJ dan Rapat Bidang LLAJ yang dilaksanakan	Kali	20		8		3		1		1		0		0		2		66,67		10		50,00		DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										18,00	16,04				
Predikat Kinerja																										SR	SR				
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Rekomendasi	12	50.000.000	3	18.564.100	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	inf	nan	6	18.564.100	50,00	37,13						
11	2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Kali	10	50.000.000	6	18.564.100	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	inf	nan	8	18.564.100	80,00	37,13	DISHUB	sub kegiatan ini tidak di Anggarkan pada tahun 2023				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										5,00	3,38				
Predikat Kinerja																										SR	SR				
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan	%	600	1.460.000.000	200	353.671.600	100	147.402.750	25	11.365.000	25	100.974.000	25	29.175.000	25	5.753.000	100	147.267.000	100,00	99,91	300	500.938.600	50,00	34,31					
12	2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Inspeksi dan audit, pemantauan serta pengawasan unit PKB	UPUBKB	36	260.000.000	14	44.180.600	5	39.878.000	3	11.365.000	1	13.845.000	2	9.890.000	0	4.665.000	6	39.765.000	120,00	99,72	20	83.945.600	55,56	32,29	DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
			Jumlah Laporan Data Akreditasi Unit PKB	Laporan	6		2		1		0		0		1		0		1		100,00		3		50,00		DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
13	2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah inspeksi, audit, Laik Jalan dan pemantauan terminal yang terlaksana	Kali	36	700.000.000	12	309.491.000	6	107.524.750	1	0	5	87.129.000	0	19.285.000	0	1.088.000	6	107.502.000	100,00	99,98	18	416.993.000	50,00	59,57	DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	6		2		1		0		0		0		1		1		100,00		3		50,00		DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun	
14	2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	3	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub kegiatan ini tidak di Anggarkan pada tahun 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran (ivent nasional)			
			Jumlah Pelajar Pelopor tingkat provinsi yang peduli keselamatan LLAJ	Orang	100		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DISHUB	sub kegiatan ini tidak di Anggarkan pada tahun 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran (ivent nasional)			
			Jumlah pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi	Kali	180		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DISHUB	sub kegiatan ini tidak di Anggarkan pada tahun 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran (ivent nasional)			
			Jumlah pengemudi / awak kendaraan umum tingkat provinsi yang profesional dan peduli keselamatan LLAJ	Orang	100		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DISHUB	sub kegiatan ini tidak di Anggarkan pada tahun 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran (ivent nasional)			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,56	6,56					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usulan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Usulan	10	360.000.000	2	145.991.849	1	106.459.525	0	7.510.000	0	27.601.000	0	16.912.860	1	21.534.353	1	73.558.213	100,00	69,10	3	219.550.062	30,00	60,99					
15	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah dokumen data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	6	360.000.000	2	145.991.849	1	106.459.525	0	7.510.000	0	27.601.000	0	16.912.860	1	21.534.353	1	73.558.213	100,00	69,10	3	219.550.062	50,00	60,99	DISHUB	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun			
			Jumlah pengawasan angkutan perintis yang dilakukan	Kali	60		28		16		5		3		2		3		13		81,25		41		68,33		DISHUB	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									4,55	4,07					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.200.000.000	2		0	1	94.832.900	0	39.832.730	0	90.928.836	1	27.134.000	0	13.136.568	1	171.032.134	100,00	180,35	3	171.032.134	50,00	14,25				
16	2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	600.000.000	1		0	1	94.832.900	0	19.916.365	0	45.464.418	0	13.567.000	1	6.568.284	1	85.516.067	100,00	90,18	2	85.516.067	50,00	14,25	DISHUB	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
											I		II		III		IV																																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				yang telah disusun																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,85	0,89																												
Predikat Kinerja																									SR	SR																												
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kendaraan	6000	70.000.000	1893	16.801.511	1200	5.025.300	319	816.000	299	0	300	2.536.000	383	0	1301	3.352.000	108,42	66,70	3194	20.153.511	53,23	28,79																												
17	2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Kendaraan	6000	70.000.000	3091	16.801.511	1200	5.025.300	219	816.000	199	0	155	2.536.000	282	0	855	3.352.000	71,25	66,70	3946	20.153.511	65,77	28,79	DISHUB			terdapat beberapa pengusaha yang tidak melakukan pengurusan perpanjangan KP (Kartu Pengawas Angkutan Umum)	Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,35	1,69																												
Predikat Kinerja																									SR	SR																												
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi		2.150.000.000	3	494.254.185	1	235.580.211	0	37.503.679	1	44.146.954	2	37.813.713	0	63.930.465	3	183.394.811	300,00	77,85	6	677.648.996	inf	31,52																												
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan angkutan laut perintis	Laporan	6	550.000.000	2	188.746.195	1	67.082.550	0	13.270.843	0	12.105.000	0	10.728.650	1	12.560.267	1	48.664.760	100,00	72,54	3	237.410.955	50,00	43,17																												
1	2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Angkutan Laut Perintis	Laporan	6	550.000.000	2	188.746.195	1	67.082.550	0	13.270.843	0	12.105.000	0	10.728.650	1	12.560.267	1	48.664.760	100,00	72,54	3	237.410.955	50,00	43,17	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun.																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									50,00	43,17																												
Predikat Kinerja																									SR	SR																												
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	6	400.000.000	2	157.019.936	1	90.374.511	0	14.021.050	0	21.464.547	0	12.070.000	1	23.633.900	1	71.189.497	100,00	78,77	3	228.209.433	50,00	57,05																												
2	2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengawasan Trayek Lintas Penyebrangan	Laporan	6	400.000.000	2	157.019.936	1	90.374.511	0	14.021.050	0	21.464.547	0	12.070.000	1	23.633.900	1	71.189.497	100,00	78,77	3	228.209.433	50,00	57,05	DISHUB				Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun.																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									25,00	28,53																												
Predikat Kinerja																									SR	SR																												
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah dokumen pembangunan pelabuhan pengumpan regional	Dokumen	6	1.200.000.000	2	148.488.054	1	78.123.150	0	10.211.786	0	10.577.407	0	15.015.063	1	27.736.298	1	63.540.554	100,00	81,33	3	212.028.608	50,00	17,67																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
		Pelabuhan Pengumpan Regional																																																		
3	2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak	Dokumen	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	inf	nan	1	0	100,00	0,00	DISHUB	Merupakan kegiatan Progul yang tidak dapat terlaksana pada tahun 2023 dikarenakan keterbatasan Anggaran		di prioritaskan anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2024																					
			Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak	Dokumen	1		0		0	0		0		0		0		0	0		nan		0		0,00		DISHUB	Merupakan kegiatan Progul yang tidak dapat terlaksana pada tahun 2023 dikarenakan keterbatasan Anggaran		di prioritaskan anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2024																						
4	2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan sinkronisasi, koordinasi dan pengawasan Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan	Laporan	6	400.000.000	2	148.488.054	1	78.123.150	0	10.211.786	0	10.577.407	0	15.015.063	1	27.736.298	1	63.540.554	100,00	81,33	3	212.028.608	50,00	53,01	DISHUB			Komitmen bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai target yang telah disusun.																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	Dokumen		750.000.000	2	156.187.111	1	147.867.500	0	21.710.000	0	15.956.500	0	41.017.500	1	19.095.000	1	97.779.000	100,00	66,13	3	253.966.111	inf	33,86																										
	2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Usulan	6	350.000.000	2	0	1	64.809.000	0	10.000.000	0	2.480.000	0	22.835.000	1	9.820.000	1	45.135.000	100,00	69,64	3	45.135.000	50,00	12,90																										
1	2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan usulan Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Laporan	6	350.000.000	2	0	1	64.809.000	0	10.000.000	0	2.480.000	0	22.835.000	1	9.820.000	1	45.135.000	100,00	69,64	3	45.135.000	50,00	12,90	DISHUB																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah Usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Usulan	6	400.000.000	2	156.187.111	1	83.058.500	0	11.710.000	0	13.476.500	0	18.182.500	1	9.275.000	1	52.644.000	100,00	63,38	3	208.831.111	50,00	52,21																										
2	2.15.05.1.06.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Laporan	6	400.000.000	2	156.187.111	1	83.058.500	0	11.710.000	0	13.476.500	0	18.182.500	1	9.275.000	1	52.644.000	100,00	63,38	3	208.831.111	50,00	52,21	DISHUB																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
								I	II	III	IV																				
								(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%			
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)									
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				38.096.913.591		35.037.045.587		47.733.262.445		3.491.789.497		7.072.800.935		18.689.485.916		0		29.254.076.348		61,29		64.291.121.935		168,76					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.673.197.734		9.880.309.548		11.825.371.523		1.421.485.748		4.665.940.496		7.500.786.290		0		13.588.212.534		114,91		23.468.522.082		219,88					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				10.673.197.734		9.880.309.548		11.825.371.523		1.421.485.748		4.665.940.496		7.500.786.290		0		13.588.212.534		114,91		23.468.522.082		219,88					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.655.081.734		9.871.926.048	0	11.825.371.523		1.421.485.748		4.665.940.496		7.500.786.290		0	0	13.588.212.534	nan	114,91	0	23.460.138.582	nan	220,18					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	108.927.150	0	107.448.600	0	154.578.000	0	29.115.999	0	56.310.299	0	71.251.699	0	0	0	156.677.997	nan	101,36	0	264.126.597	nan	242,48					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makan Minum Rapat Forum Perangkat Daerah	Kegiatan		60.262.000		59.837.150	2	100.061.600		25.325.999		42.878.099		57.995.299		0	0	126.199.397	0,00	126,12	0	186.036.547	nan	308,71	DISKOMINFOTIK				
			Forum Perangkat Daerah	Kali	2		1		2		1		0		0				1		50,00		2		100,00		DISKOMINFOTIK			Forum OPD telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2023	
			Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2				4		1		2		1				4		100,00		4		200,00		DISKOMINFOTIK				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2				0		0		1		1				2		inf		2		100,00		DISKOMINFOTIK				
			Jumlah SK yang disusun	SK	1				4		1		2		1				4		100,00		4		400,00		DISKOMINFOTIK				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	9.489.900		9.274.200	0	18.516.800		0		1.568.500		3.546.400		0	0	5.114.900	nan	27,62	0	14.389.100	0,00	151,63	DISKOMINFOTIK	masih proses di PBJ			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusundisusun	Dokumen	1				4		1		1		1				3		75,00		3		300,00		DISKOMINFOTIK				
			Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (RKKA dan DPA Pergeseran) yang disusunil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1				2		1		1		1				2		100,00		2		200,00		DISKOMINFOTIK				
			Terlaksananya rapat	kali	6				4		1		2		1				4		100,00		4		66,67		DISKOMINFOTIK				
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	12.705.750	1	12.245.250	3	15.000.000	3	960.000	0	3.534.900		0		0	3	4.494.900	100,00	29,97	4	16.740.150	400,00	131,75	DISKOMINFOTIK				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	4				20		20		0						20		100,00		20		500,00		DISKOMINFOTIK				
			Terlaksananya rapat	kali	2				6		1		1		2				4		66,67		4		200,00		DISKOMINFOTIK				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		26.469.500		26.092.000	0	20.999.600		2.830.000		8.328.800		9.710.000		0	0	20.868.800	nan	99,38	0	46.960.800	nan	177,41	DISKOMINFOTIK				
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	4				17		5		3		3				11		64,71		11		275,00		DISKOMINFOTIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
								I	II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja daerah yang disusun	Dokumen					17		5		3		3		11		64,71		11		inf		DISKOMINFOTIK						
			Pelaksanaan Rapat	Kali	3				6		1		1		2		4		66,67		4		133,33		DISKOMINFOTIK						
			Pelaksanaa Rapat	Kali					8								0		0,00		0		nan		DISKOMINFOTIK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	nan	192,38													
Predikat Kinerja																	-	ST													
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	7.423.932.340	0	6.301.422.107	0	7.799.051.996	0	1.134.719.954	0	3.553.901.643	0	5.118.271.869	0	0	9.806.893.466	nan	125,74	0	16.108.315.573	nan	216,98						
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		6.972.059.776	5	5.920.941.357	55	7.498.004.046	58	1.095.473.854	58	3.462.784.143	58	4.934.706.169	0	174	9.492.964.166	316,36	126,61	174	15.413.905.523	inf	221,08	DISKOMINFOTIK					
			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	57		55		58		58		58		58		174		316,36		174		305,26		DISKOMINFOTIK	realisasi sesuai aliran kas					
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang / Bulan		420.205.764	350.856.250	28	214.161.700	28	37.196.100	28	83.933.100	28	142.383.800	0	84	263.513.000	300,00	123,04	84	614.369.250	inf	146,21	DISKOMINFOTIK						
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		8.840.000	7.168.100	43	37.976.800	12	2.050.000	12	3.879.400	12	13.623.500	0	36	19.552.900	83,72	51,49	36	26.721.000	inf	302,27	DISKOMINFOTIK						
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	43			43		12		12		12		36		83,72		36		83,72		DISKOMINFOTIK	realisasi sesuai aliran kas						
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Laporan	1	5.018.800	4.912.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	4.912.100	0,00	97,87	DISKOMINFOTIK	aliran kas pada trw III dan Trw IV					
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	1	7.808.000	7.684.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	7.684.800	0,00	98,42	DISKOMINFOTIK	aliran kas pada trw III dan Trw IV					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran yang disusun	Laporan	18	10.000.000	9.859.500	16	48.909.450	0	0	3	3.305.000	3	27.558.400	0	6	30.863.400	37,50	63,10	6	40.722.900	33,33	407,23	DISKOMINFOTIK	dalam proses kelengkapan SPJ					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	inf	127,31													
Predikat Kinerja																	-	ST													
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	104.204.700	0	81.835.550	0	176.065.400	0	10.609.500	0	43.812.836	0	10.050.300	0	0	64.472.636	nan	36,62	0	146.308.186	nan	140,40						
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMd Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	5	8.015.000	7.147.500	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	7.147.500	0,00	89,18	DISKOMINFOTIK						
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah gedung dan kendaraan yang diasuransikan	Unit		87.689.700	67.142.950	6	140.285.400	10.609.500	43.812.836		0	0	0	54.422.336	0,00	38,79	0	121.565.286	nan	138,63	DISKOMINFOTIK								
			Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Dokumen	1			2	0	0	0				0		0,00		0		0,00		DISKOMINFOTIK								
13	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	2	8.500.000	7.545.100	2	35.780.000	0	0	0	0	1	10.050.300	0	1	10.050.300	50,00	28,09	1	17.595.400	50,00	207,00	DISKOMINFOTIK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	nan	33,45													
Predikat Kinerja																	-	SR													
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	258.637.000	0	245.849.713	0	131.920.000	0	0	0	0	6.164.205	0	0	6.164.205	nan	4,67	0	252.013.918	nan	97,44							
14	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	109.000.000	108.370.000	70	41.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	108.370.000	0,00	99,42	DISKOMINFOTIK						
15	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	16	149.637.000	137.479.713	0	90.670.000	0	0	0	0	1	6.164.205	0	1	6.164.205	inf	6,80	1	143.643.918	6,25	95,99	DISKOMINFOTIK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,20	13,03								
Predikat Kinerja																						SR	SR								
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	1.067.172.494	0	1.010.499.850	0	1.454.781.560	0	140.733.512	0	493.982.127	0	1.196.747.132	0	0	0	1.831.462.771	nan	125,89	0	2.841.962.621	nan	266,31					
16	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9.960.000		9.940.000	0	14.993.700		0		4.773.000		7.159.000	0	0		11.932.000	nan	79,58	0	21.872.000	nan	219,60	DISKOMINFOTIK				
17	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		406.850.550		359.879.860	0	66.428.860		0		0		0	0	0		0	nan	0,00	0	359.879.860	nan	88,46	DISKOMINFOTIK				
18	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	27.197.400		27.056.800	0	33.500.000	0	0	0	6.820.000		21.681.500	0	0		28.501.500	nan	85,08	0	55.558.300	0,00	204,28	DISKOMINFOTIK				
19	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	25.000.000		25.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0		25.000.000	0	0		25.000.000	nan	83,33	0	50.000.000	0,00	200,00	DISKOMINFOTIK				
20	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	16.470.000		16.470.000	0	25.000.000	0	0	0	7.200.000		11.520.000	0	0		18.720.000	nan	74,88	0	35.190.000	0,00	213,66	DISKOMINFOTIK				
21	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200	581.694.544		572.153.190	0	1.284.859.000	0	140.733.512	0	475.189.127		1.131.386.632	0	0		1.747.309.271	nan	135,99	0	2.319.462.461	0,00	398,74	DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	63,08								
Predikat Kinerja																						-	R								
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.062.928.050	0	933.767.115	0	91.209.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	933.767.115	nan	87,85					
22	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	977.736.800		852.891.590	0	84.263.590	0	0	0	0		0	0	0		0	nan	0,00	0	852.891.590	0,00	87,23	DISKOMINFOTIK				
23	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12	85.191.250		80.875.525	0	6.945.625	0	0	0	0		0	0	0		0	nan	0,00	0	80.875.525	0,00	94,93	DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00	7,92								
Predikat Kinerja																						SR	SR								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	412.550.000	0	1.001.118.104	0	1.393.824.952	0	106.306.783	0	472.000.604	0	842.353.183	0	0	0	1.420.660.570	nan	101,93	0	2.421.778.674	nan	587,03					
24	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.995.000		6.995.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0		0	0	0		5.000.000	nan	100,00	0	11.995.000	0,00	171,48	DISKOMINFOTIK				
25	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	405.555.000		390.023.524	0	650.000.000	0	98.906.783	0	215.835.424		333.719.059	0	0		648.461.266	nan	99,76	0	1.038.484.790	0,00	256,07	DISKOMINFOTIK				
26	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		604.099.580	0	738.824.952	0	2.400.000	0	256.165.180		508.634.124	0	0		767.199.304	nan	103,84	0	1.371.298.884	nan	inf	DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf								
Predikat Kinerja																						-	-								
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	216.730.000	0	189.985.009	0	623.940.400	0	0	0	45.932.987	0	255.947.902	0	0	0	301.880.889	nan	48,38	0	491.865.898	nan	226,95					
27	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		120.490.000		107.475.971	11	205.745.000		0		41.177.987		66.897.202	0	0		108.075.189	0,00	52,53	0	215.551.160	nan	178,90	DISKOMINFOTIK				
28	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	43.740.000		35.272.538	32	30.000.000	0	0	0	4.755.000		4.755.000	0	0		9.510.000	0,00	31,70	0	44.782.538	0,00	102,38	DISKOMINFOTIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I	II	III	IV		K	Rp	K		Rp	K	Rp					K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
29	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	Unit		52.500.000		47.236.500	1	388.195.400		0		0		184.295.700		0	0	184.295.700	0,00	47,47	0	231.532.200	nan	441,01	DISKOMINFOTIK				
			Perbaikan instalasi air	Paket					1						0		0,00		0				0		nan		DISKOMINFOTIK				
			Perbaikan instalasi listrik	Paket					10						0		0,00		0				0		nan		DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	24,91														
Predikat Kinerja																-	SR														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.423.715.857		25.156.736.039		35.907.890.922		2.070.303.749		2.406.860.439		11.188.699.626		0		15.665.863.814		43,63		40.822.599.853		148,86					
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				26.044.286.230		24.194.054.791		34.956.789.912		2.007.667.149		2.205.125.355		10.820.861.978		0		15.033.654.482		43,01		39.227.709.273		150,62					
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DANKOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	%		13.212.081.038		12.346.917.916	20	14.591.807.842		1.742.542.149		1.420.140.413		4.517.842.801		0	0	7.680.525.363	0,00	52,64	0	20.027.443.279	nan	151,58					
2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pesertase masyarakat yang terpapar iformasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	%	0	13.212.081.038	0	12.346.917.916	20	14.591.807.842	0	1.742.542.149	0	1.420.140.413	0	4.517.842.801	0	0	7.680.525.363	0,00	52,64	0	20.027.443.279	nan	151,58						
1	2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen		32.498.000		23.804.000	1	10.000.000		0		0	1	4.072.400		0	1	4.072.400	100,00	40,72	1	27.876.400	inf	85,78	DISKOMINFOTIK				
2	2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen		46.000.000		37.834.630	12	25.000.000	3	4.320.000	3	3.693.250	3	15.253.250		0	9	23.266.500	75,00	93,07	9	61.101.130	inf	132,83	DISKOMINFOTIK				
3	2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen		47.560.000		30.644.012	4	40.000.000		0	1	6.760.000	2	6.760.000		0	3	13.520.000	75,00	33,80	3	44.164.012	inf	92,86	DISKOMINFOTIK				
4	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		1.479.797.924		1.465.097.587	12	792.151.100	3	143.703.943	3	401.973.664	3	543.968.664		0	9	1.089.646.271	75,00	137,56	9	2.554.743.858	inf	172,64	DISKOMINFOTIK				
5	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		8.207.521.290		7.791.310.710	12	11.894.473.097	3	1.404.446.000	3	368.762.600	3	2.834.110.264		0	9	4.607.318.864	75,00	38,73	9	12.398.629.574	inf	151,06	DISKOMINFOTIK				
6	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen		242.000.000		183.008.824	12	98.214.000	3	11.124.000	3	68.314.000	3	79.430.800		0	9	158.868.800	75,00	161,76	9	341.877.624	inf	141,27	DISKOMINFOTIK				
7	2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		56.798.000		33.125.800	12	65.930.000	3	937.000	3	7.107.000	3	25.437.000		0	9	33.481.000	75,00	50,78	9	66.606.800	inf	117,27	DISKOMINFOTIK				
8	2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen		122.199.800		98.998.900	1	79.125.000		10.995.170		10.995.170	1	10.995.170		0	1	32.985.510	100,00	41,69	1	131.984.410	inf	108,01	DISKOMINFOTIK				
9	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen		26.375.000		14.956.640	4	34.400.000		0	1	3.657.500	2	4.037.500		0	3	7.695.000	75,00	22,37	3	22.651.640	inf	85,88	DISKOMINFOTIK				
10	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		40.000.000		36.719.120	6	23.336.000		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	36.719.120	nan	91,80	DISKOMINFOTIK					
11	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen		2.743.030.924		2.494.694.938	1	1.458.813.645		160.488.036		533.409.229		944.110.853		0	0	1.638.008.118	0,00	112,28	0	4.132.703.056	nan	150,66	DISKOMINFOTIK				
12	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen		168.300.100		136.722.755	1	70.365.000		6.528.000	1	15.468.000	1	49.666.900		0	2	71.662.900	200,00	101,84	2	208.385.655	inf	123,82	DISKOMINFOTIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	121,16							
Predikat Kinerja																							-	ST							
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASIINFORMATIKA	indeks SPBE	indeks		12.832.205.192		11.847.136.875	3.3	20.364.982.070		265.125.000		784.984.942		6.303.019.177		0	0	7.353.129.119	0,00	36,11	0	19.200.265.994	nan	149,63					
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah sistem jaringan intra yang tersedia	sistem	0	7.832.465.243	0	7.764.838.916	2	8.391.173.292	0	0	0	1.820.000	0	5.039.165.000	0	0	0	5.040.985.000	0,00	60,07	0	12.805.823.916	nan	163,50					
1	2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Subdomain Pemerintahan yang dikelola	subdomain		42.500.000		42.270.000	150	32.290.000		0		0	126	7.780.000		0	126	7.780.000	84,00	24,09	126	50.050.000	inf	117,76	DISKOMINFOTIK				
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen					1					1				1		100,00		1		inf		DISKOMINFOTIK					
2	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	sistem		7.789.965.243		7.722.568.916	2	8.358.883.292		0		1.820.000	2	5.031.385.000		0	2	5.033.205.000	100,00	60,21	2	12.755.773.916	inf	163,75	DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	140,76							
Predikat Kinerja																							-	ST							
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah data dan informasi elektronik yang telah sinkron denga OPD	OPD	0	4.999.739.949	0	4.082.297.959	51	11.973.808.778	0	265.125.000	0	783.164.942	0	1.263.854.177	0	0	0	2.312.144.119	0,00	19,31	0	6.394.442.078	nan	127,90					
3	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen		684.155.400		678.338.346	0	72.541.800		0		13.247.000	4	25.057.000		0	4	38.304.000	inf	52,80	4	716.642.346	inf	104,75	DISKOMINFOTIK	Regulasi SPBE yaitu SK arsitektur SPBE, SK Peta Rencana SPBE, SK Tim Koordinasi SPBE, SK Tim Audit SPBE	-	Sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan indeks SPBE	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi SPBE dengan OPD dan Kab/Kota	kegiatan					1					1				1		100,00		1		inf		DISKOMINFOTIK					
4	2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen		85.512.000		85.337.140	0	31.546.000		0		20.048.600		20.048.600		0	0	40.097.200	nan	127,11	0	125.434.340	nan	146,69	DISKOMINFOTIK				
			Terlaksananya FGD	kali					2				2		0			2		100,00		2		inf		DISKOMINFOTIK	-			Sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan indeks SPBE	
5	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	persentase pemanfaatan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	lokasi		784.866.859		724.392	2	458.744.000		29.970.000	1	45.665.400	1	45.665.400		0	2	121.300.800	100,00	26,44	2	122.025.192	inf	15,55	DISKOMINFOTIK				
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit					0									0		nan		0		nan		DISKOMINFOTIK					
6	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yang dikelola	sistem		559.348.840		505.983.400	1	9.396.250.643		0		5.653.924	1	5.653.924		0	1	11.307.848	100,00	0,12	1	517.291.248	inf	92,48	DISKOMINFOTIK				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen					0									0		nan		0		nan		DISKOMINFOTIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong											
								I	II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
7	2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	tersedianya jasa tenaga teknologi informasi (network Administrator, RTC, Field Support, IT support Manajemen))	orang		1.113.723.500		1.064.704.164	10	611.474.935	6	81.505.000	6	257.524.000	6	389.660.000		0	18	728.689.000	180,00	119,17	18	1.793.393.164	inf	161,03	DISKOMINFOTIK					
			persentase data dan informasi elektronik yang sinkron dengn OPD	Perangkat Daerah				51		0		0		0		0		0,00		0				nan			DISKOMINFOTIK					
			Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		nan		0				nan			DISKOMINFOTIK					
8	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terbayarnya gaji tenaga programmer	orang		1.273.230.450		1.256.035.950	14	1.104.923.500	14	145.550.000	14	432.180.000	14	672.229.800		0	42	1.249.959.800	300,00	113,13	42	2.505.995.750	inf	196,82	DISKOMINFOTIK		-		Tersedianya anggaran	
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi				20		4		5		5				14			70,00		14		inf			DISKOMINFOTIK		Kurangnya tenaga programmer	Terlaksananya prioritas pembangunan aplikasi sesuai dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE	
			Terlaksananya Evaluasi Tenaga IT	kegiatan				1				1						1			100,00		1		inf			DISKOMINFOTIK	Evaluasi bulan februari dan november	Tidak tersedianya pedoman dan standar penilaian tenaga IT	Melakukan kerjasama dengan akademisi dalam evaluasi tenaga IT	
			Tersedianya kajian Manajemen Layanan Aplikasi	dokumen				0										0			nan		0		nan			DISKOMINFOTIK				
			Tersedianya kajian Manajemen Resiko SPBE	dokumen				0										0			nan		0		nan			DISKOMINFOTIK				
9	2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah sistem yang terhubung ke SPLP	sistem		0		0	2	35.492.500		0		0		32.400.000		0	0	32.400.000	0,00	91,29	0	32.400.000	nan	inf	DISKOMINFOTIK					
			Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan				0										0			nan		0		nan			DISKOMINFOTIK				
10	2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen		243.932.900		237.409.467	0	63.996.800		0		0		0		0	0	0	nan	0,00	0	237.409.467	nan	97,33	DISKOMINFOTIK					
			Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan smart city dan smart Province	kali				2										0			0,00		0		nan			DISKOMINFOTIK				
			Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city dan smart province	OPD				51										0			0,00		0		nan			DISKOMINFOTIK				
11	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen		254.970.000		253.765.100	0	165.360.900		8.100.000		8.846.000		42.074.000		0	0	59.020.000	nan	35,69	0	312.785.100	nan	122,68	DISKOMINFOTIK					
			Terlaksananya Bimbingan Teknis TIK	kali				5	1		1		2					4			80,00		4		inf			DISKOMINFOTIK	Bimtek secure programming yang direncanakan pada bulan Desember dibatalkan karena rasionalisasi anggaran	-		Adanya kebutuhan OPD dan kab/kota untuk meningkatkan kompetensi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II														III		IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																											SDM pengelola TIK		
12	2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK			
			Sosialisasi GCIO	kali					0							0		nan		0		nan			DISKOMINFOTIK				
13	2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kab/Kota		0		0	18	33.477.700		0		18		31.065.453	0	0	31.065.471	0,00	92,79	0	31.065.471	nan	inf	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.423.715.857		25.156.736.039		35.907.890.922		2.070.303.749		2.406.860.439		11.188.699.626	0		15.665.863.814		43,63		40.822.599.853		148,86				
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				687.549.627		648.557.643		537.094.505		31.007.600		85.785.900		147.847.000	0		264.640.500		49,27		913.198.143		132,82				
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				687.549.627		648.557.643	0	537.094.505		31.007.600		85.785.900		147.847.000	0	0	264.640.500	nan	49,27	0	913.198.143	nan	132,82				
2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			0	687.549.627	0	648.557.643	0	537.094.505	0	31.007.600	0	85.785.900	0	147.847.000	0	0	264.640.500	nan	49,27	0	913.198.143	nan	132,82				
1	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Dokumen	0	199.665.500	0	199.065.396	4	228.192.000	2	22.811.800	1	62.477.100	1	75.275.100	0	4	160.564.000	100,00	70,36	4	359.629.396	inf	180,12	DISKOMINFOTIK		Keterlambatan pengumpulan data statistik sektoral dari OPD produsen data dan jadwal publikasi data sektoral, Sumber dalam angka dan PDRB	Koordinasi yang baik dengan BPS selaku instansi pengguna data
2	2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100	91.728.000	0	89.166.330	280	118.175.400	0	2.420.000	0	12.816.500		44.371.500	0	0	59.608.000	0,00	50,44	0	148.774.330	0,00	162,19	DISKOMINFOTIK		Menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dengan narasumber terkait	Melakukan pergeseran aliran kas ke tw III untuk pelaksanaan survey
3	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral	Dokumen	0	85.054.100	0	84.903.818	1	85.100.000	0		0	0		1.563.300	0	0	1.563.300	0,00	1,84	0	86.467.118	nan	101,66	DISKOMINFOTIK	Finalisasi dokumen metadata statistik sektoral di pada TW 4	Keterlambatan dan tidak lengkapnya metadata dalam penyajian data statistik sektoral oleh produsen data	Koordinasi yang baik dengan BPS selaku instansi pengguna data
4	2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Lembaga yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	0	152.630.027	0	131.595.123	70	60.901.105	0	499.800	0	3.607.800		16.002.600	0	0	20.110.200	0,00	33,02	0	151.705.323	nan	99,39	DISKOMINFOTIK		Jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lainnya	Melakukan pergeseran aliran kas ke tw III untuk pelaksanaan survey
5	2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah ISarana dan Prasarana Statistik yang Disediakan	Unit	3	49.200.000	0	48.450.000	3	416.000	0	416.000	0	0		0	0	416.000	0,00	100,00	0	48.866.000	0,00	99,32	DISKOMINFOTIK		-	pengerjaan sudah selesai	
6	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Rekomendasi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) dari BPS	Dokumen	3	109.272.000	0	95.376.976	2	44.310.000	0	4.860.000	0	6.884.500		10.634.500	0	0	22.379.000	0,00	50,51	0	117.755.976	0,00	107,76	DISKOMINFOTIK	Jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan	Melakukan pergeseran aliran kas ke tw III untuk	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I	II	III	IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	125,07			
Predikat Kinerja															-	ST			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.423.715.857	25.156.736.039	35.907.890.922	2.070.303.749	2.406.860.439	11.188.699.626	0	15.665.863.814	43,63	40.822.599.853	148,86				
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			691.880.000	314.123.605	414.006.505	31.629.000	115.949.184	219.990.648	0	367.568.832	88,78	681.692.437	98,53				
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			691.880.000	314.123.605	0 414.006.505	31.629.000	115.949.184	219.990.648	0 0	367.568.832	nan 88,78	0 681.692.437	nan 98,53				
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			0 596.612.000	0 314.123.605	0 361.550.005	0 31.629.000	0 104.591.184	0 208.632.648	0 0 0	344.852.832	nan 95,38	0 658.976.437	nan 110,45				
1	2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	1 95.898.000	0 90.006.982	0 60.438.783	0 0	10.333.000	1 27.643.000	0 1	37.976.000	inf 62,83	1 127.982.982	100,00 133,46	DISKOMINFOTIK	Pergub Manajemen Keamanan Informasi SPBE pada TW 3 telah disahkan, draft Pergub Pelaksanaan Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi PD dalam proses fasilitasi di Kemendagri	-	-
2	2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	0 162.714.000	0 0	1 69.792.422	0 5.440.000	0 28.747.784	0 30.447.748	0 0	64.635.532	0,00 92,61	0 64.635.532	nan 39,72	DISKOMINFOTIK	Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi PD pada TW 4	-	-
3	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	0 225.000.000	0 224.116.623	1 157.189.300	0 26.189.000	0 63.091.900	100.181.900	0 0	189.462.800	0,00 120,53	0 413.579.423	nan 183,81	DISKOMINFOTIK	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota belum seluruhnya menyusun regulasi terkait manajemen keamanan informasi, dari 19 kab/kota baru 5 yang telah melakukan launching CSIRT	Pemprov sudah mendorong kab/kota untuk menyusun regulasi terkait manajemen keamanan informasi melalui pembinaan
4	2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	0 113.000.000	0 0	0 74.129.500	52 0	52 2.418.500	52 50.360.000	0 156	52.778.500	inf 71,20	156 52.778.500	inf 46,71	DISKOMINFOTIK	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	100,93			
Predikat Kinerja															-	ST			
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			0 95.268.000	0 0	0 52.456.500	0 0	11.358.000	0 11.358.000	0 0	22.716.000	nan 43,30	0 22.716.000	nan 23,84				
5	2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	0 95.268.000	0 0	52 52.456.500	52 0	52 11.358.000	52 11.358.000	0 156	22.716.000	inf 43,30	156 22.716.000	inf 23,84	DISKOMINFOTIK	-	Minimnya OPD menggunakan email dinas OPD sebagai sarana jaring komunikasi	Telah membuat Edaran Gubernur tentang penggunaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
											I		II		III		IV																																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
																														email dinas sebagai sarana jaring komunikasi																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																		
Predikat Kinerja																																																		

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV			(12) = 8+9+10+11			(13) = 12/7 * 100%						(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				317.863.072.101		55.731.831.755		37.002.155.621		3.669.133.725		9.903.797.376		9.556.677.817		9.652.549.351		32.782.158.269		88,60		88.513.990.024		27,85					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				77.412.450.075		22.074.078.590		12.603.896.451		2.109.728.297		4.358.971.890		3.990.800.313		3.491.749.351		13.951.249.851		110,69		36.025.328.441		46,54					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				77.412.450.075		22.074.078.590		12.603.896.451		2.109.728.297		4.358.971.890		3.990.800.313		3.491.749.351		13.951.249.851		110,69		36.025.328.441		46,54					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah propinsi	%		77.412.450.075	20	22.074.078.590	95	12.603.896.451	25	2.109.728.297	25	4.358.971.890	25	3.990.800.313	20	3.491.749.351	95	13.951.249.851	100,00	110,69	115	36.025.328.441	inf	46,54					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	1.958.001.400	20	302.844.150	100	206.788.400	25	12.707.000	25	26.254.385	25	46.591.071	25	93.557.362	100	179.109.818	100,00	86,62	120	481.953.968	120,00	24,61					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	488.408.000	0	65.672.450	0	96.717.000	0	8.054.000	0	25.954.385	0	20.035.214	0	10.470.000	0	64.513.599	nan	66,70	0	130.186.049	nan	26,66	DISKOP				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	12		4		2		1		0		0		1		2		100,00		6		50,00		DISKOP				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	4.369.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DISKOP					
			Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	0		0		4		2		0		0		2		4		100,00		4		inf		DISKOP				
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan	Laporan	5	732.612.000	1	126.601.220	1	110.071.400	0	4.653.000	0	300.000	0	26.555.857	1	83.087.362	1	114.596.219	100,00	104,11	2	241.197.439	40,00	32,92	DISKOP				
			Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	18		6		3		3		0		0		0		3		100,00		9		50,00		DISKOP				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	24	732.612.000	8	110.570.480	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	100,00	nan	12	110.570.480	50,00	15,09	DISKOP					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	nan	18,67													
Predikat Kinerja																	-	SR													
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	100	45.619.704.000	20	13.723.041.209	100	8.420.786.712	25	1.380.119.047	25	3.035.294.783	25	3.118.995.702	25	2.216.136.689	100	9.750.546.221	100,00	115,79	120	23.473.587.430	120,00	51,45					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	390	42.272.092.000	130	13.031.701.959	65	8.178.783.762	65	1.329.538.047	0	2.977.264.783	0	3.051.637.702	0	2.152.296.639	65	9.510.737.171	100,00	116,29	195	22.542.439.130	50,00	53,33	DISKOP				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	390		130		0		65		0		0		0		65		inf		195		50,00		DISKOP				
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	78	2.817.332.000	26	633.521.500	33	218.240.000	13	45.340.000	0	56.610.000	0	54.045.000	20	62.245.000	33	218.240.000	100,00	100,00	59	851.761.500	75,64	30,23	DISKOP				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72		24		0		3		3		3		3		12		inf		36		50,00		DISKOP				
7	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	214.975.000	4	15.908.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	4	15.908.000	33,33	7,40	DISKOP					
			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	12		4		2		0		0		0		0		0		0,00		4		33,33		DISKOP				
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	315.305.000	24	41.909.750	0	23.762.950	3	5.241.000	3	1.420.000	3	13.313.000	3	1.595.050	12	21.569.050	inf	90,77	36	63.478.800	50,00	20,13	DISKOP				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	Dokumen	72		24		18		3		3		3		9		18		100,00		42		58,33		DISKOP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	25,04	13,89													
Predikat Kinerja																	SR	SR													

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	100	305.205.000	20	73.396.307	100	39.100.000	25	38.942.106	25	0	25	0	25	0	100	38.942.106	100,00	99,60	120	112.338.413	120,00	36,81				
9	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	305.205.000	0	73.396.307	0	39.100.000	0	38.942.106	0	0	0	0	0	0	0	38.942.106	nan	99,60	0	112.338.413	nan	36,81	DISKOP			
			Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	Unit	48		16		8		8		0		0		0		8		100,00		24		50,00		DISKOP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	4,09					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	701.086.000	20	129.156.045	100	10.400.000	25	0	25	2.940.000	25	2.500.000	25	0	100	5.440.000	100,00	52,31	120	134.596.045	120,00	19,20				
10	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	335.780.000	135	87.295.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	135	87.295.045	45,00	26,00	DISKOP			
			Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel	390		130		65		0		0		0		0		0		0,00		130		33,33		DISKOP			
11	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	Orang	40	365.306.000	16	41.861.000	6	10.400.000	0	0	0	2.940.000	6	2.500.000	0	0	6	5.440.000	100,00	52,31	22	47.301.000	55,00	12,95	DISKOP			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40		16		0		0		0		0		0		0		nan		16		40,00		DISKOP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								7,88	3,54					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	100	7.599.193.050	20	2.136.734.751	100	928.293.954	25	142.469.550	25	283.818.792	25	361.317.837	25	153.055.300	100	940.661.479	100,00	101,33	120	3.077.396.230	120,00	40,50				
12	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	145	244.204.000	58	68.506.000	29	43.004.000	7	10.589.000	0	7.305.000	7	10.733.000	15	7.375.300	29	36.002.300	100,00	83,72	87	104.508.300	60,00	42,80	DISKOP			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP			
13	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	6.105.100.000	0	706.534.000	0	45.132.000	0	39.100.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	43.100.000	nan	95,50	0	749.634.000	nan	12,28	DISKOP			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	36		12		6		6		0		0		0		6		100,00		18		50,00		DISKOP			
14	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	57.342.000	0	0	0	19.114.000	0	0	0	18.890.000	0	0	0	0	0	18.890.000	nan	98,83	0	18.890.000	nan	32,94	DISKOP			
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	15		0		5		0		5		0		0		5		100,00		5		33,33		DISKOP			
15	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	120	609.510.000	40	342.323.500	20	285.660.500	20	26.834.500	0	65.619.000	0	105.125.400	0	11.280.000	20	208.858.900	100,00	73,11	60	551.182.400	50,00	90,43	DISKOP			
16	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Unit	48	427.357.000	16	111.728.000	8	28.175.000	8	5.530.000	0	9.327.500	0	11.968.750	0	1.200.000	8	28.026.250	100,00	99,47	24	139.754.250	50,00	32,70	DISKOP			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP			
17	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jenis	60	152.627.500	20	25.800.000	10	20.730.000	0	0	10	4.455.000	0	5.985.000	0	8.200.000	10	18.640.000	100,00	89,92	30	44.440.000	50,00	29,12	DISKOP			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP			
18	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Laporan	606	3.052.550	202	881.843.251	101	486.478.454	30	60.416.050	30	174.222.292	41	227.505.687	0	125.000.000	101	587.144.029	100,00	120,69	303	1.468.987.280	50,00	48.123,28	DISKOP			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	2.686,86					
Predikat Kinerja																								-	ST					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	2.450.846.000	20	55.990.500	100	199.415.000	25	0	25	135.219.000	25	7.715.000	25	0	100	142.934.000	100,00	71,68	120	198.924.500	120,00	8,12				
19	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang baru	Unit	4	40.000.000	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISKOP			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II	III	IV		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP					
20	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Jenis	80	1.831.530.000	38	55.990.500	4	150.525.000	0		0	4	114.219.000	0		0	4	114.219.000	100,00	75,88	42	170.209.500	52,50	9,29	DISKOP					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP					
21	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang baru	Unit	51	579.316.000	0		0	17	48.890.000	0		0	21.000.000	17	7.715.000	0		0	17	28.715.000	100,00	58,73	17	28.715.000	33,33	4,96	DISKOP			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	0,68							
Predikat Kinerja																								-	SR							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	12.720.878.125	20	3.863.447.683	100	2.153.292.385	25	321.532.094	25	662.266.630	25	379.935.453	25	718.000.000	100	2.081.734.177	100,00	96,68	120	5.945.181.860	120,00	46,74						
22	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	510	122.102.000	170	21.087.250	85	8.110.000	85	1.152.100	0	2.392.000	0	3.397.700	0	3.000.000	85	9.941.800	100,00	122,59	255	31.029.050	50,00	25,41	DISKOP					
23	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	bln	72	3.052.550.000	0	845.645.369	12	439.815.000	3	101.422.446	3	103.028.650	3	117.212.857	3	105.000.000	12	426.663.953	100,00	97,01	12	1.272.309.322	16,67	41,68	DISKOP					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP					
			Jumlah rekening tagihan telpon/fax yang dibayarkan	Menit	47.76		7.96		3.98		0.33		0.33		0.33		2.99		3.98		100,00		11.94		25,00		DISKOP					
			Jumlah tagihan air yang dibayarkan	Meter kubik	26.61		8.87		4.435		1109		1109		1109		1108		4435		100.000,00		4443.87		16.700,00		DISKOP					
			Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh	1008		336		168		39		48		31		50		168		100,00		504		50,00		DISKOP					
24	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	9.546.226.125	0	2.996.715.064	0	1.705.367.385	0	218.957.548	0	556.845.980	0	259.324.896	0	610.000.000	0	1.645.128.424	nan	96,47	0	4.641.843.488	nan	48,62	DISKOP					
			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	228		76		38		38		0		0		0		38		100,00		114		50,00		DISKOP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	4,82							
Predikat Kinerja																								-	SR							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%	100	6.057.536.500	20	1.789.467.945	100	645.820.000	25	213.958.500	25	213.178.300	25	73.745.250	25	311.000.000	100	811.882.050	100,00	125,71	120	2.601.349.995	120,00	42,94						
25	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	3	123.570.000	3		0	1	41.190.000	1	1.950.000	0	6.870.000	99	6.762.000	0	15.000.000	100	30.582.000	10.000,00	74,25	103	30.582.000	3.433,33	24,75	DISKOP				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0		0		0		0		0		100		0		100		inf		100		inf		DISKOP					
26	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	1.770.479.000	20	380.299.395	10	196.900.000	10	15.380.500	0	45.198.300	90	51.228.250	0	50.000.000	100	161.807.050	1.000,00	82,18	120	542.106.445	200,00	30,62	DISKOP					
27	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Unit	264	671.561.000	88	128.959.000	44	60.540.000	44	5.880.000	0	10.280.000	56	12.555.000	0	15.000.000	100	43.715.000	227,27	72,21	188	172.674.000	71,21	25,71	DISKOP					
28	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	3.400.000.000	6	1.210.725.550	3	340.000.000	1	190.748.000	1	147.580.000	1		0	0	231.000.000	3	569.328.000	100,00	167,45	9	1.780.053.550	60,00	52,35	DISKOP				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISKOP					
29	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	91.926.500	5	69.484.000	0	7.190.000	0		0	0	3.250.000	0	3.200.000	0	0	0	6.450.000	nan	89,71	5	75.934.000	inf	82,60	DISKOP				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehab	Unit	390		130		65		0		30		35		0		65		100,00		195		50,00		DISKOP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	7,45							
Predikat Kinerja																								-	SR							
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				240.450.622.026		33.657.753.165		24.398.259.170		1.559.405.428		5.544.825.486		5.565.877.504		6.160.800.000		18.830.908.418		77,18		52.488.661.583		21,83						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
				I	II	III	IV	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			240.450.622.026	33.657.753.165	24.398.259.170	1.559.405.428	5.544.825.486	5.565.877.504	6.160.800.000	18.830.908.418	77,18	52.488.661.583	21,83															
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPANPINJAM	Persentase penerbitan izin usaha simpan pinjam	%	702.086.500	20	112.769.430	2.58	45.849.000	0	0	0	0	0	2.58	32.000.000	2.58	32.000.000	100,00	69,79	22.58	144.769.430	inf	20,62						
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	koperasi	60	702.086.500	20	112.769.430	5	45.849.000	0	0	0	0	0	5	32.000.000	5	32.000.000	100,00	69,79	25	144.769.430	41,67	20,62					
1	2.17.02.1.01.01	Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	koperasi	60	702.086.500	20	112.769.430	10	45.849.000	0	0	0	0	0	10	32.000.000	10	32.000.000	100,00	69,79	30	144.769.430	50,00	20,62	DISKOP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						50,00	20,62							
Predikat Kinerja																						SR	SR							
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANKOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	417.429.651	20	398.216.700	63	406.500.000	20	74.413.000	23	125.154.700	14	140.002.750	6	3.300.000	63	342.870.450	100,00	84,35	83	741.087.150	inf	177,54					
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel	koperasi	168	417.429.651	56	398.216.700	38	406.500.000	8	74.413.000	10	125.154.700	10	140.002.750	10	3.300.000	38	342.870.450	100,00	84,35	94	741.087.150	55,95	177,54				
1	2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi	168	261.876.551	56	398.216.700	64	250.946.900	15	54.493.000	15	106.773.900	15	84.387.000	19	1.800.000	64	247.453.900	100,00	98,61	120	645.670.600	71,43	246,56	DISKOP			
2	2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan	%	360	155.553.100	120	0	70	155.553.100	15	19.920.000	15	18.380.800	15	55.615.750	25	1.500.000	70	95.416.550	100,00	61,34	190	95.416.550	52,78	61,34	DISKOP			
			Jumlah pemantauan/tindaklanjuti pemeriksaan koperasi	koperasi	360		120	60		15		15		15		15		60		100,00		180		50,00		DISKOP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						58,07	153,95							
Predikat Kinerja																						R	ST							
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Jumlah koperasi sehat	koperasi	1.529.075.241	10	882.457.993	41	100.000.000	0	3.257.250	5	29.485.000	20	24.401.000	16	30.000.000	41	87.143.250	100,00	87,14	51	969.601.243	inf	63,41					
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang kategori sehat	koperasi	64	1.529.075.241	10	882.457.993	40	100.000.000	0	3.257.250	5	29.485.000	25	24.401.000	10	30.000.000	40	87.143.250	100,00	87,14	50	969.601.243	78,13	63,41				
1	2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan/monev	koperasi	64	1.529.075.241	2	882.457.993	47	100.000.000	0	3.257.250	0	29.485.000	35	24.401.000	12	30.000.000	47	87.143.250	100,00	87,14	49	969.601.243	76,56	63,41	DISKOP			
			Rapat koordinasi Satgas Pengawas Prov/Kab/Kota	Kali	2		2	2	0		0		2		0		2		100,00		4		200,00		DISKOP		a. Tidak semua Kab/Kota mempunyai anggaran tersendiri untuk pelaksanaan Pemkes b. Terbatasnya jumlah personil/SDM untuk melakukan Pemkes (akibat pensiun dan mutasi) c. Masih	1. Disarankan pada pembina Kab/Kota untuk mendapatkan dukungan dana dari APBD Kab/Kota 2. Petugas Pemkes agar mempelajari tentang Pemkes dan mempedomani regulasi yang mengatur tentang Pemkes 3. Melakukan		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			kurangnya pengetahuan ASN dalam melakukan Pemkes dikarenakan adanya personil yang baru bergabung di Dinas Koperasi yang berasal dari Dinas lain	koordinasi / pembinaan Pemkes ke Kab/Kota 4. Agar mengikuti bimtek / pelatihan untuk Pemkes di Kab/Kota/Prov 5. Mendorong KSP/USP Koperasi untuk menindaklanjuti aspek penilaian yang lama	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								138,28	63,41						
Predikat Kinerja																								ST	R						
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	koperasi		34.803.470.434	190	6.195.186.666	50	12.485.392.000	10	210.951.582	10	312.781.727	20	1.614.622.141	10	1.753.000.000	50	3.891.355.450	100,00	31,17	240	10.086.542.116	inf	28,98					
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan	koperasi	564	34.803.470.434	190	6.195.186.666	75	12.485.392.000	20	210.951.582	20	312.781.727	25	1.614.622.141	10	1.753.000.000	75	3.891.355.450	100,00	31,17	265	10.086.542.116	46,99	28,98					
1	2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penataan manajemen	koperasi	564	15.730.105.662	190	2.295.915.919	94	2.457.638.000	23	72.920.148	23	99.029.733	34	1.209.625.569	14	1.000.000.000	94	2.381.575.450	100,00	96,91	284	4.677.491.369	50,35	29,74	DISKOP		1. Adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Belum optimalnya akses pembiayaan bagi koperasi	1. Memprioritaskan pembinaan koperasi sesuai dengan kewenangan (keanggotaan lintas Kab/Kota) 2. Melakukan koordinasi ke lembaga keuangan non bank seperti LPDB-KUMKM, LPMUKP, Pusat Investasi Pemerintah serta memberikan bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dengan menghadirkan narasumber dari lembaga keuangan non bank seperti LPDB-KUMKM, LPMUKP, Pusat Investasi Pemerintah	
			Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	Unit Usaha	0		0		0		0		0		0		0		0		nan	0		nan		DISKOP					
			Terselenggaranya Hari Koperasi Tahun 2023	Event	0		0		1		0		1		0		0		1		100,00	1		inf		DISKOP					
2	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	270	19.073.364.772	90	3.899.270.747	0	10.027.754.000	10	138.031.434	0	213.751.994	0	404.996.572	0	753.000.000	10	1.509.780.000	inf	15,06	100	5.409.050.747	37,04	28,36	DISKOP				
			Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pemasaran	Koperasi	270		90		30		10		10		5		5		30		100,00		120		44,44		DISKOP				
			Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan manajemen usaha	Koperasi	270		90		30		10		10		10		0		30		100,00		120		44,44		DISKOP				
			Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah	Koperasi	270		90		30		10		10		10		0		30		100,00		120		44,44		DISKOP				
			Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usaha	koperasi	270		90		30		10		10		0		10		30		100,00		120		44,44		DISKOP				
			Jumlah kopersai yang difasilitasi akses pembiayaan/permodalan	Koperasi	270		90		30		10		10		0		10		30		100,00		120		44,44		DISKOP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	29,05						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
											I		II		III		IV																																						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																									
																												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	SR				
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHANPERKOPERASIAN	Jumlah KUMKM yang dilatih	orang		5.482.022.000	1250	1.096.404.400	1250	1.096.404.400	40	181.610.840	40	144.602.800	875	312.293.000	295	275.000.000	1250	913.506.640	100,00	83,32	2500	2.009.911.040	inf	36,66																													
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi perkoperasian	orang	2250	5.482.022.000	450	1.096.404.400	450	1.096.404.400	40	181.610.840	40	144.602.800	345	312.293.000	25	275.000.000	450	913.506.640	100,00	83,32	900	2.009.911.040	40,00	36,66																													
1	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah peserta pelatihan penyusunan SOP, SOM dan Persus Koperasi	Orang	40	5.482.022.000	40	1.096.404.400	40	1.096.404.400	0	181.610.840	40	144.602.800	0	312.293.000	0	275.000.000	40	913.506.640	100,00	83,32	80	2.009.911.040	200,00	36,66	DISKOP																												
			Jumlah peserta pelatihan perkoperasian pola syariah	Orang	200		40		40		40		0		0		0		40		100,00		80		40,00		DISKOP																												
			Jumlah peserta pelatihan simulasi RAT	Orang	200		40		40		40		0		0		0		40		100,00		80		40,00		DISKOP																												
			Jumlah peserta pelatihan sertifikasi dewan syariah bagi KSPPS/USPPS Koperasi	Orang	220		44		44		0		0		0		44		44		100,00		88		40,00		DISKOP																												
			Jumlah peserta pelatihan teknis akuntansi bagi koperasi berbasis IT	Orang	40		40		40		0		0		0		40		40		100,00		80		200,00		DISKOP																												
			Monitoring dan evaluasi tenaga pendamping dan peserta pelatihan	Kab/Kota	90		18		18		0		0		18		0		18		100,00		36		40,00		DISKOP																												
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan manajemen keuangan bagi pengurus koperasi	Orang	520		104		104		0		20		84		0		104		100,00		208		40,00		DISKOP																												
			Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi gerakan koperasi	Orang	200		40		40		0		0		40		0		40		100,00		80		40,00		DISKOP		Masih rendahnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan perkoperasian karena pada umumnya pengurus koperasi mempunyai pekerjaan tetap	Perlunya koordinasi dengan Kab/Kota terkait peserta pelatihan bagi pengurus koperasi																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								80,00	36,66																														
Predikat Kinerja																								T	SR																														
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%		61.576.805.000	20	5.949.936.956	3	4.483.650.750	1	249.102.696	1	1.232.820.259	1	1.869.883.893	0	1.987.500.000	3	5.339.306.848	100,00	119,08	23	11.289.243.804	inf	18,33																													
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan	unit usaha	3666	61.576.805.000	1348	5.949.936.956	45	4.483.650.750	10	249.102.696	10	1.232.820.259	15	1.869.883.893	10	1.987.500.000	45	5.339.306.848	100,00	119,08	1393	11.289.243.804	38,00	18,33																													
1	2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah enterpreneur baru tercipta melalui Bimtek Peningkatan Kapastas Kewirausahaan	Orang	900	60.037.650.000	300	5.642.105.956	150	4.175.819.750	30	197.401.696	30	1.124.401.759	60	1.779.809.893	30	1.987.500.000	150	5.089.113.348	100,00	121,87	450	10.731.219.304	50,00	17,87	DISKOP	1. Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan IT untuk memasarkan produk. 2. Keberlanjutan MOU yang telah dilakukan oleh UMKM dengan buyer tidak dilaporkan secara berkala ke Dinas Koperasi UKM Prov.Sumatera Barat. 3. Terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan teknis 4. Peserta	1. Melakukan bimbingan teknis secara berkala dan berjenjang bagi pelaku UMKM 2. Melakukan monitoring/evaluasi dan koordinasi ke dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kab/kota untuk memantau perkembangan keberlanjutan MOU pelaku UMKM 3. Mengadakan bimbingan teknis desain lanjutan 4. Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																													Bimtek yang tidak memenuhi persyaratan	koperasi dan UMKM kab/kota untuk dapat lebih selektif dalam mengirim peserta	
			Jumlah enterpreneur baru tercipta melalui bimtek peningkatan kualitas kemasan, label dan paper bag	Orang	600		200		100		0		100		0		0		100		100,00		300		50,00		DISKOP				
			Jumlah enterpreneur yang fasilitasi pengembangan pemasaran produk UMKM (bazar ramadhan dan pameran)	Orang	624		208		104		0		50		0		54		104		100,00		312		50,00		DISKOP				
			Jumlah peserta bimtek pengembangan UMKM kerajinan	Orang	600		200		100		50		50		0		0		100		100,00		300		50,00		DISKOP				
			Jumlah peserta temu bisnis dalam rangka Penas Tani	Orang	42		140		70		70		0		0		0		70		100,00		210		500,00		DISKOP				
			Jumlah UMKM yang difasilitasi prototype, kemasan, label dan paper bag	Orang	300		100		50		50		0		0		0		50		100,00		150		50,00		DISKOP				
			Jumlah UMKM yang mendapatkan bimtek pemasaran produk UMKM secara digital	Orang	600		200		100		0		0		0		100		100		100,00		300		50,00		DISKOP				
2	2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	600	1.539.155.000	120	307.831.000	120	307.831.000	30	51.701.000	30	108.418.500	30	90.074.000	30	0	120	250.193.500	100,00	81,28	240	558.024.500	40,00	36,26	DISKOP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									105,00	27,06					
Predikat Kinerja																									ST	SR					
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	buah		56.160.078.500	4443	7.591.594.606	120	5.780.463.020	30	332.605.420	30	1.972.346.400	30	1.604.674.720	30	2.080.000.000	120	5.989.626.540	100,00	103,62	4563	13.581.221.146	inf	24,18					
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	13280	56.160.078.500	4443	7.591.594.606	50	5.780.463.020	15	332.605.420	15	1.972.346.400	15	1.604.674.720	5	2.080.000.000	50	5.989.626.540	100,00	103,62	4493	13.581.221.146	33,83	24,18					
1	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	30	32.129.900.000	5	2.785.558.836	0	974.427.250	0	58.452.620	0	227.930.100	0	378.502.200	0	1.050.000.000	0	1.714.884.920	nan	175,99	5	4.500.443.756	16,67	14,01	DISKOP	1. Terlambatnya pengadaan kendaraan mobil klinik karena tender dilaksanakan sebanyak 2 kali sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran. 2. Keterbatasan jaringan yang bagus di beberapa lokasi pelaksanaan sosialisasi millennial entrepreneur 3. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftraran merk dan sertifikasi halal yang mengakibatkan lamanya proses	1. Mengoptimalkan pemanfaatan mobil klinik KUMKM pada beberapa event pada akhir tahun 2022. 2. Memanfaatkan mobil klinik KUMKM yang telah memiliki jaringan yang bagus untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya. 3. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pentingnya pendaftraran merk dan sertifikasi halal dengan melibatkan instansi terkait di Kab/kota dan lembaga lainnya. 4. Optimalisasi pemanfaatan konsultan PLUT dan pendamping UMKM di Kab/kota untuk mendampingi pelaku UMKM/pengusaha pemula untuk		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)													(9)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Jumlah lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Lembaga	30		10		5		1		2		0		2		5		100,00		15		50,00		DISKOP			input data dari pelaku UMKM dalam melengkapi persyaratan 4. Banyaknya pelaku UMKM terkendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga bank dan non bank karena BI Checking dan agunan	mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan dan non bank
			Jumlah lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Lembaga	24		8		4		0		2		2		0		4		100,00		12		50,00		DISKOP				
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan	Orang	2400		800		400		100		100		100		100		400		100,00		1200		50,00		DISKOP				
			Jumlah pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Orang	1200		400		200		50		50		50		50		200		100,00		600		50,00		DISKOP				
			Jumlah pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan	Orang	900		300		150		50		50		50		0		150		100,00		450		50,00		DISKOP				
			Jumlah UMKM yang difasilitasi akses keuangan perbankan dan non bank melalui sosialisasi	Orang	3240		1080		540		130		130		130		150		540		100,00		1620		50,00		DISKOP				
			Terfasilitasinya pendaftaran merk	Merk	60		40		20		0		20		0		0		20		100,00		60		100,00		DISKOP				
			Terfasilitasinya penerbitan sertifikat halal	sertifikat	240		80		40		0		20		20		0		40		100,00		120		50,00		DISKOP				
			Terlaksananya sosialisasi fasilitasi penumbuhan millenial enterpreneur	UMKM	4800		1600		800		200		100		300		200		800		100,00		2400		50,00		DISKOP				
			Terlaksananya sosialisasi pendaftaran merk dan sertifikat halai	Orang	360		120		60		0		0		30		30		60		100,00		180		50,00		DISKOP				
2	2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah Peserta pelatihan digital enterpreneur bagi generasi milenial	Orang	300	24.030.178.500	60	4.806.035.770	60	4.806.035.770	60	274.152.800	0	1.744.416.300	0	1.226.172.520	0	1.030.000.000	60	4.274.741.620	100,00	88,95	120	9.080.777.390	40,00	37,79	DISKOP				
			Jumlah kewirausahaan bagi pelaku UMKM	Orang	500		100		100		0		0		0		100		100		100,00		200		40,00		DISKOP				
			Jumlah peserta pelatihan manajemen pemasaran bagi UMKM	Orang	200		40		40		0		40		0		0		40		100,00		80		40,00		DISKOP				
			Jumlah peserta pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM	Orang	260		52		52		0		0		0		52		52		100,00		104		40,00		DISKOP				
			Jumlah peserta pelatihan digital marketing	Orang	200		40		40		0		0		40		0		40		100,00		80		40,00		DISKOP				
			Jumlah peserta pelatihan kreatifitas dan inovasi bagi wirausaha pemula	Orang	225		45		45		0		0		45		0		45		100,00		90		40,00		DISKOP				
			Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM	Orang	500		100		100		0		0		0		100		100		100,00		200		40,00		DISKOP				
			Jumlah peserta pelatihan penumbuhan kewirausahaan yang inovatif dalam persaingan global	Orang	620		124		124		0		0		0		124		124		100,00		248		40,00		DISKOP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
									I	II	III	IV																																								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
			Jumlah peserta pelatihan motivasi dan inovasi dalam pencapaian 100 ribu enterpreneur bagi tenaga pendamping UMKM	Orang	520		0		104		0		0		104		0		104		100,00		104		20,00		DISKOP																									
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan teknologi digital bagi UMKM	Orang	1050		210		210		210		0		0		0		210		100,00		420		40,00		DISKOP																									
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi pelaku UMKM	Orang	200		40		40		40		0		0		0		40		100,00		80		40,00		DISKOP																									
			Jumlah peserta pelatihan Sumber Daya Pelaku UMKM	Orang	550		110		110		0		0		110		0		110		100,00		220		40,00		DISKOP																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
									I		II		III		IV						K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
		DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			27.939.680.184	12.862.728.150	14.909.535.889	2.316.763.142	3.967.141.075	4.612.243.699	4.131.031.163	15.027.179.079	100,79	27.889.907.229	99,82																																				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.103.253.969	8.949.654.935	9.681.606.192	1.674.165.922	3.062.201.341	2.629.444.442	2.433.096.198	9.798.907.903	101,21	18.748.562.838	103,56																																				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			18.103.253.969	8.949.654.935	9.681.606.192	1.674.165.922	3.062.201.341	2.629.444.442	2.433.096.198	9.798.907.903	101,21	18.748.562.838	103,56																																				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	18.103.253.969	100	8.949.654.935	100	9.681.606.192	100	1.674.165.922	100	3.062.201.341	100	2.629.444.442	100	2.433.096.198	400	9.798.907.903	400,00	101,21	500	18.748.562.838	inf	103,56																										
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	401.775.050	100	193.775.050	85	151.205.100	85	47.843.150	85	21.204.350	85	27.999.300	85	6.899.250	340	103.946.050	400,00	68,75	440	297.721.100	517,65	74,10			Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	222.392.200	0	89.392.200	0	96.957.000	0	41.671.000	0	9.739.350	0	17.791.400	0	2.899.250	0	72.101.000	nan	74,36	0	161.493.200	nan	72,62	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	10		2		6		2		0		2		2		6		100,00		8		80,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	36.230.950	0	36.230.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	36.230.950	nan	100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD, dan Perubahan DPA SKPD) yang Disusun	Dokumen	4		4		4		0		0		0		0		0		0,00		4		100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Yang Disusun	Dokumen	15	108.623.400	3	33.623.400	3	54.248.100	4	6.172.150	1	11.465.000	1	10.207.900	1	4.000.000	7	31.845.050	233,33	58,70	10	65.468.450	66,67	60,27	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah Yang Disusun	Dokumen	20	34.528.500	4	34.528.500	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	34.528.500	20,00	100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	83,22																										
Predikat Kinerja																								-	T																										
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	12.247.771.797	100	6.090.767.363	100	7.019.351.299	100	1.043.881.387	100	2.339.141.805	100	2.011.276.581	100	1.606.035.552	400	7.000.335.325	400,00	99,73	500	13.091.102.688	500,00	106,89			Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																															dan Sub Kegiatan
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN Yang Dibayarkan gaji dan Tunjangannya	Orang	107	11.685.273.605	52	5.725.884.071	45	6.806.933.399	45	994.948.387	45	2.296.995.155	45	1.961.576.581	45	1.566.360.802	180	6.819.880.925	400,00	100,19	232	12.545.764.996	216,82	107,36	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Honor	orang	29	438.018.300	14	187.098.300	12	158.770.000	11	40.106.000	11	38.970.000	11	39.870.000	11	38.110.000	44	157.056.000	366,67	98,92	58	344.154.300	200,00	78,57	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Dokumen SPP, SPM, dan Pengesahan SPJ yang Diterbitkan	Dokumen	0		0		12		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	124.479.892	0	124.479.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	124.479.892	nan	100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Laporan Keuangan DPMP2TSP Yang Disusun	Dokumen	1		1		1		0		0		0		0		0		0,00		1		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Yang Disiapkan	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	53.305.100	0	53.647.900	0	8.827.000	0	3.176.650	0	9.830.000	0	1.564.750	0	23.398.400	nan	43,61	0	76.703.500	nan	inf	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Yang Disiapkan	Dokumen	75		13		13		4		3		4		3		14		107,69		27		36,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Predikat Kinerja																														-	-				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	169.745.000	100	19.745.000	100	18.400.000	100	18.364.350	100	0	100	0	100	0	400	18.364.350	400,00	99,81	500	38.109.350	500,00	22,45			Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Serta Perhitungan Standar Kebutuhan Yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diasuransikan	Unit	20	150.000.000	0	0	5	18.400.000	3	18.364.350	0	0	0	0	0	0	3	18.364.350	60,00	99,81	3	18.364.350	15,00	12,24	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Penertiban	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan Honorinya	Orang	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,00	1	50,00	1	50,00	50,00	100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	19.745.000	2	19.745.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	19.745.000	100,00	100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan									
Predikat Kinerja																									-	-									

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertin Administrasi Pendapatan Daerah	%	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	400	0	400,00	nan	500	0	500,00	nan			Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
16	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
17	X.XX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Kebijakan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
18	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Sosialisasi atau Penyebarluasan Informasi yang Dilakukan Oleh Perangkat daerah Pemungut Retribusi	Kali	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
19	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
20	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	391.702.290	100	206.702.290	100	120.644.000	100	21.598.888	100	35.619.300	100	38.638.028	100	1.139.009	400	96.995.225	400,00	80,40	500	303.697.515	500,00	77,53			Monev Pelaksanaan	Monev Pelaksanaan																						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
21	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	64.350.000	0	64.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	64.350.000	nan	100,00	DPM P2TSP		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																					
			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	100		100		55		0		0		0		0		0		0,00		100		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
22	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Dikelola	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
23	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	160	211.678.899	60	81.278.899	19	66.044.750	0	0	46	33.159.300	0	11.078.900	0	1.139.009	46	45.377.209	242,11	68,71	106	126.656.108	66,25	59,83	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
24	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan	-	0	115.673.391	0	61.073.391	0	54.599.250	0	21.598.888	0	2.460.000	0	27.559.128	0	0	0	51.618.016	nan	94,54	0	112.691.407	nan	97,42	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	22		12		14		5		4		4		1		14		100,00		26		118,18		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.470.059.024	100	723.897.724	100	1.075.810.488	100	225.959.997	100	337.724.956	100	191.243.204	100	399.784.394	400	1.154.712.551	400,00	107,33	500	1.878.610.275	500,00	127,79			Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
25	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	80	174.240.000	20	29.038.500	17	25.604.100	0	0	8	14.977.500	4	7.020.500	5	3.360.000	17	25.358.000	100,00	99,04	37	54.396.500	46,25	31,22	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																						
26	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	88.417.000	0	88.417.000	0	103.836.440	0	0	0	84.591.000	0	0	0	17.700.000	0	102.291.000	nan	98,51	0	190.708.000	nan	215,69	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan																						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																															dan Sub Kegiatan
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jenis	21		13		7		0		3		4		1		8		114,29		21		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
27	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP				
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
28	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jenis	77	115.442.700	34	29.482.700	34	85.756.500	13	27.730.000	10	23.424.200	8	18.266.800	3	22.418.800	34	91.839.800	100,00	107,09	68	121.322.500	88,31	105,09	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah yang Dilakukan	Kali	34		22		15		3		7		5		3		18		120,00		40		117,65		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
29	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Jenis	21	45.774.750	9	15.774.750	5	19.530.000	4	1.261.500	3	4.646.000	5	6.625.250	3	7.570.000	15	20.102.750	300,00	102,93	24	35.877.500	114,29	78,38	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
30	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	85.400.000	0	17.080.000	0	17.080.000	0	2.840.000	0	4.260.000	0	4.260.000	0	5.680.000	0	17.040.000	nan	99,77	0	34.120.000	nan	39,95	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Jenis	30		6		6		6		6		6		6		24		400,00		30		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
31	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	111	960.784.574	59	544.104.774	52	680.790.848	18	152.333.157	24	177.743.296	9	99.782.334	10	320.238.186	61	750.096.973	117,31	110,18	120	1.294.201.747	108,11	134,70	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
32	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang Dikelola	Arsip	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
33	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	Aplikasi/Modul	3	0	0	0	3	143.212.600	3	41.795.340	3	28.082.960	3	55.288.320	3	22.817.408	12	147.984.028	400,00	103,33	12	147.984.028	400,00	inf	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia	Jumlah	12		0		3		3		3		3		3		12		400,00		12		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	Orang	12		0		3		3		3		3		3		12		400,00		12		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai Dengan Perencanaan	%	100	199.306.800	100	59.306.800	100	27.035.600	100	0	100	7.225.000	100	0	100	0	400	7.225.000	400,00	26,72	500	66.531.800	500,00	33,38			Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
34	X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Baru	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
35	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Baru	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
36	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Jenis	27	99.306.800	17	59.306.800	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	17	59.306.800	62,96	59,72	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
37	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Baru	unit	10	100.000.000	0	0	4	27.035.600	0	0	1	7.225.000	0	0	0	0	1	7.225.000	25,00	26,72	1	7.225.000	10,00	7,23	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan	Monev Pelaksanaan

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																															dan Penganggaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
38	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dibangun	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
39	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jenis	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.265.700.001	100	1.104.993.301	100	909.063.005	100	215.679.910	100	267.362.254	100	224.022.115	100	333.160.804	400	1.040.225.083	400,00	114,43	500	2.145.218.384	500,00	94,68			Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
40	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	55.204.000	0	23.497.300	0	23.654.500	0	15.089.000	0	2.094.000	0	0	0	6.086.222	0	23.269.222	nan	98,37	0	46.766.522	nan	84,72	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
			Jumlah Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar Dalam 1 Tahun	Surat	2000		600		400		260		0		240		240		740		185,00		1340		67,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
41	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	398.793.976	0	173.793.976	0	144.600.000	0	36.022.660	0	24.842.310	0	53.645.779	0	36.749.043	0	151.259.792	nan	104,61	0	325.053.768	nan	81,51	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
			Jumlah Rekening Tagihan Telepon/Fax yang dibayarkan	Rekening	3		3		3		3		3		3		3		12		400,00		15		500,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
			Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	41500		41500		41500		41500		41500		41500		41500		166000		400,00		207500		500,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
42	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																															dan Sub Kegiatan
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	Unit	0		0		10		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
43	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1.811.702.025	0	907.702.025	0	740.808.505	0	164.568.250	0	240.425.944	0	170.376.336	0	290.325.539	0	865.696.069	nan	116,86	0	1.773.398.094	nan	97,89	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	90		18		18		18		18		18		18		72		400,00		90		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	%	100	957.194.007	100	550.467.407	100	360.096.700	100	100.838.240	100	53.923.676	100	136.265.214	100	86.077.189	400	377.104.319	400,00	104,72	500	927.571.726	500,00	96,91			Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
44	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	1	42.000.000	0	0	1	44.812.500	1	5.250.000	1	12.335.555	1	17.531.240	1	9.610.589	4	44.727.384	400,00	99,81	4	44.727.384	400,00	106,49	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Yang Dipelihara	Unit	3		0		3		3		3		3		3		12		400,00		12		400,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
45	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara	Unit	18	503.543.383	11	268.543.383	7	175.974.200	6	55.858.240	1	19.498.121	7	81.949.974	7	18.665.500	21	175.971.835	300,00	100,00	32	444.515.218	177,78	88,28	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
46	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	31.994.200	0	15.994.200	0	11.000.000	0	0	0	2.850.000	0	0	0	4.100.000	0	6.950.000	nan	63,18	0	22.944.200	nan	71,71	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Jumlah Pemeliharaan Mebel Yang Dipelihara	Unit	255		200		55		0		5		0		4		9		16,36		209		81,96		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
47	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	55	40.000.000	0	0	55	41.950.000	15	11.060.000	4	2.365.000	10	8.055.000	26	20.696.600	55	42.176.600	100,00	100,54	55	42.176.600	100,00	105,44	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
48	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	294.141.424	0	220.414.824	0	86.360.000	0	28.670.000	0	16.875.000	0	28.729.000	0	33.004.500	0	107.278.500	nan	124,22	0	327.693.324	nan	111,41	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/rehab	Unit	5		1		1		1		1		1		1		4		400,00		5		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
49	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	45.515.000	0	45.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	45.515.000	nan	100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
			Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit	96		96		55		0		0		0		0		0		0,00		96		100,00		DPM P2TSP		Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	11,90					
Predikat Kinerja																										-	SR					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.836.426.215		3.913.073.215		5.227.929.697		642.597.220		904.939.734		1.982.799.257		1.697.934.965		5.228.271.176		100,01		9.141.344.391		92,93						
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.836.426.215		3.913.073.215		5.227.929.697		642.597.220		904.939.734		1.982.799.257		1.697.934.965		5.228.271.176		100,01		9.141.344.391		92,93						
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIMPENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%		3.795.778.892	100	720.621.892	100	1.271.756.950	25	79.473.577	25	202.817.200	25	664.631.517	25	260.829.900	100	1.207.752.194	100,00	94,97	200	1.928.374.086	inf	50,80						
2.18.02.1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	267.422.500	1	84.208.500	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	2.500,00	nan	26	84.208.500	2.600,00	31,49			Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
1	2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	267.422.500	1	84.208.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	84.208.500	100,00	31,49	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Orang	1.7		80		90		0		0		0		0		0		0,00		80		4.705,88	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
			Tersedianya Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Keputusan Gubernur	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
			Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pergub	1		1		1		0		0		0		0		0		0,00		1		100,00	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	31,49					
Predikat Kinerja																										-	SR					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi Yang Lengkap	%	100	3.528.356.392	100	636.413.392	100	1.271.756.950	25	79.473.577	25	202.817.200	25	664.631.517	25	260.829.900	100	1.207.752.194	100,00	94,97	200	1.844.165.586	200,00	52,27			Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2	2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan RUPMP Yang Disusun	Laporan	1	90.297.754	1	90.297.754	0	80.174.150	0	1.533.200	0	1.031.000	0	68.575.200	1	935.000	1	72.074.400	inf	89,90	2	162.372.154	200,00	179,82	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	1		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Orang	0		80		80		0		0		80		0		80		100,00		160		inf		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
3	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha Yang Mengikuti Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah	Orang	600	3.438.058.638	100	546.115.638	506	1.191.582.800	100	77.940.377	102	201.786.200	102	596.056.317	208	259.894.900	512	1.135.677.794	101,19	95,31	612	1.681.793.432	102,00	48,92	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Aparatur Kab/Kota/Provinsi yang mengikuti Sosialisasi/Workshop/Bimtek Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi (SIPOPEI)	orang	300		50		50		0		50		0		0		50		100,00		100		33,33		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Data Status Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal	persil	5		3		0		0		0		0		0		0		nan		3		60,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Aplikasi Pemetaan dan Kemitraan yang Dikelola dan Dikembangkan	aplikasi	8		1		2		1		0		1		0		2		100,00		3		37,50		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	kesepakatan	25		5		25		5		5		10		15		35		140,00		40		160,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen	5		1		0		0		0		0		0		0		nan		1		20,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Study Kelayakan Proyek Investasi	dokumen	5		1		0		0		0		0		0		0		nan		1		20,00		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										inf	76,25			
Predikat Kinerja																										-	T			
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat		1.476.880.302	5	723.509.302	4	481.900.650	2	34.617.325	3	110.313.758	4	124.282.640	5	201.811.500	14	471.025.223	350,00	97,74	19	1.194.534.525	inf	80,88				
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Event Yabg Diikuti	Event	5	1.476.880.302	1	723.509.302	1	481.900.650	0	34.617.325	1	110.313.758	1	124.282.640	1	201.811.500	3	471.025.223	300,00	97,74	4	1.194.534.525	80,00	80,88			Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																														dan Sub Kegiatan
1	2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Materi Promosi Sesuai Potensi Investasi Daerah Yang Disusun	Dokumen	1	299.042.850	1	149.935.850	1	65.655.000	0	15.578.325	0	12.736.100	0	11.893.800	1	25.336.400	1	65.544.625	100,00	99,83	2	215.480.475	200,00	72,06	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Video Promosi Investasi	Video	2	1.177.837.452	1	573.573.452	1	416.245.650	0	19.039.000	0	97.577.658	0	112.388.840	1	176.475.100	1	405.480.598	100,00	97,41	2	979.054.050	100,00	83,12	DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Terfasilitasinya Calon Investor Kelokasi Proyek Investasi di Sumatera Barat	Laporan	3		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		66,67		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Terlaksananya Keikutsertaan DPMP TSP Dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan Atau Luar Negeri Melalui Pameran atau Temu Bisnis	Event	7		1		3		0		1		1		1		3		100,00		4		57,14		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Tersebar nya Informasi Penanaman Modal Melalui Media Massa	Kali	14		4		10		3		1		1		0		5		50,00		9		64,29		DPM P2TSP		Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								97,62	77,59					
Predikat Kinerja																								ST	T					
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75 / 3,40 nilai		2.745.917.663	95,35	1.455.240.663	1	2.235.684.900	0	306.220.683	95,08	190.979.226	95,08	960.760.900	96,48	930.244.315	286,64	2.388.205.124	28.664,00	106,82	381,99	3.843.445.787	inf	139,97				
			Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%			85		85,52		85		83		85		86		339		396,40		424		inf					
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Nilai	88,13	2.745.917.663	85	1.455.240.663	82,75	2.235.684.900	85	306.220.683	83	190.979.226	85	960.760.900	86	930.244.315	339	2.388.205.124	409,67	106,82	424	3.843.445.787	481,11	139,97				
1	2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku Usaha	0	1.671.171.501	0	988.273.501	0	2.007.124.550	0	229.935.783	0	127.434.926	0	913.507.900	0	891.053.065	0	2.161.931.674	nan	107,71	0	3.150.205.175	nan	188,50	DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Sistem Aplikasi Perizinan Terintegrasi Sesuai SOP yang Dikelola	sistem	4		1		1		1		1		0		0		2		200,00		3		75,00		DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Izin/Non Izin	4011		2011		2944		620		697		703		1828		3848		130,71		5859		146,07		DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2	2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	0	341.677.850	0	177.183.850	0	98.840.000	0	6.850.000	0	16.063.000	0	39.435.000	0	35.000.000	0	97.348.000	nan	98,49	0	274.531.850	nan	80,35	DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Jumlah Penilaian Standar Mutu (ISO 9001:2015) yang Diselenggarakan	kali	1		1		0		0		0		0		0		0		nan		1		100,00		DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang Diselenggarakan	kali	4		2		2		0		1		0		1		2		100,00		4		100,00		DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
3	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Orang	0	733.068.312	0	289.783.312	0	129.720.350	0	69.434.900	0	47.481.300	0	7.818.000	0	4.191.250	0	128.925.450	nan	99,39	0	418.708.762	nan	57,12	DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Terfasilitasinya Izin SIPSAKATO Yang Tidak Sesuai dengan SOP	Izin	28		10		8		3		7		4		0		14		175,00		24		85,71		DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Terfasilitasinya/Termediasinya Pengaduan Izin yang Bermasalah	Pengaduan	20		10		10		3		7		4		0		14		140,00		24		120,00		DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	kali	2		1		3		1		2		0		0		3		100,00		4		200,00		DPM P2TSP		Inkositensi Perencanaan dan Penganggaran	Monev Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	108,66					
Predikat Kinerja																								-	ST					
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)		1.699.718.435	5.2	960.213.435	5.6	1.191.207.297	2.22	221.667.535	6.31	390.703.550	7.21	224.351.200	11.75	286.603.150	27.49	1.123.325.435	490,89	94,30	32.69	2.083.538.870	inf	122,58				
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	7.5	1.699.718.435	5.2	960.213.435	5.6	1.191.207.297	2.22	221.667.535	6.31	390.703.550	7.21	224.351.200	11.75	286.603.150	27.49	1.123.325.435	490,89	94,30	32.69	2.083.538.870	435,87	122,58			Inkonsistensinya pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
1	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	0	25.301.800	0	7.671.800	0	10.736.000	0	0	2	6.710.000	0	2.400.000	0	0	2	9.110.000	inf	84,85	2	16.781.800	inf	66,33	DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
			Jumlah Koordinasi penanaman modal	kali	5		1		5		0		2		0		0		2		40,00		3		60,00		DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
2	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	0	1.189.263.525	0	704.188.525	0	760.220.000	0	179.024.125	0	275.975.000	0	62.099.000	0	177.237.350	0	694.335.475	nan	91,33	0	1.398.524.000	nan	117,60	DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
			Perusahaan PMA/PMDN yang Difasilitasi Permasalahannya	Perusahaan PMA/PMDN	50		10		10		2		2		2		4		10		100,00		20		40,00		DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Orang	750		450		575		195		160		220		0		575		100,00		1025		136,67		DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
			Terlaksananya Forum Investasi Sumatera Barat	Orang	100		100		0		0		0		0		0		0		nan		100		100,00		DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
3	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	0	485.153.110	0	248.353.110	0	420.251.297	0	42.643.410	0	108.018.550	0	159.852.200	0	109.365.800	0	419.879.960	nan	99,91	0	668.233.070	nan	137,74	DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
			Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	103		73		30		13		30		20		10		73		243,33		146		141,75		DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Monev pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	107,22					
Predikat Kinerja																								-	ST					
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%		118.130.923	20	53.487.923	40	47.379.900	10	618.100	10	10.126.000	10	8.773.000	10	18.446.100	40	37.963.200	100,00	80,13	60	91.451.123	inf	77,42				
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Keresediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	100	118.130.923	20	53.487.923	40	47.379.900	10	618.100	10	10.126.000	10	8.773.000	10	18.446.100	40	37.963.200	100,00	80,13	60	91.451.123	60,00	77,42			Inkonsistensinya pelaksanaan kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Lancarnya Koordinasi dengan rumpun terkait dan Kab/Kota
1	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Yang Tersedia	Dokumen	6	118.130.923	1	53.487.923	1	47.379.900	0	618.100	0	10.126.000	0	8.773.000	1	18.446.100	1	37.963.200	100,00	80,13	2	91.451.123	33,33	77,42	DPM P2TSP		Inkonsistensinya pelaksanaan kegiatan dimulai dari perencanaan dan penganggaran	Lancarnya Koordinasi dengan rumpun terkait dan Kab/Kota
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								33,33	77,42					
Predikat Kinerja																								SR	T					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
											(5)		(6)		(7)		(8)													
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)		
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				32.169.543.210		52.161.034.056		91.566.619.133		2.525.347.699		11.429.003.345		13.929.726.812		38.259.470.184		66.143.548.040		72,24		118.304.582.096		367,75				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.205.734.000		14.262.888.021		18.173.019.878		2.333.019.299		5.657.326.439		3.567.525.245		4.344.711.339		15.902.582.322		87,51		30.165.470.343		165,69				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				18.205.734.000		14.262.888.021		18.173.019.878		2.333.019.299		5.657.326.439		3.567.525.245		4.344.711.339		15.902.582.322		87,51		30.165.470.343		165,69				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		17.278.065.000		14.170.158.921	100	18.173.019.878		2.321.449.299		5.652.326.439		3.567.525.245		4.344.711.339	0	15.886.012.322	0,00	87,42	0	30.056.171.243	nan	173,96				
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	1.405.000.000	0	585.626.701	85	739.021.373	0	203.395.350	0	153.301.400	0	195.112.850	0	120.171.800	0	671.981.400	0,00	90,93	0	1.257.608.101	nan	89,51				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		680.000.000		232.249.050	2	371.900.040	0	168.523.600	0	78.822.900	1	47.213.700	1	32.550.500	2	327.110.700	100,00	87,96	2	559.359.750	inf	82,26	DISPORA			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					2		0		1		1		0		2		100,00		2		inf		DISPORA			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DISPORA			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		DISPORA			
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4		0		4		3		3		0		1		7		175,00		7		175,00		DISPORA			
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	8.476.600	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	8.476.600	0,00	16,95	DISPORA				
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		295.000.000		71.329.784	3	367.121.333	1	34.871.750	1	74.478.500	0	147.899.150	1	87.621.300	3	344.870.700	100,00	93,94	3	416.200.484	inf	141,08	DISPORA			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					3		1		1		1		0		3		100,00		3		inf		DISPORA			
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	5	380.000.000	0	273.571.267	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	273.571.267	0,00	71,99	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	78,07				
Predikat Kinerja																									-	T				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	8.820.000.000	0	8.839.362.301	100	10.072.095.888	0	1.761.002.881	0	3.430.936.708	0	2.209.892.484	0	2.598.358.552	0	10.000.190.625	0,00	99,29	0	18.839.552.926	nan	213,60				
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	93	8.000.000.000	0	8.125.520.181	93	9.601.222.108	83	1.661.149.381	83	3.318.260.008	83	2.129.579.034	83	2.438.826.352	332	9.547.814.775	356,99	99,44	332	17.673.334.956	356,99	220,92	DISPORA			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	93		0		0		0		83		83		83		249		inf		249		267,74		DISPORA			
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	0	600.000.000	0	385.935.500	43	370.290.000	43	75.285.000	43	71.645.000	43	70.965.000	43	73.445.000	172	291.340.000	400,00	78,68	172	677.275.500	inf	112,88	DISPORA			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DISPORA			
7	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	1	100.000.000	0	165.028.350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	165.028.350	0,00	165,03	DISPORA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																												
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	120.000.000	0	162.878.270	13	100.583.780	3	24.568.500	3	41.031.700	3	9.348.450	4	86.087.200	13	161.035.850	100,00	160,10	13	323.914.120	260,00	269,93	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	96,09						
Predikat Kinerja																								-	ST						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	190.000.000	0	328.793.250	100	138.962.700	0	10.761.380	0	39.050.153	0	43.252.500	0	48.036.538	0	141.100.571	0,00	101,54	0	469.893.821	nan	247,31					
9	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPORA					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	DISPORA							
10	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dasuransikan	Unit	0	70.000.000	0	125.046.380	6	87.160.300	1	10.761.380	1	25.824.953	2	31.581.800	2	16.569.924	6	84.738.057	100,00	97,22	6	209.784.437	inf	299,69	DISPORA				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Administrasi yang disusun	Dokumen	3	0	0	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	3	0	100,00	3	0	100,00	DISPORA							
11	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	Dokumen	0	0	0	1	32.795.700	0	0	1	4.255.000	0	4.517.500	0	28.650.914	1	37.423.414	100,00	114,11	1	37.423.414	inf	inf	DISPORA					
			Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorumya	Orang	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,29	1	0	inf	DISPORA								
12	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	3	70.000.000	0	79.987.250	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	79.987.250	0,00	114,27	DISPORA					
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0,00	0,00	DISPORA								
13	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Laporan	3	50.000.000	0	123.759.620	3	19.006.700	0	0	1	8.970.200	0	7.153.200	2	2.815.700	3	18.939.100	100,00	99,64	3	142.698.720	100,00	285,40	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	%	0	30.000.000	0	0	100	26.082.225	0	0	0	5.249.900	0	6.742.800	0	3.965.000	0	15.957.700	0,00	61,18	0	15.957.700	nan	53,19					
14	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	15.000.000	0	0	26.082.225	0	0	1	5.249.900	0	6.742.800	0	3.965.000	1	15.957.700	inf	61,18	1	15.957.700	100,00	106,38	DISPORA					
			Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	Kali	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	DISPORA								
15	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	15.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPORA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	7,09						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	%	0	180.000.000	0	143.839.086	100	118.848.250	0	4.310.000	0	3.955.150	0	36.965.575	0	39.252.832	0	84.483.557	0,00	71,09	0	228.322.643	nan	126,85					
			Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan									
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	180.000.000	0	58.344.000	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	58.344.000	0,00	32,41	DISPORA					
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPORA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPORA					
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPORA					
18	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Orang	0		0	0	10		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISPORA				
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	0		0		5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPORA					
19	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kali	0		0	85.495.086	5	118.848.250	0	4.310.000	0	3.955.150	0	36.965.575	5	39.252.832	5	84.483.557	100,00	71,09	5	169.978.643	inf	inf	DISPORA					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPORA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	1.573.065.000	0	1.327.510.476	100	1.202.452.737	0	139.449.362	0	588.677.270	0	322.286.820	0	318.851.339	0	1.369.264.791	0,00	113,87	0	2.696.775.267	nan	171,43						
20	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	0	160.000.000	0	106.803.080	5	58.499.100	0	0	0	29.999.000	0	14.999.800	4	13.494.850	4	58.493.650	80,00	99,99	4	165.296.730	inf	103,31	DISPORA					
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	25.189.600	0	0	0	25.154.600	0	0	0	0	0	25.154.600	0,00	99,86	0	25.154.600	nan	inf	DISPORA					
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	0	550.000.000	0	295.627.379	27	70.000.000	0	0	27	66.586.000	0	0	0	0	27	66.586.000	100,00	95,12	27	362.213.379	inf	65,86	DISPORA					
23	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPORA					
24	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	105.000.000	0	0	0	88.578.000	0	0	0	0	0	88.578.000	nan	84,36	0	88.578.000	nan	inf	DISPORA					
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Set				5		0		2		0		0		2		40,00		2		inf		DISPORA						
25	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Unit	0	240.000.000	0	196.264.810	5	166.859.000	0	0	0	86.931.200	0	36.035.700	5	51.176.500	5	174.143.400	100,00	104,37	5	370.408.210	inf	154,34	DISPORA					
26	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	14.124.100	0	0	1	12.260.100	0	1.830.000	1	0	2	14.090.100	100,00	99,76	2	14.090.100	inf	inf	DISPORA					
27	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	4	10.518.000	0	0	0	10.518.000	0	0	0	0	0	10.518.000	0,00	100,00	0	10.518.000	nan	inf	DISPORA					
28	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar	0	65.578.000	0	49.176.750	140000	44.905.000	0	0	48000	23.998.000	48000	12.440.000	44000	8.450.000	140000	44.888.000	100,00	99,96	140000	94.064.750	inf	143,44	DISPORA					
29	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KBOR]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	10	5.160.000	0	1.290.000	0	1.290.000	0	1.290.000	0	1.290.000	0	5.160.000	0,00	100,00	0	5.160.000	nan	inf	DISPORA					
30	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar	221	40.000.000	0	25.000.000	211	25.000.000	52	3.380.000	52	4.365.000	52	4.365.000	55	5.820.000	211	17.930.000	100,00	71,72	211	42.930.000	95,48	107,33	DISPORA					
31	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Orang	0		0	0	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPORA					
32	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	50	517.487.000	0	654.638.457	50	672.919.187	10	134.779.362	20	235.787.570	10	250.308.320	10	238.619.989	50	859.495.241	100,00	127,73	50	1.514.133.698	100,00	292,59	DISPORA					
33	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Arsip	0		0	0	1	4.278.750	0	0	1	3.209.800	0	1.018.000	0	0	1	4.227.800	100,00	98,81	1	4.227.800	inf	inf	DISPORA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	380.000.000	0	161.191.000	100	262.594.060	0	0	0	88.715.000	0	0	0	0	0	88.715.000	0,00	33,78	0	249.906.000	nan	65,76						
34	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPORA					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					I	II			III	IV	I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		[UPTD KBOR]	yang Disediakan																												
35	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		200.000.000		161.191.000	0	63.722.000	0	0	0	62.520.000	0	0	0	0	62.520.000	nan	98,11	0	223.711.000	nan	111,86	DISPORA					
			Jumlah Mebel	Unit					60		0		35		0		0	35		58,33		35		inf		DISPORA					
36	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Unit	5	180.000.000	0	0	30	198.872.060	0	0	0	26.195.000	0	0	0	0	26.195.000	0,00	13,17	0	26.195.000	0,00	14,55	DISPORA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	2.700.000.000	0	1.671.428.598	100	2.964.181.145	0	184.354.626	0	769.114.621	0	617.121.459	0	1.024.465.678	0	2.595.056.384	0,00	87,55	0	4.266.484.982	nan	158,02					
37	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Laporan	2300	50.000.000	0	29.029.950	1800	21.450.000	450	5.237.800	450	5.237.800	450	5.666.800	450	4.850.500	1800	20.992.900	100,00	97,87	1800	50.022.850	78,26	100,05	DISPORA				
38	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	500	10.000.000	0	0	200	5.000.000	200	2.000.000	100	0	500	7.000.000	100,00	70,00	500	7.000.000	inf	inf	DISPORA				
39	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	0	850.000.000	0	330.726.222	1200	378.540.000	300	20.145.658	600	79.161.618	0	34.400.000	300	62.818.631	1200	196.525.907	100,00	51,92	1200	527.252.129	inf	62,03	DISPORA				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96	0	0	48		12		12		12		12		48		100,00		48		50,00		DISPORA					
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	0	0	0	5		2		1		1		1		5		100,00		5		inf		DISPORA					
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik	0	0	0	1500		375		375		375		375		1500		100,00		1500		inf		DISPORA					
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	0	0	0	1000		250		250		250		250		1000		100,00		1000		inf		DISPORA					
40	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	48	120.000.000	0	23.455.808	0	24.185.783	0	23.087.611	0	23.762.063	0	94.491.265	0,00	78,74	0	94.491.265	nan	inf	DISPORA				
41	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	0	1.800.000.000	0	1.311.672.426	27	1.896.973.283	27	57.212.172	0	506.937.906	0	434.903.818	0	757.073.634	27	1.756.127.530	100,00	92,58	27	3.067.799.956	inf	170,43	DISPORA				
42	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	11	537.217.862	0	78.303.188	10	148.591.514	1	117.063.230	0	175.960.850	11	519.918.782	100,00	96,78	11	519.918.782	inf	inf	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondidisi baik	%	0	2.000.000.000	0	1.112.407.509	100	2.648.781.500	0	18.175.700	0	573.326.237	0	136.150.757	0	191.609.600	0	919.262.294	0,00	34,71	0	2.031.669.803	nan	101,58					
43	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	41.690.000	0	0	0	6.342.621	0	9.974.307	1	25.315.000	1	41.631.928	100,00	99,86	1	41.631.928	inf	inf	DISPORA				
44	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	10	400.000.000	0	233.686.372	8	150.851.500	3	6.605.700	3	80.991.068	1	8.266.600	1	48.367.500	8	144.230.868	100,00	95,61	8	377.917.240	80,00	94,48	DISPORA				
45	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	100.000.000	0	13.812.000	30	15.000.000	0	0	9	6.914.414	9	7.500.000	12	580.000	30	14.994.414	100,00	99,96	30	28.806.414	33,33	28,81	DISPORA				
46	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel [UPTD KBOR]	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPORA					
47	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	0	0	0	100	91.440.000	0	0	16	50.668.800	20	22.189.300	10	18.569.100	46	91.427.200	46,00	99,99	46	91.427.200	inf	inf	DISPORA				
48	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.000.000.000	0	622.632.471	0	200.000.000	0	0	0	198.720.000	0	0	0	98.778.000	0	297.498.000	nan	148,75	0	920.130.471	0,00	92,01	DISPORA				
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Unit	3	0	0	1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DISPORA					
49	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KBOR]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	26.040.000	0	0	0	25.627.334	0	0	0	0	25.627.334	0,00	98,42	0	25.627.334	nan	inf	DISPORA					
50	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan	Unit	100	500.000.000	0	242.276.666	100	2.100.000.000	50	0	50	199.062.000	30	88.220.550	10	0	140	287.282.550	140,00	13,68	140	529.559.216	140,00	105,91	DISPORA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/rehab																														
51	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang [UPTD KBOR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	26	23.760.000	0	11.570.000	20	5.000.000	0	0	0	0	20	16.570.000	76,92	69,74	20	16.570.000	inf	inf	DISPORA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												nan	nan				
Predikat Kinerja																												-	-				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.963.809.210		37.898.146.035		73.393.599.255		192.328.400		5.771.676.906		10.362.201.567		33.914.758.845		50.240.965.718		68,45		88.139.111.753		631,20							
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.963.809.210		37.898.146.035		73.393.599.255		192.328.400		5.771.676.906		10.362.201.567		33.914.758.845		50.240.965.718		68,45		88.139.111.753		631,20							
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	JJumlah wirausaha muda baru	orang		3.528.569.000		6.284.819.300	348	8.460.727.600		0		2.438.920.056		3.272.845.586		2.254.614.267	0	7.966.379.909	0,00	94,16	0	14.251.199.209	nan	403,88							
			Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%					16									0		0,00		0		nan									
2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	%	0	3.028.569.000	0	5.553.207.550	100	7.910.727.600	0	0	0	2.188.920.056	0	3.022.845.586	0	2.204.614.267	0	7.416.379.909	0,00	93,75	0	12.969.587.459	nan	428,24							
1	2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	15	200.000.000	0	216.676.323	15	36.511.900	0	0	15	4.630.000	0	22.481.750	0	7.405.000	15	34.516.750	100,00	94,54	15	251.193.073	100,00	125,60	DISPORA						
2	2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	380	1.200.000.000	0	1.245.918.250	348	2.637.340.500	0	0	200	743.188.900	290	677.167.100	0	0	490	1.420.356.000	140,80	53,86	490	2.666.274.250	128,95	222,19	DISPORA						
3	2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	298	678.569.000	0	2.041.898.218	298	4.395.509.200	0	0	200	1.364.589.256	200	1.589.643.866	0	1.762.046.173	400	4.716.279.295	134,23	107,30	400	6.758.177.513	134,23	995,95	DISPORA						
4	2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	100	850.000.000	0	1.582.062.009	100	770.765.000	0	0	56	76.511.900	24	676.185.100	20	430.163.094	100	1.182.860.094	100,00	153,47	100	2.764.922.103	100,00	325,28	DISPORA						
5	2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen	5	100.000.000	0	74.377.500	5	70.601.000	0	0	0	0	3	57.367.770	2	5.000.000	5	62.367.770	100,00	88,34	5	136.745.270	100,00	136,75	DISPORA						
6	2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	392.275.250	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	392.275.250	nan	inf	DISPORA							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												nan	inf				
Predikat Kinerja																												-	-				
2.19.02.1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	%	0	500.000.000	0	731.611.750	100	550.000.000	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	50.000.000	0	550.000.000	0,00	100,00	0	1.281.611.750	nan	256,32							
7	2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	1	500.000.000	0	731.611.750	6	550.000.000	0	0	3	250.000.000	3	250.000.000	0	50.000.000	6	550.000.000	100,00	100,00	6	1.281.611.750	600,00	256,32	DISPORA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												85,71	36,62				
Predikat Kinerja																												T	SR				
2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASKEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	%		1.238.677.000		0	5.04	3.397.547.800		0		875.675.800		1.290.852.200		994.375.000	0	3.160.903.000	0,00	93,03	0	3.160.903.000	nan	255,18							

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	0	1.238.677.000	0	0	100	3.397.547.800	0	0	0	0	875.675.800	0	1.290.852.200	0	994.375.000	0	3.160.903.000	0,00	93,03	0	3.160.903.000	nan	255,18				
1	2.19.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Dokumen	1	150.000.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPORA				
2	2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	245.257.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPORA				
3	2.19.04.1.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit	1	400.000.000		0	1	170.000.000	0	0	0	1	166.528.000	0	594.375.000	1	760.903.000	100,00	447,59	1	760.903.000	100,00	190,23	DISPORA					
4	2.19.04.1.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	80	81.798.000		0	30	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISPORA				
5	2.19.04.1.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan	1	125.000.000		0	1	2.627.547.800	0	0	1	875.675.800	0	1.124.324.200	0	400.000.000	1	2.400.000.000	100,00	91,34	1	2.400.000.000	100,00	1.920,00	DISPORA				
6	2.19.04.1.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	1	71.622.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPORA				
7	2.19.04.1.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan termanfaatkan	Unit	1	15.000.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPORA				
8	2.19.04.1.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	20	150.000.000		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								25,00	263,78						
Predikat Kinerja																								SR	ST						
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN	Jumlah medali emas dalam event nasional	medali		7.605.819.210	23.785.134.035	26	61.535.323.855	192.328.400		1.250.973.700		5.798.503.781	30.665.769.578	0	37.907.575.459	0,00	61,60	0	61.692.709.494	nan	811,13								
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	%				0,9								0		0,00		0		nan									
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	%	0	3.142.238.303	0	2.617.022.318	100	7.483.600	0	0	0	0	7.100.000	0	0	7.100.000	0,00	94,87	0	2.624.122.318	nan	83,51							
1	2.19.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	2	200.000.000	0	987.712.655	5	383.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	987.712.655	0,00	493,86	DISPORA					
2	2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi [UPTD KBOR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit		0	0	17	7.100.000	0	0	0	17	7.100.000	0	0	17	7.100.000	100,00	100,00	17	7.100.000	inf	inf	DISPORA						
3	2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	23	2.942.238.303	0	1.629.309.663	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	1.629.309.663	0,00	55,38	DISPORA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf						
Predikat Kinerja																								-	-						
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	%	0	3.384.158.907	0	6.231.848.814	100	6.024.381.350	0	0	0	977.964.400	0	1.823.313.407	0	3.459.384.396	0	6.260.662.203	0,00	103,92	0	12.492.511.017	nan	369,15					
4	2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	20	683.633.121	0	3.112.727.420	17	5.072.000.000	0	0	5	958.000.000	7	1.016.935.000	5	2.383.641.831	17	4.358.576.831	100,00	85,93	17	7.471.304.251	85,00	1.092,88	DISPORA				
5	2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan	Dokumen	5	300.000.000	0	187.229.000	2	405.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	187.229.000	0,00	62,41	DISPORA					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																												
										I		II		III		IV																																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
		Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi																																																		
6	2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	56	2.400.525.786	0	2.931.892.394	50	852.000.100	0	0	10	19.964.400	30	767.124.592	10	1.029.385.000	50	1.816.473.992	100,00	213,20	50	4.748.366.386	89,29	197,81	DISPORA																										
7	2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event [UPTD KBOR]	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang		0	0	0	50	99.976.000	0	0	0	0	15	39.253.815	0	46.357.565	15	85.611.380	30,00	85,63	15	85.611.380	inf	inf	DISPORA																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																					
Predikat Kinerja																																																					
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	%	0	250.000.000	0	1.429.208.477	100	4.887.713.680	0	192.328.400	0	197.775.000	0	2.077.564.674	0	1.253.267.750	0	3.720.935.824	0,00	76,13	0	5.150.144.301	nan	2.060,06																											
8	2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	7	200.000.000	0	1.429.208.477	4	2.090.000.000	1	192.328.400	1	197.775.000	1	187.038.974	1	473.177.250	4	1.050.319.624	100,00	50,25	4	2.479.528.101	57,14	1.239,76	DISPORA																										
9	2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi [UPTD KBOR]	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang		0	0	119	2.754.713.680	0	0	0	119	1.890.525.700	0	780.090.500	119	2.670.616.200	100,00	96,95	119	2.670.616.200	inf	inf	DISPORA																												
10	2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi [UPTD KBOR]	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang		0	0	30	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																											
11	2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	4	50.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISPORA																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																					
Predikat Kinerja																																																					
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%	0	829.422.000	0	13.507.054.426	100	50.615.745.225	0	0	0	75.234.300	0	1.890.525.700	0	25.953.117.432	0	27.918.877.432	0,00	55,16	0	41.425.931.858	nan	4.994,55																											
12	2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	3	160.000.000	0	13.507.054.426	3	49.839.289.000	0	0	0	0	1	1.890.525.700	2	24.944.036.629	3	26.834.562.329	100,00	53,84	3	40.341.616.755	100,00	25.213,51	DISPORA																										
13	2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	2	669.422.000	0	0	1	776.456.225	0	0	1	75.234.300	0	0	0	1.009.080.803	1	1.084.315.103	100,00	139,65	1	1.084.315.103	50,00	161,98	DISPORA																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																					
Predikat Kinerja																																																					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS KEBUDAYAAN				0		0	39.523.563.024	3.696.690.300	12.269.614.176	11.785.217.207	14.329.425.592	42.080.947.275		106,47	42.080.947.275	inf												
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0	13.801.375.256	2.196.862.657	5.579.693.908	2.448.522.891	3.578.870.847	13.803.950.303		100,02	13.803.950.303	inf												
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0	13.801.375.256	2.196.862.657	5.579.693.908	2.448.522.891	3.578.870.847	13.803.950.303		100,02	13.803.950.303	inf												
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	%		0		0	80	13.801.375.256	2.196.862.657	0	5.579.693.908	0	2.448.522.891	3.578.870.847	0	13.803.950.303	0,00	100,02	0	13.803.950.303	nan	inf						
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	%	0	0	0	0	80	57.925.400	0	9.349.600	0	23.984.100	0	14.119.150	0	2.000.000	0	49.452.850	0,00	85,37	0	49.452.850	nan	inf				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	2	36.200.000	0	9.349.600	0	21.550.500	2	1.642.250	0	2.000.000	2	34.542.350	100,00	95,42	2	34.542.350	inf	inf	DISBUD			
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	100,00	nan	4	0	inf	nan	DISBUD					
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	2	17.925.400	0	0	0	0	2	12.476.900	0	0	2	12.476.900	100,00	69,60	2	12.476.900	inf	inf	DISBUD			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan					2	0		0	0	0	2	2	100,00		2		inf		DISBUD							
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Laporan		0		0	4	3.800.000	0	0	0	2.433.600	2	0	2	0	4	2.433.600	100,00	64,04	4	2.433.600	inf	inf	DISBUD			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	Dokumen					4	0		0	0	0	4	4	100,00		4		inf		DISBUD							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	0	0	0	0	98	9.255.321.055	1.480.120.533	0	4.277.643.204	0	1.365.536.774	0	1.954.596.106	0	9.077.896.617	0,00	98,08	0	9.077.896.617	nan	inf					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (ASN)	Orang/ Bulan		0		0	78	8.956.627.360	1.438.590.533	0	4.166.923.204	57	1.298.285.574	21	1.875.807.606	78	8.779.606.917	100,00	98,02	78	8.779.606.917	inf	inf	DISBUD				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	0		nan		DISBUD							
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	0	0	12	261.876.600	0	41.530.000	6	110.720.000	2	53.741.100	0	62.465.000	8	268.456.100	66,67	102,51	8	268.456.100	inf	inf	DISBUD			
7	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	14	36.817.095	0	0	6	0	2	13.510.100	0	16.323.500	8	29.833.600	57,14	81,03	8	29.833.600	inf	inf	DISBUD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
Predikat Kinerja																					-	-								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	98	302.760.000	0	15.560.000	0	21.125.000	0	90.667.392	0	0	0	127.352.392	nan	inf								
8	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Gedung yang diasuransikan	unit		0		0	6	302.760.000	0	15.560.000	0	21.125.000	0	90.667.392	6	0	6	127.352.392	100,00	42,06	6	127.352.392	inf	inf	DISBUD			
			Jumlah Kendaraan roda empat	unit				6		0		0		0		6		6		100,00		6		inf		DISBUD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISBUD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf								
Predikat Kinerja																					-	-								
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib admnsitasi kepegawaian yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100,00	nan	100	0	inf	nan					
9	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	100,00	nan	80	0	inf	nan	DISBUD				
10	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100,00	nan	3	0	inf	nan	DISBUD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	nan								
Predikat Kinerja																					-	-								
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP	%	0	0	0	0	100	1.198.136.966	0	170.055.638	0	508.334.068	0	154.345.285	0	411.520.596	0	1.244.255.587	0,00	103,85	0	1.244.255.587	nan	inf				
11	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis		0		0	20	49.981.000	0	12.488.200	0	23.723.500	0	13.699.300	20	13.200.000	20	63.111.000	100,00	126,27	20	63.111.000	inf	inf	DISBUD			
12	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	100,00	nan	11	0	inf	nan	DISBUD				
13	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	35	127.065.580	0	12.488.200	17	84.316.500	0	28.593.750	18	6.546.000	35	131.944.450	100,00	103,84	35	131.944.450	inf	inf	DISBUD			
14	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	39.000.000	0	8.500.000	3	17.540.000	2	8.840.000	0	1.200.000	5	36.080.000	100,00	92,51	5	36.080.000	inf	inf	DISBUD			
15	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Media Cetak		0	0	0	6	17.440.000	0	2.010.000	0	5.660.000	0	4.005.000	6	4.765.000	6	16.440.000	100,00	94,27	6	16.440.000	inf	inf	DISBUD			
16	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	36	964.650.386	0	134.569.238	25	377.094.068	0	99.207.235	11	385.809.596	36	996.680.137	100,00	103,32	36	996.680.137	inf	inf	DISBUD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	nan								
Predikat Kinerja																					-	-								
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan						
17	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100,00	nan	2	0	inf	nan	DISBUD				
18	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100,00	nan	5	0	inf	nan	DISBUD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	nan								
Predikat Kinerja																					-	-								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
					K	Rp			K	Rp	K	I		II		III		IV			K	Rp					K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan daerah sesuai SOP	%	0	0	0	0	100	2.572.442.990	0	467.453.957	0	675.692.136	0	664.437.740	1	1.090.283.995	1	2.897.867.828	1,00	112,65	1	2.897.867.828	inf	inf							
19	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	1000	30.000.000	0	7.194.000	500	14.110.000	1	8.240.000	480	200.000	981	29.744.000	98,10	99,15	981	29.744.000	inf	inf	DISBUD						
20	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan	Bulan		0		0	12	553.063.695	0	145.877.425	0	182.742.401	9	133.369.352	3	102.567.234	12	564.556.412	100,00	102,08	12	564.556.412	inf	inf	DISBUD						
21	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang yang disediakan dalam Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang		0		0	51	1.989.379.295	0	314.382.532	0	478.839.735	0	522.828.388	51	987.516.761	51	2.303.567.416	100,00	115,79	51	2.303.567.416	inf	inf	DISBUD						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISBUD								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	100	414.788.845	0	54.322.929	0	72.915.400	0	159.416.550	100	120.470.150	100	407.125.029	100,00	98,15	100	407.125.029	inf	inf							
22	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	12	99.998.845	0	24.352.929	6	35.000.900	2	23.346.550	4	47.186.750	12	129.887.129	100,00	129,89	12	129.887.129	inf	inf	DISBUD						
23	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	3		0	0	2		0	0	3		0	5	166,67	nan	5		0	inf	nan	DISBUD					
24	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	14	314.790.000	0	29.970.000	0	37.914.500	5	136.070.000	14	63.283.400	19	267.237.900	135,71	84,89	19	267.237.900	inf	inf	DISBUD						
25	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	5		0	0	0	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	100,00	inf	5	10.000.000	inf	inf	DISBUD							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		25.722.187.768	1.499.827.643		6.689.920.268		9.336.694.316		10.750.554.745		28.276.996.972		109,93		28.276.996.972		inf								
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				0		0		25.722.187.768	1.499.827.643		6.689.920.268		9.336.694.316		10.750.554.745		28.276.996.972		109,93		28.276.996.972		inf								
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIANTRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional		0		0	23	5.518.769.805	0	120.982.800	0	986.914.250	0	1.642.777.548	23	2.514.231.111	23	5.264.905.709	100,00	95,40	23	5.264.905.709	inf	inf							
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	unit	0	0	0	0	23	5.518.769.805	0	120.982.800	0	986.914.250	0	1.642.777.548	23	2.514.231.111	23	5.264.905.709	100,00	95,40	23	5.264.905.709	inf	inf							
1	2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	0	0	0	0	238	2.725.803.800	0	76.702.240	0	351.967.750	238	1.418.479.196	0	536.290.944	238	2.383.440.130	100,00	87,44	238	2.383.440.130	inf	inf	DISBUD			Tingginya antusias pelaku seni mendapat Pendidikan dan Pelatihan			
2	2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	0	0	0	5	2.095.500	0	0	0	0	0	5	2.095.500	5	2.095.500	100,00	100,00	5	2.095.500	inf	inf	DISBUD		Dilaksanakan di Tw.4					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I	II	III	IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
3	2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dibina	Lembaga		0		0	25	2.790.870.505	0	44.280.560	0	634.946.500	0	224.298.352	25	1.975.844.667	25	2.879.370.079	100,00	103,17	25	2.879.370.079	inf	inf	DISBUD		Dilaksanakan di Tw.4		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISBUD						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf									
Predikat Kinerja																					-	-									
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen		0	0	0	4	608.735.477	0	137.230.300	0	331.181.200	0	65.999.600	4	43.676.300	4	578.087.400	100,00	94,97	4	578.087.400	inf	inf					
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	dokumen	0	0	0	0	1	608.735.477	0	137.230.300	0	331.181.200	0	65.999.600	1	43.676.300	1	578.087.400	100,00	94,97	1	578.087.400	inf	inf					
1	2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasita	Orang		0		0	10	7.414.996	0		10	5.220.400	0		0	0	1.864.500	10	7.084.900	100,00	95,55	10	7.084.900	inf	inf	DISBUD			
			Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga					1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		DISBUD				
2	2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen		0		0	2	601.320.481	0	137.230.300	0	325.960.800	1	65.999.600	1	41.811.800	2	571.002.500	100,00	94,96	2	571.002.500	inf	inf	DISBUD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf									
Predikat Kinerja																					-	-									
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA	Jumlah Warisan Budaya benda yang ditetapkan	%		0		0	100	693.729.952	0	4.130.000	0	160.410.616	0	43.069.800	100	722.383.425	100	929.993.841	100,00	134,06	100	929.993.841	inf	inf					
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan	unit	0	0	0	0	15	108.645.052	0	4.130.000	0	8.432.250	0	23.586.000	15	68.100.800	15	104.249.050	100,00	95,95	15	104.249.050	inf	inf					
1	2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	0	0	0	0	21	26.229.052	0		0	1.800.000	0	17.006.000	21	5.363.000	21	24.169.000	100,00	92,15	21	24.169.000	inf	inf	DISBUD		Pelaksanaan sedang berjalan di TW.3 dan Tw.4		
2	2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	0	0	0	0	15	82.416.000	0	4.130.000	0	6.632.250	0	6.580.000	15	62.737.800	15	80.080.050	100,00	97,17	15	80.080.050	inf	inf	DISBUD		Pelaksanaan sedang berjalan di TW.3 dan Tw.4		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf									
Predikat Kinerja																					-	-									
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	unit	0	0	0	0	16	585.084.900	0		0	151.978.366	0	19.483.800	16	654.282.625	16	825.744.791	100,00	141,13	16	825.744.791	inf	inf					
3	2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	0	0	0	0	16	585.084.900	0		0	151.978.366	0	19.483.800	16	654.282.625	16	825.744.791	100,00	141,13	16	825.744.791	inf	inf	DISBUD		Pelaksanaan sedang berjalan di TW.3 dan Tw.4		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf									
Predikat Kinerja																					-	-									
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali		0		0	15	2.430.999.316	0		0	0	1.629.965.388	0	949.695.540	0	2.579.660.928	0,00	106,12	0	2.579.660.928	nan	inf						
			Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang					35000		0		0		0		0		0,00		0		nan								
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum	Jumlah masyarakat yang	orang	0	0	0	0	35000	2.430.999.316	0		0	0	1.629.965.388	0	949.695.540	0	2.579.660.928	0,00	106,12	0	2.579.660.928	nan	inf						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		Provinsi			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2.22.06.1.01.01	Provinsi	mengapresiasi museum																										
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pengembangan	Koleksi		0	0	7	600.000.000	0	0	0	0	351.335.260	0	247.502.267	0	598.837.527	0,00	99,81	0	598.837.527	nan	inf	DISBUD		Kurangnya sarana dan prasarana (peralatan museum)	Lembaga atau institusi membantu kajian	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan	koleksi				700	0	0	0	700	0	700	100,00	700	inf	DISBUD								Kurang nya SDM dalam pelaksanaan di museum.	Bertambahnya koleksi		
2	2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang		0	0	2	75.362.316	0	0	0	0	53.920.414	2	26.480.768	2	80.401.182	100,00	106,69	2	80.401.182	inf	inf	DISBUD		Kurang nya SDM dalam pelaksanaan di museum.	Adanya antusias SDM yang ada	
3	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum	Sarana/Media/Aplikasi		0	0	1	1.150.000.000	0	0	0	1	694.138.575	0	597.373.475	1	1.291.512.050	100,00	112,31	1	1.291.512.050	inf	inf	DISBUD				
			Jumlah aktivitas museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan				15	0	0	0	15	0	15	100,00	15	inf	DISBUD									Adanya antusias masyarakat		
4	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	Unit		0	0	15	600.000.000	0	0	0	15	530.571.139	0	72.702.200	15	603.273.339	100,00	100,55	15	603.273.339	inf	inf	DISBUD		Banyak diperlukan peremajaan		
5	2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah sarana museum yang direvitalisasi	Unit		0	0	1	5.637.000	0	0	0	1	0	5.636.830	1	5.636.830	100,00	100,00	1	5.636.830	inf	inf	DISBUD			Kurangnya sarana dan prasarana (peralatan museum)		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf				
Predikat Kinerja																								-	-				
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang dilestarikan	Karya Budaya		0	0	8	16.469.953.218	0	549.039.000	0	3.079.702.283	0	5.954.881.980	0	6.520.568.369	0	16.104.191.632	0,00	97,78	0	16.104.191.632	nan	inf				
			Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan										
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	Karya Budaya	0	0	0	8	3.803.769.759	0	19.733.200	0	701.625.944	0	284.041.500	0	3.378.397.100	0	4.383.797.744	0,00	115,25	0	4.383.797.744	nan	inf				
1	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan	Objek		0	0	8	3.649.087.759	0	19.733.200	0	553.074.184	0	283.162.400	0	2.700.427.700	0	3.556.397.484	0,00	97,46	0	3.556.397.484	nan	inf	DISBUD			
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Objek				8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISBUD									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Objek	0	0		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISBUD									
2	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang		0	0	0	154.682.000	0	0	0	148.551.760	0	879.100	0	677.969.400	0	827.400.260	nan	534,90	0	827.400.260	nan	inf	DISBUD			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah Sumber Daya Manusia kebudayaan yang Dibina	Orang					6		0		0		0		6		6		100,00		6		inf	DISBUD				
			Jumlah Lembaga Kebudayaan yang Dibina	Lembaga	0		0		4		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DISBUD				
			Jumlah Pranata Kebudayaan yang Dibina	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DISBUD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terkelola dengan baik	Karya Budaya	0	0	0	0	8	5.829.717.141	0		0	0	0	4.119.658.841	0	1.442.171.269	0	5.561.830.110	0,00	95,40	0	5.561.830.110	nan	inf				
3	2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		0		0	5	3.760.000.000	0		0	0	5	2.536.115.479	0	1.234.412.069	5	3.770.527.548	100,00	100,28	5	3.770.527.548	inf	inf	DISBUD			
4	2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD Taman Budaya]	Jumlah sumber daya manusia tradisional yang mendapatkan pembinaan	Orang		0		0	40	1.650.050.942	0		0	0	0	1.253.823.362	40	137.125.600	40	1.390.948.962	100,00	84,30	40	1.390.948.962	inf	inf	DISBUD			
			Jumlah pranata tradisional yang dibina	Dokumen					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	DISBUD				
			Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan	Lembaga					18		0		0		18		0		18		100,00		18		inf	DISBUD				
5	2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD Taman Budaya]	Jumlah maestro kebudayaan yang mendapatkan penghargaan	Orang		0		0	7	419.666.199	0		0	0	0	329.720.000	7	70.633.600	7	400.353.600	100,00	95,40	7	400.353.600	inf	inf	DISBUD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemangku adat yang dibina dan generasi muda	orang	0	0	0	0	175	6.836.466.318	0	529.305.800	0	2.378.076.339	0	1.551.181.639	0	1.700.000.000	0	6.158.563.778	0,00	90,08	0	6.158.563.778	nan	inf				
6	2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (Adat) Dikembangkan	Nagari ABS-SBK		0		0	18	1.311.328.118	0	9.280.500	0	29.941.500	0	615.824.739	18	400.000.000	18	1.055.046.739	100,00	80,46	18	1.055.046.739	inf	inf	DISBUD			
			Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Adat) yang	Objek					30		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DISBUD				
			Jumlah Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (Adat)	Video					6		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	DISBUD				
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (Adat) terinventarisasi	Dokumen					500		0		0		0		500		500		100,00		500		inf	DISBUD				
7	2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Adat yang Dibina	Orang		0		0	3553	5.525.138.200	0	520.025.300	0	2.348.134.839	0	935.356.900	3553	1.300.000.000	3553	5.103.517.039	100,00	92,37	3553	5.103.517.039	inf	inf	DISBUD			
			Jumlah Lembaga Tradisional yang Dibina	Lembaga	0		0		138		0		0		138		0		138		100,00		138		inf	DISBUD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I		II														III		IV		
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)					(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				82.804.703.800		13.870.798.678		14.719.474.521		2.737.858.355		5.172.303.964		3.172.528.541		4.293.349.168		15.376.040.028		104,46		29.246.838.706		35,32					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				69.953.244.300		12.343.739.744		13.602.802.519		2.672.566.567		4.501.997.665		3.012.000.387		4.006.587.290		14.193.151.909		104,34		26.536.891.653		37,94					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				69.953.244.300		12.343.739.744		13.602.802.519		2.672.566.567		4.501.997.665		3.012.000.387		4.006.587.290		14.193.151.909		104,34		26.536.891.653		37,94					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		69.953.244.300		12.343.739.744	100	13.602.802.519		2.672.566.567		4.501.997.665		3.012.000.387		4.006.587.290	0	14.193.151.909	0,00	104,34	0	26.536.891.653	nan	37,94					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	1.192.310.100	0	66.611.500	85	55.873.450	0	15.320.700	0	13.196.000	0	17.868.400	0	8.704.900	0	55.090.000	0,00	98,60	0	121.701.500	nan	10,21					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		419.231.450		52.143.400	0	39.873.450	0	12.870.700	0	8.538.500	0	12.205.900	0	5.624.900	0	39.240.000	nan	98,41	0	91.383.400	nan	21,80	DAP				
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	30		5		6		4		0		0		0		4		66,67		9		30,00		DAP	Belum Ada		tersedianya data yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD), Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen	24	299.500.000	0		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DAP	Sub kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023		Dianggarkan pada tahun 2024		
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		258.379.100		14.468.100	0	16.000.000	0	2.450.000	0	4.657.500	0	5.662.500	0	3.080.000	0	15.850.000	nan	99,06	0	30.318.100	nan	11,73	DAP				
			Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	24		4		3		3		0		0		0		3		100,00		7		29,17		DAP	Belum Ada		tersedianya data yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		215.199.550		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DAP					
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	24		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DAP	Sub kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023		Dianggarkan pada tahun 2024	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	8,38							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	64.892.102.320	0	9.323.952.509	100	10.727.482.519	0	2.141.011.214	0	3.545.164.220	0	2.464.485.732	0	2.793.127.128	0	10.943.788.294	0,00	102,02	0	20.267.740.803	nan	31,23					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		63.280.743.320		9.183.884.509	0	10.575.935.519	0	2.106.433.214	0	3.511.036.220	0	2.424.605.932	0	2.748.769.928	0	10.790.845.294	nan	102,03	0	19.974.729.803	nan	31,57	DAP				
			Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	590		87		87		0		0		0		87		87		100,00		174		29,49		DAP	Belum Ada		Merupakan kegiatan rutin terkait pembayaran gaji ASN	
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1.374.480.000		117.240.000	0	117.240.000	0	28.360.000	0	29.610.000	0	29.610.000	0	31.070.000	0	118.650.000	nan	101,20	0	235.890.000	nan	17,16	DAP				
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	72		11		9		0		0		0		9		9		100,00		20		27,78		DAP	Belum Ada		Tersedianya ASN yang akan dibayarkan honornya dan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap bulannya	
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	6	85.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DAP	Sub kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023		Dianggarkan pada tahun 2024		
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30	151.679.000	5	22.828.000	0	34.307.000	0	6.218.000	0	4.518.000	0	10.269.800	0	13.287.200	0	34.293.000	nan	99,96	5	57.121.000	16,67	37,66	DAP	Belum Ada		Kewajiban untuk menyiapkan laporan keuangan dan harus dilaporkan per bulan, semester dan tahunan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	30		5		5		1		1		1		2		5		100,00		10		33,33	10,80	DAP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	10,80								
Predikat Kinerja																					-	SR								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	510.541.000	0	107.920.220	100	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	84.248.000	0	87.248.000	0,00	2.908,27	0	195.168.220	nan	38,23				
9	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		50.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DAP			
			Jumlah dokumen usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	5		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024
10	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	Unit		261.000.000	9	105.106.420	0	0	0	0	0	0	0	0	8	84.248.000	8	84.248.000	inf	inf	17	189.354.420	inf	72,55	DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Tersedianya barang yang wajib untuk diasuransikan seperti kendaraan dan bangunan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5		1		0		0		0		0		0		0		nan		1		20,00		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024
11	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		101.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DAP			
			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	Dokumen	5		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024
12	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	10	50.612.000	2	1.388.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	1.388.800	20,00	2,74	DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Terdapatnya aset yang harus dibuatkan laporannya, perlunya dokumen yang mencatat semua aset daerah, tersedianya data untuk penyusunan laporan tersebut
13	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		46.914.000		1.425.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	nan	100,00	0	4.425.000	nan	9,43	DAP			
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Dokumen	5		1		1		1		0		0		0		1		100,00		2		40,00		DAP		Tidak ada	Tersedianya barang milik daerah yang harus dibuatkan dokumennya.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	6,52								
Predikat Kinerja																					-	SR								
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	446.900.000	0	56.999.943	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	56.999.943	nan	12,75				
14	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		393.750.000		56.999.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	56.999.943	nan	14,48	DAP			
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel	525		76		0		0		0		0		0		0		nan		76		14,48		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024
15	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		53.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DAP			
			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	5		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Dokumen	5		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	0,97								
Predikat Kinerja																					-	SR								
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	1.687.106.340	0	436.482.556	100	285.618.241	0	101.863.981	0	134.271.050	0	24.009.600	0	217.571.025	0	477.715.656	0,00	167,26	0	914.198.212	nan	54,19				
16	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		67.932.650		9.580.000	0	59.846.000	0	19.972.200	0	19.928.600	0	9.966.000	0	9.979.200	0	59.846.000	nan	100,00	0	69.426.000	nan	102,20	DAP			
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Unit			235		1628		653		500		335		140		1628		100,00		1863		inf		DAP			

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
											(8)		(9)		(10)		(11)														
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													K
			kantor yang disediakan																												
17	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		59.530.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DAP				
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit			0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024	
18	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		210.100.000		35.483.100	0	24.241.700	0	9.857.900	0	10.300.200	0	3.958.600	0	12.588.300	0	36.705.000	nan	151,41	0	72.188.100	nan	34,36	DAP				
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Unit			428		450		201		155		100		48		504		112,00		932		inf		DAP		Tidak ada	Adanya kebutuhan terhadap bahan logistik kantor yang harus dipenuhi setiap bulannya	
			Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	Kali	75		5		5		3		1		2		4		10		200,00		15		20,00		DAP				
19	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		128.225.790		18.270.000	0	18.385.750	0	3.639.000	0	5.469.000	0	5.525.000	0	3.752.700	0	18.385.700	nan	100,00	0	36.655.700	nan	28,59	DAP				
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Unit				955		153		296		273		233		955		100,00		955		inf		DAP		Tidak ada	Perlunya ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan yang harus dipenuhi secara rutin		
20	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		188.580.000		24.360.000	0	18.480.000	0	3.040.000	0	4.560.000	0	4.560.000	0	6.080.000	0	18.240.000	nan	98,70	0	42.600.000	nan	22,59	DAP				
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Unit				120		30		30		30		30		120		100,00		120		inf		DAP		Tidak ada	Perlunya ketersediaan bahan bacaan setiap bulannya		
21	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen		988.679.900		347.539.456	25	164.664.791	10	65.354.881	15	94.013.250	0	0	25	185.170.825	50	344.538.956	200,00	209,24	50	692.078.412	inf	70,00	DAP		Tidak ada	Adanya perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan yang harus diikuti. Tersedianya laporan perjalanan dinas	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DAP					
22	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		44.058.000		1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	1.250.000	nan	2,84	DAP				
			Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola	Arsip				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	11,84							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	165.166.900	0	0	100	205.595.000	0	0	0	201.572.400	0	0	0	0	201.572.400	0,00	98,04	0	201.572.400	nan	122,04						
23	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		165.166.900		0	0	205.595.000	0	0	0	201.572.400	0	0	0	0	201.572.400	nan	98,04	0	201.572.400	nan	122,04	DAP					
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	Unit			0		10		0		10		0		0		10		100,00		10		inf		DAP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	5,31							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	76.800.040	0	2.185.430.166	100	1.926.463.309	0	394.711.772	0	550.487.145	0	477.395.182	0	539.718.924	0	1.962.313.023	0,00	101,86	0	4.147.743.189	nan	5.400,70					
24	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Surat	6000	76.800.000		9.700.000	1000	10.000.000	250	1.940.000	250	1.940.000	250	3.880.000	250	1.940.000	1000	9.700.000	100,00	97,00	1000	19.400.000	16,67	25,26	DAP		Tidak ada	Perlunya ketersediaan bahan terkait penyelenggaraan administrasi surat masuk dan keluar	
25	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps	600	0		558.733.493	100	558.362.600	0	177.549.485	0	146.869.254	0	140.517.831	100	126.747.293	100	591.683.863	100,00	105,97	100	1.150.417.356	16,67	inf	DAP		Tidak ada	Kegiatan rutin untuk memenuhi penyediaan layanan internet di kantor perpustakaan dan kearsipan	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
											(8)		(9)														(10)		(11)	
											K	Rp	K	Rp													K	Rp	K	Rp
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Rekening	18				3	0		0		0	3		3	100,00	3		16,67		DAP							
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	Meter kubik	9060				1510	0		0		0	1510		1510	100,00	1510		16,67		DAP							
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	2086200				347700	0		0		0	347700		347700	100,00	347700		16,67		DAP							
26	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	240	40	40	1.616.996.673	31	1.358.100.709	0	215.222.287	0	401.677.891	0	332.997.351	31	411.031.631	31	1.360.929.160	100,00	100,21	71	2.977.925.833	29,58	7.444.814.582,50	DAP		Tidak ada	Tersedianya outsourcing yang harus dibayarkan gajinya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							2,21	inf						
Predikat Kinerja																							SR	-						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	0	982.317.600	0	166.342.850	100	398.770.000	0	16.658.900	0	57.306.850	0	28.241.473	0	363.217.313	0	465.424.536	0,00	116,72	0	631.767.386	nan	64,31				
27	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	6	278.780.000	1	40.169.000	1	11.010.000	0	2.600.000	0	4.850.000	0	1.560.000	1	1.718.000	1	10.728.000	100,00	97,44	2	50.897.000	33,33	18,26	DAP		Tidak ada	Tersedianya kendaraan dinas yang harus dibayarkan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraannya
28	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		410.400.000		113.238.850	0	56.080.000	0	5.683.900	0	35.351.850	0	5.832.800	0	60.167.950	0	107.036.500	nan	190,86	0	220.275.350	nan	53,67	DAP			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	45		9		10		3		3		3		2		11		110,00		20		44,44	DAP		Tidak ada	Tersedianya kendaraan dinas yang harus dibayarkan pajaknya	
29	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		131.500.000		12.935.000	0	37.120.000	0	8.375.000	0	17.105.000	0	8.375.000	0	9.320.000	0	43.175.000	nan	116,31	0	56.110.000	nan	42,67	DAP			
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit					56		19		25		12		10		66		117,86		66		inf	DAP		Tidak ada	Tersedianya peralatan dan mesin yang harus dilakukan pemeliharaan	
30	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		161.637.600		0	0	294.560.000	0		0	0	0	12.473.673	0	292.011.363	0	304.485.036	nan	103,37	0	304.485.036	nan	188,38	DAP			
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	Unit	175		0		2		0		0		1		1		2		100,00		2		1,14	DAP		Tidak ada	Tersedianya gedung kantor yang harus dipelihara	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	10,10						
Predikat Kinerja																							-	SR						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.851.459.500		1.527.058.934		1.116.672.002		65.291.788		670.306.299		160.528.154		286.761.878		1.182.888.119		105,93		2.709.947.053		21,09				
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				9.685.768.000		978.911.770		765.061.003		36.784.600		498.611.305		21.434.594		258.272.998		815.103.497		106,54		1.794.015.267		18,52				
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan Tk. Provinsi sesuai SNP	%		7.088.537.300		900.911.770	1,52	533.359.153		35.628.400		443.705.635		21.434.594		104.535.710	0	605.304.339	0,00	113,49	0	1.506.216.109	nan	21,25				
2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	Perpustakaan	0	6.125.287.300	0	772.931.282	8	477.763.713	0	35.458.400	0	404.038.785	0	13.993.250	0	97.978.730	0	551.469.165	0,00	115,43	0	1.324.400.447	nan	21,62				
1	2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Perpustakaan		2.029.986.300		384.224.392	1	42.568.913	0	27.342.700	1	12.439.100	0	0	0	12.099.280	1	51.881.080	100,00	121,88	1	436.105.472	inf	21,48	DAP			
			Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan elektronik	Jenis				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DAP				
			Jumlah E-book yang tersedia	Softcopy	6800		300		0		0		0		0		0		0		nan		300		4,41	DAP		Tidak Ada	terlaksana sesuai jadwal karena sapsras elektornik cukup memadai	
			Jumlah Jaringan yang terpelihara	Jaringan	5		1		1		1		0		0		0		1		100,00		2		40,00	DAP				
			Jumlah Perpustakaan elektronik di Sumatera Barat	Perpustakaan	21		0		0		1		0		0		0		1		inf		1		4,76	DAP				
2	2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan perpustakaan visual yang tersedia	Studio	0	1.312.250.000	0	52.317.500	0	59.276.800	0	7.125.700	0	21.845.850	0	13.993.250	0	21.461.000	0	64.425.800	nan	108,69	0	116.743.300	nan	8,90	DAP		Tidak Ada	karena adanya dukungan pimpinan

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Orang	0	963.250.000	0	127.980.488	25500	55.595.440	0	170.000	0	39.666.850	0	7.441.344	0	6.556.980	0	53.835.174	0,00	96,83	0	181.815.662	nan	18,88												
10		2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus		497.297.000		110.148.838	0	15.380.700	0	0	0	4.107.350	0	6.456.344	0	4.806.980	0	15.370.674	nan	99,93	0	125.519.512	nan	25,24	DAP		kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di bidang literasi	adanya keingin tahuan masyarakat tentang literasi								
				Jumlah peserta sosialisasi budaya Baca yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Orang	325		50		30		0		0		15		15		30		100,00		80		24,62	DAP												
				Jumlah sosialisasi literasi Yang Dilaksanakan Pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kegiatan	6		2		6		0		0		3		3		6		100,00		8		133,33	DAP												
11		2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lembaga yang diberi penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Lembaga	32	155.769.000	0	0	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DAP		Sub Kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024								
				Jumlah Penggiat Yang Diberi Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	38		0		3		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00	DAP												
12		2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah aktifitas/kegiatan literasi di Perpustakaan Daerah yang melibatkan masyarakat umum yang diselenggarakan	Kali		188.334.000		17.831.650	0	28.510.040	0	0	0	24.474.800	0	985.000	0	1.750.000	0	27.209.800	nan	95,44	0	45.041.450	nan	23,92	DAP		Tidak Ada	karena adanya dukungan pimpinan dan kerjasama dari semua tim								
				Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan				18		0		18		0		0		18		100,00		18		inf		DAP												
13		2.23.02.1.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	6	121.850.000	0	0	1	11.704.700	0	170.000	1	11.084.700	0	0	0	0	1	11.254.700	100,00	96,16	1	11.254.700	16,67	9,24	DAP		Tidak Ada	karena adanya dukungan pimpinan dan kerjasama dari semua tim								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	4,49														
Predikat Kinerja																								-	SR														
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONALDAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	jumlah		2.597.230.700		78.000.000	223	231.701.850		1.156.200		54.905.670		0		153.737.288	0	209.799.158	0,00	90,55	0	287.799.158	nan	11,08													
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan	KCKR	0	670.257.700	0	16.028.500	2	12.312.500	0	0	0	11.914.970	0	0	0	4.980.000	0	16.894.970	0,00	137,22	0	32.923.470	nan	4,91													
1	2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam KCKR	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	1500	670.257.700	230	16.028.500	300	12.312.500	0	0	361	11.914.970	0	0	0	4.980.000	361	16.894.970	120,33	137,22	591	32.923.470	39,40	4,91	DAP												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								39,40	4,91														
Predikat Kinerja																								SR	SR														
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Buku	0	627.907.000	0	19.146.500	2	13.864.400	0	0	0	13.085.500	0	0	0	0	13.085.500	0,00	94,38	0	32.232.000	nan	5,13														
2	2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	0	313.500.000	1	11.764.000	250	8.777.200	0	0	250	8.255.400	0	0	0	250	8.255.400	100,00	94,06	251	20.019.400	inf	6,39	DAP													
3	2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	0	314.407.000	1	7.382.500	1	5.087.200	0	0	1	4.830.100	0	0	0	0	1	4.830.100	100,00	94,95	2	12.212.600	inf	3,88	DAP												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	3,42														
Predikat Kinerja																								-	SR														
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di alihmediakan ke digital	Naskah	0	854.760.000	0	28.092.600	2	205.524.950	0	1.156.200	0	29.905.200	0	0	0	148.757.288	0	179.818.688	0,00	87,49	0	207.911.288	nan	24,32													
4	2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	0	415.660.000	0	14.546.400	20	200.000.000	0	0	20	26.258.400	0	0	0	148.089.888	20	174.348.288	100,00	87,17	20	188.894.688	inf	45,44	DAP												
5	2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Diestarkan dan Didayagunakan	Eksemplar		439.100.000		13.546.200	0	5.524.950	0	1.156.200	0	3.646.800	0	0	0	667.400	0	5.470.400	nan	99,01	0	19.016.600	nan	4,33	DAP												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Dilestarikan dan Didayagunakan																													
			Jumlah naskah kuno dan koleksi klasik yang dialihmediakan ke digital / e-book	Naskah	75		21		5		0		5		0		5		100,00		26		34,67		DAP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	9,96						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka	Koleksi	0	444.306.000	0	14.732.400	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	14.732.400	nan	3,32					
6	2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	675	266.506.000	0		200		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0,00	0,00	DAP				
7	2.23.03.1.04.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	675	177.800.000	155	14.732.400	350		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	155	14.732.400	22,96	8,29	DAP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								2,87	1,18						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.851.459.500		1.527.058.934		1.116.672.002		65.291.788		670.306.299		160.528.154		286.761.878		1.182.888.119		105,93		2.709.947.053		21,09					
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.165.691.500		548.147.164		351.610.999		28.507.188		171.694.994		139.093.560		28.488.880		367.784.622		104,60		915.931.786		28,93					
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	%		1.805.524.850		491.402.205	72	314.174.799		24.411.088		151.717.294		128.262.060		27.290.180	0	331.680.622	0,00	105,57	0	823.082.827	nan	45,59					
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	Pencipta Arsip	0	581.658.400	0	58.996.690	10	52.927.599	0	12.535.800	0	28.640.150	0	6.740.000	0	13.960.050	0	61.876.000	0,00	116,91	0	120.872.690	nan	20,78					
1	2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas		153.236.000		13.125.500	300	12.600.000	0	6.855.100	696	5.422.000	0		0	0	696	12.277.100	232,00	97,44	696	25.402.600	inf	16,58	DAP				
			Jumlah Pencipta Arsip yang Melakukan Proses Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Peraturan Yang Telah ditetapkan	Pencipta Arsip	63		3		3		0		3		0		0		3		100,00		6		9,52		DAP		1. Belum memadai nya sarana pendukung kegiatan untuk tercapai nya target 2. SDM pengelola arsip kurang aktif dalam kegiatan	Temuan Kegiatan pengawasan kearsipan yang memotivasi SKPD untuk melaksanakan kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip sesuai standar	
2	2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		185.210.900		14.050.100	300	13.350.000	0	5.680.700	540	7.268.400	0		0	0	540	12.949.100	180,00	97,00	540	26.999.200	inf	14,58	DAP				
			Jumlah Pencipta Arsip yang Melakukan Proses Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis Sesuai Prosedur Dan Peraturan Yang Telah ditetapkan	Pencipta Arsip	63		3		3		0		3		0		0		3		100,00		6		9,52		DAP		1. Belum memadai nya sarana pendukung kegiatan untuk tercapai nya target 2. SDM pengelola arsip kurang aktif dalam kegiatan	Temuan Kegiatan pengawasan kearsipan yang memotivasi SKPD untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan peyusutan arsip sesuai standar	
3	2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Laporan		243.211.500		31.821.090	5	26.977.599	0		0	2	15.949.750	1	6.740.000	2	13.960.050	5	36.649.800	100,00	135,85	5	68.470.890	inf	28,15	DAP			
			Jumlah Pencipta Arsip Yang di Audit dan Dilakukan Monitoring Audit Hasil Pelaksanaan Audit Kearsipan Internal maupun Eksternal	Pencipta Arsip	96		5		5		0		2		1		2		5		100,00		10		10,42		DAP		Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tidak terlaksana sesuai aliran kas dikarenakan adanya perubahan objek dan formulir yang dilakukan oleh ANRI	Perka ANRI No.6 Tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan dan IKU kepala SKPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	19,77						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Akses layanan Arsip Statis	Pengguna Arsip	0	494.019.650	0	393.776.050	15	214.523.800	0		0	0	96.562.606	0	114.122.160	0	13.330.130	0	224.014.896	0,00	104,42	0	617.790.946	nan	125,05				
			Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah	Pencipta Arsip	0		0		5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah arsip statis yang dipreservasi	Daftar Arsip	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan					
4	2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Arsip	5	143.000.000	1	13.503.950	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	13.503.950	20,00	9,44	DAP			
5	2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	SKPD		351.019.650		380.272.100	3	214.523.800	0	0	2	96.562.606	1	114.122.160	0	13.330.130	3	224.014.896	100,00	104,42	3	604.286.996	inf	172,15	DAP			
				Arsip	10		2		5000		0		2000		1000		2000		5000		100,00		5002		50.020,00		DAP		Belum memadainya kemampuan SDM dalam hal preservasi arsip	Dukungan anggaran untuk pembelian peralatan dan perlengkapan pelaksanaan preservasi arsip
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	70,75					
Predikat Kinerja																								-	S					
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Simpul Jaringan	0	729.846.800	0	38.629.465	5	46.723.400	0	11.875.288	0	26.514.538	0	7.399.900	0	0	0	45.789.726	0,00	98,00	0	84.419.191	nan	11,57				
6	2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Data dan Informasi Arsip Statis yang Bisa di Akses melalui JIKN	Data entry arsip	13042	158.874.100	2000	11.427.690	2000	24.123.400	500	8.799.388	500	12.537.538	500	2.714.000	500	0	2000	24.050.926	100,00	99,70	4000	35.478.616	30,67	22,33	DAP			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	0		0		0		330		500		500		500		1830		inf		1830		inf		DAP			
			Jumlah Simpul Jaringan arsip statis yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota	Simpul Jaringan	24		6		5		2		3		0		0		5		100,00		11		45,83		DAP			
7	2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Arsiparis yang dinilai kinerjanya	Orang	290	570.972.700	40	27.201.775	50	22.600.000	0	3.075.900	50	13.977.000	0	4.685.900	0	0	50	21.738.800	100,00	96,19	90	48.940.575	31,03	8,57	DAP		- Dalam penilaian kinerja (SKP) fungsional arsiparis, khususnya bagi fungsional arsiparis hasil penyetaraan dan fungsional arsiparis melalui formasi yang baru diangkat, dalam mengajukan SKP yang akan dinilai oleh tim penilai, yang bersangkutan mengalami kendala karena belum mengerti dan paham bentuk pekerjaan yang akan dituangkan ke dalam SKP/DUPNK - Dalam pelaksanaan pemakaian/ penerapan aplikasi SRIKANDI, operator yang telah ditunjuk masih memerlukan pelatihan lanjutan karena belum memahami sepenuhnya pengoperasian aplikasi SRIKANDI tersebut	- Permenpan No. 1 Tahun 2023, Perka BKN No. 11 Tahun 2022 dan Perka ANR No. 23 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis yang merupakan pedoman penyusunan kinerja fungsional. Pedoman tersebut perlu disampaikan dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Sosialisasi - Operator SRIKANDI yang telah di tunjuk masih memerlukan pelatihan lanjutan atau coaching clinic
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	5		1		1		0		1		0		0		1		100,00		2		40,00		DAP			
			Jumlah Lembaga Kearsipan yang dibina	Lembaga Kearsipan	24		7		4		0		3		0		0		3		75,00		10		41,67		DAP			
			Jumlah SDM Kearsipan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0		0		50		0		5		0		0		5		10,00		5		inf		DAP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	4,41					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	%		1.109.247.650		56.744.959	76.66	37.436.200		4.096.100		19.977.700		10.831.500		1.198.700	0	36.104.000	0,00	96,44	0	92.848.959	nan	8,37				
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip diilindungi	Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan	Pencipta Arsip	0	416.955.750	0	13.576.560	12	12.974.000	0	4.096.100	0	2.259.000	0	6.195.500	0	0	0	12.550.600	0,00	96,74	0	26.127.160	nan	6,27				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun																												
1	2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		416.955.750		13.576.560	200	12.974.000	0	4.096.100	277	2.259.000	0	6.195.500	0		0	277	12.550.600	138,50	96,74	277	26.127.160	inf	6,27	DAP			
			Jumlah Pencipta Arsip yang melakukan penilaian dan penetapan arsip yang akan dimusnahkan yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pencipta Arsip	60		3		3		0		3		0		0		3		100,00		6		10,00		DAP		1. Belum memadai nya sarana pendukung kegiatan untuk tercapai nya target 2. SDM pengelola arsip kurang aktif dalam kegiatan	Temuan Kegiatan pengawasan kearsipan yang memotivasi SKPD untuk melaksanakan kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip sesuai standar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	6,27							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan	Kali	0	353.381.950	0	14.041.054	9	14.296.000	0	0	0	8.418.600	0	4.636.000	0	592.600	0	13.647.200	0,00	95,46	0	27.688.254	nan	7,84					
2	2.24.03.1.02.01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		209.467.050		14.041.054	0	14.296.000	0	0	0	8.418.600	0	4.636.000	0	592.600	0	13.647.200	nan	95,46	0	27.688.254	nan	13,22	DAP				
			Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan dalam Rangka Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kali	53		7		7		0		4		2		1		7		100,00		14		26,42		DAP		Adanya bentrok jadwal pelaksanaan sub kegiatan dengan instansi yang dituju	Ada negosiasi pengaturan ulang jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan	
3	2.24.03.1.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	0	143.914.900	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	DAP		Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini belum tersedia pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	4,41							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan	OPD	0	162.356.850	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00					
4	2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Pencipta Arsip yang dilakukan Survey/Pendataan, Pembuatan Daftar dan Penilaian Serta Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Pencipta Arsip	28	162.356.850	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DAP		Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini belum tersedia pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,00	0,00							
Predikat Kinerja																							SR	SR							
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis	Daftar Arsip	0	176.553.100	0	29.127.345	6	10.166.200	0	0	0	9.300.100	0		0	606.100	0	9.906.200	0,00	97,44	0	39.033.545	nan	22,11					
5	2.24.03.1.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Yang Dinilai Dan Ditetapkan Autentisitasnya Sesuai Syarat Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	1800	84.515.650	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DAP		Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini belum tersedia pada tahun 2023	Dianggarkan pada tahun 2024	
6	2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Hasil Alihmedia Yang Dinilai Dan Ditetapkan Autentitasnya Sesuai Syarat Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	1800	92.037.450	5000	29.127.345	3000	10.166.200	0	0	1500	9.300.100	1500	0	0	606.100	3000	9.906.200	100,00	97,44	8000	39.033.545	444,44	42,41	DAP		Kelengkapan peralatan pendukung pelaksanaan pekerjaan belum memadai	Memanfaatkan peralatan yang ada	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							55,56	7,07							
Predikat Kinerja																							R	SR							
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	regulasi		250.919.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00					
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	SOP	0	250.919.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00					
1	2.24.04.1.01.01	Penyusunan dan Penerapan SOP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP	6	250.919.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DAP	belum menjadi			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%						(16)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										0,00	0,00				
Predikat Kinerja																										SR	SR				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				84.255.000.000		32.896.349.381		91.790.491.403		6.210.687.769		15.053.960.622		44.403.458.722	0	65.668.107.113	71,54		98.564.456.494		116,98				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				54.700.000.000		22.835.796.100		27.085.651.298		4.002.883.522		8.895.654.359		8.638.833.434	0	21.537.371.315	79,52		44.373.167.415		81,12				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				54.700.000.000		22.835.796.100		27.085.651.298		4.002.883.522		8.895.654.359		8.638.833.434	0	21.537.371.315	79,52		44.373.167.415		81,12				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				51.100.000.000		22.737.823.060	0	27.085.651.298		4.002.883.522		8.895.654.359		8.638.833.434	0	21.537.371.315	nan	79,52	0	44.275.194.375	nan	86,64			
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	725.000.000	0	353.400.092	0	522.301.342	0	55.145.000	0	108.237.260	0	156.799.732	0	0	320.181.992	nan	61,30	0	673.582.084	nan	92,91		
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	375.000.000	9	145.564.360	0	174.301.342	0	23.184.000	0	79.169.660	0	55.178.500	0	0	157.532.160	nan	90,38	9	303.096.520	225,00	80,83	DKP	
			Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Dokumen	0		0		1		0		0		0		0	0	0,00	0		nan		DKP			
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKA, DPA Murni, RKA Pergeseran, DPA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Perubahan)	Dokumen	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DKP		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0		0		6	0		0		0		0		0	0,00	0		nan		DKP			
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	350.000.000	5	48.796.800	0	348.000.000	0	31.961.000	0	29.067.600	0	101.621.232	0	0	162.649.832	nan	46,74	5	211.446.632	166,67	60,41	DKP	
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Dokumen	0		0		6	0		0		0		0		0	0,00	0		nan		DKP			
			Tersedianya Laporan Kinerja	Dokumen	0		0		6	0		0		0		0		0	0,00	0		nan		DKP			
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	0	4	159.038.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	4	159.038.932	28,57	inf	DKP		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Dokumen	0		0		4	0		0		0		0		0	0,00	0		nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan						
Predikat Kinerja																				-	-						
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	24.050.000.000	0	15.469.181.963	0	17.372.089.924	0	2.929.283.876	0	6.538.536.866	0	4.804.061.647	0	0	14.271.882.389	nan	82,15	0	29.741.064.352	nan	123,66		
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	22.000.000.000	198	14.469.817.287	198	16.581.779.224	0	2.843.108.176	0	6.328.012.066	0	4.610.168.447	0	0	13.781.288.689	0,00	83,11	198	28.251.105.976	1.650,00	128,41	DKP	
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.200.000.000	0	619.376.000	0	723.987.500	0	57.033.500	0	182.566.000	0	190.937.500	0	0	430.537.000	nan	59,47	0	1.049.913.000	0,00	87,49	DKP	
			Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	Orang	0				42	0		0		0		0		0	0,00	0		nan		DKP			
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DKP		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV		(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12						(15) = 14/5 * 100%								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																											
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	425.000.000	1	253.462.839	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	nan	1	253.462.839	8,33	59,64	DKP					
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0 0	0	0	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	nan	0	0	nan	nan	DKP					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	425.000.000	2	126.525.837	2	66.323.200	0	29.142.200	0	27.958.800	0	2.955.700	0 0	60.056.700	0,00	90,55	2	186.582.537	16,67	43,90	DKP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0 0	0	0	0 0	386.857.000	0	33.985.400	0	254.495.888	0	77.746.800	0 0	366.228.088	nan	94,67	0	366.228.088	nan	inf						
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0 0	0	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	nan	0	0	nan	nan	DKP						
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0 0	0	21	189.400.000	0	0 0	183.864.633	0	900.000	0 0	184.764.633	0,00	97,55	0	184.764.633	nan	inf	DKP							
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0 0	0	1	65.340.000	0	810.500	0	55.647.790	0	4.115.800	0 0	60.574.090	0,00	92,71	0	60.574.090	nan	inf	DKP						
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0 0	0	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	nan	0	0	nan	nan	DKP						
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0 0	0	1	132.117.000	0	33.174.900	0	14.983.465	0	72.731.000	0 0	120.889.365	0,00	91,50	0	120.889.365	nan	inf	DKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	530.000.000	0	143.547.000	0	255.663.500	0	178.985.000	0	0 0	12.500.000	0 0	0	191.485.000	nan	74,90	0	335.032.000	nan	63,21						
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	155	350.000.000	150	112.035.000	150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	nan	150	112.035.000	96,77	32,01	DKP						
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0 0	0	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	nan	0	0	nan	nan	DKP						
18	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	90.000.000	0	0	160	218.263.500	0	178.985.000	0	0 0	0 0	0 0	178.985.000	0,00	82,00	0	178.985.000	0,00	198,87	DKP						
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0 0	0	160	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	nan	0	0	nan	nan	DKP						
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	30	90.000.000	10	31.512.000	15	37.400.000	0	0 0	0 0	0 0	12.500.000	0 0	12.500.000	0,00	33,42	10	44.012.000	33,33	48,90	DKP						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Peraturan Perundang-Undangan																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan							
Predikat Kinerja																						-	-							
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	6.640.000.000	0	1.120.805.360	0	2.914.981.540	0	356.212.416	0	676.445.752	0	1.128.703.245	0	0	0	2.161.361.413	nan	74,15	0	3.282.166.773	nan	49,43				
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	160.000.000	10	39.208.158	12	50.000.000	0	0	0	10.821.700	0	28.289.800	0	0	0	39.111.500	0,00	78,22	10	78.319.658	83,33	48,95	DKP			
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.370.000.000	0	0	14	180.000.000	0	0	0	0	0	175.354.200	0	0	0	175.354.200	0,00	97,42	0	175.354.200	0,00	12,80	DKP			
23	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	1.370.000.000	12	140.726.850	10	130.408.000	0	0	0	70.400.000	0	9.990.000	0	0	0	80.390.000	0,00	61,64	12	221.116.850	100,00	16,14	DKP			
24	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12	500.000.000	12	236.317.800	0	164.813.740	0	50.997.100	0	31.192.800	0	78.790.200	0	0	0	160.980.100	nan	97,67	12	397.297.900	100,00	79,46	DKP			
25	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	250.000.000	12	79.627.800	1	84.700.000	0	3.710.000	0	17.705.000	0	16.255.500	0	0	0	37.670.500	0,00	44,48	12	117.298.300	100,00	46,92	DKP			
26	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	250.000.000	8	17.340.000	1	35.000.000	0	2.900.000	0	5.450.000	0	6.160.000	0	0	0	14.510.000	0,00	41,46	8	31.850.000	66,67	12,74	DKP			
27	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.370.000.000	12	607.584.752	1	2.270.059.800	0	298.605.316	0	540.876.252	0	813.863.545	0	0	0	1.653.345.113	0,00	72,83	12	2.260.929.865	100,00	165,03	DKP			
28	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	1.370.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						16,18	13,64							
Predikat Kinerja																						SR	SR							
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	11.650.000.000	0	1.098.630.904	0	255.072.500	0	0	0	46.848.000	0	170.203.000	0	0	0	217.051.000	nan	85,09	0	1.315.681.904	nan	11,29				
29	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	3.600.000.000	1	302.000.000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	302.000.000	100,00	8,39	DKP				
30	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	50	850.000.000	1	327.552.400	25	199.224.500	0	0	0	0	0	161.489.500	0	0	0	161.489.500	0,00	81,06	1	489.041.900	2,00	57,53	DKP			
31	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.600.000.000	1	248.552.400	17	55.848.000	0	0	0	46.848.000	0	8.713.500	0	0	0	55.561.500	0,00	99,49	1	304.113.900	100,00	8,45	DKP			
32	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP				
33	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.600.000.000	1	220.526.104	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	220.526.104	100,00	6,13	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan							
Predikat Kinerja																						-	-							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	5.380.000.000	0	4.134.967.054	0	4.714.488.992	0	443.652.830	0	1.161.965.540	0	1.985.506.502	0	0	0	3.591.124.872	nan	76,17	0	7.726.091.926	nan	143,61				
34	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	80.000.000	400	4.871.000	1	10.000.000	0	2.500.000	0	876.000	0	2.975.100	0	0	0	6.351.100	0,00	63,51	400	11.222.100	3.333,33	14,03	DKP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
35	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.400.000.000	12	1.629.879.267	1	2.008.267.108	0	431.902.830	0	471.246.021	0	677.872.116	0	0	1.581.020.967	0,00	78,73	12	3.210.900.234	100,00	133,79	DKP					
36	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.900.000.000	12	2.500.216.787	71	2.696.221.884	0	9.250.000	0	689.843.519	0	1.304.659.286	0	0	2.003.752.805	0,00	74,32	12	4.503.969.592	100,00	155,31	DKP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	2.125.000.000	0	417.290.687	0	664.196.500	0	5.619.000	0	109.125.053	0	303.312.508	0	0	0	418.056.561	nan	62,94	0	835.347.248	nan	39,31					
38	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	600.000.000	18	0	30	267.900.000	0	1.844.000	0	97.625.053	0	93.895.045	0	0	0	193.364.098	0,00	72,18	18	193.364.098	100,00	32,23	DKP				
39	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1	375.000.000	0	0	0	74.430.000	0	3.450.000	0	4.825.000	0	13.315.000	0	0	21.590.000	nan	29,01	0	21.590.000	0,00	5,76	DKP					
40	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	400.000.000	1	313.516.537	4	221.866.500	0	0	0	0	0	186.627.463	0	0	186.627.463	0,00	84,12	1	500.144.000	100,00	125,04	DKP					
41	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	375.000.000	1	57.842.150	0	100.000.000	0	325.000	0	6.675.000	0	9.475.000	0	0	16.475.000	nan	16,48	1	74.317.150	100,00	19,82	DKP					
42	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	375.000.000	1	45.932.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	45.932.000	100,00	12,25	DKP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							8,33	4,64							
Predikat Kinerja																							SR	SR							
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				29.555.000.000		10.060.553.281		64.704.840.105		2.207.804.247		6.158.306.263		35.764.625.288		0		44.130.735.798		68,20		54.191.289.079		183,36					
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				29.555.000.000		10.060.553.281		64.704.840.105		2.207.804.247		6.158.306.263		35.764.625.288		0		44.130.735.798		68,20		54.191.289.079		183,36					
3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIRDAN PULAU-PULAU KECIL				7.715.000.000		1.597.648.426	0	8.614.106.124		252.422.540		1.079.499.187		4.730.600.934		0	0	6.062.522.661	nan	70,38	0	7.660.171.087	nan	99,29					
3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			0	3.900.000.000	0	980.523.335	0	7.390.909.500	0	168.284.540	0	892.500.137	0	3.845.507.934	0	0	0	4.906.292.611	nan	66,38	0	5.886.815.946	nan	150,94					
1	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat [UPTD KPSPDKP]	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha		0		0	0	6.704.912.000	0	151.544.540	0	849.178.137	0	3.402.094.934	0	0	0	4.402.817.611	nan	65,67	0	4.402.817.611	nan	inf	DKP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K		Rp				
2	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pengawasan pulau-pulau kecil begi pelaku usaha yang bergerak di Bidang wisata bahari	Kali	7	400.000.000	10	49.023.500	10	50.420.000	0	0	0	0	30.598.000	0	0	0	30.598.000	0,00	60,69	10	79.621.500	142,86	19,91	DKP			
3	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	7	2.600.000.000	0	512.402.333	0	454.693.000	0	7.690.000	0	17.868.500	0	271.570.000	0	0	297.128.500	nan	65,35	0	809.530.833	0,00	31,14	DKP			
			Terlaksananya Penanaman Mangrove	Batang	0		11500		13300		0		0		0			0		0,00	11500		inf		DKP				
			Terlaksananya transplantasi Terumbu Karang	Unit	0		0		115		0		0		0			0		0,00	0		nan		DKP				
4	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	0	900.000.000	0	419.097.502	0	180.884.500	0	9.050.000	0	25.453.500	0	141.245.000	0	0	175.748.500	nan	97,16	0	594.846.002	nan	66,09	DKP			
			Terlaksananya Penanaman Cemara Laut	Batang	7000		2450		1230		0		0		0			0		0,00	2450		35,00		DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			0	3.815.000.000	0	617.125.091	0	1.223.196.624	0	84.138.000	0	186.999.050	0	885.093.000	0	0	1.156.230.050	nan	94,53	0	1.773.355.141	nan	46,48				
5	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	7	2.800.000.000	0	308.125.850	0	1.001.285.024	0	32.218.000	0	144.535.850	0	792.353.800	0	0	969.107.650	nan	96,79	0	1.277.233.500	0,00	45,62	DKP			
			Terlaksananya kebersihan dan keindahan wilayah pesisir melalui Bersih Pantai	Kali	0		1		1		0		0		0			0		0,00	1		inf		DKP				
			Terlaksananya pelatihan forum perempuan pesisir	Kali	0		1		1		0		0		0			0		0,00	1		inf		DKP				
			Terlaksananya pembangunan tracking mangrove	Unit	0		1		1		0		0		0			0		0,00	1		inf		DKP				
			Terlaksananya pemilihan Putra Putri Maritim Tingkat Provinsi	Kali	0		1		1		0		0		0			0		0,00	1		inf		DKP				
6	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok		425.000.000		179.827.041	0	107.418.000	0	0	0	27.909.500	0	67.892.900	0	0	95.802.400	nan	89,19	0	275.629.441	nan	64,85	DKP			
			Terlaksananaya Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Nelayan	KUB	7		10		15		0		0		0			0		0,00	10		142,86		DKP				
			Terlaksananya Pertemuan Forum Koordinasi Mitra Konservasi	Kali	7		1		1		0		0		0			0		0,00	1		14,29		DKP				
7	3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	7	590.000.000	0	129.172.200	0	114.493.600	0	51.920.000	0	14.553.700	0	24.846.300	0	0	91.320.000	nan	79,76	0	220.492.200	0,00	37,37	DKP			
			Peraturan Gubernur	Peraturan	0		1		1		0		0		0			0		0,00	1		inf		DKP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
			Terlaksananya pelatihan penangkapan ikan bagi nelayan	Orang	0	50	50	0	0	0		0	0,00	50	inf	DKP											
			terlaksananya Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kali	0	1	1	0	0	0		0	0,00	1	inf	DKP											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	21,12										
Predikat Kinerja																-	SR										
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANBUDIDAYA			10.190.000.000	2.824.026.654	0	12.069.181.764	375.270.679	726.641.097	6.130.916.101	0	0	7.232.827.877	nan	59,93	0	10.056.854.531	nan	98,69							
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0	250.000.000	0	60.231.850	0	72.036.600	0	0	0	14.197.800	nan	19,71	0	74.429.650	nan	29,77							
1	3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	250.000.000	0	60.231.850	0	72.036.600	0	0	0	14.197.800	nan	19,71	0	74.429.650	nan	29,77	DKP						
			Terlaksananya sosialisasi perizinan terhadap pembudidaya serta peraturan perundang-undangan yang baru	Org	90	3	60	0	0	0		0	0,00	3	3,33	DKP											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	29,77										
Predikat Kinerja																-	SR										
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			0	9.940.000.000	0	2.763.794.804	0	11.997.145.164	0	375.270.679	0	726.641.097	6.116.718.301	0	0	7.218.630.077	nan	60,17	0	9.982.424.881	nan	100,43			
2	3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD BPBALP]	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		0	0	484.440.600	0	3.551.400	0	33.132.000	0	438.723.200	0	0	475.406.600	nan	98,14	0	475.406.600	nan	inf	DKP			
3	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan teknis budidaya ikan	Angkatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DKP				
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui pelatihan teknis	Angkatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP								
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pembuiddaya ikan melalui pelatihan tekni budidaya nila dan lele	Angkatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP									
			Tersalurnya benih gurami	Ekor	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP										
			Tersalurnya benih ikan mas	Ekor	0	0	100000	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP											
			Tersalurnya benih lele	Ekor	0	0	150000	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP											
			Tersalurnya benih nila	Ekor	0	0	250000	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP											
			Tersalurnya calon induk nila	Ekor	0	0	10800	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP											
			Tersalurnya induk gurame	Kg	0	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DKP											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Tersalurnya induk lele	Kg	0		0		600		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Tersalurnya induk mas	Kg	0		0		1000		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
4	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	5	2.750.000.000	1	1.551.604.448	0	1.204.830.400	0	7.835.000	0	29.964.425	0	129.511.900	0	0	167.311.325	nan	13,89	1	1.718.915.773	20,00	62,51	DKP			
5	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD BPBALP]	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		0		0	0	887.412.900	0	40.246.000	0	91.872.500	0	542.685.350	0	0	674.803.850	nan	76,04	0	674.803.850	nan	inf	DKP			
6	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD KPSPDKP]	Terlaksananya rehabilitasi pagar Singkarak	Unit		0		0	1	571.946.000	0	30.405.115	0	124.276.212	0	280.826.390	0	0	435.507.717	0,00	76,14	0	435.507.717	nan	inf	DKP			
			Terlaksananay rehabilitasi mess/pos jaga Singkarak	Unit					3		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Terlaksananya perlindungan dan pelestarian spesies jenis ikan endemik perairan umum, sungai dan danau	Kegiatan					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Tersedianya pelataran parkir konservasi jenis ikan Sicincin	Paket					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Terlaksananya restocking	Ekor					300000		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Terlaksananya rehabilitasi hatchery Singkarak	Unit					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Terlaksananya pengadaan pompa dan instalasi pipa	Paket					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Tersedianya belanja induk/calon induk ikan	Kg					600		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
7	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan teknis budidaya udang vaname	Angkatan	0	0	6	753.759.604	1	7.958.272.769	0	177.877.664	0	293.896.460	0	4.404.332.761	0	0	4.876.106.885	0,00	61,27	6	5.629.866.489	inf	inf	DKP			
			Terlaksananya bantuan ikan nila untuk kegiatan TMMN	Ekor	0		12000		120000		0		0		0		0		0,00		12000		inf		DKP				
			Terlaksananya budidaya rumput laut	Paket	0		700		1		0		0		0		0		0,00		700		inf		DKP				
			Terlaksananya paket bantuan budidaya udang vaname dan percontohan budidaya lobster	Kgtn	0		1		1		0		0		0		0		0,00		1		inf		DKP				
			Terlaksananya pembinaan, penilaian kelembagaan BBI , Pokdakan dan UPR	Kab/Kota	0		1		18		0		0		0		0		0,00		1		inf		DKP				
			Terlaksananya pertemuan pengelola BBI se Sumatera Barat	Angkatan	0		0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
8	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	19	690.000.000	0	193.481.800	0	285.670.295	0	23.796.500	0	22.053.500	0	151.439.800	0	0	0	197.289.800	nan	69,06	0	390.771.600	0,00	56,63	DKP				
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan OIKB	kab/Kota	0		7		16		0		0		0		0		0,00	7		inf	DKP								
			Terlaksananya pembinaan dan pengendalian HPI	kab/Kota	0		14		18		0		0		0		0		0,00	14		inf	DKP								
			Terlaksananya pengujian sampel air	kab/Kota	0		6		8		0		0		0		0		0,00	6		inf	DKP								
			Terlaksananya temu teknis HPI	Angkatan	0		0		1		0		0		0		0		0,00	0		nan	DKP								
			Terlaksananya Pengadaan Obat,Vitamin Probiotik pada Ikan	Kab/Kota	0		1		16		0		0		0		0		0,00	1		inf	DKP								
9	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi [UPTD BPBALP]	Terlaksananya pelatihan/magang teknis/pembenihan ikan kerapu hybrid, bawal bintang, kakap putih dan udang vaname	Orang		0		0	12	419.104.500	0	44.624.000	0	77.931.000	0	105.908.000	0	0	0	228.463.000	0,00	54,51	0	228.463.000	nan	inf	DKP				
			Terlaksananya pelatihan/bimbingan teknis budidaya ikan laut dan payau (Lobster, kepiting bakau dan udang vaname)	Angkatan					2		0		0		0		0		0,00	0		nan	DKP								
10	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan penilaian sertifikasi CBIB	Unit	0	6.500.000.000	8	264.948.952	100	185.467.700	0	46.935.000	0	53.515.000	0	63.290.900	0	0	0	163.740.900	0,00	88,29	8	428.689.852	inf	6,60	DKP				
			Terlaksananya temu teknis budidaya ikan yang baik	Angkatan	0		0		6		0		0		0		0		0,00	0		nan	DKP								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PERIKANAN				6.900.000.000		4.200.512.599	0	5.455.846.014		292.439.690		1.496.494.920		1.965.603.069		0	0	3.754.537.679	nan	68,82	0	7.955.050.278	nan	115,29					
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0	2.100.000.000	0	635.551.978	0	1.352.628.400	0	61.899.720	0	262.272.300	0	243.019.660	0	0	0	567.191.680	nan	41,93	0	1.202.743.658	nan	57,27					
1	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan peningkatan permodalan pelaku usaha	Kali	0	2.100.000.000	6	635.551.978	5	1.352.628.400	0	61.899.720	0	262.272.300	0	243.019.660	0	0	0	567.191.680	0,00	41,93	6	1.202.743.658	inf	57,27	DKP				
			Terlaksananya pameran promosi tingkat Provinsi dan Nasional (Sumbar Expo, Bazar Pasar Murah, Bazar Hari Makan	Event	19		3		8		0		0		0		0		0,00	3		15,79	DKP								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Ikan, Gemarikan, Seafood Expo, Festival Kuliner, Partisipasi PENAS Tani, Pameran Tkt Nasional)																											
			Terlaksananya penyiaran informasi harga ikan di media elektronik	Kali	0		1		40		0		0		0			0		0,00		1		inf		DKP				
			Terlaksananya pertemuan petugas data pengolahan	Kali	0		0		2		0		0		0			0		0,00		0		nan		DKP				
			Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sarana pasar ikan	Kali	0		1		2		0		0		0			0		0,00		1		inf		DKP				
			Terlaksananya temu bisnis investasi sektor kelautan	Kali	0		0		1		0		0		0			0		0,00		0		nan		DKP				
			Terlaksananya temu petugas informasi pasar	Kali	0		0		2		0		0		0			0		0,00		0		nan		DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	57,27						
Predikat Kinerja																							-	R						
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			0	2.500.000.000	0	1.037.225.639	0	1.782.013.000	0	185.701.650	0	385.686.420	0	883.378.912	0	0	0	1.454.766.982	nan	81,64	0	2.491.992.621	nan	99,68				
2	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar [UPTD PPMHP]	Tersedianya pengadaan alat laboratorium : Centrifuge With Rotor A12-10P	Unit		0		0	1	166.368.700	0	2.864.600	0	0	0	163.056.500	0	0	0	165.921.100	0,00	99,73	0	165.921.100	nan	inf	DKP			
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DKP				
			Tersedianya pengadaan alat laboratorium : Manual Colony Counter	Unit				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
			Tersedianya pengadaan alat laboratorium : Organoleptik Bench	Unit				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP				
3	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya diversifikasi pengolahan	Kali	6	900.000.000	125	347.810.589	10	379.383.000	0	4.560.000	0	103.344.484	0	188.279.610	0	0	0	296.184.094	0,00	78,07	125	643.994.683	2.083,33	71,55	DKP			
4	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya pelatihan pembina mutu	Kali	19	1.600.000.000	0	689.415.050	1	746.236.300	0	113.404.900	0	111.431.754	0	333.400.782	0	0	0	558.237.436	0,00	74,81	0	1.247.652.486	0,00	77,98	DKP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Terlaksananya pelatihan GMP/SSOP bagi petugas	Kali	0	0	1	0	0	0		0		0	0,00	0	nan		DKP										
			Terlaksananya pelatihan produk non konsumsi	Kali	0	4	1	0	0	0		0		0	0,00	4	inf		DKP										
			Terlaksananya peningkatan kapasitas KKMB/pendamping usaha kelautan perikanan	Kali	0	5	2	0	0	0		0		0	0,00	5	inf		DKP										
5	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing [UPTD PPMHP]	Tersedianya bahan kimia pengujian mutu PPMHP	Paket		0	0	1	490.025.000	0	64.872.150	0	170.910.182	0	198.642.020	0	0	434.424.352	0,00	88,65	0	434.424.352	nan	inf	DKP				
			Terlaksananya opearsonal Laboratorium	Bulan				12	0	0	0		0		0	0,00	0	nan		DKP									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	inf												
Predikat Kinerja																-	-												
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0	2.300.000.000	0	2.527.734.982	0	2.321.204.614	0	44.838.320	0	848.536.200	0	839.204.497	0	0	1.732.579.017	nan	74,64	0	4.260.313.999	nan	185,23				
6	3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Forum peningkatan konsumsi ikan (Lomba Forikan Nagari/kelurahan, Sosialisasi manfaat makan ikan, Rakor Forikan)	Kali	19	2.300.000.000	6	2.527.734.982	3	2.321.204.614	0	44.838.320	0	848.536.200	0	839.204.497	0	0	1.732.579.017	0,00	74,64	6	4.260.313.999	31,58	185,23	DKP			
			Terlaksananya kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Lomba masak serba ikan, Peringatan hari Makan Ikan, Lomba masak serba ikan Tingkat Nasional)	Event	0	6	3	0	0	0		0		0	0	0,00	6	inf		DKP									
			Terlaksananya pembinaan ke daerah stunting	Lokasi	0	0	3	0	0	0		0		0	0	0,00	0	nan		DKP									
			Terlaksananya rehab UPI	Unit	0	0	1	0	0	0		0		0	0	0,00	0	nan		DKP									
			Terlaksananya workshop penghitungan angka konsumsi ikan	Kali	0	0	1	0	0	0		0		0	0	0,00	0	nan		DKP									
			Tersedianya sarana pemasaran hasil perikanan (SPG Roda 3 = 2 Unit, Fish box uk 100 ltr = 85 unit)	Unit	0	25	87	0	0	0		0		0	0	0,00	25	inf		DKP									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	30,87												
Predikat Kinerja																-	SR												
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN				750.000.000		497.736.644	0	6.559.131.259		341.445.906		606.731.770		3.011.285.444		0	0	3.959.463.120	nan	60,37	0	4.457.199.764	nan	594,29			
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			0	750.000.000	0	497.736.644	0	6.115.078.209	0	336.733.906	0	550.706.770	0	2.945.793.740	0	0	0	3.833.234.416	nan	62,68	0	4.330.971.060	nan	577,46			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya FGD RPZ Kab. Agam	Kali	7	750.000.000	1	497.736.644	1	97.674.000	0	1.440.000	0	17.359.250	0	16.284.100	0	0	35.083.350	0,00	35,92	1	532.819.994	14,29	71,04	DKP				
			Terlaksananya konsultasi teknik RPZ Kab. Agam ke Pusat	Kali	0		1		1		0		0		0		0		0,00		1		inf		DKP					
			Terlaksananya rapat POKJA Penyusunan RPZ Kab. Agam	Kali	0		4		1		0		0		0		0		0,00		4		inf		DKP					
			Tersusunya dokumen RPZ Kab. Agam	Dokumen	0		1		1		0		0		0		0		0,00		1		inf		DKP					
2	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen		0		0	0	783.583.601	0	102.110.226	0	104.400.600	0	193.058.650	0	0	399.569.476	nan	50,99	0	399.569.476	nan	inf	DKP				
3	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen		0		0	0	4.827.470.608	0	228.853.680	0	412.996.920	0	2.574.638.990	0	0	3.216.489.590	nan	66,63	0	3.216.489.590	nan	inf	DKP				
			Terlaksananya forum koordinasi tindak pidana perikanan tingkat Kab/Kota	Kali					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP					
			Terlaksananya forum koordinasi tindak pidana perikanan tingkat Provinsi	Kali					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP					
			Terlaksananya pengadaan kapal pengawas	Unit					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP					
			Terlaksananya pengawasan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Hari					330		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP					
			Terlaksananya penyidikan tindak pidana perikanan	Berkas					2		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP					
4	3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok		0		0	0	406.350.000	0	4.330.000	0	15.950.000	0	161.812.000	0	0	182.092.000	nan	44,81	0	182.092.000	nan	inf	DKP				
			Terlaksananya pembinaan dan pertemuan forum koordinasi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Tingkat Porvinsi Sumatera Barat	Kali					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP					
			Terlaksananya pengadaan perlengkapan Pokmaswas	Unit					162		0		0		0		0		0,00		0		nan		DKP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0		0	0	0	0	444.053.050	0	4.712.000	0	56.025.000	0	65.491.704	0	0	126.228.704	nan	28,43	0	126.228.704	nan	inf				
5	3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan dan cacing sutra	Angkatan		0		0	1	444.053.050	0	4.712.000	0	56.025.000	0	65.491.704	0	0	126.228.704	0,00	28,43	0	126.228.704	nan	inf	DKP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya																												
			Terlaksananya pemantauan peredaran benih di Sumatera Barat	Kab/Kota					18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP						
			Terlaksananya proses sertifikasi CBIB	Unit					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP						
			Tersalurnya bantuan apartemen cacing sutra	Unit					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf							
Predikat Kinerja																						-	-							
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANTANGKAP				0		0	0	32.006.574.944	524.638.231	1.407.474.496	19.926.219.740		0	0	21.858.332.467	nan	68,29	0	21.858.332.467	nan	inf							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		0	0	0		0	0	26.855.522.194	106.332.900	597.156.827	17.923.961.993	0	0	0	18.627.451.720	nan	69,36	0	18.627.451.720	nan	inf							
1	3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Dokumen		0		0	1	37.548.000	0	0	0	0	20.470.603	0	0	20.470.603	0,00	54,52	0	20.470.603	nan	inf	DKP					
2	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD PPW II]	Terlaksananya pembangunan jalan kompleks pasir baru	Unit		0		0	1	3.590.792.500	24.467.500	109.792.349	1.336.754.879	0	0	0	1.471.014.728	0,00	40,97	0	1.471.014.728	nan	inf	DKP						
			Terlaksananya pembangunan tempat ibadah	Unit					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP							
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	DKP							
3	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD PPW III]	Terlaksananya pengadaan perahu tempel	Unit		0		0	1	1.688.904.650	0	0	0	110.874.600	0	924.789.477	0	0	1.035.664.077	0,00	61,32	0	1.035.664.077	nan	inf	DKP				
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	DKP							
			Terlaksananya pembangunan jalan lingkung	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP							
			Terlaksananya pengadaan alat bantu cetakan es/aki tator	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP							
			Terlaksananya pengadaan standing AC	Paket					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP							
			Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung PPW III	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP							
			Terlaksananya pengadaan pompa air	Unit					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP							
4	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD PPW I]	Terlaksananya pembangunan dermaga PPI Surantih	Unit		0		0	1	895.566.344	10.748.000	56.159.650	203.943.200	0	0	0	270.850.850	0,00	30,24	0	270.850.850	nan	inf	DKP						
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	DKP							
			Terlaksananya pembangunan balai pertemuan nelayan PPI Surantih	Unit					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	DKP							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
5	3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit		0		0	0	20.642.710.700	0	71.117.400	0	320.330.228	0	15.438.003.834	0	0	0	15.829.451.462	nan	76,68	0	15.829.451.462	nan	inf	DKP				
			Tersedianya mesin kapal perikanan	Unit					37		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersedianya mesin kapal perikanan (mesin tempel 15 PK)	Unit					480		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersedianya mesin kapal perikanan (mesin tempel 40 PK)	Unit					52		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersedianya mesin kapal perikanan (mesin tempel 8 PK)	Unit					12		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersedianya mesin longtail 8,5 PK	Unit					30		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersedianya sarana alat tangkap gillnet bagi nelayan	Unit					104		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			0		0	0	0	0	2.312.575.920	0	27.355.030	0	105.714.925	0	1.013.626.300	0	0	0	1.146.696.255	nan	49,59	0	1.146.696.255	nan	inf				
6	3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit		0		0	0	2.312.575.920	0	27.355.030	0	105.714.925	0	1.013.626.300	0	0	0	1.146.696.255	nan	49,59	0	1.146.696.255	nan	inf	DKP				
			Terlaksananya pelestarian sumberdaya perairan umum (Reservat)	Unit					2		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum	Ekor					300000		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersalurnya sarana penangkapan bagi perairan umum (Gillnet) Maninjau dan Singkarak	Unit					195		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersalurnya sarana penangkapan bagi perairan umum (mesin longtial 8,5 PK)	Unit					50		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
			Tersalurnya sarana penangkapan bagi perairan umum (mesin tempel 2,5 PK)	Unit					105		0		0		0			0		0,00		0			nan		DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			0		0	0	0	0	177.209.850	0	8.730.000	0	84.129.500	0	43.964.200	0	0	0	136.823.700	nan	77,21	0	136.823.700	nan	inf				
7	3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			0		0	0	74.435.100	0	7.980.000	0	42.292.800	0	8.724.200	0	0	0	58.997.000	nan	79,26	0	58.997.000	nan	inf	DKP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
										I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perizinan Kapal Perikanan	Orang					150		0		0		0			0			0,00		0		nan		DKP			
8	3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi		0		0	80	102.774.750	0	750.000	0	41.836.700	0	35.240.000	0	0	0	77.826.700	0,00	75,73	0	77.826.700	nan	inf	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			0		0	0	0	0	2.661.266.980	0	382.220.301	0	620.473.244	0	944.667.247	0	0	0	1.947.360.792	nan	73,17	0	1.947.360.792	nan	inf			
9	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW I]	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Bulan		0		0	12	776.747.870	0	96.857.750	0	177.627.363	0	263.108.229	0	0	0	537.593.342	0,00	69,21	0	537.593.342	nan	inf	DKP			
10	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW II]	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan		0		0	0	1.386.191.760	0	185.622.451	0	344.677.281	0	543.670.018	0	0	0	1.073.969.750	nan	77,48	0	1.073.969.750	nan	inf	DKP			
			Terlaksananya fungsi dan operasional pelabuhan perikanan Wilayah II	PPI					4		0		0		0			0			0,00		0		nan		DKP			
			Terlaksananya Bimbingan teknis penanganan ikan di Pelabuhan Perikanan	Angkatan					4		0		0		0			0			0,00		0		nan		DKP			
			Terlaksananya bimbingan teknis kelompok nelayan/anak buah kapal (ABK)	Angkatan					4		0		0		0			0			0,00		0		nan		DKP			
11	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW III]	Terlaksananya operasional pelabuhan perikanan Wilayah III	Bulan		0		0	12	498.327.350	0	99.740.100	0	98.168.600	0	137.889.000	0	0	0	335.797.700	0,00	67,38	0	335.797.700	nan	inf	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I		II		III		IV																																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
		DINAS PARIWISATA				211.303.352.000		33.755.514.302		51.053.723.487		6.850.824.149		11.450.765.659		14.715.153.579		17.089.986.098		50.106.729.485		98,15		83.862.243.787		39,69																							
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				59.270.000.000		11.230.403.252		12.580.623.287		2.024.552.571		3.931.532.448		2.521.991.613		3.062.166.651		11.540.243.283		91,73		22.770.646.535		38,42																							
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				59.270.000.000		11.230.403.252		12.580.623.287		2.024.552.571		3.931.532.448		2.521.991.613		3.062.166.651		11.540.243.283		91,73		22.770.646.535		38,42																							
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				59.270.000.000	0	11.230.403.252	0	12.580.623.287	0	2.024.552.571	0	3.931.532.448	0	2.521.991.613	0	3.062.166.651	0	11.540.243.283	nan	91,73	0	22.770.646.535	nan	38,42																							
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	1.580.000.000	0	274.804.000	0	195.000.000	0	56.978.800	0	35.360.450	0	21.780.000	0	81.205.000	0	195.324.250	nan	100,17	0	470.128.250	nan	29,75																							
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	56	500.000.000	18	135.844.000	9	105.000.000	4	39.476.900	1	16.585.450	2	13.520.000	2	22.868.000	9	92.450.350	100,00	88,05	27	228.294.350	48,21	45,66	DISPAR																						
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA, Perubahan DPA, RKA dan Perubahan RKA SKPD SKPD yang disusun	Dokumen	20	80.000.000	8		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	8	0	40,00	0,00	DISPAR																							
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	100.000.000	0		0	0	90.000.000	0	17.501.900	0	18.775.000	0	8.260.000	0	58.337.000	0	102.873.900	nan	114,30	0	102.873.900	nan	102,87	DISPAR																					
			Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	dokumen	20		8		4	0		0		2		2		4		100,00		12		60,00		DISPAR																							
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen	5	900.000.000	2	138.960.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	3	138.960.000	60,00	15,44	DISPAR																							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0		nan		0		nan		DISPAR																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	40,99																							
Predikat Kinerja																									-	SR																							
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	37.450.000.000	0	7.062.864.238	0	7.616.131.369	0	1.262.816.368	0	2.702.083.034	0	1.671.160.181	0	1.943.801.181	0	7.579.860.764	nan	99,52	0	14.642.725.002	nan	39,10																							
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	60	35.000.000.000	12	6.671.185.838	60	7.343.691.369	3	1.205.470.368	3	2.648.225.834	3	1.610.912.181	3	1.868.416.181	12	7.333.024.564	20,00	99,85	24	14.004.210.402	40,00	40,01	DISPAR																						
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	60	2.000.000.000	12	353.728.400	12	247.440.000	3	54.070.000	3	49.735.000	3	56.070.000	3	68.250.000	12	228.125.000	100,00	92,19	24	581.853.400	40,00	29,09	DISPAR																						
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	500	75.000.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR																							
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	5	100.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR																							
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	5	75.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR																							
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	80	200.000.000	2	37.950.000	18	25.000.000	4	3.276.000	4	4.122.200	4	4.178.000	6	7.135.000	18	18.711.200	100,00	74,84	20	56.661.200	25,00	28,33	DISPAR																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,75	9,74																							
Predikat Kinerja																									SR	SR																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	900.000.000	0	113.750.000	0	100.200.000	0	600.000	0	62.276.993	0	5.094.150	0	0	0	67.971.143	nan	67,84	0	181.721.143	nan	20,19					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	20	100.000.000	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR				
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Dokumen	20	450.000.000	4	85.800.000	3	100.200.000	0	600.000	0	62.276.993	1	5.094.150	2	0	3	67.971.143	100,00	67,84	7	153.771.143	35,00	34,17	DISPAR				
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	150.000.000	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	3	0	60,00	0,00	DISPAR				
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	10	120.000.000	2	27.950.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	27.950.000	20,00	23,29	DISPAR				
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	dokumen	20	80.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	5,00	0,00	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									7,06	3,83					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	850.000.000	0	45.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	45.750.000	nan	5,38					
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	300	250.000.000	65	45.750.000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	65	45.750.000	21,67	18,30	DISPAR				
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	100	100.000.000	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR				
18	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	100	400.000.000	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR				
			Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Orang	350	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	DISPAR						
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang	100	100.000.000	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,98	0,96					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	9.050.000.000	0	1.829.243.970	0	1.639.221.098	0	414.757.161	0	572.869.377	0	443.759.466	0	453.783.015	0	1.885.169.019	nan	115,00	0	3.714.412.989	nan	41,04					
20	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	40	500.000.000	12	100.337.000	5	75.000.000	1	19.999.500	1	19.999.500	1	19.999.500	2	14.999.900	5	74.998.400	100,00	100,00	17	175.335.400	42,50	35,07	DISPAR				
21	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	40	300.000.000	16	60.101.700	8	70.427.500	2	13.982.200	3	23.395.500	3	28.110.200	0	4.886.500	8	70.374.400	100,00	99,92	24	130.476.100	60,00	43,49	DISPAR				
22	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket PeralataJumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Rumah Tangga yang Disediakan	buah	40	300.000.000	1	20.000.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	20.000.000	2,50	6,67	DISPAR				
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	DISPAR							
23	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	bln	60	2.500.000.000	12	541.146.000	12	356.793.025	3	85.009.700	3	107.286.100	3	102.900.500	3	103.721.400	12	398.917.700	100,00	111,81	24	940.063.700	40,00	37,60	DISPAR				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100,00	3	inf	DISPAR										
			Makan yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu	org	6500	1300	1000	300	300	300	300	300	300	300	100	1000	100,00	2300	35,38	DISPAR											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Snack yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu	org	6500		1300		1000		300		300		300		100		1000		100,00		2300		35,38		DISPAR			
24	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	50	600.000.000	10	125.380.000	7	43.204.000	2	7.660.000	2	11.391.000	2	15.495.000	1	6.890.500	7	41.436.500	100,00	95,91	17	166.816.500	34,00	27,80	DISPAR			
25	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	150.000.000	8	25.320.000	0	17.040.000	0	0	0	7.570.000	0	3.840.000	0	5.600.000	0	17.010.000	nan	99,82	8	42.330.000	40,00	28,22	DISPAR			
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	45		9		4	0	0	0	2		2		4		100,00		13		28,89		DISPAR					
26	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	orang	500	200.000.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR				
27	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	500	4.500.000.000	100	956.959.270	100	1.076.756.573	20	288.105.761	20	403.227.277	30	273.414.266	30	317.684.715	100	1.282.432.019	100,00	119,10	200	2.239.391.289	40,00	49,76	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan		8,47					
Predikat Kinerja																							-		SR					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.060.000.000	0	199.150.238	0	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	199.150.238	nan	18,79					
28	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	30	250.000.000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISPAR				
29	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	810.000.000	8	199.150.238	0	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	8	199.150.238	40,00	24,59	DISPAR				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10		1		4	2	0	0	0	2		4		100,00		5		50,00		DISPAR						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							2,37		0,85					
Predikat Kinerja																							SR		SR					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	6.430.000.000	0	1.229.440.806	0	1.224.833.368	0	175.484.513	0	296.216.657	0	288.356.389	0	355.498.696	0	1.115.556.255	nan	91,08	0	2.344.997.061	nan	36,47				
30	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	1000	30.000.000	100	3.000.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	100	3.000.000	10,00	10,00	DISPAR				
31	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	bulan	60	1.700.000.000	12	316.114.000	12	341.574.000	3	70.847.920	3	71.189.242	3	78.788.637	3	79.180.596	12	300.006.395	100,00	87,83	24	616.120.395	40,00	36,24	DISPAR			
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	bulan	60		12		12	3	3	3	3	3	3	12	100,00	24	40,00	DISPAR										
			Jumlah tagihan Air yang dibayarkan	m3	20000		5340		4500	1000	1500	1500	500	4500	100,00	9840	49,20	DISPAR												
			Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	KWH	60000		12597		216	0	0	0	216	216	100,00	12813	21,36	DISPAR												
32	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Jasa sopir Kantor yang tersedia	orang	30	4.700.000.000	6	910.326.806	6	883.259.368	6	104.636.593	0	225.027.415	0	209.567.752	0	276.318.100	6	815.549.860	100,00	92,33	12	1.725.876.666	40,00	36,72	DISPAR			
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	orang	25		5		5	5	0	0	0	5	100,00	10	40,00	DISPAR												
			Jumlah Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan) - Jasa Kesehatan Rohani (wird mingguan, program Ramadhan) - Jasa Rohaniwan - Dukungan penerapan new normal yang dibayarkan	bulan	60		12		12	3	3	3	3	12	100,00	24	40,00	DISPAR												
			Jumlah Jasa Pengamanan Kantor yang tersedia	orang	35		7		7	7	0	0	0	7	100,00	14	40,00	DISPAR												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							6,82		2,59					
Predikat Kinerja																							SR		SR					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.950.000.000	0	475.400.000	0	605.237.452	0	113.915.729	0	262.725.937	0	91.841.427	0	227.878.759	0	696.361.852	nan	115,06	0	1.171.761.852	nan	60,09				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
33	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	1.200.000.000	10	294.400.000	10	266.987.452	0	68.450.729	0	58.893.200	5	75.423.427	5	57.116.200	10	259.883.556	100,00	97,34	20	554.283.556	36,36	46,19	DISPAR				
34	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	300	600.000.000	80	150.000.000	50	150.000.000	15	23.116.000	15	38.254.000	10	16.418.000	10	72.161.000	50	149.949.000	100,00	99,97	130	299.949.000	43,33	49,99	DISPAR				
35	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	150.000.000	1	31.000.000	2	188.250.000	0	22.349.000	0	165.578.737	0	0	2	98.601.559	2	286.529.296	100,00	152,21	3	317.529.296	30,00	211,69	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								2,19	8,80						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			152.033.352.000		22.525.111.050		38.473.100.200		4.826.271.578		7.519.233.211		12.193.161.966		14.027.819.447		38.566.486.202		100,24		61.091.597.252		40,18						
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			152.033.352.000		22.525.111.050		38.473.100.200		4.826.271.578		7.519.233.211		12.193.161.966		14.027.819.447		38.566.486.202		100,24		61.091.597.252		40,18						
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIKDESTINASI PARIWISATA			53.213.974.000	0	3.159.672.200	0	3.559.822.550	0	83.658.311	0	502.946.562	0	1.348.910.413	0	2.113.445.697	0	4.048.960.983	nan	113,74	0	7.208.633.183	nan	13,55						
3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			19	26.000.000.000	6	417.038.600	0	1.015.254.500	0	20.941.080	0	112.618.562	0	592.212.513	0	860.904.985	0	1.586.677.140	nan	156,28	6	2.003.715.740	31,58	7,71					
1	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	19	25.000.000.000	6	417.038.600	0	965.771.000	0	14.266.080	0	108.073.562	0	572.625.013	0	849.152.780	0	1.544.117.435	nan	159,88	6	1.961.156.035	31,58	7,84	DISPAR				
			Tersedianya video profil spot wisata selama	buah	1		0		1		0		0		0	1		1		100,00		1		100,00		DISPAR					
			Terlaksananya implementasi CHSE DTW safety destination	kab./kota	19		0		5		0		0		0	5		5		100,00		5		26,32		DISPAR					
			Tersusunnya Masterplan Kawasan Padang Kota Tua	dokumen	1		0		1		0		0		0	1		1		100,00		1		100,00		DISPAR					
			Tersusunnya model pengembangan destinasi berkelas dunia	dokumen	1		0		1		0		0		0	1		1		100,00		1		100,00		DISPAR					
2	3.26.02.1.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya Monitoring DTWU	DTWU	19	1.000.000.000	0		0	19	49.483.500	0	6.675.000	0	4.545.000	5	19.587.500	14	11.752.205	19	42.559.705	100,00	86,01	19	42.559.705	100,00	4,26	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								76,32	6,05						
Predikat Kinerja																								T	SR						
3.26.02.1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			1	300.000.000	0		0	0	49.275.500	0		0	0		0	0		0	nan	0,00	0		0,00	0,00					
3	3.26.02.1.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya fasilitasi dukungan untuk perencanaan calon KEK Mentawai dan KEK Mandeh	lokasi	6	300.000.000	0		0	2	49.275.500	0		0	0		0	0		0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00	0,00						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			1	19.913.974.000	0	2.158.427.600	0	2.159.694.550	0	52.867.131	0	346.407.750	0	721.989.400	0	1.073.898.829	0	2.195.163.110	nan	101,64	0	4.353.590.710	0,00	21,86					
4	3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	5.000.000.000	0	494.172.100	0	700.000.000	0		0	185.360.000	0	105.030.000	0	492.146.800	0	782.536.800	nan	111,79	0	1.276.708.900	0,00	25,53	DISPAR				
			Tersusunnya Peta (Road Map) Pariwisata dan Pariwisata Halal	Dokumen	1		1		2		0		0		0		2		2		100,00		3		300,00		DISPAR				
5	3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya fasilitasi dan subsidi Sertifikasi halal bagi Usaha pariwisata	usaha pariwisata	250	8.000.000.000	100	568.020.000	15	632.387.050	0	52.867.131	0	145.102.750	5	109.684.400	10	382.207.591	15	689.861.872	100,00	109,09	115	1.257.881.872	46,00	15,72	DISPAR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	desa wisata	100		0		52		50		0		0		2		52		100,00		52		52,00		DISPAR																							
				Lokasi	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPAR																							
6	3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	5	0	2	0	0	383.800.000	0	0	0	7.850.000	0	106.350.000	0	197.183.638	0	311.383.638	nan	81,13	2	311.383.638	40,00	inf	DISPAR																							
			Terlaksananya movev DTW Halal	kab./kota	19		0		6		0		0		3		3		6		100,00		6		31,58		DISPAR																							
			Terlaksananya Movev DTWU	kab./kota	19		0		12		0		0		6		6		12		100,00		12		63,16		DISPAR																							
			Terlaksananya movev pariwisata bersih	kab./kota	19		0		12		0		0		6		6		12		100,00		12		63,16		DISPAR																							
			Terlaksananya sosialisasi pariwisata bersih	kali	19		6		4		0		0		4		0		4		100,00		10		52,63		DISPAR																							
7	3.26.02.1.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya workshop pengembangan geopark	kali	19	6.913.974.000	11	1.096.235.500	2	443.507.500	0	0	0	8.095.000	2	400.925.000	0	2.360.800	2	411.380.800	100,00	92,76	13	1.507.616.300	68,42	21,81	DISPAR																							
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPAR																							
			Terlaksananya jambore geopark se Sumatera Barat	kegiatan	1		0		1		0		0		1		0		1		100,00		1		100,00		DISPAR																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																		
Predikat Kinerja																																																		
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			125	7.000.000.000	50	584.206.000	0	335.598.000	0	9.850.100	0	0	43.920.250	0	34.708.500	0	178.641.883	0	267.120.733	nan	79,60	50	851.326.733	40,00	12,16																							
8	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	5	4.000.000.000	2	256.530.000	15	190.200.000	0	9.850.100	0	0	43.920.250	15	14.260.000	0	58.835.383	15	126.865.733	100,00	66,70	17	383.395.733	340,00	9,58	DISPAR																						
			Terfasilitasinya izin usaha pariwisata	usaha	100		0		25		0		0		25		0		25		100,00		25		25,00		DISPAR																							
			Terlaksananya penguatan pentahelix pariwisata	kali	10		1		2		0		0		2		0		2		100,00		3		30,00		DISPAR																							
9	3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Terlaksananya sosialisasi sertifikasi CHSE	kali	19	3.000.000.000	11	327.676.000	1	145.398.000	0	0	0	0	20.448.500	1	119.806.500	1	140.255.000	100,00	96,46	12	467.931.000	63,16	15,60	DISPAR																								
			Terlaksananya fasilitasi CHSE Mandiri	usaha pariwisata	19		11		10		0		0		0		10		10		100,00		21		110,53		DISPAR																							
			Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	250		100		0		0		0		0		0		0		nan		100		40,00		DISPAR																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																		
Predikat Kinerja																																																		
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				24.163.183.000	0	7.401.401.750	0	12.061.127.350	0	1.234.817.801	0	0	2.080.192.610	0	2.735.166.697	0	4.417.515.465	0	10.467.692.573	nan	86,79	0	17.869.094.323	nan	73,95																							
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			0	24.163.183.000	0	7.401.401.750	0	12.061.127.350	0	1.234.817.801	0	0	2.080.192.610	0	2.735.166.697	0	4.417.515.465	0	10.467.692.573	nan	86,79	0	17.869.094.323	nan	73,95																							
1	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Ditetapkannya Wonder Event Sumbang	kegiatan	5	15.000.000.000	2	4.819.592.750	1	8.597.939.500	0	1.118.620.751	0	0	1.545.529.959	1	1.810.508.013	0	2.995.333.197	1	7.469.991.920	100,00	86,88	3	12.289.584.670	60,00	81,93	DISPAR																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100,00	1	inf	DISPAR												
			Terlaksananya event pariwisata Sumbang	kali	25	7	15	1	0	10	4	15	100,00	22	88,00	DISPAR															
			Terlaksananya partisipasi pameran dalam negeri	kali	15	0	2	1	0	1	0	2	100,00	2	13,33	DISPAR															
			Tersedianya bahan promosi pariwisata (cetak, elektronik, online, digital)	jenis	10	2	4	0	0	2	2	4	100,00	6	60,00	DISPAR															
2	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya famtrip	orang	100	4.363.183.000	20	1.297.140.000	30	2.412.266.000	0	73.422.450	0	395.844.750	15	810.739.084	15	782.724.813	30	2.062.731.097	100,00	85,51	50	3.359.871.097	50,00	77,01	DISPAR				
			Terlaksananya fasilitasi dukungan event daerah	event	10	2	6	0	0	2	4	6	100,00	8	80,00	DISPAR															
			Terlaksananya promosi pariwisata oleh pelaku ekraf	kali	80	14	20	0	0	10	10	20	100,00	34	42,50	DISPAR															
3	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya validasi data kepariwisataan	kali	5	4.000.000.000	2	1.086.284.000	4	796.351.500	0	27.039.800	0	128.869.926	0	108.209.600	4	456.168.700	4	720.288.026	100,00	90,45	6	1.806.572.026	120,00	45,16	DISPAR				
			Tersedianya data sektoral kepariwisataan	laporan	5	2	12	0	0	0	12	12	100,00	14	280,00	DISPAR															
			Terlaksananya sosialisasi penyusunan data pariwisata	kegiatan	1	0	1	0	0	1	1	2	200,00	2	200,00	DISPAR															
			Tersedianya dokumen profil kepariwisataan	dokumen	5	1	1	0	0	0	1	1	100,00	2	40,00	DISPAR															
4	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	10	800.000.000	5	198.385.000	1	254.570.350	0	15.734.800	0	9.947.975	0	5.710.000	1	183.288.755	1	214.681.530	100,00	84,33	6	413.066.530	60,00	51,63	DISPAR				
			Tersedianya baliho sebagai tindak lanjut kerjasama	baliho	0	0	4	0	0	0	4	4	100,00	4	inf	DISPAR															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																inf	63,93														
Predikat Kinerja																-	R														
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				13.525.827.000	0	2.687.989.100	0	2.739.050.800	0	21.500.000	0	110.974.000	0	452.597.450	0	2.373.022.655	0	2.958.094.105	nan	108,00	0	5.646.083.205	nan	41,74					
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			0	10.525.827.000	0	2.177.268.000	0	2.420.925.200	0	10.715.000	0	46.709.000	0	378.317.450	0	2.235.073.655	0	2.670.815.105	nan	110,32	0	4.848.083.105	nan	46,06					
1	3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0	3.325.827.000	0	877.726.000	0	196.316.000	0	0	0	25.604.000	0	7.355.000	0	102.819.050	0	135.778.050	nan	69,16	0	1.013.504.050	nan	30,47	DISPAR				
			Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	kali	19	5	2	0	0	0	2	2	100,00	7	36,84	DISPAR															
			Tersusunnya Ranpergub tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	dokumen	1	0	1	0	0	0	1	1	100,00	1	100,00	DISPAR															
2	3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Terlaksananya Gelar Karya Produk Ekonomi Kreatif	kegiatan	20	5.000.000.000	8	869.000.000	7	2.081.616.700	0	8.035.000	0	19.630.000	3	326.753.450	4	2.127.965.455	7	2.482.383.905	100,00	119,25	15	3.351.383.905	75,00	67,03	DISPAR				
3	3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	5	1.000.000.000	2	292.250.000	0	142.992.500	0	2.680.000	0	1.475.000	0	44.209.000	0	4.289.150	0	52.653.150	nan	36,82	2	344.903.150	40,00	34,49	DISPAR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Terlaksananya Forum Komunikasi Pelaku Ekraf Sumbar	kali	10		6		3		0		0		1		2		3		100,00		9		90,00		DISPAR			
4	3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	0	1.200.000.000	0	138.292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	138.292.000	nan	11,52	DISPAR			
			Terlaksananya sosialisasi akses permodalan	kali	12		3		3		0		0		0		0		0		0,00		3		25,00		DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	35,88					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif?			0	3.000.000.000	0	510.721.100	0	318.125.600	0	10.785.000	0	64.265.000	0	74.280.000	0	137.949.000	0	287.279.000	nan	90,30	0	798.000.100	nan	26,60				
5	3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	terlaksananya sosialisasi pengembangan sistem pemasaran berbasis MDI	kali	10	1.500.000.000	2	171.055.500	1	87.521.000	0	0	0	3.840.000	1	11.972.500	0	56.426.200	1	72.238.700	100,00	82,54	3	243.294.200	30,00	16,22	DISPAR			
			terlaksananya sosialisasi pengembangan sistem pemasaran berbasis seni budaya	kali	10		2		1		0		0		1		0		1		100,00		3		30,00		DISPAR			
6	3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terbitnya Sertifikasi HAKI Produk Ekraf Berbasis Seni dan Budaya dan Media Desain dan Iptek	sertifikat	250	1.500.000.000	100	339.665.600	100	230.604.600	0	10.785.000	0	60.425.000	50	62.307.500	50	81.522.800	100	215.040.300	100,00	93,25	200	554.705.900	80,00	36,98	DISPAR			
			Terlaksananya sosialisasi Undang Undang HAKI berbasis seni dan budaya dan media desain dan iptek	kali	19		10		2		0		0		2		0		2		100,00		12		63,16		DISPAR			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	8,87					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				61.130.368.000	0	9.276.048.000	0	20.113.099.500	0	3.486.295.466	0	4.825.120.039	0	7.656.487.406	0	5.123.835.630	0	21.091.738.541	nan	104,87	0	30.367.786.541	nan	49,68				
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			0	55.130.368.000	0	8.331.288.000	0	19.230.230.500	0	3.268.670.066	0	4.753.442.339	0	7.316.047.306	0	4.693.650.780	0	20.031.810.491	nan	104,17	0	28.363.098.491	nan	51,45				
1	3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	10000	4.000.000.000	0	0	60	75.229.000	0	0	0	0	60	67.053.400	0	7.905.600	60	74.959.000	100,00	99,64	60	74.959.000	0,60	1,87	DISPAR			
2	3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya bimtek sadar wisata	org	10000	22.130.368.000	0	4.092.686.000	6500	9.009.061.300	0	1.606.796.098	0	1.724.385.860	3000	3.270.600.355	3500	4.167.613.298	6500	10.769.395.611	100,00	119,54	6500	14.862.081.611	65,00	67,16	DISPAR			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPAR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
								I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%		(15) = 14/5 * 100%											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	2000	5.000.000.000	300	621.285.000	350	486.604.000	0	0	50	64.765.900	300	330.238.000	0	97.443.200	350	492.447.100	100,00	101,20	650	1.113.732.100	32,50	22,27	DISPAR			
4	3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	3.800.000.000	0	790.195.000	0	148.639.700	0	0	0	0	89.105.000	0	80.045.000	0	169.150.000	nan	113,80	0	959.345.000	nan	25,25	DISPAR				
			Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata	Orang	12000		250		100		0		0		100		0		100		100,00		350		2,92		DISPAR			
5	3.26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	5	200.000.000	1	165.670.000	0	80.000.000	0	75.174.700	0	2.864.900	0	0	0	1.708.000	0	79.747.600	nan	99,68	1	245.417.600	20,00	122,71	DISPAR			
			Terlaksananya workshop bagi pelaku ekonomi kreatif	orang	12000		250		70		0		0		70		0		70		100,00		320		2,67		DISPAR			
6	3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	0	20.000.000.000	0	2.661.452.000	0	9.430.696.500	0	1.586.699.268	0	2.961.425.679	0	3.559.050.551	0	338.935.682	0	8.446.111.180	nan	89,56	0	11.107.563.180	nan	55,54	DISPAR			
			Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM Ekraf	Orang	5000		950		1810		0		0		1500		310		1810		100,00		2760		55,20		DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	49,13				
Predikat Kinerja																									-	SR				
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			0	6.000.000.000	0	944.760.000	0	882.869.000	0	217.625.400	0	71.677.700	0	340.440.100	0	430.184.850	0	1.059.928.050	nan	120,05	0	2.004.688.050	nan	33,41				
7	3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya bimtek pelaku ekraf	Orang	0	6.000.000.000	0	944.760.000	1000	882.869.000	150	217.625.400	50	71.677.700	300	340.440.100	350	430.184.850	850	1.059.928.050	85,00	120,05	850	2.004.688.050	inf	33,41	DISPAR			
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	4000		700		0		0		0		0		0		0		nan		700		17,50		DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	4,77				
Predikat Kinerja																									-	SR				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml	
											I		II		III		IV													
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)				(17)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			134.190.761.228		146.801.181.238		238.322.237.097		19.724.876.840		43.995.839.154		62.157.055.812		104.533.859.535		230.411.631.341		96,68		377.212.812.579		281,10					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			31.968.626.728		44.610.646.738		57.308.597.987		13.953.179.182		15.499.091.037		12.326.363.412		12.398.167.535		54.176.801.166		94,54		98.787.447.904		309,01					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			31.968.626.728		44.610.646.738		57.308.597.987		13.953.179.182		15.499.091.037		12.326.363.412		12.398.167.535		54.176.801.166		94,54		98.787.447.904		309,01					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	%	31.968.626.728	100	44.610.646.738	100	57.308.597.987	25	13.953.179.182	25	15.499.091.037	25	12.326.363.412	25	12.398.167.535	100	54.176.801.166	100,00	94,54	200	98.787.447.904	inf	309,01					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		inf						
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	85	7	85	7	85	950.000.000	25	212.408.000	25	184.972.600	25	237.272.600	10	264.495.222	85	899.148.422	100,00	94,65	170	899.148.429	200,00	12.844.977.557,14				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1		1	0	1	2	300.000.000	47	141.976.400	1	40.709.800	1	70.009.800	1	30.232.422	50	282.928.422	2.500,00	94,31	50	282.928.423	5.000,00	28.292.842.300,00	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0		0	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	0	2	0	inf	nan	2	0	inf	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0		0		6		2		2		2		0		6		100,00		6		inf		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	1		1	0	1	3	650.000.000	1	70.431.600	1	144.262.800	1	167.262.800	1	234.262.800	4	616.220.000	133,33	94,80	4	616.220.001	400,00	61.622.000.100,00	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		1		0		0		1		0		0		1		inf		2		200,00		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen	0		5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	5	nan	100,00	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	%	100	26.875.249.120	100	39.501.269.120	100	46.213.802.110	25	10.483.635.875	25	11.443.575.914	25	10.171.481.464	25	11.354.181.464	100	43.452.874.717	100,00	94,03	200	82.954.143.837	200,00	308,66				
			Persentase tertib administrasi keuangan	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	355	26.000.000.000	355	39.000.000.000	400	45.338.552.990	100	10.321.287.255	100	11.036.281.464	100	10.036.281.464	100	11.236.281.464	400	42.630.131.647	100,00	94,03	755	81.630.131.647	212,68	313,96	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	355		355		0		355		355		355		355		1420		inf		1775		500,00		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA)	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	5	46.704.000	5	46.704.000	5	46.704.000	5	10.200.000	0	9.200.000	0	10.200.000	0	12.900.000	5	42.500.000	100,00	91,00	10	89.204.000	200,00	191,00	DISPERTA			
7	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	20.000.000	0	20.000.000	0	10.000.000	0	0	5	50.000.000	100,00	76,92	10	115.000.000	200,00	176,92	DISPERTA			
8	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPTD BALAI PERLINDUNGAN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	25.000.000	5	85.000.000	100,00	85,00	10	185.000.000	200,00	185,00	DISPERTA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I		II		III		IV												
											(5)		(6)		(7)		(8)												
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)		
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]																											
9	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	110.010.000	1	110.010.000	0	110.010.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	4	100.000.000	inf	90,90	5	210.010.000	500,00	190,90	DISPERTA		
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	5		0		5		5		0		0		0		5		100,00		5		100,00		DISPERTA		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1		1		0		1		1		1		1		4		inf		5		500,00		DISPERTA		
				Dokumen	1		1		12		1		1		1		1		4		33,33		5		500,00		DISPERTA		
				Dokumen	1		1		0		1		1		1		1		4		inf		5		500,00		DISPERTA		
				Dokumen	1		1		0		1		1		1		1		4		inf		5		500,00		DISPERTA		
				Dokumen	1		1		0		1		1		1		1		4		inf		5		500,00		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
10	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	73.770.000	1	73.770.000	0	73.770.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	4	70.000.000	inf	94,89	5	143.770.000	500,00	194,89	DISPERTA		
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	5		5		5		5		0		0		0		5		100,00		10		200,00		DISPERTA		
11	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	19	373.980.000	0	0	19	373.980.000	19	10.563.500	0	303.029.000	0	30.000.000	0	30.000.000	19	373.592.500	100,00	99,90	19	373.592.500	100,00	99,90	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
12	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI BENIH INDIUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	5	55.785.120	5	55.785.120	5	55.785.120	5	55.785.120	0	0	0	0	0	0	5	55.785.120	100,00	100,00	10	111.570.240	200,00	200,00	DISPERTA		
13	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	0		0		25		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
14	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
15	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	0		0		3		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
16	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	50.000.000	0	50.000.000	18	50.000.000	18	5.800.000	0	5.065.450	0	15.000.000	0	20.000.000	18	45.865.450	100,00	91,73	18	95.865.450	1.800,00	191,73	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan				
Predikat Kinerja																								-	-				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi BMD	%	100	270.444.030	100	270.444.030	100	458.374.030	25	166.119.360	25	150.623.048	25	129.594.348	25	48.950.450	100	495.287.206	100,00	108,05	200	765.731.236	200,00	283,14			
			Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00				
17	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMd pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta penghitungan standar kebutuhan yang disusun	dokumen	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml				
									I		II		III		IV														
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)										(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan			
18	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.600.000	2	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	2	12.000.000	100,00	76,92	4	27.000.000	200,00	180,00	DISPERTA		
19	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	0	0	5	0	25	136.730.000	5	51.456.560	5	63.243.898	0	63.243.898	0	0	10	177.944.356	40,00	130,14	15	177.944.356	inf	inf	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
20	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.600.000	2	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	2	12.000.000	100,00	76,92	4	27.000.000	200,00	180,00	DISPERTA		
21	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	2	10.400.000	2	10.400.000	2	10.400.000	2	4.000.000	0	10.400.000	0	10.400.000	0	1.000.000	2	25.800.000	100,00	248,08	4	36.200.000	200,00	348,08	DISPERTA		
22	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	2	10.400.000	2	10.400.000	2	10.400.000	2	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	2	10.000.000	100,00	96,15	4	20.400.000	200,00	196,15	DISPERTA		
23	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.400.000	2	10.400.000	2	10.400.000	2	10.400.000	0	0	0	0	0	0	2	10.400.000	100,00	100,00	4	20.800.000	200,00	200,00	DISPERTA		
				Dokumen	2		2		2		0		2		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
			Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	2		2		2		2		0		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2		2		2		2		0		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
				Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
				Dokumen	2		2		2		0		2		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
				Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
				Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
24	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	2	18.400.000	2	18.400.000	2	18.400.000	2	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	5.000.000	2	14.000.000	100,00	76,09	4	32.400.000	200,00	176,09	DISPERTA		
25	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	1	10.000.000	100,00	100,00	2	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
26	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	5	99.000.000	5	99.000.000	5	99.000.000	1	19.450.450	1	46.079.550	1	19.450.450	2	10.450.450	5	95.430.900	100,00	96,39	10	194.430.900	200,00	196,39	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	0		0		3		1		1		1		0		3		100,00		3		inf		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
27	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
28	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	1	48.992.350	1	48.992.350	1	48.992.350	1	48.992.350	0	0	0	0	0	0	1	48.992.350	100,00	100,00	2	97.984.700	200,00	200,00	DISPERTA		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I		II		III		IV												
											(8)		(9)		(10)		(11)												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
29	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	2	10.000.000	100,00	100,00	4	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
30	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	22.851.680	12	22.851.680	12	22.851.680	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	12	20.000.000	100,00	87,52	24	42.851.680	200,00	187,52	DISPERTA		
				Laporan	2		2		2		1		1		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
				Laporan	2		2		2		1		1		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
				Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
				Laporan	2		2		2		1		1		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
			Jumlah Pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	3		3		3		1		1		1		0		3		100,00		6		200,00		DISPERTA		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		1		1		0		0		0		1		100,00		1		inf		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
31	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	1		1		1		1		0		0		0		1		100,00		2		200,00		DISPERTA		
32	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
33	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD Perangkat Daerah	dokumen	0	0	0	0	4	50.000.000	1	5.320.000	1	4.399.600	1	20.000.000	1	19.000.000	4	48.719.600	100,00	97,44	4	48.719.600	inf	inf	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan				
Predikat Kinerja																								-	-				
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi pendapatan daerah	%	100	0	10025	0	100	250.000.000	25	0	25	30.743.125	25	141.640.000	25	57.000.000	100	229.383.125	100,00	91,75	10125	229.383.125	10.125,00	inf			
34	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	50.000.000	1	0	1	10.640.000	0	10.640.000	0	22.000.000	2	43.280.000	inf	86,56	2	43.280.000	inf	inf	DISPERTA		
			Jumlah Dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi kewenangan perangkat Daerah	Dokumen	0		0		2		0		1		1		0		2		100,00		2		inf		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
35	X.XX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	45.000.000	nan	90,00	0	45.000.000	nan	inf	DISPERTA			
			Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi kewenangan perangkat Daerah	Dokumen	0		0		2		0		2		0		0		2		100,00		2		inf		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
36	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	48.000.000	nan	96,00	0	48.000.000	nan	inf	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
			Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan	kali	0		0		5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
37	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen data retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	12	50.000.000	0	0	0	18.004.000	0	23.000.000	0	7.000.000	0	48.004.000	0,00	96,01	0	48.004.000	nan	inf	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
38	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	2.099.125	0	15.000.000	0	28.000.000	0	45.099.125	nan	90,20	0	45.099.125	nan	inf	DISPERTA		
			Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0		0		12		3		4		3		2		12		100,00		12		inf		DISPERTA	Sedang dalam	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I		II		III		IV												
											(5)		(6)		(7)		(8)												
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)		
																										proses pelaksanaan			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf			
Predikat Kinerja																									-	-			
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	0	100	0	100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100,00	nan	200	0	200,00	nan			
			Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00				
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan				
39	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
40	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
41	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
42	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
43	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
44	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
45	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	.	
46	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	dokumen	0	0		2		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan		
47	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanagn	kali	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan			
Predikat Kinerja																									-	-			
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	%	100	510.605.500	100	510.605.500	100	1.829.810.826	25	311.440.837	25	482.210.343	25	656.200.000	25	315.000.000	100	1.764.851.180	100,00	96,45	200	2.275.456.680	200,00	445,64			
			Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00				
			Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00				
48	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	2	2.500.000	4	2.500.000	3	2.500.000	1	2.500.000	10	10.000.000	100,00	100,00	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
49	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	0	0	0	0	10	10.000.000	100,00	100,00	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml							
								I		II		III		IV															
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)				
50	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	buah	0	0	0	0	20	15.000.000	0	0	5	0	15	15.000.000	0	0	20	15.000.000	100,00	100,00	20	15.000.000	inf	inf	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		5		0		0		0		5		inf		5		inf		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
51	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	5	10.000.000	100,00	100,00	10	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
52	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.460.000	5	2.000.000	5	2.000.000	0	200.000	0	0	10	4.200.000	100,00	94,17	20	8.200.000	200,00	205,00	DISPERTA		
53	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.235.000	5	3.000.000	5	3.000.000	0	0	0	0	10	6.000.000	100,00	96,23	20	12.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
54	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10	10.000.000	100,00	100,00	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
55	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
56	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
57	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
58	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
59	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
60	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
61	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
62	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
63	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	buah	10	100.000.000	10	100.000.000	10	150.000.000	2	17.831.200	8	117.561.700	0	0	0	0	10	135.392.900	100,00	90,26	20	235.392.900	200,00	235,39	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)				
											(8)		(9)													(10)		(11)	
											K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp
			Jumlah rapat koordinasi internal SKPD yang dilakukan	kali	0		0		20	0		0		0		0		0,00		0		nan	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan					
64	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	45.651.950	10	45.651.950	10	45.651.950	5	15.000.000	5	10.000.000	0	10.000.000	0	9.000.000	100,00	96,38	20	89.651.950	200,00	196,38	DISPERTA				
65	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	59.853.550	10	59.853.550	10	59.853.550	4	20.000.000	5	20.000.000	1	14.000.000	0	0	100,00	90,22	20	113.853.550	200,00	190,22	DISPERTA				
66	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	5.000.000	0	5.000.000	0	14.000.000	0	0	100,00	96,00	10	49.000.000	200,00	196,00	DISPERTA				
67	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	100,00	100,00	20	50.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
68	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.173.500	5	1.000.000	5	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100,00	95,84	20	8.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
69	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	32.000.000	10	32.000.000	10	32.872.200	5	10.000.000	5	10.000.000	0	10.000.000	0	2.000.000	100,00	97,35	20	64.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
70	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	13.000.000	5	13.000.000	5	13.149.652	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	2	4.000.000	100,00	98,86	10	26.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
71	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	0	0	0	0	100,00	100,00	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
72	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	3.400.000	10	3.400.000	10	3.486.750	5	1.700.000	5	1.700.000	0	0	0	0	100,00	97,51	20	6.800.000	200,00	200,00	DISPERTA				
73	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	80.000.000	5	80.000.000	5	81.594.224	2	20.639.800	2	34.091.950	1	25.000.000	0	0	100,00	97,72	10	159.731.750	200,00	199,66	DISPERTA	Sedang dalam proses pelaksanaan			
74	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	13.700.000	5	13.700.000	5	13.750.000	2	3.100.000	2	3.100.000	1	3.100.000	0	3.100.000	100,00	90,18	10	26.100.000	200,00	190,51	DISPERTA				
75	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	0	0	0	0	100,00	100,00	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
76	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	2	2.500.000	2	2.500.000	1	2.500.000	0	2.500.000	100,00	100,00	10	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
77	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
78	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml	
											I		II		III		IV													
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]																												
79	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
80	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	buah	10	29.000.000	10	29.000.000	10	29.040.000	2	1.520.000	2	8.400.000	2	8.400.000	4	8.400.000	10	26.720.000	100,00	92,01	20	55.720.000	200,00	192,14	DISPERTA			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA			
81	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	12	0	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	nan	DISPERTA			
82	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	nan	DISPERTA			
83	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	0	0	0	0	25	1.250.544.000	4	170.149.837	5	235.856.693	10	540.000.000	15	270.000.000	34	1.216.006.530	136,00	97,24	34	1.216.006.530	inf	inf	DISPERTA			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1		1		0		0		1		0		0		1		inf		2		200,00		DISPERTA			
84	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola	arsip	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA			
85	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	nan	DISPERTA			
			Jumlah sarana prasarana yang tersedia	unit	0		5		5		0		0		0		0		0		0,00		5		inf		DISPERTA			
			Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	orang	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertaksananya BMD sesuai dengan perencanaan	%	100	0	100	0	100	28.427.000	25	0	25	23.222.000	25	5.000.000	25	0	100	28.222.000	100,00	99,28	200	28.222.000	200,00	inf				
			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00					
86	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	nan	DISPERTA				
87	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	unit	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA			
88	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
89	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
90	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
91	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
92	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				

		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml		
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]																												
93	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
94	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1.05	0	15	0	15	28.427.000	0	0	15	23.222.000	0	5.000.000	0	0	15	28.222.000	100,00	99,28	30	28.222.000	2.857,14	inf	DISPERTA			
95	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	nan	DISPERTA		
96	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
97	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
98	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
99	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
100	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
101	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
102	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
103	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
104	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
105	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
106	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	3.753.958.162	0	3.753.958.162	100	6.398.102.308	0	2.463.953.260	0	2.656.553.107	0	740.975.000	0	283.540.399	0	6.145.021.766	0,00	96,04	0	9.898.979.928	nan	263,69				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml						
											I		II													III		IV			
											(8)		(9)													(10)		(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)		
			Persentase ketersediaan jasa penunjang umum pemerintahan daerah	%	0	Rp	0	Rp	100	0	Rp	0	Rp	0	Rp	0	Rp	0	Rp	0	Rp	0,00	Rp	0	Rp	nan	Rp				
107	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	21.000.000	10	21.000.000	10	21.000.000	10	21.000.000	0	0	0	0	0	0	10	21.000.000	100,00	100,00	20	42.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
108	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	0	0	0	0	0	0	5	3.000.000	100,00	100,00	10	6.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
109	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	16.608.400	5	16.608.400	5	16.608.400	5	16.608.400	0	0	0	0	0	0	5	16.608.400	100,00	100,00	10	33.216.800	200,00	200,00	DISPERTA				
110	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	0	3	6.000.000	100,00	100,00	6	12.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
111	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.840.000	4	1.000.000	4	1.000.000	2	530.000	0	0	10	2.530.000	100,00	89,08	20	4.530.000	200,00	226,50	DISPERTA				
112	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	0	0	0	0	100	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERTA				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	DISPERTA						
113	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	11.000.000	0	2.300.000	0	2.345.000	0	3.000.000	0	3.200.000	0	10.845.000	nan	98,59	0	10.845.000	nan	inf	DISPERTA				
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	0	0	0	0	100	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300,00	300	inf	DISPERTA									
114	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh	77335	0	77335	0	77335	192.348.050	77335	54.230.000	0	54.230.000	0	54.230.000	0	23.685.399	77335	186.375.399	100,00	96,89	154670	186.375.399	200,00	inf	DISPERTA				
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	4022	4022	4022	4022	4022	0	0	0	0	0	0	0	4022	100,00	8044	200,00	DISPERTA										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	DISPERTA							
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00	2	200,00	DISPERTA										
115	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	1200	200.000.000	1200	200.000.000	1200	286.650.000	0	55.300.000	0	55.300.000	0	55.300.000	0	55.300.000	0	221.200.000	0,00	77,17	1200	421.200.000	100,00	210,60	DISPERTA				
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	2300	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	2300	100,00	4600	200,00	DISPERTA										
			Jumlah rekening tagihan telpon yang dibayarkan	rekening	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00	2	200,00	DISPERTA										
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh	103900	103900	103900	103900	103900	0	0	0	0	0	0	0	103900	100,00	207800	200,00	DISPERTA										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	DISPERTA							
116	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	120.000.000	0	120.000.000	0	121.650.000	0	33.300.000	0	33.300.000	0	33.300.000	0	13.200.000	0	113.100.000	nan	92,97	0	233.100.000	nan	194,25	DISPERTA				
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	1710	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	1710	100,00	3420	200,00	DISPERTA										
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	400,00	5	500,00	DISPERTA										
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	440000	400,00	550000	500,00	DISPERTA											
117	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.254.724	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	120.000.000	nan	99,79	0	240.000.000	nan	200,00	DISPERTA				

		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
												I		II		III		IV												
												(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening	1		1		1		1		0		0		0		1		100,00		2		200,00		DISPERTA		
				Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	5000		5000		5000		5000		0		0		0		5000		100,00		10000		200,00		DISPERTA		
				Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh	61000		61000		61000		61000		0		0		0		61000		100,00		122000		200,00		DISPERTA		
118	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	434.831.300	0	9.599.480	0	393.882.779	0	0	0	0	0	0	403.482.259	nan	92,79	0	403.482.259	nan	inf	DISPERTA		
			Jumlah rekening tagihan internet yang dibayarkan	rekening	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	0		0		2000		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh	0		0		33800		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
119	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	nan	100,00	0	400.000.000	nan	200,00	DISPERTA			
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh	100000		100000		100000		100000		0		0		0		100000		100,00		200000		200,00		DISPERTA			
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	0		0		4000		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
120	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening	0	79.020.000	0	79.020.000	1	79.020.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	9.000.000	0	72.000.000	0,00	91,12	0	151.020.000	nan	191,12	DISPERTA			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA			
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	0		0		350		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh	15000		15000		15000		15000		0		0		0		15000		100,00		30000		200,00		DISPERTA			
121	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	99.760.000	0	9.215.000	0	43.599.000	0	19.215.000	0	19.215.000	0	91.244.000	nan	91,46	0	91.244.000	nan	inf	DISPERTA			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	0		0		20		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA			
122	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	10	0	100,00	nan	DISPERTA				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA			
123	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10	10.000.000	100,00	100,00	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA			
124	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.220.000	2	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	2	2.500.000	10	10.000.000	100,00	97,85	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA			
125	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.510.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	740.000	0	4.340.000	nan	96,23	0	8.840.000	nan	196,44	DISPERTA			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	unit	10		10		10		4		4		2		0		10		100,00		20		200,00		DISPERTA			

(1)	(2)	(3)	(4)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml		
					(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			dipelihara		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
126	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	2	3.000.000	0	1.000.000	10	10.000.000	100,00	100,00	20	20.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA				
127	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	15		15		15		5		5		5		0		15		100,00		30		200,00		DISPERTA				
128	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	1.365.912.560	0	77.000.380	0	1.187.496.328	0	0	0	0	0	0	1.264.496.708	nan	92,58	0	1.264.496.708	nan	inf	DISPERTA			
			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	0		0		20		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA				
129	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	10	732.344.787	10	732.344.787	10	732.344.787	4	300.000.000	4	300.000.000	2	131.000.000	0	0	10	731.000.000	100,00	99,82	20	1.463.344.787	200,00	199,82	DISPERTA				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA				
130	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	436.268.076	0	200.000.000	0	200.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	436.000.000	nan	99,94	0	436.000.000	nan	inf	DISPERTA			
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	0		0		10		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA				
131	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	563.484.975	0	563.484.975	0	563.484.975	0	200.000.000	0	200.000.000	0	163.000.000	0	0	0	0	563.000.000	nan	99,91	0	1.126.484.975	nan	199,91	DISPERTA			
			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	5		5		5		0		0		0		0		0		0,00		5		100,00		DISPERTA				
132	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	10	570.000.000	10	570.000.000	10	570.630.230	4	125.700.000	4	125.700.000	2	185.700.000	0	125.700.000	10	562.800.000	100,00	98,63	20	1.132.800.000	200,00	198,74	DISPERTA				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA				
133	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.483.118	0	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000.000	nan	99,93	0	1.300.000.000	nan	200,00	DISPERTA			
			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	10		10		10		10		0		0		0		10		100,00		20		200,00		DISPERTA				
134	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	6	436.000.000	6	436.000.000	6	436.286.088	6	436.000.000	0	0	0	0	0	0	6	436.000.000	100,00	99,93	12	872.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang ber kondisi baik	%	100	558.369.909	100	574.369.919	100	1.180.081.713	25	315.621.850	25	527.190.900	25	244.200.000	25	75.000.000	100	1.162.012.750	100,00	98,47	200	1.736.382.669	200,00	310,97					
			Persentase BMD yang ber kondisi baik	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00						
135	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	0	100,00	nan	DISPERTA				

		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml	
												I	II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																											
136	X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	0	100,00	nan	DISPERTA				
137	X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
138	X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	83.369.909	2	83.369.909	2	83.369.909	2	83.300.000	0	0	0	0	0	0	2	83.300.000	100,00	99,92	4	166.669.909	200,00	199,92	DISPERTA			
139	X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	1	41.000.000	1	41.190.000	0	16.647.500	1	25.335.000	0	0	0	0	1	41.982.500	100,00	101,92	2	82.982.500	200,00	inf	DISPERTA			
140	X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
141	X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA				
142	X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4,8	0	4,8	0	48	362.610.000	4,8	32.889.350	0	241.923.900	0	81.000.000	0	0	4,8	355.813.250	10,00	98,13	9,6	355.813.250	200,00	inf	DISPERTA			
143	X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.395.304	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	4	84.000.000	100,00	98,37	8	169.000.000	200,00	198,82	DISPERTA			
144	X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	70.000.000	2	70.000.000	2	73.000.000	2	17.200.000	0	17.200.000	0	17.200.000	0	19.200.000	2	70.800.000	100,00	96,99	4	140.800.000	200,00	201,14	DISPERTA			
145	X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.900.000	2	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	2	40.000.000	100,00	97,80	4	80.000.000	200,00	200,00	DISPERTA			
146	X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	97.000.000	5	97.000.000	5	97.700.000	5	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	6.000.000	5	96.000.000	100,00	98,26	10	193.000.000	200,00	198,97	DISPERTA			
147	X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2	10.000.000	0	18.800.000	4	48.800.000	100,00	96,63	8	98.800.000	200,00	197,60	DISPERTA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml		
												I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	Rp	(6)	Rp	(7)	Rp	(8)	Rp	(9)	Rp	(10)	Rp	(11)	Rp	(12) = 8+9+10+11	Rp	(13) = 12/7 * 100%	Rp	(14) = 6+12	Rp	(15) = 14/5 * 100%	Rp	(16)	(17)	(18)	
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
148	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	0	5	0	5	35.700.000	5	35.700.000	0	0	0	0	0	0	5	35.700.000	100,00	100,00	10	35.700.000	200,00	inf	DISPERTA			
149	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	40.000.000	10	40.000.000	10	41.140.000	5	20.000.000	5	20.000.000	0	0	0	0	0	10	40.000.000	100,00	97,23	20	80.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
150	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10	25.000.000	100,00	100,00	20	50.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
151	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	25.000.000	10	10	10	25.000.000	0	0	0	10	25.000.000	0	0	0	0	10	25.000.000	100,00	100,00	20	25.000.010	200,00	100,00	DISPERTA		
152	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	0	0	0	0	20	74.161.500	0	2.585.000	20	70.332.000	0	0	0	0	0	20	72.917.000	100,00	98,32	20	72.917.000	inf	inf	DISPERTA		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	nan	nan	DISPERTA				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	nan	nan	DISPERTA				
153	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	24.000.000	5	24.000.000	5	24.415.000	5	5.300.000	0	18.200.000	0	0	0	0	0	5	23.500.000	100,00	96,25	10	47.500.000	200,00	197,92	DISPERTA		
154	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	16.000.000	10	16.000.000	10	16.340.000	0	3.000.000	10	13.000.000	0	0	0	0	0	10	16.000.000	100,00	97,92	20	32.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
155	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.660.000	5	3.000.000	0	200.000	0	0	0	0	0	5	3.200.000	100,00	87,43	10	6.200.000	200,00	206,67	DISPERTA		
156	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	2	100.000.000	0	0	2	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	2	100.000.000	100,00	100,00	2	100.000.000	inf	inf	DISPERTA		
157	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				102.222.134.500		102.190.534.500		181.013.639.110		5.771.697.658		28.496.748.117		49.830.692.400		92.135.692.000		176.234.830.175		97,36		278.425.364.675		272,37				
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				102.222.134.500		102.190.534.500		181.013.639.110		5.771.697.658		28.496.748.117		49.830.692.400		92.135.692.000		176.234.830.175		97,36		278.425.364.675		272,37				
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN	Peresentase peningkatan sarana TPHP	%		1.293.000.000	5	1.273.000.000	5	57.155.244.596	1	644.252.720	1	11.082.135.295	1	39.445.560.000	2	2.871.870.000	5	54.043.818.015	100,00	94,56	10	55.316.818.015	inf	4.278,18				
			Persentase peningkatan sarana pertanian	%			5		5		1		1		1		2		5		100,00		10		inf					
3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase peredaran sarana pertanian yang diawasi	%	100	0	100	0	100	23.627.450.000	25	83.879.000	25	9.073.546.690	25	10.643.450.000	25	2.282.440.000	100	22.083.315.690	100,00	93,46	200	22.083.315.690	200,00	inf				
1	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen gambir	unit	0	0	0	0	4	8.625.650.000	0	51.879.000	2	323.546.690	2	5.400.450.000	0	2.234.440.000	4	8.010.315.690	100,00	92,87	4	8.010.315.690	inf	inf	DISPERTA			
			Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen kakako	unit	0	0		1404	0		1203	0		0	0		1203		85,68		1203			inf		DISPERTA				
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0		5		100,00		5			inf		DISPERTA				

		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
												I		II		III		IV												
												(5)		(6)		(7)		(8)												
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)			
			Jumlah pengawasan sebaran terhadap sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang dilakukan	kab/kota	0		0		19		0		19		0		0		19		100,00		19		inf		DISPERTA			
			Jumlah penyediaan alsintan pascapanen komoditas tanaman pangan dan hortikultura	unit	0		0		605		0		564		0		0		564		93,22		564		inf		DISPERTA			
			Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (APPO)	unit	0		0		10		0		10		0		0		10		100,00		10		inf		DISPERTA			
			Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (cultivator)	unit	0		0		10		0		10		0		0		10		100,00		10		inf		DISPERTA			
			Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (handsprayer)	unit	0		0		100		0		100		0		0		100		100,00		100		inf		DISPERTA			
			Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (APPO)	unit	0		0		5		0		5		0		0		5		100,00		5		inf		DISPERTA			
			Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (cultivator)	unit	0		0		20		0		20		0		0		20		100,00		20		inf		DISPERTA			
			Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (handsprayer)	unit	0		0		100		0		100		0		0		100		100,00		100		inf		DISPERTA			
			Pengadaan sarana pasca panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll	buah	0		0		5		0		5		0		0		5		100,00		5		inf		DISPERTA			
			Pengadaan sarana pasca panen jeruk (bentor, keranjang panen, terpal)	buah	0		0		300		0		234		0		0		234		78,00		234		inf		DISPERTA			
			Pengadaan sarana pascapanen manggis (bentor, keranjang panen, terpal dll)	buah	0		0		3		0		3		0		0		3		100,00		3		inf		DISPERTA			
			Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran bawang merah yang diadakan	unit	0		0		5		0		5		0		0		5		100,00		5		inf		DISPERTA			
			Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran cabe yang diadakan	unit	0		0		4		0		4		0		0		4		100,00		4		inf		DISPERTA			
			Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran jeruk yang diadakan	unit	0		0		100		0		0		100		0		100		100,00		100		inf		DISPERTA			
			Pengadaan sarana pra panen jeruk (handsprayer)	unit	0		0		5		0		5		0		0.2		5.2		104,00		5.2		inf		DISPERTA			
			Penyaluran saprodi alpukat	Ha	0		0		200		0		200		0		0		200		100,00		200		inf		DISPERTA			
			Penyaluran saprodi bawang merah	Ha	0		0		100		0		100		0		0		100		100,00		100		inf		DISPERTA			
			Penyaluran saprodi cabe	ha	0		0		100		0		100		0		0		100		100,00		100		inf		DISPERTA			
			Penyaluran saprodi durian	Ha	0		0		200		0		200		0		0		200		100,00		200		inf		DISPERTA			
			Penyaluran saprodi jeruk	Ha	0		0		100		0		100		0		0		100		100,00		100		inf		DISPERTA			
			Penyaluran saprodi manggis	Ha	0		0		200		0		200		0		0		200		100,00		200		inf		DISPERTA			
			Persentase peningkatan usaha pascapanen pengolahan hasil sub urusan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	0		0		5		0		5		0		0		5		100,00		5		inf		DISPERTA			
			sarana pengolahan kakao	unit	0		0		4		0		4		0		0		4		100,00		4		inf		DISPERTA			
			uji organoleptik mutu kopi	unit	0		0		4		0		4		0		0		4		100,00		4		inf		DISPERTA			
2		3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Terlaksananya bimtek alsintan dan bimtek operator alsinyan	kali	0	0	0	0	17	14.951.800.000	0	32.000.000	0	8.750.000.000	0	5.243.000.000	17	0	17	14.025.000.000	100,00	93,80	17	14.025.000.000	inf	inf	DISPERTA		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5		5		5		5		0		0		0		5		100,00		10		200,00		DISPERTA			
			Terlaksananya Pengadaan alsin prapanen lainnya	unit	515		746		815		210		210		210		185		815		100,00		1561		303,11		DISPERTA			
			Terlaksannnya bantuan pupuk	kg	0		0		59715		0		0		0		59715		59715		100,00		59715		inf		DISPERTA			
			Jumlah pengawasan terhadap sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang dilakukan	kab/kota	19		191		19		0		0		0		19		19		100,00		210		1.105,26		DISPERTA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I	II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pengadaan hand tractor	unit	0		0		255		0		0		0		255		255		100,00		255		inf					
			Pengadaan APPO	unit	28		0		28		14		14		0		0		28		100,00		28		100,00					
			Terlaksananya Pengadaan Handsprayer	unit	0		0		502		0		0		0		502		502		100,00		502		inf					
3	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	2	0	2	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	2	48.000.000	2	48.000.000	100,00	96,00	4	48.000.000	200,00	inf	DISPERTA				
			JUmlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan	kab/kota	19		0		19		0		0		19		19		100,00		19		100,00		DISPERTA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman yang diawasi	%	100	1.293.000.000	100	1.273.000.000	100	33.527.794.596	0	560.373.720	0	2.008.588.605	0	28.802.110.000	100	589.430.000	100	31.960.502.325	100,00	95,33	200	33.233.502.325	200,00	2.570,26				
4	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	0	0	0	0	0	170.952.000	0	0	0	0	0	0	170.200.000	0	170.200.000	nan	99,56	0	170.200.000	nan	inf	DISPERTA				
			Jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi	batang	1800000		1800000		1800000	0	0		1800000		0		1800000	100,00	3600000		3600000	200,00		DISPERTA						
5	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	39132	175.000.000	39132	175.000.000	39132	175.000.000	0	0	0	39132	170.000.000	0	39132	170.000.000	100,00	97,14	78264	345.000.000	200,00	197,14	DISPERTA					
6	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Penyaluran benih bersertifikat komoditi hortikultura	%	100	523.000.000	100	523.000.000	100	550.000.000	0	0	0	100	542.000.000	0	0	100	542.000.000	100,00	98,55	200	1.065.000.000	200,00	203,63	DISPERTA				
7	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih lengkuas yang diadakan	batang	0	0	0	0	2000	8.390.155.205	0	221.161.700	200	486.394.342	1200	7.577.880.000	0	0	1400	8.285.436.042	70,00	98,75	1400	8.285.436.042	inf	inf	DISPERTA			
			jumlah benih alpukat yang diadakan	batang	0	0	0	20000	0	0	0	20000	0	0	20000	0	20000	100,00	20000	100,00	20000	inf	DISPERTA							
			Jumlah benih durian yang diadakan	batang	0	0	0	20000	0	0	0	20000	0	0	20000	0	20000	100,00	20000	100,00	20000	inf	DISPERTA							
			Jumlah benih jahe yang diadakan	kg	0	0	0	2000	0	2000	0	2000	0	0	2000	0	2000	100,00	2000	100,00	2000	inf	DISPERTA							
			Jumlah benih kunyit yang diadakan	kg	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000	100,00	2000	100,00	2000	inf	DISPERTA								
			Pelatihan pengolahan hasil komoditas hortikultura	unit	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	5	100,00	5	100,00	5	inf	DISPERTA							
			Pelatihan teknis agribisnis komoditas hortikultura	angkatan	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	4	100,00	4	100,00	4	inf	DISPERTA							
			Penerapan GAP/SOP komoditas hortikultura	komoditi	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	4	100,00	4	100,00	4	inf	DISPERTA							
			Penerapan GHP Komoditas Hortikultura	komoditi	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	4	100,00	4	100,00	4	inf	DISPERTA							
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi cabe	gram	0	0	0	16500	0	0	0	16500	0	0	16500	0	16500	100,00	16500	100,00	16500	inf	DISPERTA							
			Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	0	100	100,00	100	100,00	100	inf	DISPERTA							
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi bawang merah	kg	0	0	0	100000	0	0	0	100000	0	0	100000	0	100000	100,00	100000	100,00	100000	inf	DISPERTA							
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi jeruk	batang	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0	0	40000	0	40000	100,00	40000	100,00	40000	inf	DISPERTA							
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi manggis	batang	0	0	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	20000	100,00	20000	100,00	20000	inf	DISPERTA							
			Penyaluran benih tanaman hias	paket	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	2	100,00	2	100,00	2	inf	DISPERTA							
			Persentase mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman yang diawasi	%	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	0	100	100,00	100	100,00	100	inf	DISPERTA							
8	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura [UPTD BALAI PENGAWASAN	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	nan	100,00	0	200.000.000	nan	200,00	DISPERTA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)
		DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah benih/bibit hortikultura yang diawasi, disediakan /diadakan baru dan diedarkan/disalurkan	komoditi	9		9		9		3		3		3		0		9		100,00		18		200,00		DISPERTA		
			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	9		9		9		0		0		9		0		9		100,00		18		200,00		DISPERTA		
				Laporan	0		0		5		0		5		0		0		5		100,00		5		inf		DISPERTA		
9	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produksi jagung	ton	0	0	0	0	1012295	11.011.292.891	0	28.466.000	0	241.909.101	0	10.000.000.000	0	342.000.000	0	10.612.375.101	0,00	96,38	0	10.612.375.101	nan	inf	DISPERTA		
			Jumlah produksi padi	ton	0	0	0	0	1573767		0	0	0	0	0	1345666	0	1345666	0	1345666	85,51	1345666	0	1345666	inf	DISPERTA			
			Meningkatnya penggunaan alsintan	unit	0	0	0	0	3118		0	0	0	0	0	3111	0	3111	0	3111	99,78	3111	0	3111	inf	DISPERTA			
			Penerapan GAP/SOP komoditas tanaman pangan berupa SL PTT Padi (Jarwo)	unit	0	0	0	0	80		0	0	0	0	80	0	80	0	80	100,00	80	0	80	inf	DISPERTA				
			Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	0	0	0	0	100		0	100	0	100	0	0	100	0	100	100,00	100	0	100	inf	DISPERTA				
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi jagung	ton	0	0	0	0	120		0	0,1	0	120	0	120,1	0	120,1	0	120,1	100,08	120,1	0	120,1	inf	DISPERTA			
			Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi Padi	ton	0	0	0	0	2500		0	0	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	100,00	2500	0	2500	inf	DISPERTA			
			Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya	%	0	0	0	0	100		0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00	100	0	100	inf	DISPERTA			
			Persentase mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman yang diawasi	%	0	0	0	0	100		0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00	100	0	100	inf	DISPERTA			
10	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang diawasi, disediakan /diadakan baru dan diedarkan/disalurkan	komoditi	4	240.000.000	0	220.000.000	4	240.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	35.000.000	4	230.000.000	100,00	95,83	4	450.000.000	100,00	187,50	DISPERTA		
			Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	0	nan	DISPERTA			
				komoditi	2		2	2	2		1	1	1	0	0	2	100,00	4	200,00	100,00	4	200,00	100,00	200,00	DISPERTA				
				Dokumen	0	0	0	5	0		0	0	5	0	0	5	100,00	5	inf	100,00	5	inf	100,00	inf	DISPERTA				
11	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	75.000.000	nan	100,00	0	150.000.000	nan	200,00	DISPERTA		
			JUmlah benih/bibit tanaman pangan yang diawasi , disediakan/diadakan baru dan diedarkan/disalurkan	komoditi	4		4		4		1		1		1		1		4		100,00		8		200,00		DISPERTA		
12	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih/bibit cengkeh yang di adakan	batang	0	0	0	0	50000	12.633.474.500	0	203.516.020	2000	1.173.055.162	3000	10.230.000.000	0	0	5000	11.606.571.182	10,00	91,87	5000	11.606.571.182	inf	inf	DISPERTA		
			Jumlah benih bibit pala yang diadakan	batang	0	0	0	0	70000		0	0	0	0	70000		0	70000		100,00		70000		inf		DISPERTA			
			Jumlah benih kayu manis yang diadakan	batang	0	0	0	0	55000		0	0	0	0	55000		0	55000		100,00		55000		inf		DISPERTA			
			Jumlah benih tembakau yang diadakan	batang	0	0	0	0	15000		0	0	0	0	15000		0	15000		100,00		15000		inf		DISPERTA			
			Penaracab GHP/SOP komoditi perkebunan	komoditi	0	0	0	0	6		0	0	0	6	0	6	0	6	0	100,00	6	0	inf	DISPERTA					
			Penerapan GHP Komoditas perkebunan	komoditi	0	0	0	0	5		0	0	0	5	0	5	0	5	0	100,00	5	0	inf	DISPERTA					
			Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	0	0	0	0	100		0	0	0	100	0	100	0	100	0	100,00	100	0	100	inf	DISPERTA				
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi kakao	batang	0	0	0	0	10000		0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	100,00	10000	0	10000	inf	DISPERTA				
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi karet	batang	0	0	0	0	100000		0	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	10,00	10000	0	10000	inf	DISPERTA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml				
											I		II		III		IV																
											(8)		(9)		(10)		(11)													(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa	batang	0		0		400000		0		0		400000		0		400000		100,00		400000		inf				DISPERTA				
			Penyaluran benih bersertifikat komoditi kopi	batang	0		0		36000		0		0		36000		0		36000		100,00		36000		inf				DISPERTA				
			Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi kelapa sawit	batang	0		0		125000		0		0		125000		0		125000		100,00		125000		inf				DISPERTA				
			Penyaluran benih bersertifikta komoditi gambir	batang	0		0		250000		0		0		250000		0		250000		100,00		250000		inf				DISPERTA				
13	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah benih/bibit perkebunan yang diawasi/disediakan/diadakan baru dan didarkan/disalurkan	komoditi	15	180.000.000	15	180.000.000	15	181.920.000	0	42.230.000	5	42.230.000	5	42.230.000	5	42.230.000	15	168.920.000	100,00	92,85	30	348.920.000	200,00	193,84				DISPERTA			
			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	16		16		16		4		4		4		4		16		100,00		32		200,00					DISPERTA			
				Laporan	0		0		5		0		5		0		0		5		100,00		5		inf					DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf							
Predikat Kinerja																									-	-							
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DANPENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP	%		1.641.474.500	0,6	1.641.474.500	0,6	1.642.438.999	0,6	459.520.000	0	459.520.000	0	459.520.000	0	209.556.000	0,6	1.588.116.000	100,00	96,69	1,2	3.229.590.500	inf	196,75							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Gerakan Pengendalian OPT Utama Tanaman Perkebunan	%	99	1.641.474.500	99	1.641.474.500	99	1.642.438.999	33	459.520.000	33	459.520.000	33	459.520.000	0	209.556.000	99	1.588.116.000	100,00	96,69	198	3.229.590.500	200,00	196,75							
			Persentase bencana pertanian provinsi yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi		75		75		75		25		25		25		0		75		100,00		150		200,00								
1	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Pelatihan Lapangan Pengendalian OPT Perkebunan	lokasi	0	378.474.500	0	378.474.500	0	378.474.500	0	102.000.000	0	102.000.000	0	102.000.000	0	52.310.000	0	358.310.000	nan	94,67	0	736.784.500	nan	194,67				DISPERTA			
			Gerakan Pengendalian OPT Utama Tanaman Perkebunan	lokasi	3		3		3		1		1		1		0		3		100,00		6		200,00					DISPERTA			
			Penerapan PHT OPT Tembakau (DBHCHT)	lokasi	3		3		3		1		1		1		0		3		100,00		6		200,00					DISPERTA			
			Klinik PHT Tanaman Perkebunan	unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan					DISPERTA			
			Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Regu Pengendali OPT	lokasi	12		12		12		3		3		3		3		12		100,00		24		200,00					DISPERTA			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan					DISPERTA			
			Jumlah pengendalian OPT TPH dan Perkebunan yang dilakukan	kali	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan					DISPERTA			
			Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	lokasi	2		2		2		1		1		0		0		2		100,00		4		200,00					DISPERTA			
2	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	0	638.000.000	0	638.000.000	0	638.964.499	0	201.200.000	0	201.200.000	0	201.200.000	0	21.900.000	0	625.500.000	nan	97,89	0	1.263.500.000	nan	198,04				DISPERTA			
			Jumlah pengendalian OPT TPH	kali	20		20		20		5		5		5		5		20		100,00		40		200,00					DISPERTA			
3	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan terkait Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Perkebunan	kab/kota	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	20.120.000	0	20.120.000	0	20.120.000	0	12.001.000	0	72.361.000	nan	96,48	0	147.361.000	nan	196,48				DISPERTA			
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0		0		0		0		0		0		0,2		0,2		inf		0,2		inf					DISPERTA			
			Penanganan DPI Perkebunan	lokasi	2		2		2		1		1		0		0		2		100,00		4		200,00					DISPERTA			
4	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman	Ha	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	92.800.000	nan	92,80	0	192.800.000	nan	192,80				DISPERTA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml	
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani																											
			JUmlah movev PDPI	Kab/kota	19		19		19		0		0		19		0		19		100,00		38		200,00		DISPERTA			
5	3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	0	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	97.800.000	0	97.800.000	0	97.800.000	0	97.800.000	0	391.200.000	nan	97,80	0	791.200.000	nan	197,80	DISPERTA			
6	3.27.05.1.01.04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	JUmlah penanggulangan pasca bencana alam bidang TPHP yang dilakukan	HA	9000	50.000.000	9000	50.000.000	9000	50.000.000	2000	15.200.000	2000	15.200.000	2000	15.200.000	2000.3	2.345.000	8000.3	47.945.000	88,89	95,89	17000.3	97.945.000	188,89	195,89	DISPERTA			
			Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	1		1		1		0		0		1		0		1		100,00		2		200,00		DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	195,95			
Predikat Kinerja																										-	ST			
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha petanian	%		100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	1	0	1	7.259.450	1	45.300.000	2	43.200.000	5	95.759.450	100,00	95,76	10	195.759.450	inf	195,76				
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perkebunan yang naik klasifikasinya hasil penilaian pada tahun berjalan	usaha perkebunan	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	1	0	1	7.259.450	1	45.300.000	0	43.200.000	3	95.759.450	100,00	95,76	6	195.759.450	200,00	195,76				
1	3.27.06.1.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
2	3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
			Jumlah rekomendasi dan sertifikat klasifikasi usaha pertanian di lintas kab/kota yang dikeluarkan	sertifikat usaha	9		9		9		0		9		0		0		9		100,00		18		200,00		DISPERTA			
3	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	5,7	100.000.000	5,7	100.000.000	57	100.000.000	15	0	15	7.259.450	15	45.300.000	12	43.200.000	57	95.759.450	100,00	95,76	62,7	195.759.450	1.100,00	195,76	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan			
Predikat Kinerja																										-	-			
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANPRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian	%		88.568.200.000	5	88.568.200.000	5	110.816.495.515	1	1.608.693.038	1	10.243.558.650	1	7.115.812.400	2	86.268.566.000	5	105.236.630.088	100,00	94,96	10	193.804.830.088	inf	218,82				
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian terkelola dengan baik	%	100	88.568.200.000	100	88.568.200.000	100	110.816.495.515	25	1.608.693.038	25	10.243.558.650	25	7.115.812.400	25	86.268.566.000	100	105.236.630.088	100,00	94,96	200	193.804.830.088	200,00	218,82				
1	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	918.200.000	1	918.200.000	1	989.836.625	0	213.000.000	0	213.000.000	0	213.000.000	1	213.000.000	1	852.000.000	100,00	86,07	2	1.770.200.000	200,00	192,79	DISPERTA			
			Luas lahan pertanian organik yang dikembangkan	Ha	450		450		450		150		150		150		0		450		100,00		900		200,00		DISPERTA			
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	0		0		1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		DISPERTA			
2	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kampung yang melakukan pengembangan kampung buah/sayur/biofarmaka	kampung	0	0	0	0	35	6.351.292.890	0	77.462.538	35	316.836.250	0	5.340.000.000	0	123.000.000	35	5.857.298.788	100,00	92,22	35	5.857.298.788	inf	inf	DISPERTA			
			Jumlah pupuk jagung yang dapat disalurkan	ton	0		0		300		0		300		0		0		300		100,00		300		inf		DISPERTA			
			Jumlah saprodi hortikultura yang disalurkan	Ha	0		0		519		0		519		0		0		519		100,00		519		inf		DISPERTA			
			Luas pengembangan kawasan dan komoditas pertanian	hektar	0		0		530		0		530		0		0		530		100,00		530		inf		DISPERTA			
3	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	100,00	100,00	2	400.000.000	200,00	200,00	DISPERTA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]																											
4	3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	68.080.000.000	1	68.080.000.000	1	68.080.000.000	0	0	0	0	0	0	1	67.880.000.000	1	67.880.000.000	100,00	99,71	2	135.960.000.000	200,00	199,71	DISPERTA		
			Jumlah koordinasi terhadap pembangunan/peningkatan Jalan Usaha Tani yang dilakukan	kab/kota	19		19		19		0		0		0		19		19		100,00		38		200,00		DISPERTA		
			Pembangunan/peningkatan Jalan Usaha Tani	unit	15		14		15		0		0		0		15		15		100,00		29		193,33		DISPERTA		
5	3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1	19.120.000.000	1	19.120.000.000	1	19.525.000.000	0	1.232.400.000	0	9.347.010.000	1	1.146.100.000	0	4.500.000.000	1	16.225.510.000	100,00	83,10	2	35.345.510.000	200,00	184,86	DISPERTA		
			Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha	100		100		100		100		0		0		0		100		100,00		200		200,00		DISPERTA		
			Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	unit	20		20		20		5		5		5		5		20		100,00		40		200,00		DISPERTA		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT)	kab/kota	19		19		19		19		0		0		0		19		100,00		38		200,00		DISPERTA		
6	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	nan	100,00	0	300.000.000	nan	200,00	DISPERTA		
			Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara	unit	1		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		200,00		DISPERTA		
			Jumlah sarana/prasarana kelengkapan laboratorium pertanian	paket	1		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		200,00		DISPERTA		
7	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara	unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	100,00	100,00	2	200.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
8	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara	unit	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	134.200.000	1	134.200.000	100,00	89,47	1	134.200.000	inf	inf	DISPERTA		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
9	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara	unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		
10	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	1	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	48.000.000	1	48.000.000	100,00	96,00	1	48.000.000	100,00	inf	DISPERTA		
11	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang dilaksanakan	kab/kota	0	0	0	0	19	450.000.000	0	85.830.500	19	166.712.400	0	166.712.400	0	0	19	419.255.300	100,00	93,17	19	419.255.300	inf	inf	DISPERTA		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA		
12	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I	II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
13	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	6.569.657.269	0	0	0	0	0	1	6.169.657.269	1	6.169.657.269	100,00	93,91	1	6.169.657.269	inf	inf	DISPERTA			
14	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
15	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
16	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	3.949.620.516	0	0	0	0	0	1	3.149.620.516	1	3.149.620.516	100,00	79,74	1	3.149.620.516	inf	inf	DISPERTA			
17	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	4.251.088.215	0	0	0	0	0	1	4.051.088.215	1	4.051.088.215	100,00	95,30	1	4.051.088.215	inf	inf	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan				
Predikat Kinerja																								-	-				
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	orang		10.619.460.000	1000	10.607.860.000	1000	11.299.460.000	250	2.764.500.000	250	2.764.500.000	250	2.742.500.000	1000	11.036.000.000	100,00	97,67	2000	21.643.860.000	inf	203,81					
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase tenaga penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	%	50	400.000.000	50	388.400.000	50	400.000.000	25	95.000.000	25	95.000.000	25	95.000.000	100	380.000.000	200,00	95,00	150	768.400.000	300,00	192,10					
1	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	150.000.000	100	139.000.000	100	150.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	100	140.000.000	100,00	93,33	200	279.000.000	200,00	186,00	DISPERTA				
2	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	677	150.000.000	677	149.400.000	677	150.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	67	35.000.000	667	140.000.000	98,52	93,33	1344	289.400.000	198,52	192,93	DISPERTA		
3	3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	100	100.000.000	100,00	100,00	200	200.000.000	200,00	200,00	DISPERTA				
			Jumlah kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta	kerjasama	1		1		1		1		1		1		4		400,00		5		500,00		DISPERTA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								274,63	192,98				
Predikat Kinerja																								ST	ST				
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan	unit	14	10.219.460.000	14	10.219.460.000	14	10.899.460.000	14	2.669.500.000	0	2.669.500.000	0	2.669.500.000	0	2.647.500.000	14	10.656.000.000	100,00	97,77	28	20.875.460.000	200,00	204,27			
4	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
5	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
6	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghaml
											I	II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Inovasi Pertanian																										
7	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Terlaksananya peningkatan kompetensi personil laboratorium	kali	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	100.000.000	nan	100,00	0	200.000.000	nan	200,00	DISPERTA		
			Terlaksananya peningkatan kompetensi personil laboratorium/uji banding	kali	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
			Terlaksananya kegiatan penyusunan/penginputan data base alsintan	kab/kota	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
			Terlaksananya kegiatan bimtek operator mekanik/alsintan	angkatan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
			Terlaksananya pertemuan komunikasi laboratorium	kali	6		6		6		2		2		2		0		6		100,00		12		200,00		DISPERTA		
			Terlaksananya kegiatan pengujian mutu alsintan	kali	5		5		5		1		1		1		2		5		100,00		10		200,00		DISPERTA		
			Terlaksananya uji banding antar tim	kali	2		2		2		2		0		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
			Terlaksananya kegiatan demonstrasi alsintan	kali	2		2		2		2		0		0		0		2		100,00		4		200,00		DISPERTA		
8	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	2	60.000.000	100,00	100,00	4	120.000.000	200,00	200,00	DISPERTA		
9	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah diseminasi infprmasi teknis, sosial ekonomi dan inovasi pertanian yang dilakukan	kali	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	0	100,00	nan	DISPERTA			
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERTA		
10	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	kelompok	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	10.500.000	20	48.000.000	100,00	96,00	40	98.000.000	200,00	196,00	DISPERTA		
11	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	730	10.009.460.000	730	10.009.460.000	730	10.689.460.000	200	2.612.000.000	200	2.612.000.000	200	2.612.000.000	130	2.612.000.000	730	10.448.000.000	100,00	97,74	1460	20.457.460.000	200,00	204,38	DISPERTA		
			Terlaksananya Panas Tani	orang	1000		1000		1000		250		250		250		250		1000		100,00		2000		200,00		DISPERTA		
			Jumlah enterpreneur baru yang tercipta	orang	300		300		300		75		75		75		75		300		100,00		600		200,00		DISPERTA		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	20		20		20		5		5		5		5		20		100,00		40		200,00		DISPERTA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan				
Predikat Kinerja																								-	-				
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang ditingkatkan kapasitas nya	%	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	2.5	0	100,00	nan	5	0	200,00	nan				
12	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	Jumlah event/festival atau promosi lainnya yang diadakan atau diikuti	kali	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
			Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	0		0		5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA		
			Jumlah penguatan kelembagaan kooperasi petani yang dilakukan	kali	0		0		19		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERTA		
13	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	Laporan	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
14	3.27.07.1.03.03	Penilai Kelayakan dan Standarisasi Manajamen	Jumlah Kooperasi Petani yang Ditilai Kelayakan dan	Unit	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghami		
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koorporasi Petani	Standarisasi Manajemennya																												
15	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
16	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
											I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				768.961.086.455		190.388.003.068		99.478.563.310		4.955.884.764		24.665.995.192		39.798.182.870		23.039.154.894		92.459.217.720		92,94		282.847.220.788		36,78						
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				126.127.631.261		44.201.572.249		28.249.291.612		3.954.154.798		9.019.364.912		8.976.473.048		4.528.804.301		26.478.797.059		93,73		70.680.369.308		56,04						
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				126.127.631.261		44.201.572.249		28.249.291.612		3.954.154.798		9.019.364.912		8.976.473.048		4.528.804.301		26.478.797.059		93,73		70.680.369.308		56,04						
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%		126.127.631.261	0	44.201.572.249	100	28.249.291.612	0	3.954.154.798	0	9.019.364.912	0	8.976.473.048		4.528.804.301	0	26.478.797.059	0,00	93,73	0	70.680.369.308	nan	56,04						
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	80	3.404.000.000	0	578.495.083	80	360.398.000	0	65.594.500	0	13.530.000	40	16.498.250	40	82.052.900	80	177.675.650	100,00	49,30	80	756.170.733	100,00	22,21						
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	54	1.879.000.000	9	335.246.250	2	240.398.000	0	58.803.500	2	3.050.000	5	7.116.250	2	35.848.000	9	104.817.750	450,00	43,60	18	440.064.000	33,33	23,42	DISNAK					
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	20.000.000	0		3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	30	655.000.000	5	24.853.900	5	120.000.000	0	6.791.000	5	10.480.000	0	9.382.000	0	46.204.900	5	72.857.900	100,00	60,71	10	97.711.800	33,33	14,92	DISNAK					
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan OPD	Dokumen	24	850.000.000	4	218.394.933	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	218.394.933	16,67	25,69	DISNAK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							20,83	16,01								
Predikat Kinerja																							SR	SR								
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	0	94.588.932.791	0	30.671.939.208	100	18.325.272.156	0	3.006.445.327	0	6.265.378.043	20	6.319.544.377	80	2.284.410.483	100	17.875.778.230	100,00	97,55	100	48.547.717.438	inf	51,32						
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	900	87.732.432.791	296	28.922.478.684	150	17.467.872.156	0	2.858.645.327	146	6.147.368.043	0	6.099.066.177	0	2.126.470.743	146	17.231.550.290	97,33	98,65	442	46.154.028.974	49,11	52,61	DISNAK					
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	200	6.590.000.000	72	1.564.626.996	46	742.820.000	0	130.530.000	46	86.060.000	0	171.720.000	0	136.400.000	46	524.710.000	100,00	70,64	118	2.089.336.996	59,00	31,70	DISNAK					
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	6.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DISNAK						
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	30		0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00		DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA						
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	1	10.000.000	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	1	10.000.000	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	72	240.000.000	24	184.833.528	12	114.580.000	0	17.270.000	5	31.950.000	4	48.758.200	3	21.539.740	12	119.517.940	100,00	104,31	36	304.351.468	50,00	126,81	DISNAK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	21,11								
Predikat Kinerja																							-	SR								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	0	560.000.000	0	93.264.647	100	382.901.600	0	110.914.035	0	40.922.552	75	46.046.600	25	124.806.945	100	322.690.132	100,00	84,27	100	415.954.779	inf	74,28						
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	4	10.000.000	0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	17	30.000.000	0		0	18	221.370.000	0	103.834.035	0	3.670.000	9	3.552.000	9	95.111.295	18	206.167.330	100,00	93,13	18	206.167.330	105,88	687,22	DISNAK				
			Jumlah dokumen pengamanan Hukum	Dokumen	5		0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00		DISNAK							
			Jumlah tanah yang bersertifikat	Persil	5		0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00		DISNAK							
			Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas)	Unit/Set	6		0		6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00		DISNAK							
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen	1	50.000.000	0		0	1	143.786.600	0	7.080.000	0	37.252.552	0	36.878.600	1	25.134.900	1	106.346.052	100,00	73,96	1	106.346.052	100,00	212,69	DISNAK				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang	7		0		7		0		0		0		7		7		100,00		7		100,00		DISNAK					
14	X.XX.01.1.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	DISNAK					
			Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	4		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA				
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	16	460.000.000	3	93.264.647	4	17.745.000	0	0	0	0	2	5.616.000	2	4.560.750	4	10.176.750	100,00	57,35	7	103.441.397	43,75	22,49	DISNAK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	61,49				
Predikat Kinerja																											-	R				
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	%	0	50.000.000	0	0	100	10.000.000	0	0	0	75	0	25	0	100	0	100,00	0,00	100	0	inf	0,00							
16	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
17	X.XX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	10.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
			Jumlah Kebijakan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA				
18	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	10.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	DISNAK						
19	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	10.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
20	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	12	10.000.000	0	0	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan pada APBD perubahan dihapuskan/rasinalisasi					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	0,00				
Predikat Kinerja																											-	SR				
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	%	0	3.760.000.000	0	371.086.359	100	906.460.000	0	24.289.374	0	218.618.963	75	156.923.753	25	274.519.000	100	674.351.090	100,00	74,39	100	1.045.437.449	inf	27,80						
21	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel	800	1.510.000.000	300	217.160.000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	300	217.160.000	37,50	14,38	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
22	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	50	570.000.000	10	94.957.814	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	10	94.957.814	20,00	16,66	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll)	Dokumen	0		0		5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA				
23	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	110	1.180.000.000	0	0	150	750.000.000	0	0	0	197.474.550	60	130.844.008	0	274.519.000	60	602.837.558	40,00	80,38	60	602.837.558	54,55	51,09	DISNAK					
			Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Orang	150		0		150		0		0		150		150		300		200,00		300		200,00		DISNAK					
24	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	500.000.000	0	58.968.545	0	156.460.000	0	24.289.374	0	21.144.413	0	26.079.745	0	0	0	71.513.532	nan	45,71	0	130.482.077	nan	26,10	DISNAK					
			Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/Bimtek	Orang	50		10		20		0		5		5		10		20		100,00		30		60,00		DISNAK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	4,51				
Predikat Kinerja																											-	SR				
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	0	6.778.018.400	0	2.429.389.720	100	1.501.540.700	0	241.065.399	0	397.457.624	75	388.778.995	25	186.762.660	100	1.214.064.678	100,00	80,85	100	3.643.454.398	inf	53,75						
25	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	120.000.000	0	39.749.000	0	25.021.200	0	24.859.600	0	0	0	0	6.940.000	0	31.799.600	nan	127,09	0	71.548.600	nan	59,62	DISNAK						
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Set	60		20		18		0		0		18		18		100,00		38		63,33		DISNAK							
26	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	0	1.765.000.000	0	1.051.676.500	5	172.207.400	0	0	5	166.900.000	0	0	0	5	166.900.000	100,00	96,92	5	1.218.576.500	inf	69,04	DISNAK						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendong
											I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Disediakan																														
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	145		55		19		0		19		0		0		19		100,00		74		51,03		DISNAK						
27	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	980.000.000	0	180.491.500	0	253.122.100	0	11.760.000	0	85.645.700	0	115.083.500	0	0	0	212.489.200	nan	83,95	0	392.980.700	nan	40,10	DISNAK						
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit	150		50		61		0		5		30		26		61		100,00		111		74,00		DISNAK						
			Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	Kali	100		0		20		0		5		10		5		20		100,00		20		20,00		DISNAK						
28	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Unit	60	595.000.000	20	187.119.850	10	91.150.000	0	52.807.000	5	9.387.050	0	7.390.500	5	10.395.000	10	79.979.550	100,00	87,74	30	267.099.400	50,00	44,89	DISNAK						
29	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Exemplar	0	227.000.000	0	58.165.000	0	40.440.000	0	4.720.000	0	7.545.000	0	11.300.000	0	7.480.000	0	31.045.000	nan	76,77	0	89.210.000	nan	39,30	DISNAK						
			Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan (Koran dan buku)	Bulan	72		21		12		0		0		9		3		12		100,00		33		45,83		DISNAK						
30	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	2.985.000.000	0	912.187.870	0	909.600.000	0	146.918.799	0	127.979.874	0	255.004.995	0	161.947.660	0	691.851.328	nan	76,06	0	1.604.039.198	nan	53,74	DISNAK	Kegiatan pada APBD perubahan dihapuskan/rasinalisasi					
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	6		2		1		0		1		0		0		1		100,00		3		50,00		DISNAK						
31	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Arsip	5	10.000.000	0	0	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK						
32	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	Aplikasi/Modul	2	96.018.400	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK						
			Jumlah Sarana prasarana yang tersedia	Jumlah	3		0		3		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DISNAK						
			Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	Orang	1		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DISNAK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	9,58								
Predikat Kinerja																								-	SR								
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	2.627.309.240	0	358.170.000	100	748.785.960	0	0	0	574.950.000	0	146.076.000	0	31.050.000	0	752.076.000	0,00	100,44	0	1.110.246.000	nan	42,26							
33	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler yang diadakan	Unit	152	1.250.000.000	62	358.170.000	30	212.231.000	0	0	0	62.500.000	30	146.076.000	0	0	30	208.576.000	100,00	98,28	92	566.746.000	60,53	45,34	DISNAK						
34	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Unit	10	177.309.240	0	0	10	362.320.960	0	0	0	343.650.000	0	0	10	0	10	343.650.000	100,00	94,85	10	343.650.000	100,00	193,81	DISNAK						
35	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	Unit	80	1.200.000.000	0	0	20	174.234.000	0	0	0	168.800.000	20	0	0	31.050.000	20	199.850.000	100,00	114,70	20	199.850.000	25,00	16,65	DISNAK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								3,50	7,31								
Predikat Kinerja																								SR	SR								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	7.695.983.330	0	7.707.100.100	100	4.751.835.340	0	392.251.740	0	1.269.309.280	75	1.238.237.389	25	1.422.307.078	100	4.322.105.487	100,00	90,96	100	12.029.205.587	inf	156,30							
36	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Surat	50	15.000.000	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam DPA					
37	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	3500	7.662.983.330	1200	1.994.805.784	500	1.137.900.000	0	213.481.733	200	281.778.502	100	344.798.301	200	230.457.196	500	1.070.515.732	100,00	94,08	1700	3.065.321.516	48,57	40,00	DISNAK						
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Rekening	12		4		2		0		2		0		0		2		100,00		6		50,00		DISNAK						
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Meter kubik	270000		90000		45000		0		5000		20000		20000		45000		100,00		135000		50,00		DISNAK						
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	31660000		10553000		5276832		1319208		1319208		1319208		1319208		5276832		100,00		15829832		50,00		DISNAK						
38	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	18.000.000	0	5.712.294.316	0	3.613.935.340	0	178.770.007	0	987.530.778	0	893.439.088	0	1.191.849.882	0	3.251.589.755	nan	89,97	0	8.963.884.071	nan	49.799,36	DISNAK						
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	382		60		74		0		30		30		74		134		181,08		194		50,79		DISNAK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	1.311,56								
Predikat Kinerja																								-	ST								
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%	0	6.663.387.500	0	1.992.127.132	100	1.262.097.856	0	113.594.423	0	239.198.450	75	664.367.684	25	122.895.235	100	1.140.055.792	100,00	90,33	100	3.132.182.924	inf	47,01							
39	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	Unit	180	3.425.000.000	61	1.018.590.050	30	472.050.000	0	32.112.306	15	220.383.450	15	199.596.900	0	77.524.350	30	529.617.006	100,00	112,20	91	1.548.207.056	50,56	45,20	DISNAK						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendong
												I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																													
40	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	173.387.500	0	0	259	253.530.000	0	15.410.000	0	17.415.000	150	51.338.550	109	0	259	84.163.550	100,00	33,20	259	84.163.550	259,00	48,54	DISNAK				
41	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	1.730.000.000	20	781.053.082	2	445.596.000	0	0	0	0	2	413.432.234	0	29.884.885	2	443.317.119	100,00	99,49	22	1.224.370.201	36,67	70,77	DISNAK				
42	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1410	1.335.000.000	461	192.484.000	2	90.921.856	0	66.072.117	0	1.400.000	0	0	0	15.486.000	0	82.958.117	0,00	91,24	461	275.442.117	32,70	20,63	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								5,92	4,41						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				642.833.455.194		146.186.430.819		71.229.271.698		1.001.729.966		15.646.630.280		30.821.709.822		18.510.350.593		65.980.420.661		92,63		212.166.851.480		33,00					
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				642.833.455.194		146.186.430.819		71.229.271.698		1.001.729.966		15.646.630.280		30.821.709.822		18.510.350.593		65.980.420.661		92,63		212.166.851.480		33,00					
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	%		29.847.719.000	0	739.860.702	100	3.968.636.731	0	21.291.180	0	959.662.392	75	743.016.672	25	1.547.460.093	100	3.271.430.337	100,00	82,43	100	4.011.291.039	inf	13,44					
			Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	%			0		100		0		0		75		25		100		100,00		100		inf						
			Persentase Prasarana Pertanian yang Terkelola dengan Baik	%	0	26.800.000.000	0	520.680.914	100	3.566.708.231	0	21.291.180	0	940.474.892	75	644.987.971	25	1.491.287.271	100	3.098.041.314	100,00	86,86	100	3.618.722.228	inf	13,50					
1	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian/peternakan yang disusun	Dokumen	5	1.250.000.000	1	73.329.500	2	169.978.000	0	2.751.180	0	7.515.000	1	6.291.000	1	61.427.200	2	77.984.380	100,00	45,88	3	151.313.880	60,00	12,11	DISNAK				
2	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah laporan pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian yang disusun	Laporan	5	25.000.000.000	1	447.351.414	2	200.000.000	0	18.540.000	0	0	0	26.171.800	2	76.647.000	2	121.358.800	100,00	60,68	3	568.710.214	60,00	2,27	DISNAK				
			Jumlah pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian yang dilakukan, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kali	55		0		55		0		0		0		55		55		100,00		55		100,00		DISNAK				
3	3.27.03.1.01.05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan [UPD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	1	730.042.514	0	0	0	498.277.892	1	133.202.750	0	75.041.405	1	706.522.047	100,00	96,78	1	706.522.047	inf	inf	DISNAK				
4	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang dilaksanakan	Kali	20	550.000.000	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada dalam RKPD			
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang disusun	Laporan	1		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DISNAK				
5	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tumbuhan Sakato (BPTS DTS)]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	858.488.817	0	0	0	219.685.000	1	292.716.800	0	111.306.217	1	623.708.017	100,00	72,65	1	623.708.017	inf	inf	DISNAK				
6	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah gedung UPTD peternakan serta sarana pendukungnya yang direhab dan dipelihara Rehabilitasi dan pemeliharaan UPTD PMPP	unit	0	0	0	0	1	243.945.300	0	0	0	0	1	78.346.000	0	162.041.300	1	240.387.300	100,00	98,54	1	240.387.300	inf	inf	DISNAK				
7	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPD Ternak Unggas]	Jumlah Gedung UPTD peternakan serta sarana pendukungnya yang direhab dan Dipelihara Rehabilitasi dan Pemeliharaan UPTD Ternak Unggas	Unit	0	0	0	0	1	700.136.000	0	0	0	0	1	31.580.000	0	660.644.573	1	692.224.573	100,00	98,87	1	692.224.573	inf	inf	DISNAK				
8	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPD Ternak Ruminansia]	Jumlah gedung UPTD peternakan serta sarana pendukungnya yang direhab dan dipelihara Rehabilitasi dan pemeliharaan UPTD PMPP	Unit	0	0	0	0	1	374.280.000	0	0	0	0	1	30.041.250	0	318.140.463	1	348.181.713	100,00	93,03	1	348.181.713	inf	inf	DISNAK				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendongkrak
												I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
9	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah gedung UPTD peternakan serta sarana pendukungnya yang direhab dan dipelihara: Terlaksananya pembangunan pet hotel, Rehabilitasi dan pemeliharaan UPTD RSH	Unit	0	0	0	0	1	289.837.600	0	0	0	214.997.000	1	46.638.371	0	26.039.113	1	287.674.484	100,00	99,25	1	287.674.484	inf	inf	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola	Wilayah	0	3.047.719.000	0	219.179.788	24	401.928.500	0	0	0	19.187.500	0	98.028.701	24	56.172.822	24	173.389.023	100,00	43,14	24	392.568.811	inf	12,88					
10	3.27.03.1.02.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah laporan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang disusun	laporan	6	920.000.000	2	189.236.188	1	150.000.500	0	0	0	9.920.000	0	13.980.000	1	38.955.022	1	62.855.022	100,00	41,90	3	252.091.210	50,00	27,40	DISNAK				
			Jumlah Pengendalian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilakukan	kali	20		0		20		0	0	5		0		5		25,00		5		25,00		DISNAK						
11	3.27.03.1.02.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah kawasan sentra produksi peternakan yang diawasi	Kawasan	24	2.127.719.000	0	29.943.600	24	251.928.000	0	0	0	9.267.500	0	84.048.701	24	17.217.800	24	110.534.001	100,00	43,88	24	140.477.601	100,00	6,60	DISNAK				
			Jumlah laporan pengawasan kawasan sentra produksi peternakan yang dilakukan	Laporan	1		1		1		0	0	0		1		1		100,00		2		200,00		DISNAK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									25,00	3,09					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis	%		72.208.774.000	0	3.568.043.435	4,71	6.135.440.954	0	71.795.300	0	724.006.070	0	1.960.103.691	4,71	1.367.340.446	4,71	4.123.245.507	100,00	67,20	4,71	7.691.288.942	inf	10,65					
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	Kali	0	47.745.328.000	0	1.915.346.173	150	3.041.433.700	0	32.214.000	0	428.256.350	0	632.470.201	120	856.997.969	120	1.949.938.520	80,00	64,11	120	3.865.284.693	inf	8,10					
1	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah laporan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis yang disusun	Laporan	10	37.095.328.000	4	1.714.554.503	4	1.740.280.000	0	29.934.000	0	253.746.450	2	254.945.150	2	776.172.970	4	1.314.798.570	100,00	75,55	8	3.029.353.073	80,00	8,17	DISNAK				
			Jumlah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis yang dilakukan	Kali	100		25		100		0	0	50		30		80		80,00		105		105,00		DISNAK						
2	3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Monitoring , evaluasi, pengawasan, pembinaan pembebasan penyakit hewan menular yang dilakukan	Laporan	6	3.750.000.000	2	155.762.220	1	223.328.000	0	2.280.000	0	14.635.000	0	48.754.905	1	77.475.000	1	143.144.905	100,00	64,10	3	298.907.125	50,00	7,97	DISNAK				
			Jumlah Monitoring , evaluasi, pengawasan, pembinaan pembebasan penyakit hewan menular yang dilakukan	Kali	50		10		25		0	2	15		8		25		100,00		35		70,00		DISNAK						
3	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Laporan Sosialisasi, Penguatan Otoritas Veteriner dan Optimalisasi Pelayanan Poskeswan yang dilaksanakan	Laporan	6	6.900.000.000	1	45.029.450	1	1.077.825.700	0	0	0	159.874.900	0	328.770.146	1	3.349.999	1	491.995.045	100,00	45,65	2	537.024.495	33,33	7,78	DISNAK				
			Jumlah Sosialisasi, Penguatan Otoritas Veteriner dan Optimalisasi Pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan	Kali	25		0		25		0	5	15		0		20		80,00		20		80,00		DISNAK						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									69,72	7,97					
Predikat Kinerja																									S	SR					
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Kali	0	11.076.885.000	0	440.194.493	635	382.281.750	0	18.272.250	0	36.407.620	35	64.309.500	0	117.065.830	35	236.055.200	5,51	61,75	35	676.249.693	inf	6,11					
4	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel serum rabies yang diuji	sampel	5000	2.516.885.000	1000	202.095.533	1000	166.252.250	0	1.125.000	0	6.765.000	0	4.503.000	850	81.502.500	850	93.895.500	85,00	56,48	1850	295.991.033	37,00	11,76	DISNAK				
			Jumlah sampel suspect rabies yang diuji	sampel	100		0		100		0	0	100		0		100		100,00		100		100,00		DISNAK						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendongkrak			
												I		II															III		IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
5	3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemასukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah laporan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produk hewan	laporan	60	8.560.000.000	5	238.098.960	12	216.029.500	0	17.147.250	0	29.642.620	8	59.806.500	4	35.563.330	12	142.159.700	100,00	65,81	17	380.258.660	28,33	4,44	DISNAK				
			Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produk hewan yang dilakukan	kali	35		0		35		0		0		25		10		35		100,00		35		100,00		DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									26,53	3,24					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	Dokumen	0	6.150.000.000	0	622.618.449	1	2.254.849.820	0	810.000	0	127.381.500	0	1.078.339.690	1	354.395.947	1	1.560.927.137	100,00	69,23	1	2.183.545.586	inf	35,50					
6	3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan yang dilakukan	Kali	150	6.150.000.000	10	622.618.449	100	1.143.608.000	0	810.000	0	127.381.500	50	330.772.041	30	59.000.186	80	517.963.727	80,00	45,29	90	1.140.582.176	60,00	18,55	DISNAK				
7	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat)	Jumlah sampel pengujian laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilakukan: Laboratorium Kesehatan Hewan	Sampel	0	0	0	0	1875	508.395.132	0	0	0	0	1200	431.377.320	675	106.116.941	1875	537.494.261	100,00	105,72	1875	537.494.261	inf	inf	DISNAK				
8	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (FMPP))	Jumlah sampel pengujian laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilakukan: Laboratorium Kesmavet	Sampel	0	0	0	0	1540	602.846.688	0	0	0	0	2015	316.190.329	0	189.278.820	2015	505.469.149	130,84	83,85	2015	505.469.149	inf	inf	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan	Sertifikat	0	2.600.000.000	0	162.982.650	10	170.379.000	0	11.057.800	0	56.342.000	1	48.882.200	0	8.764.700	1	125.046.700	10,00	73,39	1	288.029.350	inf	11,08					
9	3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk yang diterbitkan	Sertifikat	40	2.600.000.000	10	162.982.650	10	170.379.000	0	11.057.800	0	56.342.000	1	48.882.200	0	8.764.700	1	125.046.700	10,00	73,39	11	288.029.350	27,50	11,08	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									1,96	1,23					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	Unit	0	4.636.561.000	0	426.901.670	10	286.496.684	0	9.441.250	0	75.618.600	1	136.102.100	7	30.116.000	8	251.277.950	80,00	87,71	8	678.179.620	inf	14,63					
10	3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diterbitkan	Sertifikat	10	3.366.561.000	10	426.901.670	10	130.005.500	0	8.276.500	0	22.332.600	1	60.686.500	7	18.480.750	8	109.776.350	80,00	84,44	18	536.678.020	180,00	15,94	DISNAK				
			Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil	%	49.15		0		49.15		0		0		33.89		33.89		67.78		137,90		67.78		137,90		DISNAK				
11	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya yang dilakukan	Kali	5	1.270.000.000	0	0	1	156.491.184	0	1.164.750	0	53.286.000	0	75.415.600	1	11.635.250	1	141.501.600	100,00	90,42	1	141.501.600	20,00	11,14	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									19,88	2,46					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%		2.499.640.000	6	283.155.350	3	409.819.580	0	0	0	2.636.900	0	116.197.525		144.031.698	0	262.866.123	0,00	64,14	6	546.021.473	inf	21,84					
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Izin Usaha	9	1.349.640.000	0	46.252.500	0	100.000.000	0	0	0	2.636.900	0	14.029.125	7	12.224.000	7	28.890.025	inf	28,89	7	75.142.525	77,78	5,57					
1	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kali	12	1.349.640.000	2	46.252.500	20	100.000.000	0	0	0	2.636.900	50	14.029.125	0	12.224.000	50	28.890.025	250,00	28,89	52	75.142.525	433,33	5,57	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									433,33	5,57					
Predikat Kinerja																									ST	SR					
	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	0	1.150.000.000	0	236.902.850	2	309.819.580	0	0	0	0	0	102.168.400	2	131.807.698	2	233.976.098	100,00	75,52	2	470.878.948	inf	40,95					
2	3.27.06.1.02.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan	Terpenuhinya persyaratan untuk Penerapan ISO 17025:2017	Dokumen	10	1.150.000.000	2	236.902.850	2	309.819.580	0	0	0	0	0	102.168.400	0	131.807.698	0	233.976.098	0,00	75,52	2	470.878.948	20,00	40,95	DISNAK				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								10,00	20,47						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	%		11.928.255.000	20	2.612.700.127	20	2.537.395.150	0	11.193.000	0	55.717.000	0	686.999.325	20	256.957.933	20	1.010.867.258	100,00	39,84	40	3.623.567.385	inf	30,38					
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase tenaga penyuluh pertanian (peternakan) yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	950.000.000	20	128.343.500	20	105.729.000	0	0	0	0	0	0	20	92.309.805	20	92.309.805	100,00	87,31	40	220.653.305	40,00	23,23					
1	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat/ bimtek pengembangan kompetensi	Orang	40	950.000.000	10	128.343.500	60	105.729.000	0	0	0	0	0	0	60	92.309.805	60	92.309.805	100,00	87,31	70	220.653.305	175,00	23,23	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								175,00	23,23						
Predikat Kinerja																								ST	SR						
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan	Kali	100	7.679.000.000	20	1.626.731.000	46	2.114.548.150	0	0	0	36.532.000	0	656.008.075	25	138.114.520	25	830.654.595	54,35	39,28	45	2.457.385.595	45,00	32,00					
2	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang dilakukan	kali	200	7.679.000.000	20	1.626.731.000	43	2.114.548.150	0	0	0	36.532.000	25	656.008.075	0	138.114.520	25	830.654.595	58,14	39,28	45	2.457.385.595	22,50	32,00	DISNAK				
			Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian	Orang	6000		150		4997		0		0		130		0		130		2,60		280		4,67		DISNAK				
			Jumlah Laporan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang disusun	Laporan	6		0		6		0		0		4		2		6		100,00		6		100,00		DISNAK				
			Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi peternakan	%	25		0		16,55		0		0		0		16,55		16,55		100,00		16,55		66,20		DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								38,67	16,00						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	3.299.255.000	0	857.625.627	100	317.118.000	0	11.193.000	0	19.185.000	0	30.991.250	100	26.533.608	100	87.902.858	100,00	27,72	100	945.528.485	inf	28,66					
3	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Kelembagaan	5	2.677.000.000	1	682.962.427	4	206.514.000	0	5.113.000	0	10.405.000	0	9.905.000	1	4.130.000	1	29.553.000	25,00	14,31	2	712.515.427	40,00	26,62	DISNAK				
			Jumlah penguatan kelembagaan Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	20		0		20		0		0		0		20		20		100,00		20		100,00		DISNAK				
			Meningkatnya usaha UMKM peternakan	UMKM	5		0		5		0		0		0		5		5		100,00		5		100,00		DISNAK				
4	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	15	622.255.000	3	174.663.200	3	110.604.000	0	6.080.000	0	8.780.000	1	21.086.250	2	22.403.608	3	58.349.858	100,00	52,76	6	233.013.058	40,00	37,45	DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								31,11	16,02						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%		451.334.036.000	0	78.954.490.488	1,51	58.177.979.283	0	326.822.500	0	11.691.747.466	0	27.315.392.609	1,51	15.194.560.423	1,51	54.528.522.998	100,00	93,73	1,51	133.483.013.486	inf	29,58					
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang diawasi	%	0	250.000.000	0	0	100	50.000.000	0	0	0	4.750.000	0	2.280.000	100	0	100	7.030.000	100,00	14,06	100	7.030.000	inf	2,81					
1	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengawasan Peredaran Sarana Peternakan yang dilaksanakan	Kali	40	250.000.000	0	0	10	50.000.000	0	0	0	4.750.000	0	2.280.000	10	0	10	7.030.000	100,00	14,06	10	7.030.000	25,00	2,81	DISNAK				
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengawasan Peredaran Sarana Peternakan yang dilaksanakan	Laporan	4		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		25,00		DISNAK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								25,00	2,81						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi yang dikelola	%	0	837.312.000	0	126.309.276	100	106.279.000	0	2.780.000	0	5.570.000	0	11.404.800	100	14.978.000	100	34.732.800	100,00	32,68	100	161.042.076	inf	19,23					
2	3.27.02.1.03.01	Penilaian Kultivar SDG Hewan	Jumlah Dokumen Kajian Sumber Daya Genetik Hewan (Plasma Nutfah) yang disusun	Dokumen	6	337.312.000	1	126.309.276	1	50.000.000	0	2.780.000	0	0	0	3.460.000	1	3.935.000	1	10.175.000	100,00	20,35	2	136.484.276	33,33	40,46	DISNAK				
3	3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah dokumen sistem manajemen mutu (SDG) Hewan yang disusun	Dokumen	4	500.000.000	0	0	1	56.279.000	0	0	0	5.570.000	0	7.944.800	1	11.043.000	1	24.557.800	100,00	43,64	1	24.557.800	25,00	4,91	DISNAK				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I		II		III		IV																																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
																								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								14,58		15,12																							
Predikat Kinerja																								SR	SR																								
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	%	0	3.168.727.000	0	173.542.140	100	3.739.041.240	0	34.705.000	0	7.260.000	0	2.368.971.180	100	1.048.763.401	100	3.459.699.581	100,00	92,53	100	3.633.241.721	inf	114,66																							
4	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Kali	15	2.215.000.000	3	101.204.500	3	359.855.390	0	34.705.000	0	6.570.000	1	36.394.930	2	5.165.000	3	82.834.930	100,00	23,02	6	184.039.430	40,00	8,31	DISNAK																						
5	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah laporan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Laporan	0	0	0	0	1	1.857.644.000	0	0	0	0	0	1.268.731.950	1	689.279.550	1	1.958.011.500	100,00	105,40	1	1.958.011.500	inf	inf	DISNAK																						
			Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Dilakukan: Tersedianya pakan ternak unggas yang berkualitas di UPTD Ternak Unggas	Kali	0		0		12		0		0		9		3		12		100,00		12		inf		DISNAK																						
6	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah laporan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Laporan	0	0	0	0	1	1.387.097.450	0	0	0	0	0	1.063.614.300	1	240.981.946	1	1.304.596.246	100,00	94,05	1	1.304.596.246	inf	inf	DISNAK																						
			Jumlah pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan : Tersedianya pakan ternak ruminansia yang berkualitas di UPTD Ternak Ruminansia	kali	0		0		12		0		0		9		3		12		100,00		12		inf		DISNAK																						
7	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Kali	6	953.727.000	2	72.337.640	1	134.444.400	0	0	0	690.000	0	230.000	1	113.336.905	1	114.256.905	100,00	84,98	3	186.594.545	50,00	19,56	DISNAK																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf		inf																							
Predikat Kinerja																								-	-																								
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Kali	0	45.393.671.000	0	6.164.139.819	57	6.629.004.838	0	289.337.500	0	79.455.670	27	2.980.795.409	23	1.510.811.816	50	4.860.400.395	87,72	73,32	50	11.024.540.214	inf	24,29																							
8	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Laporan pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disusun : kontes ternak	Laporan	6	37.610.671.000	2	5.088.692.190	1	495.878.400	0	289.337.500	0	850.000	1	152.308.062	1	0	2	442.495.562	200,00	89,23	4	5.531.187.752	66,67	14,71	DISNAK																						
			Jumlah pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang dilakukan : Kontes ternak	Kali	5		2		1		0		0		1		1		2		200,00		4		80,00		DISNAK																						
			Service per Conception (S/C)	S/C	2,4		0		2,4		0		0		2,4		0		2,4		100,00		2,4		100,00		DISNAK																						
9	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan : Peningkatan produktifitas bibit ternak ruminansia	kali	0	0	0	0	12	646.070.000	0	0	0	0	9	323.365.450	3	261.772.236	12	585.137.686	100,00	90,57	12	585.137.686	inf	inf	DISNAK																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
			Jumlah laporan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disusun : Peningkatan produktifitas bibit ternak ruminansia	Laporan	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISNAK					
10	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSOTS))	Jumlah semen beku yang disediakan	Dosis	0		0		0	200000	2.783.555.996	0		0		0	100000	1.633.585.803	0	763.301.201	100000	2.396.887.004	50,00	86,11	100000	2.396.887.004	inf	inf	DISNAK			
			Jumlah pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan: Peningkatan produksi semen beku, pemanfaatan teknologi reproduksi (IB dan ET) dan Produktifitas ternak sapi	Kali	0		0		12		0		0		9		3		12		100,00		12		inf		DISNAK					
			Jumlah laporan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disusun: Peningkatan produksi semen beku, pemanfaatan teknologi reproduksi (IB dan ET) dan Produktifitas ternak sapi	Laporan	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISNAK					
11	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (UPTD Ternak Unggas)	Jumlah Ketersediaan Unggas	Ekor	0		0		0	10000	832.327.980	0		0		0	0	655.693.888	10000	197.330.850	10000	853.024.738	100,00	102,49	10000	853.024.738	inf	inf	DISNAK			
			Jumlah Laporan Pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disusun: Peningkatan produktifitas bibit ternak unggas	Laporan	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISNAK					
			Jumlah Pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan: Peningkatan produktifitas bibit ternak unggas	Kali	0		0		12		0		0		9		3		12		100,00		12		inf		DISNAK					
12	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan: Pengawasan Mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi	rekomendasi	55	7.068.000.000	10	1.075.447.629	11	1.482.492.462	0		0		26.965.000	5	67.499.676	6	174.199.750	11	268.664.426	100,00	18,12	21	1.344.112.055	38,18	19,02	DISNAK				
			Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan: Terjaminnya ketersediaan pakan ternak (Bank Pakan)	Kelompok	25		5		5		0		0		0		0		0		0,00		5		20,00		DISNAK					
			Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan: tersedianya ternak bibit bersertifikasi (SKLB)	Rekomendasi	50		10		18		0		0		5		13		18		100,00		28		56,00		DISNAK					
			Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan: Tersedianya usaha pembibitan ternak yang bersertifikat (SKPT)	rekomendasi	10		0		5		0		0		2		3		5		100,00		5		50,00		DISNAK					
13	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP))	Jumlah sampel pengujian Laboratorium Pakan	sampel	0		0		0	200	334.000.000	0		0	42.120.670	50	143.482.530	100	107.367.779	150	292.970.979	75,00	87,72	150	292.970.979	inf	inf	DISNAK				
14	3.27.02.1.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah laporan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit yang disusun	laporan	6	715.000.000	0		0	1	54.680.000	0		0	0	9.520.000	0	4.860.000	1	6.840.000	1	21.220.000	100,00	38,81	1	21.220.000	16,67	2,97	DISNAK			
			Jumlah Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak yang dilakukan	kali	20		0		20		0		0		10		10		20		100,00		20		100,00		DISNAK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf						
Predikat Kinerja																									-	-						
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi	%	0	660.000.000	0	48.468.940	100	110.000.000	0		0	0	5.100.000	75	20.410.000	25	28.000.000	100	53.510.000	100,00	48,65	100	101.978.940	inf	15,45					
15	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Laporan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang disusun	Laporan	6	660.000.000	1	48.468.940	1	110.000.000	0		0	0	5.100.000	0	20.410.000	1	28.000.000	1	53.510.000	100,00	48,65	2	101.978.940	33,33	15,45	DISNAK				
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang dilakukan	Kali	20		0		20		0		0		10		0		10		50,00		10		50,00		DISNAK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									2,78	1,03						
Predikat Kinerja																									SR	SR						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia	Komoditi	0	401.024.326.000	0	72.442.030.313	8	47.543.654.205	0	0	0	11.589.611.796	4	21.931.531.220	0	12.592.007.206	4	46.113.150.222	50,00	96,99	4	118.555.180.535	inf	29,56				
16	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Kambing	Ekor	0	401.024.326.000	0	72.442.030.313	5000	47.543.654.205	0	0	0	11.589.611.796	0	21.931.531.220	2000	12.592.007.206	2000	46.113.150.222	40,00	96,99	2000	118.555.180.535	inf	29,56	DISNAK			
			Jumlah Benih/Bibit Sapi	Ekor	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISNAK			
			Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Komoditi	8		3		4		0		0		4		0		4		100,00		7		87,50		DISNAK			
			Jumlah Benih/Bibit Unggas	Ekor	0		0		640000		0		0		250000		65000		315000		49,22		315000		inf		DISNAK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	1,85					
Predikat Kinerja																								-	SR					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I		II		III		IV															
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS KEHUTANAN				637.661.800.000		78.682.616.401		83.934.962.342	13.389.758.786		28.697.053.732	17.228.913.884		8.608.258.373		67.923.984.775		80,92		146.606.601.176		22,99							
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				301.559.000.000		45.190.498.193		53.864.864.530	8.688.333.792		17.835.531.494	11.215.906.269		7.513.885.029		45.253.656.584		84,01		90.444.154.777		29,99							
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				301.559.000.000		45.190.498.193		53.864.864.530	8.688.333.792		17.835.531.494	11.215.906.269		7.513.885.029		45.253.656.584		84,01		90.444.154.777		29,99							
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		301.559.000.000		44.790.585.525	100	53.864.864.530	0	8.688.333.792	0	17.835.531.494	0	11.215.906.269	100	7.513.885.029	100	45.253.656.584	100,00	84,01	100	90.044.242.109	inf	29,86					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	9.074.000.000	0	465.152.592	85	642.514.800	0	76.408.222	0	140.536.761	0	129.032.285	85	108.573.250	85	454.550.518	100,00	70,75	85	919.703.110	inf	10,14					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen	4	3.536.000.000		0	4	242.400.395	0	38.313.750	0	14.962.450	0	68.716.588	4	78.580.750	4	200.573.538	100,00	82,74	4	200.573.538	100,00	5,67	DISHUT				
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	4				4		0		0		0		4		4		100,00		4		100,00		DISHUT				
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	25		9		1		0		0		0		1		1		100,00		10		40,00		DISHUT				
2	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	20.663.672	0	3.317.672	0	14.194.848	0	0	1	0	1	17.512.520	100,00	84,75	1	17.512.520	inf	inf	DISHUT				
3	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	35.361.897	0	0	0	12.357.400	0	12.480.497	1	1.610.000	1	26.447.897	100,00	74,79	1	26.447.897	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen					4		0		0		0		4		4		100,00		4		inf		DISHUT				
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun	Dokumen					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT				
4	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	31.279.619	0	5.445.900	0	10.086.700	0	6.194.500	1	1.613.850	1	23.340.950	100,00	74,62	1	23.340.950	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT				
5	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	22.334.430	0	4.313.800	0	3.594.650	0	2.550.000	1	3.080.000	1	13.538.450	100,00	60,62	1	13.538.450	inf	inf	DISHUT				
6	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	39.845.525	0	2.145.000	0	26.508.113	0	1.720.000	1	7.476.400	1	37.849.513	100,00	94,99	1	37.849.513	inf	inf	DISHUT				
7	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	26.484.823	0	1.498.700	0	11.650.900	0	5.154.800	1	0	1	18.304.400	100,00	69,11	1	18.304.400	inf	inf	DISHUT				
8	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	26.527.397	0	5.506.000	0	6.984.500	0	4.761.250	1	3.538.250	1	20.790.000	100,00	78,37	1	20.790.000	inf	inf	DISHUT				
9	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	34.120.000	0	3.030.000	0	8.117.000	0	2.748.500	1	8.350.000	1	22.245.500	100,00	65,20	1	22.245.500	inf	inf	DISHUT				
10	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	24.779.619	0	6.037.400	0	8.100.000	0	3.765.000	1	0	1	17.902.400	100,00	72,25	1	17.902.400	inf	inf	DISHUT				
11	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	56.484.823	0	6.800.000	0	13.290.000	0	12.714.750	1	0	1	32.804.750	100,00	58,08	1	32.804.750	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
12	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	27.232.600	0	0	0	10.690.200	0	8.226.400	1	4.324.000	1	23.240.600	100,00	85,34	1	23.240.600	inf	inf	DISHUT				
13	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
14	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
15	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
16	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
17	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT VI)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
18	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen	45		0		4		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DISHUT				
19	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
20	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
21	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
22	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	4	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
23	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
24	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	20	5.538.000.000	4	465.152.592	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	465.152.592	20,00	8,40	DISHUT					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20		0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DISHUT						
25	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Laporan		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT					
26	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%																
(1)	(2)	(3)	(4)			(5) K Rp		(6) K Rp		(7) K Rp		(8) K Rp		(9) K Rp		(10) K Rp		(11) K Rp		(12) = 8+9+10+11 K Rp		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	(16)	(17)	(18)	(19)		
		[UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]																													
27	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT			
28	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT			
29	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUT			
			Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen					4		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISHUT		
30	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT			
31	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT			
32	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	0	225.074.000.000	0	38.067.465.493	100	45.435.671.516	0	7.193.643.433	0	15.586.391.374	0	9.595.510.240	0	6.381.375.290	0	38.756.920.337	0,00	85,30	0	76.824.385.830	nan	34,13					
33	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	2045	213.595.000.000	350	37.003.915.843	409	44.185.671.516	409	7.090.229.633	0	15.169.008.904	0	9.392.087.416	0	6.201.967.811	409	37.853.293.764	100,00	85,67	759	74.857.209.607	37,11	35,05	DISHUT				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT				
34	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	0	7.768.000.000	0	800.471.500	64	900.000.000	0	11.353.000	0	298.044.420	0	178.594.824	64	161.209.204	64	649.201.448	100,00	72,13	64	1.449.672.948	inf	18,66	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT				
35	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	5	1.623.000.000	3	22.100.250	3		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	3	22.100.250	60,00	1,36	DISHUT			
36	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	0		0		1	0	0		0		0		1	1		100,00		1			inf		DISHUT				
37	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	12	15.000.000	3	2.400.400	3	3.605.400	3	2.655.600	3		0	12	8.661.400	100,00	57,74	12	8.661.400	inf	inf	DISHUT			
38	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	1	15.000.000	0	3.442.000	0	3.174.000	0	3.116.000	0	1.268.000	0	11.000.000	0,00	73,33	0	11.000.000	nan	inf	DISHUT				
39	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkanJumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	12	20.000.000	3	7.134.500	3	2.830.750	3	275.500	3	7.613.775	12	17.854.525	100,00	89,27	12	17.854.525	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
40	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	12	15.000.000	3	2.915.000	3	2.871.750	3	4.231.000	3		0	12	10.017.750	100,00	66,79	12	10.017.750	inf	inf	DISHUT				
41	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	12	30.000.000	3	736.000	3	13.080.000	3		0	3		0	12	13.816.000	100,00	46,05	12	13.816.000	inf	inf	DISHUT			
42	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	12	20.000.000	3	4.830.000	3	4.737.100	3	9.132.400	3		0	12	18.699.500	100,00	93,50	12	18.699.500	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT					
43	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	0	2.088.000.000	0	240.977.900	0	185.000.000	0	55.683.600	0	82.699.450	0	0	0	0	0	0	138.383.050	nan	74,80	0	379.360.950	nan	18,17	DISHUT				
			Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	0		0		12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		DISHUT					
44	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	dokumen		0		0	12	15.000.000	3	3.647.300	3	3.161.600	3	1.947.500	3	1.286.500	12	10.042.900	100,00	66,95	12	10.042.900	inf	inf	DISHUT					
45	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	12	20.000.000	3	8.140.000	3	90.000	3	290.000	3	6.440.000	12	14.960.000	100,00	74,80	12	14.960.000	inf	inf	DISHUT					
46	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Dokumen		0		0	12	15.000.000	3	3.132.000	3	3.088.000	3	3.180.000	3	1.590.000	12	10.990.000	100,00	73,27	12	10.990.000	inf	inf	DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	0	4.151.000.000	0	480.391.474	100	645.200.000	0	100.330.000	0	285.072.389	0	119.760.105	100	23.075.150	100	528.237.644	100,00	81,87	100	1.008.629.118	inf	24,30						
47	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	0		0	0	1		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DISHUT					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0					0		nan		0		nan		DISHUT						
48	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Unit	0	4.151.000.000	0	480.391.474	10	330.000.000	0	13.500.000	0	196.980.864	0	39.800.000	10		0	10	250.280.864	100,00	75,84	10	730.672.338	inf	17,60	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT					
			Jumlah dokumen pengamanan Hukum	Dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
			Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	Dokumen	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
			Jumlah tanda kepemilikan tanah	Unit/Set	0		0		10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT					
			Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas)	Unit/Set	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
			Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	Unit	10		2		10		0		0		0		10		10		100,00		12		120,00		DISHUT					
49	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	1.048.500	0	3.328.400	0	2.287.450	1		0	1	6.664.350	100,00	66,64	1	6.664.350	inf	inf	DISHUT				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Daerah pada SKPD [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]																														
			Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang					1	10.000.000	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
50	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0		0	0	2.851.900	0	4.205.000	1	2.348.000	1	9.404.900	100,00	94,05	1		9.404.900	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang					1	10.000.000	0		0		0				0		0,00		0		nan		DISHUT					
51	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang		0		0	1	10.000.000	0	2.425.500	0	6.448.400	0	726.000	1		0	1	9.599.900	100,00	96,00	1		9.599.900	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen					1	10.000.000	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
52	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	100,00	nan	1		0	inf	nan	DISHUT			
53	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang		0		0	1	10.000.000	0	3.746.400	0	2.133.600	0	3.220.000	1	900.000	1	10.000.000	100,00	100,00	1		10.000.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen					1	10.000.000	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
54	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang		0		0	1	20.000.000	0	9.857.250	0	250.000	0		0	1	9.271.200	1	19.378.450	100,00	96,89	1		19.378.450	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen					1	10.000.000	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
55	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	1.557.600	0	4.828.800	0	3.139.600	1		0	1	9.526.000	100,00	95,26	1		9.526.000	inf	inf	DISHUT			
56	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0		0	0	3.369.250	0	3.566.100	1	987.750	1	7.923.100	100,00	79,23	1		7.923.100	inf	inf	DISHUT			
57	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0		0	0		0	7.291.550	1	2.545.100	1	9.836.650	100,00	98,37	1		9.836.650	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang					1	10.000.000	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
58	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	Orang		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	100,00	nan	1		0	inf	nan	DISHUT		
59	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0		0	1	15.000.000	0	1.706.250	0	5.352.125	0	3.933.875	1	1.610.000	1	12.602.250	100,00	84,02	1		12.602.250	inf	inf	DISHUT				
60	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen		0		0	0	1	150.200.000	0	66.488.500	0	41.477.600	0	26.423.200	1		0	1	134.389.300	100,00	89,47	1		134.389.300	inf	inf	DISHUT		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	Orang	0		0		15		0		0		0		15		15		100,00		15		inf		DISHUT						
61	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT						
62	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah	Dokumen	0		0	0	1	60.000.000	0		0	0	18.051.450	0	25.167.330	1	5.413.100	1	48.631.880	100,00	81,05	1		48.631.880	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	nan					
Predikat Kinerja																											-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	10.380.000.000	0	796.589.003	100	100.000.000	0	44.285.000	0	33.625.000	0	14.626.200	100	3.341.000	100	95.877.200	100,00	95,88	100		892.466.203	inf	8,60						
63	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel					25		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISHUT						
64	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
65	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		5.190.000.000		581.180.653	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		581.180.653	nan	11,20	DISHUT					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0		0		0		0		0					0		nan		0		nan		DISHUT							
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0		0		0		0		0					0		nan		0		nan		DISHUT							
66	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
67	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
68	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT							
69	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0		0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
70	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHL SUJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0		0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT							
71	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0		0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
72	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0		0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT					
73	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		5.190.000.000		215.408.350	0	100.000.000	0	44.285.000		33.625.000		14.626.200		3.341.000	0	95.877.200	nan	95,88	0		311.285.550	nan	6,00	DISHUT					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kali	0		35		10		0		0		0		10		10		100,00		45		inf		DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	nan				
Predikat Kinerja																											-	-				
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	16.168.000.000	0	1.555.252.784	100	1.203.028.789	0	416.202.347	0	461.416.710	0	99.068.300	100	23.152.750	100	999.840.107	100,00	83,11	100	2.555.092.891	inf	15,80						
74	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	0	1	9.227.400	0	0	0	0	1	9.227.400	100,00	92,27	1	9.227.400	inf	inf	DISHUT					
75	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000		0	1	10.000.000	0	0	0	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT					
76	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	5.343.000	0	1.686.700	0	2.970.300	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT					
77	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT					
78	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	0	0	6.521.900	0	3.478.100	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT					
79	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT					
80	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	0	0	9.681.000	0	0	1	0	1	9.681.000	100,00	96,81	1	9.681.000	inf	inf	DISHUT					
81	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	3.995.200	0	3.998.400	0	2.006.400	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT					
82	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	nan	100,00	0	10.000.000	nan	inf	DISHUT					
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT					
83	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT					
84	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	3.700.500	0	3.561.500	0	2.436.800	1	0	1	9.698.800	100,00	96,99	1	9.698.800	inf	inf	DISHUT					
85	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit	0	1.038.000.000	0	149.985.000	1	40.000.000	0	39.924.000	0	0	0	0	1	0	1	39.924.000	100,00	99,81	1	189.909.000	inf	18,30	DISHUT					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISHUT			
86	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	3.632.000.000	0	709.585.925	0	160.457.835	0	0	0	150.840.000	0	0	0	4.475.000	0	155.315.000	nan	96,79	0	864.900.925	nan	23,81	DISHUT			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
87	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
88	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	5.599.700	0	3.440.300	0	960.000	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
89	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT VI)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	7.464.000	0	2.536.000	0	0	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
90	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
91	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Unit		2.595.000.000		136.614.250	1	165.000.000	0	65.000.900	0	39.930.000	0	51.455.000	1	7.105.000	1	163.490.900	100,00	99,09	1	300.105.150	inf	11,56	DISHUT			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0					0		nan		0		nan		DISHUT				
92	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	4.338.000	0	4.294.000	0	788.000	1	580.000	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
93	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
94	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Bulan		0		0	12	10.000.000	0	3.104.400	0	3.356.000	0	3.539.600	12	0	12	10.000.000	100,00	100,00	12	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
95	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	3.241.350	0	4.681.950	0	2.076.700	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
96	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	9.914.000	0	0	0	0	1	0	1	9.914.000	100,00	99,14	1	9.914.000	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
97	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit		0		0	1	10.000.000	0	0	0	4.862.600	0	5.137.400	1	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
98	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit		0		0	1	9.700.967	0	8.529.100	0	250.000	0	0	1	500.000	1	9.279.100	100,00	95,65	1	9.279.100	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
99	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
100	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah barang cetakan dan	Set	0	1.350.000.000	0	190.377.500	1	90.000.000	0	74.351.500	0	39.723.250	0	0	1	0	1	114.074.750	100,00	126,75	1	304.452.250	inf	22,55	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penggandaan	penggandaan yang disediakan																												
101	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bulan		0		0	12	10.000.000	12	3.309.000	0	0	0	3.741.000	0	2.950.000	12	10.000.000	100,00	100,00	12	10.000.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0									0		nan		0		nan		DISHUT					
102	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	0	5.393.397	0	1.491.603	1	2.100.000	0	0	1	8.985.000	100,00	89,85	1	8.985.000	inf	inf	DISHUT				
103	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	0	0	1	9.000.000	0	0	0	1.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0									0		nan		0		nan		DISHUT					
104	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	0	0	1	2.040.000	0	3.720.000	0	0	1	5.760.000	100,00	57,60	1	5.760.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0									0		nan		0		nan		DISHUT					
105	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	1	7.240.000	0	2.760.000	0	0	0	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT				
106	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.129.128	0	0	1	10.129.000	0	0	0	0	1	10.129.000	100,00	100,00	1	10.129.000	inf	inf	DISHUT				
107	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	0	1.045.000	1	6.867.500	0	1.300.000	0	393.750	1	9.606.250	100,00	96,06	1	9.606.250	inf	inf	DISHUT				
108	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	5	10.000.000	0	2.760.000	0	4.126.000	1	3.114.000	0	0	1	10.000.000	20,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT				
109	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	0	4.761.000	0	0	1	2.940.000	0	799.000	1	8.500.000	100,00	85,00	1	8.500.000	inf	inf	DISHUT				
110	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Set		0		0	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	inf	inf	DISHUT				
111	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	buah		0		0	2	3.480.000	0	0	1	1.410.000	1	1.005.000	0	570.000	2	2.985.000	100,00	85,78	2	2.985.000	inf	inf	DISHUT				
112	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Buah		0		0	10	3.480.000	0	0	5	1.740.000	5	580.000	0	580.000	10	2.900.000	100,00	83,33	10	2.900.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0									0		nan		0		nan		DISHUT					
113	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	set		0		0	30	3.480.000	30	720.000	0	720.000	0	720.000	0	480.000	30	2.640.000	100,00	75,86	30	2.640.000	inf	inf	DISHUT				
114	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Buah		0		0	2	3.480.000	2	3.920.000	0	2.240.000	0	840.000	0	560.000	2	7.560.000	100,00	217,24	2	7.560.000	inf	inf	DISHUT				
115	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	buah		0		0	3	3.480.000	0	580.000	3	870.000	0	870.000	0	580.000	3	2.900.000	100,00	83,33	3	2.900.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen					0									0		nan		0		nan		DISHUT					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Perundang-Undangan yang Disediakan						K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
116	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Jenis	0	0	2	3.480.000	0	0	2	1.450.000	0	870.000	0	580.000	2	2.900.000	100,00	83,33	2	2.900.000	inf	inf	DISHUT				
117	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	buah	0	0	2	3.480.000	2	900.000	0	900.000	0	900.000	0	600.000	2	3.300.000	100,00	94,83	2	3.300.000	inf	inf	DISHUT				
118	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Buah	0	0	10	3.480.000	10	870.000		870.000		580.000		580.000	10	2.900.000	100,00	83,33	10	2.900.000	inf	inf	DISHUT				
119	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Buah		1.297.000.000		83.280.000	4	38.880.000	4	11.500.000		20.040.000		0	0	4	31.540.000	100,00	81,12	4	114.820.000	inf	8,85	DISHUT			
120	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	buah	0	0	2	3.480.000	2	870.000		870.000		0		0	2	1.740.000	100,00	50,00	2	1.740.000	inf	inf	DISHUT				
121	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	buah	0	0	2	3.480.000	2	240.000		360.000		360.000		240.000	2	1.200.000	100,00	34,48	2	1.200.000	inf	inf	DISHUT				
122	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	buah	0	0	2	3.480.000	2	10.000.000		8.260.000		580.000		580.000	2	19.420.000	100,00	558,05	2	19.420.000	inf	inf	DISHUT				
123	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	0	6.256.000.000	0	285.410.109	1	340.580.859	1	37.588.300	0	86.681.607		0	0	1	124.269.907	100,00	36,49	1	409.680.016	inf	6,55	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100,00	nan	100	0	inf	nan				
124	X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
125	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
126	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
127	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
128	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
129	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
130	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
131	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
132	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
133	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
134	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																										
								I		II		III		IV																																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																													
135	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT																												
136	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun (Rumah Dinas KPH)	Unit	0	0		0	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
137	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
138	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
139	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
140	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHL SUJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
141	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Pagar)	unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
142	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	Unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
143	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	Unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					0								0		nan		0		nan		DISHUT																												
144	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
145	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
146	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	Unit		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DISHUT																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																					
Predikat Kinerja																																																					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	21.816.000.000	0	791.197.687	100	3.597.775.857	0	476.434.518	0	1.002.361.612	0	611.309.630	100	480.037.726	100	2.570.143.486	100,00	71,44	100	3.361.341.173	inf	15,41																											
147	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 (satu) tahun	Surat	18000	905.000.000	3600	89.040.000	3600	20.000.000	500	5.450.000	1000	3.865.000	1000	7.040.000	1100	2.902.900	3600	19.257.900	100,00	96,29	7200	108.297.900	40,00	11,97	DISHUT																										
148	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh		0		0	1	114.930.000	1	16.742.665	0	18.850.116	0	19.559.206	0	12.344.514	1	67.496.501	100,00	58,73	1	67.496.501	inf	inf	DISHUT																										
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1		1							1		100,00		1		inf		DISHUT																											
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					1		1							1		100,00		1		inf		DISHUT																											
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					1		1							1		100,00		1		inf		DISHUT																											

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
149	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT VI)]	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps		0		0	1	63.279.600	1	9.029.928		9.762.990		9.687.951		6.194.841	1	34.675.710	100,00	54,80	1	34.675.710	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					1		1								1		100,00		1		inf	DISHUT					
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh					1		1								1		100,00		1		inf	DISHUT					
150	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik		0		7.745.712	450	34.200.000	450	6.899.494		6.888.143		4.964.760		0	450	18.752.397	100,00	54,83	450	26.498.109	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh					7820		7820							7820		100,00		7820			inf	DISHUT					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					100		100							100		100,00		100			inf	DISHUT					
151	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening		0		0	1	30.420.000	1	7.939.644	0	6.050.352	0	7.868.200	0	2.225.000	1	24.083.196	100,00	79,17	1	24.083.196	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik					1		1							1		100,00		1			inf	DISHUT					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					10		10							10		100,00		10			inf	DISHUT					
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kwh					1		1							1		100,00		1			inf	DISHUT					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0									0		nan		0			nan	DISHUT					
152	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh		0		8.401.640	230400	31.164.000	230400	3.736.344		11.480.703		7.802.742		0	230400	23.019.789	100,00	73,87	230400	31.421.429	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					120		120							120		100,00		120			inf	DISHUT					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0									0		nan		0			nan	DISHUT					
153	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kwh		7.527.000.000		546.843.029	230400	328.379.786	0	74.278.619	0	55.918.238	0	62.216.890	230400	56.618.155	230400	249.031.902	100,00	75,84	230400	795.874.931	inf	10,57	DISHUT				
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik					14508							14508		14508		100,00		14508			inf	DISHUT					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps	0		0		120		0		0		0		120		120		100,00		120			inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0			0		nan		0			nan	DISHUT					
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	Rekening			0		16		0		0		0		16		16		100,00		16			inf	DISHUT				
154	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh		0		5.374.322	1	61.208.000	1	8.002.786		5.975.462		4.064.128		0	1	18.042.376	100,00	29,48	1	23.416.698	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					1		1							1		100,00		1			inf	DISHUT					
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	Rekening					1		1							1		100,00		1			inf	DISHUT					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps					1		1							1		100,00		1			inf	DISHUT					
155	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	0	32.640.000		8.433.584		8.590.299		6.735.029		6.904.779	0	30.663.691	nan	93,95	0	30.663.691	nan	inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KWh					0									0		nan		0			nan	DISHUT					
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik					0									0		nan		0			nan	DISHUT					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps					0									0		nan		0			nan	DISHUT					
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	Rekening					0									0		nan		0			nan	DISHUT					
156	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik		0		4.713.600	1	26.406.796	1	4.662.600		4.662.600		3.108.400		0	1	12.433.600	100,00	47,08	1	17.147.200	inf	inf	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	Rekening		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					1		1								1		100,00		1			inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kwh					1		1								1		100,00		1			inf	DISHUT				
157	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps		0		0	1	42.180.000	1	3.441.800	0	6.900.334	0	5.377.649	0	3.939.422	1	19.659.205	100,00	46,61	1	19.659.205	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	Rekening					1		1		0		0		0		1		100,00		1			inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KWh					1		1								1		100,00		1			inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	Meter Kubik					1		1								1		100,00		1			inf	DISHUT				
158	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh		0		0	5992.357333	31.728.536		3.223.791		5.687.047		5.459.989	5992.36	2.949.989	5992.36	17.320.816	100,00	54,59	5992.36	17.320.816	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					100		25		25		25		25		100		100,00		100			inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					480		120		120		120		120		480		100,00		480			inf	DISHUT				
159	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening		0		0	1	76.434.000	1	21.045.777	0	10.874.889	0	20.071.560	0	9.821.049	1	61.813.275	100,00	80,87	1	61.813.275	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik					1		0		0		0		1		1		100,00		1			inf	DISHUT				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh					1		1		0		0		0		1		100,00		1			inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0			nan	DISHUT				
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps					1		1		0		0		0		1		100,00		1			inf	DISHUT				
160	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		8.576.271	1	144.582.906	1	53.743.968	0	33.517.159	0	19.787.727	0	0	1	107.048.854	100,00	74,04	1	115.625.125	inf	inf	DISHUT				
161	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang		13.384.000.000		0	20	1.015.869.390	20	55.406.002	0	347.270.578	0	165.521.094	0	162.088.710	20	730.286.384	100,00	71,89	20	730.286.384	inf	5,46	DISHUT				
162	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jasa Sopir Kantor	Bulan		0		11.998.154	13	153.941.388	3	43.094.076	4	36.609.300	3	19.903.552	3	0	13	99.606.928	100,00	64,70	13	111.605.082	inf	inf	DISHUT				
			Instruktur Kesehatan Jasmani/Infrastruktur Senam	kegiatan					12		3		3		3		3		12		100,00		12			inf	DISHUT				
			Jasa Kebersihan Kantor	Bulan					13		3		4		3		3		13		100,00		13			inf	DISHUT				
			Jasa Pengamanan Kantor	Bulan					13		3		4		3		3		13		100,00		13			inf	DISHUT				
163	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		5.936.912	2	38.589.928	2	11.647.844	0	8.905.368	0	5.936.912	0	5.936.912	2	32.427.036	100,00	84,03	2	38.363.948	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					0								0		nan		0				nan	DISHUT					
164	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang		0		16.966.200	3	149.000.628	3	16.966.200	0	41.098.354	0	34.124.877	0	19.882.628	3	112.072.059	100,00	75,22	3	129.038.259	inf	inf	DISHUT				
165	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang		0		9.727.428	4	153.582.906	4	9.727.428	0	67.819.741	0	21.889.615	0	20.389.615	4	119.826.399	100,00	78,02	4	129.553.827	inf	inf	DISHUT				
166	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang		0		10.227.428	0	160.835.128		10.227.428		58.144.780		21.901.412		51.543.517	0	141.817.137	nan	88,18	0	152.044.565	nan	inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					0									0		nan		0			nan	DISHUT					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
			yang Disediakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
167	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		19.778.737	2	295.409.400	2	10.969.904		117.145.321		55.198.023		0	2	183.313.248	100,00	62,05	2	203.091.985	inf	inf	DISHUT					
168	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		10.000.000	3	146.832.906	3	10.000.000	0	38.418.169	0	34.941.733	0	29.349.759	3	112.709.661	100,00	76,76	3	122.709.661	inf	inf	DISHUT					
169	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		8.227.428	3	151.335.128	3	8.227.428	0	54.483.856	0	30.195.740	0	20.130.492	3	113.037.516	100,00	74,69	3	121.264.944	inf	inf	DISHUT					
170	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		16.454.856	3	140.742.525	3	16.454.856	0	10.969.904	0	8.227.428	0	66.815.444	3	102.467.632	100,00	72,81	3	118.922.488	inf	inf	DISHUT					
171	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		11.185.970	1	154.082.906	1	57.082.352		32.472.909		29.725.013		0	1	119.280.274	100,00	77,41	1	130.466.244	inf	inf	DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	0	14.896.000.000	0	2.634.536.492	100	2.240.673.568	0	381.030.272	0	326.127.648	0	646.599.509	100	494.329.863	100	1.848.087.292	100,00	82,48	100	4.482.623.784	inf	30,09						
172	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	265	5.586.000.000	44	654.118.751	53	570.198.348	53	102.107.050	0	174.108.350	0	168.091.460	0	58.732.500	53	503.039.360	100,00	88,22	97	1.157.158.111	36,60	20,72	DISHUT					
173	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0		1	45.000.000	1	44.942.695	0	0	0	0	0	1	44.942.695	100,00	99,87	1	44.942.695	inf	inf	DISHUT						
			Jumlah unit perbenihan yang dikembangkanyang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0								0		nan		0		nan		DISHUT							
174	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab (Kantor Resort)	Unit		0		14.915.300	1	145.000.000	1	14.915.300	0	10.041.291	0	133.216.079	0	0	1	158.172.670	100,00	109,08	1	173.087.970	inf	inf	DISHUT					
			Jumlah Pagar Kantor Resort yang direhab	Unit					1		1		0		0		0	1		100,00		1		inf		DISHUT						
175	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	Unit		0		0	1	45.000.000	0		0	1	44.435.027	0		0	0	1	44.435.027	100,00	98,74	1	44.435.027	inf	inf	DISHUT				
176	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	Unit		0		0	1	45.000.000	0		0	1	2.915.000	0	41.672.521	0	0	1	44.587.521	100,00	99,08	1	44.587.521	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0								0		nan		0		nan		DISHUT							
177	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	unit		0		0	1	45.000.000	0		0	1	45.000.000	0		0	0	1	45.000.000	100,00	100,00	1	45.000.000	inf	inf	DISHUT				
178	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	unit		0		0	1	45.000.000	1	44.927.227	0		0	0		0	0	1	44.927.227	100,00	99,84	1	44.927.227	inf	inf	DISHUT				
179	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	unit		0		0	1	45.000.000			0	1	2.900.000	0	41.760.014	0		0	1	44.660.014	100,00	99,24	1	44.660.014	inf	inf	DISHUT			
180	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas,	unit			0		0	1	45.000.000	1	45.000.000	0		0	0		0	1	45.000.000	100,00	100,00	1	45.000.000	inf	inf	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I	II	III		IV			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)	
		[UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
181	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	unit		0	1	145.000.000	0	0	0	1.181.000	1	142.875.091	0	0	1	144.056.091	100,00	99,35	1	144.056.091	inf	inf	DISHUT			
182	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	60.000.000	1	59.755.000	0	0	0	0	0	1	59.755.000	inf	99,59	1	59.755.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	M3/TAHUN			4500	4500		0		0		0	4500	100,00	4500		inf		DISHUT							
183	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	6.144.000.000	4	1.833.777.441	2	660.475.220	0	0	17.477.000	2	118.984.344	435.597.363	2	572.058.707	100,00	86,61	6	2.405.836.148	13,64	39,16	DISHUT			
184	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah gedung kantor UPTD KPHL Hulu Batanghari/Resort yang dipelihara	unit		0	1	145.000.000	1	44.715.000		7.234.980		0	0	1	51.949.980	100,00	35,83	1	51.949.980	inf	inf	DISHUT				
185	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	3.166.000.000	0	131.725.000	5	200.000.000	5	24.668.000	0	20.835.000	0	0	0	5	45.503.000	100,00	22,75	5	177.228.000	inf	5,60	DISHUT		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			336.102.800.000	33.492.118.208		30.070.097.812	4.701.424.994	10.861.522.238	6.013.007.615		1.094.373.344	22.670.328.191	75,39		56.162.446.399	16,71										
3.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			336.102.800.000	33.492.118.208		30.070.097.812	4.701.424.994	10.861.522.238	6.013.007.615		1.094.373.344	22.670.328.191	75,39		56.162.446.399	16,71										
3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRANSUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sunga	11.124.000.000	511.180.608	3	650.000.000	43.126.437	178.431.150	0		0	0	221.557.587	0,00	34,09	0	732.738.195	nan	6,59							
3.28.06.1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	DAS	0	11.124.000.000	0	511.180.608	1	650.000.000	0	43.126.437	0	178.431.150	0	0	221.557.587	0,00	34,09	0	732.738.195	nan	6,59					
1	3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	Dokumen	17	2.838.000.000	1	97.860.350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	97.860.350	5,88	3,45	DISHUT				
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	0		0		1	0		0			0		0,00	0		nan		DISHUT						
2	3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen		3.330.000.000	238.830.586	0	400.000.000	26.782.137	129.367.500	0		0	0	156.149.637	nan	39,04	0	394.980.223	nan	11,86	DISHUT					
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	0		0		2	0		0			0		0,00	0		nan		DISHUT						
			Jumlah kegiatan optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS yang dilakukan	Kali	0		0		10	0		0			0		0,00	0		nan		DISHUT						
			Jumlah Petak Ukur Permanen yang ter re-enumerasi dan publikasi	Petak	180		30	20	0		0				0		0,00	30		16,67		DISHUT						
			Jumlah Unit Bangunan Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS yang Dibangun	Unit	0		0	5	0		0				0		0,00	0		nan		DISHUT						
			Monev implementasi REDD + dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun	KPH	60		10	10	0		0				0		0,00	10		16,67		DISHUT						
3	3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kegiatan pengelolaan DAS yang dilakukan	Kali	0	2.683.000.000	0	87.087.850	10	100.000.000	0	9.661.750	0	33.765.950	0	0	43.427.700	0,00	43,43	0	130.515.550	nan	4,86	DISHUT				
4	3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	Lembaga	10	2.273.000.000	0	87.401.822	2	100.000.000	0	2.182.500	0	500.000	0	0	2.682.500	0,00	2,68	0	90.084.322	0,00	3,96	DISHUT				
5	3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Kali	0		0	0	10	50.000.000	0	4.500.050	0	14.797.700	0	0	19.297.750	0,00	38,60	0	19.297.750	nan	inf	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN	Indeks Tutupan Hutan	indeks		91.207.000.000	18.454.979.228	60.55	14.750.654.080	3.690.949.755	6.427.281.469	1.262.208.736			0	0	11.380.439.960	0,00	77,15	0	29.835.419.188	nan	32,71					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
		HUTAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen rancang bangun tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi yang disusun	Dokumen	0	9.626.000.000	0	297.079.026	10	500.000.000	0	31.779.100	0	76.579.100	0	0	0	0	108.358.200	0,00	21,67	0	405.437.226	nan	4,21						
1	3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Lindung (KPHP/ L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	0	4.514.000.000	0	97.174.800	3	300.000.000	0	31.779.100	0	53.100.500	0	0	0	0	84.879.600	0,00	28,29	0	182.054.400	nan	4,03	DISHUT					
			Panjang Batas Kawasan Hutan yang Dipelihara	Km	1800		70		30		0		30				30		100,00		100		5,56	DISHUT							
2	3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	KPH	10	5.112.000.000	50	199.904.226	10	200.000.000	0	0	0	23.478.600	0	0	0	0	23.478.600	0,00	11,74	50	223.382.826	500,00	4,37	DISHUT					
			Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	KPH	10		10		10		0		0				0		0,00		10		100,00		DISHUT						
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	50		18		0		0		0				0		nan		18		36,00		DISHUT						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	4,20						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	Dokumen	0	5.112.000.000	0	475.761.075	10	650.000.000	0	172.329.880	0	178.239.742	0	116.192.255	0	0	466.761.877	0,00	71,81	0	942.522.952	nan	18,44						
3	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0	267.700	1	25.000.000	0	9.148.500	0	645.100	0	4.830.000	1	0	1	14.623.600	100,00	58,49	1	14.891.300	inf	inf	DISHUT					
4	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	55	5.112.000.000	11	457.046.275	12	240.000.000	0	36.200.000	0	115.835.655	0	0	12	0	12	152.035.655	100,00	63,35	23	609.081.930	41,82	11,91	DISHUT				
5	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	Dokumen		0	0	1	25.000.000	0	5.706.800	0	6.130.437	0	12.693.450	1	0	1	24.530.687	100,00	98,12	1	24.530.687	inf	inf	DISHUT					
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen				0									0		nan		0		nan		DISHUT						
6	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	Dokumen		0	7.664.000	1	78.000.000	0	29.637.130	0	4.283.000	0	0	1	0	1	33.920.130	100,00	43,49	1	41.584.130	inf	inf	DISHUT					
7	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0	3.590.500	12	25.000.000	0	7.226.900	0	4.256.250	0	9.585.750	12	0	12	21.068.900	100,00	84,28	12	24.659.400	inf	inf	DISHUT					
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	Dokumen				12		0		0		0		12		12		100,00		12		inf		DISHUT					
8	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0	420.000	1	25.000.000	0	16.203.525	0	600.000	0	7.171.500	1	0	1	23.975.025	100,00	95,90	1	24.395.025	inf	inf	DISHUT					
9	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	unit		0	0	1	79.000.000	0	13.823.850	0	16.029.600	0	29.895.000	1	0	1	59.748.450	100,00	75,63	1	59.748.450	inf	inf	DISHUT					
10	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0	3.764.100	1	78.000.000	0	17.194.275	0	21.613.100	0	30.129.950	1	0	1	68.937.325	100,00	88,38	1	72.701.425	inf	inf	DISHUT					
11	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan	Dokumen		0	1.826.000	1	25.000.000	0	14.804.900	0	0	0	6.898.205	1	0	1	21.703.105	100,00	86,81	1	23.529.105	inf	inf	DISHUT					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengelolaan Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Pengelolaan Hutan yang disusun																												
12	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (RPHJpd Tahun 2024)	Dokumen	0	492.500	1	25.000.000	0	0	0	8.846.600	0	14.298.400	1	0	1	23.145.000	100,00	92,58	1	23.637.500	inf	inf							
13	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	0	690.000	1	25.000.000	0	22.384.000	0	0	0	690.000	1	0	1	23.074.000	100,00	92,30	1	23.764.000	inf	inf							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	Unit	0	19.408.000.000	0	4.395.076.762	10	2.895.900.000	0	522.142.085	0	1.231.902.465	0	269.844.392	0	0	2.023.888.942	0,00	69,89	0	6.418.965.704	nan	33,07						
14	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha pada Hutan Produksi yang tersedia	Dokumen	0	2.735.500	1	10.000.000	0	5.812.500	0	70.000	0	0	1	0	1	5.882.500	100,00	58,83	1	8.618.000	inf	inf							
15	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	Dokumen	0	0	1	10.000.000	0	900.000	0	6.055.350	0	0	1	0	1	6.955.350	100,00	69,55	1	6.955.350	inf	inf							
16	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	Dokumen	0	1.188.000	5	10.000.000	0	3.682.500	0	4.895.300	0	132.000	5	0	5	8.709.800	100,00	87,10	5	9.897.800	inf	inf							
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen			0								0		nan	0		nan		DISHUT									
17	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	50	1.110.000.000	10	52.654.000	1	10.000.000	0	15.598.500	0	10.910.000	0	0	1	0	1	26.508.500	100,00	265,09	11	79.162.500	22,00	7,13					
			Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	Dokumen	0	0	5		0	0	0	5		5		5		100,00	5		inf		DISHUT								
18	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	Dokumen	0	11.675.000	1	20.000.000	0	6.301.898	0	0	1.960.000	1	0	1	8.261.898	100,00	41,31	1	19.936.898	inf	inf								
19	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	50	1.910.000.000	10	98.501.750	1	130.000.000	0	20.525.200	0	61.688.472	0	0	1	0	1	82.213.672	100,00	63,24	11	180.715.422	22,00	9,46					
			Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Dokumen	0	0	7		0	0	0	7		7		7		100,00	7		inf		DISHUT								
20	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Dokumen	0	9.171.170	7	10.000.000	0	6.915.170	0	2.610.000	0	0	7	0	7	9.525.170	100,00	95,25	7	18.696.340	inf	inf							
21	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Dokumen	0	6.548.350	7	10.000.000	0	3.450.000	0	0	0	0	7	0	7	3.450.000	100,00	34,50	7	9.998.350	inf	inf							
22	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Dokumen	0	2.500.600	1	10.000.000	0	5.240.760	0	1.806.500	0	0	1	0	1	7.047.260	100,00	70,47	1	9.547.860	inf	inf							
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai	Dokumen			0								0		nan	0		nan		DISHUT									

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
23	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		12.039.324	0	20.000.000		4.101.674		2.478.100		8.891.000		0	0	15.470.774	nan	77,35	0	27.510.098	nan	inf	DISHUT					
24	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Dokumen		0		1.938.250	1	10.000.000	0	3.429.500	0	4.530.050	0	0	1	0	1	7.959.550	100,00	79,60	1	9.897.800	inf	inf	DISHUT					
25	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Dokumen		0		1.892.250	1	10.000.000	0	4.430.750	0	1.256.250	0	0	1	0	1	5.687.000	100,00	56,87	1	7.579.250	inf	inf	DISHUT					
26	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH dan PPKH di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		0		51.300	1	20.000.000	0	10.989.400	0	4.799.400	0	0	1	0	1	15.788.800	100,00	78,94	1	15.840.100	inf	inf	DISHUT					
			Jumlah PBPH dan PPKH yang dikoordinasikan/dikendalikan	Unit					3		0		0		0		3		3		100,00		3		inf	DISHUT						
27	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	0	2.055.000.000	27	290.740.323	3	120.000.000	0	16.286.600	0	44.365.900	0	0	3	0	3	60.652.500	100,00	50,54	30	351.392.823	inf	17,10	DISHUT					
			Jumlah izin usaha /kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan dan dikendalikan	Izin usaha/Kerjasama	135		0		3		0		0		0		3		3		100,00		3		2,22	DISHUT						
28	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin usaha		0		1.656.800	1	20.000.000	0	13.149.000	0	3.600.000	0	0	1	0	1	16.749.000	100,00	83,75	1	18.405.800	inf	inf	DISHUT					
29	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin usaha		0		5.175.000	1	20.000.000	0	8.145.000	0	6.080.000	0	0	1	0	1	14.225.000	100,00	71,13	1	19.400.000	inf	inf	DISHUT					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen					0									0		nan		0		nan	DISHUT							
30	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin usaha		0		2.804.500	2	20.000.000	0	12.512.500	0	0	0	2.171.425	2	0	2	14.683.925	100,00	73,42	2	17.488.425	inf	inf	DISHUT					
31	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	Izin Usaha/Kerjasama		0		10.807.100	10		0	0	10.807.100	0	0	0	0	10	0	10	10.807.100	100,00	inf	10	21.614.200	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen					0									0		nan		0		nan	DISHUT							
32	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	Izin Usaha/Kerjasama		0		837.100	1		0	0	3.099.300	0	8.817.750	0	0	1	0	1	11.917.050	100,00	inf	1	12.754.150	inf	inf	DISHUT				
33	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	KPH		0		4.830.000	1	40.000.000	0	5.400.000	0	20.330.095	0	0	1	0	1	25.730.095	100,00	64,33	1	30.560.095	inf	inf	DISHUT					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		[UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]																												
34	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin usaha		0		1.377.700	1	0	0	10.971.325	0	7.558.900	0	0	1	0	1	18.530.225	100,00	inf	1	19.907.925	inf	inf	DISHUT			
35	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	izin Usaha/Kerjasama		0		846.200	1	0	0	14.188.860	0	4.245.480	0	68.000	1	0	1	18.502.340	100,00	inf	1	19.348.540	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
36	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin usaha		0		471.000	1	20.000.000	0	7.076.900	0	0	0	0	1	0	1	7.076.900	100,00	35,38	1	7.547.900	inf	inf	DISHUT			
37	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin usaha		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DISHUT			
38	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	KPH		0		3.220.000	1	0	0	8.030.000	0	28.150.900	0	10.037.300	1	0	1	46.218.200	100,00	inf	1	49.438.200	inf	inf	DISHUT			
39	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin Usaha/Kerjasama		0		3.220.000	3	50.000.000	0	8.030.000	0	28.150.900	0	10.037.300	3	0	3	46.218.200	100,00	92,44	3	49.438.200	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
40	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT III)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin Usaha/Kerjasama		0		837.100	1	20.000.000	0	3.099.300	0	8.817.750	0	0	1	0	1	11.917.050	100,00	59,59	1	12.754.150	inf	inf	DISHUT			
41	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin Usaha/Kerjasama		0		846.200	1	20.000.000	0	14.188.860	0	4.245.480	0	68.000	1	0	1	18.502.340	100,00	92,51	1	19.348.540	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
42	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	izin usaha		0		0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	100,00	nan	10	0	inf	nan	DISHUT				
43	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah izin usaha atau PBPH/PS pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan/dikendalikan	unit PBPH/PS		0		1.377.700	1	20.000.000	0	10.971.325	0	7.558.900	0	0	1	0	1	18.530.225	100,00	92,65	1	19.907.925	inf	inf	DISHUT			
44	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan	Dokumen	0	1.809.000.000	20	292.035.333	7	50.000.000	0	17.642.000	0	40.153.435	0	0	7	0	7	57.795.435	100,00	115,59	27	349.830.768	inf	19,34	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
									I		II		III		IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung																														
			Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikordinasikan/dikendalikan	Izin usaha/Kerjasama	100		0		7		0		0		0		7		7		100,00		7		7,00		DISHUT						
45	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikordinasikan / dikendalikan	izin usaha			0		0		1		0		0		0		1		0		1		0	inf	nan	DISHUT					
46	3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	0		0	3	17.391.000	5	100.000.000	0	4.193.600	0		0	0	5		0	5	4.193.600	100,00	4,19	8	21.584.600	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Produksi yang dinilai	Dokumen	0		0			5		0		0		0		5		5		100,00			5		inf		DISHUT				
47	3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0		0	7	49.579.400	7	100.000.000	0	2.503.800	0		0	0	7		0	7	2.503.800	100,00	2,50	14	52.083.200	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Lindung yang dinilai	Dokumen	0		0			7		0		0		0		7		7		100,00			7		inf		DISHUT				
48	3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah KPH yang melaksanakan pemanfaatan hutan	KPH	50	1.022.000.000	10	167.661.500	10	200.000.000	0	9.240.500	0	34.020.000	0		0	10		0	10	43.260.500	100,00	21,63	20	210.922.000	40,00	20,64	DISHUT				
			Jumlah promosi tentang pemanfaatan hutan di wilayah KPH	KPH	0			0		10		0		0		0		10		10		100,00			10		inf		DISHUT				
49	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Unit			0		5.590.000	2	120.000.000	0	1.395.088	0	19.217.800	0	8.240.675	2		0	2	28.853.563	100,00	24,04	2	34.443.563	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	Unit					10		0		0		0		10		10		100,00			10		inf		DISHUT					
50	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	unit			0		11.553.550	1	120.000.000	0	92.829.950	0	6.753.600	0	2.613.500	1		0	1	102.197.050	100,00	85,16	1	113.750.600	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	unit						1		0		0		0		1		1		100,00			1		inf		DISHUT				
									0										0		nan			0		nan		DISHUT					
51	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	unit			0		218.600	1	505.900.000	0	42.771.050	0	289.827.750	0	163.897.692	1		0	1	496.496.492	100,00	98,14	1	496.715.092	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	unit						2		0		0		0		2		2		100,00			2		inf		DISHUT				
									0										0		nan			0		nan		DISHUT					
52	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	unit			0		2.147.000	1	120.000.000	0	10.394.400	0	26.273.666	0	55.067.100	1		0	1	91.735.166	100,00	76,45	1	93.882.166	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	unit						1		0		0		0		1		1		100,00			1		inf		DISHUT				
53	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Unit			11.502.000.000		3.307.411.312	20	100.000.000	0	31.752.800	0	208.040.737	0		0	20		0	20	239.793.537	100,00	239,79	20	3.547.204.849	inf	30,84	DISHUT			
54	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	unit			0		0	1	120.000.000	0	22.213.050	0	92.126.600	0		0	1		0	1	114.339.650	100,00	95,28	1	114.339.650	inf	inf	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		[UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]																												
			Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
55	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	unit		0		3.342.850	1	120.000.000	0	5.362.350	0	9.470.000	0	4.026.150	1	0	1	18.858.500	100,00	15,72	1	22.201.350	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
56	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	Unit		0		3.294.000	1	220.000.000	0	10.043.400	0	37.971.250	0	0	1	0	1	48.014.650	100,00	21,82	1	51.308.650	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Unit					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISHUT			
									0								0		nan		0		nan		DISHUT					
57	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	unit		0		2.096.000	1	270.000.000	0	18.061.200	0	113.846.800	0	2.634.250	1	0	1	134.542.250	100,00	49,83	1	136.638.250	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
58	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DISHUT				
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
59	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	Unit		0		2.814.000	1	120.000.000	0	16.404.975	0	81.179.350	0	0	1	0	1	97.584.325	100,00	81,32	1	100.398.325	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Unit					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara yang dilaksanakan	Ha	0	25.041.000.000	0	8.230.245.183	600	5.806.036.080	0	1.563.717.364	0	2.789.819.098	0	490.385.199	0	0	0	4.843.921.661	0,00	83,43	0	13.074.166.844	nan	52,21				
60	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	5	506.000.000	1	71.356.900	1	95.000.000	0	13.424.100	0	15.061.900	0	0	1	0	1	28.486.000	100,00	29,99	2	99.842.900	40,00	19,73	DISHUT			
61	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab (P0)	Ha		0		7.726.200	25	407.384.500	0	147.206.400	0	218.451.718	0	24.142.900	25	0	25	389.801.018	100,00	95,68	25	397.527.218	inf	inf	DISHUT			
			Luas Hutan Rakyat yang dipelihara (P1)	Ha					50		0		0		0		50		50		100,00		50		inf		DISHUT			
			Luas Hutan Rakyat yang dipelihara (P2)	Ha					25		0		0		0		25		25		100,00		25		inf		DISHUT			
62	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab	Ha		23.002.000.000		7.763.882.048	220	423.548.600	0	55.096.350	0	438.957.468	0	0	20	0	20	494.053.818	9,09	116,65	20	8.257.935.866	inf	35,90	DISHUT			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0		0		0		0		0				0		0		nan		0		nan		DISHUT			
63	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab	Hektar		0		3.220.000	0	754.923.000		485.257.364		262.908.550		1.172.575		0	0	749.338.489	nan	99,26	0	752.558.489	nan	inf	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
												I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					0								0		nan		0		nan		DISHUT						
64	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab	Hektar		0		8.670.000	25	323.910.000	0	107.851.750	0	154.363.284	0	25.655.000	5		0	5	287.870.034	20,00	88,87	5	296.540.034	inf	inf	DISHUT			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					75		0		0		0		5		5		6,67		5		inf		DISHUT				
65	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Ke-2 P2 (APBD Murni)	Ha		0		5.136.000	100	497.681.580	0	84.549.980	0	340.506.813	0	37.310.650	100		0	100	462.367.443	100,00	92,90	100	467.503.443	inf	inf	DISHUT			
			Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Ke-1 P1 (APBD Murni)	Ha					48		0		0		0		48		48		100,00		48		inf		DISHUT				
			Penanaman Hutan Rakyat P0 (DBH DR)	Hektar					25		0		0		0		25		25		100,00		25		inf		DISHUT				
66	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab	Hektar		0		0	1	508.709.500	0	138.941.088	0	353.507.770	0	483.300	1		0	1	492.932.158	100,00	96,90	1	492.932.158	inf	inf	DISHUT			
67	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (P1)	Ha		0		18.509.000	125	774.878.900	0	114.338.300	0	529.786.405	0	65.793.550	125		0	125	709.918.255	100,00	91,62	125	728.427.255	inf	inf	DISHUT			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (P2)	Ha					50		0		0		0		50		50		100,00		50		inf		DISHUT				
			Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab (P0)	Hektar					45		0		0		0		45		45		100,00		45		inf		DISHUT				
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					0								0		nan		0		nan		DISHUT						
68	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Kebuin Bibit Rakyat (KBR) yang terbangun	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	DISHUT				
69	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Arboretum untuk pelestarian sumber daya genetik	unit		0		72.935.938	2	1.870.000.000	0	417.052.032	0	452.417.340	0	335.827.224	2		0	2	1.205.296.596	100,00	64,45	2	1.278.232.534	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Kebuin Bibit Rakyat (KBR) yang terbangun	unit					3		0		0		0		3		3		100,00		3		inf		DISHUT				
			Jumlah unit perbenihan yang dikembangkan	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT				
70	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah agroforestry yang dikembangkan	Unit		0		0	2	0	0	0	0	0	0	2		0	2	0	100,00	nan	2	0	inf	nan	DISHUT				
71	3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N - 5	Dokumen	5	1.533.000.000	1	278.809.097	1	150.000.000	0	0	0	23.857.850	0	0	1		0	1	23.857.850	100,00	15,91	2	302.666.947	40,00	19,74	DISHUT			
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	50		10		0		0		0						0		nan		10		20,00		DISHUT				
			Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	Kali	0		0		10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	Kali	0	25.743.000.000	0	4.180.390.332	100	3.883.718.000	0	1.088.870.476	0	1.809.242.999	0	335.436.160	0		0	0	3.233.549.635	0,00	83,26	0	7.413.939.967	nan	28,80				
72	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah satgas LMPHBN	Orang		17.820.000.000		2.421.340.387	450	439.318.000	0	152.177.695	0	614.283.531	0	0	450		0	450	766.461.226	100,00	174,47	450	3.187.801.613	inf	17,89	DISHUT			
			Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani	Kasus	25		2		2		0		2						2		100,00		4		16,00		DISHUT				
			Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan yang dilakukan	Kali	800		161		10		0		0		0		10		10		100,00		171		21,38		DISHUT				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong											
								I		II		III		IV																				
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)										(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11
			Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali	0	Rp	0	Rp	100	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	inf	inf	DISHUT			
73	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	kali	0		18.600.000		20	120.000.000	0	71.118.000	0	7.200.000	0	18.797.800	20	0	20	97.115.800	100,00	80,93	20	115.715.800	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
74	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali	0		900.000		10	203.640.000	0	35.578.675	0	82.096.175	0	1.494.300	10	0	10	119.169.150	100,00	58,52	10	120.069.150	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah satgas LMPHBN	Orang					60		0		0		0		60		60		100,00		60		inf		DISHUT							
			Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
75	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	kali	0		21.337.950		20	257.720.000	0	88.970.351	0	21.412.250	0	0	20	0	20	110.382.601	100,00	42,83	20	131.720.551	inf	inf	DISHUT							
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
			Jumlah satgas LMPHBN	orang					80		0		0		0		80		80		100,00		80		inf		DISHUT							
76	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah satgas LMPHBN	Orang	0		9.590.400		45	150.580.000	0	49.948.750	0	49.017.500	0	4.180.800	45	0	45	103.147.050	100,00	68,50	45	112.737.450	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
			Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
77	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	Kali	0		15.218.200		10	161.600.000	0	65.491.350	0	31.808.200	0	12.169.200	10	0	10	109.468.750	100,00	67,74	10	124.686.950	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
			Jumlah satgas LMPHBN	Orang					50		0		0		0		50		50		100,00		50		inf		DISHUT							
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha					0									0		nan		0		nan		DISHUT								
78	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT VI)]	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	kali	0		8.131.400		10	170.580.000	0	68.530.450	0	47.310.910	0	42.904.500	10	0	10	158.745.860	100,00	93,06	10	166.877.260	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
			Jumlah satgas LMPHBN	orang					45		0		0		0		45		45		100,00		45		inf		DISHUT							
79	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali	0		35.281.800		10	171.600.000	0	63.361.750	0	38.456.250	0	30.000.000	10	0	10	131.818.000	100,00	76,82	10	167.099.800	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	kali					20		0		0		0		20		20		100,00		20		inf		DISHUT							
			Jumlah satgas LMPHBN	orang					50		0		0		0		50		50		100,00		50		inf		DISHUT							
80	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	kali	0		5.229.500		15	127.520.000	0	38.520.000	0	43.420.500	0	23.650.000	15	0	15	105.590.500	100,00	82,80	15	110.820.000	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah satgas LMPHBN	orang					30		0		0		0		30		30		100,00		30		inf		DISHUT							
			Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
81	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan	kali	0		15.090.645		10	160.580.000	0	48.772.200	0	37.710.540	0	20.686.400	10	0	10	107.169.140	100,00	66,74	10	122.259.785	inf	inf	DISHUT							
			Jumlah satgas LMPHBN	orang					450		0		0		0		450		450		100,00		450		inf		DISHUT							
			Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
82	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah satgas LMPHBN	orang	0		8.782.500		45	160.580.000	0	54.453.800	0	47.298.900	0	40.578.300	45	0	45	142.331.000	100,00	88,64	45	151.113.500	inf	inf	DISHUT							

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
									I		II		III		IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		[UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]							K	Rp									K	Rp														
			Patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	kali					12		0		0		0		12		12		100,00		12		inf		DISHUT							
			Pembinaan Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN)	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT							
83	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	kali		0		0	10	20.000.000	0		0	6.930.000	0	12.813.910	10		0	10	19.743.910	100,00	98,72	10		19.743.910	inf	inf	DISHUT					
84	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	Kali		1.022.000.000		194.301.075	10	30.000.000	0		18.056.700	0	72.809.080	0		0	10	0	10	90.865.780	100,00	302,89	10		285.166.855	inf	27,90	DISHUT				
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	0		0		0		0		0						0			nan		0		nan		DISHUT						
85	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	kali		0		2.262.500	10	15.000.000	0		4.200.000	0	5.918.800	0	853.650	10		0	10	10.972.450	100,00	73,15	10		13.234.950	inf	inf	DISHUT				
86	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	kali		0		812.400	1	20.000.000	0		12.781.500	0	2.882.000	0	3.246.000	1		0	1	18.909.500	100,00	94,55	1		19.721.900	inf	inf	DISHUT				
			Sosialisasi Regulasi Perlindungan Hutan	kali					1		0		0		0		1		1			100,00		1		inf		DISHUT						
87	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	Kali		0		15.055.150	10	20.000.000	0		8.611.150	0	9.897.625	0		0	10	0	10	18.508.775	100,00	92,54	10		33.563.925	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen					0										0			nan		0		nan		DISHUT						
88	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	Kali		0		1.691.500	10	15.000.000	0		2.706.500	0	7.799.200	0	1.282.800	10		0	10	11.788.500	100,00	78,59	10		13.480.000	inf	inf	DISHUT				
89	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	kali		0		3.059.800	10	15.000.000	0		3.973.950	0	3.273.200	0	2.944.650	10		0	10	10.191.800	100,00	67,95	10		13.251.600	inf	inf	DISHUT				
90	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	Kali		0		2.032.600	10	15.000.000	0		3.180.000	0	3.209.600	0	6.131.600	10		0	10	12.521.200	100,00	83,47	10		14.553.800	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen					0										0			nan		0		nan		DISHUT						
91	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		8.128.500	1	15.000.000	0		6.871.500	0		0	0	1		0	1	6.871.500	100,00	45,81	1		15.000.000	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	kali					3		0		0		0		3		3			100,00		3		inf		DISHUT						
92	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	kali		0		0	10	20.000.000	0		6.830.000	0	4.750.000	0	7.750.000	10		0	10	19.330.000	100,00	96,65	10		19.330.000	inf	inf	DISHUT				
93	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	kali		0		2.953.900	5	15.000.000	0		4.120.350	0	4.113.000	0	2.317.100	5		0	5	10.550.450	100,00	70,34	5		13.504.350	inf	inf	DISHUT				
94	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penangulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	Kali		0		8.983.500	10	50.000.000	0		14.668.400	0	13.363.898	0		0	10		0	10	28.032.298	100,00	56,06	10		37.015.798	inf	inf	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
			Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DISHUT					
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan					0								0		nan		0		nan		DISHUT					
95	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT VI)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penangulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	kali		0		5.685.500	10	60.000.000	0	10.482.800	0	16.643.640	0	15.758.800	10	0	10	42.885.240	100,00	71,48	10	48.570.740	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
96	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penangulangan kebakaran hutan dan lahan	kali		0		8.801.050	3	80.000.000	0	22.158.800	0	21.296.100	0	27.414.000	3	0	3	70.868.900	100,00	88,59	3	79.669.950	inf	inf	DISHUT			
			Latihan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan	kali					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISHUT			
			Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	kali					16		0		0		0		16		16		100,00		16		inf		DISHUT			
97	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali		0		3.528.500	10	50.000.000	0	13.483.350	0	27.754.850	0	3.519.000	10	0	10	44.757.200	100,00	89,51	10	48.285.700	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penangulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	kali					22		0		0		0		22		22		100,00		22		inf		DISHUT			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
98	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali		0		5.787.600	10	70.000.000	0	26.931.925	0	7.094.100	0	8.166.050	10	0	10	42.192.075	100,00	60,27	10	47.979.675	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penangulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
99	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penangulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	kali		0		7.254.500	15	50.000.000	0	25.042.000	0	6.220.000	0	5.250.000	15	0	15	36.512.000	100,00	73,02	15	43.766.500	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan					0									0		nan		0		nan		DISHUT				
100	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali		0		5.400.000	10	50.000.000	0	34.100.000	0	6.750.000	0	2.700.000	10	0	10	43.550.000	100,00	87,10	10	48.950.000	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penangulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	kali					22		0		0		0		22		22		100,00		22		inf		DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
101	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali		0		8.716.925	10	70.000.000	0	32.646.950	0	10.716.950	0	11.835.300	10	0	10	55.199.200	100,00	78,86	10	63.916.125	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	kali					15		0		0		0		15		15		100,00		15		inf		DISHUT				
102	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	Kali		6.901.000.000		1.315.811.870	10	940.000.000	0	80.341.355	0	517.883.550	0	0	10	0	10	598.224.905	100,00	63,64	10	1.914.036.775	inf	27,74	DISHUT				
			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi	Orang	750		150		150		0		0		0		150		150		100,00		300		40,00		DISHUT				
			Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali	0		0		100		0		0		0		100		100		100,00		100		inf		DISHUT				
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	0		0		0		0		0						0		nan		0		nan		DISHUT				
103	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	Kali		0		5.244.000	10	70.000.000	0	8.249.075	0	35.804.950	0	16.655.250	10	0	10	60.709.275	100,00	86,73	10	65.953.275	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT				
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan					0										0		nan		0		nan		DISHUT				
104	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	kali		0		15.376.680	10	70.000.000	0	12.511.150		4.117.700	0	12.336.750	10	0	10	28.965.600	100,00	41,38	10	44.342.280	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT				
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan					0										0		nan		0		nan		DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	inf			
Predikat Kinerja																											-	-			
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah lokasi produksi hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	KPH	0	5.751.000.000	0	739.802.550	10	665.000.000	0	225.422.150	0	264.803.675	0	14.004.650	0		0	0	504.230.475	0,00	75,82	0	1.244.033.025	nan	21,63				
105	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah lokasi produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang di hasilkan	KPH		0		1.769.100	1	50.000.000	0	0	0	40.354.250	0	1.384.400	1		0	1	41.738.650	100,00	83,48	1	43.507.750	inf	inf	DISHUT			
106	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Komoditi yang Dikembangkan	Jenis	0	5.225.000.000	0	583.227.050	10	165.000.000	0	58.316.300	0	156.259.000	0	0	10		0	10	214.575.300	100,00	130,05	10	797.802.350	inf	15,27	DISHUT			
			Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Ha	2000		400		100		0		0		0		100		100		100,00		500		25,00		DISHUT				
107	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Hektar		0		0	50	50.000.000	0	39.598.100	0	6.476.025	0	1.206.500	50		0	50	47.280.625	100,00	94,56	50	47.280.625	inf	inf	DISHUT			
108	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT III)]	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Ha		0		1.114.500	50	50.000.000	0	29.787.450	0	5.079.700	0	783.750	50		0	50	35.650.900	100,00	71,30	50	36.765.400	inf	inf	DISHUT			
109	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Hektar		0		2.143.500	50	50.000.000	0	38.603.300	0	6.953.000	0	1.170.000	50		0	50	46.726.300	100,00	93,45	50	48.869.800	inf	inf	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		[UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]																												
110	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Hektar		0		1.764.200	5	50.000.000	0	9.803.900	0	32.472.750	0	2.510.000	5	0	5	44.786.650	100,00	89,57	5	46.550.850	inf	inf	DISHUT			
111	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen		0		6.671.750	4	50.000.000	0	36.821.250	0	1.830.950	0	2.783.750	4	0	4	41.435.950	100,00	82,87	4	48.107.700	inf	inf	DISHUT			
			Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Hektar					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISHUT			
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
				Unit Managemen					0								0		nan		0		nan		DISHUT					
				Unit Managemen	0		0		0		0		0				0		nan		0		nan		DISHUT					
112	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Hektar		0		43.147.000	5	50.000.000	0	4.151.850	0	96.000	0	0	5	0	5	4.247.850	100,00	8,50	5	47.394.850	inf	inf	DISHUT			
113	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	Ha		0		0	1	50.000.000	0	8.340.000	0	0	0	4.166.250	1	0	1	12.506.250	100,00	25,01	1	12.506.250	inf	inf	DISHUT			
114	3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah izin pengolahan hasil hutan bukan kayu yang diawasi secara berkala	Izin	200	526.000.000	20	99.965.450	10	100.000.000	0	0	0	15.282.000	0	0	10	0	10	15.282.000	100,00	15,28	30	115.247.450	15,00	21,91	DISHUT			
			Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Unit Managemen	0		0		3		0		0		0		3		3		100,00		3		inf		DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan	KPH	0	526.000.000	0	99.651.650	10	100.000.000	0	0	0	22.878.000	0	0	0	0	0	22.878.000	0,00	22,88	0	122.529.650	nan	23,29				
115	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	200	526.000.000	40	99.651.650	40	100.000.000	0	0	0	22.878.000	0	0	40	0	40	22.878.000	100,00	22,88	80	122.529.650	40,00	23,29	DISHUT			
			Jumlah pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun yang dilaksanakan	Kali	0		0		10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	0,20				
Predikat Kinerja																									-	SR				
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	Benih/Bibit	0	0	0	36.972.650	800000	250.000.000	0	86.688.700	0	53.816.390	0	36.346.080	0	0	0	176.851.170	0,00	70,74	0	213.823.820	nan	inf				
116	3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha		0		2.275.600	8	50.000.000	0	18.642.750	0	3.666.400	0	11.093.100	8	0	8	33.402.250	100,00	66,80	8	35.677.850	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah pengada atau pengedar benih atau bibit terdaftar	bibit					0								0		nan		0		nan		DISHUT					
117	3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah sertifikasi sumber benih	sertifikat		0		1.914.000	2	50.000.000	0	29.384.250	0	15.652.200	0	0	2	0	2	45.036.450	100,00	90,07	2	46.950.450	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat					0								0		nan		0		nan		DISHUT					
118	3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN	Jumlah sertifikasi mutu benih	sertifikat		0		13.134.400	4	50.000.000	0	12.332.500	0	17.546.340	0	918.000	4	0	4	30.796.840	100,00	61,59	4	43.931.240	inf	inf	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]							K	Rp									K	Rp														
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat					4		0		0		0		4		4		100,00		4		inf		DISHUT							
119	3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat		0		9.484.800	14	50.000.000	0	12.530.400	0	3.282.450	0	16.514.280	14	0	14	32.327.130	100,00	64,65	14		41.811.930	inf	inf	DISHUT						
			Jumlah sertifikasi mutu bibit	sertifikat					14		0		0		0		14		14		100,00		14		inf		DISHUT							
120	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan		0		10.163.850	10	50.000.000	0	13.798.800	0	13.669.000	0	7.820.700	10	0	10	35.288.500	100,00	70,58	10		45.452.350	inf	inf	DISHUT						
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran benih dan / atau bibit yang dilakukan	kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												nan	inf					
Predikat Kinerja																												-	-					
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi		114.673.000.000		176.497.502	10	400.000.000		0		20.106.000		39.652.000		38.060.000	0	97.818.000	0,00	24,45	0		274.315.502	nan	0,24							
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	KPH	0	114.673.000.000	0	176.497.502	10	400.000.000	0	0	0	20.106.000	0	39.652.000	0	38.060.000	0	97.818.000	0,00	24,45	0		274.315.502	nan	0,24							
1	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	Kali		45.205.000.000		56.792.500	10	150.000.000	0	0	0	617.000	0	39.652.000	10	38.060.000	10	78.329.000	100,00	52,22	10		135.121.500	inf	0,30	DISHUT						
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	0		10		0		0		0					0		nan		10		inf		DISHUT								
			Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	Kelompok	0		0		10		0		0					0		0,00		0		nan		DISHUT								
2	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	Kelompok		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT						
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	kali					1									0		0,00		0		nan		DISHUT								
3	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	kelompok		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT						
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	kali					1									0		0,00		0		nan		DISHUT								
4	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	Kali		0		0	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT						
			Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	Kelompok					3									0		0,00		0		nan		DISHUT								
5	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	Kelompok		0		0	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]																														
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	Kali					5										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
6	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang		0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	Kali					5										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
			Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	Kelompok					3										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
7	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	kelompok		0		0	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	kali					12										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
8	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang		0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	kali					10										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
			Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	kelompok					3										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
9	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan	kali		0		0	20	0	0	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	kelompok					2										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
10	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang		0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISHUT				
			Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	kelompok					1										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					
			Jumlah kegiatan pengelolaan daerahpenyangga di kawasan bernilai ekosistem	kali					12										0		0,00		0		nan	nan	DISHUT					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
			pentingkewenanganprovinsi yang dikelola		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
11	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	lokasi		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT			
			Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	kali					50									0		0,00		0			nan		DISHUT				
12	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	Lokasi		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT			
			Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	kali					10									0		0,00		0			nan		DISHUT				
13	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	kali		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT			
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha					0									0		nan		0			nan		DISHUT				
			Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	lokasi					1									0		0,00		0			nan		DISHUT				
14	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	Kali		69.468.000.000		119.705.002	10	250.000.000		0		19.489.000		0		0	0	19.489.000	0,00	7,80	0		139.194.002	nan	0,20	DISHUT			
			Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	Lokasi	0		0		10		0		0					0		0,00		0			nan		DISHUT				
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	0		0		0		0		0					0		nan		0			nan		DISHUT				
15	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT II)]	Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	Kali		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT			
			Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	Lokasi					1									0		0,00		0			nan		DISHUT				
16	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	lokasi		0		0	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT			
			Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	kali					20									0		0,00		0			nan		DISHUT				
17	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	Kali		0		0	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT			
			Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	Lokasi					1									0		0,00		0			nan		DISHUT				
18	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	lokasi		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)				(8)				(9)				(10)				(11)				(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12				(15) = 14/5 * 100%				(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																
			Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	unit						1													0		0,00		0			nan		DISHUT																
19	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	Kali		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT																				
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha					0									0		nan		0			nan		DISHUT																					
			Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	Lokasi					1									0		0,00		0			nan		DISHUT																					
20	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi	lokasi		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISHUT																				
			Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola	kali					1									0		0,00		0			nan		DISHUT																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan														
Predikat Kinerja																																	-	-														
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar		115.831.000.000		12.230.551.097	50000	14.269.443.732		857.440.214		3.913.250.787		4.711.146.879	50637	1.056.313.344	50637	10.538.151.224	101,27	73,85	50637	22.768.702.321	inf	19,66																						
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	115.831.000.000	0	12.230.551.097	500	14.269.443.732	0	857.440.214	0	3.913.250.787	0	4.711.146.879	549	1.056.313.344	549	10.538.151.224	109,80	73,85	549	22.768.702.321	inf	19,66																						
1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Unit		0		0	1	150.000.000	0	3.069.200	0	48.687.600	0	78.077.900	1		0	1	129.834.700	100,00	86,56	1	129.834.700	inf	inf	DISHUT																				
			Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT																					
2	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Unit		0		0	1	150.000.000	0	982.500	0	55.188.650	0	87.097.150	1		0	1	143.268.300	100,00	95,51	1	143.268.300	inf	inf	DISHUT																				
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan	Kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT																					
			Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT																					
3	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh	orang		0		0	1	150.000.000	0	839.200	0	12.210.800	0	27.208.700	1	88.729.728	1	128.988.428	100,00	85,99	1	128.988.428	inf	inf	DISHUT																					
			Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT																					
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT																					
			Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT																					
			Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	orang					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT																					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang					0										0		nan		0		nan		DISHUT			
4	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh	Orang		15.160.000.000		867.978.853	500	1.345.890.000	0	24.838.800	0	272.223.500	0	0	500	0	500	297.062.300	100,00	22,07	500	1.165.041.153	inf	7,68	DISHUT			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	Orang					200		0		0		0		200		200		100,00		200		inf		DISHUT			
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan	Kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
			Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Unit					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
			Penas Tani	Kegiatan	0		0		1		0		1						1		100,00		1		inf		DISHUT			
5	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang		0		0	0	150.000.000		0		0		93.060.700		47.731.900	0	140.792.600	nan	93,86	0	140.792.600	nan	inf	DISHUT			
				Orang					20		0		0		0		20		20		100,00		20		inf		DISHUT			
			Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	Orang					20		0		0		0		20		20		100,00		20		inf		DISHUT			
			Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan	Kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
			Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Unit					0										0		nan		0		nan		DISHUT			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	0		0		0		0		0						0		nan		0		nan		DISHUT			
6	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	kelompok		0		0	2	80.000.000	0	3.499.500	0	4.830.479	0	62.086.060	2	4.749.775	2	75.165.814	100,00	93,96	2	75.165.814	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok					0										0		nan		0		nan		DISHUT			
7	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	kelompok		0		0	1	80.000.000	0	0	0	24.749.700	0	54.990.350	1	0	1	79.740.050	100,00	99,68	1	79.740.050	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok					0										0		nan		0		nan		DISHUT			
8	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	Kali		0		0	3	80.000.000	0	0	0	3.884.900	0	42.407.100	3	25.905.150	3	72.197.150	100,00	90,25	3	72.197.150	inf	inf	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok			3		0		0		0		3		3		100,00		3		inf		DISHUT				
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok			0										0		nan		0		nan		DISHUT				
9	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	Kali		3.000.000.000	885.224.811	10	846.165.000	0	13.480.000	0	159.727.729	0	0	10	0	10	173.207.729	100,00	20,47	10	1.058.432.540	inf	35,28	DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok	500		0		10		0		0		10		10		100,00		10		2,00		DISHUT				
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	0		0		0		0						0		nan		0		nan		DISHUT				
10	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	kali		0	0	1	80.000.000	0	0	0	31.514.000	0	29.396.000	1	12.880.000	1	73.790.000	100,00	92,24	1	73.790.000	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok				0									0		nan		0		nan		DISHUT				
11	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	kali		0	0	1	80.000.000	0	0	0	65.112.450	0	11.581.900	1	0	1	76.694.350	100,00	95,87	1	76.694.350	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	kelompok				3		0		0		0		3		3		100,00		3		inf		DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok				0									0		nan		0		nan		DISHUT				
12	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	kelompok		0	0	1	80.000.000	0	0	0	50.996.226	0	15.214.000	1	11.204.875	1	77.415.101	100,00	96,77	1	77.415.101	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	kali				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok				0									0		nan		0		nan		DISHUT				
13	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	Kali		0	0	1	100.000.000	0	840.000	0	5.512.150	0	34.605.025	1	8.232.500	1	49.189.675	100,00	49,19	1	49.189.675	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok				0									0		nan		0		nan		DISHUT				
14	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	kelompok		0	0	2	80.000.000	0	9.519.600	0	18.660.000	0	46.520.400	2	4.500.000	2	79.200.000	100,00	99,00	2	79.200.000	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	kali				18		0		0		0		18		18		100,00		18		inf		DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok				0									0		nan		0		nan		DISHUT				
15	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	Kali		0	0	1	80.000.000	0	0	0	15.774.000	0	59.721.700	1	589.000	1	76.084.700	100,00	95,11	1	76.084.700	inf	inf	DISHUT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		[UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]																												
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok					0								0		nan		0		nan		DISHUT					
16	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Stup		0		0	300	789.246.664	0	0	0	52.258.000	0	417.357.000	300	85.157.500	300	554.772.500	100,00	70,29	300	554.772.500	inf	inf	DISHUT			
			Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Hektar					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT			
			Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	unit					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISHUT			
17	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Hektar		0		0	5000	1.237.501.391	0	52.342.300	0	72.860.300	0	776.915.256	5000	137.998.050	5000	1.040.115.906	100,00	84,05	5000	1.040.115.906	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	stup					350		0		0		0		350		350		100,00		350		inf		DISHUT			
			Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	unit					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISHUT			
18	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Ha		97.671.000.000		10.470.379.933	50000	1.749.203.459	0	117.217.950	0	378.785.550	0	414.138.728	50000	339.309.935	50000	1.249.452.163	100,00	71,43	50000	11.719.832.096	inf	12,00	DISHUT			
			Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	Unit					20		0		0		0		20		20		100,00		20		inf		DISHUT			
			Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Stup	0		0		3000		0		0				0		0		0,00		0		nan		DISHUT			
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	0		0		0		0		0				0		nan		0		nan		DISHUT					
19	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Usulan Kelompok Perhutanan Sosial	Kelompok		0		0	3	888.748.800	0	860.500	0	210.050.400	0	584.123.710	3	19.819.950	3	814.854.560	100,00	91,69	3	814.854.560	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Stup					400		0		0		0		400		400		100,00		400		inf		DISHUT			
20	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	Unit		0		0	2	531.793.089	0	14.504.350	0	80.764.300	0	397.596.700	2	5.260.000	2	498.125.350	100,00	93,67	2	498.125.350	inf	inf	DISHUT			
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha					6069.17		0		0		0		6069.17		6069.17		100,00		6069.17		inf		DISHUT			
			Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Stup					300								0		0,00		0		nan		DISHUT					
21	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Stup		0		0	519	946.665.050	0	7.465.400	0	339.710.800	0	322.925.500	519	16.036.250	519	686.137.950	100,00	72,48	519	686.137.950	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok					3		0		0		0		3		3		100,00		3		inf		DISHUT			
			Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	Unit					3								0		0,00		0		nan		DISHUT					
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha					0								0		nan		0		nan		DISHUT					
			Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Hektar					0								0		nan		0		nan		DISHUT					
22	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	unit		0		0	2	1.031.501.498	0	0	0	165.578.463	0	638.547.800	2	129.494.700	2	933.620.963	100,00	90,51	2	933.620.963	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	stup					300		0		0		0		300		300		100,00		300		inf		DISHUT			
			Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Hektar					1								0		0,00		0		nan		DISHUT					
23	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	unit		0		0	2	938.669.105	0	8.533.600	0	587.129.924	0	180.239.400	2	62.777.406	2	838.680.330	100,00	89,35	2	838.680.330	inf	inf	DISHUT			
			Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	stup					350		0		0		0		350		350		100,00		350		inf		DISHUT			
			Bibit kayu putih yang disediakan	batang					5000		0		0		0		5000		5000		100,00		5000		inf		DISHUT			
			Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Hektar					882		0		0		0		882		882		100,00		882		inf		DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
24	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	stup		0		0	350	852.577.707	0	3.503.000	0	491.920.078	0	209.577.200	350	14.200.000	350	719.200.278	100,00	84,36	350	719.200.278	inf	inf	DISHUT				
			Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Hektar					3000		0		0		0		3000		3000		100,00		3000		inf		DISHUT				
			Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	unit					4		0		0		0		4		4		100,00		4		inf		DISHUT				
25	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	unit		0		0	4	939.742.629	0	9.813.950	0	646.948.038	0	124.724.000	4	41.736.625	4	823.222.613	100,00	87,60	4	823.222.613	inf	inf	DISHUT				
			Jumlah UPPK yang dibangun dan dipelihara	Unit					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT				
			Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek/Diklat pengelolaan Perhutanan Sosial	kali					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT				
			Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DISHUT				
			Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Hektar					9500		0		0		0		9500		9500		100,00		9500		inf		DISHUT				
26	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Stup		0		6.967.500	400	831.739.340	0	586.130.364	0	118.172.750	0	3.034.600	400		0	400	707.337.714	100,00	85,04	400	714.305.214	inf	inf	DISHUT			
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha					5000		0		0		0		5000		5000		100,00		5000		inf		DISHUT				
			Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Kelompok					10		0		0		0		10		10		100,00		10		inf		DISHUT				
			Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	Unit					2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf		DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																										
									I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				21.368.543.970		0		30.196.981.128		1.272.748.219		4.131.360.482		2.873.270.552		6.490.033.388		14.767.412.641		48,90		14.767.412.641		69,11																								
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.944.709.970		0		10.250.195.128		1.246.941.219		3.764.494.340		2.164.123.239		3.433.970.343		10.609.529.141		103,51		10.609.529.141		53,19																								
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				19.944.709.970		0		10.250.195.128		1.246.941.219		3.764.494.340		2.164.123.239		3.433.970.343		10.609.529.141		103,51		10.609.529.141		53,19																								
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		19.944.709.970		0	100	10.250.195.128		1.246.941.219		3.764.494.340		2.164.123.239		3.433.970.343	0	10.609.529.141	0,00	103,51	0	10.609.529.141	nan	53,19																								
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	443.254.408	0	0	100	125.521.064	0	9.845.000	0	27.409.674	0	31.379.900	0	69.406.490	0	138.041.064	0,00	109,97	0	138.041.064	nan	31,14																								
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	2	191.442.234		0	2	30.000.000	1	745.000	0	5.789.674	0	11.744.000	1	4.726.076	2	23.004.750	100,00	76,68	2	23.004.750	100,00	12,02	DINAS ESDM																							
2	X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																							
			Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen				1		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	nan		DINAS ESDM																								
3	X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																							
			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen				1		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	nan		DINAS ESDM																								
4	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	32.288.447		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																							
			Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1			1		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0,00		DINAS ESDM																									
5	X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	25.525.631		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																							
			Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1			1		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0,00		DINAS ESDM																									
6	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	3	191.442.234	1	0	3	95.521.064	0	9.100.000	1	21.620.000	1	19.635.900	1	64.680.414	3	115.036.314	100,00	120,43	4	115.036.314	133,33	60,09	DINAS ESDM																							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3			0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan		0		0,00		DINAS ESDM																									
7	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	4	2.555.862		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3			0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan		0		0,00		DINAS ESDM																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																		
Predikat Kinerja																																																		
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	10.748.086.610	0	0	100	7.528.757.419	0	933.193.365	0	3.224.162.273	0	1.526.299.532	100	2.312.469.717	100	7.996.124.887	100,00	106,21	100	7.996.124.887	inf	74,40																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
									I		II		III		IV																																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
8	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	80	10.141.471.461		0	80	7.349.937.419	0	933.193.365	0	3.141.007.273	0	1.487.284.532	63	2.268.879.717	63	7.830.364.887	78,75	106,54	63	7.830.364.887	78,75	77,21	DINAS ESDM																						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	80			0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DINAS ESDM																							
9	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	20	510.512.625		0	20	169.020.000	0		0	78.030.000	0	39.015.000	20	39.015.000	20	156.060.000	100,00	92,33	20	156.060.000	100,00	30,57	DINAS ESDM	Honor2 dialihkan ke kode rekeng gaji dan tunjangan																					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	20			0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		DINAS ESDM																							
10	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	25.525.631		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																						
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	50			50		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DINAS ESDM																							
11	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	19.144.223		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																						
			Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	1			1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DINAS ESDM																							
12	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	19.144.223		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																						
			Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	1			1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		DINAS ESDM																							
13	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	32.288.447		0	0	9.800.000	0		0	5.125.000	0		0	4.575.000	0	9.700.000	nan	98,98	0	9.700.000	0,00	30,04	DINAS ESDM																						
			Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	12			12		3		3		3		3		12		100,00		12		100,00		DINAS ESDM																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	0	191.442.234	0	0	1	90.000.000	0	49.999.590	0	8.603.000	0	23.820.658	1	49.576.342	1	131.999.590	100,00	146,67	1	131.999.590	inf	68,95																							
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0		0		100		0		0		100		100		100,00		100			inf																									
14	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen			0		1	0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD																						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS ESDM																								
15	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tanda kepemilikan tanah	Unit	4	63.814.078		0	4	50.000.000	0	49.999.590	0		0	0	4	0	4	49.999.590	100,00	100,00	4	49.999.590	100,00	78,35	DINAS ESDM																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I	II	III	IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
16	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen	1	127.628.156		0	1	40.000.000	0		0	0	8.603.000	0	23.820.658	1	49.576.342	1	82.000.000	100,00	205,00	1	82.000.000	100,00	64,25	DINAS ESDM				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					0		0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DINAS ESDM				
17	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen		0		0	1		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAS ESDM			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					0		0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	297.411.000	0	0	100		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	0,00				
18	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel	80	143.078.000		0	80		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD		
19	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen		0		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS ESDM					
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat	Tahun	1	154.333.000		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD		
			Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kali					20		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS ESDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	2.727.867.270	0	0	100	876.156.666	0	126.796.800	0	152.215.114	0	186.827.517	100	337.622.153	100	803.461.584	100,00	91,70	100	803.461.584	inf	29,45						
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit/Set/Buah	500	44.207.000		0	500	20.000.000	125	4.930.400	125	4.930.400	125	4.930.400	125	21.158.800	500	35.950.000	100,00	179,75	500	35.950.000	100,00	81,32	DINAS ESDM					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS ESDM					
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	648.065.000		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD			
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit/Set/Buah					8		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS ESDM					
23	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit/Set/Buah	1000	178.811.000		0	1000	29.651.200	250	5.707.300	250	5.514.800	250	8.238.000	250	18.829.084	1000	38.289.184	100,00	129,13	1000	38.289.184	100,00	21,41	DINAS ESDM					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS ESDM					
24	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Unit/Set/Buah	800	85.393.271		0	800	25.000.000	200	4.992.750	200	4.976.000	200	10.434.000	200	23.497.250	800	43.900.000	100,00	175,60	800	43.900.000	100,00	51,41	DINAS ESDM					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DINAS ESDM					
25	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar	6	35.770.000		0	6	15.000.000	2	2.620.000	0	3.555.000	0		0	4	0	6	6.175.000	100,00	41,17	6	6.175.000	100,00	17,26	DINAS ESDM				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
26	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	1	1.685.620.999		0	1	786.505.466	0	108.546.350	0	133.238.914	0	163.225.117	1	274.137.019	1	679.147.400	100,00	86,35	1	679.147.400	100,00	40,29	DINAS ESDM				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					0		0		0		0		0				nan		0		nan		DINAS ESDM				
27	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Dokumen	1	50.000.000		0	1		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					0		0		0		0		0			nan		0		nan		DINAS ESDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	7,84						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	513.683.000	0	0	100	10.000.000	0		0	0		0	100		0	100,00	0,00	100		0	inf	0,00					
28	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Unit		0		0	2		0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAS ESDM				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0			nan		0		nan			DINAS ESDM					
29	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	1	413.683.000		0	1	10.000.000	0		0	0		0	0		0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM				
30	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	Unit	1	100.000.000		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomodir APBD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	2.533.169.000	0	0	100	1.394.759.979	0	108.729.464	0	303.313.529	0	347.679.096	0	576.379.927	0	1.336.102.016	0,00	95,79	0	1.336.102.016	nan	52,74					
31	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Tahun	1	48.204.000		0	1	8.000.000	0	5.110.000	0		0	2.890.000	1	3.950.000	1	11.950.000	100,00	149,38	1	11.950.000	100,00	24,79	DINAS ESDM				
32	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan	m3/Tahun	200	1.062.117.000		0	200	433.000.000	50	90.274.714	50	83.409.715	50	83.305.515	50	113.562.072	200	370.552.016	100,00	85,58	200	370.552.016	100,00	34,89	DINAS ESDM				
			Jumlah tagihan internet yang dibayarkan	Mbps	500				500		125		125		125		125		500		100,00		500		100,00		DINAS ESDM				
			Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	kWh	2000				2000		500		500		500		500		2000		100,00		2000		100,00		DINAS ESDM				
			Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan	Rekening	2				2		0		0		0		2		2		100,00		2		100,00		DINAS ESDM				
33	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.422.848.000		0	0	953.759.979	0	13.344.750	0	219.903.814	0	261.483.581	0	458.867.855	0	953.600.000	nan	99,98	0	953.600.000	0,00	67,02	DINAS ESDM				
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	20				20		0		0		0		20		20		100,00		20		100,00		DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								9,84	3,84						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	2.489.796.448	0	0	100	225.000.000	0	18.377.000	0	48.790.750	0	48.116.536	0	88.515.714	0	203.800.000	0,00	90,58	0	203.800.000	nan	8,19					
34	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	396.745.000		0	0	145.000.000	0	14.177.000	0	33.700.750	0	36.776.536	0	59.845.714	0	144.500.000	nan	99,66	0	144.500.000	0,00	36,42	DINAS ESDM				
			Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	Unit					11		0		0		0		11		11		100,00		11		inf		DINAS ESDM				
35	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	50	38.288.447		0	50	30.000.000	0	4.200.000	0	5.690.000	0	9.140.000	50	10.570.000	50	29.600.000	100,00	98,67	50	29.600.000	100,00	77,31	DINAS ESDM				
36	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit	1	391.263.001		0	1		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																												
									I		II		III		IV																																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
			dipelihara/rehab																									diakomodir APBD																								
37	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	Unit	50	813.429.000		0	50	30.000.000	0		0	0	9.400.000	0	2.200.000	50	18.100.000	50	29.700.000	100,00	99,00	50	29.700.000	100,00	3,65	DINAS ESDM																								
38	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Lantai	2	850.071.000		0	2	20.000.000	0		0	0		0	0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.423.834.000		0		19.946.786.000		25.807.000		366.866.142		709.147.313		3.056.063.045		4.157.883.500		20,84		4.157.883.500		292,02																										
3.29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				1.423.834.000		0		19.946.786.000		25.807.000		366.866.142		709.147.313		3.056.063.045		4.157.883.500		20,84		4.157.883.500		292,02																										
3.29.06		PROGRAM PENGELOLAANKETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	%		705.569.000		0	99,60	2.432.374.000		25.807.000		187.168.000		474.406.000		1.573.033.000	0	2.260.414.000	0,00	92,93	0	2.260.414.000	nan	320,37																										
3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	0	100.000.000	0	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	0,00																									
1	3.29.06.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah NSPK Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	50.000.000		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD																							
			Terlaksananya penertiban usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen					1			0		0		0		0		0	0,00		0		nan		DINAS ESDM																									
2	3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik yang dikendalikan dan diawasi	Dokumen	1	50.000.000		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD																							
			Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan					1			0		0		0		0		0	0,00		0		nan		DINAS ESDM																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah	Dokumen	0	100.000.000	0	0	1	85.164.000	0	11.202.000	0	39.331.000	0	32.804.000	0	30.827.000	0	114.164.000	0,00	134,05	0	114.164.000	nan	114,16																										
3	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi teknis Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang disusun	Dokumen	1	50.000.000		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS ESDM				
4	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	Dokumen	1	50.000.000		0	1	85.164.000	0	11.202.000	0	39.331.000	0	32.804.000	1	30.827.000	1	114.164.000	100,00	134,05	1	114.164.000	100,00	228,33	DINAS ESDM				
			Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi	Laporan					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	57,08							
Predikat Kinerja																							-	R							
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			0	50.000.000	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	0,00					
5	3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri yang dikendalikan dan diawasi	Dokumen	1	50.000.000		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD			
			Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	0,00							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	KK	0	455.569.000	0	0	1300	2.347.210.000	0	14.605.000	0	147.837.000	0	441.602.000	0	1.542.206.000	0	2.146.250.000	0,00	91,44	0	2.146.250.000	nan	471,11					
6	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Masyarakat yang belum berlistrik dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu yang telah didata	Rumah Tangga	1	50.000.000		0	1000		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD			
7	3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Masyarakat berlistrik yang telah ditetapkan sebagai Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	KK		10.000.000		0	600	2.347.210.000	0	14.605.000	0	147.837.000	0	441.602.000	600	1.542.206.000	600	2.146.250.000	100,00	91,44	600	2.146.250.000	inf	21.462,50	DINAS ESDM				
8	3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang telah didata	Laporan	1	50.000.000		0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD			
9	3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan dalam rangka Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kali	1	50.000.000		0	100		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD			
			Tersedianya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN	Laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DINAS ESDM				
10	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Penambahan Rumah Tangga yang mendapatkan akses listrik dari Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rumah Tangga	20	200.000.000		0	200		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
11	3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	1	95.569.000		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD		
			Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan	Laporan					1		0		0		0		0			0	0,00		0			nan		DINAS ESDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	1.951,14					
Predikat Kinerja																									-	ST					
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEKKEGEOLOGIAN	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	%		297.759.000		0	55	118.800.000		0	35.186.500	42.089.364	16.124.136	0	93.400.000	0,00	78,62	0	93.400.000	nan	31,37								
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Dokumen dan Peta	0	205.000.000	0	0	1	68.800.000	0		0	15.029.100	0	27.521.364	0	1.449.536	0	44.000.000	0,00	63,95	0	44.000.000	nan	21,46					
1	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah yang tersedia	Dokumen dan Peta	1	205.000.000	1	0	1	68.800.000	0		0	15.029.100	0	27.521.364	1	1.449.536	1	44.000.000	100,00	63,95	2	44.000.000	200,00	21,46	DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									200,00	21,46					
Predikat Kinerja																									ST	SR					
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan air tanah	Laporan	0	92.759.000	0	0	1	50.000.000	0		0	20.157.400	0	14.568.000	0	14.674.600	0	49.400.000	0,00	98,80	0	49.400.000	nan	53,26					
2	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah data pemakaian air tanah di dalam zona konservasi air tanah yang tersedia	Dokumen dan Peta	30	92.759.000	1	0	1	50.000.000	0		0	10	20.157.400	0	14.568.000	1	14.674.600	11	49.400.000	1.100,00	98,80	12	49.400.000	40,00	53,26	DINAS ESDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									20,00	26,63					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DANBATUBARA	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	%		26.220.000		0	40	245.900.000		0	80.465.642	90.501.949	98.577.909	0	269.545.500	0,00	109,62	0	269.545.500	nan	1.028,01								
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	0	9.500.000	0	0	1	109.200.000	0		0	28.279.800	0	51.502.475	0	28.871.725	0	108.654.000	0,00	99,50	0	108.654.000	nan	1.143,73					
1	3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan informasi Wilayah izin usaha pertambangan yang tersedia	Dokumen	1	3.500.000		0	1		0		0	0		0	0		0	0	0,00	nan	0		0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD		
2	3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tersedia	Peta	1	3.000.000		0	1	55.000.000	0		0	4.568.600	0	30.163.600	1	19.992.800	1	54.725.000	100,00	99,50	1	54.725.000	100,00	1.824,17	DINAS ESDM				
3	3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang baik dan benar (good mining practice)	IUP	1	3.000.000		0	1	54.200.000	0		0	23.711.200	0	21.338.875	1	8.878.925	1	53.929.000	100,00	99,50	1	53.929.000	100,00	1.797,63	DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									66,67	1.207,27					
Predikat Kinerja																									S	ST					
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	0	9.500.000	0	0	1	106.700.000	0		0	44.473.642	0	30.778.882	0	60.763.976	0	136.016.500	0,00	127,48	0	136.016.500	nan	1.431,75					
4	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diterbitkan	Dokumen	1	3.000.000		0	1	53.400.000	0		0	0	21.200.800	0	22.625.712	1	19.256.488	1	63.083.000	100,00	118,13	1	63.083.000	100,00	2.102,77	DINAS ESDM			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I		II		III		IV																
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)					(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																													
5	3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikendalikan dan diawasi	IUP	1	3.200.000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	nan	nan	DINAS ESDM						
6	3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	1	3.300.000	0	0	53.300.000	0	0	0	23.272.842	0	8.153.170	0	41.507.488	0	72.933.500	nan	136,84	0	72.933.500	0,00	2.210,11	DINAS ESDM					
			Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	IUP				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	0	nan	nan	DINAS ESDM							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	718,81							
Predikat Kinerja																							-	ST							
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Usaha Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	0	7.220.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	7.712.200	0	8.220.592	0	8.942.208	0	24.875.000	0,00	82,92	0	24.875.000	nan	344,53					
7	3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Rekomendasi Perizinan Izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan	Dokumen	1	2.500.000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD				
8	3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin Pertambangan Rakyat yang dikendalikan dan diawasi	IUP	1	2.500.000	0	1	30.000.000	0	0	0	7.712.200	0	8.220.592	1	8.942.208	1	24.875.000	100,00	82,92	1	24.875.000	100,00	995,00	DINAS ESDM					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam,	Laporan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	DINAS ESDM								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV														
									(5)		(6)		(7)		(8)												(9)		(10)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																										
9	3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	IUP	1	2.220.000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	110,56							
Predikat Kinerja																					-	ST							
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGITERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	%		394.286.000	29	0	33,3	17.149.712.000		0		64.046.000	102.150.000		1.368.328.000	0	1.534.524.000	0,00	8,95	29	1.534.524.000	inf	389,19				
	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi)	Ton Co2eq	20	394.286.000	20	0	20	17.149.712.000	0	0	0	64.046.000	102.150.000	0	1.368.328.000	0	1.534.524.000	0,00	8,95	20	1.534.524.000	100,00	389,19				
1	3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah rumusan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi.	Dokumen	1	24.286.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD				
			Tersedianya perda pengelolaan energi	Dokumen	1		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0,00		DINAS ESDM					
2	3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kali	1	20.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD				
			Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Laporan	1		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0,00		DINAS ESDM					
3	3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpasangnya PLTS Irigasi	Unit		270.000.000		0	2	17.149.712.000	0	0	0	64.046.000	102.150.000	2	1.368.328.000	2	1.534.524.000	100,00	8,95	2	1.534.524.000	inf	568,34	DINAS ESDM			
								0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DINAS ESDM					
			Terpasangnya PLTS Atap	Unit				1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DINAS ESDM					
			Terpasangnya Biogas Skala Rumah Tangga	Unit				1		0	0	0	1		1		100,00		1		inf		DINAS ESDM						
			Terpasangnya Lampu Penerangan Tenaga Surya	Unit				824		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DINAS ESDM					
4	3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi kewenangan provinsi	Orang	1	80.000.000	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM	Kegiatan tidak diakomdir di APBD				
			Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Laporan	1		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0,00		DINAS ESDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	142,09							
Predikat Kinerja																					-	ST							

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				0		0		28.547.010.914		4.443.719.242		7.847.700.135		8.203.083.340		8.352.310.747		28.846.813.464		101,05		28.846.813.464		inf					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		16.837.383.966		2.653.454.156		5.509.745.572		3.686.646.727		4.718.695.337		16.568.541.792		98,40		16.568.541.792		inf					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		16.837.383.966		2.653.454.156		5.509.745.572		3.686.646.727		4.718.695.337		16.568.541.792		98,40		16.568.541.792		inf					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0		0	100	16.837.383.966		2.653.454.156		5.509.745.572		3.686.646.727		4.718.695.337	0	16.568.541.792	0,00	98,40	0	16.568.541.792	nan	inf					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	0	0	0	85	184.006.000	0	73.006.500	0	41.637.800	0	26.877.500	0	25.984.228	0	167.506.028	0,00	91,03	0	167.506.028	nan	inf					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	10	112.000.000	5	71.556.500	2	13.030.800	0	4.359.500	3	9.241.228	10	98.188.028	100,00	87,67	10	98.188.028	inf	inf	DISPERINDAG				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023			
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	4	72.006.000	2	1.450.000	0	28.607.000	1	22.518.000	1	16.743.000	4	69.318.000	100,00	96,27	4	69.318.000	inf	inf	DISPERINDAG				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	12.430.888.800	0	1.931.292.394	0	4.369.654.270	0	2.789.695.581	3	3.236.480.220	3	12.327.122.465	25,00	99,17	3	12.327.122.465	inf	inf					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang		0		0	92	12.010.332.250	92	1.854.063.394	92	4.314.005.570	92	2.679.200.331	92	3.143.446.620	368	11.990.715.915	400,00	99,84	368	11.990.715.915	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISPERINDAG					
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang		0		0	48	369.906.600	0	70.620.000	48	47.080.000	48	94.826.000	0	73.230.600	96	285.756.600	200,00	77,25	96	285.756.600	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISPERINDAG						
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	0	16.999.950	0	3.974.500	0	5.848.200	0	5.074.250	0	2.103.000	0	16.999.950	nan	100,00	0	16.999.950	nan	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen				3		0	0	0	0	0	3		3		100,00		3		inf		DISPERINDAG						
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023				
			Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen				1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISPERINDAG						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023					
			Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen				1		0		0		0		0		0	0,00		0		nan		DISPERINDAG						
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	33.650.000	3	2.634.500	3	2.720.500	3	10.595.000	3	17.700.000	12	33.650.000	100,00	100,00	12	33.650.000	inf	inf	DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	28.560.000	0		0	0	11.647.900	0	10.180.000	3	7.460.000	3	29.287.900	25,00	102,55	3	29.287.900	inf	inf				
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMd pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	dokumen		0		0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG					
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	nan	inf	0	1.800.000	nan	inf	DISPERINDAG					
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen		0		0	1	25.560.000	0		0	0	11.647.900	0	10.180.000	0	2.660.000	0	24.487.900	0,00	95,81	0	24.487.900	nan	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG					
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG					
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	3.000.000	0		0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00	100,00	0	3.000.000	nan	inf	DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	%	0	0	0	0	100	1.500.000	0		0	0	1.500.000	0	0	25	0	25	1.500.000	25,00	100,00	25	1.500.000	inf	inf				
16	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan redistribusi kewenangan perangkat daerah	dokumen		0		0	1	1.500.000	0		0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00	100,00	0	1.500.000	nan	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG					
17	X.XX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan redistribusi kewenangan perangkat daerah	dokumen		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
18	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG				
			Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh perangkat daerah pemungut retribusi	kali			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISPERINDAG					
19	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG				
			Jumlah dokumen data retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	dokumen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISPERINDAG					
20	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG				
			Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISPERINDAG					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	0	0	0	60	236.254.000	0	11.660.000	0	109.251.000	0	12.613.223	25	0	25	133.524.223	41,67	56,52	25	133.524.223	inf	inf			
21	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	stel		0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023			
22	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Dikelola	Dokumen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023			
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll)	Dokumen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		DISPERINDAG					
23	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	orang		0	0	90	96.350.000	0	0	90	96.346.000	0	0	0	0	90	96.346.000	100,00	100,00	90	96.346.000	inf	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0		nan		DISPERINDAG					
24	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		0	0	45	139.904.000	10	11.660.000	3	12.905.000	4	12.613.223	0	0	17	37.178.223	37,78	26,57	17	37.178.223	inf	inf	DISPERINDAG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	756.672.735	0	197.913.024	0	207.717.627	0	127.131.770	0	258.513.903	0	791.276.324	0,00	104,57	0	791.276.324	nan	inf			
25	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis komponen		0	0	1	760.000	1	756.000	0	0	0	0	0	1	756.000	100,00	99,47	1	756.000	inf	inf	DISPERINDAG				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPJMD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
26	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jenis komponen		0	K	Rp	8	10.993.461	8	10.987.300	0	0	0	0	0	8	10.987.300	100,00	99,94	8	10.987.300	inf	inf	DISPERINDAG					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0	0	0	0	nan		0		nan	inf	DISPERINDAG						
27	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0			0	7.413.200	0	0	0	7.303.800	0	0	0	0	7.303.800	nan	98,52	0	7.303.800	nan	inf	DISPERINDAG					
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit					2		0		2		0		2		100,00		2		inf	DISPERINDAG							
28	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0			0	48.650.000	0	15.900.000	0	31.933.000	0	0	0	0	47.833.000	nan	98,32	0	47.833.000	nan	inf	DISPERINDAG					
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis					4		1		3		0		4		100,00		4		inf	DISPERINDAG							
29	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0			0	9.947.600	0	0	0	9.947.600	0	0	0	0	9.947.600	nan	100,00	0	9.947.600	nan	inf	DISPERINDAG					
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis					33		0		33		0		33		100,00		33		inf	DISPERINDAG							
30	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0			50	127.828.970	7	34.429.600	23	47.361.500	14	27.399.000	6	16.338.970	50	125.529.070	100,00	98,20	50	125.529.070	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	kali					10		6		3		1		0	10		100,00		10		inf	DISPERINDAG						
31	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetak blanko NCR, lainnya	buah		0			0	41.478.000	0	10.353.300	0	14.459.100	0	7.626.000	0	31.732.560	0	64.170.960	0,00	154,71	0	64.170.960	nan	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah cetak amplop	kotak					15		15		0		0		0	15		100,00		15		inf	DISPERINDAG						
			Jumlah cetak kop surat dinas	rim					10		10		0		0		0	10		100,00		10		inf	DISPERINDAG						
			jumlah cetak map OPD	buah					800		800		0		0		0	800		100,00		800		inf	DISPERINDAG						
			jumlah penggandaan	lembar					102000		2593		51537		21503		26367	102000		100,00		102000		inf	DISPERINDAG						
			jumlah spanduk	m2					154.4		15		35		50		54	154		99,74		154		inf	DISPERINDAG						
32	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah penggandaan	lembar		0			0	6000	1.815.000	1300	415.000	840	300.000	1060	400.000	3860	700.000	7060	1.815.000	117,67	100,00	7060	1.815.000	inf	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah spanduk	meter					7		2		2		3		0	7		100,00		7		inf	DISPERINDAG						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0	0	nan		0		nan	DISPERINDAG							
33	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksemplar		0			0	14	1.680.000	4	420.000	2	420.000	3	420.000	5	420.000	14	1.680.000	100,00	100,00	14	1.680.000	inf	inf	DISPERINDAG			
34	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	eksemplar		0			0	256	27.470.000	53	6.720.000	93	6.870.000	47	6.870.000	20	7.010.000	213	27.470.000	83,20	100,00	213	27.470.000	inf	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0		0		0		0		0	0	nan		0		nan	DISPERINDAG							
35	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0			0	64	478.636.504	16	117.931.824	12	89.122.627	12	84.416.770	24	202.312.373	64	493.783.594	100,00	103,16	64	493.783.594	inf	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					0		0		0		0		0	0	nan		0		nan	DISPERINDAG							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
36	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola	arsip		0		0	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen						0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	152.105.186	0	0	0	50.831.600	0	0	3	64.947.400	3	115.779.000	25,00	76,12	3	115.779.000	inf	inf			
37	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (UPTD BPSMB)	Unit				1		0		0		0		0		0	0,00		0		nan		DISPERINDAG				
38	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	unit		0		0	2	12.832.000	0	0	2	12.831.600	0	0	5	52.725.400	7	65.557.000	350,00	510,89	7	65.557.000	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG			
39	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit		0		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISPERINDAG			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISPERINDAG				
40	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	unit		0		0	8	139.273.186	0	0	3	38.000.000	0	0	6	12.222.000	9	50.222.000	112,50	36,06	9	50.222.000	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	2.254.999.967	0	356.725.709	0	612.655.672	0	499.762.467	3	746.780.573	3	2.215.924.421	25,00	98,27	3	2.215.924.421	inf	inf			
41	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0		0	600	1.500.000	70	300.000	230	350.000	50	150.000	250	700.000	600	1.500.000	100,00	100,00	600	1.500.000	inf	inf	DISPERINDAG		
42	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0	12.700.000	0	9.700.000	0	0	0	0	0	9.700.000	nan	76,38	0	9.700.000	nan	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun	surat				2500		300		900		0		1300		2500		100,00		2500		inf		DISPERINDAG			
43	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	kwh		0		0	74500	131.070.000	14857.87	28.150.920	0	22.781.224	0	45.300.822	20926	26.207.488	35783.87	122.440.454	48,03	93,42	35783.87	122.440.454	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah rekening telepon/telkomnet dalam 1 tahun	rekening				2		2		2		2		2		8		400,00		8		inf		DISPERINDAG			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0		0		0		38716		0		38716		inf		38716		inf		DISPERINDAG			
44	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa informasi dan publikasi yang tersedia	kali		0		0	5	315.989.000	0	70.168.603	0	67.296.509	0	66.367.366	0	89.710.522	0	293.543.000	0,00	92,90	0	293.543.000	nan	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG			
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening telepon				5		5		0		5		5		15		300,00		15		inf		DISPERINDAG			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah tagihan air yang dibayarkan	m3					1300		243.2		240		188		0		671.2		51,63		671.2		inf	DISPERINDAG				
			Jumlah tagihan internet yang dibayarkan	mbps					100		100		0		100		100		300		300,00		300		inf	DISPERINDAG				
			Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	kwh					143000		38199.26		36171		36522		37108		148000.26		103,50		148000.26		inf	DISPERINDAG				
45	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan, pengamanan dan sopir	orang		0	0	35	1.793.740.967	35	248.406.186	35	522.227.939	35	387.944.279	35	630.162.563	140	1.788.740.967	400,00	99,72	140	1.788.740.967	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah jasa kesehatan jasmani (senam mingguan)	kali					44		11		9		12		12		44		100,00		44		inf	DISPERINDAG				
			Jumlah jasa kesehatan rohani (wirid mingguan, program ramadhan)	kali					52		13		11		12		16		52		100,00		52		inf	DISPERINDAG				
			Jumlah jasa rohaniwan (pengambil sumpah jabatan)	kali					4		1		0		2		1		4		100,00		4		inf	DISPERINDAG				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	792.397.278	0	82.856.529	0	104.849.703	0	220.386.186	3	378.529.013	3	786.621.431	25,00	99,27	3	786.621.431	inf	inf				
46	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0	0	1	46.344.000	1	16.065.448	0	7.478.334	0	15.749.000	0	7.030.552	1	46.323.334	100,00	99,96	1	46.323.334	inf	inf	DISPERINDAG				
47	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	0	10	220.877.514	3	49.441.081	2	62.575.769	2	34.877.100	3	73.962.319	10	220.856.269	100,00	99,99	10	220.856.269	inf	inf	DISPERINDAG				
48	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	95	72.380.000	26	17.350.000	21	14.235.000	30	26.944.000	18	3.166.500	95	61.695.500	100,00	85,24	95	61.695.500	inf	inf	DISPERINDAG				
49	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit		0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG					
50	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	4	452.795.764	0	0	0	20.560.600	1	142.816.086	3	294.369.642	4	457.746.328	100,00	101,09	4	457.746.328	inf	inf	DISPERINDAG				
51	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0	0		11.709.626.948		1.790.265.086		2.337.954.563		4.516.436.613		3.633.615.410		12.278.271.672		104,86		12.278.271.672		inf					
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				0	0		5.775.496.305		1.528.705.917		1.345.409.484		1.811.160.750		1.813.972.033		6.499.248.184		112,53		6.499.248.184		inf					
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARANPERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha		0	0	5450	130.000.000		0		0		54.113.594		5.026.000	0	59.139.594	0,00	45,49	0	59.139.594	nan	inf					
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik	dokumen	0	0	0	0	1	65.000.000	0	0	0	0	0	54.113.594	0	5.026.000	0	59.139.594	0,00	90,98	0	59.139.594	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi																										
1	3.30.02.1.02.01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik	Dokumen	0	0	1	65.000.000	0	0	0	0	54.113.594	1	5.026.000	1	59.139.594	100,00	90,98	1	59.139.594	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen			0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah dokumen SKA yang diterbitkan	dokumen	0	0	0	0	1	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					
2	3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah aparat dan pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis SKA	orang		0	0	50	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG				
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	berkas			3250		0		0		293		0		293		9,02		293		inf		DISPERINDAG			
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap layanan penerbitan SKA yang dilakukan	kali			2		0		0		0		0		0		0		nan		DISPERINDAG					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSIPERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%		0	0	5.8	155.000.000		0		46.827.100		90.175.600		0	0	137.002.700	0,00	88,39	0	137.002.700	nan	inf			
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota	kab/kota	0	0	0	0	19	155.000.000	0	0	0	46.827.100	0	90.175.600	0	0	137.002.700	0,00	88,39	0	137.002.700	nan	inf			
1	3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah bimtek pengelolaan pasar bagi aparat dan pengelola pasar rakyat	orang		0	0	100	131.635.650	0	0	100	46.827.100	100	67.600.000	0	0	200	114.427.100	200,00	86,93	200	114.427.100	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan				0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
			Jumlah pasar yang dilakukan pembinaan pengelolaan pasar di Sumatera Barat	pasar				40		0		40		0		40		100,00		40		inf		DISPERINDAG				
2	3.30.03.1.01.03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang		0	0	2	23.364.350	0	0	0	0	2	22.575.600	0	0	2	22.575.600	100,00	96,62	2	22.575.600	inf	inf	DISPERINDAG		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANGKebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%		0	0	6	329.802.250		36.420.200		143.974.400		14.426.000		81.550.000	0	276.370.600	0,00	83,80	0	276.370.600	nan	inf			
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor	laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan				
1	3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor	laporan		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Tidak Ada dalam DPA 2023		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di	Laporan				0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Tingkat Distributor dan Sub Distributor																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang di kab/kota	kab/kota	0	0	0	0	19	272.455.000	0	36.420.200	0	143.974.400	0	150.000	0	81.550.000	0	262.094.600	0,00	96,20	0	262.094.600	nan	inf			
2	3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas yang tersedia data dan informasi harga serta distribusi barang di 19 kab/kota	komoditas		0		0	17	56.960.200	17	36.420.200	0	19.440.000	0	0	0	1.100.000	17	56.960.200	100,00	100,00	17	56.960.200	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan					1		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERINDAG				
3	3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan		0		0	0	215.494.800	0	0	0	124.534.400	0	150.000	0	80.450.000	0	205.134.400	nan	95,19	0	205.134.400	nan	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah operasi pasar/pasar murah yang dilakukan	kali					8		0		5		0		5		10		125,00		10		inf		DISPERINDAG		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	kab/kota	0	0	0	0	19	57.347.250	0	0	0	0	14.276.000	0	0	0	14.276.000	0,00	24,89	0	14.276.000	nan	inf				
4	3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	laporan		0		0	1	57.347.250	0	0	0	0	14.276.000	0	0	0	14.276.000	0,00	24,89	0	14.276.000	nan	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan					0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
			Jumlah pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan	kab/kota					19		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$		0		0	1449.41	313.737.955		185.749.955		0		43.804.600		61.090.898	0	290.645.453	0,00	92,64	0	290.645.453	nan	inf			
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan promosi dagang dan pembinaan bagi produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui temu usaha, sosialisasi, promosi	kali	0	0	0	0	3	313.737.955	0	185.749.955	0	0	0	43.804.600	0	61.090.898	0	290.645.453	0,00	92,64	0	290.645.453	nan	inf			
1	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pameran dagang internasional/nasional yang	kali		0		0	2	263.049.955	1	185.749.955	0	0	0	0	1	61.090.898	2	246.840.853	100,00	93,84	2	246.840.853	inf	inf	DISPERINDAG		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			diikuti																											
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG			
2	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah calon eksportir yang mengikuti bintek ekspor	orang		0	0	50	50.688.000	0	0	30	0	20	43.804.600	0	0	50	43.804.600	100,00	86,42	50	43.804.600	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	kali				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%		0	0	5	1.591.885.600		173.046.437		684.789.300		169.957.566		824.255.379	0	1.852.048.682	0,00	116,34	0	1.852.048.682	nan	inf					
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	kali	0	0	0	0	8	1.353.696.000	0	173.046.437	0	612.760.400	0	169.957.566	0	670.772.340	0	1.626.536.743	0,00	120,16	0	1.626.536.743	nan	inf				
1	3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah promosi produk industri kecil dan menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	kali		0	0	8	1.353.696.000	1	173.046.437	1	612.760.400	5	169.957.566	2	670.772.340	9	1.626.536.743	112,50	120,16	9	1.626.536.743	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM				0		0		0		0		0		nan		0			nan		DISPERINDAG					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran produk melalui marketplace	pelaku usaha	0	0	0	0	120	238.189.600	0	0	0	72.028.900	0	0	0	153.483.039	0	225.511.939	0,00	94,68	0	225.511.939	nan	inf				
			Jumlah promosi produk dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha yang diikuti dan dilaksanakan	kali	0		0		7		0		0		0		0		0,00		0			nan						
2	3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi marketing digital	pelaku usaha		0	0	200	238.189.600	0	0	0	72.028.900	120	0	100	153.483.039	220	225.511.939	110,00	94,68	220	225.511.939	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM				0		0		0		0		0		nan		0			nan		DISPERINDAG					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%		0	0	89	3.255.070.500		1.101.099.475		364.386.062		1.416.129.690		842.049.756	0	3.723.664.983	0,00	114,40	0	3.723.664.983	nan	inf					
			Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%				25								0		0,00		0			nan							
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	orang	0	0	0	0	840	2.773.589.450	0	1.037.473.125	0	219.233.440	0	1.350.654.490	0	722.610.125	0	3.329.971.180	0,00	120,06	0	3.329.971.180	nan	inf				
1	3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK		0	0	8	2.773.589.450	8	1.037.473.125	0	219.233.440	8	1.350.654.490	8	722.610.125	24	3.329.971.180	300,00	120,06	24	3.329.971.180	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen yang dilakukan	kali				10		1		2		6		2		11		110,00		11		inf		DISPERINDAG				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	orang			708		60		28		592		118		798		112,71		798		inf		DISPERINDAG					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi	kab/kota	0	0	0	0	19	292.746.050	0	32.389.850	0	105.432.622	0	22.553.700	0	118.545.131	0	278.921.303	0,00	95,28	0	278.921.303	nan	inf				
2	3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi		0	0	7	37.502.100	7	1.062.000	0	30.989.794	0	0	0	7	32.051.794	100,00	85,47	7	32.051.794	inf	inf	DISPERINDAG					
3	3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen		0	0	1	131.490.450	0	21.928.250	0	30.499.020	0	17.427.700	0	54.636.801	0	124.491.771	0,00	94,68	0	124.491.771	nan	inf	DISPERINDAG				
4	3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat		0	0	1391	123.753.500	200	9.399.600	0	43.943.808	108	5.126.000	442	63.908.330	750	122.377.738	53,92	98,89	750	122.377.738	inf	inf	DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi dan perizinan bagi pelaku usaha, barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	kab/kota	0	0	0	0	19	188.735.000	0	31.236.500	0	39.720.000	0	42.921.500	0	894.500	0	114.772.500	0,00	60,81	0	114.772.500	nan	inf				
5	3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah barang beredar di pasaran yang diawasi sesuai dengan ketentuan	merek		0	0	25	188.735.000	3	31.236.500	0	39.720.000	0	42.921.500	3	894.500	6	114.772.500	24,00	60,81	6	114.772.500	inf	inf	DISPERINDAG				
				produk				8		3		0		0		13		16		200,00		16		inf		DISPERINDAG				
			Jumlah berita acara pengawasan distribusi dan perizinan perdagangan bagi pelaku usaha	berita acara				130		0		0		85		85		85		65,38		85		inf		DISPERINDAG				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0	0		11.709.626.948		1.790.265.086		2.337.954.563		4.516.436.613		3.633.615.410		12.278.271.672		104,86		12.278.271.672	inf						
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				0	0		5.934.130.643		261.559.169		992.545.079		2.705.275.863		1.819.643.377		5.779.023.488		97,39		5.779.023.488	inf						
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHAINDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%		0	0	74	130.958.500		57.667.801		16.460.134		21.250.000		10.866.500	0	106.244.435	0,00	81,13	0	106.244.435	nan	inf					
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan bimtek IUI dan pengawasan	orang	0	0	0	0	100	130.958.500	0	57.667.801	0	16.460.134	0	21.250.000	0	10.866.500	0	106.244.435	0,00	81,13	0	106.244.435	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan IMB yang mendapatkan Bimtek IUI	orang		0		0	70	130.958.500	68	57.667.801	0	16.460.134	0	21.250.000	0	10.866.500	68	106.244.435	97,14	81,13	68	106.244.435	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	kali					25		3		7		0		6		16		64,00		16		inf		DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASIINDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha		0		0	43.263	87.199.500		0		46.377.000		16.690.000		0	0	63.067.000	0,00	72,32	0	63.067.000	nan	inf					
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	buku	0	0	0	0	30	87.199.500	0		0	0	46.377.000	0	16.690.000	0	0	0	63.067.000	0,00	72,32	0	63.067.000	nan	inf				
1	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	buku		0		0	30	87.199.500	0		0	0	46.377.000	0	16.690.000	0	0	0	63.067.000	0,00	72,32	0	63.067.000	nan	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf							
Predikat Kinerja																							-	-							
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0		0	100	394.407.324		86.503.059		61.847.473		38.733.024		197.460.925	0	384.544.481	0,00	97,50	0	384.544.481	nan	inf					
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	32.100.900	0	10.589.500	0	8.438.700	0	6.110.800	3	910.000	3	26.049.000	25,00	81,15	3	26.049.000	inf	inf					
1	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD LOGAM]	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis komponen		0		0	15	9.795.000	1	1.080.000	7	3.514.200	7	5.200.800	7		0	22	9.795.000	146,67	100,00	22	9.795.000	inf	inf	DISPERINDAG			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG				
2	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	5.776.900	0		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPJMD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)										
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis komponen			7	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
3	3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis		0	0	5	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DISPERINDAG													
4	3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD LOGAM]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	0	10.000.000	0	6.260.500	0	3.739.500	0	0	10.000.000	nan	100,00	0	10.000.000	nan	inf	DISPERINDAG						
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis			41	11	30	0	0	41	100,00	41	inf	DISPERINDAG													
5	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD LOGAM]	Jumlah cetak kop surat dinas	rim		0	0	2	5.089.000	2	2.889.000	0	825.000	0	550.000	550.000	2	4.814.000	100,00	94,60	2	4.814.000	inf	inf	DISPERINDAG				
			Jumlah cetak kop surat UPTD	rim			1	1	0	0	0	1	100,00	1	inf	DISPERINDAG													
			Jumlah cetak kwitansi dinas	buku			25	25	0	0	25	100,00	25	inf	DISPERINDAG														
			Jumlah cetak amplop UPTD	kotak			1	2	0	0	2	200,00	2	inf	DISPERINDAG														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah cetak map UPTD	lembar			150	150	0	0	0	150	100,00	150	inf	DISPERINDAG													
			Jumlah penggandaan	lembar			11000	2200	0	0	700	2900	26,36	2900	inf	DISPERINDAG													
			Jumlah cetak amplop dinas	kotak			2	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
6	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah cetak kwitansi	buku		0	0	40	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah penggandaan	lembar			4960	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah cetak kop surat	rim			3	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah spanduk	meter			76	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah jilid biasa	eksemplar			50	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah cetak blanko sppd	buku			6	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
			Jumlah cetak amplop	kotak			5	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
7	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD LOGAM]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0	0	0	1.440.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0	1.440.000	nan	100,00	0	1.440.000	nan	inf	DISPERINDAG					
			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksemplar			24	3	9	6	6	24	100,00	24	inf	DISPERINDAG													
8	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG						
			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksemplar			24	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	DISPERINDAG													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	43.382.000	3	16.757.000	3	19.622.000	3	0	0	0	9	36.379.000	75,00	83,86	9	36.379.000	inf	inf			
9	3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD LOGAM]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	10	43.382.000	0	16.757.000	4	19.622.000	0	0	0	0	4	36.379.000	40,00	83,86	4	36.379.000	inf	inf	DISPERINDAG			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
								I		II		III		IV														
								(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)						(12) = 8+9+10+11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
10	3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	175.646.000	3	57.326.559	3	30.256.773	3	32.622.224	0	37.696.201	9	157.901.757	75,00	89,90	9	157.901.757	inf	inf		
11	3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD LOGAM]	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun	surat		0	0	150	2.000.000	20	400.000	55	1.000.000	75	600.000	0	0	150	2.000.000	100,00	100,00	150	2.000.000	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG		
12	3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG		
13	3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD LOGAM]	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan	rekening		0	0	2	94.116.000	1	17.228.324	2	17.455.730	2	22.534.241	2	21.160.705	7	78.379.000	350,00	83,28	7	78.379.000	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG		
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps				100		100		100		100		0		300		300,00		300		inf		DISPERINDAG		
			Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	KWH				48000		9346.11		9192		12945		398518		430001.11		895,84		430001.11		inf		DISPERINDAG		
14	3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah tagihan listrik dalam 1 tahun	kwh		0	0	53020	79.530.000	26465.49	39.698.235	7867	11.801.043	6325	9.487.983	12362	16.535.496	53019.49	77.522.757	100,00	97,48	53019.49	77.522.757	inf	inf	DISPERINDAG		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	0	0	12	143.278.424	3	1.830.000	3	3.530.000	3	0	0	158.854.724	9	164.214.724	75,00	114,61	9	164.214.724	inf	inf		
15	3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD LOGAM]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	8	5.360.000	3	1.830.000	5	3.530.000	0	0	0	8	5.360.000	100,00	100,00	8	5.360.000	inf	inf	DISPERINDAG			
16	3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERINDAG		
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit				3		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		DISPERINDAG		
17	3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD LOGAM]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	68.168.424	0	0	0	0	0	0	1	68.168.424	1	68.168.424	100,00	100,00	1	68.168.424	inf	inf	DISPERINDAG		
18	3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	69.750.000	0	0	0	0	0	0	1	90.686.300	1	90.686.300	100,00	130,02	1	90.686.300	inf	inf	DISPERINDAG		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
								I		II		III		IV																												
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	nan	nan												
															-	-																										
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNANINDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Sentra		0	0	20	5.321.565.319		30.885.250		806.012.999		2.589.869.815		1.611.315.952	0	5.038.084.016	0,00	94,67	0	5.038.084.016	nan	inf																	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standarisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri	IKM dan orang	0	0	0	0	285	5.321.565.319	0	30.885.250	0	806.012.999	0	2.589.869.815	0	1.611.315.952	0	5.038.084.016	0,00	94,67	0	5.038.084.016	nan	inf																
			Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, sosialisasi produk sektor industri	IKM	0		0		150		0		0		0		0			0,00		0		nan																		
			Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, dan wira usahaa baru sektor industri	IKM dan orang	0		0		70		0		0		0		0			0,00		0		nan																		
1	3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen		0		0	1	0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISPERINDAG																
2	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk industri (sertifikat halal)	IKM		0		0	73	4.854.264.219	0	21.553.000	50	632.647.469	0	2.333.392.265	0	1.608.229.952	50	4.595.822.686	68,49	94,68	50	4.595.822.686	inf	inf	DISPERINDAG															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen					0		0		41		0		41		inf		41		inf		DISPERINDAG																	
			Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk	IKM					170		0		22		41		726		789		464,12		789		inf		DISPERINDAG															
			Jumlah wirausaha baru yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis di sektor agro dan non agro	orang					590		0		236		354		0		590		100,00		590		inf		DISPERINDAG															
3	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [UPTD LOGAM]	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi teknologi tepat guna	IKM		0		0	150	228.078.000	0		0	74.172.830	150	149.306.800	0	0	150	223.479.630	100,00	97,98	150	223.479.630	inf	inf	DISPERINDAG															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen					0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG																	
4	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Wirausaha baru yang mendapatkan pelatihan teknis pengolahan minyak atsiri dan diversifikasi produk atsiri	Orang		0		0	70	239.223.100	0	9.332.250	20	99.192.700	50	107.170.750	0	3.086.000	70	218.781.700	100,00	91,46	70	218.781.700	inf	inf	DISPERINDAG															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen					0		0		0		0		0		nan		0		nan		DISPERINDAG																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	nan																										
Predikat Kinerja															-	-																										

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPd
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I		II		III		IV																																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI				37.204.147.789		38.473.447.682		24.147.298.028		4.450.002.753		6.799.937.995		5.699.095.528		7.621.800.873		24.570.837.149		101,75		63.044.284.831		169,45																								
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.838.580.791		28.063.587.361		19.879.022.128		3.630.680.534		5.975.463.430		4.777.071.173		5.834.915.690		20.218.130.827		101,71		48.281.718.188		194,38																								
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				24.838.580.791		28.063.587.361		19.879.022.128		3.630.680.534		5.975.463.430		4.777.071.173		5.834.915.690		20.218.130.827		101,71		48.281.718.188		194,38																								
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		24.838.580.791	100	28.063.587.361	100	19.879.022.128	25	3.630.680.534	25	5.975.463.430	25	4.777.071.173	25	5.834.915.690	100	20.218.130.827	100,00	101,71	200	48.281.718.188	inf	194,38																								
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	150.247.433	100	191.898.475	100	19.451.000	2.5	9.685.400	25	9.344.000	25	0	25	1.997.500	77.5	21.026.900	77,50	108,10	177.5	212.925.375	35,50	141,72																								
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	74.942.810	0	99.982.625	0	15.010.000	50	7.507.000	50	7.488.000	0	0	0	1.997.500	100	16.992.500	inf	113,21	100	116.975.125	inf	156,09	INSPEKTORAT																							
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	25		25		7		4		3		0		0		7		100,00		32		128,00		INSPEKTORAT																							
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	20	8.716.395	20	10.760.500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	20	10.760.500	100,00	123,45	INSPEKTORAT	sub kegiatan ini tidak ada lagi di dalam RKA																							
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen	0		0		4		0		0		0		0		0	0,00		0		nan		INSPEKTORAT	Dalam DPA sub kegiatan ini tidak ada lagi karena rasionalisasi																							
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	dokumen	10	0	10	0	2	4.441.000	60	2.178.400	40	1.856.000	0	0	0	0	100	4.034.400	5.000,00	90,84	110	4.034.400	1.100,00	inf	INSPEKTORAT	Sub Kegiatan muncul di DPA setelah rasionalisasi																						
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen	20	66.588.228	20	81.155.350	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	20	81.155.350	100,00	121,88	INSPEKTORAT	Dalam DPA sub kegiatan ini tidak ada lagi karena rasionalisasi																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																		
Predikat Kinerja																																																		
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	12.388.132.396	100	21.871.403.529	100	14.504.933.364	25	2.220.524.334	25	5.246.847.462	25	3.770.588.321	25	4.018.936.318	100	15.256.896.435	100,00	105,18	200	37.128.299.964	40,00	299,71																								
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	742	12.111.272.283	98	21.512.670.758	97	14.351.166.564	25	2.182.688.834	25	5.209.693.212	25	3.734.852.821	25	3.983.560.318	100	15.110.795.185	103,09	105,29	198	36.623.465.943	26,68	302,39	INSPEKTORAT																							
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	59	239.211.630	11	311.400.750	11	149.186.800	25	37.835.500	25	35.290.000	25	33.930.000	25	34.930.000	100	141.985.500	909,09	95,17	111	453.386.250	188,14	189,53	INSPEKTORAT																							
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	605	0	25	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	25	0	4,13	nan	INSPEKTORAT	Dalam DPA sub kegiatan ini tidak ada lagi karena rasionalisasi																							
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	nan	INSPEKTORAT	Dalam DPA sub kegiatan ini tidak ada lagi karena rasionalisasi																						
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	INSPEKTORAT																								

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	dokumen	65	37.648.483	13	47.332.021	13	4.580.000	0	0	50	1.864.250	0	1.805.500	50	446.000	100	4.115.750	769,23	89,86	113	51.447.771	173,85	136,65	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan				
Predikat Kinerja																										-	-				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	61.060.470	100	108.470.020	100	64.429.850	25	2.873.000	25	0	25	70.000	25	49.292.412	100	52.235.412	100,00	81,07	200	160.705.432	40,00	263,19					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	INSPEKTORAT	Sub kegiatan tidak ada dalam Renstra dan DPA			
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diarsuransikan	unit/set	40	50.565.060	8	88.471.395	9	54.900.000	0	0	0	0	0	100	48.383.412	100	48.383.412	1.111,11	88,13	108	136.854.807	270,00	270,65	INSPEKTORAT					
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	dokumen	0	0	0	0	1	6.544.250	0	1.562.750	0	0	0	70.000	100	909.000	100	2.541.750	10.000,00	38,84	100	2.541.750	inf	inf	INSPEKTORAT				
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	orang	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		INSPEKTORAT					
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	INSPEKTORAT				
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	dokumen	10	10.495.410	2	19.998.625	1	2.985.600	100	1.310.250	0	0	0	0	0	100	1.310.250	10.000,00	43,89	102	21.308.875	1.020,00	203,03	INSPEKTORAT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan				
Predikat Kinerja																										-	-				
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	595.148.152	100	1.086.284.292	100	2.037.786.000	25	681.144.776	25	215.339.064	25	226.298.167	25	232.881.316	100	1.355.663.323	100,00	66,53	200	2.441.947.615	40,00	410,31					
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	orang	186	204.241.950	198	221.000.000	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	198	221.000.000	106,45	108,20	INSPEKTORAT	Sub kegiatan ini tidak ada muncul dalam DPA karena adanya rasionalisasi				
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	INSPEKTORAT	Sub kegiatan ini tidak ada dalam Renstra				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		nan		INSPEKTORAT						
18	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	400	218.658.027	80	572.888.709	100	2.002.814.000	40	671.709.776	20	211.714.064	20	223.433.167	20	232.881.316	100	1.339.738.323	100,00	66,89	180	1.912.627.032	45,00	874,71	INSPEKTORAT				
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah asn yang mengikuti sosialisasi	orang	24	31.166.796	98	31.773.600	48	19.560.000	100	4.495.000	0	0	0	0	0	100	4.495.000	208,33	22,98	198	36.268.600	825,00	116,37	INSPEKTORAT					
			jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	24	8	8	8	0	1	0	0	0	0	1	12,50	9	37,50	INSPEKTORAT												
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali	25	141.081.379	5	260.621.983	20	15.412.000	50	4.940.000	25	3.625.000	25	2.865.000	0	0	100	11.430.000	500,00	74,16	105	272.051.983	420,00	192,83	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan				
Predikat Kinerja																										-	-				
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	1.016.606.822	100	1.773.631.889	100	981.870.620	25	201.814.480	25	189.455.692	25	332.412.231	25	433.174.077	100	1.156.856.480	100,00	117,82	200	2.930.488.369	40,00	288,26					
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit/set	161	6.867.610	12	12.335.550	117	4.933.800	10	490.000	40	1.500.000	30	1.930.000	20	999.500	100	4.919.500	85,47	99,71	112	17.255.050	69,57	251,25	INSPEKTORAT				
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	unit	0	0	0	26.250.000	7	35.610.312	25	12.597.400	25	9.028.080	0	0	50	6.684.000	100	28.309.480	1.428,57	79,50	100	54.559.480	inf	inf	INSPEKTORAT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
			disediakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
23	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit	1698	175.576.744	1650	252.450.510	2965	116.948.508	25	36.817.455	15	19.405.780	10	30.012.500	50	62.574.004	100	148.809.739	3,37	127,24	1750	401.260.249	103,06	228,54	INSPEKTORAT			
			Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah yang dilakukan	Kali	12		12		24		6		5		3		10		24		100,00		36		300,00		INSPEKTORAT			
24	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	kali	500	63.929.551	100	117.237.039	40	53.756.000	0	0	15	15.054.752	8	13.736.175	17	23.967.875	40	52.758.802	100,00	98,14	140	169.995.841	28,00	265,91	INSPEKTORAT			
25	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	unit/set	1320	39.674.124	264	60.692.826	246	27.180.000	126	10.463.500	40	7.473.000	40	7.473.000	40	1.500.000	246	26.909.500	100,00	99,00	510	87.602.326	38,64	220,80	INSPEKTORAT			
26	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	73	730.558.793	12	1.304.665.964	81	743.442.000	15	141.446.125	16	136.994.080	25	279.260.556	25	337.448.698	81	895.149.459	100,00	120,41	93	2.199.815.423	127,40	301,11	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	9.124.742.250	100	296.848.650	100	429.148.400	25	410.805.000	25	7.924.000	25	0	25	116.494.800	100	535.223.800	100,00	124,72	200	832.072.450	40,00	9,12				
27	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	8	659.846.250	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	7	0	87,50	0,00	INSPEKTORAT	Sub kegiatan ini tidak ada lagi dalam DPA karena rasionalisasi			
28	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	127.776.000	0	76.558.650	0	15.916.000	0	7.232.000	0	7.924.000	0	0	2	37.107.300	2	52.263.300	inf	328,37	2	128.821.950	inf	100,82	INSPEKTORAT			
			jumlah mebel	unit	0		0		12		3		3		0		6		12		100,00		12		inf		INSPEKTORAT			
29	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	unit/set	41	326.095.000	41	220.290.000	41	413.232.400	21	403.573.000	0	0	0	0	20	79.387.500	41	482.960.500	100,00	116,87	82	703.250.500	200,00	215,66	INSPEKTORAT			
30	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor inspektorat yang dibangun	unit	1	8.000.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	0	100,00	0,00	INSPEKTORAT	Sub kegiatan ini tidak ada lagi dalam DPA karena rasionalisasi			
31	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	unit/set	1	11.025.000	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	0	100,00	0,00	INSPEKTORAT	Sub kegiatan ini tidak ada lagi dalam DPA karena rasionalisasi			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	10,21					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	1.196.104.747	100	2.077.897.053	100	1.143.468.185	25	93.729.644	25	272.205.737	25	247.541.721	25	479.402.472	100	1.092.879.574	100,00	95,58	200	3.170.776.627	40,00	265,09				
32	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan	12	27.696.282	12	49.003.750	12	24.365.000	4	7.793.000	2	4.000.000	4	12.273.000	2	1.776.000	12	25.842.000	100,00	106,06	24	74.845.750	200,00	270,24	INSPEKTORAT			
33	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	346.645.881	12	735.580.315	0	401.642.400	25	81.550.644	25	82.761.103	25	83.608.549	25	85.629.223	100	333.549.519	inf	83,05	112	1.069.129.834	933,33	308,42	INSPEKTORAT			
			jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	100		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		200,00		INSPEKTORAT			
			jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	2		2		2		25		25		25		25		100		5.000,00		102		5.100,00		INSPEKTORAT			
			jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	1740		1740		1740		25		25		25		25		100		5,75		1840		105,75		INSPEKTORAT			
			jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	144000		144000		144000		25		25		25		25		100		0,07		144100		100,07		INSPEKTORAT			
34	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	4.493.666	0	7.175.500	0	4.500.000	0	300.000	0	300.000	0	3.900.000	0	725.000	0	5.225.000	nan	116,11	0	12.400.500	nan	275,96	INSPEKTORAT			
			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipeihara (spanduk)	Bulan	12		12		12		3		3		3		3		12		100,00		24		200,00		INSPEKTORAT			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
35	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelaksanaan Umum Kantor yang disediakan	Bulan	12	817.268.918	12	1.286.137.488	12	712.960.785	3	4.086.000	3	185.144.634	3	147.760.172	3	391.272.249	12	728.263.055	100,00	102,15	24	2.014.400.543	200,00	246,48	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	31,46				
Predikat Kinerja																										-	SR				
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	500	306.538.521	100	657.153.453	100	697.934.709	25	10.103.900	25	34.347.475	25	200.160.733	25	502.736.795	100	747.348.903	100,00	107,08	200	1.404.502.356	40,00	458,18					
36	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	50.066.702	5	55.509.700	0	26.800.000	0	0	50	14.859.575	10	3.090.000	40	8.848.915	100	26.798.490	inf	99,99	105	82.308.190	2.100,00	164,40	INSPEKTORAT				
			jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1		1		1		0		1		0		0		1		100,00		2		200,00		INSPEKTORAT				
37	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	35	113.528.284	7	208.409.163	7	115.973.500	1	10.103.900	2	14.913.650	2	41.155.613	2	48.798.055	7	114.971.218	100,00	99,14	14	323.380.381	40,00	284,85	INSPEKTORAT				
38	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	445	81.682.020	89	109.895.890	58	43.750.000	0	0	18	3.075.000	25	4.413.270	25	10.153.550	68	17.641.820	117,24	40,32	157	127.537.710	35,28	156,14	INSPEKTORAT				
39	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor Inspektorat yang dipelihara/rehab	unit	1	0	1	0	1	487.251.209	0	0	0	1.499.250	0	148.022.000	1	430.768.225	1	580.289.475	100,00	119,09	2	580.289.475	200,00	inf	INSPEKTORAT	Sub kegiatan ini tidak ada dalam Renstra			
40	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	uni	60	61.261.515	12	283.338.700	2	24.160.000	0	0	0	0	1	3.479.850	1	4.168.050	2	7.647.900	100,00	31,66	14	290.986.600	23,33	474,99	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										49,03	inf				
Predikat Kinerja																										SR	-				
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.365.566.998		10.409.860.321		4.268.275.900		819.322.219		824.474.565		922.024.355		1.786.885.183		4.352.706.322		101,98		14.762.566.643		119,38					
6.01		INSPEKTORAT DAERAH				12.365.566.998		10.409.860.321		4.268.275.900		819.322.219		824.474.565		922.024.355		1.786.885.183		4.352.706.322		101,98		14.762.566.643		119,38					
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditingkatkan	%		6.781.116.999	100	8.467.255.827	78	3.335.762.064	25	752.612.319	15	700.277.659	30	782.860.991	8	1.286.479.771	78	3.522.230.740	100,00	105,59	178	11.989.486.567	inf	176,81					
6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	Persen	500	6.429.906.703	100	8.244.406.752	100	3.083.392.964	25	620.426.283	25	664.210.659	25	746.418.991	25	1.201.418.521	100	3.232.474.454	100,00	104,83	200	11.476.881.206	40,00	178,49					
1	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan	379	3.941.428.933	631	4.896.396.533	778	1.525.206.533	10	288.813.920	12	523.259.959	23	413.034.715	30	785.880.271	75	2.010.988.865	9,64	131,85	706	6.907.385.398	186,28	175,25	INSPEKTORAT	Deviasi tinggi disebabkan karena kesalahan dalam penetapan target	1. Salah penetapan target renja 2. anggaran belum terpenuhi		
2	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	laporan	177	783.303.787	177	1.189.873.085	307	468.196.000	13	79.707.500	27	56.112.100	30	231.640.000	15	179.413.000	85	546.872.600	27,69	116,80	262	1.736.745.685	148,02	221,72	INSPEKTORAT				
3	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	jumlah laporan kinerja yang direviu	laporan	102	132.186.912	1	100.471.000	52	66.937.600	0	61.387.000	52	4.643.000	0	0	0	52	66.030.000	100,00	98,64	53	166.501.000	51,96	125,96	INSPEKTORAT					
4	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan yang direviu	laporan	52	200.874.684	103	270.553.800	52	129.103.100	52	97.228.000	0	0	0	0	0	52	97.228.000	100,00	75,31	155	367.781.800	298,08	183,09	INSPEKTORAT					
5	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	jumlah hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota	laporan	4	483.758.550	4	646.992.150	8	309.713.100	0	0	0	0	0	6.336.000	8	172.130.000	8	178.466.000	100,00	57,62	12	825.458.150	300,00	170,63	INSPEKTORAT		1. keterbatasan jumlah APIP dan waktu pengawasan 2. keterbatasan anggaran		
6	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	jumlah hasil pengawasan internal	laporan	1	129.168.081	1	31.564.450	15	105.351.800	0	3.597.386	4	32.805.520	0	600.000	4	18.441.250	8	55.444.156	53,33	52,63	9	87.008.606	900,00	67,36	INSPEKTORAT	Salah dalam penetapan target awal renja	kesalahan penetapan target awal		
7	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	laporan	5	759.185.756	89	1.108.555.734	3	478.884.831	0	89.692.477	0	47.390.080	0	94.808.276	3	45.554.000	3	277.444.833	100,00	57,94	92	1.386.000.567	1.840,00	182,56	INSPEKTORAT				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										532,05	160,94				
Predikat Kinerja																										ST	ST				
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditangani	Persen	100	351.210.296	100	222.849.075	100	252.369.100	25	132.186.036	25	36.067.000	25	36.442.000	25	85.061.250	100	289.756.286	100,00	114,81	200	512.605.361	200,00	145,95					
8	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	0	114.611.336	1	32.489.200	1	40.335.000	0	0	0	1.984.000	1	2.850.000	0	0	1	4.834.000	100,00	11,98	2	37.323.200	inf	32,57	INSPEKTORAT				
9	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persentase kasus yang ditangani	%	0	236.598.960	1	190.359.875	100	212.034.100	40	132.186.036	20	34.083.000	0	33.592.000	40	85.061.250	100	284.922.286	100,00	134,38	101	475.282.161	inf	200,88	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										inf	25,94				
Predikat Kinerja																										-	SR				
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%		5.584.449.999	70	1.942.604.494	75	932.513.836	0	66.709.900	0	124.196.906	0	139.163.364	75	500.405.412	75	830.475.582	100,00	89,06	145	2.773.080.076	inf	49,66					
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	Persen	0	954.426.325	1	796.662.590	100	394.835.686	0	57.309.000	0	53.587.508	0	37.498.900	100	170.505.265	100	318.900.673	100,00	80,77	101	1.115.563.263	inf	116,88					
1	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	Peraturan	0	724.109.767	1	312.073.040	5	8.245.400	0	593.000	0	335.000	0	0	5	7.317.400	5	8.245.400	100,00	100,00	6	320.318.440	inf	44,24	INSPEKTORAT				
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	INSPEKTORAT						
2	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	PKPT	500	230.316.558	100	484.589.550	1	386.590.286	1	56.716.000	0	53.252.508	0	37.498.900	0	163.187.865	1	310.655.273	100,00	80,36	101	795.244.823	20,20	345,28	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	194,76				
Predikat Kinerja																										-	ST				
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	500	4.630.023.674	100	1.145.941.904	100	537.678.150	100	9.400.900	0	70.609.398	0	101.664.464	0	329.900.147	100	511.574.909	100,00	95,15	200	1.657.516.813	40,00	35,80					
3	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah	laporan	1	1.085.227.521	1	5.316.500	3	61.070.950	0	680.000	1	27.332.398	1	7.975.000	1	145.004.500	3	180.991.898	100,00	296,36	4	186.308.398	400,00	17,17	INSPEKTORAT				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	inf	0	2	0	200,00	INSPEKTORAT							
4	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan	laporan	0	1.165.797.946	1	369.854.632	1	282.144.000	0	590.000	0	12.090.000	1	44.423.499	1	55.756.600	2	112.860.099	200,00	40,00	3	482.714.731	inf	41,41	INSPEKTORAT				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	nan	INSPEKTORAT							
5	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	0	1.253.322.986	0	622.136.522	0	129.988.200	0	584.000	0	27.743.000	0	38.000.965	0	121.499.047	0	187.827.012	nan	144,50	0	809.963.534	nan	64,63	INSPEKTORAT				
			jumlah laporan penegakan integritas	laporan	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100,00	2	0	inf	INSPEKTORAT									
6	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	laporan	0	1.125.675.221	1	148.634.250	1	64.475.000	0	7.546.900	0	3.444.000	0	11.265.000	1	7.640.000	1	29.895.900	100,00	46,37	2	178.530.150	inf	15,86	INSPEKTORAT				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	INSPEKTORAT								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	23,18				
Predikat Kinerja																										-	SR				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I		II		III		IV															
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)										(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				87.230.183.211		0		21.383.163.301		3.706.978.063		5.676.430.088		3.656.377.224		7.232.754.486		20.272.539.861		94,81		20.272.539.861		23,24					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				87.230.183.211		0		18.334.375.351		3.397.057.713		5.057.395.138		3.123.038.824		6.150.952.594		17.728.444.269		96,70		17.728.444.269		20,32					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				87.230.183.211		0		18.334.375.351		3.397.057.713		5.057.395.138		3.123.038.824		6.150.952.594		17.728.444.269		96,70		17.728.444.269		20,32					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		86.891.907.193		0	100	18.334.375.351	0	3.397.057.713	0	5.057.395.138	0	3.123.038.824	0	6.150.952.594	0	17.728.444.269	0,00	96,70	0	17.728.444.269	nan	20,40					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	1.310.034.946	0	0	100	77.837.750	0	38.205.750	0	12.030.000	0	12.866.750	0	15.567.500	0	78.670.000	0,00	101,07	0	78.670.000	nan	6,01					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	790.254.260	0	0	0	33.580.250	0	20.521.500	0	3.086.250	0	4.952.500	0	4.735.500	0	33.295.750	nan	99,15	0	33.295.750	nan	4,21	BAPPEDA				
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13		5	6		0		0	5		0		5		83,33		10		76,92		BAPPEDA						
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	24	150.723.900	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	8	0	33,33	0,00	BAPPEDA					
			Jumlah dokumen penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan dokumen perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen	0		0	4		0		0	0		0	0	0	0	0,00		0		nan		BAPPEDA						
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	24	133.017.548	8	0	8	44.257.500	4	17.684.250	5	8.943.750	6	7.914.250	0	10.832.000	15	45.374.250	187,50	102,52	23	45.374.250	95,83	34,11	BAPPEDA				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0		0	0		0		0	0		0	0	0	0	nan		0		nan		BAPPEDA						
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	24	236.039.238	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	8	0	33,33	0,00	BAPPEDA					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0	0		0		0	0		0	0	0	0	nan		0		nan		BAPPEDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	9,58							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	55.455.066.336	0	0	100	11.385.485.878	0	1.659.203.830	0	4.027.071.805	0	2.491.790.475	0	3.167.973.829	0	11.346.039.939	0,00	99,65	0	11.346.039.939	nan	20,46					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	591	52.018.384.136		0	100	11.164.541.628	79	1.610.281.080	80	3.988.489.805	80	2.440.638.475	0	3.085.696.329	239	11.125.105.689	239,00	99,65	239	11.125.105.689	40,44	21,39	BAPPEDA				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0			0		0		0	0		0		0	0	nan		0		nan		BAPPEDA						
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	132	2.701.535.000		0	22	169.654.250	10	35.322.250	10	38.090.000	22	41.442.000	0	54.800.000	42	169.654.250	190,91	100,00	42	169.654.250	31,82	6,28	BAPPEDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA					
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	151.250.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0		0	nan	0,00	BAPPEDA				
			Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	654				109		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA					
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	90.750.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0		0	nan	0,00	BAPPEDA				
			Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	6				1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA					
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	69.575.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	nan	nan	0		0	nan	0,00	BAPPEDA				
			Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	18				3		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	423.572.200		0	0	51.290.000	3	13.600.500	0	492.000	0	9.710.000	0	27.477.500	3	51.280.000	inf	99,98	3	51.280.000	inf	12,11	BAPPEDA					
			Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	78				13		0		3		9		0		12		92,31		12		15,38		BAPPEDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	3,98							
Predikat Kinerja																								-	SR							
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	1.570.722.575	0	0	100	115.955.100	0	57.240.775	0	52.623.105	0	33.611.620	0	0	0	143.475.500	0,00	123,73	0	143.475.500	nan	9,13						
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen	24	44.155.000		0	4	0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAPPEDA						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA					
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	66	702.091.325		0	11	104.309.600	10	55.880.775	10	48.390.105	11	5.729.120	0	0	31	110.000.000	281,82	105,46	31	110.000.000	46,97	15,67	BAPPEDA					
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA					
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	dokumen	8	584.650.000		0	2	5.040.000	0	1.360.000	1	680.000	2	24.830.000	0	0	3	26.870.000	150,00	533,13	3	26.870.000	37,50	4,60	BAPPEDA					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA					
			Jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	orang	0				4		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA					
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	24	90.883.250		0	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAPPEDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp							K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Barang Milik Daerah pada SKPD																												
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0			0		0		0		0		0		0		0	nan		0		nan		BAPPEDA			
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	148.943.000	0	0	7	6.605.500	0	0	0	3.553.000	7	3.052.500	0	0	7	6.605.500	100,00	100,00	7	6.605.500	29,17	4,43	BAPPEDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	1,65					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	2.521.054.000	0	0	100	294.705.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00				
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	749.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	BAPPEDA			
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	860			168		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA				
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen	14	81.000.000	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAPPEDA			
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	Dokumen	0			1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				
18	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	60	1.088.750.000	0	80	274.625.000	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	100,00	0,00	80	0	133,33	0,00	BAPPEDA				
			Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	orang	336			80		0		80		0		0		80		100,00		80		23,81		BAPPEDA				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Orang	30	298.904.000	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAPPEDA				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	20			4		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA				
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali	0	303.000.000	0	0	20.080.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	0,00	BAPPEDA				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	34			8		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	0,00					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	10.905.762.937	0	0	100	3.291.629.852	0	342.976.866	0	445.189.087	0	85.871.200	0	2.176.540.847	0	3.050.578.000	0,00	92,68	0	3.050.578.000	nan	27,97				
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	145	111.000.000	0	25	26.428.000	24	4.492.000	24	4.431.000	25	0	0	17.505.000	73	26.428.000	292,00	100,00	73	26.428.000	50,34	23,81	BAPPEDA				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Bangunan Kantor yang Disediakan																												
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	2.349.248.276	0	0	0	97.056.500	0	1.233.500	0	0	0	87.266.500	0	88.500.000	nan	91,18	0	88.500.000	nan	3,77	BAPPEDA						
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	41				2		1		2		2		0		5		250,00		5		12,20		BAPPEDA				
23	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	286.160.150	0	0	0	154.839.950	0	26.266.000	0	2.048.000	0	0	125.686.000	0	154.000.000	nan	99,46	0	154.000.000	nan	53,82	BAPPEDA					
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	102				7		7		7		7		0		21		300,00		21		20,59		BAPPEDA				
24	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jenis	450	2.177.135.683	0	58	142.651.200	58	30.207.100	58	29.760.600	58	22.562.200	0	64.170.100	174	146.700.000	300,00	102,84	174	146.700.000	38,67	6,74	BAPPEDA					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				
			Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	kali	48				12		4		4		12		0		20		166,67		20		41,67		BAPPEDA				
25	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	60	162.662.000	0	11	25.000.000	11	8.848.500	11	6.628.750	11	3.309.000	0	6.163.750	33	24.950.000	300,00	99,80	33	24.950.000	55,00	15,34	BAPPEDA					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				
26	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	37	65.085.000	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAPPEDA						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				
27	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	55.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	BAPPEDA					
			Jumlah tamu yang dilayani	orang	490				100		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA						
28	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	25	4.099.321.828	0	4	2.585.654.202	1	231.929.766	1	322.320.737	0	0	1.795.749.497	2	2.350.000.000	50,00	90,89	2	2.350.000.000	8,00	57,33	BAPPEDA						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0				0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA						
29	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1.599.650.000	0	0	260.000.000	0	40.000.000	0	80.000.000	0	60.000.000	0	80.000.000	0	260.000.000	nan	100,00	0	260.000.000	nan	16,25	BAPPEDA					
			Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	orang	24				4		4		4		4		0		12		300,00		12		50,00		BAPPEDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	6,11						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	1.811.441.611	0	0	100	1.095.937.285	0	990.000.000	0	0	0	52.947.000	0	50.000.000	0	1.092.947.000	0,00	99,73	0	1.092.947.000	nan	60,34					
30	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	jenis		652.041.611	0	3	53.526.085	0	0	0	0	1	52.947.000	0	0	1	52.947.000	33,33	98,92	1	52.947.000	inf	8,12	BAPPEDA					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0				0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA						
31	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	unit	22	1.115.000.000	0	2	1.042.411.200	2	990.000.000	2	0	2	0	50.000.000	6	1.040.000.000	300,00	99,77	6	1.040.000.000	27,27	93,27	BAPPEDA						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0				0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA						
32	X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	jenis	6	44.400.000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAPPEDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
										I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	3,17								
Predikat Kinerja																							-	SR								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	10.041.268.279	0	0	100	1.468.023.986	0	249.302.714	0	418.814.246	0	333.786.277	0	441.830.593	0	1.443.733.830	0,00	98,35	0	1.443.733.830	nan	14,38						
33	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	45.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	0,00	BAPPEDA					
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	3250			500		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA						
34	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh		2.715.411.500	0	182000	302.790.000	0	71.652.256	0	68.240.992	182000	71.267.399	0	84.629.353	182000	295.790.000	100,00	97,69	182000	295.790.000	inf	10,89	BAPPEDA						
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	580			0		0		0		0		0		0		nan		0		0,00		BAPPEDA						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0			0		45000		0		0		45000		inf		45000		inf		inf		BAPPEDA						
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	48			8		8		8		8		0		24		300,00		24		50,00		BAPPEDA						
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik	4100			2660		2660		665		2660		0		5985		225,00		5985		145,98		BAPPEDA						
35	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	7.280.481.779	0	0	1.165.233.986	0	177.650.458	0	350.573.254	0	262.518.878	0	357.201.240	0	1.147.943.830	nan	98,52	0	1.147.943.830	nan	15,77	BAPPEDA						
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	165			28		28		28		28		0		84		300,00		84		50,91		BAPPEDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	0,76								
Predikat Kinerja																							-	SR								
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	0	3.276.556.509	0	0	100	604.800.000	0	60.127.778	0	101.666.895	0	112.165.502	0	299.039.825	0	573.000.000	0,00	94,74	0	573.000.000	nan	17,49						
36	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	6	262.644.500	0	1	41.190.000	1	13.877.500	1	22.692.377	1	0	0	4.430.123	3	41.000.000	300,00	99,54	3	41.000.000	50,00	15,61	BAPPEDA						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA						
37	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	60	1.128.325.000	0	10	302.440.000	4	43.100.278	4	58.428.768	10	97.322.002	0	91.148.952	18	290.000.000	180,00	95,89	18	290.000.000	30,00	25,70	BAPPEDA						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA						
38	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	415	407.061.000	0	75	67.100.000	8	3.150.000	8	6.110.000	25	4.845.000	0	50.895.000	41	65.000.000	54,67	96,87	41	65.000.000	9,88	15,97	BAPPEDA						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0			0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA						
39	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1.301.626.009	0	0	138.400.000	0	0	0	9.462.750	1	0	0	120.537.250	1	130.000.000	inf	93,93	1	130.000.000	inf	9,99	BAPPEDA						
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit	6			1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
40	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	176.900.000	0	0	0	55.670.000	0	0	0	4.973.000	35	9.998.500	0	32.028.500	35	47.000.000	inf	84,43	35	47.000.000	inf	26,57	BAPPEDA			
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	unit	288				74		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BAPPEDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	2,35						
Predikat Kinerja																							-	SR						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			0		0		3.048.787.950		309.920.350		619.034.950		533.338.400		1.081.801.892		2.544.095.592		83,45		2.544.095.592		inf					
5.01		PERENCANAAN			0		0		3.048.787.950		309.920.350		619.034.950		533.338.400		1.081.801.892		2.544.095.592		83,45		2.544.095.592		inf					
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	0	0	0	87	1.437.428.200	0	157.268.200	0	385.672.050	0	157.456.000	458.596.939	0	1.158.993.189	0,00	80,63	0	1.158.993.189	nan	inf						
5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	dokumen	0	0	0	3	879.971.000	0	101.965.400	0	352.226.050	0	80.131.200	0	333.319.961	0	867.642.611	0,00	98,60	0	867.642.611	nan	inf					Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
1	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	0	0	0	0	46.028.000	0	42.278.500	0	0	0	3.329.750	0	3.750	0	45.612.000	nan	99,10	0	45.612.000	nan	inf	BAPPEDA	Masih terbatasnya masukan dan saran dari peserta terhadap rancangan awal RKPD		Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
			Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	Dokumen Berita Acara				1		1		1		1	0		3		300,00		3		inf	BAPPEDA	Masih minim masukan dan saran dari non pemerintah terkait substansi RKPD		Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.			
2	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	0	0	0	0	245.833.000	0	24.113.100	1	218.103.850	21	2.140.250	0	1.266.800	22	245.624.000	inf	99,91	22	245.624.000	inf	inf	BAPPEDA	Minimnya kehadiran kepala Perangkat Daerah Provinsi		Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
			Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	Dokumen Berita Acara				1		1		0		0	0		1		100,00		1		inf	BAPPEDA	Pembahasan usulan musrenbang baru dari usulan Pemerintah Kab Kota		Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.			
3	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	588.110.000	0	35.573.800	0	134.122.200	0	74.661.200	0	332.049.411	0	576.406.611	nan	98,01	0	576.406.611	nan	inf	BAPPEDA	Penetapan RKP terlambat dibandingkan		Komitmen bersama Bappeda	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pembangunan Daerah Provinsi	yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)																										penetapan RKPD sehingga sulit untuk sinkronisasi	Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Dokumen					3	0			1		2		0		3		100,00		3		inf		BAPPEDA		Adanya tahapan harmonisasi dengan kanwil kemenkumham yang mengakibatkan banyaknya proses dan tahapan yang harus di lalui dalam penetapan dokumen dengan Peraturan Kepala Daerah	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf							
Predikat Kinerja																								-	-							
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen	0		0	0	0	4	233.650.700	0	26.800.000	0	14.235.000	0	36.625.800	0	44.573.978	0	122.234.778	0,00	52,32	0	122.234.778	nan	inf			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
4	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen			0		0	0	25.497.700	0	22.563.000	0	0	0	2.064.000	0	858.500	0	25.485.500	nan	99,95	0	25.485.500	nan	inf	BAPPEDA	Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen					1		0		1		1		0		2		200,00		2		inf		BAPPEDA	Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.			
5	5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang			0		0	0	208.153.000	0	4.237.000	0	14.235.000	0	34.561.800	0	43.715.478	0	96.749.278	nan	46,48	0	96.749.278	nan	inf	BAPPEDA		Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data	Dokumen					1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf		BAPPEDA		Komitmen bersama Bappeda			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
																													I	II
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota																										Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
6	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA			
			Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	Dokumen				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	%	0	0	0	0	87	323.806.500	0	28.502.800	0	19.211.000	0	40.699.000	0	80.703.000	0	169.115.800	0,00	52,23	0	169.115.800	nan	inf				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
7	5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dokumen		0		0	2	240.311.000	0	18.063.300	0	11.051.000	0	21.122.000	0	35.801.477	0	86.037.777	0,00	35,80	0	86.037.777	nan	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan				0		0		1		1		0		2		inf		2		inf		BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
8	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen		0		0	42	83.495.500	3	10.439.500	3	8.160.000	41	19.577.000	0	44.901.523	47	83.078.023	111,90	99,50	47	83.078.023	inf	inf	BAPPEDA		Waktu pelaksanaan fasilitasi yang sangat sempit Adanya tahapan harmonisasi dengan kanwil kemenkumham mengakibatkan banyaknya proses dan tahapan yang harus di lalui	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%		0	0	0	60	1.611.359.750	0	152.652.150	0	233.362.900	0	375.882.400	623.204.953	0	1.385.102.403	0,00	85,96	0	1.385.102.403	nan	inf		Tindak Lanjut : 1. Mengoptimalkan rencana aksi pencapaian target kinerja program secara berjenjang. 2. Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	0		0	0	0	2	569.981.100	0	22.832.600	0	119.808.000	0	213.362.500	0	198.020.125	0	554.023.225	0,00	97,20	0	554.023.225	nan	inf		kinerja program. 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja.		Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
1	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			0	0	3	46.911.800	0	9.174.300	1	0	2	13.164.000	0	24.104.382	3	46.442.682	100,00	99,00	3	46.442.682	inf	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
2	5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan			0	0	0	37.350.000	0	0	0	8.686.000	0	24.833.000	0	3.457.500	0	36.976.500	nan	99,00	0	36.976.500	nan	inf	BAPPEDA		Tidak cukupnya waktu bagi tim dalam melihat dan menelaah usulan indikator dan rincian kebutuhan belanja pada dokumen RKA per Sub Kegiatan yang telah dientri masing-masing Perangkat Daerah kedalam SIPD RI.	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
			Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	rumusan					3		0		1		1		0		2		66,67		2		inf	BAPPEDA		Tertundanya kegiatan Internal Bidang karena padatnya kegiatan Koordinasi Lingkup OPD Provinsi dan Kabupaten Kota			
3	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan			0	0	0	50.968.200	0	0	0	5.351.200	0	18.668.000	0	26.439.318	0	50.458.518	nan	99,00	0	50.458.518	nan	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	BAPPEDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		0		0	12.317.500	0		0	0	4.742.000	0	5.310.000	0	2.142.325	0	12.194.325	nan	99,00	0	12.194.325	nan	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	Laporan				1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	BAPPEDA					
5	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	41.415.100	0	9.130.000	0	13.361.600	0	8.865.000	0	9.000.000	0	40.356.600	nan	97,44	0	40.356.600	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen				3		0		1		1		0		2		66,67		2		inf	BAPPEDA					
6	5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		0		0	28.289.100	0	425.000	0	20.614.100	0		0	6.755.000	0	27.794.100	nan	98,25	0	27.794.100	nan	inf	BAPPEDA			Tidak cukupnya waktu bagi tim dalam melihat dan menelaah usulan indikator dan rincian kebutuhan belanja pada dokumen RKA per Sub Kegiatan yang telah dientri masing-masing Perangkat Daerah kedalam SIPD RI.	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	rumusan				3		0		1		1		0		2		66,67		2		inf	BAPPEDA			Tertundanya kegiatan Internal Bidang karena padatnya kegiatan Koordinasi Lingkup OPD Provinsi dan Kabupaten Kota		
7	5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		0		0	84.117.900	0	2.903.300	0	10.338.400	0	30.068.000	0	38.821.600	0	82.131.300	nan	97,64	0	82.131.300	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan				1		0		0		1		0		1		100,00		1		inf	BAPPEDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																													
8	5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		0		0	0	268.611.500	0	1.200.000	0	56.714.700	0	112.454.500	0	87.300.000	0	257.669.200	nan	95,93	0	257.669.200	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
			Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf						
Predikat Kinerja																									-	-						
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	0		0	0	0	2	617.891.350	0	73.530.100	0	54.392.700	0	96.052.750	0	260.134.278	0	484.109.828	0,00	78,35	0	484.109.828	nan	inf				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
9	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	0	0	17.888.800	0	10.777.200	0	0	0	4.247.500	0	2.327.436	0	17.352.136	nan	97,00	0	17.352.136	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Dokumen					3		0		1		2		0		3		100,00		3		inf		BAPPEDA					
10	5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan		0		0	0	0	20.174.192	0	6.585.000	0	10.084.000	0	0	0	3.258.450	0	19.927.450	nan	98,78	0	19.927.450	nan	inf	BAPPEDA			Tertundanya kegiatan Internal Bidang karena padatnya kegiatan Koordinasi Lingkup OPD Provinsi dan Kabupaten Kota	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang perekonomian	Rumusan					3		0		1		1		0		2		66,67		2		inf		BAPPEDA					
11	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan		0		0	0	0	179.231.608	0	15.426.500	0	3.400.000	0	16.857.000	0	72.745.276	0	108.428.776	nan	60,50	0	108.428.776	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
										I		II		III		IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
			Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																																												
12	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		0		0	0	153.913.300	0	15.058.300	0	0	0	19.865.250	0	130.353.101	0	165.276.651	nan	107,38	0	165.276.651	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.																
			Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang perekonomian	laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA																				
13	5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	0	17.888.850	0	3.912.100	0	5.000.000	0	0	0	8.618.973	0	17.531.073	nan	98,00	0	17.531.073	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.																
			Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen					3		0		1		2		0		3		100,00		3		inf		BAPPEDA																				
14	5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang SDA	Rumusan		0		0	3	23.327.900	0	2.167.900	1	9.895.000	1	8.584.000	0	2.672.000	2	23.318.900	66,67	99,96	2	23.318.900	inf	inf	BAPPEDA			Tertundanya kegiatan Internal Bidang karena padatnya kegiatan Koordinasi Lingkup OPD Provinsi dan Kabupaten Kota	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.																
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAPPEDA																				
15	5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan		0		0	0	163.908.400	0	3.697.900	0	26.013.700	0	41.219.000	0	19.785.942	0	90.716.542	nan	55,35	0	90.716.542	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.																
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA																				
16	5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan		0		0	0	41.558.300	0	15.905.200	0	0	0	5.280.000	0	20.373.100	0	41.558.300	nan	100,00	0	41.558.300	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.																
			Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang SDA	laporan					1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																								nan	inf						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Predikat Kinerja																												-	-				
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah	dokumen	0		0	0	0	2	423.487.300	0	56.289.450	0	59.162.200	0	66.467.150	0	165.050.550	0	346.969.350	0,00	81,93	0	346.969.350	nan	inf				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
17	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			0		0	0	62.666.900	0	28.473.600	0	3.639.000	0		0	29.695.900	0	61.808.500	nan	98,63	0	61.808.500	nan	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	dokumen						3		0		1		1		0		2		66,67		2		inf	BAPPEDA						
18	5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan			0		0	0	34.541.900	0	3.734.200	0	9.831.000	0	8.641.750	0	679.950	0	22.886.900	nan	66,26	0	22.886.900	nan	inf	BAPPEDA		Tertundanya kegiatan Internal Bidang karena padatnya kegiatan Koordinasi Lingkup OPD Provinsi dan Kabupaten Kota	Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur	rumusan						3		0		1		0		0		1		33,33		1		inf	BAPPEDA						
19	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan			0		0	0	156.359.100	0	8.388.050	0	14.306.200	0	25.226.000	0	55.248.400	0	103.168.650	nan	65,98	0	103.168.650	nan	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan						1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	BAPPEDA						
20	5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan			0		0	0	18.771.600	0	544.000	0	7.572.000	0	3.408.000	0	7.243.100	0	18.767.100	nan	99,98	0	18.767.100	nan	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	laporan						1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	BAPPEDA						
21	5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	Dokumen			0		0	0	15.757.700	0	850.700	0		0		0	14.875.000	0	15.725.700	nan	99,80	0	15.725.700	nan	inf	BAPPEDA			Komitmen bersama Bappeda		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																											Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.		
			Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Dokumen					3		0		1		0		1		33,33		1		inf		BAPPEDA							
22	5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.	
			Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	rumusan					3		0		1		1		0		2		66,67		2		inf		BAPPEDA					
23	5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		0	0	0	37.940.000	0	4.731.800	0	1.200.000	0	5.686.400	0	15.849.200	0	27.467.400	0	nan	72,40	0	27.467.400	0	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan				1	0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA					
24	5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		0	0	0	97.450.100	0	9.567.100	0	22.614.000	0	23.505.000	0	41.459.000	0	97.145.100	0	nan	99,69	0	97.145.100	0	nan	inf	BAPPEDA				Komitmen bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan.
			Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	Laporan				1	0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAPPEDA							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan							
Predikat Kinerja																								-	-							

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				17.284.674.305		14.410.320.456		1.218.666.616.830		2.213.179.002		285.059.216.203		233.304.198.036		441.187.425.792		961.764.019.033		78,92		976.174.339.489		5.647,63				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.284.674.305		14.410.320.456		15.879.037.518		1.884.236.212		5.932.501.620		4.029.414.864		4.632.641.821		16.478.794.517		103,78		30.889.114.973		178,71				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				17.284.674.305		14.410.320.456		15.879.037.518		1.884.236.212		5.932.501.620		4.029.414.864		4.632.641.821		16.478.794.517		103,78		30.889.114.973		178,71				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan daerah	persen		17.169.532.305		14.304.058.456	100	15.879.037.518	25	1.884.236.212		5.932.501.620		4.029.414.864		4.632.641.821	25	16.478.794.517	25,00	103,78	25	30.782.852.973	inf	179,29				
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	bulan	0	334.119.900	0	288.383.659	12	210.458.000	25	53.913.700	0	41.702.900	0	23.626.900	0	42.978.200	25	162.221.700	208,33	77,08	25	450.605.359	inf	134,86				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	141.500.100	76,36	108.042.809	5	178.615.400	20,92	33.886.100	20,95	35.567.900	14,58	23.626.900	5,09	42.978.200	61,54	136.059.100	1.230,80	76,17	137,9	244.101.909	2.758,00	172,51	BAKEUDA			
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	158.540.700	95,02	150.652.450	0	0	14	0	5	0	1	0	0	0	20	0	inf	nan	115,02	150.652.450	5.751,00	95,02	BAKEUDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun ang disusun	Dokumen	2		100		8	0		5		6		0		11			137,50		111	5.550,00		BAKEUDA				
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	23.164.900	100	18.849.200	2	31.842.600	62,89	20.027.600	19,26	6.135.000	1	0	0	0	83,15	26.162.600	4.157,50	82,16	183,15	45.011.800	18.315,00	194,31	BAKEUDA			
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4	10.914.200	99,31	10.839.200	4	0	19	0	8	0	0	0	0	0	27	0	675,00	nan	126,31	10.839.200	3.157,75	99,31	BAKEUDA			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		100		0	0		8		4		0		12			inf		112	2.800,00		BAKEUDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								6.388,63		140,29				
Predikat Kinerja																								ST		ST				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	bulan	0	13.020.107.464	0	11.237.651.372	12	12.252.510.879	25	1.498.928.221	0	5.148.975.871	0	3.056.488.390	0	3.756.777.903	25	13.461.170.385	208,33	109,86	25	24.698.821.757	inf	189,70				
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	11.411.866.164	100	9.924.552.712	75	11.713.665.379	10,76	1.443.538.921	37,77	5.067.282.871	22,15	2.971.486.390	14,92	3.615.995.603	85,6	13.098.303.785	114,13	111,82	185,6	23.022.856.497	1.546,67	201,74	BAKEUDA			
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honorarium	Orang		1.321.127.250		1.100.561.000	75	409.821.800	14,9	46.161.500	21,76	67.412.000	22,5	69.708.800	17,37	100.268.000	76,53	283.550.300	102,04	69,19	76,53	1.384.111.300	inf	104,77	BAKEUDA			
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen/bulan		11.729.900		10.433.800	12	49.819.700	11,58	3.767.200	1,09	357.000	15,48	5.036.800	0	13.604.000	28,15	22.765.000	234,58	45,69	28,15	33.198.800	inf	283,03	BAKEUDA			
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	167.683.900	63,64	106.707.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	63,64	106.707.560	3.182,00	63,64	BAKEUDA			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	2		100		2	0		0		0		0		0		0,00		100	5.000,00		BAKEUDA					
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	17.281.550	81,92	14.157.800	0	0	0	7	0	12	0	0	0	19	0	inf	nan	100,92	14.157.800	3.364,00	81,92	BAKEUDA				
			Jumlah laporan tindak lanut pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	3		100		3	0		7		12		0		19		633,33		119	3.966,67		BAKEUDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disiapkan	Dokumen		90.418.700		81.238.500	2	79.204.000	7.8	5.460.600	19.89	13.924.000	14.65	10.256.400	19.17	26.910.300	61.51	56.551.300	3.075,50	71,40	61.51	137.789.800	inf	152,39	BAKEUDA				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulanan yang disiapkan	Dokumen					6		3		3		0		0		6		100,00		6		inf		BAKEUDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	88,75						
Predikat Kinerja																								-	T						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi BMD	bulan	0	240.152.100	0	203.233.237	12	105.915.300	25	0	25	5.723.100	0	14.484.716	0	0	50	20.207.816	416,67	19,08	50	223.441.053	inf	93,04					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan, serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0	400,00	nan	4	0	inf	nan	BAKEUDA					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	inf	0	3	inf	0	BAKEUDA						
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	Unit	20	137.409.000	91.63	125.905.237	1	66.815.000	0	0	6	0	0	0	0	6	0	600,00	0,00	97.63	125.905.237	488,15	91.63	BAKEUDA					
			Jumlah Dokumen Pengamanan Administrasi yang disusun	Dokumen	20	0	100	1	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	600,00	0	106	0	530,00	0	BAKEUDA						
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		24.975.250		19.373.000	1	19.996.600	0	0	24.7	5.723.100	62.53	996.500	0	0	87.23	6.719.600	8.723,00	33,60	87.23	26.092.600	inf	104,47	BAKEUDA				
			jumlah pengelola BMD yang dibayar honornya	Orang	12	0	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100	0	833,33	0	BAKEUDA					
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	12	77.767.850	74.52	57.955.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	74.52	57.955.000	621,00	74,52	BAKEUDA				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	100	0	833,33	0	BAKEUDA						
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	1	19.103.700	0	0	0	0	0	82.25	13.488.216	0	0	82.25	13.488.216	8.225,00	70,61	82.25	13.488.216	inf	inf	BAKEUDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dab Kapasitas Sumbardaya Aparatur	bulan	0	471.549.300	0	236.763.436	12	27.887.500	3	2.650.000	25	0	0	4.320.000	0	0	28	6.970.000	233,33	24,99	28	243.733.436	inf	51,69					
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	0	0	80	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0	62,50	0	50	inf	0							
			Tertib Administrasi Keuangan	bulan	0	0	12	0	3	0	25	0	0	0	0	0	0	28	0	233,33	0	28	inf	0							
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130	127.308.300	82.98	105.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	82.98	105.640.000	63,83	82,98	BAKEUDA				
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel	130	0	100	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100	0	76,92	0	BAKEUDA					
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAKEUDA				
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	Dokumen	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	0	BAKEUDA						
			Jumlah Dokumen Pendataan dan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	0	BAKEUDA						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I		II														III		IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Pengolahan Administrasi Kepegawaian																													
18	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	90	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	3,33	nan	3	0	inf	nan	BAKEUDA					
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang	2	151.882.500	29,21	44.357.833	20	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5	0	25,00	nan	34,21	44.357.833	1.710,50	29,21	BAKEUDA					
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	2		100		10	0		0		0		0		0		0,00		100		5.000,00		BAKEUDA						
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	192.358.500	100	86.765.603	10	27.887.500	11,2	2.650.000	0	0	18,26	4.320.000	0	0	29,46	6.970.000	294,60	24,99	129,46	93.735.603	1.294,60	48,73	BAKEUDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	bulan	0	1.320.656.773	0	1.004.520.266	12	2.204.711.428	25	258.315.768	0	426.342.095	0	719.621.156	0	631.196.531	25	2.035.475.550	208,33	92,32	25	3.039.995.816	inf	230,19						
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.176.500	10	8.156.550	1	21.419.000	0	0	45,28	9.700.500	54,71	11.718.500	0	0	99,99	21.419.000	9.999,00	100,00	109,99	29.575.550	916,58	322,30	BAKEUDA					
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Modal Personal Computer (Tablet PC)	Unit		143.370.000		115.295.400	2	100.026.600	6,03	7.436.500	43,64	53.789.100	3,23	3.981.800	5,84	48.871.000	58,74	114.078.400	2.937,00	114,05	58,74	229.373.800	inf	159,99	BAKEUDA					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12		80,42		1		7		3		13		0		23		2.300,00		103,42		861,83		BAKEUDA					
23	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	249.454.000	100	160.518.500	1	114.715.600	52,25	59.948.800	19,3	22.146.300	14,19	16.289.000	7,72	8.865.600	93,46	107.249.700	9.346,00	93,49	193,46	267.768.200	1.612,17	107,34	BAKEUDA					
24	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		172.711.750		86.229.750	1	27.940.000	0	0	37,02	13.530.000	26,8	9.795.000	32,07	11.720.000	95,89	35.045.000	9.589,00	125,43	95,89	121.274.750	inf	70,22	BAKEUDA					
25	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku Perpustakaan yang disediakan	paket		12.910.000		6.270.000	1	32.770.000	0	0	37,34	8.425.000	11,96	2.700.000	11,96	6.750.000	61,26	17.875.000	6.126,00	54,55	61,26	24.145.000	inf	187,03	BAKEUDA					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Exemplar					4		0		3		0		0		3		75,00		3		inf		BAKEUDA					
26	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Plakat yang disediakan	buah		51.030.000		40.494.000	65	57.850.000	0	5.115.000	15	25.232.000	0	7.300.000	0	8.240.000	15	45.887.000	23,08	79,32	15	86.381.000	inf	169,27	BAKEUDA					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan/bulan					12		10,37		51,18		14,8		7,61		83,96		699,67		83,96		inf		BAKEUDA					
27	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan/bulan		682.004.523		587.556.066	12	1.719.589.578	8,87	185.815.468	14,02	293.519.195	30,28	633.936.856	16,95	507.050.031	70,12	1.620.321.550	584,33	94,23	70,12	2.207.877.616	inf	323,73	BAKEUDA					
28	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAKEUDA						
29	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah aplikasi yang dikembangkan	modul	0	0	0	0	3	130.400.650	0	0	0	0	39,69	33.900.000	46,48	39.699.900	86,17	73.599.900	2.872,33	56,44	86,17	73.599.900	inf	inf	BAKEUDA					
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0		0		12		0		0		26		0		26		216,67		26		inf		BAKEUDA					
			Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	orang	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAKEUDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	bulan	0	1.190.919.538	0	876.503.806	12	276.906.817	15		25	138.328.000	0	37.000.000	0	4.300.000	40	179.628.000	333,33	64,87	40	1.056.131.806	inf	88,68						
30	X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	BAKEUDA					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																													
31	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Baru	Unit	3	65.800.600	97,08	63.880.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	97,08	63.880.000	3.236,00	97,08	BAKEUDA					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3		100		0		0		0		0		0		0		nan		100		3.333,33		BAKEUDA					
32	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		245.985.524		193.008.496	1	56.305.001	0	0	0	1.956.000	0	0	0	0	1.956.000	0,00	3,47	0	194.964.496	nan	79,26	BAKEUDA						
			Jumlah Mebel yang Disediakan	unit				19		0		99,81		0		0		99,81		525,32		99,81		inf		BAKEUDA						
33	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		879.133.414		619.615.310	19	220.601.816	0	0	63,16	136.372.000	17,13	37.000.000	0	4.300.000	80,29	177.672.000	422,58	80,54	80,29	797.287.310	inf	90,69	BAKEUDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan							
Predikat Kinerja																								-	-							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya BMD	bulan	0	341.757.230	0	263.955.289	12	618.407.594	0	60.306.706	25	137.300.988	0	143.429.905	0	168.655.680	25	509.693.279	208,33	82,42	25	773.648.568	inf	226,37						
34	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan/bulan		14.000.900		8.588.650	12	37.900.000	0	0	27,37	6.378.000	42,93	10.004.000	2,14	500.000	72,44	16.882.000	603,67	44,54	72,44	25.470.650	inf	181,92	BAKEUDA					
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	12		61,34		1500		0		825		35		0		860		57,33		921,34		7.677,83		BAKEUDA					
35	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	unit	12	11.880.000	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAKEUDA						
36	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan/bulan		315.876.330		255.366.639	12	580.507.594	10,11	60.306.706	21,95	130.922.988	22,37	133.425.905	14,1	168.155.680	68,53	492.811.279	571,08	84,89	68,53	748.177.918	inf	236,86	BAKEUDA					
			Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Orang	12		80,84		13		10		9		23		0		42		323,08		122,84		1.023,67		BAKEUDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	11,63							
Predikat Kinerja																								-	SR							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	bulan	0	250.270.000	0	193.047.391	12	182.240.000	20	10.121.817	1	34.128.666	0	30.443.797	0	28.733.507	21	103.427.787	175,00	56,75	21	296.475.178	inf	118,46						
37	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		41.190.000		23.264.243	1	41.190.000	7,86	3.237.717	14,14	9.944.676	3,27	1.350.000	5,32	2.195.000	30,59	16.727.393	3.059,00	40,61	30,59	39.991.636	inf	97,09	BAKEUDA					
38	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		180.100.000		142.613.148	6	120.300.000	1,2	1.454.100	19,75	23.758.990	17,05	20.520.797	15,21	23.193.507	53,21	68.927.394	886,83	57,30	53,21	211.540.542	inf	117,46	BAKEUDA					
39	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAKEUDA					
			Jumlah pemeliharaan Mebel	Unit	0		0		5		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAKEUDA					
40	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	28.980.000	100	27.170.000	30	20.750.000	26,16	5.430.000	2,04	425.000	41,31	8.573.000	6,5	3.345.000	76,01	17.773.000	253,37	85,65	176,01	44.943.000	1.466,75	155,08	BAKEUDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan							
Predikat Kinerja																								-	-							
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		1.202.787.579.312		328.942.790		279.126.714.583		229.274.783.172		436.554.783.971		945.285.224.516		78,59		945.285.224.516		inf						
5.02		KEUANGAN				0		0		1.202.787.579.312		328.942.790		279.126.714.583		229.274.783.172		436.554.783.971		945.285.224.516		78,59		945.285.224.516		inf						
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat Waktu Penyampaian APBD, Penatausahaan dan LKPD	tepat waktu		0		0	1	1.201.708.106.583		228.216.400		278.899.999.861		228.992.509.850		436.272.972.082	0	944.393.698.193	0,00	78,59	0	944.393.698.193	nan	inf						
5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana	jumlah regulasi dan rencana anggaran daerah	Dokumen	0	0	0	0	22	3.049.757.200	0	52.774.000	0	623.509.100	0	332.140.000	0	1.338.848.515	0	2.347.271.615	0,00	76,97	0	2.347.271.615	nan	inf						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
										I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
		Anggaran Daerah	yang disusun																																																
1	5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	0	2	0	3	283.825.700	0	0	0	8.65	17.017.000	89.38	175.727.400	98.03	192.744.400	3.267,67	67,91	100.03	192.744.400	5.001,50	inf	BAKEUDA	Realisasi sub kegiatan ini pada triwulan III dan Triwulan IV	Komunikasi antar pihak terkait belum optimal																							
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen					0		0		2		0		2		inf		2		inf		BAKEUDA																										
2	5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	0	2	0	3	250.904.300	0	0	0	19.33	48.245.100	2.44	196.285.000	21.77	244.530.100	725,67	97,46	23.77	244.530.100	1.188,50	inf	BAKEUDA	Realisasi sub kegiatan ini pada triwulan III	Komunikasi antar pihak terkait belum optimal																							
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen					0	0		0	2		0		2		inf		2		inf		BAKEUDA																										
3	5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	0	51	0	51	38.253.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	51	0	100,00	nan	BAKEUDA	Realisasi sub kegiatan ini pada triwulan IV	Penempatan rekening belanja yang tidak tepat																								
4	5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	0	51	0	51	26.261.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	51	0	100,00	nan	BAKEUDA	Realisasi sub kegiatan ini pada triwulan III	Penempatan rekening belanja yang tidak tepat																								
5	5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	0	51	0	51	146.259.600	11.55	19.842.000	73.11	125.514.600	0	0	13.35	22.935.000	98.01	168.291.600	192,18	115,06	149.01	168.291.600	292,18	inf	BAKEUDA																								
6	5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	0	51	0	51	47.674.400	0	0	0	0	0	0	65.850.000	0	65.850.000	0,00	138,12	51	65.850.000	100,00	inf	BAKEUDA	Realisasi sub kegiatan ini pada triwulan III																								
7	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	5	0	5	0	7	1.453.842.000	0.66	9.725.000	31.34	458.090.800	14.61	213.583.100	19.92	600.734.315	66.53	1.282.133.215	950,43	88,19	71.53	1.282.133.215	1.430,60	inf	BAKEUDA	Realisasi sub kegiatan ini pada triwulan IV																							
8	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	5	0	5	0	7	315.890.300	1	0	4	0	8.4	22.425.300	4.8	198.110.000	18.2	220.535.300	260,00	69,81	23.2	220.535.300	464,00	inf	BAKEUDA																								
9	5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	5	0		0	0	486.085.900	9.77	23.207.000	16.8	39.903.700	12.99	30.869.500	6.9	79.206.800	46.46	173.187.000	inf	35,63	46.46	173.187.000	929,20	inf	BAKEUDA																								
			Jumlah Perda/ Pergub terkait Kebijakan Anggaran yang disusun	Dokumen	5		5		4		3		2		5		0		10		250,00		15		300,00		BAKEUDA				Komitmen untuk menyiapkan regulasi sebagai pedoman perangkat daerah dalam penyusunan anggaran																				
10	5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		0		0	0	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BAKEUDA																									
			Jumlah OPD yang dibina dalam Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	51		51		51		51		51		51		204		400,00		255		500,00		BAKEUDA																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanannya pengelolaan APBD, Penatausahaan dan LKPD	SK	0	0	0	0	19	886.228.800	0	31.825.000	0	71.134.420	0	72.453.180	0	99.226.940	0	274.639.540	0,00	30,99	0	274.639.540	nan	inf																									
11	5.02.02.1.02.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan	SK		0		0	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAKEUDA																										

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota yang diterbitkan																												
12	5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan		0		0	0	105.485.500	0	0	7.27	6.270.000	0	0	0	35.363.540	7.27	41.633.540	inf	39,47	7.27	41.633.540	inf	inf	BAKEUDA				
			Jumlah SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancanga Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang diterbitkan	SK	19		19		19		1.9		19		19		19		58.9		310,00		77.9		410,00		BAKEUDA	Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV			
13	5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		0		0	0	106.340.400	0	0	0	0	0	4.3	19.297.400	4.3	19.297.400	inf	18,15	4.3	19.297.400	inf	inf	BAKEUDA					
			Jumlah SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang diterbitkan	SK	19		19		19		19		19		19		19		76		400,00		95		500,00		BAKEUDA	Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III			
14	5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		0		0	0	131.200.700	0	0	19	0	11.27	10.443.500	6.97	15.565.000	37.24	26.008.500	inf	19,82	37.24	26.008.500	inf	inf	BAKEUDA				
			Jumlah SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang diterbitkan	SK	19		19		19		19		19		19		19		76		400,00		95		500,00		BAKEUDA	Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III			
15	5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen		0		0	0	155.551.000	20.19	21.502.000	18.23	19.411.720	14.68	15.632.000	7.9	11.737.800	61	68.283.520	inf	43,90	61	68.283.520	inf	inf	BAKEUDA				
			Jumlah Kabupaten/Kota yang diasistensidalam Pengelolaan Keuangan	Kabupaten/Kota	19		19		19		19		19		19		19		76		400,00		95		500,00		BAKEUDA	Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III	waktu pelaksanaan kegiatan yang sering bersamaan dengan kegiatan provinsi		
16	5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan		0		0	0	183.184.100	0	0	39.09	14.848.800	33	12.536.300	0	0	72.09	27.385.100	inf	14,95	72.09	27.385.100	inf	inf	BAKEUDA				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan daerah Yang Dilaksanakan	Kali	3		3		5		3		1		1		0		5		100,00		8		266,67		BAKEUDA					
17	5.02.02.1.02.07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga		0		0	0	28.217.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BAKEUDA					
			Jumlah Kab/Kota yang diasistensi dalam Pengelolaan Keuangan BLUD	Kabupaten/Kota	19				10		0		19		19		19		57		570,00		57		300,00		BAKEUDA	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan karena bukan tupoksi BPKAD				
18	5.02.02.1.02.11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Impelementasi Sistem Informasi Penemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten/Kota	19		0	0	0	19	54.935.000	79.02	2.474.000	0	0	0	0	0	79.02	2.474.000	415,89	4,50	79.02	2.474.000	415,89	inf	BAKEUDA	Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang					0		0		38		57		0		95		inf		95		inf		BAKEUDA					
19	5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen		0		0	0	121.314.900	7.46	7.849.000	29.1	30.603.900	32.18	33.841.380	9.54	17.263.200	78.28	89.557.480	inf	73,82	78.28	89.557.480	inf	inf	BAKEUDA					
			Jumlah Laporan Keuangan Provinsi dan Kab/Kota yang dikonsolidasikan	Laporan	4		4		12		3		3		19		0		25		208,33		29		725,00		BAKEUDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan							
Predikat Kinerja																								-	-							
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	terlaksananya pengelolaan APBD, Penatausahaan dan LKPD	SK	0	0	0	0	50	578.174.720	0	39.928.000	0	129.308.000	0	117.046.322	0	164.183.798	0	450.466.120	0,00	77,91	0	450.466.120	nan	inf						
			Terlaksananya APBD Penatausahaan dan LKPD	SKPD	0		0		50		0		0		0		0		0		0,00		0		nan							
20	5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		0			0	0	99.975.250	16.98	11.895.000	30.89	21.629.800	32.01	22.416.000	11.88	11.930.200	91.76	67.871.000	inf	67,89	91.76	67.871.000	inf	inf	BAKEUDA				
			Jumlah dokumen hasil koordinasi/rekonsiliasi dengan perbankan pemegang Kasda	Dokumen	3		3		20		1		725		6		0		732		3.660,00		735		24.500,00		BAKEUDA					
21	5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		0		0	0	76.858.570		0	9.14	6.247.800	49.84	34.065.472	6.69	20.613.598	65.67	60.926.870	inf	79,27	65.67	60.926.870	inf	inf	BAKEUDA					
			Jumlah laporan koordinasi terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang tersedia	Dokumen	12		12		6		2		2		6		0		10		166,67		22		183,33		BAKEUDA					
			Jumlah laporan tata kelola keuangan PHJD yang dilaksanakan	Dokumen					1		0		2		1		0		3		300,00		3		inf		BAKEUDA					
22	5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	Laporan		0		0	0	170.894.700	3.23	4.043.000	19.96	24.963.000	0	0	29.23	85.466.800	52.42	114.472.800	inf	66,98	52.42	114.472.800	inf	inf	BAKEUDA					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																												
			Jumlah laporan koordinasi (KPP, KPPN, BPJS Kesehatan, Taspem, Kemenkeu, Kemendagri) yang tersedia	Dokumen	6		6		10		1		2		2		0		5		50,00		11		183,33		BAKEUDA				
			Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga yang disusun	Dokumen	7600		7698		5		665		250		155		0		1070		21.400,00		8768		115,37		BAKEUDA				
23	5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen			0		0	0	156.087.400	14.48	17.690.000	12.42	15.175.400	49.59	60.564.850	0.32	9.203.200	76.81	102.633.450	inf	65,75	76.81	102.633.450	inf	inf	BAKEUDA			
			Jumlah berita acara rekonsiliasi dengan pihak terkait (KPP, KPPN, BPJS Kesehatan, Taspem) sehubungan dengan data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D	Dokumen	14		14		4		3		5		5		0		13		325,00		27		192,86		BAKEUDA				
24	5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen			0		0	0	74.358.800	5.33	6.300.000	51.92	61.292.000	0	0	0	36.970.000	57.25	104.562.000	inf	140,62	57.25	104.562.000	inf	inf	BAKEUDA			
			Jumlah juknis administrasi keuangan yang disusun	Dokumen					2		2		1		2		0		5		250,00		5		inf		BAKEUDA				
			Jumlah sosialisasi/bimtek terkait Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	kali					2		1		2		2		0		5		250,00		5		inf		BAKEUDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	SKPD	0	0	0	0	50	495.644.900	0	103.689.400	0	49.681.000	0	50.132.300	0	13.354.600	0	216.857.300	0,00	43,75	0	216.857.300	nan	inf					
25	5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah berita acara rekonsiliasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	1200	0		0	204	72.275.100	153	0	1	0	205	20.660.000	0	2.462.100	359	23.122.100	175,98	31,99	359	23.122.100	29,92	inf	BAKEUDA				
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen				0		0		19		205		0		224		inf		224		inf		BAKEUDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan	kali	4		4		4		1		2		6		0		9		225,00		13		325,00		BAKEUDA							
26	5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		0		0	0	132.196.500	52	62.497.400	52	31.252.000	129	22.569.000	0	0	233	116.318.400	inf	87,99	233	116.318.400	inf	inf	BAKEUDA							
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan yang dikonsolidasikan	Dokumen	2		2		51		52		52		129		0		233		456,86		235		11.750,00		BAKEUDA							
27	5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen		0		0	0	185.844.300	0	38.302.000	2	18.429.000	2	6.903.300	57,43	0	61,43	63.634.300	inf	34,24	61,43	63.634.300	inf	inf	BAKEUDA							
			Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	7		7		2		2		2		2		0		6		300,00		13		185,71		BAKEUDA							
28	5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen		0		0	0	63.280.900	0	0	0	0	0	0	0	6.500.500	0	6.500.500	nan	10,27	0	6.500.500	nan	inf	BAKEUDA							
			Jumlah sidang MPPKD yang dilaksanakan	sidang	5		1		6		0		0		0		0		0		0,00		1		20,00		BAKEUDA							
29	5.02.02.1.04.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen hasil analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	0	0	0	1	4.030.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	BAKEUDA	Sedang dalam proses penyusunan						
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAKEUDA							
30	5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan	kali	2	0		0	2	38.017.600	0	2.890.000	20	0	0	0	16,68	4.392.000	36,68	7.282.000	1.834,00	19,15	36,68	7.282.000	1.834,00	inf	BAKEUDA	Menunggu regulasi kebijakan akuntansi						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang				0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAKEUDA							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan								
Predikat Kinerja																									-	-								
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya dana urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	bulan	0	0	0	0	12	1.196.698.300	963	0	0	278.026.367	341	0	228.420.738	048	0	434.657.358	229	0	941.104.463	618	0,00	78,64	0	941.104.463	618	nan	inf			
31	5.02.02.1.05.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAKEUDA							
			Jumlah Regulasi terkait Alokasi Subsidi	Dokumen				1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BAKEUDA						
32	5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	19	0	10	0	1	40.778.977	832	0	12,58	4.650.000	000	24,42	9.028.848	000	30,61	19.393.828	832	67,61	33.072.676	832	6.761,00	81,10	77,61	33.072.676	832	408,47	inf	BAKEUDA	Jumlah dokumen analisis tergantung jumlah Kab/Kota yang mengajukan BKK pada	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																											tahun berjalan				
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan					0		0		2		5		0		7		inf		7		inf		BAKEUDA				
33	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen		0		0	1	64.441.583.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAKEUDA				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan				0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BAKEUDA			
34	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Kab/Kota Penerima Dana Bagi Hasil Provinsi	Kab/Kota	19	0	19	0	19	1.091.477.739.821	19	0	30.1	273.376.367.341	24.16	219.391.890.048	6.58	415.263.529.397	79.84	908.031.786.786	420,21	83,19	98.84	908.031.786.786	520,21	inf	BAKEUDA				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan				1		1		19		2		0		22		2.200,00		22		inf		BAKEUDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tepat Waktu Penyampaian APBD, Penatausahaan dan LKPD	tepat waktu		0		0	1	1.079.472.729		100.726.390		226.714.722		282.273.322		281.811.889	0	891.526.323	0,00	82,59	0	891.526.323	nan	inf					
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya APBD Penatausahaan dan LKPD	bulan	0	0	0	0	12	1.079.472.729	0	100.726.390	0	226.714.722	0	282.273.322	0	281.811.889	0	891.526.323	0,00	82,59	0	891.526.323	nan	inf					
1	5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	0	2	0	2	102.769.638	1	23.632.730	1	32.020.759	2	8.976.550	3.24	2.678.000	7.24	67.308.039	362,00	65,49	9.24	67.308.039	924,00	inf	BAKEUDA				
2	5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		0		0	0	28.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BAKEUDA				
			Tersedianya draft standar BMD dan draft standar kebutuhan BMD	Dokumen	2		2		2		1		0		0		0		1		50,00		3		150,00		BAKEUDA		Keterlambatan penyampaian usulan kebutuhan dari perangkat daerah		
3	5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	0	2	0	2	101.522.500	1	942.000	1	8.338.670	2	72.107.680	0	542.250	4	81.930.600	200,00	80,70	6	81.930.600	300,00	inf	BAKEUDA		Keterlambatan input data kebutuhan barang dari Perangkat Daerah		
4	5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	0	0	0	1	17.380.000	0	0	0	1.509.000	0	0	0	1.340.000	0	2.849.000	0,00	16,39	0	2.849.000	0,00	inf	BAKEUDA	realisasi masih dalam bentuk draft			
5	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		0		0	0	113.132.300	1	0	1	3.880.000	1	0	0	7.300.000	3	11.180.000	inf	9,88	3	11.180.000	inf	inf	BAKEUDA				
			Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Dokumen	1		1		51		0		0		0		0		0		0,00		1		100,00		BAKEUDA	Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III			
6	5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		0		0	0	47.315.046	0	0	0	0	5	41.549.300	3.5	1.519.100	8.5	43.068.400	inf	91,02	8.5	43.068.400	inf	inf	BAKEUDA				
			Jumlah dokumen hasil Inventarisasi BMD	Dokumen	51		51		51		0		0		51		0		51		100,00		102		200,00		BAKEUDA	Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV			
7	5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	39	0	39	0	1	122.730.899	0	5.085.300	15	44.383.373	15	8.823.480	8.91	47.312.980	38.91	105.605.133	3.891,00	86,05	77.91	105.605.133	199,77	inf	BAKEUDA	Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III			
8	5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	Laporan		0		0	0	69.630.500	0	0	64.65	26.052.700	34.6	13.945.000	0	0	99.25	39.997.700	inf	57,44	99.25	39.997.700	inf	inf	BAKEUDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah																													
			Jumlah objek aset SKPD yang dinilai	Objek	2		2		5		0		30		12		0		42		840,00		44		2.200,00		BAKEUDA	Masih dalam proses penilaian dari KJKN	Belum adanya SDM penilai internal pemerinta provinsi yang kompeten			
9	5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		0		0	2	1.827.000	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	150,00	0,00	3	0	inf	nan	BAKEUDA					
10	5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		0		0	0	270.172.070	6.81	25.604.830	19.57	73.574.900	17.17	64.551.712	8.95	208.159.459	52.5	371.890.901	inf	137,65	52.5	371.890.901	inf	inf	BAKEUDA					
11	5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		0		0	0	92.296.700	17.01	14.574.200	0	0	78.41	67.184.100	0	1.543.600	95.42	83.301.900	inf	90,25	95.42	83.301.900	inf	inf	BAKEUDA					
			Jumlah Berita acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2		2		2		1		0		2		0		3		150,00		5		250,00		BAKEUDA					
12	5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		0		0	0	55.733.500	53.11	27.472.200	16.29	8.430.100	7.97	4.125.500	1.78	11.416.500	79.15	51.444.300	inf	92,30	79.15	51.444.300	inf	inf	BAKEUDA					
			Jumlah dokumen laporan BMD	Dokumen	1		1		2		1		0		1		0		2		100,00		3		300,00		BAKEUDA					
13	5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0		0	0	56.228.576	10.36	3.415.130	86.57	28.525.220	3.06	1.010.000	0	0	99.99	32.950.350	inf	58,60	99.99	32.950.350	inf	inf	BAKEUDA					
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan BMD	Kali	1		1		2		0		1		1		0		2		100,00		3		300,00		BAKEUDA	Rapat Koordinasi akan dilaksanakan pada bulan juli				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I		II		III		IV														
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				0		0	15.805.108.588	2.479.033.592	5.277.149.056	3.798.125.686	4.290.005.876	15.844.314.210		100,25	15.844.314.210	inf											
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0	13.115.489.238	2.058.465.342	4.490.498.525	3.122.425.029	3.483.305.964	13.154.694.860		100,30	13.154.694.860	inf											
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0	13.115.489.238	2.058.465.342	4.490.498.525	3.122.425.029	3.483.305.964	13.154.694.860		100,30	13.154.694.860	inf											
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0	100	0	100	13.115.489.238	100	2.046.342.586	0	4.463.392.321	0	3.122.425.029	100	3.483.305.964	200	13.115.465.900	200,00	100,00	300	13.115.465.900	inf	inf			
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	0	100	0	100	199.005.650	100	49.655.000	0	26.090.000	0	23.660.000	100	99.600.650	200	199.005.650	200,00	100,00	300	199.005.650	300,00	inf			
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen		0		0	2	61.853.500	2	25.054.000	0	5.525.000	0	14.850.000	0	16.424.500	2	61.853.500	100,00	100,00	2	61.853.500	inf	inf	BKD		
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	kali					1		1		0		0		1		2		200,00		2		inf		BKD		
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen		0		0	3	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	100,00	nan	3	0	inf	nan	BKD			
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen		0		0	16	137.152.150	5	24.601.000	4	20.565.000	2	8.810.000	5	83.176.150	16	137.152.150	100,00	100,00	16	137.152.150	inf	inf	BKD		
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen		0		0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100,00	nan	5	0	inf	nan	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan				
Predikat Kinerja																								-	-				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	0	0	0	0	100	9.996.796.328	100	1.569.201.277	0	3.756.214.106	0	2.262.655.319	0	2.408.702.376	100	9.996.773.078	100,00	100,00	100	9.996.773.078	inf	inf			
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	0	9.772.950.378	90	1.533.763.777	0	3.717.000.706	0	2.224.961.419	0	2.297.224.476	90	9.772.950.378	inf	100,00	90	9.772.950.378	inf	inf	BKD		
			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang					90		90		0		0		0	90		100,00		90		inf		BKD			
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang		0		0	10	219.471.800	10	35.437.500	0	36.162.500	0	36.393.900	0	111.477.900	10	219.471.800	100,00	100,00	10	219.471.800	inf	inf	BKD		
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM, dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen		0		0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	100,00	nan	60	0	inf	nan	BKD			
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	BKD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
											(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	dokumen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	BKD						
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan, bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	dokumen		0	0	14	4.374.150	0	0	5	3.050.900	9	1.300.000	0	0	14	4.350.900	100,00	99,47	14	4.350.900	inf	inf	BKD						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah	%	0	0	0	0	100	8.036.300	100	3.451.700	0	2.583.000	0	1.814.700	0	186.900	100	8.036.300	100,00	100,00	100	8.036.300	inf	inf						
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	dokumen		0	0	4	0	1	0	0	0	0	3	0	4	0	100,00	nan	4	0	inf	nan	BKD							
12	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen		0	0	4	8.036.300	1	3.451.700	0	2.583.000	3	1.814.700	0	186.900	4	8.036.300	100,00	100,00	4	8.036.300	inf	inf	BKD						
13	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100,00	nan	2	0	inf	nan	BKD							
14	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	dokumen		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100,00	nan	2	0	inf	nan	BKD							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	149.700.000	100	0	0	19.593.400	0	35.120.325	0	94.986.275	100	149.700.000	100,00	100,00	100	149.700.000	inf	inf						
15	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92	0	100,00	nan	92	0	inf	nan	BKD							
16	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen		0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	100,00	nan	4	0	inf	nan	BKD							
17	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		0	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	100,00	nan	75	0	inf	nan	BKD							
18	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0	0	1	37.554.000	0	0	0	0	1	28.855.325	0	8.698.675	1	37.554.000	100,00	100,00	1	37.554.000	inf	inf	BKD						
19	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali		0	0	2	112.146.000	0	0	0	0	0	2	86.287.600	2	112.146.000	100,00	100,00	2	112.146.000	inf	inf	BKD							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	nan						
Predikat Kinerja																									-	-						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	1.225.300.843	0	208.239.442	0	335.419.238	0	396.517.475	100	285.124.600	100	1.225.300.755	100,00	100,00	100	1.225.300.755	inf	inf						
20	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit/set/buah		0	0	12	21.080.000	0	5.958.800	7	11.040.000	0	0	5	4.081.200	12	21.080.000	100,00	100,00	12	21.080.000	inf	inf	BKD						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV															
								(8)		(9)		(10)		(11)										(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
21	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit/set/buah		0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	100,00	nan	8	0	inf	nan	BKD					
22	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis		0	0	3	163.003.800	1	39.086.000	0	45.677.700	1	41.265.700	1	36.974.400	3	163.003.800	100,00	100,00	3	163.003.800	inf	inf	BKD			
23	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis		0	0	8	163.859.500	2	12.503.500	0	74.662.500	5	38.990.000	1	37.703.500	8	163.859.500	100,00	100,00	8	163.859.500	inf	inf	BKD			
24	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis		0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	100,00	nan	6	0	inf	nan	BKD				
25	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	orang		0	0	50	0	10	0	0	0	0	40	0	50	0	100,00	nan	50	0	inf	nan	BKD				
26	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Laporan		0	0	100	877.357.543	25	150.691.142	25	204.039.038	30	316.261.775	20	206.365.500	100	877.357.455	100,00	100,00	100	877.357.455	inf	inf	BKD			
27	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola	arsip		0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100,00	nan	3	0	inf	nan	BKD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	100	30.330.200	100	19.960.000	0	3.150.000	0	3.720.000	0	3.500.200	100	30.330.200	100,00	100,00	100	30.330.200	inf	inf			
28	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasinal atau lapangan baru	unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	BKD				
29	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mobiler yang diadakan	Jenis		0	0	5	20.130.200	4	19.960.000	0	0	0	1	170.200	5	20.130.200	100,00	100,00	5	20.130.200	inf	inf	BKD				
30	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jenis		0	0	2	10.200.000	0	0	1	3.150.000	1	3.720.000	1	3.330.000	3	10.200.000	150,00	100,00	3	10.200.000	inf	inf	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	0	0	0	100	1.087.116.456	100	154.975.167	0	277.764.577	0	309.269.782	0	345.106.930	100	1.087.116.456	100,00	100,00	100	1.087.116.456	inf	inf			
31	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0	0	1200	11.480.000	300	8.707.200	500	66.000	0	0	400	2.706.800	1200	11.480.000	100,00	100,00	1200	11.480.000	inf	inf	BKD			
32	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	buah		0	0	2	232.284.000	1	62.408.135	0	36.528.413	1	79.923.618	2	53.423.834	4	232.284.000	200,00	100,00	4	232.284.000	inf	inf	BKD			
			Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	m3				1000		250	0	0	0	750	1000		100,00		1000			inf		BKD					
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	kwh				8		2	0	0	0	6	8		100,00		8			inf		BKD					
			Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps				10		3	0	0	0	7	10		100,00		10			inf		BKD					
33	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	tabung		0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	100,00	nan	12	0	inf	nan	BKD				
34	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0	0	12	843.352.456	3	83.859.832	3	241.170.164	3	229.346.164	3	288.976.296	12	843.352.456	100,00	100,00	12	843.352.456	inf	inf	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	0	0	0	0	100	419.203.461	100	40.860.000	0	42.578.000	0	89.667.428	0	246.098.033	100	419.203.461	100,00	100,00	100	419.203.461	inf	inf					
35	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	unit		0	0	7	145.515.000	1	0	0	0	3	62.497.428	3	83.017.572	7	145.515.000	100,00	100,00	7	145.515.000	inf	inf	BKD					
36	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	jenis		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100,00	nan	3	0	inf	nan	BKD					
37	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit/set/buah		0	0	12	97.920.000	3	35.910.000	3	17.590.000	3	27.170.000	3	17.250.000	12	97.920.000	100,00	100,00	12	97.920.000	inf	inf	BKD					
38	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab	unit		0	0	2	175.768.461	1	4.950.000	1	24.988.000	0	0	0	145.830.461	2	175.768.461	100,00	100,00	2	175.768.461	inf	inf	BKD					
39	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ rehab	unit		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	100,00	nan	4	0	inf	nan	BKD					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			0	0		2.689.619.350		420.568.250		786.650.531		675.700.657		806.699.912		2.689.619.350		100,00		2.689.619.350		inf							
5.03		KEPEGAWAIAN			0	0		2.689.619.350		420.568.250		786.650.531		675.700.657		806.699.912		2.689.619.350		100,00		2.689.619.350		inf							
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	0	0	325	2.689.619.350	0	420.568.250	0	786.650.531	0	675.700.657	325	806.699.912	325	2.689.619.350	100,00	100,00	325	2.689.619.350	inf	inf							
1	5.03.02.1.01.02	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	%	0	0	0	0	52	494.444.450	0	33.121.400	0	123.840.400	0	128.069.107	52	209.413.543	52	494.444.450	100,00	100,00	52	494.444.450	inf	inf					
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Buku formasi ASN Pemprov Sumbar	buku		0	0	2	31.431.350	0	0	0	0	1	13.996.600	1	17.434.750	2	31.431.350	100,00	100,00	2	31.431.350	inf	inf	BKD					
			Dokumen perencanaan penataan ASN Pemprov Sumbar	dokumen				1		0	0	0	0	1		1		1	100,00		1		inf		BKD						
2	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelamar yang terlayani	pelamar		0	0	31000	204.655.100	0	0	1000	55.504.600	500	25.300.200	1600	123.850.300	3100	204.655.100	10,00	100,00	3100	204.655.100	inf	inf	BKD					
			Jumlah SK CPNS, ASN dan Honorer yang diterbitkan	SK				1500		0	0	0	0	1500		1500		1500	100,00		1500		inf		BKD						
			Terlaksananya pendampingan sekolah ikatan dinas	sekolah ikatan dinas				2		0	0	0	0	2		2		100,00		2		inf		BKD							
3	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah usul pensiun PNS yang diproses tepat waktu	usul		0	0	700	51.443.400	100	4.238.900	200	17.169.900	200	21.784.600	200	8.250.000	700	51.443.400	100,00	100,00	700	51.443.400	inf	inf	BKD					
4	5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN	orang		0	0	80	90.713.100	10	9.920.000	20	28.356.000	20	34.223.757	30	18.213.343	80	90.713.100	100,00	100,00	80	90.713.100	inf	inf	BKD					
			Jumlah ASN yang mengikuti seleksi MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional	orang				20		0	0	0	0	20		20		100,00		20		inf		BKD							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Jumlah fasilitasi Rapat Kerja pengurus Korps Organisasi Profesi ASN	kali					4		0		0		0		4		4		100,00		4		inf	BKD				
			Upacara HUT KORPRI	kali					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	BKD				
5	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	DUK		0		0	1	58.219.700	0	5.318.100	0	10.919.900	0	14.432.000	1	27.549.700	1	58.219.700	100,00	100,00	1	58.219.700	inf	inf	BKD			
			Terlaksananya updating data kepegawaian	sistem					5		0		0		0		5		5		100,00		5		inf	BKD				
6	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola	bundel		0		0	23000	57.981.800	5000	13.644.400	5000	11.890.000	8000	18.331.950	5000	14.115.450	23000	57.981.800	100,00	100,00	23000	57.981.800	inf	inf	BKD			
			Jumlah kartu identitas pegawai bagi Asn yang dikelola	kartu					400		0		0		0		400		400		100,00		400		inf	BKD				
			Tersedianya laporan IP ASN Pemprov Sumatera Barat	laporan					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	BKD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	%	0	0	0	0	90	1.361.308.600	0	277.801.360	0	321.631.150	0	432.129.300	90	329.746.790	90	1.361.308.600	100,00	100,00	90	1.361.308.600	inf	inf				
7	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas mutasi yang diproses	berkas		0		0	500	87.798.500	100	18.092.400	150	45.602.200	150	17.331.800	100	6.772.100	500	87.798.500	100,00	100,00	500	87.798.500	inf	inf	BKD			
8	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usul SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu (2 periode)	orang		0		0	5000	282.331.100	500	14.573.050	500	59.912.000	1000	91.450.250	3000	116.395.800	5000	282.331.100	100,00	100,00	5000	282.331.100	inf	inf	BKD			
9	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan	JPT		0		0	7	991.179.000	2	245.135.910	2	216.116.950	2	323.347.250	1	206.578.890	7	991.179.000	100,00	100,00	7	991.179.000	inf	inf	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	0	0	0	0	98	585.804.150	0	51.372.790	0	253.741.231	0	67.195.850	98	213.494.279	98	585.804.150	100,00	100,00	98	585.804.150	inf	inf				
10	5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas	orang		0		0	25	36.581.500	5	1.000.000	12	27.779.500	5	7.210.000	3	592.000	25	36.581.500	100,00	100,00	25	36.581.500	inf	inf	BKD			
11	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah aparatur yang dipetakan potensinya	orang		0		0	3600	329.443.900	300	12.890.190	1500	187.718.900	200	8.180.800	1600	120.654.010	3600	329.443.900	100,00	100,00	3600	329.443.900	inf	inf	BKD			
12	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bantuan pendidikan lanjutan	orang		0		0	50	87.478.200	20	17.877.400	5	5.209.800	5	5.366.400	20	59.024.600	50	87.478.200	100,00	100,00	50	87.478.200	inf	inf	BKD			
13	5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah sertifikasi jabatan yang difasilitasi	jenis		0		0	3	2.247.500	0		0	3	2.247.500	0	0	0	3	2.247.500	100,00	100,00	3	2.247.500	inf	inf	BKD			
14	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah sertifikasi fungsional yang difasilitasi	jenis		0		0	4	6.955.450	3	4.918.250	1	2.037.200	0		0	0	4	6.955.450	100,00	100,00	4	6.955.450	inf	inf	BKD			
15	5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Teknis Jabatan Fungsional	orang		0		0	60	42.636.900	0		0	0	40	25.964.900	20	16.672.000	60	42.636.900	100,00	100,00	60	42.636.900	inf	inf	BKD			
16	5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah penerbitan jabatan fungsional	keputusan		0		0	950	49.669.750	150	7.092.000	200	19.434.331	250	10.449.750	350	12.693.669	950	49.669.750	100,00	100,00	950	49.669.750	inf	inf	BKD			
			Jumlah usul kenaikan jabatan fungsional jenjang utama	surat usulan					1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf	BKD				
17	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah jabatan fungsional yang difasilitasi	jenis		0		0	4	30.790.950	1	7.594.950	1	9.314.000	1	10.024.000	1	3.858.000	4	30.790.950	100,00	100,00	4	30.790.950	inf	inf	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	0	0	0	0	98	248.062.150	0	58.272.700	0	87.437.750	0	48.306.400	98	54.045.300	98	248.062.150	100,00	100,00	98	248.062.150	inf	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV															
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
18	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan pengukuran kinerja PNS yang sesuai dengan aturan yang berlaku	laporan		0	0	1	65.269.350	0	14.240.100	0	17.788.600	0	21.732.800	1	11.507.850	1	65.269.350	100,00	100,00	1	65.269.350	inf	inf	BKD			
19	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		0	0	12	62.944.500	3	11.667.000	5	21.117.500	1	255.000	3	29.905.000	12	62.944.500	100,00	100,00	12	62.944.500	inf	inf	BKD			
			Terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja	laporan				1		0		0		0		1		1		100,00		1		inf		BKD			
20	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan untuk memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya	orang		0	0	1000	23.018.850	250	8.007.850	250	6.015.000	250	6.071.000	250	2.925.000	1000	23.018.850	100,00	100,00	1000	23.018.850	inf	inf	BKD			
21	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya sidang MPP dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	kali sidang		0	0	6	76.960.250	2	14.564.650	2	40.561.250	2	17.181.300	0	4.653.050	6	76.960.250	100,00	100,00	6	76.960.250	inf	inf	BKD			
22	5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terselesaikannya kasus perceraian PNS	orang		0	0	30	14.090.200	10	4.014.100	5	1.955.400	5	3.066.300	10	5.054.400	30	14.090.200	100,00	100,00	30	14.090.200	inf	inf	BKD			
23	5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Laporan evaluasi disiplin PNS	dokumen		0	0	1	5.779.000	1	5.779.000	0		0	0	0		1	5.779.000	100,00	100,00	1	5.779.000	inf	inf	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf					
Predikat Kinerja																							-	-					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																										
								I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%			(15) = 14/5 * 100%																															
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp																						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				102.158.420.429		36.234.783.429		17.301.411.183		4.942.024.149		3.817.053.820		4.358.585.191		4.519.105.630		17.636.768.790		101,94		53.871.552.219		52,73																									
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				91.070.076.991		26.246.623.720		14.778.697.624		3.722.497.050		3.491.963.158		3.913.433.596		4.194.074.986		15.321.968.790		103,68		41.568.592.510		45,64																									
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				91.070.076.991		26.246.623.720		14.778.697.624		3.722.497.050		3.491.963.158		3.913.433.596		4.194.074.986		15.321.968.790		103,68		41.568.592.510		45,64																									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan % daerah provinsi	%		91.070.076.991	100	26.246.623.720	100	14.778.697.624	25	3.722.497.050	25	3.491.963.158	25	3.913.433.596	25	4.194.074.986	100	15.321.968.790	100,00	103,68	200	41.568.592.510	inf	45,64																									
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	dokumen	94	1.365.566.450	17	50.418.600	7	70.074.573	8	26.383.303	0	22.028.747	0	1.348.750	1	23.124.803	9	72.885.603	128,57	104,01	26	123.304.203	27,66	9,03																									
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	42	164.021.450	9	26.113.400	0	49.474.773	4	15.295.100	0	18.101.250	0	370.000	0	15.233.650	4	49.000.000	inf	99,04	13	75.113.400	30,95	45,79	BPSDM																								
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0		0		4		0		0		0		0		0	0,00		0		nan		BPSDM	Indikator kinerja telah tercapai																								
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	16	23.000.000	0		2	2.167.000	1	1.824.800	0		0		0	1	1.824.800	50,00	84,21	1	1.824.800	6,25	7,93	BPSDM	Realsasi berikutnya di triwulan IV	Gangguan pada saat entry data pada aplikasi SIPD	Entry data sudah per masing-masing PPTK sehingga bisa lebih cepat																						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																										
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	12	23.000.000	0		1	2.082.500	0	1.362.400	0	587.500	0		0	0	1.949.900	0,00	93,63	0	1.949.900	0,00	8,48	BPSDM	Realisasi Sub Kegiatan ini pada Triwulan IV	sistem pembagian paket untuk evidence fisik agak rigid.	Sistem entri data sudah menggunakan aplikasi Simbangda																						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																										
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	24	1.155.545.000	8	24.305.200	3	16.350.300	3	7.901.003	0	3.339.997	0	978.750	0	7.891.153	3	20.110.903	100,00	123,00	11	44.416.103	45,83	3,84	BPSDM	Telah tercapai																							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			750	60.343.095.059	221	18.033.533.178	0	10.497.736.874	79	3.130.485.016	0	2.136.728.254	0	2.821.803.229	0	2.879.545.495	79	10.968.561.994	inf	104,49	300	29.002.095.172	40,00	48,06																									
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	492	58.004.325.159	162	17.397.782.228	80	10.236.410.874	76	3.076.222.366	0	2.111.897.654	0	2.786.823.229	0	2.733.858.745	76	10.708.801.994	95,00	104,61	238	28.106.584.222	48,37	48,46	BPSDM	Adanya ASN yang pensiun pada tahun ini																							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																										
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	90	2.029.852.000	31	571.764.600	1	244.020.000	0	45.280.000	0	20.600.000	0	34.980.000	1	145.100.000	1	245.960.000	100,00	100,80	32	817.724.600	35,56	40,28	BPSDM	Realisasi pada akhir tahun	Adanya perbedaan indikator kinerja antara																						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
												I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																													DPA dengan Renstra		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
7	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	dokumen	12	155.061.300	4	29.126.600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	29.126.600	33,33	18,78	BPSDM	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
8	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	4	23.000.000	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
9	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	130.856.600	24	34.859.750	0	17.306.000	3	8.982.650	3	4.230.600	3	0	3	586.750	12	13.800.000	inf	79,74	36	48.659.750	50,00	37,19	BPSDM				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	dokumen	0		0		14		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	16,08				
Predikat Kinerja																										-	SR				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			44	129.000.000	0		0	0	28.860.000	0		0	2	28.766.840	0		0	0	0	2	28.766.840	inf	99,68	2	28.766.840	4,55	22,30		
10	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	8	20.000.000	0		0	2	0	0		0	0	0	0		0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
11	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	Dokumen	4	34.000.000	0		0	2	28.860.000	0		0	2	28.766.840	0		0	0	0	2	28.766.840	100,00	99,68	2	28.766.840	50,00	84,61	BPSDM	Realisasi pada Triwulan III
12	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	laporan	4	25.000.000	0		0	2	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM			
13	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan	16	25.000.000	0		0	2	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
14	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	12	25.000.000	0		0	2	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	6,04				
Predikat Kinerja																										-	SR				
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah			20	125.000.000	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I		II		III		IV																																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
		Kewenangan Perangkat Daerah																																																	
15	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	4	25.000.000	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM																								
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																								
16	X.XX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	4	25.000.000	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM																								
17	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	laporan	4	25.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM																								
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																								
18	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah	laporan	4	25.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM																								
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																								
19	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	laporan	4	25.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM																								
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			685	2.016.248.300	268	235.016.708	0	86.378.500	78	29.764.150	0	23.011.800	0	19.722.068	0	28.941.982	78	101.440.000	inf	117,44	346	336.456.708	50,51	16,69																									
20	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	stel	480	480.500.000	242	124.394.900	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	242	124.394.900	50,42	25,89	BPSDM	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2023 karena belum prioritas																							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																								
21	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen	8	25.000.000	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2023 karena belum prioritas																							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																								
22	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20	250.000.000	0	0	80	26.550.000	76	11.430.000	0	10.260.000	0	0	0	20.250.000	76	41.940.000	95,00	157,97	76	41.940.000	380,00	16,78	BPSDM	Penambahan kegiatan pengembangan kapasitas SDM berupa Outbound																							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																								
23	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	78	1.260.748.300	26	110.621.808	7	59.828.500	2	18.334.150	3	12.751.800	3	19.722.068	2	8.691.982	10	59.500.000	142,86	99,45	36	170.121.808	46,15	13,49	BPSDM		Realisasi berdasarkan undangan	Komitmen pimpinan dan ketersediaan anggaran mencukupi hingga akhir tahun.																					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	2,44							
Predikat Kinerja																								-	SR							
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1142	4.553.371.375	155	1.438.781.022	0	911.909.253	21	244.848.478	20	211.138.769	30	378.594.618	0	132.507.488	71	967.089.353	inf	106,05	226	2.405.870.375	19,79	52,84						
24	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	300	382.993.981	8	150.552.103	4	69.999.489	1	19.958.700	1		0	2	28.950.653	0		0	4	48.909.353	100,00	69,87	12	199.461.456	4,00	52,08	BPSDM			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM					
25	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	18	897.515.144	6	314.400.900	3	114.186.500	1	19.309.800	1	33.276.900	1	30.863.100	0	43.550.200	3	127.000.000	100,00	111,22	9	441.400.900	50,00	49,18	BPSDM					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM					
26	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	600	334.907.500	14	96.585.300	5	48.630.000	1	5.062.750	2	6.356.499	2	20.786.400	0	8.474.351	5	40.680.000	100,00	83,65	19	137.265.300	3,17	40,99	BPSDM		Belanja tidak bisa dilaksanakan sekaligus karena tidak memiliki gudang penyimpanan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM					
27	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	12	118.950.000	4	27.090.000	3	8.400.000	3	1.500.000	0	500.000	0	2.000.000	0	1.500.000	3	5.500.000	100,00	65,48	7	32.590.000	58,33	27,40	BPSDM					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM					
28	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	252	2.819.004.750	123	850.152.719	60	670.693.264	15	199.017.228	16	171.005.370	25	295.994.465	9	78.982.937	65	745.000.000	108,33	111,08	188	1.595.152.719	74,60	56,59	BPSDM	Data Triwulan II belum dilakukan rekapitulasi				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	8,08							
Predikat Kinerja																								-	SR							
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			88	1.984.256.366	26	517.553.500	0	34.837.600	0		0	0		0	6	34.350.000	0		0	6	34.350.000	inf	98,60	32	551.903.500	36,36	27,81			
29	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	48	1.155.354.400	11	350.675.000	3	4.837.600	0		0	0		0	3	4.800.000	0		0	3	4.800.000	100,00	99,22	14	355.475.000	29,17	30,77	BPSDM	proses pengadaan telah dilaksanakan menunggu proses pembayaran di keuangan	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM					
30	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	828.901.966	15	166.878.500	0	30.000.000	0		0	0		0	3	29.550.000	0		0	3	29.550.000	inf	98,50	18	196.428.500	45,00	23,70	BPSDM	Belanja peralatan untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi (Kamdis Belajar)	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I		II		III		IV																																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
			Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		3		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BPSDM																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	1,82																								
Predikat Kinerja																									-	SR																								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40215	16.261.955.850	2650	4.118.132.649	0	2.382.978.824	447	187.443.990	558	591.051.216	352	549.425.931	327	1.025.053.863	1684	2.352.975.000	inf	98,74	4334	6.471.107.649	10,78	39,79																								
31	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4200	122.194.250	2544	27.244.750	0	12.000.000	447	2.710.000	558	9.065.000	352		0	325	200.000	1682	11.975.000	inf	99,79	4226	39.219.750	100,62	32,10	BPSDM																						
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat-surat	laporan	0		0		2		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BPSDM																							
32	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	5.299.700.000	1	1.272.138.689	0	637.114.646	0	118.606.872	0	147.407.334	0	181.564.229	1	165.421.565	1	613.000.000	inf	96,22	2	1.885.138.689	5,56	35,57	BPSDM	Penyesuaian Indikator renstra																						
			Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BPSDM																							
33	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	15	10.840.061.600	6	2.818.749.210	1	1.733.864.178	0	66.127.118	0	434.578.882	0	367.861.702	1	859.432.298	1	1.728.000.000	100,00	99,66	7	4.546.749.210	46,67	41,94	BPSDM	Realisasi pada akhir tahun																						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	3,32																								
Predikat Kinerja																									-	SR																								
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			888	4.291.583.591	314	1.853.188.063	0	765.922.000	16	103.572.113	108	479.237.532	12	108.189.000	17	104.901.355	153	795.900.000	inf	103,91	467	2.649.088.063	52,59	61,73																								
34	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	84	896.740.000	27	347.519.579	13	141.400.000	4	35.607.113	3	10.344.201	5	68.829.000	1	18.219.686	13	133.000.000	100,00	94,06	40	480.519.579	47,62	53,59	BPSDM																							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																							
35	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	504	302.890.000	155	43.597.000	85	20.000.000	0		5	19.900.000	0		0	5	19.900.000	5,88	99,50	160	63.497.000	31,75	20,96	BPSDM	Masih dalam tahap proses pengadaan																							
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM																							
36	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300	3.091.953.591	132	1.462.071.484	15	604.522.000	12	67.965.000	100	448.993.331	7	39.360.000	16	86.681.669	135	643.000.000	900,00	106,37	267	2.105.071.484	89,00	68,08	BPSDM																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	3,96																								
Predikat Kinerja																									-	SR																								
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.088.343.438		9.988.159.709		2.522.713.559		1.219.527.099		325.090.662		445.151.595		325.030.644		2.314.800.000		91,76		12.302.959.709		110,95																								
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				11.088.343.438		9.988.159.709		2.522.713.559		1.219.527.099		325.090.662		445.151.595		325.030.644		2.314.800.000		91,76		12.302.959.709		110,95																								
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%		11.088.343.438	100	9.988.159.709	87	2.522.713.559	55	1.219.527.099	0	325.090.662	20	445.151.595	25	325.030.644	100	2.314.800.000	114,94	91,76	200	12.302.959.709	inf	110,95																								
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	orang	1440	4.215.581.030	340	1.134.640.558	210	1.151.916.250	167	650.104.607	0	152.424.875	30	169.299.058	90	258.671.460	287	1.230.500.000	136,67	106,82	627	2.365.140.558	43,54	56,10																								
1	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	1440	4.006.631.030	340	1.072.334.928	120	1.126.301.400	1.67	649.784.607	0	128.273.675	30	169.299.058	90	257.642.660	121,67	1.205.000.000	101,39	106,99	461,67	2.277.334.928	32,06	56,84	BPSDM	Adanya beberapa kegiatan pelatihan yang	Sulitnya mendapatkan izin atasan karena	Tingginya antusias ASN untuk																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																								diundur menyesuaikan dengan pelaksanaan Latsiltarda		kesibukan pekerjaan		mengikuti diklat teknis
2	5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi	dokumen	5	208.950.000	2	62.305.630	1	25.614.850	0	320.000	1	24.151.200	0	0	0	1.028.800	1	25.500.000	100,00	99,55	3	87.805.630	60,00	42,02	BPSDM	kegiatan berupa monev ke kabupaten/kota dengan realisasi laporan pada akhir tahun		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	0			0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	49,43				
Predikat Kinerja																									-	SR				
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2964	6.872.762.408	1386	8.853.519.151	0	1.370.797.309	0	569.422.492	60	172.665.787	71	275.852.537	0	66.359.184	131	1.084.300.000	inf	79,10	1517	9.937.819.151	51,18	144,60				
3	5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan kompetensi	Dokumen	5	310.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2023 karena belum prioritas		
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
4	5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah dokumen lembaga sertifikasi	dokumen	5	414.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPSDM	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2023 karena belum prioritas		
		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
5	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN provinsi dan kabupaten/kota yang tersertifikasi	Orang	240	666.400.000	150	151.635.129	30	30.353.700	0	3.181.200	30	4.905.000	30	8.850.000	0	13.563.800	60	30.500.000	200,00	100,48	210	182.135.129	87,50	27,33	BPSDM	Pelaksanaan Uji Kompetensi Barang dan Jasa pada bulan juni	Pelaksanaan menunggu hasil penilaian dari LKPP	Ketersediaan sarana pendukung sangat baik
6	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah laporan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar	laporan	5	3.509.659.150	2	548.616.727	1	109.089.709	0	9.973.200	0	57.073.000	0	8.330.000	1	11.523.800	1	86.900.000	100,00	79,66	3	635.516.727	60,00	18,11	BPSDM	berupa kegiatan penjamkinan mutu Diklat dengan realisasi laporan pada akhir tahun	Keterlambatan penyusunan SK Penjamin Mutu	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
7	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah dokumen pelaksanaan kerja sama antar lembaga	Dokumen	5	545.373.800	2	160.736.017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	160.736.017	40,00	29,47	BPSDM	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2023 karena belum prioritas			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
8	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Orang	1464	33.478.780	1056	7.673.262.674	370	1.205.233.900	0	552.993.592	0	110.687.787	41	246.177.285	0	32.141.336	41	942.000.000	11,08	78,16	1097	8.615.262.674	74,93	25.733,50	BPSDM	Diklat PKP masih dalam tahap pelaksanaan			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	1260		180		0		0		30		0		0		30		inf		210		16,67		BPSDM	dua diklat masih dalam tahap pelaksanaan	Menyesuaikan dengan jadwal Latsitardanus		
9	5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlahdokumen hasil pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan	dokumen	18	1.393.850.678	6	319.268.604	3	26.120.000	0	3.274.500	0	0	1	12.495.252	2	9.130.248	3	24.900.000	100,00	95,33	9	344.168.604	50,00	24,69	BPSDM	Evaluasi pasca diklat dapat dilaksanakan setelah seluruh pelaksanaan diklat selesai			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen			0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	2.870,35							
Predikat Kinerja																							-	ST							

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV											
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			0	0	12.327.776.754	1.448.103.270	2.301.196.090	4.758.503.257	2.926.073.554	11.433.876.171		92,75	11.433.876.171	inf										
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	7.590.922.881	1.206.046.909	1.652.882.877	2.858.145.589	1.436.892.269	7.153.967.644		94,24	7.153.967.644	inf										
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			0	0	7.590.922.881	1.206.046.909	1.652.882.877	2.858.145.589	1.436.892.269	7.153.967.644		94,24	7.153.967.644	inf										
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	7.590.922.881	1.206.046.909	1.652.882.877	2.858.145.589	1.436.892.269	7.153.967.644	nan	94,24	7.153.967.644	nan	inf	-								
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	263.065.683	52.363.900	34.950.000	142.066.130	26.713.437	256.093.467	nan	97,35	256.093.467	nan	inf	-	-	-						
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Rakor Kelitbangan	Rakor Kelitbangan	0	0	104.252.683	50.038.300	1	46.697.500	6.154.800	102.890.600	200,00	98,69	102.890.600	inf	inf	BALITBANG	-	-	-					
			Terlaksananya Forum OPD	Forum OPD	0	0	1	1	0	0	0	1	100,00	1	inf	BALITBANG										
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	0	0	6	4	5	0	0	9	150,00	9	inf	BALITBANG	-	-	-							
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	0	5.000.000	2.325.600	0	0	2.672.000	4.997.600	100,00	99,95	4.997.600	inf	inf	BALITBANG								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	0	1	1	0	0	1	2	200,00	2	inf	BALITBANG	-	-	-							
3	X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-					
4	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Studi Implementasi	kali	0	0	153.813.000	0	0	34.950.000	1	95.368.630	17.886.637	1	148.205.267	100,00	96,35	1	148.205.267	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-						
			Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	dokumen	0	0	1	0	1	0	1	2	200,00	2	inf	BALITBANG	-	-	-							
5	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan									
Predikat Kinerja																-	-									
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	5.186.460.461	834.726.351	1.184.879.023	1.873.218.895	959.505.653	4.852.329.922	nan	93,56	4.852.329.922	nan	inf	-	-	-						
6	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	4.961.001.181	805.477.751	1.157.929.023	1.805.442.595	861.530.133	4.630.379.502	nan	93,34	4.630.379.502	nan	inf	BALITBANG	-	-	-					
			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	0	0	33	35	0	0	35	106,06	35	inf	BALITBANG	-	-	-								
			Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Baitbang Prov. Sumbar	bulan	0	0	12	3	3	0	9	75,00	9	inf	BALITBANG	-	-	-								
7	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	202.299.280	29.248.600	26.950.000	55.176.300	87.800.286	199.175.186	nan	98,46	199.175.186	nan	inf	BALITBANG	-	-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	0		0		9		10		0		0		0		10		111,11		10		inf	BALITBANG	-	-	-	
8	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	0	0	0	0	40	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	25,00	nan	10	0	inf	nan	BALITBANG	-	-	-	
9	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-		
10	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-		
11	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	23.160.000	0	0	0	0	12.600.000	1	10.175.234	1	22.775.234	100,00	98,34	1	22.775.234	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Laporan	0	0			17		4		0		0		13		17		100,00		17		inf	BALITBANG	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	51.475.600	0	10.097.299	0	4.955.580	0	12.360.400	0	12.465.153	0	39.878.432	nan	77,47	0	39.878.432	nan	inf		-	-	-
12	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	BALITBANG	-	-	-		
13	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	0	0	0	0	4	24.775.600	2	7.590.299	1	4.955.580	0	0	1	6.851.029	4	19.396.908	100,00	78,29	4	19.396.908	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		BALITBANG	-	-	-			
14	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Laporan	0	0	0	0	1	7.310.000	0	1.888.000	0	0	0	564.000	1	4.746.442	1	7.198.442	100,00	98,47	1	7.198.442	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	orang	0	0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		BALITBANG	-	-	-			
15	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan	0	0	0	0	1	19.390.000	0	619.000	0	0	0	11.796.400	1	867.682	1	13.283.082	100,00	68,50	1	13.283.082	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Laporan	0	0		2		0		0		0		2		2		100,00		2		inf	BALITBANG	-	-	-		
16	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	131.823.455	0	0	0	58.769.082	0	43.131.758	0	19.407.216	0	121.308.056	nan	92,02	0	121.308.056	nan	inf		-	-	-
17	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	0	0	0	0	70	0	35	0	0	0	0	0	35	0	50,00	nan	35	0	inf	nan	BALITBANG	-	-	-		
18	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-		
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang	0	0	0	0	20	0	31	0	0	0	0	0	31	0	155,00	nan	31	0	inf	nan	BALITBANG	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	0		0		1		4		0		0		0		4		400,00		4		inf		BALITBANG	-	-	-		
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	kali	0		0	0	0	5	131.823.455	0		0	0	58.769.082	0	43.131.758	5	19.407.216	5	121.308.056	100,00	92,02	5	121.308.056	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0		31		0		35		0		0		35		112,90		35		inf		BALITBANG	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0		0	0	0	0	676.080.585	0	174.716.465	0	132.976.170	0	288.183.008	0	39.906.591	0	635.782.234	nan	94,04	0	635.782.234	nan	inf		-	-	-	
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	0		0	0	0	4	5.000.000	0		0	0	1.247.200	0	1.248.400	0	2.492.547	0	4.988.147	0,00	99,76	0	4.988.147	nan	inf	BALITBANG	-	-	-
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	0		0	0	0	4	40.067.000	0		0	4	37.380.000	0	2.664.000	0	0	4	40.044.000	100,00	99,94	4	40.044.000	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
23	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	0		0	0	0	31	56.536.824	31	11.151.100	0	5.349.700	0	20.354.268	0	19.258.112	31	56.113.180	100,00	99,25	31	56.113.180	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	kali	0		0		12		4		2		0		0		6		50,00		6		inf		BALITBANG	-	-	-		
24	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0		0	0	0	0	17.700.000	0	5.000.000	0	0	0	8.478.600	0	4.221.400	0	17.700.000	nan	100,00	0	17.700.000	nan	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	0		0		4		2		0		2		0		4		100,00		4		inf		BALITBANG	-	-	-		
25	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0	0	0	0	4.440.000	0	540.000	0	0	0	1.080.000	0	2.450.000	0	4.070.000	nan	91,67	0	4.070.000	nan	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	0		0		3		2		0		1		1		4		133,33		4		inf		BALITBANG	-	-	-		
26	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	0		0	0	0	12	552.336.761	3	158.025.365	3	88.999.270	3	254.357.740	3	11.484.532	12	512.866.907	100,00	92,85	12	512.866.907	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
27	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	arsip	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		0	0	0	0	106.827.800	0	0	0	36.650.000	0	67.700.000	0	2.477.800	0	106.827.800	nan	100,00	0	106.827.800	nan	inf		-	-	-	
28	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	0		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-	
29	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		0	0	0	6	70.177.800	0	0	0	6	67.700.000	0	2.477.800	6	70.177.800	100,00	100,00	6	70.177.800	inf	inf	BALITBANG	-	-	-		
			Jumlah Mebel	unit	0		0		20		0		0		20		0		20		100,00		20		inf		BALITBANG	-	-	-		
30	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0	0	0	0	36.650.000	0	0	0	36.650.000	0	0	0	0	36.650.000	nan	100,00	0	36.650.000	nan	inf	BALITBANG	-	-	-		
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	unit	0		0		5		0		10		0		0		10		200,00		10		inf		BALITBANG	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
											I		II		III		IV										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												nan	nan				
Predikat Kinerja																												-	-				
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	861.599.297	0	122.668.317	0	167.827.105	0	230.470.342	0	324.899.715	0	845.865.479	nan	98,17	0	845.865.479	nan	inf		-	-	-			
31	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	10.328.767	0	1.500.000	0	1.250.000	0	2.750.000	0	4.818.793	0	10.318.793	nan	99,90	0	10.318.793	nan	inf	BALITBANG	-	-	-			
			Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	0		0		500		150		150		100		150		550		110,00		550		inf	BALITBANG	-	-	-				
32	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	60.000.000	0	7.766.755	0	3.613.603	0	15.650.418	0	23.312.879	0	50.343.655	nan	83,91	0	50.343.655	nan	inf	BALITBANG	-	-	-			
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	0		0		3		2		0		1		0		3		100,00		3		inf	BALITBANG	-	-	-				
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KVA	0		0		2000		23000		0		0		0		23000		1.150,00		23000		inf	BALITBANG	-	-	-				
33	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Rohaniwan dan Penceramah Agama	kali	0	0	0	0	28	791.270.530	0	113.401.562	1	162.963.502	8	212.069.924	18	296.768.043	27	785.203.031	96,43	99,23	27	785.203.031	inf	inf	BALITBANG	-	-	-			
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	0		0		15		15		0		0		0		15		100,00		15		inf	BALITBANG	-	-	-				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												nan	inf				
Predikat Kinerja																												-	-				
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	313.590.000	0	11.474.577	0	31.875.917	0	201.015.056	0	51.516.704	0	295.882.254	nan	94,35	0	295.882.254	nan	inf		-	-	-			
34	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	0	0	0	0	1	41.190.000	1	6.416.827	0	3.078.111	0	14.442.744	0	13.299.606	1	37.237.288	100,00	90,40	1	37.237.288	inf	inf	BALITBANG	-	-	-			
35	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	0	0	0	0	3	122.400.000	1	5.057.750	1	28.797.806	0	41.258.059	1	34.145.824	3	109.259.439	100,00	89,26	3	109.259.439	inf	inf	BALITBANG	-	-	-			
36	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit	0	0	0	0	1	150.000.000	0		0	0		1	145.314.253	1	4.071.274	2	149.385.527	200,00	99,59	2	149.385.527	inf	inf	BALITBANG	-	-	-		
37	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	7		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												nan	nan				
Predikat Kinerja																												-	-				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		4.736.853.873		242.056.361		648.313.213		1.900.357.668		1.489.181.285		4.279.908.527		90,35		4.279.908.527		inf							
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				0		0		4.736.853.873		242.056.361		648.313.213		1.900.357.668		1.489.181.285		4.279.908.527		90,35		4.279.908.527		inf							
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH				0	0	0	0	4.736.853.873	0	242.056.361	0	648.313.213	0	1.900.357.668		1.489.181.285	0	4.279.908.527	nan	90,35	0	4.279.908.527	nan	inf		-					
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan			0	0	0	0	0	928.215.324	0	9.485.150	0	156.223.864	0	276.492.050	0	455.934.073	0	898.135.137	nan	96,76	0	898.135.137	nan	inf		-	-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																													
1	5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Rumusan rekomendasi kebijakan kelitbangan	Rumusan rekomendasi	0	0	0	0	1	730.100.000	0	9.485.150	0	106.803.740	0	197.637.405	1	394.078.473	1	708.004.768	100,00	96,97	1	708.004.768	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BALITBANG	-	-	-			
			Terukurnya indeks kinerja Pemda	indeks	0		0		2		0		1		1		0		2		100,00		2		inf		BALITBANG	-	-	-	
2	5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Rekomendasi Rumusan Kebijakan Penugasan Gubernur Difasilitasi	rekomendasi	0	0	0	0	1	75.000.000	0		0	17.997.800	0	43.642.425	1	11.662.600	1	73.302.825	100,00	97,74	1	73.302.825	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BALITBANG	-	-	-			
3	5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	0	0	0	0	0	123.115.324	0		0	31.422.324	0	35.212.220	0	50.193.000	0	116.827.544	nan	94,89	0	116.827.544	nan	inf	BALITBANG				
			Jumlah Data Kelitbangan yang dikelola	data	0		0		2		0		2		0		2		100,00		2		inf		BALITBANG	-	-	-			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf						
Predikat Kinerja																								-	-						
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			0	0	0	0	0	477.563.484	0	9.980.000	0	80.258.883	0	218.730.612	0	163.096.383	0	472.065.878	nan	98,85	0	472.065.878	nan	inf		-	-	-	
4	5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Terlaksananya penelitian aspek sosial	hasil penelitian	0	0	0	0	1	157.723.773	0	9.980.000	0	24.187.800	0	45.223.000	1	76.340.000	1	155.730.800	100,00	98,74	1	155.730.800	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
5	5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	0	0	0	0	0	156.676.228	0		0	16.652.600	0	131.457.612	1	6.489.000	1	154.599.212	inf	98,67	1	154.599.212	inf	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0		0		1		0		0		1		1		100,00		1		inf		BALITBANG	-	-	-			
6	5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	0	0	0	0	0	163.163.483	0		0	39.418.483	0	42.050.000	0	80.267.383	0	161.735.866	nan	99,13	0	161.735.866	nan	inf	BALITBANG	-	-	-	
			Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0		0		1		0		0		0		0		0,00		0		nan		BALITBANG	-	-	-			
7	5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0	0	0	0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			0	0	0	0	0	843.399.065	0		0	144.330.100	0	337.403.558	0	343.587.658	0	825.321.316	nan	97,86	0	825.321.316	nan	inf		-	-	-	
8	5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	hasil penelitian	0	0	0	0	1		0	0		0	0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RPKD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																											
9	5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	0	0	0	144.508.450	0	0	0	34.901.900	0	34.437.300	0	70.307.000	0	139.646.200	nan	96,64	0	139.646.200	nan	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	100,00	1	inf	BALITBANG	-	-	-							
10	5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	0	0	0	0	0	242.522.846	0	0	0	815.000	0	123.310.258	1	117.371.258	1	241.496.516	inf	99,58	1	241.496.516	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	50,00	1	inf	BALITBANG	-	-	-								
11	5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang difasilitasi	hasil penelitian	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-				
12	5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0	0	0	0	160.877.786	0	0	0	49.426.800	0	49.804.000	0	60.721.000	0	159.951.800	nan	99,42	0	159.951.800	nan	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0	0	2	0	0	0	1	1	50,00	1	inf	BALITBANG	-	-	-											
13	5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	hasil penelitian	0	0	0	0	1	158.122.891	0	0	0	41.354.800	0	28.363.400	1	84.347.000	1	154.065.200	100,00	97,43	1	154.065.200	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
14	5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-				
15	5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	0	0	0	0	0	137.367.092	0	0	0	17.831.600	0	101.488.600	1	10.841.400	1	130.161.600	inf	94,75	1	130.161.600	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	0	nan	BALITBANG	-	-	-									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			0	0	0	0	0	2.487.676.000	0	222.591.211	0	267.500.366	0	1.067.731.448	0	526.563.171	0	2.084.386.196	nan	83,79	0	2.084.386.196	nan	inf		-	-	-
16	5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0	0	0	0	0	1.035.164.000	0	0	0	72.765.450	0	533.386.660	0	179.070.950	0	785.223.060	nan	75,85	0	785.223.060	nan	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	hasil penelitian	0	0	5	0	5	0	0	5	100,00	5	inf	BALITBANG	-	-	-											
			Jumlah hasil perekayasaan	Hasil perekayasaan	0	0	5	0	0	5	0	5	100,00	5	inf	BALITBANG	-	-	-											
17	5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah hasil penelitian/perekayasaan dan pengembangan yang didifusikan dan diterapkan	teknologi	0	0	0	0	5	602.512.000	0	54.831.000	0	79.967.020	0	318.054.200	5	116.178.365	5	569.030.585	100,00	94,44	5	569.030.585	inf	inf	BALITBANG	-	-	-
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	0	0	1	0	0	0	1	1	100,00	1	inf	BALITBANG	-	-	-											
18	5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah diseminasi yang dilaksanakan	kali	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I		II		III		IV																																		
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)													(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
		Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																																																	
			terlaksananya pembinaan, koordinasi, konsultasi, fasilitasi pengukuran dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Keuangan Daerah, Daya Saing Daerah dan Kepemimpinan Daerah	indeks	0		0		2		0		0		0		0		0,00		0		nan		BALITBANG	-	-	-																							
19	5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya seminar penelitian	seminar	0	0	0	0	1	850.000.000	0	167.760.211	0	114.767.896	0	216.290.588	0	231.313.856	0	730.132.551	0,00	85,90	0	730.132.551	nan	inf	BALITBANG	-	-	-																					
			Jumlah pelaksanaan publikasi hasil karya tulis ilmiah secara online (Elektronik Jurnal)	kali terbit	0		0		2		0		1		0		1		2		100,00		2		inf		BALITBANG	-	-	-																					
			Terlaksananya Diseminasi hasil kelitbangan	diseminasi	0		0		1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		BALITBANG	-	-	-																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		BADAN PENGHUBUNG				146.085.581.671		29.607.701.225		17.735.424.341		1.700.254.689		3.687.492.891		5.941.961.968		6.147.928.643		17.477.638.191		98,55		47.085.339.416		32,23					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				111.740.448.735		22.934.720.320		11.754.325.216		1.431.365.018		2.957.616.876		2.478.456.381		3.956.418.596		10.823.856.871		92,08		33.758.577.191		30,21					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				111.740.448.735		22.934.720.320		11.754.325.216		1.431.365.018		2.957.616.876		2.478.456.381		3.956.418.596		10.823.856.871		92,08		33.758.577.191		30,21					
	X.XX.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		111.740.448.735		22.934.720.320	100	11.754.325.216		1.431.365.018		2.957.616.876		2.339.406.381		3.956.418.596	0	10.684.806.871	0,00	90,90	0	33.619.527.191	nan	30,09					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung	%	0	752.471.806	0	184.787.608	100	137.132.200	0	17.225.163	0	38.313.318	0	11.816.159	0	45.346.543	0	112.701.183	0,00	82,18	0	297.488.791	nan	39,53					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun	Dokumen	1	36.345.242	1	5.036.200	3	95.032.200	1	17.225.163	0	36.512.118	1	10.013.159	1	28.938.943	3	92.689.383	100,00	97,53	4	97.725.583	400,00	268,88	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Kurang terdatanya kebutuhan sesuai anggaran	Lebih teliti dalam meanggarkan dana dan kebutuhan	
			Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung	kali	5		0		1		1		0		0		0		1		100,00		1		20,00		BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
2	X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	24	321.670.128	4	47.624.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	47.624.000	16,67	14,81	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-
3	X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	72	321.670.128	12	43.964.000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	100,00	nan	13	43.964.000	18,06	13,67	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
4	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	5.005.900	0	56.383.000	12	16.020.000	3	0	3	600.000	3	1.169.000	3	6.950.000	12	8.719.000	100,00	54,43	12	65.102.000	inf	1.300,51	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Kurang terdatanya kebutuhan sesuai anggaran	Lebih teliti dalam meanggarkan dana dan kebutuhan	
5	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	67.780.408	4	31.780.408	4	26.080.000	1	0	1	1.201.200	1	634.000	1	9.457.600	4	11.292.800	100,00	43,30	8	43.073.208	33,33	63,55	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Kurang terdatanya kebutuhan sesuai anggaran	Lebih teliti dalam meanggarkan dana dan kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	332,28							
Predikat Kinerja																							-	ST							
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	65.647.923.157	0	12.104.013.584	0	6.364.082.522	0	853.160.154	0	1.499.422.904	0	1.429.950.329	0	1.716.660.565	0	5.499.193.952	nan	86,41	0	17.603.207.536	nan	26,81					
6	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	318	62.654.174.612	100	11.637.492.237	50	6.159.572.522	0	853.160.154	0	1.472.733.504	0	1.352.821.429	50	1.617.390.215	50	5.296.105.302	100,00	85,98	150	16.933.597.539	47,17	27,03	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pegawai	Kurang terdatanya kebutuhan sesuai anggaran	Lebih teliti dalam meanggarkan dana dan kebutuhan	
7	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan penunjang pelaksanaan Tugas AS N	kali		2.504.053.776		395.047.115	12	192.170.000	3	0	3	26.689.400	3	73.681.300	3	90.398.400	12	190.769.100	100,00	99,27	12	585.816.215	inf	23,39	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Kurang terdatanya kebutuhan sesuai anggaran	Lebih teliti dalam meanggarkan dana dan kebutuhan	
			Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	orang	72		12		11		33		33		33		33		132		1.200,00		144		200,00	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	
8	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0		0	0	62		0	15		0	16		0	16		0	100,00	nan	62		0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
9	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	157.058.414	1	23.581.611	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	2	23.581.611	33,33	15,01	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-		
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	108	332.636.355	18	47.892.621	12	12.340.000	3	0	3	0	3	3.447.600	3	8.871.950	12	12.319.550	100,00	99,83	30	60.212.171	27,78	18,10	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan							
Predikat Kinerja																								-	-							
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	13.007.935.576	0	448.114.921	0	262.457.000	0	0	0	149.766.806	0	5.540.545	0	9.788.500	0	165.095.851	nan	62,90	0	613.210.772	nan	4,71						
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	1.871.593.191	1	51.053.250	5	0	1	0	1	0	2	0	1	0	5	0	100,00	nan	6	51.053.250	100,00	2,73	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD	unit		2.046.135.744		275.636.042	3	212.880.000	0	0	0	149.766.806	3	5.540.545	0	3.740.000	3	159.047.351	100,00	74,71	3	434.683.393	inf	21,24	BADAN PENGHUBUNG	-	tertundanya pembayaran pajak PBB bangunan asrama	melakukan koordinasi yang intensif guna pelaksanaan pembayaran PBB bangunan tepat waktu		
			Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit				29	29	0	0	0	0	0	0	29	100,00	29	inf	BADAN PENGHUBUNG	-	-			melakukan koordinasi yang intensif guna -							
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	89.302.629	1	36.461.000	0	0	0	0	0	1	3.973.500	1	3.973.500	100,00	10,90	2	93.276.129	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	-	-	-	-	
14	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	9.090.206.641	12	32.123.000	2	13.116.000	0	0	1	0	0	0	1	2.075.000	2	2.075.000	100,00	15,82	14	34.198.000	19,44	0,38	BADAN PENGHUBUNG	-	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf							
Predikat Kinerja																								-	-							
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	1.445.833.490	0	318.734.339	0	197.591.000	0	10.124.428	0	4.287.700	0	14.106.145	0	13.273.705	0	41.791.978	nan	21,15	0	360.526.317	nan	24,94						
15	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	498	680.472.600	83	118.287.015	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	83	118.287.015	16,67	17,38	BADAN PENGHUBUNG	Batal	-	-	-	-	
16	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan dan pelatihan yang dilaksanakan	kegiatan		0		0	1	134.751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BADAN PENGHUBUNG	Batal	-	-	-	-	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	inf	20	inf	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	554.227.588	1	167.105.342	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100,00	nan	6	167.105.342	100,00	30,15	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	
18	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	18	211.133.302	3	33.341.982	10	62.840.000	2	10.124.428	1	4.287.700	2	14.106.145	5	13.273.705	10	41.791.978	100,00	66,51	13	75.133.960	72,22	35,59	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	12.768.180.116	0	2.275.675.442	0	1.050.850.094	0	128.820.764	0	172.303.929	0	261.600.614	0	837.731.478	0	1.400.456.785	nan	133,27	0	3.676.132.227	nan	28,79				
19	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jenis		212.029.926		36.269.660	10	42.007.800	2	0	1	0	2	0	5	41.428.419	10	41.428.419	100,00	98,62	10	77.698.079	inf	36,64	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	-	-
20	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jenis		477.078.006		285.618.600	20	202.167.084	0	0	0	2.924.000	0	0	20	303.816.982	20	306.740.982	100,00	151,73	20	592.359.582	inf	124,16	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	72		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		nan		24		33,33	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
21	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jenis		1.176.293.616		201.580.640	54	146.713.695	2	2.280.000	13	18.663.900	25	36.644.930	14	83.208.376	54	140.797.206	100,00	95,97	54	342.377.846	inf	29,11	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	144		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		nan		24		16,67	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
22	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jenis		4.304.536.241		1.016.024.201	21	68.047.500	0	0	0	0	6	19.765.080	15	22.851.300	21	42.616.380	100,00	62,63	21	1.058.640.581	inf	24,59	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	-	-
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		nan		12		16,67	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
23	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	bulan	12	59.561.366	12	7.114.000	12	3.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	7.114.000	100,00	11,94	BADAN PENGHUBUNG	Batal	-	-
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		nan		0		nan	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
24	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4.045.476.321		83.969.663	0	62.200.000	0	6.021.375	0	5.756.000	0	12.945.487	0	35.567.605	0	60.290.467	nan	96,93	0	144.260.130	nan	3,57	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya
			jumlah tamu yang dilayani	orang	72		2		250		25		75		75		75		250		100,00		252		350,00	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
25	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	2.493.204.640	12	645.098.678	60	526.234.015	17	120.519.389	9	144.960.029	12	192.245.117	22	350.858.796	60	808.583.331	100,00	153,65	72	1.453.682.009	100,00	58,31	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	-	-
26	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah tenaga IT yang dibayarkan gajinya	orang		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		nan		0		nan	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
								I	II	III	IV																																								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	5.784.526.243	0	2.328.574.778	0	446.549.800	0		0	0	325.011.440	0		0	0	325.011.440	nan	72,78	0	2.653.586.218	nan	45,87																									
27	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		0	0	1		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-																				
28	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang diadakan	unit	138	4.143.797.406	23	465.009.000	19	184.061.800	0		0	3	181.388.540	0		0	16	0	19	181.388.540	100,00	98,55	42	646.397.540	30,43	15,60	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0		0		0		0		0		0			0		nan		0		nan		BADAN PENGHUBUNG	-	-	-																				
29	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	1.640.728.837	3	1.601.386.133	6	143.655.000	0		0	4	143.622.900	0		0	2	0	6	143.622.900	100,00	99,98	9	1.745.009.033	50,00	106,36	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	-	-																			
30	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0	1	262.179.645	2	118.833.000	0		0	0	0	1		0	1	0	2	0	100,00	0,00	3	262.179.645	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG	Pengadaan pos jaga di TMII yang terhutang tahun lalu	terkendalanya persyaratan administrasi pada pihak ke 3	melakukan koordinasi yang lebih detail dengan pihak ke 3 mengenai persyaratan kelengkapan LS																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	6.044.581.196	0	4.146.051.517	0	2.413.532.600	0	384.880.509	0	702.511.079	0	555.207.014	0	694.407.835	0	2.337.006.437	nan	96,83	0	6.483.057.954	nan	107,25																									
31	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	buah		127.232.995		26.243.622	1000	18.800.000	500		6.207.000	0	2.024.526	500	1.800.916	0	7.518.800	1000	17.551.242	100,00	93,36	1000	43.794.864	inf	34,42	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-																				
			Jumlah paket yang dikirim	kg					200		50		50		50		50		200		100,00		200		inf		BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	-	-	-																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	110		185		0		0		0		0		0		0		nan		185		168,18		BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-																				
			jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar	buah	0		0		200		50		20		70		60		200		100,00		200		inf		BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-																				
32	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		4.239.247.557		577.664.077	0	401.137.500	0	82.139.609	0	80.680.556	0	100.876.419	0	100.170.813	0	363.867.397	nan	90,71	0	941.531.474	nan	22,21	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-																				
			jumlah tagihan air, listrik, telepon,internet yang dibayarkan	bulan					12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya																					
33	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan	paket		1.678.100.644		3.542.143.818	1	1.993.595.100	1	296.533.900	0	619.805.997	0	452.529.679	0	586.718.222	1	1.955.587.798	100,00	98,09	1	5.497.731.616	inf	327,62	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-																				
			jumlah tenaga outsourcing yang tersedia	orang					33		99		99		99		99		396		1.200,00		396		inf		BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
									I	II	III	IV																																								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
																									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	11,64																										
Predikat Kinerja																									-	SR																										
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	6.288.997.151	0	1.128.768.131	0	882.130.000	0	37.154.000	0	65.999.700	0	61.185.575	0	639.209.970	0	803.549.245	nan	91,09	0	1.932.317.376	nan	30,73																										
34	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	2.281.584.600	20	427.438.399	28	395.350.000	4	25.279.000	5	65.999.700	4	61.185.575	15	206.558.220	28	359.022.495	100,00	90,81	48	786.460.894	40,00	34,47	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan dan anggarannya	Lebih teliti dalam meanggarkan kebutuhan dan anggarannya																						
35	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	20	31.400.000	0	0	0	0	0	0	20	11.800.000	20	11.800.000	100,00	37,58	20	11.800.000	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	terdapatnya ketidaksinkronan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan	Melakukan pendataan ulang kebutuhan pemeliharaan																						
36	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	481.507.749	12	57.348.600	45	68.950.000	10	11.875.000	0	0	20	0	15	45.501.750	45	57.376.750	100,00	83,22	57	114.725.350	79,17	23,83	BADAN PENGHUBUNG	-	Melakukan efisiensi dana digunakan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan pendataan kebutuhan secara mendetail																						
37	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	2.564.981.424	3	555.178.132	3	334.350.000	0	0	0	0	2	0	1	325.600.000	3	325.600.000	100,00	97,38	6	880.778.132	33,33	34,34	BADAN PENGHUBUNG	-	ketidaksinkronan antara penganggaran di DPA dengan kebutuhan	Melakukan verifikasi ulang terhadap kebutuhan dan anggaran																						
38	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	960.923.378	6	88.803.000	1	52.080.000	0	0	0	0	1	0	0	49.750.000	1	49.750.000	100,00	95,53	7	138.553.000	19,44	14,42	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf																										
Predikat Kinerja																									-	-																										
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			34.345.132.936	6.672.980.905	5.981.099.125	268.889.671	729.876.015	3.463.505.587	2.191.510.047	6.653.781.320		111,25	13.326.762.225	38,80																																				
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG			34.345.132.936	6.672.980.905	5.981.099.125	268.889.671	729.876.015	3.463.505.587	2.191.510.047	6.653.781.320		111,25	13.326.762.225	38,80																																				
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			34.345.132.936	6.672.980.905	5.981.099.125	268.889.671	729.876.015	3.463.505.587	2.191.510.047	6.653.781.320	nan	111,25	0	13.326.762.225	nan	38,80																																		
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			0	34.345.132.936	0	6.672.980.905	0	5.981.099.125	0	268.889.671	0	729.876.015	0	3.463.505.587	0	2.191.510.047	0	6.653.781.320	nan	111,25	0	13.326.762.225	nan	38,80																										
1	5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	kendaraan dinas yang disewa	bulan	36	14.845.403.723	0	1.437.469.942	12	3.187.951.769	0	0	0	89.000.000	1	2.588.525.283	11	272.848.006	12	2.950.373.289	100,00	92,55	12	4.387.843.231	33,33	29,56	BADAN PENGHUBUNG																									
			Jumlah Gedung Kantor yang disewa	unit	5		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1		100,00		3		60,00		BADAN PENGHUBUNG																											
			jumlah mess yang disewa	unit	5		1	2	0	1	0	1	0	0	1	2		100,00		3		60,00		BADAN PENGHUBUNG	Kontrak sewa akan diperpanjang pada bulan Desember 2023																											
			Jumlah rumah jabatan yang disewa	unit	5		1	1	0	1	0	0	0	0	1		100,00		2		40,00		BADAN PENGHUBUNG	sudah selesai																												
2	5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	72	3.495.047.648	24	839.793.689	0	421.833.400	0	51.541.490	0	102.731.248	0	135.632.027	0	125.560.680	0	415.465.445	nan	98,49	24	1.255.259.134	33,33	35,92	BADAN PENGHUBUNG																									
			Jumlah Kooordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya	kali	72		12	20	5	5	5	5	20		100,00		32		44,44		BADAN PENGHUBUNG		adalah terlambatnya pencairan dana untuk triwulan I, yang menyebabkan	koordinasi yang intensif dengan pihak Dinas Kebudayaan Provinsi																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																													kegiatan yang direncanakan akan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2023, baru bisa dimulai pada pertengahan bulan Februari 2023	Sumatera Barat, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal		
			Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau	kali	0		0		20		5		5		5		5		20		100,00		20		inf		BADAN PENGHUBUNG		kegiatan pertemuan dengan perantau yang awalnya direncanakan secara formal dan memerlukan biaya makan minum jamuan tamu, dirobah menjadi non formal yang tidak memerlukan biaya tersebut	pengumpulan data perantau dapat terlaksana sesuai perencanaan karena koordinasi yang baik dengan pihak IKM dan organisasi perantau lainnya		
			jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat	kali	0		0		25		5		5		10		5		25		100,00		25		inf		BADAN PENGHUBUNG		Pengurusan Izin dari Biro Adpim Kabupaten/kota terlambat			
3	5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	30	5.219.665.446	12	1.051.255.812	3	247.940.000	1	7.572.730	0	62.100.528	1	54.839.810	1	123.152.101	3	247.665.169	100,00	99,89	15	1.298.920.981	50,00	24,89	BADAN PENGHUBUNG					
			jenis sarana pendukung promosi yang disediakan	jenis	30		7		3		0		1		2		0		3		100,00		10		33,33		BADAN PENGHUBUNG		Koordinasi internal dan eksternal dalam menyiapkan kegiatan baik masalah persiapan Pelaksanaan kegiatan di Anjungan Sumatera Barat untuk Melakukan pertemuan, pagelaran seni Budaya di Anjungan Sumatera Barat TMIl	Banyaknya animo dan motivasi dari organisasi masyarakat perantau Sumatera Barat untuk Melakukan pertemuan, pagelaran seni Budaya di Anjungan Sumatera Barat TMIl		
			jumlah promosi yang dilakukan	kali	0		0		3		0		1		2		0		3		100,00		3		inf		BADAN PENGHUBUNG					
4	5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	6	2.570.111.387	2	101.495.958	0	423.968.000	0	1.678.500	0	47.238.628	0	136.259.880	0	392.883.411	0	578.060.419	nan	136,35	2	679.556.377	33,33	26,44	BADAN PENGHUBUNG					
			jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan	kali	6		1		3		0		0		0		3		3		100,00		4		66,67		BADAN PENGHUBUNG		Koordinasi internal dan eksternal dalam menyiapkan perencanaan kegiatan baik masalah anggaran maupun persiapan tempat dan	Tingginya Motivasi dari organisasi masyarakat perantau Sumatera Barat untuk Melakukan Pameran Produk Unggulan dan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																														persetujuan pimpinan di sesuaikan dengan jadwal kegiatan lingkungan	Pelestarian Seni Budaya	
5	5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah papan bunga yang disediakan	buah	360	8.214.904.732	144	3.242.965.504	60	1.699.405.956	15	208.096.951	15	428.805.611	15	548.248.587	15	1.277.065.849	60	2.462.216.998	100,00	144,89	204	5.705.182.502	56,67	69,45	BADAN PENGHUBUNG					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	60		24		0		0		0		0		0		0			nan		24		40,00		BADAN PENGHUBUNG				
			jumlah aktivitas pemerintah provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan	kali	72		12		25		5		5		8		7		25			100,00		37		51,39		BADAN PENGHUBUNG		Pelaksanaan kegiatan di sesuaikan dengan jadwal kegiatan pimpinan ke Jakarta dan Luar Provinsi Sumatera Barat	Adanya sharing informasi ke Biro Administrasi Pimpinan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi lainnya	
			jumlah aktivitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani	kali	1615		0		250		60		70		60		60		250			100,00		250		15,48		BADAN PENGHUBUNG		Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan kegiatan Pimpinan di Jakarta dan di Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat	Adanya Shairing informasi dengan Biro Administrasi Pimpinan dan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lainnya	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	37,25							
Predikat Kinerja																								-	SR							

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I		II		III		IV																																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				58.041.515.275		5.912.104.037		4.293.468.669		1.030.715.668		1.303.089.192		823.422.167		1.306.607.163		4.463.834.190		103,97		10.375.938.227		17,88																											
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.754.170.870		1.303.503.949		1.579.796.161		132.423.951		583.217.162		391.475.279		339.611.319		1.446.727.711		91,58		2.750.231.660		18,64																											
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				14.754.170.870		1.303.503.949		1.579.796.161		132.423.951		583.217.162		391.475.279		339.611.319		1.446.727.711		91,58		2.750.231.660		18,64																											
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.754.170.870		1.303.503.949	0	1.579.796.161		132.423.951		583.217.162	75	391.475.279		339.611.319	75	1.446.727.711	inf	91,58	75	2.750.231.660	inf	18,64																											
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	957.297.700	0	46.284.250	85	68.743.200	0	5.722.000	0	32.324.300	75	12.490.000	0	21.427.000	75	71.963.300	88,24	104,68	75	118.247.550	inf	12,35																											
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	310.835.000	3	32.243.500	3	36.925.000	1	3.980.000	50	20.955.300	1	2.386.000	0	8.358.000	52	35.679.300	1.733,33	96,63	55	67.922.800	305,56	21,85	Biro Pemerintahan dan Otda																										
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	12	195.000.000	0	0	0	7.677.000	1	0	0	4.634.000	1	0	0	2.990.000	2	7.624.000	inf	99,31	2	7.624.000	16,67	3,91	Biro Pemerintahan dan Otda																										
			Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	6		2		3		1		1		1		0		3		100,00		5		83,33	Biro Pemerintahan dan Otda																											
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	18	231.462.700	3	14.040.750	3	16.278.600	3	1.742.000	0	4.575.000	3	7.800.000	0	6.815.000	6	20.932.000	200,00	128,59	9	34.972.750	50,00	15,11	Biro Pemerintahan dan Otda																										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18		3		0		3		0		3		0		6		inf		9		50,00	Biro Pemerintahan dan Otda																											
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	18	220.000.000	0	0	3	7.862.600	3	0	0	2.160.000	0	2.304.000	0	3.264.000	3	7.728.000	100,00	98,29	3	7.728.000	16,67	3,51	Biro Pemerintahan dan Otda																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									87,04	11,10																											
Predikat Kinerja																									T	SR																											
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	1.645.288.400	0	77.183.000	0	109.167.000	0	5.388.400	0	24.000.000	0	17.125.000	0	35.557.500	0	82.070.900	nan	75,18	0	159.253.900	nan	9,68																											
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	60	1.078.094.500	10	65.625.000	7	81.803.000	0	0	0	22.260.000	0	10.455.000	10	22.360.000	10	55.075.000	142,86	67,33	20	120.700.000	33,33	11,20	Biro Pemerintahan dan Otda																										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	Biro Pemerintahan dan Otda																											
6	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	6	355.000.000	1	11.558.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	11.558.000	16,67	3,26	Biro Pemerintahan dan Otda																											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Keuangan Akhir Tahun SKPD																												
7	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	108	212.193.900	0	0	13	27.364.000	1	5.388.400	1	1.740.000	8	6.670.000	0	13.197.500	10	26.995.900	76,92	98,65	10	26.995.900	9,26	12,72	Biro Pemerintahan dan Otda			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	3,88					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	1.504.277.100	0	39.864.790	0	37.458.000	0	0	0	0	0	3.048.000	0	0	0	3.048.000	nan	8,14	0	42.912.790	nan	2,85				
8	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	6	220.000.000	1	10.822.500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	10.822.500	16,67	4,92	Biro Pemerintahan dan Otda			
9	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	18	973.300.000	3	16.275.690	3	23.300.000	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100,00	0,00	6	16.275.690	33,33	1,67	Biro Pemerintahan dan Otda			
10	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	6	310.977.100	1	12.766.600	3	14.158.000	0	0	0	0	1	3.048.000	0	0	1	3.048.000	33,33	21,53	2	15.814.600	33,33	5,09	Biro Pemerintahan dan Otda			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								6,41	1,17					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	647.174.950	0	49.923.700	0	34.537.500	0	8.535.000	0	3.670.000	0	14.240.000	0	2.410.000	0	28.855.000	nan	83,55	0	78.778.700	nan	12,17				
11	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel	80	245.000.000	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	Biro Pemerintahan dan Otda			
12	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimtek	Orang	40	402.174.950	15	49.923.700	15	34.537.500	3	8.535.000	3	3.670.000	3	14.240.000	6	2.410.000	15	28.855.000	100,00	83,55	30	78.778.700	75,00	19,59	Biro Pemerintahan dan Otda			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40		15	0	0	0	0	0	0	0	15		15			inf		30		75,00		Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								9,38	1,63					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	6.565.543.840	0	724.796.500	0	1.076.253.893	0	101.384.568	0	465.037.373	0	307.837.673	0	164.245.802	0	1.038.505.416	nan	96,49	0	1.763.301.916	nan	26,86				
13	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit	72	408.243.400	12	53.065.600	1000	148.751.100	0	340.000	0	89.462.100	6	3.840.000	6	54.235.000	12	147.877.100	1,20	99,41	24	200.942.700	33,33	49,22	Biro Pemerintahan dan Otda			
			Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	Kali	600		100	50	10		40		40		10		100		200,00		200			33,33		Biro Pemerintahan dan Otda				
14	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Unit	1200	434.472.000	200	37.922.000	400	53.526.000	0	0	0	43.211.000	100	0	100	9.000.000	200	52.211.000	50,00	97,54	400	90.133.000	33,33	20,75	Biro Pemerintahan dan Otda			
15	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Set	180	87.280.000	30	11.900.000	7	8.520.000	7	2.130.000	7	1.420.000	7	2.130.000	9	2.130.000	30	7.810.000	428,57	91,67	60	19.710.000	33,33	22,58	Biro Pemerintahan dan Otda			
16	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300	5.635.548.440	50	621.908.900	45	865.456.793	10	98.914.568	12	330.944.273	18	301.867.673	10	98.880.802	50	830.607.316	111,11	95,97	100	1.452.516.216	33,33	25,77	Biro Pemerintahan dan Otda			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
17	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia	Jumlah	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	1.750.000.000	0	158.170.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	158.170.500	nan	9,04					
18	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer, ladtop, printer, televisi dan kulkas yang disediakan	Unit	30	1.750.000.000	6	158.170.500	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	6	158.170.500	20,00	9,04	Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,87	0,50						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	586.101.200	0	77.805.493	0	89.556.568	0	5.398.983	0	34.946.989	0	18.550.606	0	27.005.217	0	85.901.795	nan	95,92	0	163.707.288	nan	27,93					
19	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Surat	12000	60.000.000	2000	4.425.000	600	9.200.000	60	4.000.000	120	0	1000	0	500	2.700.000	1680	6.700.000	280,00	72,83	3680	11.125.000	30,67	18,54	Biro Pemerintahan dan Otda				
20	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps	12	132.823.200	2	5.455.185	20	6.888.000	3	1.398.983	3	1.321.459	0	1.356.148	0	1.379.273	6	5.455.863	30,00	79,21	8	10.911.048	66,67	8,21	Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Rekening	12		2		2		2		2		0		0		4		200,00		6		50,00		Biro Pemerintahan dan Otda				
21	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	2	393.278.000	2	67.925.308	2	73.468.568	2	0	2	33.625.530	2	17.194.458	2	22.925.944	8	73.745.932	400,00	100,38	10	141.671.240	500,00	36,02	Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								23,98	2,99						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.098.487.680	0	129.475.716	0	164.080.000	0	5.995.000	0	23.238.500	0	18.184.000	0	88.965.800	0	136.383.300	nan	83,12	0	265.859.016	nan	24,20					
22	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara	Unit	6	343.196.680	1	40.198.295	1	41.190.000	0	0	0	12.981.000	0	10.850.000	1	15.468.800	1	39.299.800	100,00	95,41	2	79.498.095	33,33	23,16	Biro Pemerintahan dan Otda				
23	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	12	467.511.000	2	73.875.421	2	76.230.000	0	0	0	7.414.500	0	1.145.000	1	64.177.000	1	72.736.500	50,00	95,42	3	146.611.921	25,00	31,36	Biro Pemerintahan dan Otda				
24	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	80	287.780.000	54	15.402.000	52	46.660.000	5	5.995.000	7	2.843.000	10	6.189.000	30	9.320.000	52	24.347.000	100,00	52,18	106	39.749.000	132,50	13,81	Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								6,36	2,85						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				43.287.344.405		4.608.600.088		2.713.672.508		898.291.717		719.872.030		431.946.888		966.995.844		3.017.106.479		111,18		7.625.706.567		17,62					
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				43.287.344.405		4.608.600.088		2.713.672.508		898.291.717		719.872.030		431.946.888		966.995.844		3.017.106.479		111,18		7.625.706.567		17,62					
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				43.287.344.405		4.608.600.088	0	2.713.672.508		898.291.717		719.872.030		431.946.888		966.995.844	0	3.017.106.479	nan	111,18	0	7.625.706.567	nan	17,62					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
											I		II		III		IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			0	16.101.620.708	0	1.047.550.631	0	533.692.996	0	83.920.900	0	70.795.000	0	144.124.288	0	175.923.700	0	474.763.888	nan	88,96	0	1.522.314.519	nan	9,45																						
1	4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Camat Terbaik Hasil Pelaksanaan Kompetensi	Orang	19	1.623.658.800	6	4.900.600	6	213.450.186	0	3.840.000	0	0	0	38.570.000	6	160.320.100	6	202.730.100	100,00	94,98	12	207.630.700	63,16	12,79	Biro Pemerintahan dan Otda																					
			Jumlah Lurah terbaik hasil pelaksanaan kompetensi	Orang	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	33,33	1	0	inf	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																						
			Jumlah Rapat Koordinasi Antara Pemprov dengan PemKab/kota dan Camat se Sumatera Barat	Kali	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	100,00	1	0	16,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																						
			Jumlah Rapat Sosialisasi Bagi Aparat Pembina Kecamatan, Nagari/desa/Kelurahan	Kali	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	100,00	1	0	16,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																						
			Jumlah rumusan kebijakan tata kelola administrasi pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	100,00	1	0	16,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																						
2	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Tugas Pembantuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah	Kegiatan	6	1.765.540.300	2	381.655.190	1	218.551.192	0	60.625.000	0	48.620.000	1	65.625.250	1	5.175.000	2	180.045.250	200,00	82,38	4	561.700.440	66,67	31,81	Biro Pemerintahan dan Otda																					
3	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam penyusunan toponimnya.	Kab/Kota	114	12.712.421.608	38	660.994.841	5	101.691.618	0	19.455.900	0	22.175.000	19	39.929.038	19	10.428.600	38	91.988.538	760,00	90,46	76	752.983.379	66,67	5,92	Biro Pemerintahan dan Otda																					
			Jumlah Kab/Kota yang dibina penegasan batas desa/nagari/kelurahannya	Kab/Kota	114	0	38	5	0	0	0	0	19	0	19	0	38	0	760,00	76	0	66,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																							
			Jumlah penataan Wilayah yang difasilitasi	Dokumen	6	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	200,00	4	0	66,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																								
			Jumlah usulan penegasan batas antar Kab/kota yang disampaikan ke Kementerian Dalam negeri	Dokumen	9	0	9	3	0	0	0	0	2	0	7	9	0	300,00	18	0	200,00	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	16,84																							
Predikat Kinerja																								-	SR																							
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			0	23.476.345.317	0	1.062.987.062	0	726.520.400	0	134.349.921	0	90.659.400	0	250.109.000	0	174.875.687	0	649.994.008	nan	89,47	0	1.712.981.070	nan	7,30																						
4	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah administrasi DPRD yang difasilitasi	Dokumen	240	5.619.034.600	89	242.320.029	5	156.998.000	0	0	33	15.219.400	33	17.873.400	23	12.475.000	89	45.567.800	1.780,00	29,02	178	287.887.829	74,17	5,12	Biro Pemerintahan dan Otda																					
			Jumlah administrasi Kepala Daerah yang difasilitasi	Dokumen	258	0	123	6	0	0	41	0	41	41	123	0	2.050,00	246	0	95,35	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																									
			Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	24	0	6	2	0	0	2	0	3	1	6	0	300,00	12	0	50,00	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																									
5	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Kab/Kota yang dibina penyelenggaraan urusan pemerintahannya	Kab/Kota	114	7.481.813.550	19	253.525.397	19	225.514.400	0	37.785.721	0	39.538.750	19	41.158.400	0	152.530.810	19	271.013.681	100,00	120,18	38	524.539.078	33,33	7,01	Biro Pemerintahan dan Otda																					
			Jumlah laporan SPM Provinsi dan Kab/Kota	Laporan	6	0	2	1	1	0	0	1	0	2	0	200,00	4	0	66,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																										
			Jumlah peringatan hari jadi provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan	Kali	6	0	2	1	0	0	0	1	1	2	0	200,00	4	0	66,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																										
			Jumlah peringatan hari otonomi daerah yang dilaksanakan	Kali	6	0	2	1	0	0	1	1	1	0	2	0	200,00	4	0	66,67	0	0	Biro Pemerintahan dan Otda																									
6	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Bimtek LKPJ yang dilaksanakan.	Kegiatan	6	10.375.497.167	0	567.141.636	1	344.008.000	0	96.564.200	0	35.901.250	0	191.077.200	0	9.869.877	0	333.412.527	0,00	96,92	0	900.554.163	0,00	8,68	Biro Pemerintahan dan Otda																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Bimtek LPPD yang dilaksanakan.	Kegiatan	6		0		1		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah EPPD Kab/Kota yang dilaksanakan	Kab/Kota	114		38		19		0		0		19		19		38		200,00		76		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah LKPJ Gubernur yang disusun	Laporan	6		2		1		1		0		1		0		2		200,00		4		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah LPPD Kab/Kota yang dibina.	Kab/Kota	114		38		19		0		0		19		19		38		200,00		76		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah LPPD Provinsi yang disusun.	Laporan	6		2		1		1		0		1		0		2		200,00		4		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah peta kapasitas pemerintahan daerah Kab/Kota yang difasilitasi	Kab/Kota	114		0		4		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		0,00		Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											29,98	3,47					
Predikat Kinerja																											SR	SR					
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah			0	3.709.378.380	0	2.498.062.395	0	1.453.459.112	0	680.020.896	0	558.417.630	0	37.713.600	0	616.196.457	0	1.892.348.583	nan	130,20	0	4.390.410.978	nan	118,36							
7	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah izin perjalanan dinas luar negeri KDH/WKDH, DPRD dan ASN yang difasilitasi	Dokumen	6	414.962.150	2	428.936.054	1	1.246.222.112	2	648.532.586	1	525.801.080	0	5.160.000	0	547.352.607	3	1.726.846.273	300,00	138,57	5	2.155.782.327	83,33	519,51		Biro Pemerintahan dan Otda					
			Jumlah kerjasama pemerintah yang difasilitasi	Dokumen	6		2		1		0		0		1		1		2		200,00		4		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah kerjasama wajib yang difasilitasi	Dokumen	6		2		1		0		0		1		1		2		200,00		4		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
			Jumlah rapat koordinasi kerjasama daerah yang dilaksanakan	Kali	6		2		1		0		0		1		1		2		200,00		4		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
8	4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi	Dokumen	6	2.982.939.110	2	1.871.881.932	1	125.132.000	0	23.358.910	0	20.372.050	1	14.240.800	1	35.762.700	2	93.734.460	200,00	74,91	4	1.965.616.392	66,67	65,90		Biro Pemerintahan dan Otda					
9	4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerjasama antar pemerintah, badan usaha/ swasta dan pihak ketiga dalam dan luar negeri yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen	6	311.477.120	2	197.244.409	1	82.105.000	0	8.129.400	0	12.244.500	1	18.312.800	1	33.081.150	2	71.767.850	200,00	87,41	4	269.012.259	66,67	86,37		Biro Pemerintahan dan Otda					
			Jumlah Rencana induk kerjasama daerah.	Dokumen	6		2		0		1		0		1		0		2		inf		4		66,67		66,67		Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											15,59	74,64					
Predikat Kinerja																											SR	S					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				0	0	16.241.461.151	1.362.233.401	4.494.341.394	5.532.594.236	4.699.306.931	16.088.475.962		99,06	16.088.475.962		inf											
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0	0	16.241.461.151	1.362.233.401	4.494.341.394	5.532.594.236	4.699.306.931	16.088.475.962		99,06	16.088.475.962		inf											
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0	0	16.241.461.151	1.362.233.401	4.494.341.394	5.532.594.236	4.699.306.931	16.088.475.962		99,06	16.088.475.962		inf											
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%		0	0	100	16.241.461.151	1.362.233.401	4.494.341.394	5.532.594.236	4.699.306.931	0	16.088.475.962	0,00	99,06	0	16.088.475.962	nan	inf								
X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	0	0	0	85	181.547.560	0	71.676.400	0	17.213.000	0	49.000.600	0	44.882.250	0	182.772.250	nan	inf							
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		0	0	2	156.945.260	0	67.507.500	1	8.159.500	1	46.450.100	0	38.752.850	2	160.869.950	100,00	102,50	2	160.869.950	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		0	0	8	8.688.300	1	4.168.900	2	0	2	0	3	2.689.400	8	6.858.300	100,00	78,94	8	6.858.300	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		0	0	3	9.492.000	1	0	1	5.066.000	0	1.491.000	1	2.065.000	3	8.622.000	100,00	90,83	3	8.622.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen		0	0	4	6.422.000	0	0	2	3.987.500	0	1.059.500	2	1.375.000	4	6.422.000	100,00	100,00	4	6.422.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf							
Predikat Kinerja																					-	-							
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	0	0	0	100	118.209.700	0	16.507.000	0	21.442.500	0	23.955.900	0	37.889.500	0	99.794.900	0,00	84,42	0	99.794.900	nan	inf			
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang		0	0	5	94.685.700	0	13.635.000	2	17.402.500	1	20.135.900	2	30.257.500	5	81.430.900	100,00	86,00	5	81.430.900	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
6	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	100,00	nan	2	0	inf	nan	Biro Adm. Pimp			
7	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	1	0	inf	nan	Biro Adm. Pimp			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen		0		0	2	23.524.000	0	2.872.000	1	4.040.000	0	3.820.000	1	7.632.000	2	18.364.000	100,00	78,06	2	18.364.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	0	0	0	0	100	45.796.300	0	5.147.200	0	2.404.100	0	2.720.000	0	31.273.310	0	41.544.610	0,00	90,72	0	41.544.610	nan	inf				
9	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit		0		0	5	26.000.000	1	5.147.200	2	0	0	0	2	25.813.610	5	30.960.810	100,00	119,08	5	30.960.810	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
10	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honornya	orang		0		0	3	14.727.300	1	0	1	2.404.100	0	2.720.000	1	3.163.200	3	8.287.300	100,00	56,27	3	8.287.300	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
11	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen		0		0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	100,00	nan	2	0	inf	nan	Biro Adm. Pimp			
12	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	dokumen		0		0	1	5.069.000	0	0	1	0	0	0	0	2.296.500	1	2.296.500	100,00	45,30	1	2.296.500	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	nan				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	0	0	0	0	100	244.006.187	0	34.787.700	0	37.396.300	0	34.231.700	0	186.694.000	0	293.109.700	0,00	120,12	0	293.109.700	nan	inf				
13	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Usulan dan Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian yang diproses Tepat Waktu	SK		0		0	450	126.660.087	50	18.847.400	150	17.635.800	100	25.583.800	150	48.550.500	450	110.617.500	100,00	87,33	450	110.617.500	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
14	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	kali		0		0	4	117.346.100	1	15.940.300	1	19.760.500	1	8.647.900	1	138.143.500	4	182.492.200	100,00	155,52	4	182.492.200	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	1.942.180.828	0	224.510.916	0	697.828.892	0	570.248.347	0	347.462.146	0	1.840.050.301	0,00	94,74	0	1.840.050.301	nan	inf				
15	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit		0		0	10	49.357.000	0	0	18	49.357.000	0	0	3	0	21	49.357.000	210,00	100,00	21	49.357.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
16	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	unit		0		0	14	461.455.440	3	29.260.000	11	349.275.000	0	28.180.000	2	12.150.000	16	418.865.000	114,29	90,77	16	418.865.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
17	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis		0		0	3	39.903.920	0	2.440.000	1	3.925.000	1	12.838.100	1	20.308.900	3	39.512.000	100,00	99,02	3	39.512.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
18	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis		0		0	5	32.400.000	1	15.920.000	2	2.400.000	1	6.500.000	1	10.264.000	5	35.084.000	100,00	108,28	5	35.084.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
19	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	jenis		0		0	27	329.137.200	0	0	9	110.678.200	9	81.718.200	9	54.478.800	27	246.875.200	100,00	75,01	27	246.875.200	inf	inf	Biro Adm. Pimp			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
20	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen		0		0	40	1.029.927.268	10	176.890.916	10	182.193.692	10	441.012.047	10	250.260.446	40	1.050.357.101	100,00	101,98	40	1.050.357.101	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf									
Predikat Kinerja																				-	-									
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	100	311.143.270	0	0	0	93.690.000	0	234.510.000	0	37.838.000	0	366.038.000	0,00	117,64	0	366.038.000	nan	inf				
21	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit		0		0	26	79.383.400	0	0	0	0	26	67.710.000	0	15.141.000	26	82.851.000	100,00	104,37	26	82.851.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
22	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya baru	unit		0		0	10	231.759.870	0	0	5	93.690.000	0	166.800.000	5	22.697.000	10	283.187.000	100,00	122,19	10	283.187.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf									
Predikat Kinerja																				-	-									
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	0	0	0	100	1.409.374.180	0	218.976.582	0	408.621.251	0	318.030.384	0	213.173.632	0	1.158.801.849	0,00	82,22	0	1.158.801.849	nan	inf				
23	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0		0	400	18.000.000	100	4.381.250	100	3.806.500	100	3.818.000	100	3.572.500	400	15.578.250	100,00	86,55	400	15.578.250	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
24	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps		0		0	10	58.779.000	0	13.906.358	3	9.449.258	3	13.453.172	4	9.241.258	10	46.050.046	100,00	78,34	10	46.050.046	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening				1		0		1		0		0		1		100,00		1		inf		Biro Adm. Pimp				
25	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		0	35	1.332.595.180	9	200.688.974	9	395.365.493	9	300.759.212	8	200.359.874	35	1.097.173.553	100,00	82,33	35	1.097.173.553	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf									
Predikat Kinerja																				-	-									
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	0	0	0	0	100	248.250.000	0	52.171.000	0	16.353.500	0	112.645.350	0	70.857.250	0	252.027.100	0,00	101,52	0	252.027.100	nan	inf				
26	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	7	223.890.000	2	46.811.000	2	15.133.500	2	105.135.350	1	61.197.250	7	228.277.100	100,00	101,96	7	228.277.100	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
27	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit		0		0	35	24.360.000	8	5.360.000	8	1.220.000	5	7.510.000	14	9.660.000	35	23.750.000	100,00	97,50	35	23.750.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf									
Predikat Kinerja																				-	-									
	X.XX.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Optimalisasi Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	%	0	0	0	0	80	4.138.022.670	0	236.738.400	0	669.821.400	0	1.192.238.475	0	1.274.736.600	0	3.373.534.875	0,00	81,53	0	3.373.534.875	nan	inf				
28	X.XX.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	dokumen		0		0	295	399.745.510	73	40.935.400	75	27.525.000	73	102.273.200	74	113.996.000	295	284.729.600	100,00	71,23	295	284.729.600	inf	inf	Biro Adm. Pimp			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
29	X.XX.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Dokumen		0		0	102	2.747.888.380	25	123.625.500	28	428.580.000	25	890.823.975	22	960.922.000	100	2.403.951.475	98,04	87,48	100	2.403.951.475	inf	inf	Biro Adm. Pimp				
30	X.XX.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan yang tersusun	Dokumen		0		0	255	990.388.780	64	72.177.500	68	213.716.400	64	199.141.300	60	199.818.600	256	684.853.800	100,39	69,15	256	684.853.800	inf	inf	Biro Adm. Pimp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										inf	inf				
Predikat Kinerja																										-	-				
	X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keprotokolan yang difasilitasi dengan baik	%	0	0	0	0	100	7.602.930.456	0	501.718.203	0	2.529.570.451	0	2.995.013.480	0	2.454.500.243	0	8.480.802.377	0,00	111,55	0	8.480.802.377	nan	inf					
31	X.XX.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	laporan		0		0	24	869.543.300	6	92.386.884	6	102.852.200	6	262.391.200	6	543.760.900	24	1.001.391.184	100,00	115,16	24	1.001.391.184	inf	inf	Biro Adm. Pimp				
32	X.XX.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan		0		0	4	6.069.223.685	1	333.204.140	1	2.188.300.500	1	2.546.656.480	1	1.738.012.943	4	6.806.174.063	100,00	112,14	4	6.806.174.063	inf	inf	Biro Adm. Pimp				
33	X.XX.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan		0		0	24	664.163.471	6	76.127.179	6	238.417.751	6	185.965.800	6	172.726.400	24	673.237.130	100,00	101,37	24	673.237.130	inf	inf	Biro Adm. Pimp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										inf	inf				
Predikat Kinerja																										-	-				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0	nan						
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0	nan						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		BIRO HUKUM			0	0	2.537.361.996	253.166.868	432.837.441	662.106.206	639.340.274	1.987.450.789	78,33	1.987.450.789	inf									
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	1.582.272.553	187.774.218	278.361.072	462.788.168	391.692.918	1.320.616.376	83,46	1.320.616.376	inf									
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			0	0	1.582.272.553	187.774.218	278.361.072	462.788.168	391.692.918	1.320.616.376	83,46	1.320.616.376	inf									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	0 1.582.272.553	187.774.218	278.361.072	462.788.168	391.692.918	0 1.320.616.376	nan 83,46	0 1.320.616.376	nan inf									
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	%	0	0	0 0 100	58.461.328	0 11.537.500	0 10.073.384	0 14.320.750	0 1.625.500	0 37.557.134	0,00 64,24	0 37.557.134	nan inf								
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	2 30.793.750	0 11.537.500	0 202.000	2 9.455.750	0 863.000	2 22.058.250	100,00 71,63	2 22.058.250	inf inf	ROHUKUM								
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen			6	0	0	5	1	6	100,00	6	inf	ROHUKUM								
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA- SKPD dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD) yang disusun	Dokumen	0	0	4 0 4	0 0	0 0	0 0	0 4	0 100,00	nan 4	0 inf	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini telah dialihkan ke sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahapan penganggaran tahun 2023							
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi/Reviu Perencanaan- Penganggaran yang disusun	Laporan	0	0	9 27.667.578	0 0	0 9.871.384	7 4.865.000	2 762.500	9 15.498.884	100,00 56,02	9 15.498.884	inf inf	ROHUKUM								
			Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen			6	0	0	5	1	6	100,00	6	inf	ROHUKUM								
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	0	0	9 0 1	0 0	0 0	0 0	0 1	0 11,11	nan 1	0 inf	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini telah dialihkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahapan penganggaran tahun 2023							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		inf	nan												
Predikat Kinerja																		-	-												
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	%	0	0	0	0	100	60.699.000	0	315.000	0	22.725.000	0	18.307.000	0	13.234.000	0	54.581.000	0,00	89,92	0	54.581.000	nan	inf					
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	5	54.540.000	0		0	5	22.725.000	0	18.180.000	0	13.125.000	5	54.030.000	100,00	99,06	5	54.030.000	inf	inf	ROHUKUM			Anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai (honorarium pengeloa keuangan dan pejabat pengadaan barjas belum direalisasikan, menunggu kepastian boleh tidaknya dibayarkan, karena telah diusulkan pada komponen TPP yang baru. Pengelola keuangan daerah telah dibayarkan sd. TW II, tetapi pejabat pengadaan masih ditunda
6	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen		0		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM			Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini telah dialihkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD pada tahapan penganggaran tahun 2023
7	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diiapkan	Dokumen		0		0	12		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM			Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini telah dialihkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD pada tahapan penganggaran tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disiapkan	Dokumen		0		0	1	6.159.000	0	315.000	0		0	0	127.000	1	109.000	1	551.000	100,00	8,95	1	551.000	inf	inf	ROHUKUM				
			Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen					17		3		3		7		4		17		100,00		17		inf		ROHUKUM	-		Telah dilaksanakan sesuai anggaran kas		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	%	0	0	0	0	100	16.270.000	0	206.000	0		0	0	464.000	0	10.041.610	0	10.711.610	0,00	65,84	0	10.711.610	nan	inf					
9	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen		0		0	5		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran sub kegiatan ini dirasionalisasi dan target kinerja dialihkan ke sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD di tahapan penganggaran tahun 2023			
10	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diaturansikan	Unit		0		0	3	15.600.000	0		0	0		0	2	10.041.610	2	10.041.610	66,67	64,37	2	10.041.610	inf	inf	ROHUKUM	Alokasi anggaran pada TW 4				
11	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan homonya	Orang		0		0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran sub kegiatan ini dirasionalisasi dan target kinerja dialihkan ke sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD di tahapan penganggaran tahun 2023			
12	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen		0		0	2		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran sub kegiatan ini dirasionalisasi dan target kinerja dialihkan ke sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD di tahapan penganggaran tahun 2023			
13	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		0		0	4	670.000	0	206.000	0		0	4	464.000	0		0	4	670.000	100,00	100,00	4	670.000	inf	inf	ROHUKUM			
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Dokumen					2		1		0		1		0		2		100,00		2		inf		ROHUKUM	-		Telah dilaksanakan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)		(17)	(18)	(19)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							sesuai anggaran kas				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan											
Predikat Kinerja																					-	-											
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	%	0	0	0	0	100	154.912.407	0	14.471.020	0	14.650.000	0	50.396.200	0	4.005.472	0	83.522.692	0,00	53,92	0	83.522.692	nan	inf							
14	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dan dikelola	Dokumen		0		0	10		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini dirasionalisasi pada tahapan penganggaran tahun 2023				
15	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali		0		0	4	58.031.200	0		0	0		0	1	8.114.200	0		0	1	8.114.200	25,00	13,98	1	8.114.200	inf	inf	ROHUKUM	Alokasi anggaran pada TW 2 dan 3		
16	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	5	96.881.207	3	14.471.020	0	14.650.000	7	42.282.000	3	4.005.472	13	75.408.492	260,00	77,84	13	75.408.492	inf	inf	ROHUKUM		Pelaksanaan anggaran telah direncanakan mulai TW I, sehingga dapat mendukung persiapan pelaksanaan kegiatan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan											
Predikat Kinerja																					-	-											
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	%	0	0	0	0	100	1.037.239.858	0	155.630.226	0	194.879.581	0	302.285.565	0	290.404.650	0	943.200.022	0,00	90,93	0	943.200.022	nan	inf							
17	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit		0		0	13	67.964.950	0		0	6	8.780.000	0		0	6	8.780.000	46,15	12,92	6	8.780.000	inf	inf	ROHUKUM						
18	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit		0		0	5		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahapan penganggaran tahun 2023				
19	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis		0		0	2	80.678.500	1	43.435.000	1	17.920.200	0	9.278.700	0	2.685.000	2	73.318.900	100,00	90,88	2	73.318.900	inf	inf	ROHUKUM		Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai anggaran kas yang telah direncanakan	SDM pelaksana yang kompeten			
20	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis		0		0	10	48.097.000	3	8.310.000	2	7.303.000	2	17.992.000	3	9.987.250	10	43.592.250	100,00	90,63	10	43.592.250	inf	inf	ROHUKUM		Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai	SDM pelaksana yang kompeten			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																													anggaran kas yang telah direncanakan		
21	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Jenis		0		0	3	20.700.000	1	1.695.000	2	6.780.000	0	5.085.000	0	6.780.000	3	20.340.000	100,00	98,26	3	20.340.000	inf	inf	ROHUKUM		Penyesuaian beberapa harga surat kabar dan majalah	Penyedia yang menyediakan barang secara on time	
22	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Orang		0		0	100		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada tahapan penganggaran tahun 2023		
23	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen		0		0	24	819.799.408	10	102.190.226	1	154.096.381	9	269.929.865	4	270.952.400	24	797.168.872	100,00	97,24	24	797.168.872	inf	inf	ROHUKUM				
24	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Dokumen		0		0	12		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada tahapan penganggaran tahun 2023		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	%	0	0	0	0	100	156.639.960	0		0	0	29.285.000	0	47.475.000	0	55.890.000	0	132.650.000	0,00	84,68	0	132.650.000	nan	inf				
25	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Unit		0		0	15	156.639.960	0		0	5	29.285.000	8	47.475.000	7	55.890.000	20	132.650.000	133,33	84,68	20	132.650.000	inf	inf	ROHUKUM	Pengadaan belanja modal melalui e- purchasing, dan beberapa item dalam paket pengadaan masih indent	Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pejabat pengadaan barjas di Biro PBJ	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	%	0	0	0	0	100	3.600.000	0	1.089.872	0	269.058	0	691.744	0	794.686	0	2.845.360	0,00	79,04	0	2.845.360	nan	inf					
26	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0		0	1000	3.000.000	868	1.000.000	185	128.000	1218	512.000	1000	756.000	3271	2.396.000	327,10	79,87	3271	2.396.000	inf	inf	ROHUKUM	Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai anggaran kas yang telah direncanakan	SDM pelaksana yang kompeten		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
27	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening		0		0	1	600.000	1	89.872	0	141.058	0	179.744	0	38.686	1	449.360	100,00	74,89	1	449.360	inf	inf	ROHUKUM		Penggunaan telepon kantor tidak optimal, dikarenakan sering terjadinya kerusakan jaringan	Penggunaan telepon seluler lebih efektif dan teknologi yang lebih modern menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan	
28	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit		0		0	10		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada tahapan penganggaran tahun 2023		
29	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		0	5		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada tahapan penganggaran tahun 2023		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	%	0	0	0	0	100	94.450.000	0	4.524.600	0	6.479.049	0	28.847.909	0	15.697.000	0	55.548.558	0,00	58,81	0	55.548.558	nan	inf					
30	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	1		0	1		0	0		0	0		0	100,00	nan	1		0	inf	nan	ROHUKUM	Alokasi anggaran dan target kinerja sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahapan penganggaran tahun 2023		
31	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit		0		0	8	85.290.000	3	4.524.600	3	5.789.049	1	26.569.909	1	13.200.000	8	50.083.558	100,00	58,72	8	50.083.558	inf	inf	ROHUKUM		Alokasi anggaran kas yang tersedia pada TW I tidak mencukupi pendanaan terhadap kendaraan	Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan masa pemeliharaan kendaraan yang harus dilakukan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					I	II	III	IV	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																												yang telah dilakukan pemeliharaan berkalanya		
32	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		0	0	20	9.160.000	0	0	1	690.000	10	2.278.000	3	2.497.000	14	5.465.000	70,00	59,66	14	5.465.000	inf	inf	ROHUKUM			Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai anggaran kas yang telah direncanakan	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				0	0		955.089.443	65.392.650	154.476.369	199.318.038	247.647.356	666.834.413	69,82	666.834.413	inf													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				0	0		955.089.443	65.392.650	154.476.369	199.318.038	247.647.356	666.834.413	69,82	666.834.413	inf													
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				0	0	0	955.089.443	65.392.650	154.476.369	199.318.038	247.647.356	0	666.834.413	nan	69,82	0	666.834.413	nan	inf									
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	%	0	0	0	0	100	527.065.299	0	33.245.800	0	76.956.269	0	152.254.438	0	78.658.988	0	341.115.495	0,00	64,72	0	341.115.495	nan	inf				
1	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Perda Provinsi	Perda		0	0	10	200.030.800	0	14.422.800	2	32.608.319	4	55.947.600	32	43.115.838	38	146.094.557	380,00	73,04	38	146.094.557	inf	inf	ROHUKUM			Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai anggaran kas yang telah direncanakan. Fasilitasi produk hukum oleh Kemendagri dan Kanwil Hukum HAM membutuhkan waktu.	SDM yang kompeten dan koordinasi dengan instansi terkait
			Jumlah Pergub Provinsi	Pergub				40		10		5		12		15		42		105,00		42		inf	ROHUKUM					
2	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan	Kepgub		0	0	750	14.158.300	320	848.600	85	987.500	275	2.147.000	120	6.053.300	800	10.036.400	106,67	70,89	800	10.036.400	inf	inf	ROHUKUM			Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai anggaran kas yang telah direncanakan	SDM yang kompeten dan koordinasi dengan instansi terkait
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan	ROHUKUM					
			Persentase Rancangan Keputusan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya	%				100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan	ROHUKUM					
3	4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan Melalui Buku	Buku		0	0	160	90.572.099	0	0	0	4.724.850	80	24.489.150	0	8.939.500	80	38.153.500	50,00	42,13	80	38.153.500	inf	inf	ROHUKUM	Pelaksanaan kegiatan dialokasikan pada TW 3 dan 4	Beberapa kegiatan masih belum sesuai	SDM yang kompeten dan koordinasi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																											anggaran kas yang telah direncanakan	dengan instansi terkait
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan Melalui Situs JDIH	Produk Hukum			50		0		0		10		70		80		160,00		80		inf		ROHUKUM			
4	4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	PHD Kab/Kota	0	0	80	222.304.100	27	17.974.400	0	38.635.600	30	69.670.688	25	20.550.350	82	146.831.038	102,50	66,05	82	146.831.038	inf	inf	ROHUKUM		Waktu pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai anggaran kas yang telah direncanakan. Fasilitasi produk hukum oleh Kemendagri dan Kanwil Hukum HAM membutuhkan waktu.	SDM yang kompeten dan koordinasi dengan instansi terkait
			Persentase Produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	%			100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		ROHUKUM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf			
Predikat Kinerja																								-	-			
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	%	0	0	0	0	100	428.024.144	0	32.146.850	0	77.520.100	0	47.063.600	0	168.988.368	0	325.718.918	0,00	76,10	0	325.718.918	nan	inf		
5	4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	Perkara		0	0	10	326.138.668	11	20.664.800	0	35.560.900	0	27.960.600	4	139.732.368	15	223.918.668	150,00	68,66	15	223.918.668	inf	inf	ROHUKUM		
6	4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum	Perkara		0	0	8	101.885.476	0	11.482.050	2	41.959.200	3	19.103.000	3	29.256.000	8	101.800.250	100,00	99,92	8	101.800.250	inf	inf	ROHUKUM		
			Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM	Kab/Kota			19		0		0		19		0		19		100,00		19		inf		ROHUKUM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf			
Predikat Kinerja																								-	-			

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																										
									I	II	III	IV																																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp																				
		BIRO PEREKONOMIAN				39.558.552.650		2.718.344.378		2.288.731.059		213.138.042		421.523.492		617.481.102		409.952.977		1.662.095.613		72,62		4.380.439.991		11,07																									
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.041.000.000		675.327.589		1.065.372.519		86.670.960		191.589.828		339.386.251		226.887.552		844.534.591		79,27		1.519.862.180		11,65																									
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				13.041.000.000		675.327.589		1.065.372.519		86.670.960		191.589.828		339.386.251		226.887.552		844.534.591		79,27		1.519.862.180		11,65																									
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		13.041.000.000		675.327.589	100	1.065.372.519	25	86.670.960	25	191.589.828	25	339.386.251	25	226.887.552	100	844.534.591	100,00	79,27	100	1.519.862.180	inf	11,65																									
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	560.000.000	0	14.942.900	85	25.103.000	20	4.400.000	20	3.870.000	20	1.400.000	25	6.505.300	85	16.175.300	100,00	64,44	85	31.118.200	inf	5,56																									
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	280.000.000		12.630.000	0	16.142.900	0	4.400.000	0	1.870.000	1	0	1	3.792.000	2	10.062.000	inf	62,33	2	22.692.000	20,00	8,10	ROPEREK		belum ada		dukungan dari pimpinan dan pelaksana kegiatan perencanaan																				
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	10		6		2	0		0		1		1		2		100,00		8		80,00		ROPEREK		belum ada																							
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Mumi, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan SKPD yang disusun	dokumen		0		0	3	4.602.900	1	0	0	0	1	1.400.000	1	1.873.300	3	3.273.300	100,00	71,11	3	3.273.300	inf	inf	ROPEREK																								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0		nan		ROPEREK																										
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ yang disusun	dokumen	1	0		0	3	2.302.300	3	0	0	1.015.000	0	0	0	420.000	3	1.435.000	100,00	62,33	3	1.435.000	300,00	inf	ROPEREK																								
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	280.000.000	10	2.312.900	0	2.054.900	1	0	2	985.000	1	0	1	420.000	5	1.405.000	inf	68,37	15	3.717.900	50,00	1,33	ROPEREK																								
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	30		3		5		1		2		1		1		5		100,00		8		26,67		ROPEREK		belim ada		dukungan dari pimpinan dan kerjaasama tim yang solid																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	2.000.000.000	0	70.715.500	0	67.899.700	0	0	0	22.212.500	0	1.657.000	0	38.488.000	0	62.357.500	nan	91,84	0	133.073.000	nan	6,65																									
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	30	490.000.000	10	64.732.500	0	65.909.200	0	0	10	22.212.500	0	0	10	37.007.500	20	59.220.000	inf	89,85	30	123.952.500	100,00	25,30	ROPEREK																								
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	30		7		6	0		0		0	0	0		0	0	0,00		7		23,33		ROPEREK		belum tersedianya honor BPP		anggaran yang cukup memeadaai																					
6	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0		3.651.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	3.651.000	nan	inf	ROPEREK		sub kegiatan tidak jadi diambil																							
			Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	0		1		1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100,00		2		inf		ROPEREK	tidak diambil, belum menjadi prioritas PD																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
7	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	ROPEREK				
			Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100,00	1	inf	ROPEREK	tidak diambil, belum menjadi prioritas PD												
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	1.510.000.000	26	2.332.000	0	1.990.500	3	0	3	0	4	1.657.000	3	1.480.500	13	3.137.500	inf	157,62	39	5.469.500	60,00	0,36	ROPEREK				
			Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	65	13	13	3	3	4	3	13	100,00	26	40,00	ROPEREK	keterlambatan administrasi keuangan	dukungan dari pimpinan dan kerjasama tim yang solid													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	335.000.000	0	2.737.000	0	13.437.200	0	0	0	460.000	0	740.000	0	5.179.080	0	6.379.080	nan	47,47	0	9.116.080	nan	2,72					
9	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	ROPEREK	tidak diambil, belum menjadi prioritas PD			
			Jumlah Dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Penghitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	ROPEREK	tidak diambil, belum menjadi prioritas PD										
10	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	12.800.000	0	0	0	0	600.000	0	5.179.080	0	5.779.080	nan	45,15	0	5.779.080	nan	inf	ROPEREK						
			Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	10	4	2	0	0	0	1	1	50,00	5	50,00	ROPEREK															
11	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD Milik SKPD yang dibayarkan honoranya	Orang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	ROPEREK	tidak diambil, belum menjadi prioritas PD							
12	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	15	335.000.000	3	2.737.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	3	2.737.000	20,00	0,82	ROPEREK	tidak diambil, belum menjadi prioritas PD						
13	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Dokumen	5	0	2	0	1	637.200	0	0	0	460.000	0	140.000	1	0	1	600.000	100,00	94,16	3	600.000	60,00	inf	ROPEREK	belum ada	jumlah aset yang tidak terlalu banyak		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	1.600.000.000	0	14.315.000	0	33.220.600	0	0	0	10.360.000	0	14.489.000	0	0	0	24.849.000	nan	74,80	0	39.164.000	nan	2,45					
14	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Orang		0	0	0	1	869.400	0	0	1	270.000	0	0	0	1	270.000	100,00	31,06	1	270.000	inf	inf	ROPEREK	pensiunya pengelola ADM kepegawaian pada bula maret 2023	jumlah pegawai hanya 30 orang			
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, evaluasi jabatan dll)	Dokumen		0	1	0	1	0	1	0	1	100,00	1	inf	ROPEREK														
15	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	kali	20	1.600.000.000	12	14.315.000	3	32.351.200	0	0	1	10.090.000	2	14.489.000	0	0	3	24.579.000	100,00	75,98	15	38.894.000	75,00	2,43	ROPEREK	identifikasi kebutuhan BIMTEK bagi opegawai	jadwal BIMTEK yang belum pasti	ketersediaan anggaran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																											
											I	II	III	IV																																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
		Peraturan Perundang- Undangan																																																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf																											
Predikat Kinerja																									-	-																											
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	5.806.000.000	0	425.335.366	0	673.276.789	0	81.611.902	0	135.865.092	0	247.424.101	0	129.383.564	0	594.284.659	nan	88,27	0	1.019.620.025	nan	17,56																											
16	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	60	611.000.000	2	3.742.000	10	3.000.000	0	0	0	0	10	2.775.000	0	0	10	2.775.000	100,00	92,50	12	6.517.000	20,00	1,07	ROPEREK		proses pengadaan belum terlaksana	anggaran tersedia																							
17	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0	3	14.541.000	2	22.460.000	0	0	0	2	18.350.000	0	0	2	18.350.000	100,00	81,70	5	32.891.000	inf	inf	ROPEREK		terlambatnya proses pengadaan	anggaran tersedia																							
18	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	20	570.000.000	4	17.047.000	4	24.646.800	2	450.000	0	7.393.000	1	2.485.000	1	2.132.000	4	12.460.000	100,00	50,55	8	29.507.000	40,00	5,18	ROPEREK		belum ada	anggaran tersedia																							
19	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	50	125.000.000	10	17.875.000	10	17.239.250	0	0	10	16.259.000	0	0	0	975.000	10	17.234.000	100,00	99,97	20	35.109.000	40,00	28,09	ROPEREK		belum ada	anggaran tersedia																							
20	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Laporan	100	4.500.000.000	75	372.130.366	40	605.930.739	10	81.161.902	14	112.213.092		223.814.101	126.276.564	24	543.465.659	60,00	89,69	99	915.596.025	99,00	20,35	ROPEREK		jadwal koordinasi dan konsukltasi yang bersifat dinamis	anggaran tersedia																								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100		0		0	0	0	0	0				0		nan	0			0,00			ROPEREK																											
21	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	arsip			0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	ROPEREK	tidak diambil, belum menjadi prioritas PD																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan																											
Predikat Kinerja																									-	-																											
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		0	0	91.100.000	0	151.541.780	0	0	0	0	48.075.000	0	32.575.000	0	80.650.000	nan	53,22	0	171.750.000	nan	inf																											
22	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			0	0	0	0	74.649.700	0	0	0	0	0	0	32.575.000	0	32.575.000	nan	43,64	0	32.575.000	nan	inf	ROPEREK	penggantian mebel yang sudah kurang layak	terdapat rincian belanja yang tidak sesuai kebutuhan	pelaksanaan pengadaan sudah dikoordinasikan dengan pejabat pengadaan																							
			Kursi biasa	unit			0		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			nan			ROPEREK	ada rencana Biro mendapatkan hibah kursi kerja dari DPRD																										
			Kursi Kerja Pejabat Eselon II	unit			0		1	0	0	0	0	0	1	1		100,00	1			inf			ROPEREK																												
			Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit			0		3	0	0	0	0	0	3	3		100,00	3			inf			ROPEREK																												
			Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	unit			0		9	0	0	0	0	0	9	9		100,00	9			inf			ROPEREK																												
			Meja Kerja Pejabat Eselon II	unit			0		1	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0			nan			ROPEREK	refocusing anggaran																											
			Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit			0		3	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0			nan			ROPEREK	refocusing anggaran	hibah meja kerja dari DPRD																										
			Meja Kerja Pejabat Eselon IV	unit			0		9	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0			nan			ROPEREK	refocusing anggaran	hibah meja kerja dari DPRD																										
23	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0	6	91.100.000	0	76.892.080	0	0	0	0	48.075.000	0	0	0	48.075.000	nan	62,52	6	139.175.000	inf	inf	ROPEREK	penambahan/penggantian peralatan kantor	belum ada	sudah dilakukan survey ke penyedia																							
			Laptop	unit				4		5	0	0	0	3	0	3		60,00	7			inf			ROPEREK																												
			PC Unit	unit				1		5	0	0	0	1	0	1		20,00	2			inf			ROPEREK																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Printer	unit			5		5		0		0		3		0		3		60,00		8		inf	inf	ROPEREK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.191.000.000	0	5.841.318	0	7.063.450	0	659.058	0	1.227.372	0	2.223.972	0	1.473.058	0	5.583.460	nan	79,05	0	11.424.778	nan	0,96					
24	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.170.000.000	1	5.208.000	1	5.803.450	0	533.000	0	1.150.000	0	2.107.914	1	1.357.000	1	5.147.914	100,00	88,70	2	10.355.914	40,00	0,89	ROPEREK		belum ada	angggran tersedia	
25	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	21.000.000	1	633.318	1	1.260.000	0	126.058	0	77.372	0	116.058	1	116.058	1	435.546	100,00	34,57	2	1.068.864	40,00	5,09	ROPEREK		belum ada	angggran tersedia	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								1,74	0,24						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	1.549.000.000	0	50.340.505	0	93.830.000	0	0	0	17.594.864	0	23.377.178	0	13.283.550	0	54.255.592	nan	57,82	0	104.596.097	nan	6,75					
26	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	448.000.000	0	0	4	41.190.000	0	0	0	1.665.000	0	18.254.580	4	4.023.500	4	23.943.080	100,00	58,13	4	23.943.080	80,00	5,34	ROPEREK		belum ada	angggran tersedia	
27	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	448.000.000	3	50.340.505	3	41.800.000	0	0	0	13.424.864	0	2.427.598	3	6.500.050	3	22.352.512	100,00	53,47	6	72.693.017	40,00	16,23	ROPEREK		angggran tersedia	angggran tersedia	
28	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		653.000.000	0	0	22	10.840.000	0	0	6	2.505.000	10	2.695.000	6	2.760.000	22	7.960.000	100,00	73,43	22	7.960.000	inf	1,22	ROPEREK		angggran tersedia	angggran tersedia	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	0,81						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				26.517.552.650		2.043.016.789		1.223.358.540		126.467.082		229.933.664		278.094.851		183.065.425		817.561.022		66,83		2.860.577.811		10,79					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				26.517.552.650		2.043.016.789		1.223.358.540		126.467.082		229.933.664		278.094.851		183.065.425		817.561.022		66,83		2.860.577.811		10,79					
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%		26.517.552.650		2.043.016.789	100	1.223.358.540	25	126.467.082	25	229.933.664	25	278.094.851	25	183.065.425	100	817.561.022	100,00	66,83	100	2.860.577.811	inf	10,79					
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Dokumen	0	8.000.000.000	0	427.876.248	16	237.787.511	0	19.087.500	0	64.963.000	0	68.410.920	16	68.050.035	16	220.511.455	100,00	92,73	16	648.387.703	inf	8,10					
			Terimplementasinya Persentase Peningkatan Implementasi Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	%	0	0		90		20		20		20		30		90		100,00		90		inf							
1	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Data Perekonomian	Data	0	4.000.000.000	1	240.520.747	1	133.916.400	1	12.055.000	0	22.927.000	0	40.865.920	0	52.241.035	1	128.088.955	100,00	95,65	2	368.609.702	inf	9,22	ROPEREK				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	0	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		ROPEREK					
			Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	0	0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		ROPEREK					
			Jumlah Laporan Monitoring	Laporan	5	1		3		0		0		0		1		1		33,33		2		40,00		ROPEREK					
			Jumlah Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro	Rumusan/Rekomendasi	0	10		10		2		0		3		0		5		50,00		15		inf		ROPEREK					
2	4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen		4.000.000.000		187.355.501	0	103.871.111	0	7.032.500	0	42.036.000	0	27.545.000	0	15.809.000	0	92.422.500	nan	88,98	0	279.778.001	nan	6,99	ROPEREK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
								I		II		III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Rumusan dan rekomendasi Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen					4	1		1		1		1		4		100,00		4		inf		ROPEREK					
			Jumlah Data Perekonomian	data	0		1		1	3		0		0		0		3		300,00		4		inf		ROPEREK					
			Jumlah laporan evaluasi	Laporan	0		0		1	0		0		0		1		1		100,00		1		inf		ROPEREK					
			Jumlah Laporan Monitoring	Laporan	5		1		4	1		0,01		1		1		3,01		75,25		4,01		80,20		ROPEREK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	8,10					
Predikat Kinerja																									-	SR					
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	Dokumen	0	7.000.247.900	0	364.918.818	7	335.810.258	0	47.382.070	0	66.956.600	0	64.032.600	7	47.680.200	7	226.051.470	100,00	67,32	7	590.970.288	inf	8,44					
3	4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan sinkronisasi kebijakan	Laporan		2.500.000.000		173.682.817	1	206.815.943	0	26.584.900	0	33.560.400	0	44.837.600	1	32.532.200	1	137.515.100	100,00	66,49	1	311.197.917	inf	12,45	ROPEREK				
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Produk Pertanian, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan	Rekomendasi					1	0		0		0		7		7		700,00		7		inf		ROPEREK					
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pertanian, Kehutanan, kelautan dan Perikanan	Rekomendasi	5		1		1	0		1		0		1		2		200,00		3		60,00		ROPEREK					
			Terselenggaranya Penas Tani	kegiatan	1		0		1	0		1		0		0		1		100,00		1		100,00		ROPEREK					
4	4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen		2.250.123.950		89.974.762	0	64.053.646	0	11.285.570	0	15.572.000	0	9.463.000	0	7.154.000	0	43.474.570	nan	67,87	0	133.449.332	nan	5,93	ROPEREK				
			Jumlah Laporan Singkronisasi Kebijakan	Laporan	5		1		1	0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		ROPEREK					
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rekomendasi	5		1		1	1		0		3		0		4		400,00		5		100,00		ROPEREK					
5	4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen		2.250.123.950		101.261.239	0	64.940.669	0	9.511.600	0	17.824.200	0	9.732.000	0	7.994.000	0	45.061.800	nan	69,39	0	146.323.039	nan	6,50	ROPEREK				
			Jumlah Laporan Singkronisasi Kebijakan	Laporan	5		1		1	0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		ROPEREK					
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Energi dan Air	Rekomendasi	5		1		1	0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		ROPEREK					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	4,98					
Predikat Kinerja																									-	SR					
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen	0	11.517.304.750	0	1.250.221.723	13	649.760.771	0	59.997.512	0	98.014.064	0	145.651.331	13	67.335.190	13	370.998.097	100,00	57,10	13	1.621.219.820	inf	14,08					
6	4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	0	2.500.000.000	0	446.206.674	0	222.643.350	0	1.275.000	0	18.725.400		35.201.200		34.688.000	0	89.889.600	nan	40,37	0	536.096.274	nan	21,44	ROPEREK				
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD	Laporan	10		2		2	0		1		0		1		2		100,00		4		40,00		ROPEREK					
			Jumlah Rumusan Kebijakan Evaluasi BUMD	Rumusan Kebijakan	5		1		1	1		0		0		0		1		100,00		2		40,00		ROPEREK					
			Jumlah Rumusan Kebijakan Evaluasi Kinerja Keuangan	Rumusan Kebijakan	5		1		1	1		0		0		0		1		100,00		2		40,00		ROPEREK					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
					I				II		III		IV		K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
			BUMD dan Persero lainnya																																												
7	4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen		2.500.000.000	106.318.335	0	57.885.244	0	23.400.912	0	7.774.410	0	17.228.457	0	146.600	0	48.550.379	nan	83,87	0	154.868.714	nan	6,19	ROPEREK																					
			Jumlah Laporan Pembinaan organisasi, Manajemen dan Aset BUMD kab/kota	Laporan	5		1		1		0		0		1		1		2		200,00		3		60,00		ROPEREK																				
			Jumlah Laporan Pembinaan, Organisasi, manajemen, dan aset BUMD Provinsi Sumatera Barat	Laporan	5		1		1		0		1		0		0		1		100,00		2		40,00		ROPEREK																				
			Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan	5		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		ROPEREK																				
8	4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	5	2.500.000.000	0	362.881.805	0	218.268.400	0	7.736.600	0	13.575.604	0	59.626.674	0	21.029.140	0	101.968.018	nan	46,72	0	464.849.823	0,00	18,59	ROPEREK																				
			Jumlah Rumusan Kebijakan Pendirian BUMD	Rumusan Kebijakan	5		1		1		0		1		0		0		1		100,00		2		40,00		ROPEREK																				
			Jumlah terpilihnya Komisaris/Direksi BUMD	BUMD	5		1		2		0		0		1		1		2		100,00		3		60,00		ROPEREK																				
9	4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen		3.160.000.000	47.873.800	0	39.104.527	0	6.580.000	0	8.983.650	0	15.195.000	0	2.731.200	0	33.489.850	nan	85,64	0	81.363.650	nan	2,57	ROPEREK																					
			Jumlah Laporan evaluasi	Laporan	5		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		ROPEREK																				
			Jumlah rumusan Kebijakan Pengelolaan BUMD	Rumusan Kebijakan	5		3		1		0		2		0		0		2		200,00		5		100,00		ROPEREK																				
10	4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang BLUD	Rekomendasi		857.304.750	286.941.109	3	111.859.250	0	21.005.000	2	48.955.000	1	18.400.000	0	8.740.250	3	97.100.250	100,00	86,81	3	384.041.359	inf	44,80	ROPEREK																					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen				0									0			nan		0		nan		ROPEREK																					
			Jumlah Laporan evaluasi	Laporan	5		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		ROPEREK																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	9,36																						
Predikat Kinerja																								-	SR																						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
									I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				29.336.072.223	31.155.886.877	38.872.143.715	438.146.882	8.332.115.088	10.388.095.865	2.687.715.527	21.846.073.362		56,20	53.001.960.239	180,67												
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				597.425.000	721.977.266	1.689.948.235	130.639.479	169.339.244	168.829.908	466.618.625	935.427.256		55,35	1.657.404.522	277,42												
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				597.425.000	721.977.266	1.689.948.235	130.639.479	169.339.244	168.829.908	466.618.625	935.427.256		55,35	1.657.404.522	277,42												
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		597.425.000	664.732.266	100	1.689.948.235	130.639.479	50	169.339.244	20	168.829.908	20	466.618.625	90	935.427.256	90,00	55,35	90	1.600.159.522	inf	267,84					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaa n Kinerja Perangkat Daerah	Persen	0	11.029.200	0	9.511.200	100	44.557.200	0	9.048.000	50	1.008.000	20	0	20	15.499.100	90	25.555.100	90,00	57,35	90	35.066.300	inf	317,94			
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5.401.000	5.401.000	2	28.623.000	9.048.000	1	0	0	0	1	10.887.000	2	19.935.000	100,00	69,65	2	25.336.000	inf	469,10	ROBINTAL				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen		0	0	2	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROBINTAL				
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	0	3	6.306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROBINTAL				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		5.628.200	4.110.200	1	5.628.200	0	0	1.008.000	0	0	1	4.612.100	1	5.620.100	100,00	99,86	1	9.730.300	inf	172,88	ROBINTAL				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	nan	nan											
Predikat Kinerja																	-	-											
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	158.584.300	0	122.984.700	100	121.902.900	0	15.160.000	40	26.198.000	20	29.963.100	0	11.067.400	60	82.388.500	60,00	67,59	60	205.373.200	inf	129,50			
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		152.005.000	116.415.400	1	115.889.400	15.160.000	0	26.198.000	0	29.963.100	1	11.067.400	1	82.388.500	100,00	71,09	1	198.803.900	inf	130,79	ROBINTAL				
6	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	ROBINTAL				
7	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	ROBINTAL				
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		6.579.300	6.569.300	1	6.013.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.569.300	nan	99,85	ROBINTAL				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
								I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)										
		Triwulan/Semester SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan												
Predikat Kinerja																-	-												
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	0	0	0	100	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan								
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	nan										
9	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	0	1	8.000.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROBINTAL							
10	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	1	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	ROBINTAL							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan												
Predikat Kinerja																-	-												
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen	0	45.047.500	0	20.996.000	100	3.390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	20.996.000	nan	46,61								
11	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0	0	1	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	ROBINTAL							
12	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		45.047.500		20.996.000	5	3.390.000		0	0	0	0	0,00	0,00	0	20.996.000	nan	46,61	ROBINTAL							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan												
Predikat Kinerja																-	-												
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen	0	276.794.000	0	416.945.516	100	1.406.521.650	0	91.674.479	50	119.723.244	20	121.553.558	20	436.653.625	90	769.604.906	90,00	54,72	90	1.186.550.422	inf	428,68			
13	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		54.873.000		54.787.700	1	56.603.800		1.470.000	0	12.252.300	0	10.176.300	1	3.504.000	1	27.402.600	100,00	48,41	1	82.190.300	inf	149,78	ROBINTAL		
14	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		35.469.000		34.677.000	2	35.469.000		0	0	0	1	8.703.400	0		1	8.703.400	50,00	24,54	1	43.380.400	inf	122,31	ROBINTAL		
15	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		186.452.000		327.480.816	30	1.314.448.850		90.204.479	8	107.470.944	42	102.673.858	30	433.149.625	80	733.498.906	266,67	55,80	80	1.060.979.722	inf	569,04	ROBINTAL		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																inf	56,07												
Predikat Kinerja																-	R												
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	0	12.100.000	0	6.000.000	100	2.000.000	0	0	50	990.000	0	0	50	1.010.000	100	2.000.000	100,00	100,00	100	8.000.000	inf	66,12			
16	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12.100.000		6.000.000	1	2.000.000		0	0	990.000	0	0	1	1.010.000	1	2.000.000	100,00	100,00	1	8.000.000	inf	66,12	ROBINTAL		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																inf	4,13												
Predikat Kinerja																-	SR												
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	0	93.870.000	0	88.294.850	100	103.576.485	0	14.757.000	50	21.420.000	30	17.313.250	20	2.388.500	100	55.878.750	100,00	53,95	100	144.173.600	inf	153,59			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
17	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		47.190.000		48.737.950	1	47.184.250		2.356.500	0	12.673.000	1	11.440.500	0	2.388.500	1	28.858.500	100,00	61,16	1	77.596.450	inf	164,43	ROBINTAL			
18	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		34.100.000		33.614.400	2	43.282.235		12.400.500	1	8.747.000	1	5.872.750	0	0	2	27.020.250	100,00	62,43	2	60.634.650	inf	177,81	ROBINTAL			
19	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		12.580.000		5.942.500	3	13.110.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.942.500	nan	47,24	ROBINTAL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	20,50					
Predikat Kinerja																								-	SR					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				28.738.647.223		30.433.909.611		37.182.195.480		307.507.403		8.162.775.844		10.219.265.957		2.221.096.902		20.910.646.106		56,24		51.344.555.717		178,66				
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				28.738.647.223		30.433.909.611		37.182.195.480		307.507.403		8.162.775.844		10.219.265.957		2.221.096.902		20.910.646.106		56,24		51.344.555.717		178,66				
4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Lembaga		28.738.647.223		30.433.909.611	12	37.182.195.480		307.507.403	6	8.162.775.844	6	10.219.265.957	0	2.221.096.902	12	20.910.646.106	100,00	56,24	12	51.344.555.717	inf	178,66				
4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya fasilitasi pembinaan mental spiritual	%	0	27.488.928.723	0	29.352.355.290	100	36.378.289.480	0	260.944.461	50	8.037.552.285	50	9.713.933.193	0	2.191.027.943	100	20.203.457.882	100,00	55,54	100	49.555.813.172	inf	180,28				
1	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit		1.274.359.450		1.218.552.644	1	1.750.000.000		127.176.384	0	641.440.594	1	484.078.261	0	166.987.687	1	1.419.682.926	100,00	81,12	1	2.638.235.570	inf	207,02	ROBINTAL			
2	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga		26.214.569.273		28.133.802.646	100	34.628.289.480		133.768.077	20	7.396.111.691	50	9.229.854.932	20	2.024.040.256	90	18.783.774.956	90,00	54,24	90	46.917.577.602	inf	178,98	ROBINTAL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	193,00					
Predikat Kinerja																								-	ST					
4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%	0	624.608.500	0	569.168.313	100	578.906.000	0	24.723.042	50	38.578.359	50	439.104.540	0	21.498.959	100	523.904.900	100,00	90,50	100	1.093.073.213	inf	175,00				
3	4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen		353.030.500		342.184.752	2	471.318.000		15.459.642	1	30.126.659	1	414.004.000	0	5.000.000	2	464.590.301	100,00	98,57	2	806.775.053	inf	228,53	ROBINTAL			
4	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen		106.612.000		88.537.700	1	53.794.000		9.263.400	0	1.611.700	1	5.803.428	0	16.498.959	1	33.177.487	100,00	61,68	1	121.715.187	inf	114,17	ROBINTAL			
5	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen		164.966.000		138.445.861	1	53.794.000		0	0	6.840.000	1	19.297.112	0	0	1	26.137.112	100,00	48,59	1	164.582.973	inf	99,77	ROBINTAL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	88,49					
Predikat Kinerja																								-	T					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	%	0	625.110.000	0	512.386.008	100	225.000.000	0	21.839.900	50	86.645.200	50	66.228.224	0	8.570.000	100	183.283.324	100,00	81,46	100	695.669.332	inf	111,29				
6	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen		195.514.000		155.508.500	1	75.000.000		8.731.800	0	9.946.000	1	38.910.980	0	0	1	57.588.780	100,00	76,79	1	213.097.280	inf	108,99	ROBINTAL			
7	4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen		234.912.000		193.343.550	1	75.000.000		8.863.900	0	42.582.600	1	13.208.000	0	3.849.000	1	68.503.500	100,00	91,34	1	261.847.050	inf	111,47	ROBINTAL			
8	4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen		194.684.000		163.533.958	1	75.000.000		4.244.200	0	34.116.600	1	14.109.244	0	4.721.000	1	57.191.044	100,00	76,25	1	220.725.002	inf	113,38	ROBINTAL			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	41,73														
Predikat Kinerja															-	SR														

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I	II	III	IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				15.829.922.800		3.252.350.718		2.257.830.031		333.798.704		395.689.714		1.270.820.527		0		2.000.308.945		88,59		5.252.659.663		33,18						
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.133.372.800		1.074.595.658		1.103.562.911		120.647.345		165.939.294		603.196.933		0		889.783.572		80,63		1.964.379.230		62,69						
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				3.133.372.800		1.074.595.658		1.103.562.911		120.647.345		165.939.294		603.196.933		0		889.783.572		80,63		1.964.379.230		62,69						
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		3.133.372.800		1.074.595.658	100	1.103.562.911		120.647.345		165.939.294		603.196.933	0	0	889.783.572	0,00	80,63	0	1.964.379.230	nan	62,69							
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	193.756.000	0	37.927.500	85	58.444.500	0	14.680.000	0	3.600.000	0	31.425.000	0	0	49.705.000	0,00	85,05	0	87.632.500	nan	45,23							
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	11	129.496.000	0	21.433.000	2	27.957.500		9.840.000		1.680.000		17.975.000	0	0	29.495.000	0,00	105,50	0	50.928.000	0,00	39,33	ROKERJASAMA						
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Perubahan RKA SKPD) yang disusun	dokumen	4		0	0	4	14.120.000		3.140.000		0		7.630.000	0	0	10.770.000	0,00	76,27	0	10.770.000	0,00	inf	ROKERJASAMA						
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	dokumen	3	64.260.000		16.494.500	3	5.449.000		500.000		1.200.000		2.700.000	0	0	4.400.000	0,00	80,75	0	20.894.500	0,00	32,52	ROKERJASAMA						
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	dokumen	4	0		0	4	10.918.000		1.200.000		720.000		3.120.000	0	0	5.040.000	0,00	46,16	0	5.040.000	0,00	inf	ROKERJASAMA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,00	inf								
Predikat Kinerja																							SR	-								
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	529.960.000	0	62.225.000	100	65.340.000	0	16.083.000	0	14.295.000	0	30.378.000	0	0	60.756.000	0,00	92,98	0	122.981.000	nan	23,21							
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	5	529.960.000	5	62.225.000	5	59.340.000		15.315.000		14.295.000		29.610.000	0	0	59.220.000	0,00	99,80	5	121.445.000	100,00	22,92	ROKERJASAMA						
6	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	15		0	0	1	0		0		0		768.000	0	0	768.000	0,00	inf	0	768.000	0,00	inf	ROKERJASAMA						
7	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	1		0	0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	nan	ROKERJASAMA							
8	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	dokumen	18		0	0	2	6.000.000		768.000		0		0	0	0	768.000	0,00	12,80	0	768.000	0,00	inf	ROKERJASAMA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							12,50	nan								
Predikat Kinerja																							SR	-								
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen	0	104.459.000	0	18.800.000	100	32.850.000	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	1.800.000	0,00	5,48	0	20.600.000	nan	19,72							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0		0		100		0		0		0		0		0	0,00		0		nan								
9	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	dokumen	0		0		0	1		0		0		0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROKERJASAMA					
10	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	3	104.459.000	0		0	4		17.760.000		0		0		0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	ROKERJASAMA					
11	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0		0		0	0		12.000.000		0		0		0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan	ROKERJASAMA				
			Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	orang	3		0		3								0			0,00		0		0,00		ROKERJASAMA						
12	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	0		0		0	2		0		0		0		0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	ROKERJASAMA					
13	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	dokumen	2		0	2	18.800.000	2		3.090.000		900.000		0		900.000	0	0	1.800.000	0,00	58,25	2	20.600.000	100,00	inf	ROKERJASAMA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																
Predikat Kinerja																								-	-							
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	53.404.000	0		45.277.900	100		4.790.000	0		0	0		0	0	3.660.000	0,00	76,41	0	48.937.900	nan	91,64						
14	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali	2	53.404.000	2		45.277.900	2		4.790.000		0		0		0	0	3.660.000	0,00	76,41	2	48.937.900	100,00	91,64	ROKERJASAMA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																
Predikat Kinerja																								SR	SR							
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	1.619.094.000	0		730.026.384	100		724.990.515	0		57.065.521	0		103.982.606	0	391.626.935	0	0	0	552.675.062	0,00	76,23	0	1.282.701.446	nan	79,22		
15	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	700.000.000	0		128.000.000	0		42.797.800		0		0		0	0	0	nan	0,00	0	128.000.000	nan	18,29	ROKERJASAMA					
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit					6								0			0,00		0		nan		ROKERJASAMA						
16	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0		0	0		0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	ROKERJASAMA				
17	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	4	148.752.000		39.062.290	3	50.707.500		0		48.984.500		48.984.500		0	0	97.969.000	0,00	193,20	0	137.031.290	0,00	92,12	ROKERJASAMA					
18	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	5	60.480.000		18.369.500	5	17.352.000		0		17.352.000		17.352.000		0	0	34.704.000	0,00	200,00	0	53.073.500	0,00	87,75	ROKERJASAMA					
19	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	27		0	0		0	27		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	0,00	nan	ROKERJASAMA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
20	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	200	709.862.000		544.594.594	40	614.133.215	57.065.521	37.646.106	325.290.435	0	0	420.002.062	0,00	68,39	0	964.596.656	0,00	135,89	ROKERJASAMA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	366.726.200	0	72.815.366	100	80.727.896	0	15.873.824	0	23.295.688	0	56.980.248	0	0	0	96.149.760	0,00	119,10	0	168.965.126	nan	46,07		
21	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	1500	291.173.000		72.815.366	400	4.000.000	4.000.000		0		4.000.000	0	0	0	8.000.000	0,00	200,00	0	80.815.366	0,00	27,76	ROKERJASAMA		
22	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	10	75.553.200	0	0	10	0	0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	ROKERJASAMA		
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening	0		0		1							0			0,00		0		nan		ROKERJASAMA			
23	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	76.727.896	11.873.824	23.295.688	52.980.248	0	0	88.149.760	nan	114,89	0	88.149.760	nan	inf	ROKERJASAMA					
			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	5		0		5						0		0,00		0		0,00		ROKERJASAMA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf				
Predikat Kinerja																							-	-				
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	0	265.973.600	0	107.523.508	100	136.420.000	0	16.045.000	0	20.766.000	0	88.226.750	0	0	0	125.037.750	0,00	91,66	0	232.561.258	nan	87,44		
24	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	unit	1	83.289.600		47.718.800	1	40.990.000	2.750.000	15.961.000	36.314.304	0	0	55.025.304	0,00	134,24	0	102.744.104	0,00	123,36	ROKERJASAMA					
25	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	2	136.028.000		12.465.000	3	73.850.000	7.455.000	4.805.000	38.932.446	0	0	51.192.446	0,00	69,32	0	63.657.446	0,00	46,80	ROKERJASAMA					
26	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	30	46.656.000		47.339.708	30	21.580.000	5.840.000	0	12.980.000	0	0	18.820.000	0,00	87,21	0	66.159.708	0,00	141,80	ROKERJASAMA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,00	12,00				
Predikat Kinerja																							SR	SR				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				12.696.550.000		2.177.755.060		1.154.267.120	213.151.359	229.750.420	667.623.594	0	0	1.110.525.373	96,21	3.288.280.433		25,90								
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				12.696.550.000		2.177.755.060		1.154.267.120	213.151.359	229.750.420	667.623.594	0	0	1.110.525.373	96,21	3.288.280.433		25,90								
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN				12.696.550.000		2.177.755.060	0	1.154.267.120	213.151.359	229.750.420	667.623.594	0	0	1.110.525.373	nan	96,21	0	3.288.280.433	nan	25,90						
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	%	0	7.542.487.600	0	1.341.416.286	92	720.584.250	106.017.739	0	80.503.310	0	0	348.651.864	0	0	0	535.172.913	0,00	74,27	0	1.876.589.199	nan	24,88		
			Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	%	0		0		92	0		0		0		0		0	0,00		0		nan					
1	4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentase Realisasi Fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat	%	95	2.919.314.800		322.658.655	92	239.804.500	33.210.000	8.942.000	76.778.894	0	0	118.930.894	0,00	49,59	0	441.589.549	0,00	15,13	ROKERJASAMA					
			Persentase Realisasi Keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber	%	95				92						0		0,00		0		0,00		ROKERJASAMA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I	II	III	IV																													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
			dari APBD Provinsi Sumatera Barat																																								
2	4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber Dari APBN	%	95	1.948.388.400		317.742.363	92	155.132.500	17.910.000	20.606.000	93.750.255	0	0	132.266.255	0,00	85,26	0	450.008.618	0,00	23,10	ROKERJASAMA																				
			Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber Dari APBN	%	95				92						0		0,00		0		0,00		ROKERJASAMA																				
3	4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	%	95	2.674.784.400		701.015.268	92	325.647.250	54.897.739	50.955.310	178.122.715	0	0	283.975.764	0,00	87,20	0	984.991.032	0,00	36,83	ROKERJASAMA																				
			Persentase Realisasi Fisik Kegiatan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota	%	95				92						0		0,00		0		0,00		ROKERJASAMA																				
			Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	%	95				92						0		0,00		0		0,00		ROKERJASAMA																				
			Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota	%	95				92						0		0,00		0		0,00		ROKERJASAMA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																											
Predikat Kinerja																																											
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target.	%	0	5.154.062.400	0	836.338.774	92	433.682.870	0	107.133.620	0	149.247.110	0	318.971.730	0	0	0	575.352.460	0,00	132,67	0	1.411.691.234	nan	27,39																	
			Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi	%	0		0		92		0		0		0		0,00		0		nan																						
			Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi	%	0		0		92		0		0		0		0,00		0		nan																						
4	4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Hasil analisa triwulanan terhadap capaian kinerja Pembangunan Daerah	dokumen	1	1.655.232.000		104.565.827	4	90.251.620	9.859.620	24.805.000	41.284.620	0	0	75.949.240	0,00	84,15	0	180.515.067	0,00	10,91	ROKERJASAMA																				
5	4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen		2.232.720.000		479.966.155	12	227.031.250	71.992.000	86.650.110	187.981.110	0	0	346.623.220	0,00	152,68	0	826.589.375	nan	37,02	ROKERJASAMA																				
			Jumlah Laporan Tahunan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen	0		0		1						0		0,00		0		nan		ROKERJASAMA																				
			Jumlah Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen	0		0		4						0		0,00		0		nan		ROKERJASAMA																				
6	4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	dokumen	2	1.266.110.400		251.806.792	2	116.400.000	25.282.000	37.792.000	89.706.000	0	0	152.780.000	0,00	131,25	0	404.586.792	0,00	31,96	ROKERJASAMA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																											
Predikat Kinerja																																											

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong															
											I		II																						III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
		BIRO ORGANISASI				24.919.877.073		3.236.785.508		3.121.908.198		294.091.090		993.016.844		817.130.327		884.068.226		2.988.306.487		95,72		6.225.091.995		24,98																							
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.262.462.983		850.237.305		1.370.006.748		147.800.117		512.423.963		438.903.311		117.850.702		1.216.978.093		88,83		2.067.215.398		39,28																							
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				5.262.462.983		850.237.305		1.370.006.748		147.800.117		512.423.963		438.903.311		117.850.702		1.216.978.093		88,83		2.067.215.398		39,28																							
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.223.072.283		850.237.305	0	1.370.006.748		147.800.117		512.423.963		438.903.311		117.850.702	0	1.216.978.093	nan	88,83	0	2.067.215.398	nan	39,58																							
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah %	%	0	117.953.200	0	11.672.700	85	9.671.500	0	0	0	6.929.600	0	1.954.700	0	463.100	0	9.347.400	0,00	96,65	0	21.020.100	nan	17,82																							
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	32.860.000	0	0	0	1.533.000	0	0	0	1.517.500	0	0	0	0	0	1.517.500	nan	98,99	0	1.517.500	nan	4,62	ROORGANISASI																						
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4		0		1		1		0		0		0		1		100,00		1		25,00	ROORGANISASI				komitmen pimpinan dan ketrersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																			
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	4	21.000.000	0	0	1	1.669.600	0	0	1	1.666.000	0	0	0	0	1	1.666.000	100,00	99,78	1	1.666.000	25,00	7,93	ROORGANISASI				komitmen pimpinan dan ketrersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																		
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	52	48.593.200	10	11.672.700	1	4.503.500	0	0	1	2.749.700	0	1.459.300	0	0	1	4.209.000	100,00	93,46	11	15.881.700	21,15	32,68	ROORGANISASI				komitmen pimpinan dan ketrersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																		
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	4	15.500.000	0	0	1	1.965.400	0	0	1	996.400	0	495.400	0	463.100	1	1.954.900	100,00	99,47	1	1.954.900	25,00	12,61	ROORGANISASI				komitmen pimpinan dan ketrersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran serta ketepatan waktu dan kualitas data																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																								nan	14,46								
Predikat Kinerja																																									-	SR							
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	505.800.000	0	65.580.000	100	71.395.000	0	14.535.000	0	11.773.000	0	20.435.000	0	20.000.000	0	66.743.000	0,00	93,48	0	132.323.000	nan	26,16																							
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium	Orang	50	493.800.000	6	65.580.000	7	70.860.000	6	14.535.000	6	11.400.000	5	20.325.000	0	20.000.000	17	66.260.000	242,86	93,51	23	131.840.000	46,00	26,70	ROORGANISASI				komitmen pimpinan dan ketrersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																		
6	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Laporan	12	12.000.000	0	0	1	535.000	0	0	1	373.000	0	110.000	0	0	1	483.000	100,00	90,28	1	483.000	8,33	4,03	ROORGANISASI				komitmen pimpinan dan ketrersediaan																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																										
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
		Triwulan/Semesteran SKPD			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
																																																		sumber daya manusia dan juga anggaran		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							7,76	5,12																												
Predikat Kinerja																							SR	SR																												
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	48.239.400	0	19.828.000	100	1.806.500	0	0	0	1.806.500	0	0	0	0	0	1.806.500	0,00	100,00	0	21.634.500	nan	44,85																										
7	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Dokumen	4	22.500.000	0	0	1	1.148.600	0	0	1	1.148.600	0	0	0	1	1.148.600	100,00	100,00	1	1.148.600	25,00	5,10	ROORGANISASI					komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan	ROORGANISASI																														
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoranya	Orang	4	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100,00	1	25,00	ROORGANISASI											komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																					
8	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Dokumen	5	25.739.400	1	19.828.000	1	657.900	0	0	1	657.900	0	0	0	1	657.900	100,00	100,00	2	20.485.900	40,00	79,59	ROORGANISASI					komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	10,59																												
Predikat Kinerja																							-	SR																												
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	109.164.000	0	0	100	6.265.000	0	0	0	6.265.000	0	0	0	0	6.265.000	0,00	100,00	0	6.265.000	nan	5,74																											
9	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	Bimtek	48	109.164.000	0	0	1	6.265.000	0	0	0	1	6.265.000	0	0	1	6.265.000	100,00	100,00	1	6.265.000	2,08	5,74	ROORGANISASI					komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,17	0,64																												
Predikat Kinerja																							SR	SR																												
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	2.695.495.126	0	502.944.796	100	756.571.780	0	128.345.117	0	228.544.183	0	218.035.671	0	66.255.900	0	641.180.871	0,00	84,75	0	1.144.125.667	nan	42,45																										
10	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	2	29.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROORGANISASI																										
11	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bahan	20	305.441.445	3	38.394.000	31	31.675.000	0	8	16.635.100	17	7.604.800	6	5.993.400	31	30.233.300	100,00	95,45	34	68.627.300	170,00	22,47	ROORGANISASI					komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																					
12	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Barang	20	214.070.086	5	35.024.700	12	25.616.200	0	6	15.512.200	4	2.250.000	2	15.262.500	12	33.024.700	100,00	128,92	17	68.049.400	85,00	31,79	ROORGANISASI					komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran																					
13	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Laporan	325	2.175.983.595	86	429.526.096	100	669.980.580	128.345.117	68	196.396.883	4	208.180.871	9	45.000.000	81	577.922.871	81,00	86,26	167	1.007.448.967	51,38	46,30	ROORGANISASI					komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	716.924.560	0	123.499.000	100	353.675.712	0	0	0	202.350.000	0	149.229.012	0	8.000.000	0	359.579.012	0,00	101,67	0	483.078.012	nan	67,38				manusia dan juga anggaran
14	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel baru yang disediakan	Unit, Set		159.026.900		0	31	149.229.012		0		0		149.229.012	0	0	0	149.229.012	0,00	100,00	0	149.229.012	nan	93,84	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran
15	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Unit	26	557.897.660	12	123.499.000	17	204.446.700	0	0	14	202.350.000	0	0	0	8.000.000	14	210.350.000	82,35	102,89	26	333.849.000	100,00	59,84	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	10,25						
Predikat Kinerja																							-	SR						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	476.385.997	0	43.133.309	100	82.591.256	0	4.920.000	0	32.220.680	0	18.067.428	0	11.404.952	0	66.613.060	0,00	80,65	0	109.746.369	nan	23,04				
16	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Surat	2550	151.893.293	1500	43.133.309	500	8.187.500	0	0	1171	6.184.250	426	0	302	1.000.000	1899	7.184.250	379,80	87,75	3399	50.317.559	133,29	33,13	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran
17	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	bulan	12	20.200.000	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran	
18	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	8	304.292.704	0	0	2	74.403.756	1	4.920.000	2	26.036.430	2	18.067.428	2	10.404.952	7	59.428.810	350,00	79,87	7	59.428.810	87,50	19,53	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							10,51	2,93						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	0	553.110.000	0	83.579.500	100	88.030.000	0	0	0	28.800.000	0	24.916.500	0	11.726.750	0	65.443.250	0,00	74,34	0	149.022.750	nan	26,94				
19	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	6	239.570.000	1	39.154.500	1	39.190.000	0	0	1	12.185.000	1	6.437.000	1	6.435.000	3	25.057.000	300,00	63,94	4	64.211.500	66,67	26,80	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran
20	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	15	208.400.000	3	34.100.000	1	34.100.000	0	0	2	11.845.000	2	14.199.500	2	1.941.750	6	27.986.250	600,00	82,07	9	62.086.250	60,00	29,79	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran
21	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	132	105.140.000	13	10.325.000	21	14.740.000	0	0	9	4.770.000	6	4.280.000	6	3.350.000	21	12.400.000	100,00	84,12	34	22.725.000	25,76	21,61	ROORGANISASI			komitmen pimpinan dan ketersediaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																														sumber daya manusia dan juga anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							6,35	3,72						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				19.657.414.090		2.386.548.203		1.751.901.450		146.290.973		480.592.881		378.227.016		766.217.524		1.771.328.394		101,11		4.157.876.597		21,15				
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				19.657.414.090		2.386.548.203		1.751.901.450		146.290.973		480.592.881		378.227.016		766.217.524		1.771.328.394		101,11		4.157.876.597		21,15				
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				19.657.414.090		2.386.548.203	0	1.751.901.450		146.290.973		480.592.881		378.227.016		766.217.524	0	1.771.328.394	nan	101,11	0	4.157.876.597	nan	21,15				
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	%	0	7.543.660.884	0	1.300.856.546	100	573.188.150	0	33.388.677	0	115.444.321	0	151.179.091	0	268.750.659	0	568.762.748	0,00	99,23	0	1.869.619.294	nan	24,78				
			Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang - undangan Kelembagaan	%	0		0		100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan					
			Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	0		0		100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan					
			Persentase Penataan Kelembagaan dan Penataan Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	%	0		0		100		0		0		0		0		0		0,00		0		nan					
1	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat Daerah yang disusun	Ranperda / Ranpergub	6	2.562.719.884	5	375.820.305	1	145.784.750	3	9.930.000	1	45.930.853	0	38.940.600	3	49.269.700	7	144.071.153	700,00	98,82	12	519.891.458	200,00	20,29	ROORGANISASI		lamanya proses harmonisasi fasilitasi ranperkada/ranperda di kanwil hukum	komitmen pimpinan dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan	%	380	2.582.283.450	100	582.715.021	80	245.225.200		12.269.177	100	40.734.918	100	64.061.441	100	126.364.409	300	243.429.945	375,00	99,27	400	826.144.966	105,26	31,99	ROORGANISASI		banyaknya kab/kota yang melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur serta penyesuain tugas dan fungsi perangkat daerah	
3	4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah dibina Penataan Jabatan	%	370	2.398.657.550	100	342.321.220	80	182.178.200	42	11.189.500	33	28.778.550	25	48.177.050	0	93.116.550	100	181.261.650	125,00	99,50	200	523.582.870	54,05	21,83	ROORGANISASI		Masih banyak dokumen yang diserahkan opd dikembalikan untuk di lakukan perbaikan dikamakan sebagian Opd masih menggunakan permenpan 41 dalam penyusunan dokumen anjab abknya.	Melakukan pendampingan dalam penyusunan Anjab/ABK dan menerima konsultasi dari setiap OPD.
			Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	%	370		100		80		50		25		25		0		100		125,00		200		54,05	ROORGANISASI		Masih banyak Opd yang belum paham dalam penyusunan nomenklatur pelaksana sesuai	Melaksanakan pembahasan secara Running, dimana pelaksanaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp													K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																														permenpan 45 Tahun 2022, sehingga kesulitan dalam penyusunan dokumen arjab abknya.	pembahasan terhadap dokumen yang sudah masuk terlebih dahulu tanpa menunggu semua Opd lengkap menyerahkan dokumen nya.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							103,34	24,70							
Predikat Kinerja																							ST	SR							
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik)	Skor	0	12.113.753.206	0	1.085.691.657	5	1.178.713.300	0	112.902.296	0	365.148.560	0	227.047.925	0	497.466.865	0	1.202.565.646	0,00	102,02	0	2.288.257.303	nan	18,89					
4	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Bimtek RB Kabupaten / Kota	Orang		2.173.873.266			0	84	227.426.200	84	47.513.900	0	94.372.500	0	29.256.400	0	54.350.000	84	225.492.800	100,00	99,15	84	225.492.800	inf	10,37	ROORGANISASI	Narasumber Kemenpan seringkali susah mendapatkan waktunya sesuai jadwal yang kita seting	SKPD cukup disiplin mengirimkan peserta bimteknya	
			Jumlah Peserta Sosialisasi RB	Orang						102						0			0		0,00		0		nan		ROORGANISASI	Narasumber Kemenpan seringkali susah mendapatkan waktunya sesuai jadwal yang kita seting	SKPD cukup disiplin mengirimkan peserta sosialisasinya		
			Jumlah Kab / Kota yang dibina / asistensi	Kab/Kota	112		0			18		7		3		5		3		18		100,00		18		16,07		ROORGANISASI	Seringkali pejabat yang dituju mewakili pada aparatur lain saat menerima tim pembinaan RB	Kab/kota memberikan respon positif terhadap materi yang disampaikan karena sesuai dengan kebutuhan informasi yang mereka harapkan	
5	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	Dokumen	5	2.391.113.347	1	337.696.328	1	207.505.000	1	17.901.200	0	58.636.100	0	52.630.100	0	77.740.000	1	206.907.400	100,00	99,71	2	544.603.728	40,00	22,78	ROORGANISASI	Belum samanya pemahaman aparatur dalam penerapan SAKIP pada Perangkat Daerahnya masing-masing	Membuat Surat Edaran tentang Penyusunan laporan kinerja yang berisikan sistematisa penyusunan laporan kinerja OPD		
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun	Dokumen	6		1			1		1		0		0		0		1		100,00		2		33,33		ROORGANISASI	Keterlibatan pimpinan dalam mengawal implementasi SAKIP masih belum optimal	Berkoordinasi secara langsung atau tidak langsung dengan OPD terkait pemenuhan dokumen SAKIP tahun 2023	
			Jumlah Kabupaten / Kota yang dicoaching / asistensi Dokumen SAKIP-nya	Kab / Kota	14		2			2		0		1		0		1		2		100,00		4		28,57		ROORGANISASI	Belum semua OPD melakukan pengentrian pada aplikasi SAKIP dan esr.menpan tepat waktu.	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan statistik dalam hal penggunaan aplikasi saki	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																														Provinsi Sumatera Barat	
			Jumlah Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	Kali	12		2		2		0		0		1		1		2		100,00		4		33,33		ROORGANISASI		Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mengelola SAKIP pada Perangkat Daerah.		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP	OPD	204		0		51		51		51		0		0		102		200,00		102		50,00		ROORGANISASI		Belum optimalnya analisa pencapaian sasaran Pemerintah Daerah		
			Jumlah Peserta percepatan implementasi SAKIP Prov.Sumbar	Orang	410		0		110		0		0		510		0		510		463,64		510		124,39		ROORGANISASI		Kesulitan mencari jadwal narasumber dari Kementerian PAN dan RB		
6	4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Peserta		1.363.754.900			0	142	103.480.750		1.031.050		65.494.903	152	12.146.700	0	24.136.900	152	102.809.553	107,04	99,35	152	102.809.553	inf	7,54	ROORGANISASI			
7	4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam penyusunan Probis	Perangkat Daerah	44	2.491.115.746	38	230.111.986	8	195.994.950	0	4.580.200	0	95.072.644	5	20.298.629	9	73.171.293	14	193.122.766	175,00	98,53	52	423.234.752	118,18	16,99	ROORGANISASI		masih kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dari penyusunan probis	komitmen pimpinan dan Dukungan dari kebijakan dan regulasi yang relevan dapat memberikan arahan dan panduan dalam penyusunan Probis	
			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam penyusunan SOP	Perangkat Daerah	32		4		8		0		0		5		9		14		175,00		18		56,25		ROORGANISASI		masih kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dari penyusunan SOP	komitmen pimpinan dan Dukungan dari kebijakan dan regulasi yang relevan dapat memberikan arahan dan panduan dalam penyusunan SOP	
			Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten / Kota	Perangkat Daerah	34		18		7		0		0		10		0		10		142,86		28		82,35		ROORGANISASI		komitmen pimpinan dan Kesadaran akan pentingnya memiliki SOP yang jelas untuk mengatur proses operasional dan Probis sebagai alat untuk menggambarkan profil perangkat daerah dapat menjadi faktor pendorong.		
			Peserta Rapat Koordinasi Organisasi Kabupaten / Kota	Orang	0		0		112		0		130		0		0		130		116,07		130		inf		ROORGANISASI		susahny mendatangkan narasumber dari pusat	komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan	
8	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah peserta digitalisasi pelayanan publik	Orang	510	3.693.895.947	0	517.883.343	150	444.306.400	0	41.875.946	0	51.572.413	0	112.716.096	0	268.068.672	0	474.233.127	0,00	106,74	0	992.116.470	0,00	26,86	ROORGANISASI				
			jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan	UKPP	350		0		70		0		52		0		27		79		112,86		79		22,57		ROORGANISASI			adanya komitmen pimpinan, partisipasi aktif pemangku kepentingan serta Sumber	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
																														daya manusia yang terampil dan berkualitas dapat mendukung implementasi standar sarana dan prasarana pelayanan.
			Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP	UKPP	320		20		30	0		30		0		0		30		100,00		50		15,63		ROORGANISASI				adanya komitmen pimpinan, partisipasi aktif pemangku kepentingan serta Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dapat mendukung implementasi standar sarana dan prasarana pelayanan.
			Jumlah UKPP yang menerapkan standar pelayanan	UKPP	320		20		30	0		52		0		27		79		263,33		99		30,94		ROORGANISASI				adanya komitmen pimpinan, partisipasi aktif pemangku kepentingan serta Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dapat mendukung implementasi standar sarana dan prasarana pelayanan.
			Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	UKPP	320		27		30	0		0		28		0		28		93,33		55		17,19		ROORGANISASI				adanya komitmen pimpinan, partisipasi aktif pemangku kepentingan serta Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dapat mendukung implementasi standar sarana dan prasarana pelayanan.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	10,57						
Predikat Kinerja																							-	SR						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
											(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		BIRO UMUM				657.650.000.000		243.404.000.000		114.826.491.273		15.814.768.278		38.103.163.310		34.403.246.740		34.585.661.377		122.906.839.705		107,04		366.310.839.705		55,70				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				657.650.000.000		243.404.000.000		114.826.491.273		15.814.768.278		38.103.163.310		34.403.246.740		34.585.661.377		122.906.839.705		107,04		366.310.839.705		55,70				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				657.650.000.000		243.404.000.000		114.826.491.273		15.814.768.278		38.103.163.310		34.403.246.740		34.585.661.377		122.906.839.705		107,04		366.310.839.705		55,70				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		657.650.000.000	200	243.404.000.000	100	114.826.491.273	25	15.814.768.278	25	38.103.163.310	25	34.403.246.740	25	34.585.661.377	100	122.906.839.705	100,00	107,04	300	366.310.839.705	inf	55,70				
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	500	3.200.000.000	200	715.000.000	100	172.326.606	25	56.589.100	25	21.250.000	25	46.888.698	25	21.115.002	100	145.842.800	100,00	84,63	300	860.842.800	60,00	26,90				
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	11	1.200.000.000	4	350.000.000	3	98.844.786	1	37.797.700	1	6.790.000	1	32.857.098	0	9.260.002	3	86.704.800	100,00	87,72	7	436.704.800	63,64	36,39	ROUMUM			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11		5		2	0		1		1	0		2		100,00		7		63,64		ROUMUM					Jadwal perencanaan yang telah jelas
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	15	500.000.000	6	120.000.000	4	0	1	0	1	0	1	0	4	0	100,00	nan	10	120.000.000	66,67	24,00	ROUMUM		Tidak ada tersedia anggaran pada Penganggaran 2023			Pelaksanaan Penganggaran tetap terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	60	750.000.000	24	120.000.000	12	73.481.820	3	18.791.400	3	14.460.000	3	14.031.600	3	11.855.000	12	59.138.000	100,00	80,48	36	179.138.000	60,00	23,89	ROUMUM			
			Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang Disusun	Dokumen	15		6		3	2		1		0		0	3		100,00		9		60,00		ROUMUM	-				Laporan capaian kinerja telah tersusun seluruhnya
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	60	750.000.000	24	125.000.000	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	nan	36	125.000.000	60,00	16,67	ROUMUM			
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	35		14		14	6		4		4		0	14		100,00		28		80,00		ROUMUM		Tidak ada tersedia anggaran pada Penganggaran 2023			Evaluasi kinerja tetap terlaksana setiap bulannya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								64,85	25,24					
Predikat Kinerja																								R	SR					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	500	256.000.000.000	200	102.050.000.000	100	50.998.025.552	25	7.647.060.156	25	19.084.331.834	25	15.508.115.004	25	10.260.777.629	100	52.500.284.623	100,00	102,95	300	154.550.284.623	60,00	60,37				
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	60	250.000.000.000	24	100.000.000.000	500	50.338.756.992	3	7.525.720.356	3	18.935.554.234	3	15.347.864.404	3	9.970.170.129	12	51.779.309.123	2,40	102,86	36	151.779.309.123	60,00	60,71	ROUMUM			
			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang/ Bulan	500		500		500	500		0		0		0	500		100,00		1000		200,00		ROUMUM		Aplikasi baru utk TPP, membuat pencairan TPP sedikit lambat			Regulasi yang telah jelas membuat pelaksanaan dapat dilaksanakan segera.
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2.000.000.000	2	600.000.000	12	273.930.000	0	41.460.000	0	71.690.000	0	65.070.000	1	157.752.400	1	335.972.400	8,33	122,65	3	935.972.400	60,00	46,80	ROUMUM			
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	75		30		30	15		0		0		0	15		50,00		45		60,00		ROUMUM	-				Regulasi pembayaran honor pegelola keuangan telah jelas dan telah ada di pergub SHS
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	600	1.500.000.000	240	600.000.000	99	256.441.189	18	48.041.700	27	63.250.700	27	54.568.600	36	91.786.400	108	257.647.400	109,09	100,47	348	857.647.400	58,00	57,18	ROUMUM			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																												
			Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang Diterbitkan	Dokumen	600		240		120		37		41		48		33		159		132,50		399		66,50		ROUMUM				
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	750.000.000	4	250.000.000	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	100,00	nan	6	250.000.000	60,00	33,33	ROUMUM				
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun	Dokumen	10		4		2		1		0		1		0		2		100,00		6		60,00		ROUMUM				
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10	250.000.000	4	100.000.000	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	100,00	nan	6	100.000.000	60,00	40,00	ROUMUM				
			Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Disiapkan	Dokumen	10		4		2		0		2		0		0		2		100,00		6		60,00		ROUMUM		Tidak ada tersedia anggaran pada Penganggaran 2023	Tindak lanjut pemeriksaan BPK tetap dilaksanakan	
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	1.500.000.000	24	500.000.000	12	128.897.371	3	31.838.100	3	13.836.900	3	40.612.000	3	41.068.700	12	127.355.700	100,00	98,80	36	627.355.700	60,00	41,82	ROUMUM				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang Disusun	Dokumen	60		24		12		3		3		3		3		12		100,00		36		60,00		ROUMUM	-	Laporan keuangan telah tersusun s/d Bulan Mei		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									45,50	27,98					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	500	4.590.000.000	200	1.709.000.000	100	528.487.500	25	277.055.359	25	142.673.150	25	38.936.550	25	28.259.550	100	486.924.609	100,00	92,14	300	2.195.924.609	60,00	47,84					
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	500.000.000	4	87.000.000	6	0	0	0	0	0	3	0	3	0	6	0	100,00	nan	10	87.000.000	100,00	17,40	ROUMUM		Tidak ada tersedia anggaran pada Penganggaran 2023		
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	215	2.500.000.000	86	1.000.000.000	43	422.000.000	43	247.644.109	0	135.714.350	0	0	0	43	383.358.459	100,00	90,84	129	1.383.358.459	60,00	55,33	ROUMUM	-	BMD telah diasuransikan seluruhnya sesuai ketersediaan anggaran			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10		4		2		2		0		0		0		2		100,00		6		60,00		ROUMUM	-			
13	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	90.000.000	1	36.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	36.000.000	100,00	40,00	ROUMUM		Tidak ada tersedia anggaran pada Penganggaran 2023		
			Jumlah Pengelola BMD yang Dibayarkan Honorinya	Orang	10		10		5		0		0		0		0		0		0,00		10		100,00		ROUMUM		Tidak ada tersedia anggaran pada Penganggaran 2023		
14	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	750.000.000	24	298.000.000	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	inf	nan	36	298.000.000	60,00	39,73	ROUMUM				
			Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	60		24		2		3		3		3		3		12		600,00		36		60,00		ROUMUM		Tidak ada tersedia anggaran pada Penganggaran 2023		
15	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	750.000.000	24	288.000.000	12	106.487.500	3	29.411.250	3	6.958.800	3	38.936.550	3	28.259.550	12	103.566.150	100,00	97,26	36	391.566.150	60,00	52,21	ROUMUM		Pendataan aset biro umum yang tersebar di unit kerja seperti Istana Bung Hatta,		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																													Mess Bukit Lampu, dll		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60		24		0		3		3		3		3		12		inf		36		60,00		ROUMUM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									23,57	13,65					
Predikat Kinerja																									SR	SR					
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	Persen	500	2.180.000.000	200	290.000.000	100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100,00	nan	300	290.000.000	60,00	13,30					
16	X.XX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	150.000.000	2	63.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	63.000.000	100,00	42,00	ROUMUM				
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah	Dokumen	2		2		1		1		0		0		0		1		100,00		3		150,00		ROUMUM				
			jumlah dokumen perencanaan retribusi kewenangan perangkat daerah	dokumen	2		2		1		1		0		0		0		1		100,00		3		150,00		ROUMUM				
17	X.XX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.000.000.000	2	40.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	3	40.000.000	150,00	4,00	ROUMUM				
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2		2		1		1		0		0		0		1		100,00		3		150,00		ROUMUM				
18	X.XX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	Kali	0	450.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	0,00	ROUMUM				
			Jumlah Sosialisasi atau Penyebarluasan Informasi yang Dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	Kali	0		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		ROUMUM				
19	X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	80.000.000	0	20.000.000	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	nan	12	20.000.000	inf	25,00	ROUMUM				
			Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	0		0		12		3		3		3		3		12		100,00		12		inf		ROUMUM				
20	X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	60	500.000.000	24	167.000.000	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	nan	36	167.000.000	60,00	33,40	ROUMUM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										5,22					
Predikat Kinerja																									-	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	500	6.700.000.000	200	1.352.000.000	100	539.582.587	25	10.935.000	25	9.345.000	25	124.427.500	25	11.180.000	100	155.887.500	100,00	28,89	300	1.507.887.500	60,00	22,51					
21	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1000	5.000.000.000	458	976.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	458	976.000.000	45,80	19,52	ROUMUM				
			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	1000		458		700		0		0		0		0		0		0,00		458		45,80		ROUMUM			Anggaran tidak tersedia pada TA 2023	
22	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	30	300.000.000	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	31	0	103,33	0,00	ROUMUM				
			Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala, Penyusunan DUK, Kenaikan Pangkat, Pensiun, ANJAB ABK, Evaluasi Jabatan, Cuti, dll.	Dokumen	30		31		100		0		0		0		0		0		0,00		31		103,33		ROUMUM			Anggaran tidak tersedia pada TA 2023	
23	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	900.000.000	0	0	0	144.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	0,00	ROUMUM				
			Jumlah ASN dn Non ASN yang Mengikuti Kegiatan Capacity Building	Orang	200		0		200		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		ROUMUM			Kegiatan capacity building baru direncanakan di akhir tahun anggaran	
24	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan	Kali	3	500.000.000	2	376.000.000	1	395.282.587	1	10.935.000	0	9.345.000	0	124.427.500	0	11.180.000	1	155.887.500	100,00	39,44	3	531.887.500	100,00	106,38	ROUMUM			Masih terbatas undangan untuk mengikuti Bimtek	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
											I		II		III		IV																																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100		42		100		4		6		11		68		89		89,00		131		131,00		ROUMUM		Uang kontribusi yang lebih besar dari standar harga																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								11,51	5,25																													
Predikat Kinerja																								SR	SR																													
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	500	90.650.000.000	200	18.728.000.000	100	11.501.485.054	25	1.164.204.729	25	3.570.595.368	25	5.357.101.282	25	3.885.620.494	100	13.977.521.873	100,00	121,53	300	32.705.521.873	60,00	36,08																												
25	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	500.000.000	2	100.000.000	0	74.481.400	1	8.833.300	0	15.526.800	0	13.644.800	0	42.939.900	1	80.944.800	inf	108,68	3	180.944.800	60,00	36,19	ROUMUM																											
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	250		100		50		6		5		27		12		50		100,00		150		60,00		ROUMUM																											
26	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	250	5.500.000.000	100	2.200.000.000	0	682.226.000	20	289.194.110	10	272.051.650	19	99.196.500	1	1.248.160.150	50	1.908.602.410	inf	279,76	150	4.108.602.410	60,00	74,70	ROUMUM																											
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	250		100		50		20		10		19		1		50		100,00		150		60,00		ROUMUM		Pejabat pengadaan hanya ada di Biro PNJ, sehingga proses birokrasi lebih lama																									
27	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	300	10.500.000.000	120	4.100.000.000	0	842.402.345	2	6.984.800	25	700.049.000	32	112.508.000	1	929.805.100	60	1.749.346.900	inf	207,66	180	5.849.346.900	60,00	55,71	ROUMUM																											
			Jumlah Perelatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	300		120		60		2		25		32		1		60		100,00		180		60,00		ROUMUM		Pejabat pengadaan hanya ada di Biro PNJ, sehingga proses birokrasi lebih lama																									
28	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	2.500.000.000	16	812.000.000	0	305.389.600	2	60.899.300	2	63.781.300	2	121.061.600	2	241.467.800	8	487.210.000	inf	159,54	24	1.299.210.000	60,00	51,97	ROUMUM																											
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	40		16		8		2		3		2		1		8		100,00		24		60,00		ROUMUM																											
29	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	1.000.000.000	40	300.000.000	0	174.060.450	5	67.027.000	7	41.388.000	7	58.434.000	1	55.194.000	20	222.043.000	inf	127,57	60	522.043.000	60,00	52,20	ROUMUM																											
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	100		40		20		5		7		7		1		20		100,00		60		60,00		ROUMUM																											
30	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	250.000.000	6	100.000.000	0	50.058.000	0		0	1	22.660.000	0		0	2	27.274.390	3	49.934.390	inf	99,75	9	149.934.390	60,00	59,97	ROUMUM																									
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	15		6		3		0		1		0		2		3		100,00		9		60,00		ROUMUM																											
31	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	20.000.000.000	1	11.000.000.000	0	5.500.000.000	0		0	0	1.485.716.829	1	3.729.480.470	0		0	1	5.215.197.299	inf	94,82	2	16.215.197.299	200,00	81,08	ROUMUM																									
			Jumlah Tamu yang Dilayani	Orang	5000		5000		3000		0		0		0		0		0		0,00		5000		100,00		ROUMUM																											
32	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2500	50.000.000.000	1000	18.000.000	0	3.872.867.259	13	731.266.219	122	969.421.789	261	1.222.775.912	116	1.340.779.154	512	4.264.243.074	inf	110,11	1512	4.282.243.074	60,48	8,56	ROUMUM																											
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	2500		1000		500		13		122		261		116		512		102,40		1512		60,48		ROUMUM																											
			Rapat Koordinasi Staf Ahli se Sumatera Barat yang diselenggarakan	kali	2		2		1		0		0		0		0		0		0,00		2		100,00		ROUMUM																											
33	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	15	400.000.000	6	98.000.000	0		0		0	0		0	3		0	3		inf	nan	9	98.000.000	60,00	24,50	ROUMUM																										
			Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	Arsip	15		6		3		0		0		0		3		3		100,00		9		60,00		ROUMUM		Anggaran tidak tersedia pada TA 2023																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								20,94	13,48																													
Predikat Kinerja																								SR	SR																													
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Persen	500	30.200.000.000	200	7.500.000.000	100	1.812.052.599	25	7.450.000	25	533.005.250	25	248.179.662	25	2.569.209.788	100	3.357.844.700	100,00	185,31	300	10.857.844.700	60,00	35,95																												

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
34	X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	4.200.000.000	2	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	2.000.000.000	100,00	47,62	ROUMUM			
			jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru	unit	2		2		3		0		0		0		0		0		0,00		2		100,00		ROUMUM		Anggaran tidak tersedia pada TA 2023	
35	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15	8.000.000.000	3	1.400.000.000	0	798.000.000	0	0	1	40.300.000	0	0	1	799.600.000	2	839.900.000	inf	105,25	5	2.239.900.000	33,33	28,00	ROUMUM			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15		3		15		0		1		0		1		2		13,33		5		33,33		ROUMUM		Spesifikasi Kendaraan masih menunggu arahan pimpinan	
36	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	500	6.000.000.000	200	1.200.000.000	0	693.011.879	0	2.980.000	20	277.523.650	45	156.251.512	35	755.217.788	100	1.191.972.950	inf	172,00	300	2.391.972.950	60,00	39,87	ROUMUM			
			jumlah mebel yang diadakan	unit	500		200		100		0		20		45		35		100		100,00		300		60,00		ROUMUM		Pejabat pengadaan hanya ada di Biro PNJ, sehingga proses birokrasi lebih lama	
37	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	250	6.000.000.000	100	2.900.000.000	0	321.040.720	0	4.470.000	12	215.181.600	26	91.928.150	12	1.014.392.000	50	1.325.971.750	inf	413,02	150	4.225.971.750	60,00	70,43	ROUMUM			
			jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	250		100		50		0		12		26		12		50		100,00		150		60,00		ROUMUM		Pejabat pengadaan hanya ada di Biro PNJ, sehingga proses birokrasi lebih lama	
38	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	ROUMUM			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	Unit	1		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		ROUMUM		Anggaran tidak tersedia pada TA 2023	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									6,76	4,89				
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	500	83.500.000.000	200	33.510.000.000	100	16.495.904.164	25	2.317.532.833	25	5.860.652.252	25	3.496.344.696	25	5.901.232.427	100	17.575.762.208	100,00	106,55	300	51.085.762.208	60,00	61,18				
39	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 Tahun	Surat	15000	1.000.000.000	6000	310.000.000	3000	118.043.831	765	30.443.350	176	23.060.200	1318	10.037.930	762	0	3021	63.541.480	100,70	53,83	9021	373.541.480	60,14	37,35	ROUMUM			
			jumlah surat - surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun	surat	15000		6000		3000		765		176		1318		762		3021		100,70		9021		60,14		ROUMUM			
40	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	17.500.000.000	2	7.000.000.000	0	3.494.362.666	1	732.469.283	0	1.252.393.342	0	922.024.651	0	1.126.665.987	1	4.033.553.263	inf	115,43	3	11.033.553.263	60,00	63,05	ROUMUM			
			Jumlah Kapasitas Tagihan Internet yang Dibayarkan	mbps	500		100		100		100		0		0		0		100		100,00		200		40,00		ROUMUM			
			Jumlah Tagihan Air yang Dibayarkan	M3	250000		100000		55000		11528		12000		23230		8242		55000		100,00		155000		62,00		ROUMUM			
			Jumlah Tagihan Listrik yang Dibayarkan	KWH	6200000		3200000		1600000		335360		330000		695660		239012		1600032		100,00		4800032		77,42		ROUMUM			
			Jumlah Tagihan Telepon yang Dibayarkan	Rekening	15		6		3		3		0		0		0		3		100,00		9		60,00		ROUMUM			
			Jumlah Tagihan TV Kabel yang Dibayarkan	Paket	25		10		5		5		0		0		0		5		100,00		15		60,00		ROUMUM			
41	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.000.000.000	1	2.200.000.000	0	800.130.000	2	101.620.750	1	187.530.600	0	261.380.400	0	574.563.900	3	1.125.095.650	inf	140,61	4	3.325.095.650	80,00	66,50	ROUMUM			
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	40		16		8		2		1		3		2		8		100,00		24		60,00		ROUMUM			
42	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	60.000.000.000	2	24.000.000.000	0	12.083.367.667	1	1.452.999.450	0	4.397.668.110	0	2.302.901.715	0	4.200.002.540	1	12.353.571.815	inf	102,24	3	36.353.571.815	60,00	60,59	ROUMUM			
			Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	Orang	1300		520		260		260		0		0		0		260		100,00		780		60,00		ROUMUM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									8,50	5,42				
Predikat Kinerja																									SR	SR				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)													(9)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persen	500	67.100.000.000	200	26.250.000.000	100	9.239.924.576	25	451.557.075	25	2.681.009.763	25	3.254.972.707	25	4.649.215.298	100	11.036.754.843	100,00	119,45	300	37.286.754.843	60,00	55,57					
43	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	1.000.000.000	10	450.000.000	0	230.982.000	1	29.891.600	1	45.630.214	1	76.931.875	2	64.123.150	5	216.576.839	inf	93,76	15	666.576.839	60,00	66,66	ROUMUM				
			Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	Unit	25		10		5		1		1		1		2		5		100,00		15		60,00		ROUMUM				
44	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	300	10.000.000.000	120	3.300.000.000	0	1.472.541.696	12	321.837.415	15	406.935.824	19	373.746.743	14	709.055.788	60	1.811.575.770	inf	123,02	180	5.111.575.770	60,00	51,12	ROUMUM				
			jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	300		120		60		12		15		19		14		60		100,00		180		60,00		ROUMUM				
45	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	500	600.000.000	200	300.000.000	0	23.975.000	0	0	0	79	19.000.000	21	200.000	100	19.200.000	inf	80,08	300	319.200.000	60,00	53,20	ROUMUM					
			Jumlah Pemeliharaan mebel	unit	500		200		100		0		0	79		21		100		100,00		300		60,00		ROUMUM					
46	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	750	1.500.000.000	300	600.000.000	0	206.561.755	0	0	13	66.391.120	71	45.693.000	66	183.393.410	150	295.477.530	inf	143,05	450	895.477.530	60,00	59,70	ROUMUM				
			jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	750		300		150		0		13		71		66		150		100,00		450		60,00		ROUMUM				
47	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	50.000.000.000	20	20.000.000.000	0	6.792.342.987	0	60.956.860	3	1.755.490.065	4	2.739.601.089	3	3.322.844.420	10	7.878.892.434	inf	116,00	30	27.878.892.434	60,00	55,76	ROUMUM				
			jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit	50		20		10		0		3		4		3		10		100,00		30		60,00		ROUMUM				
48	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis	25	4.000.000.000	10	1.600.000.000	5	513.521.138	1	38.871.200	2	406.562.540	0	0	2	369.598.530	5	815.032.270	100,00	158,71	15	2.415.032.270	60,00	60,38	ROUMUM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							6,73	7,23							
Predikat Kinerja																							SR	SR							
	X.XX.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan Baik	Persen	500	23.500.000.000	200	9.300.000.000	100	5.139.963.729	25	1.261.375.371	25	1.324.899.425	25	1.254.901.417	25	1.022.172.368	100	4.863.348.581	100,00	94,62	300	14.163.348.581	60,00	60,27					
49	X.XX.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	1.250.000.000	2	500.000.000	2	250.783.943	2	52.138.362	0	103.991.916	0	34.758.908	0	52.138.362	2	243.027.548	100,00	96,91	4	743.027.548	200,00	59,44	ROUMUM				
50	X.XX.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Stel	500	1.750.000.000	200	700.000.000	50	243.489.750	27	72.814.500	32	84.485.000	41	83.720.000	88	202.358.500	188	443.378.000	376,00	182,09	388	1.143.378.000	77,60	65,34	ROUMUM				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	500		200		100		27		32		41		88		188		188,00		388		77,60		ROUMUM				
51	X.XX.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	10	500.000.000	4	100.000.000	10	100.000.000	0	0	0	0	0	2	10.060.500	2	10.060.500	20,00	10,06	6	110.060.500	60,00	22,01	ROUMUM					
			jumlah orang yang mengikuti medical chek up kepala daerah dan wakil kepala daerah	orang	10		4		10		0		0		0		2		2		20,00		6		60,00		ROUMUM				
52	X.XX.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun anggaran	Orang/ Bulan	10	20.000.000.000	4	8.000.000.000	2	4.545.690.036	2	1.136.422.509	0	1.136.422.509	0	1.136.422.509	0	757.615.006	2	4.166.882.533	100,00	91,67	6	12.166.882.533	60,00	60,83	ROUMUM				
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	10		4		2		2		0		0		0		2		100,00		6		60,00		ROUMUM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							5,67	3,99							
Predikat Kinerja																							SR	SR							
	X.XX.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi dengan Baik	Persen	500	90.030.000.000	200	42.000.000.000	100	18.398.738.906	25	2.621.008.655	25	4.875.401.268	25	5.073.379.224	25	6.236.878.821	100	18.806.667.968	100,00	102,22	300	60.806.667.968	60,00	67,54					

		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
												I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)		(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
53	X.XX.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	jenis	1500	50.000.000.000	600	17.000.000.000	25	7.783.080.500	45	1.299.478.089	80	2.188.216.803	86	2.216.085.695	89	2.565.108.760	300	8.268.889.347	1.200,00	106,24	900	25.268.889.347	60,00	50,54	ROUMUM				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1500		600		300		45		80		86		89		300		100,00		900		60,00		ROUMUM				
54	X.XX.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	jenis	1500	40.000.000.000	600	15.000.000.000	25	7.034.183.000	35	874.670.060	45	1.938.538.176	121	1.878.071.359	99	2.530.955.815	300	7.222.235.410	1.200,00	102,67	900	22.222.235.410	60,00	55,56	ROUMUM				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1500		600		300		35		45		121		99		300		100,00		900		60,00		ROUMUM				
55	X.XX.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu yang Disediakan	Paket	125	30.000.000	50	10.000.000.000	25	3.581.475.406	22	446.860.506	23	748.646.289	31	979.222.170	24	1.140.814.246	100	3.315.543.211	400,00	92,57	150	13.315.543.211	120,00	44.385,14	ROUMUM				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	125		50		250		22		23		31		24		100		40,00		150		120,00		ROUMUM				
			jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretaris daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu yang disediakan	jenis	125		50		25		22		23		31		24		100		400,00		150		120,00		ROUMUM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									5,36	808,93					
Predikat Kinerja																									SR	ST					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		0		0		0		0		0		0	nan		0		nan						
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				0		0		0		0		0		0		0		0	nan		0		nan						

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				66.095.652.486	4.177.628.489	2.632.156.289	442.354.433	829.062.308	589.891.396	588.486.543	2.449.794.680		93,07	6.627.423.169		10,03								
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.735.711.528	1.855.254.711	1.309.321.205	167.235.537	506.623.345	300.463.928	256.399.900	1.230.722.710		94,00	3.085.977.421		19,61								
X.XX		PENUNJANG URUSAN				15.735.711.528	1.855.254.711	1.309.321.205	167.235.537	506.623.345	300.463.928	256.399.900	1.230.722.710		94,00	3.085.977.421		19,61								
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.735.711.528	1.855.254.711	0 1.309.321.205	167.235.537	506.623.345	300.463.928	256.399.900	0 1.230.722.710	nan	94,00	0 3.085.977.421	nan	19,61								
X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	1.187.932.345	0 40.608.423	85 41.626.782	0 6.595.100	0 19.582.400	0 0 0 9.867.500	0 36.045.000	0,00	86,59	0 76.653.423	nan	6,45									
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja Awal, Penyusunan Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra	Dokumen	17	422.340.850	3 5.731.423	3 5.647.882	0 0 3	5.638.200	0 0 0 0	3 5.638.200	100,00	99,83	6	11.369.623	35,29	2,69	ROPBJ	Menambah SDM dan SDM yang telah ada untuk mengikuti Diklat / Bimtek	Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	140.000.000	1 9.867.300	0 20.223.900	0 6.595.100	0 6.601.700	0 0 0 7.027.100	0 20.223.900	nan	100,00	1	30.091.200	20,00	21,49	ROPBJ	Menambah SDM	Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	5		0 1	1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	1 100,00	1 100,00		1		20,00			ROPBJ	Menambah SDM	Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen DPA TA 2023	Dokumen	5		0 1	1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	1 100,00	1 100,00		1		20,00			ROPBJ	Menambah SDM	Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran				
			Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1		0 1	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 100,00	1 100,00		1		100,00			ROPBJ	Menambah SDM	Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran				
			Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1		0 1	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 100,00	1 100,00		1		100,00			ROPBJ	Menambah SDM	Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran				
			Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1		0 1	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 100,00	1 100,00		1		100,00			ROPBJ	Menambah SDM	Terbatasnya SDM dalam penyusunan	Tersedianya Alokasi Anggaran				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
																													Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Fisik dan Laporan Keuangan Biro	Bulan	1	264.074.800	12	15.236.000	12	6.236.900	3	0	3	5.164.400	3	0	3	0	12	5.164.400	100,00	82,80	24	20.400.400	2.400,00	7,73	ROPBJ		Adanya perbedaan pemahaman antara operator dengan para Bagian di lingkup Biro PBJ	Meningkatkan Koordinasi dengan internal Biro PBJ																						
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Biro	Bulan	12		12		12		3		3		3		3		12		100,00		24		200,00		ROPBJ		Adanya perbedaan pemahaman antara operator dengan para Bagian di lingkup Biro PBJ	Meningkatkan Koordinasi dengan internal Biro PBJ																						
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro (LKPD,LKPJ)	Dokumen	4	361.516.695	12	9.773.700	2	9.518.100	0	0	1	2.178.100	0	0	1	2.840.400	2	5.018.500	100,00	52,73	14	14.792.200	350,00	4,09	ROPBJ		Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran																						
			Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Biro (Laporan Tahunan)	Dokumen	1		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		100,00		ROPBJ		Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran																						
			Tersusunnya Laporan Kinerja Biro	Dokumen	1		0		1		0		0		0		1		1		100,00		1		100,00		ROPBJ		Terbatasnya SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Alokasi Anggaran																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																									ST	SR																										
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	1.818.406.400	0	408.586.153	100	90.228.600	0		0	0	38.473.900	0	23.571.000	0	19.414.100	0	81.459.000	0,00	90,28	0	490.045.153	nan	26,95																									
5	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	780.836.520	12	377.487.800	0	73.982.000	0		0	0	33.332.000	0	16.245.000	0	16.245.000	0	65.822.000	nan	88,97	12	443.309.800	inf	56,77	ROPBJ		Jumlah SDM di Biro PBJ belum ideal	Koordinasi antar sub Bagian dilaksanakan secara rutin																					
			Terlaksannya Administrasi Pengelolaan Keuangan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan	Bulan	12		0		12		3		3		3		3		12		100,00		12		100,00		ROPBJ		Jumlah SDM di Biro PBJ belum ideal	Koordinasi antar sub Bagian dilaksanakan secara rutin																						
6	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	140.000.000	12	5.441.932	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	nan	24	5.441.932	200,00	3,89	ROPBJ																									
7	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	3	428.784.940	1	2.798.600	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	nan	2	2.798.600	66,67	0,65	ROPBJ		Jumlah SDM di Biro PBJ belum ideal	Koordinasi antar sub Bagian dilaksanakan secara rutin																						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		ROPBJ		Jumlah SDM di Biro PBJ belum ideal	Koordinasi antar sub Bagian																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I		II		III		IV				K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																											dilaksanakan secara rutin		
8	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terkelolanya dan Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tahun	1	40.000.000	3	4.025.200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	3	4.025.200	300,00	10,06	ROPBJ					
9	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersedia	Laporan	6	428.784.940	3	18.832.621	3	16.246.600	0	0	1	5.141.900	2	7.326.000	2	3.169.100	5	15.637.000	166,67	96,25	8	34.469.621	133,33	8,04	ROPBJ					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											nan	8,82				
Predikat Kinerja																											-	SR				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0	572.931.350	0	26.625.361	100	17.838.900	0	0	0	16.500.000	0	1.338.900	0	0	0	17.838.900	0,00	100,00	0	44.464.261	nan	7,76						
10	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	134.000.000	2	5.842.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	5.842.430	20,00	4,36	ROPBJ					
			Tersusunnya Dokumen Usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023	Dokumen	1			1		1		0		0		0		1		100,00		1		100,00		ROPBJ						
			Tersusunnya Dokumen Usulan Perencanaan Kebutuhan BMD	Dokumen	1			1		1		0		0		0		1		100,00		1		100,00		ROPBJ						
11	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertaksananya premi asuransi BMD OPD	Unit	5	226.500.000	3	15.548.425	3	16.500.000	0	0	3	16.500.000	0	0	0	0	3	16.500.000	100,00	100,00	6	32.048.425	120,00	14,15	ROPBJ					
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		0		0	0		0		0		0		0		nan		0		0,00		ROPBJ						
12	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	18	141.588.750	3	4.132.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	3	4.132.706	16,67	2,92	ROPBJ						
			Tersedianya Laporan BMD (Semesteran dan Tahunan)	Dokumen	2			3		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		ROPBJ						
13	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	70.842.600	3	1.101.800	0	1.338.900	0	0	0	0	1.338.900	0	0	0	1.338.900	nan	100,00	3	2.440.700	100,00	3,45	ROPBJ						
			Tersedianya Laporan Penatausahaan BMD	Bulan	12			12		3		3		3		3		12		100,00		12		100,00		ROPBJ						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											19,88	1,91				
Predikat Kinerja																											SR	SR				
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	1.052.000.000	0	4.188.800	100	22.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0,00	11,11	0	6.688.800	nan	0,64							
14	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	62.000.000	1	2.988.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	2.988.800	100,00	4,82	ROPBJ						
			Terdatanya dan terkelolanya Administrasi Kepegawaian	Tahun	1			1		0		0		0		1		1		100,00		1		100,00		ROPBJ						
15	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	125	990.000.000	5	1.200.000	9	22.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	1	2.500.000	11,11	11,11	6	3.700.000	4,80	0,37	ROPBJ	OPD terkait harus menyesuaikan Anggaran Kontribusi Bimtek / Diklat ke Aplikasi SIPD	Dana DPA tidak sesuai dengan Dana Real untuk mengikuti Bimtek / Diklat	Tersedianya Alokasi Anggaran			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	125			0		0		0		1		0		1		inf		1		0,80		ROPBJ	OPD terkait harus menyesuaikan Anggaran	Dana DPA tidak sesuai dengan Dana Real untuk	Tersedianya Alokasi Anggaran			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																											Kontribusi Bimtek / Diklat ke Aplikasi SIPD	mengikuti Bimtek / Diklat		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								6,43	0,35					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	4.812.162.733	0	579.738.300	100	625.497.111	0	127.235.125	0	115.606.849	0	216.729.268	0	117.130.851	0	576.702.093	0,00	92,20	0	1.156.440.393	nan	24,03				
16	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	5	1.240.000.000	6	42.200.000	8	34.765.600	0	0	8	34.700.000	0	0	0	0	8	34.700.000	100,00	99,81	14	76.900.000	280,00	6,20	ROPBJ			
17	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	403.011.500	12	36.908.200	0	11.648.400	0	0	0	4.883.600	0	4.195.900	0	7.985.300	0	17.064.800	nan	146,50	12	53.973.000	100,00	13,39	ROPBJ			
			Tersedianya Logistik Kantor	Bulan	12				12		3		3		3		3		12		100,00		12		100,00		ROPBJ			
18	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	394.665.500	10	14.327.000	0	10.125.200	0	8.500.000	0	0	0	1.622.000	0	0	0	10.122.000	nan	99,97	10	24.449.000	83,33	6,19	ROPBJ			
			Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		12		12		3		3		3		3		12		100,00		24		200,00		ROPBJ			
19	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.636.162.483	1	481.897.200	0	568.957.911	0	118.735.125	0	76.023.249	0	210.911.368	0	109.145.551	0	514.815.293	nan	90,48	1	996.712.493	8,33	37,81	ROPBJ			
			Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Bulan	12		12		12		3		3		3		3		12		100,00		24		200,00		ROPBJ			
20	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	138.323.250	12	4.405.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	12	4.405.900	100,00	3,19	ROPBJ			
			Tertatanya Arsip Dinamis	Bulan	12		12		12		3		3		3		3		12		100,00		24		200,00		ROPBJ			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								31,02	3,34					
Predikat Kinerja																								SR	SR					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	3.549.000.000	0	191.644.680	100	184.930.880	0	0	0	182.733.000	0	0	0	0	0	182.733.000	0,00	98,81	0	374.377.680	nan	10,55				
21	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Sofa /Kursi Tamu	Set	4	1.149.000.000	2	24.339.000	2	88.600.000	0	0	2	88.444.000	0	0	0	0	2	88.444.000	100,00	99,82	4	112.783.000	100,00	9,82	ROPBJ			
			Lemari kayu	Unit	5		2		2		0		2		0		0		2		100,00		4		80,00		ROPBJ			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0				0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		ROPBJ			
22	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	15	2.400.000.000	6	167.305.680	6	96.330.880	0	0	5	94.289.000	0	0	0	0	5	94.289.000	83,33	97,88	11	261.594.680	73,33	10,90	ROPBJ			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15		6		0		0		0		0		0		0		nan		6		40,00		ROPBJ			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	0,94					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	1.278.072.800	0	241.965.064	100	195.130.717	0	20.100.312	0	110.630.643	0	27.704.760	0	52.480.787	0	210.916.502	0,00	108,09	0	452.881.566	nan	35,43				
23	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	72.477.500	15	1.966.000	0	1.602.205	0	0	0	1.115.600	0	280.000	0	0	0	1.395.600	nan	87,10	15	3.361.600	125,00	4,64	ROPBJ			
			Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12		12		12		3		3		3		3		12		100,00		24		200,00		ROPBJ			
24	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC Floor Standing dipelihara	Unit	0	269.039.300	0	9.150.000	1	0	0	0	1	34.700.000	0	0	0	0	1	34.700.000	100,00	inf	1	43.850.000	inf	16,30	ROPBJ			
			Jumlah Ac split dipelihara	Unit	60		15		6		0		6		0		0		6		100,00		21		35,00		ROPBJ			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV				K	Rp	K						Rp	K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Alat Kantor lainnya dipelihara	Unit	0		0		13	0		13		0		0		13		100,00		13		inf		ROPBJ					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0		0	0		0		0		0		0		nan		0		nan		ROPBJ					
			Jumlah Mesin Tik dipelihara	Unit	0		0		1	0		1		0		0		1		100,00		1		inf		ROPBJ					
25	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	936.556.000	4	230.849.064	0	193.528.512	0	20.100.312	0	74.815.043	0	27.424.760	0	52.480.787	0	174.820.902	nan	90,33	4	405.669.966	400,00	43,32	ROPBJ				
			Terpenuhinya Honorarium Non ASN	Bulan	12		12		12	3		3		3		3		12		100,00		24		200,00		ROPBJ					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	2,57						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	0	1.465.205.900	0	361.897.930	100	131.568.215	0	13.305.000	0	23.096.553	0	28.620.000	0	57.506.662	0	122.528.215	0,00	93,13	0	484.426.145	nan	33,06					
26	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	250.000.000	1	67.442.000	0	53.546.781	0	0	0	8.025.000	0	3.275.000	0	34.361.781	0	45.661.781	nan	85,27	1	113.103.781	20,00	45,24	ROPBJ				
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2		1		1	0		0		0		1		1		100,00		2		100,00		ROPBJ					
27	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	980.205.900	4	102.811.250	0	65.121.434	0	13.305.000	0	10.771.553	0	16.745.000	0	23.144.881	0	63.966.434	nan	98,23	4	166.777.684	11,11	17,01	ROPBJ				
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	Unit	20		4		4	0		4		0		0		4		100,00		8		40,00		ROPBJ					
28	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	78.000.000	4	24.339.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	4	24.339.000	20,00	31,20	ROPBJ					
			Terpeliharanya Mebel	Unit	20		4		6	0		0		0		0		0		0,00		4		20,00		ROPBJ					
29	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop dipelihara	Unit		157.000.000	6	167.305.680	6	12.900.000	0	0	4	4.300.000	2	8.600.000	0	0	6	12.900.000	100,00	100,00	12	180.205.680	inf	114,78	ROPBJ				
			Jumlah PC dipelihara	Unit	25		5		6	0		3		3		0		6		100,00		11		44,00		ROPBJ					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25		5		0	0		0		0		0		0		nan		5		20,00		ROPBJ					
			Jumlah Printer dipelihara	Unit	25		5		5	0		0		0		0		0		0,00		5		20,00		ROPBJ					
			Jumlah Scanner dipelihara	Unit	3		1		1	0		0		0		0		0		0,00		1		33,33		ROPBJ					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	7,18						
Predikat Kinerja																								-	SR						
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				50.359.940.958		2.322.373.778		1.322.835.084		275.118.896		322.438.963		289.427.468		332.086.643		1.219.071.970		92,16		3.541.445.748		7,03					
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				50.359.940.958		2.322.373.778		1.322.835.084		275.118.896		322.438.963		289.427.468		332.086.643		1.219.071.970		92,16		3.541.445.748		7,03					
4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANANPENGADAAN BARANG DAN JASA				50.359.940.958		2.322.373.778	0	1.322.835.084		275.118.896		322.438.963		289.427.468		332.086.643	0	1.219.071.970	nan	92,16	0	3.541.445.748	nan	7,03					
4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan	%	0	21.684.255.418	0	765.015.148	100	384.380.947	0	76.537.827	0	129.318.185	0	95.584.969	0	67.212.166	0	368.653.147	0,00	95,91	0	1.133.668.295	nan	5,23					
1	4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	0	3.713.810.000	0	79.797.785	0	27.116.686	0	19.252.600	0	0	0	2.650.000	0	5.214.086	0	27.116.686	nan	100,00	0	106.914.471	nan	2,88	ROPBJ		terlambatnya OPD dalam mengirimkan laporan	Koordinasi dengan OPD terkait	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pelaksanaan E-Katalog Lokal	Komoditi	0		8		7		0		0		4		3		7		100,00		15		inf		ROPBJ		kurangnya pemahaman OPD dalam pelaksanaan katalog lokal	pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan katalog lokal
			Pelaksanaan E-Market Place lokal	Kategori	0		3		2		0		0		0		0		0		0,00		3		inf		ROPBJ		kurangnya pemahaman OPD dalam pelaksanaan master place	pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan e-master place
			Pembahasan Dokumen RUP	Kegiatan	0		1		1		1		0		0		0		1		100,00		2		inf		ROPBJ		masih banyak OPD yang salah input dalam penginputan RUP	pelaksanaan pendampingan RUP
			Pembahasan Finaliasi Dokumen RUP	Kegiatan	0		1		1		0		0		1		0		1		100,00		2		inf		ROPBJ		masih banyak OPD yang salah input dalam penginputan RUP	pelaksanaan pendampingan RUP
			Penyusunan Draf RUP	Dokumen	0		1		1		0		0		1		0		1		100,00		2		inf		ROPBJ		masih banyak OPD yang salah input dalam penginputan RUP	pelaksanaan pendampingan RUP
			Penyusunan RUP Final	Dokumen	0		1		1		0		0		1		0		1		100,00		2		inf		ROPBJ		masih banyak OPD yang salah input dalam penginputan RUP	pelaksanaan pendampingan RUP
2	4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	0	14.364.860.918	0	519.332.366	1	243.248.622	0	46.028.200	0	102.628.085	0	46.266.892	1	52.523.645	1	247.446.822	100,00	101,73	1	766.779.188	inf	5,34	ROPBJ		Laporan disusun setelah akhir kegiatan dilaksanakan	dilakukan percepatan dalam penyusunan laporan
			Pelaksanaan Proses PBJ Melalui Kelompok Kerja	Paket	3300		300		205		66		54		79		101		300		146,34		600		18,18		ROPBJ		Proses pengadaan sudah melalui Epurschasing	sosialisasi percepatan Epurschasing
3	4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	72	3.605.584.500	12	165.884.997	12	114.015.639	3	11.257.027	3	26.690.100	3	46.668.077	3	9.474.435	12	94.089.639	100,00	82,52	24	259.974.636	33,33	7,21	ROPBJ		Laporan disusun setelah akhir kegiatan dilaksanakan	dilakukan percepatan dalam penyusunan laporan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	5,14				
Predikat Kinerja																									-	SR				
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pesentase pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui sistem pengadaan	%	0	10.548.242.340	0	632.623.281	84	544.460.141	0	43.930.523	0	141.581.067	0	141.309.099	0	186.766.000	0	513.586.689	0,00	94,33	0	1.146.209.970	nan	10,87				
4	4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi SPSE	Kab/Kota	19	4.617.066.090	0	365.147.405	19	314.632.639	2	4.638.500	8	78.696.191	8	77.848.500	1	141.700.000	19	302.883.191	100,00	96,27	19	668.030.596	100,00	14,47	ROPBJ		pelaksanaan PBJ melalui sistem 2. Sarana prasarana pelayanan belum memadai informasi oleh OPD	1.Adanya aplikasi pendukung PBJ 2. Komitmen pelayanan dari staf

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV				K	Rp						K	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0,00	ROPBJ					
			Pembinaan Standarisasi SPSE	OPD	51	51	51	51	3	0	0	0	0	0	3	5,88	54	105,88	ROPBJ												
			Pemeliharaan Server dan Jaringan Aplikasi SPSE	Tahun	1	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100,00	2	200,00	ROPBJ														
			Tersedianya Colocation Server dan Jaringan Aplikasi SPSE	Tahun	1	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100,00	2	200,00	ROPBJ														
5	4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Kab/Kota	19	4.029.313.350	19	191.023.769	19	167.578.726	4	22.637.000	6	49.580.000	9	46.994.000	0	29.768.600	19	148.979.600	100,00	88,90	38	340.003.369	200,00	8,44	ROPBJ		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung IT	Dukungan dari OPD dan UKPBJ Kab Kota dalam pengembangan aplikasi sistem informasi	
				OPD	51	51	51	51	0	0	0	0	51	100,00	102	200,00	ROPBJ														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100,00	1	inf	ROPBJ														
			Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi	2	2	2	2	1	0	0	1	2	100,00	4	200,00	ROPBJ														
6	4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	0	1.901.862.900	0	76.452.107	0	62.248.776	0	16.655.023	0	13.304.876	0	16.466.599	0	15.297.400	0	61.723.898	nan	99,16	0	138.176.005	nan	7,27	ROPBJ		keterbatasan SDM yang memahami pengolahan dan publikasi data	Ketersediaan media sosial	
			Laporan IKM terhadap pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	5	1	1	0	0	0	0	1	1	100,00	2	40,00	ROPBJ														
			Laporan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	60	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	40,00	ROPBJ															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	5,03							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	0	18.127.443.200	0	924.735.349	3	393.993.996	0	154.650.546	0	51.539.711	0	52.533.400	0	78.108.477	0	336.832.134	0,00	85,49	0	1.261.567.483	nan	6,96					
7	4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Bimtek PBJ	Kali	30	10.148.761.800	3	131.320.540	3	85.503.923	0	6.708.500	1	16.824.811	1	27.505.992	1	14.075.000	3	65.114.303	100,00	76,15	6	196.434.843	20,00	1,94	ROPBJ	Penambahan Alokasi Dana	Alokasi Dana belum memenuhi target	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti Zoom.	
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0,00	ROPBJ						
			Pelaksanaan Sidang Kode Etik	Kali	30	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2	6,67	ROPBJ								
			Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	30	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100,00	1	3,33	ROPBJ													
			Pengiriman Personil UKPBJ	Orang	0	0	9	0	0	3	3	9	9	9	100,00	9	inf	ROPBJ													
			Penilaian Angka Kredit	Dokumen	500	100	25	0	0	0	0	25	25	100,00	125	25,00	ROPBJ														
			Sertifikasi Kopetensi KPA/PPK	Angkatan	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	nan	ROPBJ												
8	4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	0	3.701.340.100	0	197.936.492	0	101.399.933	0	12.473.223	0	19.469.953	0	17.357.800	0	34.498.477	0	83.799.453	nan	82,64	0	281.735.945	nan	7,61	ROPBJ		Alokasi Dana belum memenuhi target	Meningkatkan koordinasi ke kabupaten / kota	
			Pembinaan Tingkat Kematangan UKPBJ	Kab/Kota	19	19	10	2	2	3	3	10	100,00	29	152,63	ROPBJ															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Rapat Koordinasi Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kali	10		2		2		0		1		0		1		2		100,00		4		40,00		ROPBJ			
9	4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	0	4.277.341.300	0	595.478.317	0	207.090.140	0	135.468.823	0	15.244.947	0	7.669.608	0	29.535.000	0	187.918.378	nan	90,74	0	783.396.695	nan	18,32	ROPBJ		Alokasi Dana belum memenuhi target	Meningkatkan koordinasi ke kabupaten / kota
			Pendampingan dan Bantuan Hukum terkait PBJ	Tahun	4		1		1		0		0		0		0		0		0,00		1		25,00		ROPBJ			
			Pendampingan Paket Strategis	Paket	60		12		12		3		3		3		12		100,00		24		40,00		ROPBJ					
			Penyedion Klinik Pengadaan	Tahun	1		1		1		0		0		0		0		0,00		1		100,00		ROPBJ					
			Penyelesaian Sangketa Kontrak	Tahun	1		1		1		0		0		0		0		0,00		1		100,00		ROPBJ					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	3,10					
Predikat Kinerja																								-	SR					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
											(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)					(11)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		SEKRETARIAT DPRD				562.520.545.821		179.906.829.229		203.468.379.405		25.531.307.029		48.276.107.766		45.568.279.567		99.378.739.087		218.754.433.449		107,51		398.661.262.678		70,87					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				361.700.221.321		112.957.649.237		97.033.190.839		15.464.957.460		25.357.270.866		19.420.722.999		51.522.739.087		111.765.690.412		115,18		224.723.339.649		62,13					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				361.700.221.321		112.957.649.237		97.033.190.839		15.464.957.460		25.357.270.866		19.420.722.999		51.522.739.087		111.765.690.412		115,18		224.723.339.649		62,13					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		359.200.221.321	100	112.957.649.237	100	97.033.190.839	25	15.464.957.460	25	25.357.270.866	25	19.420.722.999	25	51.522.739.087	100	111.765.690.412	100,00	115,18	200	224.723.339.649	inf	62,56					
			Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	%			100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		inf						
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	425	1.973.251.000	85	517.937.500	85	571.416.350	21.25	155.512.150	21.25	118.070.750	21.25	163.117.500	21.25	251.980.100	85	688.680.500	100,00	120,52	170	1.206.618.000	40,00	61,15					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RKA, DPA	Dokumen	15	1.125.000.000	3	383.492.500	3	321.416.350	0	112.116.750	0	74.743.750	1	100.087.500	2	109.392.000	3	396.340.000	100,00	123,31	6	779.832.500	40,00	69,32	SEKWAN				
			Dokumen Renstra	Dokumen	1		1		1		0		0		1		0		1		100,00		2		200,00		SEKWAN				
			Dokumen RTP, RKT, Rencana Aksi, dan PK	Dokumen	20		4		4		4		0		0		0		4		100,00		8		40,00		SEKWAN				
			Dokumen Renja	Dokumen	10		2		2		0		0		1		1		2		100,00		4		40,00		SEKWAN				
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD)	Dokumen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SEKWAN					
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	Laporan	20	0	4	0	4	250.000.000	1	43.395.400	1	43.327.000	1	63.030.000	1	142.588.100	4	292.340.500	100,00	116,94	8	292.340.500	40,00	inf	SEKWAN				
			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	15		3		3		1		0		1		1		3		100,00		6		40,00		SEKWAN				
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	848.251.000	0	134.445.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	134.445.000	nan	15,85	SEKWAN					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	500	42.603.027.000	100	9.498.503.697	100	10.641.934.208	25	2.003.169.621	25	3.998.778.853	25	2.413.730.612	25	3.316.360.000	100	11.732.039.086	100,00	110,24	200	21.230.542.783	40,00	49,83					
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	87	38.798.777.000	87	8.122.517.281	89	9.417.370.835	87	1.612.018.821	0	3.675.546.353	0	2.226.175.612	0	2.836.000.000	87	10.349.740.786	97,75	109,90	174	18.472.258.067	200,00	47,61	SEKWAN				
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	orang	60	1.293.500.000	12	304.060.000	13	279.370.873	8	45.170.000	0	76.370.000	0	72.210.000	0	145.110.000	8	338.860.000	61,54	121,29	20	642.920.000	33,33	49,70	SEKWAN				
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	0	0	0	0	10000	393.317.500	2500	191.130.950	3000	115.732.500	2500	39.225.000	5000	102.000.000	13000	448.088.450	130,00	113,93	13000	448.088.450	inf	inf	SEKWAN				
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1.300.000.000	1	560.486.916	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	560.486.916	20,00	43,11	SEKWAN					
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SEKWAN					
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	1.210.750.000	12	511.439.500	12	551.875.000	3	154.849.850	3	131.130.000	3	76.120.000	3	233.250.000	12	595.349.850	100,00	107,88	24	1.106.789.350	40,00	91,41	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	500	3.205.198.000	100	632.307.156	100	842.706.100	25	129.517.800	25	518.124.762	25	103.367.000	25	53.901.000	100	804.910.562	100,00	95,51	200	1.437.217.718	40,00	44,84					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
11	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMd Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen	20	364.322.500	4	72.719.300	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	72.719.300	20,00	19,96	SEKWAN			
12	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	260	2.067.235.500	52	321.028.466	52	460.350.000	0	0	52	427.399.762	0	7.200.000	0	0	52	434.599.762	100,00	94,41	104	755.628.228	40,00	36,55	SEKWAN			
13	X.XX.01.1.03.03	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	orang	0	773.640.000	0	238.559.390	3	309.709.500	5	56.986.500	0	90.725.000	0	96.167.000	0	53.901.000	5	297.779.500	166,67	96,15	5	536.338.890	inf	69,33	SEKWAN			
14	X.XX.01.1.03.04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	SEKWAN			
15	X.XX.01.1.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	3	72.646.600	3	72.531.300	0	0	0	0	0	0	3	72.531.300	100,00	99,84	3	72.531.300	inf	inf	SEKWAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	500	2.360.725.000	100	137.393.000	100	337.508.000	25	31.239.960	25	68.681.911	25	13.120.000	25	1.719.129	100	114.761.000	100,00	34,00	200	252.154.000	40,00	10,68				
16	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas BesarAtribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	700	355.000.000	140	110.704.000	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	140	110.704.000	20,00	31,18	SEKWAN			
17	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen	600	450.000.000	10	23.529.000	85	45.300.000	0	0	85	41.387.000	0	0	0	85	41.387.000	100,00	91,36	95	64.916.000	15,83	14,43	SEKWAN				
			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll)	dokumen	0	0	85	0	85	0	0	85	0	85	0	85	100,00	85	inf	SEKWAN										
18	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	490.160.000	1	0	0	57.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	1	0	20,00	0,00	SEKWAN			
			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	200	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42	21,00	SEKWAN							
19	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	494.400.000	9	0	9	123.426.000	0	0	1	1.910.000	0	0	0	1	1.910.000	11,11	1,55	10	1.910.000	22,22	0,39	SEKWAN				
20	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	25	571.165.000	5	3.160.000	5	111.146.000	1	31.239.960	1	25.384.911	2	13.120.000	1	1.719.129	5	71.464.000	100,00	64,30	10	74.624.000	40,00	13,07	SEKWAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	2,95					
Predikat Kinerja																								-	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	500	20.161.050.000	100	16.584.227.770	100	9.009.436.784	25	978.501.192	25	4.215.673.986	25	1.957.464.785	25	7.052.790.770	100	14.204.430.733	100,00	157,66	200	30.788.658.503	40,00	152,71				
21	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	100	512.500.000	20	160.770.000	20	94.130.780	0	0	10	67.437.480	10	26.687.700	0	60.515.600	20	154.640.780	100,00	164,28	40	315.410.780	40,00	61,54	SEKWAN			
22	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	15	1.125.000.000	3	7.658.521.500	3	1.926.045.000	0	25.126.800	3	1.795.194.000	0	77.076.000	0	3.302.773.235	3	5.200.170.035	100,00	269,99	6	12.858.691.535	40,00	1.142,99	SEKWAN			
23	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Foto Presiden dan Wakil Presiden + Frame	paket	0	377.125.000	0	1.488.931.700	4	305.069.750	0	0	0	301.197.400	0	0	0	985.373.922	0	1.286.571.322	0,00	421,73	0	2.775.503.022	nan	735,96	SEKWAN			
			Pengadaan Lambang Burung Garuda	Paket	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	SEKWAN						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	100,00	4	40,00	SEKWAN									
24	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	4.136.376.000	3	2.902.647.579	3	2.896.761.340	0	216.105.671	1	836.533.666	1	933.592.750	1	1.109.081.809	3	3.095.313.896	100,00	106,85	6	5.997.961.475	40,00	145,01	SEKWAN			
			Jumlah Rapat Koordinasi internal	kali	1560	312	312	78	78	78	80	314	100,64	626	40,13	SEKWAN														
			Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	400	80	80	0	10	70	0	80	100,00	160	40,00	SEKWAN														
25	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	50	1.043.790.000	10	233.116.000	11	512.611.250	3	47.146.000	4	240.098.750	1	4.500.000	4	298.614.250	12	590.359.000	109,09	115,17	22	823.475.000	44,00	78,89	SEKWAN			
26	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35	3.762.500.000	35	762.385.000	22	774.420.000	0	62.540.000	12	279.360.000	10	210.320.000	0	354.784.400	22	907.004.400	100,00	117,12	57	1.669.389.400	162,86	44,37	SEKWAN			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
27	X.XX.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	orang	12000	770.000.000	2400	199.546.000	1280	199.981.000	0	0	0	0	1280	199.981.000	1280	199.981.000	100,00	100,00	3680	399.527.000	30,67	51,89	SEKWAN						
28	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2700	7.663.759.000	540	2.920.291.261	2400	2.193.183.364	600	587.909.221	700	642.469.940	600	705.288.335	800	696.288.504	2700	2.631.956.000	112,50	120,01	3240	5.552.247.261	120,00	72,45	SEKWAN				
29	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	770.000.000	12	258.018.730	625	107.234.300	3	39.673.500	500	53.382.750	100	0	200	45.378.050	803	138.434.300	128,48	129,10	815	396.453.030	1.358,33	51,49	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	82,23							
Predikat Kinerja																							-	T							
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	500	33.331.861.000	100	21.244.042.876	100	15.232.388.050	25	31.500.000	25	275.397.060	25	309.081.960	25	20.340.487.037	100	20.956.466.057	100,00	137,58	200	42.200.508.933	40,00	126,61					
30	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	10.000.000.000	4	5.416.650.000	1	335.431.000	0	0	1	228.404.100	0	0	1	176.230.122	2	404.634.222	200,00	120,63	6	5.821.284.222	120,00	58,21	SEKWAN				
31	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kursi Tamu	Unit	100	2.890.025.000	25	1.104.054.400	9	323.114.500	0	0	5	46.992.960	0	0	9	527.633.530	14	574.626.490	155,56	177,84	39	1.678.680.890	39,00	58,09	SEKWAN				
			Pengadaan Meja Rapat	unit	100		25		30		0	0	0		0		30		30		100,00		55		55,00	SEKWAN					
32	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Personal komputer	Unit	75	2.729.100.000	15	1.415.595.920	15	300.005.000	5	31.500.000	0	0	10	262.500.000	5	636.483.978	20	930.483.978	133,33	310,16	35	2.346.079.898	46,67	85,97	SEKWAN				
33	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	15.000.000.000	2	13.307.742.556	1	11.925.153.550	0	0	0	0	0	46.581.960	1	14.102.906.332	1	14.149.488.292	100,00	118,65	3	27.457.230.848	100,00	183,05	SEKWAN				
34	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2.712.736.000	0	0	1	2.348.684.000	0	0	0	0	0	0	1	4.897.233.075	1	4.897.233.075	100,00	208,51	1	4.897.233.075	50,00	180,53	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							9,13	16,64							
Predikat Kinerja																							SR	SR							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	23.468.762.000	100	8.391.337.929	100	11.860.836.647	25	1.211.321.489	25	3.437.882.044	25	2.573.856.801	25	4.725.798.264	100	11.948.858.598	100,00	100,74	200	20.340.196.527	40,00	86,67					
35	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	surat	12000	1.310.100.000	2750	141.174.600	50000	195.210.475	2000	54.601.000	1000	79.012.300	0	0	5000	48.883.475	8000	182.496.775	16,00	93,49	10750	323.671.375	89,58	24,71	SEKWAN				
36	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kwh	7155660	7.524.112.000	1431132	1.956.155.747	1431132	2.430.920.400	357783	354.811.372	357783	754.901.872	357783	549.180.334	357783	440.384.918	1431132	2.099.278.496	100,00	86,36	2862264	4.055.434.243	40,00	53,90	SEKWAN				
			Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	menit	285300		57060		57060		14265		14265		14265		14265		57060		100,00		114120		40,00	SEKWAN					
			Jumla tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	m3	31000		6098		12000		6042		6042		6042		6052		24178		201,48		30276		97,66	SEKWAN					
37	X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	jenis	100	625.485.000	20	1.327.165.950	20	1.445.960.000	5	58.631.950	5	207.943.825	5	347.027.258	5	1.660.303.367	20	2.273.906.400	100,00	157,26	40	3.601.072.350	40,00	575,72	SEKWAN				
38	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum kantor yang tersedia	orang	500	14.009.065.000	100	4.966.841.632	142	7.788.745.772	100	743.277.167	0	2.396.024.047	0	1.677.649.209	42	2.576.226.504	142	7.393.176.927	100,00	94,92	242	12.360.018.559	48,40	88,23	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							6,97	19,54							
Predikat Kinerja																							SR	SR							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	500	28.978.690.001	100	12.759.579.666	100	5.287.275.000	25	484.573.061	25	1.309.582.980	25	1.214.704.128	25	5.290.294.250	100	8.299.154.419	100,00	156,96	200	21.058.734.085	40,00	72,67					
39	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	2.252.600.000	5	660.676.620	7	854.240.000	1	87.300.000	2	214.032.752	4	218.920.342	0	210.000.000	7	730.253.094	100,00	85,49	12	1.390.929.714	48,00	61,75	SEKWAN				
40	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	unit	200	4.077.125.000	38	1.639.302.329	57	1.982.840.000	2	153.170.665	15	254.401.808	40	315.300.724	0	444.700.000	57	1.167.573.197	100,00	58,88	95	2.806.875.526	47,50	68,84	SEKWAN				
41	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	300	1.327.260.000	60	138.800.000	60	93.500.000	0	0	20	24.950.000	20	24.500.000	25	50.490.000	65	99.940.000	108,33	106,89	125	238.740.000	41,67	17,99	SEKWAN				
42	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Personal Komputer dan Printer	Unit	500	500.000.000	100	96.756.800	130	92.900.000	0	0	20	15.066.400	30	14.561.350	50	22.662.250	100	52.290.000	76,92	56,29	200	149.046.800	40,00	29,81	SEKWAN				
43	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin gedung kantor	paket	5	12.137.736.000	1	7.207.781.029	1	1.100.000.000	0	138.609.163	1	586.200.850	0	313.287.804	0	2.278.847.000	1	3.316.944.817	100,00	301,54	2	10.524.725.846	40,00	86,71	SEKWAN				
44	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket	5		0	0	1	975.795.000	0	105.493.233	0	214.931.170	1	328.133.908	0	1.735.900.000	1	2.384.458.311	100,00	244,36	1	2.384.458.311	20,00	238.445.831.100,00	SEKWAN				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
45	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (rutin)	paket	7	8.683.969.000	2	3.016.262.888	1	188.000.000	0	0	0	0	0	1	547.695.000	1	547.695.000	100,00	291,33	3	3.563.957.888	42,86	41,04	SEKWAN					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								4,83	5.298.796.253,47						
Predikat Kinerja																								SR	ST						
	X.XX.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang	325	200.065.625.000	65	42.424.251.723	65	42.708.644.700	65	10.347.711.367	65	11.255.229.690	65	10.519.542.583	25	10.354.965.537	220	42.477.449.177	338,46	99,46	285	84.901.700.900	87,69	42,44					
			Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	500		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		40,00						
46	X.XX.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	325	193.075.796.500	65	41.223.014.755	65	41.432.390.700	65	10.325.922.407	0	10.347.829.690	0	10.354.842.583	0	10.354.965.537	65	41.383.560.217	100,00	99,88	130	82.606.574.972	40,00	42,78	SEKWAN				
47	X.XX.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Daerah yang disediakan	stel	352	5.998.578.500	65	1.158.536.968	65	1.078.004.000	0	21.788.960	65	907.400.000	0	0	0	0	65	929.188.960	100,00	86,20	130	2.087.725.928	36,93	34,80	SEKWAN				
			Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang disediakan.	stel	325		65		65		0		65		0		0	65		100,00		130		40,00		SEKWAN					
			Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH) yang disediakan.	stel	650		130		130		0		130		0		0	130		100,00		260		40,00		SEKWAN					
			Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang disediakan.	stel	325		65		65		0		65		0		0	65		100,00		130		40,00		SEKWAN					
			Jumlah Pakaian Sipil Lengkap untuk PAW yang disediakan.	stel	25		5		5		0		0		0		0	0		0,00		5		20,00		SEKWAN					
			Jumlah Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang disediakan.	stel	325		65		65		0		65		0		0	65		100,00		130		40,00		SEKWAN					
			Jumlah Pin Lambang Daerah untuk PAW yang disediakan.	set	25		5		5		0		0		0		0	0		0,00		5		20,00		SEKWAN					
48	X.XX.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	325	991.250.000	5	42.700.000	65	198.250.000	0	0	0	0	65	164.700.000	0	0	65	164.700.000	100,00	83,08	70	207.400.000	21,54	20,92	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								4,45	2,05						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	X.XX.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Administrasi DPRD yang dapat difasilitasi dengan Baik	%	500	3.052.032.320	100	768.067.920	100	541.045.000	25	91.910.820	25	159.848.830	25	152.737.630	25	134.443.000	100	538.940.280	100,00	99,61	200	1.307.008.200	40,00	42,82					
			Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	500		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		40,00						
49	X.XX.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Administrasi LHKPN yang disediakan	orang	325	200.000.000	65	15.184.000	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	65	15.184.000	20,00	7,59	SEKWAN					
			Jumlah Keanggotaan DPRD yang disediakan	orang	325		65		65		0		0		0		0	0		0,00		65		20,00		SEKWAN					
50	X.XX.01.1.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang difasilitasi	fraksi	35	767.994.500	7	39.271.000	7	46.620.000	7	16.165.000	0	7.259.000	0	12.968.000	0	8.400.000	7	44.792.000	100,00	96,08	14	84.063.000	40,00	10,95	SEKWAN				
51	X.XX.01.1.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Konsultasi DPRD yang difasilitasi	kali	200	1.636.270.500	40	266.168.000	12	143.400.000	3	25.755.000	3	46.085.000	3	45.517.000	3	26.043.000	12	143.400.000	100,00	100,00	52	409.568.000	26,00	25,03	SEKWAN				
			Jumlah rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi	kali	1200		48		24		6		6		6		6	24		100,00		72		6,00		SEKWAN					
52	X.XX.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga pada Rumah Jabatan Ketua DPRD (Pakan Natura)	bulan	60	447.767.320	12	447.444.920	12	351.025.000	3	49.990.820	3	106.504.830	3	94.252.630	3	100.000.000	12	350.748.280	100,00	99,92	24	798.193.200	40,00	178,26	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								2,08	4,27						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				200.820.324.500		66.949.179.992		106.435.188.566		10.066.349.569		22.918.836.900		26.147.556.568		47.856.000.000		106.988.743.037		100,52		173.937.923.029		86,61					
4.02		SEKRETARIAT DPRD				200.820.324.500		66.949.179.992		106.435.188.566		10.066.349.569		22.918.836.900		26.147.556.568		47.856.000.000		106.988.743.037		100,52		173.937.923.029		86,61					
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	%		180.337.424.970	100	56.140.316.277	100	106.435.188.566	25	10.066.349.569	25	22.918.836.900	25	26.147.556.568	25	47.856.000.000	100	106.988.743.037	100,00	100,52	200	163.129.059.314	inf	90,46					
			Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi	%			100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		inf						
			Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	%			100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		inf						
4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	%	500	43.789.694.500	100	8.188.280.372	100	12.805.025.100	25	1.575.094.793	25	1.224.765.639	25	1.816.626.933	25	2.910.000.000	100	7.526.487.365	100,00	58,78	200	15.714.767.737	40,00	35,89					
1	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Pembahasan Propemperda yang disusun	kali	5	4.417.150.030	1	1.814.427.074	1	1.507.700.300	0	256.278.471	1	270.171.108	0	27.486.000	0	580.000.000	1	1.133.935.579	100,00	75,21	2	2.948.362.653	40,00	66,75	SEKWAN		tidak ada		Ketersediaan Anggaran

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pembentukan Peraturan Daerah																														
			Jumlah Pembahasan Ranperda di luar Propemperda yang diharmonisasikan.	kali	5		1		3		0		1		0		0		1		33,33		2		40,00		SEKWAN					
			Jumlah Pembahasan Ranperda usul inisiatif DPRD yang diharmonisasikan.	kali	30		6		6		2		1		0		0		3		50,00		9		30,00		SEKWAN					
2	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	5	36.032.764.470	1	5.681.088.676	0	9.196.665.400	0	1.193.146.142	0	902.728.231	1	1.681.749.933	4	2.000.000.000	5	5.777.624.306	inf	62,82	6	11.458.712.982	120,00	31,80	SEKWAN					
			Jumlah pembahasan keputusan DPRD yang difasilitasi.	kali	200		40		40		20		0		0		15		35		87,50		75		37,50		SEKWAN		Belum Optimalnya SKPD terkait memberi tanggapan dalam sidang pembahasan	Ketersediaan Anggaran		
			Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi.	kali	85		17		12		0		0		0		8		8		66,67		25		29,41		SEKWAN					
3	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian terhadap usul inisiatif DPRD yang dilaksanakan	kali	30	1.064.530.000	6	330.835.022	6	334.097.800	0		0	5.191.300	0	26.726.000	12	200.000.000	12	231.917.300	200,00	69,42	18	562.752.322	60,00	52,86	SEKWAN					
4	4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	5	2.275.250.000	1	361.929.600	0	679.302.900	0	125.670.180	0	46.675.000	0	80.665.000	3	130.000.000	3	383.010.180	inf	56,38	4	744.939.780	80,00	32,74	SEKWAN					
			Jumlah Naskah Akademik Ranperda yang disusun	kali	30		6		6		0		1		0		3		4		66,67		10		33,33		SEKWAN					
			Jumlah Seminar Ranperda yang difasilitasi	kali	30		6		4		0		0		1		3		4		100,00		10		33,33		SEKWAN					
5	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah pembahasan Tata Tertib DPRD yang difasilitasi	kali	5		0	0	0	1	1.087.258.700	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	nan	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								45,78	nan							
Predikat Kinerja																								SR	-							
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	%	500	15.832.967.500	100	5.269.227.335	100	10.796.800.300	25		0	25	51.745.000	25	2.448.291.124	25	1.595.000.000	100	4.095.036.124	100,00	37,93	200	9.364.263.459	40,00	59,14					
6	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS difasilitasi	kali	5	3.627.906.250	1	969.699.694	1	1.908.228.300	1		0	0	8.640.000	0	851.319.735	0	5.000.000	1	864.959.735	100,00	45,33	2	1.834.659.429	40,00	50,57	SEKWAN				
7	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS difasilitasi	kali	5	2.556.865.970	1	593.237.581	1	2.026.868.700	0		0	0	8.710.000	1	611.544.552	0		1	620.254.552	100,00	30,60	2	1.213.492.133	40,00	47,46	SEKWAN				
8	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD difasilitasi	kali	5	1.603.864.000	1	1.541.559.062	1	2.095.633.700	0		0	0	9.510.000	1	1.394.200	0	900.000.000	1	910.904.200	100,00	43,47	2	2.452.463.262	40,00	152,91	SEKWAN				
9	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Pembahasan Perubahan APBD difasilitasi	kali	5	5.089.056.780	1	1.081.822.500	1	2.176.569.700	0		0	0	10.710.000	0	10.402.145	1	690.000.000	1	711.112.145	100,00	32,67	2	1.792.934.645	40,00	35,23	SEKWAN				
10	4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semester difasilitasi	kali	5	860.561.000	1	51.209.500	1	392.876.450	0		0	0	5.325.000	1	4.808.750	0		1	10.133.750	100,00	2,58	2	61.343.250	40,00	7,13	SEKWAN				
11	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD difasilitasi	kali	5	2.094.713.500	1	1.031.698.998	1	2.196.623.450	0		0	0	8.850.000	1	968.821.742	0		1	977.671.742	100,00	44,51	2	2.009.370.740	40,00	95,93	SEKWAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								14,12	35,38							
Predikat Kinerja																								SR	SR							
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi	%	500	19.257.333.000	100	7.245.824.508	100	7.446.523.250	25	1.558.839.500	25	2.713.080.260	25	1.893.533.650	25	2.385.000.000	100	8.550.453.410	100,00	114,82	200	15.796.277.918	40,00	82,03						
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	%	500		100		100		25		25		25		25		100		100,00		200		40,00							
12	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang disusun	dokumen	15	3.029.567.600	3	1.160.518.047	3	1.252.434.300	0	200.355.800	1	496.344.000	1	428.653.000	1	325.000.000	3	1.450.352.800	100,00	115,80	6	2.610.870.847	40,00	86,18	SEKWAN					
			Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang disusun yang difasilitasi	kali	600		120		120		30		30		30		30		120		100,00		240		40,00		SEKWAN					
13	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Infrastruktur yang disusun	dokumen	15	3.573.244.370	3	1.149.202.700	3	1.111.933.000	0	336.969.700	1	415.730.300	1	284.862.500	1	390.000.000	3	1.427.562.500	100,00	128,39	6	2.576.765.200	40,00	72,11	SEKWAN					
			Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang disusun yang difasilitasi	kali	600		120		120		0		30		30		60		120		100,00		240		40,00		SEKWAN					
14	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang	dokumen	15	3.650.652.000	3	1.333.440.800	3	1.196.152.850	0	364.605.000	1	394.325.200	1	248.253.400	1	410.000.000	3	1.417.183.600	100,00	118,48	6	2.750.624.400	40,00	75,35	SEKWAN					

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																									
											I		II		III		IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
		Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat yang disusun																																																	
			Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun yang difasilitasi	kali	600		120		120		0		30		30		60		120		100,00		240		40,00		104,78	SEKWAN																								
15	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Perekonomian Rakyat yang disusun	dokumen	15	4.092.018.530	3	1.912.858.500	3	1.896.316.400	0	407.580.000	1	766.621.400	1	640.738.250	1	560.000.000	3	2.374.939.650	100,00	125,24	6	4.287.798.150	40,00	104,78	SEKWAN																									
			Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang disusun yang difasilitasi	kali	600		120		120		0		30		30		60		120		100,00		240		40,00		104,78	SEKWAN																								
16	4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun	dokumen	15	3.550.519.500	3	682.834.500	3	442.746.550	0	220.730.000	1	89.132.600	1	9.819.250	1	410.000.000	3	729.681.850	100,00	164,81	6	1.412.516.350	40,00	39,78	SEKWAN																									
			Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun yang difasilitasi	kali	600		120		120		0		30		30		60		120		100,00		240		40,00		39,78	SEKWAN																								
17	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pembahasan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi	kali	10	462.581.000	2	290.292.107	2	345.887.000	1	28.599.000	0	63.396.000	0	0	1	0	2	91.995.000	100,00	26,60	4	382.287.107	40,00	82,64	SEKWAN																									
18	4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi	kali	5	898.750.000	1	716.677.854	1	446.740.500	0	0	0	2.487.800	1	130.248.250	0	290.000.000	1	422.736.050	100,00	94,63	2	1.139.413.904	40,00	126,78	SEKWAN																									
19	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi	kali	0	0	0	0	1	754.312.650	0	0	1	485.042.960	0	150.959.000	0	0	1	636.001.960	100,00	84,32	1	636.001.960	inf	inf	SEKWAN																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	%	500	53.691.267.500	100	25.359.635.830	100	54.582.871.616	25	3.585.080.508	25	14.553.853.424	25	13.566.008.182	25	28.625.000.000	100	60.329.942.114	100,00	110,53	200	85.689.577.944	40,00	159,60																										
20	4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek Bagi anggota DPRD yang difasilitasi	kali	20	24.342.500	4	3.206.983.197	4	17.943.700.716	0	2.106.890.258	1	3.285.062.342	1	1.787.789.253	2	8.200.000.000	4	15.379.741.853	100,00	85,71	8	18.586.725.050	40,00	76.355,04	SEKWAN																									
			Jumlah Pendalaman Tugas Pokok dan Fungsi bagi Komisi DPRD yang difasilitasi	kali	0	0	0	48	12	12	12	12	12	12	12	12	48	100,00	48	inf	SEKWAN																															
21	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah pelaksanaan tugas Pimpinan dan anggota DPRD yang didokumentasikan.	dokumen	2260	30.682.864.470	452	19.884.187.292	452	34.095.297.700	0	1.025.787.950	0	10.445.742.982	452	11.074.277.929	0	19.500.000.000	452	42.045.808.861	100,00	123,32	904	61.929.996.153	40,00	201,84	SEKWAN																									
			Jumlah pelaksanaan tugas Pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasikan.	kali	45960	9192	9192	0	1000	5000	3500	9500	103,35	18692	40,67	SEKWAN																																				
			Jumlah Sosialisasi Perda yang dilaksanakan	kali	1300	260	260	0	65	65	130	260	100,00	520	40,00	SEKWAN																																				
22	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	0	15.039.522.000	0	1.755.570.541	0	2.062.207.700	0	372.984.600	0	674.741.300	0	555.000.000	0	820.000.000	0	2.422.725.900	nan	117,48	0	4.178.296.441	nan	27,78	SEKWAN																									
			Jumlah Pakar Dan Ahli Yang Disediakan untuk DPRD.	orang	105	21	30	25	0	5	0	30	100,00	51	48,57	SEKWAN																																				
			Jumlah Pakar Dan Ahli Yang Disediakan untuk Kegiatan Hari Jadi Sumatera Barat.	orang	15	0	4	0	0	0	4	100,00	4	26,67	SEKWAN																																					
23	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	35	7.944.538.530	7	512.894.800	7	481.665.500	7	79.417.700	0	148.306.800	0	148.941.000	0	105.000.000	7	481.665.500	100,00	100,00	14	994.560.300	40,00	12,52	SEKWAN																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	%	500	36.321.342.000	100	4.943.051.053	100	13.182.587.000	25	2.739.774.692	25	2.551.477.300	25	5.041.065.189	25	6.841.000.000	100	17.173.317.181	100,00	130,27	200	22.116.368.234	40,00	60,89																										
24	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam daerah yang difasilitasi	kali	2200	5.713.491.200	390	137.368.500	390	211.448.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	390	137.368.500	17,73	2,40	SEKWAN																									
25	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	dokumen	325	2.879.217.745	65	268.050.448	65	224.407.500	0	0	65	83.659.000	0	16.325.150	0	41.000.000	65	140.984.150	100,00	62,83	130	409.034.598	40,00	14,21	SEKWAN																									
26	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses yang difasilitasi	kali	975	27.728.633.055	195	4.537.632.105	3	12.746.730.900	1	2.739.774.692	1	2.467.818.300	0	5.024.740.039	1	6.800.000.000	3	17.032.333.031	100,00	133,62	198	21.569.965.136	20,31	77,79	SEKWAN																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																				
Predikat Kinerja																																																				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dan Pengawasan Kode Etik	%	500	1.664.330.000	100	207.580.100	100	1.087.684.000	25	150.876.950	25	246.031.800	25	224.390.518	25	0	100	621.299.268	100,00	57,12	200	828.879.368	40,00	49,80				
27	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pembahasa Penyusunan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	kali	10	1.146.159.000	2	127.500.480	2	694.481.000	0	149.656.950	1	246.031.800	0	128.143.636	0	0	1	523.832.386	50,00	75,43	3	651.332.866	30,00	56,83	SEKWAN			
28	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pemabhasan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	kali	15	518.171.000	3	80.079.620	3	393.203.000	0	1.220.000	0	0	1	96.246.882	0	0	1	97.466.882	33,33	24,79	4	177.546.502	26,67	34,26	SEKWAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																									SR	SR				
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Untuk Pimpinan Dan Alat Kelengkapan Dewan.	%	500	9.780.490.470	100	4.926.717.079	100	6.533.697.300	25	456.683.126	25	1.577.883.477	25	1.157.640.972	25	5.500.000.000	100	8.692.207.575	100,00	133,04	200	13.618.924.654	40,00	139,25				
29	4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kinerja yang disusun.	dokumen	5	725.264.470	1	12.044.000	1	277.169.800	0	9.550.000	0	37.117.950	1	29.143.000	0	94.000.000	1	169.810.950	100,00	61,27	2	181.854.950	40,00	25,07	SEKWAN			
30	4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah tugas badan musyawarah yang difasilitasi	kali	50	4.542.626.000	10	2.446.086.439	10	2.066.886.000	0	0	1	320.714.716	7	1.006.006.007	2	426.000.000	10	1.752.720.723	100,00	84,80	20	4.198.807.162	40,00	92,43	SEKWAN			
31	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	180	4.512.600.000	36	2.468.586.640	36	1.855.762.700	4	447.133.126	20	1.220.050.811	10	122.491.965	5	2.680.000.000	39	4.469.675.902	108,33	240,85	75	6.938.262.542	41,67	153,75	SEKWAN			
32	4.02.02.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	dokumen	0	0	0	0	2	2.333.878.800	0	0	0	0	0	0	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	50,00	98,55	1	2.300.000.000	inf	inf	SEKWAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																									-	-				

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV																
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)										(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.661.403.952		0		65.444.046.345		2.323.089.852		7.441.552.237		7.899.480.172		75.800.398.980		93.464.521.241		142,82		93.464.521.241		2.552,70					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				38		0		7.749.609.860		1.335.726.650		2.343.151.356		2.056.404.406		2.284.681.617		8.019.964.029		103,49		8.019.964.029		21.105.168.497,37					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				38		0		7.749.609.860		1.335.726.650		2.343.151.356		2.056.404.406		2.284.681.617		8.019.964.029		103,49		8.019.964.029		21.105.168.497,37					
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		38	200	0	100	7.749.609.860	25	1.335.726.650	25	2.343.151.356	25	2.056.404.406	25	2.284.681.617	100	8.019.964.029	100,00	103,49	300	8.019.964.029	inf	21.105.168.497,37					
X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	600		0	200	0	100	87.737.200	25	61.783.120	25	8.855.000	25	11.000.550	25	5.487.100	100	87.125.770	100,00	99,30	300	87.125.770	50,00	inf				Penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai schedule
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10		0	2	0	2	71.515.900	1	55.570.720	0	5.967.000	1	5.259.750	0	4.260.100	2	71.057.570	100,00	99,36	4	71.057.570	40,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
2	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen	2		0	2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	0	100,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 903/860/APKD/BPKAD/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD da RKA-PPKD Tahun Anggaran 2023			
3	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	15		0	3	0	22	16.221.300	6	6.212.400	9	2.888.000	5	5.740.800	2	1.227.000	22	16.068.200	100,00	99,06	25	16.068.200	166,67	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
4	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	14		0	14	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	14	0	100,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 903/860/APKD/BPKAD/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD da RKA-PPKD Tahun Anggaran 2023			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								101,67	nan						
Predikat Kinerja																								ST	-						
X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Bulan	72	38	24	0	12	5.206.164.373	3	789.602.496	3	1.819.246.078	3	1.173.794.144	3	1.365.742.910	12	5.148.385.628	100,00	98,89	36	5.148.385.628	50,00	13.548.383.231,58				Pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi dan dukungan dengan pihak-pihak terkait	
5	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	190	38	38	0	38	5.035.746.873	38	753.084.496	0	1.781.879.578	0	1.134.459.144	0	1.329.907.910	38	4.999.331.128	100,00	99,28	76	4.999.331.128	40,00	13.156.134.547,37	KESBANGPOL				Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
											I		II		III		IV																																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
6	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	55		0	11	0	11	165.300.000	11	33.565.000	0	36.665.000	0	37.875.000	0	35.835.000	11	143.940.000	100,00	87,08	22	143.940.000	40,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal																							
7	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	12		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan ini tidak dianggarkan karena digabungkan dengan kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																									
8	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	5		0	1	0	0		0	0		0	1		0	0		0	1	0	inf	nan	2	0	40,00	nan	KESBANGPOL		Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal																						
9	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	JJumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	1		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan ini digabung dengan kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD																							
10	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	90		0	18	0	18	5.117.500	6	2.953.000	5	701.500	5	1.460.000	2		0	18	5.114.500	100,00	99,94	36	5.114.500	40,00	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																						
Predikat Kinerja																																																						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Bulan	72		0	24	0	12	32.537.200	3	28.640.100	3		0	3	2.504.900	3		0	12	31.145.000	100,00	95,72	36	31.145.000	50,00	inf			Penyusunan dokumen penatausahaan barang milik daerah sesuai regulasi dan dukungan dengan pihak-pihak terkait																						
11	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Unit	25		0	5	0	5	28.800.000	5	27.417.800	0		0	0		0	0		0	5	27.417.800	100,00	95,20	10	27.417.800	40,00	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal																					
12	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Dokumen	12		0		0	12	3.737.200	3	1.222.300	3		0	3	2.504.900	3		0	12	3.727.200	100,00	99,73	12	3.727.200	100,00	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																						
Predikat Kinerja																																																						
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	420		0	140	0	70	57.572.000	20	4.310.000	20		8.845.000	20	23.457.000	10		0	70	36.612.000	100,00	63,59	210	36.612.000	50,00	inf			Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam peningkatan kapasitas SDM																						
13	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	152		0	38	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	nan	nan	38	0	25,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 903/860/APKD/BPKAD/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD da RKA-PPKD Tahun Anggaran 2023																							

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
14	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	0	100,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan karena belum prioritas		
15	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	0	19.332.000	0		0	0	0	0	18.395.000	0	0	0	18.395.000	nan	95,15	0	18.395.000	nan	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40			39		0		0		0	39		0		39		100,00		39		97,50		KESBANGPOL				
16	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang	50	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	10	0	20,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan karena digabungkan dengan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			
17	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	kali	24	0	6	0	3	38.240.000	2	4.310.000	1	8.845.000	0	5.062.000	0	0	3	18.217.000	100,00	47,64	9	18.217.000	37,50	inf	KESBANGPOL			Komitmen pimpinan untuk peningkatan kompetensi ASN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan					
Predikat Kinerja																									-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Bulan	72	0	24	0	12	1.469.167.773	3	288.576.589	3	344.684.357	3	626.876.948	3	491.416.310	12	1.751.554.204	100,00	119,22	36	1.751.554.204	50,00	inf				Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan	
18	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	35	0	7	0	10	9.248.000	5	2.309.200	5	2.309.200	0	4.622.000	0	0	10	9.240.400	100,00	99,92	17	9.240.400	48,57	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	
19	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah infocus yang disediakan	unit	1	0	0	1	5.038.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan karena belum prioritas			
20	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah AC split yang disediakan	Unit	8	0	0	2	12.000.000	2	11.400.000	0	0	0	0	0	0	2	11.400.000	100,00	95,00	2	11.400.000	25,00	inf	KESBANGPOL				Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	
21	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Cendera Mata, Makan Minum Tamu)	Jenis		0	0	7	41.432.900	3	7.385.400	2	8.957.450	1	24.381.800	1	9.838.650	7	50.563.300	100,00	122,04	7	50.563.300	inf	inf	KESBANGPOL					
			Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	Kali	12	0		5		3		1		1		0		5		100,00		5		41,67		KESBANGPOL				Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	
22	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	35	0	7	0	7	30.348.000	4	7.581.600	3	8.572.750	0	8.705.000	0	13.235.000	7	38.094.350	100,00	125,53	14	38.094.350	40,00	inf	KESBANGPOL				Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
23	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	eksemplar	720	0	147	0	144	16.080.000	36	2.680.000	36	2.680.000	36	5.360.000	36	5.360.000	144	16.080.000	100,00	100,00	291	16.080.000	40,42	inf	KESBANGPOL				Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi/Ket		Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV																	
											(5)		(6)		(7)		(8)																	
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)				
																														kegiatan sesuai jadwal				
24	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	60	0	12	0	12	1.355.019.973	3	257.220.389	3	322.164.957	3	583.808.148	3	462.982.660	12	1.626.176.154	100,00	120,01	24	1.626.176.154	40,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal				
25	X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	Arsip	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan									
Predikat Kinerja																								-	-									
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Bulan	72	0	24	0	12	100.460.680	3	51.871.000	3	0	3	0	3	53.350.000	12	105.221.000	100,00	104,74	36	105.221.000	50,00	inf				Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan				
26	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 903/860/APKD/BPKAD/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD da RKA-PPKD Tahun Anggaran 2023						
27	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	unit	50	0	10	0	33	75.710.200	25	51.871.000	0	0	0	0	9	21.550.000	34	73.421.000	103,03	96,98	44	73.421.000	88,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal				
28	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru (printer dan komputer PC))	Unit		0	0	3	24.750.480	0	0	0	0	0	0	3	31.800.000	3	31.800.000	100,00	128,48	3	31.800.000	inf	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		0	nan	nan	KESBANGPOL									
29	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Garase)	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan karena belum prioritas						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan									
Predikat Kinerja																								-	-									
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	72	0	24	0	12	579.655.634	3	44.534.622	3	138.173.332	3	146.289.963	3	231.827.978	12	560.825.895	100,00	96,75	36	560.825.895	50,00	inf				Adanya dDukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai schedue				
30	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	500	0	100	0	150	10.355.000	35	2.650.000	40	2.650.000	50	2.648.400	25	2.406.000	150	10.354.400	100,00	99,99	250	10.354.400	50,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
31	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	bulan		0		0	12	105.000.000	3	17.945.614	3	11.419.370	3	26.470.597	3	19.786.510	12	75.622.091	100,00	72,02	12	75.622.091	inf	inf	KESBANGPOL			
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	20		4		4		4		0		0		0		4		100,00		8		40,00		KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	mater kubik	1400		367		450		100		100		150		100		450		100,00		817		58,36		KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kwh	200000		40000		42000		10000		10000		15000		7000		42000		100,00		82000		41,00		KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
32	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	55	0	11	0	11	464.300.634	11	23.939.008	0	124.103.962	0	117.170.966	0	209.635.468	11	474.849.404	100,00	102,27	22	474.849.404	40,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									inf	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	72	0	24	0	12	216.315.000	3	66.408.723	3	23.347.589	3	72.480.901	3	136.857.319	12	299.094.532	100,00	138,27	36	299.094.532	50,00	inf				Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan
33	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	4	0	0	0	1	41.190.000	1	4.346.543	0	0	0	11.275.306	0	10.181.034	1	25.802.883	100,00	62,64	1	25.802.883	25,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
34	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	0	0	0	131.947.000	0	52.022.180	0	19.207.589	0	32.254.195	0	27.349.874	0	130.833.838	nan	99,16	0	130.833.838	nan	inf	KESBANGPOL			
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	30		6		7		3		3		0		1		7		100,00		13		43,33		KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
35	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	156	0	0	0	39	26.190.000	10	10.040.000	12	4.140.000	12	11.988.400	5	0	39	26.168.400	100,00	99,92	39	26.168.400	25,00	inf	KESBANGPOL			Adanya dukungan dan komitmen SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
36	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	Unit	1	0	1	0	1	16.988.000	0	0	0	0	1	16.963.000	1	99.326.411	2	116.289.411	200,00	684,54	3	116.289.411	300,00	inf	KESBANGPOL			Adanya kerjasama yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penangguh Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																														kegiatan sesuai jadwal	
37	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	KESBANGPOL			
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Pagar)	Unit	39		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		39		100,00		KESBANGPOL	Kegiatan tidak dianggarkan karena belum prioritas			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			3.661.403.914		0	57.694.436.485	987.363.202	5.098.400.881	5.843.075.766	73.515.717.363	85.444.557.212	148,10	85.444.557.212	2.333,66															
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.661.403.914		0	57.694.436.485	987.363.202	5.098.400.881	5.843.075.766	73.515.717.363	85.444.557.212	148,10	85.444.557.212	2.333,66															
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	nilai	1.160.736.000	5,41	0	2,72	4.175.357.490	1	148.730.703	1	1.021.531.877	0,62	2.493.615.348	0,1	623.290.050	2,72	4.287.167.978	100,00	102,68	8,13	4.287.167.978	inf	369,35						
8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	rekomendasi	6	1.160.736.000	2	0	1	4.175.357.490	0	148.730.703	0	1.021.531.877	0	2.493.615.348	1	623.290.050	1	4.287.167.978	100,00	102,68	3	4.287.167.978	50,00	369,35					Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM yang memadai untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
1	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	640	714.236.000	300	0	175	179.765.500	100	61.341.250	0	13.510.000	75	85.150.300	160	310.246.300	335	470.247.850	191,43	261,59	635	470.247.850	99,22	65,84	KESBANGPOL				Adanya komitemen pimpinan dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan
2	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	267	415.000.000	100	0	9730	3.937.803.490	20	71.571.053	9000	1.008.021.877	600	2.372.166.548	110	308.389.150	9730	3.760.148.628	100,00	95,49	9830	3.760.148.628	3.681,65	906,06	KESBANGPOL				Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan
3	8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	5	31.500.000	1	0	1	57.788.500	0	15.818.400	0	0	0	36.298.500	1	4.654.600	1	56.771.500	100,00	98,24	2	56.771.500	40,00	180,23	KESBANGPOL	Realisasi laporan pada akhir tahun			Adanya dukungan SDM dalam melaksanakan kegiatan sesuai schedule
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								1.273,62	384,04						
Predikat Kinerja																								ST	ST						
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Nilai	642.946.914	16,45	0	3,28	45.191.256.995	1	485.823.950	1	2.484.119.500	1,19	1.863.000.392	0,09	68.574.502.762	3,28	73.407.446.604	100,00	162,44	19,73	73.407.446.604	inf	11.417,34						
8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan	rekomendasi	1	642.946.914	5	0	1	45.191.256.995	0	485.823.950	0	2.484.119.500	0	1.863.000.392	1	68.574.502.762	1	73.407.446.604	100,00	162,44	6	73.407.446.604	600,00	11.417,34				Adanya komitmen pimpinan dan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																						
					I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																										dukungan SDM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait politik																		
1	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1250	16.085.914	2200	0	8050	45.113.763.095	500	485.373.950	4500	2.466.317.500	1000	1.841.832.392	7477	68.574.502.762	13477	73.368.026.604	167,42	162,63	15677	73.368.026.604	1.254,16	456.101,07	KESBANGPOL	Adanya tambahan anggaran Pokok-pokok pikiran DPRD untuk pendidikan politik		Adanya dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan																	
2	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	400	536.861.000	60	0	50	49.179.400	10	450.000	25	17.802.000	5	21.168.000	10	0	50	39.420.000	100,00	80,16	110	39.420.000	27,50	7,34	KESBANGPOL			Adanya koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan																	
3	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	5	90.000.000	1	0	1	28.314.500	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	2	0	40,00	0,00	KESBANGPOL	Adanya refocusing anggaran																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										440,55	152.036,14																				
Predikat Kinerja																										ST	ST																				
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	%		416.606.000	200	0	100	607.982.300	25	23.934.800	25	308.077.350	25	133.787.700	25	514.154.200	100	979.954.050	100,00	161,18	300	979.954.050	inf	235,22																					
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	rekomendasi	6	416.606.000	2	0	1	607.982.300	0	23.934.800	0	308.077.350	0	133.787.700	1	514.154.200	1	979.954.050	100,00	161,18	3	979.954.050	50,00	235,22				Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM dalam penyusunan rekomendasi kebijakan tentang ormas																	
1	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	350	266.606.000	470	0	400	500.000.000	0	0	200	296.427.550	100	99.450.650	450	511.289.200	750	907.167.400	187,50	181,43	1220	907.167.400	348,57	340,27	KESBANGPOL	Adanya tambahan anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk pembinaan Ormas		Adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan																	
2	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang	Orang	30	75.000.000	6	0	50	41.638.000	20	17.063.300	0	0	20	15.154.250	10	0	50	32.217.550	100,00	77,38	56	32.217.550	186,67	42,96	KESBANGPOL			Adanya dukungan SDM																	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
										I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%							
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)			
		Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				dalam pelaksanaan kegiatan sesuai schedule			
3	8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	5	75.000.000	1	0	1	66.344.300	0	6.871.500	0	11.649.800	0	19.182.800	1	2.865.000	1	40.569.100	100,00	61,15	2	40.569.100	40,00	54,09	KESBANGPOL	Laporan Monitoring disusun pada akhir tahun anggaran		Adanya dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							191,75	145,77							
Predikat Kinerja																							ST	ST							
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai		1.441.115.000	15,6	0	3,11	1.347.280.700	1	208.258.000	1	235.197.500	1,02	334.648.260	0,09	1.363.045.550	3,11	2.141.149.310	100,00	158,92	18,71	2.141.149.310	inf	148,58					
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	rekomendasi	1	1.441.115.000	5	0	1	1.347.280.700	0	208.258.000	0	235.197.500	0	334.648.260	1	1.363.045.550	1	2.141.149.310	100,00	158,92	6	2.141.149.310	600,00	148,58				Adanya komitmen dan dukungan SDM dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
1	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	640	660.758.000	640	0	3395	1.244.860.000	500	196.823.000	1500	201.459.900	1000	294.681.760	1515	1.356.640.050	4515	2.049.604.710	132,99	164,65	5155	2.049.604.710	805,47	310,19	KESBANGPOL	Penambahan anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk sosialisasi P4GN		Adanya dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan	
2	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	640	718.357.000	48	0	30	102.420.700	5	11.435.000	10	33.737.600	10	39.966.500	5	6.405.500	30	91.544.600	100,00	89,38	78	91.544.600	12,19	12,74	KESBANGPOL			Adanya komunikasi yang baik dengan Tim FKUB	
3	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	5	62.000.000	1	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0,00	nan	1	0	20,00	0,00	KESBANGPOL			Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							279,22	107,64							
Predikat Kinerja																							ST	ST							
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Nilai		0	0	0	3,02	6.372.559.000	1	120.615.749	1	1.049.474.654	0,94	1.018.024.066	0,08	2.440.724.801	3,02	4.628.839.270	100,00	72,64	3,02	4.628.839.270	inf	inf					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I		II		III		IV														
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																												
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	rekomendasi	30	0	0	0	5	6.372.559.000	1	120.615.749	1	1.049.474.654	1	1.018.024.066	2	2.440.724.801	5	4.628.839.270	100,00	72,64	5	4.628.839.270	16,67	inf				Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait pemantapan kewaspadaan nasional
1	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan karena belum prioritas		
2	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	670	0	100	0	130	3.899.434.000	30	32.638.650	30	645.770.000	20	660.720.800	50	2.039.783.532	130	3.378.912.982	100,00	86,65	230	3.378.912.982	34,33	inf	KESBANGPOL	Terdapatnya anggaran hibah instansi vertikal		Dukungan SDM yang memadai dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
3	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	20	0	4	0	4	232.394.400	1	11.065.450	1	64.223.380	1	68.655.434	1	36.382.139	4	180.326.403	100,00	77,59	8	180.326.403	40,00	inf	KESBANGPOL		Kurangnya SDM Intelijen untuk menginventarisir permasalahan dan isu strategis di daerah	
4	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	30	0	6	0	23	2.240.730.600	3	76.911.649	4	339.481.274	10	288.647.832	10	364.559.130	27	1.069.599.885	117,39	47,73	33	1.069.599.885	110,00	inf	KESBANGPOL	Adanya penambahan anggaran untuk rapat-rapat tim Forkopimda	Jadwal Pimpinan yang sangat dinamis	Dukungan SDM untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim secara berkala
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								46,08	nan					
Predikat Kinerja																								SR	-					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPd
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPd Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
									I	II		III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				77.538.001.242		14.877.699.069		10.795.650.447		1.147.512.067		2.565.736.387		3.541.717.359		5.621.168.910		12.876.134.723		119,27		27.753.833.792		35,79																						
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				40.077.001.242		7.354.252.899		7.816.952.030		984.808.035		2.003.102.035		2.200.980.758		2.874.168.910		8.063.059.738		103,15		15.417.312.637		38,47																						
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				40.077.001.242		7.354.252.899		7.816.952.030		984.808.035		2.003.102.035		2.200.980.758		2.874.168.910		8.063.059.738		103,15		15.417.312.637		38,47																						
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		38.947.001.242		7.145.700.974	100	7.816.952.030		984.808.035		2.003.102.035		2.200.980.758		2.874.168.910	0	8.063.059.738	0,00	103,15	0	15.208.760.712	nan	39,05																						
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	133.000.000	0	77.567.913	85	46.864.895	0	10.946.000	0	5.022.000	0	8.426.000	0	41.133.597	0	65.527.597	0,00	139,82	0	143.095.510	nan	107,59																						
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA-SKPD, perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD) yang disusun	Dokumen		79.000.000		14.373.800	6	21.869.000		5.342.000		4.022.000	0	4.366.000	6	7.701.620	6	21.431.620	100,00	98,00	6	35.805.420	inf	45,32	BPBD																					
			Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen					1						0		1		1		100,00		1		inf		BPBD																					
2	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun	Dokumen		54.000.000		63.194.113	4	24.995.895	1	5.604.000	1	1.000.000	1	4.060.000	1	33.431.977	4	44.095.977	100,00	176,41	4	107.290.090	inf	198,69	BPBD																					
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja tahunan yang disusun	Dokumen					1						0		1		1		100,00		1		inf		BPBD																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																									inf	122,00						
Predikat Kinerja																																										-	ST					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	0	27.485.000.000	0	4.791.478.685	100	5.936.087.148	0	851.386.606	0	1.776.985.511	0	1.629.896.170	100	1.564.982.863	100	5.823.251.150	100,00	98,10	100	10.614.729.835	inf	38,62																						
3	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		25.991.000.000		4.543.730.385	0	5.780.895.382		830.761.606		1.744.446.761	0	1.584.996.170		1.519.795.463	0	5.680.000.000	nan	98,25	0	10.223.730.385	nan	39,34	BPBD																					
			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	225		50		50		50		0		0		0		50		100,00		100		44,44		BPBD																					
4	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	orang	60	1.267.000.000	18	204.367.900	12	144.008.300	12	20.625.000	0	29.287.600	0	44.900.000	0	45.187.400	12	140.000.000	100,00	97,22	30	344.367.900	50,00	27,18	BPBD																					
5	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	Laporan	65	227.000.000	13	43.380.400	13	11.183.466	3	0	10	3.251.150	0	0	0	0	13	3.251.150	100,00	29,07	26	46.631.550	40,00	20,54	BPBD																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																										nan	17,41					
Predikat Kinerja																																											-	SR				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	%	0	201.000.000	0	95.208.842	100	20.562.900	0	0	0	1.345.000	0	15.575.000	0	12.595.000	0	29.515.000	0,00	143,54	0	124.723.842	nan	62,05																						
6	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit		0	1	3.211.300	1	8.000.000	0	0	0	0	1	8.000.000	0	0	1	8.000.000	100,00	100,00	2	11.211.300	inf	inf	BPBD																					
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD																					
7	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	5	17.000.000	1	3.211.300	1	1.392.900	0	0	1	1.345.000	0	0	0	1	1.345.000	100,00	96,56	2	4.556.300	40,00	26,80	BPBD																						
			Jumlah pengelola BMD perangkat daeah yang dibayarkan honornya	orang					2		0		2		0		0		2		100,00		2		inf		BPBD																					
8	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	5	184.000.000	1	88.786.242	1	11.170.000	0	0	0	0	0	7.575.000	1	12.595.000	1	20.170.000	100,00	180,57	2	108.956.242	40,00	59,22	BPBD																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																										nan	inf					
Predikat Kinerja																																											-	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
										I		II														III		IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	0	182.000.000	0	20.617.200	100	20.817.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	20.617.200	nan	11,33					
9	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	8	182.000.000	1	20.617.200	3	10.408.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	20.617.200	12,50	11,33	BPBD				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0		0	0	0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD				
10	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang	0	0	0	0	3	10.408.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan						
Predikat Kinerja																								-	-						
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	0	611.001.242	0	440.875.051	100	279.970.157	0	34.436.676	0	65.278.850	0	34.714.120	0	251.353.200	0	385.782.846	0,00	137,79	0	826.657.897	nan	135,30					
11	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit/buah	596	76.000.000	116	22.002.200	62	6.300.000	0	0	40	4.140.000	22	2.130.000	0	0	62	6.270.000	100,00	99,52	178	28.272.200	29,87	37,20	BPBD				
12	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit/buah	1749	314.000.000	349	62.111.500	55	12.607.800	0	0	0	3.957.500	0	4.540.000	4.000.000	0	12.497.500	0,00	99,13	349	74.609.000	19,95	23,76	BPBD					
13	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit/buah	5443	140.000.000	1083	38.434.500	512	15.611.900	0	0	250	10.369.000	100	3.356.000	162	44.072.900	512	57.797.900	100,00	370,22	1595	96.232.400	29,30	68,74	BPBD				
			Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	kali	0		0		7		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BPBD				
14	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	lembar	257399	81.000.000	51479	13.000.000	12244	15.865.750	0	0	12244	5.865.750	0	0	0	12244	5.865.750	100,00	36,97	63723	18.865.750	24,76	23,29	BPBD					
15	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	5	1.242	1	305.326.851	1	229.584.707	0	34.436.676	0	40.946.600	0	24.688.120	1	203.280.300	1	303.351.696	100,00	132,13	2	608.678.547	40,00	49.007.934,54	BPBD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	3.267.205,84						
Predikat Kinerja																								-	ST						
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	222.000.000	0	30.788.600	100	8.500.800	0	0	0	7.600.000	0	0	0	15.000.000	0	22.600.000	0,00	265,86	0	53.388.600	nan	24,05					
16	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	unit/set	35	77.000.000	7	6.638.600	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	7	6.638.600	20,00	8,62	BPBD	Sub kegiatan ini tidak ada dalam DPA 2023			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD						
17	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	Unit/set	27	145.000.000	3	24.150.000	3	8.500.800	0	0	1	7.600.000	0	0	2	15.000.000	3	22.600.000	100,00	265,86	6	46.750.000	22,22	32,24	BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	2,40						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	5.965.000.000	0	1.075.048.233	100	1.359.885.680	0	87.921.753	0	62.674.174	0	504.967.568	0	550.184.250	0	1.205.747.745	0,00	88,67	0	2.280.795.978	nan	38,24					
18	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	2500	26.000.000	500	4.930.000	750	1.500.000	0	0	700	1.500.000	0	0	50	606.471	750	2.106.471	100,00	140,43	1250	7.036.471	50,00	27,06	BPBD				
19	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas agihan internet yang dibayarkan	mbps	500	498.000.000	100	195.127.293	100	299.822.259	100	40.781.625	0	24.544.756	0	55.509.299	0	49.577.779	100	170.413.459	100,00	56,84	200	365.540.752	40,00	73,40	BPBD				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD						
			jumlah rekening telepon/fax yang dibayarkan	rekening	10		2		2		2		0		0		0		2		100,00		4		40,00		BPBD				
			jumlah tagihan listrik (PLN) yang	KVA	6875		1375		1375		1375		0		0		0		1375		100,00		2750		40,00		BPBD				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			dibayarkan																												
20	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	5.441.000.000	0	874.990.940	0	1.058.563.421	0	47.140.128	0	36.629.418	0	449.458.269	0	500.000.000	0	1.033.227.815	nan	97,61	0	1.908.218.755	nan	35,07	BPBD				
			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	130		26		23		23		0		0		0		23		100,00		49		37,69		BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	6,78						
Predikat Kinerja																								-	SR						
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	%	0	4.148.000.000	0	614.116.450	100	144.263.450	0	117.000	0	84.196.500	0	7.401.900	0	438.920.000	0	530.635.400	0,00	367,82	0	1.144.751.850	nan	27,60					
21	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	5	108.000.000	1	39.190.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	39.190.000	20,00	36,29	BPBD				
22	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	255	3.322.000.000	51	387.315.450	53	110.537.450	13	117.000	0	74.096.500	15	7.401.900	25	273.000.000	53	354.615.400	100,00	320,81	104	741.930.850	40,78	22,33	BPBD				
23	X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	32.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	5.000.000	20,00	15,63	BPBD	Sub kegiatan ini tidak ada dalam DPA 2023			
			Jumlah pemeliharaan mebel	Unit	0		0		25		0		0		0		0		0		0,00		0		nan		BPBD				
24	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	495	61.000.000	99	10.190.000	25	7.390.000	0	0	10	7.200.000	0	0	15	14.000.000	25	21.200.000	100,00	286,87	124	31.390.000	25,05	51,46	BPBD				
25	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	216.000.000	1	144.941.000	1	17.836.000	0	0	0	0	0	1	151.920.000	1	151.920.000	100,00	851,76	2	296.861.000	40,00	137,44	BPBD					
26	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	94.000.000	5	22.480.000	1	3.500.000	0	0	1	2.900.000	0	0	0	1	2.900.000	100,00	82,86	6	25.380.000	24,00	27,00	BPBD					
27	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	315.000.000	2	5.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	5.000.000	20,00	1,59	BPBD	Sub kegiatan ini tidak ada dalam DPA 2023			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	10,80						
Predikat Kinerja																								-	SR						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.461.000.000		7.523.446.170		2.978.698.417		162.704.032		562.634.352		1.340.736.601		2.747.000.000		4.813.074.985		161,58		12.336.521.155		32,93					
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.461.000.000		7.523.446.170		2.978.698.417		162.704.032		562.634.352		1.340.736.601		2.747.000.000		4.813.074.985		161,58		12.336.521.155		32,93					
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	%		37.461.000.000		7.523.446.170	72	2.978.698.417		162.704.032		543.195.852		1.340.736.601		2.747.000.000	0	4.793.636.485	0,00	160,93	0	12.317.082.655	nan	32,88					
1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase informasi rawan bencana provinsi yang disebarluaskan	%	0	3.503.000.000	0	586.411.377	57	192.549.400	0	0	0	7.581.000	0	165.162.600	0	19.000.000	0	191.743.600	0,00	99,58	0	778.154.977	nan	22,21					
1	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	6	1.989.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	nan	100,00	0	1.000.000	0,00	0,05	BPBD	Sub Kegiatan ini tidak ada dalam DPA 2023				
2	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah sosialisasi dan penyaluran kebencanaan di masyarakat yang dilaksanakan	kali	290	1.514.000.000	2	586.411.377	1	191.549.400	0	0	0	6.581.000	1	165.162.600	0	19.000.000	1	190.743.600	100,00	99,58	3	777.154.977	1,03	51,33	BPBD				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		Provinsi (Per Jenis Bencana)			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,52	25,69						
Predikat Kinerja																								SR	SR						
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana	%	0	25.740.000.000	0	5.693.928.526	57	2.472.702.199	0	138.304.332	0	426.593.417	0	1.075.737.870	0	2.670.000.000	0	4.310.635.619	0,00	174,33	0	10.004.564.145	nan	38,87					
3	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan pelatihan kebencanaan bagi aparatur yang dilaksanakan	kali	5	1.009.000.000	1	1.779.099.724	0	944.115.200	0	0	0	32.227.300	0	619.046.725	0	1.322.000.000	0	1.973.274.025	nan	209,01	1	3.752.373.749	20,00	371,89	BPBD				
			Jumlah pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan	kali	5		5		8		0		0		3		5		8		100,00		13		260,00		BPBD				
4	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan data dan informasi bencana yang disusun	Dokumen	5	6.764.000.000	1	1.275.155.600	1	860.053.050	0	133.005.332	0	261.604.264	0	200.939.298	1	264.000.000	1	859.548.894	100,00	99,94	2	2.134.704.494	40,00	31,56	BPBD				
5	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang disediakan	jenis	10	2.263.000.000	2	468.742.611	2	194.929.580	0	3.270.500	0	4.396.000	0	25.530.125	2	739.000.000	2	772.196.625	100,00	396,14	4	1.240.939.236	40,00	54,84	BPBD				
6	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	1.941.000.000	0	299.140.002	0	55.907.000	0	0	0	6.528.475	0	31.044.740	0	53.000.000	0	90.573.215	nan	162,01	0	389.713.217	nan	20,08	BPBD				
			Jumlah pertemuan/koordinasi/event/pelatihan antar stakeholder dalam rangka pengelolaan risiko bencana	kali	7		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		28,57		BPBD				
7	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	jumlah penguatan/peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan	kali	50	10.487.000.000	35	1.590.763.138	5	243.207.800	0	0	0	80.082.348	1	148.464.575	4	14.000.000	5	242.546.923	100,00	99,73	40	1.833.310.061	80,00	17,48	BPBD				
			Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan	kali	50		10		1		0		0		0		1		1		100,00		11		22,00		BPBD				
8	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah koordinasi TRC Provinsi yang dilakukan	kali	5	1.009.000.000	1	115.276.611	1	85.847.000	0	2.028.500	0	35.631.561	0	36.042.807	1	212.000.000	1	285.702.868	100,00	332,80	2	400.979.479	40,00	39,74	BPBD				
			Jumlah peningkatan/pengembangan kapasitas TRC Provinsi yang dilakukan	kali	5		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		BPBD				
9	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	0	1.349.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	0,00	BPBD				
			Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview	dokumen	4		0		1		0		0		0		0		0		0,00		0		0,00		BPBD				
10	1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat provinsi yang dilakukan	kali	5	918.000.000	1	165.750.840	2	87.642.569	0	0	0	6.123.469	0	14.669.600	2	66.000.000	2	86.793.069	100,00	99,03	3	252.543.909	60,00	27,51	BPBD				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	56,31						
Predikat Kinerja																								-	R						
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	%	0	3.965.000.000	0	808.203.827	77	162.427.216	0	10.513.700	0	69.122.335	0	50.267.331	0	31.000.000	0	160.903.366	0,00	99,06	0	969.107.193	nan	24,44					
11	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kewenangan provinsi yang disusun	Laporan	5	1.817.000.000	1	301.367.569	1	100.039.164	0	3.147.400	0	48.340.481	0	29.904.350	1	18.000.000	1	99.392.231	100,00	99,35	2	400.759.800	40,00	22,06	BPBD				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan		BPBD				
12	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	0	262.000.000	0	46.663.750	0	28.616.652	0	5.594.100	0	5.538.429	0	9.933.075	0	7.000.000	0	28.065.604	nan	98,07	0	74.729.354	nan	28,52	BPBD				
			Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang disusun	Laporan	5		1		1		0		0		0		1		1		100,00		2		40,00		BPBD				
13	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	Orang	0	1.624.000.000	0	411.415.995	0	32.758.000	0	758.800	0	15.243.425	0	10.429.906	0	6.000.000	0	32.432.131	nan	99,01	0	443.848.126	nan	27,33	BPBD				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Evakuasi Korban Bencana	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																												
			Jumlah logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan	paket	10		2		1	0	0	0	0	0	0	1	1.013.400	100,00	100,00	3		30,00			BPBD						
14	1.05.03.1.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan epidemi/wabah penyakit yang disusun	Laporan	5	262.000.000	1	48.756.513	1	1.013.400	1	1.013.400	0	0	0	0	0	1	1.013.400	100,00	100,00	2	49.769.913	40,00	19,00	BPBD					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		nan		0		nan		BPBD						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	6,92					
Predikat Kinerja																									-	SR					
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik	sistem	0	4.253.000.000	0	434.902.440	1	151.019.602	0	13.886.000	0	39.899.100	0	49.568.800	0	27.000.000	0	130.353.900	0,00	86,32	0	565.256.340	nan	13,29					
15	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan?	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	5	1.084.000.000	0	24.610.198	0	21.462.602	0	960.000	0	8.831.600	0	5.458.500		6.000.000	0	21.250.100	nan	99,01	0	45.860.298	0,00	4,23	BPBD				
			Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan	kali	5		2		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		2		40,00		BPBD						
16	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilakukan	kali		1.173.000.000		125.422.669	1	64.385.000		12.926.000	1	31.067.500	0	500.000	0	0	1	44.493.500	100,00	69,11	1	169.916.169	inf	14,49	BPBD				
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana	kabupaten/kota	95		19		19	0	0	0	0	0	19		19		100,00		38		40,00		BPBD						
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Laporan	0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan		1		inf		BPBD						
17	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	0	1.996.000.000	0	284.869.573	0	65.172.000	0	0	0	0	0	43.610.300	0	21.000.000	0	64.610.300	nan	99,14	0	349.479.873	nan	17,51	BPBD				
			Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana provinsi/kabupaten/kota yang disusun	dokumen	5		1		1	0	0	0	0	0	1		1		100,00		2		40,00		BPBD						
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pengkajian kebutuhan pasca bencana provinsi	laporan	5		1		1	0	0	0	0	0	1		1		100,00		2		40,00		BPBD						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	2,13					
Predikat Kinerja																									-	SR					

FORMULIR E19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)		
		BADAN PENDAPATAN DAERAH				2.779.430.000		685.470.450		88.209.206.076		8.745.885.430		25.456.153.363		21.023.994.432		36.880.249.263		92.106.282.488		104,42		92.791.752.938		3.338,52				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		80.119.313.330		7.232.828.591		22.868.504.328		18.594.342.318		33.470.036.737		82.165.711.974		102,55		82.165.711.974		inf				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		80.119.313.330		7.232.828.591		22.868.504.328		18.594.342.318		33.470.036.737		82.165.711.974		102,55		82.165.711.974		inf				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		0		0	100	80.119.313.330		6.917.316.751		22.346.627.509		18.594.342.318		33.470.036.737	0	81.328.323.315	0,00	101,51	0	81.328.323.315	nan	inf				
			ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%					100								0		0,00		0		0		nan					
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	0	0	0	0	100	330.796.411	0	69.390.800	0	48.545.170	0	107.168.560	0	106.471.881	0	331.576.411	0,00	100,24	0	331.576.411	nan	inf				
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	0	0			100		0		0		0		0		0,00		0		0		nan					
1	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SJUNJUNG]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	3.650.000		844.000		380.000		380.000	1	2.081.000	1	3.685.000	100,00	100,96	1	3.685.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
2	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	3.920.000		960.000		0		1.260.000	1	2.081.000	1	4.301.000	100,00	109,72	1	4.301.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
3	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	2.570.000		2.270.000		0		0	1	300.000	1	2.570.000	100,00	100,00	1	2.570.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
4	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	2.060.000		0		530.000		240.000	1	1.290.000	1	2.060.000	100,00	100,00	1	2.060.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]																												kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM	
5	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	0	2.960.000		631.000		760.000		809.000	1	1.290.000	1	3.490.000	inf	117,91	1	3.490.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM	
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen					1									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
6	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	2.140.000		1.552.000		460.000		0	1	128.000	1	2.140.000	100,00	100,00	1	2.140.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM	
7	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	4.160.000		1.410.000		1.955.000		760.000	1	35.000	1	4.160.000	100,00	100,00	1	4.160.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM	
8	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	2	239.440.161		50.696.550		30.704.400		89.775.560	1	72.137.651	1	243.314.161	50,00	101,62	1	243.314.161	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM	
9	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	0	1.480.000		0		0		0	0	1.480.000	0	1.480.000	nan	100,00	0	1.480.000	nan	inf	BAPENDA	Indikatornya double			
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen					1								1		1		100,00		1		inf		BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																														target - Ketersediaan anggaran dan SDM
10	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	1.020.000		0		1.000.000		0	1	20.000	1	1.020.000	100,00	100,00	1	1.020.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
11	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	3.120.000		0		1.970.000		910.000	1	240.000	1	3.120.000	100,00	100,00	1	3.120.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
12	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	3.903.250		1.983.250		0		960.000	1	960.000	1	3.903.250	100,00	100,00	1	3.903.250	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
13	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	1.320.000		0		0		0	1	1.320.000	1	1.320.000	100,00	100,00	1	1.320.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
14	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	2.240.000		460.000		396.000		0	1	1.384.000	1	2.240.000	100,00	100,00	1	2.240.000	inf	inf	BAPENDA			- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
15	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					0								0		nan		0		nan			BAPENDA				
16	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	2.000.000	500.000		1.000.000		0	1	120.000	1	1.620.000	100,00	81,00	1	1.620.000	inf	inf	BAPENDA				- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
17	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	2.888.000	1.444.000		0		1.444.000	0	0	0	2.888.000	0,00	100,00	0	2.888.000	nan	inf	BAPENDA				- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
18	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	3.920.000	1.855.000		0		1.915.000	1	150.000	1	3.920.000	100,00	100,00	1	3.920.000	inf	inf	BAPENDA				- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
19	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	2.200.000	380.000		679.500		380.000	1	760.500	1	2.200.000	100,00	100,00	1	2.200.000	inf	inf	BAPENDA				- Adanya komitmen atasan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target - Ketersediaan anggaran dan SDM
20	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
21	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat	dokumen					4								0		0,00		0		nan		BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
			Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun																												
22	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4									0			0,00		0		0	nan		BAPENDA			
23	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen		0		0	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0									0			nan		0		0	nan		BAPENDA			
24	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen		0		0	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0									0			nan		0		0	nan		BAPENDA			
25	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4									0			0,00		0		0	nan		BAPENDA			
26	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4									0			0,00		0		0	nan		BAPENDA			
27	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat	dokumen		0		0	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun																												
28	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Dokumen		0		0	4	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0								0			0		nan		0		nan		BAPENDA			
29	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4								0			0		0,00		0		nan		BAPENDA			
30	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen		0		0	4	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
31	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4								0			0		0,00		0		nan		BAPENDA			
32	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen		0		0	4	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0								0			0		nan		0		nan		BAPENDA			
33	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen		0		0	4	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
34	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
35	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen		0		0	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
36	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
37	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
38	X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	dokumen					4									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
39	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	Dokumen		0		0	3	45.805.000		4.405.000		8.710.270		8.335.000		20.694.730	0	42.145.000	0,00	92,01	0		42.145.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I	II	III	IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					0										0		nan		0		nan		BAPENDA				
40	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
41	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
42	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Laporan		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
43	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
44	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
45	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
46	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
47	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
48	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
49	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
									I		II		III		IV																																		
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
50	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
51	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	5	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					0							0		nan		0		nan		BAPENDA																									
52	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
53	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
54	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
55	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					0							0		nan		0		nan		BAPENDA																									
56	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
57	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					0							0		nan		0		nan		BAPENDA																									
58	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																								
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen					1							0		0,00		0		nan		BAPENDA																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	0	0	0	100	59.393.748.836	0	4.038.452.909	0	16.551.034.993	0	12.989.615.405	0	26.860.084.640	0	60.439.187.947	0,00	101,76	0	60.439.187.947	nan	inf																							
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	%	0	0			100		0		0		0		0		0,00		0		nan																										
59	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		0		0	0	57.578.735.036		3.807.291.159		16.065.926.285		12.551.216.405		26.278.163.048	0	58.702.596.897	nan	101,95	0	58.702.596.897	nan	inf	BAPENDA																						
			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang					206								0		0,00		0		nan		BAPENDA																								
60	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	3	43.435.000		0		17.595.000		8.797.500		8.797.500	0	35.190.000	0,00	81,02	0	35.190.000	nan	inf	BAPENDA																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		[UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH]																												
61	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	44.460.000		7.410.000		11.115.000		11.115.000		14.820.000	0	44.460.000	0,00	100,00	0	44.460.000	nan	inf	BAPENDA			
62	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	16	247.230.000		30.905.000		46.357.500		61.810.000		78.337.500	0	217.410.000	0,00	87,94	0	217.410.000	nan	inf	BAPENDA			
63	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	39.480.000		6.580.000		9.870.000		9.870.000		13.160.000	0	39.480.000	0,00	100,00	0	39.480.000	nan	inf	BAPENDA			
64	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	54.420.000		0		12.247.500		12.247.500		29.925.000	0	54.420.000	0,00	100,00	0	54.420.000	nan	inf	BAPENDA			
65	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang/bulan		0		0	4	39.480.000		6.580.000		9.870.000		9.870.000		13.160.000	0	39.480.000	0,00	100,00	0	39.480.000	nan	inf	BAPENDA			
66	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	48.990.000		8.165.000		12.247.500		12.247.500		16.330.000	0	48.990.000	0,00	100,00	0	48.990.000	nan	inf	BAPENDA			
67	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	46.950.000		7.825.000		15.650.000		11.737.500		11.737.500	0	46.950.000	0,00	100,00	0	46.950.000	nan	inf	BAPENDA			
68	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	46.500.000		6.920.000		13.840.000		10.380.000		15.360.000	0	46.500.000	0,00	100,00	0	46.500.000	nan	inf	BAPENDA			
69	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	39.480.000		6.580.000		13.160.000		6.580.000		13.160.000	0	39.480.000	0,00	100,00	0	39.480.000	nan	inf	BAPENDA			
70	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	39.480.000		6.580.000		9.870.000		9.870.000		13.160.000	0	39.480.000	0,00	100,00	0	39.480.000	nan	inf	BAPENDA			
71	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	46.950.000		7.825.000		11.737.500		8.782.500		15.650.000	0	43.995.000	0,00	93,71	0	43.995.000	nan	inf	BAPENDA			
72	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	5	41.584.000		6.580.000		9.870.000		9.870.000		16.964.000	0	43.284.000	0,00	104,09	0	43.284.000	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%										
								(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)			(9)		(10)						(11)		(12) = 8+9+10+11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
73	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	41.520.000		6.920.000		10.380.000		10.380.000		13.840.000	0	41.520.000	0,00	100,00	0	41.520.000	nan	inf	BAPENDA					
74	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	0	41.520.000		3.460.000		17.300.000		10.380.000		10.380.000	0	41.520.000	nan	100,00	0	41.520.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang					5								0		0,00		0			nan		BAPENDA						
75	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	0	39.480.000		6.580.000		9.870.000		9.870.000		13.160.000	0	39.480.000	nan	100,00	0	39.480.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang					4								0		0,00		0			nan		BAPENDA						
76	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	41.520.000		6.920.000		13.840.000		6.920.000		13.840.000	0	41.520.000	0,00	100,00	0	41.520.000	nan	inf	BAPENDA					
77	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	46.950.000		0		11.737.500		19.562.500		13.840.000	0	45.140.000	0,00	96,14	0	45.140.000	nan	inf	BAPENDA					
78	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang		0		0	4	39.480.000		6.580.000		9.870.000		9.870.000		13.160.000	0	39.480.000	0,00	100,00	0	39.480.000	nan	inf	BAPENDA					
79	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	0	39.480.000		6.580.000		9.870.000		9.870.000		13.160.000	0	39.480.000	nan	100,00	0	39.480.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang					5								0		0,00		0			nan		BAPENDA						
80	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pemb	Laporan		0		0	12	19.440.000		2.650.000		6.960.000		5.000.000		4.830.000	0	19.440.000	0,00	100,00	0	19.440.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan					12								0		0,00		0			nan		BAPENDA						
81	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan		0		0	12	29.700.000		3.840.000		7.920.000		8.640.000		9.300.000	0	29.700.000	0,00	100,00	0	29.700.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan					12								0		0,00		0			nan		BAPENDA						
82	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan		0		0	12	21.060.000		2.000.000		6.510.000		3.500.000		9.050.000	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
		Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan					12									0		0,00		0		nan		BAPENDA				
83	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan		0		0	12	36.080.000	5.775.000		9.210.000		8.085.000		13.010.000	0	36.080.000	0,00	100,00	0	36.080.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
84	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan		0		0	12	18.580.000	1.140.000		6.226.000		4.081.000		7.133.000	0	18.580.000	0,00	100,00	0	18.580.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
85	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan		0		0	12	37.900.000	7.265.000		11.658.688		10.215.000		11.981.312	0	41.120.000	0,00	108,50	0	41.120.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
86	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan		0		0	12	20.230.000	3.511.000		7.221.500		4.984.700		5.532.800	0	21.250.000	0,00	105,04	0	21.250.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
87	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan		0		0	12	18.820.000	1.380.000		6.100.000		2.300.000		9.040.000	0	18.820.000	0,00	100,00	0	18.820.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
88	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan		0		0	12	18.120.000	2.500.000		6.030.000		3.000.000		6.590.000	0	18.120.000	0,00	100,00	0	18.120.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA					
89	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan			0		0	12	6.420.000		0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA					
90	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan			0		0	12	41.440.000	7.230.000		14.715.076		9.845.000		9.649.924	0	41.440.000	0,00	100,00	0		41.440.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA					
91	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan			0		0	12	18.680.000	1.520.000		3.900.000		3.800.000		9.460.000	0	18.680.000	0,00	100,00	0		18.680.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA					
92	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen			0		0	92	272.692.800	22.640.000		58.370.444		76.874.300		97.228.056	0	255.112.800	0,00	93,55	0		255.112.800	nan	inf	BAPENDA				
93	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan			0		0	12	41.860.000	4.530.000		14.100.000		8.710.000		9.460.000	0	36.800.000	0,00	87,91	0		36.800.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA					
94	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan			0		0	12	14.542.000	2.002.000		4.595.000		2.280.000		6.541.000	0	15.418.000	0,00	106,02	0		15.418.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA					
95	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan			0		0	12	18.820.000	2.760.000		6.400.000		3.680.000		5.980.000	0	18.820.000	0,00	100,00	0		18.820.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
									I		II		III		IV																																	
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)													
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan				12											0		0,00		0		nan		BAPENDA																					
96	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan		0		0	12	15.580.000	3.530.000		4.910.000		3.000.000		4.140.000	0	15.580.000	0,00	100,00	0	15.580.000	nan	inf	BAPENDA																						
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA																					
97	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan		0		0	12	15.820.000	1.920.000		6.560.000		2.880.000		4.460.000	0	15.820.000	0,00	100,00	0	15.820.000	nan	inf	BAPENDA																						
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA																					
98	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	Laporan		0		0	12	15.840.000	1.820.000		6.175.000		4.240.000		3.605.000	0	15.840.000	0,00	100,00	0	15.840.000	nan	inf	BAPENDA																						
			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Laporan					12										0		0,00		0		nan		BAPENDA																					
99	X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen		0		0	2	0	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																						
100	X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Laporan		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																						
101	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Laporan		0		0	14	65.000.000	14.158.750		21.249.500		13.254.000		2.989.000	0	51.651.250	0,00	79,46	0	51.651.250	nan	inf	BAPENDA																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	nan																						
Predikat Kinerja																									-	-																						
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	0		0	0	0	100	405.875.000	0	40.351.650	0	2.600.000	0	45.655.000	0	228.501.950	0	317.108.600	0,00	78,13	0	317.108.600	nan	inf																					
102	X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMd Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen			0		0	4	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																						
103	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit			0		0	2	180.000.000		0		0		180.000.000	0	180.000.000	0,00	100,00	0	180.000.000	nan	inf	BAPENDA																						
			Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan	unit					36									0		0,00		0		nan		BAPENDA																						
			Jumlah tanah yang bersertifikat	persil					1									0		0,00		0		nan		BAPENDA																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
104	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	orang		0		0	3	175.875.000	36.611.650		2.600.000		45.655.000		44.281.950	0	129.148.600	0,00	73,43	0	129.148.600	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
105	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang		0		0	1	0	0		0		0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
106	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang		0		0	1	0	0		0		0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
107	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	0	0	0		0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
108	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang		0		0	1	0	0		0		0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
109	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang		0		0	1	0	0		0		0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
110	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang		0		0	1	0	0		0		0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
111	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang		0		0	1	0	0		0		0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
112	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorumya	Orang		0		0	1	0	0		0		0		0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]																												
113	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
114	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
115	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
116	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
117	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
118	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					0							0		nan		0		nan		BAPENDA						
119	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
120	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				
121	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Orang		0		0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]																												
122	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoranya	Orang/Bulan		0		0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
123	X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen		0		0	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
124	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	dokumen		0		0	3	50.000.000		3.740.000		0		0		4.220.000	0	7.960.000	0,00	15,92	0	7.960.000	nan	inf	BAPENDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	100	50.000.000	0	0	0	19.630.000	0	17.915.000	0	12.455.000	0	50.000.000	0,00	100,00	0	50.000.000	nan	inf				
			Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	%	0		0		100		0		0		0		0			0,00		0		nan						
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0		0		100		0		0		0		0			0,00		0		nan						
					0		0		0		0		0		0		0			nan		0		nan						
125	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel					11									0		0,00		0		nan		BAPENDA				
126	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	6	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
127	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	8	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
128	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	8	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
129	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	60	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
130	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		0		0	20	0		0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I	II	III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]																													
131	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0		0		0		0		0		0		0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA		
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel						7								0			0,00		0			nan		BAPENDA			
132	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0		0		0		0		0		0		0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA		
			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel						7								0			0,00		0			nan		BAPENDA			
133	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0		6		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
134	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0		8		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
135	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0		12		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket						0								0			nan		0			nan		BAPENDA			
136	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0		10		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
137	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0		8		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
138	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0		8		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			
139	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0		6		0		0		0		0		0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
									I	II		III		IV																																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																													
140	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	9	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																										
141	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	9	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																										
142	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	7	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																										
143	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel		0		0	9	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket					0							0			nan		0		nan		BAPENDA																												
144	X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen		0		0	200	50.000.000		0		19.630.000		17.915.000		12.455.000	0	50.000.000	0,00	100,00	0	50.000.000	nan	inf	BAPENDA																										
145	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti oubond	Orang		0		0	70	0		0		0		0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																											
			Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	orang					5							0			0,00		0		nan		BAPENDA																												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					0							0			nan		0		nan		BAPENDA																												
146	X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	orang		0		0	3	0		0		0		0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					0							0			nan		0		nan		BAPENDA																												
147	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali		0		0	2	0		0		0		0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA																											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					0							0			nan		0		nan		BAPENDA																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																					
Predikat Kinerja																																																					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0		0	0	0	100	6.468.548.121	0	847.256.276	0	1.922.398.785	0	1.884.680.818	0	1.730.131.755	0	6.384.467.634	0,00	98,70	0	6.384.467.634	nan	inf																										
148	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0		0	50	4.620.000		770.000		1.402.000		1.094.000		1.354.000	0	4.620.000	0,00	100,00	0	4.620.000	nan	inf	BAPENDA																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
149	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0		0	50	2.797.000		700.000		689.000		675.000		733.000	0	2.797.000	0,00	100,00	0	2.797.000	nan	inf	BAPENDA			
150	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0		0	50	1.886.000		470.400		466.000		477.000		472.600	0	1.886.000	0,00	100,00	0	1.886.000	nan	inf	BAPENDA			
151	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	2.106.000		525.000		525.000		525.000		531.000	0	2.106.000	nan	100,00	0	2.106.000	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	buah					50									0		0,00		0		nan		BAPENDA				
152	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0		0	50	2.512.000		600.000		600.000		1.304.000		0	0	2.504.000	0,00	99,68	0	2.504.000	nan	inf	BAPENDA			
153	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	8.744.100		2.098.200		3.073.300		2.780.700		791.900	0	8.744.100	nan	100,00	0	8.744.100	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah					300									0		0,00		0		nan		BAPENDA				
154	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0		0	50	2.850.000		710.000		0		900.000		1.240.000	0	2.850.000	0,00	100,00	0	2.850.000	nan	inf	BAPENDA			
155	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Buah		0		0	10	2.421.900		0		2.411.900		0		0	0	2.411.900	0,00	99,59	0	2.411.900	nan	inf	BAPENDA			
156	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0		0	50	2.429.800		607.000		607.900		607.000		607.900	0	2.429.800	0,00	100,00	0	2.429.800	nan	inf	BAPENDA			
157	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0		0	50	2.848.800		0		1.414.600		705.000		729.200	0	2.848.800	0,00	100,00	0	2.848.800	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]																													
158	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0	0	2.310.000	1.050.000		0	1.190.000	0	0	2.240.000	nan	96,97	0	2.240.000	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah				50							0		0,00	0		nan		BAPENDA									
159	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0	0	456	30.192.000	0	6.798.000	8.298.000	15.096.000	0	30.192.000	0,00	100,00	0	30.192.000	nan	inf	BAPENDA									
160	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0	0	50	2.665.200	669.600	669.600	669.600	656.400	0	2.665.200	0,00	100,00	0	2.665.200	nan	inf	BAPENDA									
161	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0	0	65	1.911.400	910.400	0	998.000	0	0	1.908.400	0,00	99,84	0	1.908.400	nan	inf	BAPENDA									
162	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit		0	0	60	1.834.800	1.833.800	0	0	0	0	1.833.800	0,00	99,95	0	1.833.800	nan	inf	BAPENDA									
163	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0	0	50	2.180.000	675.000	735.000	327.000	443.000	0	2.180.000	0,00	100,00	0	2.180.000	nan	inf	BAPENDA									
164	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0	0	50	2.682.000	0	1.306.000	0	1.240.000	0	2.546.000	0,00	94,93	0	2.546.000	nan	inf	BAPENDA									
165	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0	0	50	2.946.900	0	1.350.000	715.000	881.900	0	2.946.900	0,00	100,00	0	2.946.900	nan	inf	BAPENDA									
166	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		0	0	50	2.829.300	691.000	698.000	635.500	804.800	0	2.829.300	0,00	100,00	0	2.829.300	nan	inf	BAPENDA									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I		II		III		IV																
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)						
		PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]																												
167	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	119.622.000		0		0	118.659.000	0	0	118.659.000	nan	99,19	0	118.659.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit					30						0			0,00		0			nan		BAPENDA					
168	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	164.566.600		0		0	149.055.700		13.876.900	0	162.932.600	nan	99,01	0	162.932.600	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	buah					600						0			0,00		0			nan		BAPENDA					
169	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Makan Minum Rapat yang disediakan	kotak		0		0	160	29.169.100		4.541.500		9.341.500	9.782.600		4.676.800	0	28.342.400	0,00	97,17	0	28.342.400	nan	inf	BAPENDA				
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
			Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
170	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	60.868.400		13.147.000		17.219.500	14.746.000		15.755.900	0	60.868.400	nan	100,00	0	60.868.400	nan	inf	BAPENDA				
			Peralatan kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
			Makan minum rapat yang disediakan	kotak					160							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
171	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Makan Minum rapat yang disediakan	kotak		0		0	160	67.383.768		18.735.550		17.430.650	15.883.350		15.334.218	0	67.383.768	0,00	100,00	0	67.383.768	nan	inf	BAPENDA				
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
			Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
172	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan		0		0	12	64.053.400		10.601.650		15.991.850	11.732.950		11.005.950	0	49.332.400	0,00	77,02	0	49.332.400	nan	inf	BAPENDA				
			Peralatan kebersihan yang disediakan	Bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
			Makan Minum rapat yang disediakan	kotak					160							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
173	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	buah		0		0	1600	335.296.556		3.750.000		179.666.978	25.270.300		80.124.478	0	288.811.756	0,00	86,14	0	288.811.756	nan	inf	BAPENDA				
174	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Bulan		0		0	12	63.231.700		5.357.000		23.352.800	10.994.300		23.522.100	0	63.226.200	0,00	99,99	0	63.226.200	nan	inf	BAPENDA				
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan					12							0			0,00		0			nan		BAPENDA				
			Makan Minum Rapat yang disediakan	kotak					160							0			0,00		0			nan		BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV											
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									(9)	(10)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0						0		nan		0		nan		BAPENDA			
175	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan		0		0	12	53.729.950	8.357.600	17.387.850	14.133.100	13.851.400	0	53.729.950	0,00	100,00	0	53.729.950	nan	inf	BAPENDA			
			Makan Minum rapat yang disediakan	kotak					160						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
176	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan		0		0	12	47.629.800	11.873.500	14.410.500	10.945.000	14.714.300	0	51.943.300	0,00	109,06	0	51.943.300	nan	inf	BAPENDA			
			Makan dan Minum rapat yang disediakan	kotak					200						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Peralatan Kebersihan yang disediakan	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
177	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	56.136.200	17.166.300	11.232.300	8.482.100	0	0	36.880.700	nan	65,70	0	36.880.700	nan	inf	BAPENDA			
			Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Makan Minum Rapat yang disediakan	kotak					140						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
178	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan		0		0	12	52.753.200	15.141.800	10.219.000	11.196.500	10.467.100	0	47.024.400	0,00	89,14	0	47.024.400	nan	inf	BAPENDA			
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Makan Minum rapat yang disediakan	kotak					160						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
179	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	bulan		0		0	12	51.439.100	12.017.000	13.570.100	13.544.100	12.307.900	0	51.439.100	0,00	100,00	0	51.439.100	nan	inf	BAPENDA			
			Makan Minum rapat yang disediakan	kotak					160						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
180	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan		0		0	12	50.986.300	7.588.400	19.543.300	10.224.700	15.189.900	0	52.546.300	0,00	103,06	0	52.546.300	nan	inf	BAPENDA			
			Makan minum rapat yang disediakan	kotak					160						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
181	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN	Makan Minum rapat yang disediakan	kotak		0		0	120	53.689.000	13.825.200	16.147.600	14.638.000	9.078.200	0	53.689.000	0,00	100,00	0	53.689.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]																												
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Peralatan kebersihan yang disediakan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
182	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	bulan		0		0	12	55.851.400	10.808.100		14.203.000		9.489.300		10.788.000	0	45.288.400	0,00	81,09	0	45.288.400	nan	inf	BAPENDA				
			Makan Minum rapat yang disediakan	kotak					160								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
183	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah makan minum yang disediakan	kotak		0		0	300	172.187.900	38.273.500		49.928.300		37.356.000		42.738.700	0	168.296.500	0,00	97,74	0	168.296.500	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	buah					1200								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan	buah					1200								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Obat-obatan yang disediakan	kotak					350								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
184	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Makanan dan Minuman yang disediakan	bulan		0		0	12	54.862.000	14.357.800		14.424.600		9.836.200		18.462.300	0	57.080.900	0,00	104,04	0	57.080.900	nan	inf	BAPENDA				
			Peralatan kebersihan yang disediakan	bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
185	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan		0		0	12	43.802.100	6.063.600		9.628.500		15.464.300		13.851.400	0	45.007.800	0,00	102,75	0	45.007.800	nan	inf	BAPENDA				
			Makan Minum rapat yang disediakan	kotak					160								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
			Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
186	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Bulan		0		0	12	54.084.400	1.800.000		24.234.000		10.138.600		17.911.800	0	54.084.400	0,00	100,00	0	54.084.400	nan	inf	BAPENDA				
			Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Makan Minum rapat yang disediakan	kotak					160								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
187	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN	Makan minum yang disediakan	kotak		0		0	280	80.038.500	13.877.000		29.797.000		25.442.000		10.922.500	0	80.038.500	0,00	100,00	0	80.038.500	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
		PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	bulan					12								0		0,00		0			nan		BAPENDA				
			Peralatan kebersihan yang disediakan	bulan					12								0		0,00		0			nan		BAPENDA				
188	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Foto copy/penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	115250	50.000.000	13.000.000		16.058.750		5.464.000		23.077.250	0	57.600.000	0,00	115,20	0	57.600.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0								0		nan		0			nan		BAPENDA				
189	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	15.000.000	3.933.000		3.438.000		3.524.000		4.105.000	0	15.000.000	nan	100,00	0	15.000.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar					42500								0		0,00		0			nan		BAPENDA				
190	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	buah		0		0	106600	39.600.000	0		0		29.025.000		10.575.000	0	39.600.000	0,00	100,00	0	39.600.000	nan	inf	BAPENDA				
191	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	15.000.000	3.862.000		4.059.500		3.416.000		5.986.000	0	17.323.500	0,00	115,49	0	17.323.500	nan	inf	BAPENDA				
192	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	15.000.000	7.500.000		0		7.479.000		21.000	0	15.000.000	0,00	100,00	0	15.000.000	nan	inf	BAPENDA				
193	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	13.000.000	4.418.000		564.000		4.599.000		2.659.000	0	12.240.000	nan	94,15	0	12.240.000	nan	inf	BAPENDA				
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	lembar					42350								0		0,00		0			nan		BAPENDA				
194	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	20.780.250	0		10.712.500		7.311.000		2.756.750	0	20.780.250	0,00	100,00	0	20.780.250	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0								0		nan		0			nan		BAPENDA				
195	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	24.810.000	7.188.000		7.812.000		7.500.000		2.310.000	0	24.810.000	0,00	100,00	0	24.810.000	nan	inf	BAPENDA				
196	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	15.000.000	3.750.000		3.560.250		2.814.500		4.875.250	0	15.000.000	0,00	100,00	0	15.000.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]																												
197	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	10.223.000	1.990.000		3.419.000		2.786.000		2.028.000	0	10.223.000	0,00	100,00	0	10.223.000	nan	inf	BAPENDA				
198	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	15.000.000		0	7.497.000		3.748.500		3.754.500	0	15.000.000	0,00	100,00	0	15.000.000	nan	inf	BAPENDA				
199	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	15.000.000	2.980.000		8.321.000		1.984.000		1.715.000	0	15.000.000	0,00	100,00	0	15.000.000	nan	inf	BAPENDA				
200	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan;	lembar		0		0	42500	15.000.000	4.956.500		5.043.500		3.459.250		1.540.750	0	15.000.000	0,00	100,00	0	15.000.000	nan	inf	BAPENDA				
201	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	12.633.250	3.992.500		5.409.000		1.472.250		1.759.500	0	12.633.250	0,00	100,00	0	12.633.250	nan	inf	BAPENDA				
202	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	14.688.000	5.431.500		1.453.500		5.431.500		1.435.500	0	13.752.000	nan	93,63	0	13.752.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar					42500								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
203	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	15.001.250	3.718.000		3.782.000		3.725.000		3.776.250	0	15.001.250	0,00	100,00	0	15.001.250	nan	inf	BAPENDA				
204	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar		0		0	42500	15.000.000	1.276.000		9.431.250		1.838.000		3.776.250	0	16.321.500	0,00	108,81	0	16.321.500	nan	inf	BAPENDA				
205	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Lembar		0		0	42500	15.000.000	3.748.000		3.724.000		3.717.000		3.811.000	0	15.000.000	0,00	100,00	0	15.000.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
206	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lembar		0		0	42500	9.954.000	4.950.000		4.944.000		0		0	0	9.894.000	0,00	99,40	0	9.894.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
215	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	24	2.640.000		440.000		660.000		660.000		880.000	0	2.640.000	0,00	100,00	0	2.640.000	nan	inf	BAPENDA				
216	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	24	2.880.000		600.000		720.000		720.000		840.000	0	2.880.000	0,00	100,00	0	2.880.000	nan	inf	BAPENDA				
217	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	24	1.800.000		240.000		360.000		360.000		840.000	0	1.800.000	0,00	100,00	0	1.800.000	nan	inf	BAPENDA				
218	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	24	1.440.000		360.000		360.000		360.000		360.000	0	1.440.000	0,00	100,00	0	1.440.000	nan	inf	BAPENDA				
219	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0	2.640.000		0		1.320.000		0		660.000	0	1.980.000	nan	75,00	0	1.980.000	nan	inf	BAPENDA				
220	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0	2.640.000		440.000		660.000		660.000		880.000	0	2.640.000	nan	100,00	0	2.640.000	nan	inf	BAPENDA				
221	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia	Eksamplar		0		0	24	2.880.000		480.000		960.000		480.000		960.000	0	2.880.000	0,00	100,00	0	2.880.000	nan	inf	BAPENDA				
222	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	24	2.640.000		440.000		660.000		660.000		1.300.000	0	3.060.000	0,00	115,91	0	3.060.000	nan	inf	BAPENDA				
223	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	24	2.880.000		720.000		720.000		720.000		720.000	0	2.880.000	0,00	100,00	0	2.880.000	nan	inf	BAPENDA				
224	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	280	20.160.000		0		6.960.000		2.400.000		10.800.000	0	20.160.000	0,00	100,00	0	20.160.000	nan	inf	BAPENDA				
225	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	Eksemplar		0		0	24	2.880.000		720.000		720.000		720.000		720.000	0	2.880.000	0,00	100,00	0	2.880.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
		PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
226	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen		0		0	30	67.034.180	9.444.450		13.405.400		10.117.650		32.546.680	0	65.514.180	0,00	97,73	0	65.514.180	nan	inf	BAPENDA				
227	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	17.229.326	3.857.100		1.981.450		0		2.010.776	0	7.849.326	0,00	45,56	0	7.849.326	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
228	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	98.270.000	16.764.100		19.731.500		36.594.600		28.141.500	0	101.231.700	0,00	103,01	0	101.231.700	nan	inf	BAPENDA				
229	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	46.935.688	10.772.200		13.621.500		12.436.000		17.445.518	0	54.275.218	nan	115,64	0	54.275.218	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan					30								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
230	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	24	67.441.704	12.651.200		11.783.650		18.162.800		35.944.054	0	78.541.704	0,00	116,46	0	78.541.704	nan	inf	BAPENDA				
231	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	43.035.822	10.260.000		10.997.600		10.198.200		17.660.022	0	49.115.822	0,00	114,13	0	49.115.822	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
232	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	50	1.410.453.023	480.000		402.602.056		612.216.289		400.546.597	0	1.415.844.942	0,00	100,38	0	1.415.844.942	nan	inf	BAPENDA				
233	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	46.379.934	10.830.000		8.705.360		12.056.320		18.068.254	0	49.659.934	0,00	107,07	0	49.659.934	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD																												
234	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	60.039.768	13.290.000	19.036.200	15.043.000	17.920.568	0	65.289.768	0,00	108,74	0	65.289.768	nan	inf	BAPENDA								
235	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen		0		0	30	77.042.084	18.363.700	13.803.350	24.349.000	22.861.084	0	79.377.134	0,00	103,03	0	79.377.134	nan	inf	BAPENDA								
236	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	42	46.754.848	7.962.000	13.650.000	12.628.000	12.514.848	0	46.754.848	0,00	100,00	0	46.754.848	nan	inf	BAPENDA								
237	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	43.978.622	11.957.150	11.540.600	13.998.400	12.482.472	0	49.978.622	0,00	113,64	0	49.978.622	nan	inf	BAPENDA								
238	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	46.783.530	9.931.950	16.583.950	14.909.200	13.544.726	0	54.969.826	nan	117,50	0	54.969.826	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan					32						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
239	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	61.232.540	9.706.900	13.342.250	13.701.400	26.761.990	0	63.512.540	0,00	103,72	0	63.512.540	nan	inf	BAPENDA								
240	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	49.573.000	6.039.800	16.342.300	11.529.400	12.117.184	0	46.028.684	0,00	92,85	0	46.028.684	nan	inf	BAPENDA								
241	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	77.553.750	17.841.350	15.945.200	18.797.600	19.996.234	0	72.580.384	nan	93,59	0	72.580.384	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan					30						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
242	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	74.223.560	15.296.450	18.638.200	24.556.000	26.761.990	0	85.252.640	0,00	114,86	0	85.252.640	nan	inf	BAPENDA								
243	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	59.490.000	12.658.586	17.859.688	19.362.000	9.609.726	0	59.490.000	0,00	100,00	0	59.490.000	nan	inf	BAPENDA								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
		PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
244	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan		0		0	30	45.786.718	10.851.100	12.430.080	11.845.800	13.998.458	0	49.125.438	0,00	107,29	0	49.125.438	nan	inf	BAPENDA							
245	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	39.060.000	9.754.250	9.749.250	9.749.250	9.807.250	0	39.060.000	0,00	100,00	0	39.060.000	nan	inf	BAPENDA							
			Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link	Tahun					1						0		0,00		0		nan		BAPENDA							
246	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	58.080.000	14.166.000	14.166.000	14.832.000	14.916.000	0	58.080.000	0,00	100,00	0	58.080.000	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA							
247	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	22.080.000	5.514.000	5.517.000	5.517.000	5.531.500	0	22.079.500	0,00	100,00	0	22.079.500	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA							
248	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	22.080.000	5.178.000	5.505.000	5.499.000	5.898.000	0	22.080.000	0,00	100,00	0	22.080.000	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA							
249	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	21.060.000	5.249.250	5.249.250	5.249.250	5.312.250	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					0						0		nan		0		nan		BAPENDA							
250	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	59.100.000	14.332.500	14.748.750	14.748.750	15.270.000	0	59.100.000	0,00	100,00	0	59.100.000	nan	inf	BAPENDA							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
251	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	22.080.000	5.178.000		5.517.000		5.349.500		6.035.500	0	22.080.000	0,00	100,00	0	22.080.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
252	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	4.080.000	666.000		1.009.000		1.014.000		1.391.000	0	4.080.000	0,00	100,00	0	4.080.000	nan	inf	BAPENDA				
253	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	22.080.000	5.166.000		5.499.000		5.499.000		5.916.000	0	22.080.000	0,00	100,00	0	22.080.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
254	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	22.080.000	5.178.000		5.511.000		5.499.000		5.892.000	0	22.080.000	0,00	100,00	0	22.080.000	nan	inf	BAPENDA				
255	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	21.060.000	5.009.500		5.254.250		5.249.250		5.547.000	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
256	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	bulan		0		0	12	21.060.000	5.004.500		5.252.750		5.249.250		5.553.500	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA				
257	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH]	Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan	orang		0		0	4	1.328.151.700	199.838.090		503.987.823		193.517.009		380.808.778	0	1.278.151.700	0,00	96,24	0	1.278.151.700	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah peserta yang mengikuti bintek aplikasi pelayanan pajak	orang					150								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Terlaksananya pengembangan modul/aplikasi pendukung samsat	aplikasi					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Terlaksananya operasional	tahun					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5) K Rp		(6) K Rp		(7) K Rp		(8) K Rp		(9) K Rp		(10) K Rp		(11) K Rp		(12) = 8+9+10+11 K Rp		(13) = 12/7 * 100% K Rp		(14) = 6+12 K Rp		(15) = 14/5 * 100% K Rp		(16)	(17)	(18)	(19)
			sistim samsat link																											
			Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pendukung samsat link	tahun					1						0		0,00		0			nan		BAPENDA						
258	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	21.060.000	4.999.500		5.249.250	5.249.250	5.562.000	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA						
259	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	0	40.080.000	10.010.500		10.005.000	9.999.000	10.065.500	0	40.080.000	nan	100,00	0	40.080.000	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12						0		0,00		0			nan		BAPENDA						
260	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	21.060.000	5.004.500		5.262.000	5.262.000	5.531.500	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12						0		0,00		0			nan		BAPENDA						
261	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	21.060.000	5.004.500		5.249.250	5.249.250	5.557.000	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA						
262	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	21.060.000	5.259.250		5.252.750	5.249.250	5.298.750	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA						
			Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link	Tahun					1						0		0,00		0			nan		BAPENDA						
263	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	Bulan		0		0	12	21.060.000	4.999.500		5.249.250	5.249.250	5.562.000	0	21.060.000	0,00	100,00	0	21.060.000	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	Bulan					12						0		0,00		0			nan		BAPENDA						
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					0						0		nan		0			nan		BAPENDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)				(9)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	0	0	0	0	100	406.960.260	0	0	0	0	286.509.300	0	222.451.360	0	508.960.660	0,00	125,06	0	508.960.660	nan	inf					
264	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang disediakan	unit		0		0	2	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
			Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional yng disewa	Unit					3							0		0,00		0		nan		BAPENDA						
265	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit		0		0	102	180.746.700		0		0	179.250.000		0	179.250.000	0,00	99,17	0	179.250.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					0							0		nan		0		nan		BAPENDA						
266	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Unit		0		0	90	117.863.560		0		0		0	222.451.360	0	222.451.360	0,00	188,74	0	222.451.360	nan	inf	BAPENDA				
267	X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	unit		0		0	2	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA					
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					0							0		nan		0		nan		BAPENDA						
268	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	unit		0		0	2	108.350.000		0		0	107.259.300		0	107.259.300	0,00	98,99	0	107.259.300	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					0							0		nan		0		nan		BAPENDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan					
Predikat Kinerja																								-	-					
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	0	0	0	100	9.675.450.952	0	1.596.462.224	0	2.770.672.071	0	2.261.576.321	0	3.308.972.333	0	9.937.682.949	0,00	102,71	0	9.937.682.949	nan	inf				
269	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		0		0	7500	20.722.200		728.600		1.880.200		4.376.416		3.736.984	0	10.722.200	0,00	51,74	0	10.722.200	nan	inf	BAPENDA			
270	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh			0	0	40200	166.554.000		38.040.410		42.422.214		40.610.594		45.480.782	0	166.554.000	0,00	100,00	0	166.554.000	nan	inf	BAPENDA			
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					240								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
271	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	0	179.874.000		37.460.936		41.903.593		44.206.281		56.303.190	0	179.874.000	nan	100,00	0	179.874.000	nan	inf	BAPENDA			
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					48000								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekenig tagihan air yang dibayarkan	m3					927								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
272	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan		0		0	12	133.704.000	25.280.086		29.832.687		30.580.152		48.011.075	0	133.704.000	0,00	100,00	0	133.704.000	nan	inf	BAPENDA				
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					360000								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					840								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
273	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening		0		0	1	174.816.000	36.958.844		38.097.785		40.103.143		50.011.108	0	165.170.880	0,00	94,48	0	165.170.880	nan	inf	BAPENDA				
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					39960								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					900								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
274	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3		0		0	1440	200.268.000	41.824.899		47.210.739		45.184.840		83.225.522	0	217.446.000	0,00	108,58	0	217.446.000	nan	inf	BAPENDA				
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					30600								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
275	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan		0		0	12	129.564.000	27.333.690		30.970.114		30.698.837		40.561.359	0	129.564.000	0,00	100,00	0	129.564.000	nan	inf	BAPENDA				
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					16200								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
276	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh		0		0	19200	118.494.000	25.375.675		29.307.710		21.772.446		42.038.169	0	118.494.000	0,00	100,00	0	118.494.000	nan	inf	BAPENDA				
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					600								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
277	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	0	714.469.500	211.836.577		209.974.523		188.100.873		216.745.527	0	826.657.500	nan	115,70	0	826.657.500	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]																													
			Rekening listrik yang dibayarkan	Kwh					308820									0		0,00		0			nan		BAPENDA				
			Rekening internet yang dibayarkan	bulan					12									0		0,00		0			nan		BAPENDA				
			Rekening telepon yang dibayarkan	rekening					1									0		0,00		0			nan		BAPENDA				
			Rekening air yang dibayarkan	m3					5400									0		0,00		0			nan		BAPENDA				
278	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh		0	0	41820	281.268.000	65.119.249	71.685.301	69.344.040	88.385.410	0	294.534.000	0,00	104,72	0	294.534.000	nan	inf				BAPENDA						
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					1620						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
279	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	m3		0	0	20400	113.844.000	25.166.090	27.677.169	25.540.370	35.460.371	0	113.844.000	0,00	100,00	0	113.844.000	nan	inf				BAPENDA						
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					600						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
280	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening		0	0	1	102.015.600	21.045.325	26.849.235	26.352.620	27.768.420	0	102.015.600	0,00	100,00	0	102.015.600	nan	inf				BAPENDA						
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	bulan					12						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					22800						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					1200						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
281	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Rekening tagihan internet yang dibayarkan	bulan		0	0	12	154.368.000	36.494.372	38.395.932	37.404.054	35.460.371	0	147.754.729	0,00	95,72	0	147.754.729	nan	inf				BAPENDA						
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					32400						0		0,00		0			nan			BAPENDA						
282	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan		0	0	12	143.544.000	22.959.669	32.548.054	34.803.154	44.233.123	0	134.544.000	0,00	93,73	0	134.544.000	nan	inf				BAPENDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					600								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					28200								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
283	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan		0	0	12	130.428.000	26.464.301	30.349.946	29.702.050	39.627.703	0	126.144.000	0,00	96,72	0	126.144.000	nan	inf	BAPENDA								
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					12000								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
284	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh		0	0	24600	146.376.000	30.922.289	35.282.187	34.548.633	45.622.891	0	146.376.000	0,00	100,00	0	146.376.000	nan	inf	BAPENDA								
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					300								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
285	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening		0	0	1	178.776.000	38.783.125	42.129.832	42.660.242	55.202.801	0	178.776.000	0,00	100,00	0	178.776.000	nan	inf	BAPENDA								
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					48000								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					900								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
286	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening		0	0	1	98.604.000	20.151.783	25.388.681	24.124.724	28.938.812	0	98.604.000	0,00	100,00	0	98.604.000	nan	inf	BAPENDA								
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					16200								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					240								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	bulan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
287	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAKI]	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	rekening		0	0	1	159.155.500	32.883.052	39.801.388	40.750.059	45.721.001	0	159.155.500	0,00	100,00	0	159.155.500	nan	inf	BAPENDA								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%							
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Rekening tagihan internet yang dibayarkan	Bulan					12						0		0,00		0		nan		BAPENDA							
			Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	Kwh					34200						0		0,00		0		nan		BAPENDA							
			Rekening tagihan air yang dibayarkan	m3					120						0		0,00		0		nan		BAPENDA							
288	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps		0	0	300	924.545.200	194.030.787	252.561.188	210.933.611	277.519.614	0	935.045.200	0,00	101,14	0	935.045.200	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik				3600						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kwh				360000						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
289	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	1	154.359.712	22.870.056	45.274.988	34.305.084	51.909.584	0	154.359.712	0,00	100,00	0	154.359.712	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
290	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	orang		0	0	2	265.579.180	41.558.384	80.163.670	59.369.120	84.488.006	0	265.579.180	0,00	100,00	0	265.579.180	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan	orang				3						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa tenaga sopir yang dibayarkan	orang				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
291	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	1	210.760.376	34.634.181	68.570.676	52.444.917	75.889.794	0	231.539.568	0,00	109,86	0	231.539.568	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan				3						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
292	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	2	213.728.832	35.402.074	67.729.651	53.103.111	75.304.732	0	231.539.568	0,00	108,33	0	231.539.568	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan				3						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
293	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Jasa Pengaman Kantor yang dibayarkan	Orang		0	0	6	538.899.108	0	196.886.296	114.912.492	251.782.604	0	563.581.392	0,00	104,58	0	563.581.392	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir Kantor yang dibayarkan	Orang				3						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang				5						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan				3						0		0,00		0		nan		BAPENDA								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I		II		III		IV											
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			yang Disediakan																							
294	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		0		0	25	1.020.139.200	34.283.929	293.522.372	209.487.403	494.719.320	0	1.032.013.024	0,00	101,16	0	1.032.013.024	nan	inf	BAPENDA			
295	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	192.949.640	29.684.560	58.240.620	44.526.840	60.497.620	0	192.949.640	nan	100,00	0	192.949.640	nan	inf	BAPENDA			
			Jasa tenaga sopir yang dibayarkan	orang					1						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	orang					3						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Jasa Tenaga keamanan yang dibayarkan	orang					1						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
296	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang		0		0	2	266.738.654	41.558.384	81.534.908	62.337.576	81.307.786	0	266.738.654	0,00	100,00	0	266.738.654	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					0						0		nan		0		nan		BAPENDA			
			Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang					3						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang					2						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
297	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang		0		0	2	353.845.680	52.047.983	104.065.896	78.684.717	116.499.990	0	351.298.586	0,00	99,28	0	351.298.586	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang					3						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					0						0		nan		0		nan		BAPENDA			
			Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang					3						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
298	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan		0		0	1	178.107.360	29.684.560	58.239.220	44.526.840	60.499.020	0	192.949.640	0,00	108,33	0	192.949.640	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan					2						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan					1						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
299	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan		0		0	1	230.183.688	35.621.472	69.658.524	53.432.208	71.471.484	0	230.183.688	0,00	100,00	0	230.183.688	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan					2						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan					3						0		0,00		0		nan		BAPENDA			
300	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang		0		0	2	270.129.496	41.338.986	78.463.335	62.008.479	88.318.696	0	270.129.496	0,00	100,00	0	270.129.496	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12							(15) = 14/5 * 100%		
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11	K	Rp					K	Rp	K
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0							0		nan		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang			2							0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang			3							0		0,00		0		nan		BAPENDA								
301	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	2	238.140.858	34.865.140	68.690.090	55.107.398	79.413.268	0	238.075.896	0,00	99,97	0	238.075.896	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
302	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	2	249.350.304	41.119.588	80.876.714	61.679.382	86.453.812	0	270.129.496	0,00	108,33	0	270.129.496	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan				3						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
303	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	2	213.728.832	34.515.084	68.227.482	51.772.626	75.668.496	0	230.183.688	0,00	107,70	0	230.183.688	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
304	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	2	142.485.888	23.747.648	46.591.376	35.621.472	68.495.296	0	174.455.792	0,00	122,44	0	174.455.792	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				0						0		nan		0		nan		BAPENDA								
305	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	2	178.107.360	28.587.570	56.593.735	42.881.355	50.044.700	0	178.107.360	0,00	100,00	0	178.107.360	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
306	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan		0	0	2	273.097.952	41.558.384	84.503.364	71.242.944	50.044.700	0	247.349.392	0,00	90,57	0	247.349.392	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan				2						0		0,00		0		nan		BAPENDA								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan					4								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
307	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	Orang/bulan		0		0	2	213.728.832		34.524.482		68.570.676		52.335.218		76.109.192	0	231.539.568	0,00	108,33	0	231.539.568	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	Orang/bulan					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	Orang/bulan					3								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									nan	inf				
Predikat Kinerja																									-	-				
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	0	0	0	0	100	3.387.933.750	0	325.402.892	0	1.031.746.490	0	1.001.221.914	0	1.000.967.818	0	3.359.339.114	0,00	99,16	0	3.359.339.114	nan	inf				
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0		0		100		0		0		0		0		0,00		0		nan							
			ersentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	0		0		100		0		0		0		0		0,00		0		nan							
308	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	1	34.100.000		0		22.985.000		7.839.000		5.276.000	0	36.100.000	0,00	105,87	0	36.100.000	nan	inf	BAPENDA			
309	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit/tahun		0		0	1	34.100.000		0		17.045.000		4.000.000		13.055.000	0	34.100.000	0,00	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA			
310	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	1	34.100.000		11.500.000		0		21.300.000		1.300.000	0	34.100.000	0,00	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA			
311	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	1	22.165.000		2.555.000		9.420.000		8.910.000		3.115.000	0	24.000.000	0,00	108,28	0	24.000.000	nan	inf	BAPENDA			
312	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	1	34.100.000		4.923.000		17.994.590		5.438.000		5.744.410	0	34.100.000	0,00	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
										I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]																													
313	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	1	34.100.000	9.275.000	12.540.000	7.100.000	5.185.000	0	34.100.000	0,00	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA								
314	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	0	34.100.000	4.685.000	11.450.000	3.450.000	14.515.000	0	34.100.000	nan	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit					1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
315	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit/tahun		0		0	1	34.100.000	6.470.000	15.150.000	2.950.000	9.430.000	0	34.000.000	0,00	99,71	0	34.000.000	nan	inf	BAPENDA								
316	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	1	34.100.000	6.275.000	12.580.000	7.375.000	9.870.000	0	36.100.000	0,00	105,87	0	36.100.000	nan	inf	BAPENDA								
317	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	0	34.100.000	3.500.000	5.530.000	14.950.000	10.120.000	0	34.100.000	nan	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit					1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
318	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	1	36.100.000	0	0	6.591.019	29.508.981	0	36.100.000	0,00	100,00	0	36.100.000	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	Unit					0						0		nan		0		nan		BAPENDA								
319	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	0	34.100.000	7.087.582	9.500.000	8.490.000	9.022.418	0	34.100.000	nan	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]																												
			Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit					1									0		0,00		0		nan		BAPENDA				
320	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	35.700.000		0		3.055.000		1.515.000		7.030.000	0	11.600.000	nan	32,49	0	11.600.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit					1									0		0,00		0		nan		BAPENDA				
321	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	17.050.000		0		7.805.000		4.225.000		5.020.000	0	17.050.000	0,00	100,00	0	17.050.000	nan	inf	BAPENDA				
322	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	34.100.000		6.925.000		15.153.000		9.020.000		3.002.000	0	34.100.000	0,00	100,00	0	34.100.000	nan	inf	BAPENDA				
323	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	26.000.000		6.950.000		6.250.000		10.450.000		2.350.000	0	26.000.000	0,00	100,00	0	26.000.000	nan	inf	BAPENDA				
324	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	36.100.000		8.525.000		8.511.000		8.506.000		10.558.000	0	36.100.000	0,00	100,00	0	36.100.000	nan	inf	BAPENDA				
325	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	34.100.000		0		14.102.000		733.030		16.030.734	0	30.865.764	0,00	90,52	0	30.865.764	nan	inf	BAPENDA				
326	X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		0		0	36.100.000		9.791.000		13.666.000		10.100.000		2.543.000	0	36.100.000	0,00	100,00	0	36.100.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]																												
327	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit/tahun		0		0	2	40.960.000		6.500.000		14.035.000		9.180.000		10.195.000	0	39.910.000	0,00	97,44	0	39.910.000	nan	inf	BAPENDA			
328	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	2	37.950.000		0		18.810.000		3.340.000		15.466.000	0	37.616.000	0,00	99,12	0	37.616.000	nan	inf	BAPENDA			
329	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	2	24.090.000		0		7.015.000		14.176.000		3.034.000	0	24.225.000	0,00	100,56	0	24.225.000	nan	inf	BAPENDA			
330	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	1	3.850.000		0		1.894.900		1.925.000		16.030.100	0	19.850.000	0,00	515,58	0	19.850.000	nan	inf	BAPENDA			
331	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	1	39.900.000		7.505.000		8.305.000		5.750.000		18.340.000	0	39.900.000	0,00	100,00	0	39.900.000	nan	inf	BAPENDA			
332	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0		0	10	199.500.000		26.886.500		27.740.500		13.112.950		121.810.050	0	189.550.000	0,00	95,01	0	189.550.000	nan	inf	BAPENDA			
333	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara	unit		0		0	1	37.950.000		0		0		6.275.000		31.675.000	0	37.950.000	0,00	100,00	0	37.950.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%					(14) = 6+12
			Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara	unit		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	BAPENDA			
334	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit			0		0	1	20.900.000		0	10.755.000		5.100.000		5.045.000	0	20.900.000	0,00	100,00	0	20.900.000	nan	inf	BAPENDA				
335	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit			0		0	2	37.950.000	12.445.000		9.410.000		7.009.000		9.086.000	0	37.950.000	0,00	100,00	0	37.950.000	nan	inf	BAPENDA				
336	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit			0		0	1	3.850.000		0	950.000		610.000		2.290.000	0	3.850.000	0,00	100,00	0	3.850.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit						0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
337	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara	unit			0		0	1	39.900.000	9.487.500		9.445.000		7.670.000		13.297.500	0	39.900.000	0,00	100,00	0	39.900.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara	unit						1								0		0,00		0		nan		BAPENDA					
338	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit			0		0	2	37.950.000	11.335.000		7.315.000		8.040.000		11.260.000	0	37.950.000	0,00	100,00	0	37.950.000	nan	inf	BAPENDA				
339	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit			0		0	3	25.450.000	6.205.000		12.750.000		4.000.000		2.495.000	0	25.450.000	0,00	100,00	0	25.450.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
340	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0	0	2	45.650.000	4.810.000		8.707.500	21.500.000	13.282.500	0	48.300.000	0,00	105,81	0	48.300.000	nan	inf	BAPENDA							
341	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0	0	1	39.900.000	1.010.000		7.070.000	3.275.000	6.445.000	0	17.800.000	0,00	44,61	0	17.800.000	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				0							0	nan		0		nan		BAPENDA								
342	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	0	2	72.050.000	0	39.535.000	0	32.515.000	0	72.050.000	0,00	100,00	0	72.050.000	nan	inf	BAPENDA								
343	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0	0	2	29.850.000	8.770.000		7.450.000	10.545.000	3.085.000	0	29.850.000	0,00	100,00	0	29.850.000	nan	inf	BAPENDA							
344	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit/tahun		0	0	1	7.700.000	0	3.775.000	1.550.000	2.375.000	0	7.700.000	0,00	100,00	0	7.700.000	nan	inf	BAPENDA								
345	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	0	0	3.850.000	950.000		725.000	885.000	1.640.000	0	4.200.000	nan	109,09	0	4.200.000	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
346	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0	0	50	13.150.000	2.190.000		4.625.000	3.395.000	750.000	0	10.960.000	0,00	83,35	0	10.960.000	nan	inf	BAPENDA							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%							
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]																												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					0								0		nan		0			nan			BAPENDA			
347	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	37	15.800.000		500.000		4.650.000		4.610.000		6.040.000	0	15.800.000	0,00	100,00	0	15.800.000	nan	inf	BAPENDA			
348	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	110.580.000		0		47.950.000		1.490.000		58.990.000	0	108.430.000	nan	98,06	0	108.430.000	nan	inf	BAPENDA			
			Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit					150								0		0,00		0			nan			BAPENDA			
349	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	162	81.640.000		1.725.000		6.440.000		16.155.000		17.390.000	0	41.710.000	0,00	51,09	0	41.710.000	nan	inf	BAPENDA			
350	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	13.680.000		2.100.000		1.200.000		5.760.000		4.620.000	0	13.680.000	nan	100,00	0	13.680.000	nan	inf	BAPENDA			
			Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit					50								0		0,00		0			nan			BAPENDA			
351	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	75	16.080.000		5.500.000		2.065.000		4.900.000		3.615.000	0	16.080.000	0,00	100,00	0	16.080.000	nan	inf	BAPENDA			
352	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	unit		0		0	50	17.080.000		3.050.000		9.650.000		2.050.000		2.330.000	0	17.080.000	0,00	100,00	0	17.080.000	nan	inf	BAPENDA			
353	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	16.460.000		2.310.000		6.095.000		3.330.000		4.725.000	0	16.460.000	0,00	100,00	0	16.460.000	nan	inf	BAPENDA			
354	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	16.810.000		3.022.000		7.045.000		6.007.000		736.000	0	16.810.000	0,00	100,00	0	16.810.000	nan	inf	BAPENDA			
355	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	14.580.000		4.100.000		1.830.000		2.150.000		6.500.000	0	14.580.000	nan	100,00	0	14.580.000	nan	inf	BAPENDA			
			Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit					50								0		0,00		0			nan			BAPENDA			
356	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	12.870.000		1.180.000		4.105.000		1.500.000		6.085.000	0	12.870.000	0,00	100,00	0	12.870.000	nan	inf	BAPENDA			
357	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	13.970.000		0		8.160.000		5.720.000		0	0	13.880.000	0,00	99,36	0	13.880.000	nan	inf	BAPENDA			
358	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	16.460.000		3.950.000		5.100.000		4.625.000		2.785.000	0	16.460.000	0,00	100,00	0	16.460.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]																												
359	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	13.220.000		0	7.967.000	2.495.000	2.758.000	0	13.220.000	0,00	100,00	0	13.220.000	nan	inf	BAPENDA						
360	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	14.660.000	4.332.000		2.000.000	0	8.328.000	0	14.660.000	0,00	100,00	0	14.660.000	nan	inf	BAPENDA						
361	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	14.970.000		0	5.060.000	5.790.000	4.120.000	0	14.970.000	0,00	100,00	0	14.970.000	nan	inf	BAPENDA						
362	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0		0	50	16.960.000	4.750.000		490.000	8.110.000	4.120.000	0	17.470.000	0,00	103,01	0	17.470.000	nan	inf	BAPENDA						
363	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	15.730.000	4.490.000		7.670.000	3.035.000		0	15.195.000	nan	96,60	0	15.195.000	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit					40							0		0,00		0		nan		BAPENDA						
364	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		0		0	40	17.480.000	2.000.000		10.900.000	2.100.000	2.480.000	0	17.480.000	0,00	100,00	0	17.480.000	nan	inf	BAPENDA						
365	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0		0	1	54.600.000		0	0	53.434.600	1.165.400	0	54.600.000	0,00	100,00	0	54.600.000	nan	inf	BAPENDA						
366	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0		0	1	29.800.000		0	29.800.000	0		0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA						
367	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0		0	1	29.800.000		0	0	0	47.652.000	0	47.652.000	0,00	159,91	0	47.652.000	nan	inf	BAPENDA						
368	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0		0	1	46.664.000	4.808.560		24.475.500	0	17.379.940	0	46.664.000	0,00	100,00	0	46.664.000	nan	inf	BAPENDA						
369	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0		0	1	29.760.000		0	29.616.000	0	41.684.000	0	71.300.000	0,00	239,58	0	71.300.000	nan	inf	BAPENDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
370	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0	0	1	29.800.000		0		0		0	29.800.000	0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0								0		nan		0		nan		BAPENDA						
371	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0	0	1	29.800.000		0		29.800.000		0		0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA						
372	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0	0	1	0		0		0		0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	BAPENDA						
373	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0	0	2	29.800.000		0		5.000.000		24.800.000		0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA						
374	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	0	518.663.000	7.061.500		40.992.800		399.607.800		71.625.600	0	519.287.700	nan	100,12	0	519.287.700	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit				4									0		0,00		0		nan		BAPENDA						
375	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0	0	1	29.002.000		0		28.700.000		0		0	28.700.000	0,00	98,96	0	28.700.000	nan	inf	BAPENDA						
376	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0	0	1	29.800.000		0		29.800.000		0		0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				0									0		nan		0		nan		BAPENDA						
377	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0	0	1	29.800.000	3.180.000		10.800.000		11.191.440		4.628.560	0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA						
378	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0	0	1	44.680.000		0		17.282.000		17.460.000		9.938.000	0	44.680.000	0,00	100,00	0	44.680.000	nan	inf	BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	
379	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0		0	1	17.400.000		0		0	12.400.000		5.000.000	0	17.400.000	0,00	100,00	0	17.400.000	nan	inf	BAPENDA					
380	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0		0	1	42.200.000		0	29.650.000		0	15.774.000	0	45.424.000	0,00	107,64	0	45.424.000	nan	inf	BAPENDA						
381	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit		0		0	1	29.800.000		0	29.800.000		0		0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA						
382	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit/tahun		0		0	1	29.800.000		0		0	29.592.600		207.400	0	29.800.000	0,00	100,00	0	29.800.000	nan	inf	BAPENDA					
383	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	250.870.000	54.190.000	106.478.000		47.341.500		42.860.500	0	250.870.000	nan	100,00	0	250.870.000	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA						
384	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.052.500		0	4.703.200		5.044.200		1.305.100	0	11.052.500	0,00	100,00	0	11.052.500	nan	inf	BAPENDA					
385	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.045.750	960.000	2.833.000		1.812.000		5.440.750	0	11.045.750	0,00	100,00	0	11.045.750	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0								0		nan		0		nan		BAPENDA						
386	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	15.650.000	680.000	6.050.000		3.495.000		2.925.000	0	13.150.000	0,00	84,03	0	13.150.000	nan	inf	BAPENDA						
387	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	9.477.500	931.000	3.600.000		0		4.946.500	0	9.477.500	0,00	100,00	0	9.477.500	nan	inf	BAPENDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
388	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.052.500		0	3.898.950		308.200		6.199.850	0	10.407.000	0,00	94,16	0	10.407.000	nan	inf	BAPENDA				
389	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.052.500	5.353.000		1.100.000		3.583.000		1.016.500	0	11.052.500	0,00	100,00	0	11.052.500	nan	inf	BAPENDA				
390	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	unit		0		0	5	27.420.000	1.980.000		0	4.664.775		20.775.225	0	27.420.000	0,00	100,00	0	27.420.000	nan	inf	BAPENDA					
391	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	40.602.500	2.645.750		20.603.550		0	17.353.200	0	40.602.500	0,00	100,00	0	40.602.500	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0								0		nan		0		nan		BAPENDA					
392	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.052.500	1.285.000		1.280.700		8.254.200		0	10.819.900	0,00	97,90	0	10.819.900	nan	inf	BAPENDA					
393	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.045.750	0		5.418.750		981.750		4.645.250	0	11.045.750	0,00	100,00	0	11.045.750	nan	inf	BAPENDA				
394	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	21.260.000	2.410.000		5.515.500		2.703.750		10.630.750	0	21.260.000	0,00	100,00	0	21.260.000	nan	inf	BAPENDA				
395	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.052.500	1.154.250		2.712.250		2.873.000		4.313.000	0	11.052.500	0,00	100,00	0	11.052.500	nan	inf	BAPENDA				
396	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0		0	2	11.052.500	2.660.800		962.400		6.350.800		1.078.500	0	11.052.500	0,00	100,00	0	11.052.500	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
397	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	0	11.052.500	2.708.800		2.768.800	2.738.800	2.836.100	0	11.052.500	nan	100,00	0	11.052.500	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit				2							0		0,00		0		nan		BAPENDA							
398	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0	0	2	11.040.000	1.200.000		2.293.600	3.630.400	1.759.000	0	8.883.000	0,00	80,46	0	8.883.000	nan	inf	BAPENDA							
399	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0	0	2	11.045.750	960.000		5.803.000	960.000	3.322.750	0	11.045.750	0,00	100,00	0	11.045.750	nan	inf	BAPENDA							
400	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0	0	2	11.052.500	1.669.650		3.140.000	3.608.200	2.634.650	0	11.052.500	0,00	100,00	0	11.052.500	nan	inf	BAPENDA							
401	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	0	8.040.000	0		325.000	1.002.000	998.000	0	2.325.000	nan	28,92	0	2.325.000	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit				1							0		0,00		0		nan		BAPENDA							
402	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	unit		0	0	1	11.052.500	0		5.117.000	3.276.900	2.658.600	0	11.052.500	0,00	100,00	0	11.052.500	nan	inf	BAPENDA							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan							
Predikat Kinerja																						-	-							
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.779.430.000		685.470.450		8.089.892.746	1.513.056.839		2.587.649.035	2.429.652.114	3.410.212.526	9.940.570.514		122,88		10.626.040.964		382,31								
5.02		KEUANGAN				2.779.430.000		685.470.450		8.089.892.746	1.513.056.839		2.587.649.035	2.429.652.114	3.410.212.526	9.940.570.514		122,88		10.626.040.964		382,31								
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	%		2.779.430.000		685.470.450	7.2	8.089.892.746	937.098.749		2.169.014.615	2.429.652.114	3.410.212.526	0	8.945.978.004	0,00	110,58	0	9.631.448.454	nan	346,53							
			Persentase peningkatan PAD	%					7.2							0		0,00		0		nan								
5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	%	0	2.779.430.000	0	685.470.450	7.2	8.089.892.746	0	937.098.749	0	2.169.014.615	0	2.429.652.114	0	8.945.978.004	0,00	110,58	0	9.631.448.454	nan	346,53						
			ercapainya Target PAD	%	0		0		7.2		0		0		0		0		0,00		0		nan							
1	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen	0		0	0	2	93.822.850		36.673.050		13.967.350	1.440.000	27.742.450	0	79.822.850	0,00	85,08	0	79.822.850	nan	inf	BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)								
		Daerah	yang tersedia		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
2	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia	inovasi		0		0	3	417.983.500		34.182.400		35.852.100		85.113.000		165.459.000	0	320.606.500	0,00	76,70	0	320.606.500	nan	inf	BAPENDA			
			Jumlah peserta Rakor HKPD	orang				60					0			0,00		0		nan		BAPENDA								
			Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	Pergub dan Perda				3					0			0,00		0		nan		BAPENDA								
3	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	2.779.430.000	685.470.450	2	260.700.000		0	60.450.000	18.100.000	218.412.500	0	296.962.500	0,00	113,91	0	982.432.950	nan	35,35	BAPENDA								
			Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jenis	11	2		3		0		1			1		33,33		3		27,27		BAPENDA		Kurangnya tenaga SDM dan IT, Tidak sesuai standar harga yg ada dgn saat realisasi dengan DPA perlu pergeseran akibatnya realisasi tidak sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan.	Adanya Anggaran yang tersedia, komitmen pimpinan				
			Jumlah vidio tron	Laporan				1						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
4	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		5.900.000	0	11.750.000	0,00	70,66	0	11.750.000	nan	inf	BAPENDA			
5	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000		2.880.000		0		3.400.000		4.410.000	0	10.690.000	0,00	64,28	0	10.690.000	nan	inf	BAPENDA			
6	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah sosialisasiyang dilaksanakan	Kali		0		0	1	10.410.000		2.685.000		3.165.000		2.430.000		5.100.000	0	13.380.000	0,00	128,53	0	13.380.000	nan	inf	BAPENDA			
7	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	6.455.000		1.080.000		3.125.000		1.080.000		4.455.000	0	9.740.000	0,00	150,89	0	9.740.000	nan	inf	BAPENDA			
8	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	9.750.000		1.980.000		1.935.000		1.035.000		4.800.000	0	9.750.000	0,00	100,00	0	9.750.000	nan	inf	BAPENDA			
9	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000		5.350.000		2.750.000		5.975.000		2.555.000	0	16.630.000	0,00	100,00	0	16.630.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II		III		IV														
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%					(14) = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]																													
10	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	16.630.000	2.025.000		500.000		5.095.000		255.510.000	0	263.130.000	0,00	1.582,26	0	263.130.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kali					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA						
11	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	9.605.000	0		4.725.000		0		4.725.000	0	9.450.000	0,00	98,39	0	9.450.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kali					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA						
12	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	11.630.000	2.335.000		2.525.000		2.560.000		4.210.000	0	11.630.000	0,00	100,00	0	11.630.000	nan	inf	BAPENDA					
13	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000	1.800.000		3.800.000		0		16.150.000	0	21.750.000	0,00	130,79	0	21.750.000	nan	inf	BAPENDA					
14	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000	810.000		10.052.000		4.215.000		1.553.000	0	16.630.000	0,00	100,00	0	16.630.000	nan	inf	BAPENDA					
15	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000	0		10.956.000		2.130.000		1.544.000	0	14.630.000	0,00	87,97	0	14.630.000	nan	inf	BAPENDA					
16	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	15.829.000	0		1.755.000		6.320.000		12.839.000	0	20.914.000	0,00	132,12	0	20.914.000	nan	inf	BAPENDA					
17	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	3.375.000	750.000		750.000		1.120.000		755.000	0	3.375.000	0,00	100,00	0	3.375.000	nan	inf	BAPENDA					
18	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kali		0		0	4	13.880.000	0		3.920.000		4.280.000		7.805.000	0	16.005.000	0,00	115,31	0	16.005.000	nan	inf	BAPENDA					
19	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000	3.650.000		4.095.000		2.600.000		6.285.000	0	16.630.000	0,00	100,00	0	16.630.000	nan	inf	BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]																													
20	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	0	11.630.000		1.620.000		1.710.000		1.710.000		5.310.000	0	10.350.000	nan	88,99	0	10.350.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali					1									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
21	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		0		0	1	16.630.000		4.800.000		2.500.000		4.295.000		255.035.000	0	266.630.000	0,00	1.603,31	0	266.630.000	nan	inf	BAPENDA				
22	5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kiosinformasi dan mesin antrian elektronik	Sarana dan Prasarana		0		0	8	1.339.064.000		0		383.270.022		938.690.000		325.544.083	0	1.647.504.105	0,00	123,03	0	1.647.504.105	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah sepeda motor	unit					18									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah stiker road tax yang disediakan	buah					250000									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak	Lembar					1150000									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
23	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	17.699.750		4.878.000		5.207.100		4.871.600		8.815.050	0	23.771.750	0,00	134,31	0	23.771.750	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
24	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	100	17.027.250		3.065.400		3.787.100		4.283.400		22.391.350	0	33.527.250	0,00	196,90	0	33.527.250	nan	inf	BAPENDA				
25	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Wajib pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	17.669.250		4.753.000		6.884.400		5.729.000		6.302.850	0	23.669.250	0,00	133,96	0	23.669.250	nan	inf	BAPENDA				
26	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	22.199.750		3.446.310		5.404.860		5.291.520		8.057.060	0	22.199.750	0,00	100,00	0	22.199.750	nan	inf	BAPENDA				
27	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	100	21.749.025		4.500.000		7.494.000		6.695.200		7.109.825	0	25.799.025	0,00	118,62	0	25.799.025	nan	inf	BAPENDA				
28	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	22.192.200		4.800.000		3.878.000		5.302.400		14.611.800	0	28.592.200	0,00	128,84	0	28.592.200	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]																													
29	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	50	38.543.226		5.685.600		4.793.600		6.565.600		21.498.429	0	38.543.229	0,00	100,00	0	38.543.229	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
30	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	17.384.550		3.449.050		3.518.550		4.396.800		16.720.150	0	28.084.550	0,00	161,55	0	28.084.550	nan	inf	BAPENDA				
31	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	840	15.400.000		4.420.000		3.000.000		4.040.000		5.740.000	0	17.200.000	0,00	111,69	0	17.200.000	nan	inf	BAPENDA				
32	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	0	21.742.200			0	16.567.000		2.184.000		13.549.000	0	32.300.000	nan	148,56	0	32.300.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Wajib pajak yang didata	Wajib Pajak					100									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
33	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	80	15.592.200		4.290.000		3.690.000		5.290.000		5.322.200	0	18.592.200	0,00	119,24	0	18.592.200	nan	inf	BAPENDA				
34	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan	Wajib Pajak		0		0	5	100.000.000			0	10.080.000		81.120.000		25.600.000	0	116.800.000	0,00	116,80	0	116.800.000	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					0									0		nan		0		nan		BAPENDA					
			Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak					234									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
35	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah wajib pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	50	22.092.750		3.391.500		6.696.000		5.414.400		6.590.850	0	22.092.750	0,00	100,00	0	22.092.750	nan	inf	BAPENDA				
36	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	100	19.142.750		6.584.400		6.093.900		5.400.000		6.914.450	0	24.992.750	0,00	130,56	0	24.992.750	nan	inf	BAPENDA				
37	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Wajib Pajak yang didata	wajib Pajak		0		0	100	21.676.350		5.404.850		5.988.538		5.534.000		24.698.962	0	41.626.350	0,00	192,04	0	41.626.350	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%				(15) = 14/5 * 100%												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]																															
38	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	29.979.000		5.620.000		5.460.000		8.400.000		17.099.000	0	36.579.000	0,00	122,02	0	36.579.000	nan	inf	BAPENDA						
39	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	22.199.750		5.506.300		5.520.100		5.896.800		15.476.550	0	32.399.750	0,00	145,95	0	32.399.750	nan	inf	BAPENDA						
40	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	Wajib Pajak		0		0	90	20.083.750		2.778.750		7.265.000		5.800.000		15.040.000	0	30.883.750	0,00	153,77	0	30.883.750	nan	inf	BAPENDA						
41	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Wajib Pajak yang didata	wajib Pajak		0		0	90	14.100.000		2.775.000		4.575.000		1.250.000		7.300.000	0	15.900.000	0,00	112,77	0	15.900.000	nan	inf	BAPENDA						
42	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah [UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH]	Jumlah aplikasi yang dikelola	aplikasi		0		0	3	627.729.200		26.640.726		375.918.978		61.723.378		134.822.118	0	599.105.200	0,00	95,44	0	599.105.200	nan	inf	BAPENDA						
43	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola	Dokumen		0		0	5	71.157.350		31.864.700		0		22.655.100		26.017.550	0	80.537.350	0,00	113,18	0	80.537.350	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA								
44	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan		0		0	0	35.219.000		0		0		0		0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
			Jumlah wajib pajak yang dilayani	Wajib Pajak					8								0		0,00		0		nan		BAPENDA								
45	5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen		0		0	0	177.528.600		0		47.434.805		41.393.600		28.410.195	0	117.238.600	nan	66,04	0	117.238.600	nan	inf	BAPENDA						
			Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	dokumen					5								0		0,00		0		nan		BAPENDA								
46	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	wajib Pajak		0		0	550	152.090.000		22.950.000		30.357.700		27.447.000		59.643.600	0	140.398.300	0,00	92,31	0	140.398.300	nan	inf	BAPENDA						
47	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	500	90.167.850		22.950.000		30.357.700		27.447.000		30.443.370	0	111.198.070	0,00	123,32	0	111.198.070	nan	inf	BAPENDA						
48	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	450	107.482.500		26.765.250		26.647.150		26.937.200		31.432.900	0	111.782.500	0,00	104,00	0	111.782.500	nan	inf	BAPENDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I		II		III		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
49	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Terlaksananya Samkel	Bulan		0		0	8	130.421.024	30.957.250		33.494.300	27.947.200	42.329.274	0	134.728.024	0,00	103,30	0	134.728.024	nan	inf	BAPENDA							
			Terlaksananya Penagihan PAP	Bulan					8						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
50	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		0		0	674.152.374	74.710.000		92.214.050	88.196.900	448.371.424	0	703.492.374	nan	104,35	0	703.492.374	nan	inf	BAPENDA								
			Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak					1000						0		0,00		0		nan		BAPENDA								
51	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	500	119.707.850	28.935.200		43.072.750	29.516.650	81.555.400	0	183.080.000	0,00	152,94	0	183.080.000	nan	inf	BAPENDA							
52	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	550	84.141.700	24.398.750		23.965.200	16.308.850	19.468.900	0	84.141.700	0,00	100,00	0	84.141.700	nan	inf	BAPENDA							
53	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	500	103.675.750	25.275.050		19.889.117	26.540.260	25.021.323	0	96.725.750	0,00	93,30	0	96.725.750	nan	inf	BAPENDA							
54	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	500	92.980.800	21.827.600		20.873.200	24.798.800	25.481.200	0	92.980.800	0,00	100,00	0	92.980.800	nan	inf	BAPENDA							
55	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	600	256.123.323	49.462.000		59.478.000	57.523.000	89.690.323	0	256.153.323	0,00	100,01	0	256.153.323	nan	inf	BAPENDA							
56	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	500	99.200.000	24.544.000		24.999.780	22.298.820	27.357.400	0	99.200.000	0,00	100,00	0	99.200.000	nan	inf	BAPENDA							
57	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	750	197.510.500	40.636.100		54.960.000	49.578.500	69.585.900	0	214.760.500	0,00	108,73	0	214.760.500	nan	inf	BAPENDA							
58	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	450	111.751.750	25.179.040		29.668.385	20.100.000	36.804.325	0	111.751.750	0,00	100,00	0	111.751.750	nan	inf	BAPENDA							
59	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	550	143.850.500	45.117.700		49.218.700	39.977.000	54.734.454	0	189.047.854	0,00	131,42	0	189.047.854	nan	inf	BAPENDA							
60	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	400	79.121.200	19.425.850		21.433.500	22.239.200	18.788.000	0	81.886.550	0,00	103,50	0	81.886.550	nan	inf	BAPENDA							
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD					0						0		nan		0		nan		BAPENDA								
61	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Wajib pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	500	83.013.750	20.676.000		20.232.650	19.750.000	28.355.100	0	89.013.750	0,00	107,23	0	89.013.750	nan	inf	BAPENDA							
62	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	500	142.447.674	29.384.500		38.520.250	30.913.150	40.415.600	0	139.233.500	0,00	97,74	0	139.233.500	nan	inf	BAPENDA							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
63	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Wajib Pajak		0		0	450	90.847.350	21.451.450		22.064.700		21.627.600		23.056.250	0	88.200.000	0,00	97,09	0	88.200.000	nan	inf	BAPENDA					
64	5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah surat permohonan yang diproses	Dokumen		0		0	2	35.392.000		0		0		0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
65	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0		0	1	28.300.000	4.584.900		9.779.400		8.129.200		5.806.500	0	28.300.000	0,00	100,00	0	28.300.000	nan	inf	BAPENDA					
66	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	0	22.513.950	2.038.900		7.354.000		5.940.000		7.181.050	0	22.513.950	nan	100,00	0	22.513.950	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA						
67	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0		0	1	38.685.000	1.508.600		15.615.555		13.939.200		3.421.645	0	34.485.000	0,00	89,14	0	34.485.000	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA						
68	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	0	36.612.750	9.025.800		8.424.000		13.536.000		0	0	30.985.800	nan	84,63	0	30.985.800	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali					1								0		0,00		0		nan		BAPENDA						
69	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0		0	1	32.994.300	8.698.100		8.576.150		1.800.000		10.312.050	0	29.386.300	0,00	89,06	0	29.386.300	nan	inf	BAPENDA					
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA						
70	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		0		0	1	34.800.000	4.200.000		9.000.000		2.700.000		18.900.000	0	34.800.000	0,00	100,00	0	34.800.000	nan	inf	BAPENDA					
				Laporan					12								0		0,00		0		nan		BAPENDA						
			Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali					2								0		0,00		0		nan		BAPENDA						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan					0								0		nan		0		nan		BAPENDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I		II		III		IV			(13) = 12/7 * 100%			(15) = 14/5 * 100%					
								(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)		(18)	(19)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
				Laporan			0					0		nan		BAPENDA									
				Laporan			0					0		nan		BAPENDA									
71	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah laporan pengawasan yang dilakukan	Laporan		0	8 25.999.000	0	10.321.000	10.328.000	7.150.000	0 27.799.000	0,00 106,92	0 27.799.000	nan inf	BAPENDA									
			Jumlah Razia yang dilakukan	Kali			4					0	0,00	0	nan	BAPENDA									
72	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	1 32.130.900	2.850.000	10.994.100	2.800.000	15.486.800	0 32.130.900	0,00 100,00	0 32.130.900	nan inf	BAPENDA									
73	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	1 16.028.250	3.228.300	3.703.900	8.032.000	1.064.050	0 16.028.250	0,00 100,00	0 16.028.250	nan inf	BAPENDA									
74	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	1 43.827.200	1.998.500	18.435.050	14.727.150	8.666.500	0 43.827.200	0,00 100,00	0 43.827.200	nan inf	BAPENDA									
75	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	1 42.342.750	2.700.000	12.743.950	9.008.800	17.725.000	0 42.177.750	0,00 99,61	0 42.177.750	nan inf	BAPENDA									
76	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	1 39.817.500	900.000	7.300.675	11.074.615	24.742.210	0 44.017.500	0,00 110,55	0 44.017.500	nan inf	BAPENDA									
77	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	1 53.600.000	10.369.800	13.267.400	13.900.600	15.162.200	0 52.700.000	0,00 98,32	0 52.700.000	nan inf	BAPENDA									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan			0					0	nan	0	nan	BAPENDA									
78	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	1 40.083.900	4.440.000	3.876.000	4.435.000	14.332.900	0 27.083.900	0,00 67,57	0 27.083.900	nan inf	BAPENDA									
79	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0	18 169.487.500	16.969.850	44.899.950	61.216.600	46.401.100	0 169.487.500	0,00 100,00	0 169.487.500	nan inf	BAPENDA									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I		II		III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengawasan Pajak Daerah																													
80	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0		0	1	375.887.500		0	159.818.800		130.990.350		57.278.350	0	348.087.500	0,00	92,60	0	348.087.500	nan	inf	BAPENDA					
81	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	0	46.385.700		11.830.000		10.057.200		23.574.800		27.235.850	0	72.697.850	nan	156,72	0	72.697.850	nan	inf	BAPENDA				
			Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali					1									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
82	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0		0	1	15.103.800		5.400.000		5.924.800		3.772.800		0	0	15.097.600	0,00	99,96	0	15.097.600	nan	inf	BAPENDA				
83	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		0		0	1	36.903.750		0		0		4.400.000		21.403.750	0	25.803.750	0,00	69,92	0	25.803.750	nan	inf	BAPENDA				
84	5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		0		0	1	231.322.900		52.526.223		69.071.150		49.061.771		60.663.756	0	231.322.900	0,00	100,00	0	231.322.900	nan	inf	BAPENDA				
			Terlaksananya evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan	kali					12									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Terlaksananya rapat penetapan target	bulan					12									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Terlaksananya sosialisasi/ bimtek/ FGD/ Asistensi	orang untuk 5 keg					1000									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
			Tersusunnya rencana pendapatan daerah	dokumen					2									0		0,00		0		nan		BAPENDA					
85	5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah [UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH]	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0		0	1	118.556.250		0		0		18.358.400		100.197.850	0	118.556.250	0,00	100,00	0	118.556.250	nan	inf	BAPENDA				
86	5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan		0		0	1	72.519.700		760.000		5.395.000		46.004.900		20.359.800	0	72.519.700	0,00	100,00	0	72.519.700	nan	inf	BAPENDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Penyusunan RKPD 2025 salah satunya berpedoman terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi pencapaian target 2023 yang dilaksanakan bertujuan salah satunya dengan penekanan pada pencapaian Misi yang juga menjadi Prioritas Pembangunan sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi Tahun 2023 mencakup evaluasi terhadap kinerja efektivitas pembangunan yang berdasarkan kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan. Evaluasi kinerja efektivitas pembangunan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang nanti juga menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran serta program pembangunan RKPD Tahun 2025.

Tabel 2.88
Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA			KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
		JUMLAH	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	6	6	0	100
2	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	7	3	4	98,28
3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	9	9	0	100
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	9	8	1	99.84
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	3	2	1	77.25
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12	7	5	97.75
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	8	6	2	96.49
TOTAL PENCAPAIAN KINERJA		54	41	13	95.66

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja efektifitas pelaksanaan terhadap 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 maka masih terdapat target-target pembangunan yang belum tercapai secara maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan di RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Secara total dari 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan maka pencapaian kinerja efektifitas pembangunan tahun 2023 mencapai 95,66%.

2.3.1.1. Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing

Terdapat 6 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 1 yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.89
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan,
Terampil, dan Berdaya Saing Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALLISASI	
Prioritas Pembangunan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing					100%
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Nilai	73,23	75.64	100% / Tercapai
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,98	74,14	100% / Tercapai
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,43	9.8	100% / Tercapai
4	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,28	9,28	100% / Tercapai
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,06	14,11	100% / Tercapai
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	%	49,75	52.14	100% / Tercapai

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 100%. Dari 6 (enam) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 1, semuanya dapat dicapai dengan baik.

2.3.1.2. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 2 yang difokuskan untuk meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal Sumatera Barat, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.90
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah					98,28%
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	60.9	56.9	93.43% / Tidak Tercapai
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	Indeks	62.8	61.97	98.68% / Tidak Tercapai
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	14	16.41	100% / Tercapai
4	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	61.38	60.99	99.36% / Tidak Tercapai
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.25	94.72	100% / Tercapai
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60.01	65.48	100% / Tercapai
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65.95	63.65	96.51% / Tidak Tercapai

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 98.28%%. Dari 7 (tujuh) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 2, sebanyak 3 (tiga) Indikator kinerja dapat tercapai yakni Pembangunan Lterasi Masyarakat dengan capaian 16,41, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 94,72 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian 65,48, sedangkan terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan capaian 56,9 (menggunakan data capaian tahun 2022), Indeks Ketahanan Sosial Budaya dengan capaian 61,97 (menggunakan data capaian tahun 2022), Indeks Pembangunan Keluarga dengan capaian 60,99 (menggunakan data capaian tahun 2022) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan capaian 63,65 (menggunakan data capaian tahun 2022).

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Sumatera Barat antara lain yakni :

- a. masih rendahnya pencapaian pada dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 61,97 (rata-rata capaian nasional sebesar 69,25) yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

- b. masih rendahnya capaian pada dimensi ekspresi budaya dengan capaian tahun 2022 sebesar 28,71 (rata-rata capaian nasional sebesar 31,48) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi penduduk untuk mengikuti kegiatan organisasi masyarakat serta penduduk rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat.

Terkait dengan pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga, maka beberapa permasalahan antara lain yakni masih rendahnya tingkat kemandirian ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, belum optimalnya pelaksanaan dan komitmen lintas sektor yang terkait dalam pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga serta masih terbatasnya advokasi dan KIE terkait iBangga, baik untuk melakukan advokasi kepada stakeholders terkait maupun KIE kepada masyarakat, belum tersedianya peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta masih rendahnya tingkat ketahanan keluarga (ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan) yang dapat mengakibatkan tingginya angka perkawinan anak, perceraian, dan kehamilan yang tidak diinginkan dan direncanakan.

Adapun permasalahan dalam pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) antara lain yakni belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga UPTD/Sub Unit untuk memberikan pelayanan dan tindak lanjut dalam kasus terhadap perempuan dan anak, terbatasnya data kasus kekerasan tidak valid dan realtime, dikarenakan adanya keengganan masyarakat untuk mengungkapkan kasus, terbatasnya dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sinergitas dan keberlanjutan program antara provinsi dan kabupaten/kota, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan, terbatasnya jangkauan layanan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimalnya pelibatan anak dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah serta belum maksimalnya komitmen atau kebijakan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai salah satu prioritas daerah.

2.3.1.3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 3 yang difokuskan untuk meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui peningkatan pendapatan petani, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.91
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan					100%

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	%	5	8.3	100% / Tercapai
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101.19	110.27	100% / Tercapai
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	103.98	108.97	100% / Tercapai
4	Pendapatan pembudidaya ikan	Rp. Juta	48590	50989	100% / Tercapai
5	Pendapatan nelayan	Rp. Juta	41611	41758	100% / Tercapai
6	Pendapatan Peternak	Rp. Juta	50265	52458	100% / Tercapai
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	9.94	100% / Tercapai
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80.21	83.22	100% / Tercapai
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	%	5	17.24	100% / Tercapai

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 100%. Dari 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 3 yang seluruh dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian dari masing-masing indikator kinerja yakni sebagai berikut Persentase Peningkatan Pendapatan Petani dengan capaian sebesar 8,3%, Nilai Tukar Petani (NTP) dengan capaian 110,27, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) dengan capaian 108,97, Pendapatan pembudidaya ikan dengan capaian Rp.50,989 juta, Pendapatan nelayan sebesar Rp. 41,758 juta, Pendapatan Peternak dengan capaian sebesar Rp. 52,458 juta, Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura sebesar 9,94%, capaian Indeks Ketahanan Pangan sebesar 83,22 dan Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dengan capaian sebesar 17,24%.

Meskipun secara keseluruhan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 3 telah tercapai namun secara umum dalam pembangunan sektor pertanian dalam artian luas masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar antara lain yakni keterbatasan lahan dan modal yang dimiliki oleh petani, harga jual hasil tani (termasuk ternak) yang cenderung tidak stabil dan akses pasar yang tidak dapat dimasuki langsung oleh petani/peternak terutama ternak unggas, skala usaha atau jumlah kepemilikan ternak belum memenuhi skala ekonomi, usaha perkebunan rakyat masih skala kecil, kenaikan harga barang modal seperti bibit dan pupuk, adanya kelangkaan pupuk bersubsidi, faktor cuaca yang sangat mempengaruhi hasil pertanian baik kualitas dan harga jual barang, sistem pertanian yang digunakan masih tradisional, adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga mempengaruhi biaya operasional terutama nelayan, pola tanam yang dilakukan tidak sesuai dengan kalender tanam sehingga hasil panen tidak maksimal (terutama untuk komoditas

palawija dan hortikultura), serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani/peternak, menurunnya luas panen karena serangan hama dan penyakit terutama pada daerah sentra padi, adanya alih komoditi tanaman pangan ke hortikultura, adanya jaringan irigasi yang masih dalam perbaikan sehingga berpengaruh terhadap waktu tanam, harga komoditi hortikultura yang berfluktuasi, sifat komoditi hortikultura cepat rusak dan tidak dapat disimpan lama, hilirisasi masih belum optimal, harga pakan yang terus meningkat, adanya wabah penyakit seperti PMK untuk sapi dan flu burung untuk unggas, ketersediaan bibit unggul di UPR (Unit Pembenihan Rakyat) masih kurang serta budaya kerja yang masih rendah, masih kurangnya pemahaman pembudidaya dalam melakukan CBIB (Cara budidaya ikan yang baik) dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan kurangnya pemahaman nelayan dalam menerapkan CPIB (cara penanganan ikan yang baik) diatas kapal, masih rendahnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi pertanian, kurangnya akses permodalan bagi pembudidaya ikan dan nelayan.

2.3.1.4. Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 4 yang difokuskan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebagai salah satu sektor yang cukup dominan dalam struktur PDRB Sumatera Barat serta meningkatkan kualitas UKM termasuk Industri Kecil dan Menengah serta penumbuhan entrepreneur, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.92
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas
Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah
serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital					99,84%
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16.70	16.91	100% / Tercapai
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	8.88	8.75	98.54% / Tidak Tercapai
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	(1.00)	4.81	100% / Tercapai
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	Sentra	379.00	406.00	100% / Tercapai
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	2.18	5.58	100% / Tercapai
6	Persentase peningkatan	%	3.10	3.20	100% / Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
	pendapatan pada usaha mikro dan kecil				
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta	Orang	130,482	240,385	100% / Tercapai
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	8.00	125.84	100% / Tercapai
9	Kontribusi Ekonomi Digital	%	6.70	6.72	100% / Tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 99,84%. Dari 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4, sebanyak 8 (delapan) Indikator kinerja dapat tercapai yakni Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan capaian 16,91%, , Laju pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 4,81%, Jumlah sentra industri kecil dan menengah dengan capaian 406 sentra, Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi dengan capaian sebesar 5,58%, Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil dengan capaian 3,20%, Jumlah enterpreneur baru tercipta sebanyak 240.385 orang, Persentase peningkatan Investasi di provinsi sebesar 125.84%, dan Kontribusi Ekonomi Digital dengan capaian 6,72%. Sedangkan terdapat 1 (sat) indikator kinerja yang tidak tercapai yakni Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dengan capaian 8,75 dari target yang ditetapkan sebesar 8.88%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB antara lain 1) masih rendahnya kapasitas pelaku IKM meningkatkan kualitas nilai produk serta terbatasnya kapasitas pelaku IKM dalam memasarkan produk dalam digital marketing, 2) belum terdapatnya pabrik/industri pengolahan yang mempunyai akses keluar (ekspor) seperti pemanfaatan produk turunan kelapa dan komoditas potensial lainnya, 3) belum optimalnya akses pasar bagi pelaku industry, 4) belum fokusnya masing-masing daerah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

2.3.1.5. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 5 yang difokuskan untuk dunia pariwisata di Sumatera Barat yang didukung dengan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.93
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan
Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata					77,25%
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	13.89	4.41	31.75%/ Tidak Tercapai
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	1.24	1.37	100%/ Tercapai
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB	%	1.75	7.44	100%/ Tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 77.25%. Dari 3 (tiga) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 5, terdapat Indikator kinerja yang dapat tercapai yakni Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB dengan capaian 1,37% dan Persentase Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB dengan capaian 6,72%, serta 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian 4.41% dari target yang ditetapkan sebesar 13.89%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain yakni Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga secara tidak langsung berdampak kepada aksesibilitas pada objek-objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan), destinasi wisata belum dikelola dengan baik antara lain dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan pengunjung seperti sarana toilet dan air bersih serta tempat ibasah yang representatif, serta masih banyaknya destinasi wisata lainnya terutama destinasi wisata alam yang belum terpublikasikan dengan baik, dan akses sarana dan prasarana yang belum optimal untuk mendukung peningkatan pariwisata.

Hal mendasar lainnya yang menjadi permasalahan yakni belum berdayanya masyarakat sekitar lokasi wisata, masyarakat justru cenderung menjadi penghalang kemajuan pariwisata di lokasi tempat tinggalnya dengan adanya pemalakan baik berbentuk pungutan liar, parkir liar serta tindakan criminal lainnya yang mengakibatkan ancaman keamanan bagi pengunjung, hal lainnya yang tak kalah meresahkan adalah sikap tidak menjaga lingkungan dengan mendirikan bangunan liar serta membuang sampah

sembarangan dan tidak menjaga lingkungan dengan baik yang mengakibatkan pariwisata yang berjalan tersebut akan terhenti dengan sendirinya.

Selain itu, dalam perkembangan ekonomi kreatif belum di dukung sepenuhnya oleh komitmen masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan ekonomi kreatif belum sepenuhnya didasarkan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, kualitas produk ekonomi kreatif belum mampu berdaya saing dan belum bernilai tinggi, harga produk ekonomi kreatif masih sangat bervariasi serta relatif tinggi dan kurangnya inovasi terhadap produk ekonomi kreatif yang dihasilkan serta juga minim informasi terkait dengan minat pasar akan suatu produk yang dibutuhkan.

2.3.1.6. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 6 yang difokuskan untuk meningkatkan kinerja infrastruktur, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan bangunan strategis, penguatan jaringan irigasi serta pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.94

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan					97,75%
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	0.731	0.653	89.33%/ Tidak Tercapai
2	Rasio Konektivitas	Rasio	0.676	0.67	99.11%/ Tidak Tercapai
3	Kemantapan Jalan	%	77	67.99	88.30%/ Tidak Tercapai
4	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.5	0.8	100%/ Tercapai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77.95	75.85	97.31%/ Tidak Tercapai
6	Akses Air Minum	%	84	84.93	100%/ Tercapai
7	Akses Sanitasi Layak	%	84	84.89	100%/ Tercapai
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	%	55.55	67.99	100%/ Tercapai
9	Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	71.92	71.92	100%/ Tercapai
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	%	55.28	59.4	100%/ Tercapai
11	Persentase luas kawasan yang	%	68.27	67.57	98.97%/ Tidak Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
	terlindungi dari daya rusak air				
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	87	87.75	100%/ Tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 97,75%. Dari 12 (duabelas) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 6, sebanyak 7 (tujuh) Indikator kinerja dapat tercapai yakni Indeks Ketahanan Daerah dengan capaian 0,8%, Akses Air Minum dengan capaian 84,93%, Akses Sanitasi Layak dengan capaian 84,89%

Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi dengan capaian 71,06%, Persentase Volume tampungan sumber-sumber air dengan capaian sebesar 58,73%, Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dengan capaian 66,90% dan Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW dengan capaian 86%, Persentase Bangunan Strategis Terbangun dengan capaian 67.99%, Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi dengan capaian 71.92%, Persentase Volume tampungan sumber-sumber air dengan capaian 59.4% dan Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW capaian 87.75%

Sedangkan terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak tercapai target yakni Indeks Kinerja Infrastruktur dengan capaian 0,653, Rasio Konektivitas dengan capaian 0,67, Kemantapan Jalan dengan capaian 67,99%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 75,85, dan Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dengan capaian 67.57%

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur terutama dipengaruhi oleh pencapaian target 12 (dua belas) indikator kinerja Prioritas 6 yang merupakan komponen yang diukur untuk perhitungan indeks kinerja infrastruktur yaitu Rasio Konektivitas, Kemantapan Jalan, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Akses Air Minum, Akses Sanitasi Layak, Persentase Bangunan Strategis Terbangun, Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi, Persentase Volume tampungan sumber-sumber air, Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, dan Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW. Dengan tidak tercapainya 5 indikator target kinerja mengakibatkan pencapaian target Indeks Kinerja Infrastruktur sebesar 0,653 berada dibawah target RPJMD.

Permasalahan dalam pencapaian target Rasio Konektivitas antara lain adalah adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak

dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak. Hal itu mempengaruhi kepada variable perhitungan rasio konektivitas.

Sumatera Barat memiliki jaringan jalan yang luas dan penting untuk konektivitas dalam daerah, namun permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Kemantapan Jalan antara lain adalah kejadian bencana alam yang terjadi menyebabkan terjadinya kerusakan pada beberapa ruas jalan Provinsi, tingginya intensitas lalu lintas, muatan kendaraan yang melewati jalan Provinsi melebihi kapasitas Jalan, dampak dari cuaca ekstrem dan belum berimbangnya antara penanganan kerusakan jalan dengan penambahan kerusakan jalan.

Dampak dari belum optimalnya kemantapan jalan ini yakni banyaknya terjadi jalan rusak dan berlobang yang menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan yang rusak dan berlubang juga menyebabkan semakin tingginya risiko kecelakaan lalu lintas dan dapat mempengaruhi kendali kendaraan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan berdampak negatif pada keselamatan pengguna jalan.

Selain itu akses jalan yang buruk dan belum maksimal dapat menurunkan potensi daya Tarik Pariwisata dan daya tarik Investasi. Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama dengan keindahan alamnya, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Danau Maninjau, dan Gunung Singgalang, namun jalan rusak dan berlobang dapat menjadi hambatan bagi wisatawan dan investor yang ingin mengunjungi atau berinvestasi di daerah tersebut. Sumatera Barat juga memiliki beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang buruk, sehingga hal ini dapat menghambat aksesibilitas masyarakat lokal terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Dan yang tak kalah pentingnya belum maksimalnya kemantapan jalan akan memberikan dampak Ekonomi dan Biaya Operasional menjadi meningkat, karena dengan adanya jalan rusak dan berlubang akan meningkatkan biaya operasional kendaraan, khususnya kendaraan komersial yang mengangkut barang dan logistik. Hal ini dapat berdampak pada biaya transportasi yang lebih tinggi dan pengurangan daya saing produk lokal.

Untuk percepatan peningkatan angka kemantapan jalan ini, didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi jalan dan kegiatan Pembangunan/Rekonstruksi atau pembukaan jalan baru. Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan akan lebih mempercepat pencapaian kemantapan jalan, sementara kegiatan pembangunan/rekonstruksi atau pembukaan jalan baru akan mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas terutama akses menuju daerah terisolir dan tertinggal, namun untuk pencapaian target kemantapan jalan akan lebih lambat karena biaya yang dibutuhkan lebih besar.

Permasalahan dalam pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain belum terintegrasinya kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas air,

lahan, udara dan air laut, masih terjadinya alih fungsi lahan, masih adanya illegal mining di sungai serta belum optimalnya penanganan sampah dan limbah.

Meskipun capaian Indeks Ketahanan Daerah telah tercapai melebihi target, namun terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu segera dibenahi antara lain yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan kejadian bencana karena belum adanya suatu aplikasi yang telah terintegrasi secara menyeluruh dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait, selain itu laporan kejadian bencana masih bersifat sektoral tertentu dengan proses tanggap darurat yang dilakukan terkadang masih kurang terasa manfaatnya oleh masyarakat. Disamping itu adanya keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial, serta masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat, serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2.3.1.7. Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 7 yang difokuskan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.95
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas					96,49%
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69.5	76.25	100%/ Tercapai
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	100%/ Tercapai
3	Nilai EPPD	Skor	3.002	2.7333	91.05/ Tidak Tercapai
4	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	100%/ Tercapai
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	38.25	44.31	100%/ Tercapai
6	Indeks SPBE	Indeks	3.3	3.75	100%/ Tercapai
7	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	61.46	80.87/ Tidak Tercapai
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	87.5	89.11	100%/ Tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 96.49%. Dari 8 (delapan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 7, sebanyak 6 (enam) Indikator kinerja dapat tercapai yakni Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 76.25, Nilai SAKIP dengan capaian BB , Opini laporan keuangan dengan capaian WTP, Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan capaian 44,31%, Indeks SPBE dengan capaian 3.75 serta Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dengan capaian 89,11. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni Nilai EPPD dengan skor 2.7333 dari target nilai 3 dan Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian 61.46 dari target sebesar 76.

Permasalahan dalam pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN antara lain yakni keterbatasan anggaran dalam meningkatkan kompetensi ASN yang salah satunya ditandai dengan belum terpenuhinya komitmen penganggaran peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan sebesar 0,34% dari seluruh total belanja daerah sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD, Aplikasi mySAPK yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak terdokumentasinya aspek penilaian kompetensi individu ASN dengan baik, masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti diklat teknis, belum tersedianya sistem informasi untuk menyimpan data individu ASN

2.3.2. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan

- 1) Terbatasnya ketersediaan data terpilah jumlah penyandang disabilitas untuk mengintervensi bagi Pendidikan Luar Biasa.
- 2) Terbatasnya data dan informasi untuk mengintervensi dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah ditingkatkan dijenjang pendidikan menengah dan khusus, terutama dalam mengintervensi faktor non teknis seperti : budaya, ekonomi.
- 3) Terbatasnya kemampuan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan khususnya pencapaian akreditasi A berupa peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 4) Minimnya pelatihan guru dan kemampuan literasi siswa yang belum dapat dinilai oleh guru dalam peningkatan nilai kompetensi minimum literasi dan numerasi.
- 5) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal masih terkendala dikarenakan belum diakui oleh Kemendikbud-Ristek dan SDM-nya masih belum tersedia.

- 6) Belum idealnya jumlah kebutuhan guru dengan yang tersedia baik PNS maupun PPPK, dengan masih banyaknya guru honorer di sekolah.
- 7) Belum ada struktur yang khusus pada Dinas Pendidikan yang menangani program pengembangan bahasa dan sastra.
- 8) Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sekolah penggerak.
- 9) Masih adanya kondisi masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang dan sebagainya.
- 10) Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah.
- 11) Faktor Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, SDM pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar, jumlah siswa yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan).

B. Urusan pemerintahan bidang Kesehatan

- 1) Masih ada persalinan kehamilan yang menggunakan tenaga non Kesehatan
- 2) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban sehat
- 3) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Kesehatan lingkungan
- 4) Isu negatif terkait kehalalan imunisasi yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat
- 5) Terbatasnya SDM Kesehatan baik dari kualitas dan kuantitas terutama pada pusat layanan pertama
- 6) Terbatasnya Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan (Bidan Desa)
- 7) Masih rendahnya kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten/Kota
- 8) Terbatasnya pelaksanaan pengawasan /pembinaan UKOT, dan Pelaku Usaha

C. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum
- 2) Terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan Jalan, jembatan, ciptakarya serta pengairan
- 3) Data harian irigasi masih belum valid
- 4) Belum adanya database irigasi
- 5) Belum optimalnya kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

- 6) Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air.
- 7) Tidak adanya pengawasan yang intensi terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi berat dari yang di izinkan sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak (umur ekonomis jalan menjadi singkat) serta berkurangnya kapasitas jalan akibat guna lahan maupun pemanfaatan ruang jalan.
- 8) Belum adanya MOU antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama terkait dengan sinergi pembangunan infrastruktur.
- 9) Belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan kawasan strategis.
- 10) Masih terdapat pihak ketiga yang kurang kompeten dalam penyelesaian pekerjaan sehingga menjadi terbengkalai/tidak diselesaikan dengan tepat waktu.
- 11) Panjangnya prosedur terutama terkait dengan proses lelang pekerjaan pembangunan yang bersifat fisik.
- 12) Faktor cuaca yang sering tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik.
- 13) Terhambatnya pembangunan dikarenakan permasalahan pembebasan lahan.
- 14) Relatif belum meratanya aksesibilitas pergerakan orang dan barang ke kawasan terpencil, tertinggal dan terluar.
- 15) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program air minum dan sanitasi.
- 16) Belum tersusunnya Masterplan Sanitasi lintas kabupen/kota.
- 17) Belum tersedianya database kebutuhan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota dan sistem pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota.
- 18) Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi.
- 19) Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan. Belum semua kabupaten/kota yang memiliki sistem air limbah terpusat sehingga tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah permukiman.
- 20) Belum adanya SPALD Regional dan SPAM Regional.
- 21) Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan tidak diiringi dengan pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang tinggi.
- 22) Terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota.

- 23) Adanya kebutuhan di daerah yang mendesak untuk menyusun dokumen seperti mengakomodir perubahan RTRW, Kondisi alam dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis yang butuh penyesuaian

D. Urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Belum ada regulasi tentang RTLH
- 2) Sebagian besar pelaksanaan urusan merupakan kewenangan kabupaten/kota
- 3) Lokasi PSU yang sulit diakses
- 4) Terbatasnya SDM pengelola kegiatan
- 5) Masih kurangnya dukungan dari masyarakat
- 6) Masih belum maksimalnya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengurangan kawasan kumuh provinsi
- 7) Masih banyaknya permukiman yang belum memiliki PSU yang layak
- 8) Data rumah yang layak huni untuk korban bencana yang menjadi tanggung jawab provinsi tidak ada sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan/ dianggarkan.
- 9) Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak ada sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan.

E. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Terbatasnya kewenangan terutama dalam penentuan status bencana
- 2) Terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana
- 3) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
- 5) Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
- 6) Belum adanya database khusus untuk menyimpan history/ riwayat dari bencana, baik dalam skala yang kecil maupun besar
- 7) Laporan bencana yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana
- 8) Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi
- 9) Validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan

- 10) Sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai
- 11) Penyusunan Rencana Kontijensi yang belum optimal dikarenakan masih dilaksanakan secara manual
- 12) Terdapatnya gangguan trantibum yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang
- 13) Masih adanya OPD yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP
- 14) Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda
- 15) Terbatasnya kewenangan penentuan status bencana
- 16) Masih belum memadainya Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana
- 17) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
- 18) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
- 19) Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
- 20) SDM Satpol PP yang masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas
- 21) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
- 22) Minimnya anggaran yang tersedia sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak.
- 23) Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana damkar di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- 24) Belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran

F. Urusan pemerintahan bidang Sosial

- 1) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam rehabilitasi sosial diluar panti yang menjadi kewenangannya
- 2) Belum adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota terhadap anak terlantar dan penyandang disabilitas yang telah menamatkan pendidikan/pelatihan di dalam panti
- 3) Kurangnya pemantauan Kabupaten/Kota terhadap lanjut usia terlantar yang telah direkomendasikan kedalam panti
- 4) Belum tersedianya petan rawan bencana dari Kabupaten/kota
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat

- 6) Belum adanya regulasi terkait forum filantropi di Sumatera Barat sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah
- 7) Belum adanya pemenuhan SPM terkait Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial
- 8) Pemahaman terkait dengan kinerja dan penilaian Indek Partisipasi Sosial (IKD) yang masih terbatas dan belum diketahui semua pihak terutama oleh penyelenggara urusan sosial
- 9) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pemenuhan SMP Bidang Sosial untuk mencaai target 100% yang merupakan kewenangan Provinsi yakni Rehabilitasi Sosial dalam Sosial
- 10) Data DTKS yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

2.3.2.2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja

- 1) Masih belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun RTKD
- 2) Mekanisme pelaporan ketenagakerjaan kabupaten /kota belum optimal
- 3) Masih rendahnya pemahaman tentang ketentuan dan peraturan Hubungan Industrial mengakibatkan belum optimalnya pembinaan Hubungan Industrial di perusahaan
- 4) Pada sektor UKM belum sepenuhnya mengerti dengan peraturan perlindungan ketenagakerjaan sehingga kepesertaan BPJS ketenagakerjaan masih sedikit
- 5) Belum optimalnya program pengawasan ketenagakerjaan disebabkan Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan baik di provinsi yang masih terbatas
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana BLK milik pemerintah
- 7) Kuantitas dan kualitas instruktur masih minim dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja
- 8) Tingkat kompetensi tenaga kerja belum maksimal
- 9) Budaya kerja di Sumatera Barat yang masih rendah
- 10) Keterbatasan orang yang akan dilakukan pendidikan dasar dan pelatihan di BLK karena dibatasi persyaratan usia, pendidikan, lama pelatihan dll
- 11) Komitmen beberapa perusahaan yang masih rendah untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
- 2) Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.

- 3) Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
- 4) Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
- 5) Belum optimalnya Kabupaten/ Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 6) Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan
- 7) Belum Teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan secara Optimal.
- 8) Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
- 9) masih rendahnya capaian indicator kluster dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak
- 10) Masih tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 11) Adanya peran ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga
- 12) Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsive gender
- 13) Partisipasi masyarakat yang masih rendahnya antara lain belum seluruhnya kabupaten/kota yang memiliki PUSPA yakni Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya: lembaga masyarakat, dunia usaha dan media

C. Urusan pemerintahan bidang Pangan

- 1) Masih terdapatnya daerah rawan pangan
- 2) Belum kuatnya regulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota
- 3) Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
- 4) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan
- 5) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi
- 6) Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
- 7) Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui
- 8) Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan masih berskala rumah tangga

- 9) Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

D. Urusan pemerintahan bidang Pertanahan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembebasan lahan
- 2) Para pihak bertahan pada pendapat dan tuntutan masing-masing sehingga sulit mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi
- 3) Masyarakat tidak bersedia menerima ganti rugi sesuai dengan harga appraisal
- 4) Adanya bantuan dari aparat hukum dalam mengoordinasikan dan menjaga ketentraman/ketertiban dalam penyelesaian masalah pertanahan
- 5) Instansi terkait dan para pihak yang bersengketa bersedia memberikan data-data dan dokumen berkenaan dengan permasalahan pertanahan yang difasilitasi
- 6) Terbatasnya bantuan dari aparat hukum dalam mengoordinasikan dan menjaga ketentraman/ketertiban dalam penyelesaian masalah pertanahan
- 7) Status tanah yang kebanyakan milik kaum dan merupakan tanah ulayat sehingga mengakibatkan sulitnya berinvestasi di Sumatera Barat

E. Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

- 1) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas air sungai yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di sumber seperti pemilahan sampah sejak dari rumah tangga
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta secara mandiri melakukan pengolahan sampah pada level rumah Tangga
- 5) Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat
- 6) Masih maraknya kegiatan penambangan illegal di sungai
- 7) Terbatasnya kegiatan pengawasan lingkungan yang dilakukan
- 8) Masih minimnya kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
- 9) Masih belum maksimalnya dalam menerapkan sanksi sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan
- 10) Belum semua Kabupaten/Kota memiliki perangkat aturan pengelolaan sampah seperti regulasi dan lain-lain
- 11) Belum semua usaha da-tau kegiatan memiliki acuan pengelolaan limbah B3 dalam izin/dokumen lingkungan (belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3)

- 12) Belum semua objek pencemar dan perusak tercakup dalam upaya pencegahan (pengawasan/ pemantauan/ inventarisasi)
- 13) Aktivitas perusakan lebih tinggi daripada kemampuan upaya pemulihan
- 14) Belum maksimalnya pusat penanganan Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan
- 15) Masih rendahnya tingkat pelayanan penanganan sampah di Kabupaten/Kota khususnya di wilayah kabupaten.
- 16) Kondisi lingkungan hidup yang belum baik dan masih rendahnya kualitas air, udara dan air laut
- 17) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah.
- 18) Masih banyaknya pencemaran Daerah Air sungai.
- 19) Belum optimalnya pengendalian lingkungan dan penegakan hukum

F. Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan
- 2) Masih terdapat masyarakat yang belum atau enggan melakukan update data kependudukan (terutama data kematian)
- 3) Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengetahui kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program
- 4) Masyarakat masih belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaannya
- 5) Kartu Identitas Anak (KIA) belum menjadi dokumen wajib kependudukan
- 6) Masih terdapat masyarakat yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan kependudukan seperti Kepulauan Mentawai, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, daerah yang sulit diakses transportasi
- 7) Masih terdapat beberapa daerah yang menetapkan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran
- 8) Masih terdapat anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orangtua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran
- 9) Masih terdapat beberapa orangtua yang malas mengurus akta kelahiran anak
- 10) Masih adanya praktek pernikahan siri sehingga sulit untuk tercatat pada dokumen kependudukan
- 11) Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan
- 12) Pengelolaan data kependudukan masih belum terintegrasinya antar sektor

- 13) Belum ada analisa yang menggambarkan terkait dengan data yang ditampilkan sehingga tidak diketahui kegunaan data kependudukan

G. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih rendahnya SDM Masyarakat dan aparatur Pemerintahan Nagari/Desa
- 2) Masih ada Nagari/Desa yang tidak mempunyai kantor Desa akibatnya Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi tidak optimal
- 3) Banyaknya kader lembaga kemasyarakatan yang mempunyai rangkap jabatan, seperti kader posyandu, kader PKK dan LPM dipegang oleh 1 orang
- 4) Terbatasnya Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis di desa/nagari
- 5) Masih banyak desa yang tidak memiliki akses sinyal dan saluran komunikasi (blankspot).
- 6) Sulitnya memfasilitasi Kerjasama Desa yang berbeda potensi
- 7) Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa/Nagari (BKAS/BKAN) yang belum berjalan secara optimal.
- 8) Kurangnya kompetensi Direktur/Manager Badan Usaha yang dimiliki Nagari/Desa dalam hal entrepreneur
- 9) Kurang sinkronnya antara usaha dan potensi yang dimiliki oleh Desa/Nagari yang diakibatkan oleh tidak adanya kesesuaian antara Pemerintahan Nagari dan BPD di desa/nigari
- 10) Evaluasi terkait dengan perkembangan desa dan nigari belum dilakukan secara maksimal sebagaimana di amanatkan pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- 11) Belum diperbaharuinya SK kepengurusan KAN sehingga banyak status kelembagaan KAN yang tidak aktif
- 12) Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari
- 13) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari
- 14) Minimnya keterlibatan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan di nagari/desa
- 15) Masih kurangnya Kabupaten/Kota dan Nagari yang membentuk Pokjanal dan Pokja Posyandu dan kurangnya koordinasi stakeholder terkait dalam melakukan pembinaan
- 16) Masih banyak Posyandu yang belum terintegrasi dengan BKB dan PAUD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.

- 17) Belum semua Pokja Posyandu yang menetapkan keberadaan posyandu dengan SK Wali Nagari/Desa/Kelurahan
- 18) Belum adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Nagari yang menjelaskan detail tugas dan fungsi LPM itu sendiri
- 19) Kurangnya kompetensi dari pengurus dan anggota LPM dalam pembangunan dan pemberdayaan Nagari
- 20) Belum sinkronnya antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nagari/Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan Nagari.
- 21) Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pemberdayaan LPM di Desa/Nagari
- 22) Terjadinya penurunan swadaya dan partisipasi Masyarakat yang salah satunya diakibatkan dari melemahnya perekonomian masyarakat
- 23) Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pemberdayaan dasawisma mandiri
- 24) Desa/Nagari belum mengoptimalkan kerjasama yang dilaksanakan antar desa/nagari
- 25) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari
- 26) Kurangnya kompetensi dari pengurus dan anggota LPM dalam pembangunan dan pemberdayaan Nagari

H. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Pada daerah pedesaan, masih banyaknya angka usia pernikahan dini dan angka kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat serta lemahnya ekonomi masyarakat
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang melakukan sinkronisasi dalam , pelaksanaan dan pemantauan urusan pemerintah Bidang PPKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang PPKB, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi.
- 4) Capaian indeks kebahagiaan rendah karena minimnya Waktu berinteraksi antar anggota keluarga yang kurang, pola pengasuhan anak yang masih didominasi oleh 1 pihak, terbatasnya waktu berekreasi keluarga.
- 5) rendahnya capaian indeks ketentraman karena terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dikeluarga

- 6) Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan kependudukan, terbatasnya analisa serta kajian dalam melihat permasalahan kependudukan, pembangunan belum berorientasi terhadap penduduk,
- 7) Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, Karena takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan

I. Urusan pemerintahan bidang Perhubungan

- 1) Masih belum optimalnya komitmen operator atau pengusaha angkutan umum untuk melakukan pengurusan pengaktifan kembali KP (Kartu Pengawasan)
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan kenyamanan transportasi umum yang dapat memberikan dampak peralihan penggunaan angkutan pribadi ke Angkutan umum
- 3) Terjadinya penambahan penggunaan jumlah kendaraan pribadi di ruas jalan provinsi terutama pada saat hari libur dan liburan Panjang sehingga menyebabkan kemacetan
- 4) Relatif kurangnya keterpaduan antarmoda (jaringan prasarana, jaringan pelayanan) darat, kereta api, laut dan udara.
- 5) Relatif kurangnya pemenuhan standar pelayanan minimum serta standar keselamatan (termasuk standar dampak lingkungan) dari sarana dan prasarana transportasi.

J. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Besarnya belanja kebutuhan untuk pemenuhan TIK dikarenakan sarana dan prasarana berbiaya mahal
- 2) Masih belum optimalnya implementasi Perda tentang SPBE dikarenakan masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami serta belum mau mematuhi terutama dalam penyediaan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo
- 3) Belum seluruhnya Layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- 4) Masih adanya wilayah blankspot atau yang minim prasarana hotspot sehingga sulit menjangkau informasi kepada masyarakat
- 5) Perbedaan generasi menyebabkan belum semua kelompok masyarakat melek penggunaan teknologi

- 6) Terbatasnya SDM Teknologi Informasi terutama dari sisi jumlah dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi
- 7) Belum semua Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dilakukan pendataan oleh diskominfo sebagai instansi yang merupakan supporting teknis bagi UKPP terkait kebutuhan aplikasi umum pada UKPP, pada tahun 2022 hanya bisa melakukan survey ke 42 UKPP karena keterbatasan anggaran yang tersedia

K. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UKM
- 2) Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
- 3) Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
- 5) Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
- 6) Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
- 7) Sebaran UKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
- 8) Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
- 9) SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
- 10) kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
- 11) Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing dari produk produk UKM
- 12) terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis

L. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal

- 1) Data terkait dengan potensi investasi dan realisasi investasi yang sudah atau sedang berjalan belum tersedia dengan lengkap oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Regulasi dan aturan yang mengatur tentang investasi cenderung berubah – ubah sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pelaksanaan pekerjaannya antara lain dengan adanya peralihan dengan adanya perubahan regulasi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko serta Peraturan Kementerian/Lembaga (NSPK) terkait yang menjadi dasar penerbitan perizinan dengan menggunakan portal OSS yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dari Kementerian Investasi / BKPM RI

- 3) Status kepemilikan lahan di Sumatera Barat yang sebagian besar di kuasai kkaum sehingga tanah ulayat dianggap menjadi penyebab ketidakpastian pelaksanaan investasi
- 4) Kurangnya koordinasi antar instansi di Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan Investasi
- 5) Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pelaksanaan even even promosi potensi investasi daera sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran investor
- 6) Materi promosi yang disiapkan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi investor
- 7) Terbatasnya keikutsertaan Sumatera Barat dalam even promosi investasi tingkat Nasional dan Internasional (pameran dan temu bisnis)
- 8) Masih adanya beberapa perizinan dan non perizinan bersifat yang diproses secara manual di PTSP
- 9) Masih terdapatnya jangka waktu pelayanan PTSP yang melewati Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan Gubernur
- 10) Masih terdapat jenis perizinan yang belum dipetakan
- 11) Masih terdapat perizinan yang belum dapat dilaksanakan antara lain perizinan berusaha usaha menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) dan KBLI yang belum ada pengampu pada Kementerian/Lembaga terkait.
- 12) Banyaknya pelaku usaha/masyarakat yang belum memahami teknologi atau perizinan secara elektronik atau berbasis web.
- 13) Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan
- 14) Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web
- 15) Masih rendahnya pemahaman OPD teknis dalam penerapan aplikasi perizinan OSS berbasis teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan perizinan terintegrasi.
- 16) Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi
- 17) Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.
- 18) Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan.

- 19) SDM perusahaan yang terbatas dari sisi jumlah dan kapasitas sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada
- 20) SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan
- 21) Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW, RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR, SIMBG, dll)
- 22) Belum adanya Data Calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat
- 23) Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi (LKPM), dimana Nilai Investasi s.d 1 M tidak dilaporkan
- 24) Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021
- 25) Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi
- 26) Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi

M. Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih kurangnya minat dan ketertarikan Pemuda untuk ikut berpartisipasi dan bergabung dalam Organisasi
- 2) Minimnya Pelatihan-Pelatihan atau peningkatan kapasitas dan pemberian edukasi pemahaman Organisasi kepada Pemuda dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah daerah
- 3) Belum matangnya tatakelola organisasi, serta terbatasnya pendanaan organisasi untuk membiaya operasional dan kegiatan organisasi
- 4) Masih minimnya minat Pemuda untuk menjadi entrepreneur/wirausaha dan lebih berorientasi menjadi Pegawai/Pekerja
- 5) Semakin banyaknya media sosial atau sumber media informasi lainnya sehingga tidak ada pembatasan arus informasi kepada Pemuda baik yang baik maupun yang salah/hoax yang berpotensi menyebabkan pemuda menjadi salah Langkah dalam mengambil Tindakan antara lain investasi bodong, perjudian online, pinjaman online, porstitusi online.
- 6) Masih banyaknya pemuda yang belum siap kerja dan masuk dalam dunia kerja dikarenakan minimnya pengalaman, minim dalam kemampuan teknik,

memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya yang ada.

- 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang representative dalam peningkatan prestasi olahraga yang berada di Provinsi Sumatera Barat
- 8) Terbatasnya anggaran daerah sehingga banyak tidak terselenggaranya kejuaraan/event olahraga sebagai ajang evaluasi perkembangan penyelenggaraan olahraga di daerah
- 9) Minimnya ujicoba atlet ke tingkat internasional, nasional dan daerah
- 10) Tidak adanya kompetisi sebagai ajang uji coba sebelum mengikuti kompetisi utama
- 11) Tidak terpusatnya pelatihan atlet sejak awal
- 12) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran
- 13) Tingginya pengaruh HP bagi masyarakat sehingga merubah pola hidup masyarakat menjadi malas gerak
- 14) Mayoritas peserta didik yang telah tamat sekolah tidak aktif di kegiatan kepramukaan karena telah disibukkan dengan kegiatan perkuliahan atau pindah ke luar kota atau menjalani usaha
- 15) Kebijakan sekolah online mengakibatkan kegiatan kepramukaan yang cenderung dilaksanakan diluar ruang menjadi tidak terlaksana sejak tahun 2020.

N. Urusan pemerintahan bidang Statistik

- 1) SDM Tenaga JFT Statistisi yang sesuai dengan kompetensi pendidikannya belum tersedia
- 2) Fungsi penyelenggaraan data belum seluruhnya ada di masing-masing Perangkat Daerah
- 3) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya
- 4) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan bukan pekerjaan yang menarik

O. Urusan pemerintahan bidang Persandian

- 1) Regulasi/aturan yang ada belum terlalu kompleks dan maksimal dalam pengaturan pengamanan informasi daerah
- 2) Belum maksimalnya perangkat daerah dan aparatur sipil negara dalam melakukan pengamanan informasi pemerintah daerah dikarenakan minimnya informasi dan pemahaman akan pelaksanaan persandian/pengamanan informasi
- 3) Edukasi dan informasi tentang pengamanan informasi pemerintah daerah belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh aparatur sipil negara

- 4) Belum maksimalnya pengelolaan area keamanan informasi pada aspek tatakelola, pengelolaan resiko dan kerangka kerja keamanan informasi
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan statistic
- 6) Belum memiliki Security Operation Center atau SOC sebagai sebuah layanan terpusat yang menyediakan jasa keamanan siber bagi server Pemerintah Daerah

P. Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan

- 1) Masih terbatasnya jumlah dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM kebudayaan dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 3) Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Provinsi
- 4) Masih terbatasnya ketersediaan data akan Objek Pemajuan Kebudayaan di Sumatera Barat serta pelaku kebudayaan.
- 5) Masih minimnya peran serta masyarakat dalam pewarisan nilai-nilai budaya
- 6) Kebudayaan yang dihasilkan belum dapat mendukung ekonomi pelaku kebudayaan
- 7) Masih belum optimal dan berkesinambungannya pendokumentasian terhadap objek pemajuan kebudayaan yang akan ditetapkan menjadi warisan budaya.
- 8) Masih banyaknya potensi Objek Pemajuan Kebudayaan yang belum dikelola secara baik.
- 9) Penyelenggaraan urusan kebudayaan belum menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah sehingga masih terbatas dukungan anggaran untuk pemajuan kebudayaan tersebut.
- 10) Minimnya minat dan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan lokal sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan informasi sehingga generasi muda lebih mengapresiasi kebudayaan dari luar.
- 11) Masih terbatasnya ruang publik untuk pelestarian budaya lokal, ruang ekspresi bagi para budayawan dan seniman untuk menampilkan hasil karya.
- 12) Masih minimnya pelaksanaan pembinaan bagi para komunitas

Q. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan

- 1) Kurangnya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan karena perkembangan teknologi membuat informasi dapat di akses dengan mudah, tidak harus mengunjungi pustaka.
- 2) Kurangnya ketercukupan koleksi buku-buku bacaan yang tersedia di pustaka.

- 3) Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan yang bersertifikasi sebagai pustakawan.
- 4) Masih banyaknya perpustakaan yang tidak terkelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

R. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan

- 1) OPD sebagai pencipta arsip belum melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip secara optimal , sehingga arsip yang menjadi bukti indikator kinerja kearsipan di OPD belum semuanya dibuatkan daftar, dimana belum optimalnya kinerja petugas pengelola arsip yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor 045-120-2021 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Belum tersedianya pembinaan secara langsung berupa pendampingan terhadap petugas pengelola arsip OPD tentang tata cara pengelolaan arsip, seperti penyediaan ruang bagi OPD untuk mempelajari tentang tata kelola arsip dengan membuat 'Klinik Arsip'.
- 3) Masih rendahnya kesadaran OPD melaksanakan kegiatan penyusutan arsip, yang meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip dengan memanfaatkan JRA sehingga arsip yang disimpan betul-betul hanya arsip yang berguna

2.3.2.3. Urusan Pilihan

A. Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- 2) Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan
- 3) Belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terhadap 2 (dua) kawasan
- 4) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu karang
- 5) Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
- 6) Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
- 7) Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
- 8) Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
- 9) Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.

- 10) Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir
- 11) Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil
- 12) Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
- 13) Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten
- 14) Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
- 15) Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
- 16) Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km2 perairan laut Sumatera Barat
- 17) Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
- 18) Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
- 19) Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
- 20) Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passenger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional
- 21) Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
- 22) Masih belum optimalnya pengolah paska panen dan diversifikasi olahan
- 23) Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan

B. Urusan pemerintahan bidang Pariwisata

- 1) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
- 2) Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif
- 3) Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata

- 4) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
- 5) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan
- 6) Belum berkembangnya ekonomi kreatif.
- 7) Terbatasnya kegiatan pembinaan SDM pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan
- 8) Masih terbatasnya kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan DTW unggulan
- 9) Masih terdapat SDM yang belum memenuhi kriteria kompetensi.
- 10) Terbatasnya produk ekraf yang memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- 11) Pengembangan DTW membutuhkan anggaran yang besar
- 12) Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
- 13) Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
- 14) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
- 15) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- 16) Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata di daerah
- 17) Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal

C. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

- 1) Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- 2) Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- 3) Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.

- 4) Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- 5) Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- 6) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- 7) Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- 8) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- 9) Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
- 10) Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
- 11) Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
- 12) Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
- 13) Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sambilan masyarakat
- 14) Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
- 15) Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
- 16) Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun
- 17) Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
- 18) Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.
- 19) Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
- 20) Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.
- 21) Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.
- 22) Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
- 23) Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

D. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan

- 1) masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan

- 2) rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- 3) masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- 4) masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- 5) alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- 6) Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).
- 8) Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- 9) Pengelolaan DAS belum terpadu
- 10) Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- 11) Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local
- 12) masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- 13) rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- 14) masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- 15) masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- 16) alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- 17) Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- 18) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).
- 19) Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- 20) Pengelolaan DAS belum terpadu
- 21) Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- 22) Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local
- 23) Pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak

- 24) Terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan
- 25) Luas wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang cukup luas
- 26) Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai
- 27) Proses tender bibit yang memerlukan waktu yang agak lama dan standar harga bibit yang belum valid
- 28) Proses beberapa pengadaan sarana pendukung produksi dan sarpras pendukung masih dalam tahap pengadaan
- 29) Penghitungan Indeks Tutupan hutan masih menggunakan citra sentinel 2A dengan cloud cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan desk analysis

E. Urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Masih adanya Rumah Tangga Miskin Penerima bantuan pemasangan instalasi listrik yang belum masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu)
- 2) Pebiayaan Investasi untuk pemanfaatan EBT yang cukup besar
- 3) Terbitnya UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga kewenangan provinsi tidak ada (Tahun 2021-2022)
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- 5) Belum memadainya akses infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- 6) Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
- 7) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- 8) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- 9) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- 10) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
- 11) Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

F. Urusan pemerintahan bidang Perdagangan

- 1) Mayoritas produk komoditas di Sumatera Barat masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi belum terlalu canggih sehingga peningkatan nilai tambah belum terlalu mendongkrak nilai ekspor
- 2) Harga ditentukan oleh pasar internasional
- 3) Belum berkembangnya hilirisasi produk di Sumatera Barat

- 4) Ada beberapa kasus di BPSK di tarik kembali oleh pelapor, sehingga tidak dapat diproses, sedangkan kasus tersebut sudah tercatat dalam kasus pengaduan konsumen
- 5) Kurangnya tenaga/SDM yang melakukan pengujian mutu barang sudah banyak pensiun dan belum ada penggantinya
- 6) Terbatasnya SDM PPNS
- 7) Minuman beralkohol sangat riskan untuk dilakukan pengawasan
- 8) Realisasi pupuk yang diluncurkan Pemerintah pusat lebih rendah dibandingkan dengan RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok)
- 9) Sering terjadi keterlambatan hasil pengujian terhadap hasil produk dari pihak ketiga
- 10) Peningkatan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif salah satunya minyak goreng dan cabe
- 11) Operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh kabupaten/kota
- 12) Kegiatan dalam bentuk pameran belum terlaksana secara optimal yang ditandai dengan belum signifikannya pendapatan peserta pameran
- 13) Melakukan pembinaan kepada pengelola pasar, lomba pasar dan promosi produk
- 14) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat di pasar kab/kota dalam menerapkan perda No. 6/2020 dengan etap menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan air mengalir serta menjaga jarak
- 15) Masyarakat petani, pengumpul, dan pedagang yang masih belum sepenuhnya memahami tentang standar mutu komoditi sesuai ketentuan berlaku
- 16) Kurangnya tenaga/SDM penguji mutu barang karena telah memasuki masa pensiun
- 17) Terdapatnya beberapa mesin pendukung pengujian mutu yang perlu diperbarui
- 18) Belum semua masyarakat tahu tentang peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- 19) Keberpihakan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang

G. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian

- 1) Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
- 2) Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
- 3) Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah

- 4) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- 5) Mayoritas produk komoditas di sumbar masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga belum mendongkrak peningkatan nilai tambah
- 6) Pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit
- 7) Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait
- 8) Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- 9) Kurangnya kemampuan SDM di kabupaten/kota dalam memperoleh informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah
- 10) Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya data industri
- 11) Daya saing produk yang masih rendah
- 12) Penguasaan teknologi yang masih rendah
- 13) Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- 14) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- 15) Daya saing produk yang masih rendah
- 16) Penguasaan teknologi yang masih rendah
- 17) Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- 18) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- 19) Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait maupun dalam aplikasi SIIInas secara berkala
- 20) Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal

H. Urusan pemerintahan bidang Transmigrasi

- 1) Tidak sinkronnya penetapan lokasi transmigrasi penyusunan dokumen kawasan transmigrasi dengan RTRW yang menyebabkan sulitnya dilakukan penetapan pencadangan dan penetapan kawasan transmigrasi
- 2) Belum terpenuhinya daya tampung di beberapa lokasi Transmigrasi
- 3) Rendahnya alokasi anggaran mandatory untuk Transmigrasi
- 4) Minimnya intervensi program dan kegiatan mulai dari pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
- 5) Terbatasnya kegiatan pembinaan dan monitoring yang dilakukan di daerah transmigrasi
- 6) Masih rendahnya keterlibatan pembangunan yang dilakukan oleh lintas sektor
- 7) Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
- 8) Kelembagaan usaha di daerah transmigrasi yang sudah ada tidak terkelola secara maksimal

2.3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- 1) adanya usulan yang tidak sesuai dengan SOP penetapan batas
- 2) keterbatasan waktu untuk pembahasan penetapan batas
- 3) Penetapan tata batas diatur oleh Permendagri yang membutuhkan waktu yang lama
- 4) Penetapan pemekaran diatur oleh Permendagri yang membutuhkan waktu yang lama
- 5) Masih terdapat Perangkat daerah yang belum menggunakan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai prioritas dalam pencapaian kinerja dikarenakan masih belum memahami IKK sesuai dengan yang dimaksud oleh Permendagri 18 Tahun 2020.
- 6) Terlambatnya pemakarsa dokumen kerjasama dalam melengkapi persyaratan dokumen usulan kerja sama
- 7) Pengajuan usulan dokumen kerjasama yang relative meningkat volumenya di akhir tahun sehingga tidak tersedianya waktu untuk pembahasan
- 8) Belum adanya pemetaan Kerjasama yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan proses MoU dan PKS
- 9) Pencapaian SPM belum menjadi prioritas dalam pencapaian kinerja pembangunan
- 10) Penentuan data sasaran penerima SPM yang sulit untuk dilakukan terutama data berupa prediksi / proyeksi
- 11) Masih banyak Pemerintah kabupaten/Kota yang tidak memprioritaskan pencapaian SPM dalam pelaksanaan pembangunan

b) Biro Umum

- 1) Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana untuk layanan pada lingkungan kantor Gubernur dan Rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
- 2) Tingginya intensitas aktifitas kegiatan di lingkungan Istana Gubernur baik yang berasal dari Perangkat daerah ataupun dari masyarakat, yang belum sebanding dengan ketersediaan SDM yang memberikan layanan
- 3) Masih belum optimalnya kualitas SDM Pramuka tamu di Istana Gubernur dalam memberikan layanan tamu tamu pimpinan
- 4) Terbatasnya SDM dalam melakukan proses pencairan keuangan

c) Biro Organisasi

- 1) Regulasi serta petunjuk teknis terkait penyederhanaan birokrasi yang belum sepenuhnya keluar, sehingga mengakibatkan belum jelasnya arah dari penyederhanaan birokrasi khususnya terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 2) Ketersediaan anggaran yang sangat tidak proporsional dengan beban kerja, antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan anggaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyederhanaan birokrasi, khususnya terkait anggaran perjalanan dinas dan anggaran verifikasi/pembahasan rancangan produk hukum terkait penataan kelembagaan provinsi.
- 3) kurangnya keterlibatan pimpinan OPD dalam merumuskan kinerja Perangkat Daerah
- 4) Dokumen Kinerja belum dijadikan acuan dalam implementasi kinerja
- 5) Masih minimnya informasi dari Perangkat Daerah terkait pendukung keberhasilan atau penyebab ketidaktercapaian target Indikator Kinerja Pemerintah Prov Sumbar, sehingga analisa yang disajikan pun masih kurang lengkap
- 6) Keterbatasan Pemahaman ASN terhadap urgensi (pentingnya) manajemen perubahan dalam meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi
- 7) Masih banyaknya UKPP yang belum memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta belum menggunakan secara maksimal digitalisasi guna mempercepat proses layanan
- 8) Masih adanya perangkat daerah yang belum melaksanakan review SOP dan penyusunan Peta Proses Bisnis
- 9) Banyaknya usulan Ranperda Kab/Kota yang belum melengkapi persyaratan yang sesuai dengan SOP, sehingga mengakibatkan usulan belum dapat diproses
- 10) usulan anjab dan abk perangkat daerah yang terus berubah dan tidak berdasarkan kebutuhan real dari perangkat daerah
- 11) Minimnya inovasi yang dilakukan UKPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

d) Biro Hukum

- 1) Tahapan pengkajian legal drafting yang terhambat saat PPKM
- 2) Tahapan fasilitasi dengan Kemendagri yang membutuhkan waktu
- 3) Bagian Hukum Kabupaten/Kota belum mengajukan Perda Kab/Kota yang akan diklarifikasi
- 4) Jadwal sidang yang harus mengikuti pengadilan, dan beberapa kali harus diundur karena PPKM
- 5) Keterbatasan SDM untuk melakukan fasilitasi produk hukum/legal drafting

- 6) Keterbatasan anggaran karena refocusing, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan bantuan hukum yang diajukan
- 7) Masih belum optimalnya kualitas usulan produk hukum daerah dari SKPD/Pemerintah Kabupaten/Kota pengusul mulai dari prosedur dan substansi/materi rancangan produk hukum daerah

e) Biro Administrasi Pimpinan

- 1) Masih kurangnya SDM yang profesional dalam memberikan layanan keprotokolan dan sarana dan prasarana dalam pelayanan keprotokolan yang maksimal serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder terkait.
- 2) Terbatasnya ketersediaan Anggaran pada DPA dibandingkan dengan jumlah tamu pimpinan yang harus dilayani sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada tamu
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pendokumentasian kegiatan pimpinan
- 4) Penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah yang masih parsial per Biro sehingga belum terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya

f) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Belum ada kebijakan yang mengatur kewajiban untuk memanfaatkan proses e-pengadaan langsung
- 2) Jumlah SDM masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah beban kerja, yang belum sesuai dengan SE Gubernur Nomor 871/7536/III-BKD/2020 Tanggal 23 November 2020 Tentang Usul Penetapan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyesuaian/Impasing
- 3) Tingkat kematangan UKPBJ belum maksimal

g) Biro Kesra

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar baik antar instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, kurang optimalnya dukungan dari SKPD teknis, dan terbatasnya SDM
- 2) Terbatasnya kewenangan untuk penyelenggaraan urusan agama yang merupakan kewenangan pusat
- 3) Terbatasnya fasilitasi keberangkatan dan kepulangan ibadah haji karena merupakan kewenangan Pusat

- 4) Masih bervariasi kapasitas dan kualitas SDM pengelola rumah ibadah
- 5) Belum optimalnya capaian prestasi qori/qorih Sumatera Barat dalam even MTQ, STQ dan MQK
- 6) Masih bervariasi kapasitas serta mekanisme pengelolaan rumah ibadah (belum memenuhi standar layanan)
- 7) Banyaknya target rumah ibadah yang difasilitasi yang tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang tersedia

h) Biro Administrasi Pembangunan

- 1) Kabupaten/Kota masih belum memahami penuh terkait penginputan capaian realisasi fisik dan keuangan pada simbangda
- 2) Terjadinya perubahan struktur OPD terhadap beberapa OPD menyebabkan terlambatnya pencairan anggaran baik anggaran rutin kantor dan kegiatan, pengurangan anggaran menyebabkan berubahnya target dan realisasi kegiatan, terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa
- 3) Lamanya proses pengembalian data dari OPD yang lambat karena terbatasnya data dimasing-masing OPD sehingga menjadi kendala karena minimnya analisa
- 4) Belum tersedianya regulasi tentang Pengendalian Administrasi Pembangunan
- 5) Lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
- 6) Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana APBN
- 7) Masih terbatasnya kualitas pengelola kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan (KPA/PPTK) terutama untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh SKPD non ke Pu-an

i) Biro Perekonomian

- 1) Koordinasi pengendalian inflasi daerah belum berjalan secara optimal, karena belum terjalannya kerjasama daerah dengan baik akibat dari belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- 2) Belum optimalnya kinerja BUMD dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlihat dari besaran deviden yang diterima sebagai PAD
- 3) Kelangkaan BBM bersubsidi (solar) dan LPG 3 Kg yang selalu terjadi setiap tahun di masyarakat yang disebabkan dualisme aturan, penimbunan dan penyelewengan alokasi pendistribusian oleh oknum tertentu. Termasuk pelaksanaan BBM satu harga di Kepulauan Mentawai yang disinyalir masih banyak penyelewengan

- 4) Belum optimalnya koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi karena adanya kebijakan baru tentang implementasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)
- 5) Koordinasi pembinaan lembaga keuangan di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik
- 6) Belum seluruh perusahaan yang berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dan ada beberapa perusahaan yang belum masuk Forum TJSLP bentukan Pemerintah Prov. Sumatera Barat

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya
- 2) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan DPRD
- 3) Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya
- 4) Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD baik dalam Organisasi ataupun dengan Lembaga Pemerintahan Daerah dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2.3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

- 1) Rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pembentuk pada dimensi proses dalam pencapaian Indeks Kualitas .
- 2) Terlambatnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada bulan Juni setiap tahunnya menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dikarenakan sempitnya waktu untuk melakukan penyesuaian
- 3) Adanya beberapa IKU dan IKD yang belum jelas formula perhitungannya.
- 4) Mandatory spending mempengaruhi kebijakan belanja daerah menjadi terbatas dan sempit.
- 5) Banyaknya tugas-tugas mandatory dari Pemerintah Pusat diluar tugas pokok untuk penyusunan dokumen menyebabkan tidak terkordinir dan dilaksanakannya tugas pokok dengan baik

- 6) Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga.
- 7) Data indikator kinerja daerah, data program unggulan dan data capaian program sebagian besar merupakan data yang dirilis pertahun sehingga sulit untuk dilakukan prognosis per triwulan
- 8) Pokok Pokok Pikiran DPRD belum selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
- 9) Evaluasi terhadap kinerja capaian pembangunan masih belum menjadi dasar penyusunan arah kebijakan tahun selanjutnya
- 10) Belum selarasnya pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama dari sisi penetapan target-target pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 11) Besarnya belanja pegawai menyebabkan anggaran untuk alokasi pembangunan menjadi terbatas
- 12) Terbatasnya pelaksanaan kordinasi, pengendalian dan evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan tingginya intensitas pelaksanaan pekerjaan untuk pada tingkat Provinsi
- 13) Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah
- 14) Belum seluruh Perangkat Daerah melaksanakan Tahapan Forum SKPD sdalam Penyusunan Renja sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- 15) Belum selarasnya pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama dari sisi penetapan target-target pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 16) Dokumen RKPD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya digunakan untuk penyusunan KUA PPAS dan RAPBD hal ini dibuktikan dengan tidak konsistenan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan dan penganggaran
- 17) Terlambatnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada bulan Juni setiap tahunnya menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dikarenakan sempitnya waktu untuk melakukan penyesuaian
- 18) Terbatasnya pelaksanaan kordinasi, penngendalian dan evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan tingginya intensitas pelaksanaan pekerjaan untuk pada tingkat Provinsi
- 19) Rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik

B. Unsur Keuangan

- 1) Pelaksanaan peyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran
- 2) Masih terdapat Perangkat Daerah yang mengirim laporan belum valid
- 3) Terbatasnya SDM pengelola asset
- 4) Masih terdapat asset yang telah ditempati / digunakan oleh Pemerintah Provinsi yang belum tercatat dan bersertifikat
- 5) Terdatanya SPM yang tidak cair sampai dengan akhir Tahun Anggaran, karena terlambat disampaikan
- 6) Adanya penyederhanaan struktur organisasi pada BPKAD dengan Tipe B yang tidak sesuai dengan beban kerja
- 7) Lemahnya perekonomian di Masyarakat yang mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat yang menurun sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.
- 8) Terbatasnya gambaran penetapan target terutama pada pajak rokok masih bersifat 'given' dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan
- 9) Terbatasnya sumber pendapatan asli daerah untuk dikembangkan sesuai aturan
- 10) Belum optimalnya penerimaan dari retribusi
- 11) Adanya regulasi yang berubah yang menyebabkan belum dibolehkan melakukan pemungutan sebelum dibuat aturan oleh daerah.
- 12) Sarana dan prasarana serta kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah yang terbatas dan belum memadai
- 13) Komponen belanja pegawai yang cukup besar dikarenakan adanya pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dan Luar Biasa ke Provinsi yang cukup besar menyedot anggaran belanja pembangunan
- 14) rendahnya Realisasi Belanja SKPD
- 15) Masih adanya aset-aset daerah yang belum terselesaikan karena masih tersangkut dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya
- 16) Masih banyak kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan waktu yang telah di tentukan
- 17) Masih banyak kegiatan masuk di pertengahan tahun anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan
- 18) Informasi Keuangan yang belum terpublikasi secara lengkap
- 19) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengakses informasi public
- 20) Masih adanya ego sektoral dalam memberikan data yang akan di publikasikan ke masyarakat/publik

21) Penundaan alokasi belanja transfer ke Daerah

C. Unsur Kepegawaian

- 1) Masih belum terimplementasikannya secara komprehensif konsep dan system kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan.
- 2) Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
- 3) Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit
- 4) Belum difungsionakannya aplikasi talent pool dalam implementasi system merit
- 5) Belum diterapkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, da-tau pertimbangan objektif lainnya
- 6) Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
- 7) Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
- 8) Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 9) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
- 10) Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
- 11) Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekrutmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas
- 12) Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah

D. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan

- 1) Sulitnya untuk mendapatkan data pengembangan kompetensi dari seluruh OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat/kurangnya kepedualian OPD dan belum memahami bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan pencapaian IP ASN dan imbasnya ke reformasi birokrasi
- 2) Pelatihan secara Blended Learning menuntut kemandirian dan keaktifan peserta. Sementara ada beberapa peserta yang mengikuti diklat tetapi masih terbebani oleh pekerjaan kantor
- 3) Masih banyaknya Gedung dan sarana prasarana diklat yang memerlukan rehabilitasi sehingga belum terpenuhinya standar akreditasi diklat
- 4) Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya
- 5) Masih rendahnya keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD
- 6) Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
- 7) Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu
- 8) Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

E. Unsur Penelitian Dan Pengembangan

- 1) Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.
- 2) Masih rendahnya penerapan budaya inovasi di lingkungan kerja
- 3) Rendahnya implementasi inovasi di lingkungan pemerintah daerah
- 4) Keterbatasan fungsional peneliti di daerah
- 5) Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- 6) Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- 7) Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- 8) Isu tema kelitbangan yang diangkat sudah tidak actual
- 9) Masih terdapat Beberapa produk rekayasa yang dihasilkan masih butuh pengembangan pada tahun berikutnya sehingga belum bisa segera dimanfaatkan

- 10) Beberapa komponen alat peraga rekayasa tidak didukung dengan ketersediaan standar harga sehingga mengakibatkan output tidak menjadi produk rekayasa (hanya desain)

F. Unsur Penghubung

- 1) Meningkatnya aktivitas Pimpinan Daerah yang belum sebanding dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta SDM Badan Penghubung
- 2) Koordinasi dan komunikasi antar OPD dan Pemerintah Pusat belum maksimal
- 3) Masih terbatasnya dukungan dari pelaku seni dan pemerintah daerah pelaksanaan promosi
- 4) Keterbatasan akses masuk ke seluruh anjungan daerah karena adanya revitalisasi yang dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah oleh Pemerintah Pusat
- 5) Kegiatan promosi yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena revitalisasi yang dilakukan di TMII oleh Pemerintah Pusat
- 6) Belum maksimalnya layanan kepada para perantau
- 7) Belum maksimalnya potensi rantau untuk digali dan diintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat sehingga potensi rantau masih parsial dan belum komprehensi

2.3.2.6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan

- 1) Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
- 3) Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana terutama gedung kantor yang representative dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

2.3.2.7. Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Belum maksimalnya fungsi Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat.

- 2) Terbatasnya jumlah intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
- 3) Belum optimalnya peran Kelompok Kerja (Pokja) BPS, POLDA, KOREM Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat
- 4) Masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Timdu Penanganan Konflik Sosial dan forum strategis lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal
- 5) Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Pemerintahan Daerah yang bersinergi dengan Pemerintah dan Pihak lainnya antara lain Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- 6) Belum terbentuknya sistem informasi ormas (Slormas) yang memuat data dan informasi aktifitas ormas di daerah
- 7) Belum optimalnya fungsi tim terpadu pengawasan ormas

2.4. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2.4.1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun berjalan 2024 hingga triwulan II di Sumatera Barat

Adapun hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2023 dan tahberjalan 2024 hingga triwulan II di Sumatera Barat yakni sebagai berikut.

Tabel 2.96
Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat
Pada Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.									
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.								
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	6,63	6,28	6,16	6,04		Tercapai
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.								
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	370,67	356,45	353,68	343,82		Tercapai
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	370,67	356,45	353,68	343,82		Tercapai
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	85,78	53,8	54,72	34,37	0,38	On the Track
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	94,7	103,47	103,9	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	85,78	53,8	54,72	85,78	0,69	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	13	25	25	13	0	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen		20	20	15	15	On the Track
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen		20	20	15	15	On the Track
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang		401	401	0		-
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.								
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.								
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	46,29	50,46	1,14	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	11,83	50,46	1,14	Tercapai
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.								
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	72,65	72,74	73,23	73,26		-
	RPJMD - b. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	69,59	69,80	69,98	69,90		-

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	72,65	72,74	73,23	73,26		-
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	69,59	69,8	69,98	69,90		-
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	84	85,23		-
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	84	69,27		-
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	97,4	97,8	98,2	97,8	96,42	On the Track
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	89	85,19	86,19	On the Track
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	77	71,72 (SK Lama) , 71,68 (SK Baru) karena ada penambahan jumlah p	0	Tidak Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85.23	Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	84	69,27	69.27	On the Track
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61.11	12,78	On the Track
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,676	0,662	Belum dapat dilakukan perhitungan terkait rasio konektivitas	On the Track
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99,6	99,98	99,99	Tercapai
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25	73,7	79,9	77,42	79,4	On the Track
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26	82	84	82,05	82.05	On the Track
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	77	75	0	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - RasioElektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,6	99,98	99,99	Tercapai
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		118	236	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		55	111	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	4	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		15	29	15	0	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	46	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	57	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	59	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		-	1			-
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi		12	15	12	15	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi		12	15	12	15	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi		-	19	0	19	On the Track
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.								
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	100	100	100	100		-
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	75	80	85	80	0	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana da-tau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	56	75	54,74	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	0	3	3	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.								
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana								
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	0,46	0,49	0,5	0,64		-
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana da-tau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		10	10	10	0	On the Track
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa		10	10	10	0	On the Track
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	100,19	110,37		-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	103,98	108,85		-
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	46255	47872	50265	49678		-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	5	9,94		-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	5	11,16		-
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	-1,41	2,14	2,18	5,04		-
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	3,1	1,6		-
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	5	6,5		-
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	379	289		-
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	17888	115.149		-
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	NA	6,54	6,7	6,68		-
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	10,43	28,57	0	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	2,02	73,68	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	70	51	61	51	85	Tercapai
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	381	410	450	417	765	Tercapai
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	2,65	17,94	20,49	17,98	10,22	On the Track
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	3	9,31	0,78	On the Track
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	54,72	20	20	20	13,33	On the Track
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	40	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	53830	50000	50000	50000	39320	On the Track
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Indikator Program	Sentra	42	20	20	25	1	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen		10	10	9,47	15,12	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang		470	528	515	310	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang		5872	6742	5900	1655	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UKM	Indikator Progul	orang		1500	2000	1600	470	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang		300	300	320	30	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang		4.759	4.997	150	0	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang		500	500	500	296	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang		1.950	2.220	3859	730	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang		1.636	1.855	1645	192	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang		412	412	330	180	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang		200	240	300	242	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang		350	400	280	119	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang		675	700	1625	765	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang		200	100	200	100	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang		112	112	112	145	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang		112	112	1192	1762	Tercapai
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha		50.000	50.000		39320	On the Track
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.								
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.									
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.								
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	80,21	79,45		-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	94	84,02	102,15	Tercapai
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	845.607	885080	411978 *) Angka sementara	On the Track
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	83	89.80	89,8	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	24	27,91	27,91 *) angka sementara	On the Track
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton		1.542.909	1.573.767	1442000		-
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton		978.062	1.012.295	950058		-
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000			-
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000			-
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton		1.542.909	1.573.767		533909	On the Track
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton		978.062	1.012.295		71258	On the Track
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000	500000	90000	On the Track
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000	0	0	On the Track
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.								
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	80,21	79,45		-
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	94	84,02	102,15	Tercapai
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	845.607	885080	411978 *) Angka sementara	On the Track
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	83	89.80	89,8	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	24	27,91	27,91 *) angka sementara	On the Track
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).								
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	80,21	79,45		-
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	845.607	885080	411978 *) Angka sementara	On the Track
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	83	89.80	89,8	Tercapai
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	83,80	82,5	83	89,8	89,8 *) Angka Sementara	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	24	27,91	27,91 *) angka sementara	On the Track
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	40,46	40	40,5	40,77	0	On the Track
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.								
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli,keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.									
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan								
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan								
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	100,19	110,37		-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	103,98	108,85		-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	5	9,94		-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	5	11,16		-
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	5	6,5		-
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.								
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	100,19	110,37		-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	103,98	108,85		-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	5	9,94		-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	5	11,16		-
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	5	6,5		-
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.								
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.								
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang		50.000	50.000	50000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan	Indikator Progul	batang		100.000	100.000	100000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang		300.000	400.000	300000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang		50.000	50.000	50000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang		200.000	400.000	200000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan	Indikator Progul	batang		37.500	231.250	12500	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton		1.000	2.500	1000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton		120	120	120	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram		16.500	16.500	16500	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan	Indikator Progul	kg		100.000	100.000	100000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang		20.000	20.000	20000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang		40.000	40.000	40000	0	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang		20.000	20.000	20000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan	Indikator Progul	batang		20.000	20.000	20000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang		15.000	20.000	10030	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang		44.500	55.000	44500	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang		30.480	50.000	70090	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang		15.000	15.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg		2.000	2.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan	Indikator Progul	kg		2.000	2.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg		-?	2.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg		1.500	1.800	1.500	0	Tercapai
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000			-
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000			-
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000	500000	90000	On the Track
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000	0	0	On the Track
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.								
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.									
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.								
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan,	Indikator Progul	>= persen		10	10	9,47	15,12	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD								
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.								
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen		10	10	9,47	15,12	Tercapai
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.									
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.								
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.									
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.								
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak Tercapai
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.									
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak Tercapai
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.								
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.								
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	211	231	85	Tercapai
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.								
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	18	18	Tercapai
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.								
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	18	18	Tercapai
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.								
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	8,8	7,2	7,2	On the Track
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.								
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.								
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.								
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis								
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.								
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.								
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.									
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.								
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.								
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	50,60	62,58	63	61,08	-	On the Track
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.								
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	11,8	19,1	18,6	12,2	-	On the Track
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).								
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	2,6	2,7	2,67	2,46	-	On the Track
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	89	85,19	86,19	On the Track
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85,23	Tercapai
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	211	231	85	Tercapai
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	18	18	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	8,8	7,2	7,2	On the Track
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	574	420	480	427	390	On the Track
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25	73,7	79,9	77,42	79,4	On the Track
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.								
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,676	0,662	Belum dapat dilakukan perhitungan terkait rasio konektivitas dik	On the Track
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25	73,7	79,9	77,42	79,4	On the Track
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.								
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).								
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.								
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	8,8	7,2	7,2	On the Track
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.								
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen		80	90		83,76	On the Track
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen		70	85		67,36	On the Track
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen		80	90		67,36	On the Track
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.								
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.								
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	Indikator Program	%	100	92	94	94,74	92	On the Track
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.								
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.								
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca,								
	(ii) matematika.								
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.								
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	94,7	106,08	103,9	On the Track
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	53,88	90,66	51,88	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	34,27	28,55	30,46	On the Track
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	94,7	103,47	103,9	Tercapai
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	73,49	77,19	76,46	Tercapai
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.								
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	94,7	106,08	103,9	On the Track
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	53,88	90,66	51,88	On the Track
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	34,27	28,55	30,46	On the Track
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	94,7	103,47	103,9	Tercapai
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	73,49	77,19	76,46	Tercapai
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.								
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.								
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.								
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	17888	115.149		-
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	3	9,31	0,78	On the Track
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	3	1,72	0,78	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang		470	528	515	310	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang		5872	6742	5900	1655	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UKM	Indikator Progul	orang		1500	2000	1600	470	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang		300	300	320	30	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang		4.759	4.997	150	0	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang		500	500	500	296	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang		1.950	2.220	3859	730	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang		1.636	1.855	1645	192	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang		412	412	330	180	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang		200	240	300	242	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang		350	400	280	119	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang		675	700	1625	765	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang		200	100	200	100	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang		112	112	112	145	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang		112	112	1192	1762	Tercapai
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).								
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).								
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).								
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.								
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	73,49	77,19	76,46	Tercapai
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.								
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	58,2	58,51	43,52	43,52	On the Track
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	27,4	27,7	60,48	60,48	On the Track
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun.								
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).								
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		236	236	236	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		118	236	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		111	111	111	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		55	111	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		29	29	29	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	4	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		15	29	15	0	On the Track
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.									
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.								
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.								
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.								
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	4,3	7,44	0	On the Track
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,76	10,77	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	22,2	21,8	22	22,5	-	On the Track
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.								
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.									
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.								
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.								
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,76	10,77	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.								
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	13,2	21,15	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.									
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.								
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.								
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.								
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah da-tau hak kontrol.								
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.								
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.									
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.								
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	4,3	7,44	0	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	17	17	18	17	-	On the Track
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	-	On the Track
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.								
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	84	85,23		-
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85.23	Tercapai
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26	82	84	82,05	82.05	On the Track
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.								
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	84	69,27		-
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	89	85,19	86,19	On the Track
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	84	69,27	69.27	On the Track
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.								
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku								
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	77,43	77,95	74,98		-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	77,95	75,59	0	On the Track
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku								
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	77,43	77,95	74,98		-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	77,95	75,59	0	On the Track
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.								
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya								
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya								
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.									
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).								
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	65,66	66,51	68,27	66,60	67,07	On the Track
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.								
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	58,50	53,78	55,28	58,60	59.06	Tercapai
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	58,50	53,78	55,28	58,60	59.06	Tercapai
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.								
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	NA	37,3	55	37,3	40	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	55	37,3	40	On the Track
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.								
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99,6	99,98	99,99	Tercapai
	RPJMD - RasioElektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,6	99,98	99,99	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.								
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.								
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.								
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.								
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.								
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.									
7.3.1*	Intensitas energi primer.								
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih,teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih									
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.								
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang									
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)								
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.								
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	3,29	3,40	4,57	4,36		Tercapai
8.1.1.(a)	PDB per kapita.								
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	31,36	32	32,97	32,37		-
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	45,35	48,29	50,6	50,59		-
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa								
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UKM terhadap total kredit.								
	Progul - Jumlah UKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga		540	540	540	120	On the Track
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		200	200	-	0	On the Track
	Progul - Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		400	400	265	62	On the Track
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		100	150	0	24	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	2	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	2	-
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.								
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin								
8.3.1.(a)	Persentase akses UKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan								
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	3,1	1,6		-
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	3	9,31	0,78	On the Track
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	3	1,72	0,78	On the Track
	Progul - Jumlah UKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga		540	540	540	120	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		200	200	-	0	On the Track
	Progul - Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		400	400	265	62	On the Track
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		100	150	0	24	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	2	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	2	-
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.									
08.04.01	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.								
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan								
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).								
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.								
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.								
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	6,52	6,6	6,45	6,28		Tercapai
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.								
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).								
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.									
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.								
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	46,29	50,46	1,14	Tercapai
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	9,26	12,36	16,58	19,2	25,13	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	11,83	50,46	1,14	Tercapai
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.								
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.								
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	1,27	1,24	1,24	1,35		-
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.								
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	-100	1,5	1,5	4142005	119,77% (9.244 orang)	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	-100	2,5	4	2,5	119,77% (9.244 orang)	Tercapai
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.								
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	-40,23	1,5	1,5	17,37	0,21% (1.268.247 perjalanan)	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	-40,23	3	4,5	3	0,21% (1.268.247 perjalanan)	On the Track
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.								
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.								
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,676	0,662	Belum dapat dilakukan perhitungan terkait rasio konektivitas dik	On the Track
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.								
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	75,034	75	77	71,39		-
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	77	71,72 (SK Lama) , 71,68 (SK Baru) karena ada	0	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
							penambahan jumlah p		
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	77	75	0	On the Track
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.								
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.								
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.								
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.								
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.								
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan		4	4	4	4	Tercapai
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut		4	4	4	4	Tercapai
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.								
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan		4	4	4	4	Tercapai
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut		4	4	4	4	Tercapai
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.								
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.								
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.								
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.								
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	8,81	8,75	8,88	8,54		-
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	379	289		-
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	11,36	15,7	16	20,93	20.93	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang		1.636	1.855	1645	192	On the Track
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.								
	Progul - Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		400	400	265	62	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	2	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	2	-
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.								
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.								
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.								
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.								
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.								
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).								
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Rasio Gini.								
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	3,15	0,31	0,309	0,315 (2021)		-
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.								
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	370,67	356,45	353,68	343,82		Tercapai
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.								
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	10,43	28,57	0	On the Track
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.								
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	2,02	73,68	0	On the Track
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.								
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.								
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.								
10.2 Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.								
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.								
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	68,5	78,51		On the Track
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).								
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.								
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.								
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	46,29	50,46	1,14	Tercapai
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.								
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.									
10.05.01	Financial Soundness Indicator.								
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.								
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.									
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.								
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementa- sikan kebijakan mi- gran yang baik.								
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	13	35	35	-	11	On the Track
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.								
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.								
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.								
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau								
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	84	85,23		-
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	84	69,27		-
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85.23	Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	84	69,27	69.27	On the Track
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	100	100	100	100	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26	82	84	82,05	82.05	On the Track
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas								
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik								
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	20000000	18650012	4358063	On the Track
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum								
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	20000000	18650012	4358063	On the Track
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk								
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk								
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis								
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)								
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	10790	10916	11108	11130		-
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang								
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	56	75	54,74	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		10	10	10	0	On the Track
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa		10	10	10	0	On the Track
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar								
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB								
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya								
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61.11	12,78	On the Track
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen		-	-		-	Tidak Tercapai
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola								
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)								
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10								
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara								
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	77,43	77,95	74,98		-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	77,95	75,59	0	On the Track
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua								
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.									
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.								
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.									
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana								
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.									
11.c.1	-								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.									
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan								
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.									
12.03.01	(a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)								
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan								
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen		-	-		-	Tidak Tercapai
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa		13	18	15	0	On the Track
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
12.4.2*	(a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.05.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.								
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61.11	12,78	On the Track
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya								
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.								
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional									
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi								
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah								
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa								
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
12.08.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.								
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup								
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.								
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	87,5	90,02		-
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	82	90,9		On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93	93,49	93,49	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	87	91,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	93	92,57	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	93	88,58	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	95,60 / 3,82	95,60/ 3,82	On the Track
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit		50	75	58	52	On the Track
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.									
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan								
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development								
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		10	10	10	0	On the Track
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030								
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications								
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun								
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)								
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)								
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim									
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup								
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi									
14.01.01	(a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung								
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut								
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61.11	12,78	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif									
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan								
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	481143,69	477.362	487.949	487.462.96	0	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	0,19	0,99	1,07	6,62	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	219570,30	222693	225081	226589,29	0	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	5,56	3,33	3,39	6,66	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	261573,39	262256	274280	277361,08	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	64,9	67	72	1046,97	0	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	100	6,49	7,26	7,5	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	9118	16652	17861	17500	0	On the Track
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	52,94	48	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	6	7	Tercapai
	RPJMD - Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	Indikator Program	M2	140,40	250	300	300	0	On the Track
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut								
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	52,94	48	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	6	7	Tercapai
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	55	37,3	40	On the Track
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)									
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha								
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	84,34	82	84	86,21	87	Tercapai
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%	84,34	82	84	85	87	Tercapai
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara									
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)								
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar									
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil								
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan								
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi								
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want									
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)								
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI									
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan								
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya								
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)								
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	1	0	On the Track
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.									
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari								
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju								
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	40	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	20	20	20	20	0	On the Track
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan								
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	0,48	1,29	1,79	0,78	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	2,55	2,85	3,81	2,95	0	On the Track
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.									
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi								
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	1	0	On the Track
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan								
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal									
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal								
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL								
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
15.09.01	(a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan								
	(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi								
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis								
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	1	0	On the Track
TUJUAN 16. MENGOATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN									
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.								
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the Track
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.								
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.								
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	0	3	3	1	0	Tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the Track
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.								
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the Track
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.								
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	3,04	3,1	3,11	2,18	1,86	On the Track
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the Track
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.								
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.								
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).								
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori da-tau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.								
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	20	13,83	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	20	8,86	0	On the Track
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif								
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	20	13,83	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	20	8,86	0	On the Track
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi da-tau adjudikasi non litigasi.								
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik da-tau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik da-tau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi								
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	25	On the Track
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.								
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	25	On the Track
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.								
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.								
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.								
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)								
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).								
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.								
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.								
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.								
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,5	69,88		-
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B								
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	BB (77,52)	BB	BB	BB		-
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	6	8	10	8	11	Tercapai
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	6	8	10	8	11	Tercapai
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B								
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,5	69,88		-
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap								
	pengalaman terakhir atas layanan publik.								
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.								
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	87,5	90,02		-
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	82	90,9		On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93	93,49	93,49	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	87	91,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	93	92,57	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	93	88,58	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	95,60 / 3,82	95,60/ 3,82	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	46	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	53	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	57	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	59	52	On the Track
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit		50	75	58	52	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).								
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	60,01	65,48		-
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,76	10,77	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).								
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	60,01	65,48		-
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	13,2	21,15	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.								
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi								
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan								
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	68,5	78,51		On the Track
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan								
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	60,01	65,48		-
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	68,5	78,51		On the Track
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.								
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	90,50	101,47	90,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	36	40	50	112,5	48,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	95	104,25	98,58	Tercapai
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.								
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	90,50	101,47	90,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	95	104,25	98,58	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun								
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	90,50	101,47	90,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	95	104,25	98,58	Tercapai
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.									
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.								
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.									
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.								
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	38,25	46,50		-
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	3,56	-11,24	64,4	On the Track
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	1,83	1,85	1,92	1,4995	On the Track
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.								
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	38,25	46,50		-
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	1,83	1,85	1,92	1,4995	On the Track
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.								
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	38,25	46,50		-
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	3,56	-11,24	64,4	On the Track
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	1,83	1,85	1,92	1,4995	On the Track

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.									
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).								
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati								
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.									
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas								
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp	IKD	Rp. Juta	3066,93	1420,99	1449,41	2492.04 (Jan-Okt)	732,25	On the Track
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	3066,93	1420,99	1449,41	2492,04	735.25	On the Track
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.									
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.								
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.								
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).								
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.								
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs								
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	70	63	0	On the Track
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	70	63	0	On the Track
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.								
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.								
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.								
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	70	63	0	On the Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	70	68,63	0	On the Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	60	60	70	70,59	0	On the Track
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	60	60	70	67	0	On the Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	70	68,63	0	On the Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	60	60	70	70,59	0	On the Track
17.19.02	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan								
	b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.								
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).								
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.									
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.								
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs		Capaian SDGs		Status
					2023	2024	2023	2024 (TW II)	
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya								
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga								
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)								
17.8 Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Persentase pengguna internet								

Sumber : Hasil evaluasi Triwulan II RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026

2.4.2. Permasalahan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun berjalan 2024 hingga triwulan II di Sumatera Barat

Pencapaian target indikator pada RAD TPB/SDGs sampai dengan triwulan II tahun 2024 didukung oleh program dan kegiatan baik dari pemerintrah daerah maupun nonpemerintah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 17 Tujuan TPB diidentifikasi beberapa permasalahan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih adanya kondisi masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang dan sebagainya
 - b. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah
 - c. Faktor Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, SDM pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar, jumlah siswa yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 - a. Masih ada persalinan kehamilan yang menggunakan tenaga non Kesehatan
 - b. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban sehat
 - c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Kesehatan lingkungan
 - d. Aplikasi pelaporan (STBM Smart) tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sistem pelaporan terkendala dan pelaporan secara manual tidak berjalan dengan baik
 - e. Isu negatif terkait kehalalan imunisasi yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat
 - f. Belum maksimalnya penemuan kasus serta belum optimalnya layanan Kesehatan terutama pada Posyandu dan Puskesmas
 - g. Terbatasnya SDM Kesehatan baik dari kualitas dan kuantitas terutama pada pusat layanan pertama
 - h. Terbatasnya Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan (Bidan Desa)
 - i. Terbatasnya pelaksanaan pengawasan /pembinaan UKOT, dan Pelaku Usaha
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi

- b. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan Jalan, jembatan, ciptakarya serta pengairan
 - c. Tidak adanya pengawasan yang intensi terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi berat dari yang di izinkan sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak (umur ekonomis jalan menjadi singkat)
 - d. Belum adanya MOU antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama terkait dengan sinergi pembangunan infrastruktur
 - e. Belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan Kawasan strategis
 - f. Masih terdapat pihak ketiga yang kurang kompeten dalam penyelesaian pekerjaan sehingga menjadi terbengkalai/tidak diselesaikan dengan tepat waktu
 - g. Panjangnya prosedur terutama terkait dengan proses lelang pekerjaan pembangunan yang bersifat fisik
 - h. Faktor cuaca yang sering tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik
 - i. Terhambatnya pembangunan dikarenakan permasalahan pembebasan lahan
 - j. Adanya kebutuhan di daerah yang mendesak untuk menyusun dokumen seperti mengakomodir perubahan RTRW, Kondisi alam dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis yang butuh penyesuaian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Belum ada regulasi tentang RTLH
 - b. Merupakan kewenangan kabupaten/kota
 - c. Lokasi PSU yang sulit diakses
 - d. Terbatasnya SDM pengelola kegiatan
 - e. Masih kurangnya dukungan dari masyarakat
 - f. Belum ada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi dan registrasi untuk pengembang perumahan
 - g. Masih belum maksimalnya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengurangan kawasan kumuh provinsi
 - h. Masih banyaknya permukiman yang belum memiliki PSU yang layak
5. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Terdapatnya gangguan trantibum yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup Panjang
 - b. Masih adanya OPD yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP
 - c. Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda

- d. Terbatasnya kewenangan penentuan status bencana
 - e. Masih belum memadainya Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana
 - f. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
 - g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
 - h. Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
 - i. SDM Satpol PP yang masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas
 - j. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
 - k. Minimnya anggaran yang tersedia sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak.
 - l. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana damkar di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
 - m. Belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- a. Pemahaman terkait dengan kinerja dan penilaian Indek Partisipasi Sosial (IKD) yang masih terbatas dan belum diketahui semua pihak terutama oleh penyelenggara urusan sosial
 - b. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam rehabilitasi sosial diluar panti yang mennadi kewenangannya
 - c. Cukup besarnya kebutuhan alokasi anggaran untuk memenuhi SPM yang merupakan kewenangan Provinsi yakni Rehabilitasi Sosial dalam Sosial
 - d. Data DTKS yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- a. Keterbatasan sarana dan prasarana BLK milik pemerintah
 - b. Kuantitas dan kualitas instruktur masih minim dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja
 - c. Tingkat kompetensi tenaga kerja belum maksimal
 - d. Efektiftas tenaga kerja belum optimal
 - e. Budaya kerja di Sumatera Barat yang masih rendah

- f. Penggunaan teknologi belum maksimal oleh pencari kerja
 - g. Keterbatasan orang yang akan dilakukan pendidikan dasar dan pelatihan di BLK karena dibatasi persyaratan usia, pendidikan, lama pelatihan dll
 - h. Komitmen beberapa perusahaan yang masih rendah untuk menerapkan tata Kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - i. Sulit untuk menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang sedang bersengketa
 - j. Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan baik di provinsi (33 orang) yang masih terbatas jika dibandingkan kondisi ideal yang mengharuskan minimal 1 fungsional pengawas ketenagakerjaan menangani 5 perusahaan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
 - b. Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
 - c. Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
 - d. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
 - e. Belum optimalnya Kabupaten/ Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - f. Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan
 - g. Belum Teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan secara Optimal.
 - h. Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
 - i. Masih rendahnya capaian kluster 1 dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak
 - j. Masih rendahnya kluster 4 dalam pemenuhan hak anak karena masih rendahnya persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
 - k. Rendahnya Tingkat Ekonomi masyarakat
 - l. Masih tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - m. Adanya beban ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga
 - n. Terbatasnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penilaian KLA
 - o. Konsep terkait data gender dan anak belum dipahami semua perangkat daerah pemangku urusan

- p. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah yang terlihat dari masih belum semua Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki regulasi mendukung Pengarusutamaan Gender
 - q. Belum seluh kebijakan Pengarusutamana Gender (PUG) yang tertuang detail dalam dokumen RPJMD dan renstra Perangkat Daerah
 - r. Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsive gender
9. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan
 - b. Masih terdapat masyarakat yang belum atau enggan melakukan update data kependudukan (terutama data kematian)
 - c. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengetahui kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program
 - d. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaan
 - e. Kartu Identitas Anak (KIA) belum menjadi dokumen wajib kependudukan
 - f. Pembiayaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota
 - g. Terbatasnya ketersediaan blanko KTP
 - h. Masih banyak masyarakat yang belum mencetak KTP karena telah memiliki Surat keterangan Perekaman KTP
 - i. Masih terdapat masyarakat yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan kependudukan seperti Kepulauan Mentawai, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, daerah yang sulit diakses transportasi
 - j. Masih terdapat beberapa daerah yang menetapkan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran
 - k. Masih terdapat anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orangtua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran
 - l. Masih terdapat beberapa orangtua yang malas mengurus akta kelahiran anak
 - m. Masih adanya praktek pernikahan siri sehingga sulit untuk tercatat pada dokumen kependudukan
 - n. Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan
 - o. Pengelolaan data kependudukan masih belum terintegrasinya antar sector
 - p. Terbatasnya SDM IT untuk memfasilitasi terciptanya inovasi

- q. Penyajian data kependudukan kurang menarik dan kurang kekinian
 - r. Belum ada analisa yang menggambarkan terkait dengan data yang ditampilkan sehingga tidak diketahui kegunaan data kependudukan
10. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Pada daerah pedesaan, masih banyaknya angka usia pernikahan dini dan angka kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat serta lemahnya ekonomi masyarakat
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan urusan pemerintah Bidang PPKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang PPKB, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi.
 - d. Capaian indeks kebahagiaan rendah karena minimnya Waktu berinteraksi antar anggota keluarga yang kurang, pola pengasuhan anak yang masih didominasi oleh 1 pihak, terbatasnya waktu berekreasi keluarga.
 - e. Rendahnya capaian indeks ketentraman karena terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dikeluarkan
 - f. Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan kependudukan, terbatasnya analisa serta kajian dalam melihat permasalahan kependudukan, pembangunan belum berorientasi terhadap penduduk,
 - g. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, karena takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- a. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas air sungai yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di sumber seperti pemilahan sampah sejak dari Rumah Tangga
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta secara mandiri melakukan pengolahan sampah pada level rumah Tangga
 - e. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat

- f. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai
- g. Terbatasnya kegiatan pengawasan lingkungan yang dilakukan
- h. Masih minimnya kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
- i. Masih belum maksimalnya dalam menerapkan sanksi sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan
- j. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perangkat aturan pengelolaan sampah seperti regulasi dll
- k. Belum semua usaha da-tau kegiatan memiliki acuan pengelolaan limbah B3 dalam izin/dokumen lingkungan (belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3);
- l. Belum semua objek pencemar dan perusak tercakup dalam upaya pencegahan (pengawasan/ pemantauan/ inventarisasi);
- m. Aktivitas perusakan lebih tinggi daripada kemampuan upaya pemulihan;
- n. Belum maksimalnya pusat penanganan Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan
- o. Masih rendahnya tingkat pelayanan penanganan sampah di Kabupaten/Kota khususnya di wilayah kabupaten.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Masih belum optimalnya komitmen operator atau pengusaha angkutan umum untuk melakukan pengurusan pengaktifan kembali KP
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan kenyamanan transportasi umum yang dapat memberikan dampak peralihan penggunaan angkutan pribadi ke Angkutan umum
- c. Terjadinya penambahan penggunaan jumlah kendaraan pribadi di ruas jalan provinsi terutama pada saat hari libur dan liburan Panjang sehingga menyebabkan kemacetan
- d. Belum optimalnya koordinasi yang baik antara Kepala Terminal dengan Kepala UPTD untuk penambahan dan perbaikan fasilitas Utama dan Penunjang di terminal di tahun 2021.
- e. Perlunya dilakukan penyesuaian perijinan kembali dengan aturan terbaru menggunakan sistem (OSS) yang terintegrasi
- f. Belum adanya pembangunan moda transportasi yang terpadu dan saling berhubungan antar wilayah

13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UKM
- b. Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi

- c. Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
- e. Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
- f. Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
- g. Sebaran UKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
- h. Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
- i. SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
- j. Kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
- k. Terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis

14. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- b. Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan
- c. Belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terhadap 2 (dua) Kawasan
- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu Karang
- e. Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
- f. Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
- g. Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
- h. Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
- i. Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.
- j. Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir
- k. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil
- l. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
- m. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten

- n. Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
- o. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
- p. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km² perairan laut Sumatera Barat
- q. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
- r. Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
- s. Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
- t. Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional
- u. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
- v. Masih belum optimalnya pengolahan paska panen dan diversifikasi olahan
- w. Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan

15. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a. Masih terdapatnya daerah rawan pangan
- b. Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
- c. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi
- e. Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
- f. Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui
- g. Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

16. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

- a. Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- d. Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- e. Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- f. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- g. Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- h. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- i. Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
- j. Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
- k. Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
- l. Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
- m. Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sambilan masyarakat
- n. Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
- o. Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
- p. Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun
- q. Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
- r. Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.
- s. Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
- t. Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.
- u. Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.

- v. Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
- w. Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangansarana pertanian

17. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan

- a. masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- b. rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- c. masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- d. masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- e. alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- f. Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- g. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization),
- h. Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- i. Pengelolaan DAS belum terpadu
- j. Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- k. Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal

18. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih adanya Lokasi Rumah Tangga yang terisolir yang sulit diakses dan belum teraliri listrik
- b. Masih adanya Rumah Tangga Miskin Penerima bantuan pemasangan instalasi listrik yang belum masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu)
- c. Pebiayaan Investasi untuk pemanfaatan EBT yang cukup besar
- d. Terbitnya UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga kewenangan provinsi tidak ada (Tahun 2021-2022)
- e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- f. Belum memadainya akses infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- g. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan

- h. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi pada beberapa daerah (khususnya Kep.Mentawai)
- i. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- j. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- k. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- l. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
- m. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
- n. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

2.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Mengingat perhitungan capaian / realisasi SPM di laksanakan pada akhir tahun, maka hasil capaian pada triwulan II Tahun 2024 masih menggunakan data capaian SPM yang diurus oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, seluruh Jenis Pelayanan Dasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap Indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut :

2.5.1. Standar Pelayanan Bidang Pendidikan

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97
Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99,79%
I	Pendidikan Menengah				99,57%
	PERSENTASE PENCAPAIAN	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	79.637	79.6370	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,57%
	SMA				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	97,87%
	1. Angka partisipasi kasar	94,7	93,90	0,8	99,16%
	2. Angka partisipasi sekolah	100	80,9	19,1	80,90%
	3. Angka partisipasi murni	73,49	73,41	0.079	99,89%
	4. Kemampuan literasi	58,51	51,64	6,87	88,26%
	5. Kemampuan numerasi	27,70	52,345	-24,645	100,00%
	6. Perbedaan skor literasi	2,38	2,38	0	100,00%
	7. Perbedaan skor numerasi	0,68	0,68	0	100,00%
	8. Indeks iklim keamanan	68,18	68,18	0	100,00%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	60,76	60,76	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	25,5	25,5	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	0,41	0,41	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	93,55	93,55	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak	0,25	0,25	0	100,00%
	14. Pengalaman pelatihan guru	33	33	0	100,00%
	SMK				
	1. Angka partisipasi kasar	94,7	93,90	0,8	99,16%
	2. Angka partisipasi sekolah	100	78,18	21,82	78,18%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3. Angka partisipasi murni	73,49	73,41	0.079	99,89%
	4. Kemampuan literasi	58,51	53,03	5,48	90,63%
	5. Kemampuan numerasi	27,70	43,3	-15,6	100,00%
	6. Tingkat penyerapan lulusan SMK	85,50	85,50	0	100,00%
	7. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	100	100	0	100,00%
	8. Perbedaan skor literasi	2	2	0	100,00%
	9. Perbedaan skor numerasi	0,8	0,8	0	100,00%
	10. Indeks iklim keamanan	68,44	68,44	0	100,00%
	11. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61,25	61,25	0	100,00%
	12. Kecukupan formasi guru ASN	21	21	0	100,00%
	13. Indeks distribusi guru	0,37	0,37	0	100,00%
	14. Proporsi PTK bersertifikat	90,95	90,95	0	100,00%
	15. Proporsi PTK penggerak	0,13	0,13	0	100,00%
	16. Pengalaman pelatihan guru	33	33	0	100,00%
II	Pendidikan Khusus				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	2.752	2.752	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	97,98%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1. Angka partisipasi kasar	94,92	94,92	0	100,00%
	2. Angka partisipasi sekolah	20,15	20,15	0	100,00%
	3. Angka partisipasi murni	54,72	76,40	-21,68	100,00%
	4. Kemampuan literasi	58,51	59,77	-1,26	100,00%
	5. Kemampuan numerasi	27,70	57,15	-29,45	100,00%
	6. Perbedaan skor literasi	8,5	8,5	0	100,00%
	7. Perbedaan skor numerasi	2,59	2,59	0	100,00%
	8. Indeks iklim keamanan	72,58	72,58	0	100,00%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	65,08	65,08	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	21	21	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	0,39	0,39	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	90	90	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak	0,02	0,02	0	100,00%
	14. Pengalaman pelatihan guru	38,7	38,7	0	100,00%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pendidikan tahun 2022 yakni :

1. Indikator pemenuhan SPM Pendidikan yang sesuai dengan permendikbud belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan karena adanya Sub Kegiatan yang tidak sesuai.
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal, hal ini terlihat pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan menengah di Sumatera Barat yang belum mencapai 100%.
3. Belum maksimalnya komunikasi dengan tim penerapan SPM Kabupaten/Kota.
4. Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.

5. Tahun 2023 untuk indikator pemenuhan SPM pendidikan yang sesuai dengan permendikbud belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan.
6. Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK. Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat.
7. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan, serta belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1).
8. Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

2.5.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00%
I	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana da-tau Berpotensi Bencana Provinsi				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	27.458	27.458	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1. Obat-obatan dan Bahan medis habis pakai	1.500	1.500	0	100,00%
	2. Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	982	982	0	100,00%
	3. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	85	85	0	100,00%
	4. Dokter	28	28	0	100,00%
	5. Perawat	54	54	0	100,00%
	6. Bidan	28	28	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	84	84	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	28	28	0	100,00%
	9. Apoteker da-tau Asisten Apoteker	28	28	0	100,00%
	10. Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	28	28	0	100,00%
II	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	443.494	443.494	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	319	319	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2. Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	2.535	2.535	0	100,00%
	3. Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	35	35	0	100,00%
	4. Tempat sampah biologis	40	40	0	100,00%
	5. Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	124	124	0	100,00%
	6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	167	167	0	100,00%
	7. Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	172	172	0	100,00%
	8. Dokter	113	113	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	126	126	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	85	85	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	3	3	0	100,00%
	12. Tenaga Laboratorium	65	65	0	100,00%
	13. Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	84	84	0	100,00%
	14. Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	259	259	0	100,00%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 yakni :

1. Kab. Mentawai terdiri dari pulau-pulau, sehingga susah untuk dijangkau. Untuk sampai kelokasi bencana memakan waktu lebih kurang 1 minggu, karena cuaca yang kurang baik seperti : ombak besar dan angin kencang, sehingga bantuan lambat sampai ke daerah lokasi. Kejadian bencana yang terjadi di Kab. Mentawai adalah gempa dan banjir.

2. Kejadian bencana yang sering terjadi di Kab/Kota adalah banjir, longsor dan gempa bumi. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana dan di kelilingi perbukitan, apabila terjadi bencana banjir, longsor dan gempa bumi sering terjadi masalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan, disebabkan jalan yang dilalui ketempat rawan bencana terputus akibat banjir dan jalan tertimbun material longsor.
3. Ada 75 korban saat Erupsi Gunung Merapi terjadi, dimana saat erupsi para pendaki masih berada dipuncak gunung sehingga menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang dan 1 orang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit. Banyaknya korban diakibatkan Erupsi Gunung Merapi tersebut dikarenakan susah untuk melakukan evakuasi karena medan yang curam dan tebalnya abu vulkanik di sekitar Gunung Merapi.

2.5.3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99
Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00%
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota				100,00%
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,65%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	98,24%
	1. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan	0	0	-	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				100,00%
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD- Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	0	0	-	100,00%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah:

1. Pembebasan lahan untuk rencana Pembangunan SPAM Regional Agam – Bukittinggi belum bisa dilakukan karena adanya penolakan dari 18 warga terdampak. Telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan terkait penyelesaian masalah ini baik ditingkat Kabupaten Agam maupun ditingkat Provinsi, namun 18 warga terdampak yang tidak setuju tersebut tidak hadir pada saat rapat tersebut.
2. Sedangkan untuk program penyediaan sanitasi guna pemenuhan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota baru tahap penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan TPA Regional Kabupaten Padang Pariaman. Belum bisa dilakukan penyusunan dokumen perencanaan lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum MoU (dokumen Sinergi) disepakati terlebih dahulu.
3. Penyerapan anggaran penerapan SPM tahun 2023 masih rendah karena anggaran tersebut ada yang menggunakan anggaran DAU, yang tidak bisa diubah pada saat APBD Perubahan. Anggaran kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan SPAM Regional Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota Payakumbuh mengalami perubahan dari Rp. 885.001.600,- menjadi Rp. 421.663.137,-, hal ini disebabkan adanya perubahan jenis dokumen lingkungan yang akan disusun. Rencana awal dokumen yang akan

disusun adalah dokumen Amdal, tapi setelah melakukan proses penapisan terhadap rencana kegiatan tersebut di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi disepakati dokumen yang perlu disusun adalah dokumen UKL-UPL. Sementara anggaran untuk penyusunan dokumen UKL-UPL ini tidak sebesar anggaran untuk penyusunan dokumen Amdal.

4. Sesuai dengan tugas provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap capaian SPM air minum dan air limbah kabupaten kota, masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam penginputan data SPM air minum dan air limbah dalam aplikasi eSPM Bangda.
5. SPM Bidang Pekerjaan Umum (SPM Air Minum dan Air Limbah) belum menjadi prioritas pembangunan dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota.
6. Rendahnya anggaran dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum (SPM Air Minum dan Air Limbah) sehingga penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten/Kota maupun provinsi, tidak bisa dilakukan secara menyeluruh

2.5.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00%
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi				100,00%
	Tidak Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur	19	11	8	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form da-tau dokumen pendukung lainnya)				
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi				100,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	9	9	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah da-tau Bangunan	9	9	-	100,00%
	2. Subsidi uang sewa	0	0	-	0%
	3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	-	0%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Data korban bencana yang tidak tersedia karena pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan bagi masyarakat korban bencana baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan bencana;
2. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program SPM Bidang Perumahan Rakyat masih rendah;
3. Pendataan dan sosialisasi tidak dihitung sebagai output SPM Bidang Perumahan Rakyat;
4. Belum tersedia lahan untuk relokasi rumah masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi;
5. Belum ada program SPM Bidang Perumahan Rakyat dalam RPJMD 2021-2026;
6. Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota tidak dihitung sebagai pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Provinsi.

2.5.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.101
Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99,81%
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi				99,81%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	27	27	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,81%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	99,04%
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	261	258	3	98,85%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	6	-	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	74	72	2	97,30%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	-	100,00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat				Ditutup
	6. Warga negara yang memperoleh pelayan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa kerumah sakit/pusat Kesehatan Masyarakat bila terkena cidera fisik sedang da-tau berat				Ditutup

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Adanya perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan.
2. Untuk pelaksanaan penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP

Prov Sumbar mengalami kekurangan anggaran operasional kemudian terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana

2.5.6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102
Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Bidang Sosial Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	369	369	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100%
	1. Penyediaan permakanan	369	369	0	100%
	2. Penyediaan sandang	369	369	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses**	15	15	0	100%
	4. Penyediaan alat bantu**	88	88	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan Kesehatan didalam Panti	171	171	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	0	100%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	150	150	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	1	1	0	100%
	9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	77	77	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	1	1	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	16	16	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	3.126	3.126	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100%
	1. Pengasuhan	3.126	3.126	0	100%
	2. Penyediaan permakanan	3.126	3.126	0	100%
	3. Penyediaan sandang	3.005	3.005	0	100%
	4. Penyediaan asrama yang mudah diakses**	110	110	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	535	535	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	360	360	0	100%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari- hari	2.766	2.766	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	1	1	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2.712	2.712	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	360	360	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	375	375	0	100%
	12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	535	535	0	100%
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Usia Lanjut Telantar di dalam Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	212	212	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa	Jumlah Mutu Barang / Jasa	Jumlah Mutu Barang /	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Yang Dibutuhkan	Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1. Penyediaan permakanaan	212	212	0	100%
	2. Penyediaan sandang	212	212	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses**	4	4	0	100%
	4. Penyediaan alat bantu**	48	48	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	180	180	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	70	70	0	100%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	200	200	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	1	1	0	100%
	9. Akses ke layanan kesehatan dasar	180	180	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	42	42	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	1	1	0	100%
	12. Pemulasaraan**	41	41	0	100%
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	6	6	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100%
	1. Penyediaan permakanaan	6	6	0	100%
	2. Penyediaan sandang	6	6	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses**	1	1	0	100%
	4. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	6	6	0	100%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	1	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	6. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	6	6	0	100%
	7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar	1	1	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah da-tau Kartu Identitas Anak**	1	1	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	0	100%
	10. Pemulangan ke daerah asal**	1	1	0	100%
V.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				100%
	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	100	100	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100%
	1. Penyediaan permakanan	100	100	0	100%
	2. Penyediaan sandang	1	1	0	100%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	10	10	0	100%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	36	36	0	100%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	100	100	0	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 (Pasal 3) bahwa pelayanan sosial dasar dalam panti tidak menyatakan apakah panti yang dimaksud panti pemerintah atau panti swasta. Hal ini menyebabkan belum terakomodirnya anggaran untuk memenuhi Standar Pelayanan

Minimal pada Panti Swasta yang berjumlah 140 panti.

2. Jumlah penghuni panti pemerintah (8 UPTD) sebanyak 765 orang dan panti sosial swasta berjumlah 4.398 orang.
3. Penghitungan terhadap kebutuhan pelayanan dasar dalam panti tersebut telah dilakukan sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018, namun masih banyak kegiatan dalam panti (terutama panti swasta) yang belum terakomodir kegiatan dan anggarannya.

2.6. CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun capaian masing-masing Program Unggulan di Tahun 2023 yakni sebagai tabel berikut.

Tabel 2.103
Realisasi Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
SUMBAR SEHAT DAN CERDAS			
Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19			
Definisi Operasional : 1. Meningkatkan kapasitas pelayanan Kesehatan dalam pengujian Covid yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan terutama di UPTD Laboratorium Kesehatan, RSAM Bukittinggi, RS M. Natsir Solok, RSUD Pariaman 2. Penyediaan sarana mobile test (milik Provinsi) dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan berkerjasama dengan puskesmas	1. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana dalam pengujian Covid		
	a. UPTD Laboratorium Kesehatan (%)	100	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan-lat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 3. Pengadaan dan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
3. Penyediaan sarana tes covid yang sederhana seperti g-nose, antigen dan berkoordinasi dan berkerjasama dengan puskesmas 4. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan			Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
	b. RSAM Bukittinggi (%)	100	RSAM Bukittinggi Sub kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
	c. RS. M. Natsir (%)	100	RS. M. Natsir Sub kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
	d. RSUD Pariaman (%)	-	RSUD Pariaman Sub kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
	2. Persentase SDM yang tersedia dalam pengujian Covid		
	a. UPTD Laboratorium Kesehatan (%)	100	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	b. RSAM Bukittinggi (%)	100	RSAM Bukittinggi Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	c. RS. M. Natsir (%)	-	RS. M. Natsir Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	d. RSUD Pariaman (%)	-	RSUD Pariaman Sub kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	3. Jumlah sarana mobile test baru untuk pengujian test covid sederhana yang disediakan (unit)	-	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	4. Jumlah puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas) (unit)	279	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Catatan: 1. Fungsi Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Sarana Pengujian Test COVID19 sederhana di puskesmas merupakan tanggung jawab APBD Kabupaten/Kota
	5. Persentase puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas)	100	
3. Integrasi data pasien yang terinfeksi, yang meninggal dan yang sembuh akibat covid → Sistem Pelaporan Corona	1. Jumlah sistem data informasi terkait covid yang tersedia (Sistem Pelaporan Corona)	1	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
4. Pelacakan kasus Covid merupakan bagian dari pekerjaan Puskesmas (yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota) sehingga peran Provinsi lebih banyak pada koordinasi	2. Persentase sistem data informasi terkait covid yang tersedia (persen)	100	
5. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan			
1. Pelayanan terhadap pasien Covid 19 gejala ringan dengan komorbid, gejala sedang gejala berat, dan kritis di Rumah Sakit	1. Jumlah Rumah Sakit layanan Covid 19	46	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
2. Koordinasi Dinkes Provinsi dengan Dinkes Kab/kota terkait dengan isolasi	2. Jumlah Rumah Sakit Rujukan Covid 19	22	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
mandiri pasien covid tanpa gejala 3. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan			Bencana da-tau Berpotensi Bencana 2. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
1. Pelayanan penanganan difokuskan pada peningkatan sarana, prasarana serta SDM Kesehatan yang berada pada 4 (empat) Rumah Sakit milik Provinsi yakni RSAM Bukittinggi, RSJ HB Saanin, RS.M. Natsir dan RSUD Pariaman. 2. Percepatan vaksinasi sesuai dengan standar WHO/target nasional 3. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan	1. Persentase sasaran vaksinasi Pertama (%) 2. Persentase sasaran vaksinasi Kedua (%) 3. Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju <i>Herd Immunity</i> (%)	- - -	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Surveilans (2022) 2. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (2023-2026)
1. Untuk Pencegahan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memberdayakan Kader Tanggap Covid melalui kegiatan sosialisasi 3 M kepada masyarakat. 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan	1. Jumlah kader tanggap Covid yang terbentuk (orang) 2. Jumlah kegiatan sosialisasi 3 M yang dilaksanakan (kali)	57 100	Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Dinas Kesehatan Sub kegiatan : 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1. Pelaksanaan Pengendalian Covid dilakukan oleh Satgas Covid baik berupa kebijakan-kebijakan pembatasan social, pelarangan bepergian, penegakan hukuman dll 2. Sosialisasi dan implementasi Perda No 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru	1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada masyarakat (kali)	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub kegiatan : 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
3. Penanggung jawab Progul BPBD	2. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada satuan pendidikan aman bencana (kali)	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub kegiatan : 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
	3. Jumlah kabupaten/kota yang dapat dilakukan penegakan dan pengawasan Perda No. 6 Tahun 2020	16	Satuan Polisi Pamong Praja Sub kegiatan : 1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
I. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru			
Definisi Operasional	1. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA)		
1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak untuk siswa pada sekolah jenjang Pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta Pendidikan luar Biasa (SLB) 2. Penanggung jawab Progul	a. Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	236	Dinas Pendidikan Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMA) 2. Rehabilitasi
	b. Jumlah SMA dengan	236	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Dinas Pendidikan	sarana cuci tangan yang layak (unit)		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMA)
	c. Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak (unit)	236	
	d. Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak (unit)	236	
	2. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
	a. Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	111	Dinas Pendidikan Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMK) 2. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMK)
	b. Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	111	
	c. Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak (unit)	111	
	d. Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak (unit)	111	
	3. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB)		
	a. Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan	29	Dinas Pendidikan Sub Kegiatan : 1. Pembangunan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Perempuan yang layak (unit)		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SLB) 2. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SLB)
	b. Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	29	
	c. Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak (unit)	29	
	d. Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak (unit)	29	
1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak ditempat-tempat umum 2. Fasilitasi umum yang dimaksud adalah Kawasan wisata, desa wisata, tempat pelayanan publik yang menjadi kewenangan provinsi (UKPP), terminal milik provinsi dan rest area kewenangan provinsi 3. Mekanisme penganggarannya dapat melalui hibah kepada kelompok masyarakat seperti Pokdarwis atau kelompok lainnya 4. Penanggung jawab Progul Biro Organisasi untuk UKPP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan	1. Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia	125	Biro Organisasi Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
	a. Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	129	
	b. Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	136	
	c. Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak (unit)	140	
	d. Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak (unit)	142	
	2. Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	tersedia		
	a. Jumlah Terminal Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (akumulasi) (unit)		Dinas Perhubungan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	- Terminal Padang Panjang	1	
	- Terminal Sago Painan	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	
	- Terminal Payakumbuh	-	
	- Terminal Batusangkar	-	
	b. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak (akumulasi) (unit)	-	
	- Terminal Padang Panjang	1	
	- Terminal Payakumbuh	0	
	- Terminal Sago Painan	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	
	- Terminal Batusangkar	-	
	c. Jumlah Terminal	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (unit)		
	- Terminal Padang Panjang	1	
	- Terminal Painan	1	
	- Terminal Sawahlunto	-	
	- Terminal Payakumbu h	-	
	- Terminal Batusangkar	-	
	d. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak (unit)		
	- Terminal Padang Panjang	-	
	- Terminal Payakumbu h	-	
	- Terminal Sago Painan	-	
	- Terminal Batusangkar	-	
	- Terminal Sawahlunto	-	
	3. Jumlah sanitasi layak di Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (lokasi)		
	a. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan	15	
			Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembang an Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	yang layak (lokasi)		2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 3. Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Provinsi
	b. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak sesuai dengan CHSE (lokasi)	19	
	c. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (lokasi)	15	
	d. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak (lokasi)	19	
Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru			
Definisi Operasional : 1. Menuntaskan pembangunan stadion utama Sikabu terlebih dahulu agar dapat dijadikan pusat kegiatan olahraga serta pusat pembinaan olahraga prestasi paling lambat tahun 2023/2024 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase terbangunnya Main Stadium Sikabu (%)	40,1	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)			
1. Daerah 3 T adalah daerah yang berada di pelosok, terpencil, terbatas akses	1. Jumlah Guru/Tenaga Pendidik di Daerah		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
transportasi dan layanan dasar 2. Guru dan Tenaga Kependidikan yang dimaksud adalah ASN dan Non ASN (honorar) dan yang telah bersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi 3. Lingkupnya berada pada SMA/SMK/SLB negeri 4. Penanggung jawab Progul Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan	3 T yang menerima tunjangan khusus Rp.2,5 juta (orang)		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (orang)	302	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang)	69	
	2. Jumlah Tenaga Kependidikan di Daerah 3T yang menerima tunjangan khusus Rp.2,5 juta (orang)		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (orang)	43	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang)	9	
Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen			
Definisi operasional : 1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan terutama dalam proses penerimaan Siswa Baru SMA dan SMK untuk menyediakan kouta bagi siswa tidak mampu sebesar 20% dari kouta setiap sekolah 2. Penanggung jawab Progul Dinas Pendidikan	1. Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (%)	15	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas (Kegiatan antara lain berupa sosialisasi kepada masyarakat)
	b. Sekolah Menengah	12.980	Dinas Pendidikan Sub kegiatan :

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Atas (SMA) (orang)		1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas (Kegiatan antara lain berupa sosialisasi kepada masyarakat)
	c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (%)	15	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas (Kegiatan antara lain berupa sosialisasi kepada masyarakat)
	d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang)	3.676	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas (Kegiatan antara lain berupa sosialisasi kepada masyarakat)
Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan			
Defnisi operasional : 1. Pembangunan SMA dan RKB SMA diprioritaskan jika: a. daya tampung SMA saat ini yang telah ada masih belum mencukupi dengan jumlah	1. Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) USB yang dibangun setiap tahun (unit)		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (unit),	3	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Pembangunan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
penduduk usia SMA di daerah tersebut a. belum adanya SMA pada daerah atau kawasan dengan jumlah penduduk usia SMA yang telah mencukupi untuk sebagai syarat pendirian SMA b. untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) telah tersedia hibah lahan dengan kepemilikan dari Pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat. 2. Pembangunan USB SMK dan RKB SMK diprioritas sesuai dengan potensi daerah 3. Revitalisasi SMK sesuai dengan potensi daerah 4. Penanggung jawab Progul Dinas Pendidikan	dengan target : - SMAN 2 Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat - SMAN 12 Solok Selatan - SMAN 17 Padang - SMAN 2 Sungai Geringging - SMAN 1 Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman		USB (Unit Sekolah Baru)
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (unit), dengan target : - SMKN 6 Solok Selatan - SMKN 3 Bukittinggi - SMKN 11 Padang - SMKN 1 Palupuah Kabupaten Agam - SMKN Akabiluru 50 Kota	3	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	c. Sekolah Luar Biasa (SLB) (unit) Yakni: - SLBN 1 Kepulauan Mentawai	1	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	- SLBN 1 Padang Pariaman - SLBN 1 Dharmasraya - SLBN 2 50 Kota - SLBN 3 Sawahlunto		
	2. Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun (unit)		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (unit)	14	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Baru (SMA)
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (unit)	4	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (SMK)
	c. Sekolah Luar Biasa (SLB) (unit)	0	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri			
Definisi operasional : 1. Focus beasiswa adalah masyarakat dan ASN pemprov 2. Untuk ASN Pemprov melalui tugas belajar 3. Untuk masyarakat bersumber dari PT Rajawali dan sumber lainnya seperti CSR, universitas/ Perguruan tinggi, dana rantau dan sumber dana lainnya 4. Untuk sumber dana lainnya seperti CSR dan lainnya	1. Jumlah ASN Provinsi yang mendapatkan tugas belajar baru pada jenjang pendidikan S1/S2/S3 (orang)	175	Badan Kepegawaian Daerah Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	2. Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3 (orang)	522	Dinas Pendidikan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (Sumber Dana dari Beasiswa)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
maka Peran provinsi memfasilitasi kerjasama dengan universitas dalam negeri dan luar negeri yang akan memberikan beasiswa bagi lulusan SMA dan SMK dari Sumatera Barat 5. Lingkup jenjang Pendidikan yakni S1, S2 dan S3 6. Penanggung jawab Progul Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan			Rajawali)
Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan			
Definisi operasional : 1. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi untuk penelitian dan pengembangan yang berfokus pada hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan dan Program Unggulan yang dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi dengan melibatkan mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi dan Swasta (bukan memberikan hibah kepada PTN atau PTS). 2. Hasil penelitian berupa produk inovatif terapan 3. Tema penelitian dikaitkan dengan program-program unggulan RPJMD dan Prioritas Pembangunan dan ditetapkan dengan Keputusan Majelis Pertimbangan Litbang 4. Estimasi pertahun adalah 5 penelitian 5. Penanggung jawab Progul	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebijakan untuk mendukung program unggulan (dokumen)	5	Badan Penelitian dan Pengembangan Sub kegiatan : 1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 3. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 4. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 5. Penelitian aspek-aspek sosial

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Balitbang			
SUMBAR RELIGIUS DAN BERBUDAYA			
Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi			
Definisi operasional : 1. Menjadikan Gedung LKAAM dan Bundo Kanduang menjadi tempat edukasi dan literasi (membuat galeri) 2. Membangun Gedung MUI dan juga membuat galeri 3. Melakukan pengajian dan pembelajaran keagamaan secara rutin di Masjid Raya seperti belajar Al Quran bagi generasi muda, belajar sholat, penyelenggaraan jenazah dll 4. Penyediaan tempat front office untuk pengunjung agar menutup aurat 5. Penanggung jawab Progul yakni Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Biro Kesra	1. Jumlah galeri dan tempat edukasi yang tersedia di LKAAM (unit)	-	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3. Pengadaan Mebel
	2. Jumlah galeri dan tempat edukasi yang tersedia di Bundo Kanduang (unit)	-	
	3. Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi LKAAM (orang)	3.967	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	4. Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi Bundo Kanduang (orang)	3.967	
	5. Jumlah rata-rata aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat per minggu (diluar pelaksanaan sholat 5 waktu) yang diselenggarakan (kali)	40	Biro Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Aktifitas setiap minggu: <u>Mulai 2021:</u> a. Ceramah Zuhur/Jumat (7 kali) b. Subuh Mubarakah (1 kali) c. Tahsin Qur'an (2 kali) <u>Mulai 2022 :</u> d. Ceramah Magrib (7 kali) e. Tahfidz Qur'an (2 kali) f. Pelatihan Bahasa Arab (6 kali) g. Penyelenggaraan Jenazah (1 kali 2 bulan) h. Wirid Remaja (2 kali sebulan) i. Majelis Ta'lim (1 kali sebulan) j. Ceramah Subuh (6 kali) k. Pembelajaran Adat (1 kali) <u>Mulai 2023 :</u> l. Pelatihan Sholat Kusyuk (2 kali)		
	6. Jumlah jenis aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat yang diselenggarakan (jenis)	12	Biro Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan			
Definisi operasional : 1. Memberikan hibah kepada Lembaga keagamaan seperti TPA, TPQ, MDA, pondok alquran, LPTQ dan Lembaga keagamaan lainnya serta hari besar keagamaan lainnya 2. Penanggung jawab Progul Biro Kesra	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan hibah (rumah ibadah)	900	Biro Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
	Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan hibah (lembaga)	400	
Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism)			
Definisi operasional : 1. Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan agar dapat segera difungsikan sebagai pusat Pendidikan dan wisata budaya paling lambat tahun 2023 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase terbangunnya Gedung Kebudayaan (%)	34,85	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	2. Membangun kembali Museum Adityawarman atau melakukan rehabilitasi berat terhadap Gedung yang telah ada 3. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Kebudayaan	Persentase terbangunnya/rehabilitasi berat terhadap Museum Adityawarman (%)	0
2. Membangun ruang IPTEKS tersendiri dengan lokasi masih di Lingkungan Museum Adityawarman (saat ini bergabung dengan ruangan Museum) 3. Penanggung jawab Progul	Persentase terbangunnya Gedung IPTEKS (%)	0	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang			Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1. Menjadikan Kawasan Museum dan Gedung Kebudayaan sebagai pusat aktifitas masyarakat terutama aktifitas seni dan budaya serta IPTEKS serta tersedia ruang ramah bermain anak di museum 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kebudayaan	1. Jumlah ruang ramah bermain anak di Museum Adityawarman yang terbangun (lokasi) 2. Jumlah aktifitas seni dan budaya masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Kebudayaan dan Museum Adityawarman (kali)	- 56	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Kebudayaan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Fungsional 3. Peningkatan Layanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1. Meningkatkan kapasitas Perpustakaan Daerah agar dapat menjadi pusat Pendidikan dan literasi masyarakat serta ramah anak 2. Penanggung jawab Progul	1. Jumlah ruang ramah bermain anak yang tersedia Perpustakaan Daerah (lokasi)	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Telah tersedia sejak tahun 2016 dan upaya yang dilakukan dari 2021 sampai dengan 2026 adalah peningkatan mutu ruang ramah bermain anak seperti ketersediaan perlengkapan dan lain-lain		
	2. Jumlah aktifitas/kegiatan literasi di Perpustakaan Daerah yang melibatkan masyarakat umum yang diselenggarakan (kali)	8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
	3. Jumlah layanan perpustakaan visual yang tersedia (studio)	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
	4. Jumlah ruang baca terbuka yang tersedia di perpustakaan daerah (ruang)	1	
Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan			
Definisi operasional : 1. Pembinaan kepada seniman dan budayawan termasuk kepada sejarawan seperti pelatihan atau bimtek, dan juga memberikan penghargaan secara rutin kepada para maestro seni dan budayawan serta sejarawan Sumatera	1. Jumlah seniman yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang)	580	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Kebudayaan 2. Peningkatan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Barat 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kebudayaan			Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
	2. Jumlah budayawan yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang)	3.756	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat
	3. Jumlah sejarahwan yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang)	150	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
	4. Jumlah seniman/budayawan/sejarahwan yang menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (orang)	15	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan: 1. Pemberiaan Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Kontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan
SUMBAR SEJAHTERA			
Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian			
1. Pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian	1. Persentase Alokasi anggaran	14,71	Bappeda dan Badan Pengelolaan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
sebesar 10% dari total APBD.	sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD (%)		Keuangan dan Aset Daerah
2. Distribusi anggaran untuk Dinas perkebunan Tanaman pangan dan hortikultura, dinas pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas Kehutanan, serta dinas SDA dan Bina konstruksi untuk irigasi			
3. Pengalokasian anggaran termasuk gaji, DAK, dana hibah, dan dana transfer lainnya			
3. Focus kegiatan pada:			
a. menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)			
b. meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan	2. Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan (benih/bibit)		
c. optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan	a. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
d. peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam	- Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan (batang)	125.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
	- Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan (batang)	10.000	2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
e. meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan	- Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan (batang)	36.000	3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran
	- Jumlah benih/bibit	100.000	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
serta kehutanan f. diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi g. lancarnya akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan 4. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Holtikultura	Karet yang diadakan (batang) - Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan (batang) - Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan (batang) - Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan (ton) - Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan (ton) - Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan (gram) - Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan (kg) - Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan (batang) - Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan (batang) - Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan (batang)	 400.000 250.000 384.5 37.5 16.500 100.000 20.000 40.000 20.000	Benih/Bibit Perkebunan 4. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	- Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan (batang)	20.000	
	- Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan (batang)	70.000	
	- Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan (batang)	55.000	
	- Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan (batang)	50.000	
	- Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan (batang)	15.000	
	- Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan (kg)	2.000	
	- Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan (kg)	2.000	
	- Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan (kg)	2.000	
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan		Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Penjaminan Ketersediaan
	- Benih kerapu (ekor)	26.000	
	- Bibit rumput laut (kg)	0	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	- Benih nila (ekor)	1.150.000	Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 2. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi 4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
	- Benih vaname (ekor)	500.000	
	- Calon induk ikan nila (kg)	15.200	
	- Induk ikan gurami (kg)	0	
	- Induk ikan lele (kg)	1.100	
	- Induk ikan mas (kg)	0	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
	c. Urusan Kehutanan		
	- Jumlah Bibit (batang)	800.000	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
	- Jumlah Arboretum (unit)	2	2. Sertifikasi Sumber Benih
	- Luas Agroforestry (Ha)	762	3. Sertifikasi Mutu Benih
	- Jumlah Komoditi yang dikembangkan (jenis)	15	4. Sertifikasi Mutu Bibit
			5. Pengawasan Peredaran Benih da-tau Bibit
			6. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
			7. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu da-tau Jasa Lingkungan
	d. Urusan Pangan		
	- Jumlah benih/bibit bermutu yang disediakan (batang)	18.350	Dinas Pangan Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
	e. Sub Urusan Pernakan dan Kesehatan Hewan		
	- Semen beku (dosis)	101.559	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	- Sapi (ekor)	0	Sub kegiatan :
	- Service Per	2,2	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Conception (S/C)		1. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
	3. Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan yang dilakukan (kali)		
	a. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	5	
	- Jumlah kegiatan pengawas an agroinput dan atau sumber daya pertanian (sub urusan perkebuna n, tanaman pangan dan hortikultura) (kali)		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan		
	- Jumlah	1	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	pos pengawas yang dibangun baru (unit)		Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Pengawasan Usaha Perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil 2. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
	- Jumlah Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas yang diadakan (Paket)	4	
	~~— Jumlah hari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 1 tahun yang dilakukan (hari)~~	~~100~~	
	c. Urusan Kehutanan		Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan
	- Jumlah kasus tertangani (kasus)	6	
	- Jumlah Patroli Pengamanan Hutan yang dilakukan (kali)	145	
	- Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan	130	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Lahan yang dilakukan (kali)		dan Lahan
	4. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kehutanan yang disediakan (unit)		
	a. Jumlah Alat Produktif yang disediakan (unit)	20	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	b. Jumlah sarana dan prasarana Ekowisata yang disediakan (unit)	34	
	c. Jumlah Stup lebah madu yang disediakan (unit)	4.109	
	5. Jumlah UPTD yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung produksi peternakan (UPTD)	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
	6. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	yang disediakan (unit)		
	a. Jumlah Mesin tempel 15 PK yang diadakan (unit)	303	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
	b. Jumlah Mesin tempel 40 PK yang diadakan (unit)	56	
	c. Jumlah Mesin tempel 8 PK yang diadakan (unit)	10	
	d. Jumlah Mesin tempel 4 PK yang diadakan (unit)	7	
	e. Jumlah Fish Box 100 Ltr yang diadakan (unit)	800	
	f. Jumlah Fish Box 220 Ltr yang diadakan (unit)	150	
	g. Jumlah Fish Box 1.000 Ltr yang diadakan (unit)	0	
	h. Jumlah Mesin diesel kapal perikanan yang diadakan (unit)	20	
	i. Jumlah Mesin longtail yang diadakan (unit)	150	
	j. Jumlah Rumpon yang diadakan (unit)	1	
	k. Jumlah Gillnet (Laut) yang diadakan	120	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	(unit)		
	l. Jumlah Tramel Net yang diadakan (unit)	76	
	m. Jumlah Jaring langli yag diadakan (unit)	0	
	n. Jumlah Gillnet (Perairan Umum) yang diadakan (unit)	40	
	o. Jumlah Mesin longtail 8,5 PK yang diadakan (unit)	0	
	p. Jumlah Mesin tempel 2,5 PK yang diadakan (unit)	40	
	q. Jumlah mesin Perahu fiber uang diadakan (Unit)	0	
	7. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi Perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan (unit)		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 2. Perencanaan
	a. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Kakao		
	- Gunting Pangkas (set)	0	
	- Peralatan Jemur (buah)	0	
	- Kotak Fermentasi	400	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	(unit)		Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
	b. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Kakao		
	- Gunting Pangkas (set)	0	
	- Peralatan Jemur (buah)	0	
	c. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Gambir (Alat kempa Gambir, Alat peniris, Gerobak, dll)	-	
	d. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Padi		
	- Elektrik Sprayer (set)	0	
	- Power Tresher (set)	35	
	- Hand Traktor (TR 2) (set)	173	
	- APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik)	5	
	e. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Jagung		
	- Combine (unit)	0	
	- Cultivator (unit)	20	
	- Corn Seller	37	
	f. Pengadaan alat dan mesin		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	pertanian pra, panen dan pasca panen Cabe		
	- Cultivator (unit)	20	
	- Handsprayer Manual (unit)	100	
	- APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik) (paket)	5	
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll) (paket)	5	
	g. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Bawang Merah		
	- Cultivator (unit)	10	
	- Handsprayer Manual (unit)	100	
	- APPO (alat Pencacah Pupuk Organik) (unit)	5	
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll) (paket)	10	
	h. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Manggis		
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor,	3	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	keranjang panen, terpal dll)		
	i. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Jeruk		
	- Handsprayer Manual (unit)	5	
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll) (unit)	300	
	8. Penyaluran Sarana Produksi terdiri dari :		
	a. Saprodi Cabe (Ha)	100	
	b. Saprodi Bawang Merah (Ha)	100	
	c. Saprodi Maggis (Ha)	200	
	d. Saprodi Jeruk (Ha)	100	
	9. Pengadaan sarana pengolahan perkebunan tdd :		
	a. Sarana pengolahan Kakao (unit)	4	
	b. Sarana pengolahan Kopi (unit)	102	
	c. Uji organoleptik (Cita Rasa) Mutu Kopi (unit)	4	
	10. Jumlah Pengadaan Sarana	4	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	pengolahan dan pemasaran cabe yang diadakan (unit)		
	11. Jumlah Pengadaan Sarana pengolahan dan pemasaran Bawang yang diadakan (unit)	5	
	12. Jumlah Sarana pengolahan dan pemasaran Jeruk yang diadakan (unit)	400	
	13. Jumlah Kab/Kota yang menjadi lokasi Pembinaan, pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian (Kab/Kota)	19	
	14. Jumlah Pupuk Jagung yang dapat disalurkan (ton)	45	
	15. Jumlah Saprodi Hortikultura yang disalurkan (Ha)	510	
	16. Luas Jaringan Irigasi tersier yang di rehabilitasi (Ha)	96	
	17. Luas lahan pertanian organik yang dikembangkan (Ha)	250	
	18. Jumlah kampung yang melakukan pengembangan Kampung Buah/ Sayur/ Biofarmaka	35	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	(kampung)		
	19. Jumlah resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam yang dapat diantisipasi (resiko)		
	a. Jembrana (kasus)	143	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 2. Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
	b. Rabies (kasus)	57	
	c. AI (kasus)	1	
	d. Jumlah Sampel yang diuji (sampel)	10.223	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	e. Jumlah Bank Pakan yang tersedia (unit)	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
	f. Sub-urusan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura (%)	99	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengendalian

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	20. Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil (%)		
	a. sub urusan Peternakan (%)	49,15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan	10	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
	c. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pendampingan Manajemen Koperasi Petani 2. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani 3. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
	d. Luas kawasan hutan yang dikelola	50.000	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Penyiapan dan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	kelompok masyarakat (Ha)		Pengembangan Perhutanan Sosial
	21. Jumlah Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile (unit/PPK/RMU)	73	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
	22. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi peternakan (%)	35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	23. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kelautan dan perikanan	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			dan berdaya saing
	24. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kehutanan (%)	20	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 4. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan 5. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 6. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
	25. Jumlah kelompok wanita yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan (kelompok)	136	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	26. Jumlah pemberdayaan Kelompok Wanita dalam pemanfaatan pekarangan pangan berupa	16	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	bibit tanaman rempah (Kelompok)		
	27. Jumlah TTIC yang beroperasional dengan baik (unit)	3	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak			
Definisi operasional : 1. Mempertahankan Sumatera Barat sebagai lumbung padi di nasional dan menaikkan hasil produksi padi setiap tahunnya (ukurannya Gabah kering panen) 2. Meningkatkan produksi jagung setiap tahunnya 3. Meningkatkan produksi komoditas ternak unggas dan kambing 4. Mandiri maksudnya adalah terpenuhinya kebutuhan sumatera barat oleh produksi dari sumatera barat sendiri 5. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Hortikultura dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jumlah produksi padi (ton)	1.458.869	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 2. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian:
	2. Jumlah produksi jagung (ton)	797.876	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan : 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 2. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
	3. Jumlah produksi komoditas ternak unggas (ekor)	315.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan :

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			1. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
	4. Jumlah produksi kambing (ekor)	2.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian			
Definisi operasional : 1. Mengevaluasi kinerja BUMD yang ada 2. Mengoptimalkan pemanfaatan BUMD yang ada 3. Membentuk BUMD baru dibidang agro 4. Ukuran tata Kelola BUM yang baik adalah adalah kategori BUMD yang sehat 5. Penanggung jawab Progul Biro Perekonomian	1. Jumlah BUMD Agro yang terbentuk baru (unit usaha)	-	Biro Perekonomian Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
	2. Jumlah BUMD dengan kategori Sehat (unit usaha) a. PT. Bank Nagari (perbankan) b. PT. Jamkrida (penjaminan kredit) c. BUMD Agro	3	Biro Perekonomian Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif			
Definisi operasional : 1. Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial	1. Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026 2. 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya 3. Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota 4. Definisi terkait dengan entrepreneur yakni : a. Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau b. Sudah memulai usaha 5. Bekerjasama dengan akselarator 6. Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM	a. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga (orang)	882	Dinas Pemuda dan Olahraga Sub kegiatan :
	b. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja (orang)	7.144	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub kegiatan : 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja
	c. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UKM (orang)	84.299	Dinas Koperasi dan UKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkembangkan UKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	d. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura) (orang)	352	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	e. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan) (orang)	130	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	f. Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan (orang)	556	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan 2. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 4. Penguatan dan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	g. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)	12.433	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5. Pelatihan Asesor Kompetensi/Work place Assesor (WPA) 6. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Manusia Ekonomi Kreatif 8. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
	h. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	1.221	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	i. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	513	Dinas Sosial Sub kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Anak terlantar) 2. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Tuna Netra) 3. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti PMKS Lainnya)
	j. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan (orang)	240	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	k. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan (orang)	400	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan :
	l. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (orang)	3.980	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
	m. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal (orang)	512	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub kegiatan : 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
	n. Jumlah entrepreneur	136	Dinas Pangan Sub kegiatan :

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	baru tercipta urusan Pangan (orang)		1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	o. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa (orang)	1.762	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UKM dan pengusaha pemula			
Definisi operasional : 1. Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UKM dan pengusaha pemula yang dilakukan melalui Fasilitasi, peningkatan pemahaman terkait akses pembiayaan 2. Bentuk fasilitasi antara lain mempertemukan kelompok UKM dengan perbankan 3. Target capaian yakni UKM yang mendapatkan permodalan dari perbankan 4. Edukasi terhadap non perbankan seperti CSR, fin-	1. Jumlah UKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (Lembaga)	640	Dinas Koperasi dan UKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkempa ngkan UKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan
	2. Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)	415	
	3. Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan	463	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
tech, dana dari lembaga keuangan social islam 5. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UKM	permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)		Kemiskinan
	4. Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	150	
	5. Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	4	
	6. Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	5	
Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital			
Definisi operasional : 1. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UKM melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi dengan tema difokuskan pada penguasaan Teknologi Informasi untuk perluasan jejaring pemasaran dan kerjasama 2. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UKM	1. Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang)	230	Dinas Koperasi dan UKM Sub kegiatan : 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDMUUKM 2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			SDM Koperasi 3. Menumbuhkembangkan UKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 4. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 2. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan			
Definisi operasional : 1. Penetapan 1 destinasi wisata berkelas dunia (rencana Kawasan Gunung Talang yang merupakan salah satu geosite Kawasan	1. Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 2. Pengembangan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Geopark Ranah Minang, meliputi 7 Kab/Kota, menuju UNESCO global geopark) dan 19 destinasi wisata unggulan (masing-masing 1 di setiap kabupaten/Kota) yang telah disepakati pada rakor pariwisata di Mentawai 2. Terkait dengan kewenangan, maka pola pendanaan untuk destinasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui sharing pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota. 3. Proporsi persentase sharing pendanaan diputuskan pada rapat TAPD dengan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi dan Biro Kerjasama, Pembangunan Dan Rantau. 4. Membangun Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif (Sumbar Kreatif Hub), yang berlokasi di bekas Bengkel PT Dinamika di Nipah, Padang direncanakan akan dikelola oleh salah satu BUMD 5. Penanggung jawab progul Dinas Pariwisata dan Biro Perekonomian			Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 5. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 6. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	2. Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dinas Pariwisata Sub kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	3. Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan terkelola (unit)	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional			
Definisi operasional : 1. Pusat pertunjukan seni yang direncanakan adalah: a. Gedung Kebudayaan (lokasi di Padang), b. Amphitheatre (lokasi di panorama view ngarai sianok Bukittinggi) c. Amphitheatre (lokasi di Kawasan talang dengan view 3 danau) 2. Peran provinsi yakni membangun amphitheatre (pastikan terkait kepemilikan asset) serta berkoordinasi untuk mengisi aktivitas seni dan budaya dengan sanggar-sanggar seni yang berada di kabupaten/kota tersebut 3. Penanggungjawab progul Dinas Kebudayaan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang	1. Jumlah pusat pertunjukan seni dan budaya (amphitheatre) bertaraf internasional yang terbangun (lokasi) Lokasi Amphitheatre : a. Gedung Kebudayaan b. Panorama view ngarai sianok Bukittinggi c. Kawasan talang dengan view 3 danau	0	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Catatan: 1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang hanya melaksanakan pengawasan terkait dengan pembangunan Amphitheatre oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dana BKK dari APBD provinsi 2. Amphitheatre di Bukittinggi dan di Kab Solok di bangun melalui mekanisme

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan Khusus, dengan sub kegiatan yang berada pada unsur penunjang Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni : a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	2. Jumlah aktifitas seni dan budaya di lokasi amphitheatre (kali)	25	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SUMBAR BERKEADILAN			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan			
Definisi operasional : 1. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi provinsi 2. Peningkatan dan pembangunan jalan provinsi menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran	1. Jumlah jaringan irigasi Provinsi yang direhab (meter)	12.666,2	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sub kegiatan : 1. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
hasil pertanian dan perikanan 3. Optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan untuk mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan 4. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Holtikultura, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	2. Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (kilometer)	3,56	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Pembangunan Jalan
	3. Jumlah ruas jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (ruas)	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Pembangunan Jalan
	4. Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan (Pelabuhan)		
	a. Pelabuhan Penyeberangan : - Pelabuhan Bungus di Padang - Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai - Pelabuhan Sikakap di Mentawai - Pelabuhan Siberut di Mentawai	4	Dinas Perhubungan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
	b. Pelabuhan Laut : - Pelabuhan Tua Pejat	4	Catatan : Mengoperasionalkan Pelabuhan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	di Mentawai - Pelabuhan Muaro Padang di Padang - Pelabuhan Siberut/Si malepet di Mentawai - Pelabuhan Sioban di Mentawai		penyeberangan dan Pelabuhan laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi namun hingga Januari 2022 belum ada penyerahan dari Pusat ke Provinsi
Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang			
Definisi operasional : 1. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi terutama pada daerah belum berkembang, terisolir dan perbatasan 2. Peningkatan konektivitas melalui integrasi antar moda (moda darat, laut dan udara) 3. Operasional terminal type B 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan pelabuhan 5. Penanggung jawab progul Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	1. Jumlah panjang jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (kilometer)	4,99	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Jalan 3. Rekonstruksi Jalan
	2. Jumlah akses jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (ruas)	2	
	3. Jumlah integrasi antar moda yang terbangun (jumlah):		
	a. Jumlah dokumen RIJLLAJ Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan (Peraturan Gubernur)	-	Dinas Perhubungan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	b. Persentase Realisasi Perkada tentang dokumen RIJLLAJ Provinsi (%)	-	
	c. Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Peraturan Gubernur)	-	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
	d. Persentase realisasi Perkada Rencana Induk Perkeretaapian (%)	-	
	4. Jumlah terminal Type B yang beroperasi dan memanfaatkan dengan baik (unit) yakni : a. Terminal Padang Panjang b. Terminal Payakumbuh c. Terminal Sago Painan d. Terminal Sawahlunto e. Terminal Batusangkar	5	Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 2. Pembangunan Gedung Terminal 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
	5. Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Pelabuhan yang ditetapkan (dokumen)		Dinas Pehubungan Sub kegiatan : 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan
	a. Jumlah Dokumen DLKR/DLKT Pelabuhan	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Laut Tua Pejat yang tersusun (dokumen)		Regional
	b. Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	1	
	c. Jumlah Dokumen P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta dokumen P3D)	-	
	d. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	e. Jumlah Dokumen DED Simalepet yang tersusun / Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	f. Jumlah Dokumen DED Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	g. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	h. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Penyebrangan Sinanak yang tersusun (dokumen)	-	
	i. Jumlah dokumen DED Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	j. Jumlah Dokumen DLKR/DLKP Pelabuhan Penyeberangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	k. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas			
Definisi operasional : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mitigasi, penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana 2. Pengembangan nagari dan desa siaga bencana 3. Penanggung jawab progul	1. Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (kelompok) 2. Jumlah nagari/desa siaga	8 3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub kegiatan : 1. Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
BPBD	bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (nagari/desa)		bencana
Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy) dan Tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (limbah Medis)			
Definisi operasional : 1. Lokus progul untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok 2. Pengolahan sampah sebagai sumber energi diarahkan kepada <i>waste to carbon</i> yang menjadi biogas 3. Biokonversi BSF untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok untuk mensupport sentra peternakan dan pertanian, sebagai bahan baku industry pakan dan pupuk organik 4. Implementasi pemanfaatan Maggot untuk reduksi sampah, pengembangan direncanakan untuk skala nagari 5. Penanggung jawab progul Dinas Lingkungan Hidup	1. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Payakumbuh	-	Dinas Lingkungan Hidup Keterangan : 1. Sampah yang diolah pada TPA regional Payakumbuh/Solok hanya 250 ton per hari (TPA Regional Payakumbuh) dan 60 ton/hari (TPA Regional Solok), sehingga dinilai belum layak untuk diolah menjadi RDF/energi. 2. Sesuai Perpres 38/2018 Hanya ada 12 kota yang diizinkan membuat pengolahan sampah menjadi energi yang akan dibiayai oleh APBN, tidak termasuk Payakumbuh atau Solok. 3. Pengembangan <i>waste to energy</i> disepakati di TPA Kota Padang di Aia Dingin, bukan di TPA Regional Payakumbuh atau TPA Regional Solok, sesuai surat
	2. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Solok	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Gubernur ke Menko Maritim dan Investasi No. 660/642.A/PSLB3 PK/DLH-2021 tanggal 30 juli 2021 perihal Dukungan Terhadap Rencana Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi <i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF) di Kota Padang
	3. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)		Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Supervisi Pembangunan/Re habilitasi/Peningka tan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
	a. Jumlah dokumen Kajian Kelayakan (FS) yang tersusun (dokumen)	-	
	b. Jumlah dokumen DED dan AMDAL yang tersusun (dokumen)	-	Dinas Lingkungan Hidup Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
	c. Persentase konstruksi yang terlaksana (%)	-	
	d. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh	-	2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	yang terlaksana (%)		
	4. Persentase Bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Solok yang terlaksana (%)		Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
	a. Jumlah dokumen Kajian Kelayakan (FS) yang tersusun (dokumen)	1	Dinas Lingkungan Hidup Sub kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
	b. Jumlah dokumen DED dan AMDAL yang tersusun (dokumen)	-	2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
	c. Persentase konstruksi yang terlaksana (%)	-	
	d. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)	-	
	5. Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot (nagari/desa)	30	Dinas Lingkungan Hidup Sub kegiatan : 1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2. Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, da-tau Penimbunan Limbah B3 bukan merupakan	1. Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	294.567	Dinas Lingkungan Hidup Sub kegiatan : 1. Koordinasi dan
	2. Jumlah	19	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISASI I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
Kewenangan Provinsi tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat (UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 90 tahun 2019) 3. Saat ini sedang dibangun Pengelolaan limbah B3 di air dingin Kota Padang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan progress pembangunan sekitar 90%. 4. Apabila tempat pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang telah jadi maka akan melayani seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dan juga beberapa Provinsi tetangga, dikarenakan kapasitasnya yang besar sedangkan perhitungan limbah B3 dari seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Barat masih kurang untuk mendatangkan profit dalam pengelolaannya. 5. Kondisi saat ini sedang dilakukan pembahasan ditingkat Kementerian terkait dengan pembagian peran antara Kementerian, provinsi dan kota padang dalam hal pengelolaannya. 6. Penanggung jawab progul Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi (Kabupaten/Kota)		Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, da- tau Penimbunan
Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government)			
Definisi operasional : 1. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat	Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan	141	Biro Organisasi : Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
terutama dalam pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat termasuk juga dalam manajemen internal UKPP 2. Digitalisasi yang dimaksud adalah seluruh layanan maupun manajemen internal UKPP telah berbasis TIK. 3. Penanggungjawab progul adalah Biro Organisasi, sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai <i>supporting</i> teknis.	pelayanan kepada masyarakat (Unit)		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik : Sub kegiatan : 1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan serta proyeksi pencapaian indikator makro ekonomi untuk tahun 2025 yang akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

Pencapaian target kinerja makroekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun lalu dan kebijakan penganggaran hingga tahun berjalan akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta proyeksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2025.

Kerangka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2025 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023

Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian dunia semakin masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 telah melambat secara luas. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang semula lebih baik dari perkiraan dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina dan konflik genosida di Palestina. Inflasi juga terus menanjak di banyak negara. Kenaikan terutama terjadi pada harga makanan dan energi. IMF menyebut, faktor tersebut membebani pertumbuhan ekonomi dan meredupkan prospek ekonomi ke depan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya mencapai angka 3%. Sementara itu rilis Bank Dunia edisi Desember 2023 memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada tahun 2023. Angka ini relatif lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi hanya mencapai angka 2,1%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 sekitar -1,6% akibat pandemi COVID-19 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29% dan terus meningkat menjadi 4,36% di tahun 2022. Sedangkan secara keseluruhan di tahun 2023 berdasarkan data sangat sementara yang dikeluarkan BPS maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan capaian 4,62%. Peningkatan aktivitas masyarakat yang terjadi di sepanjang tahun 2023 mendorong terjadinya transaksi ekonomi terutama pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi.

Pertumbuhan PDRB per kapita pun yang sempat berkontraksi ke angka Rp. 43,70 juta di tahun 2020 kembali meningkat ke angka Rp. 45,41 juta di tahun 2021, terus meningkat ke angka Rp. 50,52 juta di tahun 2022 dan diprediksi meningkat ke angka Rp. 54,50 juta di tahun 2023. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Hanya saja selama kurun waktu tahun 2022 tingkat inflasi di Sumatera Barat melonjak tajam ke angka 7,21%, namun angka ini kembali turun di tahun 2023 menjadi 2,47%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir ke angka 0,300 pada tahun 2022 yang lalu dan turun ke angka 0,280 pada tahun 2023. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,388 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik namun tidak serta merta menurunkan ketimpangan wilayah yang sedikit meningkat ke angka 0,315 dan menjadi 0,319 di tahun 2022. Kondisi ini diprediksi kembali sedikit meningkat ke angka 0,321 di tahun 2023.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pemulihan ekonomi telah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 364,79 ribu jiwa di tahun 2020 menjadi 339,93 ribu jiwa di tahun 2021. Namun kondisi ekonomi global memaksa terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang kembali menambah jumlah penduduk miskin menjadi 343,82 ribu jiwa di tahun 2022. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada tingkat kemiskinan yang sempat berkurang dari 6,04% pada bulan September 2021 menjadi 5,92% di bulan Maret 2022, kembali meningkat ke angka 6,04% di bulan September 2022 namun kembali turun ke angka 5,95% di bulan Maret 2023. Sementara itu walaupun jumlah pengangguran bertambah 158 orang dari tahun 2021 kemudian berkurang sekitar 601 orang menjadi 179.505 orang penganggurandi tahun 2023. Angka ini

menempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang dari 6,52% menjadi 6,28% dan turun ke angka 5,94 di tahun 2023.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional dari dampak rambatan perekonomian global yang semakin bergejolak ke depan. Ketegangan geopolitik dunia semakin memperburuk fragmentasi dan prospek ekonomi dan keuangan global. Berlanjutnya perang Rusia-Ukraina serta pengenaan sanksi terhadap Rusia menyebabkan terbatasnya pasokan dan karenanya sangat tingginya harga energi dan pangan dunia yang menyebabkan melambungnya inflasi global. Hal ini diperparah dengan konflik genosida di Palestina yang melebar ke daerah sekitarnya dan memicu ketegangan di jalur logistik global Laut Merah.

Akibat inflasi global ini akan mendorong bank-bank sentral di negara maju khususnya secara agresif meningkatkan suku bunga dalam mengetatkan kebijakan moneter. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat dan bahkan berisiko resesi seiring dengan menurunnya permintaan agregat karena pengetatan moneter dimaksud dan melemahnya daya beli konsumsi masyarakat karena tingginya inflasi. Persepsi risiko negatif di pasar keuangan global memburuk, mendorong para investor portofolio global menarik dananya dari sekuritas ke alat likuid (fenomena "*cash is the king*"), dan semakin memperburuk dampak rambatan ekonomi dan keuangan global, baik dari jalur perdagangan maupun jalur keuangan, terhadap negara EMEs, termasuk Indonesia.

Sementara itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok serta pembatasan mobilitas terkait Covid-19 di Tiongkok semakin memperburuk gangguan mata rantai pasokan global dan perjalanan wisata Tiongkok ke berbagai belahan dunia. Tingginya fragmentasi politik dan ekonomi serta memburuknya gangguan mata rantai pasokan global tersebut telah menyebabkan dan akan semakin memperlemah pertumbuhan ekonomi global dari sisi penawaran. Sebagai akibat dari fenomena diatas perekonomian dunia ke depan diperkirakan akan melambat disertai dengan meningkatnya risiko resesi. Pertumbuhan dunia kembali direvisi menjadi 2,1% pada tahun 2023 dan cenderung meningkat ke angka 2,4% pada 2024. Semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan, meskipun dengan tingkat yang berbeda.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Desember 2023 disampaikan bahwa kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) secara keseluruhan dinilai yang paling menunjukkan ketahanan dari dampak rambatan global dengan proyeksi pertumbuhan yang stabil sebesar 5,0% pada tahun 2022 dan 2023 dan kemudian membaik menjadi 5,2% pada tahun 2024. Risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan

kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk menurunkan inflasi di masing-masing negara.

Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia semakin solid dengan tumbuh di kisaran 4,7-5,5 persen pada tahun 2024 dan meningkat ke angka 4,8-5,6% di tahun 2025. Kestabilan geopolitik global dan nasional diharapkan tetap terjaga untuk mengejar level pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti sebelum pandemi. Ekonomi Indonesia tumbuh seiring permintaan domestik yang semakin membaik, ekspor yang menguat, dan stabilitas yang terjaga. Stimulus moneter yang ditempuh Bank Indonesia antara lain dengan menjaga suku bunga tetap rendah dan stabilitas nilai tukar.

Mobilitas penduduk yang kembali berjalan normal dan berkontribusi dalam membentuk iklim usaha yang kondusif dalam menopang perekonomian. Peningkatan permintaan domestik juga mendorong kenaikan inflasi yang diproyeksikan berada di kisaran 3±1 persen pada tahun 2023-2024. Hambatan dari sisi pasokan juga menyebabkan kenaikan harga bahan baku, energi, transportasi, dan makanan yang mendorong inflasi. Proyeksi kenaikan inflasi pada tahun 2023 dan 2024 bergantung pada pemulihan ekonomi dan perkembangan harga komoditas global. Pada tahun 2024 ini ekonomi Indonesia diharapkan mampu berakselerasi sejalan kebijakan yang ditetapkan pemerintah seperti percepatan transformasi sektor riil, sinergi stimulus moneter dengan fiskal, transformasi sektor keuangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, dan *green economy*.

Tabel 3.1.
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia 2022-2023

Komponen	2022*	2023**			2023 ^p	2024 ^p	2025 ^p
		I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,04	5,17	4,94	4,5-5,3	4,7-5,5	4,8-5,6
Konsumsi Rumah Tangga	4,93	4,54	5,22	5,06	4,5-5,3	4,6-5,4	4,6-5,4
Konsumsi Pemerintah	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,9-3,7	2,8-3,6	2,8-3,6
Investasi	3,87	2,11	4,63	5,77	4,1-4,9	5,0-5,8	5,2-6,0
Ekspor	16,28	11,94	-2,97	-4,26	-0,5-0,3	-0,4-0,4	6,1-6,9
Impor	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-2,9 - -2,1	-1,1 - -0,3	7,1-7,9

Sumber: BPS, Proyeksi Bank Indonesia

Keterangan: ^p Proyeksi Bank Indonesia
*Angka sangat sementara; **Angka sangat sangat sementara

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,0%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2024 menetapkan

pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,76%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,62%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,0%. Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2025 diperkirakan berada pada angka 4,4 – 5,4 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 membawa kepastian pengambilan kebijakan ioleh pemerintah. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	5,00	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47	34,75	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92	57,94	62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,290	0,289
5	Indeks Williamson	0,316	0,321	0,320	0,319
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,83	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	338,70	330,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,75	5,55
9	IPM	75,16	75,80	76,67	77,41
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	74,22	74,79
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,12	14,13
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,37	9,46
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.130	11.380	11.547	11.719
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	3,50	3,50

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpagan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2025

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Untuk Proyeksi Pendapatan pada tahun 2025, dianalisis berdasarkan dari capaian realisasi pendapatan yang sudah dilalui pada tahun 2023, serta target Pendapatan pada APBD tahun 2024 dan rencana tahun 2025.

Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2025

KODE	URAIAN	PERUBAHAN APBD 2023	REALISASI 2023	APBD 2024	PROYEKSI RAPBD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	6,476,334,990,207	6,263,971,826,408	6,586,576,217,900	7,611,087,000,000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,034,554,065,207	2,784,868,190,769	3,118,242,050,900	2,632,049,454,160
4.1.01	Pajak Daerah	2,463,434,564,594	2,236,722,695,545	2,554,336,907,537	2,271,388,175,331
4.1.02	Retribusi Daerah	22,691,509,656	16,049,240,433	384,295,538,231	360,661,278,829
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117,277,113,555	117,084,599,941	125,495,605,132	125,495,605,132
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431,150,877,402	415,011,654,850	54,114,000,000	54,114,000,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,426,592,807,500	3,464,761,720,139	3,451,310,167,000	3,114,980,012,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,398,660,587,500	3,437,048,050,139	3,422,903,367,000	3,114,980,012,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27,932,220,000	27,713,670,000	28,406,800,000	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15,188,117,500	14,341,915,500	17,024,000,000	17,024,000,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	15,188,117,500	14,341,915,500	17,024,000,000	17,024,000,000

Sumber : BPKAD PProvinsi Sumatera Barat

A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan (RPJMD)

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka Pendanaan (RPJMD Tahun 2021-2026) diasumsikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah yang berkolerasi positif terhadap kemampuan perekonomian Masyarakat di Sumatera Barat diharapkan mengalami peningkatan dalam upaya pencapaian target di RPJMD. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang secara perlahan selalu meningkat dan berada pada tren yang positif pasca Pandemi Covid-19 mencerminkan kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin membaik. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek positif pada target rata-rata pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera Barat dimana pada Tahun 2025 diproyeksi akan tumbuh sebesar 7.2%.
2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer tersebut berupa Dana Bagi Hasil, DAU, Dana Alokasi Khusus dan dana-dana transfer lainnya. Sesuai dengan RPJMD maka pada Tahun 2025 pendapatan dana transfer di proyeksikan naik sebesar 1.63%. Proyeksi penerimaan dana transfer tidak dapat dipastikan terealisasi sesuai RPJMD tetapi realisasinya mengacu kepada penetapan alokasi oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang juga merupakan Pendapatan dari Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat/sejenis. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 dan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, organisasi dan swasta sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Sesuai RPJMD pertumbuhan penerimaan pada komponen ini pada Tahun 2025 diharapkan tumbuh 1.36 %.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dituangkan pada Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	6.390.337,20	6.364.149,76	6.706.054,85	6.122.357,61	6,263,971.83
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.328.432,87	2.255.072,99	2.551.900,55	2.848.247	2,784,868.19
Pendapatan Pajak Daerah	1.872.933,99	1.809.809,96	2.060.852,02	2.407.807	2,236,722.70
Pendapatan Retribusi Daerah	19.475,96	7.926,60	9.102,05	11.889	16,049.24
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.938,38	94.747,26	81.266,83	100.651	117,084.60

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Lain-lain PAD Yang Sah	341.084,54	342.589,17	400.679,64	461.211	415,011.65
PENDAPATAN TRANSFER	4.045.668,56	4.046.974,19	4.128.407,47	3.188.121	3,464,761.72
Dana Perimbangan	4.027.349,12	4.002.552,88	4.077.691,92	3.160.399	3,428,427.03
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	106.119,22	145.620,97	182.002,55	176.649	186,817.96
Dana Alokasi Umum	2.076.398,19	1.891.323,98	1.952.740,33	1.877.995	1,989,337.43
Dana Alokasi Khusus	1.844.831,70	1.965.607,94	1.844.831,70	1.105.756	1,252,271.63
Transfer Dari Pusat Lainnya	18.319,45	44.421,31	50.715,54	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.319,45	44.421,31	50.715,54	-	-
Transfer Antar Daerah					27,713.67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.235,77	62.102,58	76.462,38	85.990	14,341.92
Pendapatan Hibah	15.024,97	57.535,78	-	77.319	14,341.92
Bantuan Keuangan	1.210,80	4.566,80	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	8.671	-

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 terlihat sangat fluktuatif. Penurunan pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat terjadi pada Tahun 2020, yakni penurunan sebesar -0,41 % dan Tahun 2022 sebesar -8,70%. Sedangkan kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi Tahun 2021 sebesar 5,37 % dan tahun 2023 sebesar 2.31%.

Adapun penyebab terjadinya fluktuasi pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2020 terjadinya penurunan besaran realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari sebelumnya (Tahun 2019) sebesar Rp.2.076.398.191.000,- menjadi sebesar Rp.1.891.323.979.000 atau turun sebesar - 8,91%.
2. Penurunan realisasi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) juga kembali terjadi pada Tahun 2022 dari sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp.1.952.740.330.000,- menjadi sebesar Rp.1.877.995.000.000,- pada tahun 2022 atau penurunan realiasi DAU sebesar -3,83 %.

3. Terjadinya penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak / bagi Hasil Sumber Daya Alam dari sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar Rp.182.002.550.000,- menjadi sebesar Rp.176.649.000.000,- pada Tahun 2022 atau turun sebesar -2,94 %.
4. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya pendapatan masyarakat pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang berakibat kepada kepatuhan dan kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penurunan pendapatan dari pajak daerah sebesar - 3,15 %.

Akibat adanya penurunan alokasi Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2020, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai program dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari upaya tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil melakukan lompatan kenaikan penerimaan PAD setiap tahunnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar sekitar 7.52% dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti urusan pendidikan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu alokasi pembiayaan DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan tersebut.

Adapun realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
BELANJA DAERAH	6,551,278.88	6,408,293.79	6,468,906.65	6,304,304.21	6,353,750.94	(0.75)
Belanja Operasi	4,576,156.01	4,460,427.08	4,728,173.16	4,137,693.97	4,422,018.65	(0.54)
Belanja Pegawai	2,170,912.46	2,081,587.32	2,093,837.76	2,078,501.67	2,195,331.45	0.34
Belanja Barang dan Jasa	1,524,405.21	1,229,706.71	1,703,252.65	1,980,942.86	1,966,520.51	8.69
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	880,838.34	1,149,133.05	931,082.75	67,416.43	260,166.69	51.16
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	10,833.00	-	
Belanja Modal	1,062,230.45	736,888.36	666,352.12	965,288.14	990,627.83	1.82
Belanja Tidak Terduga	1,945.91	455,660.79	71,352.13	197.19	-	
Belanja Tidak Terduga	1,945.91	455,660.79	71,352.13	197.19	-	
Belanja Transfer	910,946.51	765,317.56	1,003,029.24	1,206,916.56	941,104.46	3.34

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	877,337.64	764,437.56	963,100.94	1,123,088.17	908,031.79	2.65
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	33,608.87	880.00	39,928.30	83,828.39	33,072.68	1,097.33
SURPLUS/ (DEFISIT)	(160,941.68)	(44,228.03)	237,146.80	(182,496.03)	(89,779.11)	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selama periode 2019 s.d 2023 pertumbuhan rata-rata realisasi belanja daerah 0.75% namun bila dilihat secara tahunan terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi , dimana pada tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,95%, sedangkan untuk tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 2,54% dan naik lagi pada tahun 2023 sebesar 0.78%. Realisasi belanja tersebut di atas terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 3.5
Proporsi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025 (Rp juta)

Uraian	2024	2025
BELANJA OPERASI	4,686,643,781,871	3,052,946,104,405
Belanja Pegawai	2,596,150,706,205	2,596,150,706,205
Belanja Barang dan Jasa	1,808,037,125,332	374,862,999,000
Belanja Subsidi	6,500,000,000	6,500,000,000
Belanja Hibah	275,955,950,334	75,432,399,200
BELANJA MODAL	782,793,429,669	3,789,249,601,542
BELANJA TIDAK TERDUGA	46,942,466,244	20,000,000,000
BELANJA TRANSFER	1,301,640,715,165	716,303,497,137
BELANJA DAERAH	6,818,020,392,949	6,818,020,392,949

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2024 ditargetkan belanja daerah sebesar Rp. 6,818 Triliun dengan komposisi 1) Belanja operasi sebesar Rp. 4,686 Triliun yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah, 2) belanja Modal, 3) Belanja tidak terduga, dan 4) Belanja Transfer.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Rp juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	563,774.67	337,485.66	261,533.76	483,680.53	289,279.69	(4.47)
Penggunaan SiLPA	502,062.67	332,762.66	261,533.76	483,680.53	289,279.69	(2.59)
Pinjaman Dalam Negeri	61,712.00	4,723.00	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	74,441.10	32,407.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	(19.21)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20,413.10	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	(19.21)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	54,028.00	12,407.00	-	-		
PEMBIAYAAN NETTO	489,333.57	305,078.66	246,533.76	463,680.53		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI	328,391.90	256,028.62	483,680.53	281,184.50		8.34
KOREKSI SiLPA	-	-	-	-		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	328,391.90	256,028.62	483,680.53	281,184.50		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari realisasi penerimaan pembiayaan dapat dilihat bahwa pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4.47%. Penurunan yang sangat signifikan adalah pada tahun 2021 yakni sebesar – 22.51% dan tahun 2023 sebesar 40.19%. Pelampaun penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar daripada dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah daripada anggaran.

B. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 merupakan penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Tabel 3.7
Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2025 (Rp Juta)
1	Pendapatan Asli Daerah	3.082.234
2	Pendapatan Transfer	4.431.356
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	97.497
	Jumlah Pendapatan Daerah	7.611.088

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, maka proyeksi pendapatan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp.7.611.088.000.000,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.082.234.000.000,- ,Pendapatan Transfer sebesar Rp. 4.431.356.000.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.97.497.000.000,-

Dari ke-3 (ketiga) komponen Pendapatan Daerah tergambar bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen utama pendapatan daerah (58 %), selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 41 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi sebesar 1 % terhadap pendapatan daerah Tahun 2025.

Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Proyeksi Tahun 2025 (Rp. Juta)
PENDAPATAN	5,764,054
Pendapatan Asli Daerah	2,632,050
Pendapatan Transfer	3,114,980
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17,024.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Secara akumulatif proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp.1.847.034.000.000 dari proyeksi RPJMD yakni sebesar - 24.27% yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi/ Target Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
(dalam Rp. Juta)

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2025 (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
PENDAPATAN	7.611.088	5,764,054	-1,847,034	
Pendapatan Asli Daerah	3.082.234	2,632,050	-450,184	
Pendapatan Transfer	4.431.356	3,114,980	-1,316,376	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	97.497	17,024	-80,473	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.10
Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2025 (Rp Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2025 (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Ket
BELANJA OPERASI	5.550.617	3,052,946	(2,497,671)	
Belanja Pegawai	2.628.823	2,596,151	(32,672)	
Belanja Barang dan Jasa	2.006.607	374,863	(1,631,744)	
Belanja Subsidi	6.900	6.500	(400)	
Belanja Hibah	908.287	75,432	(832,855)	
BELANJA MODAL	1.065.835	3,789,250	2,723,415	
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000	20.000	(30,000)	
BELANJA TRANSFER	946.656	716,304	(230,352)	
TOTAL BELANJA DAERAH	7.613.108	6,818,020	(795,088)	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Memperhatikan tabel di atas secara total proyeksi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp.6.818.020 juta, mengalami penurunan sebesar Rp.795.088 juta atau 10,44% dari belanja daerah yang diprediksi dalam RPJMD untuk Tahun 2024 sebesar Rp.7.613.108 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan Belanja Hibah sebesar 91,70% dimana pada RPJM sudah diproyeksikan sebesar Rp. 908.287juta sedangkan dalam proyeksi Tahun 2025 sebesar Rp. 75,432 juta. Hal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi belanja Infrastruktur 40% dari total belanja daerah dan belanja Earmak lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Kenaikan belanja tidak terduga sebesar Rp.20.000 juta atau 40,00% guna antisipasi dalam menghadapi keadaan darurat mendesak baik disebabkan bencana alam, bencana non alam maupun keadaan yang tidak direncanakan lainnya.

C. Analisis Keuangan Daerah Dalam Penyusunan RKPD

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 merupakan Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Dan pada sub bab ini akan dijabarkan dengan detail melalui arah kebijakan keuangan daerah melalui pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah akan menentukan hasil yang dapat dicapai daerah. Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa sumber utama PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah tersebut dilakukan berdasarkan *Self assessment system* dan *Official Assessment System*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyeter, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dari 5 jenis Pajak Daerah provinsi, 3 jenis diantaranya dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Dengan demikian, potensi ketiga jenis Pajak Daerah ini dapat dihitung dengan pasti berdasarkan besaran ketetapan. Besar kecilnya peningkatan ketiga sumber pendapatan ini sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. Seandainya perekonomian Indonesia segera pulih, maka masyarakat membutuhkan kendaraan baru dan PLN menggunakan Air Permukaan yang lebih banyak untuk menghasilkan listrik sehingga pajak dari ketiga sumber ini juga meningkat.

Kelemahan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari ketiga sumber Pendapatan Asli Daerah ini mungkin hanya dalam proses pemungutan, terutama disebabkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan inilah yang harus ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan razia kendaraan bermotor dan memberikan ampunan denda atau pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah provinsi lainnya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok yang dipungut berdasarkan *self assessment system*. Pajak rokok merupakan pajak daerah yang pemungutannya bersamaan dengan pungutan cukai rokok yang dilakukan oleh kementerian keuangan c.q Dirjen Bea Cukai. Tarif pajak rokok adalah 10% dari cukai rokok yang pendistribusiannya ke daerah didasarkan pada koefisien jumlah penduduk. Sedangkan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan daerah dari kedua sumber ini relatif terbatas karena sudah dipungut oleh wajib pungut yang kompeten dan terpercaya.

Potensi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun demikian, tidak banyak kekayaan daerah yang dapat digunakan untuk menghasilkan retribusi daerah. Karena, kebanyakan aset tersebut digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan sehingga tidak mungkin digunakan untuk meningkatkan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menginventaris ulang seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pemanfaatan dan atau optimalisasi penggunaannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 BUMD, namun tidak semua BUMD tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Bagaimana pun laba atau rugi yang dihasilkan BUMD tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Indonesia. BUMD yang saat ini masih dapat memberikan PAD dalam masa pandemic-COVID 19 hanya dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT.Bank Nagari), Askrida, dan Jamkrida Sumatera Barat. Kecendrungan atau tren deviden yang diterima Provinsi Sumatera Barat pun mengalami penurunan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan kinerja, terutama BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, antara lain dengan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD.

Lain-lain PAD yang Sah diharapkan dapat ditingkatkan melalui RSUD yang saat ini sudah dikelola sebagai BLUD. Walaupun peningkatan pendapatan RSUD terpengaruh dengan Sistem Rujukan Berjenjang yang diterapkan BPJS kesehatan saat ini, namun peningkatan pelayanan yang diberikan oleh RSUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pelayanan Kesehatan Non-BPJS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk mendapatkan sumber dana DAK. Dengan demikian, arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam 2021-2026 adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
 - a. Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - b. Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermonotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

- c. Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT.
 - d. Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu.
 - e. Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu.
 - f. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan.
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dit Lantas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat.
 - h. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan baik pelayanan *online* maupun pelayanan yang dilakukan secara *offline*.
 - i. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan.
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT.
 - k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya.
 - l. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak.
 - m. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
 3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
 4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.

5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
9. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
2. Selanjutnya direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
3. Alokasi belanja untuk mendanai alokasi Belanja Operasi dan Belanja Transfer untuk mendukung program prioritas di provinsi yang bukan kewenangan provinsi seperti untuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa/nagari, belanja hibah dan bantuan sosial
4. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, mendanai pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan Pendapatan Daerah.

Disamping itu kebijakan alokasi belanja pada rancangan APBD Tahun 2025 adalah:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti urusan pendidikan 20% dari APBD, urusan kesehatan, belanja Peningkatan Kompetensi SDM belanja urusan wajib lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan belanja modal dari APBD yang lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Daerah mengalokasikan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi yang diutamakan penggunaannya untuk perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja bukan Penerima upah (PBPU) dan bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan dalam kepesertaan JKN menuju *Universal Health Coverage*
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan dan monitoring mengalokasikan anggaran untuk Inspektorat/APIP. Untuk itu dalam rangka mendanai program dan kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat terus diupayakan pengalokasian anggaran mencapai sebesar 0,60% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan
4. Selain itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan belanja yang merupakan mandatory dari pemerintah pusat antara lain pemenuhan SPM pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Sosial. Selain itu juga di fokuskan serta mendukung dalam penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem serta beberapa mandatory lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengalokasikan dukungan anggaran program strategis yang diamanatkan peraturan perundangan antara lain: 1) dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); 2) dalam rangka pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai peningkatan Indeks Inklusif keuangan; 3) dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi

sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, dengan mendukung tugas TPID serta pengendalian harga barang dan jasa.

6. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memperhatikan alokasi anggaran dalam rangka memajukan perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian arsip negara, penganggaran program inovasi daerah, serta alokasi anggaran dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan grand design reformasi birokrasi 2021-2025.
7. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan mempedomani agenda / prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJM Nasional yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
8. Menganggarkan untuk program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
9. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah serta infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Adapun proyeksi belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024 s/d 2025

URAIAN	BELANJA DAERAH TAHUN 2024 (Rp)	PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	+/- (Rp)	%
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASI	4,686,643,781,871	3,052,946,104,405	(1,633,697,677,466)	(34.86)
Belanja Pegawai	2,596,150,706,205	2,596,150,706,205	-	-
Belanja Barang dan Jasa	1,808,037,125,332	374,862,999,000	(1,433,174,126,332)	(79.27)
Belanja Subsidi	6,500,000,000	6,500,000,000	-	-
Belanja Hibah	275,955,950,334	75,432,399,200	(200,523,551,134)	(72.67)
BELANJA MODAL	782,793,429,669	3,789,249,601,542	3,006,456,171,873	384.07
BELANJA TIDAK TERDUGA	46,942,466,244	20,000,000,000	(26,942,466,244)	(57.39)
BELANJA TRANSFER	1,301,640,715,165	716,303,497,137	(585,337,218,028)	(44.97)
Total Belanja	6,818,020,392,949	6,818,020,392,949	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dan jumlah setiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen

rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.

3. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
5. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.
7. Melakukan alternatif pembiayaan pembangunan lainnya dengan dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta menerbitkan obligasi daerah atau Sukuk daerah.

Adapun proyeksi pembiayaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024 s/d 2025

	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI RAPBD 2025	TAMBAH/KURANG	%
	PEMBIAYAAN DAERAH	231,444,175,049	130,000,000,000	(101,444,175,049)	(43.83)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251,444,175,049	150,000,000,000	(101,444,175,049)	(40.34)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	251,444,175,049	150,000,000,000	(101,444,175,049)	(40.34)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan serta memperhatikan arahan dan direktif Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu, penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan usulan-usulan Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
2. Relevansi dengan permasalahan dan isu strategis Nasional yang terkait dengan permasalahan dan isu strategis Provinsi Sumatera Barat, yakni isu ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia antar wilayah, Layanan infrastruktur dasar yang masih terbatas dan belum menyeluruh. Daya saing, nilai tambah dan produktifitas UMKM dan kegiatan pariwisata relatif rendah dan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relative rendah.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJMD yang di fokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berpegang pada filosofi *AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, peningkatan produktifitas sektor pertanian, peningkatan kontribusi perdagangan dan industri pengolahan, peningkatan produktifitas sektor pariwisata sebagai upaya alternatif baru peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, pengembangan infrastruktur yang mendukung produktifitas pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil, dengan tetap difokuskan pada sektor utama distribusi PDRB di Sumatera Barat yakni sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan serta pariwisata.
5. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor Keputusan Gubernur

Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

6. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah dan isu sektoral.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan **tema RKP Tahun 2025** adalah :

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dengan target Tahun 2025

1. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat Pengangguran (%) sebesar 4,5 – 5,0 %
3. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia (nilai) sebesar 0,56
6. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%) sebesar 38,6%
7. Nilai Tukar Petani (kumulatif) sebesar 113 – 115
8. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) sebesar 104 - 105

Dalam rangkaian pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, maka dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, (3) peningkatan kesempatan kerja, dan (4) perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional, maka ditetapkan target sasaran untuk masing-masing regional dan Provinsi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1

Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025

INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET PADA RKP 2025		
	NASIONAL	PULAU SUMATERA	SUMATERA BARAT
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	4,8 – 5,1	4,69 – 5,19
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	-	4,50 – 5,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,5 – 5,0	4,2 - 4,7	5,37 – 5,76
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	-	0,57
Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	-	0,274 – 0,279
Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	-	52,62

Sumber Data : RKP 2025

1.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, dan juga mengedepankan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta merupakan implementasi dari prinsip Pembangunan Tujuan Berkelanjutan yakni *no one left behind*. Tujuan ini juga terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Mewujudkan Kesejahteraan Petani”** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat”** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang

memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata”** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dan mengedepankan pemerataan wilayah dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangun ketahanan terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan dukungan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu gejolak ekonomi baik secara nasional maupun di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2025, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi **Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025** yakni:

“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi Produktifitas Sektor Strategis ekonomi tetap difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
2. Akselerasi produktivitas sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan keamanan pangan di daerah serta mendukung kemandirian pangan nasional. Akselerasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang dengan meningkatkan produksi padi dan jagung serta tanaman strategis lainnya, sehingga dengan adanya peningkatan produksi pangan akan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi, dan menjaga ketahanan pangan dimasa depan.
3. Akselerasi produktivitas sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan kompetitif industri lokal yang bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri kecil dan menengah melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan akses ke pasar dan sumber daya.

4. Akselerasi produktivitas sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) serta wisatawan domestik (wisnus) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pariwisata guna menghadapi tantangan perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan ini, perlu diupayakan untuk meningkatkan pelayanan dan kreativitas pariwisata, serta meningkatkan destinasi pariwisata berkualitas dan mengamplifikasi dampak pelaksanaan event lokal, nasional dan internasional sehingga diharapkan sektor pariwisata mampu menopang secara signifikan peningkatan kinerja perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di masa depan
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja
 - b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat
 - c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2025 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	2025		
		RPJMD	RKP	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	4,69 – 5,19	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	35,44	-	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	56,13	-	62,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,13	5,37 – 5,76	5,55

No	Indikator Makro Pembangunan	2025		
		RPJMD	RKP	RKPD
5	IPM	74,07	-	77,41
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,35	-	74,79
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,09	-	14,13
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,47	-	9,47
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.592	-	11.719
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,90	4,0 – 4,5	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	347,27	-	330,84
8	Gini Rasio	0,289	0,274 – 0,279	0,289
9	Indeks Williamson	0,307	-	0,307

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Tahun 2025 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024, perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada RKP Tahun 2025.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai RKP Tahun 2025
2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat
3. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023.
4. Sasaran pokok arah kebijakan pembangunan tahun 2025, yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 dilaksanakan dalam koridor pencapaian Prioritas Nasional (PN). Adapaun arah kebijakan masing-masing Prioritas Nasional (PN) tahun 2025 yakni :

1. PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia

2. PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Prioritas Nasional 2 untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Prioritas Nasional 3 untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Prioritas Nasional 4 untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

6. PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

7. PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

8. PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Pada tahun 2025 kebijakan Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2025

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdapat pada Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketentramanan dan Ketertiban Umum serta Sosial, yang kemudian dalam target serta pelaksanaannya berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian diatur lebih detail oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian secara lebih teknis pengaturan perhitungan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diatur dengan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 bahwa Prioritas Pertama penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :

- a. Belanja wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dalam hal ini adalah pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial
- b. Belanja mengikat yakni belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahunnya dan penjabaran lebih detail bahwa belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat jenis pelayanan dasar, penerima layanan dasar dan target serta mutu minimal layanan dasar yang harus dipenuhi setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2025				
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%	Setiap tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap tahun
Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
Bidang Pekerjaan Umum				
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun
Bidang Sosial				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	Setiap tahun
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	Setiap tahun

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yakni :

A. Bidang Pendidikan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- Pemenuhan terhadap Standar satuan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- Penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

- d. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus yang terdiri dari 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- e. Pemenuhan Standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus
- f. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, yakni :
- Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- g. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni :
- Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat yang relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- h. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, yakni :
- Pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

- Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

B. Bidang Kesehatan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Provinsi secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
- Menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana Provinsi pada saat tanggap darurat dengan melakukan :
 - mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan rujukan
 - menyediakan seluruh kebutuhan logistik kesehatan.
- Menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi melalui :
 - melakukan kajian epidemiologis penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
 - penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
 - melakukan penyuluhan
 - melakukan pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
 - melakukan penanganan jenazah, jika diperlukan
 - pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
 - melakukan upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dengan penerima layanan yakni penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, dengan penerima pelayanan yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pemberian pelayanan informasi serta bantuan teknis.

Pemberian bantuan teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni : pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan/atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. Pemenuhan terhadap standar operasional prosedur Satpol PP.
- b. Pemenuhan terhadap standar sarana prasarana Satpol PP berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemenuhan terhadap standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat berupa standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pemenuhan terhadap standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
 - pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada

- Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

F. Bidang Sosial

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan pengasuhan, permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, penyediaan nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, . pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau penyediaan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial melalui permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau pemulasaraan.
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama/cottage yang mudah di akses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan/atau pemulangan ke daerah asal.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi melalui penyediaan permakanan, sandang,

tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pemberian dukungan psikososial.

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun ketiga (2023) digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2025 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni **“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkeaktivitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan

sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.5

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Tahun 2025

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,79
2	Menurunnya prevalensi stunting	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12,50
3	Meningkatnya kualitas Pendidikan	
	Rata-rata lama sekolah	9,47
	Harapan Lama Sekolah	14,13
4	Meningkatnya daya saing masyarakat	
	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,85

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
3. Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
4. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan melibatkan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
6. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi

sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting

7. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
8. Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasana Pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.
9. Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata
10. Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial.
11. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasis potensi daerah.

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Program Pembangunan mendukung
Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,
Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil Dan Berdaya Saing				
Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	80	Dinas Kesehatan
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	190	Dinas Kesehatan
	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	daerah	2	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA	kabupaten/kota	8	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	18	Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	39	Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	98	Dinas Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	8,6	Dinas Kesehatan
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	85	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	90,79	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	89	Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit	%	85	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan	strata	A	Dinas Kesehatan
	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	580	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%	95	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%	50	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	50	Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	50	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	50	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	%	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali emas dalam event nasional	medali	29	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	%	1	Dinas Pemuda Dan Olahraga

Sasaran 2 : Menurunnya Prevalensi Stunting

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	80	Dinas Kesehatan
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	190	Dinas Kesehatan
	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	daerah	2	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA	kabupaten/kota	8	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	18	Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	39	Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	98	Dinas Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	8,6	Dinas Kesehatan
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	85	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	90,79	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	89	Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit	%	85	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	88	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	295,31	Dinas Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	84,5	Dinas Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	28	Dinas Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	84,5	Dinas Pangan
Program Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Dasawisma Mandiri	Dasawisma	12.800	Dinas Pemberdayaan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				Masyarakat Dan Desa
	Jumlah KAN yang aktif	lembaga adat	500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Jumlah LPM Mandiri	LPM	37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	2.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	65,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Daging	%	1,62	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	78	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	90	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan				
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah	%	97,7	Dinas Pendidikan
	APM Pendidikan Menengah	%	73,65	Dinas Pendidikan
	APK SLB	%	56,57	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	51	Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga	%	80	Dinas Pendidikan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	kependidikan yang dipetakan			
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	%	66	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	dokumen	12	Dinas Pendidikan
	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	24	Dinas Pendidikan
Sasaran 4 : Meningkatnya Daya Saing Masyarakat				
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah	%	97,7	Dinas Pendidikan
	APM Pendidikan Menengah	%	73,65	Dinas Pendidikan
	APK SLB	%	56,57	Dinas Pendidikan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	%	36,99	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	12,98	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	%	80	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	83,05 / 3,45	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	87,27	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	80	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	62,5	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase SKPD yang terinovatif	%	40	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	12	Badan Penelitian Dan Pengembangan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Permasalahan masih rendahnya angka capaian penemuan dan pengobatan TBC di Sumatera Barat juga mendapatkan perhatian yang khusus. Untuk itu dalam rangka peningkatan penemuan dan pengobatan TBC yang juga secara langsung mendukung capaian Umur Harapan Hidup (UHH), sebagaimana juga mendukung pencapaian target serta arah kebijakan pada prioritas ini maka terdapat salah satu inovasi yang dilaksanakan yakni Inovasi SAHABAT PARU (Satu Hari Periksa TBC Tuntas di RS Paru).

Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan publik di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yang menitikberatkan pada percepatan penyelesaian layanan diagnosa Tuberkulosis pada pasien yang sebelumnya dilakukan dalam 2 hari kunjungan pelayanan menjadi dapat dilakukan dalam 1 hari kunjungan pasien, sehingga pasien tidak perlu datang kembali untuk mengantarkan dahak pada kunjungan ke-2. Hal ini dapat mengurangi kegagalan atau keterlambatan penegakan diagnosa tuberkulosis pada pasien terduga tuberkulosis.

Dengan adanya inovasi ini maka beberapa manfaat yang diperoleh yakni :

1. Meningkatnya temuan kasus tuberkulosis baik secara bakteriologis maupun radiologis
2. Mengurangi penularan kasus tuberkulosis di wilayah Sumatera Barat dengan terjadinya pengurangan resiko penularan dari pasien terduga TBC yang tidak menuntaskan pemeriksaan dahak.

Pelaksanaan pelayanan ini melibatkan elemen pelayanan rumah sakit dari petugas admisi (pendaftaran), rekam medis, perawat poli paru, radiografer, radiolog, tim Poli DOTS (dokter dan perawat), ahli teknologi laboratorium medik (ATLM), patologi/mikrobiologi, dan pulmonologi. Sinergi yang sistematis dan pelayanan prima berbasis kompetensi menghasilkan

diagnosis yang komprehensif dan bermanfaat bagi pasien dan keluarga serta lingkungan. Proses digitalisasi inovasi SAHABAT PARU ini dibuat dalam bentuk scan QR-Code yang berisikan informasi layanan inovasi SAHABAT PARU, serta konsultasi terkait inovasi pelayanan SAHABAT PARU.

2. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling tolong menolong membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

Selain itu, pada prioritas pembangunan yang kedua ini juga menekankan akan pembangunan kebudayaan, peningkatan literasi masyarakat serta peningkatan kualitas pembangunan keluarga serta pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh semua pihak tanpa ada yang merasa terdiskriminasi atau termarginalkan, yang diyakini hal tersebut merupakan wujud dari hasil nyata diterapkannya nilai-nilai filosofi ABS SBK di tengah-tengah masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	
	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,90
2	Meningkatnya Budaya Literasi	
	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	17
3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Indeks Pembangunan keluarga	65,54
	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,53
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,11
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya
5. Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
7. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
8. Meningkatkan dan menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Program Pembangunan mendukung
Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah
Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah				
Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Yang Berlandaskan ABS SBK				
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah	%	97,7	Dinas Pendidikan
	APM Pendidikan Menengah	%	73,65	Dinas Pendidikan
	APK SLB	%	56,57	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	51	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	%	85	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	83	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	63,16	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	orang	25	Dinas Sosial
	Persentase Data Fakir Miskin yang valid	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	persen	50	Dinas Sosial
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional	23	Dinas Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen	6	Dinas Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Cagar Budaya	26	Dinas Kebudayaan
	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Cagar Budaya	15	Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	15	Dinas Kebudayaan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	45000	Dinas Kebudayaan
Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	dokumen	6	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Lembaga	13	Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	nilai	2,74	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	nilai	3,13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	nilai	3,04	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Literasi				
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	dokumen	12	Dinas Pendidikan
	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	24	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	15	Dinas Kebudayaan
	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	45000	Dinas Kebudayaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	%	1,72	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	%	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	indeks	71,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	%	93,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupaten/Kota	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	%	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Prevalensi KB	%	56,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	65,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dalam rangka peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) serta menumbuhkembangkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya yang menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan, maka perlu dilakukan

beberapa upaya perlindungan terhadap warisan budaya Minangkabau yang salah satunya adalah dengan melakukan inventarisasi kekayaan budaya dan peradaban yakni perhiasan tradisional Minangkabau. Perhiasan merupakan bagian dalam Pakaian Tradisional Perempuan Minangkabau yang dipakai pada saat acara dan upacara adat. Tingginya peradaban dan kebudayaan suatu suku bangsa terlihat dari corak, model, dan kualitas pakaian adat beserta perhiasannya yang dipakai. Perhiasan bagi perempuan Minangkabau bukan hanya sebagai hiasan dalam berpakaian, tetapi memiliki makna/arti sekaligus sebagai simbol identitas dari warisan budaya.

Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan mendokumentasikan berbagai corak pakaian (khususnya perhiasan tradisional) perempuan Minangkabau melalui Inovasi penyusunan dan penerbitan BUDI PETRA PERMIKA (Buku Digital Perhiasan Tradisional Perempuan Minangkabau). Buku digital ini memiliki nilai penting dalam upaya pelestarian warisan budaya, agar generasi hari ini dan yang akan datang mengetahui dan memahami tentang fungsi dan makna dari perhiasan tersebut.

Inovasi ini memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi yakni sebagai sarana edukasi bagi generasi penerus dan mengantisipasi terjadinya degradasi nilai dan bentuk yang akan berpengaruh pada fungsi dan pemaknaan perhiasan tradisional perempuan minangkabau. Perhiasan ini juga sebagai simbol atau menggambarkan status sosial di tengah masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hasil kerajinan yang diproduksi tentang perhiasan.

3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	
	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,60
	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	105,03
	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	54.838
	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	44.158
	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	55.418
	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5
2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	
	Indeks Ketahanan Pangan	82,05
3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	
	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
6. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
7. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
8. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
10. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional
11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing

12. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
13. Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian.

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Program Pembangunan mendukung
Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan,
Peternakan Dan Perikanan Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan				
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.650	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	64,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	25.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	350	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	1,11	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah sarana penangkapan ikan	unit	1.768	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	unit	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	dokumen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	230.081	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	3,78	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	295.226	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB	unit	80	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan	kab/kota	19	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan budidaya laut	ton	85	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	90	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	8,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	20.832	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	42,4	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Daging	%	1,62	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Peternakan	%	20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	5,19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,54	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	10	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	orang	1.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	59,69	Dinas Kehutanan
	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.507,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5,2	Biro Perekonomian
	Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	Biro Perekonomian
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	62,5	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase SKPD yang terinovatif	%	40	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	12	Badan Penelitian dan Pengembangan
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan				
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	295,31	Dinas Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	84,5	Dinas Pangan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	28	Dinas Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	84,5	Dinas Pangan
Sasaran 3 : Meningkatkan Pendapatan Petani Hutan				
Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	59,69	Dinas Kehutanan
	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	10	Dinas Kehutanan
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sungai	3	Dinas Kehutanan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan maka sejumlah tantangan dan masalah perlu diatasi. Beberapa permasalahan antara lain seperti fluktuasi produksi pertanian, terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian yang modern, dan perubahan iklim serta belum maksimalnya pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air/Irigasi serta belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air dapat mempengaruhi ketersediaan pangan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut maka dilaksanakan inovasi LIHAI (Laporan Informasi Harian Irigasi) dalam rangka memberikan layanan informasi mengenai kinerja dan kondisi irigasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini

Setelah adanya Inovasi LIHAI, maka proses pelaporan OP menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan Aplikasi Google Data Studio. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dikeluarkan inovasi kebijakan sistem monitoring dan pelaporan kinerja Petugas OP irigasi wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk sebuah aplikasi. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk proses pengolahan data secara elektronik untuk kemudahan, kecepatan dan akurasi data yang tepat dalam bentuk data yang terintegrasi dalam aplikasi dan dapat mengakomodir kebutuhan dengan cepat dan tanpa mengenal batasan tempat dan waktu secara online 24 jam.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi adalah mengenalkan petani pada sistem intensifikasi tanaman padi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Pengelolaan tanaman terpadu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil padi dan efisiensi masukan produksi dengan memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Melalui usaha ini diharapkan : (1). Kebutuhan beras nasional dapat dipenuhi ; (2). Pendapatan petani padi dapat ditingkatkan; dan (3). Usaha pertanian padi dapat berkelanjutan Sebagai perwujudan penyediaan bahan pangan khususnya beras yang mengacu pada ketahanan pangan nasional, merupakan kewajiban kelompok tani sebagai pelaku utama yang perlu difasilitasi dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada petani harus dilakukan melalui pelaksanaan dan sosialisasi teknologi dan inovasi baru yang salah satunya adalah penyuluhan secara teratur dan berkesinambungan.

Salah satu inovasi untuk dalam pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yakni dengan inovasi Sekolah Lapang Padi Organik, yang juga merupakan upaya mewujudkan sistem pertanian organik di Sumatera Barat sebagaimana diamanatkan dalam Permentan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggagas sekolah lapang ini untuk mengubah perilaku budidaya padi pada petani.

Peningkatan gaya hidup sehat yang semakin membudaya yang ditandai dengan tren "*back to nature*" telah membuat peningkatan permintaan pangan organik. Pangan organik dihasilkan dari budidaya pertanian secara organik dengan menggunakan bahan alami, tanpa menggunakan bahan kimia sintetis, dengan tujuan utama untuk menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta tidak merusak lingkungan. Melembaganya gaya hidup sehat secara internasional memberikan syarat bahwa produk pertanian harus memiliki tiga kriteria yaitu atribut aman dikonsumsi (food safety attributes), kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan ramah lingkungan (eco-labelling attributes).

Hingga saat ini terjadi kesenjangan antara permintaan pasar dengan produksi beras organik, sehingga kelompok tani tersebut baru dapat memenuhi permintaan pasar untuk kalangan terbatas. Beras organik yang dihasilkan tidak mengalami kendala dalam pemasaran, bahkan kelompok tani mengalami kekurangan produksi karena tingginya permintaan pasar. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produksi beras organik tersebut adalah dengan melakukan Sekolah Lapang Pertanian Organik (SL-PO).

Diharapkan dengan adanya sekolah lapang ini maka permasalahan dalam produksi beras organik dapat diatasi secara bertahap dengan semakin meningkatnya kelompok tani yang melakukan budidaya padi organik, demikian juga pemahaman petani yang belum

membudidayakan padi secara organik akan meningkat sehingga termotivasi untuk melakukan budidaya padi organik.

4. Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusat Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas meningkatkan usaha perdagangan Dan industri kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	5,63
2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	401
3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	
	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,28
	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	4,5
4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	
	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	173.711
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	
	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	10,50
6	Meningkatnya peran ekonomi digital	
	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	7,25

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
2. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
3. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
4. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
5. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
7. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan *e-commerce* yang telah ada.
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Program Pembangunan mendukung
Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah
Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital				
Sasaran 1 : Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan				
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	6,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.507,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 2 : Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah				
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	81	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 3 : Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UMKM Yang Sejahtera				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	3,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	67	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.650	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	koperasi	80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	18	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
Sasaran 4 : Terciptanya 100.000 Entrepreneur Dari Berbagai Sektor				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	65,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.650	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	18	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	8,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	20.832	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	42,4	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	596	Dinas Pariwisata
	Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	Dinas Pariwisata
Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	10	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi				

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	83,05 / 3,45	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	87,27	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	6,7	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	80	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 6 : Meningkatnya Peran Ekonomi Digital				
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk UMKM kedepannya maka salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi UMKM (PLUT KUMKM) Sumatera Barat yakni menyediakan layanan mobile melalui inovasi Mobil Klinik Koperasi UMKM (MoNik KUMKM) dengan target utama yakni pelaku UMKM millennial, sesuai dengan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, yaitu

terciptanya 100.000 millenial entrepreneur, woman entrepreneur, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya.

Dengan inovasi MoNik KUMKM ini maka PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat meraih juara 2 PLUT Ter-Hebat dari 74 PLUT se-Indonesia yang dapat memberdayakan pelaku UMKM dalam kemudahan berusaha. MoNik KUMKM menjangkau UMKM untuk mengatasi beberapa permasalahan antara lain belum mempunyai legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), izin edar produk (SPPIRT, MD MBPOM, PKRT), sertifikasi halal, keterbatasan modal, kemasan produk yang tidak menarik, distribusi produk, pemasaran terbatas, manajemen keuangan dan SDM belum dikelola dengan baik.

Legalitas usaha NIB merupakan pintu masuk untuk pengurusan perizinan lainnya, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat kepada 807 pelaku UMKM di wilayah perkotaan, sebanyak 642 UMKM (79,5 %) sudah memiliki NIB, sedangkan sebanyak 165 UMKM (20,5 %) belum memiliki NIB, sedangkan untuk wilayah pedesaan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penumbuhan Millenial Entrepreneur dan bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan yang berlokasi di Kabupaten, terdapat bahwa lebih dari 70 % peserta belum memiliki NIB.

Kehadiran MoNik KUMKM selain memfasilitasi penerbitan NIB juga memberikan konsultasi bisnis bagi UMKM yang masih membutuhkan bimbingan tentang legalitas usaha dan pengembangan bisnisnya. MoNik KUMKM ini merupakan suatu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada KUMKM. Pelayanan difokuskan kepada hasil pemetaan Nagari-Nagari yang berada cukup jauh dari perkotaan yang belum terjangkau dengan layanan konsultasi bisnis oleh instansi terkait di kabupaten/kota.

5. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata

Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pariwisata Sumatera Barat terbukti sangat potensial untuk menjadi lokomotif baru perekonomian daerah ke depan, hal ini didukung dengan Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 besar destinasi favorit wisatawan nusantara di Indonesia serta merupakan 3 (tiga) besar destinasi favorit wisatawan di Sumatera. Hal lainnya yakni keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat juga diakui secara Global dan Nasional antara lain sebagai Provinsi dengan desa wisata terbanyak dan empat desa wisata masuk 50 besar terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021; Memiliki 11 Geopark, 3 sudah diakui Nasional; Rendang didaulat sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Travels pada tahun 2017); Sumatera Barat ditetapkan sebagai Juara *World's Best Halal Culinary Destination* dan *World's Best Halal Destination* pada anugerah World Halal Tourism Award Abu Dhabi pada tahun 2016); Gulungan ombak Mentawai masuk dalam jajaran ombak terbaik di dunia berdasarkan Surfer Magazine di tahun 2013; serta Desa Pariangan terpilih menjadi desa terindah di dunia versi Travel Budget pada tahun 2012. Berdasarkan pengakuan Global dan nasional tersebut maka Sumatera Barat memiliki kekuatan pariwisata dari keindahan alam (*nature*), keberagaman budaya (*culture*), serta kuliner yang lezat (*culinary*).

Selain itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan tahun kunjungan wisata "Visit Beautiful West Sumatera". Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic Covid 19.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism (CBT)* yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan

atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism (CBT)* juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)* adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

Pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)* sebagai pendekatan pembangunan yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Untuk mengatasi kendala dalam penerapan pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)* perlu adanya kebijakan dan pemberdayaan pengiat/pelaku-pelaku pariwisata dari kalangan masyarakat yang telah berhasil dan dijadikan sebagai inspirator bagi calon-calon pelaku pariwisata di daerah-daerah yang berpotensi dikembangkan untuk diterapkannya pariwisata berbasis komunitas - *Community Based Tourism (CBT)*. Pelaku/pengiat pariwisata yang telah berhasil dari kalangan masyarakat lokal setempat dikenal dengan istilah *local champion* yang dalam pengertiannya adalah seseorang yang memiliki inisiatif, kemampuan dan kapabilitas untuk mendorong proses perubahan dalam suatu masyarakat, instansi atau Lembaga.

Inovasi yang dikembangkan pada tahun-tahun kedepan yakni membentuk Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat. Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat terdiri dari para pelaku pariwisata yang dinilai telah berhasil mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor : 90/Dispar-Sekrt/II-2021 tanggal 2021 tentang Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Kepariwisataan Sumatera Barat.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,37
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	7,50

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
2. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
4. Penguatan *Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat*
5. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
6. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui *public campaign* dan promosi besar-besaran untuk membangun *awareness* masyarakat
7. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
8. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
9. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
10. Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.14
Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata				
Sasaran 1 : Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Dalam Perekonomian Sumatera Barat				

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	58,28	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	75,04	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	71,79	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	81	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	15	Dinas Pariwisata
	Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	19	Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	7	Dinas Pariwisata
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	7,5	Dinas Pariwisata
	Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,27	Dinas Pariwisata
	Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,82	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	596	Dinas Pariwisata
	Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	Dinas Pariwisata
Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Sumatera Barat				
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	200	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	596	Dinas Pariwisata
	Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	Dinas Pariwisata
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

6. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek *non-fisik* (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Sehingga pada prioritas ini akan di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang berkualitas, penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan tidak mengesampingkan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan. Disamping itu mengingat Sumatera Barat juga merupakan kawasan yang dengan indek risiko bencana yang relatif tinggi, ketahanan bencana juga menjadi prioritas utama.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan berkelanjutan Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	
	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,691
	Kemantapan Jalan (%)	81,00
2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	
	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,65
3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,81
4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	
	Akses Air Minum (%)	88,00
	Akses Sanitasi Layak (%)	88,00
	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	6,00
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	75,04
	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	63,23
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	71,79
5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	
	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	89,00

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantibumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
6. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
7. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
9. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan kerusakan lingkungan hidup
10. Percepatan capaian sanitasi layak
11. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
12. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh
13. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
14. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Dalam rangka peningkatan kemantaban jalan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan dan mengembangkan inovasi SITANCEP (Sistem Tambal Cepat Jalan Rusak Dan Berlubang) yang memiliki beberapa keunggulan dan kebaharuan yang dapat menjadi solusi efektif dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, antara lain Sistem tambal cepat jalan dirancang untuk memperbaiki jalan dengan cepat dan efisien. Dalam beberapa kasus, proses perbaikan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari satu jam, hal ini dapat secara efektif mengurangi gangguan lalu lintas dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan aksesibilitas jalan.

Selain itu, Sistem tambal cepat jalan menggunakan teknologi dan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan perbaikan jalan yang tahan lama. Bahan yang digunakan biasanya terbuat dari campuran aspal berkualitas tinggi atau bahan lain yang cocok untuk mengisi jalan yang rusak. Hal ini memastikan kekuatan dan daya tahan perbaikan jalan terhadap beban lalu lintas.

Sistem tambal cepat jalan juga dapat mengurangi biaya perbaikan infrastruktur jalan. Dibandingkan dengan metode perbaikan tradisional yang melibatkan penggalian besar dan waktu perbaikan yang lama, sistem tambal cepat jalan dapat menghemat biaya karena membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit. Selain itu, metode tambal cepat jalan juga dapat memberikan manfaat lingkungan. Dalam beberapa kasus, sistem ini dapat menggunakan bahan daur ulang yang ramah lingkungan untuk memperbaiki jalan. Hal ini membantu mengurangi limbah konstruksi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kelebihan lainnya yakni Sistem tambal cepat jalan dapat diterapkan di berbagai kondisi jalan, termasuk jalan berlalu lintas tinggi, jalan perkotaan, atau jalan pedesaan. Metode ini juga fleksibel dalam hal perbaikan jalan yang berbeda, seperti perbaikan lubang, retak, atau kerusakan struktural kecil lainnya.

Untuk memperoleh informasi kejadian bencana dan kegiatan penanggulangan bencana/ tanggap darurat akibat daya rusak air secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel perlu dilakukan suatu manajemen informasi database dan pelaporan yang biasanya dibuat

dalam bentuk form laporan kejadian yang diisi petugas yang berwenang. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menyusun serta mengembangkan Inovasi Sikadra (Sistem Informasi Kebencanaan Akibat Daya Rusak Air) yakni pelaporan kejadian Bencana akibat daya rusak air yang realtime secara 24 jam dengan memanfaatkan Aplikasi berbasis Android. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk proses pengolahan data secara elektronik untuk kemudahan, kecepatan dan akurasi data yang tepat dalam bentuk data yang terintegrasi dalam aplikasi dan dapat mengakomodir kebutuhan dengan cepat dan tanpa mengenal batasan tempat.

Inovasi Sikadra dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi petugas dalam mengumpulkan data kejadian bencana dan upaya tindak lanjut yang cepat dan tepat dalam menangani suatu kejadian khususnya di wilayah provinsi Sumatera Barat.

Teknologi informasi dalam wujud aplikasi berbasis web dan smartphone android merupakan teknologi yang banyak digunakan saat ini. Internet sebagai media penghubung dan pendukung layanan informasi memberikan kemudahan dan kecepatan akses dalam sistem informasi manajemen database dan pelaporan secara terperinci yang disertai referensi pendukung suatu kejadian serta sebagai tolak ukur dalam menentukan kebijakan dalam penanganan tanggap darurat bencana yang tepat saat terjadi bencana akibat daya rusak air secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan berkelanjutan, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan berkelanjutan Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi				
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	81	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	%	43,65	Dinas Perhubungan
	Persentase Penurunan Rasio	%	2,45	Dinas Perhubungan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Angka Kecelakaan Lalulintas			
Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi	1	Dinas Perhubungan
	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Trayek	4	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	dokumen	1	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	99,8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 2 : Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana				
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	58,28	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	75,04	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	71,79	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	kawasan	2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	81	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,54	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sasaran 3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas				
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	3	Dinas Bina Marga, Cipta

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Karya dan Tata Ruang
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	%	8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan Limbah B3	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	50	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	10	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	90	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	%	43,65	Dinas Perhubungan
	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	%	2,45	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	64,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	25.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	350	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,54	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	59,69	Dinas Kehutanan
	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	10	Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	%	83	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	70	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	%	51,7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 4 : Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian				

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	58,28	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	75,04	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	71,79	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	88	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah drainase kewenangan provinsi yang dikelola	Km	25	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	kawasan	2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	%	25,62	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	%	25	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sasaran 5 : Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Baik dan Berkelanjutan				

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	89	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	%	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	%	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntukannya	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan	%	75	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

7. Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian,

pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan e-Government oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan tersebut. Walaupun sudah diterbitkan Perda No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana

pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak akhir 2022 meluncurkan inovasi Dashboard Pembangunan, yakni sebuah dashboard yang dapat diakses oleh semua pihak dimana saja melalui <https://dashboard.sumbarprov.go.id/> yang menampilkan seluruh informasi perkembangan APBD pada bagian pendapatan, belanja serta pembiayaan.

Informasi ini berisikan perkembangan secara *realtime* dari pendapatan yang diterima, belanja yang dikeluarkan hingga pembiayaan yang diterima dan dikeluarkan, yang diupdate dalam 1 (satu) hari diupdate sebanyak 2 (dua) kali. Dengan adanya dashboard ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka akses untuk semua pihak mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga semua informasi yang tampil dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terus menerus mengembangkan Aplikasi Sakato Plan, yakni sebuah aplikasi yang berisikan menu perencanaan, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi sehingga dengan adanya aplikasi Sakato Plan yang dapat diakses melalui <http://sakatoplan.sumbarprov.go.id/>, maka Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah tersedia dan dapat disajikan secara informatif dan setiap saat, hasil evaluasi disajikan sesuai dengan format yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan serta tersedia menu Analisa sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau *outcome*. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

Salah satu hal mendasar lainnya terkait dengan tata kelola pemerintahan yakni Tingkat gaji yang belum memenuhi standar hidup minimal pegawai yang tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini masih melalui penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, yang dapat mengakibatkan munculnya jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Meskipun pada tahun 2023 telah di setujui nya kenaikan TPP bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun besaran kenaikan masih rendah di bandingkan dengan rencana kenaikan.

Untuk itu pada tahun 2025 salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan memberikan insentif pajak yang dikenakan pada pemberian TPP yang akan di akomodir dibayarkan melalui dana APBD.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas Tahun 2025

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	
	Nilai SAKIP (predikat)	BB (79,00)
	Nilai EPPD (skor)	3,004
	Opini laporan keuangan (opini)	WTP
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	40,75
2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	
	Indeks SPBE (indeks)	3,50
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	65,00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	88

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Memberikan insentif pajak penghasilan bagi pembayaran TPP bagi seluruh ASN yang dibebankan pada APBD.
3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
4. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
7. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
9. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
10. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian sasaran Prioritas Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18
Program Pembangunan mendukung
Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,
Akuntabel Serta Berkualitas Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas				
Sasaran 1 : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel				
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	5.720	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	20	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	14	Biro Organisasi

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	13	Biro Organisasi
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Dokumen LPPD	dokumen	1	Biro Pemerintahan
	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga	%	100	Biro Pemerintahan
	Persentase fasilitasi usulan penataan Nagari/desa	%	100	Biro Pemerintahan
	Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	%	95	Biro Pemerintahan
	Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan kebijakan	dokumen	1	Biro Pemerintahan
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	%	90	Biro Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5,2	Biro Perekonomian
	Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	Biro Perekonomian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan dan LKPD	tepat waktu	tepat waktu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	persen	94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan PAD	%	7,2	Badan Pendapatan Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	350	Badan Kepegawaian Daerah

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	80	Inspektorat Daerah Provinsi
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%	85	Inspektorat Daerah Provinsi
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi				
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	%	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	55	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah	%	100	Biro Organisasi

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	tepat fungsi dan tepat ukuran			
	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	20	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	14	Biro Organisasi
	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	13	Biro Organisasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	350	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	20	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	14	Biro Organisasi
	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	13	Biro Organisasi
Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	350	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

4.2.4. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan telah dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Tahun 2024 yakni sebagai tabel berikut.

Tabel 4.19

Target Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
SUMBAR SEHAT DAN CERDAS			
I. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam			

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19			
Definisi Operasional :	1. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana dalam pengujian Covid		
1. Meningkatkan kapasitas pelayanan Kesehatan dalam pengujian Covid yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan terutama di UPTD Laboratorium Kesehatan, RSAM Bukittinggi, RS M. Natsir Solok, RSUD Pariaman	a. UPTD Laboratorium Kesehatan (%)	100	Dinas Kesehatan
	b. RSAM Bukittinggi (%)	100	RSAM Bukittinggi
	c. RS. M. Natsir (%)	100	RS. M. Natsir
	d. RSUD Pariaman (%)	100	RSUD Pariaman
2. Penyediaan sarana mobile test (milik Provinsi) dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan berkerjasama dengan puskesmas	2. Persentase SDM yang tersedia dalam pengujian Covid		
	a. UPTD Laboratorium Kesehatan (%)	100	Dinas Kesehatan
	b. RSAM Bukittinggi (%)	100	RSAM Bukittinggi
	c. RS. M. Natsir (%)	100	RS. M. Natsir
	d. RSUD Pariaman (%)	100	RSUD Pariaman
3. Penyediaan sarana tes covid yang sederhana seperti g-nose, antigen dan berkoordinasi dan berkerjasama dengan puskesmas	3. Jumlah sarana mobile test baru untuk pengujian test covid sederhana yang disediakan (unit)	-	Dinas Kesehatan
4. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan	4. Jumlah puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas) (unit)	279	Dinas Kesehatan
	5. Persentase puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas)	100%	
1. Integrasi data pasien yang terinfeksi, yang meninggal dan yang sembuh akibat covid → Sistem Pelaporan Corona	1. Jumlah sistem data informasi terkait covid yang tersedia (Sistem Pelaporan Corona)	1	Dinas Kesehatan
2. Pelacakan kasus Covid merupakan bagian dari pekerjaan Puskesmas (yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota) sehingga peran Provinsi lebih banyak pada koordinasi	2. Persentase sistem data informasi terkait covid yang tersedia (persen)	100%	
3. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan			
1. Pelayanan terhadap pasien Covid 19 gejala ringan dengan komorbid, gejala sedang gejala berat, dan kritis di Rumah Sakit	1. Jumlah Rumah Sakit layanan Covid 19	46	Dinas Kesehatan
2. Koordinasi Dinkes Provinsi dengan Dinkes Kab/kota terkait dengan isolasi mandiri pasien covid tanpa gejala	2. Jumlah Rumah Sakit Rujukan Covid 19	22	
3. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan			
1. Pelayanan penanganan difokuskan pada peningkatan sarana, prasarana serta SDM	1. Persentase sasaran vaksinasi Pertama (%)	100	Dinas Kesehatan
	2. Persentase sasaran	100	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Kesehatan yang berada pada 4 (empat) Rumah Sakit milik Provinsi yakni RSAM Bukittinggi, RSJ HB Saanin, RS.M. Natsir dan RSUD Pariaman. 2. Percepatan vaksinasi sesuai dengan standar WHO/target nasional 3. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan	vaksinasi Kedua (%)		100
	3. Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju <i>Herd Immunity</i> (%)		
1. Untuk Pencegahan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memberdayakan Kader Tanggap Covid melalui kegiatan sosialisasi 3 M kepada masyarakat. 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kesehatan	1. Jumlah kader tanggap Covid yang terbentuk (orang)	95	Dinas Kesehatan
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi 3 M yang dilaksanakan (kali)	140	Dinas Kesehatan
1. Pelaksanaan Pengendalian Covid dilakukan oleh Satgas Covid baik berupa kebijakan-kebijakan pembatasan social, pelarangan bepergian, penegakan hukuman dll 2. Sosialisasi dan implementasi Perda No 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru 3. Penanggung jawab Progul BPBD	1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada masyarakat (kali)	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada satuan pendidikan aman bencana (kali)	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Jumlah kabupaten/kota yang dapat dilakukan penegakan dan pengawasan Perda No. 6 Tahun 2020	19	Satuan Polisi Pamong Praja
II. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru			
Definisi Operasional	1. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA)		
1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak untuk siswa pada sekolah jenjang Pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta Pendidikan luar Biasa (SLB) 2. Penanggung jawab Progul Dinas Pendidikan	a. Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	236	Dinas Pendidikan
	b. Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	236	
	c. Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak (unit)	236	
	d. Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak (unit)	236	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	2. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		Dinas Pendidikan
	a. Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	111	
	b. Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	111	
	c. Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak (unit)	111	
	d. Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak (unit)	111	
	1. Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB)		Dinas Pendidikan
	a. Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	29	
	b. Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	29	
	c. Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak (unit)	29	
	d. Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak (unit)	29	
1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak ditempat-tempat umum 2. Fasilitas umum yang dimaksud adalah Kawasan wisata, desa wisata, tempat pelayanan publik yang menjadi kewenangan provinsi (UKPP), terminal milik provinsi dan rest area kewenangan provinsi 3. Mekanisme penganggarannya dapat melalui hibah kepada kelompok masyarakat seperti Pokdarwis atau kelompok lainnya 4. Penanggung jawab Progul Biro Organisasi untuk UKPP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan	1. Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia		Biro Organisasi
	a. Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (unit)	75	
	b. Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak (unit)	75	
	c. Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak (unit)	75	
	d. Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak (unit)	75	
	1. Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia		
	a. Jumlah Terminal Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (akumulasi) (unit)	4	Dinas Perhubungan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	- Terminal Padang Panjang	1	
	- Terminal Sago Painan	1	
	- Terminal Sawahlunto	1	
	- Terminal Payakumbuh	1	
	- Terminal Batusangkar	-	
	b. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak (akumulasi) (unit)	5	
	- Terminal Padang Panjang	1	
	- Terminal Payakumbuh	1	
	- Terminal Sago Painan	1	
	- Terminal Sawahlunto	1	
	- Terminal Batusangkar	1	
	c. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (unit)	4	
	- Terminal Padang Panjang	1	
	- Terminal Painan	1	
	- Terminal Sawahlunto	1	
	- Terminal Payakumbuh	1	
	- Terminal Batusangkar	-	
	d. Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak (unit)	3	
	- Terminal Padang Panjang	1	
	- Terminal Payakumbuh	1	
	- Terminal Sago Painan	1	
	- Terminal Batusangkar	-	
	- Terminal Sawahlunto	-	
	2. Jumlah sanitasi layak di Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (lokasi)		
	a. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (lokasi)	18	Dinas Pariwisata
	b. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan	19	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak sesuai dengan CHSE (lokasi)		
	c. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (lokasi)	18	
	d. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak (lokasi)	19	
III. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru			
Definisi Operasional : 1. Menuntaskan pembangunan stadion utama Sikabu terlebih dahulu agar dapat dijadikan pusat kegiatan olahraga serta pusat pembinaan olahraga prestasi paling lambat tahun 2023/2024 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase terbangunnya Main Stadium Sikabu (%)	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
IV. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)			
1. Daerah 3 T adalah daerah yang berada di pelosok, terpencil, terbatas akses transportasi dan layanan dasar 2. Guru dan Tenaga Kependidikan yang dimaksud adalah ASN dan Non ASN (honorar) dan yang telah bersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi 3. Lingkupnya berada pada SMA/SMK/SLB negeri 4. Penanggung jawab Progul Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan	1. Jumlah Guru/Tenaga Pendidik di Daerah 3 T yang menerima tunjangan khusus Rp.2,5 juta (orang)		Dinas Pendidikan
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (orang)	314	
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang)	83	
	2. Jumlah Tenaga Kependidikan di Daerah 3T yang menerima tunjangan khusus Rp.2,5 juta (orang)		Dinas Pendidikan
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (orang)	2	
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang)	1	
V. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri			

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
minimal 20 Persen			
Definisi operasional : 1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan terutama dalam proses penerimaan Siswa Baru SMA dan SMK untuk menyediakan kouta bagi siswa tidak mampu sebesar 20% dari kouta setiap sekolah 2. Penanggung jawab Progul Dinas Pendidikan	1. Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (%)	20%	Dinas Pendidikan
	b. Sekolah Menengah Atas (SMA) (orang)	12.770	Dinas Pendidikan
	c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (%)	20%	Dinas Pendidikan
	d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (orang)	6.823	Dinas Pendidikan
VI. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan			
Defnisi operasional : 1. Pembangunan SMA dan RKB SMA diprioritaskan jika: a. daya tampung SMA saat ini yang telah ada masih belum mencukupi dengan jumlah penduduk usia SMA di daerah tersebut a. belum adanya SMA pada daerah atau kawasan dengan jumlah penduduk usia SMA yang telah mencukupi untuk sebagai syarat pendirian SMA b. untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) telah tersedia hibah lahan dengan kepemilikan dari Pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat. 2. Pembangunan USB SMK dan RKB SMK diprioritas sesuai dengan potensi daerah 3. Revitalisasi SMK sesuai dengan potensi daerah 4. Penanggung jawab Progul Dinas Pendidikan	1. Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) USB yang dibangun setiap tahun (unit)		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (unit), dengan target : - SMAN 2 Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat - SMAN 12 Solok Selatan - SMAN 17 Padang - SMAN 2 Sungai Geringging - SMAN 1 Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman	-	Dinas Pendidikan
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (unit), dengan target : - SMKN 6 Solok Selatan - SMKN 3 Bukittinggi - SMKN 11 Padang - SMKN 1 Palupuah Kabupaten Agam - SMKN Akabiluru 50 Kota	-	Dinas Pendidikan
	c. Sekolah Luar Biasa (SLB) (unit) Yakni: - SLBN 1 Kepulauan Mentawai - SLBN 1 Padang Pariaman - SLBN 1 Dharmasraya - SLBN 2 50 Kota	-	Dinas Pendidikan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	- SLBN 3 Sawahlunto		
	2. Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun (unit)		
	a. Sekolah Menengah Atas (SMA) (unit)	-	Dinas Pendidikan
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (unit)	-	Dinas Pendidikan
	c. Sekolah Luar Biasa (SLB) (unit)	-	Dinas Pendidikan
VII. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri			
Definisi operasional : 1. Focus beasiswa adalah masyarakat dan ASN Pemprov 2. Untuk ASN Pemprov melalui tugas belajar 3. Untuk masyarakat bersumber dari PT Rajawali dan sumber lainnya seperti CSR, universitas/ perguruan tinggi, dana rantau dan sumber dana lainnya 4. Untuk sumber dana lainnya seperti CSR dan lainnya maka Peran provinsi memfasilitasi kerjasama dengan universitas dalam negeri dan luar negeri yang akan memberikan beasiswa bagi lulusan SMA dan SMK dari Sumatera Barat 5. Lingkup jenjang Pendidikan yakni S1, S2 dan S3 6. Penanggung jawab Progul Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan	1. Jumlah ASN Provinsi yang mendapatkan tugas belajar baru pada jenjang pendidikan S1/S2/S3 (orang)	15	Badan Kepegawaian Daerah
	2. Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3 (orang)	401	Dinas Pendidikan
VIII. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan			
Definisi operasional : 1. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi untuk penelitian dan pengembangan yang berfokus pada hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan dan Program Unggulan yang dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi dengan melibatkan mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi dan Swasta (bukan memberikan hibah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebijakan untuk mendukung program unggulan (dokumen)	5	Badan Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
kepada PTN atau PTS). 2. Hasil penelitian berupa produk inovatif terapan 3. Tema penelitian dikaitkan dengan program-program unggulan RPJMD dan Prioritas Pembangunan dan ditetapkan dengan Keputusan Majelis Pertimbangan Litbang 4. Estimasi pertahun adalah 5 penelitian 5. Penanggung jawab Progul Balitbang			
SUMBAR RELIGIUS DAN BERBUDAYA			
1. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi			
Definisi operasional : 1. Menjadikan Gedung LKAAM dan Bundo Kandung menjadi tempat edukasi dan literasi (membuat galeri) 2. Membangun Gedung MUI dan juga membuat galeri 3. Melakukan pengajian dan pembelajaran keagamaan secara rutin di Masjid Raya seperti belajar Al Quran bagi generasi muda, belajar sholat, penyelenggaraan jenazah dll 4. Penyediaan tempat front office untuk pengunjung agar menutup aurat 5. Penanggung jawab Progul yakni Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Biro Kesra	1. Jumlah galeri dan tempat edukasi yang tersedia di LKAAM (unit)	-	Dinas Kebudayaan
	2. Jumlah galeri dan tempat edukasi yang tersedia di Bundo Kandung (unit)	-	
	3. Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi LKAAM (orang)	12.000	Dinas Kebudayaan
	4. Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi Bundo Kandung (orang)	12.000	
	5. Jumlah rata-rata aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat per minggu (diluar pelaksanaan sholat 5 waktu) yang diselenggarakan (kali) Aktifitas setiap minggu: <u>Mulai 2021:</u> a. Ceramah Zuhur/Jumat (7 kali) b. Subuh Mubarakah (1 kali) c. Tahsin Qur'an (2 kali) <u>Mulai 2022 :</u> d. Ceramah Magrib (7 kali) e. Tahfidz Qur'an (2 kali) f. Pelatihan Bahasa Arab (6 kali) g. Penyelenggaraan Jenazah (1 kali 2 bulan)	34	Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	h. Wirid Remaja (2 kali sebulan) i. Majelis Ta'lim (1 kali sebulan) j. Ceramah Subuh (6 kali) k. Pembelajaran Adat (1 kali) <u>Mulai 2023 :</u> l. Pelatihan Sholat Kusyuk (2 kali)		
	6. Jumlah jenis aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat yang diselenggarakan (jenis)	12	Biro Kesejahteraan Rakyat
II. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan			
Definisi operasional : 1. Memberikan hibah kepada Lembaga keagamaan seperti TPA, TPQ, MDA, pondok alquran, LPTQ dan Lembaga keagamaan lainnya serta hari besar keagamaan lainnya 2. Penanggung jawab Progul Biro Kesra	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan hibah (rumah ibadah) Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan hibah (lembaga)	174 35	Biro Kesejahteraan Rakyat
III. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism)			
Definisi operasional : 1. Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan agar dapat segera difungsikan sebagai pusat Pendidikan dan wisata budaya paling lambat tahun 2023 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase terbangunnya Gedung Kebudayaan (%)	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1. Membangun kembali Museum Adityawarman atau melakukan rehabilitasi berat terhadap Gedung yang telah ada 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Kebudayaan	Persentase terbangunnya/rehabilitasi berat terhadap Museum Adityawarman (%)	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1. Membangun ruang IPTEKS tersendiri dengan lokasi masih di Lingkungan Museum Adityawarman (saat ini	Persentase terbangunnya Gedung IPTEKS (%)	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
bergabung dengan ruangan Museum) 2. Penanggung jawab Progul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang			
1. Menjadikan Kawasan Museum dan Gedung Kebudayaan sebagai pusat aktifitas masyarakat terutama aktifitas seni dan budaya serta IPTEKS serta tersedia ruang ramah bermain anak di museum 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kebudayaan	1. Jumlah ruang ramah bermain anak di Museum Adityawarman yang terbangun (lokasi) 2. Jumlah aktifitas seni dan budaya masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Kebudayaan dan Museum Adityawarman (kali)	- 35	Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan
1. Meningkatkan kapasitas Perpustakaan Daerah agar dapat menjadi pusat Pendidikan dan literasi masyarakat serta ramah anak 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Jumlah ruang ramah bermain anak yang tersedia Perpustakaan Daerah (lokasi) Telah tersedia sejak tahun 2016 dan upaya yang dilakukan dari 2021 sampai dengan 2026 adalah peningkatan mutu ruang ramah bermain anak seperti ketersediaan perlengkapan dan lain-lain 1. Jumlah aktifitas/kegiatan literasi di Perpustakaan Daerah yang melibatkan masyarakat umum yang diselenggarakan (kali) 2. Jumlah layanan perpustakaan visual yang tersedia (studio) 3. Jumlah ruang baca terbuka yang tersedia di perpustakaan daerah (ruang)	- 10 - -	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
IV. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan			
Definisi operasional : 1. Pembinaan kepada seniman dan budayawan termasuk kepada sejarawan seperti pelatihan atau bimtek, dan juga memberikan penghargaan secara rutin kepada para maestro seni dan budayawan serta sejarawan Sumatera Barat 2. Penanggung jawab Progul Dinas Kebudayaan	1. Jumlah seniman yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang) 2. Jumlah budayawan yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang) 3. Jumlah sejarawan yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang) 4. Jumlah seniman/budayawan/sejarahwan yang menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (orang)	500 250 100 10	Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan
SUMBAR SEJAHTERA			

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
I. Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian			
1. Pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian sebesar 10% dari total APBD.	1. Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD (%)	≥ 10%	Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Distribusi anggaran untuk Dinas perkebunan Tanaman pangan dan hortikultura, dinas pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas Kehutanan, serta dinas SDA dan Bina konstruksi untuk irigasi	2. Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan (benih/bibit)		
3. Pengalokasian anggaran termasuk gaji, DAK, dana hibah, dan dana transfer lainnya	a. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
3. Focus kegiatan pada:	- Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan (batang)	50.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
a. menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)	- Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan (batang)	100.000	
b. meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan	- Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan (batang)	300.000	
c. optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan	- Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan (batang)	50.000	
d. peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam	- Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan (batang)	50.000	
e. meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan	- Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan (batang)	100.000	
f. diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi	- Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan (batang)	100.000	
g. lancarnya akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan	- Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan (ton)	2.500	
4. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Holtikultura	- Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan (ton)	120	
	- Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan (gram)	16.500	
	- Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan (kg)	100.000	
	- Jumlah benih/bibit Manggis yang	20.000	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	diadakan (batang)		
	- Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan (batang)	40.000	
	- Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan (batang)	20.000	
	- Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan (batang)	20.000	
	- Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan (batang)	30.000	
	- Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan (batang)	60.000	
	- Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan (batang)	65.000	
	- Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan (batang)	15.000	
	- Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan (kg)	2.000	
	- Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan (kg)	2.000	
	- Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan (kg)	2.000	
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan		
	- Benih kerapu (ekor)	30.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Bibit rumput laut (kg)	2.300	
	- Benih nila (ekor)	320.000	
	- Benih vaname (ekor)	444.000	
	- Calon induk ikan nila (kg)	9.600	
	- Induk ikan gurami (kg)	600	
	- Induk ikan lele (kg)	600	
	- Induk ikan mas (kg)	600	
	c. Urusan Kehutanan		Dinas Kehutanan
	- Jumlah Bibit (batang)	1.200.000	
	- Jumlah Arboretum (unit)	2	
	- Luas Agroforestry (Ha)	500	
	- Jumlah Komoditi yang dikembangkan (jenis)	10	
	d. Urusan Pangan		Dinas Pangan
	- Jumlah benih/bibit bermutu yang	160.000	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	disediakan (batang)		
	e. Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	- Semen beku (dosis)	200.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	- Sapi (ekor)	1.080	
	- Service Per Conception (S/C)	2,0	
	1. Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan yang dilakukan (kali)		
	a. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	- Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya pertanian (sub urusan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura) (kali)	7	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan		
	- Jumlah pos pengawas yang dibangun baru (unit)	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Jumlah Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas yang diadakan (Paket)	6	
	- Jumlah hari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 1 tahun yang dilakukan (hari)	160	
	c. Urusan Kehutanan		
	- Jumlah kasus tertangani (kasus)	2	Dinas Kehutanan
	- Jumlah Patroli Pengamanan Hutan yang dilakukan (kali)	100	
	- Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan (kali)	100	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	1. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kehutanan yang disediakan (unit)		Dinas Kehutanan
	a. Jumlah Alat Produktif yang disediakan (unit)	20	
	b. Jumlah sarana dan prasarana Ekowisata yang disediakan (unit)	20	
	c. Jumlah Stup lebah madu yang disediakan (unit)	3.000	
	5. Jumlah UPTD yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung produksi peternakan (UPTD)	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	6. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan yang disediakan (unit)		Dinas Kelautan dan Perikanan
	a. Jumlah Mesin tempel 15 PK yang diadakan (unit)	310	
	b. Jumlah Mesin tempel 40 PK yang diadakan (unit)	54	
	c. Jumlah Mesin tempel 8 PK yang diadakan (unit)	15	
	d. Jumlah Mesin tempel 4 PK yang diadakan (unit)	-	
	e. Jumlah Fish Box 100 Ltr yang diadakan (unit)	800	
	f. Jumlah Fish Box 220 Ltr yang diadakan (unit)	150	
	g. Jumlah Fish Box 1.000 Ltr yang diadakan (unit)	-	
	h. Jumlah Mesin diesel kapal perikanan yang diadakan (unit)	20	
	i. Jumlah Mesin longtail yang diadakan (unit)	45	
	j. Jumlah Rumpon yang diadakan (unit)	150	
	k. Jumlah Gillnet (Laut) yang diadakan (unit)	150	
	l. Jumlah Tramel Net yang diadakan (unit)	150	
	m. Jumlah Jaring langli yag diadakan (unit)	-	
	n. Jumlah Gillnet (Perairan Umum) yang diadakan (unit)	200	
	o. Jumlah Mesin longtail	30	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	8,5 PK yang diadakan (unit)		
	p. Jumlah Mesin tempel 2,5 PK yang diadakan (unit)	30	
	q. Jumlah mesin Perahu fiber uang diadakan (Unit)	20	
	7. Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi Perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan (unit)		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan :
	a. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Kakao		
	- Gunting Pangkas (set)	200	
	- Peralatan Jemur (buah)	200	
	- Kotak Fermentasi (unit)	400	
	b. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Kakao		
	- Gunting Pangkas (set)	300	
	- Peralatan Jemur (buah)	300	
	c. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Gambir (Alat kempa Gambir, Alat peniris, Gerobak, dll)	12	
	d. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Padi		
	- Elektrik Sprayer (set)	100	
	- Power Tresher (set)	20	
	- Hand Traktor (TR 2) (set)	20	
	- APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik)	2	
	e. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Jagung		
	- Combine (unit)	50	
	- Cultivator (unit)	50	
	- Corn Seller	10	
	f. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Cabe		
	- Cultivator (unit)	20	
	- Handsprayer Manual	100	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	(unit)		
	- APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik) (paket)	5	
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll) (paket)	5	
	g. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Bawang Merah		
	- Cultivator (unit)	10	
	- Handsprayer Manual (unit)	100	
	- APPO (alat Pencacah Pupuk Organik) (unit)	10	
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll) (paket)	5	
	h. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Manggis		
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll)	3	
	i. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen Jeruk		
	- Handsprayer Manual (unit)	5	
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll) (unit)	300	
	8. Penyaluran Sarana Produksi terdiri dari :		
	a. Saprodi Cabe (Ha)	110	
	b. Saprodi Bawang Merah (Ha)	100	
	c. Saprodi Manggis (Ha)	200	
	d. Saprodi Jeruk (Ha)	100	
	9. Pengadaan sarana pengolahan perkebunan tdd :		
	a. Sarana pengolahan Kakao (unit)	4	
	b. Sarana pengolahan Kopi (unit)	-	
	c. Uji organoleptik (Cita Rasa) Mutu Kopi (unit)	4	
	10. Jumlah Pengadaan Sarana pengolahan dan pemasaran cabe yang diadakan (unit)	4	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	11. Jumlah Pengadaan Sarana pengolahan dan pemasaran Bawang yang diadakan (unit)	5	
	12. Jumlah Sarana pengolahan dan pemasaran Jeruk yang diadakan (unit)	100	
	13. Jumlah Kab/Kota yang menjadi lokasi Pembinaan, pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian (Kab/Kota)	19	
	14. Jumlah Pupuk Jagung yang dapat disalurkan (ton)	300	
	15. Jumlah Saprodi Hortikultura yang disalurkan (Ha)	510	
	16. Luas Jaringan Irigasi tersier yang di rehabilitasi (Ha)	100	
	17. Luas lahan pertanian organik yang dikembangkan (Ha)	850	
	18. Jumlah kampung yang melakukan pengembangan Kampung Buah/ Sayur/ Biofarmaka (kampung)	35	
	20. Jumlah resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam yang dapat diantisipasi (resiko)		
	a. Jembrana (kasus)	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Rabies (kasus)	100	
	c. AI (kasus)	165	
	d. Jumlah Sampel yang diuji (sampel)	2.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	e. Jumlah Bank Pakan yang tersedia (unit)	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	f. Sub urusan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura (%)	99	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	21. Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil (%)		
	a. sub urusan Peternakan (%)	83,05	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Urusan Kelautan dan Perikanan	10	Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	d. Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	50.000	Dinas Kehutanan
	22. Jumlah Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile (unit/PPK/RMU)	300	Dinas Pangan
	23. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi peternakan (%)	45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	24. Jumlah unit pengolahan ikan yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	9	Dinas Kelautan dan Perikanan
	25. Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kehutanan (%)	20	Dinas Kehutanan
	26. Jumlah kelompok wanita yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan (kelompok)	112	Dinas Pangan
	27. Jumlah pemberdayaan Kelompok Wanita dalam pemanfaatan pekarangan pangan berupa bibit tanaman rempah (Kelompok)	52	
	28. Jumlah TTIC yang beroperasi dengan baik (unit)	4	Dinas Pangan
II. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak			
Definisi operasional : 1. Mempertahankan Sumatera Barat sebagai lumbung padi di nasional dan menaikkan hasil produksi padi setiap tahunnya (ukurannya Gabah kering panen) 2. Meningkatkan produksi jagung setiap tahunnya 3. Meningkatkan produksi komoditas ternak unggas dan kambing 4. Mandiri maksudnya adalah terpenuhinya kebutuhan Sumatera Barat oleh produksi dari Sumatera Barat sendiri 5. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Hortikultura dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jumlah produksi padi (ton)	1.637.347	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah produksi jagung (ton)	1.088.589	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3. Jumlah produksi komoditas ternak unggas (ekor)	850.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	4. Jumlah produksi kambing (ekor)	9.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
III. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian			
Definisi operasional :	1. Jumlah BUMD Agro yang	-	Biro Perekonomian

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
1. Mengevaluasi kinerja BUMD yang ada	terbentuk baru (unit usaha)		
2. Mengoptimalkan pemanfaatan BUMD yang ada	2. Jumlah BUMD dengan kategori Sehat (unit usaha)	3	Biro Perekonomian
3. Membentuk BUMD baru dibidang agro	a. PT. Bank Nagari (perbankan)		
4. Ukuran tata Kelola BUM yang baik adalah adalah kategori BUMD yang sehat	b. PT. Jamkrida (penjaminan kredit)		
5. Penanggung jawab Progul Biro Perekonomian	c. BUMD Agro		
IV. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif			
Definisi operasional :	1. Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	20.000	
1. Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026	a. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga (orang)	528	Dinas Pemuda dan Olahraga
2. 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya	b. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja (orang)	6852	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota	c. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	2000	Dinas Koperasi dan UMKM
4. Definisi terkait dengan entrepreneur yakni :			
a. Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau			
b. Sudah memulai usaha			
5. Bekerjasama dengan akselarator	d. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura) (orang)	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura
6. Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM	e. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan) (orang)	5.509	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	f. Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan (orang)	500	Dinas Kehutanan
	g. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)	3.197	Dinas Pariwisata

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	h. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	1.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	i. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	412	Dinas Sosial
	j. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan (orang)	320	Dinas Kebudayaan
	k. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan (orang)	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
	l. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (orang)	750	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	m. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal (orang)	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	n. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan (orang)	112	Dinas Pangan
	o. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (orang)	1.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
V. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula			
Definisi operasional : 1. Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula yang dilakukan melalui Fasilitasi, peningkatan pemahaman terkait akses pembiayaan 2. Bentuk fasilitasi antara lain mempertemukan kelompok UMKM dengan perbankan 3. Target capaian yakni UMKM yang mendapatkan permodalan dari perbankan 4. Edukasi terhadap non perbankan seperti CSR, fin-tech, dana dari lembaga keuangan social islam	1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (Lembaga)	540	Dinas Koperasi dan UMKM
	2. Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)	200	
	3. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	400	
	4. Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	150	
	5. Jumlah Lembaga	4	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
5. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM	perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)		
	6. Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	5	
VI. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital			
Definisi operasional : 1. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi dengan tema difokuskan pada penguasaan Teknologi Informasi untuk perluasan jejaring pemasaran dan kerjasama 2. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM	1. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang)	230	Dinas Koperasi dan UMKM
	2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
VII. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan			
Definisi operasional : 1. Penetapan 1 destinasi wisata berkelas dunia (rencana Kawasan Gunung Talang yang merupakan salah satu geosite Kawasan Geopark Ranah Minang, meliputi 7 Kab/Kota, menuju UNESCO global geopark) dan 19 destinasi wisata unggulan (masing-masing 1 di setiap kabupaten/Kota) yang telah disepakati pada rakor pariwisata di Mentawai 2. Terkait dengan kewenangan, maka pola pendanaan untuk destinasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui sharing pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota. 3. Proporsi persentase sharing pendanaan diputuskan pada rapat TAPD dengan melibatkan	1. Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	Dinas Pariwisata
	2. Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)	1	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Pariwisata
	3. Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan dikelola (unit)	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Dinas Pariwisata Provinsi dan Biro Kerjasama , Pembangunan Dan Rantau. 4. Membangun Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif (Sumbar Kreatif Hub), yang berlokasi di bekas Bengkel PT Dinamika di Nipah, Padang direncanakan akan dikelola oleh salah satu BUMD 5. Penanggung jawab progul Dinas Pariwisata dan Biro Perekonomian			
VIII. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional			
Definisi operasional : 1. Pusat pertunjukan seni yang direncanakan adalah: a. Gedung Kebudayaan (lokasi di Padang), b. Amphiteatre (lokasi di panorama view ngarai sianok Bukittinggi) c. Amphiteatre (lokasi di Kawasan talang dengan view 3 danau) 2. Peran provinsi yakni membangun amphiteatre (pastikan terkait kepemilikan asset) serta berkoordinasi untuk mengisi aktivitas seni dan budaya dengan sanggar-sanggar seni yang berada di kabupaten/kota tersebut 3. Penanggungjawab progul Dinas Kebudayaan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang	1. Jumlah pusat pertunjukan seni dan budaya (amphiteatre) bertaraf internasional yang terbangun (lokasi) Lokasi Amphiteatre : a. Gedung Kebudayaan b. Panorama view ngarai sianok Bukittinggi c. Kawasan talang dengan view 3 danau 2. Jumlah aktifitas seni dan budaya di lokasi amphiteatre (kali)	- 9	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kebudayaan
SUMBAR BERKEADILAN			
I. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan			
Definisi operasional : 1. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi provinsi 2. Peningkatan dan pembangunan jalan provinsi menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan 3. Optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan untuk mendukung distribusi produk pertanian dan	1. Jumlah jaringan irigasi Provinsi yang direhab (meter) 2. Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (kilometer)	8.825 54,70	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
4. Penanggung jawab Progul Dinas Perkebunan, Tanaman dan Holtikultura, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	3. Jumlah ruas jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (ruas)	17	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	4. Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan (Pelabuhan)		
	a. Pelabuhan Penyeberangan : - Pelabuhan Bungus di Padang - Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai - Pelabuhan Sikakap di Mentawai - Pelabuhan Siberut di Mentawai	4	Dinas Perhubungan
	b. Pelabuhan Laut : - Pelabuhan Tua Pejat di Mentawai - Pelabuhan Muaro Padang di Padang - Pelabuhan Siberut/Simalepet di Mentawai - Pelabuhan Sioban di Mentawai	4	
II. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang			
Definisi operasional : 1. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi terutama pada daerah belum berkembang, terisolir dan perbatasan 2. Peningkatan konektivitas melalui integrasi antar moda (moda darat, laut dan udara) 3. Operasional terminal type B 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan pelabuhan 5. Penanggung jawab progul Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang dan Dinas Perhubungan	1. Jumlah panjang jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (kilometer)	26,60	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2. Jumlah akses jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (ruas)	11	
	3. Jumlah integrasi antar moda yang terbangun (jumlah):		
	a. Jumlah dokumen RIJLLAJ Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan (Peraturan Gubernur)	-	Dinas Pehubungan
	b. Persentase Realisasi Perkada tentang	100	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	dokumen RIJLLAJ Provinsi (%)		
	c. Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Peraturan Gubernur)	-	Dinas Pehubungan
	d. Persentase realisasi Perkada Rencana Induk Perkeretaapian (%)	100	
	4. Jumlah terminal Type B yang beroperasi dan memanfaatkan dengan baik (unit) yakni : a. Terminal Padang Panjang b. Terminal Payakumbuh c. Terminal Sago Painan d. Terminal Sawahlunto e. Terminal Batusangkar	5	Dinas Pehubungan
	5. Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Pelabuhan yang ditetapkan (dokumen)	2	Dinas Pehubungan
	a. Jumlah Dokumen DLKR/DLKT Pelabuhan Laut Tua Pejat yang tersusun (dokumen)	-	
	b. Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	c. Jumlah Dokumen P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta dokumen P3D)	-	
	d. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	e. Jumlah Dokumen DED Simalepet yang tersusun / Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	f. Jumlah Dokumen DED Pelabuhan Penyebrangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	g. Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun		

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	(dokumen)		
	h. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Penyebrangan Sinanak yang tersusun (dokumen)	1	
	i. Jumlah dokumen DED Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	1	
	j. Jumlah Dokumen DLKR/DLKP Pelabuhan Penyeberangan Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
	k. Jumlah Dokumen Lingkungan Pelabuhan Laut Sinakak yang tersusun (dokumen)	-	
III. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas			
Definisi operasional : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mitigasi, penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana 2. Pengembangan nagari dan desa siaga bencana 3. Penanggung jawab progul BPBD	1. Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (kelompok)	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (nagari/desa)	10	
IV. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy) dan Tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (limbah Medis)			
Definisi operasional : 1. Lokus progul untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok 2. Pengolahan sampah sebagai sumber energi diarahkan kepada <i>waste to carbon</i> yang menjadi biogas 3. Biokonversi BSF untuk TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok untuk mensupport sentra peternakan dan pertanian, sebagai bahan baku industry pakan dan pupuk	1. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Payakumbuh	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Solok	-	
	3. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)		1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup
	a. Jumlah dokumen Kajian Kelayakan (FS) yang tersusun (dokumen)	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
organic 4. Implementasi pemanfaatan Maggot untuk reduksi sampah, pengembangan direncanakan untuk skala nagari 5. Penanggung jawab progul Dinas Lingkungan Hidup	b. Jumlah dokumen DED dan AMDAL yang tersusun (dokumen)	-	1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup
	c. Persentase konstruksi yang terlaksana (%)	-	
	d. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)	30	
	1. Persentase Bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Solok yang terlaksana (%)		
	a. Jumlah dokumen Kajian Kelayakan (FS) yang tersusun (dokumen)	-	
	b. Jumlah dokumen DED dan AMDAL yang tersusun (dokumen)	-	
	c. Persentase konstruksi yang terlaksana (%)	100	
	d. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (%)	-	
	1. Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot (nagari/desa)	28	Dinas Lingkungan Hidup
1. Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3 bukan merupakan Kewenangan Provinsi tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat (UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 90 tahun 2019) 2. Saat ini sedang dibangun Pengelolaan limbah B3 di air dingin Kota Padang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan progress pembangunan sekitar 90%. 3. Apabila tempat pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang telah jadi maka akan melayani seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dan juga beberapa Provinsi tetangga, dikarenakan kapasitasnya yang besar sedangkan perhitungan limbah B3 dari seluruh Kabupaten/kota	1. Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	347.776	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi (Kabupaten/Kota)	19	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH
di Sumatera Barat masih kurang untuk mendatangkan profit dalam pengelolaannya. 4. Kondisi saat ini sedang dilakukan pembahasan ditingkat Kementerian terkait dengan pembagian peran antara Kementerian, provinsi dan kota padang dalam hal pengelolaannya. 5. Penanggung jawab progul Dinas Lingkungan Hidup			
V. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government)			
Definisi operasional : 1. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat termasuk juga dalam manajemen internal UKPP. 2. Digitalisasi yang dimaksud adalah seluruh layanan maupun manajemen internal UKPP telah berbasis TIK. 3. Penanggungjawab progul adalah Biro Organisasi, sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai <i>supporting</i> teknis.	Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (Unit)	75	1. Biro Organisasi : 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

4.3. PENYELARASAN DAN DUKUNGAN RKPD PROVINSI TERHADAP RKP TAHUN 2025

Sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 memperhatikan 8 (delapan) Agenda/Prioritas Nasional yang diturunkan menjadi Program Prioritas dan didetailkan dengan Kegiatan Prioritas.

Hal ini bertujuan akan selarasnya Prioritas dan program pembangunan daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sehingga target capaian Nasional yang merupakan akumulasi dari pencapaian target masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat tercapai.

Penyelarasan juga membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengambil bagian penting dari proses pelaksanaan pembangunan yang menuju kepada tujuan pembangunan nasional.

Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Provinsi terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.19
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Keterangan
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Prioritas 1
		Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 5
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4
		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Prioritas 1
		Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Keterangan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 5
		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Prioritas 7
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2
		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6

Secara lebih konret, sub kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 juga mendukung secara langsung terhadap 8 (delapan) Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 sebagai berikut.

4.3.1. Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.20

Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69 – 85,23	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (sedang)

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
	Indeks Aktualisasi Pancasila	76,37	-	-
	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	71-80 (kategori baik)	-	-
	Indeks Hak Asasi Manusia	2,75	-	-

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.21

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Memperkokoh ideologi Pancasila	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Pengembangan ekosistem teknologi informasi yangempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Penguatan demokrasi	Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.3.01.0013 Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN INFORMATIKA		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.3.01.0015 Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.4.01.0013 Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.4.01.0015 Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
	Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi
	Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi
	Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN INFORMATIKA		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
	Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis
	Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Penegakan hak asasi manusia	Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku	DAN INFORMATIKA		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
	Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
	Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0005 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
	Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.4.02.0005 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.4.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.03.0001 Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

4.3.2. Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,

ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.22
Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Sasaran Pembangunan	Target	Sasaran Pembangunan	Target
1	Asia Power Index (Military Capability)	16	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06
2	Asia Power Index (Diplomatic Influence) ^{a)}	61,54	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50
3	Asia Power Index (Economic Relationship)	12,6	Indeks Daya Saing Daerah	3.58
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	63,5	Proporsi Penduduk yg Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya	57,76
5	Global Cybersecurity Index	94,92	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1
6	Indeks Keamanan Laut Nasional	60	Indeks Ekonomi Biru	25,19
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,21	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,84
8	Indeks Ketahanan Energi	6,77	Konsumsi listrik per kapita	707
		160	Intensitas energi primer	160
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	51,70
10	Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional	3,45-3,60	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08
11	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	63,40	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	41,23	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	41,23
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,57

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Sasaran Pembangunan	Target	Sasaran Pembangunan	Target
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72
15	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	Indeks Ekonomi Hijau	68,69
16	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24	Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,10
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29,00
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95
19	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan (%))	36,65	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	28,05
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif (%))	28,12	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	18,08
20	Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	Indeks Ekonomi Biru	25,19
21	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	38,76	Indeks Ekonomi Biru	25,19
22	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	45	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.23

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Penguatan pertahanan negara	meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat komponen cadangan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
	peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan	mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Negara Republik Indonesia			
	meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pembentukan ekosistem industri pertahanan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Penguatan keamanan negara	melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.01.0006 Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.22.08.5.09.0023 Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Profesionalisme dan pelayanan kepolisian	memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Keamanan laut dan hidro-oseanograf	memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pemetaan batimetri dan alur laut.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Keamanan siber, sandi, dan sinyal	memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.01.0007 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0005 Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
	penyelesaian perundingan perbatasan darat negara	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0003 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0004 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0006 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	optimalisasi promosi aset soft power Indonesia.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy	meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menetap atau bekerja di luar negeri			
	memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Kerja Sama Pembangunan Internasional	penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	Integrated National Financing Framework	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
	penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
Penguatan diplomasi ekonomi	penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.01.0001 Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kerja sama ekonomi internasional yang adaptif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.01.0001 Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
	optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.01.0001 Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
	partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
	pengawasan proses akses Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Swasembada pangan	menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0004 Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0005 Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.4.16.0001 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.06.0001 Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KELAUTAN DAN PERIKANAN		untuk skala usaha menengah dan besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.07.0001 Fasilitas Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0008 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.06.0002 Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07.0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0014 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0019 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0006 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.3.02.0003 Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0014 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0005 Fasilitas akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0006 Fasilitas PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0008 Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.08.0003 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.3.01.0005 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.4.01.0005 pengembangan Usaha Perhutanan sosial
	memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
	meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0008 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0012 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0014 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0019 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0022 Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0023 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0024 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0007 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
	merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.01.0007 Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.02.0005 Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.02.0006 Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.03.0002 Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.4.01.0007 Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.4.02.0005 Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.4.02.0006 Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.4.03.0002 Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.3.02.0001 Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota
	menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0006 Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0006 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0008 Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0009 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0008 Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0009 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.3.11.0002 Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.4.11.0002 Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.04.0004 Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar
	melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	jagung, singkong, kedelai, dan tebu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
	memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0007 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.06.0001 Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.09.0001 Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
	meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganeekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.3.02.0001 Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
	memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT
Swasembada energi	mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0001 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0003 Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
	mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0006 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0005 Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0003 Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0003 Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0005 Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
	mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0006 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut
Swasembada air	penyediaan tampungan dan pasokan air	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.01.0005 Pembangunan Bendungan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0051 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0055 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0069 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0070 Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0071 Rehabilitasi Bendungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0005 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0007 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0017 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.02.0024 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0005 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0007 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0017 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.02.0024 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0031 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0033 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0036 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi
	pengelolaan risiko bencana daya rusak air	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0097 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.01.0098 Pembangunan Kanal Banjir

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0100 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0106 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0108 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0109 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
	revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0011 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0016 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0017 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Swasembada pangan, energi, dan air	Pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.04.0001 Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.06.0001 Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.07.0001 Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.09.0001 Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.10.0001 Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.11.0001 Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.12.0001 Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.13.0001 Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)
Pengembangan ekonomi syariah	Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi
	penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor
	penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi
	penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf).	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Kebijakan ekonomi digital	melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
	mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil
	menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0004 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Kebijakan ekonomi hijau	mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02.0001 Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.01.0002 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03.0005 Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	menerapkan ekonomi sirkular industri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03.0005 Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	menerapkan efisiensi sumber daya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.3.02.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.3.17.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.4.02.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.4.17.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.05.0005 Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0002 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.10.0001 Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.4.05.0005 Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.4.09.0002 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.4.10.0001 Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
	mengembangkan produk ramah lingkungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk
	menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	menguatkan ekosistem daur ulang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
	peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
	peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
	optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	perbaikan tata kelola persampahan	LINGKUNGAN HIDUP		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0014 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.3.10.0001 Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.3.10.0002 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.4.10.0001 Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.4.10.0002 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0001 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.3.03.0001 Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.4.03.0001 Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan
Keanekaragaman hayati	mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
	mengelola sumber daya genetik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.4.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
	menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.4.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
	peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
	peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
	peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
	inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
	pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	termasuk pengetahuan tradisional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.4.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
	peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
	pengembangan pengelolaan keamanan hayati(biosafety)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
	meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
	meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.4.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan	URUSAN PEMERINTAHAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat	BIDANG KEHUTANAN		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan
	menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan kualitas lingkungan	meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
	meningkatkan pengelolaan air limbah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
	meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	meningkatkan kualitas lahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0009 Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
	menurunkan laju deforestasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
	meningkatkan kualitas ekosistem gambut	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0009 Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
	melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.3.04.0004 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.4.04.0004 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
	pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0007 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.02.0002 Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0007 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0006 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.4.04.0004 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
	penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
	menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	2.11.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	ekologis lahan produktif	LINGKUNGAN HIDUP	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
	memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
Pembangunan rendah karbon	menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
	melakukan pembangunan rendah karbon	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
	efisiensi energi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0002 Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0003 Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0004 Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.09.0003 Perencanaan kegiatan konservasi energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0001 Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0005 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0001 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0002 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0003 Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
	peningkatan transportasi berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.10.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.11.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0006 Pengelolaan Bandara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0002 Pembangunan Bandar Udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0003 Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0004 Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.03.0001 Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.03.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.03.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.04.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
	peningkatan cadangan karbon	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan
	pencegahan pengurangan cadangan karbon	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
	implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	pengembangan industri hijau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
	pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kesempatan dari ekonomi hijau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa
	mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0002 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0003 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0004 Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0005 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0007 Perencanaan kegiatan penyediaan biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0008 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0001 Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0002 Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0003 Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNl, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0005 Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN SUMBER DAYA MINERAL	ENERGI BARU TERBARUKAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
	mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Pekerjaan hijau	mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0007 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
	memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru	menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02.0006 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0012 Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0006 Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0004 Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0005 Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0007 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0012 Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.07.0003 Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.09.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.3.11.0002 Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.3.12.0002 Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0004 Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.04.0004 Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02.0006 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0001 Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0004 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.06.0001 Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar
	menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.03.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0004 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0005 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir
	mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DAN PULAU-PULAU KECIL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

4.3.3. Prioritas Nasional 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Untuk mengawal keberhasilan proses meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.24

Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	51	-	-
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	136,7	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17
3	Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	18,01
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0	Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,92
5	Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	-	-

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per (Rupiah)	2.926,18
7	Total Kredit/PDB (%)	37,8	Total Kredit/PDRB (%)	24,40
8	Inklusi Keuangan (%)	91	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72
9	Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang)	3,00 – 3,50	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 – 5,76
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,10	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24
11	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	Proporsi jumlah UKM non pertanian	11,15
			Proporsi jumlah IKM	3,53
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	Rasio Kewirausahaan	3,59
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	22,10	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	43,08
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,11

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pada RKP Tahun 2025 serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.25

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Melanjutkan pembangunan infrastruktur	membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	menyinerjikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05.0006 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.03.0002 Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
	menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0027 Pemeliharaan Berkala Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0034 Pembangunan Terowongan/Tunnel
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0037 Pembangunan Underpass
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0039 Pembangunan Flyover
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan
	mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	internet sinyal lemah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.3.01.0013 Pembinaan dan fasilitas start-up digital di wilayah provinsi
	memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.3.01.0014 Pendampingan dan fasilitas adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)
Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya	menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standarisasi dan sertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0003 Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0004 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0009 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0010 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0012 Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
	mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0012 Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
	melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
	mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0003 Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
	mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
Penguatan koperasi	penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0012 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0014 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0016 Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
	integrasi data ekonomi kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0012 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
	percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual
	perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0014 Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif
	meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan daya saing produk kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
	pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
	penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0016 Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
	mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0012 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	3.26.04.1.02.0014 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0016 Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
	memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
	perbaiki sistem manajemen promosi pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0009 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.3.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.3.01.0007 Fasilitas pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah
	menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0008 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0007 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0008 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	Reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0008 Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0007 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar
	meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0011 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi
	pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0007 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.3.01.0007 Fasilitas pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0007 Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0008 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0012 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0013 Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0015 Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0016 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0004 Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0005 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0006 Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0007 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
	pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0008 Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0009 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi
	pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.3.05.0001 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Mengembangkan industri kreatif	memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
	memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0003 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0005 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional,	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah			
Pendalaman sektor keuangan.	penguatan peran perbankan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan peran sektor keuangan nonbank	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

4.3.4. Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.26

Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Rata – rata Nilai Pisa (Membaca)	396	Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	52,63
2	Rata – rata Nilai Pisa (Matematika)	404	Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	15,79

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
3	Rata – rata Nilai Pisa (Sains)	416	-	-
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)	62,89	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	52,42
5	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)	54,36	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	35,44
6	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,33	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91
7	Harapan lama sekolah (tahun)	13,32	Harapan Lama Sekolah	14,39
8	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	33,94	-	-
9	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38
10	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31
11	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26
12	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,12	-	-
13	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50
15	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	71
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,11
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	akupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,424	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 – 0,390
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53-69,54

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
19	Indeks Perlindungan Anak	65,20	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15
20	Indeks Pembangunan Pemuda	64,56	-	-
21	Indeks Pembangunan Gender	92,15	-	-
22	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94	-	-
23	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69	-	-
24	Peringkat Indeks Inovasi Global	60	Indeks Inovasi Daerah	72,50
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37-5,76
26	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30	-	-
27	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56,3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41
28	Peringkat pada SEA Games	3	-	-

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Prioritas Nasional Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.27

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0015 Pembangunan Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0016 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0037 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0040 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0029 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0032 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0012 Pembangunan Ruang Laboratorium
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0036 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0063 Penyediaan infrastruktur TIK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0001 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0002 Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0003 Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0004 Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0005 Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0006 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0018 Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0020 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0028 Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
	Revitalisasi pendidikan nonformal	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
	penguatan tata kelola pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0022 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas
	menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PERLINDUNGAN ANAK		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
	memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG TENAGA KERJA		Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
	meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
	meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0014 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0062 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
	meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0029 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0032 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0048 Pemeliharaan Mebel
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0058 Penyediaan infrastruktur TIK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0061 Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0065 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0067 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0068 Penataan Ruang/Sudut Baca
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0070 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0071 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0074 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0076 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0077 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0078 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
	memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0001 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0003 Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0012 Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0014 Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0020 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Technology, Engineering, Art, Mathematics	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0022 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0025 Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0027 Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0030 Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05.0002 Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05.0003 Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
	memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0030 Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
	memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi			Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0038 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
	meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0035 Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas
	meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
	meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.3.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	yang dapat dicegah dengan Imunisasi
	memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
	meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
	mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kesehatan pesantren			
	memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0057 Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
	membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine)			
	penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0031 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0041 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0043 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0051 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0052 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0053 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0054 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.3.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0046 Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KESEHATAN	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
	penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0046 Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan peningkatan peran kader kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.01.0041 Mendukung Pembangunan Puskesmas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0011 Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
	peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KESEHATAN	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0008 Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0010 Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0011 Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KELUARGA BERENCANA		Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyediaan fasilitas pendukung keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0001 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
	penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KELUARGA BERENCANA		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
	pemenuhan hak anak secara universal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
	perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
	peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
	penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
	penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
	peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
	penghormatan dan perlindungan terhadap	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyanggah disabilitas dan lansia			Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
	mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
	mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
	memperluas program pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyanggah disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlintas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0005 Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyanggah disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
	mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyanggah disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0005 Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyanggah disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
	membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyanggah disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.	DAN KAWASAN PERMUKIMAN	UTILITAS UMUM (PSU)	untuk Menunjang Fungsi Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Meningkatkan Prestasi Olahraga	mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.3.05.0001 Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
	mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
	meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
	mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
	memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi

4.3.5. Prioritas Nasional 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Untuk mengawal keberhasilan proses Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.28

Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,46 - 8,53
2	Biaya Logistik (% PDB)	13,5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,63
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,50

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses proses Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negermaka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.29

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 5. proses Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.3.04.0001 Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.06.1.01.0001 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.06.1.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
	penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0004 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0004 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0007 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0008 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0009 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
	akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional	- Peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besi-baja nonkonstruksi pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap: a. industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara) b. industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0009 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global	- Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui: a. penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru b.penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan c. peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	- Optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui: a. standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama b. peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0004 Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0005 Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0003 Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
		Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	- Perkuatan sistem logistik nasional melalui: a. penguatan kebijakan logistik b. pengintegrasian dan digitalisasi logistik c. pengembangan infrastruktur penunjang logistik d. penguatan pelaku logistik e. peningkatan sumber daya manusia logistik			

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	- peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui: a. peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi b. peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global c. peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.3.03.0001 Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.4.03.0001 Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
	- peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui: a. peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global b. peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi c. peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi d. peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam e. peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif f. peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global g. peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle h. peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

4.3.6. Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Untuk mengawal keberhasilan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.30

Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Tingkat kemiskinan	7,0-8,0	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	0	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	0
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	15,00	-	-
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,20
5	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	67,00	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64,00
7	Persentase desa mandiri (%)	4,00	Persentase Desa Mandiri (%)	7,83
8	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,35	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	39,22

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.31
Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 6.
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Membangun desa dan membangun dari desa	peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
	penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0006 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0020 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0024 Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.01.0041 Mendukung Pembangunan Puskesmas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0005 Pembangunan Bendungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0071 Rehabilitasi Bendungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01.0011 Optimalisasi TPA/TPST/SPA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0011 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0005 Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.3.01.0017 Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.3.01.0018 Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota
	penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa	MASYARAKAT DAN DESA		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0017 Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0018 Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0020 Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0013 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0020 Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
	pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pemerataan ekonomi	Pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda)	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0010 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
	pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
	pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Memberantas kemiskinan	penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.05.0001 Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
	penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
	peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0006 Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0007 Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0008 Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
	penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

4.3.7. Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Untuk mengawal pencapaian Prioritas Nasional Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.32

Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	Indeks Reformasi Hukum	70
2	Indeks Persepsi Korupsi	38	Indeks Integritas Nasional	73,16
3	Indeks Materi Hukum	0,51	Indeks Reformasi Hukum	70
4	Indeks Integritas Nasional	74,52	Indeks Integritas Nasional	73,16
5	Indeks Pelayanan Publik	3,68	Indeks Pelayanan Publik	3,84
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90
7	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	-	-
8	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,7	-	-
9	<i>Clearance rate</i> tindak pidana judi	35,00	-	-
10	<i>Clearance rate</i> tindak pidana penyelundupan	7,00	-	-
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,30-12,36	-	-
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,1-10,3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17
14	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1,0	Tingkat Inflasi (%)	2,80-3,60

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provisi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.33

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Reformasi politik	Pengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.3.03.0003 Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.3.03.0003 Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PENCATATAN SIPIL		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.01.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02.0001 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.3.03.0003 Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
	menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PENCATATAN SIPIL		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Reformasi hukum	mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG TENAGA KERJA		
	mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan budaya hukum	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
	penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Reformasi tata kelola pemerintahan	membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat,	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk maubergabung	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0003 Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
	memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
	memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara			
	memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
	memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
	penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0001 Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik
	penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0001 Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
	harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui: a. penataan otonomi daerah menysasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, b.	KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, c. pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, d. optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)	KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
		KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
	penguatan manajemen kinerja pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan	meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan kemampuan surveillance dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui:	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menutup semua akses ke situs perjudian online	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	meningkatkan pengetahuan dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kesadaran masyarakat tentang bahaya judi	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	Arah kebijakan yang difokuskan pada perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani melalui:	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
	penanganan konflik sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0012 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.3.05.0001 Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.4.05.0004 Fasilitas Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota
Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara	penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Negara dan pembina BUMN	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis nasional difokuskan pada pengembangan a. ekosistem kesehatan bertaraf internasional b. hilirisasi industri berbasis sumber daya alam terutama mineral dan migas c. industri berteknologi menengah-tinggi d. energi baru terbarukan e. sistem logistik nasional f. pariwisata berkualitas dan berkelanjutan g. infrastruktur konektivitas	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	h. infrastruktur Ibu Kota Nusantara i. pembiayaan mikro dan ultra mikro.			

4.3.8. Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Untuk mengawal keberhasilan pencapaian Prioritas Nasional Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.34

Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	71,07	-	-
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58-60,65
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23-72,31
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	170,51

Sumber : RKP Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.35

Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA	2.13.06.3.04.0001 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	2.13.07.4.02.0001 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.3.02.0005 Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.4.02.0005 Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal
	menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi
	meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Melestarikan budaya	meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
	menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
	membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.22.08.5.04.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
	merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.4.01.0006 Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
	membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
	memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi,rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0004 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0005 Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
	menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
	mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
	mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi senimasyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	2.22.10.3.01.0001 Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	2.22.10.3.01.0001 Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi
	memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0004 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
	mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0005 Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	2.22.10.3.01.0001 Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi
	memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
	mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.4.01.0007 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
	melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0004 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0005 Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0006 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Penanganan bencana	meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memutakhirkan sistem peringatan dini bencana	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0022 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0022 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut	KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi
	menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0011 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kesiapan dan ketahanan bencana	DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana
	mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pada bab ini, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Arah dan kebijakan pembangunan tahun 2025 lebih berorientasi pada titik tolak transformasi struktural ekonomi daerah. Ketergantungan Sumatera Barat terhadap sumber daya alam perlu dikurangi dengan meningkatkan daya saing industri pengolahan dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini penting dalam rangka pencapaian Visi Indonesia 2045 untuk keluar dari *middle income trap*.

Uraian dalam Bab V RKPD Tahun 2025 dibagi dua, yaitu analisis indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2022 dan 2023 serta proyeksi indikator makro kabupaten/kota tahun 2024 dan tahun 2025.

5.1. Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan kab/kota. Capaian kinerja provinsi merupakan agregasi dari kinerja kab/kota. Semakin baik kinerja kab/kota maka semakin baik kinerja provinsi.

Pada subbab ini disajikan beberapa capaian indikator kinerja makro seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Indikator dimaksud meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Gini (Gini Ratio). Guna melihat capaian kinerja pembangunan daerah, maka disajikan data capaian tahun 2023 dan progress pencapaiannya untuk kemudian dianalisis berdasarkan wilayah yang setara dalam persentil 0,33 dan persentil 0,67 sehingga terdapat pembagian pencapaian kinerja dalam 3 wilayah.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah perlu disandingkan dengan sesama wilayah yang setara. Perwilayahan yang setara ini membagi 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat ke dalam 3 wilayah yang terdiri dari 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

5.1.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 5.1
Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Laju Pertumbuhan
Ekonomi antar Wilayah yang Setara



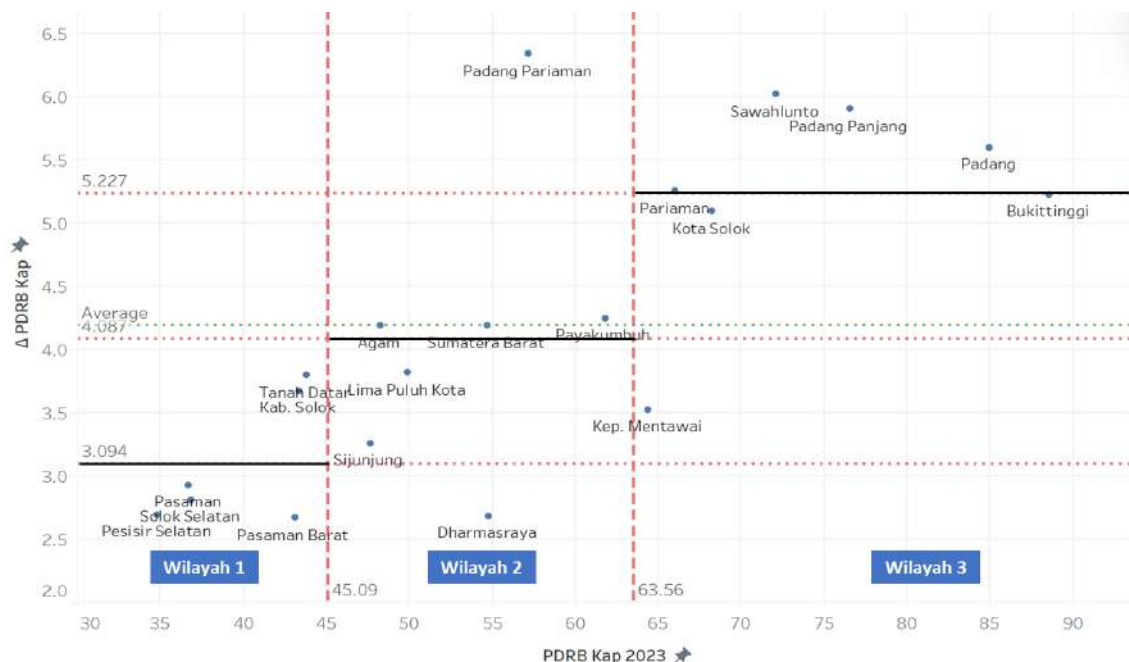
1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Pasaman Barat. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Kep. Mentawai.
2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Pasaman, dan Kota Padang.

- Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Solok Selatan, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Padang Pariaman.

5.1.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian PDRB per Kapita

Pencapaian kinerja peningkatan PDRB per Kapita di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 4,19 juta yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-2. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.2
Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian PDRB per Kapita antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja kenaikan PDRB per Kapita untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

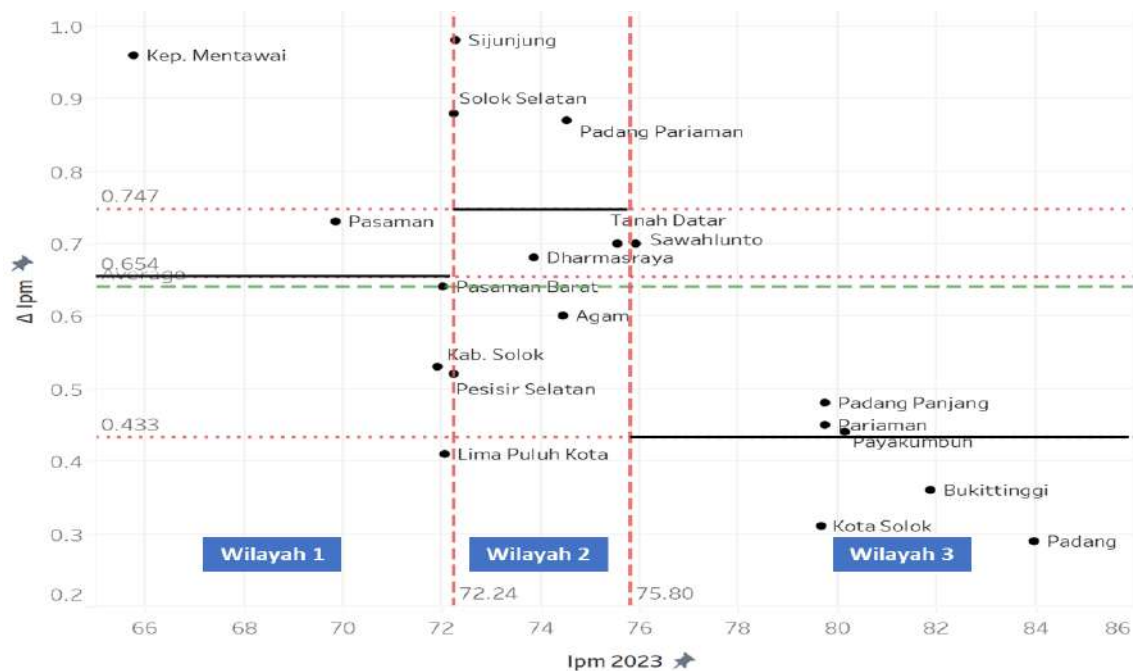
- Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, dan Kab. Pasaman Barat

2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Dharmasraya.
3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi.

5.1.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

Pencapaian kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,61 indeks poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-3. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.3
Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

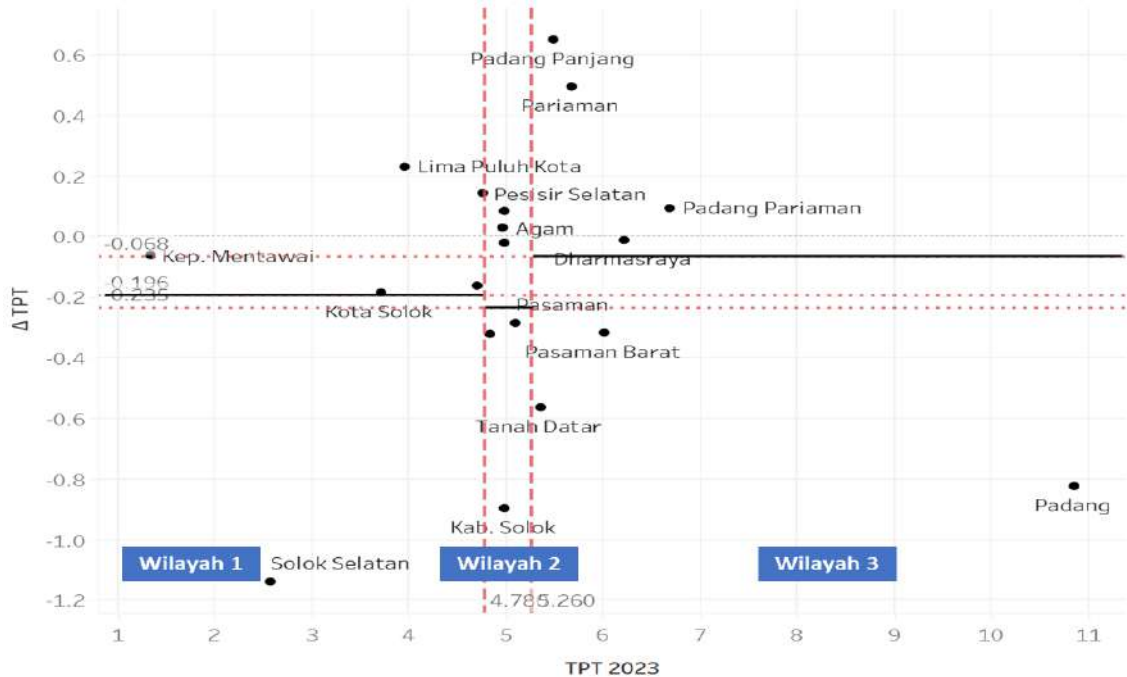
Perbandingan capaian kinerja kenaikan Indeks Pembangunan Manusia untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Kep. Mentawai dan Kab. Pasaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Lima Puluh Kota.
2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, dan Kab. Dharmasraya.
3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi.

5.1.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Pencapaian kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,16 persen poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-4. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.4
Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Pengangguran
Terbuka antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

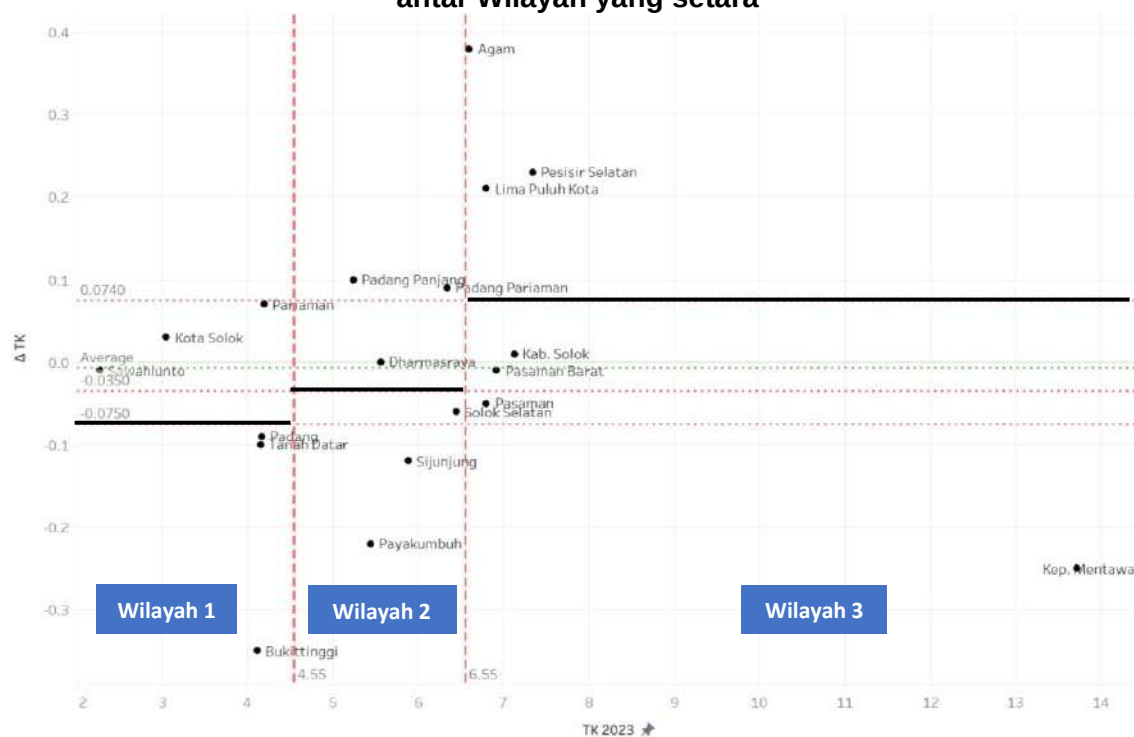
1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kota Solok.
2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Solok, Kab. Pasaman, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Agam, Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi.
3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat, dan Kota Padang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.

5.1.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Kemiskinan

Pencapaian kinerja penurunan Tingkat Kemiskinan di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,01 persen poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-5. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3

wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

**Gambar
Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Kemiskinan
antar Wilayah yang setara**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

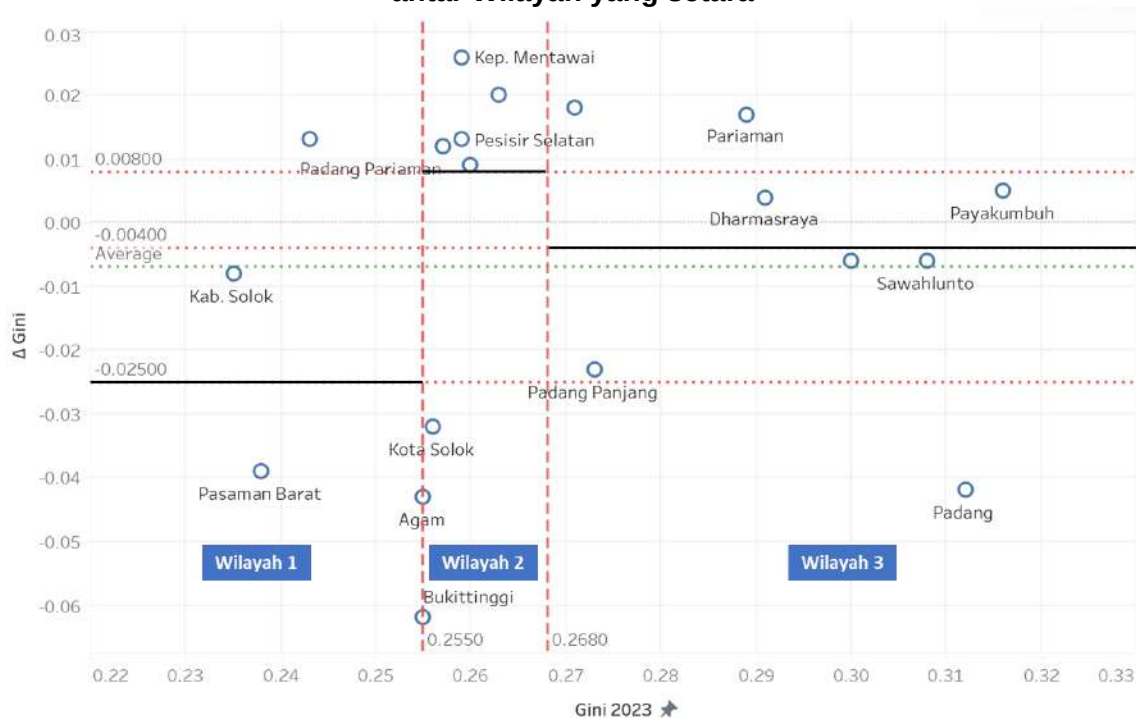
Perbandingan capaian kinerja penurunan Tingkat Kemiskinan untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman.
2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, dan Kota Padang Panjang.
3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pasaman, dan Kab. Pasaman Barat. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, dan Kab. Lima Puluh Kota.

5.1.1.6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Gini

Pencapaian kinerja penurunan Rasio Gini di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,007 indeks poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-6. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.5
Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Rasio Gini
antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja penurunan Rasio Gini untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Pasaman.
2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kota Solok. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Padang Pariaman.

3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang Panjang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Solok Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

5.1.2. Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

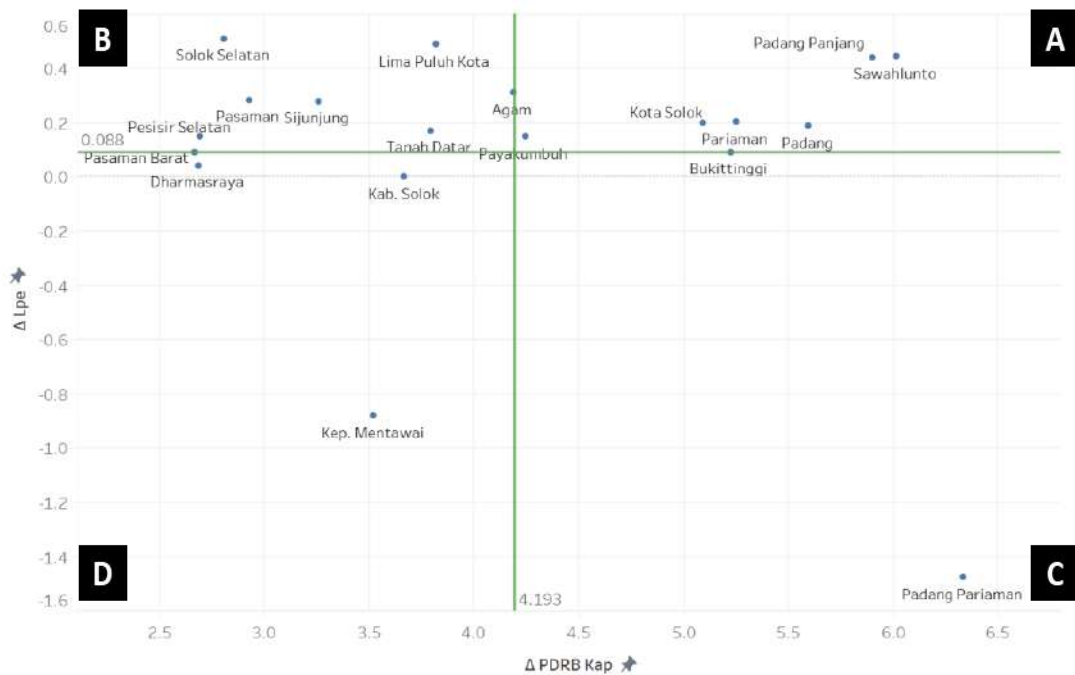
Pada subbab ini disajikan beberapa capaian indikator kinerja makro seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Indikator dimaksud meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini (Gini Ratio). Guna melihat kemajuan dan kualitas pembangunan ekonomi daerah, maka disajikan data capaian tahun 2022 dan 2023 untuk kemudian dianalisis berdasarkan kuadran pencapaian kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Kualitas pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan atau Rasio Gini. Pemulihan ekonomi akibat Pandemi yang terjadi sepanjang tahun 2020-2022 dan pasca COVID-19 menghasilkan efek berbeda-beda di masing-masing kabupaten/kota yang ditunjukkan oleh perbedaan pencapaian untuk setiap indikator, ada yang berada diatas rata-rata provinsi dan ada yang berada dibawah rata-rata provinsi.

5.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pendapatan per Kapita

Kinerja perekonomian kabupaten/kota tercermin dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Peranan kinerja perekonomian di setiap kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat, baik dari sisi sektor lapangan usaha maupun pertumbuhannya. Pada tahun 2023, perekonomian kabupaten/kota menunjukkan kinerja relatif membaik sejak pandemi COVID-19 dimana hampir semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2023, jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini juga berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat yang ikut naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Gambar 5.6
Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan PDRB per Kapita
Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

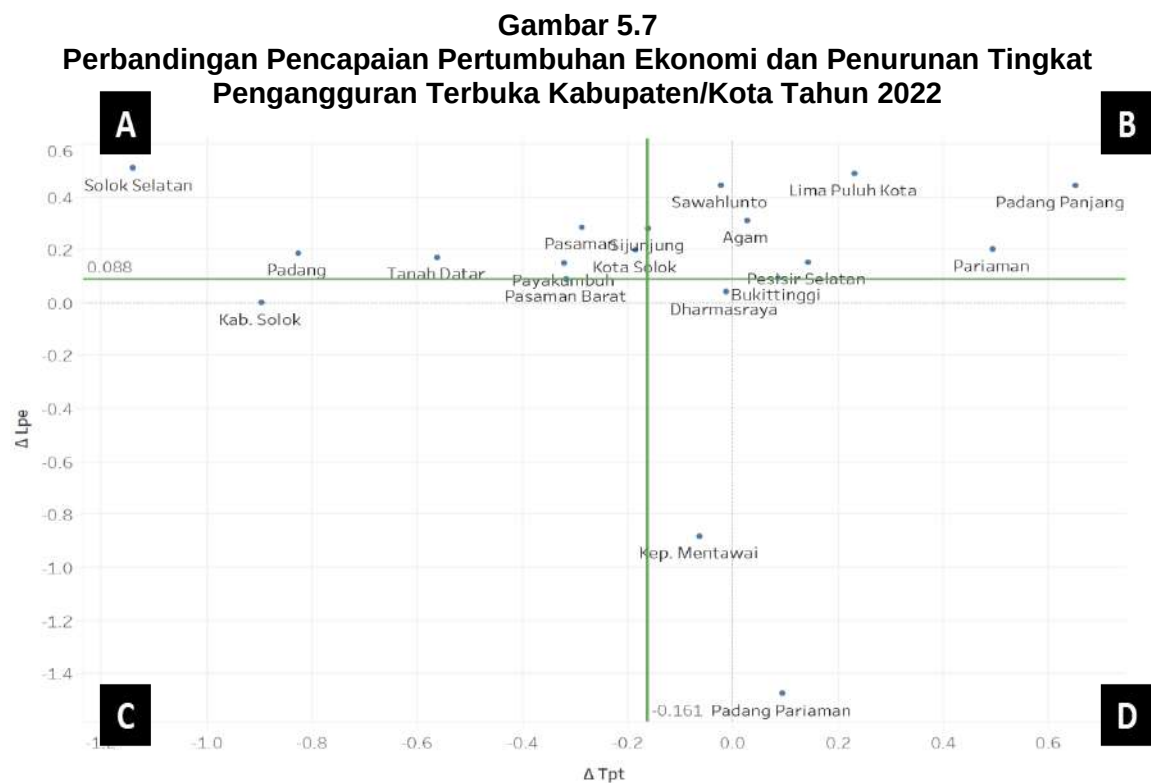
Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian PDRB per kapita terlihat pada gambar V-7. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan peningkatan PDRB per kapita di atas rata-rata peningkatan PDRB per kapita provinsi, yaitu seluruh kota yakni Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.
2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, dan Kab. Solok Selatan.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita provinsi, yaitu Kab. Padang Pariaman.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Pasaman Barat.

5.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Pengangguran

Kualitas pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan membuka lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang. Hal ini dapat diukur dengan melihat perbandingan antara

pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

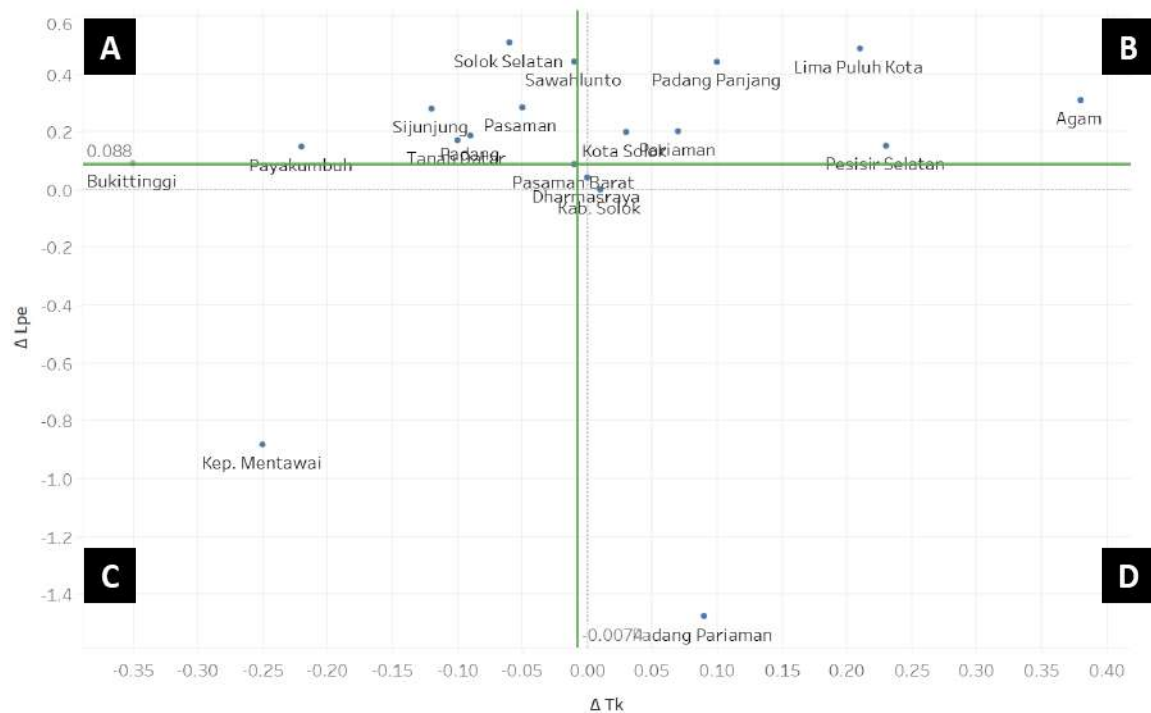
Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada gambar V-8. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan TPT di atas rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh.
2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan TPT di bawah rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan TPT di atas rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Solok dan Kab. Pasaman Barat.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan TPT di bawah rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya.

5.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Kemiskinan

Kualitas pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan membuka lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang. Hal ini dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.

Gambar 5.8
Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian penurunan tingkat kemiskinan terlihat pada gambar V-9. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

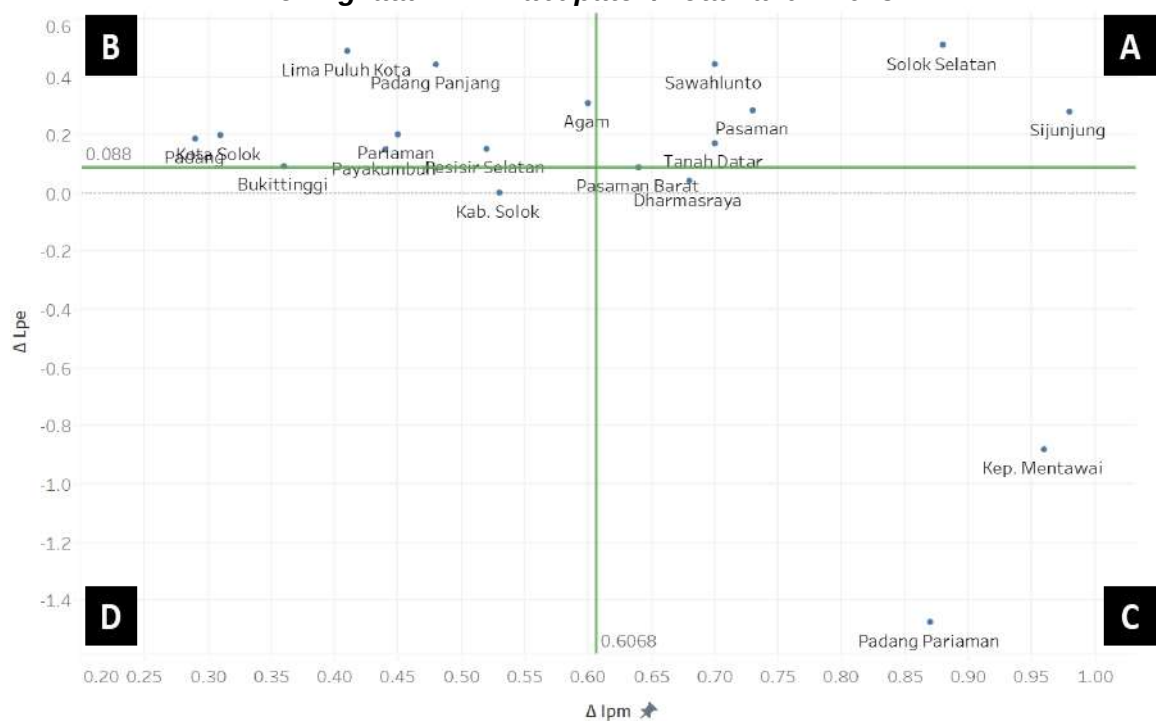
1. Kuadran A : kab/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Tingkat Kemiskinan di atas rata-rata penurunan Tingkat Kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.
2. Kuadran B : kab/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata penurunan Tingkat Kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.

3. Kuadran C : kab/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan Tingkat Kemiskinan di atas rata-rata penurunan Tingkat Kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, dan Kab. Pasaman Barat.
4. Kuadran D : ka/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata penurunan tingkat kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Dharmasraya.

5.1.2.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pertumbuhan ekonomi selain ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan juga ditunjukkan dengan peningkatan nilai IPM. Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai IPM di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.

Gambar 5.8
Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian peningkatan IPM terlihat pada gambar V-10. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

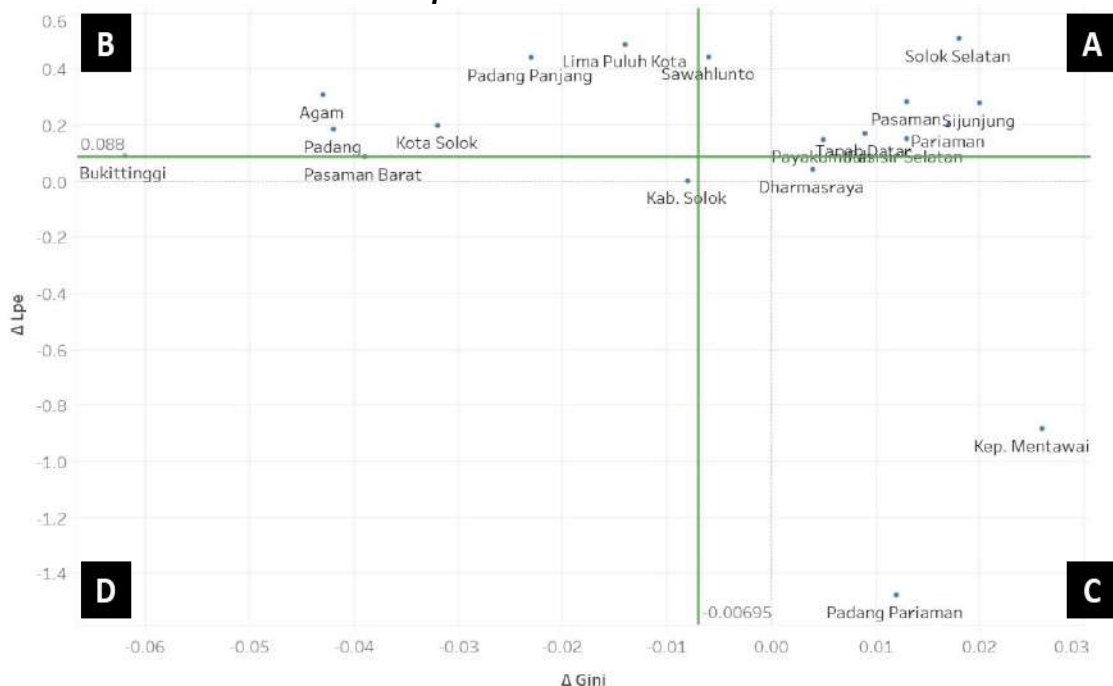
1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan peningkatan IPM di atas rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, dan Kota Sawahlunto.

2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan peningkatan IPM di atas rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Pasaman Barat.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Solok.

5.1.2.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan

Kualitas pertumbuhan ekonomi selain ditunjukkan dengan penurunan TPT dan tingkat kemiskinan serta peningkatan IPM juga ditunjukkan dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan penurunan koefisien Gini di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.

Gambar 5.9
Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Koefisien Gini
Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian peningkatan IPM terlihat pada gambar V-11. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di atas rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai dan Kab. Padang Pariaman.
2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di bawah rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di atas rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di bawah rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh.

5.1.3. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025

Target pembangunan Provinsi Sumatera Barat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dilakukan sendiri maupun bersinergi dengan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat dan dunia usaha. Kinerja pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat selain diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), juga diukur dengan pencapaian Indikator Kinerja Makro. Target indikator makro yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 adalah target berdasarkan hasil analisis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan penyesuaian target pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi dan transformasi struktural untuk indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, IPM, jumlah dan persentase Penduduk Miskin, TPT, dan Indeks Gini.

Dalam mewujudkan sinergi perencanaan provinsi dan kabupaten/kota dimaksud, maka ditetapkan arahan target indikator kinerja makro tahun 2025 bagi setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada Tabel 5.1 menyajikan proyeksi target indikator makro kabupaten/kota yang mendukung pencapaian target Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya pada Tabel 5.2 menyajikan proyeksi target indikator komponen pembentuk IPM untuk seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024-2025

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)		PDRB ADHB per Kapita (Rp. Juta)		IPM		Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Gini	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Kab. Kep. Mentawai	4,73	4,85	37,57	39,12	70,20	77,32	66,90	67,81	13,70	13,38	13,22	12,74	1,33	1,39	0,227	0,226
2	Kab. Pesisir Selatan	4,85	4,87	20,91	21,55	37,41	40,41	72,74	73,25	34,70	33,90	7,10	6,88	4,63	4,59	0,243	0,242
3	Kab. Solok	4,63	4,73	28,23	29,19	44,69	47,66	72,45	73,01	26,44	25,83	6,68	6,31	4,77	4,67	0,240	0,238
4	Kab. Sijunjung	4,77	4,84	31,42	32,59	49,38	52,74	73,15	73,98	15,36	15,00	5,66	5,36	4,58	4,49	0,240	0,239
5	Kab. Tanah Datar	4,62	4,72	29,27	30,30	45,48	48,48	76,67	77,51	14,76	14,42	3,89	3,68	5,12	5,09	0,243	0,242
6	Kab. Padang Pariaman	5,03	5,07	32,24	33,53	60,06	64,16	75,64	76,47	26,57	25,95	6,03	5,73	6,59	6,62	0,245	0,244
7	Kab. Agam	4,82	4,89	30,59	31,58	50,40	53,77	75,21	75,81	31,34	30,61	6,26	6,19	4,84	4,93	0,294	0,293
8	Kab. Lima Puluh Kota	4,78	4,87	32,68	34,02	53,12	57,11	72,18	72,60	25,53	24,94	6,52	6,25	3,82	3,63	0,206	0,205
9	Kab. Pasaman	4,82	4,88	22,69	23,38	38,67	41,53	70,44	71,06	20,23	19,76	6,39	6,01	4,90	5,51	0,223	0,222
10	Kab. Solok Selatan	4,81	4,85	23,47	24,09	38,39	40,59	72,77	73,38	11,95	11,67	6,06	5,70	2,56	3,22	0,248	0,247
11	Kab. Dharmasraya	4,89	4,96	35,90	37,39	57,72	62,20	74,47	75,02	15,78	15,41	5,14	4,77	6,05	5,59	0,286	0,285
12	Kab. Pasaman Barat	4,91	5,02	28,97	30,11	44,93	48,35	72,05	72,80	33,73	32,95	6,71	6,50	5,74	4,92	0,276	0,275
13	Kota Padang	5,33	5,35	55,13	57,89	92,04	99,95	84,74	85,18	43,47	42,46	4,05	3,92	10,16	9,12	0,352	0,351
14	Kota Solok	5,03	5,07	42,77	44,14	71,24	76,13	80,06	80,35	2,20	2,15	2,73	2,43	3,64	3,75	0,286	0,285
15	Kota Sawahlunto	5,09	5,11	47,16	48,91	77,66	84,13	76,34	76,96	1,43	1,39	2,28	2,28	4,81	4,36	0,314	0,313
16	Kota Padang Panjang	5,15	5,16	50,49	52,20	80,34	85,74	80,01	80,43	2,92	2,85	5,03	4,85	5,35	3,94	0,297	0,296
17	Kota Bukittinggi	5,27	5,28	57,53	60,54	96,47	105,24	82,39	82,83	6,29	6,14	3,76	3,73	4,75	4,93	0,315	0,314
18	Kota Payakumbuh	5,29	5,30	35,55	36,86	67,36	72,96	80,55	80,95	8,39	8,20	5,05	4,67	4,64	4,44	0,309	0,308
19	Kota Pariaman	5,14	5,16	42,03	43,41	69,01	73,59	80,27	80,88	3,85	3,76	4,10	3,99	5,37	4,70	0,271	0,270
	SUMATERA BARAT	5,00	5,05	34,75	36,10	57,94	62,29	76,67	77,41	338,70	330,84	5,83	5,65	5,75	5,55	0,291	0,290

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Tabel 5.2
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024-2025 dan Komponen Pembentuknya

No.	Kabupaten/Kota	IPM		Usia Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Kab. Kep. Mentawai	66,90	67,81	71,37	72,08	13,15	13,37	7,90	8,05	6.992	7.096
2	Kab. Pesisir Selatan	72,74	73,25	73,61	73,98	13,36	13,45	8,66	8,74	10.099	10.250
3	Kab. Solok	72,45	73,01	72,50	73,01	13,63	13,74	7,99	8,05	10.874	11.037
4	Kab. Sijunjung	73,15	73,98	72,72	73,44	12,83	12,94	8,69	8,88	11.179	11.346
5	Kab. Tanah Datar	76,67	77,51	74,42	74,91	15,20	15,40	9,11	9,23	11.065	11.230
6	Kab. Padang Pariaman	75,64	76,47	74,19	74,75	14,34	14,48	8,59	8,78	11.600	11.773
7	Kab. Agam	75,21	75,81	74,47	74,80	14,04	14,18	9,34	9,47	10.554	10.712
8	Kab. Lima Puluh Kota	72,18	72,60	73,12	73,50	13,44	13,46	8,16	8,20	10.436	10.592
9	Kab. Pasaman	70,44	71,06	72,17	72,74	13,37	13,49	8,21	8,28	9.039	9.174
10	Kab. Solok Selatan	72,77	73,38	72,35	72,92	12,89	12,98	8,76	8,85	11.043	11.208
11	Kab. Dharmasraya	74,47	75,02	74,16	74,56	12,82	12,94	8,78	8,86	12.075	12.256
12	Kab. Pasaman Barat	72,05	72,80	72,28	72,79	13,71	13,72	8,70	8,81	9.678	9.822
13	Kota Padang	84,74	85,18	74,80	74,91	17,26	17,48	11,65	11,68	15.310	15.539
14	Kota Solok	80,06	80,35	74,82	75,07	14,43	14,47	11,45	11,48	12.895	13.088
15	Kota Sawahlunto	76,34	76,96	73,71	74,04	13,89	13,86	10,56	10,67	10.988	11.152
16	Kota Padang Panjang	80,01	80,43	74,15	74,27	15,37	15,46	12,04	12,14	11.476	11.647
17	Kota Bukittinggi	82,39	82,83	75,64	75,95	15,03	15,04	11,76	11,85	14.062	14.272
18	Kota Payakumbuh	80,55	80,95	74,95	75,15	14,31	14,32	11,04	11,15	14.183	14.395
19	Kota Pariaman	80,27	80,88	74,19	74,54	14,86	14,93	10,96	11,09	13.551	13.753
	SUMATERA BARAT	76,67	77,41	74,22	74,79	14,12	14,13	9,37	9,47	11.547	11.719

Sumber: Hasil Analisis (2024)

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2025. Kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan prioritas, sasaran serta arah kebijakan pembangunan tahunan RPJMD pada tahun 2025, dan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan antar daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan provinsi Tahun 2025, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas kemajuan pembangunan antar daerah, baik pada aspek sumberdaya manusia maupun aspek sosial ekonomi. Adapun arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

5.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi

Merujuk kepada tema RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang tetap fokus pada menekankan pada transformasi sektor strategis dengan tetap memperhatikan pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan maka kebijakan pembangunan ekonomi menysasar pada sektor ekonomi strategis sesuai dengan program unggulan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yaitu pertanian, wirausaha dan usaha kecil menengah, serta pariwisata yang bertransformasi dari sektor primer ke sekunder dan tersier..

Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi ditahun 2025 diharapkan memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan PDRB Per kapita, penurunan tingkat kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi juga mulai disasar pada Sektor Jasa yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah tinggi seperti sektor pariwisata, jasa pendidikan serta jasa keuangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap berfokus pada penurunan angka kemiskinan terutama melalui pengembangan sektor pertanian yang terpadu, hal ini mengingat kantong kemiskinan dominan berada pada daerah perdesaan yang sebagian besar pada sektor pertanian, selain itu penurunan angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan baru di berbagai sektor ekonomi khususnya di perkotaan

dengan upaya pembinaan dan kemudahan akses keuangan untuk menurunkan angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sementara itu secara umum sektor pariwisata khususnya wisata kuliner dan pemantaban Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten-kabupaten diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pertanian baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis pertanian secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengimplementasikan skema *corporate farming* bisa menjadi pilihan yang pada prinsipnya hampir sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak begitu terlihat lagi perannya. Bentuk lain yang mungkin jadi pilihan adalah penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai motor bagi masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar di pasar pangan yang didominasi oleh tengkulak.
 - b. Perlunya implementasi pertanian organik pada kawasan sentra pertanian dan pemanfaatan hasil pertanian organik.
 - c. Gerakan untuk mengajak generasi muda untuk bertani bisa juga menjadi pilihan lain dengan fakta adanya bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak berusia muda dengan *median age* 31 tahun.
 - d. Sektor pariwisata di perdesaan juga bisa berkembang dengan mengawinkan kegiatan bertani dengan pengalaman wisata melalui pengembangan desa wisata di berbagai tempat. Selain itu pemanfaatan kawasan hutan produksi dengan mekanisme perhutanan sosial dapat juga menjadi alternatif skema *ecowisata* di kawasan perhutanan sosial.
- Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.
2. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor industri dan perdagangan baik dari segi

manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan standar mutu komoditas potensial dan diversifikasi komoditas perdagangan terutama komoditas ekspor. Hal ini perlu ditunjang dengan perluasan implementasi digitalisasi perdagangan melalui penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar digital.
- b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM serta penguatan SDM bagi pelaku IKM dan UMKM pada komoditas potensial. Hal ini perlu ditunjang oleh fasilitasi kemudahan investasi bagi investor lokal, nasional, maupun investor luar negeri.
- c. Penumbuhan wirausaha terutama wirausaha muda dan woman enterpreneur untuk dapat membuka lapangan usaha di komoditas potensial di sektor-sektor strategis.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Pasaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

3. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dengan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pariwisata baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan industri pariwisata halal dengan peningkatan kualitas destinasi yang memenuhi aspek amenities, aksesibilitas, dan atraksi dengan penekanan pada manajemen pengelolaan destinasi yang bertumpu pada komunitas seperti desa wisata.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi Informasi serta memperkuat kemitraan Hexahelix.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan semua daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi.

5.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan

Dalam jangka panjang dan menengah, sasaran yang ingin dicapai di bidang kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan salah satu arah kebijakan nasional adalah “Peningkatan Kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan”, dimana bidang kesehatan ditekankan pada Sistem Kesehatan dengan indikator terkait prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 14% , Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk.dan Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%. Untuk Tahun 2025 terdapat dukungan *major project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah diidentifikasi isu terkait pada bidang kesehatan diantaranya peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan, relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat, dan pentingnya pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat. Yang tak kalah pentingnya adalah permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*Stunting*).

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, difokuskan pada upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan antara lain:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing.
3. Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan SDM kesehatan
4. Penurunan angka prevalansi stunting dan pelaksanaan aksi konvergensi.
5. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.

6. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif melalui GERMAS.

Arah kebijakan yang diambil untuk melaksanakan prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan IPM kabupaten yang capaian indeks kesehatannya masih rendah, khususnya diarahkan bagi kabupaten/kota yang memiliki Angka Harapan Hidup (UHH) yang masih dibawah rata-rata Provinsi. Daerah tersebut menjadi prioritas dilakukannya peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan partisipasi masyarakat akan kesehatan. Sementara itu bagi daerah yang sudah AHH yang relatif baik terus didorong untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang menyeluruh dan berdaya saing melalui penyediaan sarana, prasarana dan SDM pendukung, juga memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan berfokus pada penanganan pandemi yang masih berlangsung. Secara umum, poin arah kebijakan kesehatan sebagaimana tersebut diatas perlu menjadi perhatian bersama seluruh Kabupaten/Kota.

Khusus terkait percepatan penanganan stunting sangat perlu diprioritaskan seluruh daerah, karena seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah menjadi daerah lokus stunting sejak Tahun 2022. Prevalensi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan manusia. Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program. Percepatan penurunan stunting perlu diupayakan dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, sehingga target nasional Tahun 2025 sebesar 14 % diharapkan bisa dicapai bersama juga di tingkat daerah di Sumatera Barat.

5.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan

Kebijakan nasional terkait pembangunan bidang pendidikan salah satu prioritas pembangunannya adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan nasional dalam mendukung prioritas dimaksud adalah dengan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

tahun 2025 maka salah satu arah kebijakan nasional adalah “Peningkatan Kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan”, dimana pendidikan ditekankan pada Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter, dengan dukungan major project terkait Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0).

Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah diidentifikasi isu terkait dimana peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Sumatera Barat. Selain itu, adopsi kebijakan merdeka belajar juga menjadi penting untuk menghadirkan pendidikan bermutu tinggi, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata. Dimana Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat. Kemudian, penting diperhatikan terkait meningkatnya kebutuhan lulusan pendidikan menengah yang terampil dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan di daerah .

Kebijakan pembangunan bidang pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025, difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan arah kebijakan antara lain:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
2. Pemerataan akses pendidikan bagi semua baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.
3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui adopsi kebijakan merdeka belajar yang berpihak pada kebutuhan anak/siswa.
4. Pembangunan sarana prasarana pendukung pendidikan yang diarahkan untuk mendukung pembelajaran pasca pandemi, seperti sanitasi yang layak di sekolah, dukungan akses teknologi informasi yang memadai, dan lainnya.
5. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pendistribusian tenaga pendidik di semua daerah.
6. Pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah, dan relevan dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja.
7. Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan peningkatan literasi masyarakat.

Arah kebijakan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan IPM kabupaten/kota yang capaian komponen pendidikannya masih rendah di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan untuk seluruh kabupaten di Sumatera Barat yang juga memiliki capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten tersebut menjadi prioritas untuk peningkatan

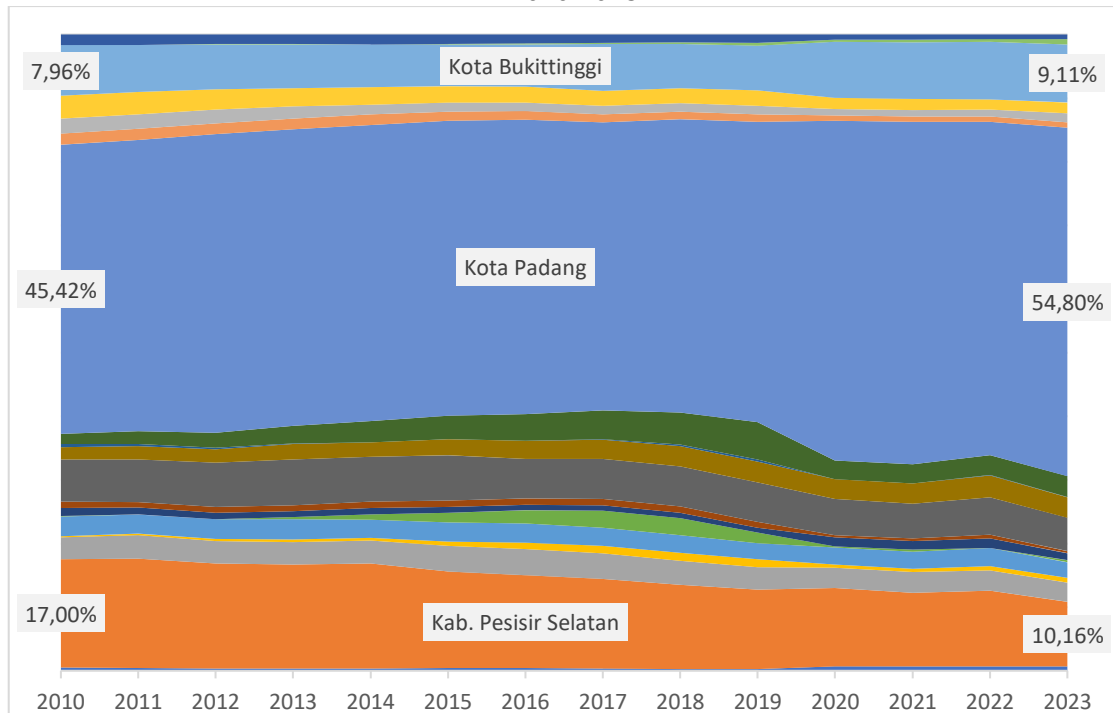
kualitas dan layanan pendidikan terutama dalam membangun ruang kelas baru, peningkatan akses dan jangkauan pendidikan, serta penyediaan tenaga pendidikan secara kuantitas dan kualitas. Sementara itu bagi daerah yang sudah memiliki RLS dan HLS yang relatif baik terus didorong untuk meningkatkan daya saing melalui pelayanan pendidikan secara efisien dan merata. Adopsi kebijakan merdeka belajar dan pengembangan pendidikan karakter juga harus terus didorong dalam proses peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di ruang kelas.

Selanjutnya, daerah dengan TPT yang masih tinggi perlu didorong untuk terus melakukan penguatan pendidikan vokasi melalui upaya kerjasama dan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia industri yang bisa meningkatkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

5.2.4. Arah Kebijakan Pemerataan Wilayah

Salah satu Prioritas Nasional dalam jangka menengah dan panjang adalah “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”. Prioritas ini dapat diukur salah satunya dengan Indeks Williamson. Kondisi pandemi COVID-2019 di sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 memperlebar ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Indeks Williamson yang pada tahun 2019 menunjukkan angka 0,274 naik tajam menjadi 0,321 di tahun 2023. Kota Padang menjadi daerah yang dominan dalam menyumbang ketimpangan Sumatera Barat, naik dari 45,42% pada tahun 2010 menjadi 54,53% pada tahun 2023. Nilai PDRB per kapita Kota Padang yang jauh di atas rata-rata provinsi membuat tingkat ketimpangan wilayah di Sumatera Barat meningkat tajam. Di sisi lain Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah penyangga Kota Padang justru memiliki nilai PDRB per kapita yang jauh di bawah rata-rata provinsi. Hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat.

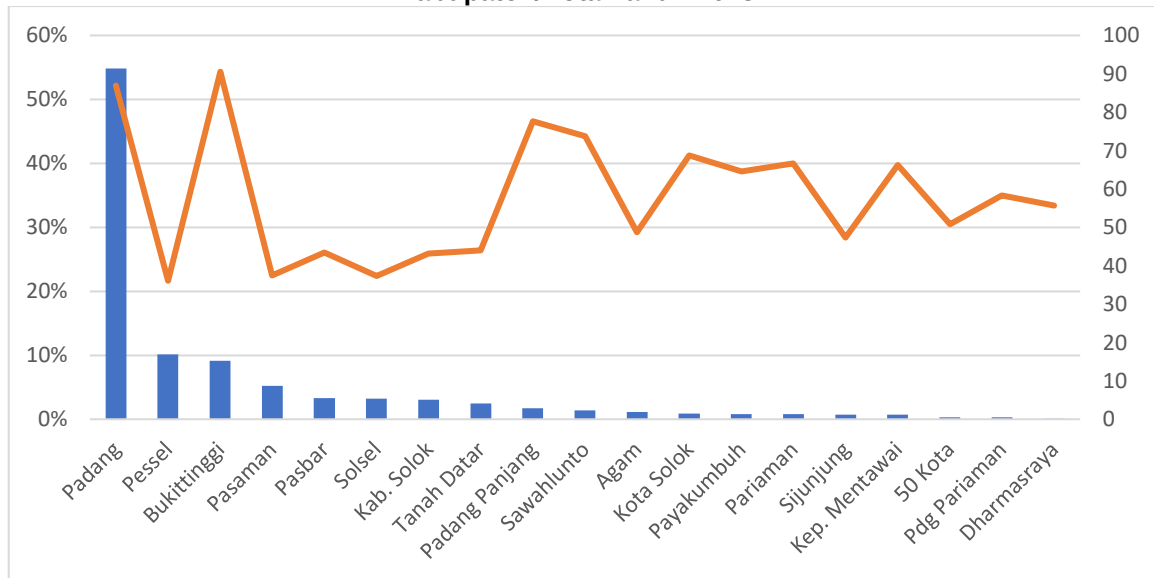
Gambar 5.10
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Secara visual ketimpangan antar wilayah terlihat dari Gambar V-13 yang secara jelas menunjukkan posisi relatif Kota Padang yang jauh berbeda dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan secara *gradual* perkembangan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Barat mengarah kepada pembentukan Kota Padang sebagai *Primate City*. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian dalam kerangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah.

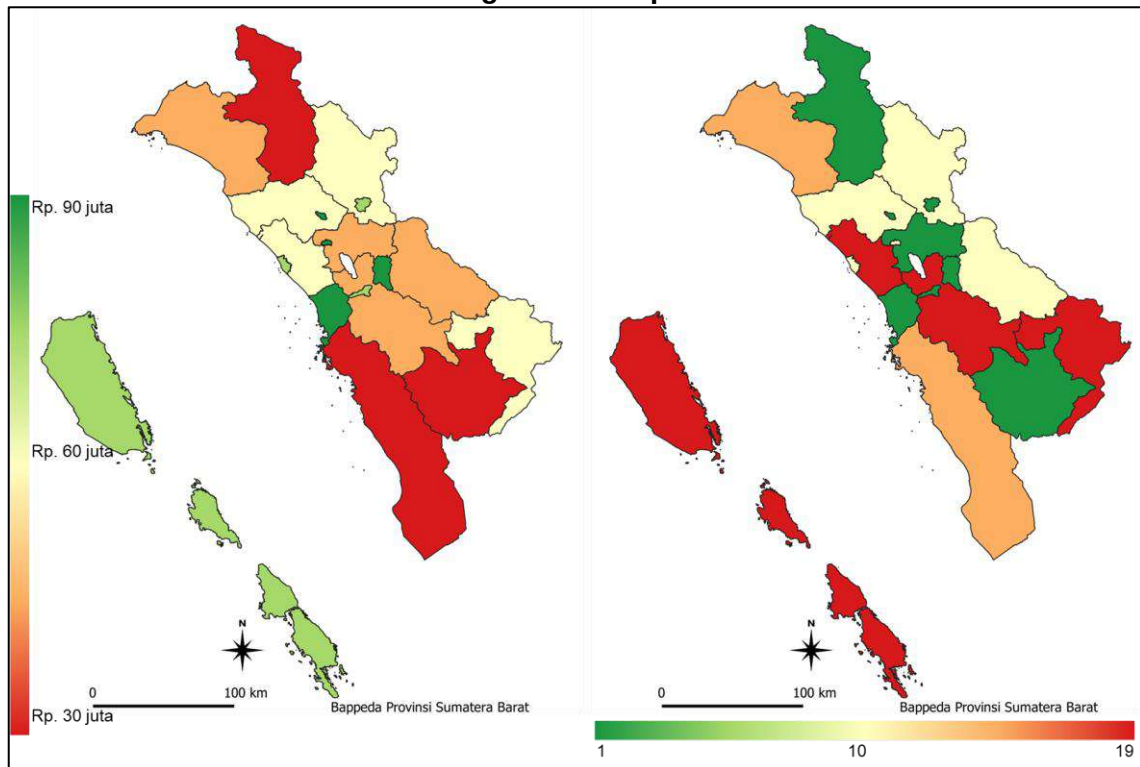
Grafik 5.1
Kontribusi Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah dibandingkan dengan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Ketimpangan pendapatan secara wilayah ini perlu disandingkan dengan hasil pencapaian kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023. Kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2023 terlihat pada gambar V-14 dimana warna hijau menunjukkan daerah dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan relatif tinggi dan sebaliknya warna merah menunjukkan daerah dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan relatif rendah.

Gambar 5.11
Peta Perbandingan PDRB per Kapita dan Persebaran Kualitas Pertumbuhan
Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Hasil Analisis (2024)

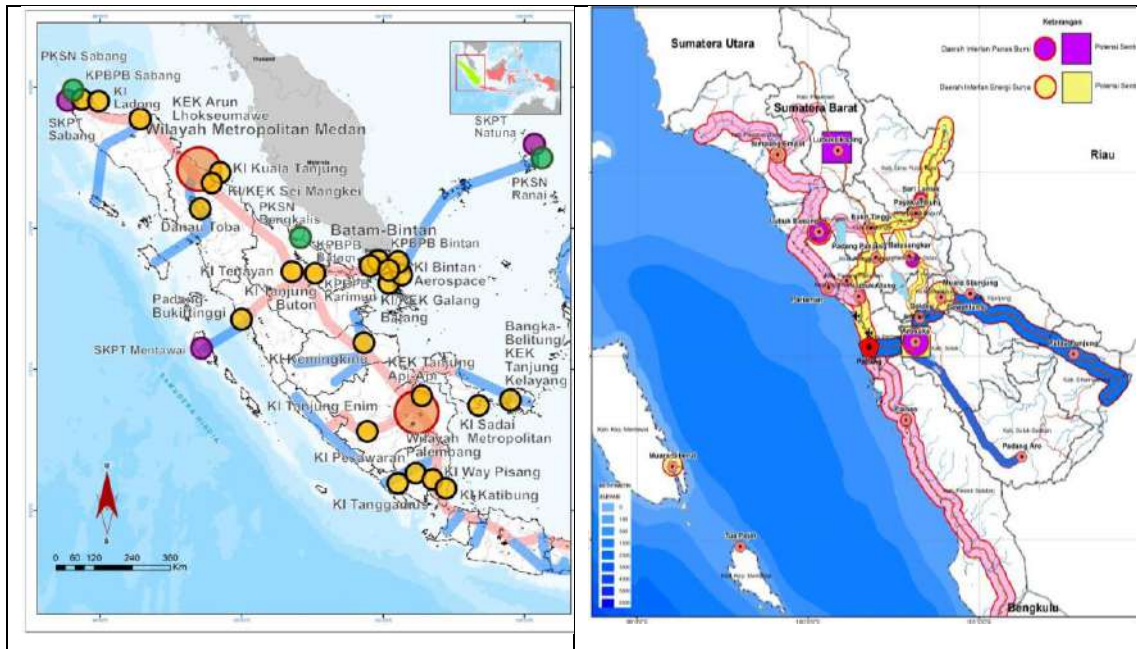
Kualitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2023 ditunjukkan pada Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh dengan Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Pasaman Barat berada satu level di bawahnya. Sementara itu daerah lain yang di tahun 2021 menunjukkan kualitas pertumbuhan yang baik namun pada tahun 2023 cenderung mengalami kontraksi seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Dharmasraya.

Penurunan kesenjangan antarwilayah salah satunya dapat diatasi dengan memberikan stimulus penggerak ekonomi daerah melalui pembangunan jalan yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah ke pusat-pusat kegiatan lokal maupun wilayah. Secara teoritis semakin tinggi aksesibilitas suatu wilayah, maka semakin tinggi kecenderungan aktivitas ekonomi untuk bergerak di sepanjang koridor jalan yang dibangun. Hal ini juga cenderung akan merubah pola penggunaan lahan disepanjang jaringan jalan yang dibangun. Pola pembangunan tersebut dapat mengadopsi pola pertumbuhan berdasarkan koridor atau *corridor development*.

Koridor pertumbuhan bukanlah merupakan hal yang baru. Konsep ini sudah lama berkembang dan telah diimplementasikan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dilanjutkan oleh Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Konsep ini juga diadaptasi secara regional dalam dokumen Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat (MP3ESB). Pertumbuhan ekonomi daerah bertumpu di sepanjang koridor pertumbuhan dan diharapkan memiliki *trickle-down effect* ke wilayah di sekitarnya (*hinterland*).

Gambar 5.12
Pola Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Koridor Pertumbuhan di Pulau Sumatera dan Provinsi Sumatera Barat

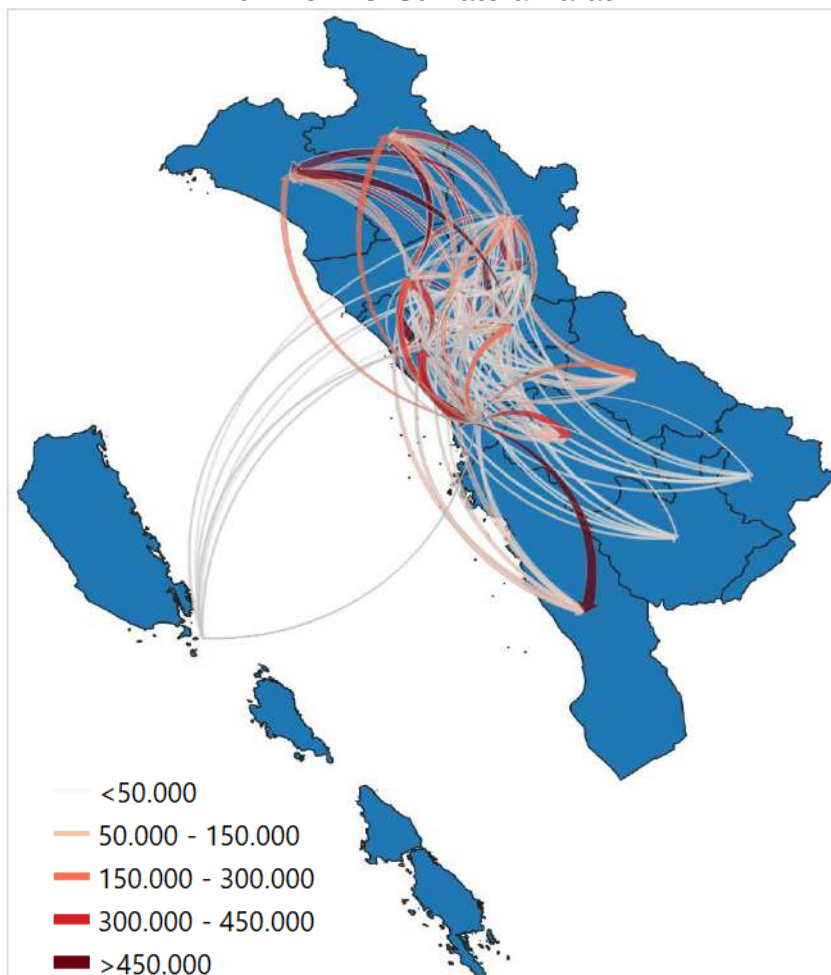


Sumber: RPJMN 2020-2024, MP3ESB

Merujuk kepada koridor pertumbuhan dalam RPJMN 2020-2024 dan dokumen MP3ESB, maka koridor pertumbuhan utama di Sumatera Barat bertumpu pada koridor pertumbuhan Padang – Bukittinggi – Payakumbuh – Batas Riau. Adapun wilayah yang terdelineasi antara lain Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Pertumbuhan pada koridor ini diharapkan dapat mengalir ke wilayah sekitarnya untuk mewujudkan pemerataan wilayah. Pemerataan ini dapat dilakukan dengan penyediaan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Untuk bisa melakukan intervensi penyediaan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dapat dilihat dari pola pergerakan orang dan barang antar wilayah. Berdasarkan data Matriks Asal Tujuan (MAT) pergerakan dari setiap wilayah di koridor pertumbuhan ke wilayah lain di Sumatera Barat ditumpangtindihkan dengan data kondisi ruas jalan provinsi dengan kondisi mantap serta tingkat kualitas pelayanan jalan, maka dapat diperoleh ruas-ruas jalan yang memang perlu diintervensi untuk mengakselerasi *trickle-down effect* dari koridor pertumbuhan ke wilayah *hinterland*.

Gambar 5.13
Pola Pergerakan dari Koridor Pertumbuhan ke Wilayah lain
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Hasil Analisis (2024)

Beberapa ruas jalan yang perlu didorong pembangunannya untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan pemerataan pembangunan wilayah adalah:

1. Ruas jalan Kubu Kerambil - Batu Sangkar (Kab. Tanah Datar)
2. Ruas jalan Sicincin - Kurai Taji (Kab. Padang Pariaman)
3. Ruas jalan Baso - Piladang (Kab. Agam)
4. Ruas jalan Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (Kab. Lima Puluh Kota)
5. Ruas jalan Simpang Napal - Bukit Tual - Tanjung Ampalu (Kab. Sijunjung)
6. Ruas jalan Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur (Kab. Lima Puluh Kota)
7. Ruas jalan Tapus (Kab. Pasaman) - Muaro Sei Lolo – Gelugur (Kab. Lima Puluh Kota)
8. Ruas jalan Lubuk Sikaping (Kab. Pasaman) – Talu (Kab. Pasaman Barat)
9. Ruas jalan Alahan Panjang (Kab. Solok) - Kiliran Jao (Kab. Sijunjung)
10. Ruas jalan Abai Sangir (Kab. Solok Selatan) - Sungai Dareh (Kab. Dharmasraya)
11. Ruas jalan Lubuk Malako - Abai Sangir (Kab. Solok Selatan)

5.2.5. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain

Wilayah perbatasan ditandai dengan karakteristik keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi, pasar, serta energi. Keterbatasan ini juga dipersulit dengan pola penyebaran lokasi permukiman yang relative jauh sehingga sulit menyediakan sarana dan prasarana yang efektif, efisien, terintegrasi dan berkualitas.

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah timur, dengan Provinsi Bengkulu sebelah Selatan, dan dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan di Kawasan Perbatasan
dengan Provinsi Tetangga

No .	Provinsi Berbatasan	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kecamatan
1	Sumatera Utara	Pasaman Barat	4	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh dan Lembah Malintang
		Pasaman	4	Duo Koto, Rao Utara, Rao, Mapat Tunggul
2	Riau	Pasaman	2	Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan
		Lima Puluh Kota	4	Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Harau, Lareh Sago Halaban
		Sijunjung	3	Sijunjung, Kamang Baru, Sumpur Kudus
		Dharmasraya	2	Sitiung dan Koto Baru
3	Jambi	Dharmasraya	2	Koto Baru, Sungai Rumbai
		Solok Selatan	2	Sangir Jujuhan dan Sangir
		Pesisir Selatan	3	Pancung Soal, basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut
4	Bengkulu	Pesisir Selatan	1	Lunang Silaut

Arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi ekonomi unggulan berupa sumberdaya alam, wisata dan sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola meningkatkan kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.
2. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
3. Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena

interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.

4. Peningkatan sumberdaya manusia dalam upaya transfer knowledge.
5. Penyusunan dan implementasi regulasi mendukung pengembangan daerah perbatasan.
6. Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
7. Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas program atau kegiatan antar wilayah perbatasan untuk percepatan pengembangan Kawasan.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026 dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta urusan pilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berserta dengan pemutakhirannya.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 pada masing-masing perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diuraikan berdasarkan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari : a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah; b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) urusan pilihan; e) unsur pendukung urusan pemerintahan; f) unsur penunjang urusan pemerintahan; g) unsur pengawasan urusan pemerintahan; dan h) unsur pemerintahan umum, sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						3.261.594.359.173,00							2.397.448.679.951,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.261.594.359.173,00							2.397.448.679.951,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						3.261.594.359.173,00							2.397.448.679.951,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.568.632.099.652,00						-	1.694.655.781.950,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	866.425.655.074,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.287.144.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	175.740.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		868.894.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	118.418.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		233.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	69.318.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		155.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	257.618.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	57.441.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	154.895.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		208.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	865.292.222.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				1 Subtansi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.653.564.618.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.643.669.537.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	203.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		254.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	253.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.206.787.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.205.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.029.408.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	177.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		178.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	59.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	404.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	280.624.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		107.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	106.574.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	846.783.050,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	786.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	198.868.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	131.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	203.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				30 Orang	131.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				30 Orang	181.014.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		182.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.360.311.320,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	5.248.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.625.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	304.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.510.588.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.511.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	111.191.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		112.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	76.018.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.014.887.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.714.601.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.823.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	5.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	137.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		138.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	203.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1.015.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.980.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.813.440.171,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.868.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.709.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	752.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		753.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.032.242.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.032.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.519.924.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.574.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	344.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	87.853.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	630.980.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		631.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	36.357.357.537,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	37.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	36.357.357.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		37.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah														
			<i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				37 Unit	7.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		7.301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			<i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah														
			<i>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0037	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				40 Paket	42.650.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		42.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta didik	5.760.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		5.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				32000 Peserta Didik	1.602.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.603.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				236 Satuan Pendidikan	238.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		238.301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				53 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				50 Orang	49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				50 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	812.704.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		813.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Unit	1.220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.001.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	2.260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.001.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				236 Satuan Pendidikan	5.719.734.221,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-			37,27 %	283.925.138.900,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	291.086.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	5.780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		5.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi</i>				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0029	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			<i>Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			<i>Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	95.249.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		95.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10 Peserta didik	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	2.196.872.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				111 Satuan Pendidikan	147.032.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		148.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				50 Orang	452.821.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1.064.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.065.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK														
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.000.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		2.000.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				111 Satuan Pendidikan	7.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		7.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-			56,57 %	78.648.996.700,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	81.840.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		3.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas														
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas														
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)														
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	6.173.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		6.174.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	1.246.551.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.247.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	40.249.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		40.300.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus</i>				0 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				0 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	644.626.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		645.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	50.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		801.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				4 Ruang	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.603.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	484.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		485.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		2.010.000.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	341.148.800,00						-	352.000.000,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-			-	290.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	295.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				1 Buku	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya				1 Orang	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah				1 Buku	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah														
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun				1 Dokumen	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun</i>				1 Dokumen	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-			-	51.148.800,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun</i>				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia</i>				1 Buku	11.148.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				1 Orang	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah</i>				1 Buku	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun</i>				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun</i>				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	1.206.125.200,00						-	1.207.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	1.206.125.200,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.207.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	554.391.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	651.733.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		652.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-			-	532.918.000,00						-	535.000.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	224.091.400,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	226.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	123.530.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	100.560.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	308.826.600,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	102.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	102.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	102.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
6.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-			-	533.000.000,00						-	540.000.000,00	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	533.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi														
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				1 Kamus	67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi				1 Bahasa	67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi				1 Publikasi	67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan				1 Orang	74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi				1 Buku	67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				1 Peserta Didik	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				1 Dokumen	107.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		108.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN						1.807.906.349,00							1.798.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.807.906.349,00							1.798.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.807.906.349,00							1.798.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.357.910.349,00						-	1.413.000.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	13.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		13.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	896.737.900,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	781.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	101.891.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		59.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.326.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		29.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	775.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		693.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	382.052.449,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	509.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	112.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		316.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	269.852.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		193.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.620.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	110.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	15.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	449.996.000,00						-	385.000.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	149.996.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	110.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	110.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	165.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)						12.764.637.175,00							12.785.700.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.764.637.175,00							12.785.700.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						12.764.637.175,00							12.785.700.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.492.047.175,00						-	4.773.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	32.250.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	32.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		33.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.718.712.428,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.723.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.335.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		13.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.487.646.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	202.979.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		195.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	179.676.900,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	179.676.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.533.097.847,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	1.963.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		3.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23.773.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		24.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.502.824.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.936.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28.310.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	28.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		17.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	11.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		11.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	7.272.590.000,00						-	8.012.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	3.736.070.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	7.600.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.736.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		7.600.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	3.222.570.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	351.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	3.222.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		351.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	313.950.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	61.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	313.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		61.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)						8.848.448.494,00							8.917.200.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.848.448.494,00							8.917.200.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						8.848.448.494,00							8.917.200.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	715.508.494,00						-	560.200.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	32.250.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	32.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		33.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	371.949.666,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	282.300.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.243.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.300.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	126.163.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		127.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	36.544.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	175.998.066,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		131.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	52.658.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	52.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	232.450.828,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	194.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	39.361.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		40.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		36.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	157.039.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		117.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26.200.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	24.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		17.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	9.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		7.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	8.132.940.000,00						-	8.357.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	5.638.720.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	8.100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	5.638.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	2.193.720.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	226.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.193.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		226.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	300.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	31.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	300.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		31.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)						9.138.759.297,00							9.276.400.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.138.759.297,00							9.276.400.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						9.138.759.297,00							9.276.400.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	4.412.999.297,00						-	3.574.400.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.750.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	28.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		28.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.125.619.985,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.917.700.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.156.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.700.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.701.380.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.700.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	26.869.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		24.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	393.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		190.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	248.672.400,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	248.672.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.977.416.912,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.572.700.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	28.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		33.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		36.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.908.916.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.540.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	30.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		17.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	13.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		13.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	4.725.760.000,00						-	5.702.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	2.215.200.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	5.200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2.215.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	1.975.350.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	426.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1.975.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		426.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	535.210.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	76.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	535.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		76.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)						10.371.124.600,00							11.365.300.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.371.124.600,00							11.365.300.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						10.371.124.600,00							11.365.300.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.943.194.600,00						-	5.894.300.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	34.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		34.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.128.730.744,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	4.222.700.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.112.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.905.287.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		4.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.369.444,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		11.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	208.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		208.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	73.497.660,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	73.497.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		26.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.691.496.196,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.589.600.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	35.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		35.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	68.277.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.582.418.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.470.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		17.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	8.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	4.427.930.000,00						-	5.471.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	3.282.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	4.300.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	3.282.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		4.300.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	352.430.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	376.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				3 Satuan Pendidikan	352.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		376.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	793.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	795.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				4 Satuan Pendidikan	793.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		795.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)						9.888.898.750,00							10.119.296.250,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.888.898.750,00							10.119.296.250,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						9.888.898.750,00							10.119.296.250,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.216.898.750,00						-	2.032.496.250,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.643.019.498,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.512.295.150,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.200.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.291.504.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.296.295.900,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		18.684.250,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	341.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		192.315.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	122.477.200,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	122.477.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	406.842.052,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	385.431.100,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	30.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		30.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	337.314.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		295.431.100,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	22.060.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	24.770.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		18.950.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.820.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	7.672.000.000,00						-	8.086.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	5.420.900.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	7.551.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				32 Satuan Pendidikan	5.420.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		7.551.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	1.775.430.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	460.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				18 Satuan Pendidikan	1.775.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		460.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	475.670.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Satuan Pendidikan	475.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)						11.794.947.538,00							12.029.513.100,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.794.947.538,00							12.029.513.100,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						11.794.947.538,00							12.029.513.100,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.295.837.538,00						-	3.410.403.100,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.517.889.182,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.537.223.100,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.771.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.314.550.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.328.664.100,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	7.247.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.247.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	193.321.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		195.312.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	27.698.900,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	27.698.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	703.699.456,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	728.130.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	18.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		18.130.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	648.649.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		650.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.050.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	35.050.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		26.950.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	7.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	8.499.110.000,00						-	8.619.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	4.039.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	8.179.110.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				25 Satuan Pendidikan	4.039.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.179.110.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	3.997.040.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	385.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	3.997.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		385.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	462.670.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				3 Satuan Pendidikan	462.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)						16.858.681.050,00							17.020.618.550,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.858.681.050,00							17.020.618.550,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						16.858.681.050,00							17.020.618.550,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.078.721.050,00						-	1.865.258.550,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	15.750.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.750.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.589.045.924,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.422.688.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.162.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.292.220.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.192.359.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.269.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		29.329.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	270.393.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		196.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	420.865.126,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	344.770.050,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.030.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	17.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		13.503.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	401.145.126,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		329.237.050,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.310.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	27.050.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		18.950.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	8.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	14.779.960.000,00						-	15.155.360.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	9.797.970.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	14.864.360.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				25 Satuan Pendidikan	9.797.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		14.864.360.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	4.452.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	226.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	4.452.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		226.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	529.490.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	65.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				4 Satuan Pendidikan	529.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		65.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)						8.434.308.210,00							8.634.050.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.434.308.210,00							8.634.050.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						8.434.308.210,00							8.634.050.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	692.208.210,00						-	729.200.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.150.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	12.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	12.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		12.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	376.690.294,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	466.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.995.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	67.454.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		163.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	296.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		291.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35.093.540,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	35.093.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	258.084.376,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	186.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	161.878.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		111.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.190.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	10.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	7.742.100.000,00						-	7.904.850.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	5.698.490.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	5.822.240.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar</i>				11 Satuan Pendidikan	5.698.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.822.240.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	305.000.000,00	
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	305.000.000,00	SMKN 1 PARIAMAN
	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		305.000.000,00	SMKN 1 PARIAMAN
		SMKN 2 PARIAMAN						0,00							250.000.000,00	
	X	NON URUSAN						0,00							250.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							250.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	250.000.000,00	
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	250.000.000,00	SMKN 2 PARIAMAN
	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							102.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	102.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	102.000.000,00	SMKN 4 PARIAMAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		102.000.000,00	SMKN 4 PARIAMAN	
		SMKN 1 BUKITTINGGI							0,00							1.900.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							1.900.000.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							1.900.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	1.900.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.900.000.000,00	SMKN 1 BUKITTINGGI	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							102.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	102.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	102.000.000,00	SMKN 1 SUMATERA BARAT
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		102.000.000,00	SMKN 1 SUMATERA BARAT
		SMKN 1 PADANG						0,00							2.580.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							2.580.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							2.580.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	2.580.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.580.000.000,00	SMKN 1 PADANG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		2.580.000.000,00	SMKN 1 PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SMKN 2 PADANG						0,00							745.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							745.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							745.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	745.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	745.000.000,00	SMKN 2 PADANG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		745.000.000,00	SMKN 2 PADANG
		SMKN 4 PADANG						0,00							250.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							250.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							250.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	250.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	1.180.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.180.000.000,00	SMKN 6 PADANG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.180.000.000,00	SMKN 6 PADANG
		SMKN 8 PADANG						0,00							1.215.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							1.215.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							1.215.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	1.215.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.215.000.000,00	SMKN 8 PADANG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							105.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	105.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	105.000.000,00	SMKN 10 PADANG	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			-				-	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		105.000.000,00	SMKN 10 PADANG	
		SMK PP NEGERI PADANG							0,00							345.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							345.000.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							345.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	345.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	345.000.000,00	SMK PP NEGERI PADANG	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	3.700.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	3.700.000.000,00	SMKN 2 PAYAKUMBUH
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.700.000.000,00	SMKN 2 PAYAKUMBUH
		SMKN 3 PAYAKUMBUH						0,00							105.000.000,00	
	X	NON URUSAN						0,00							105.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							105.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	105.000.000,00	
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	105.000.000,00	SMKN 3 PAYAKUMBUH
	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							1.400.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	1.400.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.400.000.000,00	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.400.000.000,00	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	
		SMKN 2 LUBUK BASUNG							0,00							2.800.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							2.800.000.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							2.800.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	2.800.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.800.000.000,00	SMKN 2 LUBUK BASUNG	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							1.260.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	1.260.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.260.000.000,00	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.260.000.000,00	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI
		SMKN 1 GUGUK						0,00							480.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							480.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							480.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	480.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	480.000.000,00	SMKN 1 GUGUK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							270.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	270.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	270.000.000,00	SMKN 1 SULIKI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		270.000.000,00	SMKN 1 SULIKI
		SMKN PP PADANG MENGATAS						0,00							105.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							105.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							105.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	105.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	-	-	-	105.000.000,00	SMKN PP PADANG MENGATAS
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				1 0	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		105.000.000,00	SMKN PP PADANG MENGATAS
		SMKN 1 ENAM LINGKUNG						0,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							105.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							105.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	105.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	105.000.000,00	SMKN 1 ENAM LINGKUNG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		105.000.000,00	SMKN 1 ENAM LINGKUNG
		SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG						0,00							950.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							950.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							950.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	950.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							105.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	105.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	105.000.000,00	SMKN 1 LINTAU BUO	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		105.000.000,00	SMKN 1 LINTAU BUO	
		SMKN 2 BATUSANGKAR							0,00							102.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							102.000.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							102.000.000,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	102.000.000,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	102.000.000,00	SMKN 2 BATUSANGKAR	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							100.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	100.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	100.000.000,00	SMKN 1 LUBUK SIKAPING
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	SMKN 1 LUBUK SIKAPING
		SMKN 1 KINALI						0,00							105.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							105.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							105.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	105.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	105.000.000,00	SMKN 1 KINALI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							1.100.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	1.100.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.100.000.000,00	SMKN 1 PASAMAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.100.000.000,00	SMKN 1 PASAMAN
		SMKN 1 SIJUNJUNG						0,00							100.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							100.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							100.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	100.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	SMKN 1 SIJUNJUNG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		100.000.000,00	SMKN 1 SIJUNJUNG
		SMKN 3 SIJUNJUNG						0,00							102.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							102.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							102.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	102.000.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	102.000.000,00	SMKN 3 SIJUNJUNG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		102.000.000,00	SMKN 3 SIJUNJUNG
		SMKN 1 PAINAN						0,00							235.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							235.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0,00							235.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	235.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	59.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		65.968.642,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	68.350.827.515,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				509 Orang/Bulan	67.647.442.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	649.304.489,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	54.080.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	390.594.600,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	214.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	76.589.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	550.977.700,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	714.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				451 Paket	357.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		472.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	193.977.700,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.440.110.167,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.723.564.307,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	99.994.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	150.837.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		150.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	115.720.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	173.789.985,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		196.899.670,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	177.055.442,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		195.640.986,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	23.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		58.873.651,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	699.433.640,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	288.939.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	403.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	288.939.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		403.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.845.806.343,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.614.228.259,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	10.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	849.999.759,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		927.999.759,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.995.796.584,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.648.428.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.128.183.501,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.991.799.878,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	303.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		337.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				173 Unit	197.575.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	487.838.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		995.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				51 Unit	139.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		80.799.878,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		264.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	139.050.102.774,00						-	21.885.674.776,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	6.682.488.080,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	7.262.736.887,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				3 Kab/kota Layanan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				52 Unit	551.493.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		606.642.498,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				19 Dokumen	129.506.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		142.457.092,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	5.571.488.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		6.128.637.297,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	131.618.300.015,00			-	-	-	-	13.799.191.743,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				66616 Orang	693.328.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		1.363.261.262,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 % Orang	1.118.150.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.230.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				7 Dokumen	1.400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				2 Dokumen	150.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	1.112.617.455,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.746.492.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	250.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	432.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		476.253.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				3 Dokumen	173.539.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.893.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				10 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	119.765.122.167,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	597.635.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		657.399.116,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	233.467.799,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				52 Dokumen	3.486.716.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.863.428.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	121.933.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				2 Dokumen	937.829.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.031.612.985,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				19 KAB/KOTA Keluarga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	105.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	644.314.679,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	708.746.146,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				36 Unit	544.314.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		598.746.146,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	436.274.700,00						-	136.870.140,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	34.427.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		136.870.140,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	300.329.000,00						-	187.537.899,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-			-	237.336.687,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	118.246.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				56 Sarana	237.336.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		118.246.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	62.992.313,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	69.291.544,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				10 Sarana	62.992.313,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		69.291.544,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	1.068.271.805,00						-	1.993.736.985,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	1.201.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				11 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.201.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				3 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	318.271.805,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	516.898.985,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>				5 Dokumen	318.271.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		516.898.985,00	DINAS KESEHATAN
	X	NON URUSAN						99.249.600,00							275.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						99.249.600,00							275.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	99.249.600,00						-	275.000.000,00	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	99.249.600,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	99.249.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT						7.877.177.586,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.877.177.586,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						7.877.177.586,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	7.377.877.586,00						-	0,00	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	999.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	999.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	6.278.877.586,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6.278.877.586,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	499.300.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	314.326.370,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	101.432.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				28 Unit	212.894.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	184.973.630,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				4 Unit	184.973.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
		UPTD BKOM & PELKES						3.080.119.808,00							2.428.394.940,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.045.577.808,00							2.327.330.340,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.045.577.808,00							2.327.330.340,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.820.254.108,00						-	2.008.830.340,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	63.512.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	82.566.250,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.012.500,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		6.516.250,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	58.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		76.050.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.157.121.608,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.504.258.090,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	405.032.064,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		526.541.683,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	752.089.544,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		977.716.407,00	UPTD BKOM & PELKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	299.620.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	422.006.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	34.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		77.350.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		325.000.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	15.120.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		19.656.000,00	UPTD BKOM & PELKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.300.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1.300.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD BKOM & PELKES
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	148.823.700,00						-	219.050.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	147.823.700,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	217.750.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>				14 Unit	22.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		29.250.000,00	UPTD BKOM & PELKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	125.323.700,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		188.500.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.000.000,00			-	-	-	-	1.300.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.000,00	UPTD BKOM & PELKES
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	76.500.000,00						-	99.450.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	76.500.000,00			-	-	-	-	99.450.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				30 Orang	76.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.450.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	X	NON URUSAN						34.542.000,00							101.064.600,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						34.542.000,00							101.064.600,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	34.542.000,00						-	101.064.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	34.542.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	101.064.600,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.026.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		6.533.800,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				16 Laporan	29.516.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		94.530.800,00	UPTD BKOM & PELKES
		UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT						5.726.408.118,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.726.408.118,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.726.408.118,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.102.363.724,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	44.940.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	44.940.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.807.423.724,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.807.423.724,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	624.044.394,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	374.044.394,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	374.044.394,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				20 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
		UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT						12.182.420.809,00							12.385.386.819,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.182.420.809,00							12.385.386.819,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						12.182.420.809,00							12.385.386.819,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	8.210.455.540,00						-	8.151.719.554,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	680.455.540,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	748.501.094,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	55.985.500,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		61.584.050,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	624.470.040,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		686.917.044,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	60.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	55.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	7.425.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	7.287.718.460,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.425.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		7.287.718.460,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.971.965.269,00						-	4.233.667.265,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1.457.711.027,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.603.482.130,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI						226.100.000.000,00							280.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						226.100.000.000,00							280.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						226.100.000.000,00							280.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	220.000.000.000,00						-	230.000.000.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	100.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				760 Orang/ Bulan	100.000.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	120.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	130.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	120.000.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		130.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 %			95 %	6.100.000.000,00						95 %	50.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	-			90 % 90 %	6.100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	6.100.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN						70.849.554.000,00							49.500.852.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						70.849.554.000,00							49.500.852.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						70.849.554.000,00							49.500.852.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	52 % 52 % 100 % 100 % 100 %			100 % 50 %	67.000.000.000,00						52 % 52 % 100 % 100 % 100 %	47.067.000.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	-			95 %	38.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	19.800.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				335 Orang/ Bulan	38.000.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		19.800.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)	-			50 %	29.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	27.267.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	29.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		27.267.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 %			89 %	3.688.402.000,00						89 %	2.264.981.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-			93 %	3.688.402.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	2.264.981.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	1.500.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	500.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	1.188.402.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.764.981.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	500.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	50 %			50 %	161.152.000,00						50 %	168.871.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-			48 %	161.152.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	168.871.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				123 Orang	161.152.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		168.871.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR						183.997.634.000,00							169.140.871.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						183.997.634.000,00							169.140.871.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						183.997.634.000,00							169.140.871.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 % 65 %			100 % 63 %	166.000.000.000,00						100 % 65 %	150.334.000.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	66.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	45.334.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				535 Orang/ Bulan	66.000.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		45.334.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan	-			63 %	100.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	105.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100.000.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		105.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 % 86 %			85 % 95 %	17.836.482.000,00						96 % 86 %	18.638.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			95 %	17.836.482.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	18.638.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				3 Unit	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	16.284.782.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		17.138.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	51.700.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	1.500.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	50 %			50 %	161.152.000,00						50 %	168.871.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-			50 %	161.152.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	168.871.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				400 Orang	161.152.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		168.871.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN						145.604.793.000,00							105.286.304.412,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						145.604.793.000,00							105.286.304.412,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						145.604.793.000,00							105.286.304.412,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	52 % 100 %			100 % 50 %	140.000.000.000,00						52 % 100 %	103.786.304.412,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-			100 %	50.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	34.786.304.412,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				396 Orang/ Bulan	50.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		34.786.304.412,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	-			50 %	90.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	69.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	90.000.000.000,00	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		69.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 %			95 %	5.604.793.000,00						95 %	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-			95 %	5.604.793.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	5.604.793.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0,00	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						919.294.361.791,00							126.589.018.455,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						919.294.361.791,00							126.589.018.455,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						919.294.361.791,00							126.589.018.455,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	46.597.042.618,00						100 %	48.350.008.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat</i>	-			15 Dokumen	519.350.618,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	555.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	232.340.618,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		240.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	82.010.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	205.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		225.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			12 Bulan	32.878.017.716,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	33.265.017.716,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				331 Orang/ Bulan	32.740.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		33.040.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	88.017.716,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.017.716,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan Baik	-			1 Laporan	263.925.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	263.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			360 Stel	422.280.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	460.280.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	240.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	182.280.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		185.280.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	1.509.651.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.706.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		75.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	185.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	108.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	30.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		31.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	946.151.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.105.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	140.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang</i>	-			12 Bulan	422.280.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	690.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				21 Unit	422.280.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		670.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			12 Bulan	5.879.327.350,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.521.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.880.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.005.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.987.327.350,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			20 Unit	4.702.210.934,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.852.210.934,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	900.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		900.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	700.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		750.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	3.102.210.934,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.202.210.934,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum</i>	88 %			88 %	4.500.286.000,00						88 %	8.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum</i>	-			2 Lokasi	4.500.286.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	8.400.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				1 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				19 Kabupate n/Kota	3.150.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		7.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				3 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				19 Kabupate n/Kota	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		600.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
3.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Jumlah TPA Regional yang dibangun</i>	3 lokasi			3 lokasi	682.182.000,00						3 lokasi	8.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	<i>Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan TPA Sampah Regional</i>	-			2 Lokasi	682.182.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	8.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>				2 Kabupaten/ Kota	500.000.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA														
			<i>Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi</i>				1 Unit	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		7.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan</i>				19 Kabupate n/Kota	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				1 Dokumen	82.182.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase cakupan layanan air limbah regional</i>	88 %			88 %	760.236.000,00						88 %	2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	<i>Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)</i>	-			1 Laporan	760.236.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	2.400.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>				19 Kabupate n/Kota	110.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>				4 kabupaten/ kota	450.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		600.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola</i>	25 Km			25 Km	568.409.000,00						25 Km	30.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	<i>Terlaksananya pembangunan drainase primer</i>	-			3450 m	568.409.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	30.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				3 Sistem Drainase Perkotaan	568.409.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		30.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun</i>	3 unit			3 unit	356.463.091.412,00						3 unit	25.427.049.868,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Terselenggaranya perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi</i>	-			3 Unit	356.463.091.412,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	25.427.049.868,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat</i>				28 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara														
			<i>Jumlah Rumah Negara yang Dikelola</i>				74 Rumah Negara	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		175.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				2 Bangunan Gedung	11.035.243.117,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		5.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				4 Dokumen	345.052.848.295,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		20.052.049.868,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	2 kawasan			2 kawasan	1.018.468.361,00						2 kawasan	1.072.597.936,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian kegiatan keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	-			13 Laporan	1.018.468.361,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	1.072.597.936,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	593.468.361,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		647.597.936,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		125.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				13 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	81 %			81 %	506.569.990.000,00						81 %	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	-			555 meter	506.569.990.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				1690 KM	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1690 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				135,5 KM	104.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				108 KM	73.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				5 Jembatan	84.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur														
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur</i>				1 KM	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>				2 Jembatan	85.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</i>				1 KM	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				11 Dokumen	17.340.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				10 KM	91.679.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				1690 KM	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>				2 Dokumen	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</i>	89 %			89 %	2.134.656.400,00						89 %	2.239.362.001,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	-			1 Perda	585.415.012,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	614.685.763,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	235.415.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		247.185.763,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				3 Publikasi	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		210.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				225 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		157.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	-			3 Laporan	955.636.451,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	1.003.418.273,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat</i>				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		682.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				14 Orang	305.636.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		320.918.273,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	-			16 Dokumen	592.046.650,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	618.162.740,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>				1 Laporan	347.659.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		364.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Dokumen	244.387.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		254.162.740,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	-			1 Laporan	1.558.287,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	3.095.225,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		397.260,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		595.890,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		595.890,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		397.260,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang														
			Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang				1 Berita Acara	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		595.890,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	258.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		513.035,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG						894.799.228,00							930.591.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						894.799.228,00							930.591.197,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						894.799.228,00							930.591.197,00	
1.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	3 unit			3 unit	218.538.589,00						3 unit	227.280.132,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tedapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	-			1 Laporan	218.538.589,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	227.280.132,00	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				75 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				19 Kabupaten/Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				50 Dokumen	218.538.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		227.280.132,00	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
2.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	2 kawasan			2 kawasan	676.260.639,00						2 kawasan	703.311.065,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG Terlaksananya pengendalian kegiatan keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	-			3 Laporan 13 Laporan	676.260.639,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	703.311.065,00	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				19 kabupate n/kota	676.260.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		703.311.065,00	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						2.003.968.000,00							2.500.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.003.968.000,00							2.500.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.003.968.000,00							2.500.000.000,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	81 %			81 %	2.003.968.000,00						81 %	2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboraorium Bahan Konstruksi Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	-			115.6 Km 121.05 Km 104.4 Km 133.7 Km 118.98 Km 117.6 Km 30 Unit 13 Laporan 555 meter	2.003.968.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	2.500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				100 KM	2.003.968.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		2.500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
		UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN						6.565.046.044,00							11.410.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.565.046.044,00							11.410.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						6.565.046.044,00							11.410.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	5.565.046.044,00						100 %	9.410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Paket	75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		100.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		100.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		500.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			12 Bulan	546.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	620.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	96.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		120.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	450.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		500.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			20 Unit	1.480.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	1.700.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	480.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		500.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				46 Unit	800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.000.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		200.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase Kemantapan Jalan</i>	81 %			81 %	1.000.000.000,00						81 %	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboraorium Bahan Konstruksi Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	-			115.6 Km 121.05 Km 104.4 Km 133.7 Km 118.98 Km 117.6 Km 30 Unit 13 Laporan 555 meter	1.000.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	2.000.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		2.000.000.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I						12.968.626.176,00							14.265.488.793,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.968.626.176,00							14.265.488.793,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						12.968.626.176,00							14.265.488.793,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	1.146.591.783,00						100 %	1.261.250.961,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	77.601.700,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		85.361.870,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	37.397.800,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		41.137.580,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			12 Bulan	306.323.283,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	336.955.611,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	29.400.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		32.340.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	276.923.283,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		304.615.611,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			20 Unit	450.831.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	495.914.100,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	119.730.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		131.703.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				6 Unit	131.101.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		144.211.100,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		220.000.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	81 %			81 %	11.822.034.393,00			-			81 %	13.004.237.832,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	-			115.6 Km	11.822.034.393,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	13.004.237.832,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				55 Jembatan	320.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		352.660.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya</i>				260.1 KM	227.250.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		249.975.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				260.1 KM	8.994.184.393,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		9.893.602.832,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				0.032 KM	2.280.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.508.000.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II						12.735.254.610,00							15.058.258.918,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.735.254.610,00							15.058.258.918,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						12.735.254.610,00							15.058.258.918,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	2.260.166.504,00						100 %	2.486.183.154,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	99.540.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	109.494.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		16.500.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	84.540.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		92.994.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	-			12 Bulan	1.185.633.900,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.304.197.290,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	71.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		78.320.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	42.792.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		47.071.420,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1.071.641.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.178.805.870,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	404.940.404,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	445.434.444,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		30.822.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	376.920.404,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		414.612.444,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			20 Unit	570.052.200,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	627.057.420,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	128.130.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		140.943.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				10 Unit	219.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		241.048.500,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	222.787.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		245.065.920,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase Kemantapan Jalan</i>	81 %			81 %	10.475.088.106,00						81 %	12.572.075.764,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	-			115.6 Km 121.05 Km 104.4 Km 133.7 Km 118.98 Km 117.6 Km 30 Unit 13 Laporan 555 meter	10.475.088.106,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	12.572.075.764,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				73 Jembatan	268.536.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		295.389.600,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				4 Unit	142.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		156.640.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	61.262.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		67.388.200,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	83.005.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		91.306.490,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			12 Bulan	246.024.150,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	270.626.565,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	19.200.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		21.120.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		165.000.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	81 %			81 %	9.999.292.686,00						81 %	10.999.221.972,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboraorium Bahan Konstruksi Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	-			115.6 Km 121.05 Km 104.4 Km 133.7 Km 118.98 Km 117.6 Km 30 Unit 13 Laporan 555 meter	9.999.292.686,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	10.999.221.972,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				51 Jembatan	418.706.345,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		460.576.996,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya</i>				198.83 KM	140.017.640,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		154.019.404,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				198.83 KM	6.540.568.701,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		7.194.625.572,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				2 KM	2.900.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		3.190.000.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV						11.678.070.784,00							13.035.837.854,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.678.070.784,00							13.035.837.854,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.678.070.784,00							13.035.837.854,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	1.710.729.959,00						100 %	1.517.538.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	53.138.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		58.452.460,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	195.889.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		215.478.010,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		220.000.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	386.889.259,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	61.314.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	27.870.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		30.657.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	359.019.259,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		30.657.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			20 Unit	515.966.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	567.562.600,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	147.030.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		161.733.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				8 Unit	361.836.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		398.019.600,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		7.810.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	81 %			81 %	9.967.340.825,00						81 %	11.518.299.084,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	-			133.7 Km	9.967.340.825,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	11.518.299.084,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				83 Jembatan	280.800.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		308.880.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	1.225.823.046,00						100 %	1.348.405.351,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	110.858.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	121.943.800,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		16.500.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	95.858.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		105.443.800,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	-			12 Bulan	493.156.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	542.471.600,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	71.200.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		78.320.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	65.663.700,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		72.230.070,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	146.292.300,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		160.921.530,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	210.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Sijunjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		231.000.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	328.552.046,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	361.407.251,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		27.500.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	303.552.046,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		333.907.251,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>	-			20 Unit	293.257.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	322.582.700,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	286.157.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		314.772.700,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	7.100.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		7.810.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase Kemantapan Jalan</i>	81 %			81 %	9.795.853.291,00						81 %	10.775.438.623,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboraorium Bahan Konstruksi Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	-			115.6 Km 121.05 Km 104.4 Km 133.7 Km 118.98 Km 117.6 Km 30 Unit 13 Laporan 555 meter	9.795.853.291,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	10.775.438.623,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				79 Jembatan	955.149.499,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Atar Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.050.664.449,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				220,11 KM	140.017.640,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		154.019.404,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				220,11 KM	6.472.506.946,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		7.119.757.642,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,49 KM	2.228.179.206,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.450.997.128,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI						11.405.742.079,00							12.546.316.287,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.405.742.079,00							12.546.316.287,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.405.742.079,00							12.546.316.287,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	1.061.003.436,00						100 %	1.167.103.780,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	204.908.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	225.398.800,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		16.500.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	189.908.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		208.898.800,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	-			12 Bulan	193.157.800,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	212.473.580,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	35.600.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		39.160.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	99.826.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		109.808.600,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	57.731.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		63.504.980,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			12 Bulan	298.547.636,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	328.402.400,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		33.000.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	268.547.636,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		295.402.400,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	-			20 Unit	364.390.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	400.829.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	256.390.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		282.029.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	108.000.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		118.800.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	81 %			81 %	10.344.738.643,00						81 %	11.379.212.507,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	-			115.6 Km 121.05 Km 104.4 Km 133.7 Km 118.98 Km 117.6 Km 30 Unit 13 Laporan 555 meter	10.344.738.643,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	11.379.212.507,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				125 Jembatan	197.208.544,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		216.929.398,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				217.96 KM	140.017.640,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		154.019.404,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				217.96 KM	7.731.712.459,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.504.883.705,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.6 KM	2.275.800.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.503.380.000,00	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI						136.587.526.000,00							150.381.510.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						136.587.526.000,00							150.381.510.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						136.587.526.000,00							150.381.510.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	23.378.060.000,00						-	26.010.300.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	820.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.115.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	390.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		420.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		475.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		220.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.988.657.374,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	18.770.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				124 Orang/ Bulan	16.282.457.374,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		18.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	706.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		770.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	264.400.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	280.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	174.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		190.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	90.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		90.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	197.500.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	198.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	97.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		106.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				135 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		92.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.392.502.626,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.450.800.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	18.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		19.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	120.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		180.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		9.300.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		280.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		83.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		27.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	624.502.626,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		220.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	38.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		16.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.470.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	2.738.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		58.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		680.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.210.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.420.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		640.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	210.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		230.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	108.663.100.000,00						-	119.529.410.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	48.442.430.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	53.286.673.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0077	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0.067 KM	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.650.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	180.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		198.473.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelola Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				4 Lembaga	857.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		970.200.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun</i>				0.638 KM	5.679.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		6.050.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir														
			<i>Panjang Kanal Banjir yang Dibangun</i>				0.340 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0102	Pembangunan Check Dam														
			<i>Jumlah Check Dam yang Dibangun</i>				0.438 Unit	7.983.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		8.800.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			<i>Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara</i>				0.20 KM	3.883.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.970.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing														
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi</i>				0,420 KM	4.976.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		4.460.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0114	Peningkatan Check Dam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan</i>				0 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														
			<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>				0 Titik	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>				1.78 KM	14.802.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		17.325.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>				0.710 Unit	3.220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		7.150.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun</i>				4 Dokumen	655.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		715.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dokumen	1.305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		797.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.220.670.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	66.242.737.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.750.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				26.095 KM	39.862.977.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		43.849.274.755,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				7 Bendung	13.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		14.575.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya				4 Lembaga	1.635.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		1.798.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				10 Dokumen	2.592.692.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.851.962.245,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				2 Lembaga	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		308.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi														
			Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya				1 DI	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
3.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	4.546.366.000,00						-	4.841.800.000,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	3.091.279.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	3.224.800.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				48 Orang	437.930.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		420.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	168.697.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		180.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				250 Orang	984.650.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	675.168.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		730.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	24.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		29.800.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi</i>				250 Orang	464.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya</i>				50 Orang	80.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		85.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya</i>				15 Lembaga	254.487.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		280.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	482.316.500,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	544.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	51.014.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		57.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan</i>				5 Perangkat Pendukung	75.564.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		99.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan</i>				1 Dokumen	188.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		215.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				50 Orang	167.112.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		173.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-			-	972.770.500,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.073.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>				25 Paket Pekerjaan	206.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		228.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>				5 Bangunan Konstruksi	69.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		75.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				25 Badan Usaha	196.070.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		220.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA							21.149.845.000,00						20.814.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.149.845.000,00							20.814.500.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						21.149.845.000,00							20.814.500.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.222.006.600,00						-	4.379.500.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	381.845.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	418.200.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		6.600.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	216.845.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		237.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		47.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		6.600.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	110.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		121.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.034.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		990.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		44.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.103.161.600,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.063.100.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		1.100.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		121.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	237.161.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		121.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	755.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		820.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.697.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.864.200.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	100.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	50.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		55.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	10.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		11.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.525.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		1.675.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.200.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		11.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	17.927.838.400,00						-	16.435.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.350.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	4.895.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.02 KM	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		275.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam														
			Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		220.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.100.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.750.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		110.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			<i>Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara</i>				3 KM	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		440.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.577.838.400,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	11.540.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				160 KM	7.477.838.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		8.300.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara</i>				40 Bendung	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.800.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				5 Lembaga	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		440.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
		UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN						21.591.912.000,00							22.844.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.591.912.000,00							22.844.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						21.591.912.000,00							22.844.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	7.163.677.389,00						-	3.729.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	181.002.800,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	192.400.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.241.700,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		12.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		33.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.615.500,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.500.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.850.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		6.600.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.300.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	123.295.600,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		112.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.872.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	3.011.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		11.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.862.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		3.000.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	862.011.589,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	259.600.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		11.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	97.181.700,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		132.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.675.600,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		17.600.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	755.154.289,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		99.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	248.663.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	266.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	91.061.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		99.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	40.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		44.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	20.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		22.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	82.212.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		90.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	15.390.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		11.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	14.428.234.611,00						-	19.115.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.863.943.775,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	5.235.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.15 KM	87.696.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		255.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	396.820.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		300.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				8 KM	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		990.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	1.609.427.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		2.350.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		880.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.42 KM	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		460.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.564.290.836,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	13.880.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				119 KM	6.475.665.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		9.400.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara</i>				40 Bendung	1.790.187.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		1.980.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			<i>Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				4 Lembaga	2.298.438.161,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		2.500.000.000,00	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						26.835.615.969,00							111.121.773.574,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.017.785.969,00							110.222.160.574,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						26.017.785.969,00							110.222.160.574,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	10.296.785.969,00						-	89.754.060.574,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	151.031.900,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	166.135.090,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	46.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		51.205.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	8.607.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		9.467.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	95.874.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		105.462.390,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.677.623.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	76.616.719.641,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				58 Orang/ Bulan	7.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		75.981.334.341,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	577.623.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		635.385.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	131.459.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	144.604.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	36.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		40.040.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				18 Laporan	95.059.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		104.564.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	96.871.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	106.558.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	41.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		45.375.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	55.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		61.183.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	773.417.523,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	6.386.911.773,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.789.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		10.768.560,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				43 Paket	115.024.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		126.527.060,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	70.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		77.892.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	13.585.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		14.943.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	559.207.323,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		6.151.280.553,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	517.254.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	568.979.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	479.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		527.426.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				28 Unit	36.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		40.452.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	479.778.704,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	5.247.865.744,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		3.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	476.778.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		5.244.565.744,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	469.350.842,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	516.285.926,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	268.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		294.822.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	39.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		43.065.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	162.180.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		178.398.926,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	1.821.000.000,00						-	5.103.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	1.300.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	1.430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		770.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	236.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	259.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>				50 Orang	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		39.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</i>				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	3.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi</i>				10 Unit Rumah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			-				-	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah</i>				0 Rumah Tangga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	313.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				1 Laporan	285.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		313.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	12.200.000.000,00						-	13.495.000.000,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	500.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	625.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				50 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	11.700.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	12.870.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		5.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				10 Hektar	6.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		7.370.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	1.700.000.000,00						-	1.870.000.000,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	1.700.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	1.870.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				57 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				200 Lokasi	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.320.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						817.830.000,00							899.613.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						817.830.000,00							899.613.000,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-	-			-	397.000.000,00						-	436.700.000,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-			-	397.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	436.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				1 Dokumen	397.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		436.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-			-	101.000.000,00						-	111.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	101.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	111.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		72.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				1 Berita Acara	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	102.000.000,00						-	112.200.000,00	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	102.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	112.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah</i>				1 Laporan	102.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		112.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	10.486.225.000,00						100 %	14.950.000.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				3.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				10.455.225.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	10.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	10.453.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		10.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasark an falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasark an falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				3.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasark an falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				2.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				144 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	9.000.000,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	1.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiKBAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiKBAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				6.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				5 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				25 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	-			100 %	4.000.000,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				4.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	85 % 87 %			83 % 85 %	2.508.430.000,00						85 % 87 %	4.452.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-			1 Laporan	2.256.430.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	3.752.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia				60 Unit	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				1 laporan	2.099.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		2.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				40 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas yarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemas yarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-			1 Laporan	127.000.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				4 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-			50 %	125.000.000,00			Memperku a t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %			63,16 %	563.370.000,00						63,16 %	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	<i>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</i>	-			1 Laporan	423.923.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)</i>				40 Orang	330.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</i>				1 Dokumen	93.483.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-			1 Laporan	139.447.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	139.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						18.849.908.754,00							18.454.740.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.826.701.713,00							12.341.033.919,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.826.701.713,00							12.341.033.919,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 % 100 %			100 %	2.805.172.713,00						100 % 100 %	2.789.033.919,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 %	114.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	38.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	89.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	202.259.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	162.880.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	39.379.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	43.570.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	22.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	16.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	87.500.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	82.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				90 Paket	67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		67.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	367.374.854,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	472.792.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.374.854,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		21.792.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		390.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	172.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	22.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	75.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	75.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.360.330.962,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	1.283.741.565,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	175.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		226.558.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.165.330.962,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		1.036.183.065,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	458.137.897,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	815.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	243.137.897,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		675.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	10.021.529.000,00						-	9.552.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-			-	1.300.000.000,00			-	-	-	-	1.940.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				425 Orang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	6.165.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	4.920.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				300 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				60 Orang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				750 Keluarga	1.995.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				120 Orang	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	1.251.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.251.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				60 Orang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1125 Orang	450.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	356.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		356.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	1.305.529.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.441.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		71.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				80 Orang	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi														
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				60 Orang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				19 kabupate n/kota	170.529.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	NON URUSAN						6.023.207.041,00							6.113.706.081,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.023.207.041,00							6.113.706.081,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.023.207.041,00						-	6.113.706.081,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.023.207.041,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	6.113.706.081,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	6.023.207.041,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		6.113.706.081,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						128.017.757.620,00							157.145.875.620,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						128.017.757.620,00							157.145.875.620,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						128.017.757.620,00							157.145.875.620,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	28.073.364.037,00						-	28.834.002.700,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	536.371.300,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.050.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	104.486.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	42.135.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	111.646.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	78.103.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	22.260.095.151,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	27.714.002.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				170 Orang/ Bulan	21.636.545.151,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		27.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				6 Dokumen	35.457.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		39.002.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	238.093.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	154.612.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9 Dokumen	69.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	54.327.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	31.044.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	613.786.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				10 Dokumen	105.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				170 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	882.826.959,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.063.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	85.854.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	41.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	12.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	487.289.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.399.369.480,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1.285.408.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	62.516.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	51.444.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.631.638.147,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.365.838.147,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	594.664.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	209.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	55.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	330.094.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	2.058.247.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	91.554.100,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				78 Dokumen	91.554.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-			-	1.966.692.900,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				50 Orang	37.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				70 Orang	49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				1280 Keluarga	683.882.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				987 Lembaga	1.196.610.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %			100 %	96.328.223.410,00						100 %	126.989.435.920,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	-			100 %	10.077.207.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdayasaing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Panti Penyandang Disabilitas	-	10.848.092.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				326 Orang	2.693.586.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Panti Penyandang Disabilitas		3.431.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				288 Orang	1.333.692.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Panti Penyandang Disabilitas		1.333.692.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				293 Orang	3.269.658.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Panti Penyandang Disabilitas		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				300 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Panti Penyandang Disabilitas		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	1.255.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Panti Penyandang Disabilitas		1.350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	50.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Panti Penyandang Disabilitas		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	1.213.711.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Panti Penyandang Disabilitas		450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	83.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Panti Penyandang Disabilitas		83.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				3 Dokumen	177.418.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Panti Penyandang Disabilitas		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	-			100 %	82.057.722.110,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlanntar dalam panti	-	111.145.813.080,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				1711 Orang	305.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlantar dalam panti		305.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				3173 Orang	24.505.072.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlantar dalam panti		33.801.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				2599 Orang	9.496.643.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlantar dalam panti		5.800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				273 Orang	36.318.064.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlantar dalam panti		46.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				3200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlanntar dalam panti		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				165 Orang	2.812.226.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlanntar dalam panti		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3200 Orang	7.801.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlanntar dalam panti		23.088.613.080,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantrar di dalam Panti				5 Dokumen	819.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlanntar dalam panti		1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	-			100 %	1.062.885.500,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati	-	1.437.608.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang	401.301.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		432.608.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				40 Orang	101.407.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakkses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				40 Orang	509.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Banda Dalam Kab. Agam, Candung, Lasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				40 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				40 Orang	50.436.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		300.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	-			100 %	3.130.407.900,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	-	3.557.922.320,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	380.407.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		207.922.320,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				44 Orang	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				44 Orang	2.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				44 Orang	700.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				44 Orang	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	100 %			100 %	881.500.000,00						100 %	1.175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	-			25 Kajian Teknis	65.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Anak yang diangkat sesuai Peraturan	-	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				15 Orang	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Anak yang diangkat sesuai Peraturan		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	816.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				600 Keluarga	413.886.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	131.499.173,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		147.437.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG						6.899.844.845,00							7.919.909.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.899.844.845,00							7.919.909.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.899.844.845,00							7.919.909.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.134.663.303,00						-	3.052.610.000,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	69.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	71.700.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	69.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		71.700.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	11.800.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		11.800.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	23.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		23.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	180.189.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	576.330.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.639.700,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.200.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	49.060.800,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		280.500.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	38.980.600,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		175.980.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	8.978.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.850.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		91.300.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	71.636.600,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	337.800.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		116.800.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	36.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		156.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	35.636.600,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	691.748.685,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	641.150.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	84.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		92.200.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	602.248.685,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		548.950.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.110.088.918,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.390.330.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.400.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16.890.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.030.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.006.398.918,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.107.900.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	4.765.181.542,00						-	4.867.299.000,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	4.765.181.542,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	4.867.299.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				155 Orang	1.919.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.990.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				155 Orang	323.634.250,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		189.260.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				155 Orang	381.437.800,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		319.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				155 Orang	10.015.417,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		12.869.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				160 Orang	1.126.124.100,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.250.215.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				75 Orang	172.461.600,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		191.494.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				75 Orang	756.639.375,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		831.781.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				75 Orang	46.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.000.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi</i>				12 Orang	28.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		31.680.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG
		PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG						5.719.332.007,00							15.250.696.329,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.302.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	9.900.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	25.500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.900.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	249.608.850,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	501.989.492,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				670 Paket	12.374.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.846.550,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	17.414.900,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.000.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				383 Paket	48.040.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		143.965.700,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3116 Paket	97.929.950,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		198.017.132,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17487 Paket	20.570.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		38.500.110,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	53.280.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		77.660.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.632.416.480,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.763.451.920,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				52 Paket	39.734.800,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		51.077.620,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	92.681.680,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		197.112.300,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.515.262.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	736.929.469,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	690.795.494,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				32547 Laporan	109.305.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		119.575.500,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	627.624.469,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		571.219.994,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	317.269.961,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.163.463.180,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	26.900.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.110.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	5.840.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.251.400,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	74.770.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		89.758.700,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	9.101.850,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.475.400,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	875.210.397,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.048.844.193,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	16.160.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		46.596.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	347.195.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.666.950,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				100 Orang	14.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.140.000,00	PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG
		PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG						5.119.691.130,00							5.673.125.698,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.119.691.130,00							5.673.125.698,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.119.691.130,00							5.673.125.698,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.877.845.040,00						-	2.233.957.916,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	69.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	75.900.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				36 Dokumen	69.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		75.900.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	13.789.567,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		13.789.567,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	8.250.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	7.425.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	8.250.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		7.425.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	396.820.062,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	482.786.256,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				23 Paket	14.615.900,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		19.235.590,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	38.829.800,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		46.828.650,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				45 Paket	101.715.180,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.974.358,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				90 Paket	144.278.226,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.498.068,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	11.204.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.822.800,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				25 Laporan	86.176.956,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		88.426.790,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	174.298.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	392.778.144,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	85.338.400,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		246.979.040,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	88.960.500,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.799.104,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	696.251.078,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	713.478.949,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	157.657.200,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.422.920,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	538.593.878,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		540.056.029,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	533.225.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	547.800.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	19.750.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.725.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	23.450.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.895.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	490.025.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		477.180.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	3.241.846.090,00						-	3.439.167.782,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	3.241.846.090,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.439.167.782,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	1.283.459.800,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.405.250.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	755.594.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		763.612.080,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	163.800.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		34.210.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	55.254.990,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		37.224.055,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	360.836.600,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		360.475.610,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	498.655.100,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		702.570.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	89.205.600,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		97.282.037,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	11.040.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.144.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				100 Orang	24.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.400.000,00	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG
		PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN						5.859.595.400,00							8.899.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	21.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	362.265.865,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.160.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.488.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	171.737.465,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		700.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	56.582.400,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.864.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.094.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		150.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.011.264.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.800.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	120.628.300,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	46.214.200,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	844.422.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.500.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	977.202.178,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.225.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	175.224.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	786.378.178,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.000.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	800.808.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.065.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	36.050.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				11 Unit	7.550.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	757.208.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.000.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	2.618.054.857,00						-	3.519.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-			-	2.618.054.857,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	3.519.750.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				110 Orang	1.475.186.200,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.806.750.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				110 Orang	396.893.520,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		500.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				110 Orang	184.056.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				110 Orang	110.413.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		220.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				110 Orang	409.685.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		550.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			-				-	25.821.137,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		35.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		8.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN	
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan															
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				32 Orang	12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		50.000.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN	
		PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR							4.051.440.700,00							4.741.433.547,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.051.440.700,00							4.741.433.547,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.051.440.700,00							4.741.433.547,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.551.652.368,00						-	2.860.205.791,00		
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.720.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	66.792.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	60.720.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		66.792.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	151.612.590,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	35.244.359,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				12 Dokumen	151.612.590,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.620.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	0,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.624.359,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.688.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		239.747.428,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	43.475.880,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		177.356.383,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	227.732.430,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		205.181.493,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	17.680.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.805.700,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	118.684.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.503.600,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	42.777.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	385.872.012,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				12 Unit	2.750.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.245.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	7.807.600,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		24.404.490,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	32.219.900,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		78.722.600,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		279.499.922,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	613.188.052,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	840.898.397,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	67.150.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		88.061.600,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	16.570.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.730.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.898.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	994.271.050,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		232.375.220,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	155.679.090,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		370.980.588,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	1.499.788.332,00						-	1.881.227.756,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.499.788.332,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	1.881.227.756,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	894.250.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		986.370.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	174.155.020,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		186.598.027,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				70 Orang	62.613.500,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		46.750.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				70 Orang	2.210.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		203.533.572,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	63.181.960,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		41.473.383,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				70 Orang	187.300.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		271.573.500,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				70 Orang	61.677.852,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		81.873.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				70 Orang	30.400.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		36.656.274,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				70 Orang	24.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		26.400.000,00	PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR
		PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG						4.829.484.425,00							5.011.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.829.484.425,00							5.011.000.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.829.484.425,00							5.011.000.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.388.080.085,00						-	2.411.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.720.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	70.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60.720.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		70.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	9.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	9.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	7.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		9.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	161.167.796,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	355.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.128.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		16.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.605.200,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		12.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	22.700.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		93.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	51.713.010,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		170.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		4.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	53.521.586,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	247.578.040,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	330.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	204.025.800,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	43.552.240,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		30.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	744.294.469,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	636.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		6.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	109.620.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		110.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	632.174.469,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		520.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.166.819.780,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.002.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	86.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		40.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	29.520.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		32.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	19.543.560,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		157.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	14.855.980,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		23.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	613.031.500,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		724.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	26.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		21.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	13.560.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		14.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG
		PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG						3.324.792.000,00							3.462.199.100,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.324.792.000,00							3.462.199.100,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3.324.792.000,00							3.462.199.100,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.684.417.285,00						-	1.909.597.832,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.720.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	59.880.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	60.720.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		59.880.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	28.187.400,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		30.569.900,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	13.998.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		29.296.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1541 Paket	47.980.800,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		81.658.400,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10215 Paket	6.260.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		6.260.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				128 Laporan	57.990.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		83.650.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	59.617.820,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	235.606.900,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		32.219.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				38 Paket	13.112.100,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		88.567.900,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	46.505.720,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		114.820.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	649.753.069,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	631.095.132,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		2.400.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37079 Laporan	63.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		82.020.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				271 Laporan	583.753.069,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		546.675.132,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	733.529.196,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	722.626.500,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	51.100.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		32.750.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	11.780.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		11.780.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	565.649.196,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		573.096.500,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	105.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		105.000.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	1.640.374.715,00						-	1.552.601.268,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.640.374.715,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	1.552.601.268,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	681.337.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		674.750.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	217.914.350,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		154.425.350,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	110.700.200,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		52.738.400,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				50 Orang	16.750.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		16.750.000,00	PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	13.940.785.040,00						-	6.517.445.979,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	80.880.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	80.880.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.270.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	17.270.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	29.400.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	600.142.591,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	698.481.337,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	29.260.300,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	121.959.256,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		118.938.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	132.266.335,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		250.000.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	75.678.700,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	22.952.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		20.968.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	215.986.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		198.575.337,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.116.563.964,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	5.039.592.863,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	642.704.400,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		36.686.600,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	108.350.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	77.078.500,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	21.698.900,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		63.595.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	11.076.732.164,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		4.921.075.563,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	190.000.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		18.235.700,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	784.061.585,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	598.831.779,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.880.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	66.174.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		56.478.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.200.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	708.487.585,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		535.273.779,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	312.466.900,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	180.540.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	0,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		51.800.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			-				-	65.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	28.540.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		29.540.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	218.576.900,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		99.200.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	1.797.219.960,00						-	1.742.709.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-			-	1.797.219.960,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.742.709.700,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	766.500.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		640.500.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	245.187.500,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		227.468.900,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	188.652.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		331.071.400,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	32.491.460,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		24.726.050,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK	
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial															
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	143.264.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		165.964.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK	
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari															
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	195.400.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		158.100.000,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK	
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar															
			<i>Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	225.725.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		194.879.350,00	PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK	
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							33.016.305.905,00							31.493.291.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	26.865.160.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	23.992.572.380,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/ Bulan	26.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.567.572.380,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	320.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	117.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				156 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	608.960.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	815.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	9.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.426.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.520.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	520.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		525.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.903.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.990.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	705.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	832.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		87.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	325.000.000,00						-	405.000.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	180.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				35 Lembaga	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				10 LPK	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-			-	45.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				35 Perusahaan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	415.000.000,00						-	625.997.460,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	195.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	345.897.460,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				25 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		13.255.510,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				5800 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		127.641.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				220 Orang	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD</i>				20 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi														
			<i>Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi</i>				4 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	145.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				15000 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				300 Orang	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	75.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				20 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	305.000.000,00						-	435.000.000,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	135.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	185.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				0 Perusahaan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				5 Perusahaan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	115.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				20 Perkara	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				19 Lembaga	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusahaan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	55.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				5 Perusahaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						653.000.000,00							912.622.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						653.000.000,00							912.622.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	35.000.000,00						-	52.600.000,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	35.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	52.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	210.000.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				32 Orang	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		210.000.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
		UPTD BLK PAYAKUMBUH						225.000.000,00							247.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						225.000.000,00							247.500.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						225.000.000,00							247.500.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	25.000.000,00						-	37.500.000,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	37.500.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	210.000.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				48 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		210.000.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
		UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						351.000.000,00							415.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						351.000.000,00							415.500.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						351.000.000,00							415.500.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	35.000.000,00						-	52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	52.500.000,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	316.000.000,00						-	363.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	316.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	363.000.000,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				99 Perusahaan	316.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		363.000.000,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1						344.080.000,00							409.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						344.080.000,00							409.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						344.080.000,00							409.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	70.000.000,00						-	90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	90.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	274.080.000,00						-	319.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	274.080.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	319.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				476 Perusahaan	150.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		180.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				55 Kasus	89.080.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		99.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				24 Perusahaan	35.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		40.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2							192.445.000,00						239.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						192.445.000,00							239.500.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						192.445.000,00							239.500.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	27.000.000,00						-	37.500.000,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	27.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	37.500.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.500.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	165.445.000,00						-	202.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	165.445.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	202.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				238 Perusahaan	80.445.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	98.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2	
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				27 Kasus	61.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	74.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				12 Perusahaan	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		30.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3						153.006.593,00							197.933.620,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						153.006.593,00							197.933.620,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						153.006.593,00							197.933.620,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	34.983.115,00						-	52.500.000,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	34.983.115,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	52.500.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.989.615,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.997.900,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.995.600,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	118.023.478,00						-	145.433.620,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	118.023.478,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	145.433.620,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				159 Perusahaan	60.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	75.000.000,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3	
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						14.230.030.500,00							17.357.000.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	85 %			85 %	10.342.055.105,00						85 %	12.692.000.000,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			85 %	400.036.600,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	DP3AP2KB Prov. Sumbar, OPD urusan PPPA dan PPKB se Prov Sumbar, Stakeholder dan instansi Terkait	-	540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	203.008.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	DP3AP2KB Prov. Sumbar, OPD urusan PPPA dan PPKB se Prov Sumbar, Stakeholder dan instansi Terkait		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	91.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	DP3AP2KB Prov. Sumbar, OPD urusan PPPA dan PPKB se Prov Sumbar, Stakeholder dan instansi Terkait		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ <i>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	39.383.400,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaike Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	ASN DP3AP2KB Prov. Sumbar		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-			100 %	94.894.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaike Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	DP3AP2KB Prov. Sumbar	-	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	54.700.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaike Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	DP3AP2KB Prov. Sumbar		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DP3AP2KB Prov. Sumbar		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	36.844.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	DP3AP2KB Prov. Sumbar		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	183.458.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				75 Orang	183.458.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	868.464.545,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	985.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.580.402,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.533.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	16.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	627.979.593,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	262.368.960,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	9.641.480,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3.416.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	249.311.480,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.478.214.850,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	1.551.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	342.901.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.134.063.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	451.235.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	123.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	4.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	120.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.385.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase perempuan di pengambil kebijakan</i>	15,09 %			15,09 %	1.289.972.450,00						15,09 %	1.440.000.000,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	<i>Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender Terlaksananya pembinaan PUG dan PPRG</i>	-			100 % 19 Kab/Kota	196.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi</i>				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>				2 Dokumen	146.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat	-			19 Kab/Kota	286.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Kewirausahaan Perempuan dan Anggota kaukus Perempuan Politik Indonesia	-	370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				40 Orang	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Kewirausahaan Perempuan dan Anggota kaukus Perempuan Politik Indonesia		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				3 Lembaga	256.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Kewirausahaan Perempuan dan Anggota kaukus Perempuan Politik Indonesia		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang di tingkatkan kapasitas kelembagaannya Terlaksananya Pembinaan terhadap organisasi perempuan	-			100 % 19 Kab/Kota	807.972.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan	-	850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				2 Lembaga	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi				100 Orang	782.972.450,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	96 %			96 %	1.170.416.845,00						96 %	1.325.000.000,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan terhadap perempuan	-			19 Kab/Kota	95.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait Provinsi, Instansi Vertikal Provinsi OPD pengampu PPA Kabupaten/Kota, Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat	-	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait Provinsi,Instansi Vertikal Provinsi OPD pengampu PPA Kabupaten/Kota,Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				19 Perangkat Daerah	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait Provinsi,Instansi Vertikal Provinsi OPD pengampu PPA Kabupaten/Kota,Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan	-			19 Kab/Kota	1.075.416.845,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan perempuan Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	-	1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				50 Orang	37.549.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan perempuan Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.037.866.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan perempuan Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	71,5 indeks			71,5 indeks	120.763.000,00						71,5 indeks	160.000.000,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga Terlaksananya upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	-			37,5 indeks 19 Kab/Kota	120.763.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Masyarakat,Pemerintah daerah dan Stakeholder terkait	-	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	70.763.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Masyarakat,Pemerintah daerah dan Stakeholder terkait		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Masyarakat,Pemerintah daerah dan Stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)</i>	93,75 %			93,75 %	146.509.000,00						93,75 %	170.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data, yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan</i>	-			100 %	146.509.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait	-	170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>				1 Dokumen	76.509.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi</i>				4 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)</i>	6 Kabupate n/Kota			6 Kabupate n/Kota	766.584.100,00						6 Kabupate n/Kota	1.135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi yang ditingkatkan pelebagaannya	-			100 %	331.760.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiBasandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait	-	640.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	210.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiBasandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				19 perangkat daerah	120.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiBasandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	-			100 %	434.824.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiBasandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait	-	495.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				3000 Orang	238.747.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				2 Kegiatan	181.026.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	15.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	96 %			96 %	393.730.000,00						96 %	435.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	-			19 Kab/Kota	225.505.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	135.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi				130 Orang	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak Terlaksananya koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-			100 % 19 Kab/Kota	168.225.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait, OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal, serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	-	185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	20.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait, OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal, serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait, OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal, serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				50 Orang	123.225.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait, OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal, serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						772.882.000,00							855.000.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	90 %			90 %	160.000.000,00						90 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Persentase pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian penduduk</i>	-			100 %	160.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Prevalensi KB</i>	56,32 %			56,32 %	200.000.000,00						56,32 %	230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK Terlaksananya Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal</i>	-			100 % 2 Laporan	200.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra kerja PPKB Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait	-	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra kerja PPKB Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja</i>				3 Daerah	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra kerja PPKB Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Indeks pembangunan keluarga</i>	65,54 indeks			65,54 indeks	412.882.000,00						65,54 indeks	475.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			100 %	296.202.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra Kerja, ASN lingkup Provinsi Sumatera Barat, Masyarakat, Kader KB/TPK	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	236.202.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra Kerja, ASN lingkup Provinsi Sumatera Barat, Masyarakat, Kader KB/TPK		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK														
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra Kerja, ASN lingkup Provinsi Sumatera Barat, Masyarakat, Kader KB/TPK		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			100 %	116.680.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pokja Kampung KB, Kader BKB/BKR/BKL	-	145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	41.250.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	26.249.800,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	26.249.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						808.258.150,00							1.095.258.150,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						808.258.150,00							1.095.258.150,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						808.258.150,00							1.095.258.150,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	28.000.000,00						100 %	135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan bahan logistik dan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD</i>	-			2 Sub Kegiatan	18.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pegawai Lingkup UPTD PPA	-	35.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pegawai Lingkup UPTD PPA		25.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				6 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pegawai Lingkup UPTD PPA		10.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	96 %			96 %	340.258.150,00						96 %	410.258.150,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	-			40 Orang	340.258.150,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang menjadi kewenangan Provinsi	-	410.258.150,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				40 Orang	140.258.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang menjadi kewenangan Provinsi		160.258.150,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				20 Layanan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang menjadi kewenangan Provinsi		250.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	96 %			96 %	440.000.000,00						96 %	550.000.000,00	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	-			50 Orang	440.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Provinsi	-	550.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Provinsi		200.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				30 Layanan	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Provinsi		350.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		DINAS PANGAN						54.745.599.100,00							85.046.092.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54.745.599.100,00							85.046.092.446,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						54.745.599.100,00							85.046.092.446,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	19.800.599.100,00						-	20.357.092.446,00	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	406.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	466.300.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	88.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		96.800.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	410.005.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		336.600.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		82.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	138.400.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	154.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	138.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		154.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	88.922.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	91.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				95 Paket	69.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		69.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	19.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		22.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	778.118.638,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	909.700.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		38.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	14.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		16.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	59.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		66.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		550.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	168.459.400,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	242.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	99.965.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	49.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		66.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	19.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		66.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.045.435.733,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	2.249.992.446,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		33.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		440.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.615.435.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.776.992.446,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	572.317.418,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	825.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	160.040.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		275.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	312.277.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		440.000.000,00	DINAS PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	28.445.000.000,00						-	57.459.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	24.850.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	52.907.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	4.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		5.000.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		350.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		3.300.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				100 Unit	16.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		43.737.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		300.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-			-	2.575.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	2.835.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				50 Ton	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		165.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				200 Ton	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		2.530.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		140.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-			-	1.020.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.717.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		990.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		650.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		77.000.000,00	DINAS PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	5.900.000.000,00						-	6.570.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-			-	5.800.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	6.460.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		3.850.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				2 Laporan	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.500.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	600.000.000,00						-	660.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	600.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	660.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		495.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		165.000.000,00	DINAS PANGAN
		UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN						3.287.708.900,00							3.887.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.287.708.900,00							3.887.100.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3.287.708.900,00							3.887.100.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.774.840.400,00						-	2.037.100.000,00	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	79.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	95.400.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		14.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		25.700.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		18.600.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		10.100.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		24.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	32.700.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		25.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		7.700.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	209.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		9.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.473.340.400,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.700.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		50.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.423.340.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.650.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
2.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	1.512.868.500,00						-	1.850.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.512.868.500,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.850.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				130 Sertifikat	562.868.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		880.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		150.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		220.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		600.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
		UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN						5.514.148.000,00							6.884.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.514.148.000,00							6.884.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						5.514.148.000,00							6.884.500.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.796.500.000,00						-	4.944.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	79.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	114.600.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		24.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		18.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		30.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.050.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		27.500.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		25.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		18.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	309.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		9.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		300.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	400.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		100.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		60.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		240.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	3.000.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		3.000.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	1.592.648.000,00						-	1.802.900.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	1.592.648.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.802.900.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	953.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.100.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				1 Laporan	639.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		702.900.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	125.000.000,00						-	137.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	125.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	137.500.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		137.500.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						17.970.856.739,00							16.526.783.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.970.856.739,00							16.526.783.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						17.970.856.739,00							16.526.783.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	15.662.425.739,00						-	14.308.132.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	62.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.476.570.566,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	10.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	11.067.610.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		9.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	408.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	160.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	93.250.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	93.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				103 Paket	68.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		68.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>0</i>				1 0	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18 Laporan	601.963.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				10 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				6 Dokumen	157.655.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	158.764.200,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	626.882.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	32.219.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				8 Paket	54.675.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				13 Unit	71.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		301.882.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.034.442.333,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	1.805.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				20 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				152.502 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		285.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				38 Laporan	1.822.442.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	763.117.541,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	263.117.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	102.318.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				19 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	52.318.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS														
			Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan				19 Dokumen	52.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	911.900.000,00						-	775.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	676.900.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				19 Dokumen	430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			<i>Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun</i>				1 Dokumen	96.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	235.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				2 Kegiatan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	119.327.000,00						-	10.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	119.327.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			0				0 0	119.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	80.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	158.225.000,00						-	135.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	158.225.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				100 Orang	33.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				3 Badan Usaha	75.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	52.170.000,00						-	15.000.000,00	
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-			-	52.170.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	52.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	358.252.000,00						-	357.311.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	358.252.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	357.311.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				24 Dokumen	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		159.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				10 Orang	155.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		116.311.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat				10 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				6 Lembaga	47.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		82.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	106.927.000,00						-	112.581.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	106.927.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	112.581.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				22 Entitas	106.927.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		112.581.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	134.312.000,00						-	162.759.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-			-	134.312.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	162.759.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				3 Perkara	35.489.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		43.655.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				100 Pengaduan	98.823.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		119.104.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	285.000.000,00						-	471.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	471.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		471.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				19 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD PERSAMPAHAN						3.001.000.000,00							4.025.159.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.001.000.000,00							4.025.159.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.001.000.000,00							4.025.159.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	112.800.000,00						-	0,00	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.800.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	112.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PERSAMPAHAN
2.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	2.888.200.000,00						-	4.025.159.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	2.888.200.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	4.025.159.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				2 Unit	2.862.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.000.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.159.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN						1.009.225.261,00							1.105.715.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.009.225.261,00							1.105.715.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.009.225.261,00							1.105.715.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	207.131.359,00						-	0,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.691.359,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	56.383.056,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.040.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			-				-	83.268.303,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.440.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	64.440.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	802.093.902,00						-	1.105.715.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	802.093.902,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.105.715.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				150 Dokumen	802.093.902,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.105.715.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
		UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS						1.664.989.000,00							3.879.475.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.664.989.000,00							3.879.475.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.664.989.000,00							3.879.475.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	572.228.800,00						-	767.500.000,00	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			-				-	24.000.000,00	Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		150.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	88.000.800,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	132.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	7.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		10.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				0 0	50.000.800,00	Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		75.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		7.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		40.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	155.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	175.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		175.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.228.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	260.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	4.340.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		10.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	199.888.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		250.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS	
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS	
2.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	1.092.760.200,00						-	3.111.975.000,00		
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.092.760.200,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	3.111.975.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS	
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</i>				1 Dokumen	1.092.760.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		3.111.975.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							11.527.023.152,00							11.238.094.418,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.527.023.152,00							11.238.094.418,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						11.527.023.152,00							11.238.094.418,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.705.067.152,00						-	8.704.263.418,00	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	493.859.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	415.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	223.396.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	134.509.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	135.954.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.335.277.252,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.342.889.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	4.881.984.152,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.272.889.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1700 Dokumen	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	63.293.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	118.744.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7 Dokumen	101.945.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16.799.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	345.762.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	88.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				59 Paket	84.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		88.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	261.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.178.519.175,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	915.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	153.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	37.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	202.077.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	76.031.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	485.410.875,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	130.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	281.433.916,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	95.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	186.433.916,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.236.231.240,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.299.588.895,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	-			100 persen	203.515.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	545.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	63.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat	-			100 persen	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	100 % 98 % 100 % 100 %			100 % 97 %	528.515.000,00						100 % 98 % 100 % 100 %	528.831.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat	-			100 persen	125.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	88.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.831.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase meningkatnya kemampuan aparatur pencatatan sipil kabupaten dan Kota di Sumatera barat</i>	-			100 persen	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	18 inovasi 1 %			1,1 % 15 inovasi	548.974.000,00						18 inovasi 1 %	720.000.000,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan	-			100 persen	348.974.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	420.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	163.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	40.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	<i>Persentase meningkatnya SDM Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan Provinsi</i>	-			100 persen	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>				120 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	<i>Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun</i>	2 jenis			2 jenis	215.952.000,00						2 jenis	270.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	<i>Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan</i>	-			100 persen	215.952.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				2 Dokumen	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	125.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						14.924.356.000,00							9.642.387.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.924.356.000,00							9.642.387.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						14.924.356.000,00							9.642.387.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.582.614.000,00						-	2.587.500.000,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	108.955.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	28.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.192.778.845,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	6.982.778.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	78.300.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	78.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	64.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	656.716.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	680.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	10.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	29.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	22.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.251.014.155,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.237.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	229.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.019.171.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		980.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	205.850.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	159.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	0,00						-	100.000.000,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	1.304.887.000,00						-	1.654.887.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-			-	1.304.887.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	1.654.887.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	154.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		154.887.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				7 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>				5 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	953.910.000,00						-	1.400.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-			-	953.910.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa														
			<i>jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				14 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				4 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				6 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				55 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				55 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				5 Dokumen	163.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	3.082.945.000,00						-	3.900.000.000,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.082.945.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	3.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				7 Dokumen	52.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				19 Dokumen	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				125 Lembaga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				14 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				19 Laporan	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				19 Keluarga	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah</i>				27 Keluarga	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						20.220.963.000,00						20.258.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.220.963.000,00							20.258.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						20.220.963.000,00							20.258.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	15.279.785.000,00						100 %	15.808.000.000,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			85 %	252.002.183,00			-	-	Instansi terkait	-	395.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	58.138.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	59.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	61.487.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1200 Data	43.693.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	29.027.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	10.694.061.733,00			-	-	Instansi terkait	-	10.760.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	10.411.002.333,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Instansi terkait		10.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	221.489.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	61.570.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	109.042.500,00			-	-	Instansi terkait	-	130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	70.002.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	39.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	432.076.000,00			-	-	Instansi terkait	-	260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	113.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	318.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	791.356.285,00			-	-	Instansi terkait	-	893.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.765.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.932.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.689.485,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	221.698.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.610.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	16.030.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	404.631.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	193.598.080,00			-	-	Instansi terkait	-	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	80.348.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	113.249.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	2.310.437.219,00			-	-	Instansi terkait	-	2.490.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	18.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	298.699.500,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.993.592.719,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		2.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			80 %	497.211.000,00			-	-	Instansi terkait	-	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	134.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	38.130.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	324.090.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %			2,45 %	3.470.000.000,00						2,45 %	2.940.000.000,00	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi dan Rencana Aksi Keselamatan Provinsl yang tersusun	-			2 Dokumen	930.520.500,00			-	-	Masyarakat dan Instansi terkait	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	867.132.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat dan Instansi terkait		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi														
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				1 Dokumen	63.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat dan Instansi terkait		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-			27 %	987.000.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				66 Unit	787.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				330 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi	-			2 Dokumen	922.826.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	1.290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	880.807.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	42.018.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang direkomendasikan	-			7 Rekomendasi	80.000.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	283.786.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	116.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				0 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		145.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	47.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-			1 Dokumen	190.867.500,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	190.867.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	-			1 Laporan	75.000.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				600 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	5 Rekomendasi			5 Rekomendasi	1.255.236.000,00						5 Rekomendasi	1.340.000.000,00	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase tertibnya perizinan angkutan laut	-			100 %	150.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Instansi terkait dan masyarakat	-	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Instansi terkait dan masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana	-			100 %	150.000.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pembangunan,penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-			2 Dokumen	955.236.000,00			-	Meningkatk an pembangun infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	Instansi terkait dan masyarakat	-	960.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangun infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	Instansi terkait dan masyarakat		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	155.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	Instansi Terkait dan Masyarakat	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi Terkait dan Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen			1 dokumen	215.942.000,00						1 dokumen	170.000.000,00	
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	-			1 Usulan	215.942.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan				1 Dokumen	85.106.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	130.835.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I						285.000.000,00							355.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						285.000.000,00							355.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						285.000.000,00							355.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	123.749.160,00						100 %	155.000.000,00	
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 %	64.903.000,00			-	-	Instansi terkait	-	40.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	64.903.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		40.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	22.437.600,00			-	-	-	-	15.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	22.437.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	36.408.560,00			-	-	Instansi terkait	-	60.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2.565.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		20.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	33.843.560,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		40.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	53 %			53 %	161.250.840,00						53 %	200.000.000,00	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	-			1 %	161.250.840,00			-	-	-	-	200.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi				2 Unit	56.290.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.</i>				10 Orang	83.604.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			<i>Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				0 Unit	21.356.840,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		70.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II						320.837.000,00							615.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						320.837.000,00							615.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						320.837.000,00							615.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	153.189.640,00						100 %	145.000.000,00	
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	-			100 %	94.942.000,00			-	-	Instansi terkait	-	45.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	94.942.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		45.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	12.895.200,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	12.895.200,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	45.352.440,00			-	-	Instansi terkait	-	50.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Paket	6.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		30.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	39.106.440,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		20.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	0,00			-	-	Instansi terkait	-	50.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait		50.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	69,5 %			69,5 %	167.647.360,00						69,5 %	470.000.000,00	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	-			1 %	167.647.360,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat	-	470.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi				3 Unit	67.596.300,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Instansi terkait dan masyarakat		120.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	100 %			100 persen 88 persen BB indeks	19.531.838.079,00						100 %	18.892.548.600,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	464.579.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	469.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	301.251.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	30.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	107.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				4 Data	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				0 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		99.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0 Subtansi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 persen	10.974.933.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	11.055.298.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	10.447.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.525.298.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	467.349.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 persen	197.630.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	167.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 persen	431.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	506.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				150 Paket	112.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		112.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	23.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	3.772.593.949,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.253.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	178.760.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		49.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	22.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.051.723.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.925.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.419.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 persen	1.095.507.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	642.704.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	253.803.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	183.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.084.604.130,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.428.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	993.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.086.604.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 persen	510.990.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	205.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	105.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			<i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>				0.7 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	40 persen			40 persen	9.377.118.000,00						40 persen	8.800.000.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan program strategis pemerintah	-			40 persen	9.377.118.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	8.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				750 Konten	490.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		990.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan</i>				200 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			<i>Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik</i>				10 Persentase	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														
			<i>Persentase khalayak yang terpapar informasi publik</i>				40 Persentase	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		495.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun</i>				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		137.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.636.618.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.035.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				50 Komunitas	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		137.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				50 Permohonan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomend asi	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				66 Media	5.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Indeks SPBE (skala 1-5)</i>	3,5 indeks			3,5 indeks	11.295.127.921,00						3,5 indeks	13.736.100.000,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Jumlah OPD yang pengelolaan nama domain sesuai dengan standar Permen Kominfo</i>	-			47 OPD	81.181.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	129.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	81.181.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		129.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Indeks SPBE (Skala 1-5)</i>	-			3,5 indeks	11.213.946.921,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	13.606.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				10 Aplikasi	29.005.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		154.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				8 Aplikasi	173.893.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				19 unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				19 kabupate n/kota	295.078.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				0 Aplikasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				0 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				2 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.083.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				47 Perangkat Daerah	8.236.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	45.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		38.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>				1 Dokumen	804.279.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		425.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>				47 perangkat daerah	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.375.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						875.000.000,00							962.500.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	90 persen			90 persen	875.000.000,00						90 persen	962.500.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<i>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	-			90 persen 90 persen	875.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	962.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				150 Orang	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		357.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				90 Persentase	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				50 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>				47 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						783.000.000,00							990.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah</i>	55 persen			55 persen	783.000.000,00						55 persen	990.000.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah</i>	-			55 persen	683.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	880.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	183.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				47 Perangkat Daerah	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-			47 OPD	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				47 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						40.848.650.049,00							36.808.759.600,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						40.848.650.049,00							36.808.759.600,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						40.848.650.049,00							36.808.759.600,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	22.180.712.749,00						-	16.782.900.780,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	261.972.700,00			-	-	-	-	288.169.970,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	114.522.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.974.860,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	79.166.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		87.083.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen Laporan	68.283.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.112.070,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	15.750.165.419,00			-	-	-	-	9.625.181.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	15.409.891.719,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.250.880.890,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	318.427.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.270.360,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	21.846.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.030.710,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	49.415.100,00			-	-	-	-	54.010.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16 Dokumen	39.100.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.010.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.315.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	317.060.000,00			-	-	-	-	296.791.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.025.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				93 Orang	227.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		249.766.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.279.288.055,00			-	-	-	-	1.382.347.928,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				31 Paket	62.358.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.594.020,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	89.828.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		98.811.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	353.446.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		388.791.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	211.658.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		232.824.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.400.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.440.110,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	5.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.468.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	530.716.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		558.919.058,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				20 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	1.397.233.400,00			-	-	-	-	1.698.264.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	335.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		530.281.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				12 Paket	515.675.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		567.242.720,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				36 Unit	546.127.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.739.920,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	2.205.445.075,00			-	-	-	-	2.425.989.582,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	2.332.383,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.565.621,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	452.681.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		497.949.760,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	1.750.431.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.925.474.201,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	920.133.000,00			-	-	-	-	1.012.146.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	130.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		143.979.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				108 Unit	98.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		108.185.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	662.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		728.533.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	21.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.540.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.909.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	3,95 %			3,95 %	70.469.000,00						3,95 %	77.515.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	-			6 koperasi	70.469.000,00			-	-	-	-	77.515.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				20 Unit Usaha	70.469.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.515.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	67 %			67 %	351.147.000,00						67 %	386.261.700,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-				251.147.000,00			-	-	-	-	276.261.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				14 Unit Usaha	251.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		276.261.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				10 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	45 koperasi			45 koperasi	331.905.000,00						45 koperasi	365.095.500,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-			45 unit usaha	331.905.000,00			-	-	-	-	365.095.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				45 Unit Usaha	331.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		365.095.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	80 koperasi			80 koperasi	1.778.695.000,00						80 koperasi	1.956.564.500,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan	-			150 koperasi	1.778.695.000,00			-	-	-	-	1.956.564.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				25 Unit Usaha	909.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.397.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				300 Unit Usaha	869.243.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		956.167.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	130 buah			130 buah	8.726.488.000,00						130 buah	9.090.264.590,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-				8.726.488.000,00			-	-	-	-	9.090.264.590,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				3150 Unit Usaha	6.230.344.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.619.506.410,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	127.981.300,00						-	140.779.430,00	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	75.391.300,00			-	-	-	-	82.930.430,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.640.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.504.220,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	56.751.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.426.210,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	52.590.000,00			-	-	-	-	57.849.000,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	52.590.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.849.000,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah KUKM yang dilatih	1.650 orang			1.650 orang	3.250.469.000,00						1.650 orang	3.575.515.900,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-				3.250.469.000,00			-	-	-	-	3.575.515.900,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				1382 Orang	3.250.469.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.575.515.900,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
3.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	130 buah			130 buah	3.808.870.051,00						130 buah	4.189.757.056,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	3.808.870.051,00			-	-	-	-	4.189.757.056,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				1428 Orang	3.808.870.051,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.189.757.056,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
4.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	4,2 %			4,2 %	465.358.600,00						4,2 %	511.894.460,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-			-	465.358.600,00			-	-	-	-	511.894.460,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				400 Orang	465.358.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		511.894.460,00	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
		DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						15.211.505.635,00							15.886.504.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.149.371.987,00							8.094.504.446,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7.149.371.987,00							8.094.504.446,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-			100 %	2.724.498.987,00						-	2.994.504.446,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	159.470.062,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	41.255.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	44.208.912,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	74.006.150,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	236.574.945,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	230.299.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	203.017.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		175.830.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	33.557.445,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		54.469.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	9.200.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-	14.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	9.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		14.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	130.750.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	152.987.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	60.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		67.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	70.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		85.487.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	827.168.080,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.016.891.946,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	18.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		20.981.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	37.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		20.981.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				23 Paket	73.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		73.678.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	19.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		17.495.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	18.120.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		17.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	489.850.112,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		695.668.646,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	171.007.968,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		171.007.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-			100 %	92.425.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	-	59.282.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	91.925.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah		59.282.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	892.520.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-	911.539.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	167.520.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		170.370.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	725.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		741.168.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	376.390.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-	344.104.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	184.260.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		209.434.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	12.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	49.130.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		30.060.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		93.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %			100 %	1.079.762.000,00						100 %	1.200.000.000,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-			1 Dokumen	50.000.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha	-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	-			2 dokumen	1.029.762.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha	-	1.130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	83.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				19 Daerah	197.823.502,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	305.845.598,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	443.092.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	5 Dokumen			5 Dokumen	852.444.000,00						5 Dokumen	950.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	-			5 Dokumen	852.444.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha	-	950.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				5 Dokumen	594.954.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	257.490.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	88,13 % 83,20 / 3,47 Nilai/Rasio			83,05 / 3,45 Nilai/Rasio 87,27 %	1.586.358.000,00						88,13 % 83,20 / 3,47 Nilai/Rasio	1.875.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	-			83,05 / 3,45 nilai / asio	1.586.358.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha	-	1.875.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				15 Pelaku Usaha	136.827.112,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				3000 Pelaku Usaha	1.107.058.488,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		1.245.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</i>				20 Kegiatan Usaha	342.472.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)</i>	6,7 Trilyun Rupiah			6,7 Trilyun Rupiah	832.431.000,00						6,7 Trilyun Rupiah	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	-			6,7 Trilyun Rupiah	832.431.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha	-	1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan usaha	235.360.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20 Kegiatan usaha	258.283.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	338.788.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi	80 %			80 %	73.878.000,00						80 %	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	<i>Data Penanaman Modal yang berbasis teknologi</i>	-			1 Dokumen	73.878.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha	-	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	73.878.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	NON URUSAN						8.062.133.648,00							7.792.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						8.062.133.648,00							7.792.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	-			100 %	8.062.133.648,00						-	7.792.000.000,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	8.062.133.648,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	7.792.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/ Bulan	8.062.133.648,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.792.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						42.221.740.210,00							25.311.440.818,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.221.740.210,00							25.311.440.818,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						42.221.740.210,00							25.311.440.818,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	15.972.813.303,00						100 %	15.967.487.000,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			85 %	1.163.268.981,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.775.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	139.248.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	162.581.381,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		295.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	253.452.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		380.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				19 Data	144.974.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	212.852.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	107.393.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	142.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	11.017.047.322,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	10.230.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/Bulan	10.442.047.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		9.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	230.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	195.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-			100	20.010.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	10.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	180.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Stel Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	950.911.500,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	987.487.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	100.173.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	108.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	39.975.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	22.350.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				10 Orang Laporan	4.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	517.487.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		517.487.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Arsip Dokumen	7.355.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	323.276.920,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				124 Paket	80.005.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	198.271.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.320.882.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.415.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1800 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				48 Laporan	300.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	767.416.580,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	755.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	90.270.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	200.146.580,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	1890 orang 20 % 1890 orang 20 %			18 % 348 orang	3.605.338.000,00						348 orang 20 % 348 orang 20 %	3.605.338.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-			100 %	2.605.338.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.605.338.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				298 Orang	678.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		678.569.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi														
			-				-	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	91.639.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		91.639.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				0 Persentase	335.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		335.130.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				15 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				348 Orang	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</i>	-			100 %	1.000.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi</i>				2 Organisasi	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional</i>	1,05 % 1,05 % 29 medali 29 medali			1 % 29 medali	19.461.533.907,00						1,05 % 1,05 % 29 medali 29 medali	5.011.560.818,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-			100 %	650.002.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				7 Dokumen	650.002.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-			100 %	2.326.394.710,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	2.483.633.121,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				140 Orang	1.342.761.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				4 Kegiatan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				19 Kegiatan	683.633.121,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		683.633.121,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-			100 %	886.214.697,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.148.505.697,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	137.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				30 Orang	198.505.697,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		398.505.697,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				7 Pelatda	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			100 %	15.598.922.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	729.422.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				4 Dokumen	3.568.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		669.422.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				3 Dokumen	12.030.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	5,44 %			5,44 %	3.182.055.000,00						5,44 %	727.055.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			100 %	3.182.055.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	727.055.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi															
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		245.257.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi															
			Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				1 Unit	414.874.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi															
			Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	767.181.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		81.798.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPTD KBOR						11.741.305.790,00							11.981.315.790,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.741.305.790,00							11.981.315.790,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						11.741.305.790,00							11.981.315.790,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	2.369.496.100,00						100 %	2.540.000.000,00	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	379.756.422,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	470.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		70.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		250.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	59.756.422,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	50.307.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	50.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				42 Paket	50.307.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		50.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	835.926.578,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	890.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		15.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	175.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		175.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	499.610.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		500.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	499.896.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		500.000.000,00	UPTD KBOR
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	1,05 % 1,05 % 29 medali 29 medali			1 % 29 medali	9.371.809.690,00						1,05 % 1,05 % 29 medali 29 medali	9.441.315.790,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-			100 %	2.129.636.620,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.200.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				15 Unit	2.129.636.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.200.000.000,00	UPTD KBOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-			100 %	1.500.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.500.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				50 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-			100 %	5.742.173.070,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	5.741.315.790,00	UPTD KBOR
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				70 Orang	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		950.000.000,00	UPTD KBOR
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				119 Orang	4.792.173.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		4.791.315.790,00	UPTD KBOR
		DINAS KEBUDAYAAN						12.360.963.500,00							33.162.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.360.963.500,00							33.162.500.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12.360.963.500,00							33.162.500.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	8.441.036.000,00						-	15.962.500.000,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	154.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.733.036.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	9.832.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	2.431.036.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		9.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	265.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		291.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	37.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		40.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.073.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	1.180.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	65.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		71.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	140.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		154.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	40.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		44.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	28.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		30.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	800.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		880.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	605.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	350.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		385.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.135.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	3.448.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		38.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	500.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2.600.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		2.860.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	750.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	522.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		330.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		27.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.230.107.500,00						-	7.200.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	330.107.500,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	5.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				10 Objek	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		4.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	255.107.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	900.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				30 Objek	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				1000 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	1.650.000.000,00						-	3.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.650.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	3.750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				240 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				5 Sertifikat	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	700.000.000,00						-	2.600.000.000,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-			-	700.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				38 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				8 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	339.820.000,00						-	3.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	163.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				12 Objek	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	176.820.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	3.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				10 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	176.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN						4.038.704.400,00							4.699.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.038.704.400,00							4.699.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						4.038.704.400,00							4.699.000.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	237.000.000,00						-	279.000.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	116.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	178.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		60.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	36.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		50.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		8.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		10.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		50.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	76.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		6.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		70.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	25.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		25.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-			-	3.801.704.400,00						-	4.420.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-			-	3.801.704.400,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	4.420.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				700 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.500.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	260.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		300.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				22 Unit	1.468.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.500.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				6 Unit	673.704.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Koto Tinggi Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.000.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				2 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		120.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
		UPTD TAMAN BUDAYA						3.770.720.018,00							4.636.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.770.720.018,00							4.636.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.770.720.018,00							4.636.000.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	320.792.620,00						-	386.000.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	90.711.720,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	105.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	10.031.330,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	15.067.390,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	15.613.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.920.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.920.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	225.160.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	275.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	3.449.927.398,00						-	4.250.000.000,00	
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-			-	3.449.927.398,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	4.250.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	1.999.927.398,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		2.000.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		205.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				150 Eksemplar	59.484.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		62.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		48.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				35 Orang	40.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		42.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				0 Layanan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		42.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	210.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		212.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				0 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		32.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				0 Nilai	52.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi				0 Indeks	52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				0 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		37.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemem Layanan TIK				5 Perpustaka an	188.786.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		190.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		37.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				0 Perpustaka an	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		48.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	-			26530 Orang	177.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	183.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				14 Lokus	85.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		87.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0 Orang	26.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		27.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				12 Perpustak aan	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		37.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		32.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah			223 jumlah	502.156.000,00						223 jumlah	517.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan	-			2 KCKR	124.900.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	127.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				350 Eksemplar	114.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				3 Penerbit	10.150.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		7.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	-			2 Buku	121.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	125.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				350 Entry	60.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		62.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	61.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		63.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di alihmediakan ke digital	-			2 Naskah	164.800.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	170.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				5 Eksemplar	79.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		82.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	14.659.915.000,00						100 %	14.729.000.000,00	
	2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			85 %	196.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	201.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		42.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	55.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	57.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		58.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	43.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	11.257.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	11.270.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	10.997.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.000.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	175.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	102.865.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	112.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	52.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	21.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	29.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	121.900.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	123.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	54.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				72 Orang	67.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	315.650.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	331.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	27.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	32.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	21.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				120 Dokumen	20.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				80 Laporan	191.850.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		195.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	10.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	57.960.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	57.960.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	2.422.640.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.477.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	757.040.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		800.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.650.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.660.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	185.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	193.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	117.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	62.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	73 %			73 %	277.923.000,00						73 %	303.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	-			10 Pencipta Arsip	148.523.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	165.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				500 Arsip	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi														
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				300 Arsip	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				300 Arsip	17.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan														
			Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan				40 Orang	20.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi														
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				12 Instansi	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah arsiparis				0 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				0 Unit	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan				19 Laporan	6.523.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				5 Lembaga	40.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		42.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip				0 Lembaga	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Akses layanan Arsip Statis Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah Jumlah arsip statis yang dipreservasi	-			15 Pengguna Arsip 5 Pencipta Arsip 1 Daftar Arsip	92.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	98.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				100 Arsip	22.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan														
			Jumlah Orang yang diwawancarai				0 Orang	22.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	13.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat</i>	76,66 %			76,66 %	181.313.000,00						76,66 %	186.500.000,00	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	<i>Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun</i>	-			12 Pencipta Arsip	67.900.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	68.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			<i>Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				0 Arsip	67.900.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		68.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan	-			9 Kali	57.913.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				800 Arsip	34.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	23.913.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan	-			3 OPD	26.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	27.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				0 Daftar	26.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis	-			6 Daftar Arsip	29.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	31.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	14.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
4.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1 regulasi			1 regulasi	73.878.000,00						1 regulasi	77.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-			1 SOP	73.878.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	77.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.1.01.0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan				0 SOP	30.878.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.1.01.0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0 Arsip	43.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						75.064.633.438,00							84.012.191.432,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						75.064.633.438,00							84.012.191.432,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						75.064.633.438,00							84.012.191.432,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	34.432.139.438,00						100 %	36.087.941.432,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	500.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbra	-	550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbra		220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbra		330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbra		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbra		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	23.050.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar	-	23.167.400.571,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				151 Orang/ Bulan	22.000.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		22.012.400.571,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	900.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		990.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			100 %	555.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar	-	610.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	225.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		247.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	130.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov SUMbar		143.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	630.946.238,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar	-	663.790.861,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				198 Paket	277.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				198 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				198 Orang	53.446.238,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		58.790.861,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	2.948.693.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar	-	3.124.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		44.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.283.693.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		2.392.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	1.300.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar	-	1.430.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	3.993.300.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKp Prov Sumbar	-	4.534.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKp Prov Sumbar		8.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	515.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKp Prov Sumbar		566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				63 Laporan	3.470.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKp Prov Sumbar		3.960.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	1.454.200.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar	-	2.007.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	329.200.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	75.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		82.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		1.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	350 M2 7 kawasan 30.000 bata ng 70,59 %			25.000 batang 350 M2 64,71 % 7 kawasan	2.150.000.000,00						350 M2 7 kawasan 30.000 bata ng 70,59 %	2.365.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</i>	-			7 Kab/Kota	950.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir	-	1.045.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			<i>Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola</i>				0 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi</i>				0.5 Ha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat pesisir		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</i>				0 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		660.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil</i>	-			7 Kab/Kota	1.200.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir	-	1.320.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya</i>				5000 Orang	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		1.155.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Kelompok	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan</i>	1,17 % 100 dokum en 232.762 ton 3 unit 1.800 unit			100 dokumen 1,11 % 1.768 unit 230.081 ton 3 unit	17.407.770.900,00						1,17 % 100 dokum en 232.762 ton 3 unit 1.800 unit	20.611.250.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat</i>				200 Unit	1.925.741.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Nelayan Perairan Umum		3.124.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</i>	-			100 %	150.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Nelayan	-	165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			<i>Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>				100 Persentase	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Nelayan		165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Nelayan	-	275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pembudidaya		880.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya				0 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pembudidaya		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pembudidaya		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	5.476.100.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pembudidaya	-	6.627.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				11 Unit	5.476.100.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pembudidaya		6.627.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	90 %			90 %	9.823.622.300,00						90 %	11.858.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-			7 Kab/Kota	9.348.622.300,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir	-	11.335.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi														
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani				12 Perkara	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				0 Hari Operasi	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		3.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat</i>				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			<i>Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan</i>				1 Unit	5.538.622.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		6.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				0 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				6 Kelompok Masyarakat	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		610.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Bidang Budidaya di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa</i>	-			19 Kab/Kota	475.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pembudidaya	-	522.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				0 Pelaku Usaha	475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pembudidaya		522.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan</i>	44 Kg/kap/th 11 % 22.742 ton			20.832 ton 42,4 Kg/kap/th 8,05 %	4.300.000.000,00						43,5 Kg/kap /th 11 % 22.742 ton	5.060.000.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan</i>	-			19 Kab/Kota	1.050.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pengolah dan pemasaran	-	935.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				1 Dokumen	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pengolah dan pemasaran		935.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				0 Unit Usaha	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Pengolah dan pemasaran		2.475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)						2.007.000.000,00							2.768.700.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.007.000.000,00							2.768.700.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.007.000.000,00							2.768.700.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	259.897.460,00						100 %	898.700.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	3.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP	-	5.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		5.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	106.647.460,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP	-	205.700.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	106.647.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		205.700.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP	-	110.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	PPMHP		110.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	50.250.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP	-	577.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		16.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		11.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	25.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		550.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan</i>	44 Kg/kap/t h 11 % 22.742 ton			20.832 ton 42,4 Kg/kap/th 8,05 %	1.747.102.540,00						43,5 Kg/kap /th 11 % 22.742 ton	1.870.000.000,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran</i>	-			19 Kab/Kota	1.747.102.540,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Masyarakat	-	1.870.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				5 Kegiatan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Masyarakat		770.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Kegiatan	1.047.102.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat		1.100.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
		BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)						5.151.000.000,00							6.931.100.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.151.000.000,00							6.931.100.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.151.000.000,00							6.931.100.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	705.007.200,00						-	1.139.600.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	22.838.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	385.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		385.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPPBALP)
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPPBALP)
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPPBALP)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	237.369.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	248.600.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPPBALP)
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	149.756.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	87.613.200,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		83.600.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	360.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	396.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		396.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.800.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	110.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	84.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	4.445.992.800,00						-	5.791.500.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	4.445.992.800,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	5.791.500.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				2 Unit	2.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		4.070.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	1.145.992.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.171.500.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	89.013.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	99.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	89.013.000,00	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		99.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	295.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	159.500.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		159.500.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.734.150.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.667.565.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.500.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	9.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.065.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	2.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.630.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-			-	1.500.000.000,00						-	1.650.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.650.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				332510.53 Ha	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.650.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	600.000.000,00						-	660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.942.992.000,00							7.439.291.200,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.317.992.000,00						-	2.021.791.200,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	165.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	612.992.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.246.291.200,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		440.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	438.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		550.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	112.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		256.291.200,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	448.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	492.800.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	448.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		492.800.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	117.700.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		62.700.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	4.625.000.000,00						-	5.417.500.000,00	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	300.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	550.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.812.167.640,00						-	1.771.133.491,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	245.103.104,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	275.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	245.103.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	586.011.756,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	486.333.491,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	92.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		121.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	102.157.756,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		89.319.291,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	391.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		276.014.200,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	756.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	831.600.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	756.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		831.600.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	225.052.780,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	178.200.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	35.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.900.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	72.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		74.800.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	116.922.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		82.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	3.379.954.276,00						-	4.490.200.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	3.379.954.276,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	4.490.200.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	1.892.447.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.870.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				3 Layanan	1.487.506.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.620.200.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III						4.092.300.000,00							4.521.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.092.300.000,00							4.521.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4.092.300.000,00							4.521.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.442.300.000,00						-	1.606.000.000,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	88.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		33.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.060.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.166.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	450.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		495.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				7 Paket	398.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		437.800.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	212.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		233.200.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	330.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		330.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.300.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	22.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	2.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						38.386.130.000,00							31.082.500.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %			100 %	15.263.816.000,00						100 %	14.972.500.000,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalausi Kinerja Dinas	-			1 Tahun	198.630.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	455.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	29.730.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	79.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	275.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		285.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	18.080.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		37.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Tahun	120.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	211.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearh	-			1 Tahun	240.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	305.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	90.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				58 Orang	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	3.581.910.697,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.724.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	95.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	500.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	2.636.910.697,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	195.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah	-			1 Tahun	970.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	320.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	650.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pmerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	1.375.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.425.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	375.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		390.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.035.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah</i>	-			1 Tahun	575.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	630.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	175.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW Unggulan Provinsi Berdaya Saing Nasional Yang Diintervensi Pengembangannya Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang	19 DTW 17 kali 0 Jumlah 0 jumlah 19 DTW 17 kali			15 DTW 19 Kali	6.860.000.000,00						19 DTW 17 kali 1 Jumlah 19 jumlah 19 DTW 17 kali	2.875.000.000,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-			1 DTW	400.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	425.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				6 Lokasi	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-			1 DTW	4.960.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	1.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				7 Dokumen	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				3 Lokasi	1.660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Daerah Provinsi				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi														
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata				2 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-			19 Kab/Kota	1.500.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)														
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				15 Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar														
			Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				20 Usaha Pariwisata	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				60 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata Lama Tinggal Wisnus Rata-rata Lama Tinggal Wisman Persentase Peningkatan Kunjungan Wisman Persentase Peningkatan Kunjungan Wisnus	3,29 hari 0 persen 1,88 hari 3,29 hari 8,5 % 9 % 0 persen 9 % 8,5 % 1,88 hari			1.82 Hari 3.27 Hari 7 % 7.5 %	8.130.000.000,00						3,29 hari 8,5 persen 1,88 hari 3,29 hari 8,5 % 9 % 17,5 persen 9 % 8,5 % 1,88 hari	7.950.000.000,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daua Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-			3 Kegiatan	8.130.000.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	7.950.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	2.700.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3.980.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		4.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Yang Terdaftar HKI	200 Produk			200 Produk	3.636.950.000,00						200 Produk	3.150.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat	-			200 Produk	2.764.985.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	2.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif</i>				1 Laporan	1.544.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		1.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														
			<i>Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik</i>				1 Dokumen	1.220.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		950.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	871.965.000,00			-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-	-	950.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual</i>				100 Orang	321.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														
			<i>Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah</i>				5 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata Yang Bersertifikat</i>	696 Orang 0 Pelaku 12 % 0 orang			10 % 596 Orang	4.495.364.000,00						696 Orang 12 Pelaku 12 % 696 orang	2.135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	<i>Terlaksananya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	-			100 orang	2.545.364.000,00			-	-	-	-	1.030.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>				250 Orang	2.094.314.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)</i>				50 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdayasaing kepariwisataan	-		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>				100 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdayasaing kepariwisataan	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>				1 Laporan	51.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdayasaing kepariwisataan	-		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<i>Terlaksananya Penegmbangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kraetif</i>	-			4 Kegitan	1.950.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdayasaing kepariwisataan	-	-	1.105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				500 Orang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdayasaing kepariwisataan	-		155.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif														
			0				50 0	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				250 Orang	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan	-		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA						121.639.357.811,00							127.465.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						121.639.357.811,00							127.465.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						121.639.357.811,00							127.465.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	56.206.792.811,00						-	60.220.000.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		175.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		225.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	49.074.282.898,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	50.925.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				334 Orang/ Bulan	48.624.282.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		325.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	338.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	138.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	211.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				94 Paket	211.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.296.713.028,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	100.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.676.712.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.285.896.885,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.545.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	494.964.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.759.932.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	31.158.898.000,00						-	32.000.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	6.700.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	7.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan				12 laporan	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan				12 laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura				12 laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	24.458.898.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	25.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	24.458.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		25.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	29.989.519.000,00						-	30.700.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	29.989.519.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	30.700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				12 Dokumen	29.389.519.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		30.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
4.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-			-	284.148.000,00						-	345.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	284.148.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	345.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				2 Dokumen	84.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		120.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	4.000.000.000,00						-	4.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	4.000.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	4.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				12 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				12 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN						7.085.299.750,00							8.907.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.085.299.750,00							8.907.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						7.085.299.750,00							8.907.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.885.299.750,00						-	2.487.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	67.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	70.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				25 Paket	67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	550.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	250.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.106.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.182.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		950.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.399.750,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	80.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	41.399.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	4.000.000.000,00						-	5.000.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	4.000.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	5.000.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		5.000.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	800.000.000,00						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	800.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.000.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		600.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	400.000.000,00						-	420.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	420.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		420.000.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						5.880.028.409,00							6.752.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.880.028.409,00							6.752.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						5.880.028.409,00							6.752.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.480.028.409,00						-	1.942.000.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	240.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	75.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			0				1 0	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	440.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	275.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	692.628.409,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	752.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		130.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	556.628.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	60.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	3.400.000.000,00						-	3.600.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	3.400.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	3.600.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Benih				12 Sertifikat	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		2.100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		1.500.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	600.000.000,00						-	800.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	600.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	800.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	400.000.000,00						-	410.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	410.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				12 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		410.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN						8.005.665.512,00							9.240.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.005.665.512,00							9.240.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						8.005.665.512,00							9.240.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.555.665.512,00						-	1.930.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	235.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	64.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	80.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	33.750.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	50.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	33.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	435.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	225.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	812.515.512,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	835.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		210.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	596.515.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	70.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	3.000.000.000,00						-	3.200.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	3.000.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	3.200.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				12 Sertifikat	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		2.100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	1.300.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.300.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.600.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		600.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				2 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		600.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	750.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	750.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.000.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		300.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		300.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				5 Ha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	1.400.000.000,00						-	1.510.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.400.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.510.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		410.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				10 Kelompok	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.100.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						9.845.851.434,00							11.515.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.845.851.434,00							11.515.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						9.845.851.434,00							11.515.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.695.851.434,00						-	2.305.000.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	240.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	65.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	80.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	72.750.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	250.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	72.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	435.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	230.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	865.251.434,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	940.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		215.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	649.251.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		700.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.250.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	130.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	82.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	3.900.000.000,00						-	4.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				12 Ha	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.100.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	1.850.000.000,00						-	2.200.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	1.850.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	2.200.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		900.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				10 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	2.400.000.000,00						-	2.710.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	200.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.250.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	2.510.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		410.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				12 Kelompok	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		2.100.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN						14.927.765.753,00							16.390.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						14.927.765.753,00							16.390.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						14.927.765.753,00							16.390.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.561.262.753,00						-	1.980.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	240.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	75.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	72.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	80.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	430.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	230.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	783.862.753,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	855.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	655.862.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		700.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	70.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	3.600.000.000,00						-	4.000.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	3.600.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	4.000.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	3.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		3.600.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				12 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	9.000.000.000,00						-	9.600.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	9.000.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	9.600.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				12 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.100.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				12 Dokumen	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		5.100.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		600.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	366.503.000,00						-	400.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	366.503.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	400.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>				12 Laporan	366.503.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	400.000.000,00						-	410.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	410.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				12 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		410.000.000,00	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN
		UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN						16.828.093.881,00							18.287.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						16.828.093.881,00							18.287.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						16.828.093.881,00							18.287.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.811.272.881,00						-	2.277.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	240.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	75.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	85.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	90.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	85.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	475.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	230.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.020.372.881,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.097.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	300.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	400.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		400.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
3.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	14.716.821.000,00						-	15.610.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	6.000.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	6.200.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		2.600.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		3.600.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	8.716.821.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	9.410.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				12 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		410.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				12 Kelompok	8.316.821.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		9.000.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						118.697.601.151,00							125.946.885.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						118.697.601.151,00							125.946.885.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						118.697.601.151,00							125.946.885.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	30.922.740.151,00						100 %	33.630.000.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	-			85 %	550.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD	-	700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	232.325.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	67.674.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib administrasi keuangan</i>	-			100 %	20.637.527.731,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD	-	24.050.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				150 Orang/ Bulan	19.717.527.731,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		23.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				30 Dokumen	800.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tertib administrasi barang milik daerah</i>	-			100 %	300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD	-	300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	-			100 %	500.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD	-	540.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				300 Paket	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				190 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		240.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.624.332.920,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD	-	1.600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	41.414.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	230.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	473.530.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	4.830.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD	-	4.340.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.330.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		1.340.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.500.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		3.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	1.350.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD	-	1.350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	600.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	200.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,62 %			1,62 %	67.751.263.000,00						1,62 %	73.050.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang diawasi	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak	-	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi yang dikelola	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak dan Dinas	-	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan														
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak dan Dinas		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-			100 %	600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD	-	800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas</i>				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan</i>	-			21 Kali	2.000.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD	-	2.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>				1 laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Puskesmas, Peternak, Petshop	-	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Puskesmas, Peternak, Petshop		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia	-			5 Komoditi	64.951.263.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Kelompok Tani	-	70.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				500000 Ekor	64.951.263.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Kelompok Tani		70.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %			20 %	800.000.000,00						20 %	950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	-			100 %	450.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD, Kelompok Tani	-	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD, Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD, Kelompok Tani		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola	-			24 Wilayah	350.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD	-	450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
			<i>Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis</i>	5,19 %			5,19 %	16.923.598.000,00						5,19 %	15.916.885.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan</i>	-			170 Kali	11.625.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Puskesmas, Masyarakat	-	10.166.885.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	3.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Puskesmas, Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Puskesmas, Masyarakat		516.885.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Puskesmas, Masyarakat		7.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			<i>Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan</i>				300 Kasus	825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Puskesmas, Masyarakat		900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	<i>Jumlah pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</i>	-			675 Kali	2.750.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak dan Dinas	-	2.900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Peternak dan Dinas		800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 Laporan	1.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Peternak dan Dinas		2.100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	-			1 Dokumen	1.450.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Peternak, UPH	-	1.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	Peternak, UPH		1.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan	-			10 Sertifikat	500.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH, Pengusaha	-	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH, Pengusaha		600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	-			10 Unit	598.598.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH, Pengusaha	-	1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya														
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				1 Kasus	255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH, Pengusaha		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				10 Sertifikat	343.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH, Pengusaha		700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %			3 %	100.000.000,00						3 %	100.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-			1 Izin Usaha	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD, UPH	-	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan	Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian													
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD, UPH		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %			20 %	2.200.000.000,00						20 %	2.300.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase tenaga penyuluh pertanian (peternakan) yang ditingkatkan kompetensinya	-			20 %	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, Peternak, Penyuluh	-	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>				60 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, Peternak, Penyuluh		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan</i>	-			50 Kali	1.450.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPH, Masyarakat	-	1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				4 Dokumen	1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPH, Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	-			100 %	600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani	-	650.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah korporasi petani yang didampingi</i>				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani		500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD TERNAK UNGGAS						4.245.079.800,00							5.745.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.245.079.800,00							5.745.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.245.079.800,00							5.745.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	387.883.000,00						100 %	245.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	337.883.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	195.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		50.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,62 %			1,62 %	3.091.496.800,00						1,62 %	4.000.000.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-			100 %	2.070.721.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani	-	2.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	2.070.721.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani		2.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-			12 Kali	1.020.775.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani	-	1.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1.020.775.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani		1.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %			20 %	765.700.000,00						20 %	1.500.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	-			100 %	765.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	1.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	765.700.000,00	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		1.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
		UPTD TERNAK RUMINANSIA						4.263.834.000,00							4.325.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.263.834.000,00							4.325.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.263.834.000,00							4.325.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	490.488.000,00						100 %	325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	330.488.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD	-	165.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		50.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		15.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	265.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		100.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	160.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	160.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				28 Unit	160.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		160.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Peningkatan Produksi Daging</i>	1,62 %			1,62 %	3.280.074.000,00						1,62 %	3.500.000.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	-			100 %	1.888.632.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani	-	2.100.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				1 laporan	1.888.632.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani		2.100.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						5.230.000.000,00							6.670.442.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	660.000.000,00						100 %	480.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	510.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD	-	380.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDBTS)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		200.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDBTS)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		80.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDBTS)
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTS DTS)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTS DTS)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	150.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTS DTS)
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,62 %			1,62 %	3.570.000.000,00						1,62 %	4.000.000.000,00	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-			12 Kali	3.570.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Peternak	-	4.000.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTS DTS)
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	3.570.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Peternak		4.000.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTS DTS)
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %			20 %	1.000.000.000,00						20 %	2.190.442.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	-			100 %	1.000.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	2.190.442.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTS DTS)
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		2.190.442.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTS DTS)
		UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT						2.848.700.000,00							9.600.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.848.700.000,00							9.600.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.848.700.000,00							9.600.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	398.700.000,00						100 %	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	298.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD	-	300.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	149.998.523,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		150.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		50.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	98.701.477,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		100.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	100.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		100.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Peningkatan Prasarana Peternakan</i>	20 %			20 %	500.000.000,00						20 %	500.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik</i>	-			100 %	500.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis</i>	5,19 %			5,19 %	1.800.000.000,00						5,19 %	8.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	-			170 Kali	800.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Masyarakat	-	7.250.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Masyarakat		7.250.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	-			1 Dokumen	1.000.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Peternak	-	1.300.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Peternak		1.300.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
4.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %			3 %	150.000.000,00						3 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			1 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD	-	150.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		150.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
		UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)						2.277.173.780,00							3.050.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.277.173.780,00							3.050.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.277.173.780,00							3.050.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	391.138.372,00						100 %	300.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	291.138.372,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD	-	200.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		100.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,62 %			1,62 %	384.337.000,00						1,62 %	450.000.000,00	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-			57 Kali	384.337.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD, Peternak	-	450.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1 Dokumen	384.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD, Peternak		450.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %			20 %	504.864.780,00						20 %	300.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	-			100 %	504.864.780,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	300.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	504.864.780,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		300.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	5,19 %			5,19 %	846.833.628,00						5,19 %	1.850.000.000,00	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	-			1 Dokumen	846.833.628,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD, UPH, Pedagang	-	1.850.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	846.833.628,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD, UPH, Pedagang		1.850.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %			3 %	150.000.000,00						3 %	150.000.000,00	
	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			1 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD	-	150.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	UPTD		150.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
		DINAS KEHUTANAN						100.392.599.273,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						100.392.599.273,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						100.392.599.273,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	60.287.456.073,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	49.184.329.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				352 Orang/ Bulan	48.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	984.329.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	620.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.400.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				400 Paket	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.818.783.088,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	480.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	140.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	38.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	769.903.088,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.476.454.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	482.074.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	644.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	750.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.617.889.785,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	330.409.068,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.267.480.717,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.620.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	520.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	10.645.653.200,00						-	0,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	6.666.171.700,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				10 Unit	6.666.171.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				10 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	300.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				5 Dokumen	80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	1.053.881.500,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	95.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				300 Ha	658.881.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	2.175.600.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				1000 Ha	945.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani</i>				10 Unit Managemen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	23.464.449.000,00						-	0,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-			-	23.464.449.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				90 Orang	170.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				5 Ha	23.294.449.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
4.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	3.494.540.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	3.494.540.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				100 Kelompok	1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				100 Orang	1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				50000 Hektar	894.540.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
5.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-			-	2.500.501.000,00						-	0,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	2.500.501.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				100 Orang	500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				2 Lembaga	500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				2 Dokumen	1.500.501.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN							2.558.503.928,00						0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.023.928,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	76.434.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	38.589.928,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	2.300.000.000,00						-	0,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	600.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	1.700.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				2 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih														
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				10 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit														
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				20 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				1000000 Batang	1.400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan														
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi				5 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	X	NON URUSAN						20.000.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						20.000.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	20.000.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
		UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)						3.728.864.128,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.728.864.128,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3.728.864.128,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	394.660.628,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	191.180.628,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.180.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	149.000.628,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.304.203.500,00						-	0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	60.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	880.563.500,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				75 Ha	780.563.500,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	313.640.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1000 Ha	193.640.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	1.130.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	600.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
		UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)						3.623.976.906,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.623.976.906,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3.623.976.906,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	364.982.906,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.480.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	191.502.906,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.920.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	153.582.906,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.228.994.000,00						-	0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	898.414.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				75 Ha	798.414.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				10 Ha	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	250.580.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1000 Ha	160.580.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	1.130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)
		UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)						3.609.563.928,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.609.563.928,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3.609.563.928,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	366.955.128,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	193.475.128,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32.640.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	160.835.128,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.212.608.800,00						-	0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	871.008.800,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				0 Ha	771.008.800,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	100.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	261.600.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				3000 Ha	171.600.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				10 Unit	1.130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				30 Orang	200.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				800 Hektar	600.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)
		UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)						4.073.350.900,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.073.350.900,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						4.073.350.900,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	573.819.400,00						-	0,00	
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	410.339.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	114.930.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	295.409.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.469.531.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	1.011.811.500,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	911.811.500,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	377.720.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				83.191 Ha	257.720.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	1.730.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				2 Kel/3500 Hektar	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)
		UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)						3.576.962.506,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.576.962.506,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3.576.962.506,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	383.592.506,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	210.112.506,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.279.600,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	146.832.906,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.163.370.000,00						-	0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	832.790.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				125 Ha	732.790.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				4 Ha	100.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	250.580.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				50 Ha	160.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				1 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial															
			<i>Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya</i>				2 Unit	1.130.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan															
			<i>Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya</i>				10 Orang	200.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial															
			<i>Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial</i>				882 Hektar	600.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	
		UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)						3.563.405.128,00								0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.563.405.128,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3.563.405.128,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	359.015.128,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	185.535.128,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34.200.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	151.335.128,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.174.390.000,00						-	0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	832.790.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				135 Ha	732.790.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	100.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	261.600.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				0 Ha	171.600.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok Kelompok	100.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				10 Unit	1.130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	200.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	600.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)
		UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)						3.631.310.424,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.631.310.424,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3.631.310.424,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	413.149.924,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	209.669.924,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	31.728.536,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	177.941.388,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.188.160.500,00						-	0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	60.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	850.640.500,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				600 Ha	750.640.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				1 Jenis Ha	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	227.520.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				100 Laporan	80.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	127.520.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				100 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				20 Unit	1.130.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				50000 Hektar	600.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)
		UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)						2.875.966.525,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.875.966.525,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2.875.966.525,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	375.386.525,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	171.906.525,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	31.164.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	140.742.525,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	470.580.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	60.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	260.580.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	80.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				76767 Ha	160.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				3 Unit	1.130.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya</i>				6 Orang	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			<i>Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial</i>				3000 Hektar	600.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)
		UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)						3.599.991.406,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.599.991.406,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3.599.991.406,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	388.770.906,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	217.790.906,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.528.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180.262.906,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	62.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	1.181.220.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	30.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	850.640.500,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	750.640.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	250.580.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				0 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				0 Ha	160.580.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	1.130.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				4.036 Hektar	600.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)
		UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)						2.964.469.702,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.964.469.702,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2.964.469.702,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	394.469.702,00						-	0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	170.989.702,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.406.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	144.582.906,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	540.000.000,00						-	0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	120.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	220.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				0 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				0 Ha	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	2.030.000.000,00						-	0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.030.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	0,00	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	13.352.107.380,00						-	13.970.000.000,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	368.412.917,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	113.608.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	157.387.112,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		130.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	97.417.205,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.238.246.268,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	8.760.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				62 Orang/ Bulan	8.005.171.268,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	33.075.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	335.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	380.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	378.945.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	420.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				132 Paket	82.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				62 Orang	246.445.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		260.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.290.896.511,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.440.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				500 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				800 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	910.896.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	270.638.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	138.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	103.128.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	167.510.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.774.998.684,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.830.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.299.998.684,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	694.970.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	602.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				24 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	49.970.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-			-	284.148.000,00						-	320.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	84.148.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	84.148.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-			-	27.407.000,00						-	27.407.000,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-			-	5.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			<i>Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	17.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	17.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		6.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		6.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				1 unit	36.441.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-			-	673.317.000,00						-	790.000.000,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	270.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		270.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			<i>Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</i>				1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	223.317.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				20 Keluarga	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	153.317.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	X	NON URUSAN						150.000.000,00							205.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						150.000.000,00							205.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	150.000.000,00						-	205.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	205.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						28.904.599.303,00							29.948.895.211,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						28.904.599.303,00							29.948.895.211,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						23.994.746.303,00							24.764.058.211,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	19.339.891.303,00						100 %	19.595.443.711,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			85 %	190.756.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	311.287.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	28.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		26.287.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	51.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	87.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	-			12 bulan	13.594.690.876,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	14.213.354.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/ Bulan	13.185.063.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		13.808.005.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	398.688.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		393.864.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	10.938.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		11.485.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	45.617.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	121.957.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		77.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	39.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		41.597.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	-			60 %	350.011.116,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	359.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	69.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		69.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				165 Orang	280.261.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		290.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-			12 bulan	1.641.402.503,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	896.651.521,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.149.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		20.546.461,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	165.429.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		62.269.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				49 Paket	159.310.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		97.209.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	42.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		59.705.560,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				45 Dokumen	7.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		7.350.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				70 Laporan	1.241.213.903,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		644.070.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	326.275.800,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	343.755.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Paket	64.813.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		65.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				21 Unit	261.462.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		278.655.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	2.130.280.818,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	2.232.662.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		12.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	274.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		274.280.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.853.000.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.945.682.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	1.060.857.190,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	1.116.027.190,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	287.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		320.990.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				112 Unit	86.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		97.340.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	356.601.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		356.601.518,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	330.295.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		341.095.672,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Jumlah perusahaan yang didata</i>	5.720 jumlah usaha			5.720 jumlah usaha	186.585.000,00						5.720 jumlah usaha	208.431.000,00	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik</i>	-			1 dokumen	130.963.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	139.021.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	130.963.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		139.021.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-			-	55.622.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	69.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>				1 Dokumen	55.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		69.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi</i>	6.5 %			6.5 %	397.807.000,00						6.5 %	416.862.000,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<i>Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota</i>	-			19 kab/kota	397.807.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	416.862.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i>				70 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		258.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas														
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpatisipasi				50 Orang	47.807.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		58.862.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %			6 %	533.998.500,00						6 %	559.876.500,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor	-			1 laporan	40.580.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	40.580.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	40.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		40.580.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang di kab/kota	-			19 kab/kota	402.931.500,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	428.809.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	129.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		142.383.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				11 Laporan	273.487.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		286.426.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	-			19 kab/kota	90.487.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	90.487.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	90.487.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		90.487.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	1.507,97 juta US\$			1.507,97 juta US\$	155.375.000,00						1.507,97 juta US\$	311.464.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang dan pembinaan bagi produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui temu usaha, sosialisasi, promosi	-			4 kali	155.375.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	311.464.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	155.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		311.464.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	90 %			90 %	2.738.170.500,00						90 %	2.778.704.000,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	-			350 orang	2.490.053.500,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	2.490.053.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				8 BPSK	1.946.703.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.946.703.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				10 LPKSM	48.219.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		48.219.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				80 Pengaduan	495.131.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		495.131.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi dan perizinan bagi pelaku usaha, barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan</i>	-			19 kab/kota	248.117.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	288.650.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				2 Laporan	248.117.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		288.650.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5 %			5 %	642.919.000,00						5 %	893.277.000,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	-			8 kali	266.899.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	510.037.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				12 UMKM	266.899.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		510.037.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	376.020.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku usaha	-	383.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				500 UMKM	376.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku usaha		383.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.909.853.000,00							5.184.837.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	25 Sentra			25 Sentra	4.670.615.000,00						25 Sentra	4.904.145.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standarisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri	-			2715 IKM dan orang	4.670.615.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	4.904.145.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				13 Dokumen	4.670.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		4.904.145.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	78 %			78 %	166.614.000,00						78 %	189.592.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan bimtek IUI dan pengawasan	-			100 orang	166.614.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	189.592.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	166.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		189.592.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	47.673 unit usaha			47.673 unit usaha	72.624.000,00						47.673 unit usaha	91.100.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	-			30 buku	72.624.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	91.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	72.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		91.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD LOGAM						1.150.525.500,00							1.278.964.500,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.118.676.600,00							1.235.001.700,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.118.676.600,00							1.235.001.700,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	291.161.700,00						100 %	291.226.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	28.781.700,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	28.781.700,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				13 Paket	9.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		9.795.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				38 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		10.000.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	7.366.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		7.366.700,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	1.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.620.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	94.200.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	94.200.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	94.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		94.200.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	168.180.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	168.245.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				27 Unit	29.780.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		29.845.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	138.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		138.400.000,00	UPTD LOGAM
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	25 Sentra			25 Sentra	827.514.900,00						25 Sentra	943.775.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standarisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri	-			45 IKM dan orang	827.514.900,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	943.775.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	827.514.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		943.775.000,00	UPTD LOGAM
	X	NON URUSAN						31.848.900,00							43.962.800,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						31.848.900,00							43.962.800,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	31.848.900,00						100 %	43.962.800,00	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	-			12 bulan	31.848.900,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	43.962.800,00	UPTD LOGAM
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	31.848.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		43.962.800,00	UPTD LOGAM
		UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI						1.239.906.144,00							1.404.151.740,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.239.906.144,00							1.404.151.740,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.239.906.144,00							1.404.151.740,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	251.319.144,00						100 %	278.445.740,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	30.305.800,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	59.287.500,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	1.957.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		8.993.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	17.661.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		28.880.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.813.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		12.913.500,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		6.881.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.620.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	72.641.744,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	35.828.240,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	72.641.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		35.828.240,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	57.300.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	90.000.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	57.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		90.000.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	91.071.600,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	93.330.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	13.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		13.330.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	77.781.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		80.000.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	25 Sentra			25 Sentra	988.587.000,00						25 Sentra	1.125.706.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri	-			320 IKM dan orang	988.587.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	1.125.706.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				6 Dokumen	988.587.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.125.706.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)						803.696.793,00							938.266.020,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						803.696.793,00							938.266.020,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						803.696.793,00							938.266.020,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	332.043.000,00						100 %	332.838.820,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>	-			12 bulan	34.431.400,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	34.431.400,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	8.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		8.993.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	14.518.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		14.518.400,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		9.300.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.620.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	-			12 bulan	48.101.600,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	48.417.420,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	48.101.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		48.417.420,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-			12 bulan	138.800.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	138.800.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.700.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	137.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		137.100.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-			12 bulan	110.710.000,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	111.190.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	30.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		31.190.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		80.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	26 %			26 %	471.653.793,00						26 %	605.427.200,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi	-			19 kab/kota	471.653.793,00			-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	605.427.200,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				750 Sertifikat	117.731.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		177.631.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>				300 laporan	265.079.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		335.650.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>				7 Produk	88.842.963,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an usaha p erdaganga n dan industri keci l/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		92.146.200,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
		BIRO UMUM						123.675.366.753,00							150.756.221.728,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						123.675.366.753,00							150.756.221.728,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						123.675.366.753,00							150.756.221.728,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda</i>	80 % 100 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 86,75 Nilai 80 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 100 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 90,40 Perse n 100 % 90,40 Perse n 80 % 100 % 86,75 Nilai 80 % 90,40 Perse n 100 % 100 % 86,75 Nilai 80 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 86,75 Nilai 86,75 Nilai 80 %			100 % 80 % 84,55 Nilai 84,55 Nilai 90,20 Persen	123.675.366.753,00						80 % 100 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 86,75 Nilai 80 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 100 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 90,40 Perse n 100 % 90,40 Perse n 80 % 100 % 86,75 Nilai 80 % 90,40 Perse n 100 % 100 % 86,75 Nilai 80 % 86,75 Nilai 86,75 Nilai 86,75 Nilai 86,75 Nilai 80 %	150.756.221.728,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	246.963.640,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	246.963.640,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	73.481.820,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		73.481.820,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	73.481.820,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		73.481.820,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	47.926.282.194,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	55.693.793.565,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				400 Orang/ Bulan	47.291.284.809,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.066.098.376,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	530.271.189,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		530.271.189,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	104.726.196,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		97.424.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	551.976.196,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	526.726.196,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	447.250.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		422.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	104.726.196,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		104.726.196,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.364.561,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	32.364.561,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	32.364.561,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.364.561,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	745.243.087,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	746.243.087,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				582 Paket	436.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		437.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	308.743.087,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		308.743.087,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	11.628.928.654,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	13.975.907.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	85.376.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.233.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	255.699.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	440.879.240,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	576.503.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		576.503.400,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	179.112.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		179.112.600,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	50.058.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.058.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	9.987.473.082,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	52.826.332,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9.632.471.625,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	21.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	5.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	2.491.755.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Paket	1.439.716.625,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	700.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.408.757.864,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	20.526.665.980,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	51.996.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.269.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.045.709.480,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.245.709.480,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.190.100.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.224.687.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14.120.952.284,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.833.111.228,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	12.911.822.953,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	230.982.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		230.982.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	1.503.976.141,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	62.950.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	295.935.878,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	5.358.426.256,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	380.840.953,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		380.840.953,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	4.206.097.192,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.595.734.246,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	252.244.496,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		252.244.496,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				60 Paket	246.410.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		243.489.750,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	3.607.442.696,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	20.463.170.512,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	20.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				25 Paket	9.605.152.136,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				25 Paket	7.569.708.005,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				15 Paket	3.288.310.371,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.500.000.000,00	BIRO UMUM
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						22.398.979.000,00							23.569.778.350,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.398.979.000,00							23.569.778.350,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						22.398.979.000,00							23.569.778.350,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen			100 Persen	22.398.979.000,00						100 Persen	23.569.778.350,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			85 Persen	251.648.380,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	240.262.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	213.577.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	14.639.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		17.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	13.142.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		11.900.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10.288.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		10.862.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administarsi Keuangan	-			100 Persen	181.120.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	202.528.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	144.334.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		168.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	36.785.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		34.528.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administarsi Barang Milik Daerah	-			100 Persen	55.463.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	57.512.760,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	36.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		31.200.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	19.063.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		26.312.760,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	476.201.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	527.498.101,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				450 Dokumen	206.030.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		210.717.569,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				125 Orang	270.170.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		316.780.532,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	4.107.516.624,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	3.410.300.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	49.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		60.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	127.192.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		133.200.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	28.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		40.800.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	322.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		320.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	3.579.305.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		2.856.300.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan</i>	-			100 Persen	41.797.600,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	1.071.960.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		920.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	4.837.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		31.800.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	36.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		120.160.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	1.820.256.675,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	1.984.178.468,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	26.219.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		22.485.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	58.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		62.579.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				35 Laporan	1.735.257.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		1.899.114.468,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	-			100 Persen	369.722.100,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	444.860.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	325.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		350.628.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	31.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		29.232.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	12.232.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		65.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Optimalisasi Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	-			100 Persen	5.123.436.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan	-	4.934.796.115,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				295 Dokumen	398.853.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		472.512.612,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				102 Laporan	2.992.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		2.900.574.136,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				255 Laporan	1.732.382.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		1.561.709.367,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						5.716.967.984,00							6.735.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.932.205.000,00						-	2.385.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	141.089.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	155.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	86.884.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	34.205.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	120.269.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	135.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	30.269.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.103.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	75.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	23.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	17.103.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	131.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	185.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				78 Paket	31.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.006.963.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.355.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1500 Paket	60.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1500 Paket	60.003.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	21.960.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	750.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		850.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	159.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	159.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	155.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.880.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	225.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	70.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	47.880.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-			-	3.784.762.984,00						-	4.350.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-			-	1.334.762.984,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	486.427.984,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4 Dokumen	348.335.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-			-	1.200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				6 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				19 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	1.250.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	400.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						3.463.986.177,00							5.664.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.463.986.177,00							5.664.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.463.986.177,00							5.664.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.341.625.600,00						-	3.019.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	63.927.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	236.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	18.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	133.998.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	230.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 orang/12 bulan Dokumen	120.337.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		140.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	13.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	31.577.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	81.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11.077.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	140.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 bulan Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		140.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	547.872.841,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.064.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 unit Paket	36.383.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		280.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 unit Paket	44.115.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	31.822.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		84.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12.446.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		84.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	3.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	419.480.941,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		550.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 bulan Dokumen	604.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	136.752.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	740.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 unit Paket	24.247.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	112.504.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		520.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.945.407,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	262.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 bulan Laporan	2.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				15 unit Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		54.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 orang Laporan	118.681.407,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		190.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.552.552,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	266.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	163.502.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		210.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	22.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		36.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-			-	2.122.360.577,00						-	2.645.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	660.330.937,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	890.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Laporan	153.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		240.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	277.306.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				12 Laporan	229.612.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	835.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	975.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				13 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		175.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.325.098.000,00							3.657.275.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.506.262.900,00						-	682.275.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	34.751.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	31.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	21.562.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen Laporan	3.184.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	10.005.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	91.581.400,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	118.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				5 Dokumen	89.052.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	2.529.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	15.432.400,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	18.600.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	14.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.600.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1.032.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	52.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.257.304.720,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	300.175.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.150.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	20.000.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.002.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	1.212.652.420,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		248.175.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.083.280,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	90.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	4.391.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.691.680,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.610.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	66.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	44.090.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	5.520.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	1.818.835.100,00						-	2.975.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-			-	485.264.100,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	840.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	309.444.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		420.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	175.820.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		420.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-			-	388.824.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	680.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	213.146.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		280.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	85.688.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		190.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	89.990.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-		210.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	944.747.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan	-	-	1.455.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	305.410.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	142.036.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		195.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	250.925.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	111.188.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		245.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	135.188.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		265.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						25.220.968.000,00							13.639.972.820,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						25.220.968.000,00							13.639.972.820,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						25.220.968.000,00							13.639.972.820,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	698.041.000,00						100 %	1.032.045.820,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	48.790.400,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	60.755.800,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	28.623.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		38.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	8.911.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	11.255.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		12.255.800,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 Persen	163.039.300,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	176.539.300,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	152.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		165.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.539.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		11.539.300,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 Persen	18.199.600,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	18.699.600,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		8.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	7.199.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		7.599.600,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		3.100.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	70.200.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	70.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	211.331.140,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	508.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		8.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	58.168.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	39.017.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		40.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	106.645.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		400.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	29.500.560,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	33.351.120,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	29.500.560,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		33.351.120,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	12.100.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	12.200.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				300 Laporan	12.100.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		12.200.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	144.880.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	147.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	132.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	12.580.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		12.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	30 dokume n 30 dokume n 13 Lembag a 30 dokume n 13 Lembag a 30 dokume n 13 Lembag a 13 Lembag a			13 Lembaga 6 dokumen undefined undefined	24.522.927.000,00						6 dokumen 6 dokumen 13 Lembag a 6 dokumen 13 Lembag a 6 dokumen 13 Lembag a 13 Lembag a	12.607.927.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya fasilitasi pembinaan mental spiritual	-			100 %	21.357.927.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	10.457.927.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	2.900.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		3.100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				100 Lembaga	18.457.927.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		7.357.927.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-			100 %	2.415.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	1.100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2.015.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		300.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-			100 %	750.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-	-	1.050.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO HUKUM						3.435.370.000,00						3.439.929.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.435.370.000,00							3.439.929.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.435.370.000,00							3.439.929.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	2.214.431.000,00						100 %	1.127.269.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	63.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	70.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	102.352.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	95.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				5 orang/ Dokumen	95.160.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		90.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	7.192.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		5.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	21.663.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	24.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 unit/ Dokumen	13.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		15.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	5.863.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		7.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		2.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	189.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	185.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	189.600.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		185.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.685.773.320,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	616.669.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Unit/ Paket	24.998.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Unit/ Paket	21.588.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.193.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Jenis/ Dokumen	24.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		30.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	1.560.093.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		464.669.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		2.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	67.742.180,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	67.742.180,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		50.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	5.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	6.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	4.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		4.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 rekening/12 Laporan	1.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		2.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	79.300.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	-	80.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	69.490.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		70.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	9.810.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		10.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	<i>Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum</i>	90 %			90 %	1.220.939.000,00						90 %	2.312.660.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	<i>Persentase fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi</i>	-			90 % 100 %	753.588.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	-	1.455.716.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>				65 perda dan pergub/ Dokumen	310.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		610.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				800 kepgub/ Dokumen	31.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		45.716.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				160 buku/ Dokumen	108.087.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		200.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				80 rancangan PHD/ Dokumen	304.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		600.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi Persentase fasilitasi bantuan hukum	-			100 % 90 %	467.351.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	-	856.944.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				7 perkara/ Kasus	352.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		656.944.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				8 bantuan hukum/ Kasus	115.157.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		200.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO ORGANISASI						4.135.816.058,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						4.135.816.058,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						4.135.816.058,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.349.410.858,00						-	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.093.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	14.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	15.943.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	95.760.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	95.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	28.400.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	18.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.349.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	150.349.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.501.544.985,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	112.289.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	187.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.407.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	1.156.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	337.494.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	198.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	138.929.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.269.073,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	84.269.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	71.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	1.786.405.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	573.188.150,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	145.784.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	245.225.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			0				0 0	182.178.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	1.213.217.050,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	227.462.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	207.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	103.480.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	196.994.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	477.774.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						3.738.619.900,00							3.787.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.738.619.900,00							3.787.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.738.619.900,00							3.787.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.153.532.900,00						-	1.547.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	62.371.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	185.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	34.881.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	101.359.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	108.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	93.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	7.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.709.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	25.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	18.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.309.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	126.700.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	145.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				27 Orang	106.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	672.082.062,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	894.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	107.532.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	68.205.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	479.563.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		650.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.120.938,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	84.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	79.120.938,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	86.190.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	106.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	71.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				21 Unit	15.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-			-	2.585.087.000,00						-	2.240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	1.708.022.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.370.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>				1 Laporan	490.982.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>				1 Laporan	456.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		370.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>				1 Laporan	760.757.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	877.064.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	870.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	94.661.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		390.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	402.403.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		390.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		SEKRETARIAT DPRD						121.761.869.496,00							243.950.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						121.761.869.496,00							243.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						121.761.869.496,00							243.950.000.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	78.493.306.296,00						-	129.320.000.000,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	824.079.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	271.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	174.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	378.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.821.272.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	14.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/ Bulan	12.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10000 Dokumen	1.192.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	528.427.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	544.233.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.055.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	414.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		510.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	99.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	29.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	198.050.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				200 Orang	87.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.294.442.780,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	8.980.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	94.130.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	245.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	985.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	156.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				22 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				108 Laporan	185.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2400 Laporan	2.120.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				625 Dokumen	107.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.116.057.956,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	22.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	322.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				79 Unit	438.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.017.700.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.235.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.202.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.473.868.367,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	14.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	195.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.001.822.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				24 Laporan	280.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	3.996.045.967,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.596.833.513,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	20.610.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	612.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	998.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				400 Unit	58.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				161 Unit	50.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	526.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	557.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	793.016.513,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	43.186.150.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	44.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				65/14 Orang/ Bulan	42.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		42.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				65 Paket	521.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				65 Orang	164.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	438.319.180,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				65 Dokumen	15.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	40.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				24 Laporan	103.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		680.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				12 Paket	279.004.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	43.268.563.200,00						-	114.630.000.000,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-			-	8.959.588.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	34.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				1 Dokumen	785.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda</i>				10 Dokumen	2.656.503.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen	113.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	348.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	56.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				39000 Orang	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	3.530.297.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.840.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	761.887.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	574.825.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	727.474.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	575.062.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	11.047.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	880.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	4.253.105.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	646.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	786.500.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	770.249.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	1.004.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	562.671.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				2 Dokumen	90.464.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	179.159.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	212.903.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	12.560.114.400,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	13.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				48 Dokumen	6.138.524.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				30 Orang	725.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	265.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	818.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	612.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				452 Dokumen	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	6.468.200.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	15.715.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				390 Laporan	87.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				65 Dokumen	124.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				195 Dokumen	6.256.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	233.820.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	775.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				2 Dokumen	135.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				3 Laporan	98.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	7.263.437.600,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	28.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24 Dokumen	4.898.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	6.465.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				10 Dokumen	742.854.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				36 Dokumen	856.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				3 Dokumen	759.350.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						23.883.955.118,00							29.067.461.995,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						23.883.955.118,00							29.067.461.995,00	
	5.01	PERENCANAAN						23.883.955.118,00							29.067.461.995,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	17.725.733.803,00						100 %	15.696.693.995,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			100 %	106.436.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	226.710.746,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	56.606.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		162.312.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	14.147.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		23.432.798,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	35.683.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		40.965.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	11.916.378.635,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	9.785.108.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	11.640.495.535,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		9.202.358.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	236.511.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		509.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	39.371.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	140.474.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	316.674.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	119.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		135.549.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	11.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		131.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	9.774.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		49.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	447.218.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	580.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				168 Paket	135.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		144.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	312.218.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		309.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	2.877.356.600,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	1.812.441.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	33.892.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		259.248.914,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	157.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		57.893.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket	114.440.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		421.377.079,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2.376.624.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		740.021.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	195.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		286.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	32.076.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	669.538.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.367.063.168,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1.299.944.869,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	490.640.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	567.902.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	362.490.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		244.009.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	61.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		82.131.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		210.261.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				48 Unit	59.850.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	92 %			92 %	400.000.000,00						92 %	5.121.738.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	-			3 Dokumen	400.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	2.962.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		146.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		286.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		660.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	400.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1.540.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	-			4 Dokumen	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	874.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		214.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				38 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		198.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				38 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		187.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>				38 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		792.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD</i>	70 %			70 %	5.758.221.315,00						70 %	8.249.030.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			3 Dokumen	1.131.261.350,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	2.859.985.295,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	328.888.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		344.429.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				3 Laporan	43.941.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		238.355.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	106.860.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		111.910.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				3 Laporan	60.130.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		143.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	165.803.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		593.757.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	74.132.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		664.296.725,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	129.810.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		269.463.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	221.692.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		494.759.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	1.582.574.410,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.195.692.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	500.722.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		524.382.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	45.586.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		281.259.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	143.705.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.602.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	136.560.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		143.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	455.202.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		476.710.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	728.323.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		762.737.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	364.161.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		381.368.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	318.641.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		333.697.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	82.764.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		86.674.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	728.323.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		762.737.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	227.601.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		238.355.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	594.571.155,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		627.780.382,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						1.355.098.062.333,00							1.408.176.316.139,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.355.098.062.333,00							1.408.176.316.139,00	
	5.02	KEUANGAN						1.355.098.062.333,00							1.408.176.316.139,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	17.909.396.104,00						-	17.504.828.338,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	66.494.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	153.970.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	37.326.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		94.064.960,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.157.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.412.290,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		24.493.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	12.384.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.651.203.329,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	15.579.946.566,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	15.232.993.429,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.271.062.386,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	375.890.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		244.303.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	42.319.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		64.580.560,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.633.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	21.321.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.906.560,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.396.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.185.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11.236.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.228.860,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	496.933.400,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	45.987.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.562.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	346.933.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.425.080,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	876.271.544,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	589.324.742,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.315.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.693.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.015.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.972.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	43.910.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.399.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.999.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.218.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	45.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	546.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		310.241.032,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	193.011.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		191.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	118.795.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	246.371.630,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	57.589.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	61.206.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		126.371.630,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	472.465.131,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	516.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	457.465.131,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.600.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	351.406.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	181.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		329.439.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	23.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.967.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	1.334.746.873.229,00						-	1.390.671.487.801,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	4.375.277.917,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.530.050.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				3 Dokumen	448.078.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				3 Dokumen	448.514.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		441.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	114.673.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	112.645.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	136.636.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		345.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	69.453.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	1.730.963.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.250.050.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				7 Dokumen	572.297.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		625.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	620.164.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		406.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				51 Orang	121.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		408.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.769.497.792,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.789.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				10 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				19 Laporan	235.797.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		188.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	293.212.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		187.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	312.160.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		237.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				19 Dokumen	324.051.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				3 Laporan	318.156.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				19 Lembaga	146.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		79.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		139.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		131.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				19 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		119.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	139.461.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		118.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	1.694.176.463,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.785.829.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	282.770.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		282.770.418,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				86 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	285.020.582,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		313.522.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	311.095.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		342.205.024,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	320.414.473,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		352.455.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	394.875.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		394.875.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	1.566.607.524,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.566.607.559,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	160.452.915,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.452.915,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				43 Laporan	381.413.863,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		381.413.863,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1 Dokumen	624.811.337,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		624.811.337,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	60.263.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.263.235,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	139.666.209,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		139.666.209,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				156 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	1.325.341.313.533,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.381.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				19 Laporan	560.900.674.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	28.581.517.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		31.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				19 Laporan	735.859.121.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.300.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	2.441.793.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	2.441.793.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				4 Dokumen	145.483.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	260.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	38.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	340.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	227.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	204.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	170.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	122.751.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				35 Dokumen	659.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				3 Laporan	113.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	55.839.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	102.299.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						59.014.896.843,00							2.974.706.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						59.014.896.843,00							2.974.706.000,00	
	5.02	KEUANGAN						59.014.896.843,00							2.974.706.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	57.174.896.603,00						-	165.000.000,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	400.572.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	191.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	55.850.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	114.739.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	38.251.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	48.221.753.321,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				205 Orang/ Bulan	47.523.640.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	628.112.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	591.440.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	396.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	195.440.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	222.012.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	112.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	109.512.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.628.281.046,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	34.910.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	228.605.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	345.719.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	27.360.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	866.685.846,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.086.976.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	700.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	550.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				112 Unit	1.085.320.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	201.656.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	550.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.959.051.436,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1430 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	850.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.083.851.436,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.064.810.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	247.350.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	127.460.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	650.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	1.840.000.240,00						-	2.809.706.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.840.000.240,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.809.706.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	160.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	107.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		129.372.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				18 Sarana dan Prasarana	959.557.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	111.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		134.334.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				18 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		132.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	90.703.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	59.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		123.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG						3.143.078.019,00							3.186.710.809,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.143.078.019,00							3.186.710.809,00	
	5.02	KEUANGAN						3.143.078.019,00							3.186.710.809,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.223.827.874,00						-	2.141.095.559,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.479.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.480.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1.479.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.480.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	287.117.526,00			-	-	-	-	362.051.626,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	8.744.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.744.100,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.065.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		229.358.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	54.358.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.640.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	17.229.326,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.229.326,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen Dokumen	4.080.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.080.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.440.370.585,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.237.398.933,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	714.469.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		714.469.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Dokumen Laporan	725.901.085,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		522.929.433,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	398.817.963,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	444.225.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Dokumen Unit	15.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		34.100.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Dokumen Unit	48.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		72.060.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Dokumen Unit	60.680.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.580.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Dokumen Unit	250.870.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.870.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Dokumen Unit	23.267.963,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.615.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	919.250.145,00						-	1.045.615.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	919.250.145,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.045.615.250,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen Laporan	16.615.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.605.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Dokumen Laporan	57.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		57.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				1 Dokumen Dokumen SSPD	583.947.645,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		710.322.750,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen Laporan	261.687.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		261.687.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN						872.538.128,00							2.707.362.795,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						872.538.128,00							2.707.362.795,00	
	5.02	KEUANGAN						872.538.128,00							2.707.362.795,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	749.764.128,00						-	2.540.728.795,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.925.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.450.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.965.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.210.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.240.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	68.100.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	68.100.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	68.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		68.100.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	158.400.764,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	170.827.950,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.456.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		54.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.648.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.840.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.006.264,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.127.950,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			0				0 0	39.060.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.060.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	414.835.864,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.188.878.345,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	183.528.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		186.876.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	231.307.864,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.002.002.345,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.502.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	107.472.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	49.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.150.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	12.870.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.510.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		29.760.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	8.932.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.052.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	122.774.000,00						-	166.634.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	122.774.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	166.634.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	12.870.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.630.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	16.556.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.806.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				500 Dokumen SSPD	65.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		92.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	27.848.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.198.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG						904.050.952,00							1.000.496.900,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						904.050.952,00							1.000.496.900,00	
	5.02	KEUANGAN						904.050.952,00							1.000.496.900,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	723.063.708,00						-	726.564.900,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.928.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.138.700,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.106.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.317.700,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.821.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.821.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	72.930.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	80.234.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	72.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.234.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	14.850.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.850.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	139.820.125,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	153.509.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.082.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.878.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.172.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	42.609.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		47.375.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	3.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.643.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				24 Laporan	50.339.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		54.571.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	21.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.166.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	383.803.683,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	358.450.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	102.380.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		112.618.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	281.423.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		245.832.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.081.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	113.383.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	48.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.750.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	13.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.696.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.780.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.517.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.157.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	180.987.244,00						-	273.932.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	180.987.244,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	273.932.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	15.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.993.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	16.339.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.973.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				28835 Dokumen SSPD	117.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		161.986.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	31.507.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		67.980.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI						1.057.041.926,00							1.090.215.005,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.057.041.926,00							1.090.215.005,00	
	5.02	KEUANGAN						1.057.041.926,00							1.090.215.005,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	853.984.655,00						-	891.175.555,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.118.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.118.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.118.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.118.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	87.140.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	87.840.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 laporan Dokumen	87.140.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		87.840.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	176.328.822,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	212.799.722,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	2.421.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.421.900,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 bulan Paket	43.565.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		69.009.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	27.932.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		36.850.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	2.880.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.440.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.428.622,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		43.978.622,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	59.100.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		59.100.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	481.691.283,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	481.691.283,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	200.268.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.268.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	281.423.283,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		281.423.283,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.705.750,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	105.725.750,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	47.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		47.400.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				26 Unit	17.460.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.480.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.800.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		29.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.045.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.045.750,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	203.057.271,00						-	199.039.450,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	203.057.271,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	199.039.450,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	5.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.630.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	19.342.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.642.750,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				550 wajib pajak Dokumen SSPD	167.873.521,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		140.677.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	10.441.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.089.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH						1.323.320.599,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.323.320.599,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						1.323.320.599,00							0,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.157.521.299,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.821.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				0 Dokumen	2.821.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	82.302.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	82.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				8 orang Paket	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	217.901.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				100% Paket	2.442.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 bulan Paket	68.463.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan</i>				100% Paket	24.790.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 bulan Dokumen	1.440.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	99.706.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100% Dokumen	21.060.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	755.071.549,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	301.788.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	453.283.549,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	99.425.750,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	41.500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan Unit	17.080.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.045.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	165.799.300,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	165.799.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 bulan Laporan	16.605.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 bulan Laporan	40.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				550 wajib Pajak Dokumen SSPD	76.200.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 bulan Laporan	32.994.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK						951.407.583,00							1.020.196.583,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						951.407.583,00							1.020.196.583,00	
	5.02	KEUANGAN						951.407.583,00							1.020.196.583,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	797.187.583,00						-	829.196.583,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.320.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.387.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				0 Laporan	3.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.387.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	96.742.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	97.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	96.742.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.160.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		41.440.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	7.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	160.485.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	177.789.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.990.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.429.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.695.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.160.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.120.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	48.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	40.080.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.080.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	435.975.283,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	444.423.283,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	159.052.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		163.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	276.923.283,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		281.423.283,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	90.164.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	99.496.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	34.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		42.200.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	16.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.460.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	28.188.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		29.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11.036.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.036.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	154.220.000,00						-	191.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	154.220.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	191.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						828.751.978,00							828.801.978,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	672.620.978,00						-	672.670.978,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.120.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.120.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.120.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.120.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	72.462.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	72.462.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	72.462.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		72.462.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	10.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	10.500.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	138.680.133,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	138.730.133,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.797.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.797.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	48.722.800,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.772.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				42500 Paket	15.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3.060.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.060.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	48.040.333,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.040.333,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	21.060.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.060.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	344.346.345,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	344.346.345,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	143.544.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		143.544.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.800.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		29.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11.052.500,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.052.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	156.131.000,00						-	156.131.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	156.131.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	156.131.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	8.750.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.750.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				90 Laporan	17.384.550,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.384.550,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				450 Dokumen SSPD	107.482.500,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		107.482.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	22.513.950,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.513.950,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING						862.313.316,00							992.502.716,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						862.313.316,00							992.502.716,00	
	5.02	KEUANGAN						862.313.316,00							992.502.716,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	773.762.316,00						-	841.308.881,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.472.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	10.587.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1.962.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.203.600,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	6.510.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.383.600,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	82.090.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	90.478.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 orang Dokumen	82.090.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.478.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	13.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				9 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	124.798.362,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	217.949.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 buah Paket	1.699.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.106.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	23.731.500,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		57.402.300,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	8.335.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.348.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	3.240.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.240.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	65.712.862,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		115.773.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Bulan Dokumen	22.080.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.080.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	467.928.554,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	404.320.581,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	146.376.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		146.376.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.800.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		29.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11.053.400,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.053.400,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	88.551.000,00						-	151.193.835,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	88.551.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	151.193.835,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	4.455.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.750.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	12.300.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.850.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				500 Wajib Pajak Dokumen SSPD	62.400.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		93.314.100,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	9.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.279.735,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK						1.105.811.219,00							1.112.811.219,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.105.811.219,00							1.112.811.219,00	
	5.02	KEUANGAN						1.105.811.219,00							1.112.811.219,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	822.321.004,00						-	829.321.004,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.153.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	7.153.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	2.721.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.721.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	2.721.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.721.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.711.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.711.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	94.168.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	94.168.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	94.168.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		94.168.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.250.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.250.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	5.250.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.250.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	139.637.700,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	139.637.700,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.403.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.403.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	937.300,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		937.300,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.125.100,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.125.100,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4.143.300,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.143.300,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.824.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.824.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	85.125.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.125.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	22.080.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.080.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	7.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	494.946.554,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	494.946.554,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	173.394.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.394.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.445.750,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.445.750,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	283.490.215,00						-	283.490.215,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	283.490.215,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	283.490.215,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		4.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				12 Dokumen SSPD	212.120.215,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		212.120.215,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				12 Laporan	45.870.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.870.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR						888.616.687,00							894.438.522,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						803.592.687,00							809.414.522,00	
	5.02	KEUANGAN						803.592.687,00							809.414.522,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	729.722.522,00						-	735.544.522,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.370.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.370.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.560.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	4.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.810.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.250.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.250.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.250.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	114.665.700,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	120.487.700,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.946.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.946.100,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.730.500,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		43.730.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.701.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.701.100,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	33.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		39.010.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	23.100.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.100.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.946.822,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	500.946.822,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	133.704.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		133.704.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	367.242.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		367.242.822,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.490.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	102.490.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	31.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		31.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	54.600.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		54.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	16.290.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.290.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	73.870.165,00						-	73.870.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	73.870.165,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	73.870.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	6.750.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.750.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	12.420.165,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.420.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				1 Dokumen SSPD	45.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	9.700.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.700.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	X	NON URUSAN						85.024.000,00							85.024.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						85.024.000,00							85.024.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	85.024.000,00						-	85.024.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.980.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	70.980.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	70.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.980.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.824.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.824.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.824.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.824.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.220.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	12.220.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	12.220.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.220.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN						1.135.434.109,00							998.490.357,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.135.434.109,00							998.490.357,00	
	5.02	KEUANGAN						1.135.434.109,00							998.490.357,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	802.698.859,00						-	646.205.107,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.685.880,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	11.685.900,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.266.080,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.266.100,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.089.800,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.089.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.680.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.680.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.650.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.650.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	80.140.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	80.140.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	80.140.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.140.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.750.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.750.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	6.750.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.750.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	119.371.696,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	118.785.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.525.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.525.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.373.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		41.373.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.600.196,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.592.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	27.781.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.607.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.080.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	492.491.283,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	331.243.407,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	211.068.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		208.512.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	281.423.283,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		122.731.407,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92.260.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	97.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	48.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	9.260.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	332.735.250,00						-	352.285.250,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	332.735.250,00			-	-	-	-	352.285.250,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.590.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	33.885.250,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.385.250,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	248.040.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	50.810.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.810.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA							886.286.866,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						880.127.866,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						880.127.866,00							0,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	739.516.892,00						-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.860.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	1.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.322.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	66.322.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	6.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	117.455.838,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.848.800,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	23.273.700,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	33.253.338,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	58.080.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	446.616.554,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	129.564.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	317.052.554,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	101.262.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	47.800.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	12.610.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.800.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.052.500,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	140.610.974,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	140.610.974,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	10.040.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	17.699.750,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	88.923.724,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	23.947.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
	X	NON URUSAN						6.159.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.159.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.159.000,00						-	0,00		
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	6.159.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.159.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK							844.396.866,00							2.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						844.396.866,00							2.000.000,00		
	5.02	KEUANGAN						844.396.866,00							2.000.000,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	727.481.166,00						-	2.000.000,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	77.220.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	77.220.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	10.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.598.400,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.355.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				34 Paket	51.543.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	15.075.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	2.640.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	50.885.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				36 Dokumen	23.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	390.128.814,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	144.366.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	245.762.814,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.033.952,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	28.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	17.020.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.613.952,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	116.915.700,00						-	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	116.915.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	16.440.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	9.484.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				980 Dokumen SSPD	76.290.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Laporan	14.701.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO						687.466.018,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						687.466.018,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						687.466.018,00							0,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	541.736.018,00						-	0,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.868.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.868.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	76.480.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	76.480.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	13.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	112.715.890,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.665.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	28.897.700,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	11.880.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3.648.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	44.564.990,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				36 Dokumen	21.060.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	290.052.128,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	133.012.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	157.039.328,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.120.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	21.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	8.520.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.810.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.790.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	145.730.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	145.730.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				2 Laporan	10.430.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				2 Laporan	24.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				950 Dokumen SSPD	72.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Laporan	39.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG						817.742.556,00							930.310.479,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						817.742.556,00							930.310.479,00	
	5.02	KEUANGAN						817.742.556,00							930.310.479,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	704.104.384,00						-	777.872.307,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.766.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	10.766.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	4.176.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.176.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				0 Laporan	6.590.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.590.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	73.860.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	83.860.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	73.860.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		83.860.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	9.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	4.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	167.728.233,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	201.184.233,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.977.600,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.977.600,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	59.271.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		69.297.300,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.897.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.897.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.640.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.640.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	69.157.333,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		89.344.333,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	19.785.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.028.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	349.544.151,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	370.348.074,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	122.985.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		132.985.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	226.559.151,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		237.363.074,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.706.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	102.714.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	45.650.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.650.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				13 Unit	10.600.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.600.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	28.266.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		28.274.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	13.190.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.190.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	113.638.172,00						-	152.438.172,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	113.638.172,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	152.438.172,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	24.175.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		34.175.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				12 Laporan	18.200.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.200.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				480 Dokumen SSPD	54.850.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		83.650.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	16.413.172,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.413.172,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG						1.028.603.736,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.028.603.736,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						1.028.603.736,00							0,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	857.044.552,00						-	0,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.536.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.876.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.660.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	106.180.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	106.180.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.914.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.682.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.206.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.038.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.060.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	64.847.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	22.080.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	480.451.752,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	154.368.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	326.083.752,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.962.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	51.150.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	16.960.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.052.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	171.559.184,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	171.559.184,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	11.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	19.092.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	108.956.034,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	31.910.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO						894.954.359,00							841.058.964,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						894.954.359,00							841.058.964,00	
	5.02	KEUANGAN						894.954.359,00							841.058.964,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	763.962.909,00						-	685.017.514,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.920.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	11.920.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.920.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.920.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	86.880.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	32.760.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	86.880.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.760.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	10.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	10.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	144.204.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	157.256.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	1.886.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.886.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	41.664.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.636.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	61.773.400,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		67.853.400,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	22.080.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.080.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	406.756.209,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	368.888.814,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	127.476.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		127.476.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	279.280.209,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		241.412.814,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.702.700,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	103.692.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	46.250.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		46.250.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	16.590.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.590.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	29.810.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		29.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.052.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.052.500,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	130.991.450,00						-	156.041.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	130.991.450,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	156.041.450,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	11.750.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.750.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	18.592.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.592.200,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	58.447.350,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		78.697.350,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	42.201.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.001.900,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN						922.535.548,00							855.024.718,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						922.535.548,00							855.024.718,00	
	5.02	KEUANGAN						922.535.548,00							855.024.718,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	725.208.820,00						-	656.217.990,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.719.800,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.719.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.199.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.199.800,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	1.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.520.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.920.000,00			-	-	-	-	70.920.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	70.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.920.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	12.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				16 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	139.730.464,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	139.734.564,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.421.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.421.900,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	57.627.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		57.630.400,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.471.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.660.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	43.491.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		43.491.264,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	21.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.060.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	394.262.806,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	371.517.876,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	210.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota PARIAMAN, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		210.876.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	183.386.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota PARIAMAN, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.641.876,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.575.750,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	58.325.750,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	46.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota PARIAMAN, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	17.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.480.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		29.800.000,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11.045.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.045.750,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	197.326.728,00						-	198.806.728,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	197.326.728,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	198.806.728,00	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						1.430.325.450,00							43.435.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	802.596.250,00						-	43.435.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	45.240.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	43.435.000,00	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan Dokumen	45.240.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		43.435.000,00	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	757.356.250,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	757.356.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	627.729.200,00						-	0,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	627.729.200,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	627.729.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							22.505.991.146,00							20.505.488.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						22.505.991.146,00							20.505.488.000,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN						22.505.991.146,00							20.505.488.000,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	14.606.454.146,00						100 %	12.605.151.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			25 Dokumen	213.056.600,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD	-	312.072.335,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	57.582.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		82.513.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	97.765.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		169.558.835,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	57.708.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			14 Dokumen	10.967.607.213,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD	-	8.845.973.432,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	10.751.087.413,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		8.629.453.632,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	216.519.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		216.519.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	76.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	76.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang dikelola	-			74 Orang	285.385.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD	-	272.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				92 Paket	127.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		127.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				300 Orang	157.885.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	1.264.211.907,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD	-	1.279.511.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	4.470.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		21.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	165.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	175.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	901.741.707,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		900.431.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis pengadaan barang milik daerah	-			3 Jenis	242.800.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD	-	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	142.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	65.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			1 Tahun	1.205.670.026,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD	-	1.182.244.233,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.840.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		14.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	936.830.026,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		909.344.233,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah	-			6 Unit	351.223.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD	-	427.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	107.350.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				32 Unit	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	73.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		47.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	909.537.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN dan Masyarakat umum		909.537.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				700 Dokumen	70.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN dan Masyarakat umum		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	3.500.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN dan Masyarakat umum		3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	79.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN dan Masyarakat umum		59.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN dan Masyarakat umum		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	-			90 %	1.335.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	1.335.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				4 Dokumen	65.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3 Laporan	320.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota		320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				1 Dokumen	950.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota		950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase kesenjangan kompetensi dengan kinerja Persentase kesenjangan kualifikasi dengan kompetensi</i>	-			70 % 70 %	1.556.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat	-	1.556.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya</i>				50 Orang	120.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	730.700.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				3 Orang	144.299.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				5 Orang	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				10 Orang	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Laporan	106.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		106.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				50 Orang	60.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran hukuman disiplin ASN	-			5 %	380.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Bara	-	380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Bara		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				12 Orang	115.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Bara		115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				800 Orang	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Bara		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				1 Laporan	180.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Bara		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Bara		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						23.701.396.000,00							25.028.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						23.701.396.000,00							25.028.000.000,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						23.701.396.000,00							25.028.000.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	100 %			100 %	16.103.514.000,00						100 %	16.251.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				93.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	98.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		63.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	33.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				11.515.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	11.538.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	11.240.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		11.260.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	225.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		225.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		53.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				28.800.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	28.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				185.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	195.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	60.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				73 Orang	125.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		130.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				1.003.650.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.036.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		43.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		38.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	115.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	8.650.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	750.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		760.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	467.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	490.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	337.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		340.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				2.200.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.215.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	338.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		345.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.850.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.855.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				611.064.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	649.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		48.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	90.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		95.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	10.488.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		11.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50.576.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	100.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	300.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		310.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	24 JP/Tahun 24 JP/Tahun 90 % 90 %			24 JP/Tahun 89 %	7.597.882.000,00						24 JP/Tahun 24 JP/Tahun 90 % 90 %	8.777.000.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-				1.100.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	1.155.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				150 Orang	1.050.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	5.450.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	6.542.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				80 Orang	200.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		210.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				3 Laporan	600.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		610.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				260 Orang	4.500.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		5.560.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		52.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	-			-	1.047.882.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.080.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>				210 Orang	1.022.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		1.050.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			<i>Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi</i>				1 Laporan	25.882.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						17.272.793.000,00							18.094.558.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						17.272.793.000,00							18.094.558.000,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						17.272.793.000,00							18.094.558.000,00	
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	8.428.058.000,00						-	9.174.558.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	340.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		190.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		125.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.386.388.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	6.997.558.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/ Bulan	6.160.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		6.760.558.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	190.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		37.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	47.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	51.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		27.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		16.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	123.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	166.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		31.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	93.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		135.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	798.690.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	925.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		3.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.590.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		80.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	46.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	18.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		24.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		8.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.403.250,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	25.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13.403.250,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	544.076.750,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	463.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	11.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		13.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	503.076.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		390.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	195.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	160.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		170.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	8.844.735.000,00						-	8.920.000.000,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	2.625.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.630.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		1.150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		280.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	814.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	815.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		275.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	239.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-		240.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	2.705.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	-	-	2.725.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				2 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		605.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		280.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		290.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						17.538.117.161,00							21.258.405.300,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	13.335.681.161,00						-	13.408.405.300,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	66.123.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	70.181.100,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	43.701.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	8.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	13.801.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.181.100,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.729.806.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	8.031.006.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	217.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		217.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	12.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.206.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	117.713.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	118.664.300,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13 Dokumen	108.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		108.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.614.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	6.227.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.849.700,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	94.662.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	106.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	33.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		36.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				78 Orang	60.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	872.591.710,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	912.553.300,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.503.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.553.300,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	173.474.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46.664.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	60.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	571.808.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	110.005.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	110.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.814.776.139,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.425.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	19.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	386.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.409.528.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	530.004.312,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	595.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	287.904.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	43.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	198.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	-	-			-	4.202.436.000,00						-	7.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-			-	4.202.436.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	7.850.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	1.043.877.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 Laporan	428.565.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				7 Laporan	696.098.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		700.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	334.489.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	1.699.405.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						37.971.411.385,00							37.478.077.955,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						37.971.411.385,00							37.478.077.955,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						37.971.411.385,00							37.478.077.955,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	27.119.107.326,00						-	25.112.510.957,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	85.315.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	141.531.038,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	58.590.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		74.942.810,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	14.964.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen Laporan	11.760.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.588.228,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.276.656.516,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	12.161.995.359,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				110 ORANG Orang/ Bulan	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.111.272.283,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				67 Dokumen Dokumen	240.800.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.074.593,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Dokumen Laporan	35.855.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		37.648.483,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	66.181.159,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	68.503.861,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Unit Dokumen	52.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.565.060,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.324.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.443.391,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen Laporan	6.456.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.495.410,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.610.983.300,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	422.899.977,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				200 stel Paket	123.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		204.241.950,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				110 orang Orang	1.487.113.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		218.658.027,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.341.750.073,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.687.874.322,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 buah Paket	6.540.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.867.610,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	34.343.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		361.267.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	91.387.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		310.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 unit Paket	207.517.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		175.576.744,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 kotak Paket	60.885.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		63.929.551,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				264 eksemplar Dokumen	37.784.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		39.674.124,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Dokumen Laporan	903.290.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		730.558.793,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.260.681.240,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	9.159.471.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit Unit	661.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		694.575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				184 unit Paket	375.406.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		127.776.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit Unit	180.379.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		326.095.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit Unit	43.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.025.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.400.085.168,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.190.611.081,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 surat Laporan	5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.696.282,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 rekening Laporan	341.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		346.645.881,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				15 orang Laporan	1.052.833.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		817.268.918,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.077.454.770,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	279.624.319,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit Unit	223.618.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.528.284,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				45 Unit Unit	31.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		81.682.020,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit Unit	801.656.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.576.250,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan Unit	20.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		61.261.515,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.576.250,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	7.243.556.578,00						-	6.781.116.999,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	6.807.579.824,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.429.906.703,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				379 laporan Laporan	3.879.504.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.941.428.933,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				177 laporan Laporan	815.377.781,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		783.303.787,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				102 Laporan Laporan	36.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		132.186.912,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				52 laporan Laporan	184.126.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.874.684,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota</i>				4 laporan Laporan	974.050.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		483.758.550,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Laporan Kesepakatan	195.036.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		129.168.081,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				5 laporan Dokumen	723.034.053,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		759.185.756,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	435.976.754,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	351.210.296,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kurugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				100 % Laporan	109.153.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		114.611.336,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				100 % Laporan	326.823.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		236.598.960,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	3.608.747.481,00						-	5.584.449.999,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	827.318.500,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	954.426.325,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Dokumen Rekomendas i	439.552.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		724.109.767,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Dokumen Rekomendas i	387.765.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		230.316.558,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	2.781.428.981,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.630.023.674,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan Perangkat Daerah	1.033.550.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.085.227.521,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 Laporan Perangkat Daerah	184.508.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.165.797.946,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Laporan Kegiatan	577.113.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.253.322.986,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 Laporan Perangkat Daerah	986.256.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.125.675.221,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						13.524.540.258,00							14.505.453.771,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						13.524.540.258,00							14.505.453.771,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						13.524.540.258,00							14.505.453.771,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			100 %	8.181.027.258,00						100 %	8.945.217.571,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 %	154.290.900,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	185.484.535,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	91.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		112.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				8 Laporan	16.221.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		18.654.265,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				16 Laporan	47.069.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		54.130.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	-			12 Bulan	5.893.735.816,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	6.640.385.842,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	5.657.166.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		6.239.275.387,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	211.005.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		371.711.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	25.564.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		29.399.405,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			12 bulan	49.499.800,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	56.924.770,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	34.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		39.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		10.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.499.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		7.474.770,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-			80 %	151.814.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	187.652.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		31.912.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				40 Orang	121.814.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		155.739.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tertib Administrasi Umum</i>	-			12 bulan	1.034.935.408,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	871.135.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	9.248.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		10.635.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	35.198.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		8.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		18.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	54.268.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		94.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	42.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		46.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	22.548.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		17.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	771.143.408,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.429.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	69.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		79.580.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	82.519.400,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	75.099.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Paket	18.121.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		17.599.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	64.397.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		57.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	592.541.934,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	681.423.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		5.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	70.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		80.730.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	517.341.934,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		594.943.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	221.690.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	-	247.112.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	139.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		160.195.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	37.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		29.417.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	44.640.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		57.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi</i>	2,74 nilai			2,74 nilai	295.514.000,00						2,74 nilai	351.341.100,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	-			1 Rekomend asi	295.514.000,00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait	-	351.341.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				240 Orang	100.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		115.591.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				115 Orang	65.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		74.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				120 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				57 Orang	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		57.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,3 Nilai			3,3 Nilai	3.466.762.000,00						3,3 Nilai	3.986.776.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			1 Rekomendasi	3.466.762.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Generasi Muda, Instansi Vertikal, dan OPD terkait	-	3.986.776.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				450 Orang	3.356.762.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Generasi Muda, Instansi Vertikal, dan OPD terkait		3.756.776.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	60.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Generasi Muda, Instansi Vertikal, dan OPD terkait		138.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Generasi Muda, Instansi Vertikal, dan OPD terkait		92.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %			100 %	85.244.000,00						100 %	98.030.600,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-			1 rekomendasi	85.244.000,00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pengurus Ormas dan Masyarakat	-	98.030.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				140 Orang	55.244.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pengurus Ormas dan Masyarakat		63.530.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				14 Orang	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pengurus Ormas dan Masyarakat		34.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,13 Nilai			3,13 Nilai	859.502.000,00						3,13 Nilai	392.123.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-			1 rekomendasi	859.502.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pelajar, Generasi Muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait	-	392.123.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	150.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pelajar, Generasi Muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		156.373.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				375 Orang	668.525.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pelajar, Generasi Muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		166.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	40.977.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pelajar, Generasi Muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		69.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,04 Nilai			3,04 Nilai	636.491.000,00						3,04 Nilai	731.964.650,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	-			5 rekomendasi	636.491.000,00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Tokoh mayarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait	-	731.964.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				60 Orang	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Tokoh mayarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		97.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	128.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Tokoh mayarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		147.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	154.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Tokoh mayarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		177.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				22 Dokumen	269.491.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Tokoh mayarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		309.914.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							8.579.278.069.784,00							6.972.836.057.086,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1. INIDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK2 Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan didaerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Membangun Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2026 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini. Proyeksi indikator kinerja makro disusun mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 serta memperhatikan target Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan memperhatikan target Provinsi Sumatera Barat dalam RKP tahun 2025, sehingga dalam penetapan target indikator kinerja makro tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian jika salah satunya diakibatkan realisasi tahun 2023 telah melampaui target Tahun 2024 dan 2025 yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET KINERJA		
		2025		2026
		RPJMD	RKPD	RPJMD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	5,05	4,70
2	PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)	35,44	36,10	35,44
3	PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta)	56,13	62,29	56,13
4	Indeks Gini (Ratio)	0,289	0,289	0,289
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,307	0,307	0,307
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,90	5,65	5,90
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	347,27	330,84	347,27
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,13	5,55	6,13
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,07	77,41	74,07
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,35	74,79	70,35

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET KINERJA		
		2025		2026
		RPJMD	RKPD	RPJMD
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,09	14,13	14,09
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,47	9,47	9,47
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	11.592	11.719	11.592

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan hasil Analisa Bappeda 2024

7.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2024-2025 dalam tabel berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 2026

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
		2025			2026
		RPJMD	RKPD	KET	RPJMD
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing					
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	74,16	77,41	disesuaikan	74,60
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,35	74,79	disesuaikan	70,53
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12,50	12,50	tetap	10,60
4	Rata-rata lama sekolah	9,47	9,47	tetap	9,57
5	Harapan Lama Sekolah	14,09	14,13	disesuaikan	14,10
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,85	49,85	tetap	49,90
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	63,10	63,10	tetap	64,50
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,90	62,90	tetap	62,90

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
		2025			2026
		RPJMD	RKPD	KET	RPJMD
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	16	17	disesuaikan	17
4	Indeks Pembangunan keluarga	65,54	65,54	tetap	67,62
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,00	95,53	disesuaikan	95,08
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,75	68,11	disesuaikan	62,42
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,15	tetap	66,25
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan					
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5	5	tetap	5
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,60	101,60	tetap	101,80
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	105,03	105,03	tetap	105,55
4	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	51.549	54.838	disesuaikan	53.096
5	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	43.292	44.158	disesuaikan	44.158
6	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	55.418	55.418	tetap	58.199
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5	5	tetap	5
8	Indeks Ketahanan Pangan	82,05	82,05	tetap	83,22
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5	5	tetap	5
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital					
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,65	17,65	tetap	18,15
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,15	9,15	tetap	9,29
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1,01	5,63	disesuaikan	1,02
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	401	401	tetap	413
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,28	2,28	tetap	2,33
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	4,5	4,5	tetap	5,2
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	173.711	173.711	tetap	197.703
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	10,50	10,50	tetap	11,50

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
		2025			2026
		RPJMD	RKPD	KET	RPJMD
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	7,25	7,25	tetap	7,65
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan					
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16,85	4,43	disesuaikan	17,37
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,26	1,37	disesuaikan	1,27
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,18	7,50	disesuaikan	6,26
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan					
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,786	0,786	tetap	0,805
2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,691	0,691	tetap	0,695
3	Kemantapan Jalan (%)	81,00	81,00	tetap	82,00
4	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,65	0,65	tetap	0,66
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,81	78,81	tetap	79,25
6	Akses Air Minum (%)	88,00	88,00	tetap	90,00
7	Akses Sanitasi Layak (%)	88,00	88,00	tetap	90,00
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	83,33	6,00	disesuaikan	100
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	75,04	75,04	tetap	76,60
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	58,28	63,23	disesuaikan	59,78
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	71,79	71,79	tetap	73,55
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	89,00	89,00	tetap	90,00
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas					
1	Indeks reformasi birokrasi	71,00	71,51	disesuaikan	71,87
2	Nilai SAKIP (predikat)	BB	BB	tetap	A
		(79,00)	(79,00)	tetap	(80,01)
3	Nilai EPPD (skor)	3,004	3,004	tetap	3,0050
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP	WTP	tetap	WTP
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	40,75	40,75	tetap	41,00
6	Indeks SPBE (indeks)	3,50	3,50	tetap	3,60

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
		2025			2026
		RPJMD	RKPD	KET	RPJMD
7	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	80,00	65,00	disesuaikan	82,00
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	88	88	tetap	89

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

7.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur

kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
I.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.	Urusan Pendidikan			
	a. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	Disdik	73,65	73,72
	b. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	Disdik	56,57	57,50
	c. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Disdik	59,13	59,45
	d. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Disdik	28,32	28,63
	e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	Disdik	97,70	99,20
	f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%)	Disdik	56,88	58,38
	g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%)	Disdik	37,27	38,77
	h. Persentase SMA Negeri terakreditasi (%)	Disdik	93,49	95,50
	i. Persentase SMK Negeri terakreditasi (%)	Disdik	90,07	91,75
	j. Persentase SLB Negeri terakreditasi (%)	Disdik	58,34	60,00
2.	Urusan Kesehatan			
	a. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman, RSJ HB Sa'anin Padang)	Dinas Kesehatan	1:875	1:875
	b. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	Dinas Kesehatan, RSAM, RS,M. Natsir, RSJ HB Sa'anin Padang, RSUD Solok	100	100
	c. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)			
	d. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	Dinas Kesehatan	100	100
	e. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	Dinas Kesehatan	98,90	100
	f. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	Dinas Kesehatan	84	86
	g. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	Dinas Kesehatan	8,5	7
	h. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	Dinas Kesehatan	95	100
	i. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Dinas Kesehatan	90	95
	j. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	92,4	95
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	0,69	0,69
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	0,83	0,83
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	0,75	0,89
	d. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	11,11	11,11
	e. Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	58,28	59,78
	f. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	100	100
	g. Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	Dinas Bina Marga Cipta	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
		Karya Tata Ruang		
	h. Rasio kemantapan jalan provinsi	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	81	82
	i. Akses Air Minum Layak (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	88	90
	j. Akses Sanitasi Layak (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	88	90
	k. Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	80	100
	l. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	89	90
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	Dinas Perkimtan	100	100
	b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	Dinas Perkimtan	100	100
	c. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (%)	Dinas Perkimtan	28,35	35,44
	d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	Dinas Perkimtan	10	12
	e. Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%)	Dinas Perkimtan	69,03	86,28
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Satpol PP	83	85,00
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	Satpol PP	83	85,00

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	c. Indeks Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	82	84
	d. Persentase Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (%)	Satpol PP	89,47	89,47
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap (%)	Satpol PP	62	65
	f. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	BPBD	87,5	100
	g. Persentase penanganan pra bencana (%)	BPBD	100	100
	h. Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	BPBD	100	100
6.	Urusan Sosial			
	a. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100
	b. Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100
	c. Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100
	d. Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	Dinas Sosial	100	100
	e. Indeks Partisipasi Sosial (indeks)	Dinas Sosial	0,687	0,687
II.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
7.	Urusan Ketenagakerjaan			
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja. (%)	Dinas Nakertrans	100	100
	b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Dinas Nakertrans	36,34	36,68
	c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	8,6	8,62
	d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Nakertrans	59,31	61,92
	e. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	Dinas Nakertrans	36,99	37,97

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.			
	f. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans	25,01	29,23
	g. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%)	Dinas Nakertrans	84,32	91,14
	h. Persentase Serapan tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	36,99	37,97
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	Dinas P3AP2KB	4,6	4,75
	b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas P3AP2KB	13	12
	c. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio)	Dinas P3AP2KB	2	1,96
	d. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	Dinas P3AP2KB	19	19
	e. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	Dinas P3AP2KB	Mentor	Mentor
	f. Persentase perempuan di legislative (%)	Dinas P3AP2KB	12,3	12,30
	g. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	Dinas P3AP2KB	15,09	15,09
	h. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	Dinas P3AP2KB	37,8	37,85
	i. Indeks pemenuhan hak anak	Dinas P3AP2KB	70,83	72,63
	j. Jumlah kasus perceraian baru	Dinas P3AP2KB	5.925	5.825
9.	Urusan Pangan			
	a. Persentase cadangan pangan (%)	Dinas Pangan	98	100
	b. Ketersediaan pangan utama (ton)	Dinas Pangan	871.165	884.233
	c. Skor Pola Pangan Harapan (skor)	Dinas Pangan	84,5	85
	d. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%)	Dinas Pangan	84,5	85

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	e. Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)			
	- Beras	Dinas Pangan	CV ≤10	CV ≤10
	- Cabe Merah	Dinas Pangan	CV ≤25	CV ≤25
	- Bawang Merah	Dinas Pangan	CV ≤25	CV ≤25
10.	Urusan Pertanahan			
	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	Dinas Perkimtan	4	5
	b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	Dinas Perkimtan	100	100
	c. Persentase lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota yang tersedia (%)	Dinas Perkimtan	4	5
	d. Persentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi (%)	Dinas Perkimtan	100	100
11.	Urusan Lingkungan Hidup			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Dinas LH	78,81	79,25
	b. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	Dinas LH	79	80
	c. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	Dinas LH	75	80
	- Persentase pengurangan sampah (%)	Dinas LH	23	25
	- Persentase penanganan sampah (%)	Dinas LH	62	64
	- Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun)	Dinas LH	347.776	382.554
	d. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapian lingkungan (%)	Dinas LH	96	99
	e. Persentase penurunan beban pencemaran (%)	Dinas LH	2,5	2,5
	f. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)	Dinas LH	0,05	0,05
12.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	a. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	Dinas Dukcapil	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	b. Pemanfaatan data kependudukan (%)	Dinas Dukcapil	100	100
	c. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	Dinas Dukcapil	94,25	96,16
13.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	Dinas PMD	14,78	9,5
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Dinas PMD	2,02	2,02
	c. Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	Dinas PMD	81	91
	d. Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	Dinas PMD	550	600
	e. Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas PMD		
	- Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Dinas PMD	500	544
	- Posyandu Mandiri	Dinas PMD	2.700	2.800
	- LPM mandiri	Dinas PMD	37	50
	- Dasa Wisma Mandiri	Dinas PMD	12.800	13.300
14.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (indeks)	Dinas P3AP2KB	2,61	2,58
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Dinas P3AP2KB	63,92	64,32
	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Dinas P3AP2KB	10	9,34
	d. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Dinas P3AP2KB	17,6	17,10
	e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Dinas P3AP2KB	22,4	22,60
15.	Urusan Perhubungan			
	a. Rasio konektivitas Provinsi	Dinas Perhubungan	0,691	0,695
	b. Kinerja lalu lintas provinsi	Dinas Perhubungan	0,47	0,45
	c. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	Dinas Perhubungan	23.000.000	24.000.000
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika			

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	Diskominfo	100	100
	b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)	Diskominfo	70	75
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	Diskominfo	40	50
	d. Indeks domain kebijakan internal SPBE	Diskominfo	3,4	3,5
	e. Indeks domain Tata Kelola SPBE	Diskominfo	3,4	3,5
	f. Indeks domain Manajemen SPBE	Diskominfo	3,4	3,5
	g. Indeks domain Layanan SPBE	Diskominfo	3,4	3,5
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	a. Persentase Koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM	29,21	35,01
	b. Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi dan UKM	4,2	5
18.	Urusan Penanaman Modal			
	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	DPMPTSP	10,5	11,50
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,156	0,182
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	5,62	5,85
	c. Peningkatan prestasi olahraga (medali)	Dinas Pemuda dan Olahraga	29	29
20.	Urusan Statistik			
	a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Diskominfo	90	100

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Diskominfotik	90	100
21.	Urusan Persandian			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	Diskominfotik	55	60
22.	Urusan Kebudayaan			
	a. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan	100	100
	b. Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan	86,7	87,0
23.	Urusan Perpustakaan			
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai)	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	66.30	67.30
	b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	16	17
24.	Urusan Kearsipan			
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	73	73.50
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	76.66	76.66
III.	URUSAN PILIHAN			
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan			
	a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)	DKP	512.013	525.307
	b. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	DKP	90	92

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
26.	Urusan Pariwisata			
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	Dinas Pariwisata	1,5	1,5
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	Dinas Pariwisata	1,5	1,5
	c. Tingkat hunian akomodasi (%)	Dinas Pariwisata	55,25	58,67
27.	Urusan Pertanian			
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	9,48	9,68
	b. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,9	2,95
	c. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,75	1,75
	d. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1
	e. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Dinas Peternakan dan Keswan	5,19	5,48
	f. Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	Dinas Peternakan	1,62	1,68
28.	Urusan Kehutanan			
	a. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	Dishut	20	20
	b. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	Dishut	2,79	3,29

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	c. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	Dishut	5,71	6,66
	d. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	Dishut	100	120
	e. Indeks tutupan hutan (Indeks)	Dishut	59,69	59,26
29.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral			
	a. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%)	Dinas ESDM	75	90
	b. Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	Dinas ESDM	100	100
	c. Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	99,8	99,90
	d. Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	Dinas ESDM	51,7	51,8
	e. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	Dinas ESDM	83	100
30.	Urusan Perdagangan			
	a. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp. Juta)	Dinas Perindag	1507,97	1538,12
	b. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Dinas Perindag	90	90
	c. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	Dinas Perindag	26	26,5
	d. Tertib Usaha	Dinas Perindag	68	70
	e. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Dinas Perindag	27	27
	f. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	Dinas Perindag	78	80
	g. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	Dinas Perindag	6	6
	h. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	BPS	53,43	58,78
31.	Urusan Perindustrian			
	a. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	Dinas Perindag	0,41	0,41
	b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	Dinas Perindag	0,13	0,13

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	88	90
	d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	94	94
	e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	90	90
	f. Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%)	Dinas Perindag	90	90
	g. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	Dinas Perindag	16,7	17
	h. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	Dinas Perindag	47.673	50.193
32.	Urusan Transmigrasi			
	a. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi	Dinas Nakertrans	46	51,00
	b. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	Dinas Nakertrans	77	79,00
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
33.	Unsur Sekretariat Daerah			
	a. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH (nilai)	Biro Umum	90,2	90,40
	b. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai)	Biro Umum	90,2	90,40
	c. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah (nilai)	Biro Umum	90,2	90,40
	d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan (nilai)	Biro Administrasi Pimpinan	84,55	86,75
	e. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian (nilai)	Biro Administrasi Pimpinan	84,55	86,75

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	f. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	Biro Administrasi Pimpinan	80	80
	g. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	95	100
	h. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	100	100
	i. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	95	100
	j. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	100	100
	k. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	100	100
	l. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) (%)	Biro PBJ	4,08	5,1
	m. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	Biro PBJ	14,2	41
	n. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%)	Biro PBJ	60	75
	o. Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor)	Biro PBJ	97	97
	p. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (dokumen)	Biro Perekonomian	7	7
	q. Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov (%)	Biro Perekonomian	94	95
	r. Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota (%)	Biro Perekonomian	94	95
	s. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif (Lembaga)	Biro Kesra	4	4
	t. Indeks kepuasan layanan embarkasi haji	Biro Kesra	B	B
	u. Peringkat dalam event keagamaan nasional	Biro Kesra	1	1

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	v. Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen)	Biro Kesra	6	6
	w. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan (%)	Biro Hukum	100	100
	x. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan (%)	Biro Hukum	100	100
	y. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	Biro Hukum	100	100
	z. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	Biro Organisasi	100	100
	aa. Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	Biro Organisasi	100	100
	bb. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	Biro Organisasi	14	16
	cc. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)	Biro Organisasi	13,1	13,3
	dd. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai)	Biro Organisasi	1,93	2
	ee. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi)	Biro Organisasi	13	15
	ff. Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah)	Biro Organisasi	20	22
	gg. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan (%)	Biro Administrasi Pembangunan	94	95
34	Unsur Sekretariat DPRD			
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Set DPRD	90	90
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
35	Unsur Perencanaan			
	Indeks kualitas perencanaan	Bappeda	85	89
36	Unsur Keuangan			
	a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	BPKAD	8,27	8,19

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKAD	3,6	3
	c. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKAD	3,54	3,53
	d. Manajemen Aset	BPKAD	100	100
	e. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKAD	3,53	3,50
	f. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	BPKAD	100	100
	g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	BPKAD	87,55	88,61
	h. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	BPKAD	WTP	WTP
	i. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	BPKAD	100	100
	j. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Bapenda	1,88	1,89
	k. Persentase Peningkatan PAD (%)	Bapenda	7,2	7,2
37	Unsur Kepegawaian			
	a. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKD	208	210
	b. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKD	70	75
	c. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKD	70	72
	d. Nilai penerapan sistem merit	BKD	350	370
38	Unsur Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun	BPSDM	4,9	5,0
	b. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	BPSDM	88	89
	c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BPSDM	84	85
39	Unsur Penelitian dan Pengembangan			

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA	TARGET RPJMD	
			2025	2026
	a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%)	Balitbang	62,5	62,5
	b. Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk)	Balitbang	12	12
	c. Persentase SKPD yang terinovatif (%)	Balitbang	40	50
40	Unsur Penghubung			
	a. Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)	Badan Penghubung	100	100
	b. Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan)	Badan Penghubung	5	5
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
41	Inspektorat Daerah			
	a. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Inspektorat	4	4
	b. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Inspektorat	4	4
VII	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
42	Kesatuan Bangsa dan Politik			
	a. Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	Badan Kesbangpol	2	2
	b. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	Badan Kesbangpol	69,25	70

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD serta merupakan implementasi tahun pertama pada RPJPD Tahun 2025-2045. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang juga diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui :

1. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023, serta memperhatikan perkiraan capaian tahun 2024 guna merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah serta masing-masing urusan sebagai salah satu dasar perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diintervensi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.
2. direktif / arahan Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah dari masukan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung yang dijamin melalui pendekatan partisipatif dalam wadah Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).
4. penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi serta saran dan masukan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD.
5. penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Musrenbang.

6. penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi dan Pusat melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, Rapat Koordinasi antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dengan Gubernur, Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah (Rakorrenbangpus) dan Musrenbangnas.

Manajemen Risiko Pembangunan

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi serta berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat dalam menjalankan program/kegiatan prioritas selalu melibatkan lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara sistematis dan terintegrasi

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Mendukung hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya yang mencakup:

a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.

- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan risiko yang akan terjadi, penyebab risiko, dampak dari terjadinya risiko, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku. Sehingga RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 bisa dijadikan sebagai :

- 1. pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 2. pedoman dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 serta evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025
- 3. pedoman dasar dalam hal penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

4. pedoman dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
5. pedoman dasar bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Sumatera Barat;
6. pedoman dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
7. pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

**DAFTAR PENERIMA HIBAH
BERDASARKAN PERTIMBANGAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

HASIL PERTIMBANGAN TAPD PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2025 Murni													
No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH202403215237NU50000896	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT Jl. Kuini No. 79 B Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Mohon Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025	05/FKUB/SB/ III/2024	19 Maret 2024	1,403,000,000	Layak	750,000,000	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		27 Mei 2024	0	Dialihkan menjadi program kegiatan
Total						1.403.000.000		750.000.000				0	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanasatri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD PADA SKPD BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 2025 Murni													
No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH202404301010598NU50001	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT Jl. Rimbo Kaluang No. 52 Komplek GOR H.Agus Salim Kota Padang Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	HIBAH PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) SUMATERA BARAT TAHUN 2024	025/PWRI-SB/4/IV-2024	24 April 2024	910,340,362	Layak	186,427,984	4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum		19 Juni 2024	186,427,984	
Total						910.340.362		186.427.984				186.427.984	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS KESEHATAN
2025 Murni

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH20240314431NU50000476	PMI PROVINSI SUMATERA BARAT JL SISINGAMANGARAJA NO 34 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	HIBAH PMI 2025	078/01.04.00/KEU/IV/2024	26 April 2024	6,839,913,000	Layak	2,000,000,000	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		15 Mei 2024	1,000,000,000	
Total						6.839.913.000		2.000.000.000				1.000.000.000	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2025 Murni

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH202402011669NU50000022	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT Jalan kh ahmad dahlan no 31 alai parak kopi pada utara kota padang Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Permohonan Dana Hibah KPID Sumbar APBD Tahun 2025	25/KPID-SB/ I-2024	29 Januari 2024	9,191,585,000	Layak	4,500,000,000	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		31 Mei 2024	2,000,000,000	
Total						9.191.585.000		4.500.000.000				2.000.000.000	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanaastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD PADA SKPD DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2025 Murni													
No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH2024022910026NU5000013	KOPERASI PECAHAWAI NEGERI GURU GURU SOLOK SELATAN Jl. Raya Kota Baru (Sebelah SPBU Koto Baru) Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung KAB. SOLOK	Pengadaan Prasarana Berupa Peralatan Mesin Cuci Mobil, Motor dan Karpas Untuk Mendukung Sarana Pengelolaan dan Pengembangan Koperasi	01/ KGS/1-2024	19 Januari 2024	184,500,000	Layak	184,500,000	2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		28 Mei 2024	0	
2.	HBH202403027352NU50000135	KOPERASI UNIT DESA MANUNGKAL PIR-BUN KAYU JAO Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kelurahan Batang Barus Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	Pengadaan Prasarana Berupa Mesin Packaging Teh Celup Untuk Mendukung Sarana Pengelolaan dan Pengembangan Koperasi	04/KUD- M/2024	15 Januari 2024	221,625,000	Layak	221,625,000	2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		28 Mei 2024	0	
3.	HBH202404301010680NU50001	DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPINWIL) KOTA PADANG Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	17/Dekopin/ SB/IV/2024	24 April 2024	1,000,000,000	Layak	772,000,000	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		28 Mei 2024	0	
Total						1.406.125.000		1.178.125.000				0	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD

SETDA

Drs. Hanaastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2025 Murni

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH202405271010848NU50001	P2TPP2A LIMPAPEH RUMAH NAN GADANG PROVINSI SUMATERA BARAT JALAN BATANG ANTOKAN NO. 2 KOMP. GOR H. AGUS SALIM PADANG Kelurahan 0 Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Permohonan Dana Hibah 2025	02/P2TP2A- SB/I/2024	23 Mei 2024	950,000,000	Layak	950,000,000	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30 Mei 2024	950,000,000	
2.	HBH202405271010849NU50001	DWP SUMATERA BARAT Jln Jenderal Sudirman No 51 Padang Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Permohonan Dana Hibah untuk Kegiatan	077/ DWP.PSB/ X/2024	14 Mei 2024	800,568,450	Layak	373,950,450	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		30 Mei 2024	0	Dialihkan menjadi program kegiatan
3.	HBH20240527571NU50001887	BADAN KERJASAMA KOORDINASI WANITA PROVINSI SUMATERA BARAT Jalan Sudirman Nomor 52 Padang Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	Permohonan Dana Hibah untuk Kegiatan	Sekr 25/ Sokr-BKOW- SB/V/2025	12 Mei 2024	692,533,000	Layak	379,022,000	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		30 Mei 2024	379,022,000	
Total						2.443.101.450		1.702.972.450				1.329.022.000	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD

Drs. Hanaastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD PADA SKPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025 Murni													
No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH202402235277NU50000113	KWARTIR DAERAH 03 GERAKAN PRAMUKA SUMATERA BARAT Jl. PRAMUKA RAYA NO. 12 (BELAKANG KAMPUS AKBP) KEL. LOLONG BELANTI KEC. PADANG UTARA KOTA PADANG Kelurahan 0 Kecamatan 0 0	1. Program Bidang Pembinaan Anggota Muda (Binamuda), 2. Program Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa), 3. Program Bidang Organisasi dan Hukum, 4. Program Bidang Humas dan Teknologi Informatika, 5, Program Bidang Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana, 6. Program Bidang Kesakaan, Satuan Komunitas dan Gugus Darma, 7. Program Bidang Bela Negara, 8. Program Bidang Perencanaan dan Pengembangan, 9. Program Bidang Usaha, Dana, Sarana dan Prasarana, 10. Program Bidang Kemitraan dan Kerjasama, 11. Rutin Kesekretariatan Kantor	27 - 03 - A	23 Februari 2024	5,543,234,900	Layak	4,000,000,000	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		27 Mei 2024	2,000,000,000	
2.	HBH202403017690NU50000134	KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA SUMATERA BARAT Jalan Rimbo Kaluang No. 52 Komplek GOR H. Agus Salim Kota Padang Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	HIBAH ORGANISASI KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT	301/ KORMI- SB/II/2024	26 Februari 2024	6,575,741,036	Layak	5,900,000,000	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		27 Mei 2024	1,000,000,000	
3.	HBH202405151217NU50001788	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT Jl. Rasuna Said No. 87 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja KONI Provinsi Sumatera Barat Pada APBD Tahun Anggaran 2025	491/K-SB/ KU/ IV/2024	29 April 2024	49,358,640,000	Layak	45,000,000,000	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		27 Mei 2024	12,000,000,000	
4.	HBH202405151010754NU50001	NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE GOR H.Agus Salim. Jl.rimbo Keluang Kel.Rimbo Keluang Kec.Padang Barat KOTA PADANG Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Permohonan Dana Hibah Anggaran Tahun 2025	0020/ NPC/ Sumbang/ III/2024	28 Maret 2024	12,464,117,250	Layak	2,200,000,000	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		27 Mei 2024	2,000,000,000	
Total						73.941.733.186		57.100.000.000				17.000.000.000	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN
2025 Murni

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH202404031010552NU50001	SLBN 1 LENGAYANG JALAN TUANKU UMAR KAMBANG KAMPUNG MEDAN BAIK Kelurahan Kambang Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	421.08/130/ SLBN1L-2023	17 Juli 2023	500,000,000	Tidak Layak	0	0		00 0000	0	
Total						500.000.000		0				0	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD PADA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2025 Murni													
No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH20240202949NU50000030	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Prof. Dr. H. Aziz Haily, MA No. 10Bukit Limau Sarilamak Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Dana Hibah BPSK Tahun 2025	001/BPSK-Sumbar/50Kota/I/2024	29 Januari 2024	267,187,000	Layak	172,150,000	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	172,150,000	
2.	HBH20240313426NU50000340	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN SOLOK Jl. Raya Solok Padang Km. 5 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung KAB. SOLOK	Proposal Dana Hibah BPSK Kabupaten Solok TA 2025	05/BPSK-2024	06 Maret 2024	521,874,800	Layak	172,120,000	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	172,120,000	
3.	HBH202403141158NU50000415	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG JL. AUR NO. 1 PADANG Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	BPSK pada Kota Padang	04/BPSK-PDG-SBR/III/2024	14 Maret 2024	632,089,700	Layak	205,738,100	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	205,738,100	
4.	HBH2024032010654NU5000083	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN SIJUNJUNG JL IMAM BONJOL NO.109 MUARO SIJUNJUNG Kelurahan Muaro Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	Permohonan Hibah Tahun 2025	06	01 Februari 0024	544,890,750	Layak	193,100,000	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	193,100,000	
5.	HBH20240403447NU50001587	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PARIAMAN Jl. Wolter Mongonsidi Terminal Jati Pariaman Kelurahan Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	Permohonan Hibah Anggaran Operasional BPSK Kota Pariaman Tahun 2025	04/BPSK-PRM/IV/2024	02 April 2024	416,527,600	Layak	201,316,500	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	201,316,500	
6.	HBH20240408742NU50001614	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Jl. Syamsu Tulus, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan KOTA SOLOK	Usulan Dana Hibah untuk BPSK Tahun 2025	03/BPSK-SLK/III-2024	03 Desember 2024	356,038,400	Layak	187,093,000	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	187,093,000	
7.	HBH202404241010590NU50001	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BPSK KOTA BUKITTINGGI JALAN HAZAIRIN NO 22 Kelurahan Bukik Cangang/Kayu Rmg. Kecamatan Guguak Panjang KOTA BUKITTINGGI	Permohonan Dana Hibah BPSK	010/BPSK/BKT/IV/2024	23 April 2024	438,710,000	Layak	227,847,100	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	227,847,100	
8.	HBH202404301010675NU50001	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN AGAM Jl. Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	Permohonan Dana Hibah BPSK Kab. Agam Tahun Anggaran 2025	02/BPSK-AG/IV/2024	05 April 2024	396,178,500	Layak	187,083,000	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		00 0000	187,083,000	
Total						3.573.496.750		1.546.447.700				1.546.447.700	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD

SEKRETARIS DAERAH
SUMATERA BARAT

Drs. Hanastri, MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2025 Murni

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH202402027033NU50000035	KELOMPOK USAHA GUNA JAYA JORONG PURWAJAYA JORONG PURWAJAYA KENAGARIAN SARILAMAK Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	PENYEDIAAN SAPI UNTUK KELOMPOK USAHA GUNA JAYA	003/KUGJ/2022	28 Oktober 2022	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 Mei 2024	0	
2.	HBH202402027032NU50000036	KELOMPOK TANI TERNAK BERKAH JORONG PURWAJAYA KENAGARIAN SARILAMAK Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	KELOMPOK TANI TERNAK BERKAH JORONG PURWAJAYA	02/Klp/- Berkah-2022	28 Oktober 2022	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 Mei 2024	0	
Total						100.000.000		0				0	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanastri MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

HASIL PERTIMBANGAN TAPD PADA SKPD DINAS SOSIAL 2025 Murni													
No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
1.	HBH20240217380NU50000105	PSAA. ADE IRMA SURYANI NASUTION KAB. TANAH DATAR JL. IMAM BONJOL NO.3 KUBU RAJO Kelurahan Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum KAB. TANAH DATAR	Permohonan Hibah	020/PSAA-AISN/ BSK-2024	20 Maret 2024	1,480,058,000	Layak	626,620,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	626,620,000	
2.	HBH2024022110006NU5000010	PANTI ASUHAN GERAKAN BUNDA BERBAGI KAB. PASAMAN BARAT Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua Baru Kelurahan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	Hibah Program Regabilitasi Sosial (1. Penyedian Makanan, 2. Penyediaan Sandang, 3. Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar)	04/PGBB/2024	04 Januari 2024	318,650,000	Layak	318,650,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	318,650,000	
3.	HBH20240221456NU50000110	PSAA. BAITUR RAFKI AS SA'ADIAH KAB. PASAMAN BARAT Jalan Labuah Tagak-Talao Jorongh Tabek Sirah Kelurahan Talu Kecamatan Talamau KAB. PASAMAN BARAT	21 Februari 2024	022/S.Permh/H/ BRAS-DINSOS/ GUB/II/2024	21 Februari 2024	1,090,020,000	Layak	1,030,340,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,030,340,000	
4.	HBH20240311369NU50000293	PSAA. MUHAMMADIAH RANTING CINGKARING KAB. AGAM JL. RAYA BUKITTINGGI-PADANG KM.5 CINGKARIANG Kelurahan Cingkariang Kecamatan Banuhampu KAB. AGAM	PROPOSAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	F-1/01/PAM-RC/ II/2024	27 Februari 2024	1,682,818,000	Layak	1,213,390,410	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,213,390,410	
5.	HBH202403155505NU50000596	PA. AN-NISA' KOTA PADANG JL. SAWAHAN III NO. 14 REL KERETA API KEL. GANTING PARAK GADANG Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Hibah	010/PAAN-4/ III/2024	11 Maret 2024	454,044,000	Layak	441,869,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	441,869,000	
6.	HBH20240318458NU50000697	PSAA. HAJI ABDULLAH KAB. PASAMAN BARAT Alin Tagak Jorong Simpang Tiga Alin Kelurahan Muaro Kiawai Kecamatan Gunungtuleh KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Hibah Program Rehabilitasi Sosial	01/PA/AT/2024	04 Maret 2024	795,444,000	Layak	698,568,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	698,568,000	
7.	HBH20240319405NU50000798	PSAA. NURUL IMAN ALAHAN PANJANG KAB. SOLOK BATU BAGIRIAK Kelurahan Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti KAB. SOLOK	USULAN HIBAH TAHUN 2025	021/PP-PA-NI/ YNI-2024	26 Maret 2024	2,361,100,000	Layak	597,320,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	597,320,000	
8.	HBH20240320333NU50000809	Panti Waraqil Jannah Jorong Hilir Balai Kelurahan Paninjauan Kecamatan X Koto KAB. TANAH DATAR	1. Penyedian Permakanan dan Sarana Prasarana Dapur. 2. Rehabilitasi Dapur dan Toilet. 3. Kegiatan Aktivitas Kehidupan Sehari- Hari	06/PAD- WJ/02/2024	26 Februari 2024	467,515,000	Layak	461,015,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	461,015,000	
9.	HBH20240320367NU50000815	PSAA. IKHWANUS-SHAFA KAB. AGAM GOBAG BAWAH JORONG LASI MUDO KEC. CANDUANG Kelurahan Lasi Kecamatan Candung KAB. AGAM	permohonan hibah	04/PSAA-IS/ II/2024	28 Februari 2024	526,048,000	Layak	412,908,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	412,908,000	
10.	HBH2024032010373NU5000082	PANTI ASUHAN DARUL FALAH KAB. PASAMAN BARAT	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3.	005/LKS/PA-DF/ III/ST-2024	02 Maret 2024	1,495,698,000	Layak	328,950,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan		00 0000	328,950,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
		Jorong Sungai Tanang, Nag. Sungai Aua, Kec. Sungai Aur Kelurahan Sungai Aua Kecamatan Sungaiaur KAB. PASAMAN BARAT	Penyediaan Asrama 4. Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5. Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari Hari						Makanan				
11.	HBH202403206013NU50000847	PSAA. TUAN KADHI PADANG GANTING KAB. TANAH DATAR Koto gadang padang ganting Kelurahan Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting KAB. TANAH DATAR	Penyediaan makanan, Penyediaan sandang, pemberian aktivitas hidup sehari - hari, akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penyediaan honorium pengasuh, Penyediaan asrama yang mudah di akses, penyediaan rehab asrama/fisik	22/PA-TK/PG-2024	11 Desember 2024	2,047,740,501	Layak	382,894,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	382,894,000	
12.	HBH20240320383NU50000870	PA.BHAKTI WANITA ISLAM LUBUK ALUNG KAB. PADANG PARIAMAN PASAR KANDANG LUBUK ALUNG Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	1.Pengasuhan 2. Penyediaan makanan 3. Penyediaan Sandang 4.Penyediaan asrama yang mudah diakses 5.Pemberian Bimbingan Aktifitas hidup sehari hari 6.Akses Kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	PA/13/YPBWI/LA/03/2024	20 Maret 2024	329,737,000	Layak	325,637,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	325,637,000	
13.	HBH20240320414NU50000871	PSTW. IKHWANUS SAFA KAB. AGAM Lasi mudo Kelurahan Lasi Kecamatan Candung KAB. AGAM	Permohonan Hibah	004/PSTW-IS/II/2024	28 Februari 2024	491,893,200	Layak	428,358,800	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	428,358,800	
14.	HBH20240320610NU50000882	PSAA. MUHAMMADIYAH CABANG GUGUK II KAB. 50 KOTA Jl. TAN MALAKA KUBANG TUNGKEK Kelurahan Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Belanja Uang Permakanan Panti, Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tahun 2025 ke Rekening Lembaga	142/PAM-CGII/III-2024	05 Maret 2024	415,050,000	Layak	415,050,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	415,050,000	
15.	HBH20240320390NU50000884	PSAA. DARUL HIKMAH (IPHI) KAB. PASAMAN Jl. Medan-Padang No. 18 SorikJorong Sentosa Kecamatan Panti Kab. Pasaman Sumatera Barat Kelurahan Panti Kecamatan Panti KAB. PASAMAN	1. Penyediaan Makanan 2. penyediaan Sandang 3. Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses 4. Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari Hari 5. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 6. Rehab Fisik Asrama	107/PADH/P/III/2024	12 Maret 2024	1,093,991,273	Layak	800,094,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	800,094,000	
16.	HBH20240321481NU50000937	PA. SAYYIDAH ADAWIYAH KOTA PADANG Jl.Teratai Indah RT/RW 01/09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	PENYEDIAAN MAKANAN, PENYEDIAAN AKSES ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES, PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN, PENYEDIAAN SANDANG, PENYEDIAAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI HARI, PENGASUHAN	04/PA-SA/III/2024	21 Maret 2024	1,157,630,000	Layak	828,950,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	828,950,000	
17.	HBH20240321362NU50000986	PSAA. AISYIYAH CABANG SRI ANTOKAN Jln. M.Nur Syafei Jorong III pasa Usang Kec. Lubuk Basung Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	Permohonan Belanja Uang Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Akses Kelayanan Pendidikan, Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari -hari , Pengasuhan, Asrama yang mudah diakses dan Rehab Fisik Panti kerekening Lembaga Tahun 2025	083/PCA/H/PAY/III/2024	14 Maret 2024	1,645,115,000	Layak	985,635,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	985,635,000	
18.	HBH20240321419NU50000987	PSAA. HIDAYAH ILAHI KAB. TANAH DATAR Jalan Raya Batusangkar Baso KM 14 Lawang Mandahiling Kelurahan	PERMOHONAN HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2025 (Pengasuhan, Penyediaan	20/PAHI-LM/I-2024	01 Februari 2024	834,733,000	Layak	711,995,800	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	711,995,800	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
		Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpauang KAB. TANAH DATAR	Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses, Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari dan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan										
19.	HBH20240321411NU50000989	PSTW JASA IBU KAB. 50 KOTA Jr. Lakuang Kenagarian Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Belanja Uang Permakanan Panti Ke Rekening Lembaga	192/PSTW-JAN/2024	26 Januari 2024	641,220,000	Layak	622,725,000	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	622,725,000	
20.	HBH20240322363NU50001019	PSAA. AMANAH V SUKU CANDUANG KAB. AGAM JORONG BINGKUDU KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM Kelurahan Canduang Koto Laweh Kecamatan Candung KAB. AGAM	Hibah Penyediaan Permakanan dan Sapras Dapur, Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Hibah Rehab Fisik Panti, Hibah Pengasuhan	13/YA/PAA/V-SK/III/2024	03 Juni 2024	259,195,600	Layak	256,795,600	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	256,795,600	
21.	HBH20240322471NU50001049	PSAA. AL HIDAYAH KOTA PADANG Jl. TERPADU KAPUK RT. 04 RW. 04 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	PROPOSAL BANTUAN HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	010/PA.ALHID/DN/III/2024	10 Maret 2024	682,525,000	Layak	643,390,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	643,390,000	
22.	HBH20240322461NU50001060	PA. JAMALIYAH TAMIANG AMPALU KAB. PASAMAN BARAT Jorong Tamiang Ampalu Kelurahan Parit Kecamatan Koto Balingka KAB. PASAMAN BARAT	Penyediaan Permakanan, Pemberian Bimbingan Fisik, Penyediaan Sandang dan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	02/PSAA/JML/III/2024	01 Maret 2024	1,017,258,000	Layak	573,133,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	573,133,000	
23.	HBH20240323393NU50001072	PSAA. TUANGKU RAO KAB. PASAMAN JL PADANG MEDAN JORONG II PASAR RAO Kelurahan Taruang Kecamatan Rao KAB. PASAMAN	PERMOHONAN HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANGGARAN TAHUN 2025	07/PATR/YTR/PSM-III-2024	05 Maret 2024	3,096,962,000	Layak	3,048,022,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	3,048,022,000	
24.	HBH20240324503NU50001077	PA. ANAK MENTAWAI DAN YATIM ULU GADUT H. SYAFRI MOESA KOTA PADANG Jl. Smp 21 rt.03 rw. 08 Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh KOTA PADANG	Proposal Hibah Program Rehabilitasi Sosial Anggaran 2025	010/PA-UG/III/2024	07 Maret 2024	1,231,711,000	Layak	877,797,500	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	877,797,500	
25.	HBH20240324364NU50001078	PSAA. ANAK YATIM DAN ANAK TERLANTAR (PAYAT) IBRAHIM KAB. 50 KOTA Jl. KH. Sulaiman Situjuah Batua Kelurahan Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Belanja Penyediaan Makanan, Rehab Fisik, Penyediaan Asrama Yang Mudah diakses, Penyediaan Sandang, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari, dan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tahun 2025 ke rekening lembaga	020/PAYAT.IB/III/2024	18 Maret 2024	882,091,000	Layak	543,256,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	543,256,000	
26.	HBH202403256463NU50001114	PA. MUHAMMADIYAH PADANG LAWEH MALALO KAB. TANAH DATAR Nagari Padang Laweh Malalo Kelurahan Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan KAB. TANAH DATAR	Permohonan Hibah	02/PA-M-PDL/III/2024	07 Maret 2024	653,844,000	Layak	510,519,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	510,519,000	
27.	HBH20240325400NU50001118	PA. YATIM PUTERI BHAKTI IBU KAB. PASAMAN JL BHAKTI IBU NO2 NAGARI TANJUANG BARINGIN Kelurahan Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk	PERMOHONAN BANTUAN HIBAH PANTI KE REKENING LEMBAGA 1.PERMAKANAN 2. PENYEDIAN SANDANG 3.PENYEDIAAN ASRAMA	10/BI-Lbs/III/2024	25 Maret 2024	364,349,000	Layak	315,970,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	315,970,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
		Sikaping KAB. PASAMAN	YANG MUDAH DIAKSES 4. PEMBERIAN BIMBINGAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI 5. AKSES KELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR										
28.	HBH20240325394NU50001119	PANTI ASUHAN MANDE KANDUANG JLN. RAYA PADANG LUAR-MANINJAU KM. 4 JORONG TOBO LADANG KENAGARIAN PAKAN SINAYAN BANUHAMPU-KABUPATEN AGAM Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu KAB. AGAM	Permohonan Belanja Uang Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Akses Kelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar, Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari, Pengasuhan, Asrama Yang Mudah Di Akses dan Rehab Fisik Panti Ke Rekening Lembaga Tahun 2025	139/PAMK/III/2024	25 Maret 2024	971,463,000	Layak	660,832,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	660,832,000	
29.	HBH20240325372NU50001126	PSAA. MITRA KAB. 50 KOTA Batu Nan Limo Kelurahan Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Hibah Uang Tahun 2025	04/LKSA/PA.MITRA/III/2024	13 Maret 2024	1,027,098,000	Layak	879,830,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	879,830,000	
30.	HBH202403251017NU50001129	PSAA. DARUL FIKRI KAB. PASAMAN BARAT Siduampan Kelurahan Batahan Kecamatan Ranah Batahan KAB. PASAMAN BARAT	HIBAH 2025	024/S.Perm/PA DFSGUB-DINSOS/III/2024	12 Maret 2024	2,647,221,660	Layak	1,492,100,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,492,100,000	
31.	HBH20240326463NU50001145	PA. SAHABAT YATIM DHUAFA KOTA PARIAMAN Jl. Sudirman No.121. Kelurahan Jawi- Jawi 2 Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Kelurahan Jawi Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	Proposal Dana Hibah 2025	50/PA.SYD/III/2024	18 Maret 2024	516,280,000	Layak	447,700,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	447,700,000	
32.	HBH202403261861NU50001146	PA. BAITUL HIDAYAH AL MUKARAHMAH KOTA PADANG Jl. Madura Blok 18 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Permohonan Hibah 2025	102/YY-BHA/PA-BHA/III/2024	28 Maret 2024	369,442,000	Layak	345,777,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	345,777,000	
33.	HBH20240326388NU50001147	PSAA. PKU MUHAMMADIYAH KUBUNG/ BUKIT KILI KAB. SOLOK Komplek Muhammadiyah Bukit Kili Batu Tupang Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung KAB. SOLOK	Proposal Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2025	04/PAPMB/BK/III/2024	01 Maret 2024	1,274,082,000	Layak	1,030,745,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,030,745,000	
34.	HBH20240326409NU50001155	PSAA. MUKARAMMAH PAUH KAMBAR KAB. PADANG PARIAMAN pauh kamar kec. nan sabaris kab. padang pariaman Kelurahan Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2025	03/YALH/PM/II/2024	27 Februari 2024	602,048,000	Layak	570,108,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	570,108,000	
35.	HBH20240326339NU50001163	Panti YPPLB-A Tunanetra Kabupaten Lima Puluh Kota Jl Soekarno Hatta No 288 Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH	hibah 2025	8/Panti YPPLB-TN/PYK-III 2024	01 Maret 2024	226,975,000	Layak	225,575,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	225,575,000	
36.	HBH20240326329NU50001179	LKS Amal Bhakti Sicincin Jln. Mesjid Raya Pauh Mudik Sicincin Kelurahan Sicincin	Permohonan Hibah	071/PA/ABSN/SCC/2024	21 Maret 2024	295,590,000	Layak	289,790,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	289,790,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
		Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN											
37.	HBH20240326474NU50001181	PA. AR-RAHMAN MUHAMMADIYAH KAB. SOLOK SELATAN Jln. Imam Bonjol No. 10, Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatera barat Kelurahan Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu KAB. SOLOK SELATAN	PERMOHONAN HIBAH 2025 (PERMOHONAN BANTUAN UANG TAHUN 2025 KE REKENING LEMBAGA PANTI ASUHAN ARRAHMAN MUHAMMADIYAH)	16/LKSA-PAM/II/2024	26 Februari 2024	796,419,000	Layak	523,213,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	523,213,000	
38.	HBH20240326421NU50001184	PSAA. AISIYIAH CABANG TANJUNG BONAI KAB. TANAH DATAR Jalan Raya Lintau - Payakumbuh Km 02 Tanjung Bonai Kelurahan Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara KAB. TANAH DATAR	Usulan Hibah Tahun 2025	002/PAA-TB/2024	26 Februari 2024	447,404,600	Layak	360,633,600	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	360,633,600	
39.	HBH20240326480NU50001187	PA. AISYIAH SEI.JERNIH TALU KAB. PASAMAN BARAT KAMPUNG PINANG JORONG SUNGAI JERNIH NAGARI TALU Kelurahan Talu Kecamatan Talamau KAB. PASAMAN BARAT	PROPOSAL PERMAKINAN, KKS, AKSES ASRAMA, PENDIDIKAN, SANDANG	17/V.7.AU/A/2024	28 Februari 2024	1,883,726,000	Layak	469,628,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	469,628,000	
40.	HBH20240326377NU50001192	PSAA. AL KASYAF SALIDO KAB. PESISIR SELATAN Jalan kampung luar salido Kelurahan Salido Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Hibah 2025	11/YAKS-SLD/LKSA AKS/II/2024	26 Februari 2024	3,078,196,400	Layak	568,582,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	568,582,000	
41.	HBH20240327484NU50001208	PSAA. ANAK ASUH LUBUK KILANGAN KOTA PADANG JALAN BATU GADANG RT 003 RW 001 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN BELANJA UANG KE REKENING LEMBAGA TAHUN 2025	027/PSAA/LK/03/2024	20 Maret 2024	841,684,416	Layak	785,465,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	785,465,000	
42.	HBH202403276479NU50001209	PA. AISIYIAH PUTRA NANGGALO KOTA PADANG Jalan Kandis Raya (Belakang ITP) Rt.03 Rw.03 , Kelurahan : Kampung Olo, Kecamatan : Nanggalo Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	Permohonan Hibah Rehabilitasi Sosial	126/PAP-'Aisy/III/2024	21 Maret 2024	753,996,000	Layak	403,504,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	403,504,000	
43.	HBH202403272048NU50001213	PANTI REHABILTASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ODGJ. PELITA JIWA INSANI KOTA PADANG Kapuk Kalumbuk Rt.004 Kec. Kuranji Kota Padang Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Hibah 2025	002/PP/PRSPDM ODGJ-PJI/III/2024	25 Maret 2024	5,679,650,000	Layak	4,311,439,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	4,311,439,000	
44.	HBH20240327417NU50001231	PSAA. AISIYIAH RANTING SUNGAYANG KAB. TANAH DATAR Jln. Balai Baru, Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang Kelurahan Sungayang Kecamatan Sungayang KAB. TANAH DATAR	Permohonan Hibah Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2025	F.4/3/06/PAAS/II/2024	27 Februari 2024	3,256,882,500	Layak	829,361,500	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	829,361,500	
45.	HBH202403271514NU50001237	PSAA. AISIYIAH CABANG AMPANG KOTA PADANG Jl.Ampang No.22 Rt.001 / Rw. 003 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	1. penyediaan makanan 2.pemberian bimbingan aktivitas sehari - hari 3.penyediaan honor pengasuh 4. penyediaan sandang 5. akses asrama yang mudah di akses dan rehab fisik	08/PA.A/Ampang/II/2024	24 Maret 2024	457,985,000	Layak	375,858,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	375,858,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
			6. penyediaan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar										
46.	HBH202403275582NU50001250	PA. MARDHATILLAH AISYIAH KEC. PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN Jalan Samudra, Dusun Luar Kelurahan Padang Birik Birik Kecamatan Pariaman Utara KOTA PARIAMAN	Bantuan Hibah Panti Asuhan Mardhatillah Aisyiah	Nomor : 007/PA/MDH/A/II-2023	28 Februari 2024	781,809,000	Layak	498,681,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	498,681,000	
47.	HBH202403277335NU50001253	PANTI ASUHAN AISYIYAH CABANG NANGGALO KOTA PADANG JL.SAWAH LIAT KEL. KP OLO KEC. NANGGALO Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2025	03/PA.ASY/III/2024	04 Maret 2024	923,225,000	Layak	642,374,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	642,374,000	
48.	HBH20240327381NU50001277	PSAA. AISYIYAH CABANG TANJUNG MUTIARA KAB. AGAM Jalan jawi jawi pasar tiku kanagarian tiku selatan kabupaten Agam Kelurahan Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Belanja Uang Ke Rekening Lembaga	01/IV.3/C/22985/2024	12 Maret 2024	1,616,460,000	Layak	991,370,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	991,370,000	
49.	HBH202403275813NU50001283	PSAA. LIGA DA'WAH KOTA PADANG Jl. By Pass KM 18 Simpang Koto Panjang Lubuk Minturun, RT 01 RW 04 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	PERMOHONAN HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	04/PA-LIGAD/26-III/2024	14 Maret 2024	1,251,200,000	Layak	878,280,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	878,280,000	
50.	HBH20240327450NU50001284	PA. PELITA PEDULI KASIH KAB. KEP. MENTAWAI Berkat Baru Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan Belanja Hibah Panti 2025 ke Rekening Lembaga	004/PA-PPK/II/2024	26 Februari 2024	545,030,000	Layak	464,530,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	464,530,000	
51.	HBH20240327473NU50001287	PSAA. WIRA LISNA KOTA PADANG Jl. Sutan Syahrir No. 251 C Mata Air Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Belanja Uang ke Rekening Lembaga	005/PAYP-WL/PDG/III/2024	27 Maret 2024	926,724,555	Layak	675,797,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	675,797,000	
52.	HBH20240327462NU50001289	PA. ZAMIGA KAB. PASAMAN BARAT Jln. Diponegoro No.72 Parit Kelurahan Parit Kecamatan Koto Balingka KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Hibah 2025	0018/P/LKSA/ZAMIGA/ II/ 2024	05 Februari 2024	2,383,149,000	Layak	1,067,446,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,067,446,000	
53.	HBH20240328420NU50001290	PSAA. AISYIYAH TAPI SELO Jln Panorama jorong Kota Kelurahan Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara KAB. TANAH DATAR	PROGRAM HIBAH REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	07/PAA-TS/II/2024	20 Februari 2024	2,791,504,000	Layak	2,667,396,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	2,667,396,000	
54.	HBH20240328490NU50001293	PSAA. AISYIYAH KOTO TANGAH KOTA PADANG Jl.Adinegoro No.37A Muaro Penjalinan Padang Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	Permohonan Belanja Uang Kerekening Lembaga	12/PCA/H-PA/III/2024	13 Maret 2024	2,082,980,000	Layak	1,200,312,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,200,312,000	
55.	HBH20240328475NU50001297	PSAA. YATIM PGAI PADANG KOTA PADANG Jl.Dr.H.Abdullah Ahmad no 4 Kelurahan Sawahan Kecamatan	Penyediaan makanan, Akses Asrama, Akses ke Layanan Pendidikan, KKS, Rehab Asrama, Honor Pengasuh	01/PAY-PGAI/III/2024	03 Februari 2024	473,350,000	Layak	334,894,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	334,894,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
		Padang Timur KOTA PADANG											
56.	HBH202403285916NU50001298	PA. ANAK & BALITA AL-HURUL-AIN KOTA PADANG Komp. Wisma Indah V Jl. Gunung Rinjani Blok H-2 RT 002 RW 002, Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Hibah Permakanan Panti Tahun 2025	06/PAAB-AHA/II/2024	26 Februari 2024	656,518,000	Layak	481,285,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	481,285,000	
57.	HBH20240328327NU50001304	PANTI TUNA RONGU PAYAKUMBUH Jalan Haji Agus Salim Nomor 18 Kelurahan Sawahpadang Aur Kuning Kelurahan Aur Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2025	05/YTRP/II/2024	04 Maret 2024	496,665,000	Layak	382,350,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	382,350,000	
58.	HBH20240328389NU50001309	PSAA. AISIYIAH CABANG MATUR KAB. AGAM Jorong Lawang Tuo Kelurahan Lawang Kecamatan Matur KAB. AGAM	Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2025	IV.A/1.d/04/II/2024	27 Februari 2024	768,006,000	Layak	584,617,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	584,617,000	
59.	HBH20240328454NU50001311	PSAA. AISIYIAH BUKITTINGGI KOTA BUKITTINGGI Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Bukittinggi Kelurahan Aur Tajungkang/Tgh. Sawah Kecamatan Guguk Panjang KOTA BUKITTINGGI	Permohonan Bantuan Belanja Uang Ke Rekening Lembaga	IV.A/1a/037/III/2024	05 Maret 2024	1,159,440,000	Layak	902,889,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	902,889,000	
60.	HBH20240328403NU50001314	PSAA MUHAMMADIYAH AL FURQAAN KAB. PASAMAN Komplek Pasar Benteng Lubuk Sikaping Kelurahan Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	PERMOHONAN HIBAH	10/PAM-AF/26/III/2024	26 Maret 2024	324,810,000	Layak	205,345,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	205,345,000	
61.	HBH20240328465NU50001321	PSAA. YATIM MISKIN CBG MUHAMMADIYAH PARIAMAN SELATAN KURAI TAJI KOTA PARIAMAN Dusun 1, Desa Balai Kurai Taji Kelurahan Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan KOTA PARIAMAN	BANTUAN DANA HIBAH TAHUN 2025	07/III.26/C/2024	26 Maret 2024	615,240,000	Layak	307,406,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	307,406,000	
62.	HBH20240328407NU50001327	PSAA. AISIYIAH CAB. BARULAK KAB. TANAH DATAR Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kelurahan Barulak Kecamatan Tanjung Baru KAB. TANAH DATAR	HIBAH PROGRAM REHABILITAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	01/PAA-B/II/2024	26 Februari 2024	283,760,000	Layak	235,760,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	235,760,000	
63.	HBH20240328459NU50001333	PSAA. PEMBANGUNAN PULAU PUNJUNG KAB. DHARMASRAYA Jalan Pondok KM 2 Kelurahan Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung KAB. DHARMASRAYA	Permohonan Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025	24/PAP3/YP3/III/2024	20 Maret 2024	2,077,147,000	Layak	1,493,362,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,493,362,000	
64.	HBH20240328493NU50001366	PSAA. NURUL HIKMAH KOTA PADANG Jalan Air Paku Kelurahan Sungai Sapih Padang Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	PROPOSAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2025	04/PA-NH/II/2024	26 Februari 2024	827,828,000	Layak	693,117,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	693,117,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
65.	HBH20240328485NU50001371	PSAA. BUNDO SAIYO KOTA PADANG Jalan Empat Lima, Simpang SMAN 13, Tanjung Aur, Kelurahan Balai Gadang, Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	Permohonan Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025	115/PA-BS/PH-PR/III/2024	10 Maret 2024	1,894,530,723	Layak	1,308,602,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,308,602,000	
66.	HBH20240328386NU50001387	PSAA. KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN sawah liat kenagarian kapuh utara kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan KAB. PESISIR SELATAN	Proposal Hibah Tahun 2025	21/LKSA-TRSN/2024	28 Maret 2024	932,563,000	Layak	728,514,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	728,514,000	
67.	HBH20240328449NU50001390	PS. DARUL ULUM MENTAWAI KAB. KEP. MENTAWAI Jalan Mabola Desa Sikakap Kec. Sikakap.Kab. Mentawai Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan Hibah	05/PSA-DUM-YDUSB/03-2024	25 Maret 2024	1,652,895,000	Layak	1,032,723,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,032,723,000	
68.	HBH20240328835NU50001394	PSAA. BUSTANUL ULUM KAB. 50 KOTA SITUJUAH BANDA DALAM Kelurahan Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Hibah 2025	027/PA-BU/SBD/III/2024	02 Maret 2024	231,672,900	Layak	214,800,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	214,800,000	
69.	HBH20240328410NU50001397	PA. AL-KAUTSAR MUHAMMADIAH KAB. PADANG PARIAMAN Simpang Galanggang Pasa Pakandangan Kelurahan Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN HIBAH 2025	08/PAALKAUTSAR/III/2024	06 Maret 2024	383,554,000	Layak	335,464,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	335,464,000	
70.	HBH20240329365NU50001398	PSAA. AISYIYAH RANTING BATU KAMBING KAB. AGAM jalan pasar batukambing, jorong Batukambing kec. Ampek Nagari. Kab. Agam Kelurahan Batu Kambing Kecamatan Ampek Nagari KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Belanja Uang Ke Rekening Lembaga	008/PRA/H-PAY/III/2024	15 Maret 2024	2,249,828,420	Layak	1,395,765,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,395,765,000	
71.	HBH20240329332NU50001399	Panti Amanah Bundo Jl M Nazir Dt.Pamuncak no 13 rt 15 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat KOTA PADANG PANJANG	PROPOSAL Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2025	03/PSAB-PP/2024	22 Februari 2024	329,204,000	Layak	282,106,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanaan		00 0000	282,106,000	
72.	HBH20240329406NU50001400	PSAA. AT TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG LUAR KAB. TANAH DATAR Padang Luar III Koto Kelurahan III Koto Kecamatan Rambatan KAB. TANAH DATAR	PROPOSAL HIBAH REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	3/PA/AT/PDL/II/2024	26 Februari 2025	1,367,647,000	Layak	439,534,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	439,534,000	
73.	HBH20240329391NU50001401	PSAA. SYEKH MUHAMMAD MUHSIN/ YYS YASRITA KAB. SOLOK JALAN TABEK SUPAYANG Kelurahan Sirukam Kecamatan Payung Sekaki KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025	015/PA SMM/II/2024	29 Februari 2024	2,043,036,000	Layak	946,785,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	946,785,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
74.	HBH20240329492NU50001413	PA. AISIYIAH CAB. KOTO TANGAH TIMUR KOTA PADANG Jl.Lubuk Minturun Air dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	Hibah 2025 Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Koto Tangah Timur	131/PCA/H-PA/III/2024	07 Maret 2024	1,159,089,000	Layak	950,068,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	950,068,000	
75.	HBH202403291010445NU50001	PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH PESISIR SELATAN JL KAMIL KAMKA Kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	05 MARET 2024	013/III.1/AU/PAM-PESSEL/2024	05 Maret 2024	1,837,844,000	Tidak Layak	0	0		00 0000	0	
76.	HBH20240329496NU50001419	PA. AL-IHSAN jln.gajah madah dalam no.1 RT 02/ RW02 kelurahan kampuang olo kecamatan nanggalo Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	Permohonan Hibah	021/PA-IHSN/IV-2024	03 Maret 2024	832,789,500	Layak	530,342,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	530,342,000	
77.	HBH20240329385NU50001420	PA. MUHAMMADIYAH PESISIR SELATAN KAB. PESISIR SELATAN JL. KAMIL KAMKA Kelurahan Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	013/III.1/AU/PAM-PESSEL/2024	05 Maret 2024	1,837,844,000	Layak	344,241,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	344,241,000	
78.	HBH20240329499NU50001421	PSAA. PUTRA BANGSA YAYASAN BUDI MULIA KOTA PADANG Jln. Dr. Sutomo No. 23 B Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	Permohonan hibah	020/PAPB/III-2024	03 Maret 2024	1,181,413,500	Layak	844,794,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	844,794,000	
79.	HBH20240329378NU50001427	PSAA. AISIYIAH KAMANG HILIR / TILATANG KAMANG KAB. AGAM Ampang Jorong IV Kampung Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek KAB. AGAM	Pengajuan Bantuan Hibah Uang untuk Panti Sosial Swasta Tahun 2025	No: 08/PP-PA/III/2024	19 Maret 2024	1,180,052,000	Layak	934,403,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	934,403,000	
80.	HBH20240329401NU50001432	PSAA. BINA SOSIAL LAKITAN KAB. PESISIR SELATAN PADANG MARAPALAM, LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Kelurahan Lakitan Utara Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	hibah program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025	010/PA-BINSOS/LKT-2024	26 Februari 2024	1,054,894,000	Layak	187,500,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	187,500,000	
81.	HBH20240329398NU50001433	PSAA. MUHAMMADIYAH LIMO KAUM KAB. TANAH DATAR Jl. Jenderal Sudirman Tigo Tumpuak Lima Kaum Batusangkar Kelurahan Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum KAB. TANAH DATAR	HIBAH PROGRAM REHABILITAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	F.4/02/01/II/2024	25 Februari 2024	713,860,000	Layak	542,236,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	542,236,000	
82.	HBH20240329920NU50001435	PANTI ASUHAN BPAY TANJUNG BARULAK KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR KAB. TANAH DATAR Simpang tugu joroong balai baru Kelurahan Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	01/PA-BPAY/NTB/II/2024	20 Februari 2024	2,517,740,000	Layak	343,915,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	343,915,000	
83.	HBH20240329873NU50001436	PA. AMANAH BKS PA KOTA PADANG Jalan Teknologi 8-9 RT 001 / RW 001 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	Permohonan Hibah	020/PA-AMH/IV-2024	03 Maret 2024	2,015,442,000	Layak	937,224,500	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	937,224,500	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
84.	HBH20240329469NU50001440	PSAA. AISYIYAH CABANG PADANG PANJANG KOTA PADANG PANJANG Jl. Urip Sumoharjo RT 007 No. 23 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur KOTA PADANG PANJANG	Permohonan Hibah	07/PAA/II/2024	27 Februari 2024	638,580,000	Layak	470,383,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	470,383,000	
85.	HBH20240329418NU50001442	PSAA. AN NUR PASANEHAN KAB. AGAM Suntiang jorong Pasanehan Kelurahan Lasi Kecamatan Candung KAB. AGAM	PROPOSAL HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	05/BHDSP_PAAN/II-2024	26 Februari 2024	722,052,000	Layak	561,792,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	561,792,000	
86.	HBH20240329376NU50001452	PA. BINA HARAPAN SALIDO KAB. PESISIR SELATAN Kampung Luar Salido, Nagari Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan Kelurahan Salido Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Dana Hibah Tahun Anggaran 2025	14/PA-BH/SLD/III/2024	29 Maret 2024	2,413,995,503	Layak	276,844,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	276,844,000	
87.	HBH20240329413NU50001453	PA. AISYIYAH LUBUK ALUNG KAB. PADANG PARIAMAN JALAN RAYA PADANG BUKITTINGGI NO 37 PASA KANDANG BALAH HILIA LUBUK ALUNG Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN HIBAH 2025	10/SK/PAA-LKSA/III/2024	26 Maret 2024	385,918,000	Layak	369,438,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	369,438,000	
88.	HBH20240330402NU50001455	PSAA. KASIH SAYANG KAB. AGAM Jorong Sungai Tuak Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	Pengajuan Bantuan Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025	04/PAKS/YR/II/2024	26 Februari 2024	1,158,337,250	Layak	903,204,500	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	903,204,500	
89.	HBH202403302120NU50001457	PA. BAITUL MAKMUR KAB. SOLOK SELATAN SUNGAI LAMBAL Kelurahan Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir KAB. SOLOK SELATAN	PERMOHONAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025	04/PA-BM SOLSEL/III-2024	03 Desember 2024	576,459,000	Layak	400,795,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	400,795,000	
90.	HBH20240330334NU50001458	Panti Cacat Padang Tujuh Lubuk Basung Kabupaten Agam Jl. Jambak No. 526 Lubuk Basung Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	Permohonan Hibah Permakanan Panti 2025	25/YPAC/II/2024	26 Februari 2024	547,019,500	Layak	441,116,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	441,116,000	
91.	HBH20240330366NU50001459	PSAA. AISYIYAH CABANG TANJUNG RAYA KAB. AGAM Muaro Pisang Jorong Pasa Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kab Agam Kelurahan Maninjau Kecamatan Tanjung Raya KAB. AGAM	Permohonan Hibah	08/PCA/H-PA/III/2024	12 Maret 2024	741,528,000	Layak	546,848,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	546,848,000	
92.	HBH20240330487NU50001461	PSAA. AL HIDAYAH MUARA LABUH KAB. SOLOK SELATAN PASIR TALANG SELATAN Kelurahan Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Hibah	10/PSAA.AL/III/ML02024	18 Maret 2024	633,933,500	Layak	517,329,500	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	517,329,500	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
93.	HBH202403306411NU50001464	PANTI REHABILITASI SOSIAL SADAYA PELITA JIWA INSANSI KOTA PADANG Jl. Kapuk Kalumbuk RT 004 RW 004 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Hibah 2025	001/HIBAH/PRS Sadaya-PJI/ II/2024	25 Maret 2024	6,500,617,000	Layak	3,128,455,000	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	3,128,455,000	
94.	HBH20240330489NU50001465	PSAA. DARUL MA'ARIF AL KARIMIYAH KOTA PADANG JL. Gajah Mada No. 41 B Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	PERMOHONAN HIBAH	04/PA-DM/Urn/ III/2024	21 Maret 2024	589,897,000	Layak	466,878,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	466,878,000	
95.	HBH20240330336NU50001471	Panti Asuhan Mutiara Budi Jln. Padang Bukuttinggi Km 33 Kp. Tangah Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	Bantuan Belanja Uang Permakanan Panti Tahun 2025 Ke Rekening Lembaga	164/PA-YMB/ LA-2024	22 Maret 2024	330,980,000	Layak	213,610,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	213,610,000	
96.	HBH20240330371NU50001473	PSAA. HANIFA KAB. AGAM Mata Air, Jorong III Kampung Kelurahan Gadut Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	Permohonan Hibah	29/PP-HNF/ III/2024	27 Maret 2024	725,269,000	Layak	424,690,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	424,690,000	
97.	HBH20240330483NU50001476	PSAA. PUTI BUNGSU / YAYASAN BHAKTI IBU KOTA PADANG Jl. Parak Jambu Indah No.20 RT.05 RW.09 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	PERMOHONAN HIBAH	04/YBIPB/PA-PB/ III/2024	21 Maret 2024	1,155,765,000	Layak	1,010,155,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,010,155,000	
98.	HBH20240330328NU50001484	PA. BELAIAN KASIH YPAC SUMATERA BARAT Komplek Villa Melati Mas II Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Belanja Uang ke Rekening Lembaga Tahun 2025	26/YPAC/Panti/K/ III-2024	19 Maret 2024	1,620,124,000	Layak	919,488,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	919,488,000	
99.	HBH20240330392NU50001486	PSAA. AISIYIAH CABANG BATU SANGKAR KAB. TANAH DATAR Jl. Ahmad Yani N0. 78 Kelurahan Baringin Kecamatan Lima Kaum KAB. TANAH DATAR	HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025	05 /IV.7. AU/ H/ 2024.	25 Februari 2024	2,406,292,000	Layak	1,620,294,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,620,294,000	
100.	HBH20240330505NU50001487	PSAA. PANTI ASUHAN KHUSUS ANAK MENTAWAI (PAKAM) PURUS KOTA PADANG Jln.purus IV No.8 padang Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari (KKS), Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	25/PAKAM/ III/2024	13 Maret 2024	1,665,125,000	Layak	708,901,600	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	708,901,600	
101.	HBH20240330468NU50001489	PA. AL-FALAH KOTA PADANG Jln. Mekkah Belakang Tvri Sumbang Kel Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto tengah Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN HIBAH 2025 ,PENYEDIAAN MAKANAN, PENYEDIAAN SANDANG, REHAP FISIK, ASRAMA YANG MUDAH DI AKSES,AKSES LAYAYAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	022/YSA/ LKS.PAA/III/2024	01 Maret 2024	3,634,025,000	Layak	2,245,550,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	2,245,550,000	
102.	HBH20240330330NU50001494	PANTI SDLB TARANTANG JLN. LEMBAH HARAU KM.3 TARANTANG Kelurahan Tarantang Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	PROPOSAL PERMOHONAN USULAN BANTUAN UANG KE REKENING LEMBAGA TAHUN 2025	006/Pan-SDLB- Trt/II-2024	26 Februari 2024	1,498,984,000	Layak	1,301,450,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	1,301,450,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
103.	HBH20240330665NU50001499	PSAA. DARUL MAARIF KOTA BUKITTINGGI Jl. Koto Selayan RT1/RW 1 Kel. Koto Selayan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiingin K. Selayan KOTA BUKITTINGGI	Permohonan Hibah Tahun 2025	278/PDM-BKT/III/2024	05 Maret 2024	2,273,082,400	Layak	2,068,808,500	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	2,068,808,500	
104.	HBH20240330335NU50001514	PANTI ASUHAN NURUL MUSTAKIM TUNGKAR Kelurahan Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Hibah Program Rehabilitasi Sosial	15B/PANM-ST/III-2024	12 Maret 2024	436,996,000	Layak	381,129,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	381,129,000	
105.	HBH20240331404NU50001519	PSAA. AUR PAKAN KAMIS KAB. AGAM Jl Raya Pekan kamis Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	Proposal Hibah 2025	03/PA/APK/II/2024	02 Januari 2024	477,589,750	Layak	311,518,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	311,518,000	
106.	HBH20240331415NU50001521	PSAA. AISIYIAH CABANG SALAREH AIA KAB. AGAM Jorong Koto Alam Nagari Silareh Aia Kelurahan Salareh Aia Kecamatan Pelembayan KAB. AGAM	Permohonan belanja uang ke rekening lembaga Panti asuhan Aisyiah Cabang Salareh Aia	04/PAA/ASLA/III/2024	25 Maret 2024	2,196,443,890	Layak	437,492,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	437,492,000	
107.	HBH20240331491NU50001522	PA. BABUL JANNAH KAB. SOLOK SELATAN Sungai Lambai Kelurahan Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir KAB. SOLOK SELATAN	PERMOHONAN BELANJA HIBAH UANG PANTI TAHUN 2025 KE REKENING LEMBAGA	07/PABJ/III-2024	18 Maret 2024	604,354,650	Layak	456,795,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	456,795,000	
108.	HBH202403311133NU50001523	PANTI ASUHAN AISIYIAH RANTING BATUNG TABA KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM KAB. AGAM Jorong Tanah Nyaring, nagari Batu Taba Kelurahan Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	Proposal Permohonan Bantuan Permakanan, Akses Asrama, Rehan Fisik, Sandang dan Pendidikan Panti Asuhan Tahun 2025	7/ PAABT/111/2024	19 Maret 2024	527,275,000	Layak	316,005,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	316,005,000	
109.	HBH20240331375NU50001531	PSAA. UMMATUL YAQIN KAB. PADANG PARIAMAN Ambung Kapur Sei. Sariak kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman Kelurahan Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sarik KAB. PADANG PARIAMAN	Proposal Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 Panti Asuhan Ummatul Yaqin	011/PAUY/ YPPAI/03-2024	01 Maret 2024	3,018,992,000	Layak	2,010,874,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	2,010,874,000	
110.	HBH20240401395NU50001543	PSAA. NURUL IMAN ENAM BERLIAN KAB. SIJUNJUNG Jorong Ujung Padang Kelurahan Tanjung Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG	PERMOHONAN BELANJA HIBAH PANTI TAHUN 2025	002/PSAA/NIEB/ Kt.VII/SJJ/2024	27 Maret 2024	1,128,907,000	Layak	432,744,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	432,744,000	
111.	HBH202404015645NU50001545	PANTI ASUHAN "AMAL MENTAWAI" Jln Raya Tuapejat Km 08 Kelurahan Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	permohonan Hibah	10/YH/SB/LKSA-AM/II/2024	20 Februari 2024	417,900,000	Layak	334,800,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	334,800,000	
112.	HBH20240401338NU50001547	panti asuhan yayasan pembinaan penyandang cacat Jalan.Waringin Lubang Panjang,Kel.Lubang Panjang,Kec.Barangin Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin KOTA SAWAHLUNTO	Bantuan Belanja Uang Permakanan Panti Ke Rekening Lembaga Tahun 2025	007/PA.YPPC-SWL/2024	07 Maret 2024	60,000,000	Layak	60,000,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	60,000,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
113.	HBH202404011010383NU50001	PANTI ASUHAN TAHFIZUL QURAN AL-KHALIFI KOTA PADANG Komplek Harito Blok A. No. 8 RT 003/RW 002 Rawang Timur Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Hibah Program Regabilitasi Sosial	04/YCBS/PATQA/RWG/III/2024	29 Februari 2024	150,000,000	Layak	150,000,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	150,000,000	
114.	HBH20240401845NU50001550	PSAA. AL FALAH PARUPUAK TABING KOTA PADANG Jalan Pasir Parupuk No.39 Kelurahan Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	Pemohonan Bantuan Hibah	004/PA.AIFalah/2024	19 Maret 2024	861,170,000	Layak	592,966,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	592,966,000	
115.	HBH20240402368NU50001573	PSAA. YAYASAN PENYANTUN ANAK YATIM (YPAY) KOTA SAWAHLUNTO Komplek Mesjid Agung Nurul Islam Mudik Air Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Lembah Segar KOTA SAWAHLUNTO	Hibah Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	006/PA-YPAY/III/2024	18 Maret 2024	975,750,000	Layak	860,982,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	860,982,000	
116.	HBH20240402360NU50001575	PSAA. DARUL FUNUN EL ABBASIYAH KAB. 50 KOTA Padang japing Kelurahan VII Koto Talago Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA	Pormohonana hibah pengasuhan, penyediaan makan, penyediaan sandang, akses asrama dan akses pendidikan.	27/PSAA/DFA/PJ/III/2024	03 Februari 2024	874,898,000	Layak	623,195,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	623,195,000	
117.	HBH20240402466NU50001576	PANTI ASUHAN AL-KHAIRAT KOTA PARIAMAN Jl. Kompi Barayun Kelurahan Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur KOTA PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	03/PA-Alkhairat/04/2024	04 Februari 2024	1,132,608,000	Layak	918,689,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	918,689,000	
118.	HBH20240403326NU50001583	PS.PACA YAPPAT SDLB PANTI Kp.Sorik,Jr.Sentosa Kelurahan Panti Kecamatan Panti KAB. PASAMAN	PROPOSAL BELANJA UANG PERMAKINAN PANTI TAHUN 2025 KEREKENING LEMBAGA	01/Asrm-YAPPAT/2024	03 Februari 2024	260,485,000	Layak	260,185,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakinan		00 0000	260,185,000	
119.	HBH20240403355NU50001589	PSAA DARUL JANNAH KAB. SIJUNJUNG Jorong koto Tanjung Nagari Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG	permohonan bantuan hibah tahun 2025	015/PSAA-DJ/NTJ-2024	02 Februari 2024	236,947,000	Layak	184,251,200	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	184,251,200	
120.	HBH20240403467NU50001592	PSAA. AISIYIAH CABANG PAYAKUMBUH KOTA PAYAKUMBUH Jl. Hj.fatimah djalil, nomor 103 Kelurahan Padang Tiakar Hilir Kecamatan Payakumbuh Timur KOTA PAYAKUMBUH	Proposal Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2025	13/PDA/H-PA/III/2024	28 Maret 2024	2,075,599,500	Layak	1,510,088,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,510,088,000	
121.	HBH20240403408NU50001593	PSAA. IMAM BONJOL KAB. PASAMAN Jalan Tandikat Pasar Ganggo Hilir Bonjol Kelurahan Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol KAB. PASAMAN	PROPOSAL HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	12/PAIB/Bjl-Pas/2024	16 Maret 2024	522,592,000	Layak	434,915,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	434,915,000	
122.	HBH20240404497NU50001601	PSAA. AISIYIAH DAERAH KOTA PADANG KOTA PADANG Jl. Aru Kampung Tanjung RT 01/07 Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	Permohonan Hibah Pengasuhan, Penyediaan Permakinan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Dan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	007/PA.Asy.Pdg/I/2024	15 Maret 2024	234,595,000	Layak	231,392,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	231,392,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
123.	HBH20240404448NU50001602	PSAA. KAUM KAB. KEP. MENTAWAI Jalan Raya Tuapejat Km2 Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	PERMOHONAN HIBAH	355/YKAUM/III/2024	27 Maret 2024	329,881,000	Layak	289,800,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	289,800,000	
124.	HBH202404051010570NU50001	LKSA ISLAMIC CENTER SIBERUT KAB. KEP. MENTAWAI Jalan Raya Maileppet Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kepulauan Mentawai Kelurahan Maileppet Kecamatan Siberut Selatan KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan Hibah	01/LKSA-ICS/III-2024	05 Maret 2024	817,500,000	Layak	442,500,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	442,500,000	
125.	HBH20240406978NU50001612	PANTI ASUHAN AISIYIAH BALAI GURAH KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM KAB. AGAM Jl. Raya Biaro Lasi, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN BELANJA UANG KE REKENING LEMBAGA PANTI ASUHAN AISIYIAH BALAI GURAH TAHUN 2025	No: 06/B/PA-Asy/11/2024	28 Maret 2024	393,850,000	Layak	309,390,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	309,390,000	
126.	HBH202404085509NU50001613	PA. AMANAH PUTRI KOTA PADANG jl. Seberang Padang Selatan III No. 28 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Hibah Program Rehabilitasi Sosial Anggaran 2025	002/PAPI/BHDS-01/III/2024	25 Maret 2024	2,123,071,000	Layak	1,390,584,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,390,584,000	
127.	HBH20240414457NU50001617	PSAA. NURUL IMAN PISANG REBUS KAB. DHARMASRAYA Jorong Pisang Rebus Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung KAB. DHARMASRAYA	PERMOHONAN BANTUANBELANJA UANG KE REKENING LEMBAGA PANTI TAHUN 2025	PA-PPNI.F/PR-ST/031/III/2024	27 Maret 2024	2,227,800,000	Layak	1,259,800,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	1,259,800,000	
128.	HBH20240415501NU50001618	PSAA. AISIYIAH PARIAMAN KOTA PARIAMAN Jl. Abd. Muis No. 31 Kelurahan Taratak Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	Permohonan Hibah Tahun 2025(Penyediaan makanan "bahan makanan dan Honorarium Pengasuh", akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, rehab bangun asrama)	15/PA/III/2024	02 Maret 2024	1,459,063,500	Layak	318,222,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	318,222,000	
129.	HBH20240415478NU50001619	PSAA. MUHAMMADIYAH PAUH V LIMAU MANIS KOTA PADANG Komplek Masjid Raya Pauh Kpg Dalam Kelurahan Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh KOTA PADANG	Permohonan Hibah	010/LKSA/PAM-LMS/20/II-2024	20 Maret 2024	901,738,000	Layak	233,900,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	233,900,000	
130.	HBH202404186482NU50001622	PANTI ASUHAN ANAK AL-MUTTAQIN KABUPATEN PASAMAN Situmang Nagari Salingka Muaro Kec.Sugai Aur Kelurahan Sungai Aua Kecamatan Sungaiaur KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana Hibah 2025	01/LKSA-LMTQN/II/2024	02 Februari 2024	2,613,738,400	Layak	376,580,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	376,580,000	
131.	HBH20240424337NU50001626	PANTI PENYANTUN ANAK CACAT (PPAC) SLB PAINAN Jl. Pagaruyung, Painan - Kab. Pesisir Selatan Kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Hibah	018/PPAC-PN/2024	23 April 2024	494,185,000	Layak	208,950,000	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		00 0000	208,950,000	

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)	KETERANGAN PERTIMBANGAN TAPD
132.	HBH20240513844NU50001751	PSAA. PANTI ASUHAN KHUSUS ANAK MENTAWAI GURUN LAWAS JL. Gurun Laweh 02/01 No. 18 Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	Permohonan Hibah Tahun 2025, Penyediaan Permakanan, Akses Asrama, Penyediaan Sandang, dan Akses Layanan Pendidikan	045/PAKAM-YPMM/III-2024	20 Maret 2024	1,041,846,307	Layak	622,170,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	622,170,000	
133.	HBH202405131010732NU50001	KARANG TARUNA PROVINSI SUMATERA BARAT Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Hibah Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat	108/ KT-SBR/ X - 2024	13 Mei 2024	500,000,000	Tidak Layak	0 0			00 0000	0	
134.	HBH20240514384NU50001778	PSAA. AL MAUN KAB. AGAM Kubugadang, Maninjau, Kec. Tanjung Raya Kelurahan Maninjau Kecamatan Tanjung Raya KAB. AGAM	Permohonan Belanja Uang Pemakanan Panti Tahun 2025	005/PA-A/PP-HK/III/2024	28 Februari 2024	290,580,000	Layak	247,500,000	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		00 0000	247,500,000	
Total						158.647.667.898		94.779.668.010				94.779.668.010	

SEKRETARIS DAERAH,
Sebagai Ketua TAPD



Drs. Hanastri MM
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Katib Sulaiman No.1 Padang

Telp. (0751) 7056335, 7055627

Fax. (0751) 7055676

Homepage: bappeda.sumbarprov.go.id

